

SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
   c. neraca;
   d. laporan operasional;
   e. laporan arus kas;
   f. laporan perubahan ekuitas; dan
   g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampiri laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. pendapatan daerah Rp7.048.315.869.271,64
b. belanja daerah Rp6.554.652.991.551,62
   surplus/(defisit).....Rp493.662.877.720,02
c. pembiayaan:
   1. penerimaan Rp620.675.986.790,62
   2. pengeluaran Rp401.464.798.088,00
   pembiayaan netto Rp219.211.188.702,62

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(387.691.843.961,64) (minus tiga ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah enam puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp6.660.624.025.310,00
   2. realisasi Rp7.048.315.869.271,64
      selisih lebih/(kurang) ..... Rp(387.691.843.961,64)

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja daerah sejumlah Rp858.317.286.431,98 (delapan ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah sembilan puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran belanja daerah setelah perubahan Rp7.412.970.277.983,60
   2. realisasi Rp6.554.652.991.551,62
      selisih lebih/(kurang) Rp858.317.286.431,98

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp(1.246.009.130.393,62) (satu triliun dua ratus empat puluh enam miliar sembilan juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah enam puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan .....Rp(752.346.252.673,60)
   2. realisasi surplus/(defisit) Rp493.662.877.720,02
      selisih lebih/(kurang) ..... .Rp(1.246.009.130.393,62)

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp533.135.073.970,98 (lima ratus tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah sembilan puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp1.153.811.060.761,60
   2. realisasi Rp620.675.986.790,62
      selisih lebih/(kurang) Rp533.135.073.970,98

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp401.464.808.088,00
   2. realisasi Rp401.464.798.088,00
      selisih lebih/(kurang) Rp10.000,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp533.135.063.970,98 (lima ratus tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh lima juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah sembilan puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp752.346.252.673,60
   2. realisasi Rp219.211.188.702,62
   selisih lebih/(kurang) Rp533.135.063.970,98

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
a. saldo anggaran lebih awal.....Rp623.732.459.203,32
b. penggunaan saldo anggaran lebih awal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan.....Rp620.675.986.790,62
c. sisa lebih/(kurang) pembiayaan anggaran SiLPA/(SiKPA).....Rp712.874.066.422,64
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.....Rp(3.056.472.412,70)
e. saldo anggaran lebih akhir.....Rp712.874.066.422,64

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:
a. aset Rp23.198.582.557.487,43
b. kewajiban Rp1.536.930.313.424,62
c. ekuitas..... Rp21.661.652.244.062,81

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:
kegiatan operasional
a. pendapatan-LO Rp10.085.025.980.851,22
b. beban-LO Rp6.059.034.551.978,29
jumlah surplus/(defisit) dari kegiatan operasional.....Rp4.025.991.428.872,93
kegiatan non operasional
a. surplus non operasional Rp64.624.774.904,81
b. defisit non operasional Rp5.269.234.426,05
jumlah surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional.....Rp59.355.540.478,76
pos luar biasa
a. pendapatan luar biasa..... Rp0,00
b. beban luar biasa Rp21.888.800,30
jumlah surplus/(defisit) dari pos luar biasa.....Rp(21.888.800,30)
surplus/(defisit)-LO.....Rp4.085.325.080.551,39

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2025 ..... Rp623.732.459.203,32
b. arus kas dari aktivitas operasi Rp1.266.649.842.069,55
c. arus kas dari aktivitas investasi .....Rp(930.986.964.349,53)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan ..... Rp(243.464.798.088,00)
e. arus kas dari aktivitas transitoris .....Rp(3.056.472.412,70)
f. koreksi SiLPA tahun lalu Rp0,00
g. kas lainnya di bendahara (selain BUD) terkait PFK Rp0,00
h. saldo kas akhir per 31 Desember 2025 ..... Rp712.874.066.422,64

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. ekuitas awal.....Rp17.602.612.654.466,05
b. surplus/(defisit) -LO.....Rp4.085.325.080.551,39
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar .....Rp(26.285.490.954,63)
d. ekuitas akhir.....Rp21.661.652.244.062,81

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran (LRA) terdiri atas:
   1. Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
   2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
   3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

	4. Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.	Lampiran II	:	Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.	Lampiran III	:	Laporan operasional;
d.	Lampiran IV	:	Laporan perubahan ekuitas;
e.	Lampiran V	:	Neraca;
f.	Lampiran VI	:	Laporan arus kas;
g.	Lampiran VII	:	Catatan atas laporan keuangan;
h.	Lampiran VIII	:	Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.	Lampiran IX	:	Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.	Lampiran X	:	Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.	Lampiran XI	:	Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l.	Lampiran XII	:	Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m.	Lampiran XIII	:	Daftar rekapitulasi aset tetap;
n.	Lampiran XIV	:	Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
o.	Lampiran XV	:	Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.	Lampiran XVI	:	Daftar dana cadangan daerah;
q.	Lampiran XVII	:	Daftar kewajiban jangka pendek;
r.	Lampiran XVIII	:	Daftar kewajiban jangka panjang;
s.	Lampiran XIX	:	Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t.	Lampiran XX	:	Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
	1. Lampiran XX.1	:	Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
	2. Lampiran XX.2	:	Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 September 2026

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 23 September 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2026 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: (7-135/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ngurah Satria Wardana
NIP. 19770510 200212 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN TA 2025	REALISASI TA 2025	%	REALISASI TA 2024
PENDAPATAN DAERAH	**5.1.1**	**6.660.624.025.310,00**	**7.048.315.869.271,64**	**105,82**	**7.824.598.583.907,83**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**5.1.1.1**	**4.216.263.422.941,00**	**4.628.083.379.382,63**	**109,76**	**5.535.429.679.670,83**
Pajak Daerah	5.1.1.1.1	2.767.839.352.516,00	2.865.836.401.524,00	103,54	4.520.332.643.486,00
Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	439.467.617.614,00	909.595.917.119,52	206,97	338.039.879.379,28
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	253.603.839.112,00	253.603.839.116,43	100,00	197.369.947.623,03
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	755.352.613.699,00	599.047.221.622,68	79,30	479.687.209.182,52
PENDAPATAN TRANSFER	**5.1.1.2**	**2.438.603.330.369,00**	**2.414.142.690.695,00**	**98,99**	**2.283.418.060.237,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	2.403.777.640.000,00	2.379.317.000.326,00	98,98	2.283.418.060.237,00
Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	2.260.260.706.237,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.1.2	244.948.196.000,00	251.084.753.500,00	102,50	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.3	1.401.748.162.000,00	1.403.485.166.622,00	100,12	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.1.4	744.102.696.000,00	711.768.494.204,00	95,65	0,00
Insentif Fiskal	5.1.1.2.1.5	12.978.586.000,00	12.978.586.000,00	100,00	23.157.354.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2	34.825.690.369,00	34.825.690.369,00	100,00	0,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.2.1	34.825.690.369,00	34.825.690.369,00	100,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**5.1.1.3**	**5.757.272.000,00**	**6.089.799.194,01**	**105,77**	**5.750.844.000,00**
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	5.757.272.000,00	6.089.799.194,01	105,77	5.750.844.000,00
BELANJA DAERAH	**5.1.2**	**7.412.970.277.983,60**	**6.554.652.991.551,62**	**88,42**	**7.293.051.849.998,07**
BELANJA OPERASI	**5.1.2.1**	**5.053.188.410.600,60**	**4.520.551.159.698,76**	**89,45**	**4.461.088.682.470,66**
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	2.526.874.277.345,60	2.304.413.342.308,00	91,19	2.088.693.065.509,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	1.562.731.648.119,00	1.272.505.827.668,79	81,42	1.200.096.660.415,66
Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	10.009.000.000,00	10.009.000.000,00	100,00	2.525.000.000,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	953.461.885.136,00	933.511.389.721,97	97,90	1.169.523.956.546,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	111.600.000,00	111.600.000,00	100,00	250.000.000,00
BELANJA MODAL	**5.1.2.2**	**961.755.254.119,00**	**773.687.032.749,53**	**80,44**	**667.689.607.145,41**
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	31.063.325.760,00	1.181.948.000,00	3,80	3.464.184.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	283.723.278.083,00	259.183.049.267,80	91,35	130.063.180.613,50
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	321.617.256.729,00	240.493.997.597,02	74,77	407.489.294.374,22
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	290.219.969.754,00	240.687.598.599,81	82,93	94.451.449.090,69
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	34.418.774.193,00	31.596.980.320,00	91,80	31.382.599.067,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	712.649.600,00	543.458.964,90	76,25	838.900.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**5.1.2.3**	**53.861.777.244,00**	**14.075.388.800,30**	**26,13**	**7.441.134.041,00**
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	53.861.777.244,00	14.075.388.800,30	26,13	7.441.134.041,00
BELANJA TRANSFER	**5.1.2.4**	**1.344.164.836.020,00**	**1.246.339.410.303,03**	**92,72**	**2.156.832.426.341,00**
Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	1.018.848.956.716,00	965.738.976.448,00	94,78	1.800.971.992.343,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.2.4.1.1	1.018.848.956.716,00	965.738.976.448,00	94,78	1.800.971.992.343,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	325.315.879.304,00	280.600.433.855,03	86,25	355.860.433.998,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	5.1.2.4.2.1	236.296.079.304,00	192.057.433.855,03	81,27	269.381.700.098,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.2.2	89.019.800.000,00	88.543.000.000,00	99,46	86.478.733.900,00
SURPLUS/(DEFISIT)		**-752.346.252.673,60**	**493.662.877.720,02**	**-65,61**	**531.546.733.909,76**
PEMBIAYAAN	**5.1.3**	**752.346.252.673,60**	**219.211.188.702,62**	**29,13**	**92.185.725.293,56**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**5.1.3.1**	**1.153.811.060.761,60**	**620.675.986.790,62**	**53,79**	**342.650.523.381,56**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.1	623.732.459.203,32	620.675.986.790,62	99,50	171.480.190.581,56
Pencairan Dana Cadangan	5.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	171.170.332.800,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.3.1.3	530.078.601.558,28	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**5.1.3.2**	**401.464.808.088,00**	**401.464.798.088,00**	**99,99**	**250.464.798.088,00**
Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2.1	158.000.000.000,00	158.000.000.000,00	100,00	7.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.3.2.2	243.464.808.088,00	243.464.798.088,00	99,99	243.464.798.088,00
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN - SILPA/(SIKPA)	**5.1.4**	**0,00**	**712.874.066.422,64**	**0,00**	**623.732.459.203,32**

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN I.1
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI BALI
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGRAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		4	**Pendapatan**	**6.660.624.025.310,00**	**7.048.315.869.271,64**	**387.691.843.961,64**	**105,82**
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	416.872.037.624,00	380.568.909.605,18	(36.303.128.018,82)	91,29
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.502.000.000,00	3.219.031.137,00	717.031.137,00	128,66
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.502.000.000,00	3.219.031.137,00	717.031.137,00	128,66
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.502.000.000,00	3.219.031.137,00	717.031.137,00	128,66
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.502.000.000,00	3.219.031.137,00	717.031.137,00	128,66
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	2.500.000.000,00	3.207.849.551,00	707.849.551,00	128,31
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.000.000,00	11.181.586,00	9.181.586,00	559,08
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	355.577.845.624,00	323.840.560.469,83	(31.737.285.154,17)	91,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	355.577.845.624,00	345.487.194,01	(355.232.358.429,99)	0,10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	355.577.845.624,00	345.487.194,01	(355.232.358.429,99)	0,10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	355.577.845.624,00	12.960.000,00	(355.564.885.624,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	324.995.810.000,00	12.960.000,00	(324.982.850.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	30.582.035.624,00	0,00	(30.582.035.624,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	332.527.194,01	332.527.194,01	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	332.527.194,01	332.527.194,01	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa	0,00	6.391.883.311,41	6.391.883.311,41	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	6.391.883.311,41	6.391.883.311,41	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	6.391.883.311,41	6.391.883.311,41	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	6.218.326.449,37	6.218.326.449,37	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	173.556.862,04	173.556.862,04	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	0,00	3.276.933.797,55	3.276.933.797,55	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	3.276.933.797,55	3.276.933.797,55	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	3.276.933.797,55	3.276.933.797,55	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	3.276.933.797,55	3.276.933.797,55	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional	0,00	292.580.000,00	292.580.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	292.580.000,00	292.580.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	292.580.000,00	292.580.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	292.580.000,00	292.580.000,00	0,00

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		RSUD Bali Mandara	0,00	177.471.599.546,86	177.471.599.546,86	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	177.471.599.546,86	177.471.599.546,86	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	177.471.599.546,86	177.471.599.546,86	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	176.037.142.787,81	176.037.142.787,81	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	1.434.456.759,05	1.434.456.759,05	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		Rumah Sakit Jiwa	0,00	23.055.171.161,46	23.055.171.161,46	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	23.055.171.161,46	23.055.171.161,46	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	23.055.171.161,46	23.055.171.161,46	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	21.747.568.832,00	21.747.568.832,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	1.307.602.329,46	1.307.602.329,46	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		Rumah Sakit Mata Bali Mandara	0,00	91.956.802.649,33	91.956.802.649,33	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	91.956.802.649,33	91.956.802.649,33	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	91.956.802.649,33	91.956.802.649,33	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	90.652.966.702,00	90.652.966.702,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	1.303.835.947,33	1.303.835.947,33	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan PerbekalanÂ Kesehatan	0,00	208.284.190,00	208.284.190,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	208.284.190,00	208.284.190,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	208.284.190,00	208.284.190,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	208.284.190,00	208.284.190,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya	0,00	20.841.818.619,21	20.841.818.619,21	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	20.841.818.619,21	20.841.818.619,21	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	20.841.818.619,21	20.841.818.619,21	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	20.841.818.619,21	20.841.818.619,21	0,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	58.782.832.000,00	53.499.957.998,35	(5.282.874.001,65)	91,01
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	58.782.832.000,00	2.464.740.000,00	(56.318.092.000,00)	4,19
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	58.782.832.000,00	2.464.740.000,00	(56.318.092.000,00)	4,19
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58.782.832.000,00	2.464.740.000,00	(56.318.092.000,00)	4,19
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	18.522.832.000,00	2.464.735.000,00	(16.058.097.000,00)	13,31
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	40.260.000.000,00	5.000,00	(40.259.995.000,00)	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0002		UPTD Pengelolaan Air Minum	0,00	32.757.240.005,18	32.757.240.005,18	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0002	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	32.757.240.005,18	32.757.240.005,18	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0002	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	32.757.240.005,18	32.757.240.005,18	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0002	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	32.757.240.005,18	32.757.240.005,18	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0003		UPTD Pengelolaan Air Limbah	0,00	18.277.977.993,17	18.277.977.993,17	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0003	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	18.277.977.993,17	18.277.977.993,17	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0003	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	18.277.977.993,17	18.277.977.993,17	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0003	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	17.975.890.000,00	17.975.890.000,00	0,00

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0003	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	302.087.993,17	302.087.993,17	0,00
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	100,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	100,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	100,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	100,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	100,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	13.826.873.754,00	19.692.839.420,00	5.865.965.666,00	142,42
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6.104.320.000,00	9.216.531.880,00	3.112.211.880,00	150,98
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000		Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	6.104.320.000,00	9.216.531.880,00	3.112.211.880,00	150,98
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	6.104.320.000,00	9.216.531.880,00	3.112.211.880,00	150,98
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.104.320.000,00	9.216.531.880,00	3.112.211.880,00	150,98
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	6.104.320.000,00	9.216.181.530,00	3.111.861.530,00	150,98
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	350.350,00	350.350,00	0,00
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	936.135.194,00	1.379.932.893,00	443.797.699,00	147,41
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	936.135.194,00	1.379.932.893,00	443.797.699,00	147,41
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	936.135.194,00	1.379.932.893,00	443.797.699,00	147,41
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	932.095.194,00	1.375.892.893,00	443.797.699,00	147,61
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	932.069.814,00	1.375.867.513,00	443.797.699,00	147,61
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	25.380,00	25.380,00	0,00	100,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	100,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	4.3.01	Pendapatan Hibah	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	100,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1.235.183.760,00	1.230.889.120,00	(4.294.640,00)	99,65
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.235.183.760,00	1.230.889.120,00	(4.294.640,00)	99,65
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.235.183.760,00	1.230.889.120,00	(4.294.640,00)	99,65
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.235.183.760,00	1.230.889.120,00	(4.294.640,00)	99,65
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	43.536.000,00	39.220.000,00	(4.316.000,00)	90,09
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.191.647.760,00	1.191.669.120,00	21.360,00	100,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3.425.664.000,00	4.205.771.316,00	780.107.316,00	122,77
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	3.425.664.000,00	4.205.771.316,00	780.107.316,00	122,77
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	3.425.664.000,00	4.205.771.316,00	780.107.316,00	122,77
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.425.664.000,00	4.205.771.316,00	780.107.316,00	122,77
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	5.664.000,00	5.664.000,00	0,00	100,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.420.000.000,00	4.200.107.316,00	780.107.316,00	122,81
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.048.400,00	5.056.800,00	8.400,00	100,17
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.048.400,00	5.056.800,00	8.400,00	100,17
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	5.048.400,00	5.056.800,00	8.400,00	100,17
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.048.400,00	5.056.800,00	8.400,00	100,17

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	100,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.400,00	16.800,00	8.400,00	200,00
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.120.522.400,00	3.654.657.411,00	1.534.135.011,00	172,35
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kebudayaan	2.120.522.400,00	3.654.657.411,00	1.534.135.011,00	172,35
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.120.522.400,00	3.654.657.411,00	1.534.135.011,00	172,35
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.120.522.400,00	3.654.657.411,00	1.534.135.011,00	172,35
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	2.120.520.000,00	3.654.655.011,00	1.534.135.011,00	172,35
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.400,00	2.400,00	0,00	100,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	503.193.321.600,00	371.903.089.794,00	(131.290.231.806,00)	73,91
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.162.272.000,00	2.845.771.794,00	(316.500.206,00)	89,99
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kelautan dan Perikanan	3.162.272.000,00	2.845.771.794,00	(316.500.206,00)	89,99
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	3.162.272.000,00	2.845.771.794,00	(316.500.206,00)	89,99
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.162.272.000,00	2.845.771.794,00	(316.500.206,00)	89,99
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	3.162.272.000,00	2.845.771.794,00	(316.500.206,00)	89,99
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	500.005.275.200,00	369.027.025.200,00	(130.978.250.000,00)	73,80
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata	500.005.275.200,00	369.027.025.200,00	(130.978.250.000,00)	73,80
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	500.005.275.200,00	369.027.025.200,00	(130.978.250.000,00)	73,80
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500.005.275.200,00	369.027.025.200,00	(130.978.250.000,00)	73,80
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	5.275.200,00	5.275.200,00	0,00	100,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	500.000.000.000,00	369.021.750.000,00	(130.978.250.000,00)	73,80
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	25.774.400,00	30.292.800,00	4.518.400,00	117,53
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25.774.400,00	30.292.800,00	4.518.400,00	117,53
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	25.774.400,00	30.292.800,00	4.518.400,00	117,53
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.774.400,00	30.292.800,00	4.518.400,00	117,53
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	25.760.000,00	30.240.000,00	4.480.000,00	117,39
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	14.400,00	52.800,00	38.400,00	366,67
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	253.753.839.112,00	253.753.839.116,43	4,43	100,00
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	253.753.839.112,00	253.753.839.116,43	4,43	100,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000		Sekretariat Daerah	253.753.839.112,00	253.753.839.116,43	4,43	100,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	253.753.839.112,00	253.753.839.116,43	4,43	100,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	253.753.839.112,00	253.753.839.116,43	4,43	100,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	253.603.839.112,00	253.603.839.116,43	4,43	100,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.472.977.953.220,00	6.022.397.191.336,03	549.419.238.116,03	110,04
5.02			KEUANGAN	5.450.595.698.220,00	5.999.049.184.828,15	548.453.486.608,15	110,06
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.631.978.390.704,00	2.542.430.350.071,77	(89.548.040.632,23)	96,60
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.631.978.390.704,00	2.542.430.350.071,77	(89.548.040.632,23)	96,60

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	187.621.828.335,00	122.534.427.376,77	(65.087.400.958,23)	65,31
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	80.188.303.600,00	0,00	(80.188.303.600,00)	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	107.433.524.735,00	122.534.427.376,77	15.100.902.641,77	114,06
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.438.603.330.369,00	2.414.142.690.695,00	(24.460.639.674,00)	99,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.403.777.640.000,00	2.379.317.000.326,00	(24.460.639.674,00)	98,98
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.825.690.369,00	34.825.690.369,00	0,00	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.753.232.000,00	5.753.232.000,00	0,00	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.3.01	Pendapatan Hibah	5.753.232.000,00	5.753.232.000,00	0,00	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001		UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah	0,00	572.531.461.885,38	572.531.461.885,38	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	572.531.461.885,38	572.531.461.885,38	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	572.531.461.885,38	572.531.461.885,38	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	572.522.807.759,34	572.522.807.759,34	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	8.654.126,04	8.654.126,04	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000		Badan Pendapatan Daerah	2.818.617.307.516,00	1.901.724.437.637,00	(916.892.869.879,00)	67,47
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.818.617.307.516,00	1.901.724.437.637,00	(916.892.869.879,00)	67,47
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.818.617.307.516,00	1.901.724.437.637,00	(916.892.869.879,00)	67,47
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	4.1.01	Pajak Daerah	2.767.839.352.516,00	1.891.965.145.376,00	(875.874.207.140,00)	68,36
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	277.855.000,00	140.976.000,00	(136.879.000,00)	50,74
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	50.500.100.000,00	9.618.316.261,00	(40.881.783.739,00)	19,05
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng	0,00	96.866.391.432,00	96.866.391.432,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	96.866.391.432,00	96.866.391.432,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	96.866.391.432,00	96.866.391.432,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	4.1.01	Pajak Daerah	0,00	96.047.134.096,00	96.047.134.096,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	28.080.000,00	28.080.000,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	791.177.336,00	791.177.336,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana	0,00	25.679.146.240,00	25.679.146.240,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	25.679.146.240,00	25.679.146.240,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	25.679.146.240,00	25.679.146.240,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	4.1.01	Pajak Daerah	0,00	25.308.179.390,00	25.308.179.390,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	355.666.850,00	355.666.850,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan	0,00	76.687.210.856,00	76.687.210.856,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	76.687.210.856,00	76.687.210.856,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	76.687.210.856,00	76.687.210.856,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	4.1.01	Pajak Daerah	0,00	75.931.707.156,00	75.931.707.156,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	5.985.000,00	5.985.000,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	749.518.700,00	749.518.700,00	0,00

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung	0,00	176.095.665.060,00	176.095.665.060,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	176.095.665.060,00	176.095.665.060,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	176.095.665.060,00	176.095.665.060,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	4.1.01	Pajak Daerah	0,00	174.512.687.860,00	174.512.687.860,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	31.488.000,00	31.488.000,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	1.551.489.200,00	1.551.489.200,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar	0,00	391.265.445.645,00	391.265.445.645,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	391.265.445.645,00	391.265.445.645,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	391.265.445.645,00	391.265.445.645,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	4.1.01	Pajak Daerah	0,00	388.154.281.945,00	388.154.281.945,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	3.111.163.700,00	3.111.163.700,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar	0,00	132.804.509.462,00	132.804.509.462,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	132.804.509.462,00	132.804.509.462,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	132.804.509.462,00	132.804.509.462,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006	4.1.01	Pajak Daerah	0,00	131.801.687.462,00	131.801.687.462,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	27.148.800,00	27.148.800,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	975.673.200,00	975.673.200,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli	0,00	21.896.726.810,00	21.896.726.810,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	21.896.726.810,00	21.896.726.810,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	21.896.726.810,00	21.896.726.810,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007	4.1.01	Pajak Daerah	0,00	21.675.065.210,00	21.675.065.210,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	221.661.600,00	221.661.600,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung	0,00	24.760.012.349,00	24.760.012.349,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	24.760.012.349,00	24.760.012.349,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	24.760.012.349,00	24.760.012.349,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008	4.1.01	Pajak Daerah	0,00	24.501.152.049,00	24.501.152.049,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	8.463.000,00	8.463.000,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	250.397.300,00	250.397.300,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem	0,00	36.307.827.380,00	36.307.827.380,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	36.307.827.380,00	36.307.827.380,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	36.307.827.380,00	36.307.827.380,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009	4.1.01	Pajak Daerah	0,00	35.939.360.980,00	35.939.360.980,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	15.210.000,00	15.210.000,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	353.256.400,00	353.256.400,00	0,00
5.03			KEPEGAWAIAN	22.322.255.000,00	23.285.006.507,88	962.751.507,88	104,31
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	22.322.255.000,00	1.429.707.500,00	(20.892.547.500,00)	6,40
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	22.322.255.000,00	1.429.707.500,00	(20.892.547.500,00)	6,40

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22.322.255.000,00	1.429.707.500,00	(20.892.547.500,00)	6,40
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	359.000.000,00	9.000.000,00	(350.000.000,00)	2,51
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	21.963.255.000,00	1.420.707.500,00	(20.542.547.500,00)	6,47
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0002		UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,00	21.855.299.007,88	21.855.299.007,88	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0002	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	21.855.299.007,88	21.855.299.007,88	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0002	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	21.855.299.007,88	21.855.299.007,88	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0002	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	572.880.000,00	572.880.000,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0002	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	21.282.419.007,88	21.282.419.007,88	0,00
5.07			PENGELOLAAN PENGHUBUNG	60.000.000,00	63.000.000,00	3.000.000,00	105,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000		Badan Penghubung	60.000.000,00	63.000.000,00	3.000.000,00	105,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	60.000.000,00	63.000.000,00	3.000.000,00	105,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60.000.000,00	63.000.000,00	3.000.000,00	105,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	60.000.000,00	63.000.000,00	3.000.000,00	105,00

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		5	**Belanja**	**7.412.970.277.983,60**	**6.554.652.991.551,62**	**(858.317.286.431,98)**	**88,42**
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.520.856.142.702,00	3.201.713.301.583,32	(319.142.841.118,68)	90,94
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.933.617.545.947,00	1.777.415.518.705,08	(156.202.027.241,92)	91,92
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.930.882.791.147,00	1.774.849.519.359,08	(156.033.271.787,92)	91,92
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.930.882.791.147,00	1.774.849.519.359,08	(156.033.271.787,92)	91,92
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.691.875.652.811,00	1.543.343.715.685,58	(148.531.937.125,42)	91,22
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.291.832.286.219,00	1.161.616.450.017,00	(130.215.836.202,00)	89,92
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.615.066.592,00	284.517.186.009,58	(17.097.880.582,42)	94,33
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	98.428.300.000,00	97.210.079.659,00	(1.218.220.341,00)	98,76
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	239.007.138.336,00	231.505.803.673,50	(7.501.334.662,50)	96,86
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.849.247.743,00	83.249.957.614,00	(2.599.290.129,00)	96,97
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	121.144.116.400,00	117.044.345.888,50	(4.099.770.511,50)	96,62
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	32.013.774.193,00	31.211.500.171,00	(802.274.022,00)	97,49
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0001		UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	1.997.568.065,00	1.913.295.536,00	(84.272.529,00)	95,78
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	1.997.568.065,00	1.913.295.536,00	(84.272.529,00)	95,78
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.887.839.765,00	1.822.237.536,00	(65.602.229,00)	96,53
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.887.839.765,00	1.822.237.536,00	(65.602.229,00)	96,53
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	109.728.300,00	91.058.000,00	(18.670.300,00)	82,98
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.728.300,00	91.058.000,00	(18.670.300,00)	82,98
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0002		UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	737.186.735,00	652.703.810,00	(84.482.925,00)	88,54
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	737.186.735,00	652.703.810,00	(84.482.925,00)	88,54
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	737.186.735,00	652.703.810,00	(84.482.925,00)	88,54
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	737.186.735,00	652.703.810,00	(84.482.925,00)	88,54
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	824.305.230.667,00	738.426.340.010,96	(85.878.890.656,04)	89,58
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	328.620.964.157,00	303.729.712.134,23	(24.891.252.022,77)	92,43
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	328.620.964.157,00	303.729.712.134,23	(24.891.252.022,77)	92,43
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	327.744.235.157,00	303.024.409.707,83	(24.719.825.449,17)	92,46
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	289.098.297.773,00	272.151.348.224,00	(16.946.949.549,00)	94,14
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.923.602.248,00	30.435.237.871,83	(7.488.364.376,17)	80,25
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	722.335.136,00	437.823.612,00	(284.511.524,00)	60,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	876.729.000,00	705.302.426,40	(171.426.573,60)	80,45
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	760.079.400,00	608.512.380,00	(151.567.020,00)	80,06
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	96.790.046,40	(3.209.953,60)	96,79
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	16.649.600,00	0,00	(16.649.600,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa	9.683.150.316,00	5.454.089.416,68	(4.229.060.899,32)	56,33
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	9.683.150.316,00	5.454.089.416,68	(4.229.060.899,32)	56,33
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.841.525.316,00	5.372.818.416,68	(2.468.706.899,32)	68,52

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	1.932.431.593,00	0,00	(1.932.431.593,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.909.093.723,00	5.372.818.416,68	(536.275.306,32)	90,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.841.625.000,00	81.271.000,00	(1.760.354.000,00)	4,41
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.841.625.000,00	81.271.000,00	(1.760.354.000,00)	4,41
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	5.797.088.101,00	5.370.808.958,90	(426.279.142,10)	92,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	5.797.088.101,00	5.370.808.958,90	(426.279.142,10)	92,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.441.792.301,00	5.116.837.798,90	(324.954.502,10)	94,03
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.441.792.301,00	5.116.837.798,90	(324.954.502,10)	94,03
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	355.295.800,00	253.971.160,00	(101.324.640,00)	71,48
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	355.295.800,00	253.971.160,00	(101.324.640,00)	71,48
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional	8.967.179.509,00	7.614.017.484,00	(1.353.162.025,00)	84,91
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	8.967.179.509,00	7.614.017.484,00	(1.353.162.025,00)	84,91
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.714.838.579,00	4.019.823.497,00	(695.015.082,00)	85,26
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.714.838.579,00	4.019.823.497,00	(695.015.082,00)	85,26
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	4.252.340.930,00	3.594.193.987,00	(658.146.943,00)	84,52
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.877.335.990,00	2.443.165.714,00	(434.170.276,00)	84,91
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.151.404.940,00	1.068.211.607,00	(83.193.333,00)	92,77
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	223.600.000,00	82.816.666,00	(140.783.334,00)	37,04
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		RSUD Bali Mandara	279.657.255.619,00	255.557.744.092,96	(24.099.511.526,04)	91,38
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	279.657.255.619,00	255.557.744.092,96	(24.099.511.526,04)	91,38
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	213.786.906.414,00	195.484.226.993,96	(18.302.679.420,04)	91,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	80.000.000.000,00	74.610.937.595,00	(5.389.062.405,00)	93,26
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.786.906.414,00	120.873.289.398,96	(12.913.617.015,04)	90,35
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	65.870.349.205,00	60.073.517.099,00	(5.796.832.106,00)	91,20
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.978.212.000,00	50.923.057.211,00	(2.055.154.789,00)	96,12
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.114.763.000,00	946.018.344,00	(168.744.656,00)	84,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.777.374.205,00	8.204.441.544,00	(1.572.932.661,00)	83,91
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.000.000.000,00	0,00	(2.000.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		Rumah Sakit Jiwa	54.906.260.683,00	45.583.888.609,12	(9.322.372.073,88)	83,02
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	54.906.260.683,00	45.583.888.609,12	(9.322.372.073,88)	83,02
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	34.504.611.113,00	27.846.998.895,37	(6.657.612.217,63)	80,71
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	7.768.100.000,00	4.842.444.189,00	(2.925.655.811,00)	62,34
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.736.511.113,00	23.004.554.706,37	(3.731.956.406,63)	86,04
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	20.401.649.570,00	17.736.889.713,75	(2.664.759.856,25)	86,94
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.621.000.000,00	3.106.222.902,00	(514.777.098,00)	85,78
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.780.649.570,00	14.630.666.811,75	(2.149.982.758,25)	87,19
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		Rumah Sakit Mata Bali Mandara	93.000.000.000,00	83.981.802.498,25	(9.018.197.501,75)	90,30

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5	BELANJA DAERAH	93.000.000.000,00	83.981.802.498,25	(9.018.197.501,75)	90,30
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	81.854.455.000,00	74.175.736.418,33	(7.678.718.581,67)	90,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	35.251.800.000,00	32.325.675.185,00	(2.926.124.815,00)	91,70
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.602.655.000,00	41.850.061.233,33	(4.752.593.766,67)	89,80
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	11.145.545.000,00	9.806.066.079,92	(1.339.478.920,08)	87,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.431.545.000,00	8.221.575.702,00	(209.969.298,00)	97,51
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.318.000.000,00	1.081.528.377,92	(236.471.622,08)	82,06
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	800.000.000,00	71.040.000,00	(728.960.000,00)	8,88
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	60.000.000,00	42.000.000,00	(18.000.000,00)	70,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	536.000.000,00	389.922.000,00	(146.078.000,00)	72,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan PerbekalanÂ Kesehatan	10.074.597.466,00	7.176.585.770,00	(2.898.011.696,00)	71,23
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5	BELANJA DAERAH	10.074.597.466,00	7.176.585.770,00	(2.898.011.696,00)	71,23
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	8.823.817.446,00	6.147.577.168,00	(2.676.240.278,00)	69,67
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.823.817.446,00	6.147.577.168,00	(2.676.240.278,00)	69,67
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	1.250.780.020,00	1.029.008.602,00	(221.771.418,00)	82,27
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.780.020,00	250.228.600,00	(50.551.420,00)	83,19
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	950.000.000,00	778.780.002,00	(171.219.998,00)	81,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya	33.598.734.816,00	23.957.691.046,82	(9.641.043.769,18)	71,31
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5	BELANJA DAERAH	33.598.734.816,00	23.957.691.046,82	(9.641.043.769,18)	71,31
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	30.580.609.016,00	21.492.091.432,82	(9.088.517.583,18)	70,28
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1.01	Belanja Pegawai	7.790.000.000,00	6.591.483.476,00	(1.198.516.524,00)	84,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.790.609.016,00	14.900.607.956,82	(7.890.001.059,18)	65,38
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	3.018.125.800,00	2.465.599.614,00	(552.526.186,00)	81,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.118.125.800,00	1.779.182.496,00	(338.943.304,00)	84,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	900.000.000,00	686.417.118,00	(213.582.882,00)	76,27
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	628.054.997.990,00	560.089.093.023,00	(67.965.904.967,00)	89,18
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	562.873.376.391,00	503.535.114.283,00	(59.338.262.108,00)	89,46
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5	BELANJA DAERAH	562.873.376.391,00	503.535.114.283,00	(59.338.262.108,00)	89,46
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	283.931.172.994,00	262.868.527.134,00	(21.062.645.860,00)	92,58
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	41.161.692.915,00	37.965.073.143,00	(3.196.619.772,00)	92,23
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.150.435.079,00	40.025.894.550,00	(5.124.540.529,00)	88,65
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	197.619.045.000,00	184.877.559.441,00	(12.741.485.559,00)	93,55
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	278.942.203.397,00	240.666.587.149,00	(38.275.616.248,00)	86,28
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2.01	Belanja Modal Tanah	765.000.000,00	930.000,00	(764.070.000,00)	0,12
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.031.821.300,00	596.395.300,00	(435.426.000,00)	57,80
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.983.670.000,00	11.614.103.745,00	(369.566.255,00)	96,92
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	265.161.712.097,00	228.455.158.104,00	(36.706.553.993,00)	86,16

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0001		UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	3.622.829.827,00	2.928.771.665,00	(694.058.162,00)	80,84
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	3.622.829.827,00	2.928.771.665,00	(694.058.162,00)	80,84
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.490.574.327,00	1.326.613.015,00	(163.961.312,00)	89,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.490.574.327,00	1.326.613.015,00	(163.961.312,00)	89,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	2.132.255.500,00	1.602.158.650,00	(530.096.850,00)	75,14
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.132.255.500,00	1.602.158.650,00	(530.096.850,00)	75,14
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0002		UPTD Pengelolaan Air Minum	43.218.719.622,00	38.315.121.244,00	(4.903.598.378,00)	88,65
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	43.218.719.622,00	38.315.121.244,00	(4.903.598.378,00)	88,65
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.193.724.697,00	29.775.221.019,00	(4.418.503.678,00)	87,08
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.193.724.697,00	29.775.221.019,00	(4.418.503.678,00)	87,08
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	9.024.994.925,00	8.539.900.225,00	(485.094.700,00)	94,62
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.178.581.100,00	8.143.486.400,00	(35.094.700,00)	99,57
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	196.913.825,00	196.913.825,00	0,00	100,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	649.500.000,00	199.500.000,00	(450.000.000,00)	30,72
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0003		UPTD Pengelolaan Air Limbah	18.340.072.150,00	15.310.085.831,00	(3.029.986.319,00)	83,48
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	18.340.072.150,00	15.310.085.831,00	(3.029.986.319,00)	83,48
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	13.855.072.150,00	12.645.755.320,00	(1.209.316.830,00)	91,27
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	100,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.845.412.150,00	12.636.095.320,00	(1.209.316.830,00)	91,27
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	4.485.000.000,00	2.664.330.511,00	(1.820.669.489,00)	59,41
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.910.000.000,00	2.097.629.781,00	(1.812.370.219,00)	53,65
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	540.000.000,00	536.832.850,00	(3.167.150,00)	99,41
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0003	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.000.000,00	29.867.880,00	(5.132.120,00)	85,34
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.413.522.655,00	9.082.513.069,00	(331.009.586,00)	96,48
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.413.522.655,00	9.082.513.069,00	(331.009.586,00)	96,48
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	5	BELANJA DAERAH	9.413.522.655,00	9.082.513.069,00	(331.009.586,00)	96,48
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.687.995.075,00	8.379.739.825,00	(308.255.250,00)	96,45
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.687.995.075,00	8.379.739.825,00	(308.255.250,00)	96,45
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	725.527.580,00	702.773.244,00	(22.754.336,00)	96,86
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	39.750.000,00	(250.000,00)	99,38
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	385.527.580,00	364.342.695,00	(21.184.885,00)	94,50
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	300.000.000,00	298.680.549,00	(1.319.451,00)	99,56
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	88.013.652.729,00	81.788.222.089,28	(6.225.430.639,72)	92,93
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		Satuan Polisi Pamong Praja	54.221.190.392,00	51.274.052.587,00	(2.947.137.805,00)	94,56
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	54.221.190.392,00	51.274.052.587,00	(2.947.137.805,00)	94,56
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	53.625.717.692,00	50.835.687.792,00	(2.790.029.900,00)	94,80
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	22.947.873.585,00	20.819.136.858,00	(2.128.736.727,00)	90,72

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.677.844.107,00	30.016.550.934,00	(661.293.173,00)	97,84
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	595.472.700,00	438.364.795,00	(157.107.905,00)	73,62
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	595.472.700,00	438.364.795,00	(157.107.905,00)	73,62
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.138.157.894,00	23.751.128.772,28	(2.387.029.121,72)	90,87
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	26.138.157.894,00	23.751.128.772,28	(2.387.029.121,72)	90,87
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	22.677.482.470,00	20.652.524.629,92	(2.024.957.840,08)	91,07
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	14.437.060.948,00	13.876.159.805,00	(560.901.143,00)	96,11
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.240.421.522,00	6.776.364.824,92	(1.464.056.697,08)	82,23
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.460.675.424,00	3.098.604.142,36	(362.071.281,64)	89,54
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.147.170.700,00	1.057.003.302,00	(90.167.398,00)	92,14
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.313.504.724,00	2.041.600.840,36	(271.903.883,64)	88,25
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0001		UPTD Pengendalian Bencana Daerah	7.654.304.443,00	6.763.040.730,00	(891.263.713,00)	88,36
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0001	5	BELANJA DAERAH	7.654.304.443,00	6.763.040.730,00	(891.263.713,00)	88,36
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.257.496.474,00	2.716.333.969,00	(541.162.505,00)	83,39
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.257.496.474,00	2.716.333.969,00	(541.162.505,00)	83,39
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0001	5.2	BELANJA MODAL	4.396.807.969,00	4.046.706.761,00	(350.101.208,00)	92,04
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.396.807.969,00	4.046.706.761,00	(350.101.208,00)	92,04
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	37.451.192.714,00	34.911.614.686,00	(2.539.578.028,00)	93,22
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	28.894.026.973,00	26.824.860.290,00	(2.069.166.683,00)	92,84
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	5	BELANJA DAERAH	28.894.026.973,00	26.824.860.290,00	(2.069.166.683,00)	92,84
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	5.1	BELANJA OPERASI	27.057.807.508,00	25.000.086.798,00	(2.057.720.710,00)	92,40
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	18.896.105.419,00	17.222.012.848,00	(1.674.092.571,00)	91,14
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.050.102.089,00	7.666.473.950,00	(383.628.139,00)	95,23
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00	100,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.836.219.465,00	1.824.773.492,00	(11.445.973,00)	99,38
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.288.640,00	129.645.530,00	(10.643.110,00)	92,41
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.695.930.825,00	1.695.127.962,00	(802.863,00)	99,95
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001		UPTD Pelayanan Sosial	8.557.165.741,00	8.086.754.396,00	(470.411.345,00)	94,50
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	5	BELANJA DAERAH	8.557.165.741,00	8.086.754.396,00	(470.411.345,00)	94,50
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.103.740.741,00	4.741.682.146,00	(362.058.595,00)	92,91
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.103.740.741,00	4.741.682.146,00	(362.058.595,00)	92,91
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	5.2	BELANJA MODAL	3.453.425.000,00	3.345.072.250,00	(108.352.750,00)	96,86
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.028.000,00	166.455.600,00	(2.572.400,00)	98,48
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.284.397.000,00	3.178.616.650,00	(105.780.350,00)	96,78
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.223.925.556.519,40	1.056.667.378.480,82	(167.258.178.038,58)	86,33
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	38.653.418.294,00	35.389.729.546,00	(3.263.688.748,00)	91,56
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000		Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	36.819.436.312,00	33.620.330.890,00	(3.199.105.422,00)	91,31

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	5	BELANJA DAERAH	36.819.436.312,00	33.620.330.890,00	(3.199.105.422,00)	91,31
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	36.713.159.612,00	33.528.211.990,00	(3.184.947.622,00)	91,32
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	31.865.452.568,00	28.992.142.949,00	(2.873.309.619,00)	90,98
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.847.707.044,00	4.536.069.041,00	(311.638.003,00)	93,57
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	106.276.700,00	92.118.900,00	(14.157.800,00)	86,68
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.276.700,00	92.118.900,00	(14.157.800,00)	86,68
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0001		UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	884.145.328,00	857.092.290,00	(27.053.038,00)	96,94
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	884.145.328,00	857.092.290,00	(27.053.038,00)	96,94
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	838.411.068,00	815.536.840,00	(22.874.228,00)	97,27
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	838.411.068,00	815.536.840,00	(22.874.228,00)	97,27
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	45.734.260,00	41.555.450,00	(4.178.810,00)	90,86
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.734.260,00	41.555.450,00	(4.178.810,00)	90,86
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0002		UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	949.836.654,00	912.306.366,00	(37.530.288,00)	96,05
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	949.836.654,00	912.306.366,00	(37.530.288,00)	96,05
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	949.836.654,00	912.306.366,00	(37.530.288,00)	96,05
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	949.836.654,00	912.306.366,00	(37.530.288,00)	96,05
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.164.276.173,00	5.819.472.354,00	(344.803.819,00)	94,41
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1.004.276.700,00	986.746.206,00	(17.530.494,00)	98,25
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	5	BELANJA DAERAH	1.004.276.700,00	986.746.206,00	(17.530.494,00)	98,25
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.004.276.700,00	986.746.206,00	(17.530.494,00)	98,25
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.004.276.700,00	986.746.206,00	(17.530.494,00)	98,25
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0002		UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	5.159.999.473,00	4.832.726.148,00	(327.273.325,00)	93,66
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0002	5	BELANJA DAERAH	5.159.999.473,00	4.832.726.148,00	(327.273.325,00)	93,66
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	918.476.573,00	783.528.111,00	(134.948.462,00)	85,31
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	918.476.573,00	783.528.111,00	(134.948.462,00)	85,31
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	4.241.522.900,00	4.049.198.037,00	(192.324.863,00)	95,47
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.266.900,00	25.086.000,00	(1.180.900,00)	95,50
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.215.256.000,00	4.024.112.037,00	(191.143.963,00)	95,47
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.826.074.609,00	3.575.843.109,00	(250.231.500,00)	93,46
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.834.480.199,00	2.676.078.087,00	(158.402.112,00)	94,41
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.834.480.199,00	2.676.078.087,00	(158.402.112,00)	94,41
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.834.480.199,00	2.676.078.087,00	(158.402.112,00)	94,41
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.634.480.199,00	2.476.078.087,00	(158.402.112,00)	93,99
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0009		UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	991.594.410,00	899.765.022,00	(91.829.388,00)	90,74
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0009	5	BELANJA DAERAH	991.594.410,00	899.765.022,00	(91.829.388,00)	90,74
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	974.822.950,00	883.611.822,00	(91.211.128,00)	90,64

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	974.822.950,00	883.611.822,00	(91.211.128,00)	90,64
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	16.771.460,00	16.153.200,00	(618.260,00)	96,31
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.771.460,00	16.153.200,00	(618.260,00)	96,31
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	6.113.479.700,00	5.401.666.900,00	(711.812.800,00)	88,36
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.113.479.700,00	5.401.666.900,00	(711.812.800,00)	88,36
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.113.479.700,00	5.401.666.900,00	(711.812.800,00)	88,36
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.113.479.700,00	5.401.666.900,00	(711.812.800,00)	88,36
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.113.479.700,00	5.401.666.900,00	(711.812.800,00)	88,36
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	26.170.073.897,00	18.036.515.634,00	(8.133.558.263,00)	68,92
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.513.408.925,00	1.335.019.244,00	(178.389.681,00)	88,21
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.513.408.925,00	1.335.019.244,00	(178.389.681,00)	88,21
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.513.408.925,00	1.335.019.244,00	(178.389.681,00)	88,21
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.513.408.925,00	1.335.019.244,00	(178.389.681,00)	88,21
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0006		UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	430.892.490,00	340.911.854,00	(89.980.636,00)	79,12
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0006	5	BELANJA DAERAH	430.892.490,00	340.911.854,00	(89.980.636,00)	79,12
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	382.450.847,00	309.517.054,00	(72.933.793,00)	80,93
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	382.450.847,00	309.517.054,00	(72.933.793,00)	80,93
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	48.441.643,00	31.394.800,00	(17.046.843,00)	64,81
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.441.643,00	31.394.800,00	(17.046.843,00)	64,81
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0007		UPTD Pengelolaan Sampah	24.225.772.482,00	16.360.584.536,00	(7.865.187.946,00)	67,53
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0007	5	BELANJA DAERAH	24.225.772.482,00	16.360.584.536,00	(7.865.187.946,00)	67,53
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	15.001.378.482,00	13.081.697.062,00	(1.919.681.420,00)	87,20
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.001.378.482,00	13.081.697.062,00	(1.919.681.420,00)	87,20
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	9.224.394.000,00	3.278.887.474,00	(5.945.506.526,00)	35,55
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.517.156.000,00	1.311.909.000,00	(205.247.000,00)	86,47
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0007	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	206.460.000,00	202.130.000,00	(4.330.000,00)	97,90
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0007	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.500.778.000,00	1.764.848.474,00	(5.735.929.526,00)	23,53
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	326.704.025,00	251.916.305,00	(74.787.720,00)	77,11
2.12	2.13.2.12.2.14.01.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	326.704.025,00	251.916.305,00	(74.787.720,00)	77,11
2.12	2.13.2.12.2.14.01.0000	5	BELANJA DAERAH	326.704.025,00	251.916.305,00	(74.787.720,00)	77,11
2.12	2.13.2.12.2.14.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	326.704.025,00	251.916.305,00	(74.787.720,00)	77,11
2.12	2.13.2.12.2.14.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.704.025,00	251.916.305,00	(74.787.720,00)	77,11
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	25.462.526.208,00	23.571.748.392,00	(1.890.777.816,00)	92,57
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25.462.526.208,00	23.571.748.392,00	(1.890.777.816,00)	92,57
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	5	BELANJA DAERAH	25.462.526.208,00	23.571.748.392,00	(1.890.777.816,00)	92,57
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	25.396.262.608,00	23.508.362.382,00	(1.887.900.226,00)	92,57
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	11.544.283.540,00	10.651.346.987,00	(892.936.553,00)	92,27

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.005.979.068,00	8.411.015.395,00	(594.963.673,00)	93,39
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	4.846.000.000,00	4.446.000.000,00	(400.000.000,00)	91,75
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	66.263.600,00	63.386.010,00	(2.877.590,00)	95,66
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.263.600,00	53.628.000,00	(2.635.600,00)	95,32
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	9.758.010,00	(241.990,00)	97,58
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	474.711.630,00	449.103.561,00	(25.608.069,00)	94,61
2.14	2.13.2.12.2.14.01.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	474.711.630,00	449.103.561,00	(25.608.069,00)	94,61
2.14	2.13.2.12.2.14.01.0000	5	BELANJA DAERAH	474.711.630,00	449.103.561,00	(25.608.069,00)	94,61
2.14	2.13.2.12.2.14.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	474.711.630,00	449.103.561,00	(25.608.069,00)	94,61
2.14	2.13.2.12.2.14.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	474.711.630,00	449.103.561,00	(25.608.069,00)	94,61
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	105.533.390.688,40	87.159.981.563,00	(18.373.409.125,40)	82,59
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	33.502.227.534,40	27.765.035.299,00	(5.737.192.235,40)	82,88
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	33.502.227.534,40	27.765.035.299,00	(5.737.192.235,40)	82,88
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	33.078.650.834,40	27.408.703.486,00	(5.669.947.348,40)	82,86
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	25.755.672.215,40	20.845.053.875,00	(4.910.618.340,40)	80,93
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.978.619,00	4.641.649.611,00	(759.329.008,00)	85,94
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.922.000.000,00	1.922.000.000,00	0,00	100,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	423.576.700,00	356.331.813,00	(67.244.887,00)	84,12
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	423.576.700,00	356.331.813,00	(67.244.887,00)	84,12
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001		UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	2.266.985.285,00	1.826.403.390,00	(440.581.895,00)	80,57
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	2.266.985.285,00	1.826.403.390,00	(440.581.895,00)	80,57
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.905.922.085,00	1.481.941.060,00	(423.981.025,00)	77,75
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.905.922.085,00	1.481.941.060,00	(423.981.025,00)	77,75
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	361.063.200,00	344.462.330,00	(16.600.870,00)	95,40
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	261.063.200,00	248.447.330,00	(12.615.870,00)	95,17
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	96.015.000,00	(3.985.000,00)	96,02
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002		UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita	65.641.792.293,00	53.864.986.038,00	(11.776.806.255,00)	82,06
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	65.641.792.293,00	53.864.986.038,00	(11.776.806.255,00)	82,06
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	65.496.957.773,00	53.746.619.238,00	(11.750.338.535,00)	82,06
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.496.957.773,00	53.746.619.238,00	(11.750.338.535,00)	82,06
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	144.834.520,00	118.366.800,00	(26.467.720,00)	81,73
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	144.834.520,00	118.366.800,00	(26.467.720,00)	81,73
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003		UPTD Perlengkapan Jalan	3.668.995.802,00	3.314.886.937,00	(354.108.865,00)	90,35
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	3.668.995.802,00	3.314.886.937,00	(354.108.865,00)	90,35
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.949.098.522,00	2.747.660.928,00	(201.437.594,00)	93,17
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.949.098.522,00	2.747.660.928,00	(201.437.594,00)	93,17
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	719.897.280,00	567.226.009,00	(152.671.271,00)	78,79

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	719.897.280,00	567.226.009,00	(152.671.271,00)	78,79
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004		UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan	453.389.774,00	388.669.899,00	(64.719.875,00)	85,73
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	453.389.774,00	388.669.899,00	(64.719.875,00)	85,73
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	402.653.814,00	341.827.899,00	(60.825.915,00)	84,89
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	402.653.814,00	341.827.899,00	(60.825.915,00)	84,89
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	50.735.960,00	46.842.000,00	(3.893.960,00)	92,33
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.735.960,00	46.842.000,00	(3.893.960,00)	92,33
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	246.563.487.674,00	147.170.475.702,93	(99.393.011.971,07)	59,69
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	221.922.588.034,00	128.253.134.229,68	(93.669.453.804,32)	57,79
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	5	BELANJA DAERAH	221.922.588.034,00	128.253.134.229,68	(93.669.453.804,32)	57,79
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	63.783.775.204,00	55.771.280.653,00	(8.012.494.551,00)	87,44
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	24.161.727.824,00	22.147.944.996,00	(2.013.782.828,00)	91,67
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.730.797.380,00	28.734.287.563,00	(5.996.509.817,00)	82,73
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	5.1.05	Belanja Hibah	4.891.250.000,00	4.889.048.094,00	(2.201.906,00)	99,95
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	158.138.812.830,00	72.481.853.576,68	(85.656.959.253,32)	45,83
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	5.2.01	Belanja Modal Tanah	30.298.325.760,00	1.181.018.000,00	(29.117.307.760,00)	3,90
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.700.035.070,00	20.070.854.366,00	(629.180.704,00)	96,96
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	105.680.452.000,00	49.973.959.245,78	(55.706.492.754,22)	47,29
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.400.000.000,00	1.198.500.000,00	(201.500.000,00)	85,61
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	60.000.000,00	57.521.964,90	(2.478.035,10)	95,87
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0001		UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital	7.513.820.490,00	6.103.582.442,00	(1.410.238.048,00)	81,23
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0001	5	BELANJA DAERAH	7.513.820.490,00	6.103.582.442,00	(1.410.238.048,00)	81,23
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.849.600.100,00	5.567.652.905,00	(1.281.947.195,00)	81,28
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.849.600.100,00	5.567.652.905,00	(1.281.947.195,00)	81,28
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	664.220.390,00	535.929.537,00	(128.290.853,00)	80,69
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	664.220.390,00	535.929.537,00	(128.290.853,00)	80,69
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0002		UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali	17.127.079.150,00	12.813.759.031,25	(4.313.320.118,75)	74,82
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0002	5	BELANJA DAERAH	17.127.079.150,00	12.813.759.031,25	(4.313.320.118,75)	74,82
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.588.446.592,00	8.915.667.695,00	(3.672.778.897,00)	70,82
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.588.446.592,00	8.915.667.695,00	(3.672.778.897,00)	70,82
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	4.538.632.558,00	3.898.091.336,25	(640.541.221,75)	85,89
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.288.632.558,00	2.655.423.126,80	(633.209.431,20)	80,75
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.000.000,00	995.000.000,00	(5.000.000,00)	99,50
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	250.000.000,00	247.668.209,45	(2.331.790,55)	99,07
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	23.029.940.683,00	21.169.609.316,61	(1.860.331.366,39)	91,92
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18.153.008.387,00	16.748.511.347,61	(1.404.497.039,39)	92,26
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	18.153.008.387,00	16.748.511.347,61	(1.404.497.039,39)	92,26

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	17.197.953.087,00	15.851.238.419,00	(1.346.714.668,00)	92,17
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	13.114.769.179,00	12.157.539.336,00	(957.229.843,00)	92,70
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.074.183.908,00	3.684.699.083,00	(389.484.825,00)	90,44
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	5.1.04	Belanja Subsidi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	955.055.300,00	897.272.928,61	(57.782.371,39)	93,95
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	683.055.300,00	629.293.989,00	(53.761.311,00)	92,13
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	272.000.000,00	267.978.939,61	(4.021.060,39)	98,52
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0001		UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	4.876.932.296,00	4.421.097.969,00	(455.834.327,00)	90,65
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	4.876.932.296,00	4.421.097.969,00	(455.834.327,00)	90,65
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.876.932.296,00	4.421.097.969,00	(455.834.327,00)	90,65
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.876.932.296,00	4.421.097.969,00	(455.834.327,00)	90,65
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	17.908.672.989,00	15.603.611.923,00	(2.305.061.066,00)	87,13
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.908.672.989,00	15.603.611.923,00	(2.305.061.066,00)	87,13
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	17.908.672.989,00	15.603.611.923,00	(2.305.061.066,00)	87,13
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	17.908.672.989,00	15.603.611.923,00	(2.305.061.066,00)	87,13
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	13.871.356.811,00	12.233.071.326,00	(1.638.285.485,00)	88,19
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.037.316.178,00	3.370.540.597,00	(666.775.581,00)	83,48
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	95.056.488.300,00	86.090.475.071,97	(8.966.013.228,03)	90,57
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	95.056.488.300,00	86.090.475.071,97	(8.966.013.228,03)	90,57
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	95.056.488.300,00	86.090.475.071,97	(8.966.013.228,03)	90,57
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	94.989.113.800,00	86.023.515.071,97	(8.965.598.728,03)	90,56
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.729.113.800,00	23.923.899.824,00	(8.805.213.976,00)	73,10
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	62.260.000.000,00	62.099.615.247,97	(160.384.752,03)	99,74
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	67.374.500,00	66.960.000,00	(414.500,00)	99,38
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.374.500,00	66.960.000,00	(414.500,00)	99,38
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	281.847.820,00	258.982.763,00	(22.865.057,00)	91,89
2.20	2.16.2.20.2.21.02.0000		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	281.847.820,00	258.982.763,00	(22.865.057,00)	91,89
2.20	2.16.2.20.2.21.02.0000	5	BELANJA DAERAH	281.847.820,00	258.982.763,00	(22.865.057,00)	91,89
2.20	2.16.2.20.2.21.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	281.847.820,00	258.982.763,00	(22.865.057,00)	91,89
2.20	2.16.2.20.2.21.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.847.820,00	258.982.763,00	(22.865.057,00)	91,89
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	324.157.405,00	292.239.835,00	(31.917.570,00)	90,15
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	324.157.405,00	292.239.835,00	(31.917.570,00)	90,15
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	5	BELANJA DAERAH	324.157.405,00	292.239.835,00	(31.917.570,00)	90,15
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	294.555.205,00	267.153.835,00	(27.401.370,00)	90,70
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.555.205,00	267.153.835,00	(27.401.370,00)	90,70
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	29.602.200,00	25.086.000,00	(4.516.200,00)	84,74
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.602.200,00	25.086.000,00	(4.516.200,00)	84,74

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	627.091.215.311,00	605.571.938.378,31	(21.519.276.932,69)	96,57
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kebudayaan	108.242.520.599,00	104.655.024.515,31	(3.587.496.083,69)	96,69
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	108.242.520.599,00	104.655.024.515,31	(3.587.496.083,69)	96,69
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	106.562.513.372,00	103.159.600.123,55	(3.402.913.248,45)	96,81
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	42.363.697.777,00	41.178.988.004,00	(1.184.709.773,00)	97,20
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.963.815.595,00	36.845.612.119,55	(2.118.203.475,45)	94,56
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	25.235.000.000,00	25.135.000.000,00	(100.000.000,00)	99,60
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.680.007.227,00	1.495.424.391,76	(184.582.835,24)	89,01
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.562.007.227,00	1.378.899.101,00	(183.108.126,00)	88,28
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	118.000.000,00	116.525.290,76	(1.474.709,24)	98,75
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001		UPTD Taman Budaya	10.575.259.885,00	6.060.652.935,00	(4.514.606.950,00)	57,31
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	10.575.259.885,00	6.060.652.935,00	(4.514.606.950,00)	57,31
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.884.481.935,00	5.875.102.937,00	(1.009.378.998,00)	85,34
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.884.481.935,00	5.875.102.937,00	(1.009.378.998,00)	85,34
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	3.690.777.950,00	185.549.998,00	(3.505.227.952,00)	5,03
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.777.950,00	185.549.998,00	(14.227.952,00)	92,88
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.491.000.000,00	0,00	(3.491.000.000,00)	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002		UPTD Museum Bali	14.468.476.759,00	5.433.106.159,00	(9.035.370.600,00)	37,55
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	14.468.476.759,00	5.433.106.159,00	(9.035.370.600,00)	37,55
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.628.107.986,00	4.117.299.089,00	(510.808.897,00)	88,96
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.628.107.986,00	4.117.299.089,00	(510.808.897,00)	88,96
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	9.840.368.773,00	1.315.807.070,00	(8.524.561.703,00)	13,37
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	423.609.900,00	278.961.106,00	(144.648.794,00)	65,85
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.291.758.873,00	1.036.845.964,00	(8.254.912.909,00)	11,16
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0003		UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	6.618.280.819,00	5.816.797.004,00	(801.483.815,00)	87,89
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	6.618.280.819,00	5.816.797.004,00	(801.483.815,00)	87,89
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.583.280.819,00	5.783.190.644,00	(800.090.175,00)	87,85
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.583.280.819,00	5.783.190.644,00	(800.090.175,00)	87,85
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	35.000.000,00	33.606.360,00	(1.393.640,00)	96,02
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	33.606.360,00	(1.393.640,00)	96,02
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000		Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	487.186.677.249,00	483.606.357.765,00	(3.580.319.484,00)	99,27
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	487.186.677.249,00	483.606.357.765,00	(3.580.319.484,00)	99,27
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	486.802.528.406,00	483.238.779.965,00	(3.563.748.441,00)	99,27
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	10.916.832.800,00	9.994.475.509,00	(922.357.291,00)	91,55
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.215.695.606,00	4.574.304.456,00	(641.391.150,00)	87,70
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	5.1.05	Belanja Hibah	470.670.000.000,00	468.670.000.000,00	(2.000.000.000,00)	99,58

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	384.148.843,00	367.577.800,00	(16.571.043,00)	95,69
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	255.448.843,00	239.645.800,00	(15.803.043,00)	93,81
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128.700.000,00	127.932.000,00	(768.000,00)	99,40
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	368.970.632,00	335.937.754,00	(33.032.878,00)	91,05
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0005		Biro Organisasi	368.970.632,00	335.937.754,00	(33.032.878,00)	91,05
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0005	5	BELANJA DAERAH	368.970.632,00	335.937.754,00	(33.032.878,00)	91,05
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	323.970.632,00	291.138.154,00	(32.832.478,00)	89,87
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.970.632,00	291.138.154,00	(32.832.478,00)	89,87
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	45.000.000,00	44.799.600,00	(200.400,00)	99,55
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0005	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00	44.799.600,00	(200.400,00)	99,55
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	576.120.481,00	518.130.372,00	(57.990.109,00)	89,93
2.24	4.01.2.23.2.24.01.0003		Biro Umum dan Protokol	576.120.481,00	518.130.372,00	(57.990.109,00)	89,93
2.24	4.01.2.23.2.24.01.0003	5	BELANJA DAERAH	576.120.481,00	518.130.372,00	(57.990.109,00)	89,93
2.24	4.01.2.23.2.24.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	576.120.481,00	518.130.372,00	(57.990.109,00)	89,93
2.24	4.01.2.23.2.24.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	576.120.481,00	518.130.372,00	(57.990.109,00)	89,93
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	244.456.310.296,20	216.351.605.081,00	(28.104.705.215,20)	88,50
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	36.095.008.934,20	31.271.062.999,00	(4.823.945.935,20)	86,64
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kelautan dan Perikanan	32.316.466.445,20	27.890.023.804,00	(4.426.442.641,20)	86,30
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	32.316.466.445,20	27.890.023.804,00	(4.426.442.641,20)	86,30
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	29.064.942.925,20	24.792.388.271,00	(4.272.554.654,20)	85,30
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	25.619.548.375,20	21.541.726.609,00	(4.077.821.766,20)	84,08
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.095.394.550,00	2.900.661.662,00	(194.732.888,00)	93,71
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	100,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.251.523.520,00	3.097.635.533,00	(153.887.987,00)	95,27
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	996.523.520,00	971.330.000,00	(25.193.520,00)	97,47
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.255.000.000,00	2.126.305.533,00	(128.694.467,00)	94,29
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001		UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	1.438.061.254,00	1.350.222.534,00	(87.838.720,00)	93,89
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	1.438.061.254,00	1.350.222.534,00	(87.838.720,00)	93,89
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.399.507.054,00	1.315.722.534,00	(83.784.520,00)	94,01
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.399.507.054,00	1.315.722.534,00	(83.784.520,00)	94,01
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	38.554.200,00	34.500.000,00	(4.054.200,00)	89,48
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.554.200,00	34.500.000,00	(4.054.200,00)	89,48
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002		UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	1.157.605.758,00	1.011.561.742,00	(146.044.016,00)	87,38
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	1.157.605.758,00	1.011.561.742,00	(146.044.016,00)	87,38
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.020.273.678,00	892.564.153,00	(127.709.525,00)	87,48
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.273.678,00	892.564.153,00	(127.709.525,00)	87,48
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	137.332.080,00	118.997.589,00	(18.334.491,00)	86,65

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.332.080,00	118.997.589,00	(18.334.491,00)	86,65
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0003		UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali	899.566.752,00	770.083.729,00	(129.483.023,00)	85,61
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	899.566.752,00	770.083.729,00	(129.483.023,00)	85,61
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	899.566.752,00	770.083.729,00	(129.483.023,00)	85,61
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	899.566.752,00	770.083.729,00	(129.483.023,00)	85,61
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004		UPTD Pelabuhan Perikanan	283.308.725,00	249.171.190,00	(34.137.535,00)	87,95
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	283.308.725,00	249.171.190,00	(34.137.535,00)	87,95
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	262.863.525,00	230.421.190,00	(32.442.335,00)	87,66
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.863.525,00	230.421.190,00	(32.442.335,00)	87,66
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	20.445.200,00	18.750.000,00	(1.695.200,00)	91,71
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.445.200,00	18.750.000,00	(1.695.200,00)	91,71
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	31.605.924.583,00	20.370.258.023,00	(11.235.666.560,00)	64,45
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata	31.605.924.583,00	20.370.258.023,00	(11.235.666.560,00)	64,45
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	31.605.924.583,00	20.370.258.023,00	(11.235.666.560,00)	64,45
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	30.881.670.695,00	19.674.873.895,00	(11.206.796.800,00)	63,71
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	12.549.424.810,00	11.058.473.246,00	(1.490.951.564,00)	88,12
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.332.245.885,00	8.616.400.649,00	(9.715.845.236,00)	47,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	724.253.888,00	695.384.128,00	(28.869.760,00)	96,01
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	564.253.888,00	535.810.750,00	(28.443.138,00)	94,96
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	160.000.000,00	159.573.378,00	(426.622,00)	99,73
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	106.576.529.099,00	99.721.755.396,00	(6.854.773.703,00)	93,57
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	98.029.179.296,00	91.932.840.409,00	(6.096.338.887,00)	93,78
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	98.029.179.296,00	91.932.840.409,00	(6.096.338.887,00)	93,78
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	97.870.023.096,00	91.794.700.909,00	(6.075.322.187,00)	93,79
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	51.553.930.982,00	49.277.233.011,00	(2.276.697.971,00)	95,58
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.723.092.114,00	20.924.467.898,00	(3.798.624.216,00)	84,64
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.1.04	Belanja Subsidi	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	11.593.000.000,00	11.593.000.000,00	0,00	100,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	159.156.200,00	138.139.500,00	(21.016.700,00)	86,79
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	159.156.200,00	138.139.500,00	(21.016.700,00)	86,79
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0009		UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	364.550.840,00	334.263.290,00	(30.287.550,00)	91,69
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0009	5	BELANJA DAERAH	364.550.840,00	334.263.290,00	(30.287.550,00)	91,69
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	364.550.840,00	334.263.290,00	(30.287.550,00)	91,69
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.550.840,00	334.263.290,00	(30.287.550,00)	91,69
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0012		UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.988.513.777,00	1.811.554.857,00	(176.958.920,00)	91,10
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0012	5	BELANJA DAERAH	1.988.513.777,00	1.811.554.857,00	(176.958.920,00)	91,10
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	1.988.513.777,00	1.811.554.857,00	(176.958.920,00)	91,10

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.988.513.777,00	1.811.554.857,00	(176.958.920,00)	91,10
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0013		UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	2.908.218.025,00	2.591.168.272,00	(317.049.753,00)	89,10
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0013	5	BELANJA DAERAH	2.908.218.025,00	2.591.168.272,00	(317.049.753,00)	89,10
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	2.908.218.025,00	2.591.168.272,00	(317.049.753,00)	89,10
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.908.218.025,00	2.591.168.272,00	(317.049.753,00)	89,10
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0014		UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	836.234.367,00	724.204.184,00	(112.030.183,00)	86,60
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0014	5	BELANJA DAERAH	836.234.367,00	724.204.184,00	(112.030.183,00)	86,60
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	836.234.367,00	724.204.184,00	(112.030.183,00)	86,60
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	836.234.367,00	724.204.184,00	(112.030.183,00)	86,60
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0015		UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2.449.832.794,00	2.327.724.384,00	(122.108.410,00)	95,02
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0015	5	BELANJA DAERAH	2.449.832.794,00	2.327.724.384,00	(122.108.410,00)	95,02
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	2.449.832.794,00	2.327.724.384,00	(122.108.410,00)	95,02
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.449.832.794,00	2.327.724.384,00	(122.108.410,00)	95,02
3.28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	44.619.832.805,00	41.301.879.031,00	(3.317.953.774,00)	92,56
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	41.185.117.345,00	38.220.154.424,00	(2.964.962.921,00)	92,80
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	41.185.117.345,00	38.220.154.424,00	(2.964.962.921,00)	92,80
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	40.870.675.033,00	37.973.154.424,00	(2.897.520.609,00)	92,91
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	38.018.717.214,00	35.619.479.225,00	(2.399.237.989,00)	93,69
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.851.957.819,00	2.353.675.199,00	(498.282.620,00)	82,53
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	314.442.312,00	247.000.000,00	(67.442.312,00)	78,55
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	314.442.312,00	247.000.000,00	(67.442.312,00)	78,55
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0001		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	708.446.804,00	690.825.054,00	(17.621.750,00)	97,51
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	708.446.804,00	690.825.054,00	(17.621.750,00)	97,51
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	708.446.804,00	690.825.054,00	(17.621.750,00)	97,51
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	708.446.804,00	690.825.054,00	(17.621.750,00)	97,51
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0002		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	680.499.259,00	639.698.867,00	(40.800.392,00)	94,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	680.499.259,00	639.698.867,00	(40.800.392,00)	94,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	548.684.259,00	508.543.366,00	(40.140.893,00)	92,68
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	548.684.259,00	508.543.366,00	(40.140.893,00)	92,68
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	131.815.000,00	131.155.501,00	(659.499,00)	99,50
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	131.815.000,00	131.155.501,00	(659.499,00)	99,50
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0003		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	368.983.094,00	355.794.567,00	(13.188.527,00)	96,43
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	368.983.094,00	355.794.567,00	(13.188.527,00)	96,43
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	368.983.094,00	355.794.567,00	(13.188.527,00)	96,43
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.983.094,00	355.794.567,00	(13.188.527,00)	96,43
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0004		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	341.539.476,00	322.806.007,00	(18.733.469,00)	94,51
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	341.539.476,00	322.806.007,00	(18.733.469,00)	94,51

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	341.539.476,00	322.806.007,00	(18.733.469,00)	94,51
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.539.476,00	322.806.007,00	(18.733.469,00)	94,51
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0005		UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	1.335.246.827,00	1.069.609.917,00	(265.636.910,00)	80,11
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	1.335.246.827,00	1.069.609.917,00	(265.636.910,00)	80,11
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.335.246.827,00	1.069.609.917,00	(265.636.910,00)	80,11
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.335.246.827,00	1.069.609.917,00	(265.636.910,00)	80,11
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0006		UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	2.990.195,00	2.990.195,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0006	5	BELANJA DAERAH	0,00	2.990.195,00	2.990.195,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	2.990.195,00	2.990.195,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.990.195,00	2.990.195,00	0,00
3.29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	76.085.500,00	51.779.671,00	(24.305.829,00)	68,05
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000		Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	76.085.500,00	51.779.671,00	(24.305.829,00)	68,05
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	5	BELANJA DAERAH	76.085.500,00	51.779.671,00	(24.305.829,00)	68,05
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	76.085.500,00	51.779.671,00	(24.305.829,00)	68,05
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.085.500,00	51.779.671,00	(24.305.829,00)	68,05
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	19.376.085.557,00	17.794.358.745,00	(1.581.726.812,00)	91,84
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.790.699.056,00	17.266.009.582,00	(1.524.689.474,00)	91,89
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	18.790.699.056,00	17.266.009.582,00	(1.524.689.474,00)	91,89
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	18.344.389.856,00	16.868.760.082,00	(1.475.629.774,00)	91,96
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	14.524.042.945,00	13.622.608.126,00	(901.434.819,00)	93,79
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.364.346.911,00	2.790.151.956,00	(574.194.955,00)	82,93
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	5.1.05	Belanja Hibah	456.000.000,00	456.000.000,00	0,00	100,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	446.309.200,00	397.249.500,00	(49.059.700,00)	89,01
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	446.309.200,00	397.249.500,00	(49.059.700,00)	89,01
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0002		UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	585.386.501,00	528.349.163,00	(57.037.338,00)	90,26
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0002	5	BELANJA DAERAH	585.386.501,00	528.349.163,00	(57.037.338,00)	90,26
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	525.714.341,00	469.789.163,00	(55.925.178,00)	89,36
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	525.714.341,00	469.789.163,00	(55.925.178,00)	89,36
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	59.672.160,00	58.560.000,00	(1.112.160,00)	98,14
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.672.160,00	58.560.000,00	(1.112.160,00)	98,14
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	6.081.959.018,00	5.817.007.349,00	(264.951.669,00)	95,64
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.685.549.661,00	4.447.653.885,00	(237.895.776,00)	94,92
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	4.685.549.661,00	4.447.653.885,00	(237.895.776,00)	94,92
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.685.549.661,00	4.447.653.885,00	(237.895.776,00)	94,92
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.635.549.661,00	4.447.653.885,00	(187.895.776,00)	95,95
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0001		UPTD Rumah Kreatif	1.396.409.357,00	1.369.353.464,00	(27.055.893,00)	98,06

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0001	5	BELANJA DAERAH	1.396.409.357,00	1.369.353.464,00	(27.055.893,00)	98,06
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	985.159.597,00	959.630.264,00	(25.529.333,00)	97,41
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	985.159.597,00	959.630.264,00	(25.529.333,00)	97,41
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	411.249.760,00	409.723.200,00	(1.526.560,00)	99,63
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	411.249.760,00	409.723.200,00	(1.526.560,00)	99,63
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	24.884.800,00	23.503.867,00	(1.380.933,00)	94,45
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000		Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	24.884.800,00	23.503.867,00	(1.380.933,00)	94,45
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000	5	BELANJA DAERAH	24.884.800,00	23.503.867,00	(1.380.933,00)	94,45
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	24.884.800,00	23.503.867,00	(1.380.933,00)	94,45
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.884.800,00	23.503.867,00	(1.380.933,00)	94,45
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	609.900.735.686,00	443.288.401.324,00	(166.612.334.362,00)	72,68
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	317.370.561.909,00	257.841.020.279,00	(59.529.541.630,00)	81,24
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000		Sekretariat Daerah	79.617.296.271,00	71.656.368.529,00	(7.960.927.742,00)	90,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	5	BELANJA DAERAH	79.617.296.271,00	71.656.368.529,00	(7.960.927.742,00)	90,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	79.617.296.271,00	71.656.368.529,00	(7.960.927.742,00)	90,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	79.308.896.271,00	71.506.118.529,00	(7.802.777.742,00)	90,16
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.400.000,00	150.250.000,00	(158.150.000,00)	48,72
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001		Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	71.690.793.885,00	55.683.136.952,00	(16.007.656.933,00)	77,67
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	5	BELANJA DAERAH	71.690.793.885,00	55.683.136.952,00	(16.007.656.933,00)	77,67
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	71.298.613.565,00	55.350.769.652,00	(15.947.843.913,00)	77,63
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.055.863.565,00	12.101.710.984,00	(12.954.152.581,00)	48,30
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	46.242.750.000,00	43.249.058.668,00	(2.993.691.332,00)	93,53
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	392.180.320,00	332.367.300,00	(59.813.020,00)	84,75
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	392.180.320,00	332.367.300,00	(59.813.020,00)	84,75
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003		Biro Umum dan Protokol	114.868.169.522,00	87.087.021.128,00	(27.781.148.394,00)	75,81
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	5	BELANJA DAERAH	114.868.169.522,00	87.087.021.128,00	(27.781.148.394,00)	75,81
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	110.137.804.443,00	83.527.500.448,00	(26.610.303.995,00)	75,84
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	6.317.806.694,00	6.315.000.000,00	(2.806.694,00)	99,96
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.819.997.749,00	77.212.500.448,00	(26.607.497.301,00)	74,37
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	4.730.365.079,00	3.559.520.680,00	(1.170.844.399,00)	75,25
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.937.194.826,00	3.118.245.056,00	(818.949.770,00)	79,20
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	288.913.801,00	284.210.624,00	(4.703.177,00)	98,37
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	504.256.452,00	157.065.000,00	(347.191.452,00)	31,15
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004		Biro Hukum	5.872.138.462,00	4.120.642.520,00	(1.751.495.942,00)	70,17
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	5.872.138.462,00	4.120.642.520,00	(1.751.495.942,00)	70,17
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.197.481.142,00	3.538.030.653,00	(1.659.450.489,00)	68,07
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.197.481.142,00	3.538.030.653,00	(1.659.450.489,00)	68,07

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	674.657.320,00	582.611.867,00	(92.045.453,00)	86,36
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	674.657.320,00	582.611.867,00	(92.045.453,00)	86,36
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0005		Biro Organisasi	2.408.511.471,00	2.066.032.272,00	(342.479.199,00)	85,78
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0005	5	BELANJA DAERAH	2.408.511.471,00	2.066.032.272,00	(342.479.199,00)	85,78
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.975.996.152,00	1.687.355.330,00	(288.640.822,00)	85,39
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.975.996.152,00	1.687.355.330,00	(288.640.822,00)	85,39
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	432.515.319,00	378.676.942,00	(53.838.377,00)	87,55
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	432.515.319,00	378.676.942,00	(53.838.377,00)	87,55
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007		Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	35.803.618.998,00	32.222.221.999,00	(3.581.396.999,00)	90,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	5	BELANJA DAERAH	35.803.618.998,00	32.222.221.999,00	(3.581.396.999,00)	90,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.122.077.993,00	2.270.109.009,00	(851.968.984,00)	72,71
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.122.077.993,00	2.270.109.009,00	(851.968.984,00)	72,71
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	32.681.541.005,00	29.952.112.990,00	(2.729.428.015,00)	91,65
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.681.541.005,00	29.952.112.990,00	(2.729.428.015,00)	91,65
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0008		Biro Humas dan Protokol	7.110.033.300,00	5.005.596.879,00	(2.104.436.421,00)	70,40
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0008	5	BELANJA DAERAH	7.110.033.300,00	5.005.596.879,00	(2.104.436.421,00)	70,40
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	7.110.033.300,00	5.005.596.879,00	(2.104.436.421,00)	70,40
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.110.033.300,00	5.005.596.879,00	(2.104.436.421,00)	70,40
4.02			SEKRETARIAT DPRD	292.530.173.777,00	185.447.381.045,00	(107.082.792.732,00)	63,39
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat DPRD	292.530.173.777,00	185.447.381.045,00	(107.082.792.732,00)	63,39
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	292.530.173.777,00	185.447.381.045,00	(107.082.792.732,00)	63,39
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	253.963.069.629,00	154.624.501.796,00	(99.338.567.833,00)	60,88
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	74.349.784.611,00	69.683.444.936,00	(4.666.339.675,00)	93,72
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.613.285.018,00	84.941.056.860,00	(94.672.228.158,00)	47,29
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	38.567.104.148,00	30.822.879.249,00	(7.744.224.899,00)	79,92
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.265.738.236,00	11.814.529.577,00	(3.451.208.659,00)	77,39
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.301.365.912,00	19.008.349.672,00	(4.293.016.240,00)	81,58
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.730.639.132.703,00	1.557.639.746.449,10	(172.999.386.253,90)	90,00
5.01			PERENCANAAN	25.908.334.842,00	21.337.890.034,52	(4.570.444.807,48)	82,36
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25.908.334.842,00	21.337.890.034,52	(4.570.444.807,48)	82,36
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	25.908.334.842,00	21.337.890.034,52	(4.570.444.807,48)	82,36
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	22.778.497.637,00	20.061.098.977,52	(2.717.398.659,48)	88,07
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	15.251.820.418,00	14.280.671.060,00	(971.149.358,00)	93,63
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.526.677.219,00	5.780.427.917,52	(1.746.249.301,48)	76,80
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.129.837.205,00	1.276.791.057,00	(1.853.046.148,00)	40,79
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.146.239.040,00	971.637.242,00	(174.601.798,00)	84,77
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.926.598.165,00	268.701.415,00	(1.657.896.750,00)	13,95

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	57.000.000,00	36.452.400,00	(20.547.600,00)	63,95
5.02			KEUANGAN	1.605.271.382.984,00	1.448.431.278.460,36	(156.840.104.523,64)	90,23
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.434.385.621.361,00	1.289.731.870.726,80	(144.653.750.634,20)	89,92
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	1.434.385.621.361,00	1.289.731.870.726,80	(144.653.750.634,20)	89,92
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	33.624.662.237,00	26.850.294.526,47	(6.774.367.710,53)	79,85
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	21.428.130.146,00	17.489.430.153,00	(3.938.699.993,00)	81,62
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.196.532.091,00	9.360.864.373,47	(2.835.667.717,53)	76,75
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.734.345.860,00	2.466.777.097,00	(267.568.763,00)	90,21
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.694.345.860,00	2.428.144.692,00	(266.201.168,00)	90,12
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40.000.000,00	38.632.405,00	(1.367.595,00)	96,58
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	53.861.777.244,00	14.075.388.800,30	(39.786.388.443,70)	26,13
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	53.861.777.244,00	14.075.388.800,30	(39.786.388.443,70)	26,13
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.4	BELANJA TRANSFER	1.344.164.836.020,00	1.246.339.410.303,03	(97.825.425.716,97)	92,72
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.018.848.956.716,00	965.738.976.448,00	(53.109.980.268,00)	94,79
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	325.315.879.304,00	280.600.433.855,03	(44.715.445.448,97)	86,25
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001		UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.400.024.044,00	2.439.491.306,65	(960.532.737,35)	71,75
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5	BELANJA DAERAH	3.400.024.044,00	2.439.491.306,65	(960.532.737,35)	71,75
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.400.024.044,00	2.439.491.306,65	(960.532.737,35)	71,75
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.024.044,00	2.439.491.306,65	(960.532.737,35)	71,75
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000		Badan Pendapatan Daerah	142.936.417.472,00	133.833.325.797,51	(9.103.091.674,49)	93,63
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	142.936.417.472,00	133.833.325.797,51	(9.103.091.674,49)	93,63
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	132.191.801.329,00	125.809.462.108,21	(6.382.339.220,79)	95,17
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	125.104.927.196,00	120.590.790.262,00	(4.514.136.934,00)	96,39
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.086.874.133,00	5.218.671.846,21	(1.868.202.286,79)	73,64
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	10.744.616.143,00	8.023.863.689,30	(2.720.752.453,70)	74,68
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.436.932.029,00	2.930.265.033,00	(506.666.996,00)	85,26
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.262.935.114,00	5.051.564.116,94	(2.211.370.997,06)	69,55
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.749.000,00	42.034.539,36	(2.714.460,64)	93,93
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng	4.001.267.704,00	3.761.608.046,00	(239.659.658,00)	94,01
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5	BELANJA DAERAH	4.001.267.704,00	3.761.608.046,00	(239.659.658,00)	94,01
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.001.267.704,00	3.761.608.046,00	(239.659.658,00)	94,01
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.001.267.704,00	3.761.608.046,00	(239.659.658,00)	94,01
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana	1.907.274.153,00	1.645.921.358,00	(261.352.795,00)	86,30
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	5	BELANJA DAERAH	1.907.274.153,00	1.645.921.358,00	(261.352.795,00)	86,30
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.907.274.153,00	1.645.921.358,00	(261.352.795,00)	86,30
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.907.274.153,00	1.645.921.358,00	(261.352.795,00)	86,30
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan	2.048.052.169,00	1.900.950.972,00	(147.101.197,00)	92,82

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	5	BELANJA DAERAH	2.048.052.169,00	1.900.950.972,00	(147.101.197,00)	92,82
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.048.052.169,00	1.900.950.972,00	(147.101.197,00)	92,82
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.048.052.169,00	1.900.950.972,00	(147.101.197,00)	92,82
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung	3.547.988.881,00	3.303.725.395,00	(244.263.486,00)	93,12
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	5	BELANJA DAERAH	3.547.988.881,00	3.303.725.395,00	(244.263.486,00)	93,12
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.547.988.881,00	3.303.725.395,00	(244.263.486,00)	93,12
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.547.988.881,00	3.303.725.395,00	(244.263.486,00)	93,12
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar	4.724.906.077,00	4.309.397.693,08	(415.508.383,92)	91,21
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5	BELANJA DAERAH	4.724.906.077,00	4.309.397.693,08	(415.508.383,92)	91,21
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.724.906.077,00	4.309.397.693,08	(415.508.383,92)	91,21
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.724.906.077,00	4.309.397.693,08	(415.508.383,92)	91,21
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar	2.684.865.828,00	2.477.886.502,18	(206.979.325,82)	92,29
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006	5	BELANJA DAERAH	2.684.865.828,00	2.477.886.502,18	(206.979.325,82)	92,29
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.684.865.828,00	2.477.886.502,18	(206.979.325,82)	92,29
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.684.865.828,00	2.477.886.502,18	(206.979.325,82)	92,29
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli	1.822.952.970,00	1.592.469.574,00	(230.483.396,00)	87,36
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007	5	BELANJA DAERAH	1.822.952.970,00	1.592.469.574,00	(230.483.396,00)	87,36
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.822.952.970,00	1.592.469.574,00	(230.483.396,00)	87,36
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.822.952.970,00	1.592.469.574,00	(230.483.396,00)	87,36
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung	1.988.585.947,00	1.783.991.991,00	(204.593.956,00)	89,71
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008	5	BELANJA DAERAH	1.988.585.947,00	1.783.991.991,00	(204.593.956,00)	89,71
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.988.585.947,00	1.783.991.991,00	(204.593.956,00)	89,71
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.988.585.947,00	1.783.991.991,00	(204.593.956,00)	89,71
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem	1.823.426.378,00	1.650.639.098,14	(172.787.279,86)	90,52
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009	5	BELANJA DAERAH	1.823.426.378,00	1.650.639.098,14	(172.787.279,86)	90,52
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.823.426.378,00	1.650.639.098,14	(172.787.279,86)	90,52
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.823.426.378,00	1.650.639.098,14	(172.787.279,86)	90,52
5.03			KEPEGAWAIAN	60.321.528.772,00	53.881.894.165,22	(6.439.634.606,78)	89,32
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	36.753.757.450,00	34.036.342.647,22	(2.717.414.802,78)	92,61
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	36.753.757.450,00	34.036.342.647,22	(2.717.414.802,78)	92,61
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	36.178.124.450,00	33.540.400.047,22	(2.637.724.402,78)	92,71
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	29.316.361.161,00	27.245.776.880,00	(2.070.584.281,00)	92,94
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.861.763.289,00	6.294.623.167,22	(567.140.121,78)	91,73
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	575.633.000,00	495.942.600,00	(79.690.400,00)	86,16
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	575.633.000,00	495.942.600,00	(79.690.400,00)	86,16
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0001		UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	1.867.771.322,00	1.696.243.378,00	(171.527.944,00)	90,82
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0001	5	BELANJA DAERAH	1.867.771.322,00	1.696.243.378,00	(171.527.944,00)	90,82

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.842.221.322,00	1.676.993.378,00	(165.227.944,00)	91,03
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.842.221.322,00	1.676.993.378,00	(165.227.944,00)	91,03
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	25.550.000,00	19.250.000,00	(6.300.000,00)	75,34
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.550.000,00	19.250.000,00	(6.300.000,00)	75,34
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0002		UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	21.700.000.000,00	18.149.308.140,00	(3.550.691.860,00)	83,64
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0002	5	BELANJA DAERAH	21.700.000.000,00	18.149.308.140,00	(3.550.691.860,00)	83,64
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.642.800.000,00	16.932.326.650,00	(1.710.473.350,00)	90,83
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.642.800.000,00	16.932.326.650,00	(1.710.473.350,00)	90,83
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	3.057.200.000,00	1.216.981.490,00	(1.840.218.510,00)	39,81
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.057.200.000,00	748.349.999,00	(1.308.850.001,00)	36,38
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.000.000,00	468.631.491,00	(531.368.509,00)	46,86
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.232.466.689,00	988.115.399,00	(244.351.290,00)	80,17
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.232.466.689,00	988.115.399,00	(244.351.290,00)	80,17
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	1.232.466.689,00	988.115.399,00	(244.351.290,00)	80,17
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.232.466.689,00	988.115.399,00	(244.351.290,00)	80,17
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.232.466.689,00	988.115.399,00	(244.351.290,00)	80,17
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	26.887.596.102,00	23.375.100.232,00	(3.512.495.870,00)	86,94
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000		Badan Riset dan Inovasi Daerah	26.887.596.102,00	23.375.100.232,00	(3.512.495.870,00)	86,94
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	26.887.596.102,00	23.375.100.232,00	(3.512.495.870,00)	86,94
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	24.972.788.562,00	21.915.113.824,00	(3.057.674.738,00)	87,76
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	10.698.167.860,00	9.950.233.372,00	(747.934.488,00)	93,01
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.274.620.702,00	11.964.880.452,00	(2.309.740.250,00)	83,82
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.914.807.540,00	1.459.986.408,00	(454.821.132,00)	76,25
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.677.862.540,00	1.224.062.373,00	(453.800.167,00)	72,95
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	236.945.000,00	235.924.035,00	(1.020.965,00)	99,57
5.07			PENGELOLAAN PENGHUBUNG	11.017.823.314,00	9.625.468.158,00	(1.392.355.156,00)	87,36
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000		Badan Penghubung	11.017.823.314,00	9.625.468.158,00	(1.392.355.156,00)	87,36
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	11.017.823.314,00	9.625.468.158,00	(1.392.355.156,00)	87,36
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.144.407.649,00	9.108.593.661,00	(1.035.813.988,00)	89,79
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.109.813.101,00	2.767.866.905,00	(341.946.196,00)	89,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.034.594.548,00	6.340.726.756,00	(693.867.792,00)	90,14
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	873.415.665,00	516.874.497,00	(356.541.168,00)	59,18
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	653.236.665,00	516.874.497,00	(136.362.168,00)	79,13
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	220.179.000,00	0,00	(220.179.000,00)	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	35.944.174.832,00	34.015.253.758,00	(1.928.921.074,00)	94,63
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	35.944.174.832,00	34.015.253.758,00	(1.928.921.074,00)	94,63
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		Inspektorat	35.944.174.832,00	34.015.253.758,00	(1.928.921.074,00)	94,63

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	35.944.174.832,00	34.015.253.758,00	(1.928.921.074,00)	94,63
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	34.051.151.092,00	32.256.665.618,00	(1.794.485.474,00)	94,73
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	25.989.250.471,00	24.972.876.259,00	(1.016.374.212,00)	96,09
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.061.900.621,00	7.283.789.359,00	(778.111.262,00)	90,35
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.893.023.740,00	1.758.588.140,00	(134.435.600,00)	92,90
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.681.023.740,00	1.553.971.181,00	(127.052.559,00)	92,44
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	212.000.000,00	204.616.959,00	(7.383.041,00)	96,52
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	47.248.225.245,00	44.977.304.875,38	(2.270.920.369,62)	95,19
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	47.248.225.245,00	44.977.304.875,38	(2.270.920.369,62)	95,19
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	47.248.225.245,00	44.977.304.875,38	(2.270.920.369,62)	95,19
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	47.248.225.245,00	44.977.304.875,38	(2.270.920.369,62)	95,19
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	46.314.918.705,00	44.126.425.079,38	(2.188.493.625,62)	95,27
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	9.014.553.924,00	8.260.669.413,00	(753.884.511,00)	91,64
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.324.159.781,00	7.889.550.666,38	(1.434.609.114,62)	84,61
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	27.976.205.000,00	27.976.205.000,00	0,00	100,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	933.306.540,00	850.879.796,00	(82.426.744,00)	91,17
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	933.306.540,00	850.879.796,00	(82.426.744,00)	91,17
			Jumlah	**752.346.252.673,60**	**493.662.877.720,02**	**(258.683.374.953,58)**	**65,62**

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN I.2
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAHAN PROVINSI BALI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**6.660.624.025.310,00**	**7.048.315.869.271,64**	**105,82**	**7.824.598.583.907,83**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**4.216.263.422.941,00**	**4.628.083.379.382,63**	**109,76**	**5.535.429.679.670,83**
4.1.01	Pajak Daerah	2.767.839.352.516,00	2.865.836.401.524,00	103,54	4.520.332.643.486,00
4.1.02	Retribusi Daerah	439.467.617.614,00	909.595.917.119,52	206,97	338.039.879.379,28
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	253.603.839.112,00	253.603.839.116,43	100,00	197.369.947.623,03
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	755.352.613.699,00	599.047.221.622,68	79,30	479.687.209.182,52
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**4.216.263.422.941,00**	**4.628.083.379.382,63**	**109,76**	**5.535.429.679.670,83**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.438.603.330.369,00**	**2.414.142.690.695,00**	**98,99**	**2.283.418.060.237,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.403.777.640.000,00	2.379.317.000.326,00	98,98	2.283.418.060.237,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**2.390.799.054.000,00**	**2.366.338.414.326,00**	**98,97**	**2.260.260.706.237,00**
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**12.978.586.000,00**	**12.978.586.000,00**	**100,00**	**23.157.354.000,00**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.825.690.369,00	34.825.690.369,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**34.825.690.369,00**	**34.825.690.369,00**	**100,00**	**0,00**
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**2.438.603.330.369,00**	**2.414.142.690.695,00**	**98,99**	**2.283.418.060.237,00**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.757.272.000,00**	**6.089.799.194,01**	**105,77**	**5.750.844.000,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.757.272.000,00	6.089.799.194,01	105,77	5.750.844.000,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**5.757.272.000,00**	**6.089.799.194,01**	**105,77**	**5.750.844.000,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**6.660.624.025.310,00**	**7.048.315.869.271,64**	**105,82**	**7.824.598.583.907,83**
5	**BELANJA DAERAH**	**7.412.970.277.983,60**	**6.554.652.991.551,62**	**88,42**	**7.293.051.849.998,07**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**5.053.188.410.600,60**	**4.520.551.159.698,76**	**89,45**	**4.461.088.682.470,66**
5.1.01	Belanja Pegawai	2.526.874.277.345,60	2.304.413.342.308,00	91,19	2.088.693.065.509,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.562.731.648.119,00	1.272.505.827.668,79	81,42	1.200.096.660.415,66
5.1.04	Belanja Subsidi	10.009.000.000,00	10.009.000.000,00	100,00	2.525.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	953.461.885.136,00	933.511.389.721,97	97,90	1.169.523.956.546,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	111.600.000,00	111.600.000,00	100,00	250.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**5.053.188.410.600,60**	**4.520.551.159.698,76**	**89,45**	**4.461.088.682.470,66**
5.2	**BELANJA MODAL**	**961.755.254.119,00**	**773.687.032.749,53**	**80,44**	**667.689.607.145,41**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	31.063.325.760,00	1.181.948.000,00	3,80	3.464.184.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	283.723.278.083,00	259.183.049.267,80	91,35	130.063.180.613,50
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	321.617.256.729,00	240.493.997.597,02	74,77	407.489.294.374,22
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	290.219.969.754,00	240.687.598.599,81	82,93	94.451.449.090,69
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	34.418.774.193,00	31.596.980.320,00	91,80	31.382.599.067,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	712.649.600,00	543.458.964,90	76,25	838.900.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**961.755.254.119,00**	**773.687.032.749,53**	**80,44**	**667.689.607.145,41**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**53.861.777.244,00**	**14.075.388.800,30**	**26,13**	**7.441.134.041,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	53.861.777.244,00	14.075.388.800,30	26,13	7.441.134.041,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**53.861.777.244,00**	**14.075.388.800,30**	**26,13**	**7.441.134.041,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**1.344.164.836.020,00**	**1.246.339.410.303,03**	**92,72**	**2.156.832.426.341,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.018.848.956.716,00	965.738.976.448,00	94,78	1.800.971.992.343,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	325.315.879.304,00	280.600.433.855,03	86,25	355.860.433.998,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**1.344.164.836.020,00**	**1.246.339.410.303,03**	**92,72**	**2.156.832.426.341,00**
	JUMLAH BELANJA	**7.412.970.277.983,60**	**6.554.652.991.551,62**	**88,42**	**7.293.051.849.998,07**
	SURPLUS/DEFISIT	**(752.346.252.673,60)**	**493.662.877.720,02**	**(65,61)**	**531.546.733.909,76**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**752.346.252.673,60**	**219.211.188.702,62**	**29,13**	**92.185.725.293,56**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**1.153.811.060.761,60**	**620.675.986.790,62**	**53,79**	**342.650.523.381,56**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	623.732.459.203,32	620.675.986.790,62	99,50	171.480.190.581,56
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	171.170.332.800,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	530.078.601.558,28	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**1.153.811.060.761,60**	**620.675.986.790,62**	**53,79**	**342.650.523.381,56**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**401.464.808.088,00**	**401.464.798.088,00**	**99,99**	**250.464.798.088,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	158.000.000.000,00	158.000.000.000,00	100,00	7.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	243.464.808.088,00	243.464.798.088,00	99,99	243.464.798.088,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	401.464.808.088,00	401.464.798.088,00	99,99	250.464.798.088,00
	PEMBIAYAAN NETTO	752.346.252.673,60	219.211.188.702,62	29,13	92.185.725.293,56
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	712.874.066.422,64	0,00	623.732.459.203,32

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI BALI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.01.2.19.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.502.000.000,00	3.219.031.137,00	717.031.137,00	128,65	
	1.01.2.19.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.502.000.000,00	3.219.031.137,00	717.031.137,00	128,65	
	1.01.2.19.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	2.500.000.000,00	3.207.849.551,00	707.849.551,00	128,31	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah; c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali; dan d.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	1.01.2.19.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.000.000,00	11.181.586,00	9.181.586,00	559,07	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
				JUMLAH PENDAPATAN	2.502.000.000,00	3.219.031.137,00	717.031.137,00	128,65	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.933.617.545.947,00	1.777.415.518.705,08	(156.202.027.241,92)	91,92	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.308.530.958.086,00	1.176.181.391.671,00	-132.349.566.415,00	89,88	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	185.200.900,00	110.553.877,00	-74.647.023,00	59,69	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	77.429.500,00	50.693.815,00	-26.735.685,00	65,47	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	77.429.500,00	50.693.815,00	-26.735.685,00	65,47	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.429.500,00	50.693.815,00	-26.735.685,00	65,47	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	107.771.400,00	59.860.062,00	-47.911.338,00	55,54	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	107.771.400,00	59.860.062,00	-47.911.338,00	55,54	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.771.400,00	59.860.062,00	-47.911.338,00	55,54	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.293.262.292.519,00	1.163.004.750.540,00	-130.257.541.979,00	89,92	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.291.832.286.219,00	1.161.616.450.017,00	-130.215.836.202,00	89,92	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.291.832.286.219,00	1.161.616.450.017,00	-130.215.836.202,00	89,92	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.291.832.286.219,00	1.161.616.450.017,00	-130.215.836.202,00	89,92	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	1.284.575.800,00	1.255.478.500,00	-29.097.300,00	97,73	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.284.575.800,00	1.255.478.500,00	-29.097.300,00	97,73	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.284.575.800,00	1.255.478.500,00	-29.097.300,00	97,73	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0004		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	145.430.500,00	132.822.023,00	-12.608.477,00	91,33	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	145.430.500,00	132.822.023,00	-12.608.477,00	91,33	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.430.500,00	132.822.023,00	-12.608.477,00	91,33	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	766.145.000,00	734.137.300,00	-32.007.700,00	95,82	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.03.0004		PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	766.145.000,00	734.137.300,00	-32.007.700,00	95,82	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	766.145.000,00	734.137.300,00	-32.007.700,00	95,82	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	766.145.000,00	734.137.300,00	-32.007.700,00	95,82	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	68.193.400,00	67.066.092,00	-1.127.308,00	98,34	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0004		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	68.193.400,00	67.066.092,00	-1.127.308,00	98,34	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	68.193.400,00	67.066.092,00	-1.127.308,00	98,34	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.193.400,00	67.066.092,00	-1.127.308,00	98,34	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.331.687.010,00	1.116.471.656,00	-215.215.354,00	83,83	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	755.916.560,00	673.273.496,00	-82.643.064,00	89,06	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	240.659.060,00	200.308.896,00	-40.350.164,00	83,23	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.659.060,00	200.308.896,00	-40.350.164,00	83,23	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	515.257.500,00	472.964.600,00	-42.292.900,00	91,79	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	515.257.500,00	472.964.600,00	-42.292.900,00	91,79	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	103.613.000,00	95.520.400,00	-8.092.600,00	92,18	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	103.613.000,00	95.520.400,00	-8.092.600,00	92,18	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.613.000,00	95.520.400,00	-8.092.600,00	92,18	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	20.887.200,00	15.681.582,00	-5.205.618,00	75,07	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	20.887.200,00	15.681.582,00	-5.205.618,00	75,07	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.887.200,00	15.681.582,00	-5.205.618,00	75,07	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	31.526.250,00	26.352.000,00	-5.174.250,00	83,58	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	31.526.250,00	26.352.000,00	-5.174.250,00	83,58	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.526.250,00	26.352.000,00	-5.174.250,00	83,58	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	419.744.000,00	305.644.178,00	-114.099.822,00	72,81	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	419.744.000,00	305.644.178,00	-114.099.822,00	72,81	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	419.744.000,00	305.644.178,00	-114.099.822,00	72,81	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.517.974.257,00	7.986.655.525,00	-1.531.318.732,00	83,91	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	978.222.150,00	807.419.687,00	-170.802.463,00	82,53	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	978.222.150,00	807.419.687,00	-170.802.463,00	82,53	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	978.222.150,00	807.419.687,00	-170.802.463,00	82,53	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	8.539.752.107,00	7.179.235.838,00	-1.360.516.269,00	84,06	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	8.539.752.107,00	7.179.235.838,00	-1.360.516.269,00	84,06	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.539.752.107,00	7.179.235.838,00	-1.360.516.269,00	84,06	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.399.465.000,00	3.161.756.681,00	-237.708.319,00	93,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	1.143.895.000,00	956.899.500,00	-186.995.500,00	83,65	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.143.895.000,00	956.899.500,00	-186.995.500,00	83,65	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.143.895.000,00	956.899.500,00	-186.995.500,00	83,65	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	1.440.000,00	1.350.000,00	-90.000,00	93,75	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.440.000,00	1.350.000,00	-90.000,00	93,75	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	1.350.000,00	-90.000,00	93,75	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	8.400.000,00	7.875.000,00	-525.000,00	93,75	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.400.000,00	7.875.000,00	-525.000,00	93,75	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	7.875.000,00	-525.000,00	93,75	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1.977.200.000,00	1.928.174.269,00	-49.025.731,00	97,52	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.677.200.000,00	1.653.140.421,00	-24.059.579,00	98,56	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.677.200.000,00	1.653.140.421,00	-24.059.579,00	98,56	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	300.000.000,00	275.033.848,00	-24.966.152,00	91,67	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	275.033.848,00	-24.966.152,00	91,67	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	268.530.000,00	267.457.912,00	-1.072.088,00	99,60	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	268.530.000,00	267.457.912,00	-1.072.088,00	99,60	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.530.000,00	267.457.912,00	-1.072.088,00	99,60	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	624.864.830.661,00	601.044.597.182,08	-23.820.233.478,92	96,18	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	294.201.199.474,00	281.298.984.005,00	-12.902.215.469,00	95,61	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0001		PEMBANGUNAN USB (UNIT SEKOLAH BARU)	68.000.000.000,00	66.250.897.900,00	-1.749.102.100,00	97,42	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	68.000.000.000,00	66.250.897.900,00	-1.749.102.100,00	97,42	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.000.000.000,00	66.250.897.900,00	-1.749.102.100,00	97,42	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0012		PEMBANGUNAN RUANG SERBA GUNA/AULA	3.000.000.000,00	2.887.436.700,00	-112.563.300,00	96,24	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0012	5.2	BELANJA MODAL	3.000.000.000,00	2.887.436.700,00	-112.563.300,00	96,24	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0012	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.000.000.000,00	2.887.436.700,00	-112.563.300,00	96,24	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0036		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	1.980.000.000,00	1.910.480.000,00	-69.520.000,00	96,48	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0036	5.2	BELANJA MODAL	1.980.000.000,00	1.910.480.000,00	-69.520.000,00	96,48	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0036	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.980.000.000,00	1.910.480.000,00	-69.520.000,00	96,48	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0041		PENGADAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK	382.366.000,00	381.824.003,00	-541.997,00	99,85	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0041	5.2	BELANJA MODAL	382.366.000,00	381.824.003,00	-541.997,00	99,85	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0041	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	382.366.000,00	381.824.003,00	-541.997,00	99,85	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0045		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH ATAS	4.704.150.000,00	4.424.232.449,00	-279.917.551,00	94,04	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0045	5.1	BELANJA OPERASI	4.704.150.000,00	4.424.232.449,00	-279.917.551,00	94,04	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0045	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.704.150.000,00	4.424.232.449,00	-279.917.551,00	94,04	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0049		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	2.768.028.800,00	2.240.371.572,00	-527.657.228,00	80,93	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0049	5.1	BELANJA OPERASI	2.768.028.800,00	2.240.371.572,00	-527.657.228,00	80,93	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0049	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.768.028.800,00	2.240.371.572,00	-527.657.228,00	80,93	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0050		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	27.034.056.126,00	26.859.488.373,00	-174.567.753,00	99,35	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0050	5.1	BELANJA OPERASI	27.034.056.126,00	26.859.488.373,00	-174.567.753,00	99,35	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.034.056.126,00	26.859.488.373,00	-174.567.753,00	99,35	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0051		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	77.120.000,00	73.643.740,00	-3.476.260,00	95,49	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0051	5.1	BELANJA OPERASI	77.120.000,00	73.643.740,00	-3.476.260,00	95,49	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.120.000,00	73.643.740,00	-3.476.260,00	95,49	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0052		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH MENENGAH ATAS	125.380.000,00	113.656.250,00	-11.723.750,00	90,64	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0052	5.1	BELANJA OPERASI	125.380.000,00	113.656.250,00	-11.723.750,00	90,64	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0052	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.380.000,00	113.656.250,00	-11.723.750,00	90,64	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH ATAS	165.426.169.948,00	159.858.431.038,00	-5.567.738.910,00	96,63	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053	5.1	BELANJA OPERASI	125.192.921.247,00	120.352.352.988,00	-4.840.568.259,00	96,13	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.268.721.247,00	98.231.985.619,00	-4.036.735.628,00	96,05	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053	5.1.05	Belanja Hibah	22.924.200.000,00	22.120.367.369,00	-803.832.631,00	96,49	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053	5.2	BELANJA MODAL	40.233.248.701,00	39.506.078.050,00	-727.170.651,00	98,19	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.723.850.114,00	21.600.769.379,00	-123.080.735,00	99,43	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.509.398.587,00	17.905.308.671,00	-604.089.916,00	96,73	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0054		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH ATAS	57.409.900,00	54.025.333,00	-3.384.567,00	94,10	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0054	5.1	BELANJA OPERASI	57.409.900,00	54.025.333,00	-3.384.567,00	94,10	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0054	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.409.900,00	54.025.333,00	-3.384.567,00	94,10	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0057		PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDIDIKAN	94.290.000,00	93.472.000,00	-818.000,00	99,13	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0057	5.1	BELANJA OPERASI	94.290.000,00	93.472.000,00	-818.000,00	99,13	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0057	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.290.000,00	93.472.000,00	-818.000,00	99,13	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0058		PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN	14.040.000,00	13.968.000,00	-72.000,00	99,48	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0058	5.1	BELANJA OPERASI	14.040.000,00	13.968.000,00	-72.000,00	99,48	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0058	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.040.000,00	13.968.000,00	-72.000,00	99,48	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0059		PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN	31.636.000,00	28.665.286,00	-2.970.714,00	90,60	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0059	5.1	BELANJA OPERASI	31.636.000,00	28.665.286,00	-2.970.714,00	90,60	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0059	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.636.000,00	28.665.286,00	-2.970.714,00	90,60	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0060		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	76.299.900,00	68.166.750,00	-8.133.150,00	89,34	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0060	5.1	BELANJA OPERASI	76.299.900,00	68.166.750,00	-8.133.150,00	89,34	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0060	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.299.900,00	68.166.750,00	-8.133.150,00	89,34	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0061		SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN	44.690.000,00	41.927.850,00	-2.762.150,00	93,81	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0061	5.1	BELANJA OPERASI	44.690.000,00	41.927.850,00	-2.762.150,00	93,81	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0061	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.690.000,00	41.927.850,00	-2.762.150,00	93,81	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0072		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	8.871.116.400,00	8.533.684.208,00	-337.432.192,00	96,19	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0072	5.2	BELANJA MODAL	8.871.116.400,00	8.533.684.208,00	-337.432.192,00	96,19	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0072	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.871.116.400,00	8.533.684.208,00	-337.432.192,00	96,19	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0075		BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN	86.942.800,00	80.216.000,00	-6.726.800,00	92,26	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0075	5.1	BELANJA OPERASI	86.942.800,00	80.216.000,00	-6.726.800,00	92,26	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0075	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.942.800,00	80.216.000,00	-6.726.800,00	92,26	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0078		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	11.427.503.600,00	7.384.396.553,00	-4.043.107.047,00	64,61	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0078	5.1	BELANJA OPERASI	8.711.994.800,00	5.013.170.153,00	-3.698.824.647,00	57,54	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0078	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.711.994.800,00	5.013.170.153,00	-3.698.824.647,00	57,54	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0078	5.2	BELANJA MODAL	2.715.508.800,00	2.371.226.400,00	-344.282.400,00	87,32	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0078	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.715.508.800,00	2.371.226.400,00	-344.282.400,00	87,32	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	306.029.659.844,00	296.867.675.897,58	-9.161.983.946,42	97,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0001		PEMBANGUNAN USB (UNIT SEKOLAH BARU)	22.612.384.000,00	21.545.770.400,00	-1.066.613.600,00	95,28	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	22.612.384.000,00	21.545.770.400,00	-1.066.613.600,00	95,28	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.612.384.000,00	21.545.770.400,00	-1.066.613.600,00	95,28	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0010		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	11.150.616.000,00	10.642.894.000,00	-507.722.000,00	95,44	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0010	5.2	BELANJA MODAL	11.150.616.000,00	10.642.894.000,00	-507.722.000,00	95,44	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.150.616.000,00	10.642.894.000,00	-507.722.000,00	95,44	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0028		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	3.914.925.900,00	3.630.371.550,00	-284.554.350,00	92,73	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0028	5.1	BELANJA OPERASI	7.022.700,00	7.020.000,00	-2.700,00	99,96	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.022.700,00	7.020.000,00	-2.700,00	99,96	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0028	5.2	BELANJA MODAL	3.907.903.200,00	3.623.351.550,00	-284.551.650,00	92,71	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0028	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.907.903.200,00	3.623.351.550,00	-284.551.650,00	92,71	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0033		PENGADAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK	47.370.185.000,00	47.227.767.258,58	-142.417.741,42	99,69	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	21.712.000.000,00	21.701.643.273,58	-10.356.726,42	99,95	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.712.000.000,00	21.701.643.273,58	-10.356.726,42	99,95	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	25.658.185.000,00	25.526.123.985,00	-132.061.015,00	99,48	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.658.185.000,00	25.526.123.985,00	-132.061.015,00	99,48	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0037		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	5.633.745.400,00	5.374.220.085,00	-259.525.315,00	95,39	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0037	5.1	BELANJA OPERASI	5.338.581.400,00	5.082.462.135,00	-256.119.265,00	95,20	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0037	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.338.581.400,00	5.082.462.135,00	-256.119.265,00	95,20	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0037	5.2	BELANJA MODAL	295.164.000,00	291.757.950,00	-3.406.050,00	98,84	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0037	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	295.164.000,00	291.757.950,00	-3.406.050,00	98,84	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0041		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	1.718.208.400,00	1.667.194.202,00	-51.014.198,00	97,03	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	1.718.208.400,00	1.667.194.202,00	-51.014.198,00	97,03	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.718.208.400,00	1.667.194.202,00	-51.014.198,00	97,03	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0042		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	16.854.550.194,00	14.554.422.576,00	-2.300.127.618,00	86,35	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	16.854.550.194,00	14.554.422.576,00	-2.300.127.618,00	86,35	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.854.550.194,00	14.554.422.576,00	-2.300.127.618,00	86,35	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0043		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	88.862.000,00	59.915.980,00	-28.946.020,00	67,42	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0043	5.1	BELANJA OPERASI	88.862.000,00	59.915.980,00	-28.946.020,00	67,42	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.862.000,00	59.915.980,00	-28.946.020,00	67,42	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0045		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	460.992.000,00	440.815.690,00	-20.176.310,00	95,62	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0045	5.1	BELANJA OPERASI	460.992.000,00	440.815.690,00	-20.176.310,00	95,62	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0045	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.992.000,00	440.815.690,00	-20.176.310,00	95,62	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	182.279.551.870,00	179.478.859.744,00	-2.800.692.126,00	98,46	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	150.140.469.730,00	147.572.810.197,00	-2.567.659.533,00	98,28	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.446.089.730,00	73.280.149.442,00	-2.165.940.288,00	97,12	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046	5.1.05	Belanja Hibah	74.694.380.000,00	74.292.660.755,00	-401.719.245,00	99,46	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046	5.2	BELANJA MODAL	32.139.082.140,00	31.906.049.547,00	-233.032.593,00	99,27	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.700.121.909,00	19.547.475.047,00	-152.646.862,00	99,22	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.438.960.231,00	12.358.574.500,00	-80.385.731,00	99,35	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0047		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	51.250.000,00	49.596.800,00	-1.653.200,00	96,77	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0047	5.1	BELANJA OPERASI	51.250.000,00	49.596.800,00	-1.653.200,00	96,77	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.250.000,00	49.596.800,00	-1.653.200,00	96,77	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0050		PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDIDIKAN	77.760.000,00	77.142.000,00	-618.000,00	99,20	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0050	5.1	BELANJA OPERASI	77.760.000,00	77.142.000,00	-618.000,00	99,20	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.760.000,00	77.142.000,00	-618.000,00	99,20	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0051		PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN	13.950.000,00	11.680.000,00	-2.270.000,00	83,72	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0051	5.1	BELANJA OPERASI	13.950.000,00	11.680.000,00	-2.270.000,00	83,72	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.950.000,00	11.680.000,00	-2.270.000,00	83,72	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0052		PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN	31.374.000,00	30.870.286,00	-503.714,00	98,39	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0052	5.1	BELANJA OPERASI	31.374.000,00	30.870.286,00	-503.714,00	98,39	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0052	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.374.000,00	30.870.286,00	-503.714,00	98,39	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0053		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	37.600.000,00	34.193.690,00	-3.406.310,00	90,94	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0053	5.1	BELANJA OPERASI	37.600.000,00	34.193.690,00	-3.406.310,00	90,94	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0053	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.600.000,00	34.193.690,00	-3.406.310,00	90,94	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0054		SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN	68.960.000,00	65.710.860,00	-3.249.140,00	95,28	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0054	5.1	BELANJA OPERASI	68.960.000,00	65.710.860,00	-3.249.140,00	95,28	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0054	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.960.000,00	65.710.860,00	-3.249.140,00	95,28	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0069		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	4.012.000.000,00	3.944.381.000,00	-67.619.000,00	98,31	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0069	5.2	BELANJA MODAL	4.012.000.000,00	3.944.381.000,00	-67.619.000,00	98,31	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0069	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.012.000.000,00	3.944.381.000,00	-67.619.000,00	98,31	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0072		PENYELENGARAAN PROSES BELAJAR PESERTA DIDIK	9.566.170.880,00	7.952.041.776,00	-1.614.129.104,00	83,12	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0072	5.1	BELANJA OPERASI	2.544.072.560,00	2.318.303.376,00	-225.769.184,00	91,12	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0072	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.544.072.560,00	2.318.303.376,00	-225.769.184,00	91,12	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0072	5.2	BELANJA MODAL	7.022.098.320,00	5.633.738.400,00	-1.388.359.920,00	80,22	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0072	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.022.098.320,00	5.633.738.400,00	-1.388.359.920,00	80,22	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0073		BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN	86.574.200,00	79.828.000,00	-6.746.200,00	92,20	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0073	5.1	BELANJA OPERASI	86.574.200,00	79.828.000,00	-6.746.200,00	92,20	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0073	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.574.200,00	79.828.000,00	-6.746.200,00	92,20	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03		PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS	24.633.971.343,00	22.877.937.279,50	-1.756.034.063,50	92,87	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0008		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	1.880.000.000,00	1.751.895.534,72	-128.104.465,28	93,18	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0008	5.2	BELANJA MODAL	1.880.000.000,00	1.751.895.534,72	-128.104.465,28	93,18	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0008	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.880.000.000,00	1.751.895.534,72	-128.104.465,28	93,18	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0044		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK PENDIDIKAN KHUSUS	3.523.966.200,00	3.346.270.232,00	-177.695.968,00	94,95	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0044	5.1	BELANJA OPERASI	3.523.966.200,00	3.346.270.232,00	-177.695.968,00	94,95	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.523.966.200,00	3.346.270.232,00	-177.695.968,00	94,95	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0048		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	1.322.189.000,00	766.274.153,00	-555.914.847,00	57,95	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0048	5.1	BELANJA OPERASI	1.322.189.000,00	766.274.153,00	-555.914.847,00	57,95	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0048	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.322.189.000,00	766.274.153,00	-555.914.847,00	57,95	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0049		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS	3.487.687.843,00	3.174.730.130,00	-312.957.713,00	91,02	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0049	5.1	BELANJA OPERASI	3.487.687.843,00	3.174.730.130,00	-312.957.713,00	91,02	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0049	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.487.687.843,00	3.174.730.130,00	-312.957.713,00	91,02	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0051		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH PENDIDIKAN KHUSUS	752.324.300,00	679.704.762,00	-72.619.538,00	90,34	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0051	5.1	BELANJA OPERASI	157.959.500,00	130.387.962,00	-27.571.538,00	82,54	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.959.500,00	130.387.962,00	-27.571.538,00	82,54	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0051	5.2	BELANJA MODAL	594.364.800,00	549.316.800,00	-45.048.000,00	92,42	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0051	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	594.364.800,00	549.316.800,00	-45.048.000,00	92,42	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH PENDIDIKAN KHUSUS	11.264.294.800,00	10.904.652.062,00	-359.642.738,00	96,80	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052	5.1	BELANJA OPERASI	8.734.723.025,00	8.525.047.562,00	-209.675.463,00	97,59	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.925.003.025,00	7.727.996.027,00	-197.006.998,00	97,51	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052	5.1.05	Belanja Hibah	809.720.000,00	797.051.535,00	-12.668.465,00	98,43	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052	5.2	BELANJA MODAL	2.529.571.775,00	2.379.604.500,00	-149.967.275,00	94,07	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.464.156.400,00	1.431.987.500,00	-32.168.900,00	97,80	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.065.415.375,00	947.617.000,00	-117.798.375,00	88,94	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0053		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH PENDIDIKAN KHUSUS	15.547.600,00	15.025.850,00	-521.750,00	96,64	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0053	5.1	BELANJA OPERASI	15.547.600,00	15.025.850,00	-521.750,00	96,64	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0053	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.547.600,00	15.025.850,00	-521.750,00	96,64	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0059		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	90.910.000,00	80.278.760,00	-10.631.240,00	88,30	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0059	5.1	BELANJA OPERASI	90.910.000,00	80.278.760,00	-10.631.240,00	88,30	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0059	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.910.000,00	80.278.760,00	-10.631.240,00	88,30	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0060		SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN	16.171.600,00	15.382.020,00	-789.580,00	95,11	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0060	5.1	BELANJA OPERASI	16.171.600,00	15.382.020,00	-789.580,00	95,11	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0060	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.171.600,00	15.382.020,00	-789.580,00	95,11	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0069		REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	1.918.000.000,00	1.799.264.297,78	-118.735.702,22	93,80	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0069	5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	586.912.000,00	-13.088.000,00	97,81	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0069	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	586.912.000,00	-13.088.000,00	97,81	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0069	5.2	BELANJA MODAL	1.318.000.000,00	1.212.352.297,78	-105.647.702,22	91,98	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0069	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.318.000.000,00	1.212.352.297,78	-105.647.702,22	91,98	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0071		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	362.880.000,00	344.459.478,00	-18.420.522,00	94,92	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0071	5.1	BELANJA OPERASI	362.880.000,00	344.459.478,00	-18.420.522,00	94,92	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0071	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.880.000,00	344.459.478,00	-18.420.522,00	94,92	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	102.298.100,00	95.798.952,00	-6.499.148,00	93,64	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.03.1.01		PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MENENGAH	67.654.800,00	65.283.616,00	-2.371.184,00	96,49	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.03.1.01.0004		PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MENENGAH	67.654.800,00	65.283.616,00	-2.371.184,00	96,49	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.03.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	67.654.800,00	65.283.616,00	-2.371.184,00	96,49	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.03.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.654.800,00	65.283.616,00	-2.371.184,00	96,49	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.03.1.02		PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN KHUSUS	34.643.300,00	30.515.336,00	-4.127.964,00	88,08	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.03.1.02.0004		PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN KHUSUS	34.643.300,00	30.515.336,00	-4.127.964,00	88,08	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.03.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	34.643.300,00	30.515.336,00	-4.127.964,00	88,08	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.03.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.643.300,00	30.515.336,00	-4.127.964,00	88,08	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	60.319.100,00	45.962.020,00	-14.357.080,00	76,19	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.04.1.01		PEMINDAHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) PROVINSI	60.319.100,00	45.962.020,00	-14.357.080,00	76,19	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.04.1.01.0001		PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS	26.079.400,00	23.321.600,00	-2.757.800,00	89,42	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.04.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.079.400,00	23.321.600,00	-2.757.800,00	89,42	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.04.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.079.400,00	23.321.600,00	-2.757.800,00	89,42	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.04.1.01.0002		PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS	34.239.700,00	22.640.420,00	-11.599.280,00	66,12	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.04.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.239.700,00	22.640.420,00	-11.599.280,00	66,12	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.04.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.239.700,00	22.640.420,00	-11.599.280,00	66,12	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.06		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	59.140.000,00	47.768.880,00	-11.371.120,00	80,77	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.06.1.01		PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA YANG PENUTURANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	59.140.000,00	47.768.880,00	-11.371.120,00	80,77	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.06.1.01.0006		PENINGKATAN APRESIASI SISWA TERHADAP BAHASA DAN SASTRA DAERAH KEWENANGAN PROVINSI	59.140.000,00	47.768.880,00	-11.371.120,00	80,77	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.06.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	59.140.000,00	47.768.880,00	-11.371.120,00	80,77	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.06.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.140.000,00	47.768.880,00	-11.371.120,00	80,77	
				JUMLAH BELANJA	1.933.617.545.947,00	1.777.415.518.705,08	(156.202.027.241,92)	91,92	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-1.931.115.545.947,00	(1.774.196.487.568,08)	156.919.058.378,92	91,87	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-1.931.115.545.947,00	(1.774.196.487.568,08)	156.919.058.378,92	91,87	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.01.2.19.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.502.000.000,00	3.219.031.137,00	717.031.137,00	128,65	
	1.01.2.19.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.502.000.000,00	3.219.031.137,00	717.031.137,00	128,65	
	1.01.2.19.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	2.500.000.000,00	3.207.849.551,00	707.849.551,00	128,31	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah; c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali; dan d.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	1.01.2.19.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.000.000,00	11.181.586,00	9.181.586,00	559,07	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
				JUMLAH PENDAPATAN	2.502.000.000,00	3.219.031.137,00	717.031.137,00	128,65	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	95.056.488.300,00	86.090.475.071,97	-8.966.013.228,03	90,56	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	10.986.468.200,00	3.984.301.480,00	-7.002.166.720,00	36,26	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.1.01		PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN KEWENANGAN PROVINSI	10.986.468.200,00	3.984.301.480,00	-7.002.166.720,00	36,26	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.1.01.0003		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	9.731.599.800,00	3.231.166.419,00	-6.500.433.381,00	33,20	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.731.599.800,00	3.231.166.419,00	-6.500.433.381,00	33,20	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.731.599.800,00	3.231.166.419,00	-6.500.433.381,00	33,20	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.1.01.0010		PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPEMUDAAN BAGI YANG BERPRESTASI DAN/ATAU BERJASA DALAM MEMAJUKAN POTENSI PEMUDA	36.390.000,00	4.126.701,00	-32.263.299,00	11,34	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	36.390.000,00	4.126.701,00	-32.263.299,00	11,34	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.390.000,00	4.126.701,00	-32.263.299,00	11,34	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.1.01.0011		PELAKSANAAN KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN MELALUI PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROVINSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN SERTA PENYUSUNAN DAN	148.051.900,00	36.380.960,00	-111.670.940,00	24,57	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.1.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	148.051.900,00	36.380.960,00	-111.670.940,00	24,57	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.1.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.051.900,00	36.380.960,00	-111.670.940,00	24,57	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.1.01.0012		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA TINGKAT PROVINSI	192.831.500,00	16.668.000,00	-176.163.500,00	8,64	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.1.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	192.831.500,00	16.668.000,00	-176.163.500,00	8,64	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.1.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.831.500,00	16.668.000,00	-176.163.500,00	8,64	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.1.01.0013		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEPELOPORAN PEMUDA BAGI PEMUDA PELOPOR TINGKAT PROVINSI	778.887.500,00	616.883.472,00	-162.004.028,00	79,20	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.1.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	778.887.500,00	616.883.472,00	-162.004.028,00	79,20	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.1.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	778.887.500,00	616.883.472,00	-162.004.028,00	79,20	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.1.01.0015		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA BAGI WIRAUSAHA MUDA TINGKAT PROVINSI	98.707.500,00	79.075.928,00	-19.631.572,00	80,11	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.1.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	98.707.500,00	79.075.928,00	-19.631.572,00	80,11	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.1.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.707.500,00	79.075.928,00	-19.631.572,00	80,11	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	82.570.020.100,00	80.678.022.542,97	-1.891.997.557,03	97,70	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.1.02		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA	21.493.180.100,00	19.705.533.344,00	-1.787.646.756,00	91,68	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.1.02.0004		KEIKUTSERTAAN ANGGOTA KONTINGEN PROVINSI DALAM PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA	14.310.452.700,00	13.184.702.273,00	-1.125.750.427,00	92,13	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	14.305.184.700,00	13.179.542.273,00	-1.125.642.427,00	92,13	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.305.184.700,00	13.179.542.273,00	-1.125.642.427,00	92,13	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.1.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	5.268.000,00	5.160.000,00	-108.000,00	97,94	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.1.02.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.268.000,00	5.160.000,00	-108.000,00	97,94	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.1.02.0006		PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT NASIONAL DAN PROVINSI	7.182.727.400,00	6.520.831.071,00	-661.896.329,00	90,78	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.120.620.900,00	6.459.031.071,00	-661.589.829,00	90,70	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.120.620.900,00	6.459.031.071,00	-661.589.829,00	90,70	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.1.02.0006	5.2	BELANJA MODAL	62.106.500,00	61.800.000,00	-306.500,00	99,50	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.1.02.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.106.500,00	61.800.000,00	-306.500,00	99,50	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.1.03		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT NASIONAL	316.840.000,00	301.025.000,00	-15.815.000,00	95,00	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.1.03.0008		PENYEDIAAN DATA KEOLAHRAGAAN TERPADU DI PROVINSI	316.840.000,00	301.025.000,00	-15.815.000,00	95,00	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.1.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	316.840.000,00	301.025.000,00	-15.815.000,00	95,00	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.1.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.840.000,00	301.025.000,00	-15.815.000,00	95,00	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.1.04		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA	60.760.000.000,00	60.671.464.198,97	-88.535.801,03	99,85	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.1.04.0003		PENINGKATAN KERJA SAMA ORGANISASI KEOLAHRAGAAN PROVINSI DENGAN LEMBAGA TERKAIT	60.760.000.000,00	60.671.464.198,97	-88.535.801,03	99,85	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.1.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	60.760.000.000,00	60.671.464.198,97	-88.535.801,03	99,85	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.1.04.0003	5.1.05	Belanja Hibah	60.760.000.000,00	60.671.464.198,97	-88.535.801,03	99,85	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.500.000.000,00	1.428.151.049,00	-71.848.951,00	95,21	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.04.1.01		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN	1.500.000.000,00	1.428.151.049,00	-71.848.951,00	95,21	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.04.1.01.0005		PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN PROVINSI	1.500.000.000,00	1.428.151.049,00	-71.848.951,00	95,21	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.04.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000.000,00	1.428.151.049,00	-71.848.951,00	95,21	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.04.1.01.0005	5.1.05	Belanja Hibah	1.500.000.000,00	1.428.151.049,00	-71.848.951,00	95,21	
				JUMLAH BELANJA	95.056.488.300,00	86.090.475.071,97	-8.966.013.228,03	90,56	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-92.554.488.300,00	-82.871.443.934,97	9.683.044.365,03	89,53	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-92.554.488.300,00	-82.871.443.934,97	9.683.044.365,03	89,53	

PEMERINTAH PROVINSI BALI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Dinas Kesehatan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	355.577.845.624,00	323.840.560.469,83	-31.737.285.154,17	91,07	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	355.577.845.624,00	323.508.033.275,82	-32.069.812.348,18	90,98	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	324.995.810.000,00	295.169.828.961,18	-29.825.981.038,82	90,82	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah; c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali; dan d.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	30.582.035.624,00	28.338.204.314,64	-2.243.831.309,36	92,66	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat; dan d.Peraturan Gubernur Bali Nomor 49 Tahun 2025 tentang Detail Rincian Objek Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara.
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	332.527.194,01	332.527.194,01	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	332.527.194,01	332.527.194,01	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	355.577.845.624,00	323.840.560.469,83	-31.737.285.154,17	91,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	824.305.230.667,00	738.426.340.010,96	-85.878.890.656,04	89,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI	707.587.657.322,00	635.703.171.109,56	-71.884.486.212,44	89,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	81.124.505,00	65.698.921,00	-15.425.584,00	80,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	51.666.800,00	36.366.216,00	-15.300.584,00	70,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	51.666.800,00	36.366.216,00	-15.300.584,00	70,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.666.800,00	36.366.216,00	-15.300.584,00	70,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	29.457.705,00	29.332.705,00	-125.000,00	99,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	29.457.705,00	29.332.705,00	-125.000,00	99,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.457.705,00	29.332.705,00	-125.000,00	99,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	289.547.046.672,00	272.567.252.323,00	-16.979.794.349,00	94,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	289.281.147.773,00	272.328.048.224,00	-16.953.099.549,00	94,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	289.281.147.773,00	272.328.048.224,00	-16.953.099.549,00	94,13	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	289.098.297.773,00	272.151.348.224,00	-16.946.949.549,00	94,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.850.000,00	176.700.000,00	-6.150.000,00	96,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	265.898.899,00	239.204.099,00	-26.694.800,00	89,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	265.898.899,00	239.204.099,00	-26.694.800,00	89,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.898.899,00	239.204.099,00	-26.694.800,00	89,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	6.298.074.158,00	4.908.732.746,00	-1.389.341.412,00	77,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	43.098.600,00	36.613.898,00	-6.484.702,00	84,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	43.098.600,00	36.613.898,00	-6.484.702,00	84,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.098.600,00	36.613.898,00	-6.484.702,00	84,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.332.554.264,00	3.376.541.138,00	-956.013.126,00	77,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	761.196.530,00	555.665.529,00	-205.531.001,00	72,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	761.196.530,00	555.665.529,00	-205.531.001,00	72,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	3.571.357.734,00	2.820.875.609,00	-750.482.125,00	78,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.494.708.134,00	2.796.155.909,00	-698.552.225,00	80,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	24.719.700,00	-35.280.300,00	41,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0002	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	16.649.600,00	0,00	-16.649.600,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	1.450.953.794,00	1.301.811.639,00	-149.142.155,00	89,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.450.953.794,00	1.301.811.639,00	-149.142.155,00	89,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.450.953.794,00	1.301.811.639,00	-149.142.155,00	89,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	119.726.500,00	87.700.851,00	-32.025.649,00	73,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	119.726.500,00	87.700.851,00	-32.025.649,00	73,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.726.500,00	87.700.851,00	-32.025.649,00	73,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	10.500.000,00	8.958.500,00	-1.541.500,00	85,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	8.958.500,00	-1.541.500,00	85,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	8.958.500,00	-1.541.500,00	85,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	341.241.000,00	97.106.720,00	-244.134.280,00	28,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	341.241.000,00	97.106.720,00	-244.134.280,00	28,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.241.000,00	97.106.720,00	-244.134.280,00	28,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.223.991.200,00	945.427.546,00	-278.563.654,00	77,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.07.0005		PENGADAAN MEBEL	273.991.200,00	166.647.544,00	-107.343.656,00	60,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	98.219.500,00	0,00	-98.219.500,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.219.500,00	0,00	-98.219.500,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	175.771.700,00	166.647.544,00	-9.124.156,00	94,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175.771.700,00	166.647.544,00	-9.124.156,00	94,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	950.000.000,00	778.780.002,00	-171.219.998,00	81,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.07.0009	5.2	BELANJA MODAL	950.000.000,00	778.780.002,00	-171.219.998,00	81,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.07.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	950.000.000,00	778.780.002,00	-171.219.998,00	81,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	48.062.062.623,00	43.890.437.085,00	-4.171.625.538,00	91,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.082.000,00	2.600.000,00	-2.482.000,00	51,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.082.000,00	2.600.000,00	-2.482.000,00	51,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.082.000,00	2.600.000,00	-2.482.000,00	51,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	3.810.010.402,00	2.450.936.634,00	-1.359.073.768,00	64,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.810.010.402,00	2.450.936.634,00	-1.359.073.768,00	64,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.810.010.402,00	2.450.936.634,00	-1.359.073.768,00	64,32	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	44.246.970.221,00	41.436.900.451,00	-2.810.069.770,00	93,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	44.246.970.221,00	41.436.900.451,00	-2.810.069.770,00	93,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.246.970.221,00	41.436.900.451,00	-2.810.069.770,00	93,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.310.472.540,00	5.136.361.126,01	-2.174.111.413,99	70,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	818.475.000,00	408.512.618,00	-409.962.382,00	49,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	818.475.000,00	408.512.618,00	-409.962.382,00	49,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	818.475.000,00	408.512.618,00	-409.962.382,00	49,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	322.900.000,00	215.047.507,00	-107.852.493,00	66,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	322.900.000,00	215.047.507,00	-107.852.493,00	66,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.900.000,00	215.047.507,00	-107.852.493,00	66,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	57.000.000,00	34.315.650,00	-22.684.350,00	60,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	57.000.000,00	34.315.650,00	-22.684.350,00	60,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	34.315.650,00	-22.684.350,00	60,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.054.390.600,00	662.572.040,00	-391.818.560,00	62,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.054.390.600,00	662.572.040,00	-391.818.560,00	62,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.054.390.600,00	662.572.040,00	-391.818.560,00	62,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	4.964.706.940,00	3.724.088.068,83	-1.240.618.871,17	75,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.649.702.000,00	1.814.572.331,43	-835.129.668,57	68,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.649.702.000,00	1.814.572.331,43	-835.129.668,57	68,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	2.315.004.940,00	1.909.515.737,40	-405.489.202,60	82,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.091.404.940,00	1.826.699.071,40	-264.705.868,60	87,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.09.0009	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	223.600.000,00	82.816.666,00	-140.783.334,00	37,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	93.000.000,00	91.825.242,18	-1.174.757,82	98,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	93.000.000,00	91.825.242,18	-1.174.757,82	98,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.000.000,00	91.825.242,18	-1.174.757,82	98,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	355.064.885.624,00	308.189.261.362,55	-46.875.624.261,45	86,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	355.064.885.624,00	308.189.261.362,55	-46.875.624.261,45	86,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	326.441.231.624,00	289.262.755.642,88	-37.178.475.981,12	88,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	132.742.331.593,00	118.370.540.445,00	-14.371.791.148,00	89,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.698.900.031,00	170.892.215.197,88	-22.806.684.833,12	88,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	28.623.654.000,00	18.926.505.719,67	-9.697.148.280,33	66,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.092.391.000,00	15.546.558.200,00	-4.545.832.800,00	77,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.10.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.635.263.000,00	2.765.397.108,67	-869.865.891,33	76,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.10.0001	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.300.000.000,00	182.628.411,00	-2.117.371.589,00	7,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.10.0001	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.060.000.000,00	42.000.000,00	-2.018.000.000,00	2,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.10.0001	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	536.000.000,00	389.922.000,00	-146.078.000,00	72,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	115.416.636.836,00	101.508.049.320,40	-13.908.587.515,60	87,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	81.353.041.887,00	73.960.880.726,40	-7.392.161.160,60	90,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.01.0007		PENGEMBANGAN UNIT PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN REGIONAL/REGIONAL MAINTAINANCE CENTER	139.008.800,00	139.008.800,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	139.008.800,00	139.008.800,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.008.800,00	139.008.800,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.01.0010		PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN	47.922.474.582,00	47.224.036.467,00	-698.438.115,00	98,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	831.470.482,00	352.880.971,00	-478.589.511,00	42,44	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	831.470.482,00	352.880.971,00	-478.589.511,00	42,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	47.091.004.100,00	46.871.155.496,00	-219.848.604,00	99,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.091.004.100,00	46.871.155.496,00	-219.848.604,00	99,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.01.0025		DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN KE FASILITAS KESEHATAN	360.783.000,00	179.684.000,00	-181.099.000,00	49,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	360.783.000,00	179.684.000,00	-181.099.000,00	49,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.783.000,00	179.684.000,00	-181.099.000,00	49,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.01.0026		PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT	24.937.187.875,00	23.029.156.958,00	-1.908.030.917,00	92,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	56.664.100,00	25.062.400,00	-31.601.700,00	44,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.664.100,00	25.062.400,00	-31.601.700,00	44,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.01.0026	5.2	BELANJA MODAL	24.880.523.775,00	23.004.094.558,00	-1.876.429.217,00	92,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.01.0026	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.025.000.000,00	1.018.425.000,00	-6.575.000,00	99,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.01.0026	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.578.149.570,00	13.892.816.425,00	-1.685.333.145,00	89,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.01.0026	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.277.374.205,00	8.092.853.133,00	-184.521.072,00	97,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.01.0027		PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	7.993.587.630,00	3.388.994.501,40	-4.604.593.128,60	42,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	7.993.587.630,00	3.388.994.501,40	-4.604.593.128,60	42,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.993.587.630,00	3.388.994.501,40	-4.604.593.128,60	42,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	33.793.627.324,00	27.296.055.241,00	-6.497.572.083,00	80,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA	186.176.380,00	165.773.290,00	-20.403.090,00	89,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	186.176.380,00	165.773.290,00	-20.403.090,00	89,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.176.380,00	165.773.290,00	-20.403.090,00	89,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)	70.891.400,00	69.766.400,00	-1.125.000,00	98,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	70.891.400,00	69.766.400,00	-1.125.000,00	98,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.891.400,00	69.766.400,00	-1.125.000,00	98,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0003		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	149.964.615,00	144.295.165,00	-5.669.450,00	96,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	149.964.615,00	144.295.165,00	-5.669.450,00	96,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.964.615,00	144.295.165,00	-5.669.450,00	96,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0004		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF	137.301.520,00	136.657.520,00	-644.000,00	99,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	137.301.520,00	136.657.520,00	-644.000,00	99,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.301.520,00	136.657.520,00	-644.000,00	99,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0006		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	204.191.520,00	198.944.732,00	-5.246.788,00	97,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	204.191.520,00	198.944.732,00	-5.246.788,00	97,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.191.520,00	198.944.732,00	-5.246.788,00	97,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	64.996.400,00	64.971.400,00	-25.000,00	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	64.996.400,00	64.971.400,00	-25.000,00	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.996.400,00	64.971.400,00	-25.000,00	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0008		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	90.493.200,00	90.027.200,00	-466.000,00	99,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	90.493.200,00	90.027.200,00	-466.000,00	99,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.493.200,00	90.027.200,00	-466.000,00	99,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0009		PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	98.034.105,00	93.757.745,00	-4.276.360,00	95,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	98.034.105,00	93.757.745,00	-4.276.360,00	95,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.034.105,00	93.757.745,00	-4.276.360,00	95,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISONAL, AKUPUNTUR, ASUHAN MANDIRI DAN TRADISIONAL LAINNYA	1.829.584.328,00	1.515.719.057,00	-313.865.271,00	82,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.800.723.128,00	1.500.083.357,00	-300.639.771,00	83,30	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.723.128,00	1.500.083.357,00	-300.639.771,00	83,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0010	5.2	BELANJA MODAL	28.861.200,00	15.635.700,00	-13.225.500,00	54,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.861.200,00	15.635.700,00	-13.225.500,00	54,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	2.268.289.953,00	1.823.510.943,00	-444.779.010,00	80,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	2.268.289.953,00	1.823.510.943,00	-444.779.010,00	80,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.545.954.817,00	1.385.687.331,00	-160.267.486,00	89,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0011	5.1.05	Belanja Hibah	722.335.136,00	437.823.612,00	-284.511.524,00	60,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0013		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	53.127.000,00	46.017.392,00	-7.109.608,00	86,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	53.127.000,00	46.017.392,00	-7.109.608,00	86,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.127.000,00	46.017.392,00	-7.109.608,00	86,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0016		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	24.657.838.700,00	19.572.140.150,00	-5.085.698.550,00	79,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	24.657.838.700,00	19.572.140.150,00	-5.085.698.550,00	79,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.657.838.700,00	19.572.140.150,00	-5.085.698.550,00	79,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0017		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	112.280.000,00	72.390.000,00	-39.890.000,00	64,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	112.280.000,00	72.390.000,00	-39.890.000,00	64,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.280.000,00	72.390.000,00	-39.890.000,00	64,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0019		PEMBINAAN PELAKSANAAN UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	399.741.520,00	383.270.971,00	-16.470.549,00	95,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0019	5.1	BELANJA OPERASI	399.741.520,00	383.270.971,00	-16.470.549,00	95,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.741.520,00	383.270.971,00	-16.470.549,00	95,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0021		INVESTIGASI LANJUTAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL OLEH KABUPATEN/KOTA	58.533.800,00	58.515.050,00	-18.750,00	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	58.533.800,00	58.515.050,00	-18.750,00	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.533.800,00	58.515.050,00	-18.750,00	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0023		PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENANGANAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT)	3.374.682.883,00	2.845.048.226,00	-529.634.657,00	84,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0023	5.1	BELANJA OPERASI	1.998.420.007,00	1.592.438.910,00	-405.981.097,00	79,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.998.420.007,00	1.592.438.910,00	-405.981.097,00	79,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0023	5.2	BELANJA MODAL	1.376.262.876,00	1.252.609.316,00	-123.653.560,00	91,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0023	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.376.262.876,00	1.252.609.316,00	-123.653.560,00	91,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0025		PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LAB RUJUKAN/NASIONAL	37.500.000,00	15.250.000,00	-22.250.000,00	40,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	37.500.000,00	15.250.000,00	-22.250.000,00	40,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	15.250.000,00	-22.250.000,00	40,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.03		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	73.251.405,00	66.817.703,00	-6.433.702,00	91,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.03.0002		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	73.251.405,00	66.817.703,00	-6.433.702,00	91,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	73.251.405,00	66.817.703,00	-6.433.702,00	91,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.251.405,00	66.817.703,00	-6.433.702,00	91,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.04		PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS B DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	196.716.220,00	184.295.650,00	-12.420.570,00	93,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.04.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PERIZINAN RUMAH SAKIT KELAS B DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	101.876.540,00	101.445.890,00	-430.650,00	99,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	101.876.540,00	101.445.890,00	-430.650,00	99,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.876.540,00	101.445.890,00	-430.650,00	99,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.04.0003		PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN	94.839.680,00	82.849.760,00	-11.989.920,00	87,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	94.839.680,00	82.849.760,00	-11.989.920,00	87,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.839.680,00	82.849.760,00	-11.989.920,00	87,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	510.202.629,00	471.380.570,00	-38.822.059,00	92,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.1.01		PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP PROVINSI	156.328.860,00	151.698.960,00	-4.629.900,00	97,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.1.01.0001		PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	156.328.860,00	151.698.960,00	-4.629.900,00	97,03	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	156.328.860,00	151.698.960,00	-4.629.900,00	97,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.328.860,00	151.698.960,00	-4.629.900,00	97,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.1.02		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	353.873.769,00	319.681.610,00	-34.192.159,00	90,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.1.02.0001		PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	309.559.869,00	279.230.110,00	-30.329.759,00	90,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	309.559.869,00	279.230.110,00	-30.329.759,00	90,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.559.869,00	279.230.110,00	-30.329.759,00	90,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.1.02.0002		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	44.313.900,00	40.451.500,00	-3.862.400,00	91,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	44.313.900,00	40.451.500,00	-3.862.400,00	91,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.313.900,00	40.451.500,00	-3.862.400,00	91,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	233.749.065,00	233.599.065,00	-150.000,00	99,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.1.01		PENERBITAN PENGAKUAN PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) CABANG DAN CABANG PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK)	168.145.865,00	167.995.865,00	-150.000,00	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.1.01.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENERBITAN PENGAKUAN PBF CABANG DAN CABANG PAK	168.145.865,00	167.995.865,00	-150.000,00	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	168.145.865,00	167.995.865,00	-150.000,00	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.145.865,00	167.995.865,00	-150.000,00	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.1.02		PENERBITAN IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL (UKOT)	65.603.200,00	65.603.200,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.1.02.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENERBITAN IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL	65.603.200,00	65.603.200,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	65.603.200,00	65.603.200,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.603.200,00	65.603.200,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	556.984.815,00	510.139.946,00	-46.844.869,00	91,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.1.01		ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH PROVINSI	308.484.615,00	303.870.259,00	-4.614.356,00	98,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.1.01.0001		PENINGKATAN UPAYA ADVOKASI KESEHATAN, PEMBERDAYAAN, PENGGALANGAN KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH PROVINSI	308.484.615,00	303.870.259,00	-4.614.356,00	98,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	308.484.615,00	303.870.259,00	-4.614.356,00	98,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.484.615,00	303.870.259,00	-4.614.356,00	98,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.1.02		PELAKSANAAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH PROVINSI	227.375.200,00	185.446.890,00	-41.928.310,00	81,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.1.02.0001		PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT	227.375.200,00	185.446.890,00	-41.928.310,00	81,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	227.375.200,00	185.446.890,00	-41.928.310,00	81,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.375.200,00	185.446.890,00	-41.928.310,00	81,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.1.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH PROVINSI	21.125.000,00	20.822.797,00	-302.203,00	98,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.1.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI UKBM	21.125.000,00	20.822.797,00	-302.203,00	98,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.125.000,00	20.822.797,00	-302.203,00	98,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.125.000,00	20.822.797,00	-302.203,00	98,56	
				JUMLAH BELANJA	824.305.230.667,00	738.426.340.010,96	-85.878.890.656,04	89,58	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-468.727.385.043,00	(414.585.779.541,13)	54.141.605.501,87	88,44	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-468.727.385.043,00	(414.585.779.541,13)	54.141.605.501,87	88,44	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.1.04.2.10.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	58.782.832.000,00	53.499.957.998,35	-5.282.874.001,65	91,01	
	1.03.1.04.2.10.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58.782.832.000,00	53.499.957.998,35	-5.282.874.001,65	91,01	
	1.03.1.04.2.10.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	18.522.832.000,00	20.440.625.000,00	1.917.793.000,00	110,35	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah; c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali; dan d.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	1.03.1.04.2.10.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	40.260.000.000,00	33.059.332.998,35	-7.200.667.001,65	82,11	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
				JUMLAH PENDAPATAN	58.782.832.000,00	53.499.957.998,35	-5.282.874.001,65	91,01	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000		5	BELANJA DAERAH	628.054.997.990,00	560.089.093.023,00	-67.965.904.967,00	89,17	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	47.759.467.401,00	43.338.435.834,00	-4.421.031.567,00	90,74	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	451.394.144,00	349.706.194,00	-101.687.950,00	77,47	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.01.0001		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	242.784.732,00	206.610.882,00	-36.173.850,00	85,10	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	242.784.732,00	206.610.882,00	-36.173.850,00	85,10	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.784.732,00	206.610.882,00	-36.173.850,00	85,10	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	208.609.412,00	143.095.312,00	-65.514.100,00	68,59	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	208.609.412,00	143.095.312,00	-65.514.100,00	68,59	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.609.412,00	143.095.312,00	-65.514.100,00	68,59	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	41.433.492.915,00	38.128.273.143,00	-3.305.219.772,00	92,02	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	41.433.492.915,00	38.128.273.143,00	-3.305.219.772,00	92,02	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	41.433.492.915,00	38.128.273.143,00	-3.305.219.772,00	92,02	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	41.161.692.915,00	37.965.073.143,00	-3.196.619.772,00	92,23	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.800.000,00	163.200.000,00	-108.600.000,00	60,04	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.222.397.620,00	525.461.746,00	-696.935.874,00	42,98	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	33.954.600,00	29.152.000,00	-4.802.600,00	85,85	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	33.954.600,00	29.152.000,00	-4.802.600,00	85,85	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.954.600,00	29.152.000,00	-4.802.600,00	85,85	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	78.415.200,00	57.487.000,00	-20.928.200,00	73,31	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	78.415.200,00	57.487.000,00	-20.928.200,00	73,31	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.415.200,00	57.487.000,00	-20.928.200,00	73,31	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	83.320.120,00	81.762.000,00	-1.558.120,00	98,12	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	83.320.120,00	81.762.000,00	-1.558.120,00	98,12	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.320.120,00	81.762.000,00	-1.558.120,00	98,12	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	71.372.700,00	51.237.550,00	-20.135.150,00	71,78	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	71.372.700,00	51.237.550,00	-20.135.150,00	71,78	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.372.700,00	51.237.550,00	-20.135.150,00	71,78	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	20.262.000,00	18.584.000,00	-1.678.000,00	91,71	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.262.000,00	18.584.000,00	-1.678.000,00	91,71	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.262.000,00	18.584.000,00	-1.678.000,00	91,71	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	65.750.000,00	58.011.000,00	-7.739.000,00	88,22	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	65.750.000,00	58.011.000,00	-7.739.000,00	88,22	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.750.000,00	58.011.000,00	-7.739.000,00	88,22	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	869.323.000,00	229.228.196,00	-640.094.804,00	26,36	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	869.323.000,00	229.228.196,00	-640.094.804,00	26,36	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	869.323.000,00	229.228.196,00	-640.094.804,00	26,36	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	659.136.800,00	554.859.100,00	-104.277.700,00	84,17	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.07.0005		PENGADAAN MEBEL	149.278.800,00	105.006.000,00	-44.272.800,00	70,34	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	149.278.800,00	105.006.000,00	-44.272.800,00	70,34	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	149.278.800,00	105.006.000,00	-44.272.800,00	70,34	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	509.858.000,00	449.853.100,00	-60.004.900,00	88,23	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.960.000,00	8.991.000,00	-3.969.000,00	69,37	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.960.000,00	8.991.000,00	-3.969.000,00	69,37	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	496.898.000,00	440.862.100,00	-56.035.900,00	88,72	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	496.898.000,00	440.862.100,00	-56.035.900,00	88,72	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.263.649.240,00	1.178.710.789,00	-84.938.451,00	93,27	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	8.383.800,00	5.340.000,00	-3.043.800,00	63,69	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.383.800,00	5.340.000,00	-3.043.800,00	63,69	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.383.800,00	5.340.000,00	-3.043.800,00	63,69	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	516.600.000,00	464.979.099,00	-51.620.901,00	90,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	516.600.000,00	464.979.099,00	-51.620.901,00	90,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	516.600.000,00	464.979.099,00	-51.620.901,00	90,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	49.770.000,00	49.201.860,00	-568.140,00	98,85	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	49.770.000,00	49.201.860,00	-568.140,00	98,85	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.770.000,00	49.201.860,00	-568.140,00	98,85	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	688.895.440,00	659.189.830,00	-29.705.610,00	95,68	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	688.895.440,00	659.189.830,00	-29.705.610,00	95,68	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	688.895.440,00	659.189.830,00	-29.705.610,00	95,68	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.729.396.682,00	2.601.424.862,00	-127.971.820,00	95,31	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.791.164.536,00	1.678.771.057,00	-112.393.479,00	93,72	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.791.164.536,00	1.678.771.057,00	-112.393.479,00	93,72	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.791.164.536,00	1.678.771.057,00	-112.393.479,00	93,72	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	167.823.115,00	158.737.115,00	-9.086.000,00	94,58	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	167.823.115,00	158.737.115,00	-9.086.000,00	94,58	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.823.115,00	158.737.115,00	-9.086.000,00	94,58	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	770.409.031,00	763.916.690,00	-6.492.341,00	99,15	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	770.409.031,00	763.916.690,00	-6.492.341,00	99,15	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	770.409.031,00	763.916.690,00	-6.492.341,00	99,15	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	26.954.443.379,00	24.170.406.373,00	-2.784.037.006,00	89,67	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.01		PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.600.071.220,00	10.677.173.510,00	-1.922.897.710,00	84,73	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.01.0082		OPERASI DAN PEMELIHARAAN BREAKWATER/SEAWALL DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI LAINNYA	216.563.500,00	209.303.050,00	-7.260.450,00	96,64	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.01.0082	5.1	BELANJA OPERASI	216.563.500,00	209.303.050,00	-7.260.450,00	96,64	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.01.0082	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.563.500,00	209.303.050,00	-7.260.450,00	96,64	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.01.0096		PEMBANGUNAN SEAWALL DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI LAINNYA	11.293.200.000,00	9.425.961.300,00	-1.867.238.700,00	83,46	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.01.0096	5.1	BELANJA OPERASI	23.200.000,00	22.369.300,00	-830.700,00	96,41	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.01.0096	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.200.000,00	22.369.300,00	-830.700,00	96,41	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.01.0096	5.2	BELANJA MODAL	11.270.000.000,00	9.403.592.000,00	-1.866.408.000,00	83,43	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.01.0096	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.270.000.000,00	9.403.592.000,00	-1.866.408.000,00	83,43	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.01.0105		OPERASI DAN PEMELIHARAAN EMBUNG DAN PENAMPUNG AIR LAINNYA	310.353.300,00	288.699.750,00	-21.653.550,00	93,02	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.01.0105	5.1	BELANJA OPERASI	295.353.300,00	288.699.750,00	-6.653.550,00	97,74	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.01.0105	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.353.300,00	288.699.750,00	-6.653.550,00	97,74	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.01.0105	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.01.0105	5.2.01	Belanja Modal Tanah	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.01.0121		PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI BENDUNGAN, EMBUNG, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA	209.216.200,00	208.203.836,00	-1.012.364,00	99,51	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.01.0121	5.1	BELANJA OPERASI	9.224.200,00	8.747.100,00	-477.100,00	94,82	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.01.0121	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.224.200,00	8.747.100,00	-477.100,00	94,82	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.01.0121	5.2	BELANJA MODAL	199.992.000,00	199.456.736,00	-535.264,00	99,73	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.01.0121	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.992.000,00	199.456.736,00	-535.264,00	99,73	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.01.0122		PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI PENGENDALI BANJIR, LAHAR, DAN PENGAMAN PANTAI	570.738.220,00	545.005.574,00	-25.732.646,00	95,49	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.01.0122	5.1	BELANJA OPERASI	19.389.800,00	18.483.000,00	-906.800,00	95,32	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.01.0122	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.389.800,00	18.483.000,00	-906.800,00	95,32	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.01.0122	5.2	BELANJA MODAL	551.348.420,00	526.522.574,00	-24.825.846,00	95,49	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.01.0122	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	551.348.420,00	526.522.574,00	-24.825.846,00	95,49	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.02		PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA 1000 HA-3000 HA DAN DAERAH IRIGASI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.354.372.159,00	13.493.232.863,00	-861.139.296,00	94,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.02.0014		REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	9.527.085.215,00	8.945.211.922,00	-581.873.293,00	93,89	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	115.642.315,00	92.630.965,00	-23.011.350,00	80,10	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.642.315,00	92.630.965,00	-23.011.350,00	80,10	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.02.0014	5.2	BELANJA MODAL	9.411.442.900,00	8.852.580.957,00	-558.861.943,00	94,06	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.02.0014	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.411.442.900,00	8.852.580.957,00	-558.861.943,00	94,06	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.02.0021		OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	3.354.753.009,00	3.252.363.763,00	-102.389.246,00	96,94	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	3.354.753.009,00	3.252.363.763,00	-102.389.246,00	96,94	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.354.753.009,00	3.252.363.763,00	-102.389.246,00	96,94	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.02.0032		PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI IRIGASI DAN RAWA	1.472.533.935,00	1.295.657.178,00	-176.876.757,00	87,98	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	773.083.935,00	653.979.509,00	-119.104.426,00	84,59	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	773.083.935,00	653.979.509,00	-119.104.426,00	84,59	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.02.0032	5.2	BELANJA MODAL	699.450.000,00	641.677.669,00	-57.772.331,00	91,74	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.02.0032	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	699.450.000,00	641.677.669,00	-57.772.331,00	91,74	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	74.279.328.526,00	62.877.892.177,00	-11.401.436.349,00	84,65	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.1.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA	74.279.328.526,00	62.877.892.177,00	-11.401.436.349,00	84,65	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.1.01.0015		PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	1.517.285.649,00	1.373.224.943,00	-144.060.706,00	90,50	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.1.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	1.517.285.649,00	1.373.224.943,00	-144.060.706,00	90,50	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.1.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.517.285.649,00	1.373.224.943,00	-144.060.706,00	90,50	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.1.01.0017		PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA	29.543.323.255,00	23.189.545.990,00	-6.353.777.265,00	78,49	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.1.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	27.773.100,00	18.150.290,00	-9.622.810,00	65,35	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.1.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.773.100,00	18.150.290,00	-9.622.810,00	65,35	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.1.01.0017	5.2	BELANJA MODAL	29.515.550.155,00	23.171.395.700,00	-6.344.154.455,00	78,50	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.1.01.0017	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.515.550.155,00	23.171.395.700,00	-6.344.154.455,00	78,50	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.1.01.0019		OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	43.218.719.622,00	38.315.121.244,00	-4.903.598.378,00	88,65	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.1.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	34.193.724.697,00	29.775.221.019,00	-4.418.503.678,00	87,07	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.1.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.193.724.697,00	29.775.221.019,00	-4.418.503.678,00	87,07	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.1.01.0019	5.2	BELANJA MODAL	9.024.994.925,00	8.539.900.225,00	-485.094.700,00	94,62	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.1.01.0019	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.178.581.100,00	8.143.486.400,00	-35.094.700,00	99,57	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.1.01.0019	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	196.913.825,00	196.913.825,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.1.01.0019	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	649.500.000,00	199.500.000,00	-450.000.000,00	30,71	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	21.766.029.102,00	17.780.040.383,00	-3.985.988.719,00	81,68	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.1.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL	21.766.029.102,00	17.780.040.383,00	-3.985.988.719,00	81,68	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.1.01.0013		PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT	3.167.010.552,00	2.229.748.415,00	-937.262.137,00	70,40	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.1.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	17.010.000,00	10.919.615,00	-6.090.385,00	64,19	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.1.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.010.000,00	10.919.615,00	-6.090.385,00	64,19	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.1.01.0013	5.2	BELANJA MODAL	3.150.000.552,00	2.218.828.800,00	-931.171.752,00	70,43	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.1.01.0013	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.150.000.552,00	2.218.828.800,00	-931.171.752,00	70,43	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.1.01.0015		PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD)	258.946.400,00	240.206.137,00	-18.740.263,00	92,76	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.1.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	58.946.400,00	57.389.137,00	-1.557.263,00	97,35	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.1.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.946.400,00	57.389.137,00	-1.557.263,00	97,35	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.1.01.0015	5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	182.817.000,00	-17.183.000,00	91,40	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.1.01.0015	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	182.817.000,00	-17.183.000,00	91,40	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.1.01.0018		OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD)	18.340.072.150,00	15.310.085.831,00	-3.029.986.319,00	83,47	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.1.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	13.855.072.150,00	12.645.755.320,00	-1.209.316.830,00	91,27	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.1.01.0018	5.1.01	Belanja Pegawai	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.1.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.845.412.150,00	12.636.095.320,00	-1.209.316.830,00	91,26	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.1.01.0018	5.2	BELANJA MODAL	4.485.000.000,00	2.664.330.511,00	-1.820.669.489,00	59,40	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.1.01.0018	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.910.000.000,00	2.097.629.781,00	-1.812.370.219,00	53,64	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.1.01.0018	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	540.000.000,00	536.832.850,00	-3.167.150,00	99,41	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.1.01.0018	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.000.000,00	29.867.880,00	-5.132.120,00	85,33	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.07		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	2.762.994.300,00	2.177.847.786,00	-585.146.514,00	78,82	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.07.1.01		PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PADA PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI	2.762.994.300,00	2.177.847.786,00	-585.146.514,00	78,82	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.07.1.01.0031		PERLUASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI	2.762.994.300,00	2.177.847.786,00	-585.146.514,00	78,82	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.07.1.01.0031	5.1	BELANJA OPERASI	2.762.994.300,00	2.177.847.786,00	-585.146.514,00	78,82	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.07.1.01.0031	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.994.300,00	11.673.486,00	-1.320.814,00	89,83	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.07.1.01.0031	5.1.05	Belanja Hibah	2.750.000.000,00	2.166.174.300,00	-583.825.700,00	78,76	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	210.399.437.300,00	195.804.837.671,00	-14.594.599.629,00	93,06	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.09.1.01		PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	210.399.437.300,00	195.804.837.671,00	-14.594.599.629,00	93,06	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.09.1.01.0008		PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA	203.922.650.800,00	190.906.210.670,00	-13.016.440.130,00	93,61	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.09.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	193.493.980.800,00	181.386.450.397,00	-12.107.530.403,00	93,74	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.09.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.935.800,00	85.605.702,00	-39.330.098,00	68,51	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.09.1.01.0008	5.1.05	Belanja Hibah	193.369.045.000,00	181.300.844.695,00	-12.068.200.305,00	93,75	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.09.1.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	10.428.670.000,00	9.519.760.273,00	-908.909.727,00	91,28	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.09.1.01.0008	5.2.01	Belanja Modal Tanah	750.000.000,00	930.000,00	-749.070.000,00	0,12	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.09.1.01.0008	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.678.670.000,00	9.518.830.273,00	-159.839.727,00	98,34	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.09.1.01.0009		PENYUSUNAN RENCANA DAN TEKNIS PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.476.786.500,00	4.898.627.001,00	-1.578.159.499,00	75,63	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.09.1.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	4.176.786.500,00	2.803.353.529,00	-1.373.432.971,00	67,11	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.09.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.676.786.500,00	1.392.813.083,00	-1.283.973.417,00	52,03	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.09.1.01.0009	5.1.05	Belanja Hibah	1.500.000.000,00	1.410.540.446,00	-89.459.554,00	94,03	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.09.1.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	2.300.000.000,00	2.095.273.472,00	-204.726.528,00	91,09	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.09.1.01.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.300.000.000,00	2.095.273.472,00	-204.726.528,00	91,09	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	239.408.352.921,00	210.031.817.558,00	-29.376.535.363,00	87,72	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01		PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI	239.408.352.921,00	210.031.817.558,00	-29.376.535.363,00	87,72	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0028		PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN JALAN/JEMBATAN	79.206.000,00	64.522.000,00	-14.684.000,00	81,46	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	79.206.000,00	64.522.000,00	-14.684.000,00	81,46	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.206.000,00	64.522.000,00	-14.684.000,00	81,46	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0030		REHABILITASI JALAN	23.776.643.413,00	22.887.617.109,00	-889.026.304,00	96,26	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0030	5.1	BELANJA OPERASI	28.800.000,00	13.732.000,00	-15.068.000,00	47,68	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	13.732.000,00	-15.068.000,00	47,68	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0030	5.2	BELANJA MODAL	23.747.843.413,00	22.873.885.109,00	-873.958.304,00	96,31	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0030	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.747.843.413,00	22.873.885.109,00	-873.958.304,00	96,31	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0031		REKONSTRUKSI JALAN	58.369.753.120,00	55.719.758.000,00	-2.649.995.120,00	95,45	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0031	5.2	BELANJA MODAL	58.369.753.120,00	55.719.758.000,00	-2.649.995.120,00	95,45	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0031	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	58.369.753.120,00	55.719.758.000,00	-2.649.995.120,00	95,45	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0033		PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	24.248.378.226,00	22.070.118.421,00	-2.178.259.805,00	91,01	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0033	5.1	BELANJA OPERASI	23.848.378.226,00	22.070.118.421,00	-1.778.259.805,00	92,54	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.848.378.226,00	22.070.118.421,00	-1.778.259.805,00	92,54	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0033	5.2	BELANJA MODAL	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0038		PEMELIHARAAN BERKALA JALAN	106.169.930.112,00	85.359.913.085,00	-20.810.017.027,00	80,39	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.520.000,00	-80.000,00	97,77	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.520.000,00	-80.000,00	97,77	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0038	5.2	BELANJA MODAL	106.166.330.112,00	85.356.393.085,00	-20.809.937.027,00	80,39	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0038	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	106.166.330.112,00	85.356.393.085,00	-20.809.937.027,00	80,39	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0040		PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR	16.099.635.262,00	14.277.255.377,00	-1.822.379.885,00	88,68	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0040	5.1	BELANJA OPERASI	332.163.837,00	298.170.377,00	-33.993.460,00	89,76	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.163.837,00	298.170.377,00	-33.993.460,00	89,76	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0040	5.2	BELANJA MODAL	15.767.471.425,00	13.979.085.000,00	-1.788.386.425,00	88,65	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0040	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.767.471.425,00	13.979.085.000,00	-1.788.386.425,00	88,65	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0041		PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	8.909.202.000,00	8.008.242.564,00	-900.959.436,00	89,88	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0041	5.1	BELANJA OPERASI	2.691.772.000,00	2.580.009.590,00	-111.762.410,00	95,84	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.691.772.000,00	2.580.009.590,00	-111.762.410,00	95,84	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0041	5.2	BELANJA MODAL	6.217.430.000,00	5.428.232.974,00	-789.197.026,00	87,30	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0041	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.900.000,00	99.067.500,00	-832.500,00	99,16	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0041	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0041	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.112.530.000,00	5.329.165.474,00	-783.364.526,00	87,18	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0043		SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN	1.655.604.788,00	1.544.683.254,00	-110.921.534,00	93,30	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0043	5.1	BELANJA OPERASI	1.655.604.788,00	1.544.683.254,00	-110.921.534,00	93,30	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.655.604.788,00	1.544.683.254,00	-110.921.534,00	93,30	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0044		PENGELOLAAN LEGER JALAN	100.000.000,00	99.707.748,00	-292.252,00	99,70	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0044	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.707.748,00	-292.252,00	99,70	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.707.748,00	-292.252,00	99,70	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3.777.048.389,00	3.098.265.426,00	-678.782.963,00	82,02	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.11.1.01		PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI	770.597.107,00	666.816.007,00	-103.781.100,00	86,53	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.11.1.01.0014		FASILITASI SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI AHLI	770.597.107,00	666.816.007,00	-103.781.100,00	86,53	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.11.1.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	770.597.107,00	666.816.007,00	-103.781.100,00	86,53	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.11.1.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	770.597.107,00	666.816.007,00	-103.781.100,00	86,53	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.11.1.03		KEBIJAKAN KHUSUS TERHADAP PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI	3.006.451.282,00	2.431.449.419,00	-575.001.863,00	80,87	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.11.1.03.0004		PENGAWASAN DAN EVALUASI TERTIB PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI DAN LINTAS KABUPATEN/KOTA	2.746.893.657,00	2.177.951.039,00	-568.942.618,00	79,28	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.11.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	728.893.657,00	624.332.689,00	-104.560.968,00	85,65	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.11.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	728.893.657,00	624.332.689,00	-104.560.968,00	85,65	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.11.1.03.0004	5.2	BELANJA MODAL	2.018.000.000,00	1.553.618.350,00	-464.381.650,00	76,98	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.11.1.03.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.018.000.000,00	1.553.618.350,00	-464.381.650,00	76,98	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.11.1.03.0008		PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH TERKAIT PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI	259.557.625,00	253.498.380,00	-6.059.245,00	97,66	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.11.1.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	259.557.625,00	253.498.380,00	-6.059.245,00	97,66	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.11.1.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.557.625,00	253.498.380,00	-6.059.245,00	97,66	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	947.896.672,00	809.549.815,00	-138.346.857,00	85,40	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.01		PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA RINCI TATA RUANG PROVINSI	36.792.100,00	17.937.286,00	-18.854.814,00	48,75	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.01.0005		PENYEBARLUASAN INFORMASI PENATAAN RUANG	36.792.100,00	17.937.286,00	-18.854.814,00	48,75	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	36.792.100,00	17.937.286,00	-18.854.814,00	48,75	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.792.100,00	17.937.286,00	-18.854.814,00	48,75	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.02		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG	231.192.935,00	171.189.499,00	-60.003.436,00	74,04	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.02.0006		MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RTRW DAN RDTR KABUPATEN/KOTA	231.192.935,00	171.189.499,00	-60.003.436,00	74,04	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	231.192.935,00	171.189.499,00	-60.003.436,00	74,04	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.192.935,00	171.189.499,00	-60.003.436,00	74,04	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.03		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFATAAN RUANG DAERAH PROVINSI	154.251.025,00	135.868.536,00	-18.382.489,00	88,08	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.03.0004		KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	114.918.425,00	101.373.025,00	-13.545.400,00	88,21	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	114.918.425,00	101.373.025,00	-13.545.400,00	88,21	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.918.425,00	101.373.025,00	-13.545.400,00	88,21	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.03.0006		SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENATAAN RUANG	39.332.600,00	34.495.511,00	-4.837.089,00	87,70	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	39.332.600,00	34.495.511,00	-4.837.089,00	87,70	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.332.600,00	34.495.511,00	-4.837.089,00	87,70	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.04		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFATAAN RUANG DAERAH PROVINSI	525.660.612,00	484.554.494,00	-41.106.118,00	92,18	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.04.0007		PENGAWASAN KINERJA PEMENUHAN STANDAR TEKNIS KAWASAN	140.220.800,00	132.270.159,00	-7.950.641,00	94,32	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	140.220.800,00	132.270.159,00	-7.950.641,00	94,32	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.220.800,00	132.270.159,00	-7.950.641,00	94,32	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.04.0014		PENILAIAN PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DAN/ATAU PERNYATAAN MANDIRI PELAKU UMKÅ	385.439.812,00	352.284.335,00	-33.155.477,00	91,39	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.04.0014	5.1	BELANJA OPERASI	385.439.812,00	352.284.335,00	-33.155.477,00	91,39	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.04.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.439.812,00	352.284.335,00	-33.155.477,00	91,39	
				JUMLAH BELANJA	628.054.997.990,00	560.089.093.023,00	-67.965.904.967,00	89,17	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-569.272.165.990,00	(506.589.135.024,65)	62.683.030.965,35	88,98	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-569.272.165.990,00	(506.589.135.024,65)	62.683.030.965,35	88,98	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.1.04.2.10.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	58.782.832.000,00	53.499.957.998,35	-5.282.874.001,65	91,01	
	1.03.1.04.2.10.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58.782.832.000,00	53.499.957.998,35	-5.282.874.001,65	91,01	
	1.03.1.04.2.10.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	18.522.832.000,00	20.440.625.000,00	1.917.793.000,00	110,35	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah; c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali; dan d.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	1.03.1.04.2.10.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	40.260.000.000,00	33.059.332.998,35	-7.200.667.001,65	82,11	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
				JUMLAH PENDAPATAN	58.782.832.000,00	53.499.957.998,35	-5.282.874.001,65	91,01	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000		5	BELANJA DAERAH	9.413.522.655,00	9.082.513.069,00	-331.009.586,00	96,48	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.266.060.330,00	1.236.495.427,00	-29.564.903,00	97,66	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.02.1.01		PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI	200.230.925,00	196.086.810,00	-4.144.115,00	97,93	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.02.1.01.0006		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	88.481.225,00	88.418.525,00	-62.700,00	99,92	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.02.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	88.481.225,00	88.418.525,00	-62.700,00	99,92	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.02.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.481.225,00	88.418.525,00	-62.700,00	99,92	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.02.1.01.0008		IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG BERPOTENSI TERKENA RELOKASI PROGRAM PROVINSI	111.749.700,00	107.668.285,00	-4.081.415,00	96,34	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.02.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	111.749.700,00	107.668.285,00	-4.081.415,00	96,34	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.02.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.749.700,00	107.668.285,00	-4.081.415,00	96,34	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.02.1.03		PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI	1.065.829.405,00	1.040.408.617,00	-25.420.788,00	97,61	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.02.1.03.0006		OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN PERUMAHAN PADA RELOKASI PROGRAM PROVINSI	1.065.829.405,00	1.040.408.617,00	-25.420.788,00	97,61	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.02.1.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	340.301.825,00	337.635.373,00	-2.666.452,00	99,21	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.02.1.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.301.825,00	337.635.373,00	-2.666.452,00	99,21	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.02.1.03.0006	5.2	BELANJA MODAL	725.527.580,00	702.773.244,00	-22.754.336,00	96,86	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.02.1.03.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	39.750.000,00	-250.000,00	99,37	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.02.1.03.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	385.527.580,00	364.342.695,00	-21.184.885,00	94,50	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.02.1.03.0006	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	300.000.000,00	298.680.549,00	-1.319.451,00	99,56	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6.543.576.100,00	6.407.990.587,00	-135.585.513,00	97,92	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.03.1.02		PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA	6.543.576.100,00	6.407.990.587,00	-135.585.513,00	97,92	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.03.1.02.0003		PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA	5.552.140.100,00	5.474.092.663,00	-78.047.437,00	98,59	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.03.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.552.140.100,00	5.474.092.663,00	-78.047.437,00	98,59	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.03.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.552.140.100,00	5.474.092.663,00	-78.047.437,00	98,59	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.03.1.02.0014		PELAKSANAAN PEMUGARAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA	991.436.000,00	933.897.924,00	-57.538.076,00	94,19	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.03.1.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	991.436.000,00	933.897.924,00	-57.538.076,00	94,19	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.03.1.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	991.436.000,00	933.897.924,00	-57.538.076,00	94,19	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.603.886.225,00	1.438.027.055,00	-165.859.170,00	89,65	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.05.1.01		URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN	1.603.886.225,00	1.438.027.055,00	-165.859.170,00	89,65	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.05.1.01.0001		PERENCANAAN PENYEDIAAN PSU PERMUKIMAN	358.918.400,00	327.729.150,00	-31.189.250,00	91,31	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	358.918.400,00	327.729.150,00	-31.189.250,00	91,31	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.918.400,00	327.729.150,00	-31.189.250,00	91,31	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.05.1.01.0002		PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN	1.173.894.825,00	1.079.190.575,00	-94.704.250,00	91,93	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.05.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.173.894.825,00	1.079.190.575,00	-94.704.250,00	91,93	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.05.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.173.894.825,00	1.079.190.575,00	-94.704.250,00	91,93	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.05.1.01.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM RANGKA PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERMUKIMAN	71.073.000,00	31.107.330,00	-39.965.670,00	43,76	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.05.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	71.073.000,00	31.107.330,00	-39.965.670,00	43,76	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.05.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.073.000,00	31.107.330,00	-39.965.670,00	43,76	
				JUMLAH BELANJA	9.413.522.655,00	9.082.513.069,00	-331.009.586,00	96,48	
				SURPLUS / (DEFISIT)	49.369.309.345,00	44.417.444.929,35	-4.951.864.415,65	89,96	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	49.369.309.345,00	44.417.444.929,35	-4.951.864.415,65	89,96	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.1.04.2.10.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	58.782.832.000,00	53.499.957.998,35	-5.282.874.001,65	91,00	
	1.03.1.04.2.10.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58.782.832.000,00	53.499.957.998,35	-5.282.874.001,65	91,00	
	1.03.1.04.2.10.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	18.522.832.000,00	20.440.625.000,00	1.917.793.000,00	110,35	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah; c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali; dan d.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	1.03.1.04.2.10.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	40.260.000.000,00	33.059.332.998,35	-7.200.667.001,65	82,11	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
				JUMLAH PENDAPATAN	58.782.832.000,00	53.499.957.998,35	-5.282.874.001,65	91,00	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000		5	BELANJA DAERAH	6.113.479.700,00	5.401.666.900,00	-711.812.800,00	88,35	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	5.882.758.000,00	5.216.311.500,00	-666.446.500,00	88,67	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.05.1.01		PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	5.882.758.000,00	5.216.311.500,00	-666.446.500,00	88,67	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.05.1.01.0003		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI	5.882.758.000,00	5.216.311.500,00	-666.446.500,00	88,67	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.05.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.882.758.000,00	5.216.311.500,00	-666.446.500,00	88,67	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.05.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.882.758.000,00	5.216.311.500,00	-666.446.500,00	88,67	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.06		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	23.521.700,00	10.370.500,00	-13.151.200,00	44,08	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.06.1.01		PENETAPAN SUBYEK DAN OBYEK REDISTRIBUSI TANAH LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	23.521.700,00	10.370.500,00	-13.151.200,00	44,08	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.06.1.01.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENATAAN AKSES DALAM PEMANFAATAN REDISTRIBUSI TANAH LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.521.700,00	10.370.500,00	-13.151.200,00	44,08	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.06.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	23.521.700,00	10.370.500,00	-13.151.200,00	44,08	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.06.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.521.700,00	10.370.500,00	-13.151.200,00	44,08	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	207.200.000,00	174.984.900,00	-32.215.100,00	84,45	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.10.1.01		PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	207.200.000,00	174.984.900,00	-32.215.100,00	84,45	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.10.1.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH	207.200.000,00	174.984.900,00	-32.215.100,00	84,45	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.10.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	207.200.000,00	174.984.900,00	-32.215.100,00	84,45	
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.10.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.200.000,00	174.984.900,00	-32.215.100,00	84,45	
				JUMLAH BELANJA	6.113.479.700,00	5.401.666.900,00	-711.812.800,00	88,35	
				SURPLUS / (DEFISIT)	52.669.352.300,00	48.098.291.098,35	-4.571.061.201,65	91,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	52.669.352.300,00	48.098.291.098,35	-4.571.061.201,65	91,32	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	54.221.190.392,00	51.274.052.587,00	-2.947.137.805,00	94,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.002.178.827,00	25.499.797.583,00	-2.502.381.244,00	91,06	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	21.000.000,00	17.930.955,00	-3.069.045,00	85,38	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	16.000.000,00	13.422.015,00	-2.577.985,00	83,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	13.422.015,00	-2.577.985,00	83,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	13.422.015,00	-2.577.985,00	83,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.000.000,00	4.508.940,00	-491.060,00	90,17	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.508.940,00	-491.060,00	90,17	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.508.940,00	-491.060,00	90,17	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.02		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	23.004.273.585,00	20.864.586.858,00	-2.139.686.727,00	90,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	23.004.273.585,00	20.864.586.858,00	-2.139.686.727,00	90,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.004.273.585,00	20.864.586.858,00	-2.139.686.727,00	90,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	22.947.873.585,00	20.819.136.858,00	-2.128.736.727,00	90,72	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.400.000,00	45.450.000,00	-10.950.000,00	80,58	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	863.723.290,00	607.457.866,00	-256.265.424,00	70,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	40.706.800,00	31.088.568,00	-9.618.232,00	76,37	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.706.800,00	31.088.568,00	-9.618.232,00	76,37	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.706.800,00	31.088.568,00	-9.618.232,00	76,37	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	544.290.200,00	398.457.112,00	-145.833.088,00	73,20	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	52.802.800,00	46.017.310,00	-6.785.490,00	87,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.802.800,00	46.017.310,00	-6.785.490,00	87,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	491.487.400,00	352.439.802,00	-139.047.598,00	71,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	491.487.400,00	352.439.802,00	-139.047.598,00	71,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	106.033.390,00	94.512.500,00	-11.520.890,00	89,13	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	106.033.390,00	94.512.500,00	-11.520.890,00	89,13	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.033.390,00	94.512.500,00	-11.520.890,00	89,13	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12.301.900,00	7.788.700,00	-4.513.200,00	63,31	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.301.900,00	7.788.700,00	-4.513.200,00	63,31	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.301.900,00	7.788.700,00	-4.513.200,00	63,31	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	160.391.000,00	75.610.986,00	-84.780.014,00	47,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	160.391.000,00	75.610.986,00	-84.780.014,00	47,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.391.000,00	75.610.986,00	-84.780.014,00	47,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	103.985.300,00	85.924.993,00	-18.060.307,00	82,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.07.0005		PENGADAAN MEBEL	103.985.300,00	85.924.993,00	-18.060.307,00	82,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	103.985.300,00	85.924.993,00	-18.060.307,00	82,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.985.300,00	85.924.993,00	-18.060.307,00	82,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	895.950.767,00	850.636.916,00	-45.313.851,00	94,94	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.998.700,00	1.910.000,00	-1.088.700,00	63,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.998.700,00	1.910.000,00	-1.088.700,00	63,69	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.998.700,00	1.910.000,00	-1.088.700,00	63,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	165.000.000,00	128.006.251,00	-36.993.749,00	77,57	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	165.000.000,00	128.006.251,00	-36.993.749,00	77,57	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	128.006.251,00	-36.993.749,00	77,57	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	48.720.000,00	43.474.074,00	-5.245.926,00	89,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	48.720.000,00	43.474.074,00	-5.245.926,00	89,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.720.000,00	43.474.074,00	-5.245.926,00	89,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	679.232.067,00	677.246.591,00	-1.985.476,00	99,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	679.232.067,00	677.246.591,00	-1.985.476,00	99,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	679.232.067,00	677.246.591,00	-1.985.476,00	99,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.113.245.885,00	3.073.259.995,00	-39.985.890,00	98,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	2.839.245.885,00	2.808.249.782,00	-30.996.103,00	98,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.839.245.885,00	2.808.249.782,00	-30.996.103,00	98,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.839.245.885,00	2.808.249.782,00	-30.996.103,00	98,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.09.0007		PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	75.000.000,00	72.788.250,00	-2.211.750,00	97,05	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.09.0007	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	72.788.250,00	-2.211.750,00	97,05	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.09.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	72.788.250,00	-2.211.750,00	97,05	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	199.000.000,00	192.221.963,00	-6.778.037,00	96,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	199.000.000,00	192.221.963,00	-6.778.037,00	96,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.000.000,00	192.221.963,00	-6.778.037,00	96,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26.219.011.565,00	25.774.255.004,00	-444.756.561,00	98,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01		PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	24.597.104.492,00	24.243.432.798,00	-353.671.694,00	98,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0006		KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN	42.720.905,00	38.719.455,00	-4.001.450,00	90,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	42.720.905,00	38.719.455,00	-4.001.450,00	90,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.720.905,00	38.719.455,00	-4.001.450,00	90,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0010		PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT	29.999.900,00	778.000,00	-29.221.900,00	2,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	29.999.900,00	778.000,00	-29.221.900,00	2,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.999.900,00	778.000,00	-29.221.900,00	2,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0013		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT	20.450.348.273,00	20.443.954.446,00	-6.393.827,00	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	20.450.348.273,00	20.443.954.446,00	-6.393.827,00	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.450.348.273,00	20.443.954.446,00	-6.393.827,00	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0014		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI	81.949.400,00	53.005.950,00	-28.943.450,00	64,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	81.949.400,00	53.005.950,00	-28.943.450,00	64,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.949.400,00	53.005.950,00	-28.943.450,00	64,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0015		PENYEDIAAN LAYANAN DASAR DALAM RANGKA DAMPAK PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	19.993.200,00	5.262.488,00	-14.730.712,00	26,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	19.993.200,00	5.262.488,00	-14.730.712,00	26,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.993.200,00	5.262.488,00	-14.730.712,00	26,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0016		PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	87.277.405,00	62.734.405,00	-24.543.000,00	71,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	87.277.405,00	62.734.405,00	-24.543.000,00	71,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.277.405,00	62.734.405,00	-24.543.000,00	71,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0017		PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN ,KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN	3.648.199.507,00	3.452.623.502,00	-195.576.005,00	94,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	3.648.199.507,00	3.452.623.502,00	-195.576.005,00	94,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.648.199.507,00	3.452.623.502,00	-195.576.005,00	94,63	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0018		PENINGKATAN KAPASITA SDM SATUAN POLISI PAMONGPRAJA MELALUI PELATIHAN TEKNIS TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSA HAK ASASI MANUSIA	236.615.902,00	186.354.552,00	-50.261.350,00	78,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	236.615.902,00	186.354.552,00	-50.261.350,00	78,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.615.902,00	186.354.552,00	-50.261.350,00	78,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.02		PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR	1.549.907.073,00	1.498.616.573,00	-51.290.500,00	96,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.02.0001		SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR	12.181.200,00	12.179.200,00	-2.000,00	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.181.200,00	12.179.200,00	-2.000,00	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.181.200,00	12.179.200,00	-2.000,00	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.02.0002		PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR	1.233.056.463,00	1.212.569.413,00	-20.487.050,00	98,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.233.056.463,00	1.212.569.413,00	-20.487.050,00	98,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.233.056.463,00	1.212.569.413,00	-20.487.050,00	98,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.02.0003		PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR	304.669.410,00	273.867.960,00	-30.801.450,00	89,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	304.669.410,00	273.867.960,00	-30.801.450,00	89,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.669.410,00	273.867.960,00	-30.801.450,00	89,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.03		PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PROVINSI	72.000.000,00	32.205.633,00	-39.794.367,00	44,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.03.0001		PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KARIER PPNS	72.000.000,00	32.205.633,00	-39.794.367,00	44,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	72.000.000,00	32.205.633,00	-39.794.367,00	44,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	32.205.633,00	-39.794.367,00	44,73	
				JUMLAH BELANJA	54.221.190.392,00	51.274.052.587,00	-2.947.137.805,00	94,56	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-54.221.190.392,00	-51.274.052.587,00	2.947.137.805,00	94,56	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-54.221.190.392,00	-51.274.052.587,00	2.947.137.805,00	94,56	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000		5	BELANJA DAERAH	33.792.462.337,00	30.514.169.502,28	-3.278.292.834,72	90,29	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.376.219.868,00	23.129.673.280,28	-2.246.546.587,72	91,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	88.922.000,00	44.120.006,00	-44.801.994,00	49,61	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	34.621.000,00	15.700.003,00	-18.920.997,00	45,34	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.621.000,00	15.700.003,00	-18.920.997,00	45,34	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.621.000,00	15.700.003,00	-18.920.997,00	45,34	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	54.301.000,00	28.420.003,00	-25.880.997,00	52,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	54.301.000,00	28.420.003,00	-25.880.997,00	52,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.301.000,00	28.420.003,00	-25.880.997,00	52,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	14.490.760.948,00	13.929.859.805,00	-560.901.143,00	96,12	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	14.490.760.948,00	13.929.859.805,00	-560.901.143,00	96,12	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.490.760.948,00	13.929.859.805,00	-560.901.143,00	96,12	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	14.437.060.948,00	13.876.159.805,00	-560.901.143,00	96,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.700.000,00	53.700.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	73.504.200,00	66.533.400,00	-6.970.800,00	90,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	73.504.200,00	66.533.400,00	-6.970.800,00	90,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	73.504.200,00	66.533.400,00	-6.970.800,00	90,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.504.200,00	66.533.400,00	-6.970.800,00	90,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	486.428.724,00	329.873.856,00	-156.554.868,00	67,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	26.829.600,00	23.899.780,00	-2.929.820,00	89,07	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.829.600,00	23.899.780,00	-2.929.820,00	89,07	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.829.600,00	23.899.780,00	-2.929.820,00	89,07	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	116.047.800,00	74.490.000,00	-41.557.800,00	64,18	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	116.047.800,00	74.490.000,00	-41.557.800,00	64,18	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.047.800,00	74.490.000,00	-41.557.800,00	64,18	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	86.229.424,00	86.216.400,00	-13.024,00	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	86.229.424,00	86.216.400,00	-13.024,00	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.229.424,00	86.216.400,00	-13.024,00	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	20.258.600,00	12.457.040,00	-7.801.560,00	61,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	20.258.600,00	12.457.040,00	-7.801.560,00	61,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.258.600,00	12.457.040,00	-7.801.560,00	61,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	25.992.300,00	25.786.800,00	-205.500,00	99,20	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	25.992.300,00	25.786.800,00	-205.500,00	99,20	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.992.300,00	25.786.800,00	-205.500,00	99,20	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	30.000.000,00	20.317.500,00	-9.682.500,00	67,72	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	20.317.500,00	-9.682.500,00	67,72	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	20.317.500,00	-9.682.500,00	67,72	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	181.071.000,00	86.706.336,00	-94.364.664,00	47,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	181.071.000,00	86.706.336,00	-94.364.664,00	47,88	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.071.000,00	86.706.336,00	-94.364.664,00	47,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.517.363.800,00	2.132.531.301,00	-384.832.499,00	84,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	2.517.363.800,00	2.132.531.301,00	-384.832.499,00	84,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	45.516.600,00	35.021.940,00	-10.494.660,00	76,94	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.516.600,00	35.021.940,00	-10.494.660,00	76,94	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	2.471.847.200,00	2.097.509.361,00	-374.337.839,00	84,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.471.847.200,00	2.097.509.361,00	-374.337.839,00	84,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.334.718.072,00	1.966.411.822,00	-368.306.250,00	84,22	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	498.000.000,00	242.257.203,00	-255.742.797,00	48,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	498.000.000,00	242.257.203,00	-255.742.797,00	48,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	498.000.000,00	242.257.203,00	-255.742.797,00	48,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.836.718.072,00	1.724.154.619,00	-112.563.453,00	93,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.836.718.072,00	1.724.154.619,00	-112.563.453,00	93,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.836.718.072,00	1.724.154.619,00	-112.563.453,00	93,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.384.522.124,00	4.660.343.090,28	-724.179.033,72	86,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	2.428.769.800,00	2.188.279.665,00	-240.490.135,00	90,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.428.769.800,00	2.188.279.665,00	-240.490.135,00	90,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.428.769.800,00	2.188.279.665,00	-240.490.135,00	90,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	22.380.000,00	13.252.000,00	-9.128.000,00	59,21	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	22.380.000,00	13.252.000,00	-9.128.000,00	59,21	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.380.000,00	13.252.000,00	-9.128.000,00	59,21	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	2.413.504.724,00	2.141.234.121,28	-272.270.602,72	88,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.633.280,92	-366.719,08	99,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.633.280,92	-366.719,08	99,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	2.313.504.724,00	2.041.600.840,36	-271.903.883,64	88,24	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.313.504.724,00	2.041.600.840,36	-271.903.883,64	88,24	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	125.000.000,00	24.917.204,00	-100.082.796,00	19,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	24.917.204,00	-100.082.796,00	19,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	24.917.204,00	-100.082.796,00	19,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	394.867.600,00	292.660.100,00	-102.207.500,00	74,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	394.867.600,00	292.660.100,00	-102.207.500,00	74,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	394.867.600,00	292.660.100,00	-102.207.500,00	74,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	8.416.242.469,00	7.384.496.222,00	-1.031.746.247,00	87,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.01		PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA PROVINSI	109.275.000,00	103.498.000,00	-5.777.000,00	94,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.01.0004		SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA PROVINSI (PER JENIS ANCAMAN)	109.275.000,00	103.498.000,00	-5.777.000,00	94,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	109.275.000,00	103.498.000,00	-5.777.000,00	94,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.275.000,00	103.498.000,00	-5.777.000,00	94,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02		PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	2.426.962.900,00	1.821.472.613,00	-605.490.287,00	75,05	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0013		PENGUATAN KAPASITAS KAWASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	380.586.200,00	131.500.000,00	-249.086.200,00	34,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	380.586.200,00	131.500.000,00	-249.086.200,00	34,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.586.200,00	131.500.000,00	-249.086.200,00	34,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0023		GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	8.175.000,00	3.318.750,00	-4.856.250,00	40,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0023	5.1	BELANJA OPERASI	8.175.000,00	3.318.750,00	-4.856.250,00	40,59	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.175.000,00	3.318.750,00	-4.856.250,00	40,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0024		PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI	4.500.000,00	2.655.000,00	-1.845.000,00	59,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0024	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	2.655.000,00	-1.845.000,00	59,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	2.655.000,00	-1.845.000,00	59,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0025		PENYUSUNAN RENCANA KONTIJENSI	21.450.000,00	13.845.000,00	-7.605.000,00	64,54	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	21.450.000,00	13.845.000,00	-7.605.000,00	64,54	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.450.000,00	13.845.000,00	-7.605.000,00	64,54	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0027		PENGEMBANGAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) BENCANA	283.594.200,00	271.995.800,00	-11.598.400,00	95,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0027	5.1	BELANJA OPERASI	283.594.200,00	271.995.800,00	-11.598.400,00	95,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.594.200,00	271.995.800,00	-11.598.400,00	95,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0028		PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	445.606.400,00	410.775.103,00	-34.831.297,00	92,18	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0028	5.1	BELANJA OPERASI	146.415.000,00	138.559.901,00	-7.855.099,00	94,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.415.000,00	138.559.901,00	-7.855.099,00	94,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0028	5.2	BELANJA MODAL	299.191.400,00	272.215.202,00	-26.976.198,00	90,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0028	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	299.191.400,00	272.215.202,00	-26.976.198,00	90,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0029		PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	751.322.000,00	666.769.570,00	-84.552.430,00	88,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0029	5.1	BELANJA OPERASI	751.322.000,00	666.769.570,00	-84.552.430,00	88,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	751.322.000,00	666.769.570,00	-84.552.430,00	88,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0030		PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	531.729.100,00	320.613.390,00	-211.115.710,00	60,29	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0030	5.1	BELANJA OPERASI	531.729.100,00	320.613.390,00	-211.115.710,00	60,29	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	531.729.100,00	320.613.390,00	-211.115.710,00	60,29	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03		PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	1.905.815.900,00	1.798.641.601,00	-107.174.299,00	94,37	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0028		PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	1.657.773.900,00	1.572.561.601,00	-85.212.299,00	94,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0028	5.1	BELANJA OPERASI	1.657.773.900,00	1.572.561.601,00	-85.212.299,00	94,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.657.773.900,00	1.572.561.601,00	-85.212.299,00	94,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0030		RESPON CEPAT PENANGANAN DARURAT BENCANA	248.042.000,00	226.080.000,00	-21.962.000,00	91,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0030	5.1	BELANJA OPERASI	248.042.000,00	226.080.000,00	-21.962.000,00	91,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.042.000,00	226.080.000,00	-21.962.000,00	91,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04		PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	3.974.188.669,00	3.660.884.008,00	-313.304.661,00	92,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0007		PENANGANAN PASCA BENCANA PROVINSI	154.667.000,00	143.905.796,00	-10.761.204,00	93,04	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	154.667.000,00	143.905.796,00	-10.761.204,00	93,04	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.667.000,00	143.905.796,00	-10.761.204,00	93,04	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0010		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM PENANGANAN PASCABENCANA PROVINSI	28.980.000,00	0,00	-28.980.000,00	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	28.980.000,00	0,00	-28.980.000,00	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.980.000,00	0,00	-28.980.000,00	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0013		BIMBINGAN TEKNIS PASCA BENCANA PROVINSI	103.478.000,00	85.095.200,00	-18.382.800,00	82,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0013	5.1	BELANJA OPERASI	103.478.000,00	85.095.200,00	-18.382.800,00	82,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.478.000,00	85.095.200,00	-18.382.800,00	82,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0018		PENGUATAN KELEMBAGAAN BENCANA DAERAH	208.097.500,00	29.975.000,00	-178.122.500,00	14,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0018	5.1	BELANJA OPERASI	208.097.500,00	29.975.000,00	-178.122.500,00	14,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.097.500,00	29.975.000,00	-178.122.500,00	14,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0019		KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA	13.590.000,00	8.970.000,00	-4.620.000,00	66,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0019	5.1	BELANJA OPERASI	13.590.000,00	8.970.000,00	-4.620.000,00	66,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.590.000,00	8.970.000,00	-4.620.000,00	66,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0022		PENYUSUNAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEBENCANAAN	3.375.620.069,00	3.330.584.012,00	-45.036.057,00	98,66	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0022	5.1	BELANJA OPERASI	602.680.000,00	596.598.512,00	-6.081.488,00	98,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	602.680.000,00	596.598.512,00	-6.081.488,00	98,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0022	5.2	BELANJA MODAL	2.772.940.069,00	2.733.985.500,00	-38.954.569,00	98,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0022	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.772.940.069,00	2.733.985.500,00	-38.954.569,00	98,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0023		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SUB URUSAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	89.756.100,00	62.354.000,00	-27.402.100,00	69,47	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0023	5.1	BELANJA OPERASI	89.756.100,00	62.354.000,00	-27.402.100,00	69,47	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.756.100,00	62.354.000,00	-27.402.100,00	69,47	
				JUMLAH BELANJA	33.792.462.337,00	30.514.169.502,28	-3.278.292.834,72	90,29	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-33.792.462.337,00	-30.514.169.502,28	3.278.292.834,72	90,29	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-33.792.462.337,00	-30.514.169.502,28	3.278.292.834,72	90,29	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.06.2.08.0.00.06.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	100,00	
	1.06.2.08.0.00.06.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	100,00	
	1.06.2.08.0.00.06.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	100,00	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
				JUMLAH PENDAPATAN	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000		5	BELANJA DAERAH	37.451.192.714,00	34.911.614.686,00	-2.539.578.028,00	93,21	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.067.312.714,00	26.975.764.381,00	-2.091.548.333,00	92,80	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	34.904.600,00	30.536.722,00	-4.367.878,00	87,48	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.717.600,00	4.999.567,00	-718.033,00	87,44	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0001	5.1	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	5.717.600,00	4.999.567,00	-718.033,00	87,44	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.717.600,00	4.999.567,00	-718.033,00	87,44	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	4.952.200,00	2.971.455,00	-1.980.745,00	60,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.952.200,00	2.971.455,00	-1.980.745,00	60,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.952.200,00	2.971.455,00	-1.980.745,00	60,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	24.234.800,00	22.565.700,00	-1.669.100,00	93,11	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	24.234.800,00	22.565.700,00	-1.669.100,00	93,11	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.234.800,00	22.565.700,00	-1.669.100,00	93,11	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	18.959.955.419,00	17.285.612.848,00	-1.674.342.571,00	91,16	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	18.959.955.419,00	17.285.612.848,00	-1.674.342.571,00	91,16	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.959.955.419,00	17.285.612.848,00	-1.674.342.571,00	91,16	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	18.896.105.419,00	17.222.012.848,00	-1.674.092.571,00	91,14	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.850.000,00	63.600.000,00	-250.000,00	99,60	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	690.019.940,00	633.895.248,00	-56.124.692,00	91,86	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	17.321.600,00	16.763.995,00	-557.605,00	96,78	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.321.600,00	16.763.995,00	-557.605,00	96,78	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.321.600,00	16.763.995,00	-557.605,00	96,78	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	309.316.640,00	296.101.130,00	-13.215.510,00	95,72	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	309.316.640,00	296.101.130,00	-13.215.510,00	95,72	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	309.316.640,00	296.101.130,00	-13.215.510,00	95,72	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	255.964.500,00	250.141.250,00	-5.823.250,00	97,72	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	255.964.500,00	250.141.250,00	-5.823.250,00	97,72	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.964.500,00	250.141.250,00	-5.823.250,00	97,72	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.647.200,00	1.803.195,00	-3.844.005,00	31,93	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.647.200,00	1.803.195,00	-3.844.005,00	31,93	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.647.200,00	1.803.195,00	-3.844.005,00	31,93	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	11.250.000,00	7.700.500,00	-3.549.500,00	68,44	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	11.250.000,00	7.700.500,00	-3.549.500,00	68,44	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	7.700.500,00	-3.549.500,00	68,44	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	90.520.000,00	61.385.178,00	-29.134.822,00	67,81	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	90.520.000,00	61.385.178,00	-29.134.822,00	67,81	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.520.000,00	61.385.178,00	-29.134.822,00	67,81	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.221.783.828,00	1.136.142.985,00	-85.640.843,00	92,99	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	396.100.000,00	319.948.697,00	-76.151.303,00	80,77	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	396.100.000,00	319.948.697,00	-76.151.303,00	80,77	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.100.000,00	319.948.697,00	-76.151.303,00	80,77	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	825.683.828,00	816.194.288,00	-9.489.540,00	98,85	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	825.683.828,00	816.194.288,00	-9.489.540,00	98,85	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	825.683.828,00	816.194.288,00	-9.489.540,00	98,85	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.160.648.927,00	7.889.576.578,00	-271.072.349,00	96,67	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.452.403.348,00	1.317.614.425,00	-134.788.923,00	90,71	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.452.403.348,00	1.317.614.425,00	-134.788.923,00	90,71	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.452.403.348,00	1.317.614.425,00	-134.788.923,00	90,71	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	5.230.327.825,00	5.119.201.211,00	-111.126.614,00	97,87	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	245.456.599,00	-4.543.401,00	98,18	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	245.456.599,00	-4.543.401,00	98,18	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	4.980.327.825,00	4.873.744.612,00	-106.583.213,00	97,85	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.980.327.825,00	4.873.744.612,00	-106.583.213,00	97,85	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.477.917.754,00	1.452.760.942,00	-25.156.812,00	98,29	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.477.917.754,00	1.452.760.942,00	-25.156.812,00	98,29	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.477.917.754,00	1.452.760.942,00	-25.156.812,00	98,29	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	123.193.100,00	105.781.525,00	-17.411.575,00	85,86	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.1.01		PENERBITAN IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	3.484.600,00	3.448.134,00	-36.466,00	98,95	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.1.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERBITAN IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG	3.484.600,00	3.448.134,00	-36.466,00	98,95	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.484.600,00	3.448.134,00	-36.466,00	98,95	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.484.600,00	3.448.134,00	-36.466,00	98,95	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.1.02		PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI	119.708.500,00	102.333.391,00	-17.375.109,00	85,48	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.1.02.0002		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN PROVINSI	78.398.500,00	62.373.391,00	-16.025.109,00	79,55	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	78.398.500,00	62.373.391,00	-16.025.109,00	79,55	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.398.500,00	62.373.391,00	-16.025.109,00	79,55	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.1.02.0004		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN PROVINSI	41.310.000,00	39.960.000,00	-1.350.000,00	96,73	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	41.310.000,00	39.960.000,00	-1.350.000,00	96,73	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.310.000,00	39.960.000,00	-1.350.000,00	96,73	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7.533.878.100,00	7.124.699.335,00	-409.178.765,00	94,56	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.01		REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI DALAM PANTI	2.833.626.800,00	2.823.081.575,00	-10.545.225,00	99,62	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0001		PENYEDIAAN PERMAKANAN	57.784.600,00	56.220.068,00	-1.564.532,00	97,29	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	57.784.600,00	56.220.068,00	-1.564.532,00	97,29	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.784.600,00	56.220.068,00	-1.564.532,00	97,29	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0004		PENYEDIAAN ALAT BANTU	120.325.600,00	119.977.680,00	-347.920,00	99,71	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	120.325.600,00	119.977.680,00	-347.920,00	99,71	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.325.600,00	119.977.680,00	-347.920,00	99,71	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0005		PENYEDIAAN PERBEKALAN KESEHATAN DI DALAM PANTI	2.500.000.000,00	2.492.087.666,00	-7.912.334,00	99,68	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000.000,00	2.492.087.666,00	-7.912.334,00	99,68	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000.000,00	2.492.087.666,00	-7.912.334,00	99,68	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0006		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL	155.516.600,00	154.796.161,00	-720.439,00	99,53	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	155.516.600,00	154.796.161,00	-720.439,00	99,53	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.916.600,00	43.196.161,00	-720.439,00	98,35	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0006	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.02		REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI	2.756.429.500,00	2.599.419.588,00	-157.009.912,00	94,30	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0001		PENGASUHAN	91.401.500,00	91.087.200,00	-314.300,00	99,65	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	91.401.500,00	91.087.200,00	-314.300,00	99,65	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.401.500,00	91.087.200,00	-314.300,00	99,65	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0002		PENYEDIAAN MAKANAN	2.078.897.100,00	2.039.927.026,00	-38.970.074,00	98,12	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.078.897.100,00	2.039.927.026,00	-38.970.074,00	98,12	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.078.897.100,00	2.039.927.026,00	-38.970.074,00	98,12	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0003		PENYEDIAAN SANDANG	89.750.000,00	86.122.680,00	-3.627.320,00	95,95	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	89.750.000,00	86.122.680,00	-3.627.320,00	95,95	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.750.000,00	86.122.680,00	-3.627.320,00	95,95	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0005		PENYEDIAAN PERBEKALAN KESEHATAN DI DALAM PANTI	21.680.300,00	21.577.290,00	-103.010,00	99,52	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	21.680.300,00	21.577.290,00	-103.010,00	99,52	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.680.300,00	21.577.290,00	-103.010,00	99,52	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0006		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL	226.861.200,00	200.283.910,00	-26.577.290,00	88,28	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	226.861.200,00	200.283.910,00	-26.577.290,00	88,28	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.861.200,00	200.283.910,00	-26.577.290,00	88,28	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0007		PEMBERIAN BIMBINGAN AKTIVITAS HIDUP SEHARI-HARI	125.759.400,00	108.274.233,00	-17.485.167,00	86,09	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	125.759.400,00	108.274.233,00	-17.485.167,00	86,09	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.759.400,00	108.274.233,00	-17.485.167,00	86,09	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0009		AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	100.000.000,00	30.810.000,00	-69.190.000,00	30,81	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	30.810.000,00	-69.190.000,00	30,81	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	30.810.000,00	-69.190.000,00	30,81	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0010		PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA	22.080.000,00	21.337.249,00	-742.751,00	96,63	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	22.080.000,00	21.337.249,00	-742.751,00	96,63	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.080.000,00	21.337.249,00	-742.751,00	96,63	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.03		REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI DALAM PANTI	1.764.982.400,00	1.593.698.471,00	-171.283.929,00	90,29	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0001		PENYEDIAAN PERMAKANAN	1.147.462.500,00	1.122.960.334,00	-24.502.166,00	97,86	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.147.462.500,00	1.122.960.334,00	-24.502.166,00	97,86	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.147.462.500,00	1.122.960.334,00	-24.502.166,00	97,86	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0002		PENYEDIAAN SANDANG	70.000.000,00	67.277.100,00	-2.722.900,00	96,11	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	67.277.100,00	-2.722.900,00	96,11	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	67.277.100,00	-2.722.900,00	96,11	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0005		PENYEDIAAN PERBEKALAN KESEHATAN DI DALAM PANTI SOSIAL	10.000.000,00	9.903.975,00	-96.025,00	99,03	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.903.975,00	-96.025,00	99,03	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.903.975,00	-96.025,00	99,03	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0006		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPRITUAL DAN SOSIAL	14.352.200,00	13.828.406,00	-523.794,00	96,35	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	14.352.200,00	13.828.406,00	-523.794,00	96,35	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.352.200,00	13.828.406,00	-523.794,00	96,35	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0007		PEMBERIAN BIMBINGAN AKTIVITAS HIDUP SEHARI-HARI	164.987.000,00	143.570.000,00	-21.417.000,00	87,01	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	164.987.000,00	143.570.000,00	-21.417.000,00	87,01	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.987.000,00	143.570.000,00	-21.417.000,00	87,01	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0010		PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA	37.290.600,00	33.504.154,00	-3.786.446,00	89,84	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0010	5.1	BELANJA OPERASI	37.290.600,00	33.504.154,00	-3.786.446,00	89,84	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.290.600,00	33.504.154,00	-3.786.446,00	89,84	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0012		PEMULASARAAN	320.890.100,00	202.654.502,00	-118.235.598,00	63,15	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0012	5.1	BELANJA OPERASI	320.890.100,00	202.654.502,00	-118.235.598,00	63,15	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.890.100,00	202.654.502,00	-118.235.598,00	63,15	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.04		REHABILITASI SOSIAL DASAR GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DALAM PANTI	178.839.400,00	108.499.701,00	-70.339.699,00	60,66	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0001		PENYEDIAAN PERMAKANAN	19.999.400,00	13.344.701,00	-6.654.699,00	66,72	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.999.400,00	13.344.701,00	-6.654.699,00	66,72	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.400,00	13.344.701,00	-6.654.699,00	66,72	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0010		PEMULANGAN KE DAERAH ASAL	158.840.000,00	95.155.000,00	-63.685.000,00	59,90	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	158.840.000,00	95.155.000,00	-63.685.000,00	59,90	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.840.000,00	95.155.000,00	-63.685.000,00	59,90	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	55.758.600,00	54.263.557,00	-1.495.043,00	97,31	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.1.01		PENGANGKATAN ANAK ANTAR WNI DAN PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL	17.136.600,00	16.859.815,00	-276.785,00	98,38	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.1.01.0001		PENGANGKATAN ANAK ANTAR WNI	17.136.600,00	16.859.815,00	-276.785,00	98,38	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.136.600,00	16.859.815,00	-276.785,00	98,38	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.136.600,00	16.859.815,00	-276.785,00	98,38	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.1.02		PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI	38.622.000,00	37.403.742,00	-1.218.258,00	96,84	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0001		FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	29.142.000,00	27.996.141,00	-1.145.859,00	96,06	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.142.000,00	27.996.141,00	-1.145.859,00	96,06	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.142.000,00	27.996.141,00	-1.145.859,00	96,06	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0002		PENGELOLAAN FAKIR MISKIN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.480.000,00	9.407.601,00	-72.399,00	99,23	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.480.000,00	9.407.601,00	-72.399,00	99,23	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.480.000,00	9.407.601,00	-72.399,00	99,23	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	341.811.800,00	333.582.844,00	-8.228.956,00	97,59	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.1.01		PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI	341.811.800,00	333.582.844,00	-8.228.956,00	97,59	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0003		PENYEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI	3.240.000,00	0,00	-3.240.000,00	0,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.240.000,00	0,00	-3.240.000,00	0,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	0,00	-3.240.000,00	0,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0004		PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN	3.240.000,00	960.000,00	-2.280.000,00	29,62	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.240.000,00	960.000,00	-2.280.000,00	29,62	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	960.000,00	-2.280.000,00	29,62	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0005		PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL	335.331.800,00	332.622.844,00	-2.708.956,00	99,19	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	335.331.800,00	332.622.844,00	-2.708.956,00	99,19	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.331.800,00	332.622.844,00	-2.708.956,00	99,19	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	329.238.400,00	317.523.044,00	-11.715.356,00	96,44	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.07.1.01		PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL PROVINSI	329.238.400,00	317.523.044,00	-11.715.356,00	96,44	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.07.1.01.0002		PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL PROVINSI	329.238.400,00	317.523.044,00	-11.715.356,00	96,44	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.07.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	329.238.400,00	317.523.044,00	-11.715.356,00	96,44	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.07.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.238.400,00	317.523.044,00	-11.715.356,00	96,44	
				JUMLAH BELANJA	37.451.192.714,00	34.911.614.686,00	-2.539.578.028,00	93,21	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-37.441.832.714,00	-34.902.254.686,00	2.539.578.028,00	93,21	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-37.441.832.714,00	-34.902.254.686,00	2.539.578.028,00	93,21	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.06.2.08.0.00.06.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	100,00	
	1.06.2.08.0.00.06.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	100,00	
	1.06.2.08.0.00.06.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	100,00	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
				JUMLAH PENDAPATAN	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	100,00	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000		5	BELANJA DAERAH	6.164.276.173,00	5.819.472.354,00	-344.803.819,00	94,40	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	596.303.273,00	444.547.001,00	-151.756.272,00	74,55	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	47.727.700,00	45.381.210,00	-2.346.490,00	95,08	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.528.800,00	1.507.500,00	-21.300,00	98,60	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.1.06.0001	5.1	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	1.528.800,00	1.507.500,00	-21.300,00	98,60	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.528.800,00	1.507.500,00	-21.300,00	98,60	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	26.266.900,00	25.086.000,00	-1.180.900,00	95,50	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	26.266.900,00	25.086.000,00	-1.180.900,00	95,50	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.266.900,00	25.086.000,00	-1.180.900,00	95,50	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	19.932.000,00	18.787.710,00	-1.144.290,00	94,25	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	19.932.000,00	18.787.710,00	-1.144.290,00	94,25	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.932.000,00	18.787.710,00	-1.144.290,00	94,25	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.000.000,00	4.722.009,00	-277.991,00	94,44	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	5.000.000,00	4.722.009,00	-277.991,00	94,44	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.722.009,00	-277.991,00	94,44	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.722.009,00	-277.991,00	94,44	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	543.575.573,00	394.443.782,00	-149.131.791,00	72,56	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	129.131.492,00	108.747.191,00	-20.384.301,00	84,21	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	129.131.492,00	108.747.191,00	-20.384.301,00	84,21	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.131.492,00	108.747.191,00	-20.384.301,00	84,21	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	183.510.884,00	57.378.661,00	-126.132.223,00	31,26	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	83.510.884,00	57.378.661,00	-26.132.223,00	68,70	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.510.884,00	57.378.661,00	-26.132.223,00	68,70	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.1.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0,00	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.1.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0,00	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.1.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	230.933.197,00	228.317.930,00	-2.615.267,00	98,86	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	230.933.197,00	228.317.930,00	-2.615.267,00	98,86	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.933.197,00	228.317.930,00	-2.615.267,00	98,86	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	169.369.300,00	156.306.943,00	-13.062.357,00	92,28	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.1.01		PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN PROVINSI	37.085.800,00	30.063.250,00	-7.022.550,00	81,06	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.1.01.0008		SOSIALISASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PUG KEWENANGAN PROVINSI	37.085.800,00	30.063.250,00	-7.022.550,00	81,06	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	37.085.800,00	30.063.250,00	-7.022.550,00	81,06	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.085.800,00	30.063.250,00	-7.022.550,00	81,06	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.1.02		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN PROVINSI	132.283.500,00	126.243.693,00	-6.039.807,00	95,43	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.1.02.0003		SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI KEWENANGAN PROVINSI	132.283.500,00	126.243.693,00	-6.039.807,00	95,43	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	132.283.500,00	126.243.693,00	-6.039.807,00	95,43	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.283.500,00	126.243.693,00	-6.039.807,00	95,43	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	4.520.485.300,00	4.351.182.101,00	-169.303.199,00	96,25	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.1.01		PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.313.300,00	141.007.445,00	-14.305.855,00	90,78	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.1.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN KEWENANGAN PROVINSI	155.313.300,00	141.007.445,00	-14.305.855,00	90,78	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	155.313.300,00	141.007.445,00	-14.305.855,00	90,78	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.313.300,00	141.007.445,00	-14.305.855,00	90,78	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.1.02		PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.365.172.000,00	4.210.174.656,00	-154.997.344,00	96,44	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.1.02.0001		PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.360.000,00	349.650,00	-3.010.350,00	10,40	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.360.000,00	349.650,00	-3.010.350,00	10,40	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	349.650,00	-3.010.350,00	10,40	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.1.02.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN PROVINSI	4.361.812.000,00	4.209.825.006,00	-151.986.994,00	96,51	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	246.556.000,00	185.712.969,00	-60.843.031,00	75,32	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.556.000,00	185.712.969,00	-60.843.031,00	75,32	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.1.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	4.115.256.000,00	4.024.112.037,00	-91.143.963,00	97,78	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.1.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.115.256.000,00	4.024.112.037,00	-91.143.963,00	97,78	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	9.958.600,00	9.220.350,00	-738.250,00	92,58	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.04.1.02		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK KEWENANGAN PROVINSI	9.958.600,00	9.220.350,00	-738.250,00	92,58	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.04.1.02.0002		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA KEWENANGAN PROVINSI	9.958.600,00	9.220.350,00	-738.250,00	92,58	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.04.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.958.600,00	9.220.350,00	-738.250,00	92,58	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.04.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.958.600,00	9.220.350,00	-738.250,00	92,58	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.732.700,00	2.678.550,00	-54.150,00	98,01	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.05.1.01		PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH PROVINSI	2.732.700,00	2.678.550,00	-54.150,00	98,01	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.05.1.01.0001		PENYEDIAAN DATA GENDER DAN ANAK PROVINSI	2.732.700,00	2.678.550,00	-54.150,00	98,01	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.732.700,00	2.678.550,00	-54.150,00	98,01	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.732.700,00	2.678.550,00	-54.150,00	98,01	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	780.566.400,00	777.429.800,00	-3.136.600,00	99,59	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.1.01		PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN PROVINSI	36.674.800,00	35.126.400,00	-1.548.400,00	95,77	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.1.01.0003		ADVOKASI, SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN PROVINSI	36.674.800,00	35.126.400,00	-1.548.400,00	95,77	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	36.674.800,00	35.126.400,00	-1.548.400,00	95,77	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.674.800,00	35.126.400,00	-1.548.400,00	95,77	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.1.02		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN PROVINSI	743.891.600,00	742.303.400,00	-1.588.200,00	99,78	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.1.02.0001		PENYEDIAAN LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN PROVINSI	648.691.600,00	648.506.400,00	-185.200,00	99,97	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	648.691.600,00	648.506.400,00	-185.200,00	99,97	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	648.691.600,00	648.506.400,00	-185.200,00	99,97	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.1.02.0005		PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMENUHAN HAK ANAK KEWENANGAN PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/ KOTA	95.200.000,00	93.797.000,00	-1.403.000,00	98,52	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	95.200.000,00	93.797.000,00	-1.403.000,00	98,52	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.200.000,00	93.797.000,00	-1.403.000,00	98,52	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	84.860.600,00	78.107.609,00	-6.752.991,00	92,04	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.1.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	84.860.600,00	78.107.609,00	-6.752.991,00	92,04	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.1.03.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS KEWENANGAN PROVINSI	2.099.000,00	2.062.191,00	-36.809,00	98,24	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.099.000,00	2.062.191,00	-36.809,00	98,24	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.099.000,00	2.062.191,00	-36.809,00	98,24	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.1.03.0006		PENGEMBANGAN KIE (KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI) PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK KEWENANGAN PROVINSI	13.743.600,00	13.705.350,00	-38.250,00	99,72	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.1.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.743.600,00	13.705.350,00	-38.250,00	99,72	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.1.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.743.600,00	13.705.350,00	-38.250,00	99,72	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.1.03.0008		PENINGKATAN KAPASITAS SDM LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN BAGI AMPK KEWENANGAN	69.018.000,00	62.340.068,00	-6.677.932,00	90,32	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.1.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	69.018.000,00	62.340.068,00	-6.677.932,00	90,32	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.1.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.018.000,00	62.340.068,00	-6.677.932,00	90,32	
				JUMLAH BELANJA	6.164.276.173,00	5.819.472.354,00	-344.803.819,00	94,40	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-6.154.916.173,00	-5.810.112.354,00	344.803.819,00	94,39	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-6.154.916.173,00	-5.810.112.354,00	344.803.819,00	94,39	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Organisasi : Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.07.3.29.3.32.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	6.104.320.000,00	9.216.531.880,00	3.112.211.880,00	150,98	
	2.07.3.29.3.32.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.104.320.000,00	9.216.531.880,00	3.112.211.880,00	150,98	
	2.07.3.29.3.32.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	6.104.320.000,00	9.216.181.530,00	3.111.861.530,00	150,97	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah; dan c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	2.07.3.29.3.32.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	350.350,00	350.350,00	0,00	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
				JUMLAH PENDAPATAN	6.104.320.000,00	9.216.531.880,00	3.112.211.880,00	150,98	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000		5	BELANJA DAERAH	76.085.500,00	51.779.671,00	-24.305.829,00	68,05	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.02		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	4.160.000,00	4.105.260,00	-54.740,00	98,68	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.02.1.01		PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN AIR TANAH DALAM DAERAH PROVINSI	4.160.000,00	4.105.260,00	-54.740,00	98,68	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.02.1.01.0003		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI	4.160.000,00	4.105.260,00	-54.740,00	98,68	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.160.000,00	4.105.260,00	-54.740,00	98,68	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.160.000,00	4.105.260,00	-54.740,00	98,68	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.03		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	10.100.000,00	10.033.040,00	-66.960,00	99,33	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.03.1.03		PENATAUSAHAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI PADA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH YANG BERADA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	10.100.000,00	10.033.040,00	-66.960,00	99,33	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.03.1.03.0003		PENYUSUNAN REKOMENDASI PERIZINAN DAN INFORMASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI PADA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH YANG BERADA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI TERMASUK WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL LAUT	10.100.000,00	10.033.040,00	-66.960,00	99,33	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.03.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.100.000,00	10.033.040,00	-66.960,00	99,33	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.03.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	10.033.040,00	-66.960,00	99,33	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.05		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	61.825.500,00	37.641.371,00	-24.184.129,00	60,88	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.05.1.08		PENGELOLAAN KONSERVASI ENERGI TERHADAP KEGIATAN YANG IZIN USAHANYA DIKELUARKAN OLEH DAERAH PROVINSI	61.825.500,00	37.641.371,00	-24.184.129,00	60,88	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.05.1.08.0005		MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI PADA KEGIATAN YANG IZIN USAHANYA DIKELUARKAN OLEH DAERAH PROVINSI	61.825.500,00	37.641.371,00	-24.184.129,00	60,88	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.05.1.08.0005	5.1	BELANJA OPERASI	61.825.500,00	37.641.371,00	-24.184.129,00	60,88	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.05.1.08.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.825.500,00	37.641.371,00	-24.184.129,00	60,88	
				JUMLAH BELANJA	76.085.500,00	51.779.671,00	-24.305.829,00	68,05	
				SURPLUS / (DEFISIT)	6.028.234.500,00	9.164.752.209,00	3.136.517.709,00	152,03	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	6.028.234.500,00	9.164.752.209,00	3.136.517.709,00	152,03	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
Organisasi : Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.07.3.29.3.32.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	6.104.320.000,00	9.216.531.880,00	3.112.211.880,00	150,98	
	2.07.3.29.3.32.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.104.320.000,00	9.216.531.880,00	3.112.211.880,00	150,98	
	2.07.3.29.3.32.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	6.104.320.000,00	9.216.181.530,00	3.111.861.530,00	150,97	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah; dan c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	2.07.3.29.3.32.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	350.350,00	350.350,00	0,00	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
				JUMLAH PENDAPATAN	6.104.320.000,00	9.216.531.880,00	3.112.211.880,00	150,98	
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000		5	BELANJA DAERAH	24.884.800,00	23.503.867,00	-1.380.933,00	94,45	
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.32.03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	24.884.800,00	23.503.867,00	-1.380.933,00	94,45	
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.32.03.1.01		PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YANG BERASAL DARI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	24.884.800,00	23.503.867,00	-1.380.933,00	94,45	
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.32.03.1.01.0018		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	24.884.800,00	23.503.867,00	-1.380.933,00	94,45	
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.32.03.1.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	24.884.800,00	23.503.867,00	-1.380.933,00	94,45	
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.32.03.1.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.884.800,00	23.503.867,00	-1.380.933,00	94,45	
				JUMLAH BELANJA	24.884.800,00	23.503.867,00	-1.380.933,00	94,45	
				SURPLUS / (DEFISIT)	6.079.435.200,00	9.193.028.013,00	3.113.592.813,00	151,21	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	6.079.435.200,00	9.193.028.013,00	3.113.592.813,00	151,21	

PEMERINTAH PROVINSI BALI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.07.3.29.3.32.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	6.104.320.000,00	9.216.531.880,00	3.112.211.880,00	150,98	
	2.07.3.29.3.32.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.104.320.000,00	9.216.531.880,00	3.112.211.880,00	150,98	
	2.07.3.29.3.32.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	6.104.320.000,00	9.216.181.530,00	3.111.861.530,00	150,97	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah; dan c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	2.07.3.29.3.32.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	350.350,00	350.350,00	0,00	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
				JUMLAH PENDAPATAN	6.104.320.000,00	9.216.531.880,00	3.112.211.880,00	150,98	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000		5	BELANJA DAERAH	38.653.418.294,00	35.389.729.546,00	-3.263.688.748,00	91,55	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	36.092.435.194,00	32.940.415.734,00	-3.152.019.460,00	91,26	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	31.929.952.568,00	29.053.142.949,00	-2.876.809.619,00	90,99	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.02.0001		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI	31.929.952.568,00	29.053.142.949,00	-2.876.809.619,00	90,99	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	31.929.952.568,00	29.053.142.949,00	-2.876.809.619,00	90,99	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	31.865.452.568,00	28.992.142.949,00	-2.873.309.619,00	90,98	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.500.000,00	61.000.000,00	-3.500.000,00	94,57	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	302.294.462,00	268.526.817,00	-33.767.645,00	88,82	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	23.225.800,00	21.706.100,00	-1.519.700,00	93,45	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.225.800,00	21.706.100,00	-1.519.700,00	93,45	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.225.800,00	21.706.100,00	-1.519.700,00	93,45	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	55.193.900,00	52.066.540,00	-3.127.360,00	94,33	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	55.193.900,00	52.066.540,00	-3.127.360,00	94,33	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.193.900,00	52.066.540,00	-3.127.360,00	94,33	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	92.977.662,00	90.450.800,00	-2.526.862,00	97,28	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	92.977.662,00	90.450.800,00	-2.526.862,00	97,28	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.977.662,00	90.450.800,00	-2.526.862,00	97,28	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	18.995.100,00	13.155.510,00	-5.839.590,00	69,25	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.995.100,00	13.155.510,00	-5.839.590,00	69,25	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.995.100,00	13.155.510,00	-5.839.590,00	69,25	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	8.614.000,00	7.482.500,00	-1.131.500,00	86,86	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.614.000,00	7.482.500,00	-1.131.500,00	86,86	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.614.000,00	7.482.500,00	-1.131.500,00	86,86	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	11.250.000,00	5.925.000,00	-5.325.000,00	52,66	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	11.250.000,00	5.925.000,00	-5.325.000,00	52,66	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	5.925.000,00	-5.325.000,00	52,66	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	92.038.000,00	77.740.367,00	-14.297.633,00	84,46	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	92.038.000,00	77.740.367,00	-14.297.633,00	84,46	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.038.000,00	77.740.367,00	-14.297.633,00	84,46	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	152.010.960,00	133.674.350,00	-18.336.610,00	87,93	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	106.276.700,00	92.118.900,00	-14.157.800,00	86,67	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	106.276.700,00	92.118.900,00	-14.157.800,00	86,67	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.276.700,00	92.118.900,00	-14.157.800,00	86,67	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	45.734.260,00	41.555.450,00	-4.178.810,00	90,86	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	45.734.260,00	41.555.450,00	-4.178.810,00	90,86	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.734.260,00	41.555.450,00	-4.178.810,00	90,86	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.527.997.711,00	1.415.496.521,00	-112.501.190,00	92,63	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.830.800,00	2.440.000,00	-1.390.800,00	63,69	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.830.800,00	2.440.000,00	-1.390.800,00	63,69	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.830.800,00	2.440.000,00	-1.390.800,00	63,69	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	430.053.040,00	329.171.161,00	-100.881.879,00	76,54	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	430.053.040,00	329.171.161,00	-100.881.879,00	76,54	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.053.040,00	329.171.161,00	-100.881.879,00	76,54	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.094.113.871,00	1.083.885.360,00	-10.228.511,00	99,06	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.094.113.871,00	1.083.885.360,00	-10.228.511,00	99,06	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.094.113.871,00	1.083.885.360,00	-10.228.511,00	99,06	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.180.179.493,00	2.069.575.097,00	-110.604.396,00	94,92	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	948.254.000,00	915.421.214,00	-32.832.786,00	96,53	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	948.254.000,00	915.421.214,00	-32.832.786,00	96,53	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	948.254.000,00	915.421.214,00	-32.832.786,00	96,53	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	263.397.641,00	205.102.026,00	-58.295.615,00	77,86	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	263.397.641,00	205.102.026,00	-58.295.615,00	77,86	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.397.641,00	205.102.026,00	-58.295.615,00	77,86	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	968.527.852,00	949.051.857,00	-19.475.995,00	97,98	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	968.527.852,00	949.051.857,00	-19.475.995,00	97,98	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	968.527.852,00	949.051.857,00	-19.475.995,00	97,98	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	291.120.100,00	282.773.686,00	-8.346.414,00	97,13	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.03.1.01		PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI	260.122.500,00	251.898.836,00	-8.223.664,00	96,83	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.03.1.01.0001		PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI	260.122.500,00	251.898.836,00	-8.223.664,00	96,83	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	260.122.500,00	251.898.836,00	-8.223.664,00	96,83	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.122.500,00	251.898.836,00	-8.223.664,00	96,83	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.03.1.04		PENGUKURAN PRODUKTIVITAS TINGKAT DAERAH PROVINSI	30.997.600,00	30.874.850,00	-122.750,00	99,60	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.03.1.04.0001		PENGUKURAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	30.997.600,00	30.874.850,00	-122.750,00	99,60	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.03.1.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.997.600,00	30.874.850,00	-122.750,00	99,60	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.03.1.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.997.600,00	30.874.850,00	-122.750,00	99,60	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	99.137.100,00	92.171.200,00	-6.965.900,00	92,97	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.04.1.01		PELAYANAN ANTAR KERJA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	65.223.300,00	62.730.460,00	-2.492.840,00	96,17	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.04.1.01.0005		PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	65.223.300,00	62.730.460,00	-2.492.840,00	96,17	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.04.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	65.223.300,00	62.730.460,00	-2.492.840,00	96,17	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.04.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.223.300,00	62.730.460,00	-2.492.840,00	96,17	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.04.1.04		PELINDUNGAN PMI (PRA DAN PURNA PENEMPATAN) DI DAERAH PROVINSI	33.913.800,00	29.440.740,00	-4.473.060,00	86,81	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.04.1.04.0001		PENINGKATAN PELINDUNGAN DAN KOMPETENSI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)/PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)	33.913.800,00	29.440.740,00	-4.473.060,00	86,81	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.04.1.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	33.913.800,00	29.440.740,00	-4.473.060,00	86,81	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.04.1.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.913.800,00	29.440.740,00	-4.473.060,00	86,81	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.744.175.850,00	1.667.423.438,00	-76.752.412,00	95,59	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.02		PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	5.566.000,00	4.450.820,00	-1.115.180,00	79,96	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.02.0002		PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	5.566.000,00	4.450.820,00	-1.115.180,00	79,96	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.566.000,00	4.450.820,00	-1.115.180,00	79,96	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.566.000,00	4.450.820,00	-1.115.180,00	79,96	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.03		PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP), UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP), UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK), DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA (UMSK)	1.738.609.850,00	1.662.972.618,00	-75.637.232,00	95,64	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.03.0001		PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP)	25.775.000,00	19.700.000,00	-6.075.000,00	76,43	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.775.000,00	19.700.000,00	-6.075.000,00	76,43	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.775.000,00	19.700.000,00	-6.075.000,00	76,43	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.03.0003		PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.03.0005		PENGEMBANGAN PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA	1.711.034.850,00	1.641.472.618,00	-69.562.232,00	95,93	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.711.034.850,00	1.641.472.618,00	-69.562.232,00	95,93	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.711.034.850,00	1.641.472.618,00	-69.562.232,00	95,93	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.06		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	426.550.050,00	406.945.488,00	-19.604.562,00	95,40	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.06.1.01		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	426.550.050,00	406.945.488,00	-19.604.562,00	95,40	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.06.1.01.0001		PENGAWASAN PELAKSANAAN NORMA KERJA DI PERUSAHAAN	20.300.000,00	20.068.728,00	-231.272,00	98,86	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.06.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.300.000,00	20.068.728,00	-231.272,00	98,86	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.06.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.300.000,00	20.068.728,00	-231.272,00	98,86	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.06.1.01.0003		PELAYANAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PERUSAHAAN	406.250.050,00	386.876.760,00	-19.373.290,00	95,23	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.06.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	406.250.050,00	386.876.760,00	-19.373.290,00	95,23	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.06.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	406.250.050,00	386.876.760,00	-19.373.290,00	95,23	
				JUMLAH BELANJA	38.653.418.294,00	35.389.729.546,00	-3.263.688.748,00	91,55	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-32.549.098.294,00	-26.173.197.666,00	6.375.900.628,00	80,41	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-32.549.098.294,00	-26.173.197.666,00	6.375.900.628,00	80,41	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.13.2.12.2.14.01.0000		5	BELANJA DAERAH	326.704.025,00	251.916.305,00	-74.787.720,00	77,10	
2.12	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	204.017.715,00	166.132.635,00	-37.885.080,00	81,43	
2.12	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.12.02.1.01		PELAYANAN PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN	204.017.715,00	166.132.635,00	-37.885.080,00	81,43	
2.12	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.12.02.1.01.0004		PEMANFAATAN DATA PERISTIWA KEPENDUDUKAN	204.017.715,00	166.132.635,00	-37.885.080,00	81,43	
2.12	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.12.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	204.017.715,00	166.132.635,00	-37.885.080,00	81,43	
2.12	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.12.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.017.715,00	166.132.635,00	-37.885.080,00	81,43	
2.12	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	122.686.310,00	85.783.670,00	-36.902.640,00	69,92	
2.12	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.12.03.1.01		PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	122.686.310,00	85.783.670,00	-36.902.640,00	69,92	
2.12	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.12.03.1.01.0004		FASILITASI PELAYANAN BIDANG PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN/KOTA	122.686.310,00	85.783.670,00	-36.902.640,00	69,92	
2.12	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.12.03.1.01.0004	5.1	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI	122.686.310,00	85.783.670,00	-36.902.640,00	69,92	
2.12	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.12.03.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.686.310,00	85.783.670,00	-36.902.640,00	69,92	
				JUMLAH BELANJA	326.704.025,00	251.916.305,00	-74.787.720,00	77,10	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-326.704.025,00	-251.916.305,00	74.787.720,00	77,10	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-326.704.025,00	-251.916.305,00	74.787.720,00	77,10	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000		5	BELANJA DAERAH	25.462.526.208,00	23.571.748.392,00	-1.890.777.816,00	92,57	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.041.722.804,00	13.007.918.261,00	-1.033.804.543,00	92,63	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	172.924.602,00	163.216.311,00	-9.708.291,00	94,38	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	15.715.000,00	9.813.407,00	-5.901.593,00	62,44	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.715.000,00	9.813.407,00	-5.901.593,00	62,44	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.715.000,00	9.813.407,00	-5.901.593,00	62,44	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	157.209.602,00	153.402.904,00	-3.806.698,00	97,57	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	157.209.602,00	153.402.904,00	-3.806.698,00	97,57	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.209.602,00	153.402.904,00	-3.806.698,00	97,57	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.02		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	11.682.916.555,00	10.785.963.025,00	-896.953.530,00	92,32	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	11.578.483.540,00	10.685.096.987,00	-893.386.553,00	92,28	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.578.483.540,00	10.685.096.987,00	-893.386.553,00	92,28	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	11.544.283.540,00	10.651.346.987,00	-892.936.553,00	92,26	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.200.000,00	33.750.000,00	-450.000,00	98,68	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	104.433.015,00	100.866.038,00	-3.566.977,00	96,58	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	104.433.015,00	100.866.038,00	-3.566.977,00	96,58	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.433.015,00	100.866.038,00	-3.566.977,00	96,58	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	309.966.550,00	273.469.561,00	-36.496.989,00	88,22	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.992.400,00	5.311.350,00	-681.050,00	88,63	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.992.400,00	5.311.350,00	-681.050,00	88,63	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.992.400,00	5.311.350,00	-681.050,00	88,63	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	91.786.700,00	82.056.010,00	-9.730.690,00	89,39	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.523.100,00	18.670.000,00	-6.853.100,00	73,14	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.523.100,00	18.670.000,00	-6.853.100,00	73,14	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	66.263.600,00	63.386.010,00	-2.877.590,00	95,65	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.263.600,00	53.628.000,00	-2.635.600,00	95,31	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	9.758.010,00	-241.990,00	97,58	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	75.738.750,00	75.680.000,00	-58.750,00	99,92	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	75.738.750,00	75.680.000,00	-58.750,00	99,92	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.738.750,00	75.680.000,00	-58.750,00	99,92	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.048.100,00	5.114.095,00	-934.005,00	84,55	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.048.100,00	5.114.095,00	-934.005,00	84,55	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.048.100,00	5.114.095,00	-934.005,00	84,55	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.626.600,00	3.902.500,00	-724.100,00	84,34	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.626.600,00	3.902.500,00	-724.100,00	84,34	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.626.600,00	3.902.500,00	-724.100,00	84,34	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	3.510.000,00	3.393.000,00	-117.000,00	96,66	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.510.000,00	3.393.000,00	-117.000,00	96,66	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.510.000,00	3.393.000,00	-117.000,00	96,66	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	122.264.000,00	98.012.606,00	-24.251.394,00	80,16	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	122.264.000,00	98.012.606,00	-24.251.394,00	80,16	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.264.000,00	98.012.606,00	-24.251.394,00	80,16	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	6.439.600,00	5.761.320,00	-678.280,00	89,46	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	6.439.600,00	5.761.320,00	-678.280,00	89,46	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	6.439.600,00	5.761.320,00	-678.280,00	89,46	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.439.600,00	5.761.320,00	-678.280,00	89,46	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	609.282.069,00	542.967.539,00	-66.314.530,00	89,11	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	174.800.000,00	117.551.650,00	-57.248.350,00	67,24	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	174.800.000,00	117.551.650,00	-57.248.350,00	67,24	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.800.000,00	117.551.650,00	-57.248.350,00	67,24	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	434.482.069,00	425.415.889,00	-9.066.180,00	97,91	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	434.482.069,00	425.415.889,00	-9.066.180,00	97,91	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	434.482.069,00	425.415.889,00	-9.066.180,00	97,91	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.260.193.428,00	1.236.540.505,00	-23.652.923,00	98,12	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	1.151.383.428,00	1.132.781.505,00	-18.601.923,00	98,38	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.151.383.428,00	1.132.781.505,00	-18.601.923,00	98,38	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.151.383.428,00	1.132.781.505,00	-18.601.923,00	98,38	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	108.810.000,00	103.759.000,00	-5.051.000,00	95,35	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	108.810.000,00	103.759.000,00	-5.051.000,00	95,35	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.810.000,00	103.759.000,00	-5.051.000,00	95,35	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.03		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	91.323.202,00	89.821.702,00	-1.501.500,00	98,35	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.03.1.01		FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI	91.323.202,00	89.821.702,00	-1.501.500,00	98,35	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.03.1.01.0001		FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA LINTAS KABUPATEN/KOTA	91.323.202,00	89.821.702,00	-1.501.500,00	98,35	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	91.323.202,00	89.821.702,00	-1.501.500,00	98,35	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.323.202,00	89.821.702,00	-1.501.500,00	98,35	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	440.695.435,00	414.542.485,00	-26.152.950,00	94,06	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.04.1.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	440.695.435,00	414.542.485,00	-26.152.950,00	94,06	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.04.1.01.0002		PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA	95.504.715,00	95.332.215,00	-172.500,00	99,81	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.04.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	95.504.715,00	95.332.215,00	-172.500,00	99,81	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.04.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.504.715,00	95.332.215,00	-172.500,00	99,81	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.04.1.01.0008		FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN	328.910.020,00	318.442.270,00	-10.467.750,00	96,81	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.04.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	328.910.020,00	318.442.270,00	-10.467.750,00	96,81	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.04.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	328.910.020,00	318.442.270,00	-10.467.750,00	96,81	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.04.1.01.0016		FASILITASI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	16.280.700,00	768.000,00	-15.512.700,00	4,71	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.04.1.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	16.280.700,00	768.000,00	-15.512.700,00	4,71	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.04.1.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.280.700,00	768.000,00	-15.512.700,00	4,71	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	10.888.784.767,00	10.059.465.944,00	-829.318.823,00	92,38	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.05.1.01		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM	10.888.784.767,00	10.059.465.944,00	-829.318.823,00	92,38	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.05.1.01.0004		FASILITASI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.018.805.710,00	1.820.952.746,00	-197.852.964,00	90,19	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.05.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.018.805.710,00	1.820.952.746,00	-197.852.964,00	90,19	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.05.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.968.805.710,00	1.770.952.746,00	-197.852.964,00	89,95	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.05.1.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.05.1.01.0005		FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA	99.284.120,00	95.640.920,00	-3.643.200,00	96,33	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.05.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	99.284.120,00	95.640.920,00	-3.643.200,00	96,33	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.05.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.284.120,00	95.640.920,00	-3.643.200,00	96,33	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.05.1.01.0006		FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	265.604.710,00	258.921.592,00	-6.683.118,00	97,48	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.05.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	265.604.710,00	258.921.592,00	-6.683.118,00	97,48	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.05.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.604.710,00	258.921.592,00	-6.683.118,00	97,48	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.05.1.01.0009		FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	8.505.090.227,00	7.883.950.686,00	-621.139.541,00	92,69	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.05.1.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	8.505.090.227,00	7.883.950.686,00	-621.139.541,00	92,69	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.05.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.709.090.227,00	3.487.950.686,00	-221.139.541,00	94,03	
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.05.1.01.0009	5.1.05	Belanja Hibah	4.796.000.000,00	4.396.000.000,00	-400.000.000,00	91,65	
				JUMLAH BELANJA	25.462.526.208,00	23.571.748.392,00	-1.890.777.816,00	92,57	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-25.462.526.208,00	-23.571.748.392,00	1.890.777.816,00	92,57	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-25.462.526.208,00	-23.571.748.392,00	1.890.777.816,00	92,57	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.13.2.12.2.14.01.0000		5	BELANJA DAERAH	474.711.630,00	449.103.561,00	-25.608.069,00	94,60	
2.14	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	474.711.630,00	449.103.561,00	-25.608.069,00	94,60	
2.14	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.14.03.1.01		PENGEMBANGAN DESAIN PROGRAM, PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (KB) SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	474.711.630,00	449.103.561,00	-25.608.069,00	94,60	
2.14	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.14.03.1.01.0010		FASILITASI KERJA SAMA DENGAN STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA DALAM PELAKSANAAN ADVOKASI, PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA	199.955.000,00	194.680.000,00	-5.275.000,00	97,36	
2.14	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.14.03.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	199.955.000,00	194.680.000,00	-5.275.000,00	97,36	
2.14	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.14.03.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.955.000,00	194.680.000,00	-5.275.000,00	97,36	
2.14	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.14.03.1.01.0013		PENGEMBANGAN DAN PENYEDIAAN MATERI DAN SARANA PROMOSI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	274.756.630,00	254.423.561,00	-20.333.069,00	92,59	
2.14	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.14.03.1.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	274.756.630,00	254.423.561,00	-20.333.069,00	92,59	
2.14	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.14.03.1.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.756.630,00	254.423.561,00	-20.333.069,00	92,59	
				PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	474.711.630,00	449.103.561,00	-25.608.069,00	94,60	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-474.711.630,00	-449.103.561,00	25.608.069,00	94,60	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-474.711.630,00	-449.103.561,00	25.608.069,00	94,60	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : Dinas Perhubungan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	3.425.664.000,00	4.205.771.316,00	780.107.316,00	122,77	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.425.664.000,00	4.205.771.316,00	780.107.316,00	122,77	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	5.664.000,00	5.664.000,00	0,00	100,00	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah; c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali; dan d.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.420.000.000,00	4.200.107.316,00	780.107.316,00	122,81	
				JUMLAH PENDAPATAN	3.425.664.000,00	4.205.771.316,00	780.107.316,00	122,77	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	105.533.390.688,40	87.159.981.563,00	-18.373.409.125,40	82,58	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.419.926.317,40	27.492.404.532,00	-5.927.521.785,40	82,26	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	38.167.000,00	29.931.740,00	-8.235.260,00	78,42	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01.0001		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	12.200.000,00	9.179.000,00	-3.021.000,00	75,23	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.200.000,00	9.179.000,00	-3.021.000,00	75,23	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	9.179.000,00	-3.021.000,00	75,23	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	25.967.000,00	20.752.740,00	-5.214.260,00	79,91	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	25.967.000,00	20.752.740,00	-5.214.260,00	79,91	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.967.000,00	20.752.740,00	-5.214.260,00	79,91	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	25.844.686.215,40	20.930.319.875,00	-4.914.366.340,40	80,98	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	25.801.722.215,40	20.888.603.875,00	-4.913.118.340,40	80,95	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.801.722.215,40	20.888.603.875,00	-4.913.118.340,40	80,95	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	25.755.672.215,40	20.845.053.875,00	-4.910.618.340,40	80,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.050.000,00	43.550.000,00	-2.500.000,00	94,57	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	42.964.000,00	41.716.000,00	-1.248.000,00	97,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.964.000,00	41.716.000,00	-1.248.000,00	97,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.964.000,00	41.716.000,00	-1.248.000,00	97,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.986.302.316,00	1.649.482.803,00	-336.819.513,00	83,04	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	12.153.600,00	11.709.000,00	-444.600,00	96,34	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.153.600,00	11.709.000,00	-444.600,00	96,34	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.153.600,00	11.709.000,00	-444.600,00	96,34	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.021.463.814,00	863.626.416,00	-157.837.398,00	84,54	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	437.787.434,00	347.638.486,00	-90.148.948,00	79,40	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.787.434,00	347.638.486,00	-90.148.948,00	79,40	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	583.676.380,00	515.987.930,00	-67.688.450,00	88,40	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	583.676.380,00	515.987.930,00	-67.688.450,00	88,40	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	95.924.588,00	91.203.600,00	-4.720.988,00	95,07	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	95.924.588,00	91.203.600,00	-4.720.988,00	95,07	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.924.588,00	91.203.600,00	-4.720.988,00	95,07	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	22.249.700,00	17.423.600,00	-4.826.100,00	78,30	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	22.249.700,00	17.423.600,00	-4.826.100,00	78,30	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.249.700,00	17.423.600,00	-4.826.100,00	78,30	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	834.510.614,00	665.520.187,00	-168.990.427,00	79,74	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	834.510.614,00	665.520.187,00	-168.990.427,00	79,74	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	834.510.614,00	665.520.187,00	-168.990.427,00	79,74	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.078.988.080,00	2.038.200.813,00	-40.787.267,00	98,03	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.922.000.000,00	1.922.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.922.000.000,00	1.922.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.07.0002	5.1.05	Belanja Hibah	1.922.000.000,00	1.922.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.07.0005		PENGADAAN MEBEL	96.534.000,00	61.500.013,00	-35.033.987,00	63,70	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	96.534.000,00	61.500.013,00	-35.033.987,00	63,70	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.534.000,00	61.500.013,00	-35.033.987,00	63,70	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	60.454.080,00	54.700.800,00	-5.753.280,00	90,48	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	60.454.080,00	54.700.800,00	-5.753.280,00	90,48	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.454.080,00	54.700.800,00	-5.753.280,00	90,48	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	819.473.020,00	709.392.646,00	-110.080.374,00	86,56	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.860.900,00	4.370.000,00	-2.490.900,00	63,69	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.860.900,00	4.370.000,00	-2.490.900,00	63,69	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.860.900,00	4.370.000,00	-2.490.900,00	63,69	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	386.160.000,00	293.488.608,00	-92.671.392,00	76,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	386.160.000,00	293.488.608,00	-92.671.392,00	76,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.160.000,00	293.488.608,00	-92.671.392,00	76,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	426.452.120,00	411.534.038,00	-14.918.082,00	96,50	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	426.452.120,00	411.534.038,00	-14.918.082,00	96,50	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.452.120,00	411.534.038,00	-14.918.082,00	96,50	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.652.309.686,00	2.135.076.655,00	-517.233.031,00	80,49	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN PIMPINAN	317.954.092,00	196.664.492,00	-121.289.600,00	61,85	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	317.954.092,00	196.664.492,00	-121.289.600,00	61,85	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.954.092,00	196.664.492,00	-121.289.600,00	61,85	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.288.429.296,00	929.341.393,00	-359.087.903,00	72,12	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.288.429.296,00	929.341.393,00	-359.087.903,00	72,12	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.288.429.296,00	929.341.393,00	-359.087.903,00	72,12	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	124.840.000,00	93.910.002,00	-30.929.998,00	75,22	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	124.840.000,00	93.910.002,00	-30.929.998,00	75,22	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.840.000,00	93.910.002,00	-30.929.998,00	75,22	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	921.086.298,00	915.160.768,00	-5.925.530,00	99,35	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	921.086.298,00	915.160.768,00	-5.925.530,00	99,35	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	921.086.298,00	915.160.768,00	-5.925.530,00	99,35	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	71.027.660.216,00	58.690.759.882,00	-12.336.900.334,00	82,63	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.02		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI	4.023.394.030,00	3.477.879.954,00	-545.514.076,00	86,44	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.02.0002		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI	2.586.181.610,00	2.337.376.633,00	-248.804.977,00	90,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.926.738.410,00	1.824.851.424,00	-101.886.986,00	94,71	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.926.738.410,00	1.824.851.424,00	-101.886.986,00	94,71	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	659.443.200,00	512.525.209,00	-146.917.991,00	77,72	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	659.443.200,00	512.525.209,00	-146.917.991,00	77,72	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.02.0004		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN	1.437.212.420,00	1.140.503.321,00	-296.709.099,00	79,35	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.437.212.420,00	1.140.503.321,00	-296.709.099,00	79,35	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.437.212.420,00	1.140.503.321,00	-296.709.099,00	79,35	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.05		PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN PROVINSI	1.431.103.610,00	1.340.091.987,00	-91.011.623,00	93,64	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.05.0001		PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN PROVINSI	1.192.208.593,00	1.102.396.970,00	-89.811.623,00	92,46	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	892.208.593,00	813.881.970,00	-78.326.623,00	91,22	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	892.208.593,00	813.881.970,00	-78.326.623,00	91,22	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.05.0001	5.2	BELANJA MODAL	300.000.000,00	288.515.000,00	-11.485.000,00	96,17	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.05.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	192.500.000,00	-7.500.000,00	96,25	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.05.0001	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	96.015.000,00	-3.985.000,00	96,01	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.05.0004		PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN PROVINSI	216.395.017,00	216.195.017,00	-200.000,00	99,90	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	216.395.017,00	216.195.017,00	-200.000,00	99,90	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.395.017,00	216.195.017,00	-200.000,00	99,90	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.05.0005		FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN UNTUK JARINGAN JALAN PROVINSI	22.500.000,00	21.500.000,00	-1.000.000,00	95,55	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	22.500.000,00	21.500.000,00	-1.000.000,00	95,55	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	21.500.000,00	-1.000.000,00	95,55	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.06		PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) UNTUK JALAN PROVINSI	73.926.000,00	50.397.500,00	-23.528.500,00	68,17	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.06.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENILAIAN HASIL ANDALALIN	66.726.000,00	43.197.500,00	-23.528.500,00	64,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	66.726.000,00	43.197.500,00	-23.528.500,00	64,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.726.000,00	43.197.500,00	-23.528.500,00	64,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.06.0004		PENGAWASAN PELAKSANAAN REKOMENDASI ANDALALIN	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.08		PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	65.065.269.141,00	53.431.485.806,00	-11.633.783.335,00	82,11	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.08.0003		PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	65.065.269.141,00	53.431.485.806,00	-11.633.783.335,00	82,11	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	65.065.269.141,00	53.431.485.806,00	-11.633.783.335,00	82,11	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.065.269.141,00	53.431.485.806,00	-11.633.783.335,00	82,11	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.10		PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK ANTARKOTA DALAM DAERAH PROVINSI DAN PERKOTAAN YANG MELAMPAUI BATAS 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	70.876.000,00	52.179.800,00	-18.696.200,00	73,62	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.10.0003		SOSIALISASI DAN UJI COBA PELAKSANAAN KEBIJAKAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN KEWENANGAN PROVINSI	70.876.000,00	52.179.800,00	-18.696.200,00	73,62	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.10.0003	5.1	BELANJA OPERASI	70.876.000,00	52.179.800,00	-18.696.200,00	73,62	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.10.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.876.000,00	52.179.800,00	-18.696.200,00	73,62	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.13		PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	363.091.435,00	338.724.835,00	-24.366.600,00	93,28	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.13.0001		FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK KEWENANGAN PROVINSI DALAM SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	363.091.435,00	338.724.835,00	-24.366.600,00	93,28	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.13.0001	5.1	BELANJA OPERASI	363.091.435,00	338.724.835,00	-24.366.600,00	93,28	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	363.091.435,00	338.724.835,00	-24.366.600,00	93,28	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	584.527.925,00	493.709.500,00	-90.818.425,00	84,46	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.08		PENETAPAN RENCANA INDUK DAN DAERAH LINGKUNGAN KERJA (DLKR)/DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN (DLKP) PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL	527.945.725,00	440.963.500,00	-86.982.225,00	83,52	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.08.0001		PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK DAN DAERAH LINGKUNGAN KERJA (DLKR)/DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN (DLKP) PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL	527.945.725,00	440.963.500,00	-86.982.225,00	83,52	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	527.945.725,00	440.963.500,00	-86.982.225,00	83,52	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	527.945.725,00	440.963.500,00	-86.982.225,00	83,52	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09		PEMBANGUNAN, PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL	56.582.200,00	52.746.000,00	-3.836.200,00	93,22	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0004		PENGAWASAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL	56.582.200,00	52.746.000,00	-3.836.200,00	93,22	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0004	5.1	BELANJA OPERASI	56.582.200,00	52.746.000,00	-3.836.200,00	93,22	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.582.200,00	52.746.000,00	-3.836.200,00	93,22	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	501.276.230,00	483.107.649,00	-18.168.581,00	96,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.05.1.01		PENETAPAN RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN	501.276.230,00	483.107.649,00	-18.168.581,00	96,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.05.1.01.0001		PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN	501.276.230,00	483.107.649,00	-18.168.581,00	96,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	501.276.230,00	483.107.649,00	-18.168.581,00	96,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	501.276.230,00	483.107.649,00	-18.168.581,00	96,37	
				JUMLAH BELANJA	105.533.390.688,40	87.159.981.563,00	-18.373.409.125,40	82,58	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-102.107.726.688,40	-82.954.210.247,00	19.153.516.441,40	81,24	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-102.107.726.688,40	-82.954.210.247,00	19.153.516.441,40	81,24	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000		5	BELANJA DAERAH	246.563.487.674,00	147.170.475.702,93	-99.393.011.971,07	59,68	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.984.895.928,00	30.055.207.901,95	-2.929.688.026,05	91,11	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	32.064.000,00	24.875.600,00	-7.188.400,00	77,58	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	18.173.700,00	14.027.700,00	-4.146.000,00	77,18	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.173.700,00	14.027.700,00	-4.146.000,00	77,18	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.173.700,00	14.027.700,00	-4.146.000,00	77,18	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	13.890.300,00	10.847.900,00	-3.042.400,00	78,09	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	13.890.300,00	10.847.900,00	-3.042.400,00	78,09	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.890.300,00	10.847.900,00	-3.042.400,00	78,09	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.02		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	27.265.349.524,00	25.199.472.246,00	-2.065.877.278,00	92,42	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	24.255.027.824,00	22.218.144.996,00	-2.036.882.828,00	91,60	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.255.027.824,00	22.218.144.996,00	-2.036.882.828,00	91,60	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	24.161.727.824,00	22.147.944.996,00	-2.013.782.828,00	91,66	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.300.000,00	70.200.000,00	-23.100.000,00	75,24	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	3.010.321.700,00	2.981.327.250,00	-28.994.450,00	99,03	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.010.321.700,00	2.981.327.250,00	-28.994.450,00	99,03	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.071.700,00	90.077.250,00	-28.994.450,00	75,64	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.02.0003	5.1.05	Belanja Hibah	2.891.250.000,00	2.891.250.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	493.026.800,00	350.682.734,00	-142.344.066,00	71,12	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.443.000,00	14.700.000,00	-743.000,00	95,18	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.443.000,00	14.700.000,00	-743.000,00	95,18	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.443.000,00	14.700.000,00	-743.000,00	95,18	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	42.914.800,00	33.272.250,00	-9.642.550,00	77,53	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.914.800,00	33.272.250,00	-9.642.550,00	77,53	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.914.800,00	33.272.250,00	-9.642.550,00	77,53	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	87.500.000,00	76.016.000,00	-11.484.000,00	86,87	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	87.500.000,00	76.016.000,00	-11.484.000,00	86,87	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.500.000,00	76.016.000,00	-11.484.000,00	86,87	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	13.670.400,00	6.840.300,00	-6.830.100,00	50,03	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.670.400,00	6.840.300,00	-6.830.100,00	50,03	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.670.400,00	6.840.300,00	-6.830.100,00	50,03	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	31.522.600,00	29.568.000,00	-1.954.600,00	93,79	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	31.522.600,00	29.568.000,00	-1.954.600,00	93,79	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.522.600,00	29.568.000,00	-1.954.600,00	93,79	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	12.630.000,00	7.482.000,00	-5.148.000,00	59,23	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	12.630.000,00	7.482.000,00	-5.148.000,00	59,23	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.630.000,00	7.482.000,00	-5.148.000,00	59,23	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	289.346.000,00	182.804.184,00	-106.541.816,00	63,17	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	289.346.000,00	182.804.184,00	-106.541.816,00	63,17	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.346.000,00	182.804.184,00	-106.541.816,00	63,17	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.467.428.480,00	1.144.047.668,95	-323.380.811,05	77,96	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.07.0005		PENGADAAN MEBEL	199.037.500,00	133.772.550,00	-65.264.950,00	67,20	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	199.037.500,00	133.772.550,00	-65.264.950,00	67,20	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.037.500,00	133.772.550,00	-65.264.950,00	67,20	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	580.000.000,00	352.620.129,95	-227.379.870,05	60,79	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.07.0009	5.2	BELANJA MODAL	580.000.000,00	352.620.129,95	-227.379.870,05	60,79	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.07.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	580.000.000,00	352.620.129,95	-227.379.870,05	60,79	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	688.390.980,00	657.654.989,00	-30.735.991,00	95,53	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	688.390.980,00	657.654.989,00	-30.735.991,00	95,53	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	688.390.980,00	657.654.989,00	-30.735.991,00	95,53	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	601.942.200,00	502.971.360,00	-98.970.840,00	83,55	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.998.700,00	1.910.000,00	-1.088.700,00	63,69	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.998.700,00	1.910.000,00	-1.088.700,00	63,69	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.998.700,00	1.910.000,00	-1.088.700,00	63,69	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	418.943.500,00	321.301.360,00	-97.642.140,00	76,69	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	418.943.500,00	321.301.360,00	-97.642.140,00	76,69	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	418.943.500,00	321.301.360,00	-97.642.140,00	76,69	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	180.000.000,00	179.760.000,00	-240.000,00	99,86	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	179.760.000,00	-240.000,00	99,86	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	179.760.000,00	-240.000,00	99,86	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.125.084.924,00	2.833.158.293,00	-291.926.631,00	90,65	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	2.153.928.888,00	1.907.224.191,00	-246.704.697,00	88,54	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.153.928.888,00	1.907.224.191,00	-246.704.697,00	88,54	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.153.928.888,00	1.907.224.191,00	-246.704.697,00	88,54	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	3.600.000,00	3.000.000,00	-600.000,00	83,33	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.000.000,00	-600.000,00	83,33	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.000.000,00	-600.000,00	83,33	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	99.490.000,00	60.844.346,00	-38.645.654,00	61,15	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	99.490.000,00	60.844.346,00	-38.645.654,00	61,15	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.490.000,00	60.844.346,00	-38.645.654,00	61,15	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	781.886.036,00	777.269.357,00	-4.616.679,00	99,40	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	781.886.036,00	777.269.357,00	-4.616.679,00	99,40	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	781.886.036,00	777.269.357,00	-4.616.679,00	99,40	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	86.180.000,00	84.820.399,00	-1.359.601,00	98,42	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	86.180.000,00	84.820.399,00	-1.359.601,00	98,42	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.180.000,00	84.820.399,00	-1.359.601,00	98,42	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	10.121.323.906,00	8.361.853.147,00	-1.759.470.759,00	82,61	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01		PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	10.121.323.906,00	8.361.853.147,00	-1.759.470.759,00	82,61	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0015		PENYUSUNAN KONTEN	1.007.657.665,00	583.426.595,00	-424.231.070,00	57,89	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	882.999.015,00	509.450.895,00	-373.548.120,00	57,69	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	882.999.015,00	509.450.895,00	-373.548.120,00	57,69	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0015	5.2	BELANJA MODAL	124.658.650,00	73.975.700,00	-50.682.950,00	59,34	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.658.650,00	73.975.700,00	-50.682.950,00	59,34	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0018		DISEMINASI INFORMASI	855.849.937,00	705.401.397,00	-150.448.540,00	82,42	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	626.898.437,00	601.727.397,00	-25.171.040,00	95,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	626.898.437,00	601.727.397,00	-25.171.040,00	95,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0018	5.2	BELANJA MODAL	228.951.500,00	103.674.000,00	-125.277.500,00	45,28	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0018	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	228.951.500,00	103.674.000,00	-125.277.500,00	45,28	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0020		DUKUNGAN ADMINISTRATIF, KEUANGAN, DAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	1.618.158.099,00	1.442.751.486,00	-175.406.613,00	89,16	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	1.618.158.099,00	1.442.751.486,00	-175.406.613,00	89,16	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.618.158.099,00	1.442.751.486,00	-175.406.613,00	89,16	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0021		KEMITRAAN KOMUNIKASI DENGAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT	2.195.669.235,00	2.191.706.664,00	-3.962.571,00	99,81	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	2.195.669.235,00	2.191.706.664,00	-3.962.571,00	99,81	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.669.235,00	193.908.570,00	-1.760.665,00	99,10	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0021	5.1.05	Belanja Hibah	2.000.000.000,00	1.997.798.094,00	-2.201.906,00	99,88	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0022		PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1.223.294.212,00	504.122.509,00	-719.171.703,00	41,21	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	1.223.294.212,00	504.122.509,00	-719.171.703,00	41,21	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.223.294.212,00	504.122.509,00	-719.171.703,00	41,21	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0023		MONITORING INFORMASI KEBIJAKAN, OPINI, DAN ASPIRASI PUBLIK	271.679.010,00	208.459.772,00	-63.219.238,00	76,73	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	271.679.010,00	208.459.772,00	-63.219.238,00	76,73	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.679.010,00	208.459.772,00	-63.219.238,00	76,73	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0024		PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	2.949.015.748,00	2.725.984.724,00	-223.031.024,00	92,43	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0024	5.1	BELANJA OPERASI	2.902.153.548,00	2.725.984.724,00	-176.168.824,00	93,92	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.902.153.548,00	2.725.984.724,00	-176.168.824,00	93,92	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0024	5.2	BELANJA MODAL	46.862.200,00	0,00	-46.862.200,00	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0024	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.862.200,00	0,00	-46.862.200,00	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	203.457.267.840,00	108.753.414.653,98	-94.703.853.186,02	53,45	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02		PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	203.457.267.840,00	108.753.414.653,98	-94.703.853.186,02	53,45	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0014		PENYELENGGARAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH DAERAH	4.099.398.250,00	3.437.746.669,00	-661.651.581,00	83,85	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	3.769.568.200,00	3.214.838.090,00	-554.730.110,00	85,28	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.769.568.200,00	3.214.838.090,00	-554.730.110,00	85,28	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0014	5.2	BELANJA MODAL	329.830.050,00	222.908.579,00	-106.921.471,00	67,58	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	329.830.050,00	222.908.579,00	-106.921.471,00	67,58	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0016		FASILITASI PENYELENGGARAAN SPBE DI LINGKUNGAN PEMDA	3.414.422.240,00	2.680.052.865,00	-734.369.375,00	78,49	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	3.080.031.900,00	2.367.031.907,00	-712.999.993,00	76,85	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.080.031.900,00	2.367.031.907,00	-712.999.993,00	76,85	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0016	5.2	BELANJA MODAL	334.390.340,00	313.020.958,00	-21.369.382,00	93,60	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	334.390.340,00	313.020.958,00	-21.369.382,00	93,60	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0018		KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PROVINSI CERDAS	10.003.000.592,00	6.518.442.212,00	-3.484.558.380,00	65,16	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	10.003.000.592,00	6.518.442.212,00	-3.484.558.380,00	65,16	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.003.000.592,00	6.518.442.212,00	-3.484.558.380,00	65,16	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0019		KETERHUBUNGAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA KE JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	7.124.078.558,00	6.295.316.819,25	-828.761.738,75	88,36	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0019	5.1	BELANJA OPERASI	2.585.446.000,00	2.397.225.483,00	-188.220.517,00	92,71	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.585.446.000,00	2.397.225.483,00	-188.220.517,00	92,71	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0019	5.2	BELANJA MODAL	4.538.632.558,00	3.898.091.336,25	-640.541.221,75	85,88	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0019	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.288.632.558,00	2.655.423.126,80	-633.209.431,20	80,74	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0019	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.000.000,00	995.000.000,00	-5.000.000,00	99,50	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0019	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	250.000.000,00	247.668.209,45	-2.331.790,55	99,06	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0025		KOORDINASI PENYUSUNAN PROSES BISNIS	2.588.539.600,00	661.923.955,00	-1.926.615.645,00	25,57	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	2.588.539.600,00	661.923.955,00	-1.926.615.645,00	25,57	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.588.539.600,00	661.923.955,00	-1.926.615.645,00	25,57	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0029		PENYELENGGARAAN PUSAT KENDALI PEMERINTAH DAERAH	157.949.018.500,00	72.298.712.071,73	-85.650.306.428,27	45,77	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0029	5.1	BELANJA OPERASI	3.533.566.500,00	2.856.434.338,00	-677.132.162,00	80,83	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.533.566.500,00	2.856.434.338,00	-677.132.162,00	80,83	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0029	5.2	BELANJA MODAL	154.415.452.000,00	69.442.277.733,73	-84.973.174.266,27	44,97	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0029	5.2.01	Belanja Modal Tanah	30.298.325.760,00	1.181.018.000,00	-29.117.307.760,00	3,89	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0029	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.556.674.240,00	17.383.898.653,00	-172.775.587,00	99,01	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0029	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	105.100.452.000,00	49.621.339.115,83	-55.479.112.884,17	47,21	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0029	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.400.000.000,00	1.198.500.000,00	-201.500.000,00	85,60	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0029	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	60.000.000,00	57.521.964,90	-2.478.035,10	95,86	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0030		PENYELENGGARAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	18.278.810.100,00	16.861.220.062,00	-1.417.590.038,00	92,24	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0030	5.1	BELANJA OPERASI	16.423.350.100,00	15.143.341.588,00	-1.280.008.512,00	92,20	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.423.350.100,00	15.143.341.588,00	-1.280.008.512,00	92,20	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0030	5.2	BELANJA MODAL	1.855.460.000,00	1.717.878.474,00	-137.581.526,00	92,58	
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0030	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.855.460.000,00	1.717.878.474,00	-137.581.526,00	92,58	
				JUMLAH BELANJA	246.563.487.674,00	147.170.475.702,93	-99.393.011.971,07	59,68	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-246.563.487.674,00	(147.170.475.702,93)	99.393.011.971,07	59,68	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-246.563.487.674,00	(147.170.475.702,93)	99.393.011.971,07	59,68	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.20	2.16.2.20.2.21.02.0000		5	BELANJA DAERAH	281.847.820,00	258.982.763,00	-22.865.057,00	91,88	
2.20	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	281.847.820,00	258.982.763,00	-22.865.057,00	91,88	
2.20	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.20.02.1.01		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH PROVINSI	281.847.820,00	258.982.763,00	-22.865.057,00	91,88	
2.20	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.20.02.1.01.0007		PENGINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN STATISTIK SEKTORAL	92.437.805,00	83.880.746,00	-8.557.059,00	90,74	
2.20	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.20.02.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	92.437.805,00	83.880.746,00	-8.557.059,00	90,74	
2.20	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.20.02.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.437.805,00	83.880.746,00	-8.557.059,00	90,74	
2.20	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.20.02.1.01.0008		PENINGKATAN KUALITAS DATA STATISTIK SEKTORAL	98.217.405,00	89.767.224,00	-8.450.181,00	91,39	
2.20	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.20.02.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	98.217.405,00	89.767.224,00	-8.450.181,00	91,39	
2.20	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.20.02.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.217.405,00	89.767.224,00	-8.450.181,00	91,39	
2.20	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.20.02.1.01.0011		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	91.192.610,00	85.334.793,00	-5.857.817,00	93,57	
2.20	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.20.02.1.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	91.192.610,00	85.334.793,00	-5.857.817,00	93,57	
2.20	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.20.02.1.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.192.610,00	85.334.793,00	-5.857.817,00	93,57	
				JUMLAH BELANJA	281.847.820,00	258.982.763,00	-22.865.057,00	91,88	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-281.847.820,00	-258.982.763,00	22.865.057,00	91,88	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-281.847.820,00	-258.982.763,00	22.865.057,00	91,88	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000		5	BELANJA DAERAH	324.157.405,00	292.239.835,00	-31.917.570,00	90,15	
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	324.157.405,00	292.239.835,00	-31.917.570,00	90,15	
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.21.02.1.01		PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	260.054.900,00	232.937.175,00	-27.117.725,00	89,57	
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.21.02.1.01.0001		PENETAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI DAN JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	34.024.900,00	24.982.564,00	-9.042.336,00	73,42	
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.21.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.024.900,00	24.982.564,00	-9.042.336,00	73,42	
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.21.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.024.900,00	24.982.564,00	-9.042.336,00	73,42	
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.21.02.1.01.0002		PELAKSANAAN ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	151.222.200,00	142.082.906,00	-9.139.294,00	93,95	
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.21.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	121.620.000,00	116.996.906,00	-4.623.094,00	96,19	
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.21.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.620.000,00	116.996.906,00	-4.623.094,00	96,19	
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.21.02.1.01.0002	5.2	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	29.602.200,00	25.086.000,00	-4.516.200,00	84,74	
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.21.02.1.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.602.200,00	25.086.000,00	-4.516.200,00	84,74	
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.21.02.1.01.0003		PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK	10.312.800,00	9.401.500,00	-911.300,00	91,16	
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.21.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.312.800,00	9.401.500,00	-911.300,00	91,16	
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.21.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.312.800,00	9.401.500,00	-911.300,00	91,16	
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.21.02.1.01.0004		PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	64.495.000,00	56.470.205,00	-8.024.795,00	87,55	
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.21.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	64.495.000,00	56.470.205,00	-8.024.795,00	87,55	
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.21.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.495.000,00	56.470.205,00	-8.024.795,00	87,55	
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.21.02.1.02		PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH PROVINSI	64.102.505,00	59.302.660,00	-4.799.845,00	92,51	
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.21.02.1.02.0001		OPERASIONALISASI JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	64.102.505,00	59.302.660,00	-4.799.845,00	92,51	
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.21.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	64.102.505,00	59.302.660,00	-4.799.845,00	92,51	
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.21.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.102.505,00	59.302.660,00	-4.799.845,00	92,51	
				JUMLAH BELANJA	324.157.405,00	292.239.835,00	-31.917.570,00	90,15	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-324.157.405,00	-292.239.835,00	31.917.570,00	90,15	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-324.157.405,00	-292.239.835,00	31.917.570,00	90,15	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	23.029.940.683,00	21.169.609.316,61	-1.860.331.366,39	91,92	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.903.835.662,00	15.585.542.487,61	-1.318.293.174,39	92,20	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	110.608.802,00	91.485.732,00	-19.123.070,00	82,71	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	102.343.902,00	84.564.932,00	-17.778.970,00	82,62	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	102.343.902,00	84.564.932,00	-17.778.970,00	82,62	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.343.902,00	84.564.932,00	-17.778.970,00	82,62	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	8.264.900,00	6.920.800,00	-1.344.100,00	83,73	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	8.264.900,00	6.920.800,00	-1.344.100,00	83,73	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.264.900,00	6.920.800,00	-1.344.100,00	83,73	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.02		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	13.165.169.179,00	12.207.439.336,00	-957.729.843,00	92,72	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	13.165.169.179,00	12.207.439.336,00	-957.729.843,00	92,72	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.165.169.179,00	12.207.439.336,00	-957.729.843,00	92,72	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	13.114.769.179,00	12.157.539.336,00	-957.229.843,00	92,70	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	49.900.000,00	-500.000,00	99,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	285.707.244,00	238.835.466,00	-46.871.778,00	83,59	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	11.697.400,00	10.517.250,00	-1.180.150,00	89,91	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.697.400,00	10.517.250,00	-1.180.150,00	89,91	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.697.400,00	10.517.250,00	-1.180.150,00	89,91	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	61.551.900,00	44.265.860,00	-17.286.040,00	71,91	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	61.551.900,00	44.265.860,00	-17.286.040,00	71,91	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.551.900,00	44.265.860,00	-17.286.040,00	71,91	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	132.975.244,00	131.804.040,00	-1.171.204,00	99,11	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	132.975.244,00	131.804.040,00	-1.171.204,00	99,11	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.975.244,00	131.804.040,00	-1.171.204,00	99,11	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	22.499.700,00	14.801.620,00	-7.698.080,00	65,78	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	22.499.700,00	14.801.620,00	-7.698.080,00	65,78	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.499.700,00	14.801.620,00	-7.698.080,00	65,78	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	5.490.000,00	3.625.000,00	-1.865.000,00	66,02	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.490.000,00	3.625.000,00	-1.865.000,00	66,02	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.490.000,00	3.625.000,00	-1.865.000,00	66,02	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	51.493.000,00	33.821.696,00	-17.671.304,00	65,68	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	51.493.000,00	33.821.696,00	-17.671.304,00	65,68	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.493.000,00	33.821.696,00	-17.671.304,00	65,68	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	683.055.300,00	629.293.989,00	-53.761.311,00	92,12	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	683.055.300,00	629.293.989,00	-53.761.311,00	92,12	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	683.055.300,00	629.293.989,00	-53.761.311,00	92,12	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	683.055.300,00	629.293.989,00	-53.761.311,00	92,12	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.157.965.636,00	1.046.380.777,00	-111.584.859,00	90,36	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.983.000,00	1.900.000,00	-1.083.000,00	63,69	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.983.000,00	1.900.000,00	-1.083.000,00	63,69	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.983.000,00	1.900.000,00	-1.083.000,00	63,69	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	294.500.000,00	193.095.024,00	-101.404.976,00	65,56	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	294.500.000,00	193.095.024,00	-101.404.976,00	65,56	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.500.000,00	193.095.024,00	-101.404.976,00	65,56	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	860.482.636,00	851.385.753,00	-9.096.883,00	98,94	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	860.482.636,00	851.385.753,00	-9.096.883,00	98,94	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	860.482.636,00	851.385.753,00	-9.096.883,00	98,94	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.501.329.501,00	1.372.107.187,61	-129.222.313,39	91,39	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	889.668.149,00	802.110.449,00	-87.557.700,00	90,15	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	889.668.149,00	802.110.449,00	-87.557.700,00	90,15	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	889.668.149,00	802.110.449,00	-87.557.700,00	90,15	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	51.990.000,00	35.490.250,00	-16.499.750,00	68,26	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	51.990.000,00	35.490.250,00	-16.499.750,00	68,26	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.990.000,00	35.490.250,00	-16.499.750,00	68,26	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	559.671.352,00	534.506.488,61	-25.164.863,39	95,50	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	287.671.352,00	266.527.549,00	-21.143.803,00	92,65	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.671.352,00	266.527.549,00	-21.143.803,00	92,65	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	272.000.000,00	267.978.939,61	-4.021.060,39	98,52	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	272.000.000,00	267.978.939,61	-4.021.060,39	98,52	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.02		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	789.809.889,00	751.954.289,00	-37.855.600,00	95,20	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.02.1.01		PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	779.890.289,00	742.362.289,00	-37.528.000,00	95,18	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.02.1.01.0002		FASILITASI IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	779.890.289,00	742.362.289,00	-37.528.000,00	95,18	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	779.890.289,00	742.362.289,00	-37.528.000,00	95,18	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	770.890.289,00	733.362.289,00	-37.528.000,00	95,13	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.02.1.01.0002	5.1.04	Belanja Subsidi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.02.1.02		PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	9.919.600,00	9.592.000,00	-327.600,00	96,69	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.02.1.02.0003		FASILITASI IZIN USAHA PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	9.919.600,00	9.592.000,00	-327.600,00	96,69	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.919.600,00	9.592.000,00	-327.600,00	96,69	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.919.600,00	9.592.000,00	-327.600,00	96,69	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	77.397.105,00	74.975.265,00	-2.421.840,00	96,87	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.03.1.01		PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	26.908.000,00	25.051.560,00	-1.856.440,00	93,10	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.03.1.01.0003		PENGUATAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN KOPERASI	26.908.000,00	25.051.560,00	-1.856.440,00	93,10	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	26.908.000,00	25.051.560,00	-1.856.440,00	93,10	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.908.000,00	25.051.560,00	-1.856.440,00	93,10	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.03.1.02		PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	50.489.105,00	49.923.705,00	-565.400,00	98,88	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.03.1.02.0002		PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	50.489.105,00	49.923.705,00	-565.400,00	98,88	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.03.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	50.489.105,00	49.923.705,00	-565.400,00	98,88	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.03.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.489.105,00	49.923.705,00	-565.400,00	98,88	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	4.399.123.302,00	4.006.607.513,00	-392.515.789,00	91,07	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.05.1.01		PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	4.399.123.302,00	4.006.607.513,00	-392.515.789,00	91,07	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.05.1.01.0001		PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI	4.399.123.302,00	4.006.607.513,00	-392.515.789,00	91,07	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.399.123.302,00	4.006.607.513,00	-392.515.789,00	91,07	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.399.123.302,00	4.006.607.513,00	-392.515.789,00	91,07	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	87.702.810,00	81.014.609,00	-6.688.201,00	92,37	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.06.1.01		PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	87.702.810,00	81.014.609,00	-6.688.201,00	92,37	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.06.1.01.0002		PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH, AKSES PASAR, AKSES PEMBIAYAAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENATAAN MANAJEMEN, STANDARISASI, DAN RESTRUKTURISASI USAHA	61.553.210,00	55.462.310,00	-6.090.900,00	90,10	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.06.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	61.553.210,00	55.462.310,00	-6.090.900,00	90,10	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.06.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.553.210,00	55.462.310,00	-6.090.900,00	90,10	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.06.1.01.0009		PEMBERDAYAAN KOPERASI DENGAN KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	26.149.600,00	25.552.299,00	-597.301,00	97,71	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.06.1.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	26.149.600,00	25.552.299,00	-597.301,00	97,71	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.06.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.149.600,00	25.552.299,00	-597.301,00	97,71	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	404.183.821,00	381.575.309,00	-22.608.512,00	94,40	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.1.01		PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	404.183.821,00	381.575.309,00	-22.608.512,00	94,40	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.1.01.0001		MENUMBUHKEMBANGKAN UMKM UNTUK MENJADI USAHA YANG TANGGUH DAN MANDIRI SEHINGGA DAPAT MENINGKATKAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA, PEMERATAAN PENDAPATAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN PENGENTASAN KEMISKINAN	338.343.821,00	326.750.299,00	-11.593.522,00	96,57	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	338.343.821,00	326.750.299,00	-11.593.522,00	96,57	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.343.821,00	326.750.299,00	-11.593.522,00	96,57	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.1.01.0002		PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN UMKM SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM UMKM DAN KEWIRAUSAHAAN	65.840.000,00	54.825.010,00	-11.014.990,00	83,27	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	65.840.000,00	54.825.010,00	-11.014.990,00	83,27	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.840.000,00	54.825.010,00	-11.014.990,00	83,27	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	367.888.094,00	287.939.844,00	-79.948.250,00	78,26	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.1.01		PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH	367.888.094,00	287.939.844,00	-79.948.250,00	78,26	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.1.01.0001		PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI	174.608.394,00	161.399.821,00	-13.208.573,00	92,43	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	174.608.394,00	161.399.821,00	-13.208.573,00	92,43	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.608.394,00	161.399.821,00	-13.208.573,00	92,43	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.1.01.0002		PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN LITERASI HUKUM DAN BANTUAN PENYELESAIAN PERKARA BAGI PELAKU UMKM	50.000.000,00	48.031.977,00	-1.968.023,00	96,06	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	48.031.977,00	-1.968.023,00	96,06	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.031.977,00	-1.968.023,00	96,06	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.1.01.0005		PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN	97.119.700,00	54.261.768,00	-42.857.932,00	55,87	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	97.119.700,00	54.261.768,00	-42.857.932,00	55,87	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.119.700,00	54.261.768,00	-42.857.932,00	55,87	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.1.01.0006		FASILITASI INKUBATOR USAHA KECIL	46.160.000,00	24.246.278,00	-21.913.722,00	52,52	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	46.160.000,00	24.246.278,00	-21.913.722,00	52,52	
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.160.000,00	24.246.278,00	-21.913.722,00	52,52	
				JUMLAH BELANJA	23.029.940.683,00	21.169.609.316,61	-1.860.331.366,39	91,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	-23.029.940.683,00	-21.169.609.316,61	1.860.331.366,39	91,92	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-23.029.940.683,00	-21.169.609.316,61	1.860.331.366,39	91,92	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.18.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	5.048.400,00	5.056.800,00	8.400,00	100,16	
	2.18.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.048.400,00	5.056.800,00	8.400,00	100,16	
	2.18.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	100,00	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah; c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali; dan d.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	2.18.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.400,00	16.800,00	8.400,00	200,00	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
				JUMLAH PENDAPATAN	5.048.400,00	5.056.800,00	8.400,00	100,16	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	17.908.672.989,00	15.603.611.923,00	-2.305.061.066,00	87,12	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.034.847.795,00	14.767.397.158,00	-2.267.450.637,00	86,68	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	13.871.356.811,00	12.233.071.326,00	-1.638.285.485,00	88,18	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.02.0001		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	13.871.356.811,00	12.233.071.326,00	-1.638.285.485,00	88,18	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.871.356.811,00	12.233.071.326,00	-1.638.285.485,00	88,18	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	13.871.356.811,00	12.233.071.326,00	-1.638.285.485,00	88,18	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	722.947.400,00	438.394.751,00	-284.552.649,00	60,63	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.073.400,00	4.131.000,00	-942.400,00	81,42	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.073.400,00	4.131.000,00	-942.400,00	81,42	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.073.400,00	4.131.000,00	-942.400,00	81,42	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	73.134.300,00	52.886.398,00	-20.247.902,00	72,31	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	73.134.300,00	52.886.398,00	-20.247.902,00	72,31	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.134.300,00	52.886.398,00	-20.247.902,00	72,31	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	70.000.000,00	69.944.500,00	-55.500,00	99,92	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.944.500,00	-55.500,00	99,92	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.944.500,00	-55.500,00	99,92	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	24.133.700,00	16.276.480,00	-7.857.220,00	67,44	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	24.133.700,00	16.276.480,00	-7.857.220,00	67,44	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.133.700,00	16.276.480,00	-7.857.220,00	67,44	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	550.606.000,00	295.156.373,00	-255.449.627,00	53,60	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	550.606.000,00	295.156.373,00	-255.449.627,00	53,60	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.606.000,00	295.156.373,00	-255.449.627,00	53,60	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.260.955.224,00	1.224.571.884,00	-36.383.340,00	97,11	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.846.500,00	2.450.000,00	-1.396.500,00	63,69	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.846.500,00	2.450.000,00	-1.396.500,00	63,69	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.846.500,00	2.450.000,00	-1.396.500,00	63,69	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	152.000.000,00	130.971.783,00	-21.028.217,00	86,16	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	152.000.000,00	130.971.783,00	-21.028.217,00	86,16	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.000.000,00	130.971.783,00	-21.028.217,00	86,16	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.105.108.724,00	1.091.150.101,00	-13.958.623,00	98,73	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.105.108.724,00	1.091.150.101,00	-13.958.623,00	98,73	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.105.108.724,00	1.091.150.101,00	-13.958.623,00	98,73	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.179.588.360,00	871.359.197,00	-308.229.163,00	73,86	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	926.700.460,00	809.976.400,00	-116.724.060,00	87,40	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	926.700.460,00	809.976.400,00	-116.724.060,00	87,40	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	926.700.460,00	809.976.400,00	-116.724.060,00	87,40	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	252.887.900,00	61.382.797,00	-191.505.103,00	24,27	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	252.887.900,00	61.382.797,00	-191.505.103,00	24,27	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.887.900,00	61.382.797,00	-191.505.103,00	24,27	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	140.433.115,00	139.203.136,00	-1.229.979,00	99,12	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.1.02		PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI	140.433.115,00	139.203.136,00	-1.229.979,00	99,12	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.1.02.0005		PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI	140.433.115,00	139.203.136,00	-1.229.979,00	99,12	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	140.433.115,00	139.203.136,00	-1.229.979,00	99,12	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.433.115,00	139.203.136,00	-1.229.979,00	99,12	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	103.638.110,00	99.357.660,00	-4.280.450,00	95,86	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.1.01		PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	103.638.110,00	99.357.660,00	-4.280.450,00	95,86	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.1.01.0002		PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN PROVINSI	103.638.110,00	99.357.660,00	-4.280.450,00	95,86	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	103.638.110,00	99.357.660,00	-4.280.450,00	95,86	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.638.110,00	99.357.660,00	-4.280.450,00	95,86	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	435.076.657,00	435.076.657,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.1.01		PENANAMAN MODAL YANG RUANG LINGKUPNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	435.076.657,00	435.076.657,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.1.01.0006		PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	358.765.837,00	358.765.837,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	358.765.837,00	358.765.837,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.765.837,00	358.765.837,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.1.01.0008		PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	76.310.820,00	76.310.820,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	76.310.820,00	76.310.820,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.310.820,00	76.310.820,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	156.281.902,00	124.181.902,00	-32.100.000,00	79,46	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01		PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	156.281.902,00	124.181.902,00	-32.100.000,00	79,46	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01.0004		PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01.0005		PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA	100.101.902,00	99.651.902,00	-450.000,00	99,55	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	100.101.902,00	99.651.902,00	-450.000,00	99,55	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.101.902,00	99.651.902,00	-450.000,00	99,55	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01.0006		BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA	38.900.000,00	7.250.000,00	-31.650.000,00	18,63	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	38.900.000,00	7.250.000,00	-31.650.000,00	18,63	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.900.000,00	7.250.000,00	-31.650.000,00	18,63	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	38.395.410,00	38.395.410,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.1.01		URUSAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH PROVINSI	38.395.410,00	38.395.410,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.1.01.0002		PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	38.395.410,00	38.395.410,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.395.410,00	38.395.410,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.395.410,00	38.395.410,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	17.908.672.989,00	15.603.611.923,00	-2.305.061.066,00	87,12	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-17.903.624.589,00	-15.598.555.123,00	2.305.069.466,00	87,12	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-17.903.624.589,00	-15.598.555.123,00	2.305.069.466,00	87,12	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : Dinas Kebudayaan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.22.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.120.522.400,00	3.654.657.411,00	1.534.135.011,00	172,34	
	2.22.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.120.522.400,00	3.654.657.411,00	1.534.135.011,00	172,34	
	2.22.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	2.120.520.000,00	3.654.655.011,00	1.534.135.011,00	172,34	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah; c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali; dan d.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	2.22.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.400,00	2.400,00	0,00	100,00	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
				JUMLAH PENDAPATAN	2.120.522.400,00	3.654.657.411,00	1.534.135.011,00	172,34	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	139.904.538.062,00	121.965.580.613,31	-17.938.957.448,69	87,17	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	72.419.714.004,00	56.707.451.844,31	-15.712.262.159,69	78,30	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	94.366.020,00	88.973.043,00	-5.392.977,00	94,28	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.01.0001		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	90.191.520,00	85.546.910,00	-4.644.610,00	94,85	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	90.191.520,00	85.546.910,00	-4.644.610,00	94,85	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.191.520,00	85.546.910,00	-4.644.610,00	94,85	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4.174.500,00	3.426.133,00	-748.367,00	82,07	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.174.500,00	3.426.133,00	-748.367,00	82,07	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.174.500,00	3.426.133,00	-748.367,00	82,07	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	42.916.706.348,00	41.698.784.666,00	-1.217.921.682,00	97,16	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	42.422.197.777,00	41.234.488.004,00	-1.187.709.773,00	97,20	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	42.422.197.777,00	41.234.488.004,00	-1.187.709.773,00	97,20	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	42.363.697.777,00	41.178.988.004,00	-1.184.709.773,00	97,20	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.500.000,00	55.500.000,00	-3.000.000,00	94,87	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	492.508.571,00	462.878.682,00	-29.629.889,00	93,98	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	492.508.571,00	462.878.682,00	-29.629.889,00	93,98	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.508.571,00	462.878.682,00	-29.629.889,00	93,98	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.02.0004		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	2.000.000,00	1.417.980,00	-582.020,00	70,89	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.417.980,00	-582.020,00	70,89	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.417.980,00	-582.020,00	70,89	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.265.685.927,00	1.953.464.498,00	-312.221.429,00	86,21	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	188.595.300,00	140.780.152,00	-47.815.148,00	74,64	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	188.595.300,00	140.780.152,00	-47.815.148,00	74,64	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.595.300,00	140.780.152,00	-47.815.148,00	74,64	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.615.064.227,00	1.427.918.810,00	-187.145.417,00	88,41	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	53.057.000,00	49.019.709,00	-4.037.291,00	92,39	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.057.000,00	49.019.709,00	-4.037.291,00	92,39	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.562.007.227,00	1.378.899.101,00	-183.108.126,00	88,27	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.562.007.227,00	1.378.899.101,00	-183.108.126,00	88,27	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	311.591.800,00	294.818.970,00	-16.772.830,00	94,61	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	311.591.800,00	294.818.970,00	-16.772.830,00	94,61	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.591.800,00	294.818.970,00	-16.772.830,00	94,61	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	26.178.400,00	12.848.305,00	-13.330.095,00	49,07	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	26.178.400,00	12.848.305,00	-13.330.095,00	49,07	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.178.400,00	12.848.305,00	-13.330.095,00	49,07	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	41.097.200,00	29.980.724,00	-11.116.476,00	72,95	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	41.097.200,00	29.980.724,00	-11.116.476,00	72,95	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.097.200,00	29.980.724,00	-11.116.476,00	72,95	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	6.750.000,00	6.452.500,00	-297.500,00	95,59	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	6.750.000,00	6.452.500,00	-297.500,00	95,59	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	6.452.500,00	-297.500,00	95,59	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	76.409.000,00	40.665.037,00	-35.743.963,00	53,22	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	76.409.000,00	40.665.037,00	-35.743.963,00	53,22	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.409.000,00	40.665.037,00	-35.743.963,00	53,22	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	706.556.150,00	541.271.994,00	-165.284.156,00	76,60	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	464.308.200,00	314.897.466,00	-149.410.734,00	67,82	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	5.698.300,00	2.330.000,00	-3.368.300,00	40,88	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.698.300,00	2.330.000,00	-3.368.300,00	40,88	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	458.609.900,00	312.567.466,00	-146.042.434,00	68,15	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	458.609.900,00	312.567.466,00	-146.042.434,00	68,15	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	242.247.950,00	226.374.528,00	-15.873.422,00	93,44	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	42.470.000,00	40.824.530,00	-1.645.470,00	96,12	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.470.000,00	40.824.530,00	-1.645.470,00	96,12	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	199.777.950,00	185.549.998,00	-14.227.952,00	92,87	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.777.950,00	185.549.998,00	-14.227.952,00	92,87	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.727.734.042,00	4.428.432.555,00	-1.299.301.487,00	77,31	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	9.372.900,00	7.960.000,00	-1.412.900,00	84,92	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.372.900,00	7.960.000,00	-1.412.900,00	84,92	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.372.900,00	7.960.000,00	-1.412.900,00	84,92	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	2.311.600.000,00	1.384.462.961,00	-927.137.039,00	59,89	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.311.600.000,00	1.384.462.961,00	-927.137.039,00	59,89	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.311.600.000,00	1.384.462.961,00	-927.137.039,00	59,89	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	102.074.840,00	74.688.601,00	-27.386.239,00	73,17	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	102.074.840,00	74.688.601,00	-27.386.239,00	73,17	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.074.840,00	74.688.601,00	-27.386.239,00	73,17	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.304.686.302,00	2.961.320.993,00	-343.365.309,00	89,60	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.304.686.302,00	2.961.320.993,00	-343.365.309,00	89,60	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.304.686.302,00	2.961.320.993,00	-343.365.309,00	89,60	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	20.708.665.517,00	7.996.525.088,31	-12.712.140.428,69	38,61	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN	1.176.362.460,00	983.442.619,00	-192.919.841,00	83,60	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.176.362.460,00	983.442.619,00	-192.919.841,00	83,60	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.176.362.460,00	983.442.619,00	-192.919.841,00	83,60	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3.706.480.000,00	49.622.165,00	-3.656.857.835,00	1,33	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	90.480.000,00	49.622.165,00	-40.857.835,00	54,84	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.480.000,00	49.622.165,00	-40.857.835,00	54,84	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.09.0006	5.2	BELANJA MODAL	3.616.000.000,00	0,00	-3.616.000.000,00	0,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.09.0006	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.616.000.000,00	0,00	-3.616.000.000,00	0,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	15.825.823.057,00	6.963.460.304,31	-8.862.362.752,69	44,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	6.480.107.684,00	5.873.179.149,55	-606.928.534,45	90,63	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.480.107.684,00	5.873.179.149,55	-606.928.534,45	90,63	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	9.345.715.373,00	1.090.281.154,76	-8.255.434.218,24	11,66	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.345.715.373,00	1.090.281.154,76	-8.255.434.218,24	11,66	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	59.521.199.202,00	58.068.360.699,00	-1.452.838.503,00	97,55	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.01		PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	17.311.194.626,00	16.683.579.348,00	-627.615.278,00	96,37	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.01.0001		PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	1.267.700.522,00	920.004.475,00	-347.696.047,00	72,57	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.267.700.522,00	920.004.475,00	-347.696.047,00	72,57	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.267.700.522,00	920.004.475,00	-347.696.047,00	72,57	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.01.0002		PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA KEBUDAYAAN	15.672.978.104,00	15.412.885.926,00	-260.092.178,00	98,34	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.672.978.104,00	15.412.885.926,00	-260.092.178,00	98,34	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.672.978.104,00	15.412.885.926,00	-260.092.178,00	98,34	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.01.0003		PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA TAMAN BUDAYA	370.516.000,00	350.688.947,00	-19.827.053,00	94,64	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	370.516.000,00	350.688.947,00	-19.827.053,00	94,64	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.516.000,00	350.688.947,00	-19.827.053,00	94,64	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.02		PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM DAERAH PROVINSI	16.742.251.526,00	16.019.748.923,00	-722.502.603,00	95,68	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.02.0001		PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA	15.400.739.935,00	14.775.790.479,00	-624.949.456,00	95,94	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.400.739.935,00	14.775.790.479,00	-624.949.456,00	95,94	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.400.739.935,00	14.775.790.479,00	-624.949.456,00	95,94	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.02.0003		PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PIHAK YANG BERPRESTASI ATAU BERKONTRIBUSI LUAR BIASA SESUAI DENGAN PRESTASI DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN	1.341.511.591,00	1.243.958.444,00	-97.553.147,00	92,72	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.341.511.591,00	1.243.958.444,00	-97.553.147,00	92,72	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.341.511.591,00	1.243.958.444,00	-97.553.147,00	92,72	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.03		PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	25.467.753.050,00	25.365.032.428,00	-102.720.622,00	99,59	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.03.0003		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBINAAN LEMBAGA ADAT	25.467.753.050,00	25.365.032.428,00	-102.720.622,00	99,59	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	25.467.753.050,00	25.365.032.428,00	-102.720.622,00	99,59	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.753.050,00	230.032.428,00	-2.720.622,00	98,83	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.03.0003	5.1.05	Belanja Hibah	25.235.000.000,00	25.135.000.000,00	-100.000.000,00	99,60	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.461.431.865,00	1.401.719.453,00	-59.712.412,00	95,91	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.03.1.01		PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.461.431.865,00	1.401.719.453,00	-59.712.412,00	95,91	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.03.1.01.0001		PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL	1.129.837.200,00	1.118.808.654,00	-11.028.546,00	99,02	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.129.837.200,00	1.118.808.654,00	-11.028.546,00	99,02	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.129.837.200,00	1.118.808.654,00	-11.028.546,00	99,02	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.03.1.01.0002		STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN TUNTUTAN	331.594.665,00	282.910.799,00	-48.683.866,00	85,31	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	331.594.665,00	282.910.799,00	-48.683.866,00	85,31	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.594.665,00	282.910.799,00	-48.683.866,00	85,31	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	144.883.000,00	144.078.300,00	-804.700,00	99,44	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.04.1.01		PEMBINAAN SEJARAH LOKAL PROVINSI	144.883.000,00	144.078.300,00	-804.700,00	99,44	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.04.1.01.0003		PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP DATA DAN INFORMASI SEJARAH	144.883.000,00	144.078.300,00	-804.700,00	99,44	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.04.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	144.883.000,00	144.078.300,00	-804.700,00	99,44	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.04.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.883.000,00	144.078.300,00	-804.700,00	99,44	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	698.392.891,00	639.175.658,00	-59.217.233,00	91,52	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.05.1.01		PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI	167.324.115,00	162.226.160,00	-5.097.955,00	96,95	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.05.1.01.0002		PENETAPAN CAGAR BUDAYA	167.324.115,00	162.226.160,00	-5.097.955,00	96,95	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.05.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	167.324.115,00	162.226.160,00	-5.097.955,00	96,95	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.05.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.324.115,00	162.226.160,00	-5.097.955,00	96,95	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.05.1.02		PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI	531.068.776,00	476.949.498,00	-54.119.278,00	89,80	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.05.1.02.0001		PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA	274.241.876,00	252.075.937,00	-22.165.939,00	91,91	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.05.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	274.241.876,00	252.075.937,00	-22.165.939,00	91,91	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.05.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.241.876,00	252.075.937,00	-22.165.939,00	91,91	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.05.1.02.0002		PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA	52.108.700,00	44.498.640,00	-7.610.060,00	85,39	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.05.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	52.108.700,00	44.498.640,00	-7.610.060,00	85,39	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.05.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.108.700,00	44.498.640,00	-7.610.060,00	85,39	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.05.1.02.0003		PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA	114.107.300,00	100.326.757,00	-13.780.543,00	87,92	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.05.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	114.107.300,00	100.326.757,00	-13.780.543,00	87,92	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.05.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.107.300,00	100.326.757,00	-13.780.543,00	87,92	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.05.1.02.0004		PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PELESTARI CAGAR BUDAYA	90.610.900,00	80.048.164,00	-10.562.736,00	88,34	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.05.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	90.610.900,00	80.048.164,00	-10.562.736,00	88,34	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.05.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.610.900,00	80.048.164,00	-10.562.736,00	88,34	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	5.658.917.100,00	5.004.794.659,00	-654.122.441,00	88,44	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.06.1.01		PENGELOLAAN MUSEUM PROVINSI	5.658.917.100,00	5.004.794.659,00	-654.122.441,00	88,44	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0001		PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFATAAN KOLEKSI SECARA TERPADU	1.635.430.500,00	1.550.951.995,00	-84.478.505,00	94,83	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.635.430.500,00	1.550.951.995,00	-84.478.505,00	94,83	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.635.430.500,00	1.550.951.995,00	-84.478.505,00	94,83	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0003		PENINGKATAN PELAYANAN DAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP MUSEUM	3.589.904.700,00	3.095.384.346,00	-494.520.354,00	86,22	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.589.904.700,00	3.095.384.346,00	-494.520.354,00	86,22	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.589.904.700,00	3.095.384.346,00	-494.520.354,00	86,22	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0004		PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA MUSEUM	433.581.900,00	358.458.318,00	-75.123.582,00	82,67	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	369.538.400,00	295.368.218,00	-74.170.182,00	79,92	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	369.538.400,00	295.368.218,00	-74.170.182,00	79,92	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	64.043.500,00	63.090.100,00	-953.400,00	98,51	
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.043.500,00	63.090.100,00	-953.400,00	98,51	
				JUMLAH BELANJA	139.904.538.062,00	121.965.580.613,31	-17.938.957.448,69	87,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	-137.784.015.662,00	(118.310.923.202,31)	19.473.092.459,69	85,86	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-137.784.015.662,00	(118.310.923.202,31)	19.473.092.459,69	85,86	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000		5	BELANJA DAERAH	487.186.677.249,00	483.606.357.765,00	-3.580.319.484,00	99,26	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.426.143.735,00	13.019.595.533,00	-1.406.548.202,00	90,25	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	36.797.300,00	29.081.803,00	-7.715.497,00	79,03	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	24.904.900,00	19.476.562,00	-5.428.338,00	78,20	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.904.900,00	19.476.562,00	-5.428.338,00	78,20	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.904.900,00	19.476.562,00	-5.428.338,00	78,20	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	11.892.400,00	9.605.241,00	-2.287.159,00	80,76	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	11.892.400,00	9.605.241,00	-2.287.159,00	80,76	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.892.400,00	9.605.241,00	-2.287.159,00	80,76	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.02		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	10.960.282.800,00	10.037.925.509,00	-922.357.291,00	91,58	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	10.960.282.800,00	10.037.925.509,00	-922.357.291,00	91,58	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.960.282.800,00	10.037.925.509,00	-922.357.291,00	91,58	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	10.916.832.800,00	9.994.475.509,00	-922.357.291,00	91,55	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.450.000,00	43.450.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	342.515.100,00	216.393.892,00	-126.121.208,00	63,17	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.934.200,00	8.443.000,00	-2.491.200,00	77,21	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.934.200,00	8.443.000,00	-2.491.200,00	77,21	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.934.200,00	8.443.000,00	-2.491.200,00	77,21	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	36.145.200,00	23.271.477,00	-12.873.723,00	64,38	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	36.145.200,00	23.271.477,00	-12.873.723,00	64,38	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.145.200,00	23.271.477,00	-12.873.723,00	64,38	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	19.243.700,00	16.219.500,00	-3.024.200,00	84,28	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	19.243.700,00	16.219.500,00	-3.024.200,00	84,28	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.243.700,00	16.219.500,00	-3.024.200,00	84,28	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	276.192.000,00	168.459.915,00	-107.732.085,00	60,99	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	276.192.000,00	168.459.915,00	-107.732.085,00	60,99	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.192.000,00	168.459.915,00	-107.732.085,00	60,99	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	265.058.683,00	248.945.800,00	-16.112.883,00	93,92	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	265.058.683,00	248.945.800,00	-16.112.883,00	93,92	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	9.609.840,00	9.300.000,00	-309.840,00	96,77	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.609.840,00	9.300.000,00	-309.840,00	96,77	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	255.448.843,00	239.645.800,00	-15.803.043,00	93,81	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	255.448.843,00	239.645.800,00	-15.803.043,00	93,81	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	562.166.834,00	368.402.328,00	-193.764.506,00	65,53	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	562.166.834,00	368.402.328,00	-193.764.506,00	65,53	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	562.166.834,00	368.402.328,00	-193.764.506,00	65,53	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	562.166.834,00	368.402.328,00	-193.764.506,00	65,53	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.259.323.018,00	2.118.846.201,00	-140.476.817,00	93,78	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	566.441.852,00	508.505.592,00	-57.936.260,00	89,77	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	566.441.852,00	508.505.592,00	-57.936.260,00	89,77	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	566.441.852,00	508.505.592,00	-57.936.260,00	89,77	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.692.881.166,00	1.610.340.609,00	-82.540.557,00	95,12	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.564.181.166,00	1.482.408.609,00	-81.772.557,00	94,77	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.564.181.166,00	1.482.408.609,00	-81.772.557,00	94,77	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.09.0010	5.2	BELANJA MODAL	128.700.000,00	127.932.000,00	-768.000,00	99,40	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.09.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128.700.000,00	127.932.000,00	-768.000,00	99,40	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.09		PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	472.760.533.514,00	470.586.762.232,00	-2.173.771.282,00	99,54	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.09.8.01		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DESA ADAT	471.928.683.008,00	469.821.063.704,00	-2.107.619.304,00	99,55	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.09.8.01.0001		PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA ADAT	471.741.628.706,00	469.656.050.725,00	-2.085.577.981,00	99,55	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.09.8.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	471.741.628.706,00	469.656.050.725,00	-2.085.577.981,00	99,55	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.09.8.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.071.628.706,00	986.050.725,00	-85.577.981,00	92,01	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.09.8.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	470.670.000.000,00	468.670.000.000,00	-2.000.000.000,00	99,57	a. Keputusan Gubernur Bali Nomor 9/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan. b. Keputusan Gubernur Bali Nomor 14/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan. c. Keputusan Gubernur Bali Nomor 5/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan. d. Keputusan Gubernur Bali Nomor 10/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan. e. Keputusan Gubernur Bali Nomor 6/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan. f. Keputusan Gubernur Bali Nomor 11/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan. g. Keputusan Gubernur Bali Nomor 7/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan. h. Keputusan Gubernur Nomor 27/03-O/HK/2024 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan. i. Keputusan Gubernur Bali Nomor 12/03-O/HK/2025. j. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan. k. Keputusan Gubernur Bali Nomor 237/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan. l. Keputusan Gubernur Bali Nomor 398/03-O/HK/2025 tanggal 5 November 2025. m. Keputusan Gubernur Bali Nomor 397/03-O/HK/2025 tanggal 5 November 2025. n. Keputusan Gubernur Bali Nomor 399/03-O/HK/2025 tanggal 6 November 2025. o. Keputusan Gubernur Bali Nomor 364/03-O/HK/2025 tanggal 27 Oktober 2025. p. Keputusan Gubernur Bali Nomor 403/03-O/HK/2025 tanggal 7 November 2025. q. Keputusan Gubernur Bali Nomor 327/03-O/HK/2025 tanggal 21 Oktober 2025. r. Keputusan Gubernur Bali Nomor 328/03-O/HK/2025 tanggal 21 Oktober 2025. s. Keputusan Gubernur Bali Nomor 391/03-O/HK/2025 tanggal 5 November 2025. t. Keputusan Gubernur Bali Nomor 348/03-O/HK/2025 tanggal 23 Oktober 2025. u. Keputusan Gubernur Bali Nomor 329/03-O/HK/2025 tanggal 21 Oktober 2025.

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.09.8.01.0002		FASILITASI PRODUK HUKUM DESA ADAT	187.054.302,00	165.012.979,00	-22.041.323,00	88,21	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.09.8.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	187.054.302,00	165.012.979,00	-22.041.323,00	88,21	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.09.8.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.054.302,00	165.012.979,00	-22.041.323,00	88,21	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.09.8.02		PEMBINAAN TATA KELOLA PEREKONOMIAN DESA ADAT	528.438.391,00	491.107.971,00	-37.330.420,00	92,93	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.09.8.02.0001		PEMBINAAN TATA KELOLA USAHA BIDANG KEUANGAN DESA ADAT	65.165.900,00	55.656.707,00	-9.509.193,00	85,40	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.09.8.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	65.165.900,00	55.656.707,00	-9.509.193,00	85,40	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.09.8.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.165.900,00	55.656.707,00	-9.509.193,00	85,40	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.09.8.02.0002		PEMBINAAN TATA KELOLA BIDANG PEREKONOMIAN DESA ADAT	463.272.491,00	435.451.264,00	-27.821.227,00	93,99	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.09.8.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	463.272.491,00	435.451.264,00	-27.821.227,00	93,99	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.09.8.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	463.272.491,00	435.451.264,00	-27.821.227,00	93,99	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.09.8.03		PENYELENGGARAAN DESA ADAT	303.412.115,00	274.590.557,00	-28.821.558,00	90,50	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.09.8.03.0003		KOORDINASI DAN PENYELENGGARAAN PALEMAHAN	303.412.115,00	274.590.557,00	-28.821.558,00	90,50	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.09.8.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	303.412.115,00	274.590.557,00	-28.821.558,00	90,50	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.09.8.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.412.115,00	274.590.557,00	-28.821.558,00	90,50	
				JUMLAH BELANJA	487.186.677.249,00	483.606.357.765,00	-3.580.319.484,00	99,26	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-487.186.677.249,00	-483.606.357.765,00	3.580.319.484,00	99,26	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-487.186.677.249,00	-483.606.357.765,00	3.580.319.484,00	99,26	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : Dinas Kelautan dan Perikanan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.25.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	3.162.272.000,00	2.845.771.794,00	-316.500.206,00	89,99	
	3.25.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.162.272.000,00	2.845.771.794,00	-316.500.206,00	89,99	
	3.25.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	3.162.272.000,00	2.845.771.794,00	-316.500.206,00	89,99	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah; c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali; dan d.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
				JUMLAH PENDAPATAN	3.162.272.000,00	2.845.771.794,00	-316.500.206,00	89,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	36.095.008.934,20	31.271.062.999,00	-4.823.945.935,20	86,63	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.365.283.470,20	28.695.949.410,00	-4.669.334.060,20	86,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	36.018.000,00	32.897.104,00	-3.120.896,00	91,33	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	36.018.000,00	32.897.104,00	-3.120.896,00	91,33	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.01.0001	5.1	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	36.018.000,00	32.897.104,00	-3.120.896,00	91,33	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.018.000,00	32.897.104,00	-3.120.896,00	91,33	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	25.702.348.375,20	21.615.976.609,00	-4.086.371.766,20	84,10	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	25.702.348.375,20	21.615.976.609,00	-4.086.371.766,20	84,10	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.702.348.375,20	21.615.976.609,00	-4.086.371.766,20	84,10	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	25.619.548.375,20	21.541.726.609,00	-4.077.821.766,20	84,08	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.800.000,00	74.250.000,00	-8.550.000,00	89,67	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.273.186.500,00	1.150.231.330,00	-122.955.170,00	90,34	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	16.490.400,00	12.499.670,00	-3.990.730,00	75,79	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.490.400,00	12.499.670,00	-3.990.730,00	75,79	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.490.400,00	12.499.670,00	-3.990.730,00	75,79	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	779.630.000,00	746.890.842,00	-32.739.158,00	95,80	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	50.672.100,00	39.290.842,00	-11.381.258,00	77,53	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.672.100,00	39.290.842,00	-11.381.258,00	77,53	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	728.957.900,00	707.600.000,00	-21.357.900,00	97,07	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	728.957.900,00	707.600.000,00	-21.357.900,00	97,07	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	328.642.400,00	275.907.190,00	-52.735.210,00	83,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	328.642.400,00	275.907.190,00	-52.735.210,00	83,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	328.642.400,00	275.907.190,00	-52.735.210,00	83,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	37.723.700,00	25.007.526,00	-12.716.174,00	66,29	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	37.723.700,00	25.007.526,00	-12.716.174,00	66,29	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.723.700,00	25.007.526,00	-12.716.174,00	66,29	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	110.700.000,00	89.926.102,00	-20.773.898,00	81,23	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	110.700.000,00	89.926.102,00	-20.773.898,00	81,23	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.700.000,00	89.926.102,00	-20.773.898,00	81,23	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	363.637.100,00	353.780.000,00	-9.857.100,00	97,28	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	363.637.100,00	353.780.000,00	-9.857.100,00	97,28	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	363.637.100,00	353.780.000,00	-9.857.100,00	97,28	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	363.637.100,00	353.780.000,00	-9.857.100,00	97,28	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	437.848.300,00	318.213.096,00	-119.635.204,00	72,67	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.699.100,00	3.630.000,00	-2.069.100,00	63,69	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.699.100,00	3.630.000,00	-2.069.100,00	63,69	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.699.100,00	3.630.000,00	-2.069.100,00	63,69	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	432.149.200,00	314.583.096,00	-117.566.104,00	72,79	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	432.149.200,00	314.583.096,00	-117.566.104,00	72,79	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	432.149.200,00	314.583.096,00	-117.566.104,00	72,79	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.552.245.195,00	5.224.851.271,00	-327.393.924,00	94,10	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	964.364.936,00	932.963.636,00	-31.401.300,00	96,74	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	964.364.936,00	932.963.636,00	-31.401.300,00	96,74	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	964.364.936,00	932.963.636,00	-31.401.300,00	96,74	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU KENDARAAN	520.129.984,00	444.914.729,00	-75.215.255,00	85,53	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	520.129.984,00	444.914.729,00	-75.215.255,00	85,53	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	520.129.984,00	444.914.729,00	-75.215.255,00	85,53	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	3.977.740.275,00	3.774.186.056,00	-203.554.219,00	94,88	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.722.740.275,00	1.647.880.523,00	-74.859.752,00	95,65	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.722.740.275,00	1.647.880.523,00	-74.859.752,00	95,65	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	2.255.000.000,00	2.126.305.533,00	-128.694.467,00	94,29	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.255.000.000,00	2.126.305.533,00	-128.694.467,00	94,29	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	90.010.000,00	72.786.850,00	-17.223.150,00	80,86	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	90.010.000,00	72.786.850,00	-17.223.150,00	80,86	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.010.000,00	72.786.850,00	-17.223.150,00	80,86	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	288.231.492,00	264.428.988,00	-23.802.504,00	91,74	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02.1.01		PENGELOLAAN RUANG LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI	232.435.000,00	210.072.496,00	-22.362.504,00	90,37	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02.1.01.0002		PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL BERDASARKAN PENETAPAN DARI PEMERINTAH PUSAT	44.960.000,00	38.694.000,00	-6.266.000,00	86,06	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	44.960.000,00	38.694.000,00	-6.266.000,00	86,06	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.960.000,00	38.694.000,00	-6.266.000,00	86,06	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02.1.01.0008		SOSIALISASI PERIZINAN BERUSAHA DALAM RANGKA PEMANFAATAN RUANG LAUT MENDUKUNG EKONOMI BIRU	17.475.000,00	9.475.450,00	-7.999.550,00	54,22	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	17.475.000,00	9.475.450,00	-7.999.550,00	54,22	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.475.000,00	9.475.450,00	-7.999.550,00	54,22	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02.1.01.0013		PENGINTEGRASIAN MATERI TEKNIS PERAIRAN PESISIR/RZWP-3-K KE DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI	170.000.000,00	161.903.046,00	-8.096.954,00	95,23	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02.1.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	170.000.000,00	161.903.046,00	-8.096.954,00	95,23	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02.1.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	161.903.046,00	-8.096.954,00	95,23	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02.1.03		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	55.796.492,00	54.356.492,00	-1.440.000,00	97,41	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02.1.03.0001		PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	55.796.492,00	54.356.492,00	-1.440.000,00	97,41	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	55.796.492,00	54.356.492,00	-1.440.000,00	97,41	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.796.492,00	54.356.492,00	-1.440.000,00	97,41	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	456.739.697,00	453.114.191,00	-3.625.506,00	99,20	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.01		PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL	416.024.197,00	415.724.197,00	-300.000,00	99,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.01.0002		PENYEDIAAN PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP	416.024.197,00	415.724.197,00	-300.000,00	99,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	416.024.197,00	415.724.197,00	-300.000,00	99,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.024.197,00	65.724.197,00	-300.000,00	99,54	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.06		PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI	23.854.000,00	20.690.944,00	-3.163.056,00	86,73	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.06.0003		PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN DAN PENGUSAHAAN PELABUHAN PERIKANAN	23.854.000,00	20.690.944,00	-3.163.056,00	86,73	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	23.854.000,00	20.690.944,00	-3.163.056,00	86,73	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.854.000,00	20.690.944,00	-3.163.056,00	86,73	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.09		PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN DI ATAS 10 GT SAMPAI DENGAN 30 GT	16.861.500,00	16.699.050,00	-162.450,00	99,03	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.09.0001		PENETAPAN PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN DENGAN UKURAN DI ATAS 10 GT SAMPAI	16.861.500,00	16.699.050,00	-162.450,00	99,03	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.861.500,00	16.699.050,00	-162.450,00	99,03	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.861.500,00	16.699.050,00	-162.450,00	99,03	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	968.135.194,00	939.499.194,00	-28.636.000,00	97,04	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.1.05		PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT	175.820.000,00	170.721.000,00	-5.099.000,00	97,09	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.1.05.0004		PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT	159.720.000,00	155.035.000,00	-4.685.000,00	97,06	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.1.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	159.720.000,00	155.035.000,00	-4.685.000,00	97,06	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.1.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.720.000,00	155.035.000,00	-4.685.000,00	97,06	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.1.05.0013		MONITORING KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN BUDIDAYA DI LAUT DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.100.000,00	15.686.000,00	-414.000,00	97,42	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.1.05.0013	5.1	BELANJA OPERASI	16.100.000,00	15.686.000,00	-414.000,00	97,42	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.1.05.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.100.000,00	15.686.000,00	-414.000,00	97,42	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.1.06		PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI PERAIRAN DARAT	792.315.194,00	768.778.194,00	-23.537.000,00	97,02	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.1.06.0003		PENYEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DI AIR PAYAU DAN AIR TAWAR LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	792.315.194,00	768.778.194,00	-23.537.000,00	97,02	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	792.315.194,00	768.778.194,00	-23.537.000,00	97,02	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	792.315.194,00	768.778.194,00	-23.537.000,00	97,02	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	150.791.884,00	147.381.734,00	-3.410.150,00	97,73	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.1.01		PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SAMPAI DENGAN 12 MIL	150.791.884,00	147.381.734,00	-3.410.150,00	97,73	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.1.01.0016		PENGAWASAN USAHA PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN KEWENANGAN PROVINSI	20.708.900,00	17.298.750,00	-3.410.150,00	83,53	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.1.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	20.708.900,00	17.298.750,00	-3.410.150,00	83,53	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.1.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.708.900,00	17.298.750,00	-3.410.150,00	83,53	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.1.01.0017		PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS)	130.082.984,00	130.082.984,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.1.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	130.082.984,00	130.082.984,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.1.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.082.984,00	130.082.984,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	865.827.197,00	770.689.482,00	-95.137.715,00	89,01	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.1.02		PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MENENGAH DAN	865.827.197,00	770.689.482,00	-95.137.715,00	89,01	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.1.02.0003		PELAKSANAAN PEMBINAAN, FASILITASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI TERHADAP MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN, DAN DAYA SAING SERTA PEMBERDAYAAN USAHA DALAM RANGKA MENGHASILKAN PRODUK YANG AMAN DAN BERMUTU	46.041.000,00	35.748.500,00	-10.292.500,00	77,64	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	46.041.000,00	35.748.500,00	-10.292.500,00	77,64	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.041.000,00	35.748.500,00	-10.292.500,00	77,64	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.1.02.0004		PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN PENERAPAN PERSYARATAN ATAU STANDAR PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	819.786.197,00	734.940.982,00	-84.845.215,00	89,65	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	719.526.197,00	652.743.393,00	-66.782.804,00	90,71	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	719.526.197,00	652.743.393,00	-66.782.804,00	90,71	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.1.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	100.260.000,00	82.197.589,00	-18.062.411,00	81,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.1.02.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.260.000,00	82.197.589,00	-18.062.411,00	81,98	
				JUMLAH BELANJA	36.095.008.934,20	31.271.062.999,00	-4.823.945.935,20	86,63	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-32.932.736.934,20	-28.425.291.205,00	4.507.445.729,20	86,31	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-32.932.736.934,20	-28.425.291.205,00	4.507.445.729,20	86,31	

PEMERINTAH PROVINSI BALI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : Dinas Pariwisata

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.26.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	500.005.275.200,00	369.027.025.200,00	-130.978.250.000,00	73,80	
	3.26.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500.005.275.200,00	369.027.025.200,00	-130.978.250.000,00	73,80	
	3.26.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	5.275.200,00	5.275.200,00	0,00	100,00	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah; c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali; dan d.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	3.26.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	500.000.000.000,00	369.021.750.000,00	-130.978.250.000,00	73,80	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali; dan b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing.
				JUMLAH PENDAPATAN	500.005.275.200,00	369.027.025.200,00	-130.978.250.000,00	73,80	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	31.605.924.583,00	20.370.258.023,00	-11.235.666.560,00	64,45	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.101.336.494,00	14.393.498.084,00	-10.707.838.410,00	57,34	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	90.441.402,00	84.148.885,00	-6.292.517,00	93,04	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.01.0001		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	90.441.402,00	84.148.885,00	-6.292.517,00	93,04	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	90.441.402,00	84.148.885,00	-6.292.517,00	93,04	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.441.402,00	84.148.885,00	-6.292.517,00	93,04	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	12.603.424.810,00	11.110.223.246,00	-1.493.201.564,00	88,15	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	12.603.424.810,00	11.110.223.246,00	-1.493.201.564,00	88,15	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.603.424.810,00	11.110.223.246,00	-1.493.201.564,00	88,15	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	12.549.424.810,00	11.058.473.246,00	-1.490.951.564,00	88,11	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	51.750.000,00	-2.250.000,00	95,83	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	813.338.782,00	718.511.750,00	-94.827.032,00	88,34	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.216.600,00	5.346.000,00	-1.870.600,00	74,07	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.216.600,00	5.346.000,00	-1.870.600,00	74,07	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.216.600,00	5.346.000,00	-1.870.600,00	74,07	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	621.745.088,00	572.037.662,00	-49.707.426,00	92,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	57.491.200,00	36.226.912,00	-21.264.288,00	63,01	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.491.200,00	36.226.912,00	-21.264.288,00	63,01	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	564.253.888,00	535.810.750,00	-28.443.138,00	94,95	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	564.253.888,00	535.810.750,00	-28.443.138,00	94,95	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	69.617.494,00	64.737.200,00	-4.880.294,00	92,98	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	69.617.494,00	64.737.200,00	-4.880.294,00	92,98	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.617.494,00	64.737.200,00	-4.880.294,00	92,98	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	9.882.600,00	6.290.338,00	-3.592.262,00	63,65	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.882.600,00	6.290.338,00	-3.592.262,00	63,65	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.882.600,00	6.290.338,00	-3.592.262,00	63,65	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	104.877.000,00	70.100.550,00	-34.776.450,00	66,84	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	104.877.000,00	70.100.550,00	-34.776.450,00	66,84	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.877.000,00	70.100.550,00	-34.776.450,00	66,84	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.514.504.500,00	1.488.259.502,00	-9.026.244.998,00	14,15	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	182.008.200,00	116.775.447,00	-65.232.753,00	64,15	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	182.008.200,00	116.775.447,00	-65.232.753,00	64,15	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.008.200,00	116.775.447,00	-65.232.753,00	64,15	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	10.332.496.300,00	1.371.484.055,00	-8.961.012.245,00	13,27	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.332.496.300,00	1.371.484.055,00	-8.961.012.245,00	13,27	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.332.496.300,00	1.371.484.055,00	-8.961.012.245,00	13,27	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.079.627.000,00	992.354.701,00	-87.272.299,00	91,91	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	577.947.000,00	504.439.259,00	-73.507.741,00	87,28	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	577.947.000,00	504.439.259,00	-73.507.741,00	87,28	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	577.947.000,00	504.439.259,00	-73.507.741,00	87,28	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	501.680.000,00	487.915.442,00	-13.764.558,00	97,25	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	341.680.000,00	328.342.064,00	-13.337.936,00	96,09	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.680.000,00	328.342.064,00	-13.337.936,00	96,09	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0010	5.2	BELANJA MODAL	160.000.000,00	159.573.378,00	-426.622,00	99,73	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0010	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	160.000.000,00	159.573.378,00	-426.622,00	99,73	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	623.848.516,00	478.452.192,00	-145.396.324,00	76,69	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.01		PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI	274.174.696,00	260.469.735,00	-13.704.961,00	95,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.01.0007		MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI	274.174.696,00	260.469.735,00	-13.704.961,00	95,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	274.174.696,00	260.469.735,00	-13.704.961,00	95,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.174.696,00	260.469.735,00	-13.704.961,00	95,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.03		PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA PROVINSI	149.195.900,00	68.669.831,00	-80.526.069,00	46,02	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.03.0007		PENERAPAN DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA PROVINSI	149.195.900,00	68.669.831,00	-80.526.069,00	46,02	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	149.195.900,00	68.669.831,00	-80.526.069,00	46,02	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.195.900,00	68.669.831,00	-80.526.069,00	46,02	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.04		PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	200.477.920,00	149.312.626,00	-51.165.294,00	74,47	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.04.0009		FASILITASI PENDAMPINGAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI)	55.594.805,00	50.111.843,00	-5.482.962,00	90,13	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.04.0009	5.1	BELANJA OPERASI	55.594.805,00	50.111.843,00	-5.482.962,00	90,13	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.04.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.594.805,00	50.111.843,00	-5.482.962,00	90,13	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.04.0013		KESEDIAAAN PELAKU USAHA MEMENUHI STANDAR USAHA PARIWISATA	144.883.115,00	99.200.783,00	-45.682.332,00	68,46	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.04.0013	5.1	BELANJA OPERASI	144.883.115,00	99.200.783,00	-45.682.332,00	68,46	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.04.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.883.115,00	99.200.783,00	-45.682.332,00	68,46	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.894.574.906,00	4.586.166.077,00	-308.408.829,00	93,69	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01		PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI	4.894.574.906,00	4.586.166.077,00	-308.408.829,00	93,69	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01.0001		PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI	244.390.610,00	234.121.396,00	-10.269.214,00	95,79	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	244.390.610,00	234.121.396,00	-10.269.214,00	95,79	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.390.610,00	234.121.396,00	-10.269.214,00	95,79	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01.0005		MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	289.838.394,00	288.291.029,00	-1.547.365,00	99,46	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	289.838.394,00	288.291.029,00	-1.547.365,00	99,46	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.838.394,00	288.291.029,00	-1.547.365,00	99,46	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01.0006		FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI	4.360.345.902,00	4.063.753.652,00	-296.592.250,00	93,19	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.360.345.902,00	4.063.753.652,00	-296.592.250,00	93,19	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.360.345.902,00	4.063.753.652,00	-296.592.250,00	93,19	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	140.088.084,00	135.231.774,00	-4.856.310,00	96,53	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.01		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KOTA KREATIF	97.601.384,00	97.532.984,00	-68.400,00	99,92	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.01.0005		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENINGKATAN USAHA KREATIF TERUTAMA BAGI USAHA PEMULA	97.601.384,00	97.532.984,00	-68.400,00	99,92	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	97.601.384,00	97.532.984,00	-68.400,00	99,92	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.601.384,00	97.532.984,00	-68.400,00	99,92	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02		PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIFÂ	42.486.700,00	37.698.790,00	-4.787.910,00	88,73	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02.0017		PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAERAH	42.486.700,00	37.698.790,00	-4.787.910,00	88,73	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	42.486.700,00	37.698.790,00	-4.787.910,00	88,73	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.486.700,00	37.698.790,00	-4.787.910,00	88,73	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	846.076.583,00	776.909.896,00	-69.166.687,00	91,82	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01		PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT LANJUTAN	846.076.583,00	776.909.896,00	-69.166.687,00	91,82	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0004		FASILITASI SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI TENAGA KERJA BIDANG PARIWISATA	267.634.092,00	239.381.278,00	-28.252.814,00	89,44	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	267.634.092,00	239.381.278,00	-28.252.814,00	89,44	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.634.092,00	239.381.278,00	-28.252.814,00	89,44	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0014		PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA	217.836.094,00	210.747.845,00	-7.088.249,00	96,74	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	217.836.094,00	210.747.845,00	-7.088.249,00	96,74	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.836.094,00	210.747.845,00	-7.088.249,00	96,74	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0017		PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF	360.606.397,00	326.780.773,00	-33.825.624,00	90,61	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	360.606.397,00	326.780.773,00	-33.825.624,00	90,61	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.606.397,00	326.780.773,00	-33.825.624,00	90,61	
				JUMLAH BELANJA	31.605.924.583,00	20.370.258.023,00	-11.235.666.560,00	64,45	
				SURPLUS / (DEFISIT)	468.399.350.617,00	348.656.767.177,00	-119.742.583.440,00	74,43	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	468.399.350.617,00	348.656.767.177,00	-119.742.583.440,00	74,43	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.27.2.09.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	936.135.194,00	1.379.932.893,00	443.797.699,00	147,40	
	3.27.2.09.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	932.095.194,00	1.375.892.893,00	443.797.699,00	147,61	
	3.27.2.09.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	932.069.814,00	1.375.867.513,00	443.797.699,00	147,61	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah; c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali; dan d.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	3.27.2.09.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	25.380,00	25.380,00	0,00	100,00	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	3.27.2.09.0.00.01.0000		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	100,00	
	3.27.2.09.0.00.01.0000		4.3.01	Pendapatan Hibah	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	936.135.194,00	1.379.932.893,00	443.797.699,00	147,40	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	106.576.529.099,00	99.721.755.396,00	-6.854.773.703,00	93,56	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI	59.236.788.756,00	56.257.641.697,00	-2.979.147.059,00	94,97	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	485.121.149,00	471.270.307,00	-13.850.842,00	97,14	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	296.633.227,00	291.753.727,00	-4.879.500,00	98,35	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	296.633.227,00	291.753.727,00	-4.879.500,00	98,35	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.633.227,00	291.753.727,00	-4.879.500,00	98,35	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	188.487.922,00	179.516.580,00	-8.971.342,00	95,24	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	188.487.922,00	179.516.580,00	-8.971.342,00	95,24	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.487.922,00	179.516.580,00	-8.971.342,00	95,24	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	51.914.068.522,00	49.631.500.221,00	-2.282.568.301,00	95,60	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	51.668.380.982,00	49.391.683.011,00	-2.276.697.971,00	95,59	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	51.668.380.982,00	49.391.683.011,00	-2.276.697.971,00	95,59	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	51.553.930.982,00	49.277.233.011,00	-2.276.697.971,00	95,58	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.450.000,00	114.450.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	245.687.540,00	239.817.210,00	-5.870.330,00	97,61	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	245.687.540,00	239.817.210,00	-5.870.330,00	97,61	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.687.540,00	239.817.210,00	-5.870.330,00	97,61	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	576.169.200,00	490.949.865,00	-85.219.335,00	85,20	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	31.152.300,00	23.403.500,00	-7.748.800,00	75,12	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	31.152.300,00	23.403.500,00	-7.748.800,00	75,12	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.152.300,00	23.403.500,00	-7.748.800,00	75,12	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	241.880.500,00	199.311.129,00	-42.569.371,00	82,40	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	82.724.300,00	61.171.629,00	-21.552.671,00	73,94	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.724.300,00	61.171.629,00	-21.552.671,00	73,94	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	159.156.200,00	138.139.500,00	-21.016.700,00	86,79	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	159.156.200,00	138.139.500,00	-21.016.700,00	86,79	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	217.003.400,00	207.718.360,00	-9.285.040,00	95,72	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	217.003.400,00	207.718.360,00	-9.285.040,00	95,72	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.003.400,00	207.718.360,00	-9.285.040,00	95,72	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	19.125.000,00	18.021.750,00	-1.103.250,00	94,23	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	19.125.000,00	18.021.750,00	-1.103.250,00	94,23	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.125.000,00	18.021.750,00	-1.103.250,00	94,23	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	67.008.000,00	42.495.126,00	-24.512.874,00	63,41	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	67.008.000,00	42.495.126,00	-24.512.874,00	63,41	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.008.000,00	42.495.126,00	-24.512.874,00	63,41	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.997.725.891,00	1.745.658.211,00	-252.067.680,00	87,38	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	956.541.191,00	705.930.436,00	-250.610.755,00	73,80	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	956.541.191,00	705.930.436,00	-250.610.755,00	73,80	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	956.541.191,00	705.930.436,00	-250.610.755,00	73,80	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.041.184.700,00	1.039.727.775,00	-1.456.925,00	99,86	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.041.184.700,00	1.039.727.775,00	-1.456.925,00	99,86	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.041.184.700,00	1.039.727.775,00	-1.456.925,00	99,86	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.263.703.994,00	3.918.263.093,00	-345.440.901,00	91,89	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	2.680.550.316,00	2.361.745.216,00	-318.805.100,00	88,10	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.680.550.316,00	2.361.745.216,00	-318.805.100,00	88,10	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.680.550.316,00	2.361.745.216,00	-318.805.100,00	88,10	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1.347.513.678,00	1.328.045.629,00	-19.468.049,00	98,55	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.347.513.678,00	1.328.045.629,00	-19.468.049,00	98,55	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.347.513.678,00	1.328.045.629,00	-19.468.049,00	98,55	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	235.640.000,00	228.472.248,00	-7.167.752,00	96,95	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	235.640.000,00	228.472.248,00	-7.167.752,00	96,95	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.640.000,00	228.472.248,00	-7.167.752,00	96,95	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	35.496.475.195,00	34.363.159.975,00	-1.133.315.220,00	96,80	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.01		PENGAWASAN PEREDARAN SARANA PERTANIAN	15.137.996.310,00	15.113.591.956,00	-24.404.354,00	99,83	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.01.0001		PENGAWASAN SEBARAN PUPUK, PESTISIDA, ALSINTAN, DAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN	15.137.996.310,00	15.113.591.956,00	-24.404.354,00	99,83	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.137.996.310,00	15.113.591.956,00	-24.404.354,00	99,83	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.077.996.310,00	5.053.591.956,00	-24.404.354,00	99,51	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.01.0001	5.1.04	Belanja Subsidi	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.02		PENGAWASAN MUTU, PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH TANAMAN	6.316.689.702,00	5.543.426.774,00	-773.262.928,00	87,75	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001		PENGELOLAAN PENERBITAN SERTIFIKAT BENIH	197.683.732,00	197.064.972,00	-618.760,00	99,68	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	197.683.732,00	197.064.972,00	-618.760,00	99,68	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.683.732,00	197.064.972,00	-618.760,00	99,68	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005		PENGAWASAN MUTU DAN PEREDARAN BENIH HORTIKULTURA, TANAMAN PANGAN, DAN PERKEBUNAN	4.135.864.027,00	3.437.877.594,00	-697.986.433,00	83,12	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.135.864.027,00	3.437.877.594,00	-697.986.433,00	83,12	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.087.864.027,00	3.389.877.594,00	-697.986.433,00	82,92	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.05	Belanja Hibah	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0007		PERBANYAKAN BENIH BERSERTIFIKAT HORTIKULTURA BERBENTUK BATANG	584.166.955,00	559.554.000,00	-24.612.955,00	95,78	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	584.166.955,00	559.554.000,00	-24.612.955,00	95,78	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	584.166.955,00	559.554.000,00	-24.612.955,00	95,78	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0011		PERBANYAKAN BENIH BERSERTIFIKAT PERKEBUNAN BERBENTUK BIJI	703.243.365,00	687.513.555,00	-15.729.810,00	97,76	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	703.243.365,00	687.513.555,00	-15.729.810,00	97,76	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	703.243.365,00	687.513.555,00	-15.729.810,00	97,76	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0013		PERBANYAKAN BENIH BERSERTIFIKAT TANAMAN PANGAN BERBENTUK BIJI/BENIH	373.483.732,00	361.384.713,00	-12.099.019,00	96,76	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	373.483.732,00	361.384.713,00	-12.099.019,00	96,76	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.483.732,00	361.384.713,00	-12.099.019,00	96,76	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0014		PERBANYAKAN BENIH BERSERTIFIKAT HORTIKULTURA BERBENTUK UMBI	322.247.891,00	300.031.940,00	-22.215.951,00	93,10	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	322.247.891,00	300.031.940,00	-22.215.951,00	93,10	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.247.891,00	300.031.940,00	-22.215.951,00	93,10	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.03		PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN PROVINSI	47.194.200,00	46.108.200,00	-1.086.000,00	97,69	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.03.0004		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU SDG TUMBUHAN DAN MIKROORGANISME	47.194.200,00	46.108.200,00	-1.086.000,00	97,69	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	47.194.200,00	46.108.200,00	-1.086.000,00	97,69	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.194.200,00	46.108.200,00	-1.086.000,00	97,69	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.04		PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN, SERTA PAKAN KEWENANGAN PROVINSI	13.994.594.983,00	13.660.033.045,00	-334.561.938,00	97,60	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.04.0001		PEMBERIAN BIMBINGAN PENINGKATAN PRODUKSI BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN, SERTA PAKAN KEWENANGAN PROVINSI	12.043.454.132,00	11.985.602.212,00	-57.851.920,00	99,51	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.043.454.132,00	11.985.602.212,00	-57.851.920,00	99,51	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	638.454.132,00	580.602.212,00	-57.851.920,00	90,93	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.04.0001	5.1.05	Belanja Hibah	11.405.000.000,00	11.405.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.04.0004		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN PRODUKSI BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN, SERTA PAKAN KEWENANGAN PROVINSI	1.951.140.851,00	1.674.430.833,00	-276.710.018,00	85,81	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.951.140.851,00	1.674.430.833,00	-276.710.018,00	85,81	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.951.140.851,00	1.674.430.833,00	-276.710.018,00	85,81	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.554.210.222,00	1.452.817.927,00	-101.392.295,00	93,47	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.1.01		PENATAAN PRASARANA PERTANIAN	1.554.210.222,00	1.452.817.927,00	-101.392.295,00	93,47	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0001		PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRASARANA, KAWASAN DAN KOMODITAS PERTANIAN	543.948.422,00	542.709.977,00	-1.238.445,00	99,77	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	543.948.422,00	542.709.977,00	-1.238.445,00	99,77	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	543.948.422,00	542.709.977,00	-1.238.445,00	99,77	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0009		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENATAAN PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA	1.010.261.800,00	910.107.950,00	-100.153.850,00	90,08	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.010.261.800,00	910.107.950,00	-100.153.850,00	90,08	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	930.261.800,00	830.107.950,00	-100.153.850,00	89,23	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0009	5.1.05	Belanja Hibah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	9.312.187.885,00	6.781.745.619,00	-2.530.442.266,00	72,82	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.1.01		PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	8.882.272.553,00	6.384.894.922,00	-2.497.377.631,00	71,88	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.1.01.0007		PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN ZOONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	8.882.272.553,00	6.384.894.922,00	-2.497.377.631,00	71,88	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	8.882.272.553,00	6.384.894.922,00	-2.497.377.631,00	71,88	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.882.272.553,00	6.384.894.922,00	-2.497.377.631,00	71,88	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.1.03		PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS SERTIFIKASI ZONA/KOMPARTEMEN BEBAS PENYAKIT DAN UNIT USAHA PRODUK HEWAN	364.550.840,00	334.263.290,00	-30.287.550,00	91,69	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.1.03.0001		PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS SERTIFIKASI ZONA/KOMPARTEMEN BEBAS PENYAKIT	150.623.335,00	136.007.020,00	-14.616.315,00	90,29	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	150.623.335,00	136.007.020,00	-14.616.315,00	90,29	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.623.335,00	136.007.020,00	-14.616.315,00	90,29	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.1.03.0003		PENGUJIAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	213.927.505,00	198.256.270,00	-15.671.235,00	92,67	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	213.927.505,00	198.256.270,00	-15.671.235,00	92,67	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.927.505,00	198.256.270,00	-15.671.235,00	92,67	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.1.05		KESEJAHTERAAN HEWAN	65.364.492,00	62.587.407,00	-2.777.085,00	95,75	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.1.05.0002		PENANGANAN ATAS PELANGGARAN KESEJAHTERAAN HEWAN SESUAI KEWENANGANNNYA	65.364.492,00	62.587.407,00	-2.777.085,00	95,75	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	65.364.492,00	62.587.407,00	-2.777.085,00	95,75	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.364.492,00	62.587.407,00	-2.777.085,00	95,75	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	848.586.526,00	751.930.903,00	-96.655.623,00	88,60	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.1.01		PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROVINSI	848.586.526,00	751.930.903,00	-96.655.623,00	88,60	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.1.01.0001		PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	342.943.450,00	327.311.904,00	-15.631.546,00	95,44	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	342.943.450,00	327.311.904,00	-15.631.546,00	95,44	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.943.450,00	327.311.904,00	-15.631.546,00	95,44	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.1.01.0002		PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DPI) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	285.383.657,00	242.466.315,00	-42.917.342,00	84,96	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	285.383.657,00	242.466.315,00	-42.917.342,00	84,96	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.383.657,00	242.466.315,00	-42.917.342,00	84,96	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.1.01.0005		PENANGGULANGAN PASCA BENCANA ALAM BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	220.259.419,00	182.152.684,00	-38.106.735,00	82,69	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	220.259.419,00	182.152.684,00	-38.106.735,00	82,69	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.259.419,00	182.152.684,00	-38.106.735,00	82,69	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	128.280.515,00	114.459.275,00	-13.821.240,00	89,22	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.1.01		PENGEMBANGAN KETENAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN	57.000.000,00	43.700.000,00	-13.300.000,00	76,66	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0004		PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH PERTANIAN	57.000.000,00	43.700.000,00	-13.300.000,00	76,66	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	57.000.000,00	43.700.000,00	-13.300.000,00	76,66	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	43.700.000,00	-13.300.000,00	76,66	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.1.02		PENGEMBANGAN PENERAPAN PENYULUHAN PERTANIAN	71.280.515,00	70.759.275,00	-521.240,00	99,26	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.1.02.0002		PELAKSANAAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI	71.280.515,00	70.759.275,00	-521.240,00	99,26	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	71.280.515,00	70.759.275,00	-521.240,00	99,26	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.280.515,00	70.759.275,00	-521.240,00	99,26	
				JUMLAH BELANJA	106.576.529.099,00	99.721.755.396,00	-6.854.773.703,00	93,56	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-105.640.393.905,00	-98.341.822.503,00	7.298.571.402,00	93,09	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-105.640.393.905,00	-98.341.822.503,00	7.298.571.402,00	93,09	

PEMERINTAH PROVINSI BALI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.27.2.09.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	936.135.194,00	1.379.932.893,00	443.797.699,00	147,40	
	3.27.2.09.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	932.095.194,00	1.375.892.893,00	443.797.699,00	147,61	
	3.27.2.09.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	932.069.814,00	1.375.867.513,00	443.797.699,00	147,61	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah; c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali; dan d.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	3.27.2.09.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	25.380,00	25.380,00	0,00	100,00	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	3.27.2.09.0.00.01.0000		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	100,00	
	3.27.2.09.0.00.01.0000		4.3.01	Pendapatan Hibah	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	936.135.194,00	1.379.932.893,00	443.797.699,00	147,40	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	3.826.074.609,00	3.575.843.109,00	-250.231.500,00	93,45	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.01		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI [illegible]	632.738.604,00	604.851.648,00	-27.886.956,00	95,59	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	68.130.160,00	62.755.209,00	-5.374.951,00	92,11	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.927.800,00	3.901.000,00	-26.800,00	99,31	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.927.800,00	3.901.000,00	-26.800,00	99,31	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.927.800,00	3.901.000,00	-26.800,00	99,31	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	31.702.360,00	26.950.209,00	-4.752.151,00	85,01	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.930.900,00	10.797.009,00	-4.133.891,00	72,31	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.930.900,00	10.797.009,00	-4.133.891,00	72,31	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	16.771.460,00	16.153.200,00	-618.260,00	96,31	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.771.460,00	16.153.200,00	-618.260,00	96,31	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	32.500.000,00	31.904.000,00	-596.000,00	98,16	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	32.500.000,00	31.904.000,00	-596.000,00	98,16	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	31.904.000,00	-596.000,00	98,16	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	251.484.476,00	249.320.271,00	-2.164.205,00	99,13	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	127.230.000,00	125.188.795,00	-2.041.205,00	98,39	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	127.230.000,00	125.188.795,00	-2.041.205,00	98,39	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.230.000,00	125.188.795,00	-2.041.205,00	98,39	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	124.254.476,00	124.131.476,00	-123.000,00	99,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	124.254.476,00	124.131.476,00	-123.000,00	99,90	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.254.476,00	124.131.476,00	-123.000,00	99,90	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	313.123.968,00	292.776.168,00	-20.347.800,00	93,50	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN [illegible]	185.930.984,00	173.129.684,00	-12.801.300,00	93,11	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	185.930.984,00	173.129.684,00	-12.801.300,00	93,11	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.930.984,00	173.129.684,00	-12.801.300,00	93,11	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	85.132.984,00	80.132.984,00	-5.000.000,00	94,12	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	85.132.984,00	80.132.984,00	-5.000.000,00	94,12	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.132.984,00	80.132.984,00	-5.000.000,00	94,12	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.01.1.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	42.060.000,00	39.513.500,00	-2.546.500,00	93,94	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	42.060.000,00	39.513.500,00	-2.546.500,00	93,94	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.060.000,00	39.513.500,00	-2.546.500,00	93,94	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.625.509.142,00	1.615.044.182,00	-10.464.960,00	99,35	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.1.01		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH PROVINSI DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	1.625.509.142,00	1.615.044.182,00	-10.464.960,00	99,35	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0002		PENYEDIAAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	1.625.509.142,00	1.615.044.182,00	-10.464.960,00	99,35	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.625.509.142,00	1.615.044.182,00	-10.464.960,00	99,35	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.425.509.142,00	1.415.044.182,00	-10.464.960,00	99,26	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.124.436.042,00	977.323.960,00	-147.112.082,00	86,91	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.04.1.01		PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KEWENANGAN PROVINSI	73.772.715,00	71.114.765,00	-2.657.950,00	96,39	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.04.1.01.0001		PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	73.772.715,00	71.114.765,00	-2.657.950,00	96,39	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.04.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	73.772.715,00	71.114.765,00	-2.657.950,00	96,39	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.04.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.772.715,00	71.114.765,00	-2.657.950,00	96,39	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.04.1.02		PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN PROVINSI	1.050.663.327,00	906.209.195,00	-144.454.132,00	86,25	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.04.1.02.0002		PELAKSANAAN PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PADA KERAWANAN PANGAN YANG MENCAKUP LEBIH DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	1.050.663.327,00	906.209.195,00	-144.454.132,00	86,25	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.04.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.050.663.327,00	906.209.195,00	-144.454.132,00	86,25	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.04.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.663.327,00	906.209.195,00	-144.454.132,00	86,25	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	443.390.821,00	378.623.319,00	-64.767.502,00	85,39	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05.1.01		PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DISTRIBUSI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	443.390.821,00	378.623.319,00	-64.767.502,00	85,39	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05.1.01.0006		SERTIFIKASI KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN	246.234.104,00	200.332.494,00	-45.901.610,00	81,35	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	246.234.104,00	200.332.494,00	-45.901.610,00	81,35	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.234.104,00	200.332.494,00	-45.901.610,00	81,35	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05.1.01.0008		REKOMENDASI KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	112.621.702,00	94.580.880,00	-18.040.822,00	83,98	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	112.621.702,00	94.580.880,00	-18.040.822,00	83,98	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.621.702,00	94.580.880,00	-18.040.822,00	83,98	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05.1.01.0009		PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGAWAS KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN	84.535.015,00	83.709.945,00	-825.070,00	99,02	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05.1.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	84.535.015,00	83.709.945,00	-825.070,00	99,02	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.535.015,00	83.709.945,00	-825.070,00	99,02	
				JUMLAH BELANJA	3.826.074.609,00	3.575.843.109,00	-250.231.500,00	93,45	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-2.889.939.415,00	-2.195.910.216,00	694.029.199,00	75,98	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-2.889.939.415,00	-2.195.910.216,00	694.029.199,00	75,98	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
Organisasi : Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.28.2.11.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.235.183.760,00	1.230.889.120,00	-4.294.640,00	99,65	
	3.28.2.11.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.235.183.760,00	1.230.889.120,00	-4.294.640,00	99,65	
	3.28.2.11.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	43.536.000,00	39.220.000,00	-4.316.000,00	90,08	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah; c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali; dan d.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	3.28.2.11.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.191.647.760,00	1.191.669.120,00	21.360,00	100,00	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
				JUMLAH PENDAPATAN	1.235.183.760,00	1.230.889.120,00	-4.294.640,00	99,65	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	44.619.832.805,00	41.301.879.031,00	-3.317.953.774,00	92,56	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	44.338.081.085,00	41.061.555.998,00	-3.276.525.087,00	92,61	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	37.694.200,00	23.005.700,00	-14.688.500,00	61,03	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.01.0001		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	37.694.200,00	23.005.700,00	-14.688.500,00	61,03	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.694.200,00	23.005.700,00	-14.688.500,00	61,03	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.694.200,00	23.005.700,00	-14.688.500,00	61,03	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	38.216.477.014,00	35.795.780.925,00	-2.420.696.089,00	93,66	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	38.113.997.214,00	35.709.429.225,00	-2.404.567.989,00	93,69	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.113.997.214,00	35.709.429.225,00	-2.404.567.989,00	93,69	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	38.018.717.214,00	35.619.479.225,00	-2.399.237.989,00	93,68	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.280.000,00	89.950.000,00	-5.330.000,00	94,40	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	102.479.800,00	86.351.700,00	-16.128.100,00	84,26	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	102.479.800,00	86.351.700,00	-16.128.100,00	84,26	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.479.800,00	86.351.700,00	-16.128.100,00	84,26	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.057.937.612,00	772.140.690,00	-285.796.922,00	72,98	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	30.473.900,00	27.425.510,00	-3.048.390,00	89,99	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.473.900,00	27.425.510,00	-3.048.390,00	89,99	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.473.900,00	27.425.510,00	-3.048.390,00	89,99	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	414.975.512,00	318.813.992,00	-96.161.520,00	76,82	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	100.533.200,00	71.813.992,00	-28.719.208,00	71,43	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.533.200,00	71.813.992,00	-28.719.208,00	71,43	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	314.442.312,00	247.000.000,00	-67.442.312,00	78,55	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	314.442.312,00	247.000.000,00	-67.442.312,00	78,55	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	242.650.000,00	236.473.850,00	-6.176.150,00	97,45	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	242.650.000,00	236.473.850,00	-6.176.150,00	97,45	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.650.000,00	236.473.850,00	-6.176.150,00	97,45	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	18.258.200,00	9.361.616,00	-8.896.584,00	51,27	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.258.200,00	9.361.616,00	-8.896.584,00	51,27	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.258.200,00	9.361.616,00	-8.896.584,00	51,27	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	19.500.000,00	4.363.000,00	-15.137.000,00	22,37	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	19.500.000,00	4.363.000,00	-15.137.000,00	22,37	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	4.363.000,00	-15.137.000,00	22,37	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	332.080.000,00	175.702.722,00	-156.377.278,00	52,90	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	332.080.000,00	175.702.722,00	-156.377.278,00	52,90	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.080.000,00	175.702.722,00	-156.377.278,00	52,90	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.511.997.014,00	1.314.246.507,00	-197.750.507,00	86,92	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	617.050.000,00	458.175.091,00	-158.874.909,00	74,25	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	617.050.000,00	458.175.091,00	-158.874.909,00	74,25	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	617.050.000,00	458.175.091,00	-158.874.909,00	74,25	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	894.947.014,00	856.071.416,00	-38.875.598,00	95,65	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	894.947.014,00	856.071.416,00	-38.875.598,00	95,65	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	894.947.014,00	856.071.416,00	-38.875.598,00	95,65	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.513.975.245,00	3.156.382.176,00	-357.593.069,00	89,82	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.819.315.924,00	1.559.515.953,00	-259.799.971,00	85,71	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.819.315.924,00	1.559.515.953,00	-259.799.971,00	85,71	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.819.315.924,00	1.559.515.953,00	-259.799.971,00	85,71	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	619.341.235,00	555.730.176,00	-63.611.059,00	89,72	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	619.341.235,00	555.730.176,00	-63.611.059,00	89,72	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	619.341.235,00	555.730.176,00	-63.611.059,00	89,72	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.075.318.086,00	1.041.136.047,00	-34.182.039,00	96,82	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	943.503.086,00	909.980.546,00	-33.522.540,00	96,44	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	943.503.086,00	909.980.546,00	-33.522.540,00	96,44	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.09.0011	5.2	BELANJA MODAL	131.815.000,00	131.155.501,00	-659.499,00	99,49	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.09.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	131.815.000,00	131.155.501,00	-659.499,00	99,49	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	103.565.115,00	74.575.557,00	-28.989.558,00	72,00	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.03.1.05		PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI	103.565.115,00	74.575.557,00	-28.989.558,00	72,00	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0004		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN	103.565.115,00	74.575.557,00	-28.989.558,00	72,00	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	103.565.115,00	74.575.557,00	-28.989.558,00	72,00	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.565.115,00	74.575.557,00	-28.989.558,00	72,00	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	16.520.500,00	10.275.100,00	-6.245.400,00	62,19	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.05.1.01		PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	16.520.500,00	10.275.100,00	-6.245.400,00	62,19	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.05.1.01.0004		PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI PENYULUH KEHUTANAN	16.520.500,00	10.275.100,00	-6.245.400,00	62,19	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.05.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	16.520.500,00	10.275.100,00	-6.245.400,00	62,19	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.05.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.520.500,00	10.275.100,00	-6.245.400,00	62,19	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	161.666.105,00	155.472.376,00	-6.193.729,00	96,16	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.06.1.01		PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAS LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	161.666.105,00	155.472.376,00	-6.193.729,00	96,16	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.06.1.01.0008		PENINGKATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI OPTIMALISASI FUNGSI DAN DAYA DUKUNG WILAYAH DAS	161.666.105,00	155.472.376,00	-6.193.729,00	96,16	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.06.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	161.666.105,00	155.472.376,00	-6.193.729,00	96,16	
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.06.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.666.105,00	155.472.376,00	-6.193.729,00	96,16	
				JUMLAH BELANJA	44.619.832.805,00	41.301.879.031,00	-3.317.953.774,00	92,56	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-43.384.649.045,00	-40.070.989.911,00	3.313.659.134,00	92,36	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-43.384.649.045,00	-40.070.989.911,00	3.313.659.134,00	92,36	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.28.2.11.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.235.183.760,00	1.230.889.120,00	-4.294.640,00	99,65	
	3.28.2.11.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.235.183.760,00	1.230.889.120,00	-4.294.640,00	99,65	
	3.28.2.11.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	43.536.000,00	39.220.000,00	-4.316.000,00	90,08	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah; c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali; dan d.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	3.28.2.11.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.191.647.760,00	1.191.669.120,00	21.360,00	100,00	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
				JUMLAH PENDAPATAN	1.235.183.760,00	1.230.889.120,00	-4.294.640,00	99,65	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	26.170.073.897,00	18.036.515.634,00	-8.133.558.263,00	68,92	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	555.826.560,00	471.826.043,00	-84.000.517,00	84,88	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	70.899.300,00	61.275.245,00	-9.624.055,00	86,42	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.06.0001		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	5.229.000,00	4.550.000,00	-679.000,00	87,01	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.229.000,00	4.550.000,00	-679.000,00	87,01	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.229.000,00	4.550.000,00	-679.000,00	87,01	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	16.567.800,00	10.188.500,00	-6.379.300,00	61,49	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.567.800,00	10.188.500,00	-6.379.300,00	61,49	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.567.800,00	10.188.500,00	-6.379.300,00	61,49	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	42.000.000,00	41.449.100,00	-550.900,00	98,68	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	42.000.000,00	41.449.100,00	-550.900,00	98,68	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	41.449.100,00	-550.900,00	98,68	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.852.500,00	2.987.645,00	-1.864.855,00	61,56	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.852.500,00	2.987.645,00	-1.864.855,00	61,56	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.852.500,00	2.987.645,00	-1.864.855,00	61,56	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	2.250.000,00	2.100.000,00	-150.000,00	93,33	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.250.000,00	2.100.000,00	-150.000,00	93,33	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.100.000,00	-150.000,00	93,33	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	75.488.188,00	43.409.056,00	-32.079.132,00	57,50	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	75.488.188,00	43.409.056,00	-32.079.132,00	57,50	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	27.046.545,00	12.014.256,00	-15.032.289,00	44,42	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.046.545,00	12.014.256,00	-15.032.289,00	44,42	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	48.441.643,00	31.394.800,00	-17.046.843,00	64,80	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.441.643,00	31.394.800,00	-17.046.843,00	64,80	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	409.439.072,00	367.141.742,00	-42.297.330,00	89,66	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU	225.753.662,00	195.714.832,00	-30.038.830,00	86,69	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	225.753.662,00	195.714.832,00	-30.038.830,00	86,69	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.753.662,00	195.714.832,00	-30.038.830,00	86,69	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	183.685.410,00	171.426.910,00	-12.258.500,00	93,32	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	183.685.410,00	171.426.910,00	-12.258.500,00	93,32	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.685.410,00	171.426.910,00	-12.258.500,00	93,32	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	153.867.210,00	151.028.125,00	-2.839.085,00	98,15	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.02.1.01		RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) PROVINSI	101.639.800,00	100.847.115,00	-792.685,00	99,22	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.02.1.01.0002		PENGENDALIAN PELAKSANAAN RPPLH PROVINSI	101.639.800,00	100.847.115,00	-792.685,00	99,22	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	101.639.800,00	100.847.115,00	-792.685,00	99,22	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.639.800,00	100.847.115,00	-792.685,00	99,22	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.02.1.02		PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) PROVINSI	52.227.410,00	50.181.010,00	-2.046.400,00	96,08	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.02.1.02.0006		PEMANTAUAN DAN EVALUASI KLHS	52.227.410,00	50.181.010,00	-2.046.400,00	96,08	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.02.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	52.227.410,00	50.181.010,00	-2.046.400,00	96,08	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.02.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.227.410,00	50.181.010,00	-2.046.400,00	96,08	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	379.600.492,00	345.543.396,00	-34.057.096,00	91,02	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.03.1.01		PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUGAN HIDUP	379.600.492,00	345.543.396,00	-34.057.096,00	91,02	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.03.1.01.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT	70.333.600,00	67.159.688,00	-3.173.912,00	95,48	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	70.333.600,00	67.159.688,00	-3.173.912,00	95,48	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.333.600,00	67.159.688,00	-3.173.912,00	95,48	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.03.1.01.0002		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	25.080.000,00	15.787.345,00	-9.292.655,00	62,94	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.080.000,00	15.787.345,00	-9.292.655,00	62,94	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.080.000,00	15.787.345,00	-9.292.655,00	62,94	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.03.1.01.0015		PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI	284.186.892,00	262.596.363,00	-21.590.529,00	92,40	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.03.1.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	284.186.892,00	262.596.363,00	-21.590.529,00	92,40	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.03.1.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.186.892,00	262.596.363,00	-21.590.529,00	92,40	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	40.041.000,00	300.000,00	-39.741.000,00	0,74	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.04.1.01		PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI PROVINSI	40.041.000,00	300.000,00	-39.741.000,00	0,74	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.04.1.01.0008		PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI LUAR KAWASAN HUTAN	40.041.000,00	300.000,00	-39.741.000,00	0,74	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.04.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	40.041.000,00	300.000,00	-39.741.000,00	0,74	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.04.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.041.000,00	300.000,00	-39.741.000,00	0,74	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	37.816.300,00	13.245.200,00	-24.571.100,00	35,02	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.05.1.01		PENGUMPULAN LIMBAH B3 LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	37.816.300,00	13.245.200,00	-24.571.100,00	35,02	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.05.1.01.0001		FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3 DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	37.816.300,00	13.245.200,00	-24.571.100,00	35,02	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.816.300,00	13.245.200,00	-24.571.100,00	35,02	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.816.300,00	13.245.200,00	-24.571.100,00	35,02	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	10.399.700,00	10.016.420,00	-383.280,00	96,31	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.06.1.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	10.399.700,00	10.016.420,00	-383.280,00	96,31	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.06.1.01.0006		PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN	10.399.700,00	10.016.420,00	-383.280,00	96,31	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.06.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.399.700,00	10.016.420,00	-383.280,00	96,31	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.06.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.399.700,00	10.016.420,00	-383.280,00	96,31	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.131.077.115,00	1.007.748.820,00	-123.328.295,00	89,09	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.08.1.01		PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN	1.131.077.115,00	1.007.748.820,00	-123.328.295,00	89,09	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.08.1.01.0002		PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN HIDUP	1.131.077.115,00	1.007.748.820,00	-123.328.295,00	89,09	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.08.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.131.077.115,00	1.007.748.820,00	-123.328.295,00	89,09	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.08.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.131.077.115,00	1.007.748.820,00	-123.328.295,00	89,09	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	34.399.700,00	33.645.476,00	-754.224,00	97,80	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.09.1.01		PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH PROVINSI	34.399.700,00	33.645.476,00	-754.224,00	97,80	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.09.1.01.0001		PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/ FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	34.399.700,00	33.645.476,00	-754.224,00	97,80	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.09.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.399.700,00	33.645.476,00	-754.224,00	97,80	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.09.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.399.700,00	33.645.476,00	-754.224,00	97,80	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10.394.300,00	5.313.000,00	-5.081.300,00	51,11	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.10.1.01		PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	10.394.300,00	5.313.000,00	-5.081.300,00	51,11	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.10.1.01.0007		PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT PROVINSI	10.394.300,00	5.313.000,00	-5.081.300,00	51,11	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.10.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	10.394.300,00	5.313.000,00	-5.081.300,00	51,11	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.10.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.394.300,00	5.313.000,00	-5.081.300,00	51,11	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	23.816.651.520,00	15.997.849.154,00	-7.818.802.366,00	67,17	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.11.1.01		PENANGANAN SAMPAH DI TPA/TPST REGIONAL	23.816.651.520,00	15.997.849.154,00	-7.818.802.366,00	67,17	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.11.1.01.0003		PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN TPA/TPST REGIONAL	23.816.651.520,00	15.997.849.154,00	-7.818.802.366,00	67,17	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.11.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.592.257.520,00	12.718.961.680,00	-1.873.295.840,00	87,16	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.11.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.592.257.520,00	12.718.961.680,00	-1.873.295.840,00	87,16	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.11.1.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	9.224.394.000,00	3.278.887.474,00	-5.945.506.526,00	35,54	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.11.1.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.517.156.000,00	1.311.909.000,00	-205.247.000,00	86,47	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.11.1.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	206.460.000,00	202.130.000,00	-4.330.000,00	97,90	
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.11.1.01.0003	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.500.778.000,00	1.764.848.474,00	-5.735.929.526,00	23,52	
				JUMLAH BELANJA	26.170.073.897,00	18.036.515.634,00	-8.133.558.263,00	68,92	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-24.934.890.137,00	-16.805.626.514,00	8.129.263.623,00	67,39	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-24.934.890.137,00	-16.805.626.514,00	8.129.263.623,00	67,39	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.31.3.30.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	25.774.400,00	30.292.800,00	4.518.400,00	117,53	
	3.31.3.30.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.774.400,00	30.292.800,00	4.518.400,00	117,53	
	3.31.3.30.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	25.760.000,00	30.240.000,00	4.480.000,00	117,39	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah; c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali; dan d.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	3.31.3.30.0.00.02.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	14.400,00	52.800,00	38.400,00	366,66	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
				JUMLAH PENDAPATAN	25.774.400,00	30.292.800,00	4.518.400,00	117,53	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	19.376.085.557,00	17.794.358.745,00	-1.581.726.812,00	91,83	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.933.673.213,00	16.408.462.787,00	-1.525.210.426,00	91,49	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	41.290.800,00	34.910.655,00	-6.380.145,00	84,54	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.01.0001		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	41.290.800,00	34.910.655,00	-6.380.145,00	84,54	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	41.290.800,00	34.910.655,00	-6.380.145,00	84,54	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.290.800,00	34.910.655,00	-6.380.145,00	84,54	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	14.578.942.945,00	13.673.008.126,00	-905.934.819,00	93,78	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	14.578.942.945,00	13.673.008.126,00	-905.934.819,00	93,78	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.578.942.945,00	13.673.008.126,00	-905.934.819,00	93,78	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	14.524.042.945,00	13.622.608.126,00	-901.434.819,00	93,79	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.900.000,00	50.400.000,00	-4.500.000,00	91,80	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	75.000.000,00	3.851.000,00	-71.149.000,00	5,13	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	75.000.000,00	3.851.000,00	-71.149.000,00	5,13	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	3.851.000,00	-71.149.000,00	5,13	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	3.851.000,00	-71.149.000,00	5,13	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	954.870.094,00	742.829.951,00	-212.040.143,00	77,79	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	19.722.700,00	15.329.080,00	-4.393.620,00	77,72	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.722.700,00	15.329.080,00	-4.393.620,00	77,72	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.722.700,00	15.329.080,00	-4.393.620,00	77,72	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	635.214.960,00	527.453.627,00	-107.761.333,00	83,03	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	129.233.600,00	71.644.127,00	-57.589.473,00	55,43	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.233.600,00	71.644.127,00	-57.589.473,00	55,43	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	505.981.360,00	455.809.500,00	-50.171.860,00	90,08	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	505.981.360,00	455.809.500,00	-50.171.860,00	90,08	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	83.521.434,00	75.975.900,00	-7.545.534,00	90,96	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	83.521.434,00	75.975.900,00	-7.545.534,00	90,96	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.521.434,00	75.975.900,00	-7.545.534,00	90,96	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	16.940.000,00	11.057.164,00	-5.882.836,00	65,27	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.940.000,00	11.057.164,00	-5.882.836,00	65,27	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.940.000,00	11.057.164,00	-5.882.836,00	65,27	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.424.000,00	4.542.400,00	-1.881.600,00	70,70	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.424.000,00	4.542.400,00	-1.881.600,00	70,70	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.424.000,00	4.542.400,00	-1.881.600,00	70,70	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	193.047.000,00	108.471.780,00	-84.575.220,00	56,18	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	193.047.000,00	108.471.780,00	-84.575.220,00	56,18	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.047.000,00	108.471.780,00	-84.575.220,00	56,18	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.150.403.886,00	941.710.069,00	-208.693.817,00	81,85	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	352.000.000,00	182.158.157,00	-169.841.843,00	51,74	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	352.000.000,00	182.158.157,00	-169.841.843,00	51,74	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.000.000,00	182.158.157,00	-169.841.843,00	51,74	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	571.208.986,00	536.241.280,00	-34.967.706,00	93,87	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	571.208.986,00	536.241.280,00	-34.967.706,00	93,87	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	571.208.986,00	536.241.280,00	-34.967.706,00	93,87	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	227.194.900,00	223.310.632,00	-3.884.268,00	98,29	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	227.194.900,00	223.310.632,00	-3.884.268,00	98,29	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.194.900,00	223.310.632,00	-3.884.268,00	98,29	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.133.165.488,00	1.012.152.986,00	-121.012.502,00	89,32	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN PIMPINAN DAERAH	969.011.504,00	849.117.263,00	-119.894.241,00	87,62	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	969.011.504,00	849.117.263,00	-119.894.241,00	87,62	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	969.011.504,00	849.117.263,00	-119.894.241,00	87,62	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	164.153.984,00	163.035.723,00	-1.118.261,00	99,31	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	164.153.984,00	163.035.723,00	-1.118.261,00	99,31	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.153.984,00	163.035.723,00	-1.118.261,00	99,31	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	198.569.414,00	195.540.289,00	-3.029.125,00	98,47	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.02.1.04		PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) BAGI DAERAH PROVINSI YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI INSTANSI PENERBIT SKA DAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)	198.569.414,00	195.540.289,00	-3.029.125,00	98,47	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.02.1.04.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI LAYANAN PENERBITAN SKA	198.569.414,00	195.540.289,00	-3.029.125,00	98,47	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.02.1.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	198.569.414,00	195.540.289,00	-3.029.125,00	98,47	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.02.1.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.569.414,00	195.540.289,00	-3.029.125,00	98,47	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	13.442.800,00	13.120.004,00	-322.796,00	97,59	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.03.1.01		PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PUSAT DISTRIBUSI REGIONAL DAN PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI SERTA PASAR LELANG KOMODITAS	13.442.800,00	13.120.004,00	-322.796,00	97,59	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.03.1.01.0002		PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PUSAT DISTRIBUSI REGIONAL DAN PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI	13.442.800,00	13.120.004,00	-322.796,00	97,59	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.442.800,00	13.120.004,00	-322.796,00	97,59	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.442.800,00	13.120.004,00	-322.796,00	97,59	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	147.180.600,00	127.225.005,00	-19.955.595,00	86,44	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.04.1.02		PENGENDALIAN HARGA, INFORMASI KETERSEDIAAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG LINTAS KABUPATEN/KOTA YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	147.180.600,00	127.225.005,00	-19.955.595,00	86,44	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.04.1.02.0001		PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG LINTAS KABUPATEN/KOTA	147.180.600,00	127.225.005,00	-19.955.595,00	86,44	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.04.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	147.180.600,00	127.225.005,00	-19.955.595,00	86,44	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.04.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.180.600,00	127.225.005,00	-19.955.595,00	86,44	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	48.499.200,00	46.319.000,00	-2.180.200,00	95,50	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.05.1.01		PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA LEBIH DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI	48.499.200,00	46.319.000,00	-2.180.200,00	95,50	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.05.1.01.0004		PENINGKATAN CITRA PRODUK EKSPOR	48.499.200,00	46.319.000,00	-2.180.200,00	95,50	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.05.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	48.499.200,00	46.319.000,00	-2.180.200,00	95,50	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.05.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.499.200,00	46.319.000,00	-2.180.200,00	95,50	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	761.690.873,00	731.934.999,00	-29.755.874,00	96,09	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06.1.01		PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SELURUH DAERAH KABUPATEN/KOTA	461.672.200,00	461.462.000,00	-210.200,00	99,95	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06.1.01.0001		PEMBERDAYAAN KONSUMEN DAN KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	456.000.000,00	456.000.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	456.000.000,00	456.000.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06.1.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	456.000.000,00	456.000.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06.1.01.0002		PENINGKATAN HUBUNGAN KERJA DENGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN	5.672.200,00	5.462.000,00	-210.200,00	96,29	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.672.200,00	5.462.000,00	-210.200,00	96,29	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.672.200,00	5.462.000,00	-210.200,00	96,29	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06.1.02		PELAKSANAAN PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU PRODUK DI SELURUH DAERAH KABUPATEN/KOTA	213.795.176,00	186.307.422,00	-27.487.754,00	87,14	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06.1.02.0005		PENGEMBANGAN LAYANAN PENGUJIAN	213.795.176,00	186.307.422,00	-27.487.754,00	87,14	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	213.795.176,00	186.307.422,00	-27.487.754,00	87,14	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.795.176,00	186.307.422,00	-27.487.754,00	87,14	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06.1.03		PELAKSANAAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN/ATAU JASA DI SELURUH DAERAH KABUPATEN/KOTA	86.223.497,00	84.165.577,00	-2.057.920,00	97,61	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06.1.03.0003		PENINGKATAN KAPASITAS DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN/ATAU JASA SERTA KEGIATAN PERDAGANGAN SESUAI PARAMETER KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	86.223.497,00	84.165.577,00	-2.057.920,00	97,61	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	86.223.497,00	84.165.577,00	-2.057.920,00	97,61	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.223.497,00	84.165.577,00	-2.057.920,00	97,61	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	273.029.457,00	271.756.661,00	-1.272.796,00	99,53	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.07.1.03		PELAKSANAAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	273.029.457,00	271.756.661,00	-1.272.796,00	99,53	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.07.1.03.0005		FASILITASI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT PROVINSI	273.029.457,00	271.756.661,00	-1.272.796,00	99,53	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.07.1.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	273.029.457,00	271.756.661,00	-1.272.796,00	99,53	
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.07.1.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.029.457,00	271.756.661,00	-1.272.796,00	99,53	
				JUMLAH BELANJA	19.376.085.557,00	17.794.358.745,00	-1.581.726.812,00	91,83	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-19.350.311.157,00	-17.764.065.945,00	1.586.245.212,00	91,80	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-19.350.311.157,00	-17.764.065.945,00	1.586.245.212,00	91,80	

PEMERINTAH PROVINSI BALI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.31.3.30.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	25.774.400,00	30.292.800,00	4.518.400,00	117,53	
	3.31.3.30.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.774.400,00	30.292.800,00	4.518.400,00	117,53	
	3.31.3.30.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	25.760.000,00	30.240.000,00	4.480.000,00	117,39	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah; c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali; dan d.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	3.31.3.30.0.00.02.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	14.400,00	52.800,00	38.400,00	366,66	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
				JUMLAH PENDAPATAN	25.774.400,00	30.292.800,00	4.518.400,00	117,53	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	6.081.959.018,00	5.817.007.349,00	-264.951.669,00	95,64	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	672.987.857,00	647.553.464,00	-25.434.393,00	96,22	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	541.348.660,00	528.714.345,00	-12.634.315,00	97,66	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.01.1.06.0002		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	533.071.660,00	524.312.345,00	-8.759.315,00	98,35	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	121.821.900,00	114.589.145,00	-7.232.755,00	94,06	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.821.900,00	114.589.145,00	-7.232.755,00	94,06	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	411.249.760,00	409.723.200,00	-1.526.560,00	99,62	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	411.249.760,00	409.723.200,00	-1.526.560,00	99,62	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.225.000,00	0,00	-1.225.000,00	0,00	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.225.000,00	0,00	-1.225.000,00	0,00	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.225.000,00	0,00	-1.225.000,00	0,00	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.212.000,00	2.482.000,00	-730.000,00	77,27	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.212.000,00	2.482.000,00	-730.000,00	77,27	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.212.000,00	2.482.000,00	-730.000,00	77,27	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	3.840.000,00	1.920.000,00	-1.920.000,00	50,00	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	3.840.000,00	1.920.000,00	-1.920.000,00	50,00	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	1.920.000,00	-1.920.000,00	50,00	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	27.587.705,00	26.177.720,00	-1.409.985,00	94,88	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	27.587.705,00	26.177.720,00	-1.409.985,00	94,88	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	27.587.705,00	26.177.720,00	-1.409.985,00	94,88	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.587.705,00	26.177.720,00	-1.409.985,00	94,88	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	104.051.492,00	92.661.399,00	-11.390.093,00	89,05	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN [illegible]	104.051.492,00	92.661.399,00	-11.390.093,00	89,05	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	104.051.492,00	92.661.399,00	-11.390.093,00	89,05	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.051.492,00	92.661.399,00	-11.390.093,00	89,05	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5.382.011.261,00	5.166.093.885,00	-215.917.376,00	95,98	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02.1.01		PENYUSUNAN, PENERAPAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI	5.382.011.261,00	5.166.093.885,00	-215.917.376,00	95,98	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02.1.01.0004		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI	176.162.000,00	119.644.010,00	-56.517.990,00	67,91	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	176.162.000,00	119.644.010,00	-56.517.990,00	67,91	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.162.000,00	119.644.010,00	-6.517.990,00	94,83	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02.1.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02.1.01.0005		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	5.205.849.261,00	5.046.449.875,00	-159.399.386,00	96,93	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.205.849.261,00	5.046.449.875,00	-159.399.386,00	96,93	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.205.849.261,00	5.046.449.875,00	-159.399.386,00	96,93	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	26.959.900,00	3.360.000,00	-23.599.900,00	12,46	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.04.1.01		PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI, DAN IPKI KEWENANGAN PROVINSI BERBASIS SISTEM INFORMASI [illegible]	26.959.900,00	3.360.000,00	-23.599.900,00	12,46	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.04.1.01.0001		FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI SERTA DATA LAIN LINGKUP PROVINSI MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS)	26.959.900,00	3.360.000,00	-23.599.900,00	12,46	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.04.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.959.900,00	3.360.000,00	-23.599.900,00	12,46	
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.04.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.959.900,00	3.360.000,00	-23.599.900,00	12,46	
				JUMLAH BELANJA	6.081.959.018,00	5.817.007.349,00	-264.951.669,00	95,64	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-6.056.184.618,00	-5.786.714.549,00	269.470.069,00	95,55	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-6.056.184.618,00	-5.786.714.549,00	269.470.069,00	95,55	

PEMERINTAH PROVINSI BALI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Sekretariat Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	4.01.2.23.2.24.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	253.753.839.112,00	253.753.839.116,43	4,43	100,00	
	4.01.2.23.2.24.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	253.753.839.112,00	253.753.839.116,43	4,43	100,00	
	4.01.2.23.2.24.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah; c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali; dan d.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	4.01.2.23.2.24.01.0000		4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	253.603.839.112,00	253.603.839.116,43	4,43	100,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	253.753.839.112,00	253.753.839.116,43	4,43	100,00	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000		5	BELANJA DAERAH	317.370.561.909,00	257.841.020.279,00	-59.529.541.630,00	81,24	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	209.481.313.818,00	170.574.563.716,00	-38.906.750.102,00	81,42	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	645.299.455,00	602.148.739,00	-43.150.716,00	93,31	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.01.0001		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	645.299.455,00	602.148.739,00	-43.150.716,00	93,31	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	645.299.455,00	602.148.739,00	-43.150.716,00	93,31	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	645.299.455,00	602.148.739,00	-43.150.716,00	93,31	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	77.083.141.973,00	71.112.314.678,00	-5.970.827.295,00	92,25	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	76.609.455.509,00	70.643.040.722,00	-5.966.414.787,00	92,21	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	76.609.455.509,00	70.643.040.722,00	-5.966.414.787,00	92,21	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	76.301.055.509,00	70.492.790.722,00	-5.808.264.787,00	92,38	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.400.000,00	150.250.000,00	-158.150.000,00	48,71	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	473.686.464,00	469.273.956,00	-4.412.508,00	99,06	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	473.686.464,00	469.273.956,00	-4.412.508,00	99,06	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	473.686.464,00	469.273.956,00	-4.412.508,00	99,06	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	262.467.532,00	256.328.776,00	-6.138.756,00	97,66	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	262.467.532,00	256.328.776,00	-6.138.756,00	97,66	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	262.467.532,00	256.328.776,00	-6.138.756,00	97,66	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.467.532,00	256.328.776,00	-6.138.756,00	97,66	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	4.976.000,00	3.262.939,00	-1.713.061,00	65,57	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.05.0004		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	4.976.000,00	3.262.939,00	-1.713.061,00	65,57	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.976.000,00	3.262.939,00	-1.713.061,00	65,57	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.976.000,00	3.262.939,00	-1.713.061,00	65,57	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	27.012.878.183,00	18.899.296.338,00	-8.113.581.845,00	69,96	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	666.204.720,00	556.721.875,00	-109.482.845,00	83,56	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	626.287.920,00	524.487.475,00	-101.800.445,00	83,74	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	626.287.920,00	524.487.475,00	-101.800.445,00	83,74	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.06.0001	5.2	BELANJA MODAL	39.916.800,00	32.234.400,00	-7.682.400,00	80,75	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.06.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.916.800,00	32.234.400,00	-7.682.400,00	80,75	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.797.787.497,00	4.997.599.200,00	-800.188.297,00	86,19	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.820.001.518,00	2.408.436.328,00	-411.565.190,00	85,40	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.820.001.518,00	2.408.436.328,00	-411.565.190,00	85,40	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	2.977.785.979,00	2.589.162.872,00	-388.623.107,00	86,94	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.977.785.979,00	2.589.162.872,00	-388.623.107,00	86,94	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	77.718.400,00	49.966.702,00	-27.751.698,00	64,29	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	77.718.400,00	49.966.702,00	-27.751.698,00	64,29	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.718.400,00	49.966.702,00	-27.751.698,00	64,29	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	11.862.833.477,00	7.292.636.423,00	-4.570.197.054,00	61,47	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	11.862.833.477,00	7.292.636.423,00	-4.570.197.054,00	61,47	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.862.833.477,00	7.292.636.423,00	-4.570.197.054,00	61,47	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	8.257.081.347,00	5.668.518.076,00	-2.588.563.271,00	68,65	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	8.257.081.347,00	5.668.518.076,00	-2.588.563.271,00	68,65	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.257.081.347,00	5.668.518.076,00	-2.588.563.271,00	68,65	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.06.0011		DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	351.252.742,00	333.854.062,00	-17.398.680,00	95,04	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	351.252.742,00	333.854.062,00	-17.398.680,00	95,04	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.252.742,00	333.854.062,00	-17.398.680,00	95,04	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	33.164.325.685,00	27.259.442.318,00	-5.904.883.367,00	82,19	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	2.069.469.360,00	1.675.174.542,00	-394.294.818,00	80,94	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.069.469.360,00	1.675.174.542,00	-394.294.818,00	80,94	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.069.469.360,00	1.675.174.542,00	-394.294.818,00	80,94	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	25.565.733.308,00	20.219.069.654,00	-5.346.663.654,00	79,08	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	25.565.733.308,00	20.219.069.654,00	-5.346.663.654,00	79,08	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.565.733.308,00	20.219.069.654,00	-5.346.663.654,00	79,08	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	5.529.123.017,00	5.365.198.122,00	-163.924.895,00	97,03	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.529.123.017,00	5.365.198.122,00	-163.924.895,00	97,03	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.529.123.017,00	5.365.198.122,00	-163.924.895,00	97,03	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	20.660.593.676,00	16.406.340.841,00	-4.254.252.835,00	79,40	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	2.682.212.659,00	2.432.370.611,00	-249.842.048,00	90,68	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.682.212.659,00	2.432.370.611,00	-249.842.048,00	90,68	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.682.212.659,00	2.432.370.611,00	-249.842.048,00	90,68	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU	7.931.019.577,00	6.755.654.309,00	-1.175.365.268,00	85,18	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.931.019.577,00	6.755.654.309,00	-1.175.365.268,00	85,18	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.931.019.577,00	6.755.654.309,00	-1.175.365.268,00	85,18	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	1.600.000,00	1.527.000,00	-73.000,00	95,43	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.600.000,00	1.527.000,00	-73.000,00	95,43	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.527.000,00	-73.000,00	95,43	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	391.640.000,00	211.705.430,00	-179.934.570,00	54,05	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	391.640.000,00	211.705.430,00	-179.934.570,00	54,05	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	391.640.000,00	211.705.430,00	-179.934.570,00	54,05	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	9.641.321.440,00	7.005.083.491,00	-2.636.237.949,00	72,65	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	8.917.241.188,00	6.661.428.492,00	-2.255.812.696,00	74,70	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.917.241.188,00	6.661.428.492,00	-2.255.812.696,00	74,70	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.09.0010	5.2	BELANJA MODAL	724.080.252,00	343.654.999,00	-380.425.253,00	47,46	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.09.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	235.460.000,00	203.375.999,00	-32.084.001,00	86,37	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.09.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	142.363.800,00	140.279.000,00	-2.084.800,00	98,53	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.09.0010	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	346.256.452,00	0,00	-346.256.452,00	0,00	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	12.800.000,00	0,00	-12.800.000,00	0,00	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	12.800.000,00	0,00	-12.800.000,00	0,00	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	0,00	-12.800.000,00	0,00	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.11		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	9.325.647.456,00	7.328.327.807,00	-1.997.319.649,00	78,58	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.11.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	3.007.840.762,00	1.013.327.807,00	-1.994.512.955,00	33,68	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.11.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.007.840.762,00	1.013.327.807,00	-1.994.512.955,00	33,68	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.11.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.007.840.762,00	1.013.327.807,00	-1.994.512.955,00	33,68	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.11.0004		PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	6.317.806.694,00	6.315.000.000,00	-2.806.694,00	99,95	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.11.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.317.806.694,00	6.315.000.000,00	-2.806.694,00	99,95	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.11.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	6.317.806.694,00	6.315.000.000,00	-2.806.694,00	99,95	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.12		FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	33.033.142.054,00	22.462.801.794,00	-10.570.340.260,00	68,00	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.12.0001		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH	20.348.851.434,00	15.394.002.249,00	-4.954.849.185,00	75,65	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.12.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.637.264.857,00	14.120.822.259,00	-4.516.442.598,00	75,76	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.637.264.857,00	14.120.822.259,00	-4.516.442.598,00	75,76	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.12.0001	5.2	BELANJA MODAL	1.711.586.577,00	1.273.179.990,00	-438.406.587,00	74,38	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.12.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.565.036.576,00	1.129.248.366,00	-435.788.210,00	72,15	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.12.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	146.550.001,00	143.931.624,00	-2.618.377,00	98,21	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.12.0002		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH	12.279.793.522,00	6.763.715.485,00	-5.516.078.037,00	55,08	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.12.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.893.195.512,00	5.603.425.957,00	-5.289.769.555,00	51,43	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.12.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.893.195.512,00	5.603.425.957,00	-5.289.769.555,00	51,43	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.12.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.386.598.010,00	1.160.289.528,00	-226.308.482,00	83,67	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.12.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.228.598.010,00	1.003.224.528,00	-225.373.482,00	81,65	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.12.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	158.000.000,00	157.065.000,00	-935.000,00	99,40	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.12.0003		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH	404.497.098,00	305.084.060,00	-99.413.038,00	75,42	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.12.0003	5.1	BELANJA OPERASI	404.497.098,00	305.084.060,00	-99.413.038,00	75,42	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.12.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.497.098,00	305.084.060,00	-99.413.038,00	75,42	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.13		FASILITASI MATERI DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	6.225.954.600,00	4.240.438.369,00	-1.985.516.231,00	68,10	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.13.0001		PENYIAPAN MATERI PIMPINAN	278.165.600,00	219.606.399,00	-58.559.201,00	78,94	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.13.0001	5.1	BELANJA OPERASI	278.165.600,00	219.606.399,00	-58.559.201,00	78,94	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.165.600,00	219.606.399,00	-58.559.201,00	78,94	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.13.0002		FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN	5.544.533.000,00	3.716.981.740,00	-1.827.551.260,00	67,03	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.544.533.000,00	3.716.981.740,00	-1.827.551.260,00	67,03	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.544.533.000,00	3.716.981.740,00	-1.827.551.260,00	67,03	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.13.0003		PENGELOLAAN DOKUMENTASI PIMPINAN	403.256.000,00	303.850.230,00	-99.405.770,00	75,34	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.13.0003	5.1	BELANJA OPERASI	403.256.000,00	303.850.230,00	-99.405.770,00	75,34	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.13.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.256.000,00	303.850.230,00	-99.405.770,00	75,34	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.14		FASILITASI KEPROTOKOLAN	2.062.887.204,00	2.003.861.117,00	-59.026.087,00	97,13	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.14.0002		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	388.398.000,00	386.724.033,00	-1.673.967,00	99,56	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.14.0002	5.1	BELANJA OPERASI	388.398.000,00	386.724.033,00	-1.673.967,00	99,56	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.398.000,00	386.724.033,00	-1.673.967,00	99,56	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.14.0003		PENGELOLAAN HUBUNGAN KEPROTOKOLAN	1.674.489.204,00	1.617.137.084,00	-57.352.120,00	96,57	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.14.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.674.489.204,00	1.617.137.084,00	-57.352.120,00	96,57	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.14.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.674.489.204,00	1.617.137.084,00	-57.352.120,00	96,57	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.02		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	793.973.186,00	693.054.479,00	-100.918.707,00	87,28	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.02.1.01		FASILITASI KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	346.692.005,00	290.766.036,00	-55.925.969,00	83,86	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.02.1.01.0001		FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI	85.315.000,00	73.125.756,00	-12.189.244,00	85,71	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	85.315.000,00	73.125.756,00	-12.189.244,00	85,71	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.315.000,00	73.125.756,00	-12.189.244,00	85,71	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.02.1.01.0002		FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN KABUPATEN/KOTA	80.700.000,00	62.340.510,00	-18.359.490,00	77,24	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	80.700.000,00	62.340.510,00	-18.359.490,00	77,24	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.700.000,00	62.340.510,00	-18.359.490,00	77,24	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.02.1.01.0003		PENATAAN ANALISIS JABATAN	180.677.005,00	155.299.770,00	-25.377.235,00	85,95	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	180.677.005,00	155.299.770,00	-25.377.235,00	85,95	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.677.005,00	155.299.770,00	-25.377.235,00	85,95	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.02.1.02		FASILITASI REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA	447.281.181,00	402.288.443,00	-44.992.738,00	89,94	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.02.1.02.0001		PEMBINAAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	136.243.892,00	127.930.182,00	-8.313.710,00	93,89	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	136.243.892,00	127.930.182,00	-8.313.710,00	93,89	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.243.892,00	127.930.182,00	-8.313.710,00	93,89	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.02.1.02.0002		MONITORING DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	116.325.392,00	114.646.538,00	-1.678.854,00	98,55	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	116.325.392,00	114.646.538,00	-1.678.854,00	98,55	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.325.392,00	114.646.538,00	-1.678.854,00	98,55	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.02.1.02.0003		EVALUASI PELAKSANAAN BUDAYA KERJA	14.997.000,00	8.524.701,00	-6.472.299,00	56,84	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.997.000,00	8.524.701,00	-6.472.299,00	56,84	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.997.000,00	8.524.701,00	-6.472.299,00	56,84	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.02.1.02.0004		PENGELOLAAN TATALAKSANA PEMERINTAHAN	101.993.492,00	79.429.641,00	-22.563.851,00	77,87	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	101.993.492,00	79.429.641,00	-22.563.851,00	77,87	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.993.492,00	79.429.641,00	-22.563.851,00	77,87	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.02.1.02.0005		FASILITASI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	77.721.405,00	71.757.381,00	-5.964.024,00	92,32	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.02.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	77.721.405,00	71.757.381,00	-5.964.024,00	92,32	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.02.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.721.405,00	71.757.381,00	-5.964.024,00	92,32	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.03		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.736.831.282,00	1.267.631.513,00	-469.199.769,00	72,98	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.03.1.01		PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN	473.354.475,00	379.224.897,00	-94.129.578,00	80,11	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.03.1.01.0001		PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN	361.982.075,00	307.747.505,00	-54.234.570,00	85,01	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	361.982.075,00	307.747.505,00	-54.234.570,00	85,01	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.982.075,00	307.747.505,00	-54.234.570,00	85,01	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.03.1.01.0003		FASILITASI PENATAAN WILAYAH	111.372.400,00	71.477.392,00	-39.895.008,00	64,17	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	111.372.400,00	71.477.392,00	-39.895.008,00	64,17	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.372.400,00	71.477.392,00	-39.895.008,00	64,17	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.03.1.02		PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	373.114.800,00	193.797.757,00	-179.317.043,00	51,94	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.03.1.02.0001		FASILITASI ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD	262.095.300,00	144.985.816,00	-117.109.484,00	55,31	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.03.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	262.095.300,00	144.985.816,00	-117.109.484,00	55,31	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.03.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.095.300,00	144.985.816,00	-117.109.484,00	55,31	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.03.1.02.0002		PENGEMBANGAN OTONOMI DAN PENATAAN URUSAN	111.019.500,00	48.811.941,00	-62.207.559,00	43,96	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.03.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	111.019.500,00	48.811.941,00	-62.207.559,00	43,96	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.03.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.019.500,00	48.811.941,00	-62.207.559,00	43,96	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.03.1.03		FASILITASI KERJA SAMA DAERAH	890.362.007,00	694.608.859,00	-195.753.148,00	78,01	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.03.1.03.0001		FASILITASI KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH	208.208.307,00	159.241.045,00	-48.967.262,00	76,48	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.03.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	208.208.307,00	159.241.045,00	-48.967.262,00	76,48	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.03.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.208.307,00	159.241.045,00	-48.967.262,00	76,48	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.03.1.03.0003		EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA	682.153.700,00	535.367.814,00	-146.785.886,00	78,48	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.03.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	682.153.700,00	535.367.814,00	-146.785.886,00	78,48	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.03.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	682.153.700,00	535.367.814,00	-146.785.886,00	78,48	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.04		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	68.088.191.764,00	52.749.934.961,00	-15.338.256.803,00	77,47	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.04.1.01		FASILITASI PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL	18.096.092.088,00	5.990.174.825,00	-12.105.917.263,00	33,10	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.04.1.01.0001		PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SPIRITUAL	17.541.811.336,00	5.609.244.703,00	-11.932.566.633,00	31,97	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.04.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.541.811.336,00	5.609.244.703,00	-11.932.566.633,00	31,97	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.04.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.541.811.336,00	5.609.244.703,00	-11.932.566.633,00	31,97	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.04.1.01.0002		FASILITASI KELEMBAGAAN BINA SPIRITUAL	554.280.752,00	380.930.122,00	-173.350.630,00	68,72	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.04.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	554.280.752,00	380.930.122,00	-173.350.630,00	68,72	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.04.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	554.280.752,00	380.930.122,00	-173.350.630,00	68,72	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.04.1.02		FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PELAYANAN DASAR	49.992.099.676,00	46.759.760.136,00	-3.232.339.540,00	93,53	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.04.1.02.0003		FASILITASI, KOORDINASI DAN SINKRONISASI, EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG SOSIAL	49.992.099.676,00	46.759.760.136,00	-3.232.339.540,00	93,53	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.04.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	49.992.099.676,00	46.759.760.136,00	-3.232.339.540,00	93,53	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.04.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.749.349.676,00	3.510.701.468,00	-238.648.208,00	93,63	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.04.1.02.0003	5.1.05	Belanja Hibah	46.242.750.000,00	43.249.058.668,00	-2.993.691.332,00	93,52	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.05		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.907.074.634,00	2.408.537.043,00	-1.498.537.591,00	61,64	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.05.1.01		FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.444.965.079,00	1.179.052.118,00	-265.912.961,00	81,59	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.05.1.01.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENGATURAN	896.217.607,00	694.231.297,00	-201.986.310,00	77,46	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	896.217.607,00	694.231.297,00	-201.986.310,00	77,46	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	896.217.607,00	694.231.297,00	-201.986.310,00	77,46	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.05.1.01.0002		FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENETAPAN	96.598.720,00	90.196.800,00	-6.401.920,00	93,37	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.05.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	96.598.720,00	90.196.800,00	-6.401.920,00	93,37	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.05.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.598.720,00	90.196.800,00	-6.401.920,00	93,37	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.05.1.01.0003		PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN NASKAH HUKUM LAINNYA	181.669.517,00	152.918.406,00	-28.751.111,00	84,17	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.05.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	181.669.517,00	152.918.406,00	-28.751.111,00	84,17	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.05.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.669.517,00	152.918.406,00	-28.751.111,00	84,17	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.05.1.01.0004		FASILITASI DAN EVALUASI PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA	270.479.235,00	241.705.615,00	-28.773.620,00	89,36	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.05.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	270.479.235,00	241.705.615,00	-28.773.620,00	89,36	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.05.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.479.235,00	241.705.615,00	-28.773.620,00	89,36	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.05.1.02		FASILITASI BANTUAN HUKUM	2.462.109.555,00	1.229.484.925,00	-1.232.624.630,00	49,93	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.05.1.02.0001		FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH HUKUM	2.267.456.935,00	1.052.264.615,00	-1.215.192.320,00	46,40	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.05.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.267.456.935,00	1.052.264.615,00	-1.215.192.320,00	46,40	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.05.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.267.456.935,00	1.052.264.615,00	-1.215.192.320,00	46,40	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.05.1.02.0002		FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH NON LITIGASI DAN HAM	194.652.620,00	177.220.310,00	-17.432.310,00	91,04	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.05.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	194.652.620,00	177.220.310,00	-17.432.310,00	91,04	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.05.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.652.620,00	177.220.310,00	-17.432.310,00	91,04	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.06		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	905.328.800,00	459.930.399,00	-445.398.401,00	50,80	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.06.1.01		PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI PEREKONOMIAN	230.804.000,00	198.594.330,00	-32.209.670,00	86,04	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.06.1.01.0001		FASILITASI PENGELOLAAN KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO	230.804.000,00	198.594.330,00	-32.209.670,00	86,04	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.06.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	230.804.000,00	198.594.330,00	-32.209.670,00	86,04	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.06.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.804.000,00	198.594.330,00	-32.209.670,00	86,04	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.06.1.02		PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM	130.124.000,00	97.104.946,00	-33.019.054,00	74,62	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.06.1.02.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN	130.124.000,00	97.104.946,00	-33.019.054,00	74,62	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.06.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	130.124.000,00	97.104.946,00	-33.019.054,00	74,62	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.06.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.124.000,00	97.104.946,00	-33.019.054,00	74,62	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.06.1.03		PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI BUMD DAN BLUD	544.400.800,00	164.231.123,00	-380.169.677,00	30,16	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.06.1.03.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING, DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH JASA KEUANGAN DAN ANEKA USAHA	544.400.800,00	164.231.123,00	-380.169.677,00	30,16	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.06.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	544.400.800,00	164.231.123,00	-380.169.677,00	30,16	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.06.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	544.400.800,00	164.231.123,00	-380.169.677,00	30,16	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.07		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	32.396.033.425,00	29.628.359.568,00	-2.767.673.857,00	91,45	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.07.1.01		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	32.183.490.425,00	29.493.595.373,00	-2.689.895.052,00	91,64	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.07.1.01.0001		PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA	21.330.000,00	19.348.000,00	-1.982.000,00	90,70	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.07.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.330.000,00	19.348.000,00	-1.982.000,00	90,70	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.07.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.330.000,00	19.348.000,00	-1.982.000,00	90,70	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.07.1.01.0002		PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	32.119.695.425,00	29.435.144.873,00	-2.684.550.552,00	91,64	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.07.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	48.404.000,00	28.376.883,00	-20.027.117,00	58,62	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.07.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.404.000,00	28.376.883,00	-20.027.117,00	58,62	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.07.1.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	32.071.291.425,00	29.406.767.990,00	-2.664.523.435,00	91,69	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.07.1.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.071.291.425,00	29.406.767.990,00	-2.664.523.435,00	91,69	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.07.1.01.0003		PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	42.465.000,00	39.102.500,00	-3.362.500,00	92,08	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.07.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	42.465.000,00	39.102.500,00	-3.362.500,00	92,08	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.07.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.465.000,00	39.102.500,00	-3.362.500,00	92,08	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.07.1.02		PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	98.999.000,00	36.996.486,00	-62.002.514,00	37,37	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.07.1.02.0001		PENGELOLAAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	51.105.000,00	15.661.250,00	-35.443.750,00	30,64	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.07.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	51.105.000,00	15.661.250,00	-35.443.750,00	30,64	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.07.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.105.000,00	15.661.250,00	-35.443.750,00	30,64	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.07.1.02.0002		PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	47.894.000,00	21.335.236,00	-26.558.764,00	44,54	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.07.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	47.894.000,00	21.335.236,00	-26.558.764,00	44,54	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.07.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.894.000,00	21.335.236,00	-26.558.764,00	44,54	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.07.1.03		PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	113.544.000,00	97.767.709,00	-15.776.291,00	86,10	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.07.1.03.0001		PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG DAN JASA	73.676.000,00	70.466.549,00	-3.209.451,00	95,64	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.07.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	73.676.000,00	70.466.549,00	-3.209.451,00	95,64	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.07.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.676.000,00	70.466.549,00	-3.209.451,00	95,64	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.07.1.03.0002		PEMBINAAN KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	10.140.000,00	8.452.500,00	-1.687.500,00	83,35	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.07.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.140.000,00	8.452.500,00	-1.687.500,00	83,35	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.07.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.140.000,00	8.452.500,00	-1.687.500,00	83,35	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.07.1.03.0003		PENDAMPINGAN, KONSULTASI, DAN/ATAU BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA	29.728.000,00	18.848.660,00	-10.879.340,00	63,40	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.07.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	29.728.000,00	18.848.660,00	-10.879.340,00	63,40	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.07.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.728.000,00	18.848.660,00	-10.879.340,00	63,40	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.08		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	61.815.000,00	59.008.600,00	-2.806.400,00	95,46	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.08.1.01		PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	30.030.000,00	29.965.250,00	-64.750,00	99,78	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.08.1.01.0001		PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN APBD	30.030.000,00	29.965.250,00	-64.750,00	99,78	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.08.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.030.000,00	29.965.250,00	-64.750,00	99,78	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.08.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.030.000,00	29.965.250,00	-64.750,00	99,78	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.08.1.02		PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	31.785.000,00	29.043.350,00	-2.741.650,00	91,37	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.08.1.02.0002		PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	31.785.000,00	29.043.350,00	-2.741.650,00	91,37	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.08.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.785.000,00	29.043.350,00	-2.741.650,00	91,37	
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.08.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.785.000,00	29.043.350,00	-2.741.650,00	91,37	
				JUMLAH BELANJA	317.370.561.909,00	257.841.020.279,00	-59.529.541.630,00	81,24	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-63.616.722.797,00	-4.087.181.162,57	59.529.541.634,43	6,42	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-63.616.722.797,00	-4.087.181.162,57	59.529.541.634,43	6,42	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : Sekretariat Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	4.01.2.23.2.24.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	253.753.839.112,00	253.753.839.116,43	4,43	100,00	
	4.01.2.23.2.24.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	253.753.839.112,00	253.753.839.116,43	4,43	100,00	
	4.01.2.23.2.24.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah; c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali; dan d.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	4.01.2.23.2.24.01.0000		4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	253.603.839.112,00	253.603.839.116,43	4,43	100,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	253.753.839.112,00	253.753.839.116,43	4,43	100,00	
2.24	4.01.2.23.2.24.01.0000		5	BELANJA DAERAH	576.120.481,00	518.130.372,00	-57.990.109,00	89,93	
2.24	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	576.120.481,00	518.130.372,00	-57.990.109,00	89,93	
2.24	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.24.02.1.01		PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS PROVINSI	318.729.951,00	304.747.551,00	-13.982.400,00	95,61	
2.24	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.24.02.1.01.0006		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI	318.729.951,00	304.747.551,00	-13.982.400,00	95,61	
2.24	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.24.02.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	318.729.951,00	304.747.551,00	-13.982.400,00	95,61	
2.24	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.24.02.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.729.951,00	304.747.551,00	-13.982.400,00	95,61	
2.24	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.24.02.1.03		PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN DALAM SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI	257.390.530,00	213.382.821,00	-44.007.709,00	82,90	
2.24	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.24.02.1.03.0001		PENYEDIAAN INFORMASI, AKSES DAN LAYANAN KEARSIPAN TINGKAT DAERAH PROVINSI MELALUI JIKN	49.957.500,00	34.997.341,00	-14.960.159,00	70,05	
2.24	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.24.02.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	49.957.500,00	34.997.341,00	-14.960.159,00	70,05	
2.24	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.24.02.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.957.500,00	34.997.341,00	-14.960.159,00	70,05	
2.24	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.24.02.1.03.0002		PEMBERDAYAAN KAPASITAS UNIT KEARSIPAN DAN LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH PROVINSI	207.433.030,00	178.385.480,00	-29.047.550,00	85,99	
2.24	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.24.02.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	207.433.030,00	178.385.480,00	-29.047.550,00	85,99	
2.24	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.24.02.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.433.030,00	178.385.480,00	-29.047.550,00	85,99	
				JUMLAH BELANJA	576.120.481,00	518.130.372,00	-57.990.109,00	89,93	
				SURPLUS / (DEFISIT)	253.177.718.631,00	253.235.708.744,43	57.990.113,43	100,02	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	253.177.718.631,00	253.235.708.744,43	57.990.113,43	100,02	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : Sekretariat Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	4.01.2.23.2.24.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	253.753.839.112,00	253.753.839.116,43	4,43	100,00	
	4.01.2.23.2.24.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	253.753.839.112,00	253.753.839.116,43	4,43	100,00	
	4.01.2.23.2.24.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah; c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali; dan d.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	4.01.2.23.2.24.01.0000		4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	253.603.839.112,00	253.603.839.116,43	4,43	100,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	253.753.839.112,00	253.753.839.116,43	4,43	100,00	
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0000		5	BELANJA DAERAH	368.970.632,00	335.937.754,00	-33.032.878,00	91,04	
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	293.666.435,00	269.156.123,00	-24.510.312,00	91,65	
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.23.02.1.01		PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	175.614.020,00	166.469.177,00	-9.144.843,00	94,79	
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.23.02.1.01.0004		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	32.877.705,00	31.375.510,00	-1.502.195,00	95,43	
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.23.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	32.877.705,00	31.375.510,00	-1.502.195,00	95,43	
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.23.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.877.705,00	31.375.510,00	-1.502.195,00	95,43	
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.23.02.1.01.0009		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA	77.277.605,00	76.668.730,00	-608.875,00	99,21	
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.23.02.1.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	32.277.605,00	31.869.130,00	-408.475,00	98,73	
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.23.02.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.277.605,00	31.869.130,00	-408.475,00	98,73	
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.23.02.1.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	45.000.000,00	44.799.600,00	-200.400,00	99,55	
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.23.02.1.01.0009	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00	44.799.600,00	-200.400,00	99,55	
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.23.02.1.01.0016		PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI PERPUSTAKAAN	65.458.710,00	58.424.937,00	-7.033.773,00	89,25	
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.23.02.1.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	65.458.710,00	58.424.937,00	-7.033.773,00	89,25	
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.23.02.1.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.458.710,00	58.424.937,00	-7.033.773,00	89,25	
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.23.02.1.02		PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH PROVINSI	118.052.415,00	102.686.946,00	-15.365.469,00	86,98	
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.23.02.1.02.0001		SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN TINGKAT MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA MASYARAKAT	41.177.005,00	35.713.504,00	-5.463.501,00	86,73	
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.23.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	41.177.005,00	35.713.504,00	-5.463.501,00	86,73	
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.23.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.177.005,00	35.713.504,00	-5.463.501,00	86,73	
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.23.02.1.02.0004		PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL	76.875.410,00	66.973.442,00	-9.901.968,00	87,11	
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.23.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	76.875.410,00	66.973.442,00	-9.901.968,00	87,11	
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.23.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.875.410,00	66.973.442,00	-9.901.968,00	87,11	
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.23.03		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	75.304.197,00	66.781.631,00	-8.522.566,00	88,68	
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.23.03.1.01		PELESTARIAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM KOLEKSI DAERAH DI DAERAH PROVINSI	75.304.197,00	66.781.631,00	-8.522.566,00	88,68	
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.23.03.1.01.0001		PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM	75.304.197,00	66.781.631,00	-8.522.566,00	88,68	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.23.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	75.304.197,00	66.781.631,00	-8.522.566,00	88,68	
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0000	2.23.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.304.197,00	66.781.631,00	-8.522.566,00	88,68	
				JUMLAH BELANJA	368.970.632,00	335.937.754,00	-33.032.878,00	91,04	
				SURPLUS / (DEFISIT)	253.384.868.480,00	253.417.901.362,43	33.032.882,43	100,01	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	253.384.868.480,00	253.417.901.362,43	33.032.882,43	100,01	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : Sekretariat DPRD

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	292.530.173.777,00	185.447.381.045,00	-107.082.792.732,00	63,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	142.525.125.817,00	118.750.496.530,00	-23.774.629.287,00	83,31	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	782.804.610,00	368.082.411,00	-414.722.199,00	47,02	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	495.356.005,00	287.012.636,00	-208.343.369,00	57,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	495.356.005,00	287.012.636,00	-208.343.369,00	57,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	495.356.005,00	287.012.636,00	-208.343.369,00	57,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	287.448.605,00	81.069.775,00	-206.378.830,00	28,20	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	287.448.605,00	81.069.775,00	-206.378.830,00	28,20	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.448.605,00	81.069.775,00	-206.378.830,00	28,20	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.02		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	11.803.935.217,00	10.925.432.124,00	-878.503.093,00	92,55	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	11.483.270.707,00	10.693.761.999,00	-789.508.708,00	93,12	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.483.270.707,00	10.693.761.999,00	-789.508.708,00	93,12	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	11.422.970.707,00	10.637.961.999,00	-785.008.708,00	93,12	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.300.000,00	55.800.000,00	-4.500.000,00	92,53	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	185.100.705,00	117.844.356,00	-67.256.349,00	63,66	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	185.100.705,00	117.844.356,00	-67.256.349,00	63,66	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.100.705,00	117.844.356,00	-67.256.349,00	63,66	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	135.563.805,00	113.825.769,00	-21.738.036,00	83,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	135.563.805,00	113.825.769,00	-21.738.036,00	83,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.563.805,00	113.825.769,00	-21.738.036,00	83,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	13.726.847.188,00	6.282.621.266,00	-7.444.225.922,00	45,76	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	498.521.386,00	383.544.993,00	-114.976.393,00	76,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	498.521.386,00	383.544.993,00	-114.976.393,00	76,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	498.521.386,00	383.544.993,00	-114.976.393,00	76,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	1.941.833.246,00	1.530.867.341,00	-410.965.905,00	78,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.941.833.246,00	1.530.867.341,00	-410.965.905,00	78,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.941.833.246,00	1.530.867.341,00	-410.965.905,00	78,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	141.209.600,00	73.926.574,00	-67.283.026,00	52,35	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	141.209.600,00	73.926.574,00	-67.283.026,00	52,35	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.209.600,00	73.926.574,00	-67.283.026,00	52,35	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.096.920.000,00	1.049.040.000,00	-47.880.000,00	95,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.096.920.000,00	1.049.040.000,00	-47.880.000,00	95,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.096.920.000,00	1.049.040.000,00	-47.880.000,00	95,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	10.048.362.956,00	3.245.242.358,00	-6.803.120.598,00	32,29	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	10.048.362.956,00	3.245.242.358,00	-6.803.120.598,00	32,29	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.048.362.956,00	3.245.242.358,00	-6.803.120.598,00	32,29	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	15.543.338.236,00	12.090.497.577,00	-3.452.840.659,00	77,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	15.543.338.236,00	12.090.497.577,00	-3.452.840.659,00	77,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	77.600.000,00	77.500.000,00	-100.000,00	99,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.600.000,00	77.500.000,00	-100.000,00	99,87	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	15.465.738.236,00	12.012.997.577,00	-3.452.740.659,00	77,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.265.738.236,00	11.814.529.577,00	-3.451.208.659,00	77,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.07.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	198.468.000,00	-1.532.000,00	99,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.971.149.087,00	2.473.389.107,00	-497.759.980,00	83,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	15.700.000,00	10.000.000,00	-5.700.000,00	63,69	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.700.000,00	10.000.000,00	-5.700.000,00	63,69	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.700.000,00	10.000.000,00	-5.700.000,00	63,69	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	950.000.000,00	727.414.254,00	-222.585.746,00	76,56	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	950.000.000,00	727.414.254,00	-222.585.746,00	76,56	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	950.000.000,00	727.414.254,00	-222.585.746,00	76,56	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.005.449.087,00	1.735.974.853,00	-269.474.234,00	86,56	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.005.449.087,00	1.735.974.853,00	-269.474.234,00	86,56	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.005.449.087,00	1.735.974.853,00	-269.474.234,00	86,56	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	31.275.598.450,00	25.155.757.581,00	-6.119.840.869,00	80,43	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	3.915.956.238,00	3.502.553.122,00	-413.403.116,00	89,44	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.915.956.238,00	3.502.553.122,00	-413.403.116,00	89,44	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.915.956.238,00	3.502.553.122,00	-413.403.116,00	89,44	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	26.216.602.212,00	21.015.251.446,00	-5.201.350.766,00	80,16	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	3.115.236.300,00	2.205.369.774,00	-909.866.526,00	70,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.115.236.300,00	2.205.369.774,00	-909.866.526,00	70,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	23.101.365.912,00	18.809.881.672,00	-4.291.484.240,00	81,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.101.365.912,00	18.809.881.672,00	-4.291.484.240,00	81,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.143.040.000,00	637.953.013,00	-505.086.987,00	55,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.143.040.000,00	637.953.013,00	-505.086.987,00	55,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.143.040.000,00	637.953.013,00	-505.086.987,00	55,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.15		LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	65.016.758.209,00	60.564.063.526,00	-4.452.694.683,00	93,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.15.0001		PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	62.926.813.904,00	59.045.482.937,00	-3.881.330.967,00	93,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.15.0001	5.1	BELANJA OPERASI	62.926.813.904,00	59.045.482.937,00	-3.881.330.967,00	93,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.15.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	62.926.813.904,00	59.045.482.937,00	-3.881.330.967,00	93,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.15.0002		PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	1.785.578.500,00	1.329.494.269,00	-456.084.231,00	74,45	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.15.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.785.578.500,00	1.329.494.269,00	-456.084.231,00	74,45	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.15.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.785.578.500,00	1.329.494.269,00	-456.084.231,00	74,45	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.15.0003		PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	304.365.805,00	189.086.320,00	-115.279.485,00	62,12	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.15.0003	5.1	BELANJA OPERASI	304.365.805,00	189.086.320,00	-115.279.485,00	62,12	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.15.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.365.805,00	189.086.320,00	-115.279.485,00	62,12	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.16		LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	1.404.694.820,00	890.652.938,00	-514.041.882,00	63,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.16.0002		FASILITASI FRAKSI DPRD	119.333.420,00	89.179.375,00	-30.154.045,00	74,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.16.0002	5.1	BELANJA OPERASI	119.333.420,00	89.179.375,00	-30.154.045,00	74,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.16.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.333.420,00	89.179.375,00	-30.154.045,00	74,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.16.0003		FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD	1.285.361.400,00	801.473.563,00	-483.887.837,00	62,35	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.16.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.285.361.400,00	801.473.563,00	-483.887.837,00	62,35	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.16.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.285.361.400,00	801.473.563,00	-483.887.837,00	62,35	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	150.005.047.960,00	66.696.884.515,00	-83.308.163.445,00	44,46	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.01		PEMBENTUKAN PERDA DAN PERATURAN DPRD	20.414.565.417,00	6.199.270.095,00	-14.215.295.322,00	30,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.01.0001		PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	1.896.054.110,00	796.805.608,00	-1.099.248.502,00	42,02	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.896.054.110,00	796.805.608,00	-1.099.248.502,00	42,02	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.896.054.110,00	796.805.608,00	-1.099.248.502,00	42,02	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.01.0002		PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA	17.458.355.002,00	5.155.760.242,00	-12.302.594.760,00	29,53	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.458.355.002,00	5.155.760.242,00	-12.302.594.760,00	29,53	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.458.355.002,00	5.155.760.242,00	-12.302.594.760,00	29,53	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.01.0004		FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK	1.060.156.305,00	246.704.245,00	-813.452.060,00	23,27	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.060.156.305,00	246.704.245,00	-813.452.060,00	23,27	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.060.156.305,00	246.704.245,00	-813.452.060,00	23,27	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.02		PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	6.724.518.017,00	2.020.279.889,00	-4.704.238.128,00	30,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.02.0001		PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	75.911.892,00	39.850.019,00	-36.061.873,00	52,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	75.911.892,00	39.850.019,00	-36.061.873,00	52,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.911.892,00	39.850.019,00	-36.061.873,00	52,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.02.0002		PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	64.867.710,00	24.541.855,00	-40.325.855,00	37,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	64.867.710,00	24.541.855,00	-40.325.855,00	37,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.867.710,00	24.541.855,00	-40.325.855,00	37,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.02.0003		PEMBAHASAN APBD	4.865.797.405,00	1.134.385.972,00	-3.731.411.433,00	23,31	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.865.797.405,00	1.134.385.972,00	-3.731.411.433,00	23,31	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.865.797.405,00	1.134.385.972,00	-3.731.411.433,00	23,31	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.02.0004		PEMBAHASAN PERUBAHAN APBD	855.896.705,00	583.084.650,00	-272.812.055,00	68,12	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	855.896.705,00	583.084.650,00	-272.812.055,00	68,12	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	855.896.705,00	583.084.650,00	-272.812.055,00	68,12	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.02.0006		PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD	862.044.305,00	238.417.393,00	-623.626.912,00	27,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	862.044.305,00	238.417.393,00	-623.626.912,00	27,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	862.044.305,00	238.417.393,00	-623.626.912,00	27,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.03		PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	25.776.199.424,00	8.000.321.639,00	-17.775.877.785,00	31,03	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.03.0001		PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	7.947.975.299,00	2.044.518.551,00	-5.903.456.748,00	25,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.947.975.299,00	2.044.518.551,00	-5.903.456.748,00	25,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.947.975.299,00	2.044.518.551,00	-5.903.456.748,00	25,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.03.0002		PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR	5.644.015.800,00	1.697.994.921,00	-3.946.020.879,00	30,08	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.644.015.800,00	1.697.994.921,00	-3.946.020.879,00	30,08	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.644.015.800,00	1.697.994.921,00	-3.946.020.879,00	30,08	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.03.0003		PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.457.067.715,00	1.625.381.693,00	-3.831.686.022,00	29,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.457.067.715,00	1.625.381.693,00	-3.831.686.022,00	29,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.457.067.715,00	1.625.381.693,00	-3.831.686.022,00	29,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.03.0004		PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN	5.995.348.410,00	2.260.885.696,00	-3.734.462.714,00	37,71	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.995.348.410,00	2.260.885.696,00	-3.734.462.714,00	37,71	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.995.348.410,00	2.260.885.696,00	-3.734.462.714,00	37,71	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.03.0008		PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH	731.792.200,00	371.540.778,00	-360.251.422,00	50,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	731.792.200,00	371.540.778,00	-360.251.422,00	50,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	731.792.200,00	371.540.778,00	-360.251.422,00	50,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.04		PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	14.429.738.855,00	10.437.104.784,00	-3.992.634.071,00	72,33	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.04.0002		PENDALAMAN TUGAS DPRD	3.638.481.115,00	2.356.423.267,00	-1.282.057.848,00	64,76	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.638.481.115,00	2.356.423.267,00	-1.282.057.848,00	64,76	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.638.481.115,00	2.356.423.267,00	-1.282.057.848,00	64,76	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.04.0004		PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	4.467.166.400,00	4.463.402.290,00	-3.764.110,00	99,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.467.166.400,00	4.463.402.290,00	-3.764.110,00	99,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.467.166.400,00	4.463.402.290,00	-3.764.110,00	99,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.04.0005		PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	670.186.800,00	668.244.300,00	-1.942.500,00	99,71	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	670.186.800,00	668.244.300,00	-1.942.500,00	99,71	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	670.186.800,00	668.244.300,00	-1.942.500,00	99,71	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.04.0007		PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD	1.441.278.410,00	185.150.637,00	-1.256.127.773,00	12,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.441.278.410,00	185.150.637,00	-1.256.127.773,00	12,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.441.278.410,00	185.150.637,00	-1.256.127.773,00	12,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.04.0008		PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD	4.212.626.130,00	2.763.884.290,00	-1.448.741.840,00	65,60	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.212.626.130,00	2.763.884.290,00	-1.448.741.840,00	65,60	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.212.626.130,00	2.763.884.290,00	-1.448.741.840,00	65,60	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.05		PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	41.396.852.612,00	35.889.660.696,00	-5.507.191.916,00	86,69	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.05.0001		KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH	3.305.126.902,00	1.714.619.182,00	-1.590.507.720,00	51,87	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.305.126.902,00	1.714.619.182,00	-1.590.507.720,00	51,87	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.305.126.902,00	1.714.619.182,00	-1.590.507.720,00	51,87	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.05.0002		PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	2.905.029.500,00	252.098.510,00	-2.652.930.990,00	8,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.905.029.500,00	252.098.510,00	-2.652.930.990,00	8,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.905.029.500,00	252.098.510,00	-2.652.930.990,00	8,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.05.0003		PELAKSANAAN RESES	35.186.696.210,00	33.922.943.004,00	-1.263.753.206,00	96,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	35.186.696.210,00	33.922.943.004,00	-1.263.753.206,00	96,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.186.696.210,00	33.922.943.004,00	-1.263.753.206,00	96,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.06		PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	853.546.910,00	201.315.132,00	-652.231.778,00	23,58	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.06.0002		PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	853.546.910,00	201.315.132,00	-652.231.778,00	23,58	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	853.546.910,00	201.315.132,00	-652.231.778,00	23,58	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	853.546.910,00	201.315.132,00	-652.231.778,00	23,58	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.08		FASILITASI TUGAS DPRD	40.409.626.725,00	3.948.932.280,00	-36.460.694.445,00	9,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.08.0001		KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	36.254.544.515,00	3.343.056.115,00	-32.911.488.400,00	9,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	36.254.544.515,00	3.343.056.115,00	-32.911.488.400,00	9,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.254.544.515,00	3.343.056.115,00	-32.911.488.400,00	9,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.08.0002		PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DPRD	468.679.410,00	77.694.050,00	-390.985.360,00	16,57	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	468.679.410,00	77.694.050,00	-390.985.360,00	16,57	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	468.679.410,00	77.694.050,00	-390.985.360,00	16,57	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.08.0003		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH	3.686.402.800,00	528.182.115,00	-3.158.220.685,00	14,32	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.686.402.800,00	528.182.115,00	-3.158.220.685,00	14,32	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.686.402.800,00	528.182.115,00	-3.158.220.685,00	14,32	
				JUMLAH BELANJA	292.530.173.777,00	185.447.381.045,00	-107.082.792.732,00	63,39	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-292.530.173.777,00	-185.447.381.045,00	107.082.792.732,00	63,39	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-292.530.173.777,00	-185.447.381.045,00	107.082.792.732,00	63,39	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PERENCANAAN
Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	25.908.334.842,00	21.337.890.034,52	-4.570.444.807,48	82,35	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.829.938.198,00	18.137.450.653,52	-3.692.487.544,48	83,08	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	182.864.899,00	159.949.651,00	-22.915.248,00	87,46	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	155.075.999,00	144.272.468,00	-10.803.531,00	93,03	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	155.075.999,00	144.272.468,00	-10.803.531,00	93,03	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.075.999,00	144.272.468,00	-10.803.531,00	93,03	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	11.474.400,00	7.091.650,00	-4.382.750,00	61,80	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	11.474.400,00	7.091.650,00	-4.382.750,00	61,80	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.474.400,00	7.091.650,00	-4.382.750,00	61,80	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.01.0005		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	11.444.900,00	5.486.305,00	-5.958.595,00	47,93	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.444.900,00	5.486.305,00	-5.958.595,00	47,93	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.444.900,00	5.486.305,00	-5.958.595,00	47,93	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4.869.600,00	3.099.228,00	-1.770.372,00	63,64	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.869.600,00	3.099.228,00	-1.770.372,00	63,64	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.869.600,00	3.099.228,00	-1.770.372,00	63,64	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	15.490.436.145,00	14.510.570.544,00	-979.865.601,00	93,67	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	15.275.945.418,00	14.304.796.060,00	-971.149.358,00	93,64	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.275.945.418,00	14.304.796.060,00	-971.149.358,00	93,64	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	15.251.820.418,00	14.280.671.060,00	-971.149.358,00	93,63	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.125.000,00	24.125.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	118.820.625,00	116.755.566,00	-2.065.059,00	98,26	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	118.820.625,00	116.755.566,00	-2.065.059,00	98,26	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.820.625,00	116.755.566,00	-2.065.059,00	98,26	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.02.0004		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	95.670.102,00	89.018.918,00	-6.651.184,00	93,04	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	95.670.102,00	89.018.918,00	-6.651.184,00	93,04	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.670.102,00	89.018.918,00	-6.651.184,00	93,04	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.565.797.761,00	1.098.918.363,00	-466.879.398,00	70,18	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	47.723.105,00	42.498.674,00	-5.224.431,00	89,05	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	47.723.105,00	42.498.674,00	-5.224.431,00	89,05	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.723.105,00	42.498.674,00	-5.224.431,00	89,05	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	871.296.032,00	685.674.478,00	-185.621.554,00	78,69	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	87.046.592,00	69.881.036,00	-17.165.556,00	80,28	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.046.592,00	69.881.036,00	-17.165.556,00	80,28	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	784.249.440,00	615.793.442,00	-168.455.998,00	78,52	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	784.249.440,00	615.793.442,00	-168.455.998,00	78,52	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	129.063.004,00	115.173.492,00	-13.889.512,00	89,23	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	129.063.004,00	115.173.492,00	-13.889.512,00	89,23	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.063.004,00	115.173.492,00	-13.889.512,00	89,23	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	40.205.505,00	31.057.375,00	-9.148.130,00	77,24	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	40.205.505,00	31.057.375,00	-9.148.130,00	77,24	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.205.505,00	31.057.375,00	-9.148.130,00	77,24	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	46.905.705,00	42.009.705,00	-4.896.000,00	89,56	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	46.905.705,00	42.009.705,00	-4.896.000,00	89,56	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.905.705,00	42.009.705,00	-4.896.000,00	89,56	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	43.527.705,00	19.711.455,00	-23.816.250,00	45,28	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	43.527.705,00	19.711.455,00	-23.816.250,00	45,28	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.527.705,00	19.711.455,00	-23.816.250,00	45,28	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	387.076.705,00	162.793.184,00	-224.283.521,00	42,05	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	387.076.705,00	162.793.184,00	-224.283.521,00	42,05	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.076.705,00	162.793.184,00	-224.283.521,00	42,05	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	411.144.692,00	401.332.642,00	-9.812.050,00	97,61	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.07.0005		PENGADAAN MEBEL	361.989.600,00	355.843.800,00	-6.145.800,00	98,30	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	361.989.600,00	355.843.800,00	-6.145.800,00	98,30	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	361.989.600,00	355.843.800,00	-6.145.800,00	98,30	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	49.155.092,00	45.488.842,00	-3.666.250,00	92,54	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	49.155.092,00	45.488.842,00	-3.666.250,00	92,54	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.155.092,00	45.488.842,00	-3.666.250,00	92,54	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	928.103.174,00	891.701.251,00	-36.401.923,00	96,07	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	20.339.205,00	19.227.705,00	-1.111.500,00	94,53	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.339.205,00	19.227.705,00	-1.111.500,00	94,53	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.339.205,00	19.227.705,00	-1.111.500,00	94,53	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	197.266.492,00	181.568.781,00	-15.697.711,00	92,04	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	197.266.492,00	181.568.781,00	-15.697.711,00	92,04	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.266.492,00	181.568.781,00	-15.697.711,00	92,04	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	710.497.477,00	690.904.765,00	-19.592.712,00	97,24	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	710.497.477,00	690.904.765,00	-19.592.712,00	97,24	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	710.497.477,00	690.904.765,00	-19.592.712,00	97,24	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.251.591.527,00	1.074.978.202,52	-2.176.613.324,48	33,06	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	729.044.165,00	540.724.650,00	-188.319.515,00	74,16	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	729.044.165,00	540.724.650,00	-188.319.515,00	74,16	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	729.044.165,00	540.724.650,00	-188.319.515,00	74,16	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	186.882.705,00	71.795.285,00	-115.087.420,00	38,41	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	186.882.705,00	71.795.285,00	-115.087.420,00	38,41	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.882.705,00	71.795.285,00	-115.087.420,00	38,41	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	2.335.664.657,00	462.458.267,52	-1.873.206.389,48	19,79	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	352.066.492,00	157.304.452,52	-194.762.039,48	44,68	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.066.492,00	157.304.452,52	-194.762.039,48	44,68	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	1.983.598.165,00	305.153.815,00	-1.678.444.350,00	15,38	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.926.598.165,00	268.701.415,00	-1.657.896.750,00	13,94	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.09.0009	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	57.000.000,00	36.452.400,00	-20.547.600,00	63,95	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.319.080.141,00	1.901.656.314,00	-417.423.827,00	82,00	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.01		PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	1.224.098.817,00	1.114.762.013,00	-109.336.804,00	91,06	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.01.0003		PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK	15.570.300,00	14.697.018,00	-873.282,00	94,39	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.570.300,00	14.697.018,00	-873.282,00	94,39	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.570.300,00	14.697.018,00	-873.282,00	94,39	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.01.0005		PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI	93.767.400,00	89.517.618,00	-4.249.782,00	95,46	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	93.767.400,00	89.517.618,00	-4.249.782,00	95,46	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.767.400,00	89.517.618,00	-4.249.782,00	95,46	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.01.0006		KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI	1.114.761.117,00	1.010.547.377,00	-104.213.740,00	90,65	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.114.761.117,00	1.010.547.377,00	-104.213.740,00	90,65	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.114.761.117,00	1.010.547.377,00	-104.213.740,00	90,65	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.02		ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	380.106.712,00	346.407.018,00	-33.699.694,00	91,13	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.02.0001		ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	363.016.812,00	332.603.118,00	-30.413.694,00	91,62	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	363.016.812,00	332.603.118,00	-30.413.694,00	91,62	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	363.016.812,00	332.603.118,00	-30.413.694,00	91,62	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.02.0004		PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI	17.089.900,00	13.803.900,00	-3.286.000,00	80,77	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	17.089.900,00	13.803.900,00	-3.286.000,00	80,77	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.089.900,00	13.803.900,00	-3.286.000,00	80,77	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.03		PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	670.393.312,00	414.319.593,00	-256.073.719,00	61,80	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.03.0001		KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI	95.827.700,00	38.305.190,00	-57.522.510,00	39,97	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	95.827.700,00	38.305.190,00	-57.522.510,00	39,97	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.827.700,00	38.305.190,00	-57.522.510,00	39,97	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.03.0003		MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	418.498.812,00	264.820.893,00	-153.677.919,00	63,27	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	418.498.812,00	264.820.893,00	-153.677.919,00	63,27	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	418.498.812,00	264.820.893,00	-153.677.919,00	63,27	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.03.0004		FASILITASI/EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	156.066.800,00	111.193.510,00	-44.873.290,00	71,24	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	156.066.800,00	111.193.510,00	-44.873.290,00	71,24	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.066.800,00	111.193.510,00	-44.873.290,00	71,24	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.04		IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH	44.481.300,00	26.167.690,00	-18.313.610,00	58,82	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.04.0001		PENGELOLAAN DATA DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH	44.481.300,00	26.167.690,00	-18.313.610,00	58,82	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	44.481.300,00	26.167.690,00	-18.313.610,00	58,82	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.481.300,00	26.167.690,00	-18.313.610,00	58,82	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.759.316.503,00	1.298.783.067,00	-460.533.436,00	73,82	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.01		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	743.110.924,00	539.362.671,00	-203.748.253,00	72,58	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.01.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	69.671.910,00	47.455.395,00	-22.216.515,00	68,11	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	69.671.910,00	47.455.395,00	-22.216.515,00	68,11	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.671.910,00	47.455.395,00	-22.216.515,00	68,11	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.01.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	84.909.605,00	46.426.307,00	-38.483.298,00	54,67	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	84.909.605,00	46.426.307,00	-38.483.298,00	54,67	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.909.605,00	46.426.307,00	-38.483.298,00	54,67	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.01.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	411.747.307,00	344.904.770,00	-66.842.537,00	83,76	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	411.747.307,00	344.904.770,00	-66.842.537,00	83,76	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	411.747.307,00	344.904.770,00	-66.842.537,00	83,76	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.01.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	176.782.102,00	100.576.199,00	-76.205.903,00	56,89	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	176.782.102,00	100.576.199,00	-76.205.903,00	56,89	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.782.102,00	100.576.199,00	-76.205.903,00	56,89	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.02		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	541.537.924,00	402.791.170,00	-138.746.754,00	74,37	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.02.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	171.803.907,00	134.107.771,00	-37.696.136,00	78,05	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	171.803.907,00	134.107.771,00	-37.696.136,00	78,05	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.803.907,00	134.107.771,00	-37.696.136,00	78,05	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.02.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	170.370.402,00	129.416.249,00	-40.954.153,00	75,96	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	170.370.402,00	129.416.249,00	-40.954.153,00	75,96	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.370.402,00	129.416.249,00	-40.954.153,00	75,96	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.02.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	66.715.405,00	42.177.970,00	-24.537.435,00	63,22	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	66.715.405,00	42.177.970,00	-24.537.435,00	63,22	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.715.405,00	42.177.970,00	-24.537.435,00	63,22	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.02.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA	132.648.210,00	97.089.180,00	-35.559.030,00	73,19	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	132.648.210,00	97.089.180,00	-35.559.030,00	73,19	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.648.210,00	97.089.180,00	-35.559.030,00	73,19	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.03		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	474.667.655,00	356.629.226,00	-118.038.429,00	75,13	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.03.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	198.104.730,00	154.977.845,00	-43.126.885,00	78,23	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	198.104.730,00	154.977.845,00	-43.126.885,00	78,23	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.104.730,00	154.977.845,00	-43.126.885,00	78,23	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.03.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	50.477.700,00	28.205.294,00	-22.272.406,00	55,87	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	50.477.700,00	28.205.294,00	-22.272.406,00	55,87	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.477.700,00	28.205.294,00	-22.272.406,00	55,87	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.03.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	174.897.625,00	130.407.819,00	-44.489.806,00	74,56	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	174.897.625,00	130.407.819,00	-44.489.806,00	74,56	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.897.625,00	130.407.819,00	-44.489.806,00	74,56	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.03.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	51.187.600,00	43.038.268,00	-8.149.332,00	84,07	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	51.187.600,00	43.038.268,00	-8.149.332,00	84,07	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.187.600,00	43.038.268,00	-8.149.332,00	84,07	
				JUMLAH BELANJA	25.908.334.842,00	21.337.890.034,52	-4.570.444.807,48	82,35	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-25.908.334.842,00	-21.337.890.034,52	4.570.444.807,48	82,35	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-25.908.334.842,00	-21.337.890.034,52	4.570.444.807,48	82,35	

PEMERINTAH PROVINSI BALI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.631.978.390.704,00	3.114.961.811.957,15	482.983.421.253,15	118,35	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	187.621.828.335,00	695.065.889.262,15	507.444.060.927,15	370,46	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	80.188.303.600,00	572.522.807.759,34	492.334.504.159,34	713,97	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah; c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali; dan d.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	107.433.524.735,00	122.543.081.502,81	15.109.556.767,81	114,06	a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; b. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.438.603.330.369,00	2.414.142.690.695,00	-24.460.639.674,00	98,99	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.403.777.640.000,00	2.379.317.000.326,00	-24.460.639.674,00	98,98	Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.825.690.369,00	34.825.690.369,00	0,00	100,00	a. Pemerintah Provinsi Bali Nomor PKS: B.36.100.3.7/19133/KS/B.PEMKESRA b. Pemerintah Kota Denpasar Nomor PKS: 100.3.7.1/02/PKS/KS/2025 c. Pemerintah Kabupaten Badung Nomor PKS: 100.2.2/11912/PKS/TKKSD-Bdg/2025 d. Pemerintah Kabupaten Gianyar Nomor PKS: 010/18/PKS/B.Tapem/IV/2025 e. Pemerintah Kabupaten Tabanan Nomor PKS: 100.3.7.1/1117/PKS-T.Pem/2025
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.753.232.000,00	5.753.232.000,00	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.3.01	Pendapatan Hibah	5.753.232.000,00	5.753.232.000,00	0,00	100,00	
				PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	2.631.978.390.704,00	3.114.961.811.957,15	482.983.421.253,15	118,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	1.437.785.645.405,00	1.292.171.362.033,45	(145.614.283.371,55)	89,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.586.511.858,00	24.278.174.084,42	-5.308.337.773,58	82,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	44.873.000,00	29.810.200,00	-15.062.800,00	66,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	44.873.000,00	29.810.200,00	-15.062.800,00	66,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	44.873.000,00	29.810.200,00	-15.062.800,00	66,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.873.000,00	29.810.200,00	-15.062.800,00	66,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	22.403.240.843,00	18.336.334.550,00	-4.066.906.293,00	81,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	21.428.130.146,00	17.489.430.153,00	-3.938.699.993,00	81,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.428.130.146,00	17.489.430.153,00	-3.938.699.993,00	81,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	21.428.130.146,00	17.489.430.153,00	-3.938.699.993,00	81,61	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	975.110.697,00	846.904.397,00	-128.206.300,00	86,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	975.110.697,00	846.904.397,00	-128.206.300,00	86,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	975.110.697,00	846.904.397,00	-128.206.300,00	86,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.467.860.297,00	2.895.983.278,00	-571.877.019,00	83,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	17.024.700,00	13.900.005,00	-3.124.695,00	81,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.020.700,00	9.130.000,00	-2.890.700,00	75,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.020.700,00	9.130.000,00	-2.890.700,00	75,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0001	5.2	BELANJA MODAL	5.004.000,00	4.770.005,00	-233.995,00	95,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.004.000,00	4.770.005,00	-233.995,00	95,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.733.897.270,00	2.466.810.097,00	-267.087.173,00	90,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.555.410,00	34.555.410,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.555.410,00	34.555.410,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	2.699.341.860,00	2.432.254.687,00	-267.087.173,00	90,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.689.341.860,00	2.423.374.687,00	-265.967.173,00	90,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.000.000,00	8.880.000,00	-1.120.000,00	88,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	282.801.422,00	209.448.791,00	-73.352.631,00	74,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	282.801.422,00	209.448.791,00	-73.352.631,00	74,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.801.422,00	209.448.791,00	-73.352.631,00	74,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	21.379.300,00	11.398.519,00	-9.980.781,00	53,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	21.379.300,00	11.398.519,00	-9.980.781,00	53,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.379.300,00	11.398.519,00	-9.980.781,00	53,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12.199.900,00	8.586.000,00	-3.613.900,00	70,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.199.900,00	8.586.000,00	-3.613.900,00	70,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.199.900,00	8.586.000,00	-3.613.900,00	70,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	121.512.705,00	59.499.455,00	-62.013.250,00	48,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	121.512.705,00	59.499.455,00	-62.013.250,00	48,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.512.705,00	59.499.455,00	-62.013.250,00	48,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	279.045.000,00	126.340.411,00	-152.704.589,00	45,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	279.045.000,00	126.340.411,00	-152.704.589,00	45,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.045.000,00	126.340.411,00	-152.704.589,00	45,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	348.210.000,00	240.844.252,00	-107.365.748,00	69,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.910.000,00	3.152.700,00	-2.757.300,00	53,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.910.000,00	3.152.700,00	-2.757.300,00	53,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.910.000,00	3.152.700,00	-2.757.300,00	53,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	342.300.000,00	237.691.552,00	-104.608.448,00	69,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	342.300.000,00	237.691.552,00	-104.608.448,00	69,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.300.000,00	237.691.552,00	-104.608.448,00	69,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.322.327.718,00	2.775.201.804,42	-547.125.913,58	83,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	926.076.076,00	699.124.085,00	-226.951.991,00	75,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	926.076.076,00	699.124.085,00	-226.951.991,00	75,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	926.076.076,00	699.124.085,00	-226.951.991,00	75,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	6.400.000,00	6.360.000,00	-40.000,00	99,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.400.000,00	6.360.000,00	-40.000,00	99,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	6.360.000,00	-40.000,00	99,37	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	173.897.005,00	99.048.186,00	-74.848.819,00	56,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	173.897.005,00	99.048.186,00	-74.848.819,00	56,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.897.005,00	99.048.186,00	-74.848.819,00	56,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	2.215.954.637,00	1.970.669.533,42	-245.285.103,58	88,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.185.954.637,00	1.940.917.128,42	-245.037.508,58	88,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.185.954.637,00	1.940.917.128,42	-245.037.508,58	88,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	30.000.000,00	29.752.405,00	-247.595,00	99,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.09.0009	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.000.000,00	29.752.405,00	-247.595,00	99,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.403.776.368.123,00	1.265.073.627.971,33	(138.702.740.151,67)	90,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.01		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	1.695.239.520,00	1.381.572.197,00	-313.667.323,00	81,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.01.0001		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	47.133.100,00	41.568.985,00	-5.564.115,00	88,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	47.133.100,00	41.568.985,00	-5.564.115,00	88,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.133.100,00	41.568.985,00	-5.564.115,00	88,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	34.356.300,00	18.362.010,00	-15.994.290,00	53,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.356.300,00	18.362.010,00	-15.994.290,00	53,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.356.300,00	18.362.010,00	-15.994.290,00	53,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.01.0003		KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA- SKPD	34.764.500,00	28.667.500,00	-6.097.000,00	82,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	34.764.500,00	28.667.500,00	-6.097.000,00	82,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.764.500,00	28.667.500,00	-6.097.000,00	82,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.01.0004		KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA-SKPD	20.456.000,00	16.640.000,00	-3.816.000,00	81,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	20.456.000,00	16.640.000,00	-3.816.000,00	81,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.456.000,00	16.640.000,00	-3.816.000,00	81,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.01.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	891.146.920,00	702.594.584,00	-188.552.336,00	78,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	891.146.920,00	702.594.584,00	-188.552.336,00	78,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	891.146.920,00	702.594.584,00	-188.552.336,00	78,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.01.0008		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	667.382.700,00	573.739.118,00	-93.643.582,00	85,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	667.382.700,00	573.739.118,00	-93.643.582,00	85,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	667.382.700,00	573.739.118,00	-93.643.582,00	85,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.02		PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	514.026.700,00	208.526.528,00	-305.500.172,00	40,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.02.0002		EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD KABUPATEN/KOTA	109.226.700,00	37.830.200,00	-71.396.500,00	34,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	109.226.700,00	37.830.200,00	-71.396.500,00	34,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.226.700,00	37.830.200,00	-71.396.500,00	34,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.02.0003		EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD KABUPATEN/KOTA	80.274.200,00	21.669.640,00	-58.604.560,00	26,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	80.274.200,00	21.669.640,00	-58.604.560,00	26,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.274.200,00	21.669.640,00	-58.604.560,00	26,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.02.0004		EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	63.616.900,00	38.844.240,00	-24.772.660,00	61,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	63.616.900,00	38.844.240,00	-24.772.660,00	61,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.616.900,00	38.844.240,00	-24.772.660,00	61,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.02.0005		ASISTENSI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	194.972.400,00	94.789.948,00	-100.182.452,00	48,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	194.972.400,00	94.789.948,00	-100.182.452,00	48,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.972.400,00	94.789.948,00	-100.182.452,00	48,61	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.02.0008		KONSULTASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD KABUPATEN/KOTA	65.936.500,00	15.392.500,00	-50.544.000,00	23,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	65.936.500,00	15.392.500,00	-50.544.000,00	23,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.936.500,00	15.392.500,00	-50.544.000,00	23,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.03		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	651.859.800,00	506.337.975,00	-145.521.825,00	77,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.03.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)	651.859.800,00	506.337.975,00	-145.521.825,00	77,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	651.859.800,00	506.337.975,00	-145.521.825,00	77,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	651.859.800,00	506.337.975,00	-145.521.825,00	77,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.04		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	795.851.706,00	494.688.875,00	-301.162.831,00	62,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.04.0004		KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	722.799.306,00	458.537.975,00	-264.261.331,00	63,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	722.799.306,00	458.537.975,00	-264.261.331,00	63,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	722.799.306,00	458.537.975,00	-264.261.331,00	63,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.04.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN	73.052.400,00	36.150.900,00	-36.901.500,00	49,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	73.052.400,00	36.150.900,00	-36.901.500,00	49,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.052.400,00	36.150.900,00	-36.901.500,00	49,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.05		PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.400.053.456.897,00	1.262.441.642.736,33	(137.611.814.160,67)	90,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.05.0004		ANALISIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN CICILAN POKOK DAN BUNGA PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	2.026.843.633,00	2.026.843.633,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.026.843.633,00	2.026.843.633,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.026.843.633,00	2.026.843.633,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.05.0008		ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN	325.315.879.304,00	280.600.433.855,03	-44.715.445.448,97	86,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.05.0008	5.4	BELANJA TRANSFER	325.315.879.304,00	280.600.433.855,03	-44.715.445.448,97	86,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.05.0008	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	325.315.879.304,00	280.600.433.855,03	-44.715.445.448,97	86,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.05.0009		PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	53.861.777.244,00	14.075.388.800,30	-39.786.388.443,70	26,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.05.0009	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	53.861.777.244,00	14.075.388.800,30	-39.786.388.443,70	26,13	Peraturan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring, dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.05.0009	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	53.861.777.244,00	14.075.388.800,30	-39.786.388.443,70	26,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.05.0010		PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PROVINSI	1.018.848.956.716,00	965.738.976.448,00	-53.109.980.268,00	94,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.05.0010	5.4	BELANJA TRANSFER	1.018.848.956.716,00	965.738.976.448,00	-53.109.980.268,00	94,78	Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring, dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.05.0010	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.018.848.956.716,00	965.738.976.448,00	-53.109.980.268,00	94,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.06		PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH	65.933.500,00	40.859.660,00	-25.073.840,00	61,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.06.0002		IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH	65.933.500,00	40.859.660,00	-25.073.840,00	61,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	65.933.500,00	40.859.660,00	-25.073.840,00	61,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.933.500,00	40.859.660,00	-25.073.840,00	61,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.422.765.424,00	2.819.559.977,70	-1.603.205.446,30	63,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.1.01		PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.422.765.424,00	2.819.559.977,70	-1.603.205.446,30	63,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.1.01.0001		PENYUSUNAN STANDAR HARGA	121.715.300,00	115.769.180,00	-5.946.120,00	95,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	121.715.300,00	115.769.180,00	-5.946.120,00	95,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.715.300,00	115.769.180,00	-5.946.120,00	95,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.1.01.0003		PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	22.166.000,00	17.737.960,00	-4.428.040,00	80,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	22.166.000,00	17.737.960,00	-4.428.040,00	80,02	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.166.000,00	17.737.960,00	-4.428.040,00	80,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.1.01.0005		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	214.630.000,00	176.322.790,00	-38.307.210,00	82,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	214.630.000,00	176.322.790,00	-38.307.210,00	82,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.630.000,00	176.322.790,00	-38.307.210,00	82,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.1.01.0007		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	2.102.504.000,00	1.400.827.079,00	-701.676.921,00	66,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.102.504.000,00	1.400.827.079,00	-701.676.921,00	66,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.102.504.000,00	1.400.827.079,00	-701.676.921,00	66,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.1.01.0010		OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	1.961.750.124,00	1.108.902.968,70	-852.847.155,30	56,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.961.750.124,00	1.108.902.968,70	-852.847.155,30	56,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.961.750.124,00	1.108.902.968,70	-852.847.155,30	56,52	
				JUMLAH BELANJA	1.437.785.645.405,00	1.292.171.362.033,45	(145.614.283.371,55)	89,87	
				SURPLUS / (DEFISIT)	1.194.192.745.299,00	1.822.790.449.923,70	628.597.704.624,70	152,63	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		6	PEMBIAYAAN DAERAH	752.346.252.673,60	219.211.188.702,62	(533.135.063.970,98)	29,13	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.153.811.060.761,60	620.675.986.790,62	(533.135.073.970,98)	53,79	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	623.732.459.203,32	620.675.986.790,62	-3.056.472.412,70	99,50	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	530.078.601.558,28	0,00	(530.078.601.558,28)	0,00	
				JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.153.811.060.761,60	620.675.986.790,62	(533.135.073.970,98)	53,79	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	401.464.808.088,00	401.464.798.088,00	-10.000,00	99,99	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	158.000.000.000,00	158.000.000.000,00	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	243.464.808.088,00	243.464.798.088,00	-10.000,00	99,99	
				JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	401.464.808.088,00	401.464.798.088,00	-10.000,00	99,99	
				PEMBIAYAAN NETTO	752.346.252.673,60	219.211.188.702,62	(533.135.063.970,98)	29,13	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.946.538.997.972,60	2.042.001.638.626,32	95.462.640.653,72	104,90	

PEMERINTAH PROVINSI BALI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : Badan Pendapatan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.03.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.818.617.307.516,00	2.884.087.372.871,00	65.470.065.355,00	102,32	
	5.02.0.00.0.00.03.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.818.617.307.516,00	2.884.087.372.871,00	65.470.065.355,00	102,32	
	5.02.0.00.0.00.03.0000		4.1.01	Pajak Daerah	2.767.839.352.516,00	2.865.836.401.524,00	97.997.049.008,00	103,54	a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan terhadap Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; d. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat; e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pembebasan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor.
	5.02.0.00.0.00.03.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	277.855.000,00	272.650.800,00	-5.204.200,00	98,12	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah; c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali; dan d.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	5.02.0.00.0.00.03.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	50.500.100.000,00	17.978.320.547,00	-32.521.779.453,00	35,60	
				JUMLAH PENDAPATAN	2.818.617.307.516,00	2.884.087.372.871,00	65.470.065.355,00	102,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	167.485.737.579,00	156.259.916.426,91	-11.225.821.152,09	93,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	156.656.478.597,00	146.000.513.382,91	-10.655.965.214,09	93,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.01		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI	45.277.300,00	30.573.350,00	-14.703.950,00	67,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	20.336.100,00	13.443.420,00	-6.892.680,00	66,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.336.100,00	13.443.420,00	-6.892.680,00	66,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.336.100,00	13.443.420,00	-6.892.680,00	66,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	24.941.200,00	17.129.930,00	-7.811.270,00	68,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	24.941.200,00	17.129.930,00	-7.811.270,00	68,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.941.200,00	17.129.930,00	-7.811.270,00	68,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	125.381.527.196,00	120.865.265.262,00	-4.516.261.934,00	96,39	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	125.381.527.196,00	120.865.265.262,00	-4.516.261.934,00	96,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	125.381.527.196,00	120.865.265.262,00	-4.516.261.934,00	96,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	125.104.927.196,00	120.590.790.262,00	-4.514.136.934,00	96,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.600.000,00	274.475.000,00	-2.125.000,00	99,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.674.579.962,00	2.704.952.397,00	-969.627.565,00	73,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	70.217.900,00	65.514.500,00	-4.703.400,00	93,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	70.217.900,00	65.514.500,00	-4.703.400,00	93,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.217.900,00	65.514.500,00	-4.703.400,00	93,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.857.175.690,00	1.412.663.944,00	-444.511.746,00	76,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.857.175.690,00	1.412.663.944,00	-444.511.746,00	76,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.857.175.690,00	1.412.663.944,00	-444.511.746,00	76,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	405.033.722,00	389.325.980,00	-15.707.742,00	96,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	405.033.722,00	389.325.980,00	-15.707.742,00	96,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	405.033.722,00	389.325.980,00	-15.707.742,00	96,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	464.118.050,00	401.872.285,00	-62.245.765,00	86,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	464.118.050,00	401.872.285,00	-62.245.765,00	86,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	464.118.050,00	401.872.285,00	-62.245.765,00	86,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	34.765.600,00	25.304.800,00	-9.460.800,00	72,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	34.765.600,00	25.304.800,00	-9.460.800,00	72,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.765.600,00	25.304.800,00	-9.460.800,00	72,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	86.425.000,00	65.251.998,00	-21.173.002,00	75,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	86.425.000,00	65.251.998,00	-21.173.002,00	75,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.425.000,00	65.251.998,00	-21.173.002,00	75,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	756.844.000,00	345.018.890,00	-411.825.110,00	45,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	756.844.000,00	345.018.890,00	-411.825.110,00	45,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	756.844.000,00	345.018.890,00	-411.825.110,00	45,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	9.841.839.893,00	7.137.904.182,64	-2.703.935.710,36	72,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	218.777.440,00	183.649.995,00	-35.127.445,00	83,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	218.777.440,00	183.649.995,00	-35.127.445,00	83,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	218.777.440,00	183.649.995,00	-35.127.445,00	83,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.390.847.900,00	1.070.609.344,00	-320.238.556,00	76,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	1.390.847.900,00	1.070.609.344,00	-320.238.556,00	76,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.390.847.900,00	1.070.609.344,00	-320.238.556,00	76,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	8.232.214.553,00	5.883.644.843,64	-2.348.569.709,36	71,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	14.636.000,00	11.598.240,00	-3.037.760,00	79,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.636.000,00	11.598.240,00	-3.037.760,00	79,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	8.217.578.553,00	5.872.046.603,64	-2.345.531.949,36	71,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.827.306.689,00	1.676.005.694,00	-151.300.995,00	91,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.07.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.345.522.864,00	4.154.006.370,28	-2.191.516.493,72	65,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.07.0010	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.749.000,00	42.034.539,36	-2.714.460,64	93,93	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.812.414.062,00	5.037.566.975,00	-774.847.087,00	86,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	21.878.800,00	15.064.000,00	-6.814.800,00	68,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.878.800,00	15.064.000,00	-6.814.800,00	68,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.878.800,00	15.064.000,00	-6.814.800,00	68,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	2.620.983.104,00	1.901.248.188,00	-719.734.916,00	72,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.620.983.104,00	1.901.248.188,00	-719.734.916,00	72,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.620.983.104,00	1.901.248.188,00	-719.734.916,00	72,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.169.552.158,00	3.121.254.787,00	-48.297.371,00	98,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.169.552.158,00	3.121.254.787,00	-48.297.371,00	98,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.169.552.158,00	3.121.254.787,00	-48.297.371,00	98,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	11.850.840.184,00	10.224.251.216,27	-1.626.588.967,73	86,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	544.383.392,00	389.993.591,00	-154.389.801,00	71,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	544.383.392,00	389.993.591,00	-154.389.801,00	71,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	544.383.392,00	389.993.591,00	-154.389.801,00	71,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	2.934.641.916,00	1.909.371.521,00	-1.025.270.395,00	65,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.934.641.916,00	1.909.371.521,00	-1.025.270.395,00	65,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.934.641.916,00	1.909.371.521,00	-1.025.270.395,00	65,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	676.537.215,00	589.104.055,00	-87.433.160,00	87,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	676.537.215,00	589.104.055,00	-87.433.160,00	87,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	676.537.215,00	589.104.055,00	-87.433.160,00	87,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	6.361.192.918,00	6.150.403.833,27	-210.789.084,73	96,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.443.780.668,00	5.252.846.086,61	-190.934.581,39	96,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.443.780.668,00	5.252.846.086,61	-190.934.581,39	96,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	917.412.250,00	897.557.746,66	-19.854.503,34	97,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	917.412.250,00	897.557.746,66	-19.854.503,34	97,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.334.084.743,00	1.185.378.216,00	-148.706.527,00	88,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	1.334.084.743,00	1.185.378.216,00	-148.706.527,00	88,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.334.084.743,00	1.185.378.216,00	-148.706.527,00	88,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10.829.258.982,00	10.259.403.044,00	-569.855.938,00	94,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.1.01		KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10.829.258.982,00	10.259.403.044,00	-569.855.938,00	94,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.1.01.0001		PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	128.726.400,00	93.690.430,00	-35.035.970,00	72,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	128.726.400,00	93.690.430,00	-35.035.970,00	72,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.726.400,00	93.690.430,00	-35.035.970,00	72,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.1.01.0002		ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	93.709.600,00	71.113.038,00	-22.596.562,00	75,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	93.709.600,00	71.113.038,00	-22.596.562,00	75,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.709.600,00	71.113.038,00	-22.596.562,00	75,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.1.01.0003		PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	142.974.800,00	58.412.780,00	-84.562.020,00	40,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	142.974.800,00	58.412.780,00	-84.562.020,00	40,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.974.800,00	58.412.780,00	-84.562.020,00	40,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.1.01.0008		PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH	5.805.641.335,00	5.651.834.391,00	-153.806.944,00	97,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.805.641.335,00	5.651.834.391,00	-153.806.944,00	97,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.805.641.335,00	5.651.834.391,00	-153.806.944,00	97,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.1.01.0010		PENAGIHAN PAJAK DAERAH	4.314.271.147,00	4.120.023.185,00	-194.247.962,00	95,49	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	4.314.271.147,00	4.120.023.185,00	-194.247.962,00	95,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.314.271.147,00	4.120.023.185,00	-194.247.962,00	95,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.1.01.0012		PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	308.975.700,00	239.091.810,00	-69.883.890,00	77,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.1.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	308.975.700,00	239.091.810,00	-69.883.890,00	77,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.1.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.975.700,00	239.091.810,00	-69.883.890,00	77,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.1.01.0013		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	34.960.000,00	25.237.410,00	-9.722.590,00	72,18	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.1.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	34.960.000,00	25.237.410,00	-9.722.590,00	72,18	
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.1.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.960.000,00	25.237.410,00	-9.722.590,00	72,18	
				JUMLAH BELANJA	167.485.737.579,00	156.259.916.426,91	-11.225.821.152,09	93,29	
				SURPLUS / (DEFISIT)	2.651.131.569.937,00	2.727.827.456.444,09	76.695.886.507,09	102,89	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	2.651.131.569.937,00	2.727.827.456.444,09	76.695.886.507,09	102,89	

PEMERINTAH PROVINSI BALI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEPEGAWAIAN
Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.03.5.04.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	22.322.255.000,00	23.285.006.507,88	962.751.507,88	104,31	
	5.03.5.04.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22.322.255.000,00	23.285.006.507,88	962.751.507,88	104,31	
	5.03.5.04.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	359.000.000,00	581.880.000,00	222.880.000,00	162,08	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah; c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali; dan d.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	5.03.5.04.0.00.02.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	21.963.255.000,00	22.703.126.507,88	739.871.507,88	103,36	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
				JUMLAH PENDAPATAN	22.322.255.000,00	23.285.006.507,88	962.751.507,88	104,31	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	60.321.528.772,00	53.881.894.165,22	-6.439.634.606,78	89,32	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	55.022.498.570,00	49.029.654.816,22	-5.992.843.753,78	89,10	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	102.382.600,00	59.016.463,00	-43.366.137,00	57,64	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.01.0001		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	10.200.000,00	8.355.000,00	-1.845.000,00	81,91	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.200.000,00	8.355.000,00	-1.845.000,00	81,91	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	8.355.000,00	-1.845.000,00	81,91	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	3.600.000,00	3.540.000,00	-60.000,00	98,33	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.540.000,00	-60.000,00	98,33	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.540.000,00	-60.000,00	98,33	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	37.042.600,00	81.463,00	-36.961.137,00	0,21	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	37.042.600,00	81.463,00	-36.961.137,00	0,21	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.042.600,00	81.463,00	-36.961.137,00	0,21	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	51.540.000,00	47.040.000,00	-4.500.000,00	91,26	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	51.540.000,00	47.040.000,00	-4.500.000,00	91,26	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.540.000,00	47.040.000,00	-4.500.000,00	91,26	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	29.450.461.161,00	27.361.276.880,00	-2.089.184.281,00	92,90	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	29.450.461.161,00	27.361.276.880,00	-2.089.184.281,00	92,90	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.450.461.161,00	27.361.276.880,00	-2.089.184.281,00	92,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	29.316.361.161,00	27.245.776.880,00	-2.070.584.281,00	92,93	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.100.000,00	115.500.000,00	-18.600.000,00	86,12	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	495.526.634,00	364.597.833,00	-130.928.801,00	73,57	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	17.762.400,00	15.895.000,00	-1.867.400,00	89,48	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.762.400,00	15.895.000,00	-1.867.400,00	89,48	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.762.400,00	15.895.000,00	-1.867.400,00	89,48	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	156.944.800,00	116.860.000,00	-40.084.800,00	74,45	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	156.944.800,00	116.860.000,00	-40.084.800,00	74,45	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.944.800,00	116.860.000,00	-40.084.800,00	74,45	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	85.079.034,00	84.482.000,00	-597.034,00	99,29	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	85.079.034,00	84.482.000,00	-597.034,00	99,29	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.079.034,00	84.482.000,00	-597.034,00	99,29	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.280.400,00	7.936.380,00	-2.344.020,00	77,19	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.280.400,00	7.936.380,00	-2.344.020,00	77,19	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.280.400,00	7.936.380,00	-2.344.020,00	77,19	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.137.000,00	3.175.500,00	-961.500,00	76,75	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.137.000,00	3.175.500,00	-961.500,00	76,75	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.137.000,00	3.175.500,00	-961.500,00	76,75	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	221.323.000,00	136.248.953,00	-85.074.047,00	61,56	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	221.323.000,00	136.248.953,00	-85.074.047,00	61,56	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.323.000,00	136.248.953,00	-85.074.047,00	61,56	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	601.183.000,00	515.192.600,00	-85.990.400,00	85,69	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	601.183.000,00	515.192.600,00	-85.990.400,00	85,69	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	601.183.000,00	515.192.600,00	-85.990.400,00	85,69	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	601.183.000,00	515.192.600,00	-85.990.400,00	85,69	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.120.349.355,00	1.096.346.045,00	-24.003.310,00	97,85	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.386.400,00	1.520.000,00	-866.400,00	63,69	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.386.400,00	1.520.000,00	-866.400,00	63,69	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.386.400,00	1.520.000,00	-866.400,00	63,69	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	253.600.000,00	230.463.090,00	-23.136.910,00	90,87	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	253.600.000,00	230.463.090,00	-23.136.910,00	90,87	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.600.000,00	230.463.090,00	-23.136.910,00	90,87	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	864.362.955,00	864.362.955,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	864.362.955,00	864.362.955,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	864.362.955,00	864.362.955,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.552.595.820,00	1.483.916.855,22	-68.678.964,78	95,57	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	78.656.500,00	65.540.200,00	-13.116.300,00	83,32	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	78.656.500,00	65.540.200,00	-13.116.300,00	83,32	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.656.500,00	65.540.200,00	-13.116.300,00	83,32	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.010.648.320,00	979.951.174,00	-30.697.146,00	96,96	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.010.648.320,00	979.951.174,00	-30.697.146,00	96,96	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.010.648.320,00	979.951.174,00	-30.697.146,00	96,96	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	316.731.000,00	301.314.451,22	-15.416.548,78	95,13	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	316.731.000,00	301.314.451,22	-15.416.548,78	95,13	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.731.000,00	301.314.451,22	-15.416.548,78	95,13	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	146.560.000,00	137.111.030,00	-9.448.970,00	93,55	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	146.560.000,00	137.111.030,00	-9.448.970,00	93,55	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.560.000,00	137.111.030,00	-9.448.970,00	93,55	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	21.700.000.000,00	18.149.308.140,00	-3.550.691.860,00	83,63	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	21.700.000.000,00	18.149.308.140,00	-3.550.691.860,00	83,63	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.642.800.000,00	16.932.326.650,00	-1.710.473.350,00	90,82	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.642.800.000,00	16.932.326.650,00	-1.710.473.350,00	90,82	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	3.057.200.000,00	1.216.981.490,00	-1.840.218.510,00	39,80	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.057.200.000,00	748.349.999,00	-1.308.850.001,00	36,37	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.10.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.000.000,00	468.631.491,00	-531.368.509,00	46,86	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.299.030.202,00	4.852.239.349,00	-446.790.853,00	91,56	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.01		PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	1.255.051.807,00	1.147.582.099,00	-107.469.708,00	91,43	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.01.0002		PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN	41.856.000,00	31.095.710,00	-10.760.290,00	74,29	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	41.856.000,00	31.095.710,00	-10.760.290,00	74,29	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.856.000,00	31.095.710,00	-10.760.290,00	74,29	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.01.0003		KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK	788.914.000,00	724.688.950,00	-64.225.050,00	91,85	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	788.914.000,00	724.688.950,00	-64.225.050,00	91,85	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	788.914.000,00	724.688.950,00	-64.225.050,00	91,85	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.01.0004		EVALUASI PENGADAAN ASN DAN PENGADAAN ASN	39.368.000,00	32.782.413,00	-6.585.587,00	83,27	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	39.368.000,00	32.782.413,00	-6.585.587,00	83,27	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.368.000,00	32.782.413,00	-6.585.587,00	83,27	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.01.0006		KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN	97.385.705,00	91.112.455,00	-6.273.250,00	93,55	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	97.385.705,00	91.112.455,00	-6.273.250,00	93,55	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.385.705,00	91.112.455,00	-6.273.250,00	93,55	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.01.0008		FASILITASI LEMBAGA PROFESI ASN	154.596.500,00	149.497.500,00	-5.099.000,00	96,70	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	154.596.500,00	149.497.500,00	-5.099.000,00	96,70	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.596.500,00	149.497.500,00	-5.099.000,00	96,70	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.01.0010		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	132.931.602,00	118.405.071,00	-14.526.531,00	89,07	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	132.931.602,00	118.405.071,00	-14.526.531,00	89,07	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.931.602,00	118.405.071,00	-14.526.531,00	89,07	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.02		MUTASI DAN PROMOSI ASN	240.395.815,00	180.088.287,00	-60.307.528,00	74,91	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.02.0001		PENGELOLAAN MUTASI ASN	34.097.405,00	27.618.855,00	-6.478.550,00	80,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.097.405,00	27.618.855,00	-6.478.550,00	80,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.097.405,00	27.618.855,00	-6.478.550,00	80,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.02.0002		PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN	116.113.705,00	94.576.137,00	-21.537.568,00	81,45	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	116.113.705,00	94.576.137,00	-21.537.568,00	81,45	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.113.705,00	94.576.137,00	-21.537.568,00	81,45	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.02.0003		PENGELOLAAN PROMOSI ASN	90.184.705,00	57.893.295,00	-32.291.410,00	64,19	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	90.184.705,00	57.893.295,00	-32.291.410,00	64,19	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.184.705,00	57.893.295,00	-32.291.410,00	64,19	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.03		PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	3.426.101.389,00	3.184.389.653,00	-241.711.736,00	92,94	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.03.0002		PENGELOLAAN ASSESSMENT CENTER	1.583.657.700,00	1.435.969.722,00	-147.687.978,00	90,67	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.583.657.700,00	1.435.969.722,00	-147.687.978,00	90,67	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.583.657.700,00	1.435.969.722,00	-147.687.978,00	90,67	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.03.0004		PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN	73.996.492,00	73.390.293,00	-606.199,00	99,18	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	73.996.492,00	73.390.293,00	-606.199,00	99,18	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.996.492,00	73.390.293,00	-606.199,00	99,18	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.03.0005		KOORDINASI DAN KERJA SAMA PELAKSANAAN DIKLAT	1.492.206.492,00	1.472.575.973,00	-19.630.519,00	98,68	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.492.206.492,00	1.472.575.973,00	-19.630.519,00	98,68	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.492.206.492,00	1.472.575.973,00	-19.630.519,00	98,68	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.03.0007		EVALUASI DIKLAT DAN SERTIFIKASI JABATAN ASN	18.608.000,00	17.333.310,00	-1.274.690,00	93,14	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	18.608.000,00	17.333.310,00	-1.274.690,00	93,14	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.608.000,00	17.333.310,00	-1.274.690,00	93,14	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.03.0009		KOORDINASI DAN KERJA SAMA PELAKSANAAN DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL	195.266.000,00	140.657.590,00	-54.608.410,00	72,03	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	195.266.000,00	140.657.590,00	-54.608.410,00	72,03	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.266.000,00	140.657.590,00	-54.608.410,00	72,03	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.03.0014		FASILITASI PENGEMBANGAN KARIR DALAM JABATAN FUNGSIONAL	62.366.705,00	44.462.765,00	-17.903.940,00	71,29	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.03.0014	5.1	BELANJA OPERASI	62.366.705,00	44.462.765,00	-17.903.940,00	71,29	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.03.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.366.705,00	44.462.765,00	-17.903.940,00	71,29	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.04		PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	377.481.191,00	340.179.310,00	-37.301.881,00	90,11	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.04.0002		PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	93.996.197,00	93.420.057,00	-576.140,00	99,38	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	93.996.197,00	93.420.057,00	-576.140,00	99,38	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.996.197,00	93.420.057,00	-576.140,00	99,38	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.04.0004		PENGELOLAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI	59.545.100,00	53.682.868,00	-5.862.232,00	90,15	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	59.545.100,00	53.682.868,00	-5.862.232,00	90,15	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.545.100,00	53.682.868,00	-5.862.232,00	90,15	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.04.0005		PENGELOLAAN TANDA JASA BAGI PEGAWAI	122.816.997,00	96.101.197,00	-26.715.800,00	78,24	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	122.816.997,00	96.101.197,00	-26.715.800,00	78,24	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.816.997,00	96.101.197,00	-26.715.800,00	78,24	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.04.0007		PEMBINAAN DISIPLIN ASN	84.056.197,00	83.578.837,00	-477.360,00	99,43	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	84.056.197,00	83.578.837,00	-477.360,00	99,43	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.056.197,00	83.578.837,00	-477.360,00	99,43	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.04.0008		PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN	17.066.700,00	13.396.351,00	-3.670.349,00	78,49	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	17.066.700,00	13.396.351,00	-3.670.349,00	78,49	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.066.700,00	13.396.351,00	-3.670.349,00	78,49	
				JUMLAH BELANJA	60.321.528.772,00	53.881.894.165,22	-6.439.634.606,78	89,32	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-37.999.273.772,00	-30.596.887.657,34	7.402.386.114,66	80,51	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-37.999.273.772,00	-30.596.887.657,34	7.402.386.114,66	80,51	

PEMERINTAH PROVINSI BALI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.03.5.04.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	22.322.255.000,00	23.285.006.507,88	962.751.507,88	104,31	
	5.03.5.04.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22.322.255.000,00	23.285.006.507,88	962.751.507,88	104,31	
	5.03.5.04.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	359.000.000,00	581.880.000,00	222.880.000,00	162,08	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah; c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali; dan d.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	5.03.5.04.0.00.02.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	21.963.255.000,00	22.703.126.507,88	739.871.507,88	103,36	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
				JUMLAH PENDAPATAN	22.322.255.000,00	23.285.006.507,88	962.751.507,88	104,31	
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	1.232.466.689,00	988.115.399,00	-244.351.290,00	80,17	
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.232.466.689,00	988.115.399,00	-244.351.290,00	80,17	
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.1.02		SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	1.232.466.689,00	988.115.399,00	-244.351.290,00	80,17	
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.1.02.0001		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	267.709.492,00	159.804.274,00	-107.905.218,00	59,69	
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	267.709.492,00	159.804.274,00	-107.905.218,00	59,69	
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.709.492,00	159.804.274,00	-107.905.218,00	59,69	
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.1.02.0002		PENGELOLAAN LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI	204.089.000,00	123.976.490,00	-80.112.510,00	60,74	
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	204.089.000,00	123.976.490,00	-80.112.510,00	60,74	
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.089.000,00	123.976.490,00	-80.112.510,00	60,74	
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.1.02.0003		PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	531.056.492,00	517.417.970,00	-13.638.522,00	97,43	
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	531.056.492,00	517.417.970,00	-13.638.522,00	97,43	
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	531.056.492,00	517.417.970,00	-13.638.522,00	97,43	
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.1.02.0004		PENGELOLAAN KELEMBAGAAN, TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI, DAN SUMBER BELAJAR	116.684.500,00	103.967.270,00	-12.717.230,00	89,10	
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	116.684.500,00	103.967.270,00	-12.717.230,00	89,10	
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.684.500,00	103.967.270,00	-12.717.230,00	89,10	
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.1.02.0005		PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA	69.561.205,00	46.563.875,00	-22.997.330,00	66,93	
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	69.561.205,00	46.563.875,00	-22.997.330,00	66,93	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.561.205,00	46.563.875,00	-22.997.330,00	66,93	
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.1.02.0008		PEMBINAAN, PENGOORDINASIAN, FASILITASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI, PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI, PENGELOLAAN SUMBER BELAJAR, DAN KERJA SAMA, SERTA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN	43.366.000,00	36.385.520,00	-6.980.480,00	83,90	
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.1.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	43.366.000,00	36.385.520,00	-6.980.480,00	83,90	
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.1.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.366.000,00	36.385.520,00	-6.980.480,00	83,90	
				JUMLAH BELANJA	1.232.466.689,00	988.115.399,00	-244.351.290,00	80,17	
				SURPLUS / (DEFISIT)	21.089.788.311,00	22.296.891.108,88	1.207.102.797,88	105,72	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	21.089.788.311,00	22.296.891.108,88	1.207.102.797,88	105,72	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Organisasi : Badan Riset dan Inovasi Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	26.887.596.102,00	23.375.100.232,00	-3.512.495.870,00	86,93	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.358.909.702,00	13.710.127.072,00	-1.648.782.630,00	89,26	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	58.951.000,00	52.622.031,00	-6.328.969,00	89,26	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	23.789.000,00	21.085.500,00	-2.703.500,00	88,63	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.789.000,00	21.085.500,00	-2.703.500,00	88,63	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.789.000,00	21.085.500,00	-2.703.500,00	88,63	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	35.162.000,00	31.536.531,00	-3.625.469,00	89,68	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	35.162.000,00	31.536.531,00	-3.625.469,00	89,68	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.162.000,00	31.536.531,00	-3.625.469,00	89,68	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.02		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	10.735.967.860,00	9.982.633.372,00	-753.334.488,00	92,98	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	10.735.967.860,00	9.982.633.372,00	-753.334.488,00	92,98	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.735.967.860,00	9.982.633.372,00	-753.334.488,00	92,98	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	10.687.667.860,00	9.939.733.372,00	-747.934.488,00	93,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.300.000,00	42.900.000,00	-5.400.000,00	88,81	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	576.031.300,00	393.464.673,00	-182.566.627,00	68,30	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	21.938.000,00	13.457.000,00	-8.481.000,00	61,34	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.938.000,00	13.457.000,00	-8.481.000,00	61,34	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.938.000,00	13.457.000,00	-8.481.000,00	61,34	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	205.509.000,00	125.021.000,00	-80.488.000,00	60,83	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	205.509.000,00	125.021.000,00	-80.488.000,00	60,83	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.509.000,00	125.021.000,00	-80.488.000,00	60,83	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	107.436.400,00	88.381.349,00	-19.055.051,00	82,26	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	107.436.400,00	88.381.349,00	-19.055.051,00	82,26	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.436.400,00	88.381.349,00	-19.055.051,00	82,26	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	24.180.200,00	15.992.200,00	-8.188.000,00	66,13	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	24.180.200,00	15.992.200,00	-8.188.000,00	66,13	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.180.200,00	15.992.200,00	-8.188.000,00	66,13	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	14.998.700,00	12.105.600,00	-2.893.100,00	80,71	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	14.998.700,00	12.105.600,00	-2.893.100,00	80,71	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.998.700,00	12.105.600,00	-2.893.100,00	80,71	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	201.969.000,00	138.507.524,00	-63.461.476,00	68,57	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	201.969.000,00	138.507.524,00	-63.461.476,00	68,57	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.969.000,00	138.507.524,00	-63.461.476,00	68,57	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.677.862.540,00	1.224.062.373,00	-453.800.167,00	72,95	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.07.0005		PENGADAAN MEBEL	607.456.200,00	452.099.975,00	-155.356.225,00	74,42	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	607.456.200,00	452.099.975,00	-155.356.225,00	74,42	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	607.456.200,00	452.099.975,00	-155.356.225,00	74,42	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.070.406.340,00	771.962.398,00	-298.443.942,00	72,11	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	1.070.406.340,00	771.962.398,00	-298.443.942,00	72,11	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.070.406.340,00	771.962.398,00	-298.443.942,00	72,11	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	519.869.144,00	442.716.153,00	-77.152.991,00	85,15	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	11.162.700,00	7.110.000,00	-4.052.700,00	63,69	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.162.700,00	7.110.000,00	-4.052.700,00	63,69	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.162.700,00	7.110.000,00	-4.052.700,00	63,69	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	167.200.000,00	112.105.709,00	-55.094.291,00	67,04	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	167.200.000,00	112.105.709,00	-55.094.291,00	67,04	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.200.000,00	112.105.709,00	-55.094.291,00	67,04	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	341.506.444,00	323.500.444,00	-18.006.000,00	94,72	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	341.506.444,00	323.500.444,00	-18.006.000,00	94,72	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.506.444,00	323.500.444,00	-18.006.000,00	94,72	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.790.227.858,00	1.614.628.470,00	-175.599.388,00	90,19	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	784.032.101,00	708.294.373,00	-75.737.728,00	90,33	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	784.032.101,00	708.294.373,00	-75.737.728,00	90,33	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	784.032.101,00	708.294.373,00	-75.737.728,00	90,33	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1.006.195.757,00	906.334.097,00	-99.861.660,00	90,07	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	769.250.757,00	670.410.062,00	-98.840.695,00	87,15	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.09.0009	5.1.01	Belanja Pegawai	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	758.750.757,00	659.910.062,00	-98.840.695,00	86,97	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	236.945.000,00	235.924.035,00	-1.020.965,00	99,56	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	236.945.000,00	235.924.035,00	-1.020.965,00	99,56	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	11.528.686.400,00	9.664.973.160,00	-1.863.713.240,00	83,83	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.01		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	8.506.608.000,00	6.828.827.251,00	-1.677.780.749,00	80,27	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.01.0002		FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM	6.274.365.000,00	6.190.284.222,00	-84.080.778,00	98,65	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.274.365.000,00	6.190.284.222,00	-84.080.778,00	98,65	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.274.365.000,00	6.190.284.222,00	-84.080.778,00	98,65	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.01.0008		FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETATALAKSANAAN DESA	292.539.000,00	210.398.300,00	-82.140.700,00	71,92	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	292.539.000,00	210.398.300,00	-82.140.700,00	71,92	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.539.000,00	210.398.300,00	-82.140.700,00	71,92	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.01.0012		PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN	245.784.000,00	209.452.810,00	-36.331.190,00	85,21	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	245.784.000,00	209.452.810,00	-36.331.190,00	85,21	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.784.000,00	209.452.810,00	-36.331.190,00	85,21	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.01.0013		PERUMUSAN REKOMENDASI ATAS RENCANA PENETAPAN PERATURAN BARU DAN/ATAU EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN	1.693.920.000,00	218.691.919,00	-1.475.228.081,00	12,91	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	1.693.920.000,00	218.691.919,00	-1.475.228.081,00	12,91	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.693.920.000,00	218.691.919,00	-1.475.228.081,00	12,91	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	2.642.424.300,00	2.509.204.520,00	-133.219.780,00	94,95	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03.0002		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	394.398.800,00	365.618.458,00	-28.780.342,00	92,70	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	394.398.800,00	365.618.458,00	-28.780.342,00	92,70	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	394.398.800,00	365.618.458,00	-28.780.342,00	92,70	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03.0003		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH	231.500.000,00	228.542.395,00	-2.957.605,00	98,72	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	231.500.000,00	228.542.395,00	-2.957.605,00	98,72	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.500.000,00	228.542.395,00	-2.957.605,00	98,72	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03.0004		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PANGAN	894.682.000,00	889.120.770,00	-5.561.230,00	99,37	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	894.682.000,00	889.120.770,00	-5.561.230,00	99,37	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	894.682.000,00	889.120.770,00	-5.561.230,00	99,37	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03.0006		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	234.732.500,00	231.072.755,00	-3.659.745,00	98,44	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	234.732.500,00	231.072.755,00	-3.659.745,00	98,44	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.732.500,00	231.072.755,00	-3.659.745,00	98,44	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03.0007		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP	218.611.000,00	216.976.619,00	-1.634.381,00	99,25	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	218.611.000,00	216.976.619,00	-1.634.381,00	99,25	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.611.000,00	216.976.619,00	-1.634.381,00	99,25	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03.0009		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEKERJAAN UMUM	668.500.000,00	577.873.523,00	-90.626.477,00	86,44	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	668.500.000,00	577.873.523,00	-90.626.477,00	86,44	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	668.500.000,00	577.873.523,00	-90.626.477,00	86,44	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.04		PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	379.654.100,00	326.941.389,00	-52.712.711,00	86,11	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.04.0002		UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	167.232.700,00	153.932.645,00	-13.300.055,00	92,04	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	167.232.700,00	153.932.645,00	-13.300.055,00	92,04	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.232.700,00	153.932.645,00	-13.300.055,00	92,04	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.04.0004		SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN	61.661.400,00	52.914.051,00	-8.747.349,00	85,81	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	61.661.400,00	52.914.051,00	-8.747.349,00	85,81	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.661.400,00	52.914.051,00	-8.747.349,00	85,81	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.04.0005		FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	150.760.000,00	120.094.693,00	-30.665.307,00	79,65	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	150.760.000,00	120.094.693,00	-30.665.307,00	79,65	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.760.000,00	120.094.693,00	-30.665.307,00	79,65	
				JUMLAH BELANJA	26.887.596.102,00	23.375.100.232,00	-3.512.495.870,00	86,93	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-26.887.596.102,00	-23.375.100.232,00	3.512.495.870,00	86,93	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-26.887.596.102,00	-23.375.100.232,00	3.512.495.870,00	86,93	

PEMERINTAH PROVINSI BALI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENGELOLAAN PENGHUBUNG
Organisasi : Badan Penghubung

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.07.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	60.000.000,00	63.000.000,00	3.000.000,00	105,00	
	5.07.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60.000.000,00	63.000.000,00	3.000.000,00	105,00	
	5.07.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	60.000.000,00	63.000.000,00	3.000.000,00	105,00	a.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah; c.Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali; dan d.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
				JUMLAH PENDAPATAN	60.000.000,00	63.000.000,00	3.000.000,00	105,00	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	11.017.823.314,00	9.625.468.158,00	-1.392.355.156,00	87,36	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.796.514.387,00	6.776.374.296,00	-1.020.140.091,00	86,91	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.999.300,00	4.865.800,00	-133.500,00	97,32	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.999.300,00	4.865.800,00	-133.500,00	97,32	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0001	5.1	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	4.999.300,00	4.865.800,00	-133.500,00	97,32	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.300,00	4.865.800,00	-133.500,00	97,32	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.168.063.101,00	2.818.866.905,00	-349.196.196,00	88,97	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.168.063.101,00	2.818.866.905,00	-349.196.196,00	88,97	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.168.063.101,00	2.818.866.905,00	-349.196.196,00	88,97	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.109.813.101,00	2.767.866.905,00	-341.946.196,00	89,00	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.250.000,00	51.000.000,00	-7.250.000,00	87,55	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	278.537.500,00	270.908.078,00	-7.629.422,00	97,26	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	14.989.400,00	14.041.500,00	-947.900,00	93,67	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.989.400,00	14.041.500,00	-947.900,00	93,67	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.989.400,00	14.041.500,00	-947.900,00	93,67	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	67.693.600,00	63.250.640,00	-4.442.960,00	93,43	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	60.977.600,00	56.673.890,00	-4.303.710,00	92,94	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.977.600,00	56.673.890,00	-4.303.710,00	92,94	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	6.716.000,00	6.576.750,00	-139.250,00	97,92	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.716.000,00	6.576.750,00	-139.250,00	97,92	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.090.500,00	5.566.900,00	-523.600,00	91,40	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.090.500,00	5.566.900,00	-523.600,00	91,40	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.090.500,00	5.566.900,00	-523.600,00	91,40	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	99.764.000,00	98.049.038,00	-1.714.962,00	98,28	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	99.764.000,00	98.049.038,00	-1.714.962,00	98,28	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.764.000,00	98.049.038,00	-1.714.962,00	98,28	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	544.230.256,00	435.150.748,00	-109.079.508,00	79,95	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	544.230.256,00	435.150.748,00	-109.079.508,00	79,95	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	29.091.000,00	28.638.000,00	-453.000,00	98,44	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.091.000,00	28.638.000,00	-453.000,00	98,44	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	515.139.256,00	406.512.748,00	-108.626.508,00	78,91	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	515.139.256,00	406.512.748,00	-108.626.508,00	78,91	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.529.745.566,00	1.387.224.860,00	-142.520.706,00	90,68	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	8.989.100,00	7.545.500,00	-1.443.600,00	83,94	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.989.100,00	7.545.500,00	-1.443.600,00	83,94	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.989.100,00	7.545.500,00	-1.443.600,00	83,94	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	306.800.000,00	187.355.219,00	-119.444.781,00	61,06	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	306.800.000,00	187.355.219,00	-119.444.781,00	61,06	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.800.000,00	187.355.219,00	-119.444.781,00	61,06	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.213.956.466,00	1.192.324.141,00	-21.632.325,00	98,21	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.213.956.466,00	1.192.324.141,00	-21.632.325,00	98,21	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.213.956.466,00	1.192.324.141,00	-21.632.325,00	98,21	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.270.938.664,00	1.859.357.905,00	-411.580.759,00	81,87	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	1.581.337.868,00	1.431.997.175,00	-149.340.693,00	90,55	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.581.337.868,00	1.431.997.175,00	-149.340.693,00	90,55	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.581.337.868,00	1.431.997.175,00	-149.340.693,00	90,55	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	537.975.000,00	309.388.694,00	-228.586.306,00	57,50	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	317.796.000,00	309.388.694,00	-8.407.306,00	97,35	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.796.000,00	309.388.694,00	-8.407.306,00	97,35	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0010	5.2	BELANJA MODAL	220.179.000,00	0,00	-220.179.000,00	0,00	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	220.179.000,00	0,00	-220.179.000,00	0,00	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	151.625.796,00	117.972.036,00	-33.653.760,00	77,80	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	151.625.796,00	117.972.036,00	-33.653.760,00	77,80	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.625.796,00	117.972.036,00	-33.653.760,00	77,80	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	3.221.308.927,00	2.849.093.862,00	-372.215.065,00	88,44	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01		PELAKSANAAN PELAYANAN PENGHUBUNG	3.221.308.927,00	2.849.093.862,00	-372.215.065,00	88,44	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0001		PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI APARATUR DAN MASYARAKAT	115.336.387,00	91.583.045,00	-23.753.342,00	79,40	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	48.717.600,00	43.098.045,00	-5.619.555,00	88,46	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.717.600,00	43.098.045,00	-5.619.555,00	88,46	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	66.618.787,00	48.485.000,00	-18.133.787,00	72,77	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.618.787,00	48.485.000,00	-18.133.787,00	72,77	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0004		KEGIATAN FASILITASI PAMERAN PRODUK UNGGULAN DAN PELESTARIAN SENI BUDAYA	326.087.665,00	309.150.565,00	-16.937.100,00	94,80	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	326.087.665,00	309.150.565,00	-16.937.100,00	94,80	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.087.665,00	309.150.565,00	-16.937.100,00	94,80	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0005		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PELAYANAN PENGHUBUNG	2.779.884.875,00	2.448.360.252,00	-331.524.623,00	88,07	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.715.122.253,00	2.393.060.253,00	-322.062.000,00	88,13	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.715.122.253,00	2.393.060.253,00	-322.062.000,00	88,13	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	64.762.622,00	55.299.999,00	-9.462.623,00	85,38	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.762.622,00	55.299.999,00	-9.462.623,00	85,38	
				JUMLAH BELANJA	11.017.823.314,00	9.625.468.158,00	-1.392.355.156,00	87,36	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-10.957.823.314,00	-9.562.468.158,00	1.395.355.156,00	87,26	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-10.957.823.314,00	-9.562.468.158,00	1.395.355.156,00	87,26	

PEMERINTAH PROVINSI BALI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : Inspektorat

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	35.944.174.832,00	34.015.253.758,00	-1.928.921.074,00	94,63	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.603.939.415,00	30.160.580.953,00	-1.443.358.462,00	95,43	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	42.659.000,00	36.310.390,00	-6.348.610,00	85,11	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	18.521.800,00	13.290.950,00	-5.230.850,00	71,75	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.521.800,00	13.290.950,00	-5.230.850,00	71,75	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.521.800,00	13.290.950,00	-5.230.850,00	71,75	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	24.137.200,00	23.019.440,00	-1.117.760,00	95,36	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	24.137.200,00	23.019.440,00	-1.117.760,00	95,36	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.137.200,00	23.019.440,00	-1.117.760,00	95,36	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.02		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	26.039.950.471,00	25.022.376.259,00	-1.017.574.212,00	96,09	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	26.039.950.471,00	25.022.376.259,00	-1.017.574.212,00	96,09	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.039.950.471,00	25.022.376.259,00	-1.017.574.212,00	96,09	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	25.989.250.471,00	24.972.876.259,00	-1.016.374.212,00	96,08	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.700.000,00	49.500.000,00	-1.200.000,00	97,63	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.079.791.694,00	953.584.259,00	-126.207.435,00	88,31	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	49.999.400,00	46.165.000,00	-3.834.400,00	92,33	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	49.999.400,00	46.165.000,00	-3.834.400,00	92,33	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.400,00	46.165.000,00	-3.834.400,00	92,33	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	99.997.800,00	84.115.024,00	-15.882.776,00	84,11	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	99.997.800,00	84.115.024,00	-15.882.776,00	84,11	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.997.800,00	84.115.024,00	-15.882.776,00	84,11	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	158.109.394,00	123.415.003,00	-34.694.391,00	78,05	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	158.109.394,00	123.415.003,00	-34.694.391,00	78,05	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.109.394,00	123.415.003,00	-34.694.391,00	78,05	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	40.070.300,00	25.185.150,00	-14.885.150,00	62,85	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	40.070.300,00	25.185.150,00	-14.885.150,00	62,85	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.070.300,00	25.185.150,00	-14.885.150,00	62,85	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	44.140.800,00	35.956.800,00	-8.184.000,00	81,45	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	44.140.800,00	35.956.800,00	-8.184.000,00	81,45	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.140.800,00	35.956.800,00	-8.184.000,00	81,45	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	39.960.000,00	40.436.250,00	476.250,00	101,19	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	39.960.000,00	40.436.250,00	476.250,00	101,19	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.960.000,00	40.436.250,00	476.250,00	101,19	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	647.514.000,00	598.311.032,00	-49.202.968,00	92,40	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	647.514.000,00	598.311.032,00	-49.202.968,00	92,40	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	647.514.000,00	598.311.032,00	-49.202.968,00	92,40	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.694.023.740,00	1.565.693.040,00	-128.330.700,00	92,42	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.694.023.740,00	1.565.693.040,00	-128.330.700,00	92,42	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	1.694.023.740,00	1.565.693.040,00	-128.330.700,00	92,42	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.681.023.740,00	1.553.971.181,00	-127.052.559,00	92,44	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.07.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.000.000,00	11.721.859,00	-1.278.141,00	90,16	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	633.153.460,00	562.240.226,00	-70.913.234,00	88,79	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.092.900,00	1.970.000,00	-3.122.900,00	38,68	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.092.900,00	1.970.000,00	-3.122.900,00	38,68	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.092.900,00	1.970.000,00	-3.122.900,00	38,68	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	318.500.000,00	270.308.766,00	-48.191.234,00	84,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	318.500.000,00	270.308.766,00	-48.191.234,00	84,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.500.000,00	270.308.766,00	-48.191.234,00	84,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	309.560.560,00	289.961.460,00	-19.599.100,00	93,66	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	309.560.560,00	289.961.460,00	-19.599.100,00	93,66	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.560.560,00	289.961.460,00	-19.599.100,00	93,66	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.114.361.050,00	2.020.376.779,00	-93.984.271,00	95,55	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.617.453.428,00	1.560.661.140,00	-56.792.288,00	96,48	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.617.453.428,00	1.560.661.140,00	-56.792.288,00	96,48	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.617.453.428,00	1.560.661.140,00	-56.792.288,00	96,48	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	341.752.212,00	320.673.729,00	-21.078.483,00	93,83	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	142.752.212,00	127.778.629,00	-14.973.583,00	89,51	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.752.212,00	127.778.629,00	-14.973.583,00	89,51	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	199.000.000,00	192.895.100,00	-6.104.900,00	96,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.000.000,00	192.895.100,00	-6.104.900,00	96,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	155.155.410,00	139.041.910,00	-16.113.500,00	89,61	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	155.155.410,00	139.041.910,00	-16.113.500,00	89,61	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.155.410,00	139.041.910,00	-16.113.500,00	89,61	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.034.965.370,00	1.973.590.900,00	-61.374.470,00	96,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	1.469.399.045,00	1.419.254.465,00	-50.144.580,00	96,58	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0001		PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	92.116.810,00	87.814.090,00	-4.302.720,00	95,32	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	92.116.810,00	87.814.090,00	-4.302.720,00	95,32	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.116.810,00	87.814.090,00	-4.302.720,00	95,32	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0002		PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	159.626.210,00	158.530.410,00	-1.095.800,00	99,31	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	159.626.210,00	158.530.410,00	-1.095.800,00	99,31	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.626.210,00	158.530.410,00	-1.095.800,00	99,31	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0003		REVIU LAPORAN KINERJA	48.013.500,00	33.709.500,00	-14.304.000,00	70,20	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	48.013.500,00	33.709.500,00	-14.304.000,00	70,20	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.013.500,00	33.709.500,00	-14.304.000,00	70,20	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0004		REVIU LAPORAN KEUANGAN	142.605.705,00	141.706.555,00	-899.150,00	99,36	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	142.605.705,00	141.706.555,00	-899.150,00	99,36	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.605.705,00	141.706.555,00	-899.150,00	99,36	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0005		PENGAWASAN UMUM DAN TEKNIS KABUPATEN/KOTA	547.158.610,00	531.179.190,00	-15.979.420,00	97,07	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	547.158.610,00	531.179.190,00	-15.979.420,00	97,07	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	547.158.610,00	531.179.190,00	-15.979.420,00	97,07	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0006		KERJASAMA PENGAWASAN INTERNAL	283.700.300,00	273.687.840,00	-10.012.460,00	96,47	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	283.700.300,00	273.687.840,00	-10.012.460,00	96,47	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.700.300,00	273.687.840,00	-10.012.460,00	96,47	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0007		MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP	196.177.910,00	192.626.880,00	-3.551.030,00	98,18	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	196.177.910,00	192.626.880,00	-3.551.030,00	98,18	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.177.910,00	192.626.880,00	-3.551.030,00	98,18	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.02		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	565.566.325,00	554.336.435,00	-11.229.890,00	98,01	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.02.0001		PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH	50.875.110,00	50.277.970,00	-597.140,00	98,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.875.110,00	50.277.970,00	-597.140,00	98,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.875.110,00	50.277.970,00	-597.140,00	98,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.02.0002		PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	514.691.215,00	504.058.465,00	-10.632.750,00	97,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	514.691.215,00	504.058.465,00	-10.632.750,00	97,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	514.691.215,00	504.058.465,00	-10.632.750,00	97,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.305.270.047,00	1.881.081.905,00	-424.188.142,00	81,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	1.591.152.632,00	1.195.488.988,00	-395.663.644,00	75,13	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.01.0001		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN	299.286.015,00	292.935.831,00	-6.350.184,00	97,87	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	299.286.015,00	292.935.831,00	-6.350.184,00	97,87	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.286.015,00	292.935.831,00	-6.350.184,00	97,87	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.01.0002		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN	1.291.866.617,00	902.553.157,00	-389.313.460,00	69,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.291.866.617,00	902.553.157,00	-389.313.460,00	69,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.291.866.617,00	902.553.157,00	-389.313.460,00	69,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.02		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	714.117.415,00	685.592.917,00	-28.524.498,00	96,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.02.0001		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	211.249.315,00	197.556.115,00	-13.693.200,00	93,51	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	211.249.315,00	197.556.115,00	-13.693.200,00	93,51	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.249.315,00	197.556.115,00	-13.693.200,00	93,51	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.02.0002		PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	141.882.800,00	138.058.072,00	-3.824.728,00	97,30	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	141.882.800,00	138.058.072,00	-3.824.728,00	97,30	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.882.800,00	138.058.072,00	-3.824.728,00	97,30	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.02.0003		KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	283.068.900,00	278.190.730,00	-4.878.170,00	98,27	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	283.068.900,00	278.190.730,00	-4.878.170,00	98,27	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.068.900,00	278.190.730,00	-4.878.170,00	98,27	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.02.0004		PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS	77.916.400,00	71.788.000,00	-6.128.400,00	92,13	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	77.916.400,00	71.788.000,00	-6.128.400,00	92,13	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.916.400,00	71.788.000,00	-6.128.400,00	92,13	
				JUMLAH BELANJA	35.944.174.832,00	34.015.253.758,00	-1.928.921.074,00	94,63	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-35.944.174.832,00	-34.015.253.758,00	1.928.921.074,00	94,63	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-35.944.174.832,00	-34.015.253.758,00	1.928.921.074,00	94,63	

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	47.248.225.245,00	44.977.304.875,38	-2.270.920.369,62	95,19	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.494.514.658,00	11.430.645.284,38	-1.063.869.373,62	91,48	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	80.596.000,00	68.353.900,00	-12.242.100,00	84,81	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	57.956.000,00	50.193.500,00	-7.762.500,00	86,60	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	57.956.000,00	50.193.500,00	-7.762.500,00	86,60	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.956.000,00	50.193.500,00	-7.762.500,00	86,60	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	22.640.000,00	18.160.400,00	-4.479.600,00	80,21	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	22.640.000,00	18.160.400,00	-4.479.600,00	80,21	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.640.000,00	18.160.400,00	-4.479.600,00	80,21	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	9.075.753.924,00	8.315.619.413,00	-760.134.511,00	91,62	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	9.075.753.924,00	8.315.619.413,00	-760.134.511,00	91,62	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.075.753.924,00	8.315.619.413,00	-760.134.511,00	91,62	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	9.014.553.924,00	8.260.669.413,00	-753.884.511,00	91,63	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.200.000,00	54.950.000,00	-6.250.000,00	89,78	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	601.359.824,00	455.062.645,00	-146.297.179,00	75,67	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	14.921.500,00	14.592.262,00	-329.238,00	97,79	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.921.500,00	14.592.262,00	-329.238,00	97,79	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.921.500,00	14.592.262,00	-329.238,00	97,79	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	240.117.300,00	205.901.000,00	-34.216.300,00	85,75	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.140.000,00	12.428.000,00	-5.712.000,00	68,51	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.140.000,00	12.428.000,00	-5.712.000,00	68,51	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	221.977.300,00	193.473.000,00	-28.504.300,00	87,15	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	221.977.300,00	193.473.000,00	-28.504.300,00	87,15	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	77.229.424,00	76.655.996,00	-573.428,00	99,25	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	77.229.424,00	76.655.996,00	-573.428,00	99,25	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.229.424,00	76.655.996,00	-573.428,00	99,25	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	35.880.500,00	28.065.687,00	-7.814.813,00	78,21	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	35.880.500,00	28.065.687,00	-7.814.813,00	78,21	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.880.500,00	28.065.687,00	-7.814.813,00	78,21	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.996.100,00	3.796.500,00	-1.199.600,00	75,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.996.100,00	3.796.500,00	-1.199.600,00	75,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.996.100,00	3.796.500,00	-1.199.600,00	75,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	228.215.000,00	126.051.200,00	-102.163.800,00	55,23	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	228.215.000,00	126.051.200,00	-102.163.800,00	55,23	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.215.000,00	126.051.200,00	-102.163.800,00	55,23	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	711.329.240,00	657.406.796,00	-53.922.444,00	92,41	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.07.0005		PENGADAAN MEBEL	294.406.500,00	278.750.814,00	-15.655.686,00	94,68	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	294.406.500,00	278.750.814,00	-15.655.686,00	94,68	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	294.406.500,00	278.750.814,00	-15.655.686,00	94,68	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	416.922.740,00	378.655.982,00	-38.266.758,00	90,82	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	416.922.740,00	378.655.982,00	-38.266.758,00	90,82	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	416.922.740,00	378.655.982,00	-38.266.758,00	90,82	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	981.753.870,00	950.943.759,00	-30.810.111,00	96,86	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	11.994.800,00	7.640.000,00	-4.354.800,00	63,69	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.994.800,00	7.640.000,00	-4.354.800,00	63,69	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.994.800,00	7.640.000,00	-4.354.800,00	63,69	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	139.100.000,00	115.091.349,00	-24.008.651,00	82,74	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	139.100.000,00	115.091.349,00	-24.008.651,00	82,74	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.100.000,00	115.091.349,00	-24.008.651,00	82,74	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	830.659.070,00	828.212.410,00	-2.446.660,00	99,70	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	830.659.070,00	828.212.410,00	-2.446.660,00	99,70	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	830.659.070,00	828.212.410,00	-2.446.660,00	99,70	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.043.721.800,00	983.258.771,38	-60.463.028,62	94,20	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN [illegible]	804.100.000,00	759.665.814,00	-44.434.186,00	94,47	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	804.100.000,00	759.665.814,00	-44.434.186,00	94,47	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	804.100.000,00	759.665.814,00	-44.434.186,00	94,47	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	19.960.000,00	18.697.000,00	-1.263.000,00	93,67	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	19.960.000,00	18.697.000,00	-1.263.000,00	93,67	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.960.000,00	18.697.000,00	-1.263.000,00	93,67	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	181.981.800,00	169.208.079,38	-12.773.720,62	92,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	181.981.800,00	169.208.079,38	-12.773.720,62	92,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.981.800,00	169.208.079,38	-12.773.720,62	92,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	37.680.000,00	35.687.878,00	-1.992.122,00	94,71	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	37.680.000,00	35.687.878,00	-1.992.122,00	94,71	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.680.000,00	35.687.878,00	-1.992.122,00	94,71	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	4.671.570.389,00	4.109.923.437,00	-561.646.952,00	87,97	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER [illegible]	4.671.570.389,00	4.109.923.437,00	-561.646.952,00	87,97	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	1.223.475.089,00	955.245.024,00	-268.230.065,00	78,07	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.223.475.089,00	955.245.024,00	-268.230.065,00	78,07	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.223.475.089,00	955.245.024,00	-268.230.065,00	78,07	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0012		PEMBENTUKAN PASKIBRAKA	3.448.095.300,00	3.154.678.413,00	-293.416.887,00	91,49	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	3.448.095.300,00	3.154.678.413,00	-293.416.887,00	91,49	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.448.095.300,00	3.154.678.413,00	-293.416.887,00	91,49	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN [illegible]	24.179.333.089,00	24.123.108.660,00	-56.224.429,00	99,76	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN	24.179.333.089,00	24.123.108.660,00	-56.224.429,00	99,76	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH,	24.179.333.089,00	24.123.108.660,00	-56.224.429,00	99,76	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	24.179.333.089,00	24.123.108.660,00	-56.224.429,00	99,76	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.753.089,00	281.528.660,00	-56.224.429,00	83,35	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	23.841.580.000,00	23.841.580.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	990.317.000,00	953.171.123,00	-37.145.877,00	96,24	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI [illegible]	990.317.000,00	953.171.123,00	-37.145.877,00	96,24	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	990.317.000,00	953.171.123,00	-37.145.877,00	96,24	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	990.317.000,00	953.171.123,00	-37.145.877,00	96,24	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.317.000,00	153.171.123,00	-37.145.877,00	80,48	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	801.214.207,00	734.658.207,00	-66.556.000,00	91,69	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	801.214.207,00	734.658.207,00	-66.556.000,00	91,69	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	801.214.207,00	734.658.207,00	-66.556.000,00	91,69	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	801.214.207,00	734.658.207,00	-66.556.000,00	91,69	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.214.207,00	234.658.207,00	-66.556.000,00	77,90	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	4.111.275.902,00	3.625.798.164,00	-485.477.738,00	88,19	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	4.111.275.902,00	3.625.798.164,00	-485.477.738,00	88,19	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG	3.152.903.802,00	3.097.322.412,00	-55.581.390,00	98,23	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.152.903.802,00	3.097.322.412,00	-55.581.390,00	98,23	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.278.802,00	262.697.412,00	-55.581.390,00	82,53	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	2.834.625.000,00	2.834.625.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0006		PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI	958.372.100,00	528.475.752,00	-429.896.348,00	55,14	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	958.372.100,00	528.475.752,00	-429.896.348,00	55,14	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	958.372.100,00	528.475.752,00	-429.896.348,00	55,14	
				JUMLAH BELANJA	47.248.225.245,00	44.977.304.875,38	-2.270.920.369,62	95,19	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-47.248.225.245,00	-44.977.304.875,38	2.270.920.369,62	95,19	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-47.248.225.245,00	-44.977.304.875,38	2.270.920.369,62	95,19	

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN I.4
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI BALI

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.863.674.253.781,00	2.607.441.349.008,39	657.181.888.921,00	594.271.952.574,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.694.500.679.311,00	1.545.818.657.031,58	239.116.866.636,00	231.596.861.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.691.875.652.811,00	1.543.343.715.685,58	239.007.138.336,00	231.505.803.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.306.415.474.186,00	1.174.225.306.873,00	705.529.200,00	656.940.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	185.200.900,00	110.553.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.429.500,00	50.693.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	107.771.400,00	59.860.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.293.262.292.519,00	1.163.004.750.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.291.832.286.219,00	1.161.616.450.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.284.575.800,00	1.255.478.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	145.430.500,00	132.822.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	766.145.000,00	734.137.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	766.145.000,00	734.137.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.193.400,00	67.066.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	68.193.400,00	67.066.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	723.915.410,00	568.074.537,00	405.529.200,00	381.906.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	211.303.160,00	180.590.584,00	405.529.200,00	381.906.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.000.000,00	89.357.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.840.000,00	8.916.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	31.526.250,00	26.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.246.000,00	262.858.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.509.311.957,00	7.007.293.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	978.222.150,00	807.419.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.531.089.807,00	6.199.873.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.900.415.000,00	2.733.431.433,00	300.000.000,00	275.033.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	954.685.000,00	812.833.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.677.200.000,00	1.653.140.421,00	300.000.000,00	275.033.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	268.530.000,00	267.457.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	385.399.859.525,00	369.072.446.792,58	238.301.609.136,00	230.848.863.225,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	168.333.312.573,00	158.792.872.662,00	125.182.239.901,00	121.841.627.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	0,00	0,00	68.000.000.000,00	66.250.897.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	0,00	0,00	3.000.000.000,00	2.887.436.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	0,00	1.980.000.000,00	1.910.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0,00	0,00	382.366.000,00	381.824.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	4.704.150.000,00	4.424.232.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.768.028.800,00	2.240.371.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	27.034.056.126,00	26.859.488.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	77.120.000,00	73.643.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	125.380.000,00	113.656.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	125.192.921.247,00	120.352.352.988,00	40.233.248.701,00	39.506.078.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	57.409.900,00	54.025.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	76.299.900,00	68.166.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	44.690.000,00	41.927.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	0,00	8.871.116.400,00	8.533.684.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	86.942.800,00	80.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	8.166.313.800,00	4.484.791.357,00	2.715.508.800,00	2.371.226.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	198.754.512.184,00	193.294.805.983,58	106.797.432.660,00	103.114.066.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	0,00	0,00	22.612.384.000,00	21.545.770.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	0,00	11.150.616.000,00	10.642.894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	7.022.700,00	7.020.000,00	3.907.903.200,00	3.623.351.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	21.712.000.000,00	21.701.643.273,58	25.658.185.000,00	25.526.123.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	5.338.581.400,00	5.082.462.135,00	295.164.000,00	291.757.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.718.208.400,00	1.667.194.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	16.854.550.194,00	14.554.422.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	88.862.000,00	59.915.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	460.992.000,00	440.815.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	150.140.469.730,00	147.572.810.197,00	32.139.082.140,00	31.906.049.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	51.250.000,00	49.596.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	37.600.000,00	34.193.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	68.960.000,00	65.710.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	0,00	4.012.000.000,00	3.944.381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	2.189.441.560,00	1.979.192.580,00	7.022.098.320,00	5.633.738.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	86.574.200,00	79.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	18.312.034.768,00	16.984.768.147,00	6.321.936.575,00	5.893.169.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	0,00	1.880.000.000,00	1.751.895.534,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	3.523.966.200,00	3.346.270.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.322.189.000,00	766.274.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	3.487.687.843,00	3.174.730.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	157.959.500,00	130.387.962,00	594.364.800,00	549.316.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	8.734.723.025,00	8.525.047.562,00	2.529.571.775,00	2.379.604.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	15.547.600,00	15.025.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	90.910.000,00	80.278.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	16.171.600,00	15.382.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	600.000.000,00	586.912.000,00	1.318.000.000,00	1.212.352.297,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	362.880.000,00	344.459.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	60.319.100,00	45.962.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	60.319.100,00	45.962.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	26.079.400,00	23.321.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	34.239.700,00	22.640.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0001		UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	1.887.839.765,00	1.822.237.536,00	109.728.300,00	91.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0001	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	724.477.765,00	698.950.372,00	109.728.300,00	91.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0001	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.073.500,00	48.028.807,00	109.728.300,00	91.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0001	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.355.900,00	19.718.312,00	109.728.300,00	91.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0001	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.499.600,00	2.804.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0001	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.218.000,00	25.506.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0001	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	556.164.265,00	556.164.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0001	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	556.164.265,00	556.164.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0001	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.240.000,00	94.757.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0001	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.400.000,00	85.532.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0001	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	1.440.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0001	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.400.000,00	7.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0001	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.163.362.000,00	1.123.287.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0001	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	685.647.000,00	664.484.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0001	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	94.290.000,00	93.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0001	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	14.040.000,00	13.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0001	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	31.636.000,00	28.665.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0001	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	545.681.000,00	528.378.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0001	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	477.715.000,00	458.803.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0001	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	77.760.000,00	77.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0001	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	13.950.000,00	11.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0001	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	31.374.000,00	30.870.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0001	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	354.631.000,00	339.110.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0002		UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	737.186.735,00	652.703.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0002	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	575.748.635,00	509.135.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0002	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.440.600,00	27.403.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0002	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.613.000,00	6.162.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0002	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.547.600,00	3.960.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0002	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0002	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	452.498.035,00	423.198.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0002	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	452.498.035,00	423.198.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0002	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.810.000,00	58.534.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0002	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.810.000,00	58.534.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0002	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	102.298.100,00	95.798.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0002	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	67.654.800,00	65.283.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0002	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	67.654.800,00	65.283.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0002	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	34.643.300,00	30.515.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0002	1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	34.643.300,00	30.515.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0002	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	59.140.000,00	47.768.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0002	1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	59.140.000,00	47.768.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0002	1.01.06.1.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	59.140.000,00	47.768.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	715.292.790.342,00	642.680.520.328,89	109.012.440.325,00	95.745.819.682,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	327.744.235.157,00	303.024.409.707,83	876.729.000,00	705.302.426,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	297.910.684.792,00	278.915.232.098,83	876.729.000,00	705.302.426,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.124.505,00	65.698.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.666.800,00	36.366.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.457.705,00	29.332.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	289.547.046.672,00	272.567.252.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	289.281.147.773,00	272.328.048.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	265.898.899,00	239.204.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	899.513.194,00	601.226.047,00	776.729.000,00	608.512.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.583.700,00	4.160.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	285.122.700,00	202.323.278,00	776.729.000,00	608.512.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	273.968.394,00	267.147.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	90.081.400,00	66.186.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.000.000,00	8.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	232.757.000,00	53.103.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.066.828.921,00	5.124.759.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	484.500.000,00	232.926.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.582.328.921,00	4.891.832.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.316.171.500,00	556.295.781,83	100.000.000,00	96.790.046,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	515.400.000,00	224.796.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	141.169.500,00	77.988.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	659.602.000,00	253.510.372,83	100.000.000,00	96.790.046,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	28.830.653.725,00	23.161.768.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	28.560.686.100,00	22.910.654.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	186.176.380,00	165.773.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	70.891.400,00	69.766.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	149.964.615,00	144.295.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	137.301.520,00	136.657.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	204.191.520,00	198.944.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	90.493.200,00	90.027.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	134.356.492,00	134.095.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.268.289.953,00	1.823.510.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	53.127.000,00	46.017.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	24.657.838.700,00	19.572.140.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	112.280.000,00	72.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	399.741.520,00	383.270.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	58.533.800,00	58.515.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	37.500.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	73.251.405,00	66.817.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	73.251.405,00	66.817.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	196.716.220,00	184.295.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	101.876.540,00	101.445.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	94.839.680,00	82.849.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	212.162.760,00	203.670.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	156.328.860,00	151.698.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	156.328.860,00	151.698.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	55.833.900,00	51.971.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	44.313.900,00	40.451.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	233.749.065,00	233.599.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	168.145.865,00	167.995.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	168.145.865,00	167.995.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	65.603.200,00	65.603.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	65.603.200,00	65.603.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	556.984.815,00	510.139.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	308.484.615,00	303.870.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	308.484.615,00	303.870.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	227.375.200,00	185.446.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	227.375.200,00	185.446.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	21.125.000,00	20.822.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	21.125.000,00	20.822.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	5.441.792.301,00	5.116.837.798,90	355.295.800,00	253.971.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.198.951.792,00	4.882.327.688,90	355.295.800,00	253.971.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	192.082.100,00	176.191.700,00	110.595.800,00	97.614.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.924.000,00	17.923.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.316.000,00	175.000,00	110.595.800,00	97.614.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	155.458.100,00	141.362.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.134.000,00	5.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.109.474.692,00	965.766.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	363.900.000,00	234.588.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	745.574.692,00	731.178.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.142.095.000,00	1.073.846.038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.175.000,00	23.479.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.920.000,00	34.337.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.050.000.000,00	1.016.029.130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.755.300.000,00	2.666.523.722,30	244.700.000,00	156.356.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.755.300.000,00	2.666.523.722,30	244.700.000,00	156.356.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	242.840.509,00	234.510.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	242.840.509,00	234.510.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	242.840.509,00	234.510.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa	7.841.525.316,00	5.372.818.416,68	1.841.625.000,00	81.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.702.516.516,00	5.233.809.616,68	1.841.625.000,00	81.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	455.945.300,00	384.942.339,00	21.479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.900.000,00	32.301.000,00	21.479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	410.045.300,00	352.641.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.519.547.216,00	1.329.684.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	644.000.000,00	513.286.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	875.547.216,00	816.397.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	347.170.000,00	267.511.237,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.100.000,00	74.180.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146.070.000,00	101.505.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	93.000.000,00	91.825.242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	5.379.854.000,00	3.251.671.745,50	1.820.146.000,00	81.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.379.854.000,00	3.251.671.745,50	1.820.146.000,00	81.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	139.008.800,00	139.008.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	139.008.800,00	139.008.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.1.01.0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	139.008.800,00	139.008.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional	4.714.838.579,00	4.019.823.497,00	4.252.340.930,00	3.594.193.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.747.459.895,00	1.547.094.322,00	2.870.278.054,00	2.336.904.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	324.927.500,00	295.448.760,00	1.555.273.114,00	1.210.596.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.015.500,00	4.761.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.127.400,00	60.849.400,00	1.555.273.114,00	1.210.596.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	202.695.800,00	199.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.790.800,00	13.969.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.500.000,00	652.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.798.000,00	15.770.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.038.042.395,00	995.483.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.500.000,00	67.243.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	939.542.395,00	928.239.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	384.490.000,00	256.162.292,00	1.315.004.940,00	1.126.308.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	263.900.000,00	160.235.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.490.000,00	31.327.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	68.100.000,00	64.598.986,00	1.315.004.940,00	1.126.308.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.967.378.684,00	2.472.729.175,00	1.382.062.876,00	1.257.289.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.967.378.684,00	2.472.729.175,00	1.382.062.876,00	1.257.289.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	64.996.400,00	64.971.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	98.034.105,00	93.757.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	805.928.172,00	721.561.120,00	5.800.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.998.420.007,00	1.592.438.910,00	1.376.262.876,00	1.252.609.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		RSUD Bali Mandara	213.786.906.414,00	195.484.226.993,96	65.870.349.205,00	60.073.517.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	213.786.906.414,00	195.484.226.993,96	11.614.763.000,00	6.057.163.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.401.669.414,00	24.230.316.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.401.669.414,00	24.230.316.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	188.385.237.000,00	171.253.910.497,96	11.614.763.000,00	6.057.163.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	188.385.237.000,00	171.253.910.497,96	11.614.763.000,00	6.057.163.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	0,00	54.255.586.205,00	54.016.353.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	0,00	0,00	54.255.586.205,00	54.016.353.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	0,00	0,00	45.978.212.000,00	45.923.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	0,00	0,00	8.277.374.205,00	8.092.853.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		Rumah Sakit Jiwa	34.504.611.113,00	27.846.998.895,37	20.401.649.570,00	17.736.889.713,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.447.947.013,00	27.821.936.495,37	3.798.500.000,00	2.825.648.288,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.246.447.013,00	9.798.278.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.114.110.402,00	901.268.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.132.336.611,00	8.897.009.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	24.201.500.000,00	18.023.658.236,37	3.798.500.000,00	2.825.648.288,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	24.201.500.000,00	18.023.658.236,37	3.798.500.000,00	2.825.648.288,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	56.664.100,00	25.062.400,00	16.603.149.570,00	14.911.241.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	56.664.100,00	25.062.400,00	16.603.149.570,00	14.911.241.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	56.664.100,00	25.062.400,00	16.603.149.570,00	14.911.241.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		Rumah Sakit Mata Bali Mandara	81.854.455.000,00	74.175.736.418,33	11.145.545.000,00	9.806.066.079,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	81.854.455.000,00	74.175.736.418,33	11.145.545.000,00	9.806.066.079,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	81.854.455.000,00	74.175.736.418,33	11.145.545.000,00	9.806.066.079,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	81.854.455.000,00	74.175.736.418,33	11.145.545.000,00	9.806.066.079,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan	8.823.817.446,00	6.147.577.168,00	1.250.780.020,00	1.029.008.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.210.142.552,00	2.577.990.749,00	1.227.718.820,00	1.018.052.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	462.201.480,00	388.101.700,00	221.592.620,00	186.802.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.575.400,00	9.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.799.580,00	30.733.500,00	221.592.620,00	186.802.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	408.786.200,00	341.215.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.720.300,00	2.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	1.006.126.200,00	831.250.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	56.126.200,00	52.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	950.000.000,00	778.780.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.768.299.972,00	1.323.646.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.082.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	780.000.000,00	379.120.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	983.217.972,00	941.926.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	979.641.100,00	866.242.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.800.000,00	36.205.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	57.000.000,00	34.315.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	389.841.100,00	315.287.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	492.000.000,00	480.433.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.613.674.894,00	3.569.586.419,00	23.061.200,00	10.955.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	4.753.236.430,00	2.925.160.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	360.783.000,00	179.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.392.453.430,00	2.745.476.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	860.438.464,00	644.426.265,00	23.061.200,00	10.955.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	860.438.464,00	644.426.265,00	23.061.200,00	10.955.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya	30.580.609.016,00	21.492.091.432,82	3.018.125.800,00	2.465.599.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.092.804.974,00	20.462.492.114,42	1.905.333.700,00	1.517.944.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	392.046.850,00	241.946.591,00	885.688.200,00	717.349.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	320.930.850,00	229.283.351,00	885.688.200,00	717.349.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.116.000,00	12.663.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98.219.500,00	0,00	119.645.500,00	114.177.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	98.219.500,00	0,00	119.645.500,00	114.177.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	911.753.000,00	122.502.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	325.000.000,00	122.502.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	586.753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	825.900.000,00	206.787.541,00	900.000.000,00	686.417.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	174.000.000,00	104.661.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	271.900.000,00	102.126.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	380.000.000,00	0,00	900.000.000,00	686.417.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	23.864.885.624,00	19.891.255.022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	23.864.885.624,00	19.891.255.022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.432.604.682,00	996.399.318,40	1.112.792.100,00	947.655.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	4.432.604.682,00	996.399.318,40	1.112.792.100,00	947.655.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	831.470.482,00	352.880.971,00	1.112.792.100,00	947.655.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.601.134.200,00	643.518.347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	55.199.360,00	33.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	55.199.360,00	33.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	55.199.360,00	33.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	333.470.544.168,00	306.616.116.488,00	294.584.453.822,00	253.472.976.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0001		UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	1.490.574.327,00	1.326.613.015,00	2.132.255.500,00	1.602.158.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0001	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	893.596.472,00	794.573.082,00	114.255.500,00	48.540.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0001	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.556.900,00	82.009.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0001	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.782.000,00	10.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0001	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.930.200,00	15.085.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0001	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	31.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0001	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.638.700,00	3.425.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0001	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.446.000,00	3.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0001	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.500.000,00	11.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0001	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0001	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	114.255.500,00	48.540.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0001	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	66.640.000,00	25.641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0001	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	47.615.500,00	22.899.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0001	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221.193.200,00	178.612.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0001	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.193.200,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0001	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000,00	40.327.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0001	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	140.000.000,00	137.524.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0001	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	578.846.372,00	533.950.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0001	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	263.965.060,00	225.154.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0001	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.960.000,00	22.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0001	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	290.921.312,00	286.411.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0001	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	596.977.855,00	532.039.933,00	2.018.000.000,00	1.553.618.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0001	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	596.977.855,00	532.039.933,00	2.018.000.000,00	1.553.618.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0001	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	596.977.855,00	532.039.933,00	2.018.000.000,00	1.553.618.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0002		UPTD Pengelolaan Air Minum	34.193.724.697,00	29.775.221.019,00	9.024.994.925,00	8.539.900.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0002	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	34.193.724.697,00	29.775.221.019,00	9.024.994.925,00	8.539.900.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0002	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	34.193.724.697,00	29.775.221.019,00	9.024.994.925,00	8.539.900.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0002	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	34.193.724.697,00	29.775.221.019,00	9.024.994.925,00	8.539.900.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0003		UPTD Pengelolaan Air Limbah	13.855.072.150,00	12.645.755.320,00	4.485.000.000,00	2.664.330.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0003	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	13.855.072.150,00	12.645.755.320,00	4.485.000.000,00	2.664.330.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0003	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	13.855.072.150,00	12.645.755.320,00	4.485.000.000,00	2.664.330.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0003	1.03.05.1.01.0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	13.855.072.150,00	12.645.755.320,00	4.485.000.000,00	2.664.330.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	283.931.172.994,00	262.868.527.134,00	278.942.203.397,00	240.666.587.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46.219.694.129,00	41.997.994.652,00	531.921.300,00	497.327.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	451.394.144,00	349.706.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	242.784.732,00	206.610.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	208.609.412,00	143.095.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.433.492.915,00	38.128.273.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41.433.492.915,00	38.128.273.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.128.840.720,00	443.452.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.172.600,00	18.177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.485.000,00	42.401.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.820.120,00	50.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	66.734.000,00	47.812.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.816.000,00	14.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	52.250.000,00	46.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	863.563.000,00	223.468.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.960.000,00	8.991.000,00	531.921.300,00	497.327.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	82.638.800,00	79.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.960.000,00	8.991.000,00	449.282.500,00	417.962.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.042.456.040,00	1.000.097.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.190.600,00	4.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	436.600.000,00	424.651.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.770.000,00	49.201.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	548.895.440,00	521.664.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.150.550.310,00	2.067.474.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.527.199.476,00	1.453.616.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	143.863.115,00	136.352.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	479.487.719,00	477.505.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4.807.210.059,00	4.546.576.437,00	22.147.233.320,00	19.623.829.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	563.730.800,00	547.602.200,00	12.036.340.420,00	10.129.571.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	216.563.500,00	209.303.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	23.200.000,00	22.369.300,00	11.270.000.000,00	9.403.592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	295.353.300,00	288.699.750,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	9.224.200,00	8.747.100,00	199.992.000,00	199.456.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	19.389.800,00	18.483.000,00	551.348.420,00	526.522.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.243.479.259,00	3.998.974.237,00	10.110.892.900,00	9.494.258.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	115.642.315,00	92.630.965,00	9.411.442.900,00	8.852.580.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.354.753.009,00	3.252.363.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	773.083.935,00	653.979.509,00	699.450.000,00	641.677.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.545.058.749,00	1.391.375.233,00	29.515.550.155,00	23.171.395.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.545.058.749,00	1.391.375.233,00	29.515.550.155,00	23.171.395.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.517.285.649,00	1.373.224.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	27.773.100,00	18.150.290,00	29.515.550.155,00	23.171.395.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	75.956.400,00	68.308.752,00	3.350.000.552,00	2.401.645.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	75.956.400,00	68.308.752,00	3.350.000.552,00	2.401.645.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	17.010.000,00	10.919.615,00	3.150.000.552,00	2.218.828.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	58.946.400,00	57.389.137,00	200.000.000,00	182.817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	2.762.994.300,00	2.177.847.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	2.762.994.300,00	2.177.847.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.07.1.01.0031	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	2.762.994.300,00	2.177.847.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	197.670.767.300,00	184.189.803.926,00	12.728.670.000,00	11.615.033.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	197.670.767.300,00	184.189.803.926,00	12.728.670.000,00	11.615.033.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	193.493.980.800,00	181.386.450.397,00	10.428.670.000,00	9.519.760.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.176.786.500,00	2.803.353.529,00	2.300.000.000,00	2.095.273.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	28.739.524.851,00	26.674.463.390,00	210.668.828.070,00	183.357.354.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	28.739.524.851,00	26.674.463.390,00	210.668.828.070,00	183.357.354.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	79.206.000,00	64.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	28.800.000,00	13.732.000,00	23.747.843.413,00	22.873.885.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	0,00	0,00	58.369.753.120,00	55.719.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	23.848.378.226,00	22.070.118.421,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	3.600.000,00	3.520.000,00	106.166.330.112,00	85.356.393.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	332.163.837,00	298.170.377,00	15.767.471.425,00	13.979.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.691.772.000,00	2.580.009.590,00	6.217.430.000,00	5.428.232.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.655.604.788,00	1.544.683.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan	100.000.000,00	99.707.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.162.070.534,00	1.012.607.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	770.597.107,00	666.816.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	770.597.107,00	666.816.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	391.473.427,00	345.791.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	131.915.802,00	92.292.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	259.557.625,00	253.498.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	947.896.672,00	809.549.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	36.792.100,00	17.937.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.01.0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	36.792.100,00	17.937.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	231.192.935,00	171.189.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	231.192.935,00	171.189.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	154.251.025,00	135.868.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	114.918.425,00	101.373.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	39.332.600,00	34.495.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	525.660.612,00	484.554.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.04.0007	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	140.220.800,00	132.270.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	385.439.812,00	352.284.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8.687.995.075,00	8.379.739.825,00	725.527.580,00	702.773.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.687.995.075,00	8.379.739.825,00	725.527.580,00	702.773.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	540.532.750,00	533.722.183,00	725.527.580,00	702.773.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	200.230.925,00	196.086.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	88.481.225,00	88.418.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.02.1.01.0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	111.749.700,00	107.668.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	340.301.825,00	337.635.373,00	725.527.580,00	702.773.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.02.1.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	340.301.825,00	337.635.373,00	725.527.580,00	702.773.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6.543.576.100,00	6.407.990.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	6.543.576.100,00	6.407.990.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	5.552.140.100,00	5.474.092.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	991.436.000,00	933.897.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.603.886.225,00	1.438.027.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.603.886.225,00	1.438.027.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	358.918.400,00	327.729.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.173.894.825,00	1.079.190.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	71.073.000,00	31.107.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	79.560.696.636,00	74.204.546.390,92	8.452.956.093,00	7.583.675.698,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		Satuan Polisi Pamong Praja	53.625.717.692,00	50.835.687.792,00	595.472.700,00	438.364.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.406.706.127,00	25.061.432.788,00	595.472.700,00	438.364.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.000.000,00	17.930.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.000.000,00	13.422.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	4.508.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.004.273.585,00	20.864.586.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.004.273.585,00	20.864.586.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	372.235.890,00	255.018.064,00	491.487.400,00	352.439.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.706.800,00	31.088.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.802.800,00	46.017.310,00	491.487.400,00	352.439.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106.033.390,00	94.512.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.301.900,00	7.788.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.391.000,00	75.610.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	103.985.300,00	85.924.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	103.985.300,00	85.924.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	895.950.767,00	850.636.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.998.700,00	1.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.000.000,00	128.006.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.720.000,00	43.474.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	679.232.067,00	677.246.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.113.245.885,00	3.073.259.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.839.245.885,00	2.808.249.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	75.000.000,00	72.788.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.000.000,00	192.221.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26.219.011.565,00	25.774.255.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	24.597.104.492,00	24.243.432.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	42.720.905,00	38.719.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	29.999.900,00	778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	20.450.348.273,00	20.443.954.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	81.949.400,00	53.005.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	19.993.200,00	5.262.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	87.277.405,00	62.734.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	3.648.199.507,00	3.452.623.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	236.615.902,00	186.354.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.549.907.073,00	1.498.616.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12.181.200,00	12.179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1.233.056.463,00	1.212.569.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	304.669.410,00	273.867.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	72.000.000,00	32.205.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	72.000.000,00	32.205.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22.677.482.470,00	20.652.524.629,92	3.460.675.424,00	3.098.604.142,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.896.633.370,00	17.655.918.591,92	3.161.484.024,00	2.826.388.940,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.922.000,00	44.120.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.621.000,00	15.700.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54.301.000,00	28.420.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.490.760.948,00	13.929.859.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.490.760.948,00	13.929.859.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73.504.200,00	66.533.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	73.504.200,00	66.533.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	419.589.624,00	272.935.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.982.800,00	7.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.047.800,00	74.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	86.229.424,00	86.216.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.258.600,00	12.457.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000,00	5.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181.071.000,00	86.706.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.687.400,00	13.515.690,00	847.979.300,00	784.788.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.687.400,00	13.515.690,00	847.979.300,00	784.788.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.295.609.398,00	1.094.008.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	258.000.000,00	124.307.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.037.609.398,00	969.701.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.507.559.800,00	2.234.945.152,92	2.313.504.724,00	2.041.600.840,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.287.969.800,00	2.070.098.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.380.000,00	13.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	99.633.280,92	2.313.504.724,00	2.041.600.840,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	14.919.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82.210.000,00	37.042.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.780.849.100,00	2.996.606.038,00	299.191.400,00	272.215.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	109.275.000,00	103.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	109.275.000,00	103.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.167.189.600,00	764.166.441,00	299.191.400,00	272.215.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	380.586.200,00	131.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	8.175.000,00	3.318.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	4.500.000,00	2.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi	21.450.000,00	13.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	283.594.200,00	271.995.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	146.415.000,00	138.559.901,00	299.191.400,00	272.215.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	322.469.200,00	202.291.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.905.815.900,00	1.798.641.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.657.773.900,00	1.572.561.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	248.042.000,00	226.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	598.568.600,00	330.299.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	154.667.000,00	143.905.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	28.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	103.478.000,00	85.095.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	208.097.500,00	29.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	13.590.000,00	8.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	89.756.100,00	62.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0001		UPTD Pengendalian Bencana Daerah	3.257.496.474,00	2.716.333.969,00	4.396.807.969,00	4.046.706.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0001	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.694.234.574,00	1.334.644.487,00	1.623.867.900,00	1.312.721.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0001	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.839.100,00	56.938.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0001	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.846.800,00	16.758.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0001	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.992.300,00	25.786.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0001	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.000.000,00	14.392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0001	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.829.200,00	21.506.250,00	1.623.867.900,00	1.312.721.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0001	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.829.200,00	21.506.250,00	1.623.867.900,00	1.312.721.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0001	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.039.108.674,00	872.403.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0001	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.000.000,00	117.949.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0001	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	799.108.674,00	754.453.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0001	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.457.600,00	383.797.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0001	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.800.000,00	118.181.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0001	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.000.000,00	9.997.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0001	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	312.657.600,00	255.617.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0001	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.563.261.900,00	1.381.689.482,00	2.772.940.069,00	2.733.985.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0001	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	960.581.900,00	785.090.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0001	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	751.322.000,00	666.769.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0001	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	209.259.900,00	118.321.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0001	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	602.680.000,00	596.598.512,00	2.772.940.069,00	2.733.985.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0001	1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	602.680.000,00	596.598.512,00	2.772.940.069,00	2.733.985.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	32.161.548.249,00	29.741.768.944,00	5.289.644.465,00	5.169.845.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	27.057.807.508,00	25.000.086.798,00	1.836.219.465,00	1.824.773.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.898.045.708,00	20.091.381.971,00	1.836.219.465,00	1.824.773.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.904.600,00	30.536.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.717.600,00	4.999.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.952.200,00	2.971.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.234.800,00	22.565.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.959.955.419,00	17.285.612.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.959.955.419,00	17.285.612.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	207.933.100,00	166.861.218,00	140.288.640,00	129.645.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.508.200,00	6.950.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	140.288.640,00	129.645.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.022.700,00	91.991.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.647.200,00	1.803.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.250.000,00	7.700.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.505.000,00	58.415.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	668.462.484,00	625.571.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000,00	137.176.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	488.462.484,00	488.395.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.026.790.105,00	1.982.799.368,00	1.695.930.825,00	1.695.127.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.189.080.364,00	1.151.961.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	1.695.930.825,00	1.695.127.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	787.709.741,00	780.837.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	123.193.100,00	105.781.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.484.600,00	3.448.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3.484.600,00	3.448.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	119.708.500,00	102.333.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	78.398.500,00	62.373.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	41.310.000,00	39.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.309.759.900,00	4.097.553.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	2.833.626.800,00	2.823.081.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	57.784.600,00	56.220.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	120.325.600,00	119.977.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	2.500.000.000,00	2.492.087.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	155.516.600,00	154.796.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	840.468.300,00	797.362.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	600.647.100,00	584.381.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	226.861.200,00	200.283.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	12.960.000,00	12.697.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	456.825.400,00	368.609.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	151.012.500,00	149.462.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	14.352.200,00	13.828.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	30.570.600,00	29.664.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	260.890.100,00	175.654.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	178.839.400,00	108.499.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	19.999.400,00	13.344.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	158.840.000,00	95.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	55.758.600,00	54.263.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	17.136.600,00	16.859.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	17.136.600,00	16.859.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	38.622.000,00	37.403.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	29.142.000,00	27.996.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9.480.000,00	9.407.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	341.811.800,00	333.582.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	341.811.800,00	333.582.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.240.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	335.331.800,00	332.622.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	329.238.400,00	317.523.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	329.238.400,00	317.523.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	329.238.400,00	317.523.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001		UPTD Pelayanan Sosial	5.103.740.741,00	4.741.682.146,00	3.453.425.000,00	3.345.072.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.879.622.541,00	1.714.536.668,00	3.453.425.000,00	3.345.072.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	172.770.200,00	170.932.900,00	169.028.000,00	166.455.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.813.400,00	9.813.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	169.028.000,00	166.455.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	159.941.800,00	158.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.015.000,00	2.969.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	553.321.344,00	510.571.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216.100.000,00	182.772.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	337.221.344,00	327.798.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.153.530.997,00	1.033.032.598,00	3.284.397.000,00	3.178.616.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	263.322.984,00	165.652.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	195.456.599,00	3.284.397.000,00	3.178.616.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	690.208.013,00	671.923.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.224.118.200,00	3.027.145.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	1.915.961.200,00	1.802.056.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	91.401.500,00	91.087.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	1.478.250.000,00	1.455.545.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	89.750.000,00	86.122.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	21.680.300,00	21.577.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	125.759.400,00	108.274.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100.000.000,00	30.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	9.120.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.308.157.000,00	1.225.088.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	996.450.000,00	973.497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	70.000.000,00	67.277.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	10.000.000,00	9.903.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	164.987.000,00	143.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	6.720.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0001	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	60.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.028.407.043.725,40	966.313.497.059,52	195.518.512.794,00	90.353.881.421,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	38.501.407.334,00	35.256.055.196,00	152.010.960,00	133.674.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0001		UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	838.411.068,00	815.536.840,00	45.734.260,00	41.555.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0001	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	578.288.568,00	556.514.664,00	45.734.260,00	41.555.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0001	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.736.194,00	23.331.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0001	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.252.600,00	2.897.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0001	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.117.700,00	5.557.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0001	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.899.394,00	12.244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0001	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	986.500,00	690.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0001	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0001	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.280.000,00	1.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0001	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	45.734.260,00	41.555.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0001	2.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	45.734.260,00	41.555.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0001	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.489.192,00	251.366.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0001	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	21.193.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0001	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233.489.192,00	230.172.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0001	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.063.182,00	281.816.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0001	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62.770.000,00	59.670.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0001	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.131.673,00	31.597.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0001	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	192.161.509,00	190.548.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0001	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	260.122.500,00	251.898.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0001	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	260.122.500,00	251.898.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0001	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	260.122.500,00	251.898.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0001	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	0,00	7.123.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0001	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	0,00	7.123.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0001	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	0,00	7.123.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0002		UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	949.836.654,00	912.306.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0002	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	543.586.604,00	532.552.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0002	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.704.974,00	28.807.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0002	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.980.300,00	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0002	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.896.400,00	7.473.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0002	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.944.274,00	14.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0002	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.884.000,00	1.787.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0002	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.177.912,00	127.292.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0002	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	957.700,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0002	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	9.499.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0002	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.220.212,00	117.182.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0002	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	380.703.718,00	376.453.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0002	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	129.566.492,00	127.853.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0002	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	14.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0002	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	236.137.226,00	233.783.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0002	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	406.250.050,00	379.753.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0002	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	406.250.050,00	379.753.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.0.00.01.0002	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	406.250.050,00	379.753.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000		Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	36.713.159.612,00	33.528.211.990,00	106.276.700,00	92.118.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.818.549.062,00	31.717.673.774,00	106.276.700,00	92.118.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.929.952.568,00	29.053.142.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.929.952.568,00	29.053.142.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.853.294,00	216.387.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.992.900,00	13.879.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.179.800,00	39.035.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.133.994,00	63.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.124.600,00	10.677.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.614.000,00	7.482.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.050.000,00	5.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.758.000,00	75.798.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	106.276.700,00	92.118.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	106.276.700,00	92.118.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.138.330.607,00	1.036.837.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.873.100,00	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	394.053.040,00	298.477.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	741.404.467,00	736.529.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.509.412.593,00	1.411.305.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	755.917.508,00	727.896.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	213.265.968,00	158.688.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	540.229.117,00	524.720.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	30.997.600,00	30.874.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	30.997.600,00	30.874.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	30.997.600,00	30.874.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	99.137.100,00	92.171.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	65.223.300,00	62.730.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	65.223.300,00	62.730.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	33.913.800,00	29.440.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	33.913.800,00	29.440.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.744.175.850,00	1.667.423.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	5.566.000,00	4.450.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	5.566.000,00	4.450.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	1.738.609.850,00	1.662.972.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	25.775.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1.711.034.850,00	1.641.472.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	20.300.000,00	20.068.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	20.300.000,00	20.068.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	20.300.000,00	20.068.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.922.753.273,00	1.770.274.317,00	4.241.522.900,00	4.049.198.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1.004.276.700,00	986.746.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	169.369.300,00	156.306.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	37.085.800,00	30.063.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	37.085.800,00	30.063.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	132.283.500,00	126.243.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	132.283.500,00	126.243.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	27.906.100,00	27.405.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	27.906.100,00	27.405.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	27.906.100,00	27.405.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	9.958.600,00	9.220.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	9.958.600,00	9.220.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	9.958.600,00	9.220.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.732.700,00	2.678.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	2.732.700,00	2.678.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	2.732.700,00	2.678.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	780.566.400,00	777.429.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	36.674.800,00	35.126.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	36.674.800,00	35.126.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	743.891.600,00	742.303.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	648.691.600,00	648.506.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	95.200.000,00	93.797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	13.743.600,00	13.705.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	13.743.600,00	13.705.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	13.743.600,00	13.705.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0002		UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	918.476.573,00	783.528.111,00	4.241.522.900,00	4.049.198.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0002	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	470.036.373,00	419.461.001,00	126.266.900,00	25.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0002	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.460.800,00	20.295.210,00	26.266.900,00	25.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0002	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.528.800,00	1.507.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0002	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	26.266.900,00	25.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0002	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.932.000,00	18.787.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0002	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000,00	4.722.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0002	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000,00	4.722.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0002	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.575.573,00	394.443.782,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0002	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129.131.492,00	108.747.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0002	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	83.510.884,00	57.378.661,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0002	2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	230.933.197,00	228.317.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0002	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	377.323.200,00	299.664.851,00	4.115.256.000,00	4.024.112.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0002	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	127.407.200,00	113.602.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0002	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	127.407.200,00	113.602.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0002	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	249.916.000,00	186.062.619,00	4.115.256.000,00	4.024.112.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0002	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.360.000,00	349.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0002	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	246.556.000,00	185.712.969,00	4.115.256.000,00	4.024.112.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0002	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	71.117.000,00	64.402.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0002	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	71.117.000,00	64.402.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0002	2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	2.099.000,00	2.062.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0002	2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	69.018.000,00	62.340.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.809.303.149,00	3.559.689.909,00	16.771.460,00	16.153.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.834.480.199,00	2.676.078.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.625.509.142,00	1.615.044.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.625.509.142,00	1.615.044.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.625.509.142,00	1.615.044.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.124.436.042,00	977.323.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	73.772.715,00	71.114.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	73.772.715,00	71.114.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	1.050.663.327,00	906.209.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.050.663.327,00	906.209.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	84.535.015,00	83.709.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	84.535.015,00	83.709.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	84.535.015,00	83.709.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0009		UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	974.822.950,00	883.611.822,00	16.771.460,00	16.153.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0009	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	615.967.144,00	588.698.448,00	16.771.460,00	16.153.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0009	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.358.700,00	46.602.009,00	16.771.460,00	16.153.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0009	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.927.800,00	3.901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0009	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.930.900,00	10.797.009,00	16.771.460,00	16.153.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0009	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	31.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0009	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.484.476,00	249.320.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0009	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.230.000,00	125.188.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0009	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	124.254.476,00	124.131.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0009	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313.123.968,00	292.776.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0009	2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	185.930.984,00	173.129.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0009	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.132.984,00	80.132.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0009	2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.060.000,00	39.513.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0009	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	358.855.806,00	294.913.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0009	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	358.855.806,00	294.913.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0009	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	246.234.104,00	200.332.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0009	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	112.621.702,00	94.580.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	6.113.479.700,00	5.401.666.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.113.479.700,00	5.401.666.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	5.882.758.000,00	5.216.311.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	5.882.758.000,00	5.216.311.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.05.1.01.0003	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	5.882.758.000,00	5.216.311.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	23.521.700,00	10.370.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	23.521.700,00	10.370.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	23.521.700,00	10.370.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	207.200.000,00	174.984.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	207.200.000,00	174.984.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.03.1.04.2.10.01.0000	2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	207.200.000,00	174.984.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	16.897.238.254,00	14.726.233.360,00	9.272.835.643,00	3.310.282.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.513.408.925,00	1.335.019.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	18.651.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	654.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,00	654.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	1.190.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	1.190.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	16.806.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	16.806.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	153.867.210,00	151.028.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	101.639.800,00	100.847.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	101.639.800,00	100.847.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	52.227.410,00	50.181.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.02.1.02.0006	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	52.227.410,00	50.181.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	95.413.600,00	95.071.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	95.413.600,00	95.071.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	70.333.600,00	67.159.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	25.080.000,00	15.787.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	0,00	12.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	40.041.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	40.041.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.04.1.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	40.041.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	37.816.300,00	13.245.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	37.816.300,00	13.245.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	37.816.300,00	13.245.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	10.399.700,00	10.016.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	10.399.700,00	10.016.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10.399.700,00	10.016.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.131.077.115,00	1.007.748.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	1.131.077.115,00	1.007.748.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1.131.077.115,00	1.007.748.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	34.399.700,00	33.645.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	34.399.700,00	33.645.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	34.399.700,00	33.645.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10.394.300,00	5.313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	10.394.300,00	5.313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0000	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	10.394.300,00	5.313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0006		UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	382.450.847,00	309.517.054,00	48.441.643,00	31.394.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0006	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	98.263.955,00	59.044.691,00	48.441.643,00	31.394.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0006	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.802.000,00	2.665.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0006	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.866.500,00	2.665.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0006	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	935.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0006	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.046.545,00	10.823.781,00	48.441.643,00	31.394.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0006	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.046.545,00	10.823.781,00	48.441.643,00	31.394.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0006	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.415.410,00	45.555.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0006	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.415.410,00	45.555.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0006	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	284.186.892,00	250.472.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0006	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	284.186.892,00	250.472.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0006	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	284.186.892,00	250.472.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0007		UPTD Pengelolaan Sampah	15.001.378.482,00	13.081.697.062,00	9.224.394.000,00	3.278.887.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0007	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	409.120.962,00	362.735.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0007	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.097.300,00	57.955.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0007	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.229.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0007	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.701.300,00	7.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0007	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.000.000,00	41.449.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0007	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.917.000,00	2.333.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0007	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.250.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0007	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	344.023.662,00	304.779.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0007	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	225.753.662,00	195.714.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0007	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	118.270.000,00	109.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0007	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	14.592.257.520,00	12.718.961.680,00	9.224.394.000,00	3.278.887.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0007	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	14.592.257.520,00	12.718.961.680,00	9.224.394.000,00	3.278.887.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	3.28.2.11.0.00.01.0007	2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	14.592.257.520,00	12.718.961.680,00	9.224.394.000,00	3.278.887.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	326.704.025,00	251.916.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.13.2.12.2.14.01.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	326.704.025,00	251.916.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	204.017.715,00	166.132.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	204.017.715,00	166.132.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	204.017.715,00	166.132.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	122.686.310,00	85.783.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	122.686.310,00	85.783.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	122.686.310,00	85.783.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	25.396.262.608,00	23.508.362.382,00	66.263.600,00	63.386.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25.396.262.608,00	23.508.362.382,00	66.263.600,00	63.386.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.975.459.204,00	12.944.532.251,00	66.263.600,00	63.386.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172.924.602,00	163.216.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.715.000,00	9.813.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.209.602,00	153.402.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.682.916.555,00	10.785.963.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.578.483.540,00	10.685.096.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	104.433.015,00	100.866.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.702.950,00	210.083.551,00	66.263.600,00	63.386.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.992.400,00	5.311.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.523.100,00	18.670.000,00	66.263.600,00	63.386.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.738.750,00	75.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.048.100,00	5.114.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.626.600,00	3.902.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.510.000,00	3.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.264.000,00	98.012.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.439.600,00	5.761.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.439.600,00	5.761.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	609.282.069,00	542.967.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.800.000,00	117.551.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	434.482.069,00	425.415.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.260.193.428,00	1.236.540.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.151.383.428,00	1.132.781.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.810.000,00	103.759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	91.323.202,00	89.821.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	91.323.202,00	89.821.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	91.323.202,00	89.821.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	440.695.435,00	414.542.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	440.695.435,00	414.542.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	95.504.715,00	95.332.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	328.910.020,00	318.442.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	16.280.700,00	768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	10.888.784.767,00	10.059.465.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.888.784.767,00	10.059.465.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.018.805.710,00	1.820.952.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	99.284.120,00	95.640.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	265.604.710,00	258.921.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8.505.090.227,00	7.883.950.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	474.711.630,00	449.103.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.12.2.14.01.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	474.711.630,00	449.103.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	474.711.630,00	449.103.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	474.711.630,00	449.103.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.14.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	199.955.000,00	194.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.12.2.14.01.0000	2.14.03.1.01.0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	274.756.630,00	254.423.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	103.833.283.028,40	85.726.752.611,00	1.700.107.660,00	1.433.228.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	33.078.650.834,40	27.408.703.486,00	423.576.700,00	356.331.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.302.640.427,40	25.805.635.185,00	423.576.700,00	356.331.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.167.000,00	29.931.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.200.000,00	9.179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.967.000,00	20.752.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.844.686.215,40	20.930.319.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.801.722.215,40	20.888.603.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.964.000,00	41.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	941.677.494,00	734.553.460,00	350.727.700,00	302.331.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.993.800,00	6.779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	388.743.994,00	309.814.986,00	350.727.700,00	302.331.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.600.000,00	75.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.253.700,00	6.254.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	461.086.000,00	336.694.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.922.000.000,00	1.922.000.000,00	72.849.000,00	54.000.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.922.000.000,00	1.922.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	72.849.000,00	54.000.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	642.485.436,00	554.120.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.710.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	295.000.000,00	222.234.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	342.775.436,00	328.885.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.913.624.282,00	1.634.709.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	918.767.984,00	659.303.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.770.000,00	60.245.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	921.086.298,00	915.160.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	746.788.452,00	678.997.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	238.895.017,00	237.695.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	216.395.017,00	216.195.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	22.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	73.926.000,00	50.397.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	66.726.000,00	43.197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	70.876.000,00	52.179.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.10.0003	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	70.876.000,00	52.179.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	363.091.435,00	338.724.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	363.091.435,00	338.724.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	527.945.725,00	440.963.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	527.945.725,00	440.963.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	527.945.725,00	440.963.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	501.276.230,00	483.107.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	501.276.230,00	483.107.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.05.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	501.276.230,00	483.107.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001		UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	1.905.922.085,00	1.481.941.060,00	361.063.200,00	344.462.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	416.913.492,00	301.365.561,00	61.063.200,00	55.947.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.314.900,00	117.150.602,00	61.063.200,00	55.947.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.244.400,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.924.500,00	6.157.000,00	61.063.200,00	55.947.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	800.000,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.346.000,00	106.447.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.818.992,00	93.930.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.193.200,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.860.000,00	50.979.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.765.792,00	42.191.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.779.600,00	90.284.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	167.299.600,00	75.774.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.480.000,00	14.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.489.008.593,00	1.180.575.499,00	300.000.000,00	288.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	596.800.000,00	366.693.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	596.800.000,00	366.693.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	892.208.593,00	813.881.970,00	300.000.000,00	288.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	892.208.593,00	813.881.970,00	300.000.000,00	288.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002		UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita	65.496.957.773,00	53.746.619.238,00	144.834.520,00	118.366.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	431.688.632,00	315.133.432,00	144.834.520,00	118.366.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.189.428,00	65.442.500,00	121.149.520,00	110.866.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	915.400,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.440.440,00	22.499.500,00	121.149.520,00	110.866.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.324.588,00	16.193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.876.000,00	9.234.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.633.000,00	16.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	23.685.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	23.685.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.681.892,00	61.031.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	471.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.300.000,00	20.274.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.910.892,00	40.456.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.817.312,00	188.659.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	248.677.312,00	179.549.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.140.000,00	9.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	65.065.269.141,00	53.431.485.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	65.065.269.141,00	53.431.485.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	65.065.269.141,00	53.431.485.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003		UPTD Perlengkapan Jalan	2.949.098.522,00	2.747.660.928,00	719.897.280,00	567.226.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	181.947.692,00	148.999.712,00	60.454.080,00	54.700.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.243.200,00	20.164.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.276.800,00	4.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.966.400,00	16.010.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	60.454.080,00	54.700.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	60.454.080,00	54.700.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.704.492,00	128.835.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.654.492,00	120.890.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.050.000,00	7.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.767.150.830,00	2.598.661.216,00	659.443.200,00	512.525.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	2.767.150.830,00	2.598.661.216,00	659.443.200,00	512.525.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.926.738.410,00	1.824.851.424,00	659.443.200,00	512.525.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	840.412.420,00	773.809.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004		UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan	402.653.814,00	341.827.899,00	50.735.960,00	46.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	346.071.614,00	289.081.899,00	50.735.960,00	46.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	219.200.914,00	196.183.991,00	50.735.960,00	46.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.401.700,00	5.013.000,00	50.735.960,00	46.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.320.000,00	1.438.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.479.214,00	189.732.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	486.700,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	486.700,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.384.000,00	92.587.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.984.000,00	90.487.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.400.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	56.582.200,00	52.746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	56.582.200,00	52.746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	56.582.200,00	52.746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	83.221.821.896,00	70.254.601.253,00	163.341.665.778,00	76.915.874.449,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	63.783.775.204,00	55.771.280.653,00	158.138.812.830,00	72.481.853.576,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.517.467.448,00	28.911.160.233,00	1.467.428.480,00	1.144.047.668,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.064.000,00	24.875.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.173.700,00	14.027.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.890.300,00	10.847.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.265.349.524,00	25.199.472.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.255.027.824,00	22.218.144.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.010.321.700,00	2.981.327.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	493.026.800,00	350.682.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.443.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.914.800,00	33.272.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.500.000,00	76.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.670.400,00	6.840.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	31.522.600,00	29.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.630.000,00	7.482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	289.346.000,00	182.804.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	1.467.428.480,00	1.144.047.668,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	199.037.500,00	133.772.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	580.000.000,00	352.620.129,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	688.390.980,00	657.654.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	601.942.200,00	502.971.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.998.700,00	1.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	418.943.500,00	321.301.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000,00	179.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.125.084.924,00	2.833.158.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.153.928.888,00	1.907.224.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	3.600.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.490.000,00	60.844.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	781.886.036,00	777.269.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	86.180.000,00	84.820.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	9.720.851.556,00	8.184.203.447,00	400.472.350,00	177.649.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	9.720.851.556,00	8.184.203.447,00	400.472.350,00	177.649.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten	882.999.015,00	509.450.895,00	124.658.650,00	73.975.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi	626.898.437,00	601.727.397,00	228.951.500,00	103.674.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1.618.158.099,00	1.442.751.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	2.195.669.235,00	2.191.706.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik	1.223.294.212,00	504.122.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	271.679.010,00	208.459.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.902.153.548,00	2.725.984.724,00	46.862.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	22.545.456.200,00	18.675.916.973,00	156.270.912.000,00	71.160.156.207,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	22.545.456.200,00	18.675.916.973,00	156.270.912.000,00	71.160.156.207,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	0,00	14.217.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0025	Koordinasi penyusunan proses bisnis	2.588.539.600,00	661.923.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	3.533.566.500,00	2.856.434.338,00	154.415.452.000,00	69.442.277.733,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	16.423.350.100,00	15.143.341.588,00	1.855.460.000,00	1.717.878.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0001		UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital	6.849.600.100,00	5.567.652.905,00	664.220.390,00	535.929.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0001	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	6.849.600.100,00	5.567.652.905,00	664.220.390,00	535.929.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0001	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	6.849.600.100,00	5.567.652.905,00	664.220.390,00	535.929.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0001	2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3.769.568.200,00	3.200.620.998,00	329.830.050,00	222.908.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0001	2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	3.080.031.900,00	2.367.031.907,00	334.390.340,00	313.020.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0002		UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali	12.588.446.592,00	8.915.667.695,00	4.538.632.558,00	3.898.091.336,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0002	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	12.588.446.592,00	8.915.667.695,00	4.538.632.558,00	3.898.091.336,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0002	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	12.588.446.592,00	8.915.667.695,00	4.538.632.558,00	3.898.091.336,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0002	2.16.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	10.003.000.592,00	6.518.442.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.02.0002	2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	2.585.446.000,00	2.397.225.483,00	4.538.632.558,00	3.898.091.336,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	22.074.885.383,00	20.272.336.388,00	955.055.300,00	897.272.928,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17.197.953.087,00	15.851.238.419,00	955.055.300,00	897.272.928,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.470.971.368,00	14.273.779.103,00	955.055.300,00	897.272.928,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.608.802,00	91.485.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	102.343.902,00	84.564.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.264.900,00	6.920.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.165.169.179,00	12.207.439.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.165.169.179,00	12.207.439.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	211.047.794,00	173.561.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.997.800,00	9.901.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.405.800,00	36.311.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.071.194,00	75.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.500.000,00	14.501.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000,00	3.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.573.000,00	33.821.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	683.055.300,00	629.293.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	683.055.300,00	629.293.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	948.210.568,00	870.772.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.993.900,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	246.000.000,00	178.603.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	700.216.668,00	690.898.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.035.935.025,00	930.520.690,00	272.000.000,00	267.978.939,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	788.476.657,00	707.253.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.920.000,00	33.605.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	197.538.368,00	189.661.583,00	272.000.000,00	267.978.939,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	789.809.889,00	751.954.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	779.890.289,00	742.362.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	779.890.289,00	742.362.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	9.919.600,00	9.592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	9.919.600,00	9.592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	77.397.105,00	74.975.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	26.908.000,00	25.051.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	26.908.000,00	25.051.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.489.105,00	49.923.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.489.105,00	49.923.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	87.702.810,00	81.014.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	87.702.810,00	81.014.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	61.553.210,00	55.462.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	26.149.600,00	25.552.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	404.183.821,00	381.575.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	404.183.821,00	381.575.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	338.343.821,00	326.750.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	65.840.000,00	54.825.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	367.888.094,00	287.939.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	367.888.094,00	287.939.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	174.608.394,00	161.399.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	50.000.000,00	48.031.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.1.01.0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	97.119.700,00	54.261.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.1.01.0006	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	46.160.000,00	24.246.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0001		UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	4.876.932.296,00	4.421.097.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0001	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	477.808.994,00	414.490.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0001	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.659.450,00	65.274.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0001	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	699.600,00	616.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0001	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.146.100,00	7.954.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0001	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.904.050,00	56.404.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0001	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	999.700,00	299.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0001	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0001	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0001	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.755.068,00	175.608.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0001	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	989.100,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0001	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.500.000,00	14.491.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0001	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.265.968,00	160.487.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0001	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.394.476,00	173.607.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0001	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.191.492,00	94.856.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0001	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.070.000,00	1.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0001	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.132.984,00	76.865.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0001	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	4.399.123.302,00	4.006.607.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0001	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.399.123.302,00	4.006.607.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0001	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	4.399.123.302,00	4.006.607.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	17.908.672.989,00	15.603.611.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.908.672.989,00	15.603.611.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.034.847.795,00	14.767.397.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.871.356.811,00	12.233.071.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.871.356.811,00	12.233.071.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	722.947.400,00	438.394.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.073.400,00	4.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.134.300,00	52.886.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.000.000,00	69.944.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.133.700,00	16.276.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550.606.000,00	295.156.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.260.955.224,00	1.224.571.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.846.500,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.000.000,00	130.971.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.105.108.724,00	1.091.150.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.179.588.360,00	871.359.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	926.700.460,00	809.976.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	252.887.900,00	61.382.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	140.433.115,00	139.203.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	140.433.115,00	139.203.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	140.433.115,00	139.203.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	103.638.110,00	99.357.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	103.638.110,00	99.357.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	103.638.110,00	99.357.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	435.076.657,00	435.076.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	435.076.657,00	435.076.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	358.765.837,00	358.765.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.1.01.0008	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	76.310.820,00	76.310.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	156.281.902,00	124.181.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	156.281.902,00	124.181.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	100.101.902,00	99.651.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	38.900.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	38.395.410,00	38.395.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	38.395.410,00	38.395.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	38.395.410,00	38.395.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	94.989.113.800,00	86.023.515.071,97	67.374.500,00	66.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	94.989.113.800,00	86.023.515.071,97	67.374.500,00	66.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	10.986.468.200,00	3.984.301.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	10.986.468.200,00	3.984.301.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	9.731.599.800,00	3.231.166.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	36.390.000,00	4.126.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	148.051.900,00	36.380.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	192.831.500,00	16.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	778.887.500,00	616.883.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	98.707.500,00	79.075.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	82.502.645.600,00	80.611.062.542,97	67.374.500,00	66.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	21.425.805.600,00	19.638.573.344,00	67.374.500,00	66.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	14.305.184.700,00	13.179.542.273,00	5.268.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	7.120.620.900,00	6.459.031.071,00	62.106.500,00	61.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	316.840.000,00	301.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	316.840.000,00	301.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	60.760.000.000,00	60.671.464.198,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	60.760.000.000,00	60.671.464.198,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.500.000.000,00	1.428.151.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.500.000.000,00	1.428.151.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.04.1.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1.500.000.000,00	1.428.151.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	281.847.820,00	258.982.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.02.0000		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	281.847.820,00	258.982.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	281.847.820,00	258.982.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	281.847.820,00	258.982.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.20.02.1.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	92.437.805,00	83.880.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	98.217.405,00	89.767.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	91.192.610,00	85.334.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	294.555.205,00	267.153.835,00	29.602.200,00	25.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	294.555.205,00	267.153.835,00	29.602.200,00	25.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	294.555.205,00	267.153.835,00	29.602.200,00	25.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	230.452.700,00	207.851.175,00	29.602.200,00	25.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	34.024.900,00	24.982.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	121.620.000,00	116.996.906,00	29.602.200,00	25.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	10.312.800,00	9.401.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	64.495.000,00	56.470.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	64.102.505,00	59.302.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.02.0000	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	64.102.505,00	59.302.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	611.460.912.518,00	602.173.972.758,55	15.630.302.793,00	3.397.965.619,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kebudayaan	106.562.513.372,00	103.159.600.123,55	1.680.007.227,00	1.495.424.391,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	47.424.369.014,00	45.393.821.212,55	1.680.007.227,00	1.495.424.391,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.366.020,00	88.973.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.191.520,00	85.546.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.174.500,00	3.426.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.916.706.348,00	41.698.784.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.422.197.777,00	41.234.488.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	492.508.571,00	462.878.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.000.000,00	1.417.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.590.700,00	176.056.122,00	1.562.007.227,00	1.378.899.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.085.500,00	20.067.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	1.562.007.227,00	1.378.899.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.000.000,00	96.377.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.600.000,00	3.470.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	22.915.200,00	19.275.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.750.000,00	6.452.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.240.000,00	30.412.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.677.177.698,00	1.143.117.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.495.000,00	5.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	720.000.000,00	387.693.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.950.000,00	24.538.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	926.732.698,00	725.396.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.522.528.248,00	2.286.889.571,55	118.000.000,00	116.525.290,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	885.787.460,00	749.610.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.950.000,00	14.793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.621.790.788,00	1.522.485.943,55	118.000.000,00	116.525.290,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	56.833.436.602,00	55.577.456.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	14.623.432.026,00	14.192.675.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.267.700.522,00	920.004.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	13.355.731.504,00	13.272.671.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	16.742.251.526,00	16.019.748.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	15.400.739.935,00	14.775.790.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	1.341.511.591,00	1.243.958.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25.467.753.050,00	25.365.032.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	25.467.753.050,00	25.365.032.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.461.431.865,00	1.401.719.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.461.431.865,00	1.401.719.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.129.837.200,00	1.118.808.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	331.594.665,00	282.910.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	144.883.000,00	144.078.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	144.883.000,00	144.078.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	144.883.000,00	144.078.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	698.392.891,00	639.175.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	167.324.115,00	162.226.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	167.324.115,00	162.226.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	531.068.776,00	476.949.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	274.241.876,00	252.075.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	52.108.700,00	44.498.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	114.107.300,00	100.326.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	90.610.900,00	80.048.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	0,00	3.348.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	0,00	3.348.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	0,00	425.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	0,00	2.923.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001		UPTD Taman Budaya	6.884.481.935,00	5.875.102.937,00	3.690.777.950,00	185.549.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.196.719.335,00	3.384.199.069,00	3.690.777.950,00	185.549.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.829.700,00	109.628.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	69.997.000,00	48.427.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.998.700,00	47.456.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.500.000,00	1.859.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.340.000,00	2.732.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.994.000,00	9.152.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.470.000,00	40.824.530,00	199.777.950,00	185.549.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001	2.22.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.470.000,00	40.824.530,00	199.777.950,00	185.549.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.773.510.843,00	1.440.139.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	985.600.000,00	658.540.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.930.000,00	9.547.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	772.980.843,00	772.051.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.221.908.792,00	1.793.606.843,00	3.491.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.000.000,00	49.487.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.480.000,00	18.684.870,00	3.491.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.128.428.792,00	1.725.434.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.687.762.600,00	2.490.903.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.687.762.600,00	2.490.903.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2.317.246.600,00	2.140.214.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001	2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	370.516.000,00	350.688.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002		UPTD Museum Bali	4.628.107.986,00	4.117.299.089,00	9.840.368.773,00	1.315.807.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.092.737.386,00	1.851.369.423,00	9.776.325.273,00	1.252.716.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	185.395.500,00	154.721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	61.517.500,00	42.879.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.000.000,00	100.586.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.301.000,00	6.202.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.402.000,00	3.953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.175.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.698.300,00	2.330.000,00	423.609.900,00	278.961.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.698.300,00	2.330.000,00	423.609.900,00	278.961.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.040.403.506,00	945.814.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.386.400,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	256.000.000,00	170.323.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.264.840,00	11.217.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	762.752.266,00	762.752.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	861.240.080,00	748.504.185,00	9.352.715.373,00	973.755.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	101.600.000,00	79.723.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.080.000,00	5.432.748,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	727.560.080,00	663.347.833,00	9.227.715.373,00	973.755.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.535.370.600,00	2.265.929.666,00	64.043.500,00	63.090.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	2.535.370.600,00	2.265.929.666,00	64.043.500,00	63.090.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	879.170.300,00	835.664.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1.551.494.500,00	1.347.952.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	104.705.800,00	82.312.859,00	64.043.500,00	63.090.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0003		UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	6.583.280.819,00	5.783.190.644,00	35.000.000,00	33.606.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0003	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.523.777.819,00	3.110.764.420,00	35.000.000,00	33.606.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0003	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.862.800,00	134.159.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0003	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.995.300,00	29.406.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0003	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.057.000,00	49.019.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0003	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.593.100,00	50.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0003	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.777.400,00	1.316.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0003	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.440.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0003	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	35.000.000,00	33.606.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0003	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	35.000.000,00	33.606.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0003	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.236.641.995,00	899.361.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0003	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.491.500,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0003	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	167.905.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0003	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.930.000,00	29.384.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0003	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	842.220.495,00	701.121.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0003	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.141.273.024,00	2.077.243.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0003	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.975.000,00	104.620.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0003	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.970.000,00	10.711.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0003	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.002.328.024,00	1.961.911.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0003	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	3.059.503.000,00	2.672.426.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0003	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	3.059.503.000,00	2.672.426.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0003	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	756.260.200,00	714.862.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0003	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	2.038.410.200,00	1.744.508.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0003	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	264.832.600,00	213.055.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000		Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	486.802.528.406,00	483.238.779.965,00	384.148.843,00	367.577.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.041.994.892,00	12.652.017.733,00	384.148.843,00	367.577.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.797.300,00	29.081.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.904.900,00	19.476.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.892.400,00	9.605.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.960.282.800,00	10.037.925.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.960.282.800,00	10.037.925.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	342.515.100,00	216.393.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.934.200,00	8.443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.145.200,00	23.271.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.243.700,00	16.219.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276.192.000,00	168.459.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.609.840,00	9.300.000,00	255.448.843,00	239.645.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.609.840,00	9.300.000,00	255.448.843,00	239.645.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	562.166.834,00	368.402.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	562.166.834,00	368.402.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.130.623.018,00	1.990.914.201,00	128.700.000,00	127.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	566.441.852,00	508.505.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.564.181.166,00	1.482.408.609,00	128.700.000,00	127.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.09	PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	472.760.533.514,00	470.586.762.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.09.8.01	Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	471.928.683.008,00	469.821.063.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.09.8.01.0001	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	471.741.628.706,00	469.656.050.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.09.8.01.0002	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	187.054.302,00	165.012.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.09.8.02	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	528.438.391,00	491.107.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.09.8.02.0001	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	65.165.900,00	55.656.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.09.8.02.0002	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	463.272.491,00	435.451.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.09.8.03	Penyelenggaraan Desa Adat	303.412.115,00	274.590.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.09.8.03.0003	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	303.412.115,00	274.590.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	323.970.632,00	291.138.154,00	45.000.000,00	44.799.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0005		Biro Organisasi	323.970.632,00	291.138.154,00	45.000.000,00	44.799.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0005	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	248.666.435,00	224.356.523,00	45.000.000,00	44.799.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0005	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	130.614.020,00	121.669.577,00	45.000.000,00	44.799.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0005	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	32.877.705,00	31.375.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0005	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	32.277.605,00	31.869.130,00	45.000.000,00	44.799.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0005	2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	65.458.710,00	58.424.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0005	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	118.052.415,00	102.686.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0005	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	41.177.005,00	35.713.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0005	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	76.875.410,00	66.973.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0005	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	75.304.197,00	66.781.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0005	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	75.304.197,00	66.781.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.23	4.01.2.23.2.24.01.0005	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	75.304.197,00	66.781.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	576.120.481,00	518.130.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	4.01.2.23.2.24.01.0003		Biro Umum dan Protokol	576.120.481,00	518.130.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	4.01.2.23.2.24.01.0003	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	576.120.481,00	518.130.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	4.01.2.23.2.24.01.0003	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	318.729.951,00	304.747.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	4.01.2.23.2.24.01.0003	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	318.729.951,00	304.747.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	4.01.2.23.2.24.01.0003	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	257.390.530,00	213.382.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	4.01.2.23.2.24.01.0003	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	49.957.500,00	34.997.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	4.01.2.23.2.24.01.0003	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	207.433.030,00	178.385.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	238.761.556.776,20	211.004.510.130,00	5.694.753.520,00	5.347.094.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	32.647.153.934,20	28.001.179.877,00	3.447.855.000,00	3.269.883.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kelautan dan Perikanan	29.064.942.925,20	24.792.388.271,00	3.251.523.520,00	3.097.635.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.733.013.055,20	23.499.509.560,00	3.251.523.520,00	3.097.635.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.018.000,00	32.897.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.018.000,00	32.897.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.702.348.375,20	21.615.976.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.702.348.375,20	21.615.976.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	309.975.400,00	241.320.096,00	728.957.900,00	707.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.459.500,00	4.871.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	728.957.900,00	707.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	189.642.400,00	148.340.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.923.500,00	10.445.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.950.000,00	77.662.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	267.565.620,00	263.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	267.565.620,00	263.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.661.000,00	135.675.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.611.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.050.000,00	133.375.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.523.010.280,00	1.473.640.333,00	2.255.000.000,00	2.126.305.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	964.364.936,00	932.963.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	483.415.344,00	481.729.647,00	2.255.000.000,00	2.126.305.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.230.000,00	58.947.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	243.271.492,00	225.734.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	187.475.000,00	171.378.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	17.475.000,00	9.475.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02.1.01.0013	Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	170.000.000,00	161.903.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	55.796.492,00	54.356.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	55.796.492,00	54.356.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	432.885.697,00	432.423.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	416.024.197,00	415.724.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	416.024.197,00	415.724.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	16.861.500,00	16.699.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.09.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	16.861.500,00	16.699.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	175.820.000,00	170.721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	175.820.000,00	170.721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	159.720.000,00	155.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	16.100.000,00	15.686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	150.791.884,00	147.381.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	150.791.884,00	147.381.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	20.708.900,00	17.298.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	130.082.984,00	130.082.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	329.160.797,00	316.617.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	329.160.797,00	316.617.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	329.160.797,00	316.617.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001		UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	1.399.507.054,00	1.315.722.534,00	38.554.200,00	34.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	607.191.860,00	546.944.340,00	38.554.200,00	34.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.277.200,00	41.914.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.664.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.117.200,00	5.970.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	30.306.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.996.000,00	1.237.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	38.554.200,00	34.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	38.554.200,00	34.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.070.200,00	89.531.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	471.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.599.200,00	89.231.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431.844.460,00	415.498.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	166.497.984,00	155.300.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	265.346.476,00	260.198.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	792.315.194,00	768.778.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	792.315.194,00	768.778.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	792.315.194,00	768.778.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002		UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	1.020.273.678,00	892.564.153,00	137.332.080,00	118.997.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	583.867.278,00	520.690.002,00	37.072.080,00	36.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.933.000,00	37.231.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.433.000,00	5.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	30.721.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	37.072.080,00	36.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	37.072.080,00	36.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.020.500,00	84.811.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.020.500,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.000.000,00	84.161.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	423.913.778,00	398.646.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.232.000,00	69.730.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	316.901.778,00	315.076.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.780.000,00	13.839.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	436.406.400,00	371.874.151,00	100.260.000,00	82.197.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	436.406.400,00	371.874.151,00	100.260.000,00	82.197.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	46.041.000,00	35.748.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	390.365.400,00	336.125.651,00	100.260.000,00	82.197.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0003		UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali	899.566.752,00	770.083.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0003	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	854.606.752,00	731.389.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0003	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	69.957.100,00	59.699.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0003	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.366.900,00	3.227.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0003	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.286.000,00	7.412.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0003	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.500.000,00	36.435.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0003	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.804.200,00	12.624.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0003	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.096.600,00	2.982.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0003	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	596.600,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0003	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.500.000,00	2.602.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0003	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	767.553.052,00	668.706.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0003	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.600.000,00	95.108.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0003	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	633.953.052,00	573.598.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0003	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	44.960.000,00	38.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0003	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	44.960.000,00	38.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0003	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	44.960.000,00	38.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004		UPTD Pelabuhan Perikanan	262.863.525,00	230.421.190,00	20.445.200,00	18.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	239.009.525,00	209.730.246,00	20.445.200,00	18.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.085.900,00	62.465.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.835.900,00	20.098.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	30.103.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.750.000,00	12.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	20.445.200,00	18.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	20.445.200,00	18.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.000.000,00	5.211.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	5.211.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.923.625,00	142.052.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.800.000,00	124.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.123.625,00	17.277.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	23.854.000,00	20.690.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	23.854.000,00	20.690.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	23.854.000,00	20.690.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	30.881.670.695,00	19.674.873.895,00	724.253.888,00	695.384.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata	30.881.670.695,00	19.674.873.895,00	724.253.888,00	695.384.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.377.082.606,00	13.698.113.956,00	724.253.888,00	695.384.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.441.402,00	84.148.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.441.402,00	84.148.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.603.424.810,00	11.110.223.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.603.424.810,00	11.110.223.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	249.084.894,00	182.701.000,00	564.253.888,00	535.810.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.216.600,00	5.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.491.200,00	36.226.912,00	564.253.888,00	535.810.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.617.494,00	64.737.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.882.600,00	6.290.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.877.000,00	70.100.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.514.504.500,00	1.488.259.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.008.200,00	116.775.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.332.496.300,00	1.371.484.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	919.627.000,00	832.781.323,00	160.000.000,00	159.573.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	577.947.000,00	504.439.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	341.680.000,00	328.342.064,00	160.000.000,00	159.573.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	623.848.516,00	478.452.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	274.174.696,00	260.469.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	274.174.696,00	260.469.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	149.195.900,00	68.669.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	149.195.900,00	68.669.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	200.477.920,00	149.312.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	55.594.805,00	50.111.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.04.0013	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	144.883.115,00	99.200.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.894.574.906,00	4.586.166.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4.894.574.906,00	4.586.166.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	244.390.610,00	234.121.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	289.838.394,00	288.291.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4.360.345.902,00	4.063.753.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	140.088.084,00	135.231.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	97.601.384,00	97.532.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	97.601.384,00	97.532.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	42.486.700,00	37.698.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	42.486.700,00	37.698.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	846.076.583,00	776.909.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	846.076.583,00	776.909.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	267.634.092,00	239.381.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	217.836.094,00	210.747.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	360.606.397,00	326.780.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	106.417.372.899,00	99.583.615.896,00	159.156.200,00	138.139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	97.870.023.096,00	91.794.700.909,00	159.156.200,00	138.139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	56.132.493.304,00	53.421.423.933,00	159.156.200,00	138.139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	485.121.149,00	471.270.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	296.633.227,00	291.753.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	188.487.922,00	179.516.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51.914.068.522,00	49.631.500.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51.668.380.982,00	49.391.683.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	245.687.540,00	239.817.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.673.900,00	176.797.296,00	159.156.200,00	138.139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.263.000,00	13.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.274.500,00	39.911.860,00	159.156.200,00	138.139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.003.400,00	63.300.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.125.000,00	18.021.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.008.000,00	42.495.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	758.687.236,00	684.497.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	417.000.000,00	343.321.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	341.687.236,00	341.176.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.748.942.497,00	2.457.358.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.944.486.888,00	1.665.328.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	593.655.609,00	586.255.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	210.800.000,00	205.774.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	31.107.402.010,00	30.358.517.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	15.137.996.310,00	15.113.591.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	15.137.996.310,00	15.113.591.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.925.951.568,00	3.259.323.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	3.925.951.568,00	3.259.323.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	12.043.454.132,00	11.985.602.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	12.043.454.132,00	11.985.602.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.554.210.222,00	1.452.817.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	1.554.210.222,00	1.452.817.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	543.948.422,00	542.709.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1.010.261.800,00	910.107.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	8.947.637.045,00	6.447.482.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8.882.272.553,00	6.384.894.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8.882.272.553,00	6.384.894.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	65.364.492,00	62.587.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	65.364.492,00	62.587.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	128.280.515,00	114.459.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	57.000.000,00	43.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	57.000.000,00	43.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	71.280.515,00	70.759.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	71.280.515,00	70.759.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0009		UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	364.550.840,00	334.263.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0009	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	364.550.840,00	334.263.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0009	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	364.550.840,00	334.263.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0009	3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	150.623.335,00	136.007.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0009	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	213.927.505,00	198.256.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0012		UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.988.513.777,00	1.811.554.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0012	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.139.927.251,00	1.059.623.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0012	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.655.900,00	54.051.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0012	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	599.900,00	531.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0012	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.056.000,00	3.919.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0012	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	49.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0012	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	424.884.660,00	372.429.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0012	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	220.520.000,00	168.269.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0012	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.364.660,00	204.160.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0012	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	659.386.691,00	633.142.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0012	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	245.299.476,00	229.706.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0012	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	408.887.215,00	398.461.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0012	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.200.000,00	4.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0012	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	848.586.526,00	751.930.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0012	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	848.586.526,00	751.930.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0012	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	342.943.450,00	327.311.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0012	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	285.383.657,00	242.466.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0012	3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	220.259.419,00	182.152.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0013		UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	2.908.218.025,00	2.591.168.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0013	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	957.077.174,00	916.737.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0013	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.721.700,00	44.497.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0013	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.095.200,00	5.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0013	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.126.500,00	7.075.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0013	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	31.665.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0013	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	355.015.144,00	330.519.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0013	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000,00	41.657.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0013	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	289.015.144,00	288.861.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0013	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	552.340.330,00	541.720.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0013	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	265.015.968,00	255.973.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0013	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	282.454.362,00	281.796.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0013	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.870.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0013	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.951.140.851,00	1.674.430.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0013	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.951.140.851,00	1.674.430.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0013	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.951.140.851,00	1.674.430.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0014		UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	836.234.367,00	724.204.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0014	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	428.638.176,00	348.584.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0014	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.966.500,00	40.060.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0014	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.197.300,00	2.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0014	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.269.200,00	5.296.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0014	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0014	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.205.184,00	155.342.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0014	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.109.000,00	70.697.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0014	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.096.184,00	84.644.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0014	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.466.492,00	153.182.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0014	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	133.666.492,00	123.109.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0014	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.950.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0014	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.850.000,00	11.072.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0014	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	407.596.191,00	375.619.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0014	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	407.596.191,00	375.619.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0014	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	197.683.732,00	197.064.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0014	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	209.912.459,00	178.554.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0015		UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2.449.832.794,00	2.327.724.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0015	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	419.496.651,00	373.131.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0015	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.995.000,00	37.404.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0015	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.996.900,00	1.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0015	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.998.100,00	4.968.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0015	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000,00	30.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0015	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238.933.667,00	202.868.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0015	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.912.191,00	81.984.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0015	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	121.021.476,00	120.883.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0015	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.567.984,00	132.859.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0015	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92.081.492,00	87.627.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0015	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.566.492,00	42.531.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0015	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.920.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0015	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.030.336.143,00	1.954.592.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0015	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.983.141.943,00	1.908.484.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0015	3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	584.166.955,00	559.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0015	3.27.02.1.02.0011	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	703.243.365,00	687.513.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0015	3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	373.483.732,00	361.384.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0015	3.27.02.1.02.0014	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	322.247.891,00	300.031.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0015	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	47.194.200,00	46.108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0015	3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	47.194.200,00	46.108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	44.173.575.493,00	40.923.723.530,00	446.257.312,00	378.155.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	40.870.675.033,00	37.973.154.424,00	314.442.312,00	247.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40.588.923.313,00	37.732.831.391,00	314.442.312,00	247.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.694.200,00	23.005.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.694.200,00	23.005.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.216.477.014,00	35.795.780.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.113.997.214,00	35.709.429.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	102.479.800,00	86.351.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	486.562.000,00	286.729.519,00	314.442.312,00	247.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.097.000,00	16.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.975.000,00	30.783.992,00	314.442.312,00	247.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.000.000,00	95.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.350.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.500.000,00	4.363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	294.640.000,00	135.272.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	621.843.344,00	579.775.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	208.560.000,00	191.540.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	413.283.344,00	388.234.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.226.346.755,00	1.047.539.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	836.290.360,00	674.836.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	390.056.395,00	372.703.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	103.565.115,00	74.575.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	103.565.115,00	74.575.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	103.565.115,00	74.575.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	16.520.500,00	10.275.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	16.520.500,00	10.275.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	16.520.500,00	10.275.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	161.666.105,00	155.472.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	161.666.105,00	155.472.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0000	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	161.666.105,00	155.472.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0001		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	708.446.804,00	690.825.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0001	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	708.446.804,00	690.825.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0001	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.801.800,00	59.405.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0001	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.205.900,00	2.875.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0001	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.025.900,00	9.314.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0001	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.650.000,00	33.296.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0001	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.920.000,00	13.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0001	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.253.592,00	69.228.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0001	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.500.000,00	25.926.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0001	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.753.592,00	43.301.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0001	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	571.391.412,00	562.191.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0001	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.427.705,00	125.200.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0001	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	437.963.707,00	436.990.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0002		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	548.684.259,00	508.543.366,00	131.815.000,00	131.155.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0002	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	548.684.259,00	508.543.366,00	131.815.000,00	131.155.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0002	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.271.800,00	48.452.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0002	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.129.800,00	2.830.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0002	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.443.900,00	8.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0002	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.000.000,00	34.769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0002	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.698.100,00	2.203.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0002	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.384.092,00	82.360.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0002	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.050.000,00	18.787.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0002	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.334.092,00	63.572.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0002	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.028.367,00	377.729.899,00	131.815.000,00	131.155.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0002	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	390.888.367,00	371.387.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0002	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.140.000,00	6.342.051,00	131.815.000,00	131.155.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0003		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	368.983.094,00	355.794.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0003	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	368.983.094,00	355.794.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0003	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.996.700,00	46.198.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0003	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.373.700,00	1.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0003	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.355.700,00	8.835.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0003	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	24.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0003	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.707.300,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0003	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0003	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.841.902,00	83.398.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0003	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000,00	6.147.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0003	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.841.902,00	77.250.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0003	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.144.492,00	226.197.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0003	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	223.154.492,00	217.437.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0003	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.990.000,00	8.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0004		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	341.539.476,00	322.806.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0004	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	341.539.476,00	322.806.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0004	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.411.700,00	60.103.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0004	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.137.000,00	2.753.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0004	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.811.900,00	8.499.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0004	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.000.000,00	33.981.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0004	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.502.800,00	1.908.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0004	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0004	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.319.792,00	64.086.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0004	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.940.000,00	20.351.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0004	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.379.792,00	43.735.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0004	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.807.984,00	198.615.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0004	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.425.000,00	113.431.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0004	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	86.382.984,00	85.184.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0005		UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	1.335.246.827,00	1.069.609.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0005	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.335.246.827,00	1.069.609.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0005	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.451.300,00	21.261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0005	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.530.500,00	1.802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0005	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.920.800,00	5.731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0005	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	13.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0005	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	567.354.292,00	435.396.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0005	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	324.000.000,00	195.421.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0005	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	243.354.292,00	239.975.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0005	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	743.441.235,00	612.952.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0005	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.130.000,00	57.222.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0005	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	619.341.235,00	555.730.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0005	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0006		UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	2.990.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0006	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	2.990.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0006	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	2.990.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	3.28.2.11.0.00.01.0006	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	2.990.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	76.085.500,00	51.779.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000		Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	76.085.500,00	51.779.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	4.160.000,00	4.105.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4.160.000,00	4.105.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	4.160.000,00	4.105.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	10.100.000,00	10.033.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	10.100.000,00	10.033.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	10.100.000,00	10.033.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	61.825.500,00	37.641.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	61.825.500,00	37.641.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	61.825.500,00	37.641.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	18.870.104.197,00	17.338.549.245,00	505.981.360,00	455.809.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.344.389.856,00	16.868.760.082,00	446.309.200,00	397.249.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.115.772.688,00	15.669.171.546,00	446.309.200,00	397.249.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.290.800,00	34.910.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.290.800,00	34.910.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.578.942.945,00	13.673.008.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.578.942.945,00	13.673.008.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000,00	3.851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000,00	3.851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	411.515.794,00	256.400.277,00	446.309.200,00	397.249.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.267.000,00	14.277.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.454.400,00	56.933.155,00	446.309.200,00	397.249.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.483.394,00	61.585.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.840.000,00	10.589.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.424.000,00	4.542.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193.047.000,00	108.471.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	996.826.705,00	796.218.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	340.000.000,00	175.733.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	429.631.805,00	397.174.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	227.194.900,00	223.310.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.012.196.444,00	904.783.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	848.042.460,00	741.747.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	164.153.984,00	163.035.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	198.569.414,00	195.540.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	198.569.414,00	195.540.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	198.569.414,00	195.540.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	13.442.800,00	13.120.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	13.442.800,00	13.120.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	13.442.800,00	13.120.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	147.180.600,00	127.225.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	147.180.600,00	127.225.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	147.180.600,00	127.225.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	48.499.200,00	46.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	48.499.200,00	46.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	48.499.200,00	46.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	547.895.697,00	545.627.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	461.672.200,00	461.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	456.000.000,00	456.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	5.672.200,00	5.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	86.223.497,00	84.165.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	86.223.497,00	84.165.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	273.029.457,00	271.756.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	273.029.457,00	271.756.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	273.029.457,00	271.756.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0002		UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	525.714.341,00	469.789.163,00	59.672.160,00	58.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0002	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	311.919.165,00	283.481.741,00	59.672.160,00	58.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0002	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.372.940,00	30.620.174,00	59.672.160,00	58.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0002	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.455.700,00	1.051.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0002	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.779.200,00	14.710.972,00	59.672.160,00	58.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0002	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.038.040,00	14.390.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0002	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.100.000,00	467.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0002	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.577.181,00	145.491.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0002	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	6.424.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0002	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	141.577.181,00	139.067.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0002	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.969.044,00	107.369.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0002	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.969.044,00	107.369.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0002	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	213.795.176,00	186.307.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0002	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	213.795.176,00	186.307.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0002	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	213.795.176,00	186.307.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	5.670.709.258,00	5.407.284.149,00	411.249.760,00	409.723.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.685.549.661,00	4.447.653.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4.658.589.761,00	4.444.293.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	4.658.589.761,00	4.444.293.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	176.162.000,00	119.644.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4.482.427.761,00	4.324.649.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	26.959.900,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	26.959.900,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	26.959.900,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0001		UPTD Rumah Kreatif	985.159.597,00	959.630.264,00	411.249.760,00	409.723.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0001	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	261.738.097,00	237.830.264,00	411.249.760,00	409.723.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0001	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.098.900,00	118.991.145,00	411.249.760,00	409.723.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0001	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121.821.900,00	114.589.145,00	411.249.760,00	409.723.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0001	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0001	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.212.000,00	2.482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0001	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.840.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0001	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.587.705,00	26.177.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0001	3.31.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.587.705,00	26.177.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0001	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.051.492,00	92.661.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0001	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	104.051.492,00	92.661.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0001	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	723.421.500,00	721.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0001	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	723.421.500,00	721.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0001	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	723.421.500,00	721.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	24.884.800,00	23.503.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000		Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	24.884.800,00	23.503.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	24.884.800,00	23.503.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	24.884.800,00	23.503.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	24.884.800,00	23.503.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	532.422.372.495,00	377.660.232.296,00	77.478.363.191,00	65.628.169.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	278.459.302.866,00	223.035.730.500,00	38.911.259.043,00	34.805.289.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004		Biro Hukum	5.197.481.142,00	3.538.030.653,00	674.657.320,00	582.611.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.290.406.508,00	1.129.493.610,00	674.657.320,00	582.611.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	210.828.194,00	139.667.887,00	674.657.320,00	582.611.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.740.700,00	11.731.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.465.594,00	77.876.368,00	674.657.320,00	582.611.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.990.900,00	7.714.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.631.000,00	42.346.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.079.578.314,00	989.825.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	466.545.689,00	456.570.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	555.142.625,00	477.698.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	1.600.000,00	1.527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.290.000,00	54.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.907.074.634,00	2.408.537.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.444.965.079,00	1.179.052.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	896.217.607,00	694.231.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	96.598.720,00	90.196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	181.669.517,00	152.918.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	270.479.235,00	241.705.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	2.462.109.555,00	1.229.484.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	2.267.456.935,00	1.052.264.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	194.652.620,00	177.220.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000		Sekretariat Daerah	79.617.296.271,00	71.656.368.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	79.617.296.271,00	71.656.368.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	76.609.455.509,00	70.643.040.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	76.609.455.509,00	70.643.040.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.007.840.762,00	1.013.327.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0000	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.007.840.762,00	1.013.327.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001		Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	71.298.613.565,00	55.350.769.652,00	392.180.320,00	332.367.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.473.590.519,00	1.333.203.178,00	392.180.320,00	332.367.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	218.269.427,00	202.574.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	218.269.427,00	202.574.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	236.404.600,00	183.928.573,00	392.180.320,00	332.367.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.976.600,00	14.876.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.026.000,00	14.667.240,00	392.180.320,00	332.367.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.727.000,00	26.460.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.675.000,00	127.923.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.018.916.492,00	946.700.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	919.956.492,00	899.452.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.160.000,00	47.247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.736.831.282,00	1.267.631.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	473.354.475,00	379.224.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	361.982.075,00	307.747.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	111.372.400,00	71.477.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	373.114.800,00	193.797.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	262.095.300,00	144.985.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	111.019.500,00	48.811.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	890.362.007,00	694.608.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	208.208.307,00	159.241.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	682.153.700,00	535.367.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	68.088.191.764,00	52.749.934.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	18.096.092.088,00	5.990.174.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	17.541.811.336,00	5.609.244.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	554.280.752,00	380.930.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	49.992.099.676,00	46.759.760.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0001	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	49.992.099.676,00	46.759.760.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003		Biro Umum dan Protokol	110.137.804.443,00	83.527.500.448,00	4.730.365.079,00	3.559.520.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	110.137.804.443,00	83.527.500.448,00	4.730.365.079,00	3.559.520.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	413.080.028,00	395.034.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	413.080.028,00	395.034.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	473.686.464,00	469.273.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	473.686.464,00	469.273.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	262.467.532,00	256.328.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	262.467.532,00	256.328.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.022.113.929,00	14.612.502.757,00	908.100.240,00	782.396.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	580.110.220,00	483.597.283,00	39.916.800,00	32.234.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.535.310.143,00	1.193.446.853,00	868.183.440,00	750.161.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.862.833.477,00	7.292.636.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.692.607.347,00	5.308.968.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	351.252.742,00	333.854.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.164.325.685,00	27.259.442.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.069.469.360,00	1.675.174.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.565.733.308,00	20.219.069.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.529.123.017,00	5.365.198.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.293.118.140,00	12.939.384.270,00	724.080.252,00	343.654.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.375.876.952,00	6.277.955.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.917.241.188,00	6.661.428.492,00	724.080.252,00	343.654.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6.317.806.694,00	6.315.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6.317.806.694,00	6.315.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	29.934.957.467,00	20.029.332.276,00	3.098.184.587,00	2.433.469.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	18.637.264.857,00	14.120.822.259,00	1.711.586.577,00	1.273.179.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	10.893.195.512,00	5.603.425.957,00	1.386.598.010,00	1.160.289.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	404.497.098,00	305.084.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	224.717.000,00	222.566.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	224.717.000,00	222.566.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	1.031.531.504,00	1.028.635.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0003	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1.031.531.504,00	1.028.635.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0005		Biro Organisasi	1.975.996.152,00	1.687.355.330,00	432.515.319,00	378.676.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0005	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.182.022.966,00	994.300.851,00	432.515.319,00	378.676.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0005	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.976.000,00	3.262.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0005	4.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.976.000,00	3.262.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0005	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	358.366.488,00	281.121.308,00	432.515.319,00	378.676.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0005	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.460.400,00	14.282.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0005	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.430.088,00	161.228.049,00	432.515.319,00	378.676.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0005	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.476.000,00	105.611.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0005	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	818.680.478,00	709.916.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0005	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	738.230.478,00	675.479.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0005	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.450.000,00	34.437.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0005	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	793.973.186,00	693.054.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0005	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	346.692.005,00	290.766.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0005	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	85.315.000,00	73.125.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0005	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	80.700.000,00	62.340.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0005	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	180.677.005,00	155.299.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0005	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	447.281.181,00	402.288.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0005	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	136.243.892,00	127.930.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0005	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	116.325.392,00	114.646.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0005	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	14.997.000,00	8.524.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0005	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	101.993.492,00	79.429.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0005	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	77.721.405,00	71.757.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007		Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	3.122.077.993,00	2.270.109.009,00	32.681.541.005,00	29.952.112.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.830.192.193,00	1.529.578.432,00	610.249.580,00	545.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.950.000,00	4.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.950.000,00	4.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.167.462.193,00	1.060.678.541,00	610.249.580,00	545.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	985.769.693,00	961.217.818,00	610.249.580,00	545.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.500,00	15.791.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.692.000,00	83.668.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	648.780.000,00	464.359.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	557.480.000,00	400.868.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.300.000,00	63.491.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	905.328.800,00	459.930.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	230.804.000,00	198.594.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	230.804.000,00	198.594.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	130.124.000,00	97.104.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	130.124.000,00	97.104.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	544.400.800,00	164.231.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	544.400.800,00	164.231.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	324.742.000,00	221.591.578,00	32.071.291.425,00	29.406.767.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	112.199.000,00	86.827.383,00	32.071.291.425,00	29.406.767.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	21.330.000,00	19.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	48.404.000,00	28.376.883,00	32.071.291.425,00	29.406.767.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	42.465.000,00	39.102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	98.999.000,00	36.996.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	51.105.000,00	15.661.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	47.894.000,00	21.335.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	113.544.000,00	97.767.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	73.676.000,00	70.466.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	10.140.000,00	8.452.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	29.728.000,00	18.848.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	61.815.000,00	59.008.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	30.030.000,00	29.965.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	30.030.000,00	29.965.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	31.785.000,00	29.043.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0007	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	31.785.000,00	29.043.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0008		Biro Humas dan Protokol	7.110.033.300,00	5.005.596.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0008	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.110.033.300,00	5.005.596.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0008	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.440.000,00	12.498.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0008	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.440.000,00	12.498.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0008	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	6.001.237.600,00	4.017.872.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0008	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan	278.165.600,00	219.606.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0008	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	5.319.816.000,00	3.494.415.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0008	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	403.256.000,00	303.850.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0008	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	1.031.355.700,00	975.225.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0008	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	388.398.000,00	386.724.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.23.2.24.01.0008	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	642.957.700,00	588.501.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	253.963.069.629,00	154.624.501.796,00	38.567.104.148,00	30.822.879.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat DPRD	253.963.069.629,00	154.624.501.796,00	38.567.104.148,00	30.822.879.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	103.958.021.669,00	87.927.617.281,00	38.567.104.148,00	30.822.879.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	782.804.610,00	368.082.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	495.356.005,00	287.012.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	287.448.605,00	81.069.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.803.935.217,00	10.925.432.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.483.270.707,00	10.693.761.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	185.100.705,00	117.844.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	135.563.805,00	113.825.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.726.847.188,00	6.282.621.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	498.521.386,00	383.544.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.941.833.246,00	1.530.867.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	141.209.600,00	73.926.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.096.920.000,00	1.049.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.048.362.956,00	3.245.242.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.600.000,00	77.500.000,00	15.465.738.236,00	12.012.997.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77.600.000,00	77.500.000,00	15.465.738.236,00	12.012.997.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.971.149.087,00	2.473.389.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.700.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	950.000.000,00	727.414.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.005.449.087,00	1.735.974.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.174.232.538,00	6.345.875.909,00	23.101.365.912,00	18.809.881.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.915.956.238,00	3.502.553.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.115.236.300,00	2.205.369.774,00	23.101.365.912,00	18.809.881.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.143.040.000,00	637.953.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	65.016.758.209,00	60.564.063.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	62.926.813.904,00	59.045.482.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.785.578.500,00	1.329.494.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	304.365.805,00	189.086.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	1.404.694.820,00	890.652.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	119.333.420,00	89.179.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.285.361.400,00	801.473.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	150.005.047.960,00	66.696.884.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	20.414.565.417,00	6.199.270.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.896.054.110,00	796.805.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	17.458.355.002,00	5.155.760.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	1.060.156.305,00	246.704.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	6.724.518.017,00	2.020.279.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	75.911.892,00	39.850.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	64.867.710,00	24.541.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	4.865.797.405,00	1.134.385.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	855.896.705,00	583.084.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	862.044.305,00	238.417.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	25.776.199.424,00	8.000.321.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	7.947.975.299,00	2.044.518.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	5.644.015.800,00	1.697.994.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	5.457.067.715,00	1.625.381.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	5.995.348.410,00	2.260.885.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	731.792.200,00	371.540.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	14.429.738.855,00	10.437.104.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	3.638.481.115,00	2.356.423.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4.467.166.400,00	4.463.402.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	670.186.800,00	668.244.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	1.441.278.410,00	185.150.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4.212.626.130,00	2.763.884.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	41.396.852.612,00	35.889.660.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	3.305.126.902,00	1.714.619.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	2.905.029.500,00	252.098.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	35.186.696.210,00	33.922.943.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	853.546.910,00	201.315.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	853.546.910,00	201.315.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	40.409.626.725,00	3.948.932.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	36.254.544.515,00	3.343.056.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	468.679.410,00	77.694.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3.686.402.800,00	528.182.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	309.557.114.026,00	281.748.480.507,47	23.055.405.413,00	15.476.466.838,30	53.861.777.244,00	14.075.388.800,30	1.344.164.836.020,00	1.246.339.410.303,03
5.01			PERENCANAAN	22.778.497.637,00	20.061.098.977,52	3.129.837.205,00	1.276.791.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	22.778.497.637,00	20.061.098.977,52	3.129.837.205,00	1.276.791.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.700.100.993,00	16.860.659.596,52	3.129.837.205,00	1.276.791.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	182.864.899,00	159.949.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	155.075.999,00	144.272.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.474.400,00	7.091.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	11.444.900,00	5.486.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.869.600,00	3.099.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.490.436.145,00	14.510.570.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.275.945.418,00	14.304.796.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	118.820.625,00	116.755.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	95.670.102,00	89.018.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	781.548.321,00	483.124.921,00	784.249.440,00	615.793.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.723.105,00	42.498.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.046.592,00	69.881.036,00	784.249.440,00	615.793.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129.063.004,00	115.173.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.205.505,00	31.057.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	46.905.705,00	42.009.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.527.705,00	19.711.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	387.076.705,00	162.793.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.155.092,00	45.488.842,00	361.989.600,00	355.843.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	361.989.600,00	355.843.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.155.092,00	45.488.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	928.103.174,00	891.701.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.339.205,00	19.227.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	197.266.492,00	181.568.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	710.497.477,00	690.904.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.267.993.362,00	769.824.387,52	1.983.598.165,00	305.153.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	729.044.165,00	540.724.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	186.882.705,00	71.795.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	352.066.492,00	157.304.452,52	1.983.598.165,00	305.153.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.319.080.141,00	1.901.656.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.224.098.817,00	1.114.762.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	15.570.300,00	14.697.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	93.767.400,00	89.517.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.114.761.117,00	1.010.547.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	380.106.712,00	346.407.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	363.016.812,00	332.603.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	17.089.900,00	13.803.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	670.393.312,00	414.319.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	95.827.700,00	38.305.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	418.498.812,00	264.820.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	156.066.800,00	111.193.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	44.481.300,00	26.167.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	44.481.300,00	26.167.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.759.316.503,00	1.298.783.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	743.110.924,00	539.362.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	69.671.910,00	47.455.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	84.909.605,00	46.426.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	411.747.307,00	344.904.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	176.782.102,00	100.576.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	541.537.924,00	402.791.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	171.803.907,00	134.107.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	170.370.402,00	129.416.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	66.715.405,00	42.177.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	132.648.210,00	97.089.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	474.667.655,00	356.629.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	198.104.730,00	154.977.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	50.477.700,00	28.205.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	174.897.625,00	130.407.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	51.187.600,00	43.038.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02			KEUANGAN	193.765.807.717,00	177.525.838.570,73	13.478.962.003,00	10.490.640.786,30	53.861.777.244,00	14.075.388.800,30	1.344.164.836.020,00	1.246.339.410.303,03
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	33.624.662.237,00	26.850.294.526,47	2.734.345.860,00	2.466.777.097,00	53.861.777.244,00	14.075.388.800,30	1.344.164.836.020,00	1.246.339.410.303,03
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.554.645.954,00	20.772.732.759,77	2.734.345.860,00	2.466.777.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.873.000,00	29.810.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.873.000,00	29.810.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.403.240.843,00	18.336.334.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.428.130.146,00	17.489.430.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	975.110.697,00	846.904.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	601.669.837,00	368.790.640,00	2.704.345.860,00	2.437.024.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.020.700,00	9.130.000,00	5.004.000,00	4.770.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.555.410,00	34.555.410,00	2.699.341.860,00	2.432.254.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	239.052.922,00	177.363.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.930.200,00	5.113.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.999.900,00	6.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	111.027.705,00	53.049.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.083.000,00	83.092.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.010.000,00	234.357.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.710.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	285.300.000,00	231.357.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.214.852.274,00	1.803.439.781,77	30.000.000,00	29.752.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	771.551.076,00	553.404.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	6.400.000,00	6.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158.637.005,00	85.423.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.278.264.193,00	1.158.251.359,77	30.000.000,00	29.752.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.749.754.859,00	4.658.828.868,00	0,00	0,00	53.861.777.244,00	14.075.388.800,30	1.344.164.836.020,00	1.246.339.410.303,03
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.695.239.520,00	1.381.572.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	47.133.100,00	41.568.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	34.356.300,00	18.362.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	34.764.500,00	28.667.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	20.456.000,00	16.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	891.146.920,00	702.594.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	667.382.700,00	573.739.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	514.026.700,00	208.526.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	109.226.700,00	37.830.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	80.274.200,00	21.669.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	63.616.900,00	38.844.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	194.972.400,00	94.789.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.02.0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	65.936.500,00	15.392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	651.859.800,00	506.337.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	651.859.800,00	506.337.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	795.851.706,00	494.688.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	722.799.306,00	458.537.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	73.052.400,00	36.150.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.026.843.633,00	2.026.843.633,00	0,00	0,00	53.861.777.244,00	14.075.388.800,30	1.344.164.836.020,00	1.246.339.410.303,03
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.026.843.633,00	2.026.843.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.315.879.304,00	280.600.433.855,03
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	0,00	0,00	53.861.777.244,00	14.075.388.800,30	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.848.956.716,00	965.738.976.448,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	65.933.500,00	40.859.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	65.933.500,00	40.859.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.320.261.424,00	1.418.732.898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.320.261.424,00	1.418.732.898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	121.715.300,00	115.769.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	22.166.000,00	17.737.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	214.630.000,00	176.322.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.961.750.124,00	1.108.902.968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001		UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.400.024.044,00	2.439.491.306,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.297.520.044,00	1.038.664.227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.844.600,00	90.167.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.748.500,00	32.084.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.449.100,00	6.284.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.485.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.962.000,00	43.248.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.200.000,00	6.486.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	152.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.000.000,00	6.333.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.077.475.444,00	942.009.617,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	154.525.000,00	145.719.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.260.000,00	13.624.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	907.690.444,00	782.665.768,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.102.504.000,00	1.400.827.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.102.504.000,00	1.400.827.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	2.102.504.000,00	1.400.827.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000		Badan Pendapatan Daerah	132.191.801.329,00	125.809.462.108,21	10.744.616.143,00	8.023.863.689,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	131.482.454.829,00	125.321.916.640,21	10.744.616.143,00	8.023.863.689,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.277.300,00	30.573.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.336.100,00	13.443.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.941.200,00	17.129.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	125.381.527.196,00	120.865.265.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	125.381.527.196,00	120.865.265.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.254.352.494,00	753.792.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.556.000,00	9.755.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	318.006.500,00	244.363.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101.575.894,00	96.821.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	324.960.300,00	307.789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.428.800,00	1.987.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.500.000,00	6.452.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	483.325.000,00	86.623.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.636.000,00	11.598.240,00	9.827.203.893,00	7.126.305.942,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	218.777.440,00	183.649.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	1.390.847.900,00	1.070.609.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.636.000,00	11.598.240,00	8.217.578.553,00	5.872.046.603,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	828.033.877,00	691.138.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.147.400,00	3.894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	387.433.104,00	280.486.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	434.453.373,00	406.757.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.908.627.962,00	2.969.548.887,21	917.412.250,00	897.557.746,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	124.469.592,00	61.045.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.434.609.652,00	756.674.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	465.547.215,00	445.523.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	748.794.960,00	689.249.407,21	917.412.250,00	897.557.746,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.135.206.543,00	1.017.055.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	709.346.500,00	487.545.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	709.346.500,00	487.545.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	128.726.400,00	93.690.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	93.709.600,00	71.113.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	142.974.800,00	58.412.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	308.975.700,00	239.091.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	34.960.000,00	25.237.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng	4.001.267.704,00	3.761.608.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.630.601.071,00	1.516.295.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	307.783.600,00	280.038.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.259.300,00	4.698.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	192.580.600,00	177.569.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	22.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.239.200,00	4.686.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.854.500,00	4.124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.850.000,00	5.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.000.000,00	60.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532.789.800,00	479.976.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.789.800,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	261.000.000,00	213.237.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	270.000.000,00	265.138.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	790.027.671,00	756.281.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.000.000,00	42.973.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.714.492,00	151.677.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.180.000,00	20.376.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	529.409.379,00	527.898.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.723.800,00	13.356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.370.666.633,00	2.245.312.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.370.666.633,00	2.245.312.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.151.015.939,00	1.079.818.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0001	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1.219.650.694,00	1.165.494.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana	1.907.274.153,00	1.645.921.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.166.857.200,00	985.243.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.121.720,00	177.992.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.664.700,00	3.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.410.120,00	98.744.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	24.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.691.900,00	3.813.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.775.000,00	3.915.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.580.000,00	44.118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	372.491.500,00	334.196.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.491.500,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.000.000,00	145.688.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.000.000,00	187.558.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	582.243.980,00	473.054.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.703.000,00	26.937.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.708.392,00	94.351.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.020.000,00	13.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	326.376.788,00	325.929.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.435.800,00	12.081.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	740.416.953,00	660.677.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	740.416.953,00	660.677.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	240.708.132,00	233.007.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0002	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	499.708.821,00	427.670.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan	2.048.052.169,00	1.900.950.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.433.157.380,00	1.310.757.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	208.243.990,00	174.405.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.949.800,00	5.832.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	142.850.490,00	112.489.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.000.000,00	26.128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.783.700,00	6.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.375.000,00	3.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.285.000,00	20.632.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479.978.200,00	427.799.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.978.200,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	184.000.000,00	134.178.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	294.000.000,00	292.361.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	744.935.190,00	708.552.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.855.000,00	40.267.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	225.937.992,00	202.980.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.460.000,00	18.492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	435.432.198,00	433.561.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	614.894.789,00	590.193.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	614.894.789,00	590.193.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	286.723.542,00	276.590.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0003	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	328.171.247,00	313.603.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung	3.547.988.881,00	3.303.725.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.097.625.203,00	1.878.731.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	257.107.040,00	203.613.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.924.100,00	8.687.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	174.516.890,00	129.539.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	23.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.186.050,00	13.741.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.840.000,00	3.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.575.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.065.000,00	15.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	817.209.147,00	685.245.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.978.200,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	378.000.000,00	246.676.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	437.230.947,00	436.619.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.023.309.016,00	989.871.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.265.000,00	31.766.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	188.338.992,00	163.729.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.920.000,00	19.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	750.945.024,00	748.803.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.840.000,00	25.842.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.450.363.678,00	1.424.994.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.450.363.678,00	1.424.994.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	990.567.152,00	980.433.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0004	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	459.796.526,00	444.560.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar	4.724.906.077,00	4.309.397.693,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.729.446.790,00	2.326.853.843,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	572.518.524,00	423.229.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.435.800,00	4.405.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	404.759.830,00	284.582.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.122.194,00	53.769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	65.536.700,00	46.401.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.424.000,00	4.828.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.875.000,00	16.533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.365.000,00	12.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	867.965.394,00	716.425.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.491.500,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	474.550.000,00	326.795.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	391.923.894,00	388.680.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.288.962.872,00	1.187.198.470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.270.800,00	33.077.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	226.489.104,00	177.156.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.040.000,00	14.450.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	945.518.368,00	922.689.037,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.644.600,00	39.824.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.995.459.287,00	1.982.543.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.995.459.287,00	1.982.543.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.513.483.023,00	1.512.532.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0005	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	481.976.264,00	470.011.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar	2.684.865.828,00	2.477.886.502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.607.346.939,00	1.411.669.693,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	284.012.314,00	228.598.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.931.000,00	16.413.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	145.966.580,00	110.037.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.718.634,00	56.644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.463.600,00	10.283.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.212.500,00	5.378.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.600.000,00	12.479.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.120.000,00	17.362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	589.920.457,00	524.617.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.826.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000,00	186.816.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	337.094.457,00	336.000.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	733.414.168,00	658.453.355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.500.000,00	38.738.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.497.500,00	108.878.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.300.000,00	22.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	463.096.668,00	462.516.855,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.020.000,00	26.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.077.518.889,00	1.066.216.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.077.518.889,00	1.066.216.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	731.553.314,00	722.931.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0006	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	345.965.575,00	343.285.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli	1.822.952.970,00	1.592.469.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.169.253.164,00	952.547.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.923.500,00	133.679.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.009.700,00	6.202.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.788.300,00	83.854.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.500.000,00	28.313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.399.700,00	1.951.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.250.800,00	2.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.975.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.000.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	491.639.287,00	442.680.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.789.800,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000,00	84.906.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	359.849.487,00	356.633.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	505.690.377,00	376.187.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.995.000,00	39.875.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.518.700,00	68.801.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.290.000,00	13.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	330.787.477,00	246.654.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.099.200,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	653.699.806,00	639.921.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	653.699.806,00	639.921.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	303.965.444,00	293.832.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0007	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	349.734.362,00	346.089.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung	1.988.585.947,00	1.783.991.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.399.958.289,00	1.213.651.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.023.800,00	140.702.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.660.400,00	2.564.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.050.400,00	78.899.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.280.000,00	30.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.674.000,00	3.584.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.580.000,00	1.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.325.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.454.000,00	20.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	429.193.200,00	359.237.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.193.200,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.000.000,00	141.710.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	218.000.000,00	216.767.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	790.741.289,00	713.711.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.835.000,00	26.868.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.991.500,00	106.206.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.390.000,00	10.300.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	560.964.789,00	554.375.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.560.000,00	15.959.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	588.627.658,00	570.340.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	588.627.658,00	570.340.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	270.503.542,00	262.744.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0008	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	318.124.116,00	307.595.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem	1.823.426.378,00	1.650.639.098,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.195.161.589,00	1.058.982.309,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.492.980,00	188.898.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.827.100,00	3.687.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.245.980,00	92.585.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.837.000,00	26.732.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.182.900,00	3.403.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.175.000,00	1.440.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.575.000,00	3.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.650.000,00	57.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	403.193.200,00	376.249.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.193.200,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.000.000,00	140.751.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	237.000.000,00	234.738.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	565.475.409,00	493.833.418,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.490.000,00	48.443.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.835.592,00	78.913.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.390.000,00	10.993.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	352.455.017,00	341.168.656,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.304.800,00	14.313.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	628.264.789,00	591.656.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	628.264.789,00	591.656.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	317.121.247,00	289.943.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0009	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	311.143.542,00	301.713.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03			KEPEGAWAIAN	56.663.145.772,00	52.149.720.075,22	3.658.383.000,00	1.732.174.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	36.178.124.450,00	33.540.400.047,22	575.633.000,00	495.942.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.462.751.948,00	30.124.130.420,22	575.633.000,00	495.942.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.382.600,00	59.016.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.200.000,00	8.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.600.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.042.600,00	81.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.540.000,00	47.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.450.461.161,00	27.361.276.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.450.461.161,00	27.361.276.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	469.012.234,00	341.350.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.762.400,00	15.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	153.768.400,00	115.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.079.034,00	84.482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.280.400,00	7.936.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.137.000,00	3.175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.985.000,00	114.406.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	575.633.000,00	495.942.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	575.633.000,00	495.942.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	976.616.633,00	952.613.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.386.400,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.600.000,00	230.463.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	720.630.233,00	720.630.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.464.279.320,00	1.409.873.155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.010.648.320,00	979.951.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	316.731.000,00	301.314.451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	136.900.000,00	128.607.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.715.372.502,00	3.416.269.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.255.051.807,00	1.147.582.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	41.856.000,00	31.095.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	788.914.000,00	724.688.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	39.368.000,00	32.782.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	97.385.705,00	91.112.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	154.596.500,00	149.497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	132.931.602,00	118.405.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	240.395.815,00	180.088.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	34.097.405,00	27.618.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	116.113.705,00	94.576.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	90.184.705,00	57.893.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.842.443.689,00	1.748.419.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	73.996.492,00	73.390.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1.492.206.492,00	1.472.575.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	18.608.000,00	17.333.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	195.266.000,00	140.657.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	62.366.705,00	44.462.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	377.481.191,00	340.179.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	93.996.197,00	93.420.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	59.545.100,00	53.682.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	122.816.997,00	96.101.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	84.056.197,00	83.578.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	17.066.700,00	13.396.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0001		UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	1.842.221.322,00	1.676.993.378,00	25.550.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0001	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	258.563.622,00	241.023.656,00	25.550.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0001	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.514.400,00	23.247.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0001	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.176.400,00	1.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0001	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.338.000,00	21.842.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0001	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	25.550.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0001	5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	25.550.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0001	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.732.722,00	143.732.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0001	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	143.732.722,00	143.732.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0001	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.316.500,00	74.043.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0001	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.656.500,00	65.540.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0001	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.660.000,00	8.503.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0001	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.583.657.700,00	1.435.969.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0001	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.583.657.700,00	1.435.969.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0001	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	1.583.657.700,00	1.435.969.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0002		UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	18.642.800.000,00	16.932.326.650,00	3.057.200.000,00	1.216.981.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0002	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.642.800.000,00	16.932.326.650,00	3.057.200.000,00	1.216.981.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0002	5.03.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	18.642.800.000,00	16.932.326.650,00	3.057.200.000,00	1.216.981.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0002	5.03.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	18.642.800.000,00	16.932.326.650,00	3.057.200.000,00	1.216.981.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.232.466.689,00	988.115.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.232.466.689,00	988.115.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.232.466.689,00	988.115.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.232.466.689,00	988.115.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	267.709.492,00	159.804.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	204.089.000,00	123.976.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	531.056.492,00	517.417.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	116.684.500,00	103.967.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	69.561.205,00	46.563.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	43.366.000,00	36.385.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	24.972.788.562,00	21.915.113.824,00	1.914.807.540,00	1.459.986.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000		Badan Riset dan Inovasi Daerah	24.972.788.562,00	21.915.113.824,00	1.914.807.540,00	1.459.986.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.444.102.162,00	12.250.140.664,00	1.914.807.540,00	1.459.986.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.951.000,00	52.622.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.789.000,00	21.085.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.162.000,00	31.536.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.735.967.860,00	9.982.633.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.735.967.860,00	9.982.633.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	576.031.300,00	393.464.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.938.000,00	13.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	205.509.000,00	125.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.436.400,00	88.381.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.180.200,00	15.992.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.998.700,00	12.105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.969.000,00	138.507.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	1.677.862.540,00	1.224.062.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	607.456.200,00	452.099.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	1.070.406.340,00	771.962.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	519.869.144,00	442.716.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.162.700,00	7.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.200.000,00	112.105.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	341.506.444,00	323.500.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.553.282.858,00	1.378.704.435,00	236.945.000,00	235.924.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	784.032.101,00	708.294.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	769.250.757,00	670.410.062,00	236.945.000,00	235.924.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	11.528.686.400,00	9.664.973.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	8.506.608.000,00	6.828.827.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	6.274.365.000,00	6.190.284.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.01.0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	292.539.000,00	210.398.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	245.784.000,00	209.452.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	1.693.920.000,00	218.691.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2.642.424.300,00	2.509.204.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	394.398.800,00	365.618.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	231.500.000,00	228.542.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	894.682.000,00	889.120.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	234.732.500,00	231.072.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	218.611.000,00	216.976.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	668.500.000,00	577.873.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	379.654.100,00	326.941.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	167.232.700,00	153.932.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	61.661.400,00	52.914.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	150.760.000,00	120.094.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07			PENGELOLAAN PENGHUBUNG	10.144.407.649,00	9.108.593.661,00	873.415.665,00	516.874.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000		Badan Penghubung	10.144.407.649,00	9.108.593.661,00	873.415.665,00	516.874.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.054.480.131,00	6.363.284.798,00	742.034.256,00	413.089.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.300,00	4.865.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.300,00	4.865.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.168.063.101,00	2.818.866.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.168.063.101,00	2.818.866.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	271.821.500,00	264.331.328,00	6.716.000,00	6.576.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.989.400,00	14.041.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.977.600,00	56.673.890,00	6.716.000,00	6.576.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.090.500,00	5.566.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.764.000,00	98.049.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.091.000,00	28.638.000,00	515.139.256,00	406.512.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.091.000,00	28.638.000,00	515.139.256,00	406.512.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.529.745.566,00	1.387.224.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.989.100,00	7.545.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	306.800.000,00	187.355.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.213.956.466,00	1.192.324.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.050.759.664,00	1.859.357.905,00	220.179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.581.337.868,00	1.431.997.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	317.796.000,00	309.388.694,00	220.179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	151.625.796,00	117.972.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	3.089.927.518,00	2.745.308.863,00	131.381.409,00	103.784.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	3.089.927.518,00	2.745.308.863,00	131.381.409,00	103.784.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	48.717.600,00	43.098.045,00	66.618.787,00	48.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	326.087.665,00	309.150.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2.715.122.253,00	2.393.060.253,00	64.762.622,00	55.299.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	34.051.151.092,00	32.256.665.618,00	1.893.023.740,00	1.758.588.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	34.051.151.092,00	32.256.665.618,00	1.893.023.740,00	1.758.588.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		Inspektorat	34.051.151.092,00	32.256.665.618,00	1.893.023.740,00	1.758.588.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.710.915.675,00	28.401.992.813,00	1.893.023.740,00	1.758.588.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.659.000,00	36.310.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.521.800,00	13.290.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.137.200,00	23.019.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.039.950.471,00	25.022.376.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.039.950.471,00	25.022.376.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.079.791.694,00	953.584.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.999.400,00	46.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.997.800,00	84.115.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	158.109.394,00	123.415.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.070.300,00	25.185.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	44.140.800,00	35.956.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.960.000,00	40.436.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	647.514.000,00	598.311.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	1.694.023.740,00	1.565.693.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	1.694.023.740,00	1.565.693.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	633.153.460,00	562.240.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.092.900,00	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	318.500.000,00	270.308.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	309.560.560,00	289.961.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.915.361.050,00	1.827.481.679,00	199.000.000,00	192.895.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.617.453.428,00	1.560.661.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	142.752.212,00	127.778.629,00	199.000.000,00	192.895.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	155.155.410,00	139.041.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.034.965.370,00	1.973.590.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.469.399.045,00	1.419.254.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	92.116.810,00	87.814.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	159.626.210,00	158.530.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	48.013.500,00	33.709.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	142.605.705,00	141.706.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	547.158.610,00	531.179.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	283.700.300,00	273.687.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	196.177.910,00	192.626.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	565.566.325,00	554.336.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	50.875.110,00	50.277.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	514.691.215,00	504.058.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.305.270.047,00	1.881.081.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.591.152.632,00	1.195.488.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	299.286.015,00	292.935.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1.291.866.617,00	902.553.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	714.117.415,00	685.592.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	211.249.315,00	197.556.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	141.882.800,00	138.058.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	283.068.900,00	278.190.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	77.916.400,00	71.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	46.314.918.705,00	44.126.425.079,38	933.306.540,00	850.879.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	46.314.918.705,00	44.126.425.079,38	933.306.540,00	850.879.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	46.314.918.705,00	44.126.425.079,38	933.306.540,00	850.879.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.561.208.118,00	10.579.765.488,38	933.306.540,00	850.879.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.596.000,00	68.353.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.956.000,00	50.193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.640.000,00	18.160.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.075.753.924,00	8.315.619.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.075.753.924,00	8.315.619.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	379.382.524,00	261.589.645,00	221.977.300,00	193.473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.921.500,00	14.592.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.140.000,00	12.428.000,00	221.977.300,00	193.473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.229.424,00	76.655.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.880.500,00	28.065.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.996.100,00	3.796.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.215.000,00	126.051.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	711.329.240,00	657.406.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	294.406.500,00	278.750.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	416.922.740,00	378.655.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	981.753.870,00	950.943.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.994.800,00	7.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.100.000,00	115.091.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	830.659.070,00	828.212.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.043.721.800,00	983.258.771,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	804.100.000,00	759.665.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.960.000,00	18.697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	181.981.800,00	169.208.079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.680.000,00	35.687.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	4.671.570.389,00	4.109.923.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4.671.570.389,00	4.109.923.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.223.475.089,00	955.245.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	3.448.095.300,00	3.154.678.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	24.179.333.089,00	24.123.108.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	24.179.333.089,00	24.123.108.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	24.179.333.089,00	24.123.108.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	990.317.000,00	953.171.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	990.317.000,00	953.171.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	990.317.000,00	953.171.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	801.214.207,00	734.658.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	801.214.207,00	734.658.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	801.214.207,00	734.658.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	4.111.275.902,00	3.625.798.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4.111.275.902,00	3.625.798.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3.152.903.802,00	3.097.322.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	958.372.100,00	528.475.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah	5.053.188.410.600,60	4.520.551.159.698,76	961.755.254.119,00	773.687.032.749,53	53.861.777.244,00	14.075.388.800,30	1.344.164.836.020,00	1.246.339.410.303,03

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN	
		2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	623.732.459.203,32	171.480.190.581,56
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	620.675.986.790,62	171.480.190.581,56
Subtotal		**3.056.472.412,70**	**0,00**
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	712.874.066.422,64	623.732.459.203,32
Subtotal		**715.930.538.835,34**	**623.732.459.203,32**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	(3.056.472.412,70)	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**5.2.5**	**712.874.066.422,64**	**623.732.459.203,32**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN	**5.4.1**	**10.085.025.980.851,22**	**9.377.513.158.571,52**	**707.512.822.279,70**	**7,54**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**5.4.1.1**	**4.097.995.770.279,09**	**5.671.351.179.818,08**	**(1.573.355.409.538,99)**	**(27,74)**
Pajak Daerah	5.4.1.1.1	2.816.701.997.992,96	4.518.050.546.030,04	(1.701.348.548.037,08)	(37,66)
Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	385.092.787.203,91	340.629.347.580,42	44.463.439.623,49	13,05
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	319.658.402.673,98	335.046.479.341,41	(15.388.076.667,43)	(4,59)
Lain-lain PAD yang Sah	5.4.1.1.4	576.542.582.408,24	477.624.806.866,21	98.917.775.542,03	20,71
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		**4.097.995.770.279,09**	**5.671.351.179.818,08**	**(1.573.355.409.538,99)**	**(27,74)**
PENDAPATAN TRANSFER	**5.4.1.2**	**2.586.463.824.695,00**	**2.263.980.364.237,00**	**322.483.460.458,00**	**14,24**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.4.1.2.1	**2.551.638.134.326,00**	**2.263.980.364.237,00**	**287.657.770.089,00**	**12,71**
Dana Perimbangan	5.4.1.2.1.1	0,00	2.240.823.010.237,00	(2.240.823.010.237,00)	(100,00)
Dana Bagi Hasil (DBH) - LO	5.4.1.2.1.2	423.405.887.500,00	0,00	423.405.887.500,00	100,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	5.4.1.2.1.3	1.403.485.166.622,00	0,00	1.403.485.166.622,00	100,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	5.4.1.2.1.4	711.768.494.204,00	0,00	711.768.494.204,00	100,00
Insentif Fiskal-LO	5.4.1.2.1.5	12.978.586.000,00	23.157.354.000,00	(10.178.768.000,00)	(43,95)
Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah	5.4.1.2.2	**34.825.690.369,00**	**0,00**	**34.825.690.369,00**	**100,00**
Bantuan Keuangan	5.4.1.2.2.1	34.825.690.369,00	0,00	34.825.690.369,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer		**2.586.463.824.695,00**	**2.263.980.364.237,00**	**322.483.460.458,00**	**14,24**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**5.4.1.3**	**3.400.566.385.877,13**	**1.442.181.614.516,44**	**1.958.384.771.360,69**	**135,79**
Pendapatan Hibah	5.4.1.3.1	3.400.091.365.877,13	1.441.939.855.516,44	1.958.151.510.360,69	135,80
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	5.4.1.3.2	475.020.000,00	241.759.000,00	233.261.000,00	96,48
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		**3.400.566.385.877,13**	**1.442.181.614.516,44**	**1.958.384.771.360,69**	**135,79**
JUMLAH PENDAPATAN		**10.085.025.980.851,22**	**9.377.513.158.571,52**	**707.512.822.279,70**	**7,54**
BEBAN	**5.4.2**	**6.059.034.551.978,29**	**7.400.208.014.848,32**	**(1.341.173.462.870,03)**	**(18,12)**
BEBAN OPERASI	**5.4.2.1**	**5.083.409.266.836,26**	**5.493.833.077.696,32**	**(410.423.810.860,06)**	**(7,47)**
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	2.295.243.928.886,13	2.069.550.805.320,36	225.693.123.565,77	10,91
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	1.410.895.187.012,16	1.288.255.443.830,08	122.639.743.182,08	9,52
Beban Subsidi	5.4.2.1.3	10.009.000.000,00	2.525.000.000,00	7.484.000.000,00	296,40
Beban Hibah	5.4.2.1.4	902.463.875.280,97	1.056.940.040.569,00	(154.476.165.288,03)	(14,62)
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.5	14.165.100.000,00	7.529.500.000,00	6.635.600.000,00	88,13
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.6	4.464.278.881,10	421.883.113.798,14	(417.418.834.917,04)	(98,94)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.7	446.167.896.775,90	647.149.174.178,74	(200.981.277.402,84)	(31,06)
BEBAN TRANSFER	**5.4.2.2**	**975.625.285.142,03**	**1.906.374.937.152,00**	**(930.749.652.009,97)**	**(48,82)**
Beban Bagi Hasil	5.4.2.2.1	695.024.851.287,00	1.748.842.154.053,00	(1.053.817.302.766,00)	(60,26)
Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.2.2	280.600.433.855,03	157.532.783.099,00	123.067.650.756,03	78,12
JUMLAH BEBAN		**6.059.034.551.978,29**	**7.400.208.014.848,32**	**(1.341.173.462.870,03)**	**(18,12)**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**4.025.991.428.872,93**	**1.977.305.143.723,20**	**2.048.686.285.149,73**	**103,61**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON-OPERASIONAL					
SURPLUS NON-OPERASIONAL	**5.4.3**	**64.624.774.904,81**	**1.802.044.198,34**	**62.822.730.706,47**	**3.486,19**
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	5.4.3.1	724.625.734,00	623.256.918,00	101.368.816,00	16,26
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	5.4.3.2	0,00	30.705.444,00	(30.705.444,00)	100,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.3.3	63.900.149.170,81	1.148.081.836,34	62.752.067.334,47	5.465,82
DEFISIT NON-OPERASIONAL	**5.4.4**	**5.269.234.426,05**	**12.339.160.312,80**	**(7.069.925.886,75)**	**(57,30)**
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	5.4.4.1	2.423.399.368,05	7.246.745.411,80	(4.823.346.043,75)	(66,56)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.4.2	2.845.835.058,00	5.092.414.901,00	(2.246.579.843,00)	(44,12)
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON-		**59.355.540.478,76**	**(10.537.116.114,46)**	**69.892.656.593,22**	**(663,30)**
POS LUAR BIASA		**21.888.800,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BEBAN LUAR BIASA	**5.4.5**	**21.888.800,30**	**0,00**	**21.888.800,30**	**0,00**
Beban Luar Biasa	5.4.5.1	21.888.800,30	0,00	21.888.800,30	0,00
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		**(21.888.800,30)**	**0,00**	**(21.888.800,30)**	**0,00**
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	**5.4.6**	**4.085.325.080.551,39**	**1.966.768.027.608,74**	**2.118.557.052.942,65**	**107,72**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	2025	2024
Ekuitas Awal	**5.6.1**	**17.602.612.654.466,05**	**15.648.183.735.009,10**
Surplus/(Defisit) LO	**5.6.2**	**4.085.325.080.551,39**	**1.966.768.027.608,74**
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	**5.6.3**	**(26.285.490.954,63)**	**(12.339.108.151,79)**
Koreksi Ekuitas - Kas		0,00	(3.056.472.412,70)
Koreksi Ekuitas - Piutang		1.264.843.032,37	(5.994.454,00)
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang		(25.112.690,99)	(10.997,00)
Koreksi Ekuitas - Persediaan		(40.345.991.347,75)	(5.587.542.695,64)
Koreksi Ekuitas - Investasi		(14.661.520.580,50)	(75.000.000.000,00)
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap		27.172.231.106,98	60.601.346.515,85
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya		(4.356.438.744,15)	(228.963.259,96)
Koreksi Ekuitas - Properti Investasi		4.393.392.000,00	
Koreksi Ekuitas - Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Kewajiban		273.106.269,41	10.938.529.151,66
Ekuitas Akhir	**5.6.4**	**21.661.652.244.062,81**	**17.602.612.654.466,05**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI BALI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ASET	**5.3.1**		
ASET LANCAR	**5.3.1.1**	**1.104.842.086.420,35**	**863.415.737.426,76**
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	712.874.066.422,64	623.732.459.203,32
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	609.165.272.494,47	540.047.220.034,96
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.2	17.321,38	0,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.3	96.236.366.826,39	75.472.024.913,26
Kas Dana BOS		0,00	0,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.4	0,00	3.056.472.412,70
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.1.5	7.472.409.780,40	5.156.741.842,40
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2	686.987.500,00	49.838.810.531,04
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.3	52.160.083.376,74	881.023.472.856,43
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.4	3.156.897.225,00	3.287.603.356,37
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.5	180.125.380.000,00	
Piutang Lainnya	5.3.1.1.6	17.903.688.447,00	3.709.104.636,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.7	(19.960.668.142,46)	(862.191.285.296,38)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.8	485.566.225,08	490.726.285,24
Persediaan	5.3.1.1.9	157.410.085.366,35	163.524.845.854,74
Jumlah Aset Lancar		**1.104.842.086.420,35**	**863.415.737.426,76**
INVESTASI JANGKA PANJANG	**5.3.1.2**	**7.122.255.477.273,94**	**6.915.708.269.354,89**
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.1	7.122.255.477.273,94	6.915.708.269.354,89
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**7.122.255.477.273,94**	**6.915.708.269.354,89**
ASET TETAP	**5.3.1.3**	**14.009.192.786.281,11**	**10.422.663.292.333,20**
Tanah	5.3.1.3.1	8.097.663.457.350,43	5.385.006.936.615,43
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	2.502.919.368.695,03	2.196.293.227.099,70
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	4.199.917.279.027,22	3.850.274.091.822,14
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.4	5.647.587.427.731,03	4.335.363.075.122,41
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	112.910.723.583,04	98.441.316.502,04
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	67.448.741.853,85	43.173.893.899,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(6.619.254.211.959,49)	(5.485.889.248.727,52)
Jumlah Aset Tetap		**14.009.192.786.281,11**	**10.422.663.292.333,20**
DANA CADANGAN		**0,00**	**0,00**
Dana Cadangan		0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan		**0,00**	**0,00**
ASET LAINNYA	**5.3.1.4**	**260.970.253.210,00**	**261.737.503.949,75**
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.1	36.195.435.167,65	28.998.557.508,65
Aset Lain-lain	5.3.1.4.2	356.569.130.729,74	347.585.034.803,41
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.3	(28.105.557.846,82)	(20.833.551.606,82)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.4.4	(107.855.903.850,22)	(105.330.548.116,98)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.3.1.4.5	4.167.149.009,65	3.513.765.361,49
Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.6	0,00	7.804.246.000,00
Jumlah Aset Lainnya		**260.970.253.210,00**	**261.737.503.949,75**
PROPERTI INVESTASI	**5.3.1.5**	**701.321.954.302,03**	**702.536.128.035,03**
Properti Investasi - Tanah	5.3.1.5.1	698.906.498.820,00	700.024.106.820,00
Properti Investasi - Gedung Bangunan	5.3.1.5.2	5.839.731.638,00	5.839.731.638,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.5.3	(3.424.276.155,97)	(3.327.710.422,97)
Jumlah Properti Investasi		**701.321.954.302,03**	**702.536.128.035,03**
JUMLAH ASET		**23.198.582.557.487,43**	**19.166.060.931.099,63**
KEWAJIBAN	**5.3.2**		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**5.3.2.1**	**924.101.597.721,97**	**707.808.146.491,09**
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	0,00	3.056.472.412,70
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.2	243.464.798.088,00	243.464.798.088,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.3	514.165.349.793,52	21.702.352.175,15
Utang Belanja	5.3.2.1.4	166.471.449.840,45	439.584.523.815,24
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**924.101.597.721,97**	**707.808.146.491,09**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**5.3.2.2**	**612.828.715.702,65**	**855.640.130.142,49**
Utang kepada Pemerintah Pusat	5.3.2.2.1	608.661.566.693,00	852.126.364.781,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	5.3.2.2.2	4.167.149.009,65	3.513.765.361,49
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		**612.828.715.702,65**	**855.640.130.142,49**
JUMLAH KEWAJIBAN		**1.536.930.313.424,62**	**1.563.448.276.633,58**

EKUITAS	**5.3.3**	**21.661.652.244.062,81**	**17.602.612.654.466,05**
EKUITAS	**5.3.3**	**21.661.652.244.062,81**	**17.602.612.654.466,05**
Ekuitas	5.3.3	21.661.652.244.062,81	17.602.612.654.466,05
JUMLAH EKUITAS		**21.661.652.244.062,81**	**17.602.612.654.466,05**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**23.198.582.557.487,43**	**19.166.060.931.099,63**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	**5.5.1**		
Arus Masuk Kas	**5.5.1.1**		
Pajak Daerah		2.865.836.401.524,00	4.520.332.643.486,00
Retribusi Daerah		909.595.917.119,52	338.039.879.379,28
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		253.603.839.116,43	197.369.947.623,03
Lain-lain PAD yang Sah		598.347.153.222,68	478.625.715.282,52
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2.379.317.000.326,00	2.283.418.060.237,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah		34.825.690.369,00	0,00
Pendapatan Hibah		6.089.799.194,01	5.750.844.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**7.047.615.800.871,64**	**7.823.537.090.007,83**
Arus Keluar Kas	**5.5.1.2**		
Belanja Pegawai		2.304.413.342.308,00	2.088.693.065.509,00
Belanja Barang dan Jasa		1.272.505.827.668,79	1.200.096.660.415,66
Belanja Subsidi		10.009.000.000,00	2.525.000.000,00
Belanja Hibah		933.511.389.721,97	1.169.523.956.546,00
Belanja Bantuan Sosial		111.600.000,00	250.000.000,00
Belanja Tak Terduga		14.075.388.800,30	7.441.134.041,00
Bagi Hasil		965.738.976.448,00	1.800.971.992.343,00
Bantuan Keuangan		280.600.433.855,03	355.860.433.998,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**5.780.965.958.802,09**	**6.625.362.242.852,66**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**1.266.649.842.069,55**	**1.198.174.847.155,17**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	**5.5.2**		
Arus Masuk Kas	**5.5.2.1**		
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain		700.068.400,00	1.061.493.900,00
Pencairan Dana Cadangan		0,00	171.170.332.800,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**700.068.400,00**	**172.231.826.700,00**
Arus Keluar Kas	**5.5.2.2**		
Belanja Modal Tanah		1.181.948.000,00	3.464.184.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		259.183.049.267,80	130.063.180.613,50
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		240.493.997.597,02	407.489.294.374,22
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		240.687.598.599,81	94.451.449.090,69
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		31.596.980.320,00	31.382.599.067,00
Belanja Modal Aset Lainnya		543.458.964,90	838.900.000,00
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah		158.000.000.000,00	7.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**931.687.032.749,53**	**674.689.607.145,41**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		**(930.986.964.349,53)**	**(502.457.780.445,41)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**5.5.3**		
Arus Masuk Kas	**5.5.3.1**		
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**0,00**	**0,00**
Arus Keluar Kas	**5.5.3.2**		
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		243.464.798.088,00	243.464.798.088,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**243.464.798.088,00**	**243.464.798.088,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		**(243.464.798.088,00)**	**(243.464.798.088,00)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	**5.5.4**		
Arus Masuk Kas	**5.5.4.1**		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		375.893.982.146,00	371.823.264.458,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**375.893.982.146,00**	**371.823.264.458,00**
Arus Keluar Kas	**5.5.4.2**		
Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		378.950.454.558,70	371.823.264.458,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**378.950.454.558,70**	**371.823.264.458,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**(3.056.472.412,70)**	**0,00**
Kenaikan/(Penurunan) Kas	**5.5.5**	**89.141.607.219,32**	**452.252.268.621,76**

Saldo Awal Kas	**5.5.6**	**623.732.459.203,32**	**171.480.190.581,56**
Koreksi SILPA Tahun Lalu	**5.5.7**	**0,00**	**(3.056.472.412,70)**
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	**5.5.8**	**0,00**	**3.056.472.412,70**
Saldo Akhir Kas	**5.5.9**	**712.874.066.422,64**	**623.732.459.203,32**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan tahun anggaran (TA) 2025 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan catatan atas laporan keuangan (CaLK) adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (*full disclosure*).

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, dan Arus Kas pemerintah daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah; dan
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10).

1.3 Sistematika Penyajian CaLK

CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi CaLK adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
1.3 Sistematika penyajian CaLK

Bab II Informasi Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Indikator Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro
- 2.1.1 Tingkat Kemiskinan
- 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka
- 2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)
- 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi
- 2.1.6 Inflasi
- 2.1.7 Struktur Perekonomian Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali

2.2 Kebijakan Keuangan
2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
2.4 Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) dan Kebijakan Tematik Dalam Postur APBD TA 2025

2.4.1. Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) Dalam Postur APBD TA 2025
1. Pendidikan
2. Infrastruktur Pelayanan Publik

2.4.2. Bidang Pengawasan dan APIP Kebijakan Tematik Dalam Postur APBD TA 2025
1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2. Pengawasan
3. Kemiskinan ekstrem
4. Stunting
5. Inflasi

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
3.3 Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
3.4 Kebijakan Anggaran Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025
3.5 Analisis Solvabilitas Keuangan Daerah

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas pelaporan, entitas akuntansi keuangan daerah, BLUD, dan perusahaan daerah
4.1.1 Entitas Pelaporan
4.1.2 Entitas Akuntansi
4.1.3 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
4.1.4 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan LKPD
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan LKPD
4.4 Ringkasan penerapan kebijakan akuntansi akun yang penting berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
4.4.1 Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan
4.4.2 Kebijakan akuntansi pendapatan
4.4.3 Kebijakan akuntansi beban dan belanja
4.4.4 Kebijakan akuntansi transfer
4.4.5 Kebijakan akuntansi pembiayaan
4.4.6 Kebijakan akuntansi kas dan setara kas
4.4.7 Kebijakan akuntansi piutang
4.4.8 Kebijakan akuntansi persediaan
4.4.9 Kebijakan akuntansi investasi
4.4.10 Kebijakan akuntansi aset tetap
4.4.11 Kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan
4.4.12 Kebijakan akuntansi properti investasi
4.4.13 Kebijakan akuntansi dana cadangan
4.4.14 Kebijakan akuntansi aset lainnya
4.4.15 Kebijakan akuntansi kewajiban
4.4.16 Kebijakan akuntansi ekuitas
4.4.17 Kebijakan akuntansi koreksi kesalahan
4.4.18 Kebijakan akuntansi laporan keuangan konsolidasian

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1 Pendapatan-LRA
5.1.2 Belanja
5.1.3 Penerimaan Pembiayaan
5.1.4 Pengeluaran Pembiayaan
5.1.5 SiLPA
5.2 Pos-pos LP-SAL
5.2.1 LP-SAL awal periode
5.2.2 Penggunaan SAL Tahun Berjalan
5.2.3 SAL Tahun Berjalan
5.2.4 LP-SAL akhir periode

5.3 Pos-pos Neraca
5.3.1 Aset
5.3.2 Kewajiban
5.3.3 Ekuitas
5.4 Pos-pos Laporan Operasional
5.4.1 Pendapatan-LO
5.4.2 Beban
5.4.3 Surplus Non Operasional
5.4.4 Defisit Non Operasional
5.4.5 Surplus (Defisit)-LO
5.5 Pos-pos Laporan Arus Kas
5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
5.5.5 Jumlah Kas Akhir Periode
5.6 Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
5.6.1 Ekuitas Awal
5.6.2 Perubahan Ekuitas
5.6.3 Ekuitas Akhir
5.7 Pengungkapan Informasi Untuk Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja
5.8 Pengungkapan Informasi Untuk Kejadian Setelah Tahun Pelaporan

Bab VI Penjelasan atas Informasi NonKeuangan Pemerintah Daerah

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro mencerminkan dinamika perubahan ekonomi yang berdampak pada masyarakat, perusahaan, dan pasar. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan analisis ekonomi makro sebagai instrumen untuk merumuskan serta mengevaluasi kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan menetapkan target pembangunan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Tahun 2025, kondisi ekonomi makro Provinsi Bali menunjukkan kinerja yang semakin menguat seiring dengan pemulihan sektor pariwisata dan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah. Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara serta membaiknya konsumsi domestik turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan indikator sosial ekonomi.

Dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026, asumsi makroekonomi yang digunakan mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah tahun 2025 atau tahun sebelumnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, sebagai berikut:

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 3,72 persen.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,49 persen.
3. Indeks Gini (Gini Rasio) sebesar 0,353.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 79,37.
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,82 persen.
6. Tingkat Inflasi Kota Denpasar sebesar 3,45 persen.
7. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp324,15,44 triliun.

Indikator-indikator makroekonomi tersebut secara komprehensif menggambarkan kinerja perekonomian Provinsi Bali Tahun 2025 yang menunjukkan tren pertumbuhan positif dan stabilitas yang terjaga. Adapun uraian analisis lebih lanjut disampaikan sebagai berikut:

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin ditentukan berdasarkan garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran per kapita per bulan yang diperlukan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non-pangan agar individu dapat hidup layak. Dengan demikian, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Namun, pemetaan kemiskinan tidak cukup hanya melihat besarnya persentase penduduk miskin. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus terhadap tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia. Kedalaman kemiskinan mengukur sejauh mana pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan mencerminkan kesenjangan pengeluaran antara individu termiskin dengan rata-rata pengeluaran kelompok miskin di suatu daerah. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin serius tingkat kemiskinan yang terjadi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, persentase penduduk miskin di Provinsi Bali pada tahun 2025 tercatat mencapai 3,72 persen, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2025)

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun 2024-2025
1	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	4,25	4,00	3,72	Turun 0,28 persen poin
2	Jumlah penduduk miskin (Ribu Orang)	193,78	184,43	173,24	Turun 11,19 ribu orang
3	Tingkat Kemiskinan Nasional (%)	9,36	9,03	8,47	Turun 0,56 persen poin
4	Peringkat Provinsi	1	1	1	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2023, Maret 2024, dan Maret 2025*

Persentase penduduk miskin Provinsi Bali pada Tahun 2025 (keadaan Maret 2025) sebesar 3,72 persen mengalami penurunan dimana pada Tahun 2024 persentase penduduk miskin tercatat 4 persen. Capaian tersebut turun 0,28 persen poin terhadap Maret 2024. Jika dianalisis dari jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada Maret 2025 tercatat sebanyak 173,24 ribu orang, turun 11,19 ribu orang terhadap Maret 2024.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2025)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun 2024-2025
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0,553	0,499	0,560	Naik 0,061 poin
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,528	1,461	1,365	Turun 0,096 poin
3	Peringkat Provinsi	1	1	2	Turun 1 peringkat

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2023, Maret 2024, dan Maret 2025*

Indeks Kedalaman kemiskinan (P_1) sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.2 merupakan rata-rata jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan, artinya semakin tinggi indeks kedalaman kemiskinan berarti semakin jauh rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.Pada periode Maret 2025, indikator ini meningkat 0,061 poin yang berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan. Dengan kata lain, meskipun perubahan tingkat kemiskinan secara persentase mungkin relatif terbatas, beban ekonomi yang ditanggung penduduk miskin cenderung meningkat, sehingga mereka berada pada posisi yang semakin rentan terhadap guncangan harga dan pendapatan. Secara peringkat, Provinsi Bali menduduki peringkat kedua setelah Provinsi Kalimantan Selatan yang menduduki peringkat pertama pada Maret 2025.

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2025)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun 2024-2025
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,102	0,090	0,117	Naik 0,027 poin
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,377	0,347	0,319	Turun 0,028 poin
3	Peringkat Provinsi	1	1	3	Turun 2 peringkat

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2023, Maret 2024, dan Maret 2025*

Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) yang disajikan pada Tabel 2.3 merupakan variasi pengeluaran di antara orang miskin, dengan kata lain makin tinggi indeks keparahan kemiskinan berarti semakin bervariasi pengeluaran antara penduduk miskin. Kenaikan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,027 poin menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin melebar. Artinya, tidak hanya rata-rata penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan, tetapi jarak pengeluaran antara penduduk miskin yang paling miskin dan yang

relatif lebih mendekati garis kemiskinan juga semakin besar. Secara peringkat, capaian Provinsi Bali pada tahun 2025 mengalami penurunan dimana peringkat pertama diduduki oleh Provinsi Kalimantan Selatan disusul oleh DKI Jakarta di posisi kedua.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase individu yang tidak bekerja dibandingkan dengan total angkatan kerja. Pengangguran terbuka dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

1. Individu yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan,
2. Individu yang belum bekerja tetapi sedang dalam proses mempersiapkan usaha,
3. Individu yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak ada peluang untuk mendapatkan pekerjaan, serta
4. Individu yang telah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja.

Menurut data BPS Provinsi Bali, TPT di Provinsi Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 1,49 persen, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali (Keadaan Agustus Tahun 2025)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun 2024-2025
1	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%)	2,69	1,79	1,49	Turun 0,30 persen poin
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,32	4,91	4,85	Turun 0,06 persen poin
3	Peringkat Provinsi	3	2	1	Naik 1 peringkat

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Agustus 2023, Agustus 2024, dan Agustus 2025*

Pada Agustus 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali tercatat sebesar 1,49 persen, menurun dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar 1,79 persen. Penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi pasar kerja di Bali. Selain itu, TPT Bali tetap jauh lebih rendah dibandingkan TPT nasional yang mencapai 4,85 persen, menegaskan membaiknya kondisi ketenagakerjaan di daerah ini. Secara nasional, Bali juga konsisten berada dalam kelompok provinsi dengan TPT terendah. Pada tahun 2023, Bali menempati peringkat ketiga terendah setelah Sulawesi Barat dan Papua, sementara pada tahun 2024 posisi terendah TPT secara nasional ditempati oleh Papua Pegunungan. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi dinamika antarwilayah, kinerja ketenagakerjaan Bali tetap berada pada level yang sangat kompetitif secara nasional.

Jumlah penduduk angkatan kerja di Bali tercatat sebanyak 2,74 juta orang, meningkat 28,62 ribu orang dibandingkan Agustus 2024. Pada periode yang sama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami kenaikan sebesar 0,20 persen poin menjadi 77,31 persen. Dalam periode yang sama, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,70 juta orang, meningkat 36,31 ribu orang dibandingkan kondisi Agustus 2024. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran yang meningkat sebanyak 23,38 ribu orang. Sementara sektor dengan penurunan terbesar yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang berkurang sebesar 16,25 ribu orang.

Mayoritas penduduk bekerja di Bali masih berada pada sektor informal, dengan proporsi sebesar 50,47 persen. Namun demikian, angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan Agustus 2024, yang menandakan proses formalisasi tenaga kerja masih terus berlangsung secara bertahap. Dari sisi pendidikan, tantangan ketenagakerjaan masih terlihat pada lulusan pendidikan menengah kejuruan dan vokasi. Pada Agustus 2025, TPT tertinggi tercatat pada lulusan Diploma I/II/III, yakni sebesar 3,68 persen. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga memerlukan penguatan keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia usaha

2.1.3 Indeks Gini (Gini Rasio)

Indeks Gini, atau yang dikenal sebagai Gini Rasio, merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat distribusi pendapatan dalam suatu negara atau wilayah pada periode tertentu. Pengukuran ini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu representasi grafis dari distribusi kumulatif pengeluaran yang dibandingkan dengan distribusi yang seragam, di mana setiap persentase populasi menerima proporsi pendapatan yang sama.

Gini Rasio memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1, dengan interpretasi sebagai berikut:

1. Gini Rasio sebesar 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sepenuhnya merata, di mana setiap kelompok populasi menerima bagian pendapatan yang sama.
2. Gini Rasio sebesar 1 mencerminkan ketimpangan sempurna, di mana seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu kelompok tertentu.

Semakin mendekati angka 1, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi. Berdasarkan kategorisasi nilai Gini Rasio, ketimpangan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Ketimpangan rendah (Gini Rasio < 0,35)
2. Ketimpangan sedang (Gini Rasio antara 0,35 – 0,50)
3. Ketimpangan tinggi (Gini Rasio > 0,50)

Menurut data BPS Provinsi Bali, pencapaian Gini Rasio di Provinsi Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,353 poin, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5 Gini Rasio Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2025)

No	Gini Rasio	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun 2024-2025
1	Tingkat Provinsi	0,362	0,361	0,353	Turun 0,008 poin
2	Tingkat Nasional	0,388	0,379	0,375	Turun 0,004 poin
3	Peringkat Provinsi	21	25	24	Naik 1 peringkat

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2023, Maret 2024, dan Maret 2025*

Pada Maret 2025, tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Bali menunjukkan perbaikan yang nyata. Hal ini tercermin dari nilai Gini Rasio yang tercatat sebesar 0,353, turun 0,008 poin dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 0,361. Penurunan ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan antarkelompok masyarakat di Bali semakin merata, sekaligus menegaskan keberlanjutan tren perbaikan kualitas pembangunan ekonomi daerah.

Selain itu, tingkat ketimpangan di Provinsi Bali juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan kondisi ketimpangan secara nasional, yang menempatkan Bali pada posisi yang lebih baik dalam konteks pemerataan hasil pembangunan. Jika ditinjau menggunakan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran penduduk kelompok 40 persen terbawah pada Maret 2025 mencapai 18,67 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat berpendapatan rendah memperoleh porsi pengeluaran yang cukup besar dalam struktur ekonomi daerah.

Dengan proporsi tersebut, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Bali berada dalam kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini mencerminkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi, tetapi juga mulai dirasakan secara lebih merata oleh kelompok masyarakat bawah, sehingga memperkuat inklusivitas pembangunan ekonomi di Provinsi Bali.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. IPM menggambarkan sejauh mana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam aspek pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Indeks ini dibentuk berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu harapan hidup atau kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pengetahuan (tingkat pendidikan), serta standar hidup yang layak.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), IPM dikategorikan ke dalam empat tingkatan:

1. Rendah (< 60)
2. Sedang (60 ≤ IPM < 70)
3. Tinggi (70 ≤ IPM < 80)
4. Sangat Tinggi (> 80)

Menurut data BPS Provinsi Bali, IPM di Provinsi Bali pada tahun 2025 mencapai 79,37. Capaian ini tergolong dalam kategori tinggi karena melebihi capaian IPM Indonesia yang berada pada angka 75,90. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencatat IPM sebesar 78,63, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun 2024-2025
1	Jembrana	74,80	75,32	75,94	Naik 0,62 poin
2	Tabanan	77,87	78,83	79,70	Naik 0,87 poin
3	Badung	83,00	83,73	84,27	Naik 0,54 poin
4	Gianyar	79,69	80,23	80,96	Naik 0,73 poin
5	Klungkung	74,18	75,15	75,89	Naik 0,74 poin
6	Bangli	71,99	72,51	73,22	Naik 0,71 poin
7	Karangasem	70,09	70,91	71,89	Naik 0,98 poin
8	Buleleng	74,87	75,35	76,06	Naik 0,71 poin
9	Denpasar	84,68	85,11	85,63	Naik 0,52 poin
10	Provinsi Bali	78,01	78,63	79,37	Naik 0,74 poin
11	Indonesia/Nasional	74,39	75,02	75,90	Naik 0,88 poin
12	Peringkat Provinsi	5	5	5	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan Provinsi Bali 2023, 2024, dan 2025*

IPM Provinsi Bali tahun 2025 mencapai 79,37, meningkat 0,74 poin atau 0,94 persen dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan IPM ini mengalami percepatan dibandingkan tahun 2024. Dengan capaian ini, IPM Provinsi Bali berada pada status pembangunan manusia “tinggi” (70 ≤ IPM < 80).

Pada Dimensi Umur Panjang dan Sehat, Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir pada tahun 2025 tercatat sebesar 75,46 tahun. Kondisi ini berarti bayi yang lahir pada tahun 2025 diperkirakan akan hidup 0,36 tahun lebih lama dibandingkan mereka yang lahir pada tahun 2024. Pada Dimensi Pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun ke atas tahun 2025 sebesar 13,63 tahun, meningkat 0,01 tahun dibandingkan dengan tahun 2024. Sedangkan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas sebesar 9,75 tahun, meningkat 0,21 tahun dibandingkan dengan tahun 2024. Dimensi Standar Hidup Layak yang diukur berdasarkan Rata-rata Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun (yang disesuaikan) meningkat 463 ribu rupiah dibandingkan dengan tahun 2024.

Pembangunan manusia pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2025, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali telah berada pada capaian status pembangunan manusia “tinggi” atau “sangat tinggi”. Tiga wilayah yang memiliki status pembangunan “sangat tinggi” (IPM ≥ 80) yaitu Kota Denpasar dengan capaian IPM sebesar 85,63; Kabupaten Badung sebesar 84,27; dan Kabupaten Gianyar sebesar 80,96.Sedangkan enam wilayah lainnya yaitu Kabupaten Tabanan, Buleleng, Jembrana, Klungkung, Bangli, dan Karangasem berada pada status pembangunan “tinggi” (70 ≤ IPM < 80).

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu daerah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dalam periode tertentu. Aktivitas perekonomian sendiri melibatkan proses pemanfaatan faktor produksi untuk menghasilkan output, yang pada gilirannya memberikan balas jasa kepada pemilik faktor produksi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perhitungan pertumbuhan ekonomi dilakukan berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan dasar harga konstan tahun 2010.

Sepanjang tahun 2025, perekonomian Provinsi Bali tetap mengalami pertumbuhan dengan laju sebesar 5,82 persen meningkat dari capaian tahun 2024 yang tercatat sebesar 5,42 persen. Bali tetap mampu mempertahankan posisinya di peringkat ke-5 secara nasional, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	PDRB (harga konstan 2010) (Triliun Rp)			
	Jembrana	9,49	9,97	
	Tabanan	15,47	16,24	
	Badung	35,55	37,67	
	Gianyar	18,87	19,90	
	Klungkung	6,04	6,35	
	Bangli	4,67	4,88	
	Karangasem	11,18	11,66	
	Buleleng	23,28	24,45	
	Denpasar	36,00	38,00	
	Provinsi Bali	159,46	168,20	177,99
	Indonesia	12.301,45	12.920,53	13.580,52
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
	Jembrana	3,66	4,98	
	Tabanan	3,56	4,94	
	Badung	11,29	5,94	
	Gianyar	5,06	5,47	
	Klungkung	4,70	5,08	
	Bangli	3,50	4,54	
	Karangasem	3,10	4,33	
	Buleleng	3,64	5,04	
	Denpasar	5,69	5,55	
	Provinsi Bali	5,72	5,48	5,82
	Indonesia	5,05	5,03	5,11
3	Peringkat Provinsi (Nasional)			
	Jembrana	5	6	
	Tabanan	7	7	
	Badung	1	1	

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	Gianyar	3	3	
	Klungkung	4	4	
	Bangli	8	8	
	Karangasem	9	9	
	Buleleng	6	5	
	Denpasar	2	2	
4	Peringkat Nasional	5	5	5

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali*

Perekonomian Provinsi Bali pada tahun 2025 mencatat pertumbuhan sebesar 5,82 persen secara tahunan (*c-to-c*), dengan ekspansi yang terjadi di seluruh lapangan usaha pembentuk PDRB. Capaian ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang semakin merata, terutama ditopang oleh menguatnya kembali aktivitas pariwisata sebagai motor utama perekonomian daerah. Selain dorongan dari sektor pariwisata, peningkatan belanja pegawai khususnya pada sektor pemerintahan turut memperkuat laju pertumbuhan ekonomi Bali sepanjang tahun 2025. Dari pendekatan produksi, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 10,99 persen. Kinerja ini diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebagai penyumbang terbesar terhadap PDRB Bali yang tumbuh 10,25 persen, serta Jasa Perusahaan yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,84 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan hampir seluruh komponen pengeluaran, dengan ekspor luar negeri sebagai pendorong utama yang tumbuh 8,22 persen, diikuti impor luar negeri sebesar 6,29 persen dan PMTB (investasi) sebesar 6,03 persen. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang penting dengan pertumbuhan 5,47 persen, sementara konsumsi pemerintah tumbuh 3,90 persen. Di sisi lain, pengeluaran LNPRT menjadi satu-satunya komponen yang mengalami kontraksi, yakni sebesar 3,97 persen

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari aspek pertumbuhan ekonomi, kondisi perekonomian di Provinsi Bali juga dapat dianalisis melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan indikator ekonomi yang mencerminkan perubahan harga berbagai komoditas utama yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi dapat berdampak negatif bagi perekonomian, namun jika dikelola dengan baik melalui kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa yang efektif, inflasi justru dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan karakteristiknya, inflasi dikategorikan ke dalam empat jenis, yaitu:

1. Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*) – Ditandai dengan kenaikan harga yang relatif rendah, dengan laju inflasi kurang dari 10 persen per tahun.
2. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) – Lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan, dengan laju inflasi berkisar antara 10-30 persen per tahun.
3. Inflasi Berat (*High Inflation*) – Mencapai kisaran 30-100 persen per tahun, menyebabkan lonjakan harga yang signifikan dan sulit dikendalikan.
4. Hiperinflasi (*Hyperinflation*) – Inflasi yang ekstrem, dengan tingkat kenaikan harga lebih dari 100 persen per tahun, memberikan dampak besar terhadap perekonomian.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali, tingkat inflasi di Provinsi Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,91 persen, yang termasuk dalam kategori inflasi ringan. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,92 persen sebagaimana ditampilkan dalam tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Singaraja, Kota Denpasar, dan Provinsi Bali

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Tabanan (%)	-	2,44	2,70
2	Tingkat Inflasi Kabupaten Badung (%)	-	1,98	2,37
3	Tingkat Inflasi Singaraja (%)	4,31	1,93	2,51
4	Tingkat Inflasi Denpasar (%)	2,54	2,69	3,45
5	Tingkat Inflasi Provinsi Bali (%)	-	2,34	2,91
6	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,61	1,57	2,92
7	Peringkat Provinsi (Denpasar)	2	1*	
8	Peringkat Nasional (Bali)	-	4**	

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Konsumen 2023, 2024, 2025*

Pada Desember 2025, perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2025 di Provinsi Bali yang diwakili Kota Denpasar, Singaraja, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan secara tahunan menunjukkan adanya kenaikan secara *year-on-year*. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi y-on-y pada bulan Desember 2025 antara lain cabai rawit, bawang merah, beras, emas perhiasan, daging ayam ras, sewa rumah, cabai merah, biaya Sekolah Menengah Atas, Sigaret Putih Mesin (SPM), pemeliharaan/*service*, wortel, pepaya, Sigaret Kretek Mesin (SKM), bimbingan belajar, minyak goreng, upah asisten rumah tangga, bensin, pepes, air kemasan, dan kontrak rumah. Oleh karena itu, pemantauan serta pengendalian harga melalui kebijakan yang tepat menjadi penting untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan keseimbangan ekonomi regional.

2.1.7 Struktur Perekonomian Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali

Struktur perekonomian Provinsi/Kabupaten/kota di Bali dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam juta rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	**Jembrana**			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.381.630,98	3.815.640,37	4.141.691,04
	2. Pertambangan dan Penggalian	130.296,98	134.832,81	138.575,66
	3. Industri Pengolahan	826.377,27	888.418,27	945.522,88
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	23.839,96	24.216,47	25.084,01
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11.363,43	11.894,25	12.678,26
	6. Konstruksi	1.590.389,71	1.623.412,95	1.731.285,22
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	1.648.399,89	1.711.991,78	1.868.153,35
	8. Transportasi dan Pergudangan	2.281.484,63	2.505.118,37	2.709.891,52
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.915.053,52	2.112.996,33	2.388.520,45

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	10. Informasi dan Komunikasi	962.912,12	1.006.944,06	1.055.413,30
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	642.046,66	731.776,53	761.241,97
	12. Real Estate	711.528,20	724.717,33	765.120,79
	13. Jasa Perusahaan	131.173,23	142.718,57	154.756,54
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan. dan Jaminan Sosial Wajib	407.500,36	426.835,69	467.846,28
	15. Jasa Pendidikan	326.228,55	337.600,10	367.359,95
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	375.560,11	386.767,10	423.768,00
	17. Jasa Lainnya	247.491,35	259.128,71	279.402,59
	PDRB ADH Berlaku	**15.613.276,95**	**16.845.009,69**	**18.236.311,81**
2	**Tabanan**			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.723.710,40	6.169.684,07	6.544.710,10
	2. Pertambangan dan Penggalian	280.999,77	288.304,05	287.542,23
	3. Industri Pengolahan	1.518.608,39	1.686.305,21	1.845.916,91
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	31.261,63	33.476,61	36.057,13
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	39.832,49	42.378,80	44.707,24
	6. Konstruksi	2.501.179,21	2.591.319,38	2.720.233,84
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	2.319.825,21	2.440.374,29	2.670.692,96
	8. Transportasi dan Pergudangan	424.495,67	470.216,05	522.952,09
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.743.839,60	5.530.900,57	6.257.232,77
	10. Informasi dan Komunikasi	1.480.998,95	1.544.631,17	1.632.906,46
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.158.586,29	1.337.744,33	1.389.559,59
	12. Real Estate	1.290.459,70	1.335.134,83	1.454.084,93
	13. Jasa Perusahaan	283.012,53	313.062,58	346.454,80
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.964.653,99	2.008.567,44	2.208.824,14
	15. Jasa Pendidikan	470.255,13	487.272,02	521.642,77
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	693.729,77	716.370,05	774.924,53
	17. Jasa Lainnya	606.245,20	654.056,26	725.400,47
	PDRB ADH Berlaku	**25.531.693,93**	**27.649.797,71**	**29.983.842,96**

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
3	**Badung**			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.152.829,32	4.418.709,58	4.724.545,49
	2. Pertambangan dan Penggalian	176.424,08	175.537,09	173.694,91
	3. Industri Pengolahan	2.447.355,08	2.609.050,99	2.827.515,10
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	98.010,62	101.104,90	107.551,09
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	133.721,84	144.254,69	151.350,92
	6. Konstruksi	5.831.279,10	5.936.588,64	6.313.728,28
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	4.740.948,09	5.023.681,41	5.481.307,85
	8. Transportasi dan Pergudangan	19.128.495,84	21.326.037,51	22.903.154,51
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16.877.404,33	19.318.413,47	21.746.704,50
	10. Informasi dan Komunikasi	4.216.549,63	4.474.419,94	4.670.822,90
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.043.883,80	2.441.594,87	2.559.973,49
	12. Real Estate	2.278.749,26	2.370.020,26	2.499.935,42
	13. Jasa Perusahaan	508.423,39	564.326,22	617.979,22
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.184.119,45	2.458.991,02	2.835.975,21
	15. Jasa Pendidikan	1.980.372,32	2.004.091,16	2.176.087,85
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	986.583,93	1.022.096,32	1.115.884,41
	17. Jasa Lainnya	611.145,40	674.808,97	756.959,08
	PDRB ADH Berlaku	**68.396.295,48**	**75.063.727,04**	**81.663.170,23**
4	**Gianyar**			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.675.839,89	3.891.726,30	4.097.613,73
	2. Pertambangan dan Penggalian	400.329,48	419.974,31	446.764,85
	3. Industri Pengolahan	3.702.588,93	3.987.517,87	4.318.455,53
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	35.993,58	39.498,26	43.094,17
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	36.914,45	39.844,01	41.417,63
	6. Konstruksi	3.748.697,89	3.811.078,29	4.165.576,79
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	2.519.746,62	2.699.847,80	2.930.152,53

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	8. Transportasi dan Pergudangan	278.927,26	312.035,20	334.028,93
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.809.142,28	7.853.299,40	9.035.673,50
	10. Informasi dan Komunikasi	2.022.467,54	2.185.675,15	2.233.785,69
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.470.144,23	1.616.080,27	1.681.268,34
	12. Real Estate	1.348.206,25	1.369.136,50	1.461.391,24
	13. Jasa Perusahaan	407.992,81	448.403,69	484.994,43
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.603.134,89	1.736.920,82	1.964.488,96
	15. Jasa Pendidikan	694.994,47	735.679,20	811.178,34
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.127.533,03	1.186.379,33	1.281.571,56
	17. Jasa Lainnya	646.762,67	713.502,61	785.414,50
	PDRB ADH Berlaku	**30.529.416,27**	**33.046.599,01**	**36.116.870,72**
5	**Klungkung**			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.184.286,74	2.429.551,82	2.558.267,67
	2. Pertambangan dan Penggalian	295.100,52	312.759,48	327.505,29
	3. Industri Pengolahan	951.253,24	1.024.071,76	1.128.859,59
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	12.862,85	14.893,69	15.921,51
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	19.316,40	20.615,55	21.776,40
	6. Konstruksi	1.007.661,23	1.050.024,51	1.116.707,55
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	875.010,35	917.712,34	1.025.417,10
	8. Transportasi dan Pergudangan	255.309,30	308.267,67	367.963,82
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.208.761,79	1.455.499,58	1.698.243,26
	10. Informasi dan Komunikasi	913.977,88	964.968,84	1.004.260,18
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	474.210,75	530.410,20	545.072,07
	12. Real Estate	232.428,12	244.020,72	257.461,87
	13. Jasa Perusahaan	103.802,93	117.940,92	131.392,14
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	553.753,78	587.891,46	649.815,91
	15. Jasa Pendidikan	230.940,31	243.654,61	268.964,66

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	484.075,44	501.955,32	561.731,87
	17. Jasa Lainnya	269.463,75	291.246,90	324.367,98
	PDRB ADH Berlaku	**10.072.215,38**	**11.015.485,37**	**12.003.728,87**
6	**Bangli**			
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.159.462,75	2.305.078,49	2.474.801,64
	Pertambangan dan Penggalian	139.860,70	141.074,92	147.613,01
	Industri Pengolahan	681.839,42	706.341,00	732.702,34
	Pengadaan Listrik dan Gas	3.481,68	3.643,35	3.985,19
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4.879,57	4.899,17	5.228,93
	Konstruksi	675.513,40	685.416,40	724.129,51
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	807.988,58	831.315,69	908.822,95
	Transportasi dan Pergudangan	89.153,81	97.253,93	99.497,80
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	964.649,92	1.138.978,65	1.303.066,09
	Informasi dan Komunikasi	354.235,97	374.687,21	388.929,34
	Jasa Keuangan dan Asuransi	257.966,62	298.905,38	314.377,46
	Real Estate	241.140,91	247.720,41	259.701,91
	Jasa Perusahaan	42.964,87	47.956,89	53.280,99
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	895.256,27	956.295,79	1.050.067,30
	Jasa Pendidikan	181.363,75	186.771,51	204.525,22
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	124.989,83	130.919,24	139.178,71
	Jasa Lainnya	283.561,43	308.344,91	345.094,27
	PDRB ADH Berlaku	**7.908.309,48**	**8.465.602,94**	**9.155.002,66**
7	**Karangasem**			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.883.332,90	5.136.046,48	5.408.960,39
	2. Pertambangan dan Penggalian	676.062,20	732.501,48	768.391,65
	3. Industri Pengolahan	774.052,10	812.244,50	885.278,65
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	19.350,10	19.583,50	21.122,88
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	24.557,10	26.065,36	26.777,51
	6. Konstruksi	1.318.015,90	1.388.940,76	1.463.968,91

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobi,l dan Sepeda Motor	1.082.719,70	1.083.924,05	1.214.909,76
	8. Transportasi dan Pergudangan	3.070.993,40	3.239.840,33	3.539.433,97
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.739.410,30	1.963.789,48	2.237.371,58
	10. Informasi dan Komunikasi	653.175,20	688.430,29	732.728,13
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.062.929,80	1.194.490,15	1.228.541,66
	12. Real Estate	754.932,90	796.748,39	846.901,34
	13. Jasa Perusahaan	152.030,40	166.652,96	185.064,57
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.365.395,50	1.470.849,27	1.637.060,85
	15. Jasa Pendidikan	467.122,00	505.366,70	539.687,91
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	442.879,10	472.299,19	507.147,23
	17. Jasa Lainnya	487.816,80	512.555,10	561.058,93
	PDRB ADH Berlaku	**18.974.775,40**	**20.210.327,99**	**21.804.405,92**
8	**Buleleng**			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.004.808,88	8.445.133,84	9.027.020,79
	2. Pertambangan dan Penggalian	327.936,72	346.694,92	363.273,69
	3. Industri Pengolahan	2.364.120,60	2.671.661,09	2.952.350,42
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	67.514,94	72.171,29	77.326,99
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	42.908,86	42.068,50	43.865,09
	6. Konstruksi	3.541.541,69	3.716.363,13	3.979.787,81
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	4.727.916,99	5.023.231,19	5.552.965,40
	8. Transportasi dan Pergudangan	454.042,28	508.734,02	560.652,59
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.198.370,94	7.069.183,70	8.084.796,84
	10. Informasi dan Komunikasi	2.198.163,88	2.266.618,36	2.369.033,57
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.931.174,90	2.257.241,86	2.347.322,29
	12. Real Estate	1.763.266,42	1.852.223,07	1.964.574,23
	13. Jasa Perusahaan	281.872,31	303.807,00	331.904,81
	14. Administrasi Pemerintahan,	2.001.994,79	2.129.695,24	2.362.569,42

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib			
	15. Jasa Pendidikan	2.726.839,41	2.849.266,95	3.124.219,73
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	927.592,07	972.804,27	1.042.221,84
	17. Jasa Lainnya	791.295,42	860.853,44	936.629,31
	PDRB ADH Berlaku	**38.351.361,10**	**41.387.751,87**	**45.120.514,82**
9	**Kota Denpasar**			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.949.625,79	3.778.610,97	3.837.463,68
	2. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
	3. Industri Pengolahan	3.875.731,94	4.206.282,45	4.487.141,40
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	347.657,68	409.059,32	430.414,00
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	136.499,25	134.263,81	144.638,45
	6. Konstruksi	6.689.585,29	6.820.641,59	7.409.557,07
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	6.041.481,81	6.453.315,98	7.107.080,77
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.773.632,76	1.918.713,85	2.083.262,79
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14.328.513,00	16.682.509,16	18.728.527,81
	10. Informasi dan Komunikasi	2.844.638,21	2.975.124,08	3.105.158,31
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.210.391,02	5.023.714,55	5.257.465,91
	12. Real Estate	2.457.089,19	2.496.708,08	2.685.199,57
	13. Jasa Perusahaan	1.225.422,18	1.345.518,35	1.506.743,23
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.997.349,63	3.254.187,63	3.626.833,14
	15. Jasa Pendidikan	6.587.509,19	6.992.708,13	7.617.190,71
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.636.171,17	1.700.830,67	1.848.932,38
	17. Jasa Lainnya	999.003,56	1.108.025,10	1.223.512,19
	PDRB ADH Berlaku	**60.100.301,67**	**65.300.213,72**	**71.099.121,41**
10	**Provinsi Bali**			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37.744.646,70	40.069.823,24	42.528.777,42
	2. Pertambangan dan Penggalian	2.436.619,10	2.549.557,56	2.652.258,09
	3. Industri Pengolahan	17.115.768,99	18.664.578,60	20.185.046,24

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	640.751,91	717.467,90	760.528,38
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	446.923,22	458.724,81	483.368,76
	6. Konstruksi	26.805.931,83	27.563.207,76	29.253.400,09
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	24.560.349,18	25.893.433,87	28.450.847,02
	8. Transportasi dan Pergudangan	27.658.642,39	30.622.899,07	33.055.658,92
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.672.739,87	63.866.219,32	72.199.795,23
	10. Informasi dan Komunikasi	15.517.170,16	16.101.487,08	16.908.037,19
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	13.277.201,87	15.455.369,56	16.104.962,56
	12. Real Estate	11.055.527,30	11.449.017,85	12.112.517,64
	13. Jasa Perusahaan	3.159.502,42	3.445.130,35	3.819.555,00
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	13.902.185,23	14.955.848,50	16.666.176,67
	15. Jasa Pendidikan	13.669.131,84	14.244.438,05	15.509.082,88
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.809.768,37	7.085.731,87	7.682.945,41
	17. Jasa Lainnya	4.909.174,98	5.296.623,87	5.775.986,60
	PDRB ADH Berlaku	**274.382.035,36**	**298.439.559,26**	**324.148.944,10**

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

2.2 Kebijakan Keuangan

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik.

2.2.1 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pendapatan

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran "horisontal" dan kewajaran "vertikal". Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

   a. Pajak Daerah

      Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

      1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*Budgetary*)
      2) Sebagai alat pengatur (*Regulatory*).

      Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Alat Berat, Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

   b. Retribusi Daerah

      Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan objeknya. Objek Retribusi daerah terdiri dari:

      1) Retribusi jasa umum;

      2) Retribusi jasa usaha; dan

      3) Retribusi perizinan tertentu.

   c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah; dan

   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, hasil kerja sama daerah, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi, Pemakaian Barang Milik Daerah, pendapatan dari pengembalian, Pendapatan BLUD, dan Pungutan bagi Wisatawan Asing.

2. Pendapatan Transfer terdiri dari:

   a. Transfer Pemerintah Pusat

      Transfer Pemerintah Pusat yang ada di diterima oleh Provinsi Bali meliputi:

      1) Dana Perimbangan dapat dipilah menjadi dua yaitu dana yang bersifat umum dan dana yang bersifat khusus. Dana Perimbangan terdiri atas: a) Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu Dana Perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam; b) Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan merupakan Dana Transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horisontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Jumlah DAU setiap daerah provinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah provinsi, bobot daerah provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah provinsi; c) Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
      2) Insentif Fiskal.

   b. Transfer Antar Daerah

      Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari:

   a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja;

   b. Dana Darurat; dan

   c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU.

Peningkatan Pendapatan Daerah diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber Pendapatan Daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berbagai kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

   Kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 adalah:

   a. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
   b. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
   c. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar Pajak dan Retribusi Daerah;
   d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
   e. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui bank/lembaga keuangan;
   f. Meningkatkan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui *electronic commerce* (*e-commerce*);
   g. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
   h. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;

i. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
   1) Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
   2) Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui peningkatan kapasitas *online* pembayaran pajak, *one-stop service*, samsat keliling, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
   3) Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android dan informasi perpajakan melalui *website*;
   4) Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
   5) Membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment* (*e-payment*) dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face*;
   6) Meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak; dan
   7) Melakukan Sinergitas penerimaan PKB, BBNKB, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.

2. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Transfer

Transfer ke daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horisontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. Transfer ke daerah meliputi DBH, DAU, DAK dan Insentif Fiskal. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-daerah, pengelolaan transfer ke daerah mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Untuk itu, DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi daerah. Selain itu, pengalokasian DBH memperhitungkan kinerja daerah dalam memperkuat penerimaan negara yang dibagihasilkan ataupun perbaikan lingkungan yang terdampak akibat aktivitas eksploitasi.

Reformulasi pengalokasian DAU dilakukan melalui penghitungan kebutuhan fiskal berdasarkan pada *unit cost* dan target layanan, serta penghitungan kapasitas fiskal sesuai dengan potensi pendapatan daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Selain pada aspek pengalokasian, reformulasi DAU dilakukan pada aspek penggunaan yang ditujukan untuk mendorong kinerja pencapaian pelayanan dasar masyarakat. Sementara itu, DAK lebih difokuskan pada upaya mendukung daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-daerah. Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal tertentu kepada daerah tertentu, sebagai bentuk penghargaan dan sekaligus merangsang kinerja daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan efektivitas anggaran dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada Pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD di luar Gaji.
3. Optimalisasi belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
4. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan akuntabel setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dibagi atas kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

2.2.3 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung perangkat daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah;
4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya; dan
6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo, Penyertaan Modal, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Dana Pinjaman serta Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Disamping juga untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan di daerah Bali dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai.

Dalam usaha untuk mencapai sasaran nasional, Pemerintah Pusat sudah menetapkan 8 Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonisdengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Guna menjaga sinergitas prioritas pembangunan dengan pemerintah pusat dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah maka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

Prioritas 1: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya, serta Kearifan Lokal

Prioritas 2: Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan

Prioritas 3: Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan: UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata

Prioritas 4: Infrastruktur Darat, Laut, Udara, dan Transportasi

Prioritas 5: Lingkungan, Kehutanan, dan Energi

Prioritas 6: Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali

Prioritas 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

2.3.1 Belanja Wajib *(Mandatory Spending)* dan Kebijakan Tematik Dalam Postur APBD TA 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025, Pemerintah Provinsi Bali dalam menyusun APBD TA 2025, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, sebagai berikut:

2.3.1.1 Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) Dalam Postur APBD TA 2025

Belanja wajib *(mandatory spending)* adalah kebijakan belanja yang difokuskan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 50 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan poin 5 hal khusus lainnya pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025 . Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja mandatory spending dalam tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Bali meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Wajib Fungsi Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana maksud pasal 31 ayat (4) UUD 1945, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan butir E.1.a. Lampiran Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran belanja wajib fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan. Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran belanja wajib fungsi pendidikan sebesar Rp2.603.057.858.136,00 atau 35,11% dari total belanja daerah sebesar Rp7.412.970.277.983,60, dengan realisasi mencapai Rp2.168.726.863.718,05 atau 33,09% dari total realisasi belanja daerah sebesar Rp6.555.001.412.634,62. Dengan demikian, alokasi tersebut telah melampaui ketentuan minimal 20% sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan itu, fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam pemerataan pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Ketersediaan dan sebaran fasilitas pendidikan berupa SMA, SMK, dan SLB
b. Memperhatikan jumlah dan sebaran tenaga pendidik, yaitu guru dan PPPK
c. Ketersediaan kurikulum lokal, antara lain:
    1) Kurikulum Muatan Lokal (Mata Pelajaran Bahasa Bali) Pendidikan Menengah (SMA/SMK)
    2) Kurikulum Muatan Lokal (Mata Pelajaran Bahasa Bali) Pendidikan Khusus (SDLB, SMPLB, SMALB)
    3) Inovasi Keyboard Tamiang untuk mendukung implementasi pelestarian Aksara Bali dalam media digital
    4) Bulan Bahasa Bali yang dilaksanakan setiap bulan Pebruari
    5) Pasraman Kilat (dilaksanakan pada saat jeda sekolah)
d. Angka harapan lama sekolah (HLS)
    HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini
e. Upaya optimalisasi SMK (Pendidikan Vokasi), seperti:
    1) Pengadaan ajang gelar karya/*expo* siswa SMK dengan tema "Merdeka Berkarya Vokasi Berjaya"
    2) Melakukan Kerjasama *link and match* antara SMK dan dunia usaha/industri
f. Inovasi pengembangan pembelajaran berbasis TIK tahun 2024, seperti:
    1) Penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara *online*
    Sistem untuk memfasilitasi penerimaan peserta didik baru SMA dan SMK Negeri se-Bali
    2) Portal bali melajah (BALI BELAJAR)
    Portal yang menyediakan berbagai konten pembelajaran sehingga dapat dimanfaatkan oleh Guru dan Peserta Didik
    3) Aplikasi kelas virtual
    Kelas Virtual Bali Melajah merupakan E-learning untuk mewujudkan SDM Bali unggul, cerdas & berkarakter dengan efisien, kapan saja dan di mana saja.

Alokasi anggaran dan realisasi belanja wajib fungsi pendidikan TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52.*

2. Belanja Wajib Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebagaimana maksud Pasal 147 UU Nomor 1 Tahun 2022, butir E.l.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam APBD.

Alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik dimaksud diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp2.138.615.498.744,00 atau 35,24% dari total anggaran belanja daerah diluar Belanja Transfer sebesar Rp6.068.805.441.963,60 dengan realisasi sebesar Rp1.788.117.115.228,62 atau 33,68% dari total realisasi anggaran belanja daerah diluar Belanja Transfer sebesar Rp5.308.662.002.331,59.

Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar Belanja Transfer. Alokasi anggaran dan realisasi untuk belanja wajib infrastruktur pelayanan publik TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52.*

2.3.2 Kebijakan Tematik Dalam Postur APBD TA 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2025, kebijakan tematik yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Kebijakan Tematik Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana maksud Pasal 18 dan Pasal 298 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2), Pemerintah Provinsi Bali dalam APBD TA 2025 memedomani 6 (enam) bidang urusan meliputi:

a. Pendidikan
   Urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta butir E.2.a.1) dan Tabel E.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
b. Kesehatan
   Urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan serta butir E.2.a.21 dan tabel E.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
   Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir E.2.a.3) dan Tabel E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
   Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 serta butir 8.2.a.41 dan Tabel E. 10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
e. Sosial
   Urusan sosial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir E.2.a.5) dan Tabel E.14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

f. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat
Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat:
1) Bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
2) Bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
3) Bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka pemenuhan SPM dapat diuraikan sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan
Alokasi anggaran SPM Pendidikan diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:
1) Angka Partisipasi Sekolah.
2) Literasi dan Numerasi.
3) Kekhususan SMK.
4) Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas.

b. SPM Bidang Kesehatan
Alokasi anggaran SPM Pendidikan diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:
1) Pelayanan kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi.
Adapun sub rincian objek belanja pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana yang tersusun dalam RKA, telah menunjang output Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan pada tahap Pra Krisis. Rincian belanja tersebut diperuntukkan sebagai berikut:
a) Sosialisasi pedoman HEOC ke 9 kab/kota dengan melibatkan peserta dari rumah sakit, puskesmas, BPBD, lintas sektor kebencanaan yang terkait, aparat desa seperti pecalang dan organisasi profesi;
b) perjalanan dinas dengan tujuan ke dinas kesehatan kab/kota untuk melakukan evaluasi pembentukan HEOC;
c) perjalanan dinas ke rumah sakit untuk mengecek pelaksanaan hospitals disaster dan simulasi yang dilakukan dalam kesiapsiagaan krisis/bencana;
d) berkoordinasi ke Public Safety Center (PSC) untuk monitoring kegiatan kegawatdaruratan sehari hari ataupun bencana;
e) Penyelenggaraan rapat persiapan dengan tim yang akan dilibatkan dan rapat evaluasi.
2) Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi.

c. SPM Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang
Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:
1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.
2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.

d. SPM Bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi.

e. SPM Bidang Sosial
Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:
1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti.
2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti.
3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti.
4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan di Dalam Panti.
5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi.

f. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik SPM TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52.*

2. Kebijakan Tematik Pengawasan

Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 butir E.2.c.3), Pemerintah Daerah mengalokasikan pengawasan sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

a. Kegiatan pengawasan, yaitu:
1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, rancangan KUA dan rancangan PPAS, RKA-SKPD;
3) Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
4) Reviu laporan keuangan;
5) Kegiatan pengawasan lainnya meliputi *probity audit*, reviu laporan kinerja, reviu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis *gender*, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
6) Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak Tahun 2024, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan atas pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah lainnya, termasuk memastikan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD tepat sasaran dan berbasis output sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
7) Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.
c. Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah provinsi mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi:

a. Sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) dari total belanja daerah;
b. Diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah); dan
c. Diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik pengawasan TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52.*

3. Kebijakan Tematik Kemiskinan Ekstrem

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagaimana maksud butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Mengkoordinir pelaksanaan Verifikasi dan validasi (Verivali) Data Kemiskinan Ekstrem (*by name address*) dan menyampaikan hasilnya kepada Kementerian Koordinator PMK dan by K/L terkait, berikut upaya yang telah dilakukan:
   1) *Update* data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem (*by name by address*) di Kabupaten/Kota berdasarkan data terakhir dari Kemenko PMK
   2) Melaksanakan pemetaan penyebab kemiskinan dan kemiskinan ektrem yang terjadi secara tepat sasaran untuk dilakukan intervensi
b. Pemberian pelatihan/keterampilan dan pendampingan kepada Masyarakat Miskin Ekstrim dan Miskin agar dapat mandiri seperti Pelatihan teknis keterampilan kuliner miskin ekstrem di targetkan 14 angkatan dengan total 518 orang per tahun yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2024
c. Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan melaksanakan program TJSL (Kolaborasi seluruh perusahaan BUMN, BUMD, Swasta) untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem pasca ditetapkannya Keputusan Gubernur Bali tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Nomor 246/04-A/HK/2024
d. Mengimplementasikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2023 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Bali, berikut upaya yang telah dilakukan:
   1) Menyusun Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2025
   2) Mengintegrasikan program penangulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
   3) Menyusun dan melaporkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penuntasan kemiskinan ekstrem kepada Kemenko PMK
e. Menurunkan beban pengeluaran masayarakat melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial
f. Meningkatkan pendapatan Masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan Masyarakat

g. "Ngrombo"/kroyok kemiskinan ekstrem, dengan melibatkan filantropis, orang tua asuh dan stakeholder lainnya
h. Memperbaiki akses infrastruktur jalan dan air bersih

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik kemiskinan ekstrem TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52.*

4. Kebijakan Tematik Stunting

Upaya percepatan penanggulangan stunting berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.14.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam penurunan stunting dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pertemuan Analisa Program Gizi, untuk mengkoordinasikan kegiatan konvergensi dalam upaya percepatan penurunan stunting, dengan peserta dari Kabupaten (TPG Puskesmas)
b. Monev Surveilans Gizi, dilaksanakan setiap triwulan dan evaluasi tahunan bertujuan untuk mengetahui capaian indikator kinerja gizi terkait pelayanan gizi masyarakat
c. Pertemuan Koordinasi Program Gizi, upaya percepatan penurunan stunting khususnya pada upaya peningkatan kualitas Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal bagi balita dan ibu hamil serta Capaian Program Gizi sampai TW III
d. Monev Pelaksanaan PMT Lokal di Kab/Kota, untuk mengetahui pelaksanaan PMT pada balita bermasalah gizi dan ibu hamil KEK
e. Menyusun strategi 5 aksi cegah stunting, antara lain:
   1) Penggerakan Aksi Bergizi
      Sasaran : Pelajar putri
      Kegiatan : Jalan santai, senam, sarapan bersama, Skrening kesehatan pelajar putri, Minum tablet tambah darah di Sekolah setiap minggu diawasi oleh Puskesmas
      Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Buleleng (550 siswa), Klungkung (600 siswa), Badung (650 siswa), Bangli (350 orang), Karangasem (400 orang), Tabanan (525 orang), Denpasar (400 siswa), Gianyar (350 siswa), dan Jembrana (300 orang)
   2) Penggerakan Bumil Sehat
      Sasaran : Ibu hamil, kader, bidan desa, puskesmas
      Kegiatan : Screening kesehatan ibu hamil, Minum TTD bersama, edukasi gizi seimbang, Makan buah bersama, Kelas ibu hamil, Pemberian paket PMT, dan Sosialisasi melalui media sosial
      Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (200 orang), Bangli (220 orang), dan Jembrana (120 orang)
   3) Penggerakan Posyandu Aktif
      Sasaran : Unsur perangkat desa, unsur banjar, PKK, puskesmas, Bidan desa, Kader posyandu
      Kegiatan : Sosialisasi peran Posyandu dan Kader, Posyandu buka di hari libur, Pemberian makanan tambahan lokal tinggi protein hewani, dan Pemberian Vit A untuk bayi dan balita
      Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (130 orang) dan kabupaten Bangli (125 orang)
   4) Penggerakan Cegah Stunting
      Sasaran : Unsur perangkat desa, unsur banjar, PKK, puskesmas, Bidan desa, Kader posyandu

Kegiatan : Sosialisasi dan edukasi untuk pencegahan Stunting, Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Balita setiap bulan, Pemberian PMT lokal, tinggi protein hewani pada Balita beresiko Stunting

Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (150 orang)

5) Jambore Kader

Sasaran : Kader Posyandu dan pendamping kader posyandu (desa, kabupaten, PKK, puskesmas)

Kegiatan : Lomba Ketrampilan Kader serta penyuluhan Kesehatan

Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (165 orang), Tabanan (100 orang), Buleleng (150 orang) dan kabupaten Badung (125 orang) dan Provinsi (200 orang) 20 Agustus 2024

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik stunting TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52.*

5. Kebijakan Tematik Inflasi

Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, salah satu sasaran strategisnya adalah inflasi. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam pengendalian inflasi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Operasi Pasar /Pasar Murah secara intensif
   Pasar murah dilaksanakan berkolaborasi dengan BULOG, BI, Bank BPD dan Pertamina. Total pelaksanaan Pasar Murah se-Bali thn 2024 sebanyak 253 kali
b. Pelaksanaan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (GENTA PATEN) serentak
   Program ini berdasarkan SE Pj. Gub No 6 Tahun 2024 untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di Provinsi Bali. Genta Paten memerlukan partisipasi seluruh stakeholder (Pemerintah, Masyarakat, Komunitas, Badan usaha dan Media) agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan sebagai langkah nyata mewujudkan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Saat ini stakeholder yang telah berpartisipasi yaitu Perangkat Daerah, Sekolah dan Petani (Subak)
c. Optimalisasi peran Perumda Pangan Provinsi Bali dan Paiketan Perumda Pangan se-Bali, seperti:
   1) Menjadi *off taker* pertanian khususnya beras
   2) Membuka pasar seluas-luasnya untuk produk lokal sehingga kompetitif dan masyarakat diuntungkan dengan banyak alternatif (Pasar ASN, Horeca, Mitra Swalayan dan Warung Rakyat, Gerai Pangan Kerta Bali Saguna).
d. Pengembangan aplikasi SiGapura
   1) Penyusunan juknis harga pangan dan juknis neraca pangan sebagai standar penginputan bagi enumerator SiGapura
   2) Pemantauan berjenjang dalam penginputan data oleh enumerator pada 60 pasar untuk informasi harga
   3) Pembuatan fitur *early warning system* untuk memantau lonjakan harga pangan
   4) Penyebaran informasi harga aplikasi SiGapura melalui media BMC secara infografis
e. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan
   1) Bantuan benih/bibit
   2) Pemberian subsidi pupuk organik dan non organik
   3) Pembinaan dan penyuluhan kepada petani dan nelayan
   4) Pengembangan Petani Terintegrasi Hulu-Hilir
   5) Penanganan kerawanan pangan
   6) Pengelolaan cadangan beras Pemerintah Provinsi

7) Pembinaan lumbung pangan Masyarakat
8) Asuransi Usaha Tani Padi (Target: 16.043,29 Ha, Realisasi: 16.036,01 Ha dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (Target: 1.325 ekor, Realisasi: 366 ekor)
9) Pemeliharaan waduk, embung dan jaringan irigasi

f. Mengoptimalkan kelancaran distribusi melalui integrasi Bersama
Pemantauan arus distribusi pangan yang keluar dan masuk wilayah Bali. Pemantauan dilaksanakan pada Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Padang Bai bersama antara pemerintah daerah dengan instansi terkait dan kepolisian

g. Mereduksi biaya transportasi barang/jasa
Mendorong akselerasi pembentukan pasar induk di Bali untuk menjaga pasokan dan Kelancaran distribusi komoditas pangan (jangka menengah panjang)

h. Memastikan Ketersediaan Bahan Pangan Terutama Dengan Kerjasama Antar Daerah, dengan cara berikut:
1) Peningkatan akurasi data neraca pangan di setiap kabupaten/kota sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan untuk stabilisasi harga
2) Mengimplementasikan Perda No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
3) Mengimplementasikan Pergub No. 45 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
4) Menghitung CBPP Provinsi Bali

i. Memberikan Bantuan Sosial Untuk Masyarakat yang Rentan Terhadap Dampak Inflasi
Bantuan diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti, Anak Terlantar dalam Panti, Lanjut Usia Miskin Terlantar. Bantuan yang diberikan berupa:
1) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 55 Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti
2) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 622 Anak Terlantar dalam Panti
3) Pemberian Bantuan Paket Sembako kepada 100 Lanjut Usia Miskin dan atau Terlantar
4) Bantuan Keuangan kepada *Krama* Subak. Jumlah penerima BKK sebanyak 2.858 subak sebesar Rp28.580.000.000, terealisasi sebanyak 2.157 subak sebesar Rp21.570.000.000, dan dalam proses pencairan sebanyak 701 subak sebesar Rp7.010.000.000

j. Memperkuat Koordinasi antara Tim TIPD dan Tim TPIP
1) Melakukan koordinasi, sinergi dan kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, PT. Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas Bali serta Polda Bali dalam melakukan monitoring LPG 3 kg
2) Mengajukan usulan kepada Menteri ESDM dan Dirut Pertamina agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) dijadikan sebagai pangkalan/sub pangkalan LPG 3 kg sehingga penggunaannya bisa tepat sasaran di Provinsi Bali
3) Bersinergi dengan Pemda se-Bali menyalurkan LPG 3kg melalui pasar murah khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional

k. Kepatuhan penyampaian laporan harian perkembangan bahan pokok di daerah
1) Digitalisasi berupa penyampaian informasi harga dan neraca pangan pada aplikasi SiGapura (60 pasar di 9 Kabupaten/Kota)
2) Publikasi harga dan neraca pangan SiGapura melalui berbagai media
3) Pemantauan harga harian pada aplikasi SP2KP dari Kementerian Perdagangan

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik Inflasi TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52.*

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berdasarkan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran (TA) 2025 dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 17 September 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2025 serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2025 tanggal 5 Desember 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Semesta Berencanan Provinsi Bali TA 2025, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD TA 2025.

Tabel 3.1 Realisasi APBD TA 2025

No	Uraian		2025			2024
		Anggaran Induk	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Daerah	6.027.724.313.823,00	6.660.624.025.310,00	7.048.315.869.271,64	105,82	7.824.598.583.907,83
2	Belanja Daerah	6.827.385.005.313,20	7.412.970.277.983,60	6.554.652.991.551,62	88,42	7.293.051.849.998,07
3	Surplus (Defisit)	(799.660.691.490,20)	(752.346.252.673,60)	493.662.877.720,02	(65,61)	531.546.733.909,76
4	Penerimaan Pembiayaan	1.201.125.499.578,20	1.153.811.060.761,60	620.675.986.790,62	53,79	342.650.523.381,56
5	Pengeluaran Pembiayaan	401.464.808.088,00	401.464.808.088,00	401.464.798.088,00	99,99	250.464.798.088,00
6	Pembiayaan Netto	799.660.691.490,20	752.346.252.673,60	219.211.188.702,62	29,13	92.185.725.293,56
SiLPA/SiKPA		-	-	**712.874.066.422,64**	-	**623.732.459.203,32**

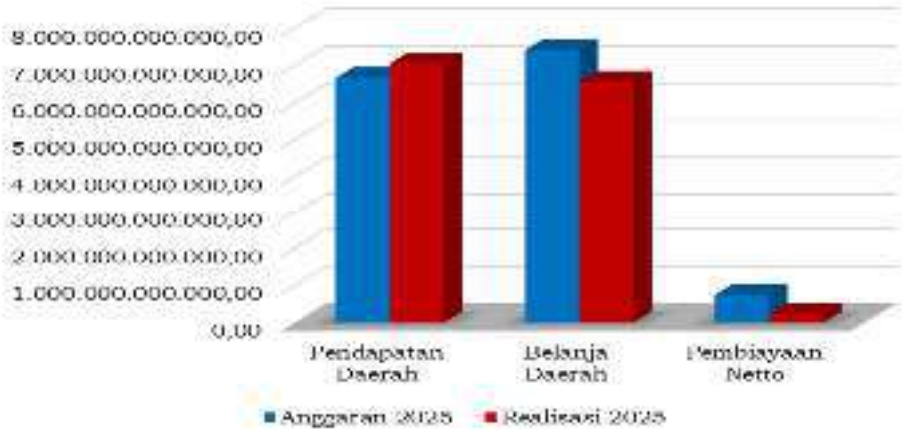

Gambar 3.1 Grafik Anggaran dan Realisasi pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2025

Pada komponen pendapatan, target anggaran TA 2025 mengalami penurunan dibandingkan TA 2024 sebesar Rp215.392.168.290,00 atau 3,13%. Penetapan target pendapatan dimaksud merupakan hasil penyesuaian terhadap capaian kinerja realisasi pendapatan pada TA 2024. Sejalan dengan hal tersebut, realisasi pendapatan TA 2025 juga mengalami penurunan sebesar Rp776.282.714.636,19 atau 9,92%. Kondisi ini dipengaruhi oleh pemberlakuan pemungutan opsen oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang efektif berlaku mulai 5 Januari 2025.

Selain itu, terdapat penerimaan pada rekening penampungan sebesar Rp6.468.000,00 yang belum masuk ke RKUD, terdiri atas penerimaan retribusi non pajak sebesar Rp318.000,00 dan pungutan wisatawan asing sebesar Rp6.150.000,00. Hal tersebut sesuai dengan Surat Kepala BPKAD kepada PT Bank BPD Bali Nomor:B.31.900/8226/PAPKD/BPKAD perihal Pelimpahan Saldo Rekening Penampungan ke RKUD Provinsi Bali. Berdasarkan ketentuan tersebut, penerimaan non tunai sampai dengan pukul 15.00 WITA dilimpahkan ke RKUD pada hari yang sama setelah dilakukan rekonsiliasi,

sedangkan transaksi setelah pukul 15.00 WITA dilimpahkan dan diakui sebagai penerimaan pada tahun anggaran berikutnya. Adapun penerimaan tunai setelah pukul 15.00 WITA tetap dilayani untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat dan hasil penerimaannya dilimpahkan pada hari yang sama.

Pada komponen belanja, target anggaran TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp382.711.452.820,40 atau 4,91% dibandingkan TA 2024. Selaras dengan penurunan tersebut, realisasi belanja juga mengalami penurunan sebesar Rp738.398.858.446,45 atau 10,12%. Capaian realisasi belanja dimaksud merupakan hasil pelaksanaan kebijakan pengendalian belanja daerah sebagaimana diatur dalam:

1. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 7054 Tahun 2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025; dan
2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 7505 Tahun 2025 tentang Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025 dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

Sebagai implikasi dari penurunan target dan realisasi pendapatan serta belanja, pada TA 2025 Pemerintah Provinsi Bali mengalami surplus sebesar Rp493.662.877.720,02 dari defisit yang direncanakan sebesar Rp752.346.252.673,60. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja keuangan TA 2024 yang mengalami surplus sebesar Rp531.546.733.909,76, Pemerintah Provinsi Bali mengalami penurunan surplus sebesar Rp37.883.856.189,74 atau 7,13%. Di sisi pembiayaan, realisasi pembiayaan netto TA 2025 sebesar Rp219.211.188.702,62 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan TA 2024 sebesar Rp92.185.725.293,56, atau meningkat sebesar Rp127.025.463.409,06 (137,79%) yang mencerminkan adanya penguatan pada komponen pembiayaan daerah.

Dengan adanya pelampauan realisasi pendapatan serta belum optimalnya realisasi belanja dan pembiayaan, Pemerintah Provinsi Bali mencatatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2025 sebesar Rp712.874.066.422,64. Saldo SiLPA tersebut selanjutnya menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya serta memberikan ruang fiskal dalam pengelolaan APBD secara berkelanjutan.

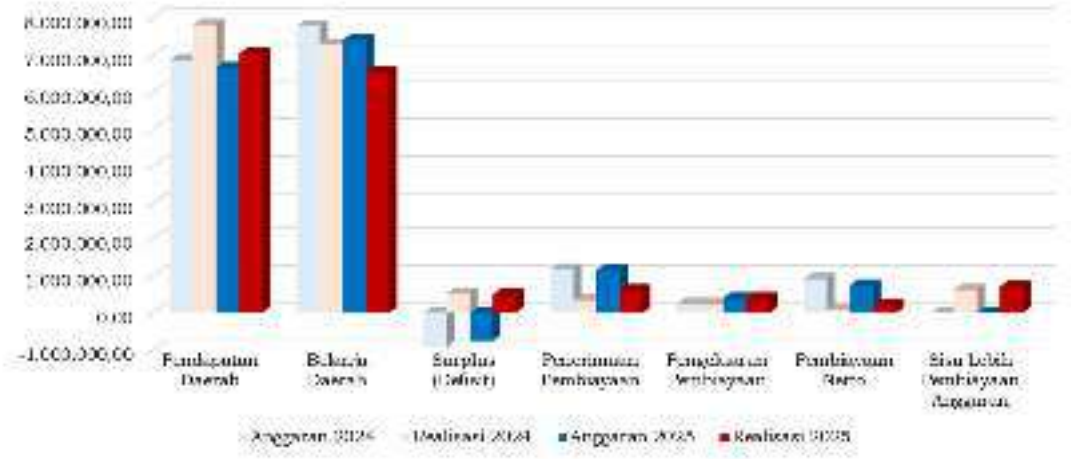

Gambar 3.2 Grafik Anggaran dan Realisasi pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2024 dan 2025 (Dalam Juta Rupiah)

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2025 dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan bidang dan fungsi terkait, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan TA 2025 Sesuai Bidang dan Fungsi

Urusan/Dinas Pelaksana	Anggaran Induk	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5 = 4:3
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**356.739.830.983,00**	**416.872.037.624,00**	**380.568.909.605,18**	**91,29**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.350.000.000,00	2.502.000.000,00	3.219.031.137,00	128,66
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.350.000.000,00	2.502.000.000,00	3.219.031.137,00	128,66
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	305.219.038.983,00	355.577.845.624,00	323.840.560.469,83	91,07
Dinas Kesehatan	305.219.038.983,00	355.577.845.624,00	323.840.560.469,83	91,07
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	49.161.432.000,00	58.782.832.000,00	53.499.957.998,35	91,01
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	49.161.432.000,00	58.782.832.000,00	53.499.957.998,35	91,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.360.000,00	9.360.000,00	9.360.000,00	100
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	9.360.000,00	9.360.000,00	9.360.000,00	100
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**9.559.798.814,00**	**13.826.873.754,00**	**19.692.839.420,00**	**142,42**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4.704.320.000,00	6.104.320.000,00	9.216.531.880,00	150,98
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	4.704.320.000,00	6.104.320.000,00	9.216.531.880,00	150,98
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	843.394.814,00	936.135.194,00	1.379.932.893,00	147,41
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	843.394.814,00	936.135.194,00	1.379.932.893,00	147,41
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1.219.380.000,00	1.235.183.760,00	1.230.889.120,00	99,65
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.219.380.000,00	1.235.183.760,00	1.230.889.120,00	99,65
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	268.064.000,00	3.425.664.000,00	4.205.771.316,00	122,77
Dinas Perhubungan	268.064.000,00	3.425.664.000,00	4.205.771.316,00	122,77
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.040.000,00	5.048.400,00	5.056.800,00	100,17
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.040.000,00	5.048.400,00	5.056.800,00	100,17
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.519.600.000,00	2.120.522.400,00	3.654.657.411,00	172,35
Dinas Kebudayaan	2.519.600.000,00	2.120.522.400,00	3.654.657.411,00	172,35
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**330.853.785.200,00**	**503.193.321.600,00**	**371.903.089.794,00**	**73,91**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.824.750.000,00	3.162.272.000,00	2.845.771.794,00	89,99
Dinas Kelautan dan Perikanan	5.824.750.000,00	3.162.272.000,00	2.845.771.794,00	89,99
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	325.005.275.200,00	500.005.275.200,00	369.027.025.200,00	73,8
Dinas Pariwisata	325.005.275.200,00	500.005.275.200,00	369.027.025.200,00	73,8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	23.760.000,00	25.774.400,00	30.292.800,00	117,53
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	23.760.000,00	25.774.400,00	30.292.800,00	117,53
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**194.046.695.885,00**	**253.753.839.112,00**	**253.753.839.116,43**	**100**
SEKRETARIAT DAERAH	194.046.695.885,00	253.753.839.112,00	253.753.839.116,43	100
Sekretariat Daerah	194.046.695.885,00	253.753.839.112,00	253.753.839.116,43	100

Urusan/Dinas Pelaksana	Anggaran Induk	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5 = 4:3
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**5.136.524.202.941,00**	**5.472.977.953.220,00**	**6.022.397.191.336,03**	**110,04**
KEUANGAN	5.126.774.182.941,00	5.450.595.698.220,00	5.999.049.184.828,15	110,06
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.464.954.781.000,00	2.631.978.390.704,00	3.114.961.811.957,15	118,35
Badan Pendapatan Daerah	2.661.819.401.941,00	2.818.617.307.516,00	2.884.087.372.871,00	102,32
KEPEGAWAIAN	9.690.020.000,00	22.322.255.000,00	23.285.006.507,88	104,31
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.690.020.000,00	22.322.255.000,00	23.285.006.507,88	104,31
PENGELOLAAN PENGHUBUNG	60.000.000,00	60.000.000,00	63.000.000,00	105
Badan Penghubung	60.000.000,00	60.000.000,00	63.000.000,00	105
Jumlah	**6.027.724.313.823,00**	**6.660.624.025.310,00**	**7.048.315.869.271,64**	**105,82**

Secara garis besar realisasi pendapatan daerah TA 2025 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp7.048.315.869.271,64 atau 105,82% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp6.660.624.025.310,00. Pelampauan target pendapatan secara signifikan terdapat pada urusan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dengan nilai pelampauan sebesar Rp548.801.907.691,15. Penjelasan atas pelampauan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, satuan kerja pengampunya adalah Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pegelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), berikut penjelasannya:
   kebijakan relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap selama TA 2025.
   a. Alokasi anggaran pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp2.818.617.307.516,00 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp2.884.087.372.871,00 atau 102,32%. Pelampauan realisasi tersebut terjadi karena terdapat
      1) Adanya pemberian keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta pembebasan sanksi PKB, yang bertujuan meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan dan mendorong percepatan pembayaran pajak, termasuk dari wajib pajak yang sebelumnya menunda kewajibannya. Selain itu, perbaikan tata kelola dan standar pelayanan turut mempermudah proses administrasi, khususnya pada layanan BBNKB.
      2) Teradapat faktor sektoral seperti dinamika konsumsi BBM yang berdampak pada PBBKB serta skema bagi hasil antara provinsi dan kabupaten/kota. Penguatan pengawasan dan optimalisasi pemungutan pajak, khususnya Pajak Air Permukaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, serta penerapan Pajak Alat Berat sebagai jenis pajak baru yang didukung upaya pemungutan melalui pendataan dan sosialisasi secara langsung, turut memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan daerah secara keseluruhan.
   b. Alokasi anggaran pendapatan pada BPKAD adalah sebesar Rp2.631.978.390.704,00 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp3.115.310.233.040,15 atau 118,36%. Pelampauan realisasi tersebut terjadi karena pada UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah di BPKAD Provinsi Bali, terdapat realisasi penerimaan sebesar Rp572.522.807.759,34 yang bersumber dari kegiatan pemanfaatan barang milik daerah melalui mekanisme sewa kantin, sewa rumah dinas, kerja sama pemanfaatan, serta sewa tanah. Adapun peningkatan penerimaan yang signifikan pada TA 2025 terutama dipengaruhi oleh transaksi:
      1) Pemerintah Provinsi Bali menjalin kerja sama pemanfaatan sebagian lahan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 2 di Desa Kesiman Kertalangu, Kota Denpasar, seluas 93.900 m² dengan PT Bali Budaya Semesta (PT BBS). Kerja sama ini dituangkan dalam perjanjian tanggal 25 November 2025 dan merupakan tindak lanjut penyelesaian kewajiban sebelumnya. Seluruh tunggakan sebesar Rp1.478.423.445,00 telah dibayarkan dan diterima pada Tahun Anggaran 2025, serta PT BBS juga membayar Kontribusi Tetap sebesar Rp58.380.000.000,00, sehingga total penerimaan yang dicatat pada Tahun Anggaran 2025 adalah Rp59.858.423.445,00. Perjanjian berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun, dengan kewajiban tambahan berupa bagi hasil pendapatan;

sebagian lahan juga ditetapkan sebagai area konservasi untuk kegiatan adat dan keagamaan.

2) Pemerintah Provinsi Bali juga melakukan kerja sama pemanfaatan lahan HPL seluas kurang lebih 398.990 m² di Desa Peminge, Kecamatan Benoa, Kabupaten Badung dengan PT Bali Destinasi Lestari (PT BDL). Kerja sama ini merupakan pembaruan dari perjanjian sebelumnya, disertai penyelesaian seluruh tunggakan sebesar Rp59.884.028.378,98 yang telah diterima pada Tahun Anggaran 2025. Selain itu, PT BDL telah membayar Kontribusi Tetap Tahap I sebesar Rp425.137.500.000,00, sehingga total penerimaan yang diakui pada Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp485.021.528.378,98. Perjanjian berlaku selama 50 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun, dengan pembayaran kontribusi tetap secara bertahap serta kewajiban bagi hasil sesuai ketentuan perjanjian.

Penjelasan lebih lanjut terkait tinggi dan rendahnya capaian realisasi pendapatan daerah dapat dilihat pada Catatan atas Laporan Keuangan Bagian LRA poin 5.1.1

Tabel 3.3 Realisasi Belanja TA 2025 Sesuai Bidang dan Fungsi

Urusan/Dinas Pelaksana	Anggaran Induk	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5 = 4:3
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**3.337.624.744.113,20**	**3.520.856.142.702,00**	**3.201.713.301.583,32**	**90,94**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.967.787.362.425,00	1.933.617.545.947,00	1.777.415.518.705,08	91,92
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.967.787.362.425,00	1.933.617.545.947,00	1.777.415.518.705,08	91,92
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	781.519.501.055,00	824.305.230.667,00	738.426.340.010,96	89,58
Dinas Kesehatan	781.519.501.055,00	824.305.230.667,00	738.426.340.010,96	89,58
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	448.787.822.747,20	628.054.997.990,00	560.089.093.023,00	89,18
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	448.787.822.747,20	628.054.997.990,00	560.089.093.023,00	89,18
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.834.476.430,00	9.413.522.655,00	9.082.513.069,00	96,48
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.834.476.430,00	9.413.522.655,00	9.082.513.069,00	96,48
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.440.747.191,00	88.013.652.729,00	81.788.222.089,28	92,93
Satuan Polisi Pamong Praja	58.799.817.568,00	54.221.190.392,00	51.274.052.587,00	94,56
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36.640.929.623,00	33.792.462.337,00	30.514.169.502,28	90,3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	38.254.834.265,00	37.451.192.714,00	34.911.614.686,00	93,22
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	38.254.834.265,00	37.451.192.714,00	34.911.614.686,00	93,22
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**1.365.918.287.388,00**	**1.223.925.556.519,40**	**1.056.667.378.480,82**	**86,33**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	43.287.730.758,00	38.653.418.294,00	35.389.729.546,00	91,56
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	43.287.730.758,00	38.653.418.294,00	35.389.729.546,00	91,56
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.337.626.086,00	6.164.276.173,00	5.819.472.354,00	94,41
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	6.337.626.086,00	6.164.276.173,00	5.819.472.354,00	94,41
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.201.538.334,00	3.826.074.609,00	3.575.843.109,00	93,46
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.201.538.334,00	3.826.074.609,00	3.575.843.109,00	93,46

Urusan/Dinas Pelaksana	Anggaran Induk	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5 = 4:3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	382.727.700,00	6.113.479.700,00	5.401.666.900,00	88,36
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	382.727.700,00	6.113.479.700,00	5.401.666.900,00	88,36
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	13.802.616.799,00	26.170.073.897,00	18.036.515.634,00	68,92
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	13.802.616.799,00	26.170.073.897,00	18.036.515.634,00	68,92
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	589.682.750,00	326.704.025,00	251.916.305,00	77,11
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	589.682.750,00	326.704.025,00	251.916.305,00	77,11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	21.716.072.927,00	25.462.526.208,00	23.571.748.392,00	92,57
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21.716.072.927,00	25.462.526.208,00	23.571.748.392,00	92,57
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	678.793.860,00	474.711.630,00	449.103.561,00	94,61
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	678.793.860,00	474.711.630,00	449.103.561,00	94,61
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	49.702.791.659,00	105.533.390.688,40	87.159.981.563,00	82,59
Dinas Perhubungan	49.702.791.659,00	105.533.390.688,40	87.159.981.563,00	82,59
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	390.721.502.885,00	246.563.487.674,00	147.170.475.702,93	59,69
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	390.721.502.885,00	246.563.487.674,00	147.170.475.702,93	59,69
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	24.807.715.448,00	23.029.940.683,00	21.169.609.316,61	91,92
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	24.807.715.448,00	23.029.940.683,00	21.169.609.316,61	91,92
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	20.171.142.940,00	17.908.672.989,00	15.603.611.923,00	87,13
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20.171.142.940,00	17.908.672.989,00	15.603.611.923,00	87,13
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	87.877.531.032,00	95.056.488.300,00	86.090.475.071,97	90,57
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	87.877.531.032,00	95.056.488.300,00	86.090.475.071,97	90,57
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	431.471.640,00	281.847.820,00	258.982.763,00	91,89
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	431.471.640,00	281.847.820,00	258.982.763,00	91,89
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	410.712.320,00	324.157.405,00	292.239.835,00	90,15
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	410.712.320,00	324.157.405,00	292.239.835,00	90,15
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	701.436.428.796,00	627.091.215.311,00	605.571.938.378,31	96,57
Dinas Kebudayaan	218.972.308.088,00	139.904.538.062,00	121.965.580.613,31	87,18
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	482.464.120.708,00	488.131.768.362,00	484.460.425.891,00	99,25
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	610.598.328,00	368.970.632,00	335.937.754,00	91,05
Sekretariat Daerah	610.598.328,00	368.970.632,00	335.937.754,00	91,05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	751.603.126,00	576.120.481,00	518.130.372,00	89,93

Urusan/Dinas Pelaksana	Anggaran Induk	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5 = 4:3
Sekretariat Daerah	751.603.126,00	576.120.481,00	518.130.372,00	89,93
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**226.986.014.137,00**	**244.456.310.296,20**	**216.351.605.081,00**	**88,5**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	36.174.908.553,00	36.095.008.934,20	31.271.062.999,00	86,64
Dinas Kelautan dan Perikanan	36.174.908.553,00	36.095.008.934,20	31.271.062.999,00	86,64
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	24.438.350.368,00	31.605.924.583,00	20.370.258.023,00	64,45
Dinas Pariwisata	24.438.350.368,00	31.605.924.583,00	20.370.258.023,00	64,45
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	95.045.589.675,00	106.576.529.099,00	99.721.755.396,00	93,57
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	95.045.589.675,00	106.576.529.099,00	99.721.755.396,00	93,57
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	47.181.527.728,00	44.619.832.805,00	41.301.879.031,00	92,56
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	47.181.527.728,00	44.619.832.805,00	41.301.879.031,00	92,56
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	115.499.500,00	76.085.500,00	51.779.671,00	68,05
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	115.499.500,00	76.085.500,00	51.779.671,00	68,05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	21.094.346.865,00	19.376.085.557,00	17.794.358.745,00	91,84
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.094.346.865,00	19.376.085.557,00	17.794.358.745,00	91,84
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2.910.906.648,00	6.081.959.018,00	5.817.007.349,00	95,64
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.910.906.648,00	6.081.959.018,00	5.817.007.349,00	95,64
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	24.884.800,00	24.884.800,00	23.503.867,00	94,45
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	24.884.800,00	24.884.800,00	23.503.867,00	94,45
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**527.944.226.153,00**	**609.900.735.686,00**	**443.288.401.324,00**	**72,68**
SEKRETARIAT DAERAH	249.802.493.765,00	317.370.561.909,00	257.841.020.279,00	81,24
Sekretariat Daerah	249.802.493.765,00	317.370.561.909,00	257.841.020.279,00	81,24
SEKRETARIAT DPRD	278.141.732.388,00	292.530.173.777,00	185.447.381.045,00	63,39
Sekretariat DPRD	278.141.732.388,00	292.530.173.777,00	185.447.381.045,00	63,39
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**1.284.139.017.906,00**	**1.730.639.132.703,00**	**1.557.639.746.449,10**	**90**
PERENCANAAN	29.056.451.327,00	25.908.334.842,00	21.337.890.034,52	82,36
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	29.056.451.327,00	25.908.334.842,00	21.337.890.034,52	82,36
KEUANGAN	1.170.373.606.034,00	1.605.271.382.984,00	1.448.431.278.460,36	90,23
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	983.522.472.624,00	1.437.785.645.405,00	1.292.171.362.033,45	89,87
Badan Pendapatan Daerah	186.851.133.410,00	167.485.737.579,00	156.259.916.426,91	93,3
KEPEGAWAIAN	50.015.636.589,00	60.321.528.772,00	53.881.894.165,22	89,32
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	50.015.636.589,00	60.321.528.772,00	53.881.894.165,22	89,32
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.518.830.394,00	1.232.466.689,00	988.115.399,00	80,17
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.518.830.394,00	1.232.466.689,00	988.115.399,00	80,17
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	23.285.290.479,00	26.887.596.102,00	23.375.100.232,00	86,94
Badan Riset dan Inovasi Daerah	23.285.290.479,00	26.887.596.102,00	23.375.100.232,00	86,94
PENGELOLAAN PENGHUBUNG	9.889.203.083,00	11.017.823.314,00	9.625.468.158,00	87,36
Badan Penghubung	9.889.203.083,00	11.017.823.314,00	9.625.468.158,00	87,36

Urusan/Dinas Pelaksana	Anggaran Induk	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5 = 4:3
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	**38.664.248.243,00**	**35.944.174.832,00**	**34.015.253.758,00**	**94,63**
INSPEKTORAT DAERAH	38.664.248.243,00	35.944.174.832,00	34.015.253.758,00	94,63
Inspektorat	38.664.248.243,00	35.944.174.832,00	34.015.253.758,00	94,63
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	**46.108.467.373,00**	**47.248.225.245,00**	**44.977.304.875,38**	**95,19**
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	46.108.467.373,00	47.248.225.245,00	44.977.304.875,38	95,19
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	46.108.467.373,00	47.248.225.245,00	44.977.304.875,38	95,19
Jumlah	**6.827.385.005.313,20**	**7.412.970.277.983,60**	**6.554.652.991.551,62**	**88,42**

Realisasi belanja daerah TA 2025 mencapai Rp6.554.652.991.551,62 atau sebesar 88,42% dari target Rp7.412.970.277.983,60, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan anggaran secara umum telah berjalan cukup efektif meskipun belum sepenuhnya memenuhi target yang direncanakan. Kondisi tersebut antara lain terjadi pada urusan komunikasi dan informatika dengan realisasi sebesar 59,69% serta sisa anggaran Rp99.393.011.971,07, yang dipengaruhi oleh belum terealisasinya pengadaan tanah karena kompleksitas tahapan, belum tercapainya kesepakatan dengan pemilik, serta pelaksanaan yang dilakukan secara selektif dan berhati-hati; terhadap sisa anggaran dimaksud akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian kembali pada tahun anggaran berikutnya sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan pelaksanaan.

Selain itu, pada urusan Sekretariat DPRD realisasi mencapai 63,39% dengan sisa anggaran Rp107.082.792.732,00, belum optimalnya penyerapan anggaran dipengaruhi oleh penyesuaian pelaksanaan perjalanan dinas, sehingga frekuensi dan volume kegiatan menurun, perbedaan harga aktual dibandingkan asumsi dalam perencanaan anggaran, serta sebagian kegiatan dilaksanakan melalui mekanisme alternatif atau dijadwalkan kembali, sehingga realisasi perjalanan dinas tercatat sebesar 25,03% dari pagu. Adapun perjalanan dinas luar negeri pada TA 2025 tidak direalisasikan karena usulan tidak memperoleh persetujuan sehubungan dengan kebijakan efisiensi belanja sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, sehingga pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui alternatif yang tidak memerlukan perjalanan luar negeri.

Penjelasan lebih lanjut terkait tinggi dan rendahnya capaian realisasi belanja daerah dapat dilihat pada Catatan atas Laporan Keuangan Bagian LRA poin 5.1.2

3.3 Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Penyusunan informasi kinerja keuangan merupakan bagian dari prosedur penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi SKPD (SA SKPD) yang dilaksanakan pada masing-masing perangkat daerah dan Sistem Akuntansi SKPKD (SA SKPKD) yang dilaksanakan pada SKPKD/PPKD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali). Laporan keuangan yang dihasilkan SA SKPD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan SA SKPKD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan laporan keuangan telah dilakukan rekonsiliasi antara pembukuan Perangkat Daerah dengan PPKD setiap bulannya dan rekonsiliasi antara pembukuan PPKD dengan B IX/rekening koran Kas Umum Daerah.

3.4 Kebijakan Anggaran Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025

Dalam pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2025, terdapat 2 (dua) kali perubahan dan penyesuaian belanja karena adanya beberapa kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah seperti diterbitkannya Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil, menindaklanjuti Surat Sekjen Kemendagri Nomor: 900.1/1819.A/SJ tanggal 22 April 2024 Hal: Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK T.A. 2024 serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, serta adanya

kebutuhan anggaran belanja yang bersifat mendesak maka secara garis besarnya Pergeseran dan Perubahan Anggaran terhadap APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pergeseran Pertama ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2025.
   Adapun yang dilakukan dalam Pergeseran APBD antara lain :
   a. Pergeseran antar objek belanja dalam satu jenis belanja pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja prioritas dan mendesak yaitu pergeseran pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan
   b. Penyesuaian terhadap belanja yang didanai dari DAK Non Fisik Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
2. Pergeseran Kedua ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2025.
   Adapun pergeseran yang dilakukan yaitu:
   a. Pergeseran anggaran belanja yang didanani dari DAK Fisik Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
   b. Pergeseran anggaran yang didanai dari Belanja Tidak Terduga pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali; dan
   c. Pergeseran dan penambahan pagu anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan kegiatan yang bersifat mendesak dan prioritas pada beberapa perangkat daerah.
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2025 yang dilakukan dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu entitas pelaporan melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disetujui oleh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas pelaporan.

3.5 Analisis Solvabilitas Keuangan Daerah

Analisis solvabilitas keuangan daerah merupakan bagian dari informasi keuangan daerah yang digunakan untuk menilai kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban keuangan serta menjaga keberlanjutan fiskal daerah.

Analisis solvabilitas keuangan daerah meliputi:

1. Solvabilitas operasional,
2. Solvabilitas jangka pendek, dan
3. Solvabilitas jangka panjang.

3.5.1 Solvabilitas operasional

Solvabilitas operasional digunakan untuk menilai kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai belanja operasional yang bersumber dari pendapatan operasional. Rasio solvabilitas operasional dihitung dengan membandingkan pendapatan operasional setelah dikurangi pendapatan DAK operasional dengan beban operasional, sebagaimana disajikan dalam Laporan Operasional.

Berikut disajikan analisis solvabilitas operasional Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.5.1 Hasil Analisis Solvabilitas operasional TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Total pendapatan LO	10.085.025.980.851,22	9.377.513.158.571,52
DAK LO	711.768.494.204,00	702.037.944.052,00
total beban LO	6.059.034.551.978,29	7.400.208.014.848,32
Hasil Analisis	**1,55**	**1,17**
Batas Hasil	**1,2**	**1,2**

Berdasarkan hasil perhitungan, solvabilitas operasional Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2025 mencapai 1,55, meningkat dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar 1,17. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pendapatan operasional (setelah dikurangi DAK operasional) pada

Tahun 2025 mampu membiayai beban operasional sebesar 155%, sedangkan pada Tahun 2024 sebesar 117%.

Dibandingkan dengan batas hasil (*benchmark*) solvabilitas sebesar 1,2, kinerja solvabilitas operasional pada Tahun 2025 berada di atas standar minimum, yang mengindikasikan kondisi keuangan operasional yang sehat dan berkelanjutan (*sustainable*). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk membiayai beban operasionalnya tanpa ketergantungan berlebih pada sumber pendanaan bersifat earmarked (terikat) seperti DAK operasional.

Peningkatan rasio solvabilitas operasional tersebut dipengaruhi oleh:

1. Peningkatan pendapatan operasional Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024, dan
2. Penurunan total beban operasional pada Tahun 2025, yang mencerminkan pengendalian belanja operasional yang lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa kinerja solvabilitas operasional Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 berada dalam kondisi sangat baik, mencerminkan struktur keuangan daerah yang semakin kuat, mandiri, dan berkelanjutan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

3.5.2 Solvabilitas Jangka Pendek

Solvabilitas jangka pendek digunakan untuk menilai kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas jangka pendek dihitung dengan membandingkan aset lancar berupa Kas dan Setara Kas serta Investasi Jangka Pendek dengan Kewajiban Jangka Pendek, sebagaimana disajikan dalam Neraca.

Berikut disajikan analisis solvabilitas Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.5.2 Hasil Analisis Solvabilitas Jangka Pendek TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas dan setara kas	712.874.066.422,64	623.732.459.203,32
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Kewajiban Lancar (Jangka Pendek)	924.101.597.721,97	707.808.146.491,09
Hasil Analisis	**0,77**	**0,88**
Batas Hasil	**1,5**	**1,5**

Berdasarkan hasil perhitungan, solvabilitas jangka pendek Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2025 sebesar 0,77, mengalami penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 0,88. Nilai tersebut menunjukkan bahwa aset lancar berupa kas dan setara kas yang tersedia pada Tahun 2025 hanya mampu menutup sekitar 77% dari kewajiban jangka pendek, sedangkan pada Tahun 2024 mampu menutup sekitar 88%.

Apabila dibandingkan dengan batas hasil (*benchmark*) sebesar 1,5, rasio solvabilitas jangka pendek pada Tahun 2025 maupun Tahun 2024 berada di bawah standar, yang mengindikasikan bahwa secara struktur neraca, likuiditas jangka pendek Pemerintah Provinsi Bali masih berada dalam kategori perlu penguatan.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh:

1. Peningkatan signifikan kewajiban jangka pendek pada Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024, dan
2. Kenaikan kas dan setara kas yang relatif lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kewajiban lancar, serta tidak adanya investasi jangka pendek sebagai penyangga likuiditas tambahan.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Provinsi Bali memiliki posisi kas yang cukup besar secara nominal, namun secara rasio likuiditas jangka pendek masih diperlukan penguatan manajemen kas dan pengendalian kewajiban lancar, agar kemampuan pemenuhan kewajiban jangka pendek dapat lebih terjaga secara berkelanjutan.

3.5.3 Solvabilitas Jangka Panjang

Solvabilitas jangka panjang digunakan untuk menilai kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang serta menjaga kesinambungan fiskal daerah melalui dukungan aset tetap yang dimiliki. Rasio ini dihitung dengan membandingkan kewajiban jangka panjang terhadap total aset tetap sebagaimana disajikan dalam Neraca.

Berikut disajikan analisis solvabilitas Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.5.3 Hasil Analisis Solvabilitas Jangka Panjang TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Total aset tetap	14.009.192.786.281,11	10.422.663.292.333,20
kewajiban jangka panjang	612.828.715.702,65	855.640.130.142,49
Hasil Analisis	**22,86**	**12,18**
Batas Hasil	**2,0**	**2,0**

Berdasarkan hasil perhitungan, solvabilitas jangka panjang Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2025 sebesar 22,86, meningkat secara signifikan dibandingkan Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 12,18. Nilai tersebut menunjukkan bahwa total aset tetap yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun 2025 mencapai sekitar 22,86 kali kewajiban jangka panjang, sedangkan pada Tahun 2024 sebesar 12,18 kali.

Apabila dibandingkan dengan batas hasil (*benchmark*) sebesar 2,0, rasio solvabilitas jangka panjang pada Tahun 2025 maupun Tahun 2024 berada jauh di atas standar, yang mengindikasikan kondisi struktur keuangan jangka panjang yang sangat kuat dan sehat. Hal ini mencerminkan bahwa kapasitas aset tetap daerah sangat memadai dalam menjamin pemenuhan kewajiban jangka panjang serta menjaga stabilitas fiskal daerah secara berkelanjutan.

Peningkatan rasio solvabilitas jangka panjang tersebut dipengaruhi oleh:

1. Peningkatan nilai total aset tetap pada Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024, dan
2. Penurunan kewajiban jangka panjang, yang menunjukkan perbaikan struktur pembiayaan jangka panjang daerah.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali memiliki daya dukung aset yang sangat kuat terhadap kewajiban jangka panjang, sehingga kesinambungan fiskal daerah berada dalam kondisi yang stabil dan berkelanjutan, serta risiko fiskal jangka panjang berada pada tingkat yang rendah.

Pemerintah Provinsi Bali memiliki fundamental fiskal yang kuat dan berkelanjutan, dengan kapasitas operasional dan jangka panjang yang sangat baik. Tantangan utama berada pada aspek likuiditas jangka pendek, yang dapat diperbaiki melalui penguatan manajemen kas, pengendalian kewajiban lancar, serta optimalisasi struktur pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan, Entitas Akuntansi Keuangan Daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali selaku entitas pelaporan terdiri dari 29 entitas akuntansi yang meliputi 29 Perangkat Daerah dan 1 Perangkat Daerah yang merangkap menjadi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.

4.1.1 Entitas Pelaporan

Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintahan Daerah Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar tepatnya di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dipimpin oleh Gubernur, yang dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur dan perangkat daerah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh PPKD. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan.

4.1.2 Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi:
   a. Pendidikan
   b. Kesehatan
   c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   d. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
   e. Sosial
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
   a. Tenaga Kerja
   b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   c. Perhubungan
   d. Komunikasi dan Informatika
   e. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
   f. Penanaman Modal
   g. Kebudayaan
   h. Kearsipan
3. Urusan Pilihan
   a. Kelautan dan Perikanan
   b. Pariwisata
   c. Pertanian
   d. Kehutanan
   e. Perindustrian
4. Urusan Pendukung
   a. Sekretariat Daerah
   b. Sekretariat DPRD
5. Urusan Penunjang
   a. Perencanaan
   b. Keuangan
   c. Kepegawaian
   d. Pendidikan dan Pelatihan
   e. Penelitian dan Pengembangan
   f. Penghubung
6. Urusan Pengawasan
   a. Inspektorat
7. Urusan Pemerintahan Umum
   a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
7. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Kebudayaan
14. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
15. Dinas Kelautan dan Perikanan
16. Dinas Pariwisata
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat DPRD
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Badan Pendapatan Daerah
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Badan Riset dan Inovasi Daerah
27. Badan Penghubung
28. Inspektorat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tugas pokok dan fungsi setiap perangkat daerah selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

4.1.3 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. BLUD Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari:

4.1.3.1 UPTD Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

UPTD Pengelolaan Air Minum (UPTD-PAM) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali merupakan unit kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dibentuk untuk memberikan pelayanan air minum yang didistribusikan kepada para *off taker* (Perumdam Kabupaten/Kota) tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam pelaksanaan kegiatannya, UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali mengutamakan efektivitas dan efisiensi sejalan dengan praktek bisnis yang sehat serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat melalui UPTD Pengelolaan Air Minum, tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali telah berdiri sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini. Instalasi SPAM terdiri dari 5 unit SPAM dengan total kapasitas 1.100 l/dt, dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara, sebagai berikut:

- SPAM Telagawaja dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 14 Desember 2012.
- SPAM Guyangan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 14 Desember 2012.
- SPAM Burana dari Direktorat Jenderal Cipta Karya kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 3 Februari 2020, yang selanjutnya dikelola oleh UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

Adapun unit SPAM yang sudah dihibahkan dari Kementerian PUPR kepada Pemerintah Provinsi Bali:

a. SPAM Petanu dari Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 10 September 2019, yang selanjutnya dikelola oleh UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

b. SPAM Penet dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 29 Juli 2020, yang selanjutnya dikelola oleh UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

Pada tanggal 21 Juli 2017, UPTD Pengelolaan Air Minum ditetapkan sebagai Unit Kerja PD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD dengan Status Penuh sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1479/04-d/HK/2017 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

2. Visi dan Misi UPTD Pengelolaan Air Minum

a. Visi UPTD Pengelolaan Air Minum

"Terwujudnya Pelayanan Air Minum kepada Masyarakat yang Berkualitas Melalui Pelaksanaan yang Profesional."

b. Misi UPTD Pengelolaan Air Minum

1) Menyediakan dan meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat di Provinsi Bali secara berkesinambungan melalui pelayanan prima;

2) Mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penyediaan air minum yang memadai;

3) Memproduksi air minum sesuai dengan standar yang berlaku;

4) Menyelenggarakan pengelolaan air minum dengan menerapkan teknologi yang tepat;

5) Memberikan kontribusi yang optimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD);

6) Memberikan pelayanan air minum dengan tarif yang terjangkau;

7) Meningkatkan kualitas SDM agar mampu berkreasi dan berinovasi secara profesional;

8) Menjalankan aktivitas usaha dengan selalu menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian air baku.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dalam rangka memberikan pelayanan air minum di Provinsi Bali, dengan praktek bisnis yang sehat, dan tetap menganut Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan menetapkan organisasi tata laksana dan akuntabilitas dengan prinsip efisien dan efektif. Tugas UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dalam pengembangan SPAM meliputi: penyelenggaraan unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan, antara lain:

- Pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum Regional di Wilayah Provinsi Bali;
- Optimalisasi dan mengembangkan sistem penyediaan air minum secara berkelanjutan;
- Percepatan cakupan pelayanan air minum;
- Meningkatkan efisiensi pelayanan air minum.

Hasil produksi air minum dari UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali disalurkan melalui Jaringan Distribusi Utama sampai ke pelanggan atau *off taker* (PDAM Kab/Kota) maupun lembaga penyelenggara air minum lainnya. UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali saat ini telah mengelola 5 (lima) SPAM terdiri dari:

- SPAM Petanu, mengambil air baku dari sungai Petanu terletak di Kabupaten Gianyar melayani PDAM Kota Denpasar, PDAM Kab. Badung dan PDAM Kab. Gianyar.
- SPAM Penet, mengambil air baku dari sungai Penet yang terletak di Kabupaten Badung, melayani PDAM Badung dan PDAM Denpasar.
- SPAM Telaga Waja, mengambil air baku dari mata air Surya, Iseh dan Bangol yang terletak di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem untuk melayani wilayah perdesaan maupun perkotaan di Kabupaten Karangasem.
- SPAM Guyangan, mengambil air baku dari mata air Guyangan terletak di Desa Batukandik, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, untuk melayani masyarakat di Kecamatan Nusa Penida bagian atas.
- SPAM Burana, mengambil air baku dari Bendungan Titab yang terletak di Desa Ularan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng untuk melayani masyarakat di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana dengan mengelola dua IPA yaitu IPA Atas dengan kapasitas 165 liter/detik dan IPA Bawah dengan kapasitas 185 liter/detik.

4.1.3.2 UPTD Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

Peningkatan kualitas lingkungan di Daerah Bali sangat penting dilakukan agar kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan sekitarnya semakin meningkat, selain itu juga dimaksudkan agar Bali tetap baik di mata dunia Internasional, mengingat Bali merupakan pintu gerbang wisata Internasional. Perkembangan pariwisata di daerah Bali mengakibatkan pesatnya laju pertumbuhan penduduk dimana dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, oleh karena itu Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Bali, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung menindaklanjuti dengan membangun sistem pengelolaan air limbah perpipaan terpusat, diawali dengan pelaksanaan Master Plan dan Studi Kelayakan oleh JICA (*Japan International Cooperation Agency*) pada tahun 1992-1993, yang kemudian dikeluarkannya dana bantuan Loan IP-431 dari Pemerintah Jepang (JBIC: Japan Bank for International Cooperation) secara efektif pada tanggal 15 Desember 1994, dengan batas waktu pinjaman sampai dengan tahun 2008. Pelaksanaan pekerjaan survey, investigasi dan penyusunan

Program Perencanaan serta Desain telah dimulai sejak tahun 1994, dan kegiatan pembangunan fisik yang meliputi pembangunan jaringan perpipaan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta pompa *booster* baru dimulai pada tahun 2004, Pembangunan DSDP (*Denpasar Sewerage Development Project*) untuk tahap I telah selesai dilaksanakan pada tahun 2008, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pelaksanaan DSDP tahap II yang dimulai tahun 2010 – 2014 untuk membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.

2. Visi dan Misi UPTD Pengelolaan Air Limbah

- Visi UPTD Pengelolaan Air Limbah

  "Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945".

- Misi UPTD Pengelolaan Air Limbah

  Misi yang diemban oleh UPTD PAL adalah Misi Gubernur Bali yaitu Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang, hijau, indah, dan bersih.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

- Tugas Pokok: UPTD Pengelolaan Air Limbah memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam pengelolaan air limbah untuk Domestik terwujudnya Bali sebagai daerah pariwisata budaya yang bersih, sehat, nyaman, dan lestari.

- Fungsi:

  1) menyusun rencana dan program kerja jangka pendek, menengah dan panjang dalam rangka pengembangan sistem jaringan perpipaan dan pengelolaan air limbah domestik;

  2) menyusun dan melaksanakan program survey, pendataan, menganalisis dan menyusun pedoman teknis pelayanan sistem jaringan perpipaan dan Sistem Pengolahan Air Limbah domestik;

  3) mengoperasikan dan memelihara sistem jaringan pipa dan instalasi pengolahan yang telah dibangun sehingga menghasilkan buangan yang telah memenuhi syarat baku mutu;

  4) melayani permohonan sambungan pipa air limbah domestik dan wilayah pelayanannya;

  5) mengawasi dan mengendalikan kualitas air limbah domestik pelanggan yang akan diolah agar memenuhi persyaratan instalasi yang telah ditetapkan;

  6) memberikan sosialisasi rencana-rencana Pemerintah kepada Daerah masyarakat di Bidang Pembangunan Sistem Jaringan Air Limbah domestik dan pengolahannya;

  7) menyelenggarakan pemungutan tarif jasa pelayanan air limbah domestik dan pendapatan lain yang sah sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang undangan; dan

  8) menyelenggarakan hubungan kerja dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan.

4.1.3.3 UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

Berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah maka terjadi pergeseran tugas-tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga tugas-tugas pemerintah daerah semakin berat termasuk tugas-tugas meningkatkan kualitas pegawai sebagai aparatur daerah. Untuk itu Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah antisipasi dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja perangkat daerah provinsi Bali

Serta Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelatihan Kesehatan Dan Masyarakat (Bapelkesmas) yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam penyelenggaraan tugas - tugas teknis operasional dinas dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2017, UPTD Bapelkesmas mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat. UPTD Bapelkesmas beralamat di Jalan Gemitir Nomor 135 Biaung Kesiman Kertalangu, Denpasar timur.

2. Visi dan Misi UPTD Bapelkesmas

- Visi UPTD Bapelkesmas

  "UPTD Bapelkesmas Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebagai pusat Pelatihan Yang Berkualitas Dalam Bidang Kesehatan Menuju Krama Bali Sejahtera Melalui Nangun Sat Kerthi Loka Bali".

- Misi UPTD Bapelkesmas

  1) Meningkatkan sumber daya, keterampilan dan profesionalisme SDM Kesehatan Provinsi Bali;
  2) Sebagai pusat informasi, Konsultasi dan memfasilitasi pendidikan pelatihan bidang kesehatan;
  3) Mengembangkan kemitraan dengan lintas program dan lintas sektor dalam proses pelatihan;
  4) Mengambangkan Kemandirian Kesehatan Masyarakat Melalui Kearifan Lokal.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok UPTD Bapelkesmas sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 tahun 2023, tanggal 15 Mei 2023, adalah sebagai berikut:

- Kepala UPTD Bapelkesmas mempunyai tugas :

  1) Menyusun rencana kegiatan kerja UPTD;
  2) Menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
  3) Mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan pada UPTD untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
  4) Merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
  5) Merancang dan menetapkan penugasan Tim Kerja;
  6) Menentukan dan memberikan arahan kegiatan operasional UPTD;
  7) Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Dinas dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas;
  8) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  9) Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi kesehatan tingkat daerah di bidang pendidikan dan pelatihan kesehatan;
  10) Menghadiri advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan;
  11) Mengembangkan metode dan teknologi pelatihan, mengawasi evaluasi sistem informasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan;
  12) Membimbing pelaksanaan laboratorium lapangan dan pembangunan kemitraan;
  13) Mengoreksi pengendalian mutu pelatihan;

14) Mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di UPTD setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
15) Memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
16) Melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan pada UPTD, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
17) Menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
18) Memberikan penilaian kinerja Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
19) Melaksanakan sistem pengendalian intern;
20) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
21) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

b. Kepala Subbagian tata Usaha mempunyai tugas :

1) Menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian;
2) Menyusun perjanjian kinerja;
3) Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bagian untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
4) Menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
5) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
6) Menghimpun bahan untuk mendukung penyusunan Rencana Strategis Dinas;
7) Menghimpun bahan penyusunan laporan kinerja UPTD;
8) Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
9) Melaksanakan penatausahaan keuangan;
10) Melaksanakan pengawasan keuangan;
11) Melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan;
12) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
13) Melaksanakan urusan kerumahtanggaan;
14) Melaksanakan administrasi pegawai ASN;
15) Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
16) Menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
17) Menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolan;
18) Menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian dan masing-masing Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
19) Memberikan masukan penilaian kinerja;
20) Melaksanakan sistem pengendalian intern;
21) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
22) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

- Kepala Seksi Pengkajian dan Pengendalian Mutu Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:
  1) Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi;
  2) Menyusun perjanjian kinerja;
  3) Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  4) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  5) Menyiapkan bahan kajian dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, kurikulum pendidikan dan pelatihan, metode dan teknologi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
  6) Menyiapkan bahan pengembangan dan pengendalian mutu, sertifikasi, evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
  7) Menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  8) Memberikan masukan penilaian kinerja;
  9) Melaksanakan sistem pengendalian intern;
  10) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  11) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- Kepala Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana mempunyai tugas:
  1) Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi;
  2) Menyusun perjanjian kinerja;
  3) Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  4) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  5) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
  6) Menyiapkan bahan kerjasama dan informasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
  7) Melakukan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
  8) Menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  9) Memberikan masukan penilaian kinerja;
  10) Melaksanakan sistem pengendalian intern;
  11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  12) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha

4.1.3.4 UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

1. Gambaran umum

   UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (UPTD PKSDM) merupakan unit kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, dibentuk

berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah. UPTD PKSDM saat ini telah menjadi salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tanggal 30 Desember 2021 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 885/04-E/HK/2021 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. Dalam pelaksanaan kegiatannya, UPTD PKSDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali mengutamakan efektivitas dan efisiensi sejalan dengan praktek bisnis yang sehat serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat melalui UPTD PKSDM, tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

2. Visi dan Misi UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

   - Visi UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

     "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.

     "Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila".

   - Misi UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

     Peran UPTD PKSDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali merupakan salah satu penggerak dalam tercapainya Misi ke-22 Pemerintah Provinsi Bali, yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

   - Tugas Pokok: UPTD PKSDM mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM. UPTD PKSDM.

   - Fungsi :

     1) Perumusan kebijakan pengembangan kompetensi SDM;

     2) Pengelolaan pengembangan kompetensi SDM; dan

     3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM.

4.1.3.5 UPTD Rumah Sakit Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

   Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dimulai dengan didirikannya "Verpleeghuis voor krankzinnigen op Bangli" dalam bentuk rumah perawatan orang sakit jiwa di Bangli pada tahun 1933 yang diprakarsai oleh dr. K. Loedin Pemerintah Kolonial Belanda. Tanggal 1 Juli 1952 dikeluarkan izin operasional rumah sakit oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan). Tahun 1978 terbit SK Menkes No.135/Menkes/SK/IV/78 RS Jiwa kelas A dan Tahun 1992/1993 RSJP Bangli. Selanjutnya berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1732/Menkes-Kessos/XII/2000 dan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2002, maka Rumah Sakit Jiwa menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah satu-satunya rumah sakit jiwa di Provinsi Bali. Walaupun prioritas pelayanan Rumah Sakit Jiwa adalah pasien dengan gangguan jiwa, tetapi juga dilengkapi pelayanan pendukung lain seperti Rehabilitasi Narkoba, Rehabilitasi Mental, Fisioterapi, Laboratorium, dll. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Bali yang terletak di Kabupaten Bangli. Sebagai langkah awal komitmen Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali memberikan pelayanan kesehatan jiwa komprehensif yang terbaik dan profesional, saat ini Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah terakreditasi Paripurna dan telah bersertifikat ISO 9001-2008. Selain itu untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sejak 1

Januari tahun 2013 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

2. Visi dan Misi UPTD Rumah Sakit Jiwa

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, ditetapkan Visi, Misi, Tujuan Strategi Kebijakan, Moto, serta Janji Layanan sebagai berikut:

a. Visi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

"Menjadi Rujukan Pelayanan dan Pendidikan Kesehatan Jiwa Utama Berstandar Internasional dengan Filosofi Nangun Sat Kerti Loka Bali Menuju Atma Kertih lan Jnana Kertih".

b. Misi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah:

1) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berkelanjutan menuju pelayanan yang paripurna dan prima;

2) Memanfaatkan aset, alat kesehatan, sarana prasarana bagi pelayanan dan penelitian dengan utilitas yang terukur;

3) Memanfaatkan validitas dan *update* informasi digital bagi tata kelola sumber daya manusia, alat kesehatan, dan sarana prasarana;

4) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, dan penelitian kepada pelanggan internal dan eksternal berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; dan

2) RSJ sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rehabilitasi dan gawat darurat psikiatri.

b. Fungsi

1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang pelayanan kesehatan jiwa;

2) Penyelenggaraan pelayanan penunjang Bidang kesehatan jiwa;

3) Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang kesehatan jiwa;

4) Penyelenggaraan pelayanan medik dan kesehatan tradisional;

5) Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;

6) Penyelenggaraan pelayanan keperawatan;

7) Penyelenggaraan pelayanan rujukan;

8) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Bidang kesehatan jiwa;

9) Penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat di Bidang kesehatan jiwa;

10) Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi serta pengelolaan aset; dan

11) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga perlengkapan dan umum.

4.1.3.6 UPTD RS Mata Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang dahulu bernama Rumah Sakit Indera berawal dari adanya Rumah Sakit Kusta/Rehabilitasi Medik Provinsi Bali sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis

(UPT) dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dan Rumah Sakit Kusta sudah ada sejak tahun 1957, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Bali yang menderita kusta. Dalam perkembangan di Rumah Sakit Kusta tidak hanya penyakit kusta saja yang dilayani tetapi justru muncul kasus kasus penyakit lainnya seperti Mata dan THT. Untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat maka Dinas Kesehatan Provinsi Bali mendirikan UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat Provinsi Bali (UPT BKMM) khusus memberikan pelayanan kesehatan mata.

Dengan adanya perubahan kelembagaan maka kedua UPT ini yaitu UPT Rumah Sakit Kusta dan UPT BKMM diubah menjadi satu kelembagaan yang disebut Badan Pelayanan Khusus Rumah Sakit Indera Masyarakat Provinsi Bali (BPRSI), berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. BPRSI Provinsi Bali yang beralamat di Jl. Maruti No.10 Denpasar dan diresmikan oleh Gubernur Bali, Dewa Beratha tanggal 28 Februari 2003. Dalam kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khusus memberikan pelayanan kesehatan indera yang terdiri dari pelayanan kesehatan Indera Penglihatan (Mata), Indera Pendengaran (THT), dan Indera Peraba (Kulit dan Kelamin). Pasca terjadinya bom di Bali tahun 2002, maka pada tanggal 15 Februari 2003 Perdana Menteri Australia setelah berkonsultasi dengan Presiden Republik Indonesia mengumumkan paket bantuan, untuk membantu sistem kesehatan di Bali, sebagai kenangan abadi dalam mengenang mereka yang menjadi korban pemboman tanggal 12 Oktober 2002.

Sebagai bentuk perhatian pemerintah maka pada tanggal 14 November 2003 telah ditandatangani MOU atau *Subsidiary Arrangement* antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia, yang juga merupakan kelanjutan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia dan dibuat sesuai ayat IV mengenai Perjanjian Umum Kerjasama Pembangunan *General Agreement of Development Cooperation* (GADC) yang berlaku sejak tanggal 12 Juli 1999.

Salah satu bagian dari paket yang telah diumumkan melalui MOU tersebut adalah pengembangan pelayanan kesehatan mata yang dimiliki Rumah Sakit Indera melalui proyek kerjasama yang disebut *Australia Bali Memorial Eye Centre* (ABMEC).

Dengan terbatasnya lokasi yang dimiliki Rumah Sakit Indera yang berlokasi di Jl. Maruti No. 10 Denpasar maka untuk pengembangan jenis pelayanan mata beserta infrastrukturnya atas bantuan Gubernur Bali, maka diberikan lahan tanah di Jalan Angsoka Denpasar dan sejak tahun 2005 mulai dibangun sarana/fisik Rumah Sakit Indera Provinsi Bali/ Indera Penglihatan/ Mata unit ABMEC dan diresmikan oleh Perdana Menteri Australia John Howard dan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Juli 2007, dan operasionalnya secara resmi dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2007.

Dengan kondisi ini maka secara otomatis pelayanan kesehatan Indera Penglihatan/ Mata tidak lagi dilayani di Jalan Maruti Nomor 10 Denpasar namun dilaksanakan di Rumah Sakit Indera, Indera Penglihatan/ Mata unit ABMEC Jalan Angsoka Nomor 8 Denpasar.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka BPRSI resmi berubah menjadi Rumah Sakit Indera Provinsi Bali, berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali.

Untuk memperkuat status kelembagaan Rumah Sakit Indera telah memiliki Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 456/Menkes/SK/V/2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Indera Milik Pemerintah Provinsi Bali dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.07.06./III/886/09 tanggal 16 Maret 2009 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus dengan nama Rumah Sakit Indera Provinsi Bali Jalan Maruti Nomor 10 Denpasar Provinsi Bali.

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2015 nama RS Indera Provinsi Bali berubah menjadi Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:HK.02.03/I/1328/2015 tanggal 15 Mei 2015 maka RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali menyandang kelas sebagai Rumah Sakit Khusus Mata Kelas A.

Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Rumah Sakit yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus merupakan unit pelaksana teknis daerah atau lembaga teknis daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 tahun 2018 Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan mata.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menetapkan Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.Maka Rumah Sakit Mata Bali Mandara ditetapkan sebagai organisasi bersifat khusus sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. Visi dan Misi Rumah Sakit Mata Bali Mandara

   - Visi Rumah Sakit Mata Bali Mandara

     Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Rumah Sakit Mata Bali Mandara Nomor B.39.700/01/DEWAS/RSM.BM tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Visi dan Misi Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali, Visi Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah "Menjadi Rumah Sakit yang Unggul dan Berkelas Dunia Dalam Pelayanan Kesehatan Mata Tahun 2026".

   b. Misi Rumah Sakit Mata Bali Mandara

      1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan mata yang bermutu, berorientasi pada keselamatan pasien, terjangkau dan berkeadilan bagi masyarakat;

      2) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan mata dan penelitian dibidang kesehatan mata; dan

      3) Menyediakan sumber daya manusia yang unggul dan inovatif didukung oleh sarana dengan teknologi mutakhir.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

   - Tugas Pokok

      1) Rumah Sakit Mata Bali Mandara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan mata dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; dan

      2) Rumah Sakit Mata Bali Mandara sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dan menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

   b. Fungsi

      1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang pelayanan kesehatan mata;

      2) Penyelenggaraan pelayanan penunjang di bidang pelayanan kesehatan mata;

      3) penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang kesehatan mata;

      4) Penyelenggaraan pelayanan medik;

      5) Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;

      6) Penyelenggaraan pelayanan keperawatan;

      7) Penyelenggaraan pelayanan rujukan;

      8) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Bidang kesehatan mata;

      9) Penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat di Bidang kesehatan mata; dan

      10) Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta rumah tangga perlengkapan dan umum.

4.1.3.7 UPTD RSUD Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

   RSUD Bali Mandara Provinsi Bali merupakan salah satu rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali yang perencanaan pembangunannya sudah di mulai pada tahun 2012 dan pada tahun 2016 bangunan fisiknya sudah berdiri berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Badan PPTSP Penanaman Modal Pemerintah Kota Denpasar dengan Nomor 02/1103/DS/BPPTSP & PM/2013, tanggal 22 Juli 2013 dengan anggaran berasal dari APBD Provinsi Bali. RSUD Bali Mandara Provinsi Bali ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 115 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali yang setara dengan Rumah Sakit Kelas B dengan dr. Gede Bagus Darmayasa, M. Repro sebagai Direktur RSUD Bali Mandara Provinsi Bali yang ditetapkan dengan Surat Perintah Gubernur Bali Nomor 238 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017. RSUD Bali Mandara Provinsi Bali ini didirikan dengan tujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada Masyarakat Bali dan wisatawan yang berkunjung ke Bali dengan empat pelayanan spesialis dasar yaitu: Pelayanan Bedah, Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Pelayanan Kesehatan Anak dan Pelayanan Penyakit Dalam, ditambah dengan Pelayanan Penyakit Kulit dan Kelamin, Pelayanan Penyakit THT, Pelayanan Penyakit Gigi Mulut, Pelayanan Penyakit Mata, Pelayanan Ruang Operasi, Pelayanan Rehabilitasi Medik, dengan Pelayanan Penunjang antara lain: Radiologi dan Laboratorium.

   Selain itu untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sejak 1 Januari 2018 Unit Pelaksana Teknis RSUD Bali Mandara Provinsi Bali telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). RSUD Bali Mandara Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan proses menjadi BLUD dengan status penuh ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1850/04-D/HK/2017, tanggal 9 November 2018 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2018.

2. Visi dan Misi RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

   Berdasarkan Bab IV Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) RSUD Bali Mandara Provinsi Bali, ditetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

   a. Visi RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

      "Menjadi Rumah Sakit yang Berkualitas dengan Mengedepankan Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian menuju Rumah Sakit Berkelas Dunia Tahun 2025".

   b. Misi RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

      1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan standar akreditasi nasional dan internasional yang berorientasi pada keselamatan dan kepuasan pelanggan;
      2) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan dengan jejaring yang luas;
      3) Menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;
      4) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan yang berkesinambungan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, berintegrasi dan memiliki budaya kerja; dan
      5) Meningkatkan kinerja layanan, profesionalisme dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

   a. Tugas Pokok

      1) RSUD Bali Mandara Provinsi Bali mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; dan RSUD Bali Mandara Provinsi Bali sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

b. Fungsi

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
2) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
3) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medik;
4) Penyelenggaraan pelayanan medik dan kesehatan tradisional;
5) Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
6) Penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
7) Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
8) Penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan mutu, sistem informasi manajemen Rumah Sakit dan pelaporan, hukum, humas dan pemasaran;
9) Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan
10) Penyelenggaraan urusan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

4.1.3.8 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa

4. Gambaran Umum

Berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah maka terjadi pergeseran tugas-tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga tugas- tugas pemerintah daerah semakin berat termasuk tugas-tugas peningkatan kualitas pegawai sebagai aparatur daerah. Untuk itu Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah antisipasi dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja perangkat daerah provinsi Bali Serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam penyelenggaraan tugas - tugas teknis operasional dinas dalam bidang laboratorium kesehatan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022, UPTD Balai Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan bidang kesehatan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam pelayanan laboratorium kesehatan serta pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan;

b. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dalam melaksanakan tugas, memiliki fungsi:

1) Menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan teknis laboratorium kesehatan serta pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan;
2) Sebagai wahana penelitian dan pengembangan kapasitas dalam pelayanan laboratorium serta pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan; dan
3) Sebagai wahana pendidikan dan pelatihan tentang pelayanan laboratorium maupun pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan. Visi dan Misi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

5. Visi dan Misi dan Motto UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa

a. Visi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa “Menjadi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan professional, memberikan pelayanan prima melalui Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam rangka mewujudkan Bali Era Baru”.

b. Misi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa

1) Menerapkan sistem manajemen mutu secara professional

2) Memberikan pelayanan prima yang professional kepada masyarakat bidang laboratorium kesehatan
3) Memberikan pelayanan informasi kualitas kesehatan masyarakat
4) Meningkatkan kapasitas dan mutu sumber daya secara berkesinambungan
5) Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan serta teknologi kesehatan secara berkelanjutan
6) Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

- Motto UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa "Pelayanan Tepat dan Akurat"

Visi, Misi dan Motto tersebut kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa.

6. Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa

Tugas pokok UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa. sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas :
  1) Menyusun rencana kegiatan kerja UPTD;
  2) Menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja
  3) Mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran / pembiayaan kegiatan pada UPTD untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas
- Merancang dan menetapkan penugasan Tim Kerja
  1) Menentukan dan memberikan arahan kegiatan operasional UPTD;
  2) Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Dinas dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas;
  3) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  4) Menyelenggarakan pelayanan laboratorium yang berkualitas;
  5) Menyelenggarakan pelayanan pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan
  6) Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak pemerintah maupun swasta dalam pelayanan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang pelayanan laboratorium kesehatan serta pemeliharaan, pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
  7) Menyelenggarakan sistem informasi laboratorium kesehatan dan alat kesehatan;
  8) Menyelenggarakan rujukan pelayanan laboratorium kesehatan serta pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan jika diperlukan;
  9) Memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
  10) Melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan pada UPTD, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
  11) Menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
  12) Memberikan penilaian kinerja Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
  13) Melaksanakan sistem pengendalian intern;
  14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Mempunyai Tugas:
  1) Menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian;
  2) Menyusun perjanjian kinerja;

3) Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bagian untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
4) Menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masingmasing Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
5) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
6) Mengelola urusan keuangan UPTD;
7) Mengelola urusan logistik UPTD;
8) Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah; • Mengelola dokumen UPTD;
9) Mengelola urusan kepegawaian UPTD;
10) Mengelola informasi, produk hukum, kehumasan dan keprotokolan UPTD;
11) Melakukan koordinasi dengan Seksi, Unit fungsional dan pejabat fungsional terkait;
12) Menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
13) Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak pemerintah maupun swasta dalam pelayanan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang pelayanan laboratorium kesehatan serta pemeliharaan, pengujian dan kalibrasi alat kesehatan
14) Menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian dan masing-masing Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
15) Melakukan evaluasi rutin, dan terjadwal dalam rangka mengelolan permasalahan dan inovasi-inovasi;
16) Memberikan masukan penilaian kinerja;
17) Melaksanakan sistem pengendalian intern;
18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
19) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
20) Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak pemerintah maupun swasta dalam pelayanan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang pelayanan laboratorium kesehatan serta pemeliharaan, pengujian dan kalibrasi alat kesehatan
21) Menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian dan masing-masing Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
22) Melakukan evaluasi rutin, dan terjadwal dalam rangka mengelolan permasalahan dan inovasi-inovasi;
23) Memberikan masukan penilaian kinerja;
24) Melaksanakan sistem pengendalian intern;
25) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD

j. Kepala Seksi Pelayanan dan Mutu Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas:

1) Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi;
2) Menyusun perjanjian kinerja;
3) Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian tata Usaha;
4) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

5) Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan membagi peran dan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana
6) Menyelenggarakan pelayanan Laboratorium Kesehatan dalam Gedung UPTD maupun luar Gedung UPTD;
7) Menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis laboratorium
8) Menyelenggarakan kegiatan pemantapan mutu internal/ekternal;
9) Memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan penelitian laboratorium kesehatan;
10) Mengelola survei kepuasan masyarakat dan keluhan pelanggan
11) Mengelola kegiatan akreditasi laboratorium;
12) Memfasilitasi penanganan peralatan dan bahan penunjang laboratorium
13) Melakukan advokasi dalam menyelenggarakan pemeriksaan laboratorium
14) Memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Seksi
15) Menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
16) Melakukan evaluasi rutin, dan terjadwal dalam rangka mengelola resiko, permasalahan dan inovasi-inovasi;
17) Memberikan masukan penilaian kinerja;
18) Melaksanakan sistem pengendalian intern;
19) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
20) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

g. Kepala Seksi Pelayanan dan Mutu Pemeliharaan, Pengujian Alat Kesehatan mempunyai tugas:

1) Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi;
2) Menyusun perjanjian kinerja;
3) Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
4) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5) Menyiapkan penyusunan rencana pelayanan serta pengembangan dan mutu pemeliharaan, pengujian dan kalibrasi alat Kesehatan
6) Berkoordinasi dengan petugas teknis dan non teknis dalam pelaksanaan pelayanan pemeliharaan, pengujian dan kalibrasi alat Kesehatan;
7) Melakukan advokasi dalam menyelenggarakan pelayanan pemeliharaan, pengujian dan kalibrasi alat Kesehatan;
8) Menyelenggarakan pelayanan pemeliharaan, pengujian dan kalibrasi alat Kesehatan dalam Gedung UPTD dan atau luar gedung UPTD;
9) Menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis pemeliharaan, pengujian dan kalibrasi alat Kesehatan;
10) Memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan penelitian pemeliharaan, pengujian dan kalibrasi alat Kesehatan;
11) Mengelola survei kepuasan masyarakat dan keluhan pelanggan dalam pelayanan pemeliharaan, pengujian dankalibrasi alat Kesehatan;
12) Memfasilitasi penanganan peralatan dan bahan penunjang pemeliharaan, pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;

13) Menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

14) Melakukan evaluasi rutin, dan terjadwal dalam rangka mengelolan permasalahan dan inovasi-inovasi;

15) Memberikan masukan penilaian kinerja;

16) Melaksanakan sistem pengendalian intern;

17) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

18) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha

4.1.3.9 Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya

1. Gambaran Umum

Pendirian RSU Dharma Yadnya pada tahun 1986 digagas oleh mantan Gubernur Bali Prof. Dr. IB Mantra (Alm). Beliau bercita-cita agar masyarakat Bali memiliki rumah sakit besar yang pengelolaannya berbasis keagamaan yaitu Agama Hindu sebagaimana mayoritas agama penduduk Bali. Berdirinya rumah sakit ini diawali dengan status sebagai klinik yang dikenal di kalangan masyarakat sebagai poliklinik Gawat Darurat. Klinik Dharma Yadnya sejak didirikan menjadi tujuan pertama dari pasien-pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas di wilayah Denpasar Timur untuk mendapatkan pertolongan pertama sebelum mendapat penanganan tingkat lanjutan di rumah sakit rujukan. Klinik Dharma Yadnya berlokasi di jalan utama yang menghubungkan Denpasar dengan Gianyar dan sangat dekat dengan jalan baypass I.B Mantra, yang menghubungkan kota Denpasar dengan Kabupaten Gianyar, Klungkung dan Karangasem, yang merupakan akses mudah menuju ke RSU Dharma Yadnya. Melihat kemudahan akses tersebut, RSU Dharma Yadnya sangat memungkinkan menjadi unggulan layanan Traumatologi di wilayah timur Bali. Pelayanan Haemodialisa RSU Dharma Yadnya setiap harinya selalu ramai dengan pasien-pasien untuk melakukan cuci darah, kondisi ini menjadi dasar pemikiran manajemen untuk memilih pelayanan Haemodialis sebagai unggulan dalam pelayanannya. Lebih lanjut dari unggulan tersebut, dengan meningkatnya kasus penyakit ginjal merupakan peluang untuk membuat layanan unggulan Ginjal dimana kasus penyakit besar yang mendasarinya juga adalah Hipertensi dan DM. RSU Dharma Yadnya merupakan rumah sakit umum kelas C yang beroperasi dengan kapasitas 100 tempat tidur dan satu-satunya rumah sakit yang bernaung di bawah Yayasan Hindu di Bali yang mayoritas penduduknya beragama Hindu.

Pada akhir tahun 2023 RSU Dharma Yadnya menghibahkan asetnya ke Pemerintah Provinsi Bali. Seluruh pengelolaan Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya telah dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Bali dalam Perubahan Kesatu Naskah Hibah RSU Dharma Yadnya Nomor B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025 tentang Hibah Aset dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya Milik Yayasan Dharma Usada Rsi Markandeya tertanggal 10 Juni 2025. Per 1 Juli 2025 RSU Dharma Yadnya secara resmi menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di bawah Pemerintah Provinsi Bali sesuai Keputusan Gubernur Bali Nomor 518/04-E/HK/2025. Dalam operasionalnya RSU Dharma Yadnya sangat berkomitmen untuk dapat berperan dalam era baru Bali maju dengan mengedepankan unggulan pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan berstandar internasional dapat terwujud sebagaimana visi dan misinya.

2. Visi dan Misi dan Motto

Visi Rumah Sakit yaitu Menjadi Pusat Pelayanan Unggulan dengan Mengedepankan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Berstandar Internasional di tahun 2025. Untuk mencapai visi tersebut, Rumah Sakit memiliki misi, yakni:

a. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan bermutu sesuai dengan standar akreditasi nasional dan internasional yang berorientasi pada keselamatan dan kepuasan pelanggan;
b. Menyelenggarakan Pendidikan yang bermutu dan berkesinambungan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas dan memiliki budaya kerja;
c. Menyelenggarakan penelitian dibidang Kesehatan dalam Upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit;
d. Menyelenggarakan pengabdian Masyarakat dibidang Kesehatan untuk mewujudkan Krama Bali Sehat niskala dan sakala berlandaskan DHARMA.

Moto Rumah Sakit yaitu "Melayani berlandaskan DHARMA" yang memiliki makna dan arti, sebagai berikut:

D : disiplin, adalah kemampuan untuk mengontrol diri sendiri serta menunaikan kewajiban dengan teratur dan patuh terhadap aturan, norma, atau tata tertib;

H : humanis, adalah sebuah pemikiran dan perbuatan yang mengedepankan nilai dan martabat manusia;

A : aman, memberikan rasa aman terhadap pasien, keluarga, petugas kesehatan dan lingkungan

R : responsif, adalah kemampuan untuk memberikan tanggapan yang cepat, tepat, dan sesuai terhadap kebutuhan pasien, keluarga, dan pemangku kepentingan lainnya;

M : mandiri, adalah kemampuan untuk mengatur diri sendiri, mengambil keputuan, dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri; dan

A : akuntabel, merupakan pertanggungjawaban secara terukur dalam pelaksanaan tugas-tugas baik secara terukur baik secara kuantitas serta kualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok RSU Dharma Yadnya :

a. RSDY mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan Upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat.

b. RSDY sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Fungsi RSU Dharma Yadnya
RSU Dharma Yadnya mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;

b. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;

c. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medik;

d. penyelenggaraan pelayanan medik dan kesehatan tradisional;

e. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;

f. penyelenggaraan pelayanan keperawatan;

g. penyelenggaraan pelayanan rujukan;

h. penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan mutu, sistem informasi manajemen Rumah Sakit dan pelaporan, hukum, humas, dan pemasaran;

i. penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan, dan akuntansi; dan

j. penyelenggaraan urusan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan Kesehatan.

4.1.4 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Terdapat dua bentuk BUMD, yaitu: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah.

4.1.4.1 Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna

Perusahaan Daerah Bali yang didirikan pada Tahun 1974 berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1976 Nomor 105 Seri D Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 05 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1986 Nomor 105 Seri D Nomor 35). Pada tahun 2022, terjadi perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna. Perumda Kerta Bali Saguna berkedudukan dan berkantor pusat di Denpasar. Wilayah kerja Perumda Kerta Bali Saguna berada di Provinsi Bali dan dapat melakukan usaha di luar Provinsi Bali, serta dapat mendirikan cabang/perwakilan atau unit usaha di tempat lain, setelah mendapat persetujuan KPM.

Perubahan bentuk badan hukum ini dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar agar tujuan perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan perekonomian yang sehat , kuat, produktif, dan berdaya saing agar mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia sesuai Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Tujuan perubahan bentuk badan hukum adalah untuk meningkatkan penerimaan PAD, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah dan Memperoleh laba atau keuntungan. Nilai penyertaan modal pada Perumda Kerta Bali Saguna disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada Perusahaan Daerah sebesar 100%. Bidang usaha Perumda Kerta Bali Saguna meliputi pengelolaan aset dan infrastruktur serta jasa, industri dan perdagangan, energi dan ketenagalistrikan.

Jenis usaha yang dilakukan oleh Perumda Kerta Bali Saguna meliputi:

1. Kegiatan Jasa Pariwisata, Jasa Alih Daya (*Outsourcing*), dan Jasa Lainnya;
2. Kegiatan Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan;
3. Kegiatan Pengelolaan Air Bersih;
4. Kegiatan Pengolahan Limbah;
5. Kegiatan Pembangunan perumahan/Permukiman (*Real Estate*); dan
6. Kegiatan Pengelolaan Transportasi.

Dalam melaksanakan usaha, Perumda Kerta Bali Saguna dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan usaha lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional perusahaan dan membuat laporan tahunan Perumda Kerta Bali Saguna meliputi Laporan Keuangan, laporan mengenai kegiatan Perumda Kerta Bali Saguna, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama satu tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Kerta Bali Saguna, laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang lampau, nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas, penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas. Laporan Keuangan yang harus dilaporkan Perumda Kerta Bali Saguna antara lain:

1. Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
2. Laporan Laba Rugi dari tahun buku yang bersangkutan;

3. Laporan Arus Kas;
4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

4.1.4.2 PT Bank Pembangunan Daerah Bali (PT BPD Bali)

PT Bank Pembangunan Daerah Bali, selanjutnya disebut Bank BPD Bali atau Perseroan, adalah sebuah perseroan terbatas yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang perbankan. Bank BPD Bali didirikan berdasarkan akta Nomor 131 tanggal 5 Juni 1962 yang dibuat di hadapan Ida Bagus Ketut Rurus, Sekretaris Daerah Tingkat I Bali merangkap Notaris. Kemudian dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2490), Bank BPD Bali mengalami perubahan status badan hukum.

Status hukum Bank BPD Bali berubah dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Daerah dan hal tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Peraturan Daerah Nomor No.6/DPRDGR tanggal 9 Februari 1965 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam keputusannya No.Des.9/21/28-128 tanggal 14 Juli 1965. Kemudian status badan hukum Bank BPD Bali kembali berubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan badan hukum Bank BPD Bali tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Bali dari PD menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Bali (PT BPD Bali) (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 6 Seri D No.3). Penyesuaian bentuk badan hukum Bank BPD Bali menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 7 tanggal 12 Mei 2004, yang dibuat di hadapan Notaris Ida Bagus Alit Sudiatmika, S.H. Hal ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor C-12858 HT.01.01.TH.2004 tanggal 21 Mei 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 50 tanggal 22 Juni 2004, Tambahan Nomor 6004.

Untuk meningkatkan kegiatan usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Bali modal dasar awal pendirian adalah Rp75.000.000.000,00 ditingkatkan menjadi Rp250.000.000.000,00. Modal dasar tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS - LB) tahun 2004 yang dikukuhkan dengan Akta Nomor 49 tanggal 31 Agustus 2004. Dan sesuai dengan Akta Nomor 24 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat oleh I Made Widiada, SH., Notaris di Denpasar, mengubah anggaran das2ar perseroan menjadi Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).

Visi PT BPD Bali yaitu menjadi Bank yang Kuat, Berdaya Saing Tinggi, dan Terkemuka dalam Melayani UMKM serta Berkontribusi bagi Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan. Sedangkan Misi PT BPD Bali yaitu:

1. Memberikan Solusi Produk, Layanan, dan/atau Jasa Keuangan yang Inovatif melalui Pengembangan Ekosistem Digital;
2. Memberdayakan Sektor UMKM dalam rangka Menggerakan Pembangunan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas SDM, Teknologi dan Informasi serta Budaya Perusahaan;
4. Meningkatkan Penerapan Tata Kelola yang Baik, Manajemen Risiko, dan Pengendalian dalam Operasional Organisasi; dan
5. Meningkatkan Kepedulian Sosial bagi Komunitas dan Lingkungan.

4.1.4.3 PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (PT Jamkrida Bali)

PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut PT Jamkrida Bali Mandara adalah Badan Usaha yang didirikan pada tanggal 10 Desember 2010 dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemegang Saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan. Dasar Hukum pendirian perusahaan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-720/KM.10/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Jamkrida Bali Mandara.

Modal Perusahaan sesuai dengan Akta RUPS-LB PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Nomor 1 Tanggal 5 April 2021 yaitu sebesar Rp148.475.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan pemegang saham pengendali adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

Visi Perusahaan yaitu “Menjadi Perusahaan Penjaminan yang Sehat, Kompetitif, Terpercaya dan Berkembang dalam Penguatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Menuju Terciptanya Struktur Perekonomian Daerah Bali yang Seimbang dan Mantap”. Dalam usaha mencapai visi perusahaan kedepan, perusahaan mempunyai misi:

1. Melakukan kegiatan usaha penjaminan kredit dan bantuan konsultasi manajemen bagi penguatan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi agar menjadi pelaku ekonomi yang tangguh;
2. Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan sehingga mampu berkembang sekaligus memperoleh keuntungan guna memberikan pelayanan kepada UMKMK, mitra bisnis serta kemanfaatan bagi perusahaan dan pemilik perusahaan (*share holders*); dan
3. Proaktif terhadap segala bentuk perubahan dan tetap memperhatikan kepentingan terkait (*Stakeholder*).

Jenis kegiatan yang dilakukan perusahaan antara lain melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan untuk membantu akses kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang mempunyai usaha layak (*feasible*) namun tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan khususnya pemenuhan agunan (belum *bankable*). Penjaminan kredit akan mengambil alih sementara risiko pelunasan kredit UMKMK (terjamin) kepada Perbankan/Kreditur (penerima jaminan) apabila pada waktu yang diperjanjikan, terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dengan jaminan PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), perbankan akan menjadi lebih ekspansif dan lebih aman untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKMK.

4.1.4.4 PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda)

Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali ini didirikan dalam rangka menciptakan penyelenggaraan Pusat Kebudayaan Bali yang berkualitas, inovatif, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan Pusat Kebudayaan Bali yang bergerak di bidang kegiatan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Bali; Pengembangan Ekonomi; Pengembangan Kawasan; Perdagangan; Olahraga; Pementasan Seni; Pameran Produk Budaya; Pusat Bisnis (*Central Business District*/ CBD); Pelabuhan Penyeberangan dan Marina; *Meeting Incentive Convention and Exhibition* (MICE); Kesehatan; Hunian; Kawasan Pengembangan Berbasis Transit (Transit Oriented Development/ TOD); dan Wahana Wisata Alam diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel serta profesional. Dasar Hukum pendirian PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali. Namun sampai Laporan ini dibuat PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) masih dalam tahap pembangunan.

4.1.4.5 Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kerthi Bali Santhi

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kerthi Bali Santhi selanjutnya disebut perusahaan, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022. Perusahan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi telah memiliki pedoman melakukan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan menggunakan prinsip-prinsip antara lain: Transparansi, Akuntabilitas, *Responsibility, Independence* dan Keadilan.

Perusahan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi juga menggunakan konsep *Environmental, Social and Governance* (ESG) yang mengedepankan konsep suatu kegiatan usaha dengan tiga faktor atau kriteria utama, yaitu Environmental (Lingkungan) Perumda KBS memanfaatkan kendaraan listrik sebagai alat bantu transportasi, *Social* (sosial) Perumda KBS mengembangkan produk di bidang pariwisata digital dengan filosofi yang diambil dari kearifan budaya dengan cara melakukan edukasi digitalisasi terpadu kepada masyarakat luas dengan menyelenggarakan event workshop, *Governance* (Tata Kelola) salah satu faktor yang turut diperhatikan dalam penerapan aktivitas perusahan menggunakan Eats dan microsoft untuk mendukung dari adanya ESG. Kerthi Bali Santhi *Employe Activity Tracking System* (KBS EATS) Suatu Aplikasi berbasis online yang digunakan oleh Perumda KBS untuk mempermudah operasional karyawan dalam melakukan kegiatan kerja yang meliputi absensi online, pengajuan lembur, perhitungan payroll atau penggajian secara otomatis, dan pengawasan kinerja pegawai.

Sesuai dengan pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2022, Pendirian Perumda Kerthi Bali Santhi dimaksudkan untuk menyelenggarakan Pariwisata Digital Budaya Bali secara profesional, akuntabel, dan transparan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan LKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali adalah Basis Akrual untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Operasional, dan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis akrual mengakui pendapatan, beban, dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah.

Basis akrual tercermin pada Pendapatan-Laporan Operasional (LO) dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Demikian pula belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan LKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Ringkasan Penerapan Kebijakan Akuntansi Akun yang Penting Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode:

1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
2. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
    a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
    b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
    c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
    d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
    e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
    f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
    g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
3. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
    a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
    b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.

4. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
   a. Aset;
   b. Kewajiban;
   c. Ekuitas;
   d. Pendapatan-LRA;
   e. Belanja;
   f. Transfer;
   g. Pembiayaan;
   h. Saldo Anggaran Lebih;
   i. Pendapatan-LO;
   j. Beban; dan
   k. Arus Kas.
5. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
6. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai *output* entitas dan *outcomes* dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
2. pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga Pendapatan-LRA diakui dengan ketentuan :

1. diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
2. diterima di Kas atau rekening BLUD berdasarkan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) oleh BUD/Kuasa BUD sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh BLUD;
3. adanya menerbitkan SPB oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang disampaikan Dinas Pendidikan untuk sisa dana BOS di SMAN dan SMKN yang sebelumnya belum diakui sebagai SiLPA; dan
4. dalam transaksi *online* atau non tunai, dimana wajib pajak atau wajib retribusi membayar melalui transfer, pengakuan Pendapatan-LRA diakui sesuai tanggal transfer diterima di RKUD, dan penerbitan SKPD atau SKRD dilakukan sesuai dengan tanggal dalam bukti transfer yang sekaligus

digunakan dasar bahwa wajib pajak/wajib retribusi telah memenuhi kewajibannya.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan atau pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah disahkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas daerah.
2. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
    a. Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.
    b. Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan Pendapatan-LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang Pendapatan-LO. Sedangkan Pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.
3. Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan-LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan Pendapatan-LRA diakui pada saat uang telah diterima.
4. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan Pendapatan-LO dan pengakuan Pendapatan-LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah.
5. Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.
6. Khusus Pendapatan-LO pada PD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada saat pasien sudah mendapatkan pelayanan, dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan maka besarnya Pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas.
7. Hibah berupa aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
8. Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai Piutang Transfer dan Pendapatan Transfer-LO.

9. Mutasi aset antar PD pada Pemerintah Provinsi Bali tidak diakui sebagai pendapatan-LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi PD penerima.

Pengukuran

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
5. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
6. Hibah aset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran aset sejenis.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Dalam LRA menyebutnya dengan belanja, sedangkan LO menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual *(full accrual accounting cycle).*

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban dapat diartikan juga sebagai kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

1. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah berdasarkan jenis beban terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tidak terduga.
2. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.
3. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja Sekretariat DPRD, belanja Sekretariat Daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban

   Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari rekening kas umum daerah atau kas di Bendahara Pengeluaran.

2. Terjadinya konsumsi aset

   Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

   Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan dan amortisasi. Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode pelaporan atau memberikan manfaat melewati akhir periode pelaporan diakui sebagai beban yang menjadi kewajiban periode pelaporan berdasarkan alokasi sistematis, dan sisa pengeluaran yang belum dibebankan pada periode pelaporan diakui sebagai Belanja Dibayar Dimuka.

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (UP) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
3. Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti belanja yang bersumber dari Dana BLUD diakui sebagai belanja berdasarkan penerbitan SP2BP oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3BP yang diajukan oleh PA/KPA.
4. Belanja yang bersumber dari Sisa Dana BOS pada Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri yang belum dilaporkan sebagai SiLPA, diakui sebagai belanja berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
5. Belanja yang bersumber dari Hibah Dana BOS kepada Kabupaten/Kota untuk Satdikdas Negeri diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS yang diterima oleh PPKD dari PKD Kabupaten/Kota.
6. Penyaluran Hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan Hibah Dana BOS dari Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik.

<u>Pengukuran</u>

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar, telah menimbulkan kewajiban, maupun melalui perhitungan akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Penyusutan Aset Tetap selain tanah, dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme LS dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan UP setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan, serta nilai pengesahan belanja yang diterbitkan BUD/Kuasa BUD terhadap belanja yang tidak melalui RKUD.

Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil.

1. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya Penerimaan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat dan Dana Bagi Hasil dari pemerintah provinsi.
2. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran Dana Perimbangan oleh pemerintah pusat dan Dana Bagi Hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Klasifikasi dan kebijakan akuntansi transfer meliputi:

1. Beban Transfer
    a. Beban Bagi Hasil : Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
    b. Beban Bantuan Keuangan
        1) Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
        2) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
        3) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
2. Pendapatan Transfer-LO
    a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
        1) Dana Perimbangan
            a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO
            b) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
            c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
            d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik-LO
        2) Dana Intensif Daerah (DID)-LO
    b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

        Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO berupa Bantuan Keuangan
        1) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi

2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

3) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota

4) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil : Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi

2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota

3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa

4. Pendapatan Transfer-LRA

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA

1) Dana Perimbangan

a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LRA

b) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA

c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA

d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik-LRA

2) Dana Intensif Daerah (DID)-LRA

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA

1) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi

2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

3) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota

4) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengakuan

1. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diakui pada saat diterimanya transfer di Rekening Kas Umum Daerah.
2. Beban transfer dan belanja transfer diakui pada saat keluar dari Kas Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau dokumen lainnya.
3. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih kecil dari penetapan transfer maka kekurangannya diakui sebagai Hutang Transfer dan diperhitungkan sebagai penambah Beban Transfer.
4. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih besar dari penetapan transfer masuk berdasarkan Keputusan Gubernur maka diakui sebagai Piutang Kelebihan Transfer dan diperhitungkan sebagai pengurang Beban Transfer.

Pengukuran

1. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa hak tagih kepada pemberi transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Pendapatan Transfer-LO.
2. Beban Transfer atau Belanja Transfer diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa kewajiban kepada penerima transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Beban Transfer.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

1. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
2. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh UP yang wajib dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam Neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas dan Setara Kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan Setara Kas yang yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUD terdiri dari:

1. Saldo Rekening Kas Umum Daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
2. Setara Kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh BUD.

Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank

sentral pada tanggal Neraca. Apabila timbul selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai Piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1. Pungutan
    a. Piutang Pajak Daerah;
    b. Piutang Retribusi Daerah;
    c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
    d. Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
2. Perikatan
    a. Pemberian Pinjaman;
    b. Penjualan;
    c. Kemitraan; dan
    d. Pemberian fasilitas.
3. Transfer antar Pemerintahan
    a. Piutang Dana Bagi Hasil;
    b. Piutang Dana Alokasi Umum;
    c. Piutang Dana Alokasi Khusus;
    d. Piutang Transfer Lainnya;
    e. Piutang Bagi Hasil;
    f. Piutang Transfer Antar Daerah; dan
    g. Piutang Kelebihan Transfer.

4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

   a. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan

   b. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

1. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2. jumlah piutang dapat diukur;
3. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
4. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk Pengakuan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, diakui dengan kondisi sebagai berikut:

1. Piutang Dana Bagi Hasil

   Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai Piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

2. Piutang Dana Alokasi Umum

   Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaaan antara total alokasi DAU menurut peraturan presiden dengan realisasi Pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, apabila pemerintah pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

3. Piutang Dana Alokasi Khusus

   Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi pemerintah pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh pemerintah daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat.

4. Piutang Transfer Lainnya

   a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan

   b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat.

5. Piutang Bagi Hasil

   Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian pemerintah daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer.

6. Piutang Transfer Antar Daerah

   Transfer Antar Daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya Transfer Antar Daerah. Piutang Transfer Antar Daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut surat keputusan kepala daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

7. Piutang Kelebihan Transfer

   Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

   Pengakuan Piutang atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, adalah sebagai berikut:

   a. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi) TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan);

   b. SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut; dan

   c. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

<u>Pengukuran</u>

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

1. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

2. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau

3. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Tuntutan Ganti Rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

1. Pemberian pinjaman

   Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

   Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2. Penjualan

   Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3. Kemitraan

   Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4. Pemberian fasilitas/jasa

   Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah; dan
3. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengakuan berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian Piutang Tidak Tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis Piutang disajikan setelah dikurangi Piutang yang dihapuskan.

Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal Piutang dengan Penyisihan Piutang.

Penilaian kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur Piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas Piutang didasarkan pada kondisi Piutang pada tanggal pelaporan. Kualitas Piutang sebagai dasar yang digunakan untuk menghitung Penyisihan Piutang, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas lancar sebesar 0,5%;
2. Kualitas kurang lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari Piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas macet 100% (seratus persen) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo Piutang, maka dihitung nilai penyisihan Piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas Piutang.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang Pakai Habis

   Digunakan untuk mencatat Aset Lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.

2. Barang Tak Habis Pakai

   Digunakan untuk mencatat Barang Tak Habis Pakai dalam bentuk komponen pipa.

3. Barang Bekas Dipakai

   Digunakan untuk mencatat Barang Bekas Dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.

Penyajian barang persediaan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan Persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam Aset Lain-Lain didukung dengan Berita Acara Reklasifikasi, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan keputusan gubernur.

Persediaan diakui pada saat:

1. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
2. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

1. Metode Perpetual

   Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu memutakhirkan nilai Persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama PD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di rumah sakit dan bahan material untuk pemeliharaan Aset Tetap di Dinas PU. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian barang persediaan dihitung berdasarkan pencatatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan kewajiban melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada setiap akhir periode pelaporan.

2. Metode Periodik

   Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung memutakhirkan nilai Persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan PD, seperti: persediaan ATK. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai persediaan sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk Investasi Jangka Pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya antara lain:

1. Investasi Jangka Pendek

   Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

2. Investasi Jangka Panjang

   Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

   a. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali; dan

b. Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengukuran

Pengukuran investasi untuk masing-masing jenis adalah sebagai berikut.

1. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:
   a. Investasi dalam bentuk Surat Berharga:
      1) Apabila terdapat nilai perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya; dan
      2) Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
   b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.
2. Pengukuran investasi jangka panjang:
   a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
   b. Investasi nonpermanen:
      1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
      2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan
      3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
   c. Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai:
      1) Dana Bergulir dengan kelola sendiri:
         a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
            (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
            (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
            (3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
            (4) Penerima dana kooperatif.
         b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
            (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
            (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
            (3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
            (4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.

c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau

(2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau

(3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.

d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau

(2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau

(3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau

(4) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau

(5) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).

2) Dana bergulir dengan *executing agency*:

a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau

(2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

b) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau

(2) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau

(3) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau

(4) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (*force majeure*).

3) Dana bergulir dengan *channeling agency*:

a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau

(2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau

(2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.

c) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau

(2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.

d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau

(2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau

(3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau

(4) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

(5) Penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*).

d. Besaran Penyisihan dana Bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas lancar;

2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas kurang lancar;

3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada; dan

4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran Kas atau Aset Lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau

2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode ekuitas

   Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

   Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi.

   Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

   a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

   b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

   c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan

   d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah

   Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan Mesin

   Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

   Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

   Jalan, Jaringan, dan Irigasi mencakup jalan, jaringan, dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset Tetap Lainnya

   Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan Aset Tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka Aset Tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Aset Tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

Berwujud;

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
5. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
6. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap.

Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila Aset Tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Jika nilai perolehan Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai Aset Tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/Aset Lainnya.

1. Komponen Biaya

   a. Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;

   b. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya Aset Tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya; dan

   c. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.

2. Konstruksi Dalam Pengerjaan

   Jika penyelesaian pengerjaan suatu Aset Tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

3. Perolehan Secara Gabungan

   Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

4. Pertukaran Aset

   Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian Aset Tetap yang tidak serupa atau Aset Lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

   Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu Aset Tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

5. Aset Donasi

   Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

6. Kapitalisasi Aset Tetap

   a. Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi;

Tabel 4.1 Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
1	Tanah	
1.1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin	
2.1	Alat Besar	100.000.000
2.2	Alat Angkutan	1.000.000
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat Pertanian	500.000
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	500.000
2.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	500.000
2.8	Alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Persenjataan	500.000
2.10	Komputer	500.000
2.11	Alat Eksplorasi	500.000
2.12	Alat Pengeboran	500.000
2.1	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	500.000
2.2	Alat Bantu Eksplorasi	500.000
2.3	Alat Keselamatan Kerja	500.000
2.4	Alat Peraga	500.000
2.5	Peralatan Proses/Produksi	500.000
2.6	Rambu - Rambu	20.000.000
2.7	Peralatan Olah Raga	500.000
3	Gedung dan Bangunan	
3.1	Bangunan Gedung	20.000.000
3.2	Monumen	20.000.000
3.3	Bangunan Menara	20.000.000
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
4.1	Jalan dan Jembatan	1
4.2	Bangunan Air	1
4.3	Instalasi	1
4.4	Jaringan	1
5	Aset Tetap Lainnya	
5.1	Bahan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	500.000
5.3	Hewan	500.000
5.4	Biota Perairan	0
5.5	Tanaman	500.000
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	500.000

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
6.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan.	
6.1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung dan Bangunan	20.000.000
6.1.2	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1

b. Kapitalisasi aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah peraturan gubernur ini diundangkan, maupun terhadap Aset Tetap yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya; dan

c. Khusus Aset Tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan *output* berupa Gambar, DED, *Master Plan*, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

7. Pengeluaran setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kriteria seperti pada paragraf diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

8. Penambahan masa manfaat

Terhadap pemeliharaan Aset Tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan overhaul dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat Aset Tetap perolehan baru.

Dasar nilai perhitungan penyusutan Aset Tetap setelah *overhaul* dan renovasi adalah nilai buku pada saat Aset Tetap selesai overhaul dan renovasi ditambah nilai *overhaul* dan renovasi Aset Tetap, dibagi dengan masa manfaat Aset Tetap setelah *overhaul* dan renovasi, dimana masa manfaat Aset Tetap setelah *overhaul* dan renovasi sama dengan sisa masa manfaat Aset Tetap sebelum *overhaul* dan renovasi ditambah tambahan masa manfaat akibat *overhaul* dan renovasi. Dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:

a. Pengukuran berikutnya terhadap aset setelah pengakuan Awal

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali (*appraisal*), maka Aset Tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap, dan akun ekuitas.

b. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan

beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset Tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

1) Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap bulan dan pelaporannya dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan triwulanan, semesteran dan tahunan.

2) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil tanpa nilai sisa.

3) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.

4) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.

5) Aset Tetap Lainnya berupa buku, terbitan, barang perpustakaan, hewan, dan tanaman, tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

6) Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, *Master Plan*, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke Aset Lain-Lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan keputusan gubernur.

7) Jika terdapat pengadaan/pekerjaan Aset Tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke Aset Lain-Lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan keputusan gubernur.

9. Aset Bersejarah

Aset Bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam LO sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan Aset Bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

10. Penghentian dan Pelepasan

Suatu Aset Tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

11. Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap

Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar. Dalam hal Aset Tetap yang dihentikan atau dihapuskan tidak memenuhi definisi Aset Tetap, maka harus dilakukan reklasifikasi ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD dalam bentuk Berita Acara Reklasifikasi.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, serta Aset Tetap Lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam Aset Tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos Aset Tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai di kerjakan; dan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan (Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Jaringan, dan Irigasi; Aset Tetap Lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya dan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

1. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
2. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
3. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
4. Biaya penyewaan sarana dan peralatan; dan
5. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

1. Asuransi;
2. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
3. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
3. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi dan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi

kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

4.4.12 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

1. Definisi

   a. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan.

   b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

   c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.

   d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

   e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

      1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

      2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

   f. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

2. Penjelasan

   a. Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah daerah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi Properti Investasi. Selain itu, entitas pemerintah daerah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi

Properti Investasi.

b. Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.

c. Properti Investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, Properti Investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan Properti Investasi dari properti yang digunakan sendiri berupa Aset Tetap.

d. Berikut adalah contoh Properti Investasi:

   1) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;

   2) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;

   3) Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;

   4) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi; dan

   5) Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

e. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan Properti Investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:

   1) Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;

   2) Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;

   3) Properti yang digunakan sendiri (lihat Kebijakan Akuntansi Aset Tetap), termasuk (diantaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;

   4) Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;

5) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;

6) Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap; dan

7) Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

f. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan:

1) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai; dan

2) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai Properti Investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

g. Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.

h. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai Properti Investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.

i. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki Properti Investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti Investasi tersebut tidak memenuhi definisi Properti Investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai Properti Investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersial. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai Properti Investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam PSAP yang mengatur Aset Tetap.

j. Properti Investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian Properti Investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

Pengakuan:

Properti Investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

1. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset Properti Investasi; dan
2. Biaya perolehan atau nilai wajar Properti Investasi dapat diukur dengan andal.

Pengakuan:

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila Properti Investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti Investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.

Penyajian:

1. Properti Investasi diklasifikasikan dalam Aset Nonlancar.
2. Properti Investasi disajikan terpisah dari kelompok Aset Tetap dan Aset Lainnya.
3. Karena sifat dari pengklasifikasian Properti Investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas Properti Investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian Properti Investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset Properti Investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.
4. Pemberlakuan kebijakan akuntansi Properti Investasi disesuaikan dengan ketersediaan kode dan uraian rekening dalam Laporan Keuangan.

4.4.13 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan Dana Cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan Dana Cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang di dalamnya mencakup:

1. Penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;
2. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
4. Sumber Dana Cadangan; dan

5. Tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.

Dana Cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya.

Pengakuan:

Dana Cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS. Pembentukan Dana Cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Pengukuran:

1. Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Penerimaan hasil atas pengelolaan Dana Cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke Dana Cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
3. Pencairan Dana Cadangan apabila Dana Cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan Dana Cadangan. Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4.4.14 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, Aset Lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan Aset Lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok Aset Lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang

   Tagihan Jangka Panjang terdiri atas Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

   a. Tagihan Penjualan Angsuran

      Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi Aset Lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset Tak Berwujud terdiri atas:

a. Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b. Lisensi dan Franchise

Pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan dan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

c. Hak Cipta

Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.

d. Hak Paten

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

e. *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori Aset Tak Berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

f. Kajian

Kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

g. Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya

film dokumenter atau benda yang dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat.

h. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset yang khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah.

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan. Sesuatu diakui sebagai Aset Tidak Berwujud jika dan hanya jika:

1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan

2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

i. Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tak Berwujud yang ada.

4. Aset Lain-Lain

Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-Lain.

5. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

a. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

6. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

a. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

b. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

<u>Pengukuran</u>

1. Tagihan Jangka Panjang

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

   a. Sewa

      Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

   b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

      Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

   c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT)

      BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

   d. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO)

      BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3. Aset Tidak Berwujud

   Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:

   a. Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

   b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

      1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

      2) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan

      3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

   Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

   a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

   b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari.

   c. Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

   d. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam Aset Lain-Lain adalah Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dilakukan penyusutan. Apabila pemerintah hendak mengembalikan fungsinya kembali dan dapat digunakan oleh pemerintah, maka diperlukan koreksi ekuitas atas selisih akumulasi yang terhenti saat dihentikan penggunaannya menjadi akumulasi saat diperbaiki.

Masa manfaat Aset Lainnya

Penyusutan Aset Lainnya dilakukan dengan metode garis lurus mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan masa manfaat sebagai berikut:

a. Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan Pihak Ketiga selama jangka waktu kemitraan dengan pihak ketiga; dan

b. Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap rusak berat tidak memiliki masa manfaat sehingga penyusutannya dihentikan, sedangkan akumulasi penyusutannya berasal dari reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya.

5. Amortisasi

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas (*Goodwill*) dan Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa.

4.4.15 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos Kewajiban antara lain:

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek antara lain utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Utang Pinjaman Jangka Pendek, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah Kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, Kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika:

a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan

b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;

c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

   Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions)*

   Dalam transaksi tanpa pertukaran, Kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

   Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, Kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

   Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, Kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Penghapusan utang

Penghapusan utang merupakan pembatalan tagihan pihak ketiga selaku kreditur kepada pemerintah daerah selaku debitur, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk perjanjian para pihak atau bentuk lain.

Penghapusan Kewajiban Jangka Pendek yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO. Penghapusan Kewajiban Jangka Pendek yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang Kewajiban Jangka Pendek bersangkutan. Penghapusan Kewajiban Jangka Panjang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai surplus penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO. Penghapusan Kewajiban Jangka Panjang yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang Kewajiban Jangka Panjang bersangkutan.

Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila Kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran Kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos Kewajiban.

Pengukuran Kewajiban atau Utang Jangka Pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran Kewajiban untuk masing-masing jenis Kewajiban Jangka Pendek.

1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

   Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui Kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

2. Pengukuran Utang Transfer

   Utang Transfer adalah Kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pengukuran Utang Bunga

   Utang Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

   Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

5. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

   Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

6. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

   Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau Utang Jangka Panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

1. Utang yang tidak diperjualbelikan

   Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

2. Utang yang diperjualbelikan

   Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.4.16 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Akun ini terdiri dari:

1. Ekuitas Awal;
2. Surplus/defisit – LO pada periode bersangkutan;
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
   a. Koreksi kesalahan mendasar dari persen yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
   b. Perubahan nilai Aset Tetap karena revaluasi Aset Tetap.
4. Ekuitas akhir.

<u>Pengakuan</u>

Ekuitas bertambah pada saat adanya:

1. Surplus-LO pada periode pelaporan;
2. Koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan Kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
3. Koreksi pengurangan saldo awal Akumulasi Penyisihan Piutang, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya; dan
4. Adanya aset masuk antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.

Ekuitas berkurang pada saat adanya:

1. Defisit-LO pada periode pelaporan;
2. Koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan Kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
3. Koreksi penambahan saldo awal Akumulasi Penyisihan Piutang, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya; dan
4. Adanya aset keluar antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan;

Pengukuran

Ekuitas pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran aset dan kewajiban yang mengalami koreksi.

4.4.17 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan tidak berulang

   Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

   a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

      Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun Pendapatan-LRA, Belanja, Pendapatan-LO, maupun Beban.

   b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

      Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

2. Kesalahan berulang

   Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

   Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

   Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.18 Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam hal ini, yang termasuk Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali dan PD/Unit Kerja PD yang menerapkan PPK BLUD yang menurut ketentuan wajib menyusun laporan keuangan sesuai PSAP BLUD, disamping sebagai entitas akuntansi yang wajib Menyusun laporan keuangan sesuai SAP.

Konsolidasi merupakan proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Bali yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam 1 (satu) periode pelaporan. Secara lebih rinci, pos-pos dalam LRA Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun Anggaran (TA) 2025 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH

Berikut ini adalah Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1 Rincian Pendapatan Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.216.263.422.941,00	4.628.083.379.382,63	109,76	5.535.429.679.670,83
PENDAPATAN TRANSFER	2.438.603.330.369,00	2.414.142.690.695,00	98,99	2.283.418.060.237,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.757.272.000,00	6.089.799.194,01	105,77	5.750.844.000,00
Jumlah	**6.660.624.025.310,00**	**7.048.315.869.271,64**	**105,82**	**7.824.598.583.907,83**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Daerah TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp776.282.714.636,19) atau -9,92%. Komposisi realisasi Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2023 ditunjukkan pada Gambar 5.1.

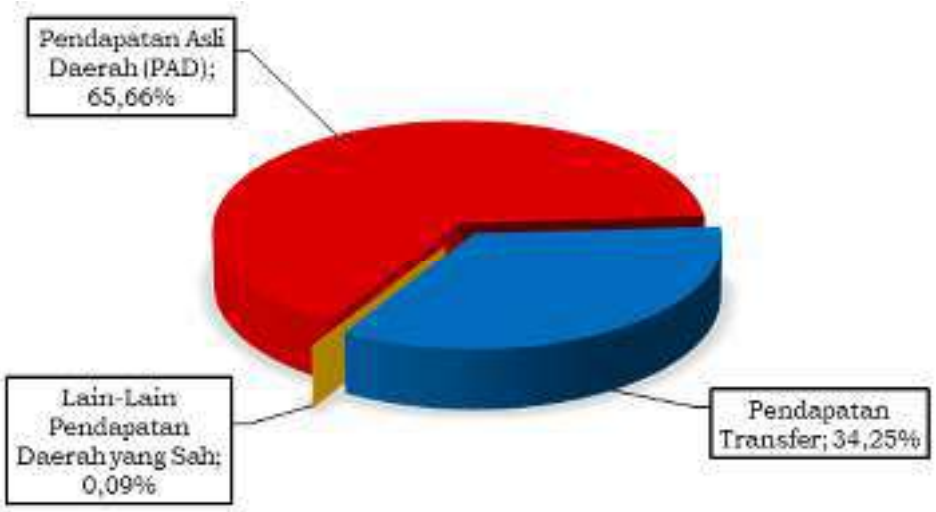

Gambar 5.1 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2025

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Berikut ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Daerah	2.767.839.352.516,00	2.865.836.401.524,00	103,54	4.520.332.643.486,00
Retribusi Daerah	439.467.617.614,00	909.595.917.119,52	206,97	338.039.879.379,28
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	253.603.839.112,00	253.603.839.116,43	100,00	197.369.947.623,03
Lain-lain PAD yang Sah	755.352.613.699,00	599.047.221.622,68	79,30	479.687.209.182,52
Jumlah	**4.216.263.422.941,00**	**4.628.083.379.382,63**	**109,76**	**5.535.429.679.670,83**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp907.346.300.288,20) atau -16,39%. Komposisi realisasi PAD TA 2025 dan capaian realisasi PAD terhadap anggaran pada TA 2025 ditunjukkan pada Gambar 5.2 dan 5.3.



Gambar 5.2 Komposisi Realisasi PAD pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2025

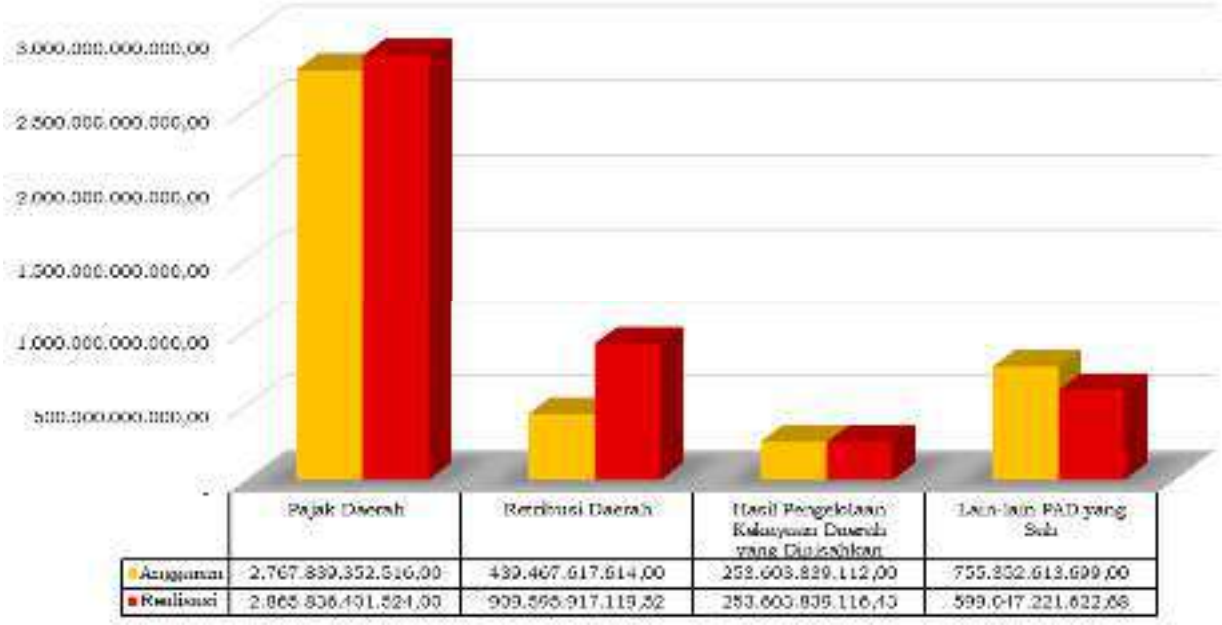

Gambar 5.3 Capaian Realisasi PAD pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2025

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Berikut ini adalah Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.1 Rincian Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.002.357.827.000,00	1.069.465.642.900,00	106,69	1.844.964.341.717,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	748.070.632.825,00	798.076.710.700,00	106,68	1.694.519.308.500,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	639.365.501.000,00	630.972.809.013,00	98,68	639.365.501.400,00
Pajak Air Permukaan	4.000.000.000,00	5.276.815.548,00	131,92	4.486.924.224,00
Pajak Rokok	354.875.391.691,00	343.585.515.178,00	96,81	336.996.567.645,00
Pajak Alat Berat	90.000.000,00	147.095.900,00	163,43	0,00
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	19.080.000.000,00	18.311.812.285,00	95,97	0,00
Jumlah	**2.767.839.352.516,00**	**2.865.836.401.524,00**	**103,54**	**4.520.332.643.486,00**

Tabel di atas menunjukkan Pajak Daerah TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp1.654.496.241.962,00) atau -36,60%.

5.1.1.1.1.1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berikut ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.1.1 Rincian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PKB-Mobil Penumpang-Sedan	13.861.802.693,00	14.665.225.100,00	105,79	27.214.938.300,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep	69.661.761.329,00	79.599.249.800,00	114,26	135.243.958.900,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus	480.632.154.563,00	531.666.094.500,00	110,61	901.273.780.700,00
PKB-Mobil Bus-Microbus	11.438.541.173,00	11.573.630.500,00	101,18	20.014.575.800,00
PKB-Mobil Bus-Bus	1.277.609.935,00	1.202.467.700,00	94,11	2.318.928.800,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	66.366.560.623,00	70.663.084.900,00	106,47	123.338.497.600,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	35.337.817.811,00	36.591.241.200,00	103,54	66.665.556.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	19.785.591.048,00	19.941.276.100,00	100,78	34.825.750.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	821.521.376,00	2.089.655.400,00	254,36	3.274.264.800,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	303.151.483.965,00	301.455.634.200,00	99,44	530.759.509.017,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	22.982.484,00	18.083.500,00	78,68	34.581.800,00
Jumlah	**1.002.357.827.000,00**	**1.069.465.642.900,00**	**106,69**	**1.844.964.341.717,00**

Tabel di atas menunjukkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp775.498.698.817,00) atau -42,03%, berikut penjelasannya:

1. Capaian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:
   a. PKB-Mobil Penumpang-Sedan memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 105,79% pada TA 2025;
   b. PKB-Mobil Penumpang-Jeep memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 114,26% pada TA 2025;

c. PKB-Mobil Penumpang-Minibus memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 110,61% pada TA 2025;
d. PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 106,47% pada TA 2025;
e. PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 254,36% pada TA 2025; dan
f. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 78,68% pada TA 2025.

2. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 106,69% pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Terdapat kebijakan keringanan dan/atau pengurangan terhadap pokok PKB yang mulai diberlakukan pada tanggal 5 Januari 2025 berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan terhadap Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan pada Pasal 2 sebagai berikut.
         a) Kendaraan bermotor sampai dengan 200 cc sebesar 14,35%;
         b) Kendaraan bermotor di atas 200 cc sebesar 12,15%; dan
         c) Kendaraan bermotor tertentu seperti ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah dan pemerintah daerah sebesar 39,76%.

         Kebijakan tersebut bertujuan untuk meringankan atau mengurangi beban masyarakat dan mendorong kepatuhan pembayaran PKB, sehingga turut andil dalam mendorong wajib pajak yang sebelumnya menunda pembayaran untuk melakukan pelunasan pada tahun berjalan serta meningkatkan ketepatan waktu pembayaran.
      2) Terdapat program pembebasan sanksi PKB yang mulai berlaku pada tanggal 22 September 2025 sampai dengan 22 November 2025 berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pembebasan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 18 September 2025. Kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai stimulus untuk mendorong wajib pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran untuk segera melakukan pelunasan kewajiban, dikarenakan sanksi administratif berupa bunga dan denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran diberikan pembebasan selama periode program. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan intensitas pembayaran dan berkontribusi terhadap penerimaan PKB pada akhir tahun (Triwulan IV).

      Walau demikian, realisasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Diberlakukannya pemungutan Opsen PKB oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025 turut mengubah struktur pemungutan PKB. Opsen PKB dipungut secara bersamaan sebagai pungutan tambahan atas pokok PKB, sehingga sebagian pungutan terkait PKB dicatat sebagai opsen yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Kondisi tersebut dapat menyebabkan nilai realisasi PKB yang tercatat pada periode saat ini menjadi lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya; dan
      2) Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2025 memberlakukan tarif PKB melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu 1,055% untuk kendaraan sampai dengan 200 cc dan 1,2% untuk kendaraan di atas 200 cc. Tarif tersebut lebih rendah dibandingkan ketentuan pada peraturan sebelumnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang menetapkan tarif 1,5% untuk kendaraan roda dua/tiga di bawah 250 cc kepemilikan pertama dan 1,75% untuk kendaraan roda dua/tiga 250 cc ke atas kepemilikan pertama maupun kendaraan roda empat atau lebih kepemilikan pertama. Perubahan penetapan tarif tersebut berpotensi memengaruhi besaran penerimaan PKB.
   b. Terdapat sejumlah inovasi dalam pelaksanaan pemungutan PKB, di antaranya:
      1) Layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) *Drive-Thru* Gelis yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam membayar PKB secara cepat, mudah, dan efisien. Hal ini didukung dengan fleksibilitas waktu operasional di luar jam kerja seperti *shift* malam yang berlaku mulai Januari 2024, sehingga dapat memberikan pelayanan yang

lebih optimal. Dengan adanya perluasan layanan, semakin banyak Wajib Pajak yang terdorong untuk memenuhi kewajibannya, yang pada gilirannya meningkatkan realisasi penerimaan PKB; dan

2) Inovasi layanan berupa Samsat Keliling dan Samsat Kerumah Tinggal (Kerti) yang memungkinkan Wajib Pajak membayar PKB di lokasi-lokasi yang lebih dekat dan fleksibel melalui mobil layanan keliling yang menjangkau berbagai wilayah. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

c. PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 254,36% pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan penerimaan tersebut umumnya dipengaruhi oleh karakteristik objek pajak Blind Van di Bali yang banyak dimanfaatkan untuk kegiatan logistik, katering, angkutan barang, dan operasional pariwisata. Hal ini ditunjukkan dari kontribusi terbesar yang berasal dari PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi sebesar Rp2.074.012.600,00 atau sekitar 99,25% dari total realisasi. Selain itu, penerimaan sebagian besar terkonsentrasi pada UPTD PPRD Provinsi Bali di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, yang merupakan pusat aktivitas ekonomi dan pariwisata. Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi penerimaan PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van dapat melampaui target anggaran pada TA 2025. Walau demikian, realisasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tingginya realisasi pada tahun sebelumnya yang secara umum didorong oleh program relaksasi dan penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali.

3. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didasarkan atas:
   a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
   c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat.
4. Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dilihat pada ***Lampiran 1***.

5.1.1.1.1.2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Berikut ini adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.2.1 Rincian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	2.900.663.900,00	3.745.351.600,00	129,12	6.947.410.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	30.288.333.351,00	33.980.088.000,00	112,18	70.725.181.500,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	301.870.504.870,00	264.228.211.400,00	87,53	685.876.893.300,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	15.995.108.727,00	14.003.791.600,00	87,55	36.146.981.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Bus	778.837.782,00	1.311.674.600,00	168,41	1.657.870.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	38.284.251.878,00	51.861.632.000,00	135,46	86.484.578.100,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	11.038.598.929,00	11.523.692.300,00	104,39	25.223.364.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	12.563.255.314,00	16.160.541.200,00	128,63	28.440.048.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	0,00	1.938.885.100,00	0,00	3.453.580.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	334.322.009.756,00	399.315.902.500,00	119,44	749.498.266.600,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	29.068.318,00	6.940.400,00	23,87	65.136.000,00
Jumlah	**748.070.632.825,00**	**798.076.710.700,00**	**106,68**	**1.694.519.308.500,00**

Tabel di atas menunjukkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp896.442.597.800,00) atau -52,90%, berikut penjelasannya:

1. Capaian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:
   a. BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 129,12% pada TA 2025;
   b. BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 112,18% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp36.745.093.500,00) pada TA 2025;
   c. BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus dengan penurunan signifikan sebesar (Rp421.648.681.900,00) pada TA 2025;
   d. BBNKB-Mobil Bus-Microbus dengan penurunan signifikan sebesar (Rp22.143.189.400,00) pada TA 2025;
   e. BBNKB-Mobil Bus-Bus memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 168,41% pada TA 2025;
   f. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 135,46% pada TA 2025;
   g. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck dengan penurunan signifikan sebesar (Rp13.699.671.700,00) pada TA 2025;
   h. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 128,63% pada TA 2025;
   i. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van memiliki persentase capaian sebesar 0,00% pada TA 2025;
   j. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 119,44% pada TA 2025; dan
   k. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 23,87% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp58.195.600,00) pada TA 2025.
2. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 106,68% pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Terdapat kebijakan keringanan dan/atau pengurangan terhadap pokok BBNKB yang mulai diberlakukan pada tanggal 5 Januari 2025 berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan terhadap Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan pada Pasal 2 ayat (3) yaitu keringanan dan/atau pengurangan terhadap pokok BBNKB sebesar 24 persen. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meringankan atau mengurangi beban masyarakat dan mendorong tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Pengurangan pokok BBNKB tersebut berpotensi mendorong masyarakat untuk melakukan proses balik nama atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor pada periode berlakunya kebijakan, sehingga turut berkontribusi terhadap peningkatan penyelesaian kewajiban BBNKB; dan
      2) Terdapat perbaikan tata kelola pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Badan Pendapatan Daerah yang ditetapkan di Bali pada tanggal 24 Februari 2025. Standar tersebut mencakup penetapan standar pelayanan pada layanan Pendaftaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) I dan Pendaftaran Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BNKB II). Hal tersebut berpotensi mendukung kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan balik nama kendaraan bermotor, sehingga dapat mendorong kelancaran proses administrasi BBNKB.

      Walau demikian, realisasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Diberlakukannya pemungutan Opsen BBNKB oleh Kabupaten/Kota sebagai implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025 turut mengubah struktur pemungutan BBNKB; dan
      2) Opsen BBNKB dipungut secara bersamaan sebagai pungutan tambahan atas BBNKB. Kondisi tersebut dapat menyebabkan nilai realisasi BBNKB yang tercatat menjadi berbeda apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya.

3. Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) didasarkan atas:
   a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
   c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat.
4. Rincian Anggaran dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat dilihat pada ***Lampiran 1***.

5.1.1.1.1.3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Berikut ini adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.3.1 Rincian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PBBKB-Bahan Bakar Solar	118.887.922.398,00	121.653.714.200,00	102,32	140.444.400.359,00
PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	520.477.578.602,00	509.319.094.813,00	97,85	498.921.101.041,00
Jumlah	**639.365.501.000,00**	**630.972.809.013,00**	**98,68**	**639.365.501.400,00**

Tabel di atas menunjukkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp8.392.692.387,00) atau -1,31%, berikut penjelasannya:

1. Capaian realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:
   a. PBBKB-Bahan Bakar Solar memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 102,32% pada TA 2025; dan
   b. PBBKB-Bahan Bakar Lainnya memiliki persentase capaian yang lebih rendah dari anggaran sebesar 97,85% pada TA 2025
2. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) memiliki persentase capaian yang mendekati anggaran sebesar 98,68% pada TA 2025. Walau demikian, realisasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Penerimaan PBBKB relatif bergantung terhadap perkembangan penjualan atau penyerahan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada konsumen atau pengguna. PBBKB dipungut pada saat terjadi penyerahan BBM oleh penyedia kepada konsumen, sehingga perubahan pada volume penyaluran atau penjualan BBM dapat memengaruhi besaran penerimaan PBBKB;
      2) Struktur bagi hasil PBBKB berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengatur hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan 70% kepada Kabupaten/Kota dan sisanya menjadi bagian Provinsi, turut memengaruhi besaran penerimaan PBBKB yang masuk ke kas daerah Pemerintah Provinsi Bali;
      3) Terdapat penguatan agenda transportasi melalui pengembangan penggunaan energi alternatif seperti Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) di Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, yang turut memengaruhi preferensi konsumsi energi sektor transportasi. Perkembangan tersebut dapat berdampak pada konsumsi BBM kendaraan bermotor, sehingga dapat berimplikasi pada penerimaan PBBKB; dan
      4) Terdapat kebijakan insentif berupa pengurangan pokok PBBKB berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 7 Maret 2025 sebesar 60% yang berlaku sejak tanggal 17 Maret 2025. Hal tersebut berpotensi memengaruhi penerimaan PBBKB pada TA 2025.

3. Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) didasarkan atas:
   a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
   b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dapat dilihat pada ***Lampiran 1***.

5.1.1.1.1.4 Pajak Air Permukaan

Berikut ini adalah Pajak Air Permukaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.4.1 Rincian Pajak Air Permukaan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Air Permukaan	4.000.000.000,00	5.276.815.548,00	131,92	4.486.924.224,00
Jumlah	**4.000.000.000,00**	**5.276.815.548,00**	**131,92**	**4.486.924.224,00**

Tabel di atas menunjukkan Pajak Air Permukaan TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp789.891.324,00 atau 17,60%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pajak Air Permukaan TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pajak Air Permukaan memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 131,92% pada TA 2025 dan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Terdapat strategi pengawasan yang diterapkan Unit Pelaksana Teknis Kegiatan (UPTD) Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Air Permukaan. Upaya tersebut berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga turut mendorong peningkatan penerimaan Pajak Air Permukaan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.
         a) Intensifikasi dilakukan dengan memperkuat pengendalian atas wajib pajak yang telah terdaftar, antara lain melalui pemantauan kepatuhan pelaporan dan pembayaran, penertiban administrasi pemungutan, serta pemutakhiran data pemanfaatan air permukaan untuk meminimalkan potensi kebocoran penerimaan; dan
         b) Ekstensifikasi dilakukan melalui penelusuran dan pendataan terhadap pelaku usaha atau pengguna air permukaan yang belum teridentifikasi sebagai wajib pajak, termasuk pembaruan basis data objek dan subjek pajak.
      2) Terdapat upaya optimalisasi pada sektor-sektor yang berpotensi menjadi pengguna air permukaan, khususnya wisata air, perhotelan, dan restoran yang membutuhkan ketersediaan air untuk mendukung operasional layanan. Hal tersebut berpotensi meningkatkan intensitas pemanfaatan air permukaan dan memperluas basis objek pemungutan, sehingga turut mendukung peningkatan penerimaan Pajak Air Permukaan.
2. Pengenaan Pajak Air Permukaan didasarkan atas:
   a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
   b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Air Permukaan dapat dilihat pada ***Lampiran 1***.

5.1.1.1.1.5 Pajak Rokok

Berikut ini adalah Pajak Rokok yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.5.1 Rincian Pajak Rokok

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Rokok	354.875.391.691,00	343.585.515.178,00	96,81	336.996.567.645,00
Jumlah	**354.875.391.691,00**	**343.585.515.178,00**	**96,81**	**336.996.567.645,00**

Tabel di atas menunjukkan Pajak Rokok TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp6.588.947.533,00 atau 1,95%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pajak Rokok TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pajak Rokok memiliki persentase capaian yang mendekati anggaran sebesar 96,81% pada TA 2025 dan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Penerimaan Pajak Rokok mengikuti realisasi Cukai Rokok yang dipungut oleh Pemerintah Pusat. Apabila penerimaan Cukai Rokok mengalami penurunan atau lebih rendah, maka penerimaan Pajak Rokok yang dibagihasilkan kepada daerah dapat ikut menurun;
      2) Kebijakan tarif cukai hasil tembakau pada tahun 2025 relatif tidak mengalami kenaikan, sebagaimana pengaturan tarif cukai yang berlaku ditetapkan melalui:
         a) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK/0.10/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengelolaan Tembakau Lainnya; dan
         b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

      Sementara itu, tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga besaran Pajak Rokok yang diterima daerah mengikuti perkembangan realisasi cukai rokok.
      3) Pajak Rokok yang tercatat sebagai bagian Provinsi bersifat terbatas karena mekanisme bagi hasil, yaitu 70 persen dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota dan sisanya menjadi bagian Provinsi. Dengan komposisi ini, setiap penurunan penerimaan Pajak Rokok akan tercermin pada besaran yang masuk ke kas daerah Provinsi;

   Walau demikian, realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat upaya dalam melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Rokok berupa dukungan dan koordinasi yang erat antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali bersama Bea Cukai dalam melakukan pengawasan peredaran rokok tanpa Pita Cukai (ilegal).
2. Pengenaan Pajak Rokok didasarkan atas:
   a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
   b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Rokok dapat dilihat pada ***Lampiran 1***.

5.1.1.1.1.6 Pajak Alat Berat

Berikut ini adalah Pajak Alat Berat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.6.1 Rincian Pajak Alat Berat

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Alat Berat	90.000.000,00	147.095.900,00	163,43	0,00
Jumlah	**90.000.000,00**	**147.095.900,00**	**163,43**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan Pajak Alat Berat TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp147.095.900,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pajak Alat Berat TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pajak Alat Berat memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 163,43% dengan realisasi sebesar Rp147.095.900,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Pajak Alat Berat mulai diimplementasikan pada tahun 2025 sebagai salah satu jenis pajak Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan objek pajak berupa kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat, dasar pengenaan berupa nilai jual alat berat, serta tarif Pajak Alat Berat ditetapkan sebesar 0,2 persen. Sebagai jenis pajak yang baru diterapkan, penerimaan pada tahap awal pelaksanaan dapat meningkat seiring dimulainya proses pendataan dan penetapan, karena jumlah alat berat yang teridentifikasi sebagai objek pajak serta nilai jual yang menjadi dasar pengenaan dapat bertambah sejalan dengan pemutakhiran data; dan
      2) Terdapat penguatan upaya pemungutan melalui UPTD PPRD Provinsi, antara lain pendataan dan sosialisasi secara jemput bola, termasuk pelayanan keliling dan penelusuran langsung kepada pihak yang memiliki atau menguasai alat berat. Penerapan tersebut tercermin, salah satunya pada UPTD PPRD Provinsi di Kabupaten Jembrana yang melakukan pendekatan jemput bola kepada pemilik alat berat, menjelaskan mekanisme penetapan berbasis data atau faktur, dan mendorong pemenuhan kewajiban Pajak Alat Berat.
2. Pengenaan Pajak Alat Berat didasarkan atas:
   a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
   c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat.
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Alat Berat dapat dilihat pada ***Lampiran 1***.

5.1.1.1.1.7 Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Berikut ini adalah Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.7.1 Rincian Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	19.080.000.000,00	18.311.812.285,00	95,97	0,00
Jumlah	**19.080.000.000,00**	**18.311.812.285,00**	**95,97**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp18.311.812.285,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) memiliki persentase capaian yang mendekati anggaran sebesar 95,97% pada TA 2025 dan merupakan realisasi baru, di mana tidak terdapat realisasi pada TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) merupakan penerimaan yang baru mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga pada tahap awal implementasi masih terdapat penyesuaian pendataan, penetapan, dan mekanisme pemungutan di lapangan; dan

2) Besaran Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ditetapkan 25 persen dari Pajak MBLB dan dipungut bersamaan dengan pemungutan Pajak MBLB, sehingga capaian opsen MBLB relatif bergantung pada penerimaan Pajak MBLB pada Kabupaten/Kota.

2. Pengenaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) didasarkan atas:
   a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
   b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dapat dilihat pada ***Lampiran 1***.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Berikut ini adalah Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.2.1 Rincian Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Umum	340.889.890.000,00	312.473.157.763,18	91,66	296.109.115.165,28
Retribusi Jasa Usaha	93.177.727.614,00	588.375.816.326,34	631,45	34.988.817.314,00
Retribusi Perizinan Tertentu	5.400.000.000,00	8.746.943.030,00	161,98	6.941.946.900,00
Jumlah	**439.467.617.614,00**	**909.595.917.119,52**	**206,97**	**338.039.879.379,28**

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Daerah TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp571.556.037.740,24 atau 169,08%.

5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Berikut ini adalah Retribusi Jasa Umum yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.2.1.1 Rincian Retribusi Jasa Umum

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Pelayanan Kesehatan	324.149.890.000,00	294.497.267.763,18	90,85	280.616.753.706,00
Retribusi Pelayanan Kebersihan	16.740.000.000,00	17.975.890.000,00	107,38	15.492.361.459,28
Jumlah	**340.889.890.000,00**	**312.473.157.763,18**	**91,66**	**296.109.115.165,28**

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Umum TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp16.364.042.597,90 atau 5,53%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Retribusi Pelayanan Kesehatan memiliki persentase capaian 90,85% yang mendekati anggaran pada TA 2025 dan realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat perubahan nomenklatur pendapatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah memiliki persentase capaian sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp274.943.124.919,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:

a) Pada TA 2025 penerimaan ini dianggarkan dan direalisasikan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.2.1.1.1 Rincian Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yang Dianggarkan di Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis

Perangkat Daerah	Tahun 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
RSUD Bali Mandara	198.200.000.000,00	175.710.054.787,81	88,65
Rumah Sakit Mata Bali Mandara	93.863.440.000,00	90.559.637.694,00	96,48
Rumah Sakit Jiwa	24.767.450.000,00	21.716.668.832,00	87,68
UPTD Balai Laboratorium Kesehatan *Kerthi* Bali *Sadhajiwa*	7.019.000.000,00	6.218.326.449,37	88,59
UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional	300.000.000,00	292.580.000,00	97,53
Jumlah	**324.149.890.000,00**	**294.497.267.763,18**	**90,85**

b) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Dharma Yadnya tidak dianggarkan pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan belum terdapat Peraturan Daerah/Kepala Daerah yang mengatur mengenai Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD Rumah Sakit Dharma Yadnya, sehingga seluruh penerimaan Layanan Kesehatan di Rumah Sakit Dharma Yadnya tercatat sebagai Pendapatan BLUD. Jumlah anggaran dan realisasi tersebut diungkapkan lebih detail pada **Rincian Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya *Tabel 5.1.1.1.4.10.1.1.1.***

2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis memiliki persentase capaian yang mendekati anggaran sebesar 90,85% dan realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan realisasi 2024. Penerimaan ini antara lain ditopang oleh pembayaran atas jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan pada unit pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bali, yang dalam ketentuan retribusi daerah dikategorikan sebagai objek Retribusi Jasa Umum berupa Pelayanan Kesehatan. Rincian realisasi berdasarkan unit pelayanan adalah sebagai berikut:
   a) RSUD Bali Mandara sebesar Rp175.710.054.787,81;
   b) Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama sebesar Rp21.716.668.832,00;
   c) Rumah Sakit Mata Bali Mandara sebesar Rp90.559.637.694,00;
   d) UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa sebesar Rp6.218.326.449,37; dan
   e) UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional sebesar Rp292.580.000,00.

b. Retribusi Pelayanan Kebersihan memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 107,38% pada TA 2025 dan realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024. Penerimaan ini berasal dari realisasi Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali selama 12 (dua belas) bulan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
   1) Terdapat peningkatan jumlah pelanggan seiring bertambahnya pengguna layanan kebersihan, baik dari sektor rumah tangga maupun usaha, sehingga basis pemungutan retribusi cenderung semakin luas dan penerimaan turut meningkat;
   2) Terdapat pelunasan tunggakan oleh pelanggan lama dalam mendorong kenaikan pendapatan, dikarenakan sebagian pelanggan yang sebelumnya menunggak kemudian menyelesaikan kewajibannya sesuai tagihan;
   3) Meningkatnya upaya tim kerja dalam melakukan penyebaran tagihan retribusi (*invoice*) dan sosialisasi yang berperan dalam memperbaiki kepatuhan pembayaran, melalui penyampaian tagihan yang lebih tertib serta penguatan pemahaman pelanggan mengenai kewajiban retribusi dan batas waktu pembayaran; dan
   4) Bertambahnya volume jasa yang dimanfaatkan pelanggan, baik dari sisi frekuensi maupun kapasitas layanan, yang pada akhirnya turut mendorong kenaikan retribusi yang dapat dipungut.

2. Pengenaan Retribusi Jasa Umum didasarkan atas:
   a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan

b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 2***.

5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Berikut ini adalah Retribusi Jasa Usaha yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.2.2.1 Rincian Retribusi Jasa Usaha

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	62.500.000,00	66.100.000,00	105,76	64.250.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	94.000.000,00	94.007.578,00	100,00	0,00
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	43.272.000,00	65.651.500,00	151,71	28.049.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	4.358.620.000,00	4.873.970.011,00	111,82	6.432.789.000,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	897.000.000,00	1.315.022.000,00	146,60	1.226.096.928,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	87.722.335.614,00	581.961.065.237,34	663,41	27.237.632.386,00
Jumlah	**93.177.727.614,00**	**588.375.816.326,34**	**631,45**	**34.988.817.314,00**

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Usaha TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp553.386.999.012,34 atau 1.581,61%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 105,76% pada TA 2025 dan realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali penerimaan sebesar Rp3.600.000,00 berasal dari tempat penginapan pada UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (BPTPHBUN) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, yang berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas akomodasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis di bidang perlindungan tanaman, seperti pembinaan, pelatihan atau pendampingan, koordinasi lapangan, dan/atau kunjungan kerja; dan
      2) Pada Badan Penghubung Provinsi Bali penerimaan sebesar Rp62.500.000,00 berasal dari tamu yang menginap di Wisma Badan Penghubung Provinsi Bali yang berlokasi di Jl. Cikini II No. 3, Jakarta, sebagai fasilitas akomodasi bagi pegawai atau tamu yang memiliki kepentingan dinas dengan kementerian/lembaga atau instansi terkait. Penerimaan ini mencerminkan adanya pemanfaatan fasilitas sebagai sarana akomodasi kedinasan yang lebih aktif, serta tertibnya administrasi pelayanan dan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.
   b. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah memiliki persentase capaian sebesar 100,00% pada TA 2025 dan merupakan realisasi baru, di mana tidak terdapat realisasi pada TA 2024. Penerimaan ini berasal dari realisasi Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan pada UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan (PPOTPPK) Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang melakukan produksi dan penjualan produk bahan baku obat tradisional berupa tanaman kering (simplisia) sebagai hasil pengolahan dari budidaya tanaman, di mana bibit atau benih yang dibudidayakan selanjutnya dipanen dan dikeringkan, sehingga menghasilkan produk bernilai ekonomis yang dapat dipungut retribusinya sesuai ketentuan yang berlaku;
   c. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 151,71% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp37.602.500,00 pada TA 2025. Hal ini dapat dipengaruhi oleh dibukanya lokasi pelayanan kepelabuhan baru, yaitu PP Tanjung Benoa, yang aktif pada tanggal 5 Maret 2025. Beroperasinya lokasi pelayanan baru tersebut

turut andil dalam memperluas cakupan layanan kepelabuhanan yang dapat diberikan, sehingga berdampak pada bertambahnya aktivitas pelayanan dan pada akhirnya mendorong peningkatan penerimaan retribusi;

d. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 111,82% pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat perubahan ketentuan yang berimplikasi pada kenaikan tarif retribusi serta pemanfaatan atau pengelolaan kekayaan daerah, termasuk kenaikan tarif sewa fasilitas milik daerah. Walau demikian, realisasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan realisasi TA 2024, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp3.096.755.011,00 antara lain didukung oleh penyesuaian (kenaikan) tarif retribusi yang berlaku untuk berbagai kategori pengunjung dan jenis kegiatan pada UPTD di sektor kebudayaan dan pariwisata, yaitu UPTD Taman Budaya, UPTD Museum Bali, dan UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali (MPRB), yang mencakup:
      a) Kenaikan tarif karcis masuk yang dibedakan menurut pengunjung mancanegara dan nusantara, termasuk kategori mahasiswa dan pelajar; dan
      b) Penyesuaian tarif kegiatan, seperti foto adat dan *prewedding* dan kegiatan *shooting* video/film/sinetron/video klip yang pengenaannya disesuaikan berdasarkan peruntukan komersial atau pendidikan; dan
   2) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp1.777.215.000,00, dapat dijelaskan sebagai berikut:
      a) Penjualan Tiket Kawasan Konservasi Nusa Penida pada UPTD Kawasan Konservasi Perairan belum mencapai target. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor eksternal, khususnya cuaca ekstrem pada pertengahan hingga menjelang akhir tahun 2025 yang berdampak pada penurunan aktivitas kunjungan dan wisata bahari, baik wisatawan domestik maupun mancanegara; dan
      b) Berkembangnya alternatif destinasi wisata dan aktivitas rekreasi pada berbagai daerah di luar Provinsi Bali turut memengaruhi kunjungan wisatawan, seperti Banyuwangi, Lombok, dan Nusa Tenggara, sehingga minat terhadap aktivitas *snorkeling* dan kegiatan wisata lainnya di Nusa Penida mengalami penyesuaian. Hal ini berdampak terhadap penurunan penjualan tiket kawasan konservasi, sehingga realisasi tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan.

e. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 146,60% pada TA 2025 dan realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali penerimaan sebesar Rp1.166.798.000,00, dapat dijelaskan sebagai berikut:
      a) Pada UPTD. Balai Inseminasi Buatan Daerah, Perbibitan Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak (BIBDPTHPT) terdapat peningkatan yang berasal dari:
         (1) Permintaan semen beku sapi dan semen cair babi pada periode musim kawin, di mana kebutuhan peternak terhadap layanan dan produk inseminasi buatan cenderung meningkat untuk mendukung proses perkawinan ternak; dan
         (2) Penjualan atau pelayanan terkait hewan ternak antara lain babi ras umur 45 hari, babi lokal umur 45 hari, kambing betina umur 1 tahun, bebek putih jambul umur 12 minggu, ayam umur 6 minggu, serta penjualan ternak sapi afkir.

         Meningkatnya permintaan tersebut berdampak pada bertambahnya volume penjualan atau layanan yang dapat dipenuhi, sehingga penerimaan yang diperoleh relatif menjadi lebih tinggi; dan
      b) Pada UPTD. Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BBITPHBUN), terdapat peningkatan yang berasal dari:
         (1) Penjualan benih Kopi Arabika dalam bentuk butiran (kopi beras) yang telah tersertifikasi, termasuk realisasi penjualan Kopi Beras Arabika (olah kering/DP), Kopi HS (olah basah), benih Kopi Arabika untuk proyek/kegiatan (termasuk luar Bali), serta Kopi Beras Robusta (olah kering/DP); dan
         (2) Pembayaran atau penjualan komoditas lain yang tercatat antara lain anggrek (Anggrek Phalaenopsis, Anggrek Chatelia, dan Anggrek Dendrobium), durian, Benih Kelapa Genjah Salak, dan Kentang G3.
   2) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali penerimaan sebesar Rp148.224.000,00 bersumber dari peningkatan penjualan bibit atau benih ikan, yang didukung oleh adanya kesesuaian penganggaran dengan kebutuhan sarana produksi budidaya, sehingga proses

produksi bibit atau benih dapat dilaksanakan lebih efektif. Selain itu, terdapat peningkatan kompetensi tenaga teknis yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan budidaya, yang pada akhirnya membantu menjaga konsistensi proses produksi. Di sisi lain, kondisi kualitas lingkungan budidaya yang mendukung turut berkontribusi terhadap kelancaran proses budidaya, sehingga ketersediaan bibit atau benih ikan yang dapat diproduksi dan dipasarkan menjadi relatif lebih baik.

f. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 663,41% dan realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 dengan kenaikan signifikan sebesar Rp554.723.432.851,34, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp3.207.849.551,00 berasal dari pembayaran sewa kantin, sewa rumah dinas, dan sewa gedung berupa Gelanggang Olahraga (GOR) Ngurah Rai dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);

   2) Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp12.960.000,00 berasal dari pembayaran sewa kantin dan Koperasi Pegawai Negeri (KPN). Selain itu, terdapat penerimaan yang bersumber dari BLUD dan UPTD dengan rincian sebagai berikut:
      a) RSUD Bali Mandara sebesar Rp327.088.000,00;
      b) Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama sebesar Rp30.900.000,00;
      c) Rumah Sakit Mata Bali Mandara sebesar Rp93.329.008,00; dan
      d) UPTD PPOTPPK sebesar Rp114.276.612,00.
   3) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp2.464.735.000,00 berasal dari pembayaran sewa kantin, sewa laboratorium, sewa alat berat, sewa gedung atau bangunan, dan sewa tanah;
   4) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp9.360.000,00 berasal dari pembayaran sewa rumah dinas dan sewa kantin;
   5) Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp469.238.500,00, dengan rincian sebagai berikut:
      a) Pembayaran sewa kantin sebesar Rp21.720.000,00; dan
      b) Pemakaian laboratorium sebesar Rp447.518.500,00 pada UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja yang belum mencapai target dikarenakan laboratorium sedang dalam proses persiapan reakreditasi ISO 17025:2017 dan Registrasi Laboratorium Lingkungan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10.2020 tentang Laboratorium Lingkungan, yang mensyaratkan peralatan dan bahan uji tersertifikasi serta tertelusur ke Sistem Satuan Internasional (SI);
   6) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp5.664.000,00 berasal dari pemanfaatan QRIS Bus Sarbagita;
   7) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp5.040.000,00 berasal dari sewa kantin;
   8) Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp557.900.000,00 berasal dari sewa gedung atau bangunan dan sewa kantin;
   9) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp854.681.294,00 berasal dari pembayaran sewa tanah dan sewa laboratorium pada UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan yang ditunjuk sebagai salah satu Laboratorium *Official Control* dalam pelaksanaan *surveillance sample* logam berat, histamin dan *E. coli* oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan;
   10) Pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp5.275.200,00 berasal dari pembayaran sewa kantin
   11) Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp205.469.513,00 berasal dari pembayaran sewa kantin, sewa rumah dinas, kegiatan pemeriksaan lapangan pada UPTD BPSBTPHBUN, sewa lahan pertanian pada UPTD BPTPHBUN, sewa laboratorium pada UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan (BSMKP) dan pembayaran jasa produksi biakan padat *Trichoderma sp.* dan jasa produksi stater agensia hayati;

12) Pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp39.220.000,00 berasal dari pembayaran sewa kantin dan sewa pengujian laboratorium pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;
13) Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali penerimaan sebesar Rp30.240.000,00 berasal dari pembayaran sewa kantin, Sertifikasi Mutu Kopi, Pengujian Mutu Kopi, Pengujian Mutu Kayu Manis Batang, Pengujian Mutu Kayu Manis Bubuk, Pengujian Mutu Pala Utuh, Pengujian Mutu Pala Bubuk, Pengujian Mutu Fuli, Sertifikasi Mutu Panili, dan Sertifikasi Mutu Beras;
14) Pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp150.000.000,00 berasal dari perpanjangan sewa menyewa atas Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah penguasaan Pemerintah Provinsi Bali dengan luas tanah 12 m^2 dari keseluruhan luas tanah seluas 68.120 m^2 yang terletak di lingkungan Kantor Gubernur Bali Jl. Basuki Rahmat Niti Mandala-Renon-Denpasar, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar oleh PT Telekomunikasi Nusantara atas sewa Gedung Kantor selama 5 (lima) tahun pada tanggal 29 Desember 2025 dengan Perjanjian SK Nomor B.40.000/61485/AKA/B.UM;
15) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp140.976.000,00 berasal dari sewa kantin dan sewa rumah dinas, serta pada 7 (tujuh) UPTD PPRD sebesar Rp131.674.800,00 berasal dari sewa kantin;
16) Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali penerimaan sebesar Rp9.000.000,00 berasal dari sewa kantin. Selain itu, terdapat penerimaan yang bersumber dari UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (PKSDM) sebesar Rp572.880.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
    a) Sewa ruang atau kamar (Ruang Belajar, Mess/Asrama, Auditorium/Aula, dan Laboratorium Komputer) selama 1 (satu) tahun sebesar Rp560.880.000,00; dan
    b) Sewa kantin selama 1 (satu) tahun sebesar Rp12.000.000,00
17) Pada Badan Penghubung Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp500.000,00 berasal dari sewa gedung berupa aula; dan
18) Pada UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, realisasi penerimaan sebesar Rp572.522.807.759,34 bersumber dari kegiatan pemanfaatan Barang Milik Daerah, yang dilaksanakan melalui mekanisme sewa kantin, sewa rumah dinas, kerja sama pemanfaatan, serta sewa tanah. Adapun peningkatan penerimaan yang signifikan pada Tahun Anggaran 2025 terutama dipengaruhi oleh transaksi:
    a) Pemerintah Provinsi Bali melakukan Kerja Sama Pemanfaatan dan Pengembangan Lahan atas sebagian Barang Milik Daerah berupa Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 2/Desa Kesiman Kertalanggu dengan NIB-el 22.09.000024299.0 seluas 93.900 m^2 (sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus meter persegi) dari total luas 121.750 m^2 (seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan PT Bali Budaya Semesta (PT BBS) yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pemanfaatan dan Pengembangan Lahan dengan NIB-el 22.09.000024299.0 Nomor 18 tanggal 25 November 2025 ditandatangani oleh Wayan Koster selaku Gubernur Bali dan Heru Budihartono selaku Direktur PT BBS di hadapan dr. Ketut Mahatma Dharma Wijaya, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Denpasar

       Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama Nomor B.31.000.2.3.2/2553/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 November 2025, yang didahului oleh Perjanjian Penyelesaian Sengketa (Perdamaian) tanggal 13 Mei 2024 antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Heru Budihartono terkait pemanfaatan HGB Nomor 80 atas nama PT Abdi Persada Nusantara di atas HPL No. 2. Sebagai syarat pelaksanaan Kesepakatan Bersama, seluruh tunggakan kewajiban PT Abdi Persada Nusantara sebesar Rp1.478.423.445,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) setara USD 88.528,35 telah dibayarkan oleh Heru Budihartono pada tanggal 14 November 2025 dan diterima melalui transfer ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Bali, serta diakui sebagai penerimaan pada Tahun Anggaran 2025.

       Lahan yang dikerjasamakan diperuntukkan bagi pengembangan kawasan wisata budaya, meliputi Gedung Parkir, Tempat Pertunjukan/Venue, Wisata Budaya dan Spiritual, Wisata Edukasi, Desa Wisata, Restoran/Kuliner, Pasar Oleh-oleh, Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Seni dan Budaya, serta Taman Rekreasi beserta fasilitas pendukungnya. Sisa lahan seluas 28.170 m^2 (dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh meter persegi) atau

30% dari luas lahan yang dikerjasamakan ditetapkan sebagai Lahan Konservasi Desa Adat Kesiman untuk kegiatan yang berhubungan dengan upacara Agama Hindu.

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 20 (dua puluh) tahun. Selama jangka waktu perjanjian, PT BBS wajib membayar Kontribusi Tetap kepada Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp58.380.000.000,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang wajib dibayarkan secara penuh dan sekaligus pada saat penandatanganan perjanjian. Selain Kontribusi Tetap, PT BBS juga wajib membayar Kontribusi Pembagian Pendapatan sebesar 2,5% dari Pendapatan Bruto pengoperasian Fasilitas Kegiatan Usaha setelah memasuki masa Operasi Komersial, serta Kompensasi Pengalihan Unit sebesar 2,5% dari Nilai Pengalihan Unit yang besarannya akan ditetapkan berdasarkan realisasi operasional sesuai ketentuan perjanjian.

Dengan demikian, total penerimaan yang diakui pada Tahun Anggaran 2025 sehubungan dengan kerja sama pemanfaatan lahan HPL No. 2 dengan PT BBS adalah sebesar Rp59.858.423.445,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri dari pelunasan tunggakan sebesar Rp1.478.423.445,00 dan Kontribusi Tetap sebesar Rp58.380.000.000,00, keduanya telah diterima melalui transfer ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Bali dan dicatat.

b) Pemerintah Provinsi Bali melakukan Kerja Sama Pemanfaatan dan Pengembangan Lahan Hak Pengelolaan (HPL) seluas kurang lebih 398.990 m^2 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) yang berlokasi di Jl. Terompong, Desa Peminge, Kecamatan Benoa, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan PT Bali Destinasi Lestari (BDL), yang dituangkan dalam Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemanfaatan dan Pengembangan Lahan Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Nomor 25 tanggal 11 Desember 2025, yang ditandatangani oleh Wayan Koster selaku Gubernur Bali dan Ferry Ma'ruf selaku Direktur Utama PT BDL di hadapan dr. Ketut Mahatma Dharma Wijaya, S.H., M.Kn selaku Notaris di Denpasar.

Perjanjian ini merupakan perubahan dan pernyataan kembali atas kerja sama pemanfaatan lahan yang telah berjalan sejak tahun 1989 melalui Perjanjian Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan (*Land Utilization and Land Development Agreement* atau "LUDA Induk") antara PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC), Pemerintah Provinsi Bali, dan PT Narendra Interpacific Indonesia (NII) di Kawasan Pariwisata The Nusa Dua. Berdasarkan Perjanjian Pemisahan tertanggal 10 November 2022, pelaksanaan kerja sama atas lahan milik Pemerintah Provinsi Bali dipisahkan dan dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 10 tertanggal 23 Desember 2022 antara Pemerintah Provinsi Bali dan NII ("LUDA Pemprov Bali").

Dalam pelaksanaannya, NII gagal memenuhi kewajiban pembayaran Kontribusi Tetap sehingga pada tanggal 1 Juni 2023 Gubernur Bali menyampaikan surat pengakhiran LUDA Pemprov Bali kepada NII. Pada tanggal 6 Juli 2023, kreditur-kreditur NII mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap NII di Pengadilan Niaga Surabaya, yang dikabulkan melalui Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby tertanggal 31 Agustus 2023. Sebagai tindak lanjut Putusan PKPU, pada tanggal 25 Oktober 2023 Perjanjian Perdamaian antara NII dan para krediturnya telah mendapat pengesahan (homologasi) oleh Pengadilan Niaga Surabaya ("Putusan Homologasi"). Dalam rangka pelaksanaan Putusan Homologasi, NII bersama PT Globalnet Spektrum Teknologi (GST) mendirikan PT Bali Destinasi Lestari (BDL) sebagai entitas baru untuk melanjutkan kerja sama pemanfaatan dan pengembangan lahan. Pada tanggal 22 April 2024, melalui serangkaian proses pengalihan saham, komposisi kepemilikan saham BDL menjadi PT Kalibiru Graha Abadi (KGA) sebesar 90,01% dan Bangkok Bank *Public Company Limited* sebesar 9,99%.

Pada tanggal 2 Desember 2025, Pemerintah Provinsi Bali, NII, dan BDL menandatangani Kesepakatan Bersama yang mengatur penyelesaian seluruh tunggakan kewajiban NII kepada Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan LUDA Pemprov Bali. Atas dasar

Kesepakatan Bersama tersebut, seluruh tunggakan sebesar Rp59.884.028.378,98 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh empat juta dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma sembilan puluh delapan Rupiah) telah diterima oleh Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 2 Desember 2025 melalui transfer ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Bali dan diakui sebagai penerimaan pada Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, setelah penandatanganan Akta Nomor 25 tanggal 11 Desember 2025, PT BDL telah melaksanakan pembayaran Kontribusi Tetap Tahap 1 sebesar Rp425.137.500.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang merupakan 50% (lima puluh persen) dari total Kontribusi Tetap, dan turut diakui sebagai penerimaan pada Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian, total penerimaan yang diakui pada Tahun Anggaran 2025 sehubungan dengan kerja sama pemanfaatan lahan HPL dengan PT BDL adalah sebesar Rp485.021.528.378,98 (empat ratus delapan puluh lima miliar dua puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma sembilan puluh delapan rupiah).

Perjanjian ini berlaku untuk Jangka Waktu Awal selama 50 (lima puluh) tahun sejak Tanggal Efektif dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 20 (dua puluh) tahun. Selama jangka waktu perjanjian, PT BDL wajib membayar Kontribusi Tetap kepada Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp850.275.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yang dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap di mana Tahap 1 sebesar Rp425.137.500.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) telah dibayarkan pada tanggal 11 Desember 2025, Tahap 2 sebesar Rp212.568.750.000,- (dua ratus dua belas miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) wajib dibayarkan pada tanggal 14 Desember 2026, dan Tahap 3 sebesar Rp212.568.750.000,- (dua ratus dua belas miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) wajib dibayarkan pada tanggal 14 Desember 2027. Selain Kontribusi Tetap, PT BDL juga wajib membayar Kontribusi Pembagian Pendapatan dari Pendapatan Bruto pengoperasian Fasilitas Pariwisata dan Kompensasi Pengalihan Unit, yang besarannya akan ditetapkan berdasarkan realisasi operasional sesuai ketentuan perjanjian. Apabila Jangka Waktu Awal diperpanjang, PT BDL wajib membayar Kontribusi Tetap Jangka Waktu Perpanjangan sebesar Rp1.079.163.488.229,- (satu triliun tujuh puluh sembilan miliar seratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh sembilan Rupiah) yang dibayarkan secara bertahap mulai tahun ke-36 sejak Tanggal Efektif.

2. Pengenaan Retribusi Jasa Usaha didasarkan atas:
   a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah;
   c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali; dan
   d. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 2***.

5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Berikut ini adalah Retribusi Perizinan Tertentu yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.2.3.1 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	5.400.000.000,00	8.746.943.030,00	161,98	6.941.946.900,00
Jumlah	**5.400.000.000,00**	**8.746.943.030,00**	**161,98**	**6.941.946.900,00**

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp1.804.996.130,00 atau 26,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 161,98% pada TA 2025 dan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Meningkatnya permintaan terhadap kebutuhan pekerja asing yang ditandai dengan membaiknya perekonomian dan kondisi operasional perusahaan untuk mempekerjakan TKA;
      2) Perkiraan nilai tukar mata uang Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah pada saat penetapan target sebesar Rp13.700,00. Namun, pada akhir TA 2025 mengalami peningkatan hingga mencapai kisaran Rp16.720,00.

2. Pengenaan Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan atas:
   a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah; dan
   c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 2***.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.3.1 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	253.382.756.690,00	253.382.756.694,43	100,00	196.751.692.444,03
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	221.082.422,00	221.082.422,00	100,00	618.255.179,00
Jumlah	**253.603.839.112,00**	**253.603.839.116,43**	**100,00**	**197.369.947.623,03**

Tabel di atas menunjukkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp56.233.891.493,40 atau 28,49%.

5.1.1.1.3.1 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

Berikut ini adalah Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.3.1.1 Rincian Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	226.382.756.690,00	226.382.756.694,43	100,00	196.751.692.444,03
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**253.382.756.690,00**	**253.382.756.694,43**	**100,00**	**196.751.692.444,03**

Tabel di atas menunjukkan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp56.631.064.250,40 atau 28,78%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Capaian realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) mencapai target yang ditetapkan pada TA 2025 dan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Penerimaan tersebut antara lain berkaitan dengan kinerja laba BUMD, kebijakan pembagian dividen, serta porsi penyertaan modal Pemerintah Provinsi Bali pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), dengan rincian sebagai berikut:
      1) PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp224.454.593.473,43 yang tercatat pada Berita Acara Nomor: 2050/BA/RNO/DOC/2025 pada tanggal 10 Februari 2025; dan
      2) PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sebesar Rp1.928.163.221,00 yang tercatat pada Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 1203/JBM/III/2025 pada tanggal 21 Maret 2025.
   b. Capaian realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) mencapai target yang ditetapkan pada TA 2025 yang dibagikan oleh Perumda Kerta Bali Saguna sebesar Rp27.000.000.000,00 pada tanggal 3 September 2025, sedangkan pada TA 2024 realisasi tercatat nihil dikarenakan Perumda Kerta Bali Saguna tidak melakukan pembagian dividen sehubungan dengan belum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Pencatatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Pemerintah Provinsi Bali TA 2025 didasarkan pada:
   a. PT Bank Pembangunan Daerah Bali berdasarkan Berita Acara Nomor: 2050/BA/RNO/DOC/2025 tentang Pembagian Dividen Tahun Buku 2024 tanggal 10 Februari 2025 dengan Akta Nomor 6 tanggal 3 Februari 2026 Notaris I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn.; dan
   b. PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 10 Maret 2025 Notaris I Made Pria Dharsana, SH.
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD dapat dilihat pada ***Lampiran 3***.

5.1.1.1.3.2 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta

Berikut ini adalah Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.3.2.1 Rincian Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	221.082.422,00	221.082.422,00	100,00	618.255.179,00
Jumlah	**221.082.422,00**	**221.082.422,00**	**100,00**	**618.255.179,00**

Tabel di atas menunjukkan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp397.172.757,00) atau -64,24%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Capaian realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta mencapai target yang ditetapkan pada TA 2025. Walau demikian, realisasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan realisasi TA 2024 dengan penurunan signifikan sebesar (Rp397.172.757,00). Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Terdapat penurunan laba pada PT Puri Raharja (Rumah Sakit Puri Raharja) pada Tahun Buku 2024 menjadi Rp903.823.349,56 dibandingkan dengan laba pada Tahun Buku 2023 sebesar Rp2.527.534.582,05 (selisih Rp1.623.711.232,49), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen PT Puri Raharja Nomor: 00031/2.1274/AU.2/05/0463-4/1/III/2025; dan
      2) Penurunan laba tersebut berdampak pada besaran dividen yang dibagikan kepada pemegang saham, sehingga bagian dividen yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Bali dengan porsi kepemilikan modal sebesar 58% turut menurun pada TA 2025.
2. Rincian Anggaran dan Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta dapat dilihat pada ***Lampiran 3***.

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Berikut ini adalah Lain-lain PAD yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.1 Rincian Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	390.000.000,00	700.068.400,00	179,50	1.061.493.900,00
Hasil Kerja Sama Daerah	6.224.780.000,00	6.812.347.316,00	109,43	3.817.445.100,00
Jasa Giro	9.269.418.781,00	8.480.362.829,62	91,48	10.304.453.335,81
Pendapatan Bunga	2.645.833.333,00	15.267.241.419,64	577,02	9.555.179.227,40
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	5.000.000,00	18.000.000,00	360,00	18.000.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	126.144.212,00	388.650.982,18	308,10	2.021.009.936,46
Pendapatan Denda Pajak Daerah	50.500.100.000,00	17.892.730.336,00	35,43	71.236.784.994,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	2.773.340,00	20.433.146,04	736,77	23.266.408,00
Pendapatan dari Pengembalian	94.996.528.409,00	97.680.108.411,33	102,82	697.704.902,79
Pendapatan BLUD	91.192.035.624,00	82.679.933.999,49	90,66	63.071.871.378,06
Pungutan bagi Wisatawan Asing	500.000.000.000,00	369.021.750.000,00	73,80	317.880.000.000,00
Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	0,00	85.577.461,00	0,00	0,00
Jumlah	**755.352.613.699,00**	**599.047.204.301,30**	**79,30**	**479.687.209.182,52**

Tabel di atas menunjukkan Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp119.359.995.118,78 atau 24,88%.

5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Berikut ini adalah Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.1.1 Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	390.000.000,00	700.068.400,00	179,50	1.061.493.900,00
Jumlah	**390.000.000,00**	**700.068.400,00**	**179,50**	**1.061.493.900,00**

Tabel di atas menunjukkan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp361.425.500,00) atau -34,05%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Hasil Penjualan Aset Lain-Lain memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 179,50% pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan penjualan BMD bersifat tidak rutin atau insidentil dan umumnya dipengaruhi oleh jumlah, jenis, serta nilai ekonomis aset yang dihapuskan dan dijual pada tahun berjalan. Penerimaan bersumber dari aset yang kondisi fisiknya telah menurun (rusak berat atau terbakar dan material bongkaran), sehingga nilai penjualannya dapat lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, walaupun masih melampaui target.
2. Rincian Hasil Penjualan Aset Lain-Lain berdasarkan penjualan aset rusak berat serta bongkaran gedung yang dilakukan menurut perangkat daerah beserta dasar penghapusan aset dapat diuraikan sebagai berikut:
   a. Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, terdapat:
      1) Penghapusan Bangunan Gedung kondisi rusak berat pada SLBN 2 Buleleng sebesar Rp81.312.470,40 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/1945/P.BMD/BPKAD tanggal 20 Maret 2025;
      2) Penghapusan Barang Inventaris kondisi terbakar pada SLBN 1 Karangasem sebesar Rp147.335.595,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor: B.31.000.2.4/3182/P.BMD/BPKAD tanggal 16 Mei 2025;
      3) Penghapusan Barang Inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp4.975.359.291,50 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor: B.31.000.2.4/7409/P.BMD/BPKAD tanggal 5 November 2025;
      4) Penghapusan Bangunan Gedung kondisi rusak berat pada SMAN 2 Banjar sebesar Rp11.428.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/8702/P.BMD/BPKAD tanggal 21 Desember 2025;
      5) Penghapusan Bangunan Gedung kondisi rusak berat pada SMAN 1 Kediri sebesar Rp3.051.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/8703/P.BMD/BPKAD tanggal 21 Desember 2025; dan
      6) Penghapusan Bangunan Gedung kondisi rusak berat pada SMAN 1 Bangli dan SMAN 1 Tembuku sebesar Rp242.984.470,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/8838/P.BMD/BPKAD tanggal 27 Desember 2025.
   b. Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali terdapat:
      1) Penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp933.138.898,33 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/8837/P.BMD/BPKAD tanggal 27 Desember 2025;
      2) Penghapusan Kendaraan Dinas kondisi rusak berat sebesar Rp8.800.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/8244/P.BMD/BPKAD tanggal 5 Desember 2025;
      3) Penghapusan Barang Inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp933.138.898,33 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/8837/P.BMD/BPKAD tanggal 27 Desember 2025.

4) Pada Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama Provinsi Bali terdapat:
   a) Penghapusan kendaraan dinas kondisi rusak berat sebesar Rp3.677.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/5914/P.BMD/BPKA tanggal 3 September 2025; dan
   b) Penghapusan bangunan gedung kondisi rusak berat sebesar Rp2.039.594.093,29 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/6004/P.BMD/BPKAD tanggal 8 September 2025.
5) Pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali terdapat penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp136.738.767,99 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/7408/P.BMD/BPKAD tanggal 5 November 2025.

c. Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali terdapat penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp168.493.228,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/8839/P.BMD/BPKAD tanggal 27 Desember 2025;
d. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, terdapat:
   1) Penghapusan Barang Inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp674.907.420,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/8928/P.BMD/BPKAD tanggal 30 Desember 2025; dan
   2) Penghapusan Barang Inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp674.907.420,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/8929/P.BMD/BPKAD tanggal 30 Desember 2025.
e. Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali terdapat penghapusan bangunan gedung kondisi rusak berat sebesar Rp222.295.134,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/3029/P.BMD/BPKAD tanggal 9 Mei 2025;
f. Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali terdapat penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp83.265.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/4742/P.BMD/BPKAD tanggal 21 Juli 2025;
g. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali terdapat:
   1) Penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp187.341.600,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/2627/P.BMD/BPKAD tanggal 21 April 2025;
   2) Bangunan gedung kondisi rusak berat sebesar Rp44.600.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/5915/P.BMD/BPKAD tanggal 3 September 2025; dan
   3) Penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp195.649.800,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/7827/P.BMD/BPKAD tanggal 25 November 2025.
h. Pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali terdapat penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp409.723.960,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/8839/P.BMD/BPKAD tanggal 27 Desember 2025;
i. Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, terdapat:
   1) Penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp533.223.348,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/1086/P.BMD/BPKAD tanggal 11 Februari 2025;
   2) Penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp271.044.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/8572/P.BMD/BPKAD tanggal 16 Desember 2025; dan
   3) Penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp15.251.455,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/8839/P.BMD/BPKAD tanggal 27 Desember 2025.
j. Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali terdapat:
   1) Penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp299.058.975,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/1085/P.BMD/BPKAD tanggal 11 Februari 2025; dan
   2) Penghapusan kendaraan dinas kondisi rusak berat sebesar Rp2.600.000,00, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/8135/P.BMD/BPKAD tanggal 3 Desember 2025.
k. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali terdapat berupa penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp280.366.380,00 berdasarkan

Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/8837/P.BMD/BPKAD tanggal 27 Desember 2025;

l. Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali terdapat:
   1) Penghapusan kendaraan dinas kondisi rusak berat sebesar Rp14.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/2795/P.BMD/BPKAD tanggal 30 April 2025;
   2) Penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp711.633.500,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/7407/P.BMD/BPKAD tanggal 5 November 2025; dan
   3) Penghapusan bangunan gedung kondisi rusak berat sebesar Rp115.753.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/8932/P.BMD/BPKAD tanggal 30 Desember 2025.
m. Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali terdapat penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp66.792.450,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/2627/P.BMD/BPKAD tanggal 21 April 2025;
n. Pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali terdapat penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp153.258.300,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/7827/P.BMD/BPKAD tanggal 25 November 2025;
o. Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali terdapat:
   1) Penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp328.223.552,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/7353/P.BMD/BPKAD tanggal 3 November 2025; dan
   2) Penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp11.932.500,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/8572/P.BMD/BPKAD tanggal 16 Desember 2025.
   3) Pada UPTD. Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdapat penghapusan kendaraan dinas kondisi rusak berat sebesar Rp228.519.900,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/6506/P.BMD/BPKAD tanggal 29 September 2025.
p. Pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali beserta UPTD terdapat:
   1) Penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp529.368.296,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/1085/P.BMD/BPKAD tanggal 11 Februari 2025; dan
   2) Penghapusan kendaraan Dinas kondisi rusak berat sebesar Rp434.850.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/6005/P.BMD/BPKAD tanggal 8 September 2025.
q. Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali terdapat penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp116.043.400,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/7408/P.BMD/BPKAD tanggal 5 November 2025;
r. Pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali terdapat:
   1) Pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali terdapat penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp820.133.657,50 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/2581/P.BMD/BPKAD tanggal 17 April 2025;
   2) Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali Provinsi Bali terdapat penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp232.339.296,42 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/2581/P.BMD/BPKAD tanggal 17 April 2025; dan
   3) Biro Hukum Setda Provinsi Bali terdapat penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp172.051.829,70 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/7407/P.BMD/BPKAD tanggal 5 November 2025; dan
   4) Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali terdapat penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp192.818.613,88 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/7408/P.BMD/BPKAD tanggal 5 November 2025.
s. Pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali terdapat:
   1) Penghapusan kendaraan dinas kondisi rusak berat sebesar Rp479.774.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/2763/P.BMD/BPKAD tanggal 29 April 2025; dan
   2) Penghapusan barang Inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp979.917.357,67 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/7407/P.BMD/BPKAD tanggal 5 November 2025.

t. Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Provinsi Bali terdapat penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.000.2.4/1085/P.BMD/BPKAD tanggal 11 Februari 2025;
u. Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali beserta UPTD terdapat:
   1) Penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sesuai sebesar Rp1.455.453.290,01 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/4776/P.BMD/BPKAD tanggal 23 Juli 2025;
   2) Penghapusan kendaraan dinas kondisi rusak berat sebesar Rp32.493.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/6006/P.BMD/BPKAD tanggal 8 September 2025; dan
   3) Penghapusan kendaraan dinas kondisi rusak berat sebesar Rp120.231.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/8224/P.BMD/BPKAD tanggal 5 Desember 2025.
v. Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali terdapat penghapusan Barang Inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp463.842.368,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/4742/P.BMD/BPKAD tanggal 21 Juli 2025; dan
w. Pada Badan Penghubung Provinsi Bali terdapat penghapusan barang inventaris kondisi rusak berat sebesar Rp281.141.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor B.31.000.2.4/4742/P.BMD/BPKAD tanggal 21 Juli 2025.

3. Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dapat dilihat pada ***Lampiran 4***.

5.1.1.1.4.2 Hasil Kerja Sama Daerah

Berikut ini adalah Hasil Kerja Sama Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.2.1 Rincian Hasil Kerja Sama Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Kerja Sama Daerah	6.224.780.000,00	6.812.347.316,00	109,43	3.817.445.100,00
Jumlah	**6.224.780.000,00**	**6.812.347.316,00**	**109,43**	**3.817.445.100,00**

Tabel di atas menunjukkan Hasil Kerja Sama Daerah TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp2.994.902.216,00 atau 78,45%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Hasil Kerja Sama Daerah TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Hasil Kerja Sama Daerah memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 109,43% pada TA 2025, dan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024 dengan kenaikan signifikan sebesar Rp2.994.902.216,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali, penerimaan sebesar Rp4.200.107.316,00, berasal dari pendapatan tiket Bus Trans Sarbagita serta adanya pelimpahan pengelolaan layanan Bus Trans Metro Dewata (TMD). Layanan TMD yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Perhubungan kemudian dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali pada pertengahan TA 2025, setelah sebelumnya sempat berhenti beroperasi pada 31 Desember 2024 akibat kendala anggaran pusat. Selanjutnya, pada 20 April 2025 Pemerintah Provinsi Bali mengaktifkan kembali layanan TMD dan Dinas Perhubungan Provinsi Bali mengambil alih kewenangan pengelolaan untuk menjaga keberlanjutan layanan transportasi umum di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Mulai Oktober 2025, TMD kembali melayani 6 (enam) koridor dengan tarif *flat*, serta mendorong peningkatan kemudahan transaksi melalui pemanfaatan teknologi pembayaran, termasuk QRIS *Tap*;
      2) Pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali sebesar Rp1.191.600.000,00, berasal dari penerimaan atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak ketiga, yaitu PT Jasa

Marga Bali Tol sebesar Rp254.400.000,00, PT ITDC sebesar Rp800.000.000,00, dan PUDAM Tirta Mangutama sebesar Rp137.200.000,00; dan

3) Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali sebesar Rp1.420.640.000,00 berasal dari kontribusi atau partisipasi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, serta pemerintah daerah di luar Provinsi Bali, yaitu Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, Pemerintah Kabupaten Sumba, dan Pemerintah Kota Bima. Penerimaan tersebut terkait dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama atau layanan pengembangan SDM dan kepegawaian.

2. Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 4***.

5.1.1.1.4.3 Jasa Giro

Berikut ini adalah Jasa Giro yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.3.1 Rincian Jasa Giro

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Jasa Giro pada Kas Daerah	9.269.418.781,00	7.140.669.743,77	77,03	7.610.111.049,43
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	1.329.865.164,23	0,00	1.652.346.726,59
Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	1.033.753.904,24
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	9.845.243,00	0,00	8.241.655,55
Jumlah	**9.269.418.781,00**	**8.480.380.151,00**	**91,48**	**10.304.453.335,81**

Tabel di atas menunjukkan Jasa Giro TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp1.824.073.184,81) atau -17,70%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Jasa Giro TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Jasa Giro pada Kas Daerah memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 77,03% pada TA 2025 dan realisasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan rata-rata saldo mengendap pada RKUD selama TA 2025 relatif lebih rendah dibandingkan TA 2024.
   b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara memiliki persentase capaian sebesar 0,00% pada TA 2025 dan realisasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini umumnya dipengaruhi oleh rata-rata saldo mengendap, tingkat jasa giro/bunga bank, serta ketepatan waktu pelimpahan/penyetoran dari rekening bendahara/rekening instansi ke kas daerah.
   c. Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan memiliki persentase capaian sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp1.033.753.904,24) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tidak terdapat saldo yang mengendap pada rekening dana cadangan; dan
   d. Jasa Giro pada Rekening Dana BOS memiliki persentase capaian sebesar 0,00% pada TA 2025. Walau demikian, realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat peningkatan rata-rata saldo mengendap pada rekening Dana BOS selama TA 2025.
2. Realisasi Penerimaan Jasa Giro tergantung pada perputaran jumlah uang di RKUD, yang mengakibatkan penerimaan Jasa Giro tidak dapat diprediksi dengan tepat dikarenakan tergantung pada ketersediaan dan perputaran kas di RKUD; dan
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Jasa Giro dapat dilihat pada ***Lampiran 4***.

5.1.1.1.4.4 Pendapatan Bunga

Berikut ini adalah Pendapatan Bunga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.4.1 Rincian Pendapatan Bunga

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.645.833.333,00	15.267.241.419,64	577,02	9.555.179.227,40
Jumlah	**2.645.833.333,00**	**15.267.241.419,64**	**577,02**	**9.555.179.227,40**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Bunga TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp5.712.062.192,24 atau 59,78%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pendapatan Bunga TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

   Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 577,02% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp5.712.062.192,24 pada TA 2025. Penerimaan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah bersumber dari Deposito Berjangka Kas Daerah Pemerintah Provinsi Bali yang merupakan skema pengelolaan kas daerah melalui penempatan dana *idle* pada instrumen deposito berjangka guna mengoptimalkan perputaran kas daerah dan meningkatkan pendapatan bunga. Pelaksanaannya tetap memperhatikan ketersediaan dana untuk mendukung kebutuhan operasional pada bulan berjalan. Pada TA 2025, skema deposito ini semakin diintensifkan melalui penambahan jumlah penempatan deposito serta optimalisasi tenor penempatan sebagai bagian dari strategi manajemen kas yang lebih aktif, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Bunga pada TA 2025. Adapun rincian nomor rekening deposito dan besaran pendapatan bunga yang diterima masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:
   a. Bilyet Deposito Berjangka 0100331001168 selama 11 bulan sebesar Rp8.020.833.333,37;
   b. Bilyet Deposito Berjangka 0100331001171 selama 9 bulan sebesar Rp1.312.499.999,97;
   c. Bilyet Deposito Berjangka 0100331001194 selama 10 bulan sebesar Rp5.833.333.333,30; dan
   d. Penerimaan remunerasi *Treasury Deposit Facility* (TDF) atas Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2025, dengan uraian sebagai berikut:
      1) Remunerasi TDF-DBH Triwulan I sebesar Rp90.680.744,00; dan
      2) Remunerasi TDF-DBH Triwulan II sebesar Rp9.894.009,00.
2. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Bunga dapat dilihat pada ***Lampiran 4***.

5.1.1.1.4.5 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Berikut ini adalah Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.5.1 Rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	5.000.000,00	18.000.000,00	360,00	18.000.000,00
Jumlah	**5.000.000,00**	**18.000.000,00**	**360,00**	**18.000.000,00**

Tabel di atas menunjukkan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2025 tidak mengalami perubahan dari TA 2024, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 360,00% pada TA 2025. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang dicatat merupakan setoran atas nama inisial IWW sebagai mantan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali dengan total penyetoran sebesar Rp18.000.000,00 yang dipotong secara langsung dari Gaji Pensiunan yang bersangkutan.

2. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 4***.

5.1.1.1.4.6 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Berikut ini adalah Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.6.1 Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	126.144.212,00	388.650.982,18	308,10	2.021.009.936,46
Jumlah	**126.144.212,00**	**388.650.982,18**	**308,10**	**2.021.009.936,46**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp1.632.358.954,28) atau -80,77%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 308,10% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp1.632.358.954,28) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Penerimaan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan umumnya bersifat estimatif dan tidak dirancang sebagai sumber pendapatan rutin yang dipengaruhi oleh kejadian keterlambatan aktual dalam pelaksanaan pekerjaan pada tahun berjalan; dan
      2) Masih terdapat beberapa pekerjaan yang terlambat pada TA 2025, sehingga menimbulkan setoran denda dan menyebabkan capaian melampaui anggaran. Namun, secara jumlah dan/atau nilai denda yang timbul pada TA 2025 tercatat lebih kecil dibandingkan TA 2024, sehingga total realisasi tahun berjalan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Setoran berasal dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia kepada Pemerintah Provinsi Bali, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali, terdapat 2 (dua) pekerjaan yang terlambat diselesaikan dan dikenakan denda sebagai berikut:
      1) Program Gizi Retinol (Vitamin A) PT Kimia Farma sebesar Rp13.111.575,00 berdasarkan STS Nomor: 51.00/42.0/000252/STS/5.02.0.00.0.00.02.0000/12/2025 tanggal 7 November 2025, terjadi dikarenakan adanya kendala teknis di pihak penyedia, antara lain terkait kesiapan barang dan pengaturan distribusi, sehingga pengiriman barang tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati. Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya proses pendistribusian barang; dan
      2) Belanja Obat *Buffer* Vitamin C sebesar Rp27.090,00 berdasarkan STS Nomor: 51.00/42.0/000256/STS/5.02.0.00.0.00.02.0000/12/2025 tanggal 7 November 2025, terjadi dikarenakan terdapat kendala teknis pada penyedia yang mengakibatkan barang tidak dapat didistribusikan sesuai jadwal pelaksanaan.
   b. Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali terdapat 4 (empat) pekerjaan yang terlambat diselesaikan dan dikenakan denda sebagai berikut:
      1) Pemeliharaan ruas Jalan Provinsi Denpasar-Sanur sebesar Rp115.625.427,03 berdasarkan STS Nomor: 51.00/42.0/000058/STS/5.02.0.00.0.00.02.0000/4/2025 tanggal 21 Maret 2025, terjadi dikarenakan adanya upacara keagamaan (*Dewa Yadnya*) pada Pura Jagatnatha yang berlangsung dengan pelaksanaan Denpasar Festival pada akhir tahun, sehingga pelaksanaan pemasangan *kerb* pracetak tipe L mengalami keterlambatan. Selain itu, faktor cuaca yang tidak mendukung turut berdampak pada keterlambatan pekerjaan pengaspalan pada segmen STA 0+000, sehingga penyelesaian pekerjaan tidak dapat dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan;

2) Pemeliharaan berkala pada ruas Jalan Provinsi SP. Kargo–SP. Imam Bonjol serta Jalan Udayana dan Jalan Hassanudin di Kota Denpasar sebesar Rp9.874.464,86 berdasarkan STS Nomor: 51.00/42.0/000288/STS/5.02.0.00.0.00.02.0000/1/2025 tanggal 9 Desember 2025, dikarenakan adanya bencana alam berupa banjir yang berdampak pada kondisi lapangan, sehingga pelaksanaan pekerjaan perlu penjadwalan ulang, khususnya pekerjaan marka jalan. Selain itu, pasca banjir terdapat material endapan atau sedimentasi pada lokasi pekerjaan yang memerlukan pembersihan terlebih dahulu, sehingga pemasangan plat penutup baru dapat dilakukan setelah proses pembersihan selesai;
3) Pengembangan SPAM Regional Petanu Denpasar Selatan sebesar Rp27.597.860,00 berdasarkan STS Nomor: 51.00/42.0/000267/STS/5.02.0.00.0.00.02.0000/12/2025 tanggal 29 Desember 2025, dikarenakan penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan masa kontrak yang ditetapkan; dan
4) Optimalisasi SPAM CV Bima Sakti sebesar Rp6.304.640,00 berdasarkan STS Nomor 51.00/42.0/000292/STS/5.02.0.00.0.00.02.0000/1/2025 tanggal 29 Desember 2025, dikarenakan penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan masa kontrak yang ditetapkan.

c. Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan bangunan gedung tempat kerja lainnya TA 2024 sebesar Rp924.785,49 berdasarkan STS Nomor: 51.00/42.0/000067/STS/5.02.0.00.0.00.02.0000/4/2025 tanggal 26 Maret 2025, sehubungan dengan adanya kekeliruan penulisan tanggal batas waktu pelaksanaan dalam kontrak, sehingga batas waktu penyelesaian pekerjaan perlu disesuaikan dengan ketentuan kontrak sebagai dasar perhitungan denda;
d. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, terdapat 2 (dua) pekerjaan yang terlambat diselesaikan dan dikenakan denda sebagai berikut:
1) Pengadaan pakaian dinas lapangan TA 2024 sebesar Rp209.100,00 berdasarkan STS Nomor: 51.00/42.0/000071/STS/5.02.0.00.0.00.02.0000/4/2025 tanggal 10 April 2025, terjadi dikarenakan penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal dan ketentuan waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
2) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan PT Berawantangi sebesar Rp33.124.335,80 berdasarkan STS Nomor 51.00/42.0/000289/STS/5.02.0.00.0.00.02.0000/1/2025 tanggal 18 Desember 2025, dikarenakan adanya kendala ketersediaan tenaga kerja serta keterlambatan suplai material ke lokasi proyek, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai batas waktu kontrak.

e. Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, terdapat keterlambatan pekerjaan belanja modal bangunan gedung kantor (belanja kontruksi rehab kantor) sebesar Rp129.690.504,00 berdasarkan STS Nomor: 51.00/42.0/000226/STS/5.02.0.00.0.00.02.0000/11/2025 tanggal 27 Oktober 2025, dikerjakan oleh CV Sinar Beliti dengan waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, dan hasil pekerjaan tersebut telah melewati masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
f. Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, terdapat 2 (dua) pekerjaan yang terlambat diselesaikan dan dikenakan denda sebagai berkut:
1) Pekerjaan tahap I konstruksi bangunan pendukung Turyapada Tower 2025 terdapat denda keterlambatan sebesar Rp10.384.900,00, dikarenakan kondisi cuaca tidak mendukung yang berdampak pada pembatasan jam kerja di lapangan serta menurunkan produktivitas pelaksanaan pekerjaan, sehingga realisasi penyelesaian tidak dapat memenuhi jadwal yang telah ditetapkan; dan
2) Pembangunan Fasilitas Umum (Fasum) Turyapada sebesar Rp10.384.900,00, dikarenakan gangguan cuaca yang menghambat kegiatan pelaksanaan, baik dari sisi pengaturan jam kerja maupun efektivitas tenaga kerja, sehingga target penyelesaian tidak tercapai sesuai ketentuan.

g. Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali terdapat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan proyek CV Putra Catur Dewata sebesar Rp31.391.400,00 berdasarkan STS Nomor: 51.00/42.0/000290/STS/5.02.0.00.0.00.02.0000/1/2025 tanggal 18 Desember 2025, dikarenakan pihak penyedia jasa konstruksi tidak dapat memenuhi target waktu sebagaimana diatur dalam kontrak kerja dalam pelaksanaan pembangunan ruang rapat.

3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dapat dilihat pada ***Lampiran 4***.

5.1.1.1.4.7 Pendapatan Denda Pajak Daerah

Berikut ini adalah Pendapatan Denda Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.7.1 Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	50.000.000.000,00	17.788.126.600,00	35,57	70.448.079.400,00
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	500.000.000,00	104.169.200,00	20,83	788.373.200,00
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	100.000,00	434.536,00	434,53	332.394,00
Jumlah	**50.500.100.000,00**	**17.892.730.336,00**	**35,43**	**71.236.784.994,00**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp53.344.054.658,00) atau -74,88%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 35,57% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp52.659.952.800,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Perkembangan kebijakan pemungutan denda dan kepatuhan Wajib Pajak, di antaranya:
         a) Penerimaan Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) relatif bergantung pada keterlambatan pendaftaran atau pembayaran, sehingga ketika keterlambatan Wajib Pajak dalam membayar PKB menurun, maka pendapatan denda PKB juga ikut menurun. Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur bahwa apabila Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran dalam jangka waktu yang ditentukan, maka dikenakan sanksi administratif berupa denda 1% per bulan dari pokok PKB terutang (termasuk Opsen PKB terutang) untuk paling lama 24 bulan. Dalam hal ini, ketika terjadi pergeseran perilaku pembayaran menjadi lebih tepat waktu, maka potensi denda dapat menjadi lebih kecil; dan
         b) Kebijakan keringanan dan/atau pengurangan terhadap pokok PKB sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan terhadap Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat mendorong Wajib Pajak untuk segera melunasi kewajiban (terutama saat memanfaatkan kebijakan keringanan atau pengurangan pokok), sehingga keterlambatan yang memicu denda berkurang dan penerimaan lebih banyak terhimpun ke PKB daripada denda PKB.
      2) Upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan optimalisasi pelayanan, di antaranya:
         c) Terdapat penerapan Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2020 tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor, dengan melibatkan Kepolisian, Jasa Raharja dan Dinas Perhubungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB melalui pendekatan edukatif. Kegiatan yang dilakukan meliputi razia kendaraan di berbagai lokasi strategis untuk memastikan kepatuhan pembayaran PKB oleh pemilik kendaraan bermotor; dan
         d) Terdapat peningkatan standar pelayanan melalui strategi jemput bola atau penagihan langsung secara *door to door* kepada Wajib Pajak yang menunggak berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Badan Pendapatan Daerah yang menekankan pentingnya pelayanan publik yang cepat, pasti, dan murah. Melalui strategi tersebut, pelunasan kewajiban dapat berlangsung lebih cepat sehingga keterlambatan yang menjadi dasar pembentukan denda menjadi lebih terkendali, dan pada akhirnya berkontribusi pada turunnya penerimaan Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada TA 2025.
   b. Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 20,83% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp684.204.000,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:

1) Denda BBNKB terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah apabila:
   a) Terjadi keterlambatan pendaftaran setelah penyerahan, di mana setiap kendaraan bermotor wajib didaftarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan. Dalam hal pendaftaran tersebut tidak dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 25% dari pokok BBNKB terutang dan Opsen BBNKB terutang. Dengan ketentuan tersebut, semakin tinggi ketepatan waktu pengurusan balik nama, maka basis pembentukan denda (keterlambatan pendaftaran) menjadi lebih kecil, sehingga penerimaan Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) relatif menurun; dan
   b) Selain penyerahan, terdapat layanan administratif tertentu yang juga wajib didaftarkan tepat waktu. Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin wajib didaftarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan selesai dilaksanakan. Ketepatan waktu pada layanan ini turut memengaruhi terbentuknya denda BBNKB.
2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan terhadap Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengatur keringanan dan/atau pengurangan terhadap pokok BBNKB sebesar 24%. Kebijakan ini berpotensi mendorong Wajib Pajak untuk segera melakukan proses balik nama, sehingga keterlambatan pendaftaran yang menjadi dasar pengenaan denda menjadi lebih kecil.

c. Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 434,53% pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan semakin meningkatnya pemanfaatan air permukaan dengan semakin berkembangnya pemanfaatan air permukaan untuk sarana pariwisata.

2. Pengenaan Pendapatan Denda Pajak Daerah didasarkan atas:
   a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
   b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 4***.

5.1.1.1.4.8 Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Berikut ini adalah Pendapatan Denda Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.8.1 Rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	2.773.340,00	20.093.596,04	724,52	22.265.708,00
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	339.550,00	0,00	1.000.700,00
Jumlah	**2.773.340,00**	**20.433.146,04**	**736,77**	**23.266.408,00**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp2.833.261,96) atau -12,18%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 724,52% pada TA 2025. Walau demikian, realisasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan penerimaan denda pada dasarnya bersifat tidak pasti dan tidak direncanakan sebagai sumber utama. Dalam hal ini, nilai denda yang lebih rendah dapat mencerminkan kepatuhan pembayaran sewa atau kontrak yang cenderung lebih baik. Penerimaan ini berasal dari realisasi Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah berupa denda sewa kantin, denda sewa rumah dinas, dan denda sewa parkir, dengan rincian sebagai berikut:

1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sebesar Rp11.176.920,00;
2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali sebesar Rp5.000,00;
3) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali sebesar Rp10.800,00;
4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sebesar Rp16.800,00;
5) Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sebesar Rp2.400,00;
6) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali sebesar Rp25.380,00;
7) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali sebesar Rp69.120,00;
8) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali sebesar Rp52.800,00;
9) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali sebesar Rp67.500,00;
10) UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana sebesar Rp12.750,00; dan
11) UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar Rp8.654.126,04.

b. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp661.150,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali terdapat Pendapatan Denda Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada TA 2025 yang telah diatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ketentuan bahwa pengenaan denda dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan, yaitu sebesar 1 (satu) Dolar Amerika Serikat per hari yang dikonversikan ke dalam rupiah sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat pembayaran.

2. Pengenaan Pendapatan Denda Retribusi Daerah didasarkan atas:
   a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
   b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 4***.

5.1.1.1.4.9 Pendapatan dari Pengembalian

Berikut ini adalah Pendapatan dari Pengembalian yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.9.1 Rincian Pendapatan dari Pengembalian

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	1.633.548.454,00	0,00	613.334,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	325.387.871,04	0,00	42.848.164,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	33.478.481,00	0,00	2.976.200,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	42.692.500,00	0,00	6.075.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	907.585.412,65	0,00	324.752.080,16
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	34.473.585,00	0,00	18.262.522,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta				
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	94.996.528.409,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	93.915.519.097,93	0,00	23.773.198,96
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	309.678.691,16	0,00	217.921.489,15
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	316.697.652,55	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi	0,00	0,00	0,00	17.982.914,52
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	55.857.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	101.385.000,00	0,00	37.500.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	0,00	4.666,00	0,00	0,00
Jumlah	**94.996.528.409,00**	**97.680.108.411,33**	**102,82**	**697.704.902,79**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan dari Pengembalian TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp96.982.403.508,54 atau 13.900,20%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas memiliki persentase capaian sebesar 0,00% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp1.632.935.120,00 pada TA 2025, yang berasal dari:
      1) Pengembalian kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp598.835.954,00, antara lain berasal dari pengembalian belanja perjalanan dinas acara pertemuan tahunan BI Tahun 2024 dan pengembalian perjalanan dinas biasa bulan November sampai dengan Desember 2024 dari Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali; dan
      2) Pengembalian kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp1.034.712.500,00, antara lain berasal dari pengembalian uang harian perjalanan dinas luar negeri TA 2024 dari beberapa perangkat daerah di antaranya Dinas Perhubungan.

Tidak terdapat anggaran pada rekening ini dikarenakan pengembalian kelebihan pembayaran bersifat tidak dapat diprediksi;

b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN memiliki persentase capaian sebesar 0,00% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp282.539.707,04 pada TA 2025 dipengaruhi salah satunya oleh pengembalian sisa dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS) SMA/SMK jenjang TA 2019 sampai dengan TA 2022 se-Bali sebesar Rp2.336.508.130,00 yang masuk melalui rekening ini (sebagai rekening titipan dikarenakan tidak tersedianya rekening lain yang sesuai pada SIPD), serta pengembalian SILPA dana BOS SMKN 2 Negara dan pengembalian gaji guru honorer yang tidak memiliki SK dari beberapa sekolah. Tidak terdapat anggaran pada rekening ini dikarenakan pengembalian bersifat insidental dari hasil pengawasan dan rekonsiliasi dana BOS oleh OPD terkait;
c. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang memiliki persentase capaian sebesar 0,00% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp30.502.281,00 pada TA 2025 bersumber dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja paket tanaman hias TA 2024 Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali sebesar Rp27.456.181,00 serta pengembalian kelebihan pembayaran belanja bahan kimia sebesar Rp4.966.300,00, dan pengembalian belanja bahan bakar minyak pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali TA 2024 sebesar Rp1.056.000,00;
d. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa memiliki persentase capaian sebesar 0,00% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp36.617.500,00 pada TA 2025 bersumber dari pengembalian kelebihan sewa mess Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) TA 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dan pengembalian dana Pekan Olahraga Pelajar (PORJAR) Tahun 2024 sebesar Rp33.687.500,00, pengembalian honorarium narasumber dari beberapa perangkat daerah sebesar Rp5.040.000,00, serta pengembalian jasa juri perlombaan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali TA 2024 sebesar Rp2.385.000,00 dan pengembalian belanja jasa lainnya;
e. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan memiliki persentase capaian sebesar 0,00% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp582.833.332,49 pada TA 2025 yang dipengaruhi oleh pengembalian kelebihan pembayaran Tower Turyapada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebesar Rp549.088.098,00 dan pengembalian kekurangan volume bangunan gedung RSUD Bali Mandara sebesar Rp189.453.868,00. Selain itu, terdapat pengembalian dari temuan BPK atas pekerjaan pemeliharaan bangunan gedung kantor BPBD TA 2024 sebesar Rp25.571.500,00 serta pengembalian kelebihan pembayaran pemeliharaan gedung kantor dari perangkat daerah lainnya;
f. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memiliki persentase capaian sebesar 0,00% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp16.211.063,00 pada TA 2025 yang seluruhnya berasal dari satu transaksi pengembalian belanja jasa layanan angkutan Trans Sarbagita/Angkutan Umum pada TA 2024;
g. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta tidak terealisasi pada TA 2025, sehingga mengalami penurunan dibandingkan TA 2024 sebesar Rp5.000.000,00 dikarenakan tidak terdapat pengembalian subsidi dari Badan Usaha Milik Swasta pada tahun berjalan;
h. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp94.996.528.409,00. Namun, belanja tersebut tidak terealisasi pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pengembalian sisa dana hibah tersebut dicatat pada rekening Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia (sebagaimana dijelaskan pada huruf i di bawah) yang merupakan Pengembalian Hibah dalam rangka pendanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
i. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp93.915.519.097,93 merupakan komponen terbesar dalam kelompok Pendapatan dari Pengembalian TA 2025. Nilai ini dipengaruhi oleh 3 (tiga) transaksi pengembalian sisa dana hibah Pemilukada TA 2024, di antaranya:

1) Pengembalian sisa dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali TA 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali sebesar Rp80.279.271.888,00;
2) Pengembalian sisa dana hibah pengawasan Pemilihan Gubernur dari Badan Pengawas Pemilu sebesar Rp10.974.051.072,00;
3) Pengembalian dana hibah pengamanan Pemilukada TA 2024 dari Polda Bali sebesar Rp2.584.937.932,00; dan
4) Sisa sebesar Rp77.258.137,93 berasal dari pengembalian sisa dana hibah berbagai badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan serta desa adat penerima hibah TA 2024;

j. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp3.800.000,00 seluruhnya berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran umum RSJ TA 2024;
k. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung sebesar Rp309.678.691,16 bersumber dari pengembalian kelebihan pembayaran kepada CV Waskita Karya Utama atas pekerjaan gedung SMAN 3 Negara TA 2024 sebesar Rp145.510.280,00, pengembalian kekurangan volume pekerjaan USB SMKN 1 Banjar TA 2024 sebesar Rp139.498.512,00, serta pengembalian kelebihan volume pekerjaan bangunan gedung pendidikan (DAK) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali dan pengembalian dari perangkat daerah lainnya termasuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
l. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan dengan realisasi baru sebesar Rp316.697.652,55 pada TA 2025 seluruhnya bersumber dari pengembalian kekurangan volume pekerjaan ruas jalan provinsi TA 2024 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, antara lain ruas jalan Denpasar–Perang sebesar Rp86.462.758,00, ruas jalan Denpasar–Sanur sebesar Rp75.537.179,00, ruas jalan Tegaltamu–Payangan–Baturanyar Bangli sebesar Rp69.688.833,00, ruas jalan SP Penelokan–Bts Buleleng sebesar Rp43.398.973,00, dan ruas jalan Tegaltamu–Payangan sebesar Rp41.609.910,00:
m. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi memiliki persentase dengan penurunan signifikan sebesar (Rp17.982.914,52) pada TA 2025, tidak terdapat pengembalian pada jenis belanja dimaksud di tahun berjalan;
n. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota dengan realisasi baru sebesar Rp55.857.000,00 pada TA 2025 seluruhnya berasal dari satu transaksi pengembalian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Program Pengendalian Penduduk Pendatang TA 2024 dari Kota Denpasar;
o. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dengan kenaikan signifikan sebesar Rp63.885.000,00 pada TA 2025 bersumber dari pengembalian sisa dana BKK oleh berbagai desa penerima, dengan transaksi terbesar berupa pengembalian BKK Desa Adat Tista melalui Kejaksaan Negeri Buleleng sebesar Rp37.500.000,00, diikuti pengembalian BKK Tambahan Penghasilan Perbekel (TPP) dari Desa Peliatan sebesar Rp20.400.000,00 dan Desa Kekeran sebesar Rp17.700.000,00, serta pengembalian sisa BKK dari desa-desa lainnya; dan
p. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP belum optimal dengan realisasi baru sebesar Rp4.666,00 pada TA 2025.

5.1.1.1.4.10 Pendapatan BLUD

Berikut ini adalah Pendapatan BLUD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.10.1 Rincian Pendapatan BLUD

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	64.183.650.000,00	57.993.630.323,00	90,35	59.434.976.862,17
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	1.200.000.000,00	1.193.407.472,00	99,45	1.215.081.560,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	25.808.385.624,00	23.492.896.204,49	91,02	2.421.812.955,89
Jumlah	**91.192.035.624,00**	**82.679.933.999,49**	**90,66**	**63.071.871.378,06**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan BLUD TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp19.608.062.621,43 atau 31,09%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pendapatan BLUD TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan memiliki persentase capaian yang mendekati anggaran sebesar 90,35% pada TA 2025 dan realisasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terjadinya penyesuaian jumlah kegiatan pelatihan, pemanfaatan fasilitas, atau kunjungan dan penggunaan layanan pada masing-masing BLUD, sehingga penerimaan yang diperoleh menjadi relatif lebih rendah, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:
      1) Pada UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (PKSDM), penerimaan sebesar Rp21.080.074.500,00 berasal dari peningkatan okupansi fasilitas pendukung berupa aula, ruang belajar, ruang makan, kamar/VIP, ruang CAT/simulasi, CCTV, dan laboratorium yang disewakan kepada kabupaten/kota, lembaga/kampus, dan pihak swasta dengan 8.992 peserta pelatihan dan uji sertifikasi, yang bersumber dari kegiatan diklat, pelatihan kepemimpinan (PKN II, PKA, PKP), Latsar CPNS, pelatihan teknis/kompetensi PBJP, uji sertifikasi, orientasi PPPK, serta bimbingan teknis pendalaman tugas anggota DPRD;
      2) Pada UPTD Pengelolaan Air Minum (PAM), penerimaan sebesar Rp32.662.398.001,00 berasal dari pendapatan operasional layanan air minum, antara lain penerimaan dari penjualan atau penyaluran air kepada pelanggan, biaya layanan sambungan atau pemasangan baru, pemeliharaan dan penggantian atau perbaikan instalasi atau meter, serta penerimaan lain yang terkait dengan jasa pelayanan air minum;
      3) Pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat, penerimaan sebesar Rp3.221.661.635,00 berasal dari penyelenggaraan layanan pelatihan dan peningkatan kompetensi, termasuk penerimaan dari paket pelatihan atau bimtek, penggunaan sarana prasarana pelatihan (kelas, asrama, dan fasilitas penunjang), serta layanan lain yang terkait dengan program pelatihan kesehatan dan masyarakat; dan
      4) Pada Rumah Sakit Jiwa, penerimaan sebesar Rp1.029.496.187,00 berasal dari jasa layanan kesehatan, baik rawat jalan maupun rawat inap, termasuk layanan penunjang medis dan penerimaan lain yang terkait dengan pelayanan rumah sakit.
   b. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain memiliki persentase capaian yang mendekati anggaran sebesar 99,45% pada TA 2025. Penerimaan ini berasal dari RSUD Bali Mandara, penerimaan sebesar Rp1.193.407.472,00. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat optimalisasi pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain yang berjalan lebih intensif, baik dari sisi jumlah kegiatan maupun pemanfaatan fasilitas atau layanan rumah sakit, sehingga penerimaan yang diperoleh melampaui target. Penerimaan ini bersumber dari kerja sama pemanfaatan layanan parkir, penyelenggaraan studi banding, kegiatan penelitian, program magang atau praktik kerja, serta pelaksanaan *workshop*; dan
   c. Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah memiliki persentase capaian yang mendekati anggaran sebesar 91,02% dan realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024 dengan kenaikan signifikan sebesar Rp21.071.083.248,60. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat peningkatan penerimaan yang bersumber dari beberapa komponen, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.10.1.1 Rincian Pendapatan BLUD Menurut Perangkat Daerah

Perangkat Daerah / BLUD	Jasa Giro	Bunga	Komisi	Pengembangan Usaha
Dinas Kesehatan Provinsi Bali				
Rumah Sakit Jiwa	278.106.142,46	-	-	-
Rumah Sakit Mata Bali Mandara	241.425.753,07	632.973.744,26	-	429.436.450,00

Perangkat Daerah / BLUD	Jasa Giro	Bunga	Komisi	Pengembangan Usaha
RSUD Bali Mandara	237.129.841,05	-	3.919.446,00	-
RSU Dharma Yadnya	5.533.752,90	8.765.039,07	-	20.827.502.505,86
UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	55.272.162,55	-	-	-
UPTD Balai Laboratorium Kesehatan *Kerthi* Bali *Sadhajiwa*	140.366.862,04	-	-	33.190.000,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali				
UPTD Pengelolaan Air Limbah (PAL)	302.087.993,17	-	-	-
UPTD Pengelolaan Air Minum (PAM)	94.842.004,18	-	-	-
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali				
UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	202.344.507,88	-	-	-
Jumlah	**1.557.109.019,30**	**641.738.783,33**	**3.919.446,00**	**21.290.128.955,86**

Pada Rumah Sakit Dharma Yadnya yang belum menetapkan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Tarif Pelayanan Kesehatan, seluruh penerimaan retribusi pelayanan kesehatan TA 2025 dicatat sebagai Pendapatan BLUD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.10.1.1.1 Rincian Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya

Uraian	Tahun 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Pengelolaan BLUD dari Layanan	23.827.919.062,00	20.535.235.500,00	86,18
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas	-	-	-
Pendapatan Hasil Kerja Sama	-	221.665.564,00	-
Pendapatan Hibah	-	-	-
Pendapatan Lainnya	36.966.562,00	84.900.233,97	229,67
Jumlah	**23.864.885.624,00**	**20.841.801.297,97**	**87,33**

2. Pengenaan Pendapatan BLUD didasarkan atas:
   a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat;
   d. Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
   e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 49 Tahun 2025 tentang Detail Rincian Objek Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara.
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 4***.

5.1.1.1.4.11 Pungutan bagi Wisatawan Asing

Berikut ini adalah Pungutan bagi Wisatawan Asing yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.11.1 Rincian Pungutan bagi Wisatawan Asing

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pungutan bagi Wisatawan Asing	500.000.000.000,00	369.021.750.000,00	73,80	317.880.000.000,00
Jumlah	**500.000.000.000,00**	**369.021.750.000,00**	**73,80**	**317.880.000.000,00**

Tabel di atas menunjukkan Pungutan bagi Wisatawan Asing TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp51.141.750.000,00 atau 16,09%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pungutan bagi Wisatawan Asing TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pungutan bagi Wisatawan Asing memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 73,80% dengan realisasi sebesar Rp369.021.750.000,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Pemahaman dan kesadaran wisatawan asing untuk membayar *tourist levy* umumnya masih beragam, di mana sebagian wisatawan asing kemungkinan belum memperoleh informasi yang cukup sejak awal perjalanan, sehingga kesediaan untuk melakukan pembayaran belum merata;
      2) Dukungan operasional, termasuk penambahan tenaga tim *checker* atau penjaga operator, baru terlaksana pada November 2025, sehingga dampaknya terhadap peningkatan cakupan verifikasi dan pendampingan pembayaran belum sepenuhnya tercermin sepanjang TA 2025; dan
      3) Pelaksanaan kerja sama dengan penyedia akomodasi pariwisata masih belum merata atau menyeluruh, sehingga kanal fasilitasi pembayaran dan verifikasi belum menjangkau seluruh wisatawan asing.

      Walau demikian, realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024, yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp51.141.750.000,00 atau 16,09%. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Terdapat strategi pemungutan wisatawan asing yang lebih baik untuk menjaring lebih banyak wisatawan asing yang membayar pungutan ke Provinsi Bali sebagai berikut:
         a) Sebagai tindak lanjut atas evaluasi penyelenggaraan Pungutan bagi Wisatawan Asing TA 2024, Pemerintah Provinsi Bali menetapkan:
            (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, yang memperluas ruang lingkup pengaturan dengan memasukkan aspek kerja sama dan imbalan jasa. Ketentuan ini membuka peluang pelaksanaan pungutan melalui kerja sama dengan pihak lain sebagai *collecting agent*, mitra manfaat, atau *endpoint* yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama; dan
            (2) Keterlibatan pelaku usaha pariwisata yang bekerja sama dalam fasilitasi pengumpulan pungutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing, termasuk pengaturan pemberian imbalan jasa sebesar 3% atas pungutan yang difasilitasi oleh mitra manfaat dan *endpoint*, yang pada praktiknya dapat meningkatkan insentif serta kepatuhan mitra dalam mendukung penyampaian informasi dan fasilitasi pembayaran.
         b) Dilakukan perluasan titik layanan serta penguatan mekanisme pelayanan di area kedatangan internasional sehingga proses pemberian informasi awal, pengecekan bukti bayar, dan pendampingan transaksi dapat dilaksanakan pada lebih banyak titik dan rentang waktu layanan, yang berdampak pada meningkatnya peluang wisatawan asing untuk menyelesaikan pembayaran sejak awal kedatangan; dan
         c) Dimulainya pengoperasian dukungan personel tambahan pada bulan November 2025 turut menambah kapasitas layanan, sehingga mendukung kelancaran pelayanan dan berkontribusi pada peningkatan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya.

2) Terdapat peningkatan pada aspek dukungan sistem dan layanan pembayaran, antara lain:
   a) Penguatan tata cara pembayaran melalui pemanfaatan sistem Love Bali sebagai saluran pembayaran turut mendukung kemudahan akses transaksi, sehingga proses pembayaran bagi wisatawan asing terdokumentasi dengan lebih baik; dan
   b) Perluasan kerja sama dengan bank persepsi dalam rangka penyediaan alternatif kanal pembayaran *tourist levy* bagi wisatawan asing, sehingga pilihan metode pembayaran menjadi lebih beragam dan memudahkan wisatawan menyesuaikan dengan preferensi transaksi yang digunakan.

b. Penerimaan Pungutan bagi Wisatawan Asing menurut bulan dan jumlah pelimpahan pada TA 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.11.1.1 Rincian Pungutan bagi Wisatawan Asing Menurut Tanggal dan Jumlah Pelimpahan

No.	Tanggal Pelimpahan	Jumlah Pelimpahan
1	2 Januari - 31 Januari 2025	21.670.200.000,00
2	3 Februari - 28 Februari 2025	20.601.750.000,00
3	3 Maret - 27 Maret 2025	21.735.300.000,00
4	8 April - 30 April 2025	35.353.950.000,00
5	2 Mei - 28 Mei 2025	28.831.050.000,00
6	21 Mei 2025	130.350.000,00
7	2 Mei - 30 Juni 2025	39.812.400.000,00
8	1 Juli - 31 Juli 2025	42.045.750.000,00
9	1 Agustus - 29 Agustus 2025	37.806.600.000,00
10	1 September - 30 September 2025	39.121.500.000,00
11	1 Oktober - 31 Oktober 2025	32.000.400.000,00
12	3 November - 28 November 2025	2.1601.350.000,00
13	18 Desember 2025	4.350.000,00
14	1 Desember - 31 Desember 2025	28.306.800.000,00
	Jumlah	**369.021.750.000,00**

2. Pengenaan Pungutan bagi Wisatawan Asing didasarkan atas:
   a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali; dan
   b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing.
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pungutan bagi Wisatawan Asing dapat dilihat pada ***Lampiran 4***.

5.1.1.1.4.12 Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah

Berikut ini adalah Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.12.1 Rincian Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	85.577.461,00	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**85.577.461,00**	**0,00**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp85.577.461,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pendapatan Denda Pajak Daerah memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan realisasi sebesar Rp85.577.461,00 pada TA 2025 dan merupakan realisasi baru, di mana tidak terdapat realisasi pada TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat keterlambatan pembayaran PBBKB Bahan Bakar Solar pada Masa Pajak Bulan Januari 2025, sehubungan dengan pembayaran tersebut belum terkonfigurasi ke dalam sistem ERM Modul Pajak, sehingga proses pemenuhan kewajiban pajak mengalami keterlambatan dan menimbulkan pengenaan denda.
2. Pengenaan Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah didasarkan atas:
   a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
   b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 4***.

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Berikut ini adalah Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1 Rincian Pendapatan Transfer

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.403.777.640.000,00	2.379.317.000.326,00	98,98	2.283.418.060.237,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.825.690.369,00	34.825.690.369,00	100,00	0,00
Jumlah	**2.438.603.330.369,00**	**2.414.142.690.695,00**	**98,99**	**2.283.418.060.237,00**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Transfer TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp130.724.630.458,00 atau 5,72%. Komposisi realisasi Pendapatan Transfer pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2025 ditunjukkan pada Gambar 5.4.

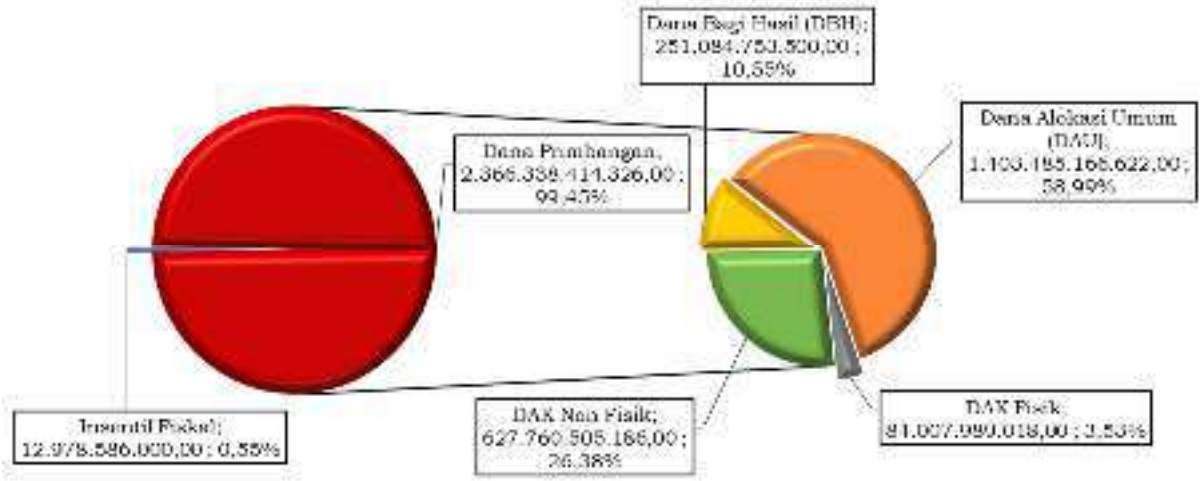

Gambar 5.4 Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2025

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Berikut ini adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1.1 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	2.260.260.706.237,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	244.948.196.000,00	251.084.753.500,00	102,50	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.401.748.162.000,00	1.403.485.166.622,00	100,12	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	744.102.696.000,00	711.768.494.204,00	95,65	0,00
Insentif Fiskal	12.978.586.000,00	12.978.586.000,00	100,00	23.157.354.000,00
Jumlah	**2.403.777.640.000,00**	**2.379.317.000.326,00**	**98,98**	**2.283.418.060.237,00**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp95.898.940.089,00 atau 4,20%.

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Berikut ini adalah Dana Perimbangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1.1.1 Rincian Dana Perimbangan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	190.545.491.110,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	1.367.677.271.075,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	87.240.500.926,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	614.797.443.126,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.260.260.706.237,00**

Tabel di atas menunjukkan Dana Perimbangan TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp2.260.260.706.237,00) atau -100,00%, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap struktur Bagan Akun Standar (BAS), diketahui telah terjadi perubahan nomenklatur akun pada kelompok Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat ke Daerah Provinsi. Perubahan tersebut merupakan implikasi dari penerapan standar klasifikasi dan kodefikasi akun keuangan daerah sebagaimana diatur dalam regulasi Pemerintah;
2. Perubahan tersebut meliputi reklasifikasi akun dari kelompok pendapatan lama ke dalam kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dengan penyesuaian struktur kode akun dan nomenklatur sesuai standar BAS terbaru yang bertujuan untuk menjamin konsistensi pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan pendapatan transfer pusat dalam sistem akuntansi pemerintah daerah; dan
3. Perbedaan nomenklatur akun antara periode sebelum dan sesudah penyesuaian BAS bukan merupakan kesalahan pencatatan, melainkan merupakan akibat langsung dari perubahan kebijakan klasifikasi akun sesuai regulasi yang berlaku.

5.1.1.2.1.1.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Berikut ini adalah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1.1.1.1 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	1.727.208.000,00
DBH PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00	174.347.552.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	13.637.455.000,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	831.422.110,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00	1.854.000,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.545.491.110,00**

Tabel di atas menunjukkan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp190.545.491.110,00) atau -100,00%. Penjelasan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2025 disajikan pada:

1. **DBH Pajak *Poin 5.1.1.2.1.2.1***; dan
2. **DBH Sumber Daya Alam *Poin 5.1.1.2.1.2.2***.

5.1.1.2.1.1.2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Berikut ini adalah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1.1.2.1 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAU	0,00	0,00	0,00	1.278.810.466.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	0,00	0,00	68.549.360.075,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	7.853.643.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	12.463.802.000,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.367.677.271.075,00**

Tabel di atas menunjukkan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp1.367.677.271.075,00) atau -100,00%. Penjelasan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2025 disajikan pada:

1. **DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya *Poin 5.1.1.2.1.3.1***; dan
2. **DAU yang Ditentukan Penggunaannya *Poin 5.1.1.2.1.3.2***.

5.1.1.2.1.1.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Berikut ini adalah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1.1.3.1 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	0,00	0,00	0,00	16.877.975.100,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	0,00	0,00	0,00	30.394.505.247,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	5.000.023.469,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	3.095.838.636,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	15.293.067.738,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	11.007.204.150,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	4.123.353.000,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	0,00	0,00	0,00	1.448.533.586,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.240.500.926,00**

Tabel di atas menunjukkan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp87.240.500.926,00) atau -100,00%. Penjelasan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2025 disajikan pada **DAK Fisik *Poin 5.1.1.2.1.4.1***.

5.1.1.2.1.1.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Berikut ini adalah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1.1.4.1 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	344.752.312.593,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	5.638.750.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	242.031.199.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	3.996.750.000,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	0,00	0,00	0,00	3.727.225.999,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	0,00	0,00	0,00	1.959.778.106,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	1.177.945.000,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	302.021.450,00
DAK Non Fisik-PK2UMK	0,00	0,00	0,00	8.458.820.306,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	0,00	0,00	0,00	2.752.640.672,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614.797.443.126,00**

Tabel di atas menunjukkan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp614.797.443.126,00) atau -100,00%. Penjelasan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2025 disajikan pada **DAK Non Fisik *Poin 5.1.1.2.1.4.2***.

5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil (DBH)

Berikut ini adalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1.2.1 Rincian Dana Bagi Hasil (DBH)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DBH Pajak	244.945.208.000,00	251.058.696.500,00	102,49	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA)	2.988.000,00	26.057.000,00	872,05	0,00
Jumlah	**244.948.196.000,00**	**251.084.753.500,00**	**102,50**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp251.084.753.500,00 atau 0,00%.

5.1.1.2.1.2.1 DBH Pajak

Berikut ini adalah DBH Pajak yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1.2.1.1 Rincian DBH Pajak

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DBH PBB	1.428.472.000,00	1.367.044.800,00	95,69	0,00
DBH PPh Pasal 21	226.939.104.000,00	231.273.570.600,00	101,90	0,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	15.779.569.000,00	17.565.604.100,00	111,31	0,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	798.063.000,00	852.477.000,00	106,81	0,00
Jumlah	**244.945.208.000,00**	**251.058.696.500,00**	**102,49**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan DBH Pajak TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp251.058.696.500,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi DBH Pajak TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. DBH PBB dengan realisasi baru sebesar Rp1.367.044.800,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DBH PBB pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp1.727.208.000,00, realisasi DBH PBB TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp360.163.200,00 atau 20,85%;

2) Realisasi DBH PBB TA 2025 sebesar Rp1.367.044.800,00 tidak mencapai pagu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.428.472.000,00 dengan selisih kurang sebesar Rp61.427.200,00. Realisasi yang diterima Pemerintah Provinsi Bali tersebut terdiri dari:
   a) Penyaluran reguler TA 2025 oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp1.285.624.800,00 yang disalurkan dalam 6 (enam) periode penyaluran, masing-masing sebesar Rp142.847.200,00 untuk periode Februari dan Desember, Rp214.270.800,00 untuk periode April dan Juni, serta Rp285.694.400,00 untuk periode Agustus dan Oktober;
   b) Penyaluran Kurang Bayar s.d. TA 2023 oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 sebesar Rp47.525.000,00 yang disalurkan pada tanggal 12 Agustus 2025;
   c) Pencairan Pokok *Treasury Deposit Facility* (TDF) TA 2024 sebesar Rp33.895.000,00 yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 11 April 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility, sebagai pencairan atas penempatan DBH PBB yang sebelumnya disalurkan secara nontunai oleh Pemerintah Pusat ke rekening TDF Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2024.

3) Tidak tercapainya pagu disebabkan Pemerintah Pusat melakukan penyaluran DBH PBB berdasarkan realisasi penerimaan PBB tahun berjalan yang lebih rendah dari prognosa yang menjadi dasar penetapan pagu, di luar kewenangan Pemerintah Provinsi Bali. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 telah menetapkan dan mengakui bahwa masih terdapat Kurang Bayar DBH PBB yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan TA 2024 sebesar Rp666.662.000,00, yang terdiri dari sisa Kurang Bayar sampai dengan TA 2023 sebesar Rp62.868.000,00 dan Kurang Bayar TA 2024 sebesar Rp603.794.000,00. Dari total Kurang Bayar tersebut, Pemerintah Pusat baru menyalurkan sebesar Rp47.525.000,00 pada TA 2025 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, sehingga masih terdapat sisa Kurang Bayar sebesar Rp619.137.000,00 yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Bali dan akan disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun-tahun berikutnya.

b. DBH PPh Pasal 21 dengan realisasi baru sebesar Rp231.273.570.600,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DBH PPh Pasal 21 pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp174.347.552.000,00, realisasi DBH PPh Pasal 21 TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp56.926.018.600,00 atau 32,65%;
   2) Realisasi yang diterima Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp231.273.570.600,00 terdiri dari:
      a) Penyaluran reguler TA 2025 oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp210.605.274.600,00 yang disalurkan dalam 6 (enam) periode penyaluran, masing-masing sebesar Rp22.693.910.400,00 untuk periode Februari dan Desember, Rp34.040.865.600,00 untuk periode April dan Juni, serta Rp45.387.820.800,00 untuk periode Agustus dan Oktober;
      b) Penyaluran Kurang Bayar s.d. TA 2023 oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 sebesar Rp20.668.296.000,00 yang disalurkan pada tanggal 12 Agustus 2025; dan
      c) Pencairan Pokok TDF TA 2024 sebesar Rp6.360.081.000,00 yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 11 April 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Non Tunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility sebagai pencairan atas penempatan DBH PPh Pasal 21 yang sebelumnya disalurkan secara nontunai oleh Pemerintah Pusat ke rekening TDF Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2024.

3) Realisasi TA 2025 melampaui anggaran karena adanya komponen Kurang Bayar dan pencairan Pokok TDF yang tidak diperhitungkan dalam penetapan pagu, Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 telah menetapkan dan mengakui bahwa masih terdapat Kurang Bayar DBH PPh Pasal 21 yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan TA 2024 sebesar Rp157.816.257.000,00, yang terdiri dari sisa Kurang Bayar sampai dengan TA 2023 sebesar Rp27.341.028.000,00 dan Kurang Bayar TA 2024 sebesar Rp130.475.229.000,00. Dari total Kurang Bayar tersebut, Pemerintah Pusat baru menyalurkan sebesar Rp20.668.296.000,00 pada TA 2025 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, sehingga masih terdapat sisa Kurang Bayar sebesar Rp137.147.961.000,00 yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Bali dan akan disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun-tahun berikutnya.

c. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN dengan realisasi baru sebesar Rp17.565.604.100,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp13.637.455.000,00, realisasi DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp3.928.149.100,00 atau 28,80%;

   2) Realisasi yang diterima Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp17.565.604.100,00 terdiri dari:
      a) Penyaluran reguler TA 2025 oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp15.601.993.100,00 yang disalurkan dalam 6 (enam) periode penyaluran, masing-masing sebesar Rp1.577.956.900,00 untuk periode Februari dan Desember, Rp2.366.935.350,00 untuk periode April dan Juni, serta Rp3.155.913.800,00 untuk periode Agustus dan Oktober;
      b) Penyaluran Kurang Bayar s.d. TA 2023 oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 sebesar Rp1.963.611.000,00 yang disalurkan pada tanggal 12 Agustus 2025; dan
      c) Pencairan Pokok TDF TA 2024 sebesar Rp1.400.381.000,00 yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 11 April 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Non Tunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility, sebagai pencairan atas penempatan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN yang sebelumnya disalurkan secara nontunai oleh Pemerintah Pusat ke rekening TDF Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2024.
   3) Realisasi TA 2025 melampaui anggaran karena adanya komponen Kurang Bayar dan pencairan Pokok TDF yang tidak diperhitungkan dalam penetapan pagu, Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 telah menetapkan dan mengakui bahwa masih terdapat Kurang Bayar DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan TA 2024 sebesar Rp21.313.495.000,00, yang terdiri dari sisa Kurang Bayar sampai dengan TA 2023 sebesar Rp2.597.560.000,00 dan Kurang Bayar TA 2024 sebesar Rp18.715.935.000,00. Dari total Kurang Bayar tersebut, Pemerintah Pusat baru menyalurkan sebesar Rp1.963.611.000,00 pada TA 2025 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, sehingga masih terdapat sisa Kurang Bayar sebesar Rp19.349.884.000,00 yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Bali dan akan disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun-tahun berikutnya.

d. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 106,81% dengan realisasi baru sebesar Rp852.477.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DBH CHT pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp831.422.110,00, realisasi DBH CHT TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp21.054.890,00 atau 2,53%;

2) Realisasi yang diterima Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp852.477.000,00 terdiri dari penyaluran reguler TA 2025 oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp798.063.000,00 yang disalurkan dalam 6 (enam) periode penyaluran, masing-masing sebesar Rp79.806.300,00 untuk periode Februari, Rp119.709.450,00 untuk periode April dan Juni, serta Rp159.612.600,00 untuk periode Agustus, Oktober, dan Desember, serta penyaluran Kurang Bayar sampai dengan TA 2023 oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 sebesar Rp54.414.000,00 yang disalurkan pada tanggal 12 Agustus 2025. Tidak terdapat komponen pencairan Pokok TDF pada DBH CHT TA 2025 dikarenakan tidak terdapat saldo TDF DBH CHT pada TA 2024 yang ditempatkan di rekening TDF Pemerintah Provinsi Bali; dan
3) Realisasi TA 2025 melampaui anggaran dikarenakan adanya komponen Kurang Bayar dan pencairan Pokok TDF yang tidak diperhitungkan dalam penetapan pagu, Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 telah menetapkan dan mengakui bahwa masih terdapat Kurang Bayar DBH CHT yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan TA 2024 sebesar Rp302.145.000,00, yang terdiri dari sisa Kurang Bayar sampai dengan TA 2023 sebesar Rp71.981.000,00 dan Kurang Bayar TA 2024 sebesar Rp230.164.000,00. Dari total Kurang Bayar tersebut, Pemerintah Pusat baru menyalurkan sebesar Rp54.414.000,00 pada TA 2025 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, sehingga masih terdapat sisa Kurang Bayar sebesar Rp247.731.000,00 yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Bali dan akan disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun-tahun berikutnya.

5.1.1.2.1.2.2 DBH Sumber Daya Alam (SDA)

Berikut ini adalah DBH Sumber Daya Alam (SDA) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1.2.2.1 Rincian DBH Sumber Daya Alam (SDA)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	1.612.000,00	3.545.000,00	219,91	0,00
DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	690.000,00	16.946.000,00	2.455,94	0,00
DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	5.566.000,00	0,00	0,00
DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	686.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**2.988.000,00**	**26.057.000,00**	**872,05**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan DBH Sumber Daya Alam (SDA) TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp26.057.000,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 219,91% dengan realisasi baru sebesar Rp3.545.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut
      1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp1.854.000,00, realisasi DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.691.000,00 atau 91,21%;
      2) Realisasi yang diterima Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp3.545.000,00 terdiri dari:
         a) Penyaluran reguler TA 2025 oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp1.612.000,00;
         b) Penyaluran Kurang Bayar sampai dengan TA 2023 oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar

Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 sebesar Rp1.128.000,00 yang disalurkan pada tanggal 12 Agustus 2025; dan

c) Pencairan Pokok TDF TA 2024 sebesar Rp805.000,00 yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 11 April 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Non Tunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility, sebagai pencairan atas penempatan DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent yang sebelumnya disalurkan secara nontunai oleh Pemerintah Pusat ke rekening TDF Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2024;

d) Realisasi TA 2025 melampaui anggaran karena adanya komponen Kurang Bayar dan pencairan Pokok TDF yang tidak diperhitungkan dalam penetapan pagu. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 telah menetapkan dan mengakui bahwa masih terdapat Kurang Bayar DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan TA 2024 sebesar Rp1.699.000,00, yang terdiri dari sisa Kurang Bayar sampai dengan TA 2023 sebesar Rp1.492.000,00 dan Kurang Bayar TA 2024 sebesar Rp207.000,00. Dari total Kurang Bayar tersebut, Pemerintah Pusat baru menyalurkan sebesar Rp1.128.000,00 pada TA 2025 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, sehingga masih terdapat sisa Kurang Bayar sebesar Rp571.000,00 yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Bali dan akan disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun-tahun berikutnya.

b. DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 2.455,94% dengan realisasi baru sebesar Rp16.946.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DBH SDA Kehutanan-PSDH pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Tidak terdapat realisasi pada kode rekening sebelumnya di TA 2024 sehingga seluruh realisasi TA 2025 merupakan penerimaan baru;
2) Realisasi yang diterima Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp16.946.000,00 terdiri dari:
   a) Penyaluran reguler TA 2025 oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp690.000,00;
   b) Penyaluran Kurang Bayar sampai dengan TA 2023 oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 sebesar Rp9.489.000,00 yang disalurkan pada tanggal 12 Agustus 2025;
   c) Pencairan Pokok TDF TA 2024 sebesar Rp6.767.000,00 yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 11 April 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Non Tunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility, sebagai pencairan atas penempatan DBH SDA Kehutanan-PSDH yang sebelumnya disalurkan secara nontunai oleh Pemerintah Pusat ke rekening TDF Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2024;
3) Realisasi TA 2025 melampaui anggaran dikarenakan adanya komponen Kurang Bayar dan pencairan Pokok TDF yang tidak diperhitungkan dalam penetapan pagu. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 telah menetapkan dan mengakui bahwa masih terdapat Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan-PSDH yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan TA 2024 sebesar Rp20.062.000,00, yang terdiri dari sisa Kurang Bayar sampai dengan TA 2023 sebesar Rp12.552.000,00 dan Kurang Bayar TA 2024 sebesar Rp7.510.000,00. Dari total Kurang Bayar tersebut, Pemerintah Pusat baru menyalurkan sebesar Rp9.489.000,00 pada TA 2025 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, sehingga masih terdapat sisa Kurang Bayar sebesar Rp10.573.000,00 yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Bali dan akan disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun-tahun berikutnya.

c. DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) memiliki persentase capaian sebesar 0,00% dengan realisasi baru sebesar Rp5.566.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DBH SDA Kehutanan-IIUPH pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Tidak terdapat anggaran maupun realisasi pada kode rekening sebelumnya di TA 2024 sehingga seluruh realisasi TA 2025 merupakan penerimaan baru;
   2) Realisasi yang diterima Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp5.566.000,00 terdiri dari:
      a) Pencairan Pokok TDF TA 2024 sebesar Rp2.317.000,00 yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 11 April 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Non Tunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility, sebagai pencairan atas penempatan DBH SDA Kehutanan-IIUPH yang sebelumnya disalurkan secara nontunai oleh Pemerintah Pusat ke rekening TDF Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2024; dan
      b) Penyaluran Kurang Bayar sampai dengan TA 2023 oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 sebesar Rp3.249.000,00 yang disalurkan pada tanggal 12 Agustus 2025;
   3) Persentase capaian tercatat 0,00% dikarenakan tidak terdapat anggaran yang ditetapkan pada rekening ini, namun demikian terdapat realisasi penerimaan dari komponen TDF dan Kurang Bayar sebagaimana tersebut di atas. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 telah menetapkan dan mengakui bahwa masih terdapat Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan-IIUPH yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan TA 2024 sebesar Rp4.298.000,00, yang seluruhnya merupakan sisa Kurang Bayar sampai dengan TA 2023. Dari total Kurang Bayar tersebut, Pemerintah Pusat baru menyalurkan sebesar Rp3.249.000,00 pada TA 2025 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, sehingga masih terdapat sisa Kurang Bayar sebesar Rp1.049.000,00 yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Bali dan akan disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun-tahun berikutnya.

d. DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tidak terdapat realisasi DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) pada TA 2025 meskipun telah dianggarkan sebesar Rp686.000,00. Tidak terdapat realisasi pada kode rekening sebelumnya di TA 2024 maupun komponen TDF yang ditempatkan atas DBH SDA Kehutanan-DR, sehingga seluruh penyebab tidak terealisasinya anggaran bersumber dari belum adanya penyaluran oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 telah menetapkan dan mengakui bahwa terdapat Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan-DR yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan TA 2024 sebesar Rp762.000,00 yang seluruhnya merupakan Kurang Bayar TA 2024. Pemerintah Pusat tidak menyalurkan DBH SDA Kehutanan-DR pada TA 2025 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, sehingga seluruh saldo Kurang Bayar sebesar Rp762.000,00 tersebut merupakan hak Pemerintah Provinsi Bali yang akan disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun-tahun berikutnya.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Berikut ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1.3.1 Rincian Dana Alokasi Umum (DAU)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	1.226.822.935.000,00	1.226.100.162.762,00	99,94	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya	174.925.227.000,00	177.385.003.860,00	101,40	0,00
Jumlah	**1.401.748.162.000,00**	**1.403.485.166.622,00**	**100,12**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp1.403.485.166.622,00 atau 0,00%.

5.1.1.2.1.3.1 DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya

Berikut ini adalah DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1.3.1.1 Rincian DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAU	1.226.822.935.000,00	1.226.100.162.762,00	99,94	0,00
Jumlah	**1.226.822.935.000,00**	**1.226.100.162.762,00**	**99,94**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp1.226.100.162.762,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. DAU dengan realisasi baru sebesar Rp1.226.100.162.762,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp1.278.810.466.000,00, realisasi DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp52.710.303.238,00 atau -4,12%. Penurunan tersebut merupakan dampak dari penyesuaian besaran alokasi DAU Provinsi Bali pada TA 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025; dan
      2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp1.226.100.162.762,00 tidak mencapai anggaran sebesar Rp1.226.822.935.000,00 dengan selisih sebesar Rp722.772.238,00 atau 0,06%. Hal ini dikarenakan penyesuaian dalam mekanisme penyaluran DAU oleh Pemerintah Pusat yang mempertimbangkan realisasi penerimaan negara sepanjang tahun anggaran berjalan.

5.1.1.2.1.3.2 DAU yang Ditentukan Penggunaannya

Berikut ini adalah DAU yang Ditentukan Penggunaannya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1.3.2.1 Rincian DAU yang Ditentukan Penggunaannya

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	91.327.186.000,00	93.786.962.860,00	102,69	0,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	83.598.041.000,00	83.598.041.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**174.925.227.000,00**	**177.385.003.860,00**	**101,40**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan DAU yang Ditentukan Penggunaannya TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp177.385.003.860,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan realisasi baru sebesar Rp93.786.962.860,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp68.549.360.075,00, realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp25.237.602.785,00 atau 36,82%. Peningkatan tersebut sejalan dengan bertambahnya jumlah PPPK yang telah diangkat dan aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2025; dan
      2) Realisasi TA 2025 melampaui anggaran sebesar Rp91.327.186.000,00 dengan selisih lebih sebesar Rp2.459.776.860,00 atau 2,69%. Kelebihan realisasi tersebut disebabkan adanya penyaluran tambahan dari Pemerintah Pusat yang memperhitungkan kebutuhan riil pembayaran gaji PPPK daerah sepanjang tahun anggaran berjalan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.
   2. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan dengan realisasi baru sebesar Rp83.598.041.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp7.853.643.000,00, realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp75.744.398.000,00 atau 964,45%. Peningkatan yang signifikan tersebut mencerminkan kebijakan Pemerintah Pusat dalam memperluas cakupan dan meningkatkan besaran alokasi DAU Bidang Pendidikan untuk Provinsi Bali pada TA 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025; dan
      2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp83.598.041.000,00 mencapai 100,00% dari anggaran, mencerminkan penyerapan yang optimal sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berikut ini adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1.4.1 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik	90.134.667.000,00	84.007.989.018,00	93,20	0,00
DAK Non Fisik	653.968.029.000,00	627.760.505.186,00	95,99	0,00
Jumlah	**744.102.696.000,00**	**711.768.494.204,00**	**95,65**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp711.768.494.204,00.

5.1.1.2.1.4.1 DAK Fisik

Berikut ini adalah DAK Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1.4.1.1 Rincian DAK Fisik

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	395.186.000,00	394.381.253,00	99,79	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	47.705.577.000,00	47.564.269.965,00	99,70	0,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	15.638.212.500,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	18.128.137.000,00	16.387.013.262,00	90,39	0,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar	19.773.748.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak	4.132.019.000,00	4.024.112.038,00	97,38	0,00
Jumlah	**90.134.667.000,00**	**84.007.989.018,00**	**93,20**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan DAK Fisik TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp84.007.989.018,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi DAK Fisik TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA dengan realisasi baru sebesar Rp394.381.253,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp16.877.975.100,00, realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp16.483.593.847,00 atau -97,68%. Penurunan tersebut disebabkan oleh penyesuaian alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMA untuk Provinsi Bali pada TA 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025; dan
      2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp394.381.253,00 mencapai 99,79% dari anggaran sebesar Rp395.186.000,00, mencerminkan tingkat penyerapan yang sangat optimal atas alokasi yang telah ditetapkan.
   b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK dengan realisasi baru sebesar Rp47.564.269.965,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp30.394.505.247,00, realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp17.169.764.718,00 atau 56,49%. Peningkatan tersebut mencerminkan kebijakan Pemerintah Pusat dalam meningkatkan alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan Penugasan SMK untuk Provinsi Bali pada TA 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025; dan
      2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp47.564.269.965,00 mencapai 99,70% dari anggaran sebesar Rp47.705.577.000,00, mencerminkan tingkat penyerapan yang sangat optimal atas alokasi yang telah ditetapkan.
   c. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan realisasi baru sebesar Rp15.638.212.500,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Pada TA 2024, tidak terdapat realisasi DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler berdasarkan kode rekening

sebelumnya, sehingga realisasi TA 2025 sebesar Rp15.638.212.500,00 merupakan penerimaan perdana atas alokasi DAK Fisik bidang tersebut; dan

2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp15.638.212.500,00 melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00 dikarenakan terdapat penyaluran DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler oleh Pemerintah Pusat yang merupakan penyelesaian atas sisa penyaluran tahun sebelumnya yang belum sepenuhnya disalurkan, sementara alokasi DAK Fisik-Bidang Air Minum untuk TA 2025 dialokasikan pada sub-bidang Layanan Dasar sebesar Rp19.773.748.000,00 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.

d. DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan dengan realisasi baru sebesar Rp16.387.013.262,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan gabungan realisasi TA 2024 pada kode rekening sebelumnya yang mencakup DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB sebesar Rp5.000.023.469,00 dan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan sebesar Rp4.123.353.000,00 dengan total sebesar Rp9.123.376.469,00, realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp7.263.636.793,00 atau 79,62%. Peningkatan tersebut mencerminkan penguatan alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan untuk Provinsi Bali pada TA 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025; dan
   2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp16.387.013.262,00 mencapai 90,39% dari anggaran sebesar Rp18.128.137.000,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp1.741.123.738,00 atau 9,60%. Belum optimalnya penyerapan tersebut disebabkan oleh kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan sehingga sebagian kegiatan tidak dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran.

e. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar memiliki persentase capaian sebesar 0,00% pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Pada TA 2024, tidak terdapat realisasi DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar berdasarkan kode rekening sebelumnya; dan
   2) Realisasi DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar TA 2025 menunjukkan nilai Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp19.773.748.000,00. Tidak terdapat realisasi pada bidang ini dikarenakan penyaluran DAK Fisik-Bidang Air Minum oleh Pemerintah Pusat pada TA 2025 seluruhnya tersalurkan melalui kode rekening DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler sebesar Rp15.638.212.500,00 yang merupakan penyelesaian atas sisa penyaluran tahun sebelumnya, sehingga penyaluran atas alokasi Layanan Dasar TA 2025 belum dapat terealisasi hingga akhir tahun anggaran.

f. DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak dengan realisasi baru sebesar Rp4.024.112.038,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Pada TA 2024, tidak terdapat realisasi DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan kode rekening sebelumnya, sehingga realisasi TA 2025 sebesar Rp4.024.112.038,00 merupakan penerimaan perdana atas alokasi DAK Fisik bidang tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025; dan
   2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp4.024.112.038,00 mencapai 97,38% dari anggaran sebesar Rp4.132.019.000,00, mencerminkan tingkat penyerapan yang sangat optimal atas alokasi yang telah ditetapkan.

5.1.1.2.1.4.2 DAK Non Fisik

Berikut ini adalah DAK Non Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1.4.2.1 Rincian DAK Non Fisik

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Non Fisik-BOS Reguler	353.029.490.000,00	346.838.606.116,00	98,24	0,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	5.719.000.000,00	5.719.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	280.872.927.000,00	263.281.297.426,00	93,73	0,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.084.180.000,00	1.088.490.000,00	52,22	0,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	4.596.891.000,00	4.101.958.564,00	89,23	0,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.300.500.000,00	2.208.487.060,00	96,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.707.426.000,00	4.002.268.020,00	85,02	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	263.443.000,00	65,75	0,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	199.955.000,00	199.955.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian	0,00	57.000.000,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**653.968.029.000,00**	**627.760.505.186,00**	**95,99**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan DAK Non Fisik TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp627.760.505.186,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi DAK Non Fisik TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. DAK Non Fisik-BOS Reguler dengan realisasi baru sebesar Rp346.838.606.116,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Non Fisik-BOS Reguler pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp344.752.312.593,00, realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp2.086.293.523,00 atau 0,61%. Peningkatan tersebut mencerminkan penyesuaian alokasi BOS Reguler untuk Provinsi Bali pada TA 2025 yang mempertimbangkan perkembangan jumlah peserta didik; dan
      2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp346.838.606.116,00 mencapai 98,24% dari anggaran sebesar Rp353.029.490.000,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp6.190.883.884,00 atau 1,75%. Penyerapan tersebut disebabkan adanya penyesuaian dalam mekanisme penyaluran BOS Reguler oleh Pemerintah Pusat yang memperhitungkan realisasi jumlah peserta didik aktif pada masing-masing sekolah penerima.
   b. DAK Non Fisik-BOS Kinerja dengan realisasi baru sebesar Rp5.719.000.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Non Fisik-BOS Kinerja pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp5.638.750.000,00, realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp80.250.000,00 atau 1,42%. Peningkatan tersebut mencerminkan bertambahnya jumlah sekolah yang memenuhi kriteria kinerja sebagai penerima BOS Kinerja pada TA 2025; dan
      2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp5.719.000.000,00 mencapai 100,00% dari anggaran sebesar Rp5.719.000.000,00, mencerminkan tingkat penyerapan yang sempurna atas alokasi yang telah ditetapkan.

c. DAK Non Fisik-TPG PNSD dengan realisasi baru sebesar Rp263.281.297.426,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Non Fisik-TPG PNSD pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp242.031.199.000,00, realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp21.250.098.426,00 atau 8,78%. Peningkatan tersebut sejalan dengan bertambahnya jumlah guru PNSD bersertifikasi yang berhak menerima tunjangan profesi pada TA 2025; dan
   2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp263.281.297.426,00 mencapai 93,73% dari anggaran sebesar Rp280.872.927.000,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp17.591.629.574,00 atau 6,26%. Belum optimalnya penyerapan tersebut disebabkan adanya guru PNSD penerima TPG yang mengalami perubahan status kepegawaian, mutasi, atau kondisi lainnya sepanjang tahun anggaran berjalan sehingga penyaluran tidak dapat dilakukan secara penuh.

d. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 52,22% dengan realisasi baru sebesar Rp1.088.490.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp3.996.750.000,00, realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.908.260.000,00 atau -72,77%. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya jumlah guru PNSD yang memenuhi kriteria penerima tambahan penghasilan pada TA 2025 seiring dengan peralihan sebagian guru berstatus PNSD menjadi PPPK; dan
   2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp1.088.490.000,00 baru mencapai 52,22% dari anggaran sebesar Rp2.084.180.000,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp995.690.000,00 atau 47,77%. Belum optimalnya penyerapan tersebut disebabkan adanya penyesuaian data guru PNSD penerima Tamsil sepanjang tahun anggaran berjalan, sehingga penyaluran oleh Pemerintah Pusat tidak dapat dilakukan secara penuh sesuai pagu yang telah ditetapkan.

e. DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum dengan realisasi baru sebesar Rp4.101.958.564,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp3.727.225.999,00, realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp374.732.565,00 atau 10,05%. Peningkatan tersebut mencerminkan penyesuaian alokasi BOP Museum untuk Provinsi Bali pada TA 2025; dan
   2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp4.101.958.564,00 mencapai 89,23% dari anggaran sebesar Rp4.596.891.000,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp494.932.436,00 atau 10,77%. Belum optimalnya penyerapan tersebut disebabkan adanya penyesuaian dalam mekanisme penyaluran BOP Museum oleh Pemerintah Pusat yang mempertimbangkan realisasi kegiatan operasional museum sepanjang tahun anggaran berjalan.

f. DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya dengan realisasi baru sebesar Rp2.208.487.060,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp1.959.778.106,00, realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp248.708.954,00 atau 12,69%. Peningkatan tersebut mencerminkan penyesuaian alokasi BOP Taman Budaya untuk Provinsi Bali pada TA 2025; dan
   2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp2.208.487.060,00 mencapai 96,00% dari anggaran sebesar Rp2.300.500.000,00, mencerminkan tingkat penyerapan yang sangat optimal atas alokasi yang telah ditetapkan

g. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK dengan realisasi baru sebesar Rp4.002.268.020,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Non Fisik-BOKKB-BOK pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya yang mencakup DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi sebesar Rp2.752.640.672,00, realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.249.627.348,00 atau 45,40%. Peningkatan tersebut

mencerminkan perluasan cakupan kegiatan kesehatan masyarakat yang dibiayai melalui BOK pada TA 2025; dan

2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp4.002.268.020,00 mencapai 85,02% dari anggaran sebesar Rp4.707.426.000,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp705.157.980,00 atau 14,98%. Belum optimalnya penyerapan tersebut disebabkan adanya kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat di lapangan sehingga sebagian kegiatan tidak dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran.

h. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 65,75% dengan realisasi baru sebesar Rp263.443.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 berdasarkan kode rekening sebelumnya sebesar Rp302.021.450,00, realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp38.578.450,00 atau -12,77%; dan
   2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp263.443.000,00 baru mencapai 65,75% dari anggaran sebesar Rp400.660.000,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp137.217.000,00 atau 34,25%. Belum optimalnya penyerapan tersebut disebabkan adanya penyesuaian dalam mekanisme penyaluran oleh Pemerintah Pusat yang mempertimbangkan realisasi kegiatan pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang telah dilaksanakan sepanjang tahun anggaran berjalan.

i. DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana dengan realisasi baru sebesar Rp199.955.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Pada TA 2024, tidak terdapat realisasi dengan nomenklatur yang sama berdasarkan kode rekening sebelumnya, sehingga realisasi TA 2025 sebesar Rp199.955.000,00 merupakan penerimaan perdana atas alokasi DAK Non Fisik bidang tersebut; dan
   2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp199.955.000,00 mencapai 100,00% dari anggaran sebesar Rp199.955.000,00, mencerminkan tingkat penyerapan yang sempurna atas alokasi yang telah ditetapkan.

j. DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian memiliki persentase capaian sebesar 0,00% dengan realisasi baru sebesar Rp57.000.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Terdapat perubahan penggunaan kode rekening pada aplikasi SIPD RI sehingga realisasi DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Pada TA 2024, tidak terdapat realisasi dengan nomenklatur yang sama berdasarkan kode rekening sebelumnya; dan
   2) Realisasi TA 2025 sebesar Rp57.000.000,00 melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00 dikarenakan terdapat penyaluran DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian oleh Pemerintah Pusat yang merupakan penyelesaian atas sisa penyaluran tahun sebelumnya, sementara alokasi untuk TA 2025 telah dialihkan pada kode rekening DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian sebesar Rp57.000.000,00

k. DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian pada TA 2025 tercatat sebagai realisasi baru. Pada TA 2024, tidak terdapat realisasi dengan nomenklatur yang sama berdasarkan kode rekening sebelumnya; dan
   2) Realisasi DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian TA 2025 menunjukkan nilai Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp57.000.000,00. Tidak terdapat realisasi pada komponen ini dikarenakan penyaluran DAK Non Fisik bidang pertanian oleh Pemerintah Pusat pada TA 2025 seluruhnya tersalurkan melalui kode rekening DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian sebesar Rp57.000.000,00 yang merupakan penyelesaian atas sisa penyaluran tahun sebelumnya, sehingga penyaluran atas alokasi Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian TA 2025 belum dapat terealisasi hingga akhir tahun anggaran.

5.1.1.2.1.5 Insentif Fiskal

Berikut ini adalah Insentif Fiskal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1.5.1 Rincian Insentif Fiskal

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	23.157.354.000,00
Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	12.978.586.000,00	12.978.586.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**12.978.586.000,00**	**12.978.586.000,00**	**100,00**	**23.157.354.000,00**

Tabel di atas menunjukkan Insentif Fiskal TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp10.178.768.000,00) atau (43,95%), berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Insentif Fiskal TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Insentif Fiskal memiliki persentase capaian sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp23.157.354.000,00). Hal ini dapat terjadi dikarenakan perubahan kebijakan pengalokasian dan klasifikasi insentif fiskal dari Pemerintah Pusat, di mana Pada TA 2025, Insentif Fiskal tidak lagi disalurkan dalam skema Insentif Fiskal (reguler) sebagaimana TA 2024, akan tetapi dialokasikan dalam skema Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya, yang dicatat sebagai akun tersendiri sesuai struktur Bagan Akun Standar (BAS). Dengan demikian, tidak terdapat realisasi pada akun Insentif Fiskal TA 2025, dan seluruh penerimaan insentif fiskal dicatat pada akun Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya sebesar Rp12.978.586.000,00. Perubahan ini merupakan dampak penyesuaian kebijakan pusat dan klasifikasi akun, dan bukan penurunan substansi penerimaan fiskal daerah; dan
   b. Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya memiliki persentase capaian sebesar 100,00% pada TA 2025. Hal ini sesuai dengan jumlah yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Lampiran V C sebesar Rp12.978.586,00.
2. Rincian rencana dan realisasi penggunaan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Provinsi Bali TA 2025 merupakan tindak lanjut atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah Tahun Anggaran 2025 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya, disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.1.2.1.5.1.1 Rincian Insentif Fiskal Menurut Rencana dan Realisasi Penggunaan

No.	Jenis Kegiatan	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	%	Sisa
1	Peningkatan Perekonomian	8.059.445.100,00	7.750.963.570,00	96,17	308.481.530,00
2	Pelayanan Kesehatan	4.919.140.900,00	4.742.626.005,00	96,41	176.514.895,00
	Jumlah	**12.978.586.000,00**	**12.493.589.575,00**	**96,26**	**484.996.425,00**

3. Rencana dan realisasi penggunaan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya TA 2025, didasarkan atas:
   a. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor: B.31.900/1818/PADFE/BPKAD tanggal 14 Maret 2025, Hal: Penyampaian Rencana Penggunaan Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025;
   b. Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali Nomor: B.31.900/6314/PAPKD/BPKAD tanggal 22 September 2025, Pengantar Laporan Realisasi Penyerapan DID IF Kinerja Tahun Sebelumnya Tahap I Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Provinsi Bali; dan
   c. Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali Nomor: B.31.900/971/PAPKD/BPKAD tanggal 9 Februari 2026, Pengantar Laporan Realisasi Penyerapan DID IF Kinerja Tahun Sebelumnya Tahap II Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Provinsi Bali.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Berikut ini adalah Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.2.1 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bantuan Keuangan	34.825.690.369,00	34.825.690.369,00	100,00	0,00
Jumlah	**34.825.690.369,00**	**34.825.690.369,00**	**100,00**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp34.825.690.369,00 atau 0,00%.

5.1.1.2.2.1 Bantuan Keuangan

Berikut ini adalah Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.2.1.1 Rincian Bantuan Keuangan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	34.825.690.369,00	34.825.690.369,00	100,00	0,00
Jumlah	**34.825.690.369,00**	**34.825.690.369,00**	**100,00**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan Bantuan Keuangan TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp34.825.690.369,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Bantuan Keuangan TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar Rp34.825.690.369,00 pada TA 2025 dan merupakan realisasi baru, di mana tidak terdapat realisasi pada TA 2024. Penerimaan ini berasal dalam bentuk bagi atau *sharing* pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Gianyar, Pemerintah Kabupaten Tabanan tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Perkotaan Trans Metro Dewata di Kawasan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita) tanggal 18 April 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.2.1.1.1 Rincian Bantuan Keuangan Menurut Perjanjian Kerja Sama

Pemerintah Daerah		Nomor Perjanjian	Realisasi
Pemerintah Provinsi Bali	Pihak I	B.36.100.3.7/19133/KS/B.PEMKESRA	-
Pemerintah Kota Denpasar	Pihak II	100.3.7.1/02/PKS/KS/2025	14.029.778.120,00
Pemerintah Kabupaten Badung	Pihak III	100.2.2/11912/PKS/TKKSD-Bdg/2025	16.069.568.556,00
Pemerintah Kabupaten Gianyar	Pihak IV	010/18/PKS/B.Tapem/IV/2025	4.726.343.693,00
Pemerintah Kabupaten Tabanan	Pihak V	100.3.7.1/1117/PKS-T.Pem/2025	-
	Jumlah		**34.825.690.369,00**

Berdasarkan Laporan Rincian Penggunaan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2025 Nomor: 900.1.4.11/3562/UPTD.SBGT/DISHUB tanggal 25 November 2025 disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk tahun 2025 tidak dikenakan *sharing* pembiayaan. Persentase *sharing* sebesar 2,92% atau sebesar Rp1.452.231.288,00 dialihkan ke Pemerintah Kabupaten Badung sesuai kesepakatan Kepala Daerah dalam rapat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

5.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Berikut ini adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.3.1 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah	5.757.272.000,00	6.089.799.194,01	105,77	5.750.844.000,00
Jumlah	**5.757.272.000,00**	**6.089.799.194,01**	**105,77**	**5.750.844.000,00**

Tabel di atas menunjukkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp338.955.194,01 atau 5,89%.

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Berikut ini adalah Pendapatan Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.3.1.1 Rincian Pendapatan Hibah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	5.753.232.000,00	6.085.759.194,01	105,77	5.744.244.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	4.040.000,00	4.040.000,00	100,00	6.600.000,00
Jumlah	**5.757.272.000,00**	**6.089.799.194,01**	**105,77**	**5.750.844.000,00**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Hibah TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp338.955.194,01 atau 5,89%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pendapatan Hibah TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 105,77% pada TA 2025 dan realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024. yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri sebesar Rp5.753.232.000,00 yang berasal dari Hibah Kontribusi Biaya Operasional KB Samsat PT Jasa Raharja selama 12 bulan; dan
      2) Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri sebesar Rp332.527.194,01, yang berasal dari Hibah Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya berdasarkan Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya per 1 Juli 2025. Pada Neraca, hibah tersebut berupa Kas dan Setara Kas dengan rincian sebagai berikut:
         a) Kas Tunai, terdiri atas:

Kas Kasir FO	4.704.373,15
Kas Besar	8.134.897,86
Jumlah Kas Tunai	**12.839.271,01**

Kas Kasir FO merupakan penerimaan kasir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 yang direncanakan disetorkan pada bulan Juli 2025, sedangkan Kas Besar merupakan saldo kas per 30 Juni 2025 yang akan disetorkan ke bank pada bulan Juli 2025.

b) Kas di Bank, terdiri atas:

Giro	
PT. Bank Mandiri,	
- (No. Rek. 145-00-0752544-3)	9.624.150,83
- (No. Rek. 145-00-1306337-1)	195.468.876,00
PT. Bank Negara Indonesia	
- (No. Rek 2017102466)	142.953,00
Tabungan	
- PT. Bank Pembangunan Daerah (No. Rek. 028 02.22.00869-4)	5.757.987,37
- PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (045020241949-1)	5.575.086,71
- PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (045.02.02.35982-8)	100.861.079,13
- PT. Bank Rakyat Indonesia No. Rek.0686-01-000462-56-3	2.257.789,96
Jumlah Kas Bank	**319.687.923,00**

Rekening-rekening bank tersebut masih atas nama Yayasan, kecuali rekening BPD Bali Nomor 045.02.02.35982-8 yang telah atas nama rekening BLUD. Pihak Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya sedang memproses penutupan rekening atas nama Yayasan dan pembukaan rekening baru atas nama BLUD, termasuk pembukaan rekening dalam bentuk giro.

b. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis memiliki persentase capaian sebesar 100,00% pada TA 2025. Walau demikian, realisasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan realisasi TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat sumbangan penerimaan yang berasal dari hasil kegiatan Demonstrasi Pilot (Demplot) pada UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali yang bersifat tidak terus-menerus dan insidental sesuai kebutuhan.

5.1.2 BELANJA DAERAH

Berikut ini adalah Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1 Rincian Belanja Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
BELANJA OPERASI	5.053.188.410.600,60	4.520.551.159.698,76	89,45	4.461.088.682.470,66
BELANJA MODAL	961.755.254.119,00	773.687.032.749,53	80,44	667.689.607.145,41
BELANJA TIDAK TERDUGA	53.861.777.244,00	14.075.388.800,30	26,13	7.441.134.041,00
BELANJA TRANSFER	1.344.164.836.020,00	1.246.339.410.303,03	92,72	2.156.832.426.341,00
Jumlah	**7.412.970.277.983,60**	**6.554.652.991.551,62**	**88,42**	**7.293.051.849.998,07**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Daerah TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp738.398.858.446,45) atau -10,12%. Komposisi realisasi Belanja Daerah TA 2025 dan capaian realisasi Belanja Daerah terhadap anggaran pada TA 2025 ditunjukkan pada Gambar 5.5 dan 5.6.

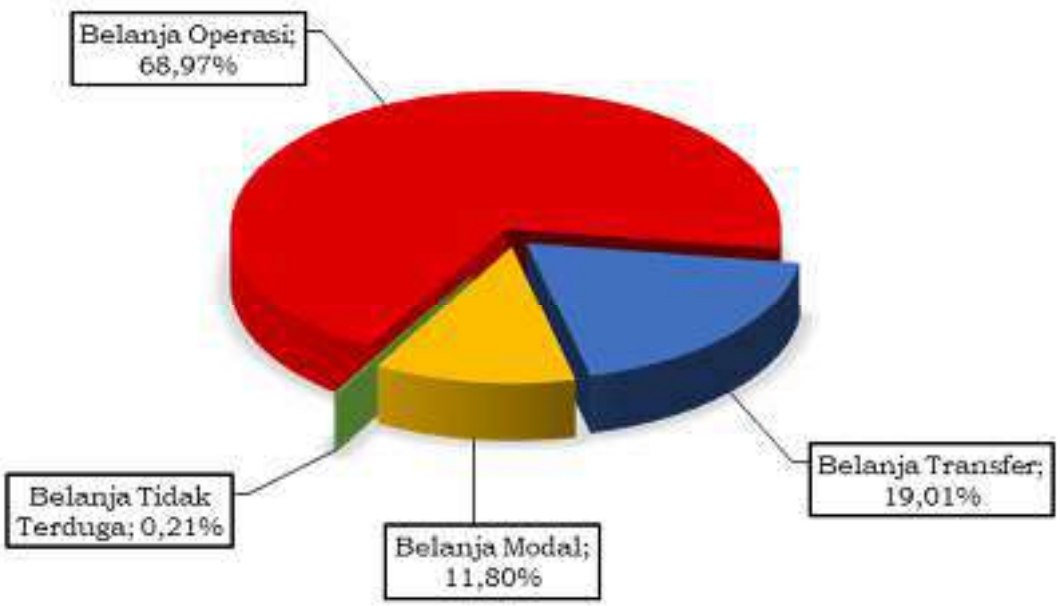

Gambar 5.5 Komposisi Realisasi Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2025

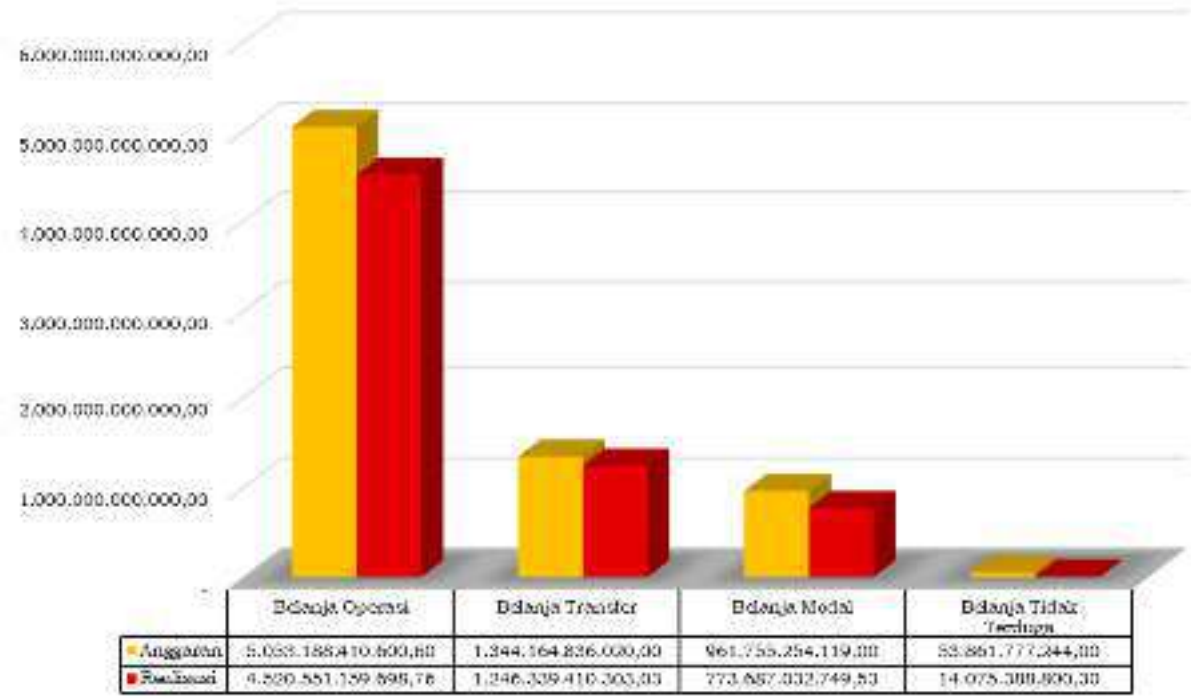

Gambar 5.6 Capaian Realisasi Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2025

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 5***.

5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Berikut ini adalah Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1 Rincian Belanja Operasi

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	2.526.874.277.345,60	2.304.413.342.308,00	91,19	2.088.693.065.509,00
Belanja Barang dan Jasa	1.562.731.648.119,00	1.272.505.827.668,79	81,42	1.200.096.660.415,66
Belanja Subsidi	10.009.000.000,00	10.009.000.000,00	100,00	2.525.000.000,00
Belanja Hibah	953.461.885.136,00	933.511.389.721,97	97,90	1.169.523.956.546,00
Belanja Bantuan Sosial	111.600.000,00	111.600.000,00	100,00	250.000.000,00
Jumlah	**5.053.188.410.600,60**	**4.520.551.159.698,76**	**89,45**	**4.461.088.682.470,66**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Operasi TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp59.462.477.228,10 atau 1,33%. Komposisi realisasi Belanja Operasi TA 2025 dan capaian realisasi Belanja Operasi terhadap anggaran pada TA 2025 ditunjukkan pada Gambar 5.7 dan 5.8.

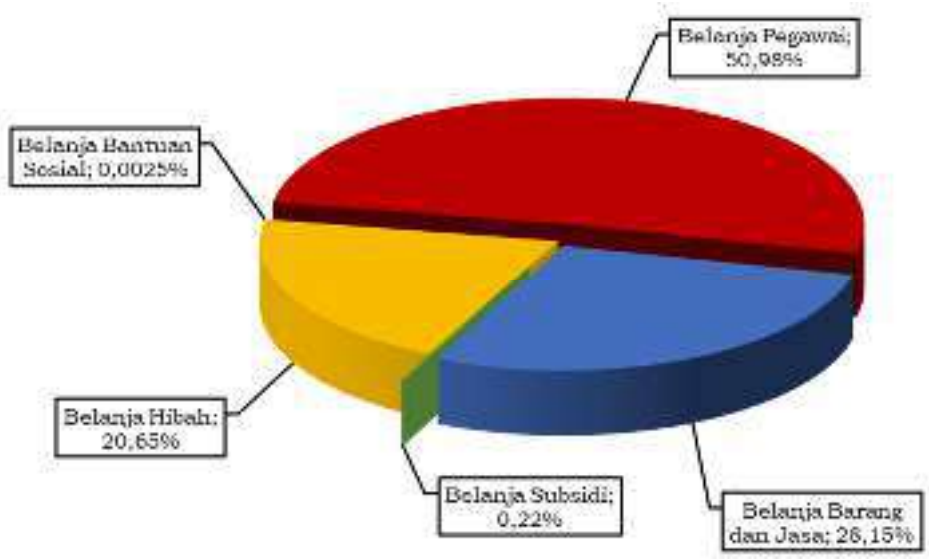

Gambar 5.7 Komposisi Realisasi Belanja Operasi pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2025

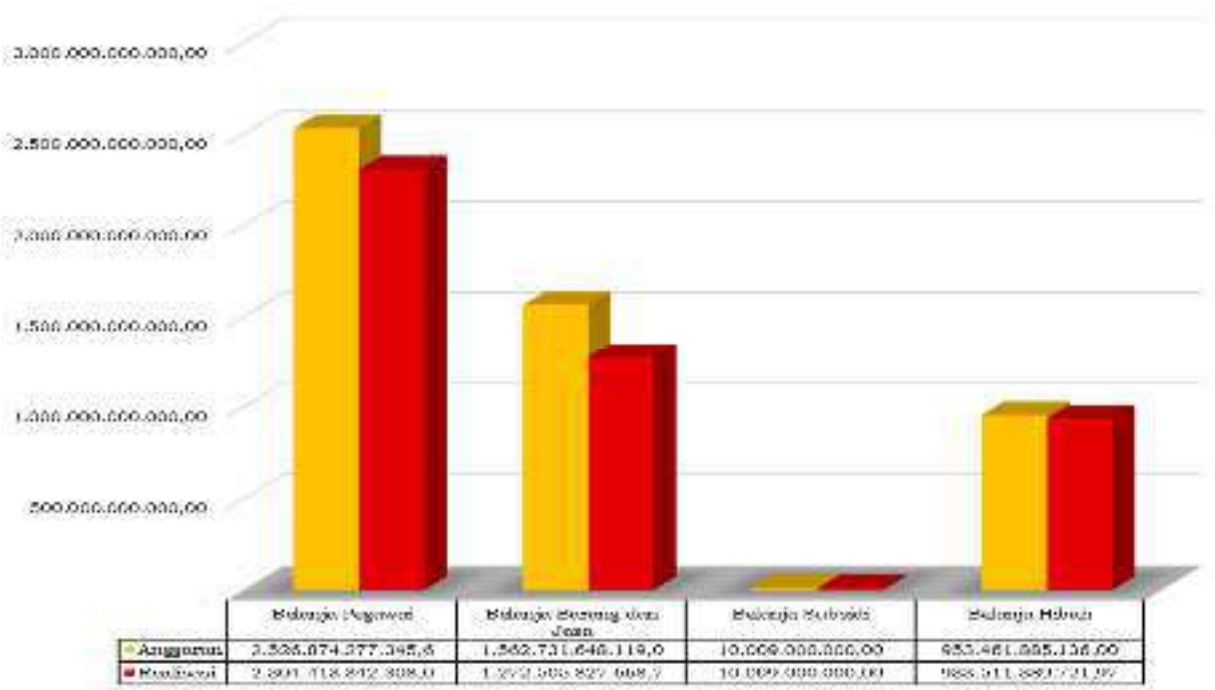

Gambar 5.8 Capaian Realisasi Belanja Operasi pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2025

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini adalah Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.1 Rincian Belanja Pegawai

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.172.678.735.056,00	1.094.301.132.770,00	93,31	915.767.773.065,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.149.191.089.336,60	1.025.358.198.349,00	89,22	648.766.658.646,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	356.514.710.609,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	62.566.813.904,00	58.685.482.937,00	93,79	58.811.705.124,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	3.007.840.762,00	1.013.327.807,00	33,68	180.740.600,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	6.677.806.694,00	6.675.000.000,00	99,95	5.090.000.000,00
Belanja Pegawai BLUD	132.751.991.593,00	118.380.200.445,00	89,17	103.561.477.465,00
Jumlah	**2.526.874.277.345,60**	**2.304.413.342.308,00**	**91,19**	**2.088.693.065.509,00**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pegawai TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp215.720.276.799,00 atau 10,33%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Tambahan Penghasilan ASN memiliki persentase capaian yang mendekati anggaran sebesar 89,22% pada TA 2025. Walau demikian, realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024, dengan kenaikan signifikan sebesar Rp376.591.539.703,00;
   b. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 33,68% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp832.587.207,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Kenaikan Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH pada TA 2025 telah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2000 sedangkan pada TA 2024 terdapat beberapa sub rincian belanja dari Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH yang tidak direalisasikan dikarenakan pada tahun tersebut Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dijabat oleh PJ Gubernur yang saat itu merupakan pegawai Kementerian Dalam Negeri sehingga belanja Gaji dan Tunjangan dari PJ Gubernur pada TA 2024 sudah ditanggung oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 6***.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini adalah Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2.1 Rincian Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	243.573.830.490,00	194.073.326.821,40	79,67	142.523.484.359,00
Belanja Jasa	524.480.110.880,00	462.105.370.947,70	88,10	498.947.019.991,30
Belanja Pemeliharaan	58.551.033.391,00	45.127.465.842,23	77,07	39.402.749.121,78
Belanja Perjalanan Dinas	171.410.619.300,00	70.854.483.596,00	41,33	98.258.652.122,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	123.254.194.950,00	95.380.073.712,58	77,38	21.182.298.130,09

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	188.119.656.792,61
Belanja Barang dan Jasa BOSP	185.639.814.002,00	179.240.131.088,00	96,55	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	255.822.045.106,00	225.724.975.660,88	88,23	211.662.799.898,88
Jumlah	**1.562.731.648.119,00**	**1.272.505.827.668,79**	**81,42**	**1.200.096.660.415,66**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Barang dan Jasa TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp72.409.167.253,13 atau 6,03%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Barang memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 79,67% pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Terdapat penyesuaian harga yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa, di antaranya:
         a) Efisiensi harga dimaksud terutama muncul karena beberapa paket pengadaan dilaksanakan melalui konsolidasi pengadaan serta dilakukan negosiasi harga dengan penyedia, sehingga harga kontrak atau harga hasil transaksi pengadaan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan harga perkiraan yang tercantum dalam DPA dan/atau DPPA; dan
         b) Pada pengadaan melalui E-Katalog, terdapat kondisi di mana harga satuan pada saat transaksi lebih rendah daripada harga satuan yang telah dianggarkan dalam DPPA, sehingga menimbulkan selisih harga yang berdampak pada rendahnya realisasi Belanja Barang dibandingkan target;
      c) Terdapat penyesuaian kebutuhan belanja barang dengan memperhatikan ketersediaan stok persediaan, sehingga realisasi belanja barang menjadi lebih rendah dikarenakan masih terdapat sisa persediaan tahun sebelumnya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional perangkat daerah;
      d) Terdapat penyesuaian pelaksanaan kegiatan, di mana sebagian kegiatan dilaksanakan secara daring (*online*), sehingga menurunkan kebutuhan belanja barang tertentu seperti konsumsi rapat dan bahan cetak; dan
      e) Terdapat kebijakan efisiensi dan pengendalian belanja sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 7054 Tahun 2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali TA 2025 tanggal 22 Oktober 2025. Melalui kebijakan tersebut, seluruh perangkat daerah melakukan pengendalian pelaksanaan belanja agar lebih selektif, memprioritaskan kebutuhan yang bersifat mendesak dan mendukung layanan utama, serta mengurangi belanja yang dapat dioptimalkan tanpa mengganggu pencapaian target kinerja. Dampaknya, sebagian rencana belanja barang yang semula dianggarkan tidak seluruhnya direalisasikan dikarenakan dilakukan penajaman prioritas dan penguatan disiplin belanja sesuai arahan pengendalian.
   b. Belanja Pemeliharaan memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 77,07% pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat efisiensi dan pengendalian belanja pemeliharaan sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 7054 Tahun 2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali TA 2025 tanggal 22 Oktober 2025. Pengendalian dimaksud antara lain mencakup pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan, serta pemeliharaan peralatan atau perlengkapan kantor lainnya, sehingga sebagian kegiatan pemeliharaan yang bersifat kurang mendesak dapat dilakukan penjadwalan ulang, penyesuaian volume, atau penundaan pelaksanaan menyesuaikan kebutuhan riil dan ketersediaan anggaran;
   c. Belanja Perjalanan Dinas memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 41,33% pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan penerapan kebijakan efisiensi dan pengendalian belanja yang berdampak langsung pada pembatasan serta penyesuaian pelaksanaan perjalanan dinas, dengan uraian sebagai berikut:
      1) Dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, yang menginstruksikan Kepala Daerah untuk membatasi belanja pada kegiatan tertentu dan mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%. Sejalan dengan instruksi tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas menjadi lebih selektif. Pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2025, pengajuan izin perjalanan dinas luar negeri tidak

dapat ditindaklanjuti. Walau demikian, pelaksanaan kegiatan tetap berjalan melalui alternatif lain yang tidak memerlukan perjalanan dinas luar negeri; dan

2) Pengendalian pelaksanaan belanja daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 7054 Tahun 2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 tanggal 22 Oktober 2025, yang memasukkan belanja perjalanan dinas sebagai salah satu objek pengendalian. Dampaknya, sebagian perjalanan dinas dilakukan penjadwalan ulang, pengurangan intensitas, atau pelaksanaan secara lebih selektif menyesuaikan prioritas kegiatan.

d. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 77,38%. Walau demikian, realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024 dengan kenaikan signifikan sebesar Rp74.197.775.582,49.

e. Belanja Barang dan Jasa BOS memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp188.119.656.792,61) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada TA 2025, belanja yang pada tahun sebelumnya disajikan pada nomenklatur Belanja Barang dan Jasa BOS telah disajikan dan dicatat pada nomenklatur Belanja Barang dan Jasa BOSP sesuai penyesuaian penyajian dan pengelompokan akun belanja Dana BOS dalam APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa:
   1) Pasal 18 ayat (2) bahwa penerimaan dan belanja yang tercantum dalam RKAS diuraikan berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dalam APBD sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah; dan
   2) Pasal 19 ayat (3) huruf b menegaskan bahwa penelaahan RKAS memperhatikan kesesuaian penerimaan dan belanja dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Belanja Barang dan Jasa BOSP memiliki persentase yang mendekati anggaran sebesar 96,55% dengan realisasi sebesar Rp179.268.311.088,00 pada TA 2025, yang dapat dirinci sebagai berikut:
   1) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler sebesar Rp176.725.799.782,87, yang pada umumnya digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional rutin pada SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Bali sesuai perencanaan dan ketentuan pengelolaan Dana BOSP; dan
   2) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja sebesar Rp2.514.331.305,13, yang pada umumnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan kinerja pada SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Bali sesuai kriteria dan ketentuan Dana BOSP.

2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 7***.

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Berikut ini adalah Belanja Subsidi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.3.1 Rincian Belanja Subsidi

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00
Belanja Subsidi kepada Koperasi	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	25.000.000,00
Jumlah	**10.009.000.000,00**	**10.009.000.000,00**	**100,00**	**2.525.000.000,00**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Subsidi TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp7.484.000.000,00 atau 296,40%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Subsidi TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta dengan kenaikan signifikan sebesar Rp7.500.000.000,00 pada TA 2025, yang berasal dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat peningkatan alokasi subsidi pupuk

organik untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pupuk organik bagi sektor pertanian, seiring dengan bertambahnya jumlah kelompok penerima dan penyesuaian kebutuhan riil di lapangan; dan

b. Belanja Subsidi kepada Koperasi dengan penurunan signifikan sebesar (Rp16.000.000,00) pada TA 2025, yang berasal dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat penyesuaian penganggaran dan penatausahaan pada TA 2025, di mana sebagian alokasi yang pada tahun sebelumnya tercatat pada akun Belanja Subsidi kepada Koperasi dialihkan penyajiannya ke akun Belanja Barang dan Jasa untuk pelaksanaan kegiatan subsidi akta Koperasi Merah Putih.

2. Dasar hukum dan rincian penerima subsidi diuraikan sebagai berikut:
   a. Subsidi pemberian pupuk organik didasarkan atas Keputusan Gubernur Bali Nomor 590/03-F/HK/2025 tentang Penerima dan Besaran Subsidi Pupuk Organik Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan tanggal 30 Juni 2025, sebagaimana dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.3.1.1 Rincian Belanja Subsidi Menurut Penerima dan Besaran Subsidi Pupuk Organik

No.	Nama Produsen	Nama Penanggung Jawab	Volume Pupuk (Kg)	Jumlah
1	CV. Ananta Winangun	Dewa Putu Buda	5.850.000	5.850.000.000,00
2	Yayasan Pemilahan Sampah Temesi	I Ketut Trikaya Wijaya Manik	700.000	700.000.000,00
3	CV. Satyaloka Parama Sidhi	I Wayan Sudarma	3.450.000	3.450.000.000,00
Jumlah			**10.000.000**	**10.000.000.000,00**

   b. Subsidi kepada koperasi didasarkan atas Keputusan Gubernur Bali Nomor 970/03-H/HK/2025 tentang Penetapan Koperasi yang Mendapatkan Subsidi Pembuatan Akta Koperasi Tahun 2025 yang ditetapkan tanggal 25 November 2025, sebagaimana dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.3.1.2 Rincian Belanja Subsidi Menurut Nama dan Akta Koperasi

No.	Nama Koperasi	Nomor dan Tanggal Akta	Jumlah
1	Koperasi Jasa Bali Transport Bersatu	Nomor 12 Tanggal 4 Maret 2025	3.000.000,00
2	Koperasi Produsen Industri Semeton Bali	Nomor 25 Tanggal 11 April 2025	3.000.000,00
3	Koperasi Produsen Bambu Harta Lestari	Nomor 70 Tanggal 20 Mei 2025	3.000.000,00
Jumlah			**9.000.000,00**

3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 8***.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Berikut ini adalah Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.4.1 Rincian Belanja Hibah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	6.859.625.000,00	6.470.508.238,00	94,32	157.039.446.676,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	824.332.380.136,00	805.989.221.824,97	97,77	899.482.561.466,00
Belanja Hibah Dana BOS	98.428.300.000,00	97.210.079.659,00	98,76	90.422.943.204,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	23.841.580.000,00	23.841.580.000,00	100,00	22.579.005.200,00
Jumlah	**953.461.885.136,00**	**933.511.389.721,97**	**97,90**	**1.169.523.956.546,00**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp236.012.566.824,03) atau -20,18%.

5.1.2.1.4.1 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Berikut ini adalah Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.4.1.1 Rincian Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.834.625.000,00	2.834.625.000,00	100,00	157.039.446.676,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	4.025.000.000,00	3.635.883.238,00	90,33	0,00
Jumlah	**6.859.625.000,00**	**6.470.508.238,00**	**94,32**	**157.039.446.676,00**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp150.568.938.438,00) atau -95,88%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat memiliki capaian yang mencapai target pada TA 2025. Walau demikian, realisasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024, dengan penurunan signifikan sebesar (Rp154.204.821.676,00). Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada TA 2024, terdapat belanja hibah yang bersifat insidental dalam rangka dukungan pendanaan pengamanan, penyelenggaraan, dan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024. Sementara itu, pada TA 2025, tidak terdapat kebutuhan pendanaan yang sejenis, sehingga realisasi pada periode saat ini relatif terbatas; dan
   b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat dengan realisasi baru sebesar Rp3.635.883.238,00 pada TA 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan belanja hibah barang yang direalisasikan untuk mendukung pekerjaan perencanaan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana Lanud I Gusti Ngurah Rai sebesar Rp99.786.713,00, pekerjaan pengawasan rehabilitasi pagar depan Kantor Makorem 163/Wira Satya Denpasar sebesar Rp99.256.000,00, serta pekerjaan rehabilitasi pagar depan Kantor Makorem 163/Wira Satya Denpasar sebesar Rp3.436.840.525,00.
2. Pemberian Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dapat dirinci sebagai berikut.
   a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat dilaksanakan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali kepada Kepolisian Daerah Bali, yang beralamat di Jalan WR Supratman No. 7, Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Pemberian hibah berupa uang sebesar Rp2.834.625.000,00 digunakan untuk untuk Pembangunan Parkir Kendaraan Roda Dua yang bertempat di depan gedung Biro Operasi Polda Bali. yang didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 175/04-H/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Pemerintah Pusat yang ditetapkan tanggal 18 September 2025;
   b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali kepada:
      1) Komando Daerah Militer IX/Udayana Komando Resor Militer 163/Wira Satya yang beralamat di Jl. PB Sudirman, Dangin Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali untuk Rehabilitasi Pagar Depan Kantor Makorem 163/Wira Satya Denpasar sebesar Rp3.436.840.525,00;

2) Komando Daerah Militer IX/Udayana Komando Resor Militer 163/Wira Satya yang beralamat di Jl. PB Sudirman, Dangin Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali untuk Pengawasan Rehabilitasi Pagar Depan Kantor Makorem 163/Wira Satya Denpasar sebesar Rp99.256.000,00; dan
3) Komando Daerah Militer IX/Udayana Babinminvetcad yang beralamat di Jalan Airport Ngurah Rai No.12 Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung untuk Renovasi Komplek Perumahan dan Gedung Base Ops sebesar Rp99.786.713,00.

3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 9***.

5.1.2.1.4.2 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Berikut ini adalah Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.4.2.1 Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	562.199.085.136,00	553.902.556.673,97	98,52	666.211.925.565,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.100.000.000,00	5.347.798.094,00	87,66	0,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	255.183.295.000,00	245.938.867.057,00	96,37	233.021.316.201,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	850.000.000,00	800.000.000,00	94,11	249.319.700,00
Jumlah	**824.332.380.136,00**	**805.989.221.824,97**	**97,77**	**899.482.561.466,00**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp93.493.339.641,03) atau -10,39%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp553.902.556.673,97 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali memberikan hibah kepada Desa Adat Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem untuk Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih Kabupaten Karangasem Tahap I sebesar Rp 25.009.117.814,00
      2) Dinas Kesehatan Provinsi Bali memberikan hibah uang kepada Komisi Penanggulangan Aids (KPA) yang beralamat di Jalan Melati No. 21 Denpasar diperuntukkan Program Penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Bali sebesar Rp437.823.612,00
      3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Bali memberikan hibah uang kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Denpasar yang beralamat di Jl. Raya Puputan Renon Denpasar diperuntukkan untuk Operasional BPSK Kota Denpasar sebesar Rp456.000.000,00;
      4) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali sebesar Rp 62.099.615.247,97

5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali ibah kepada Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (DPD PEPABRI) Provinsi Bali yang beralamat di Jl. PB. Sudirman No. G.21, Kota Denpasar sebesar Rp 500.000.000,00;
6) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, pemberian hibah berupa yang yang ditujukan kepada Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dan Desa Adat sebesar Rp465.400.000.000,00. Penurunan realisasi dari TA 2024 ke TA 2025 dikarenakan terdapat pembayaran utang hibah Desa Adat Tahap III 2023 yang dibayar pada TA 2024 sebanyak 1.485 Desa Adat atau Rp148.500.000.000,00. Pada TA 2025, pembayaran hibah hanya untuk Tahap I-III TA 2025. Belanja hibah yang tidak terealisasi seluruhnya pada TA 2025 disebabkan karena beberapa Desa Adat tidak mengajukan/tidak memenuhi syarat pencairan dana Desa Adat dari Tahap I sampai dengan Tahap III dengan rincian sebagai berikut:
   a) Pemberian Hibah kepada Desa Adat sebagai berikut:
      (1) Kepada Kabupaten Tabanan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 9/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 10.U/03-O/2025 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah;
      (2) Kabupaten Bangli berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 14/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 15.U/03-O/2025 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah;
      (3) Kabupaten Klungkung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 5/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 07.U/03-O/2025 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah;
      (4) Kabupaten Buleleng berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 10/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 14.U/03-O/2025 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah);
      (5) Kota Denpasar berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 6/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 06.U/03-O/2025 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah;
      (6) Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 11/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 12.U/03-O/2025 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah;
      (7) Kabupaten Badung berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 7/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan;
      (8) Kabupaten Jembrana berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 27/03-O/HK/2024 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 09.U/03-O/2025 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah; dan
      (9) Kabupaten Gianyar berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 12/03-O/HK/2025 dan NPHD Nomor 11.U/03-O/2025 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah.
   b) Pemberian Hibah kepada MDA sebagai berikut:
      (1) Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 4/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dengan NPHD Nomor 05.U/03-O/2025 (dari APBD Induk TA 2025); dan
      (2) Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 237/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dengan NPHD Nomor 374.U/03-O/2025 (dari APBD Perubahan 2025).

b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dengan realisasi baru sebesar Rp5.347.798.094,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali terdapat pemberian hibah berupa uang sebesar Rp1.997.798.094,00 berupa pengadaan sarana dan prasarana *sound system*, peralatan laptop, pembangunan *tower* dan lain-lain kepada komisi penyiaran, desa adat dan banjar dinas
   2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali terdapat pemberian hibah sebesar Rp 3.350.000.000,00.

c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp245.938.867.057,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
   1) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali terdapat hibah uang sebesar Rp1.922.000.000,00 yang diperuntukkan untuk pengadaan kendaraan operasional untuk Kabupaten/Kota;
   2) Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali terdapat hibah uang sebesar Rp 25.135.000.000,00 yang diperuntukkan untuk pembelian kostum, seperangkat *Gamelan Baleganjur*;
   3) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat hibah uang sebesar Rp350.000.000,00 yang diperuntukkan untuk Penguatan Bendega, Sarana-Prasarana dan Operasional Perkantoran Tahun Anggaran 2025 dan Pengadaan Mesin Tempel Tahun Anggaran 2025
   4) Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali terdapat hibah uang sebesar Rp 11.793.000.000,00 yang diperuntukkan untuk pembelian sapi pada kelompok ternak
   5) Pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali terdapat hibah uang sebesar Rp 43.249.058.668,00 yang diperuntukkan untuk sarana dan prasarana kepada *pengempon* Pura Dadia;
   6) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali terdapat hibah uang sebesar Rp 152.882.558.389,00 yang diperuntukkan untuk *pengempon* pura untuk pembangunan sarana dan prasarana pura
   7) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali sebesar Rp4.446.000.000,00;
   8) Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebesar Rp2.891.250.000,00;
   9) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali terdapat pemberian hibah sebesar Rp3.270.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
      a) Forum Kepala Lingkungan Kelurahan dan *Pengempon Pura Dalem Kahyangan Desa Adat Padonan* Keputusan Gubernur Bali Nomor: 398/03-O/HK/2025 tanggal 5 November 2025 dengan NPHD Nomor 585.U/03-O/2025 01/FKB/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025;
      b) Krama Banjar Adat Taman Sudharma berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 397/03-O/HK/2025 tanggal 5 November 2025 dengan NPHD Nomor 563.U/03-O/2025 05/KBATS/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025;
      c) Pakis Banjar Sente, Pakis Banjar Pasekan, dan Pakis Desa Adat Gelogor, berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 399/03-O/HK/2025 tanggal 6 November 2025 dengan NPHD Nomor 578.U/03-O/2025 01/PBP/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025;
      d) Paiketan Krama Istri Banjar Adat Bajera Belayu, Paiketan Krama Istri Panca Pasa Pitra Yadnya, Paiketan Krama Istri Tempek Lima, dan Krama Istri Banjar Adat Pekandelan, berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 364/03-O/HK/2025 tanggal 27 Oktober 2025 dengan NPHD Nomor 608.U/03-O/2025 01/PBABJ/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025;
      e) Krama Istri Banjar Adat Mekar Sari Pasar, Pakis Adat Dana Kerti, Krama Istri Banjar Adat Sari Muncul, dan Krama Istri Tempek Kangin, berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 403/03-O/HK/2025 tanggal 7 November 2025 dengan NPHD Nomor: 623.U/03-O/2025 01/PAD-K/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025;
      f) Paiketan Krama Istri Desa Adat Pupuan Sawah, Paiketan Krama Istri Banjar Adat Sigaran, dan Paiketan Krama Istri Banjar Adat Alas, berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 327/03-O/HK/2025 tanggal 21 Oktober 2025 dengan NPHD Nomor: 536.U/03-O/2025 01/PAKIS.PPS/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025;
      g) Paiketan Krama Istri Desa Adat Sidetapa dan Banjar Adat Dalem, berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 328/03-O/HK/2025 tanggal 21 Oktober 2025 dengan NPHD Nomor: 544.U/03-O/2025 001/PAKIS/DAS/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025;
      h) Paiketan Krama Istri Desa Adat Cangkup, Paiketan Krama Istri Desa Adat Munduk Juwet, Paiketan Suka Duka Sekar Wangi, Paiketan Krama Istri Sedana Yoga, dan STT Dharma Kanti, berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 391/03-O/HK/2025 tanggal 5 November 2025 dengan NPHD Nomor: 622.U/03-O/2025 01/KIDAC/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025;
      i) Paiketan Krama Istri Cantya Gayatri, Paiketan Krama Istri Yamuna, Paiketan Krama Istri Tempek Bangklet, dan Paiketan Krama Istri Kamboja, berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 348/03-O/HK/2025 tanggal 23 Oktober 2025 dengan NPHD Nomor: 607.U/03-O/2025 01/PAKIS-TB/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025;
      j) Krama Br. Tegalsaat Delodan dan Kelompok Krama Istri Desa Adat Seseh Keputusan Gubernur Bali Nomor: 329/03-O/HK/2025 tanggal 21 Oktober 2025 dengan NPHD Nomor: 484.U/03-O/2025 01/KBTD/XI/2025 tanggal 21 November 2025 dan 514.U/03-O/2025 01/KKIDAS/XI/2025 tanggal 24 November 2025. Penerima hibah adalah.

d. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dengan sebesar Rp800.000.000,00 pada TA 2025 terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Bali kepada:
   1) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Teratai No. 25 Denpasar untuk kegiatan Operasional FKUB Provinsi Bali sebesar Rp500.000.000,00
   2) Rumah Kebangsaan dan Kebhinekaan Pasraman Satyam Eva Jayate yang beralamat di Jalan Trengguli Gg. IV D3 Denpasar untuk Bantuan Dana Rumah Kakek Festival 2025 sebesar Rp150.000.000,00
   3) Organisasi Amatir Radio Indonesia Daerah Bali yang beralamat di jalan Trengguli I/27 Tembawu, Penatih, Denpasar untuk Bantuan dna dalam rangka Petirtaan Purnama ke Dasa lan Betara Turun Kabeh sebesar Rp50.000.000,00
   4) Pimpinan Sekretariat Pusat Perkumpulan Bengkel Mobil Bali (PBMB) yang beralamat di Jalan Nangka Utara 294, Denpasar, Bali untuk kegiatan Bhakti Sosial Besakih sebesar Rp50.000.000,00;
   5) Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) yang beralamat di gedung PHDI Bali lantai 1, Jalan Ratna 71, Tonja, Denpasar, Bali untuk Bantuan dana untuk kegiatan Jambore Pemuda Bali Tahun 2025 sebesar Rp50.000.000,00

2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 9***.

5.1.2.1.4.3 Belanja Hibah Dana BOS

Berikut ini adalah Belanja Hibah Dana BOS yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.4.3.1 Rincian Belanja Hibah Dana BOS

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	97.618.580.000,00	96.413.028.124,00	98,76	89.499.371.704,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	809.720.000,00	797.051.535,00	98,43	923.571.500,00
Jumlah	**98.428.300.000,00**	**97.210.079.659,00**	**98,76**	**90.422.943.204,00**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah Dana BOS TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp6.787.136.455,00 atau 7,50%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Hibah Dana BOS TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta mencapai persentase sebesar 98,76% pada TA 2025. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat kenaikan signifikan terhadap Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta sehubungan dengan peningkatan volume siswa yang mendaftar di sekolah swasta yang menyebabkan sekolah swasta mengalami kenaikan dalam penerimaan dana BOS; dan
   b. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta mencapai persentase sebesar 98,43% pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan anggaran yang terserap pada TA 2025 mengalami penurunan sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (dapodik).
2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dana BOS dapat dilihat pada ***Lampiran 9***.

5.1.2.1.4.4 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Berikut ini adalah Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.4.4.1 Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	23.841.580.000,00	23.841.580.000,00	100,00	22.579.005.200,00
Jumlah	**23.841.580.000,00**	**23.841.580.000,00**	**100,00**	**22.579.005.200,00**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp1.262.574.800,00 atau 5,59%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

   Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik mencapai persentase sebesar 100,00% dan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBD Provinsi Bali diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali pada TA 2025 dan besarannya dihitung secara proporsional berdasarkan perolehan suara sah dikalikan nilai bantuan per suara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dasar hukum dan penerima Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dibebankan pada APBD TA 2025 (Induk) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 10/04-H/HK/2025 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali tanggal 3 Maret 2025, yang diberikan kepada 6 (enam) Partai Politik sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.4.4.1.1 Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Menurut Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14.465.830.000,00	14.465.830.000,00	100,00	13.544.131.100,00
Partai Gerakan Indonesia Raya	3.246.480.000,00	3.246.480.000,00	100,00	2.173.629.100,00
Partai Golongan Karya	3.225.690.000,00	3.225.690.000,00	100,00	3.196.484.700,00
Partai Demokrat	1.525.060.000,00	1.525.060.000,00	100,00	1.673.103.200,00
Partai NasDem	853.350.000,00	853.350.000,00	100,00	1.130.589.300,00
Partai Solidaritas Indonesia	525.170.000,00	525.170.000,00	100,00	468.434.400,00
Partai Hati Nurani Rakyat	-	-	-	392.633.400,00
Jumlah	**23.841.580.000,00**	**23.841.580.000,00**	**100,00**	**22.579.005.200,00**

3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dapat dilihat pada ***Lampiran 9***.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini adalah Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.5.1 Rincian Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	111.600.000,00	111.600.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**111.600.000,00**	**111.600.000,00**	**100,00**	**250.000.000,00**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Bantuan Sosial TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp138.400.000,00) atau -55,36%.

5.1.2.1.5.1 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Berikut ini adalah Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.5.1.1 Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000.000,00**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp250.000.000,00) atau -100,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

   Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat memiliki persentase capaian sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp250.000.000,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tidak terdapat alokasi untuk belanja tersebut pada TA 2025.
2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada ***Lampiran 10***.

5.1.2.1.5.2 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Berikut ini adalah Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.5.2.1 Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	111.600.000,00	111.600.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**111.600.000,00**	**111.600.000,00**	**100,00**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp111.600.000,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) dengan realisasi baru sebesar Rp111.600.000,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan hibah uang kepada Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) Provinsi Bali yang beralamat di Jl. Tunggak Bingin No. 15 B Sanur, Denpasar yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bantuan Sosial Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada ***Lampiran 10***.

5.1.2.2 BELANJA MODAL

Berikut ini adalah Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.1 Rincian Belanja Modal

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah	31.063.325.760,00	1.181.948.000,00	3,80	3.464.184.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	283.723.278.083,00	259.183.049.267,80	91,35	130.063.180.613,50
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	321.617.256.729,00	240.493.997.597,02	74,77	407.489.294.374,22
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	290.219.969.754,00	240.687.598.599,81	82,93	94.451.449.090,69
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	34.418.774.193,00	31.596.980.320,00	91,80	31.382.599.067,00
Belanja Modal Aset Lainnya	712.649.600,00	543.458.964,90	76,25	838.900.000,00
Jumlah	**961.755.254.119,00**	**773.687.032.749,53**	**80,44**	**667.689.607.145,41**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp105.997.425.604,12 atau 15,88%. Komposisi realisasi Belanja Modal TA 2025 dan capaian realisasi Belanja Modal terhadap anggaran pada TA 2025 ditunjukkan pada Gambar 5.9 dan 5.10.

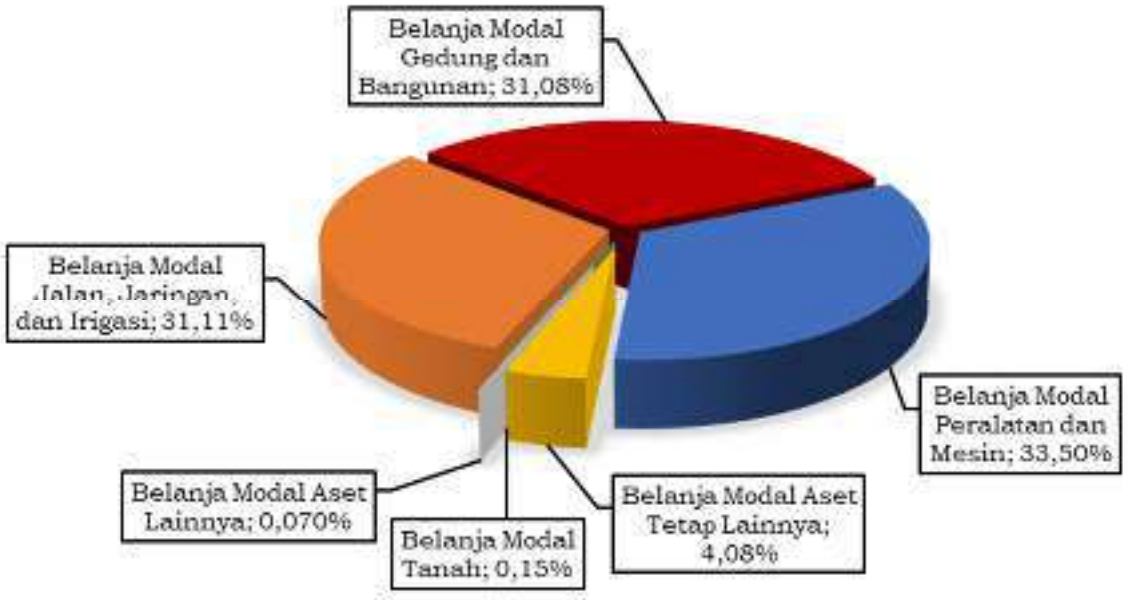

Gambar 5.9 Komposisi Realisasi Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2025

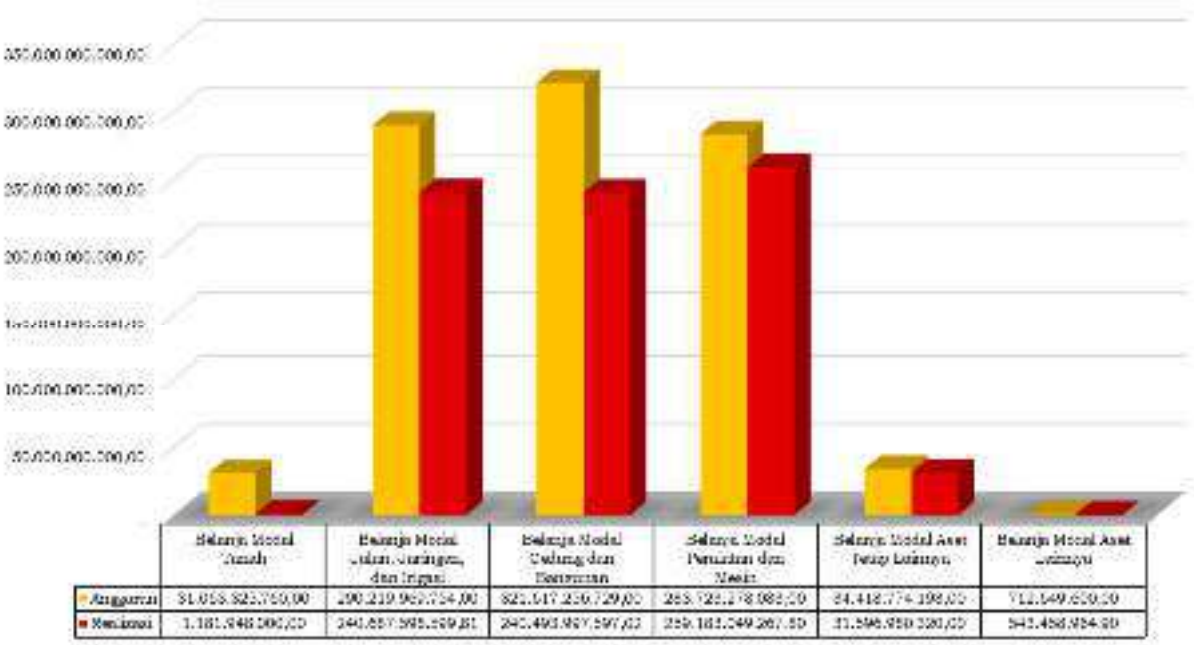

Gambar 5.10 Capaian Realisasi Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2025

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 11***.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Berikut ini adalah Belanja Modal Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.1.1 Rincian Belanja Modal Tanah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah	31.063.325.760,00	1.181.948.000,00	3,80	3.464.184.000,00
Jumlah	**31.063.325.760,00**	**1.181.948.000,00**	**3,80**	**3.464.184.000,00**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Tanah TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp2.282.236.000,00) atau -65,88%.

5.1.2.2.1.1 Belanja Modal Tanah

Berikut ini adalah Belanja Modal Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.1.1.1 Rincian Belanja Modal Tanah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah Persil	31.048.325.760,00	1.181.948.000,00	3,80	3.464.184.000,00
Belanja Modal Lapangan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**31.063.325.760,00**	**1.181.948.000,00**	**3,80**	**3.464.184.000,00**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Tanah TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp2.282.236.000,00) atau -65,88%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Modal Tanah Persil memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 3,80% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp2.282.236.000,00) pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Belanja Modal Tanah Persil yang dimaksud merupakan Belanja Modal Tanah Persil Lainnya yang direncanakan untuk mendukung pelaksanaan konsinyasi pengadaan tanah Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Kabupaten Klungkung. Namun, kegiatan tersebut belum dapat direalisasikan dikarenakan para pihak yang seharusnya ditetapkan sebagai penerima ganti kerugian sedang dalam proses penyelesaian sengketa dan belum menerbitkan akta perdamaian, serta menunggu proses mediasi yang difasilitasi BPN Kabupaten Klungkung. Sehubungan dengan hal tersebut, pengajuan pembayaran konsinyasi belum dapat dilakukan. Selain itu, pengajuan pembayaran konsinyasi tidak dapat diajukan kembali kepada Pengadilan Negeri Semarapura dikarenakan proses konsinyasi sebelumnya telah dinyatakan selesai. Apabila mediasi para pihak telah mencapai kesepakatan, mekanisme pembayaran ganti kerugian direncanakan dilakukan melalui permohonan pembayaran langsung kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, dan tidak lagi melalui rekening konsinyasi;
      2) Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, realisasi Belanja Modal Tanah Persil Lainnya dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:
         a) Pelaksanaan pengadaan tanah memerlukan pemenuhan tahapan administratif dan yuridis yang meliputi penyiapan dokumen perencanaan, pelaksanaan penilaian (*appraisal*) nilai tanah, serta verifikasi status dan keabsahan kepemilikan tanah. Sampai dengan akhir TA 2025, sebagian tahapan dimaksud belum dapat dituntaskan sepenuhnya;
         b) Pelaksanaan pengadaan tanah juga bergantung pada kesiapan objek tanah dan kesediaan pemilik tanah untuk melakukan pelepasan hak. Pada TA 2025, sebagian rencana pengadaan tanah belum dapat dilaksanakan karena proses pembahasan dan/atau kesepakatan dengan pemilik tanah belum tercapai;
         c) Pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan secara selektif dengan memperhatikan kepastian hukum, asas kehati-hatian, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga realisasi belanja dilakukan hanya terhadap objek tanah yang telah memenuhi seluruh persyaratan; dan
         d) Sisa anggaran Belanja Modal Tanah pada TA 2025 merupakan anggaran yang belum dapat direalisasikan dan akan dievaluasi kembali perencanaannya pada tahun anggaran selanjutnya sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan pengadaan tanah.
   b. Belanja Modal Lapangan memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% pada TA 2025. Hal tersebut berkaitan dengan rencana Belanja Modal Lapangan Tanah untuk Bangunan Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, di mana pada saat penyusunan anggaran TA 2025 telah dipersiapkan alokasi untuk pembayaran proses penyertifikatan atas tanah Bendungan Titab di Kabupaten Buleleng yang pada saat itu sedang dalam proses penyelesaian, yaitu sebanyak 2 (dua) sertifikat yang belum terbit. Namun, sampai dengan akhir TA 2025, proses penyertifikatan dimaksud belum selesai, dan tidak terdapat pembayaran atas proses penyertifikatan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, sepanjang TA 2025 tidak terdapat tagihan dan/atau permohonan pembayaran yang dapat diproses untuk kegiatan dimaksud, sehingga anggaran yang telah dialokasikan tidak dapat direalisasikan.
2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 12***.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Berikut ini adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.2.1 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar	4.878.553.334,00	4.339.065.460,00	88,94	1.000.015.688,00
Belanja Modal Alat Angkutan	32.705.892.586,00	29.941.202.984,00	91,54	9.104.940.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.163.318.800,00	1.147.030.300,00	98,59	20.655.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	48.995.750,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	33.112.747.205,00	27.557.100.944,00	83,22	20.805.699.849,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	24.887.588.529,00	22.816.626.241,80	91,67	3.381.338.750,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	48.463.757.976,00	48.126.584.812,00	99,30	12.097.276.465,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	26.966.402.483,00	26.335.611.827,00	97,66	6.481.862.238,00
Belanja Modal Komputer	33.199.218.847,00	28.793.392.682,00	86,72	8.734.885.826,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	17.982.100,00	0,00	0,00	45.400.000,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	57.300.000,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	140.000.000,00	132.000.002,00	94,28	775.460.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	959.343.200,00	804.092.709,00	83,81	95.500.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	77.172.500,00	74.085.000,00	95,99	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	42.816.245.711,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	42.888.128.423,00	42.580.231.926,00	99,28	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	34.238.172.100,00	26.536.024.380,00	77,50	24.597.605.336,50
Jumlah	**283.723.278.083,00**	**259.183.049.267,80**	**91,35**	**130.063.180.613,50**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp129.119.868.654,30 atau 99,27%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Modal Alat Besar dengan kenaikan signifikan sebesar Rp3.339.049.772,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat peningkatan realisasi pengadaan alat besar/alat penunjang operasional pada beberapa SKPD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, antara lain berupa genset (*electric generating set*), *excavator*, pompa, serta alat bantu lainnya, dengan rincian sebagai berikut:
      1) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali berupa Pompa Banjir sebesar Rp44.400.000,00 sebanyak 1 (satu) unit;
      2) Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berupa *Electric Generating Set* (Genset 150 KVA/120 KWA tipe *silent*) sebesar Rp627.000.000,00 sebanyak 1 (satu) unit;
      3) Pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali, di antaranya:
         a) Alat Bantu Lainnya berupa Tank Pompa Air sebesar Rp29.415.000,00 sebanyak 1 (satu) unit; dan
         b) Pompa sebesar Rp43.940.460,00 sebanyak 1 (satu) unit.
      4) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, di antaranya:
         a) *Electric Generating Set* (*Genset Portable* kapasitas 5.000 watt tipe *silent*) sebesar Rp67.800.000,00 sebanyak 1 (satu) unit; dan
         b) *Electric Generating Set* (*Genset* 30 kVA tipe *silent*) sebesar Rp1.067.500.000,00 sebanyak 1 (satu) unit.
      5) Pada UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali, berupa *Electric Generating Set* sebesar Rp193.500.000,00 sebanyak 1 (satu) unit;
      6) Pada UPTD Balai Peralatan dan Pengujian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali berupa *Excavator* sebesar Rp1.187.700.000,00 sebanyak 1 (satu) unit;

7) Pada UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, di antaranya:
   a) Pompa sebesar Rp839.160.000,00 sebanyak 1 (satu) unit; dan
   b) Pompa sebesar Rp238.650.000,00 sebanyak 1 (satu) unit.

b. Belanja Modal Alat Angkutan dengan kenaikan signifikan sebesar Rp20.836.262.984,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat peningkatan realisasi Belanja Modal Alat Angkutan untuk pengadaan kendaraan operasional atau dinas pada beberapa SKPD guna mendukung mobilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, dengan rincian sebagai berikut:
   1) Pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, berupa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Kantor sebesar Rp247.000.000,00 sebanyak 1 (satu) unit;
   2) Pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali, di antaranya:
      a) Kendaraan Bermotor Penumpang berupa BYD SEAL Premium sebesar Rp6.787.000.000,00 sebanyak 11 unit;
      b) Paket Kendaraan Bermotor Penumpang berupa 2 (dua) unit Alphard 2.5 Hybrid CVT, 2 (dua) unit Innova Zenix 2.0 Q HV CVT, 2 (dua) unit Fortuner 2.8 VRZ, 5 (lima) unit Veloz 1.5 Q CVT, dan 1 (satu) unit Hiace Commuter M/T sebesar Rp8.491.699.999,00;
      c) Paket Kendaraan Bermotor Penumpang berupa 5 (lima) unit Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista dan 3 (tiga) unit Hiace Premio 2.8 M/T sebesar Rp5.294.100.000,00;
      d) Kendaraan Bermotor Beroda Dua berupa D-TRACKER X 250 sebesar Rp274.199.998,00 sebanyak 3 (tiga) unit. Namun, telah dilakukan pengembalian dengan Jurnal 51/11.0/000001/JUR-BLJ/STS/4.01.2.23.2.24.01.0007/11/2025 tanggal 12 November 2025;
      e) Kendaraan Bermotor Beroda Dua berupa Sepeda motor listrik Gesits G1 DLX sebesar Rp251.748.000,00 sebanyak 7 (tujuh) unit;
      f) Kendaraan Bermotor Angkutan Barang berupa Pick Up Mitsubishi New Triton DC Exceed 4x4 MT sebesar Rp1.522.499.999,00 sebanyak 3 (tiga) unit;
      g) Kendaraan Bermotor Penumpang berupa Hino GB150L MT Bus Sedang Umum Deluxe 30+1 sebesar Rp2.275.600.000,00 sebanyak 2 (dua) unit;
      h) Kendaraan Bermotor Penumpang berupa MPV Mitsubishi New Xpander Cross Plus CVT sebesar Rp361.819.995,00 sebanyak 1 (satu) unit;
      i) Kendaraan Bermotor Penumpang berupa DENZA D9 MPV PREMIUM sebesar Rp1.932.999.999,00 sebanyak 2 (dua) unit;
      j) Kendaraan Bermotor Penumpang berupa DENZA D9 MPV PREMIUM sebesar Rp1.895.000.000,00 sebanyak 2 (dua) unit; dan
      k) Kendaraan Bermotor Angkutan Barang berupa Hilux Rangga Pick Up 2.4 Diesel High A/T sebesar Rp320.100.000,00 sebanyak 1 (satu) unit.
   3) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua berupa sepeda motor (Yamaha Mio M3 CW) sebesar Rp183.649.995,00; dan
   4) Pada Badan Penghubung Provinsi Bali, di antaranya:
      a) Kendaraan Bermotor Angkutan Barang berupa kendaraan listrik roda 3 (tiga) sebesar Rp32.000.000,00 sebanyak 1 (satu) unit;
      b) Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp16.485.000,00 sebanyak 1 (satu) unit; dan
      c) Kendaraan Bermotor Beroda Dua berupa Yamaha Freego 125 dan Yamaha Nmax Neo sebesar Rp55.299.999,00 sebanyak 2 (dua) unit.

c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur dengan kenaikan signifikan sebesar Rp1.126.375.300,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat peningkatan realisasi pengadaan alat bengkel dan alat ukur pada beberapa SKPD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, antara lain untuk kebutuhan operasional pengawasan, pengendalian, pengujian mutu, penanggulangan bencana, serta kegiatan lapangan, dengan rincian sebagai berikut:
   1) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali terdapat Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu berupa *Chainsaw* STIHL 250 dan *Chainsaw* STIHL MS070 sebesar Rp56.410.200,00;
   2) Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali terdapat Belanja Modal Peralatan Alat Ukur Lainnya (dalam rangka Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah) sebesar Rp1.023.200.000,00;
   3) Pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali terdapat Belanja mesin potong kayu berupa gergaji mesin/alat bantu lainnya (*chainsaw* ukuran kecil) sebesar Rp17.980.000,00;

4) Pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali terdapat Belanja Modal Alat Ukur Lain-lain berupa *hammer test* sebesar Rp9.025.000,00;
5) Pada UPTD Balai Peralatan dan Pengujian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali terdapat Belanja Modal Perkakas Bengkel Service (dalam rangka Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi) sebesar Rp38.278.350,00; dan
6) Pada UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali terdapat Belanja Modal Alat Ukur Lainnya berupa Termometer Digital (*Thermometer 4-Channel*) sebesar Rp2.136.750,00.

d. Belanja Modal Alat Pertanian memiliki persentase capaian sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp48.995.750,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tidak terdapat alokasi untuk belanja tersebut pada TA 2025;
e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga memiliki persentase capaian yang mendekati anggaran sebesar 83,22% dan realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2024 dengan kenaikan sebesar Rp6.751.401.095. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran, baik untuk pengadaan alat kantor, perlengkapan rumah tangga, mebel, maupun peralatan penunjang operasional lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan riil dan hasil pelaksanaan pengadaan;
f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dengan kenaikan signifikan sebesar Rp19.435.287.491,80 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat peningkatan realisasi pengadaan/perkuatan sarana pendukung komunikasi dan pemancar (termasuk pekerjaan peralatan pemancar), serta pengadaan peralatan studio audio dan video untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, dengan rincian sebagai berikut:
   1) Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali, di antaranya:
      a) Pada UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional terdapat Peralatan Studio Video dan Film serta Peralatan Studio Audio sebesar Rp15.000.000,00; dan
      b) Pada UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan terdapat Alat Studio Lainnya berupa kamera video *conference* sebesar Rp28.280.000,00;
      c) Pada UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional terdapat peralatan studio sebesar Rp7.150.770,00; dan
      d) Pada Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya terdapat peralatan studio audio berupa *sound system* dan *dry box* dengan total sebesar Rp58.081.860,00.
   2) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, di antaranya:
      a) Peralatan Studio Audio dan Peralatan Studio Video dan Film sebesar Rp64.450.000,00; dan
      b) Pada UPTD Balai Peralatan dan Pengujian terdapat Peralatan Studio Audio sebesar Rp5.716.500,00;
   3) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, di antaranya:
      a) Alat Studio Lainnya berupa rak *sound system* dan *stand mic* serta Peralatan Studio Video dan Film berupa peralatan *podcast* sebesar Rp35.432.500,00;
      b) Pada UPTD Pengendalian Bencana Daerah terdapat Alat Komunikasi Lainnya berupa pengadaan HT dan radio RIG, Alat Komunikasi Radio VHF berupa antena/perangkat VHF, serta Alat Komunikasi Khusus berupa perkuatan perangkat sistem sirine BTEWS dan perangkat radio komunikasi kebencanaan sebesar Rp3.532.308.001,00.
   4) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali berupa Peralatan Studio Video dan Film berupa *group conference with expansion mic* sebesar Rp25.999.530,00;
   5) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali terdapat Peralatan Studio Video dan Film berupa kamera sebesar Rp23.300.000,00;
   6) Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali di antaranya:
      a) Peralatan Pemancar Lainnya berupa pekerjaan peralatan pemancar (Termin I dan Termin II), Peralatan Studio Video dan Film berupa kamera Sony A7III dan gimbal Zhiyun Weebill S, Peralatan Studio Audio berupa alat perekam audio, Alat Studio Lainnya berupa memori kamera, serta Sumber Tenaga berupa *stabilizer* sebesar Rp9.086.314.700,00;
      b) Pada UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital terdapat Peralatan Studio Video dan Film berupa *drone for photogrammetry*, kamera digital Sony Alpha 6400 (16–50), serta *dry box* sebesar Rp107.278.400,00; dan

c) Pada UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali terdapat Peralatan Studio Video dan Film, Peralatan Studio Audio berupa peningkatan *public address* (PA *system*) dan *mic clip wireless*, serta Alat Studio Lainnya sebesar Rp447.373.951,80.

7) Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali terdapat Peralatan Studio Video dan Film berupa perangkat *podcast* dan kamera/tripod, Alat Studio Lainnya berupa alat video *conference*, serta Peralatan Studio Audio berupa *sound system* sebesar Rp199.529.500,00;
8) Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali terdapat Peralatan Studio Video dan Film serta Peralatan Studio Audio sebesar Rp187.400.001,00;
9) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali terdapat Peralatan Studio Video dan Film berupa kamera, Alat Studio Lainnya berupa kamera dan Alat Studio Lainnya berupa peralatan video *conference* sebesar Rp124.400.000,00;
10) Pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali terdapat Peralatan Studio Video dan Film berupa *videotron* sebesar Rp263.500.000,00;
11) Pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali terdapat Alat Studio Lainnya berupa rak *mixer* serta Peralatan Studio Audio berupa *sound system* sebesar Rp119.726.999,00;
12) Pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali terdapat Peralatan Studio Audio berupa *sound system* dan alat perekam suara, serta Peralatan Studio Video dan Film berupa kamera dan *display videowall* sebesar Rp8.033.659.082,00;
13) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali terdapat Peralatan Studio Audio sebesar Rp135.258.999,00;
14) Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali terdapat Peralatan Studio Video dan Film berupa kamera dan tripod (Sony A7III *mirrorless camera kit* 28–70 mm) sebesar Rp40.549.999,00;
15) Pada Badan Penghubung Provinsi Bali terdapat Alat Komunikasi Lainnya berupa *Handy Talky* (HT) serta Peralatan Studio Audio berupa *sound system* sebesar Rp43.525.248,00;
16) Pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali berupa Peralatan Studio Video dan Film berupa kamera foto serta Peralatan Studio Audio berupa *mic omnidirectional* sebesar Rp97.900.001,00;
17) Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali terdapat Peralatan Studio Audio berupa *sound system* sebesar Rp115.240.200,00; dan
18) Pada UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali terdapat Peralatan Studio Audio berupa alat perekam suara sebesar Rp19.250.000,00.

g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan dengan kenaikan signifikan sebesar Rp36.029.308.347,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat peningkatan pengadaan alat kedokteran dan alat kesehatan pada fasilitas layanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi Bali guna mendukung peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta pemenuhan kebutuhan operasional layanan, dengan rincian sebagai berikut:
1) Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali, di antaranya:
a) RSUD Bali Mandara terdapat Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam berupa *Handheld* USG *Doppler*, Alat Kedokteran Mata berupa *Fotofundus*, serta Alat Kedokteran Nuklir berupa PET/CT, sebesar Rp45.923.500.000,00;
b) Pada Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya terdapat Alat Kesehatan Umum Lainnya berupa *bed* pasien, serta Alat Kedokteran Umum berupa *Trolley Emergency Advance* PC sebanyak 2 (dua) unit dan Peralatan Penunjang Layanan Kesehatan Lainnya sebesar Rp947.655.496,00; dan
c) Pada UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional terdapat Belanja Modal Alat Kedokteran dan Belanja Modal Alat Laboratorium pada Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) sebesar Rp1.244.254.316,00.
2) Pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali terdapat Belanja Modal Alat Kedokteran Umum pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sebesar Rp11.175.000,00.

h. Belanja Modal Alat Laboratorium dengan kenaikan signifikan sebesar Rp19.853.749.589,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat peningkatan realisasi pengadaan alat laboratorium dan peralatan pendukung pengujian/praktik pada beberapa perangkat daerah, terutama untuk mendukung penyediaan sarana praktik/laboratorium pendidikan serta kebutuhan pengujian mutu dan monitoring teknis, dengan rincian sebagai berikut:
1) Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali terdapat Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya serta Belanja Modal Alat Laboratorium Umum (Laboratorium Pendidikan) sebesar Rp25.907.947.988,00;

2) Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali, di antaranya:
   a) Pada UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional berupa Belanja Modal Alat Kedokteran dan Belanja Modal Alat Laboratorium pada Sub Kegiatan SPGDT sebesar Rp4.560.000,00; dan
   b) Pada UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan berupa alat laboratorium fisika pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional sebesar Rp9.324.000,00.
3) Pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali terdapat Laboratorium Kearsipan berupa *paper shredder* sebesar Rp5.439.000,00;
4) Pada UPTD Balai Peralatan dan Pengujian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali berupa Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi serta Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan sebesar Rp327.640.000,00;
5) Pada UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali berupa Alat Laboratorium Umum berupa *pippet controller* serta Alat Laboratorium Lainnya berupa *accumax micropippete* sebesar Rp71.060.839,00; dan
6) Pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali berupa Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya serta Alat Laboratorium Lain sebesar Rp9.640.000,00.

i. Belanja Modal Komputer dengan kenaikan signifikan sebesar Rp20.058.506.856,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat peningkatan realisasi pengadaan dan pembaruan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara lebih intensif untuk mendukung penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik, penguatan layanan digital, serta pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah, dengan komposisi sebagai berikut:
   1) Sebesar 62,74% dari total realisasi atau Rp18.064.372.228,00 merupakan Belanja Modal Personal Computer (realisasi setelah pengembalian belanja). Sebagai contoh, pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali untuk pengadaan komputer pada SMKN se-Bali;
   2) Sebesar 23,74% dari total realisasi atau Rp6.836.551.067,00 merupakan Belanja Modal Peralatan Jaringan, yang terutama terkait dengan penguatan infrastruktur jaringan dan pusat kendali. Sebagai contoh, pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk pekerjaan HCI *Cloud System* serta pengadaan perangkat jaringan (antara lain *core switch*/ *switch* dan perangkat pendukung); dan
   3) Sebesar 13,52% dari total realisasi atau Rp3.892.469.387,00 merupakan Belanja Modal Peralatan Personal Computer, Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya, Belanja Modal Komputer Unit Lainnya, dan Belanja Modal Komputer Jaringan.

j. Belanja Modal Alat Eksplorasi memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp45.400.000,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat efisiensi dan pengendalian belanja sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 7054 Tahun 2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali TA 2025 tanggal 22 Oktober 2025, sehingga Belanja Modal Alat Eksplorasi dilakukan penyesuaian prioritas dan penjadwalan kembali;

k. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat efisiensi dan pengendalian belanja sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 7054 Tahun 2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali TA 2025 tanggal 22 Oktober 2025, sehingga Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian dilakukan penyesuaian prioritas dan penjadwalan kembali;

l. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp57.300.000,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tidak terdapat alokasi untuk belanja tersebut pada TA 2025;

m. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja dengan penurunan signifikan sebesar (Rp643.459.998,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali difokuskan pada pemenuhan kebutuhan alat keselamatan kerja berupa tenda pengungsi, sedangkan kebutuhan lainnya terbantu melalui penerimaan hibah alat *Search and Rescue* (SAR) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BAST-290/DSP-103/LOGPAL-BALI/D=III/BNPB/09/2025, sehingga pemenuhan sebagian kebutuhan peralatan keselamatan kerja dapat didukung melalui mekanisme hibah;

n. Belanja Modal Rambu-Rambu dengan kenaikan signifikan sebesar Rp708.592.709,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat peningkatan realisasi kegiatan peningkatan keselamatan dan manajemen lalu lintas melalui pengadaan dan pemasangan rambu-rambu, termasuk rambu bersuar dan rambu lalu lintas darat lainnya, serta penyediaan sarana pendukung pengendalian lalu lintas, dengan rincian sebagai berikut:
   1) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali berupa Rambu Tidak Bersuar berupa papan informasi Jalan Provinsi sebesar Rp99.067.500,00; dan
   2) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali, di antaranya:
      a) Pada UPTD Perlengkapan Jalan berupa Rambu Bersuar dan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya, antara lain pengadaan dan pemasangan *warning light* tenaga surya serta Zona Selamat Sekolah (ZoSS) termasuk kegiatan pengawasan, sebesar Rp512.525.209,00; dan
      b) Pada UPTD Pusat Pengendalian LLAJ berupa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya berupa alat hitung lalu lintas portabel sebesar Rp192.500.000,00.

o. Belanja Modal Peralatan Olahraga dengan realisasi sebesar Rp74.085.000,00 pada TA 2025 dan merupakan realisasi baru, di mana tidak terdapat realisasi pada TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat kebutuhan pengadaan peralatan olahraga untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan aktivitas olahraga atau kompetisi, serta pemenuhan sarana pendukung kegiatan perangkat daerah, dengan rincian sebagai berikut:
   1) Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali berupa Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik untuk kegiatan Pekan Olahraga Pelajar (PORJAR) serta Belanja Modal Peralatan Permainan untuk kegiatan *Training Center* (TC) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) sebesar Rp66.960.000,00;
   2) Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali berupa Belanja Modal Peralatan Permainan terkait kegiatan Belanja Jantra Tradisi Bali (Terompah Panjang) sebesar Rp3.375.000,00; dan
   3) Pada UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali berupa Belanja Modal Peralatan Senam sebesar Rp3.750.000,00.

p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp42.816.245.711,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada TA 2025 belanja yang pada tahun sebelumnya disajikan pada nomenklatur Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS telah dialihkan penyajiannya menjadi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, sebagai penyesuaian klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur belanja Dana BOS dalam APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah;

q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP dengan realisasi sebesar Rp42.580.231.926,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat realisasi belanja modal yang bersumber dari BOSP pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan mesin pada satuan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB, sesuai ketentuan pemanfaatan dana BOSP, dengan komposisi sebagai berikut:
   1) Sebesar 99,41% merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler atau sebesar Rp42.330.526.400,00, yang terdiri dari jenjang SMA sebesar Rp21.517.584.853,00, jenjang SMK sebesar Rp19.380.954.047,00, dan jenjang SLB sebesar Rp1.431.987.500,00; dan
   2) Sebesar 0,59% merupakan Belanja Modal BOSP-BOS Kinerja atau sebesar Rp249.705.526,00, yang terdiri dari jenjang SMA sebesar Rp83.184.526,00 dan jenjang SMK sebesar Rp166.521.000,00.

r. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 77,50% pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pelaksanaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada BLUD direalisasikan sesuai kebutuhan layanan serta kesiapan pelaksanaan pengadaan pada masing-masing BLUD, sehingga sampai dengan akhir TA 2025 masih terdapat sebagian rencana belanja modal yang belum dapat direalisasikan.

2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 13***.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Berikut ini adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.3.1 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	312.766.552.324,00	233.401.336.963,35	74,62	398.486.846.224,00
Belanja Modal Monumen	60.000.000,00	24.719.700,00	41,19	5.651.346.599,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.418.527.580,00	3.100.165.659,00	90,68	14.818.500,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	5.372.176.825,00	3.967.775.274,67	73,85	3.336.283.051,22
Jumlah	**321.617.256.729,00**	**240.493.997.597,02**	**74,77**	**407.489.294.374,22**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp166.995.296.777,20) atau -40,98%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Modal Bangunan Gedung memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 74,62% pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan, dengan rincian sebagai berikut:
      1) Sebesar 47,99% dari total realisasi atau Rp112.009.801.566,53 merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali berupa pembangunan/peningkatan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, antara lain pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada SMA Negeri beserta sarana pendukungnya. Nilai tersebut merupakan akumulasi pembayaran yang mencakup uang muka, pembayaran termin/tahap, retensi, serta belanja perencanaan dan pengawasan;
      2) Sebesar 22,41% dari total realisasi atau Rp52.307.994.374,00 merupakan Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum, di antaranya:
         a) Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, di antaranya:
            (1) Bangunan Fasilitas Umum untuk penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah/Turyapada (antara lain pekerjaan sarana dan prasarana pusat kendali, bangunan pendukung, serta pembangunan *tower* transmisi sinyal beserta fasilitas penunjangnya) sebesar Rp49.220.549.800,00. Nilai tersebut merupakan akumulasi pembayaran yang telah mencakup pembayaran termin/tahap, retensi, serta paket pendukung; dan
            (2) Pada UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali berupa Bangunan Fasilitas Umum (Teleskop Area *Panoramic*) sebesar Rp995.000.000,00.
         b) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali berupa Bangunan Fasilitas Umum dalam bentuk jasa perencanaan sebesar Rp10.762.612,00, dengan realisasi pada tanggal 10 Desember 2025;
         c) Pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali berupa Bangunan Fasilitas Umum (Rumah Perlindungan Sementara) sebesar Rp2.081.681.962,00. Nilai tersebut merupakan akumulasi pembayaran yang telah mencakup pembayaran termin/tahap serta perencanaan/pengawasan.
      3) Sebesar 7,84% dari total realisasi atau Rp18.303.695.141,00 merupakan Belanja Modal Bangunan Kesehatan, di antaranya:
         a) Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali, di antaranya:
            (1) Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali berupa Bangunan Kesehatan (pembangunan/rehabilitasi sarana layanan Napza) sebesar Rp13.892.816.425,00. Nilai tersebut merupakan akumulasi pembayaran yang telah mencakup uang muka, pembayaran termin/tahap, retensi, serta perencanaan dan pengawasan;
            (2) Pada Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya Provinsi Bali berupa Bangunan Kesehatan dalam bentuk jasa perencanaan (*Masterplan* dan DED) sebesar Rp686.417.118,00; dan
            (3) Pada UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional berupa Bangunan Kesehatan (antara lain pekerjaan penyekatan/interior penunjang layanan) sebesar Rp545.844.948,00.
         b) Pada UPTD Pelayanan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali berupa Bangunan Kesehatan (rehabilitasi ruang kesehatan pada unit layanan sosial) sebesar Rp3.178.616.650,00.
      4) Sebesar 7,62% dari total realisasi atau Rp17.792.475.544,00 merupakan Belanja Modal Bangunan Tempat Persidangan, pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali berupa Bangunan Tempat Persidangan (rehabilitasi Gedung Ruang Sidang Utama) sebesar

Rp17.792.475.544,00. Nilai tersebut merupakan akumulasi pembayaran yang mencakup uang muka, pembayaran termin/tahap, retensi, serta pengawasan;

5) Sebesar 6,08% dari total realisasi atau Rp14.195.386.126,76 merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor, di antaranya:
   a) Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Kantor (kegiatan penunjang, antara lain perencanaan dan/atau pekerjaan penataan ruang pendukung) sebesar Rp275.033.848,00;
   b) Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali, di antaranya:
      (1) Bangunan Gedung Kantor (jasa perencanaan rehabilitasi gedung kantor) sebesar Rp96.790.046,40; dan
      (2) Pada UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional berupa Bangunan Gedung Kantor (rehabilitasi atap/plafon serta belanja pendukung perencanaan/pengawasan yang terkait) sebesar Rp497.646.959,00.
   c) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Kantor (perencanaan teknis/reviu perencanaan rehabilitasi gedung perkantoran) sebesar Rp296.116.874,00;
   d) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, di antaranya:
      (1) Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor (termasuk penyelesaian kewajiban pembayaran dan pengawasan) sebesar Rp1.695.127.962,00; dan
      (2) Pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak berupa Bangunan Gedung Kantor (pembangunan gedung kantor UPTD PPA beserta perencanaan dan pengawasan) sebesar Rp1.942.430.075,00.
   e) Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Kantor terkait penguatan fasilitas pusat kendali (antara lain rehabilitasi ruang rapat SPBE, pembangunan ruang *power house*, pengawasan pusat kendali, serta perencanaan rehabilitasi gedung) sebesar Rp753.409.445,78;
   f) Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Kantor (revitalisasi/rehabilitasi gedung kantor beserta perencanaan dan pengawasan) sebesar Rp267.978.939,61;
   g) Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Kantor (pekerjaan sarana prasarana gedung beserta perencanaan dan pengawasan) sebesar Rp127.932.000,00;
   h) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali berupa rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor beserta perencanaan dan pengawasan sebesar Rp2.126.305.533,00;
   i) Pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Kantor (rehabilitasi toilet gedung) sebesar Rp140.279.000,00;
   j) Pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Kantor (ruang konsultasi DPRD) sebesar Rp496.080.804,00;
   k) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Kantor (rehabilitasi ruang/lantai serta penyelesaian pembayaran dan pengawasan) sebesar Rp220.813.578,00;
   l) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Kantor (antara lain pembangunan Gedung TNKB dan Kantin serta penataan/pengembangan ruang layanan pada UPTD PPRD) sebesar Rp4.773.709.179,97;
   m) Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Kantor (rehabilitasi/renovasi bagian bangunan kantor) sebesar Rp161.681.235,00;
   n) Pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali berupa rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor beserta perencanaan dan pengawasan sebesar Rp192.895.100,00; dan
   o) Pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Kantor (rehabilitasi bangunan gedung kantor) sebesar Rp131.155.501,00.
6) Sebesar 4,77% dari total realisasi atau Rp11.135.820.829,97 merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah, di antaranya:
   a) Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Tempat Ibadah (antara lain pembangunan Padmasana pada satuan pendidikan beserta perencanaan dan pengawasan) sebesar Rp482.085.473,97;
   b) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Tempat Ibadah (antara lain penataan/akses kawasan suci dan drainase kawasan suci beserta perencanaan dan pengawasan) sebesar Rp10.418.361.397,00; dan

c) Pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Tempat Ibadah (rehabilitasi pura di lingkungan kantor beserta perencanaan dan pengawasan) sebesar Rp235.373.959,00.

7) Sebesar 3,28% dari total realisasi atau Rp7.656.163.381,09 terdiri atas beberapa jenis Belanja Modal Bangunan, di antaranya:
   a) Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (pembangunan Gedung Aula beserta perencanaan, pengawasan, dan retensi) sebesar Rp1.604.784.000,00;
   b) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali berupa Bangunan Parkir (perencanaan teknis gedung parkir kawasan pelabuhan) dan Flat/Rumah Susun (kegiatan penunjang rusunawa) sebesar Rp922.408.169,00;
   c) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali berupa Bangunan Gudang (pembangunan gudang BPBD beserta perencanaan, pengawasan, dan retensi) sebesar Rp2.041.600.840,36;
   d) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali berupa Taman sebesar Rp9.758.010,00;
   e) Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali di antaranya:
      (2) Bangunan Gedung untuk Pos Jaga dan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp116.525.290,76; dan
      (3) Pada UPTD Museum Bali berupa Bangunan Gedung Museum (rehabilitasi/restorasi dan perencanaan) sebesar Rp1.036.845.964,00.
   f) Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali berupa Taman dan Bangunan Terbuka di lingkungan kantor sebesar Rp143.931.624,00;
   g) Pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali berupa Bangunan Terbuka serta Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/Taman sebesar Rp484.419.319,00;
   h) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali berupa Bangunan Gedung Garasi/Pool dan Bangunan Parkir sebesar Rp37.125.225,00;
   i) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali berupa Bangunan Terbuka (kanopi pada UPTD PPRD di kabupaten/kota) sebesar Rp277.854.936,97; dan
   j) Pada UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali berupa Bangunan Gudang (gudang obat *expired* beserta pengawasan) dan Bangunan Gedung Laboratorium sebesar Rp778.780.002,00; dan
   k) Pada UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali berupa Bangunan Terbuka penunjang pengelolaan persampahan sebesar Rp202.130.000,00.

b. Belanja Modal Monumen memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 41,19% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp5.626.626.899,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali, pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi serta pengendalian belanja;
c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti dengan kenaikan signifikan sebesar Rp3.085.347.159,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat peningkatan paket-paket pekerjaan Belanja Modal Pagar, sehingga kenaikan realisasi dapat dipengaruhi oleh pelaksanaan pekerjaan fisik, pembayaran uang muka, pembayaran termin/angsuran, pembayaran jasa pengawasan, serta pembayaran retensi atas kegiatan pembangunan/pengadaan/rehabilitasi tembok penyengker/pagar, dengan rincian sebagai berikut:
   1) Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sebesar Rp2.672.641.000,00, yang berlokasi di SMKN 1 Tembuku, SMKN 2 Negara, SMKN 2 Tegallalang, dan SLBN 2 Denpasar.
   2) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali sebesar Rp341.560.000,00, yang berlokasi di Rusunawa ASN Penatih (Relokasi Program Provinsi), terdiri dari pembayaran uang muka, pembayaran progres 95%, dan retensi 5% atas pengadaan tembok pagar/*penyengker*;
   3) Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebesar Rp74.242.800,00 berlokasi di Kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah Jl. Melati No. 23, Denpasar untuk rehabilitasi atau renovasi tembok pada bagian belakang kantor; dan
   4) Pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebesar Rp11.721.859,00, yang berlokasi di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Bali Jl. D.I. Panjaitan No. 14 Niti Mandala, Denpasar berupa pekerjaan pintu pagar.

d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 73,85% pada TA 2025. Walau demikian, realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada BLUD yang volumenya relatif lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, penyerapannya belum dapat mendekati target dikarenakan sebagian besar alokasi belanja merupakan pekerjaan fisik yang memerlukan rangkaian tahapan pelaksanaan sesuai ketentuan pengadaan, meliputi persiapan perencanaan (DED), penyusunan dokumen pengadaan, proses pemilihan penyedia, serta masa sanggah, sehingga penandatanganan kontrak pada beberapa paket pekerjaan baru dapat dilakukan pada akhir tahun anggaran. Dampaknya, pekerjaan fisik dan realisasi pembayaran (uang muka atau termin) hanya dapat berjalan dalam sisa waktu pelaksanaan yang tersedia, sehingga realisasi pada TA 2025 belum optimal meskipun secara nominal menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 14***.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Berikut ini adalah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.4.1 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	210.198.677.070,00	183.290.331.207,36	87,19	67.093.118.028,00
Belanja Modal Bangunan Air	22.508.489.772,00	19.653.582.341,00	87,31	11.454.013.321,00
Belanja Modal Instalasi	19.681.752.757,00	12.477.297.859,00	63,39	1.627.853.890,69
Belanja Modal Jaringan	34.846.550.155,00	24.854.390.901,45	71,32	10.212.120.985,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2.984.500.000,00	411.996.291,00	13,80	4.064.342.866,00
Jumlah	**290.219.969.754,00**	**240.687.598.599,81**	**82,93**	**94.451.449.090,69**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp146.236.149.509,12 atau 154,83%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan dengan kenaikan signifikan sebesar Rp116.197.213.179,36 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat peningkatan volume dan nilai pekerjaan infrastruktur jalan provinsi (pemeliharaan berkala, rekonstruksi/peningkatan, pelebaran, serta rehabilitasi/perkuatan tebing dan saluran) pada sejumlah ruas, sehingga pembayaran termin/MC dan retensi yang mengikuti progres fisik juga menjadi lebih besar, dengan rincian sebagai berikut:
      1) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp183.258.286.668,00, terdiri dari:
         a) Belanja Modal Jalan Provinsi sebesar Rp179.458.803.918,00, yang direalisasikan untuk paket pemeliharaan berkala, rekonstruksi/peningkatan jalan, pelebaran menuju standar, serta penanganan titik rawan (perkuatan tebing dan saluran) pada ruas strategis, antara lain ruas Tegaltamu–Payangan–Baturanyar (Segmen I–III), Pempatan–Ban, Bts. Kota Amlapura–Seraya–Culik, Wanagiri–Munduk–Mayong, Tampaksiring–Tegallalang, Rendang–Bts. Kota Amlapura, Ketewel–Sukawati, serta Bts. Kediri–Tanah Lot, dan ruas provinsi lainnya sesuai progres fisik serta ketentuan pembayaran termin/retensi;
         b) Belanja Modal Jalan Lainnya sebesar Rp3.158.015.748,00, yang dipergunakan untuk dukungan perencanaan teknis dan dokumen pendukung pada beberapa rencana penanganan/akses jalan, antara lain *Basic Design* Jalan Baru Sang Hyang Ambu, perencanaan Jalan Akses menuju Pelabuhan Sanur, penyusunan dokumen perencanaan/pendukung untuk Jalan Baru Mahendradatta–Sunset Road, serta

dukungan awal pada Pembangunan Jalan Baru Bts. Kota Singaraja–Mengwitani (kebutuhan patok/pemetaan/pemecahan sertifikat); dan

c) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi sebesar Rp641.467.002,00, yang dipergunakan terutama untuk perencanaan teknik jembatan pada beberapa lokasi prioritas, antara lain perencanaan Jembatan Tukad Sangsang II (ruas Bts. Kota Bangli–Kayuambua), perencanaan jembatan pada ruas Pempatan–Ban, serta perencanaan penggantian jembatan pada ruas Tampaksiring–Tegallalang.

2) Pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp32.044.539,36, berupa pekerjaan *paving* pada UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar.

b. Belanja Modal Bangunan Air dengan kenaikan signifikan sebesar Rp8.199.569.020,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat peningkatan pelaksanaan paket pekerjaan bangunan air, terutama pembangunan pengaman pantai serta rehabilitasi jaringan irigasi, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp19.623.829.936,00, di antaranya:

a) Pembangunan Pengaman Pantai Cengceng Kembar di Kabupaten Jembrana yang meliputi konstruksi bangunan pengaman pantai (*sea wall*), pengawasan pelaksanaan, serta retensi sebesar Rp5.870.087.000,00;

b) Pembangunan Pengaman Pantai Syahbandar di Kabupaten Karangasem yang meliputi konstruksi *sea wall*, penyusunan dokumen lingkungan, pengawasan pelaksanaan, serta retensi sebesar Rp3.633.234.480,00;

c) Perencanaan teknis (DED) Pembangunan Pengaman Pantai di Desa Tianyar Kabupaten Karangasem yang mencakup penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan sebesar Rp227.826.597,00;

d) Penyusunan dokumen lingkungan pembangunan pengaman pantai pada Pantai Julah (Kabupaten Buleleng) dan Pantai Penyaringan (Kabupaten Jembrana) sebesar Rp198.966.497,00;

e) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bekutel dan D.I. Apuan (Kabupaten Bangli dan Kabupaten Gianyar) yang meliputi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, pengawasan pelaksanaan, serta tahapan penyelesaian/retensi sebesar Rp5.284.888.171,00;

f) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Oongan (Kota Denpasar) dan D.I. Padpadan (Kabupaten Bangli dan Kabupaten Gianyar) yang meliputi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, pengawasan pelaksanaan, serta tahapan penyelesaian/retensi sebesar Rp3.567.692.786,00;

g) Reviu desain jaringan irigasi pada D.I. Balian (Kabupaten Tabanan), D.I. Tembuku (Kabupaten Bangli–Kabupaten Gianyar), D.I. Oongan (Kota Denpasar), D.I. Padpadan (Kabupaten Bangli–Kabupaten Gianyar), serta D.I. Dwi Eka Buana (Kabupaten Bangli–Kabupaten Gianyar) yang mencakup penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan sebesar Rp641.677.669,00; dan

h) Perencanaan bangunan tampungan air (embung) yang mencakup penyusunan dokumen lingkungan Pembangunan Embung Cemara di Kabupaten Karangasem dan kajian teknis Embung Puragae di Kabupaten Karangasem sebesar Rp199.456.736,00.

2) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp29.752.405,00, berupa Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor (Saluran Pembuang Air Kotor) sebesar Rp29.752.405,00.

c. Belanja Modal Instalasi memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 63,39% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp10.849.443.968,31 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:

1) Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali, di antaranya:

a) Pada RSUD Bali Mandara sebesar Rp8.092.853.133,00, berupa Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang mencakup konstruksi/pembangunan IPAL serta pengawasan pembangunan IPAL; dan

b) Pada UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional sebesar Rp82.816.666,00, berupa:

(1) Bangunan Penampung Sampah sebesar Rp23.430.000,00; dan

(2) Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Klinik Pratama sebesar Rp59.386.666,00.

2) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.401.645.800,00, berupa Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang mencakup

perencanaan pemasangan pipa, pemasangan pipa tersier dan sambungan pelanggan, pengawasan pelaksanaan, serta pembayaran bertahap (uang muka, termin, dan retensi);

3) Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp1.198.500.000,00, berupa:
   a) Instalasi Panel dan *Cable System* Ruang Pusat Kendali Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp594.200.000,00; dan
   b) Instalasi Sistem *Sky Walk* pada Pusat Kendali Pemerintah Daerah sebesar Rp604.300.000,00.
4) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp8.880.000,00, berupa Paket Jaringan Internet pada subkegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; dan
5) Pada UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali sebesar Rp692.602.260,00, berupa Instalasi Pengolahan Gas Metana TPA Regional Sarbagita.

d. Belanja Modal Jaringan memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 71,32% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp14.642.269.916,45 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat penambahan pelaksanaan paket pekerjaan jaringan, dengan rincian sebagai berikut:
   1) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp23.171.395.700,00, berupa:
      a) Pengembangan SPAM Regional Petanu untuk Kawasan Denpasar Selatan (DAK) yang mencakup uang muka, termin I–IV, pengawasan pekerjaan, dan retensi sebesar Rp15.737.223.300,00;
      b) Optimalisasi SPAM Petanu (Pengadaan dan Pemasangan Pompa *Booster* Optimalisasi JDU SPAM Petanu *Tapping* Ketewel) yang mencakup uang muka/termin pelaksanaan, pengawasan pekerjaan, dan retensi sebesar Rp7.334.932.500,00; dan
      c) Perencanaan optimalisasi SPAM Petanu dan SPAM Penet (*Tapping* Ketewel dan *Tapping* Berawa) sebesar Rp99.239.900,00.
   2) Pada Dinas Pariwisata sebesar Rp159.573.378,00, berupa Perbaikan Jaringan Instalasi Listrik pada kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya sebesar Rp159.573.378,00;
   3) Pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali sebesar Rp157.065.000,00, berupa Penyediaan/penataan Jaringan Listrik pada subkegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah sebesar Rp157.065.000,00;
   4) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp36.452.400,00, berupa Perluasan Jaringan Instalasi Listrik pada kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sebesar Rp36.452.400,00;
   5) Pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp9.990.000,00, berupa Penambahan Daya Listrik pada UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung sebesar Rp9.990.000,00;
   6) Pada UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, berupa Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Rp1.072.246.214,00; dan
   7) Pada UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali berupa pekerjaan belanja modal jaringan listrik lainnya, pengawasan sistem transmisi listrik, dan pengadaan sistem transmisi listrik sebesar Rp247.668.209,45.

e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 13,80% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp3.652.346.575,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada BLUD relatif lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari sisi jumlah paket maupun nilai pekerjaan yang dapat dituntaskan dalam tahun berjalan. Selain itu, penyerapannya belum dapat mendekati target karena sebagian besar alokasi belanja merupakan pekerjaan fisik yang memerlukan rangkaian tahapan pelaksanaan sesuai ketentuan pengadaan, meliputi persiapan perencanaan (survei/ukur teknis dan penyusunan dokumen perencanaan), penyusunan dokumen pengadaan, proses pemilihan penyedia, serta masa sanggah, sehingga pelaksanaan pada beberapa paket pekerjaan tidak dapat segera dimulai atau baru berjalan pada paruh akhir tahun anggaran.

2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 15***.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Berikut ini adalah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.5.1 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	45.000.000,00	44.799.600,00	99,55	98.531.370,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	300.000.000,00	298.680.549,00	99,56	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	28.752.067.697,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	32.013.774.193,00	31.211.500.171,00	97,49	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	2.060.000.000,00	42.000.000,00	2,03	2.532.000.000,00
Jumlah	**34.418.774.193,00**	**31.596.980.320,00**	**91,80**	**31.382.599.067,00**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp214.381.253,00 atau 0,68%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan dengan penurunan signifikan sebesar (Rp53.731.770,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan hanya berasal dari Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, sehingga nilai realisasinya relatif terbatas. Selain itu, penurunan dibandingkan TA 2024 dapat dipengaruhi oleh pergeseran prioritas kebutuhan bahan pustaka serta perubahan mekanisme pelaksanaan kegiatan;
   b. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi dengan realisasi baru sebesar Rp298.680.549,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat pelaksanaan kegiatan renovasi sarana dan prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali berupa pekerjaan renovasi Gedung Rusunawa ASN Penatih yang masih berada dalam tahapan pekerjaan/penyelesaian, sehingga pengeluarannya dicatat terlebih dahulu sebagai Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi;
   c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS memiliki persentase capaian sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp28.752.067.697,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada TA 2025 belanja yang pada tahun sebelumnya disajikan pada nomenklatur Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS telah dialihkan penyajiannya menjadi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP, sebagai penyesuaian klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur belanja Dana BOS dalam APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah;
   d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP dengan realisasi baru sebesar Rp31.211.500.171,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat regulasi baru pada petunjuk dan teknis pengelolaan Dana BOSP yang menyatakan bahwa 10% dari Dana BOSP harus digunakan untuk pembelian buku; dan
   e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 2,03% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp2.490.000.000,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali, terdapat selisih antara anggaran dan realisasi, berupa Belanja Aplikasi ERM SIMRS yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 pada TA 2025 baru akan dibayarkan pada TA 2026. Adapun nilai yang menjadi kewajiban telah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Tahun 2025 pada Kewajiban Jangka Pendek serta Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.964.700.000,00;
      2) Pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali, berupa Windows Server dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp42.000.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp18.000.000,00. Sisa anggaran tersebut terjadi dikarenakan pada saat perencanaan, harga yang tersedia pada e-katalog masih mengacu pada Windows Server Versi 2022 sebesar Rp30.000.000,00 per item, sedangkan pada saat realisasi telah tersedia Windows Server Versi 2025 dengan harga Rp21.000.000,00 per item.
2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 16***.

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Berikut ini adalah Belanja Modal Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.6.1 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	176.649.600,00	153.536.964,90	86,91	838.900.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	536.000.000,00	389.922.000,00	72,74	0,00
Jumlah	**712.649.600,00**	**543.458.964,90**	**76,25**	**838.900.000,00**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp295.441.035,10) atau -35,22%.

5.1.2.2.6.1 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud

Berikut ini adalah Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.6.1.1 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	176.649.600,00	153.536.964,90	86,91	838.900.000,00
Jumlah	**176.649.600,00**	**153.536.964,90**	**86,91**	**838.900.000,00**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp685.363.035,10) atau -81,70%.

5.1.2.2.6.1.1 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Berikut ini adalah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.6.1.1.1 Rincian Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	116.649.600,00	96.015.000,00	82,31	49.300.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	60.000.000,00	57.521.964,90	95,86	789.600.000,00
Jumlah	**176.649.600,00**	**153.536.964,90**	**86,91**	**838.900.000,00**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp685.363.035,10) atau -81,70%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software dengan kenaikan signifikan sebesar Rp46.715.000,00 pada TA 2025 merupakan Sistem Monitoring Fasilitas Keselamatan Jalan pada UPTD PPLLAJ Dinas Perhubungan Provinsi Bali; dan
   b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian dengan penurunan signifikan sebesar (Rp732.078.035,10) pada TA 2025 berasal dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, di mana pengadaan kajian telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, untuk mendukung pengambilan kebijakan dan penyusunan dokumen perencanaan strategis. Selisih

anggaran dengan realisasi terjadi dikarenakan efisiensi proses pengadaan dan penyesuaian kebutuhan riil terhadap materi kajian yang diperlukan.

2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 17***.

5.1.2.2.6.2 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD

Berikut ini adalah Belanja Modal Aset Lainnya BLUD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.6.2.1 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya BLUD

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	536.000.000,00	389.922.000,00	72,74	0,00
Jumlah	**536.000.000,00**	**389.922.000,00**	**72,74**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Aset Lainnya BLUD TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp389.922.000,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Aset Lainnya BLUD TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   Belanja Modal Aset Lainnya BLUD memiliki capaian yang belum optimal dengan realisasi baru sebesar Rp389.922.000,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya sisa anggaran atas 2 (dua) paket pengadaan pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara, yaitu pengadaan server berupa SQL Server 2022 *Standard Core* 4 dan pengadaan lisensi Forum Zeiss ke PACS. Pada pengadaan server, anggaran disusun berdasarkan perencanaan tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan estimasi kebutuhan dan potensi kenaikan harga dari tahun perencanaan, sehingga pagu anggaran lebih tinggi dibandingkan nilai realisasi. Sementara itu, pada pengadaan lisensi, berdasarkan penawaran awal penyedia yang melebihi pagu anggaran dan karena pada saat penyusunan anggaran perubahan belum terdapat kepastian hasil negosiasi harga, dilakukan penyesuaian anggaran pada anggaran perubahan. Setelah dilakukan negosiasi, penyedia menyetujui harga sesuai pagu anggaran induk, sehingga terdapat sisa anggaran pada anggaran perubahan.

5.1.2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

Berikut ini adalah Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.3.1 Rincian Belanja Tidak Terduga

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tidak Terduga	53.861.777.244,00	14.075.388.800,30	26,13	7.441.134.041,00
Jumlah	**53.861.777.244,00**	**14.075.388.800,30**	**26,13**	**7.441.134.041,00**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tidak Terduga TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp6.634.254.759,30 atau 89,16%.

5.1.2.3.1 Belanja Tidak Terduga

Berikut ini adalah Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.3.1.1 Rincian Belanja Tidak Terduga

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tidak Terduga	53.861.777.244,00	14.075.388.800,30	26,13	7.441.134.041,00
Jumlah	**53.861.777.244,00**	**14.075.388.800,30**	**26,13**	**7.441.134.041,00**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tidak Terduga TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp6.634.254.759,30 atau 89,16%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

   Belanja Tidak Terduga memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 26,13% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp6.634.254.759,30 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebagai dana kontinjensi untuk kondisi darurat, kejadian luar biasa, dan keadaan mendesak lainnya, sehingga realisasi hanya dapat dilakukan apabila terdapat kebutuhan yang memenuhi kriteria serta didukung dasar yang memadai, dan akibatnya tidak seluruh alokasi dapat digunakan. Walau demikian, realisasi TA 2025 meningkat dibandingkan TA 2024 seiring adanya kebutuhan penanganan yang relatif lebih besar, terutama penyaluran bantuan sosial yang bersifat tidak dapat direncanakan untuk penanganan bencana/musibah dan pasca bencana serta pembayaran restitusi/pengembalian yang memerlukan tindak lanjut segera.
2. Pemerintah Provinsi Bali telah merealisasikan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan kondisi darurat, kejadian luar biasa, dan keadaan mendesak lainnya pada TA 2025 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Realisasi bantuan sosial yang bersifat tidak dapat direncanakan sebesar Rp12.358.200.000,00, yang diberikan sesuai kebutuhan penanganan bencana/musibah dan pasca bencana sebagai berikut:
      1) Bantuan sosial untuk korban bencana/musibah di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Tabanan sebesar Rp75.000.000,00, tercatat pada 10 Maret 2025;
      2) Bantuan sosial untuk korban bencana/musibah di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan sebesar Rp1.303.000.000,00, tercatat pada 10 Maret 2025;
      3) Bantuan sosial untuk korban bencana/musibah di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Klungkung sebesar Rp957.000.000,00, tercatat pada 21 April 2025;
      4) Bantuan sosial untuk korban bencana/musibah di Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Klungkung sebesar Rp982.500.000,00, tercatat pada 5 Juni 2025;
      5) Bantuan sosial untuk korban bencana/musibah di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Badung sebesar Rp1.439.300.000,00, tercatat pada 24 Juli 2025;
      6) Bantuan sosial untuk korban bencana/musibah di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan sebesar Rp766.400.000,00, tercatat pada 12 Agustus 2025;
      7) Bantuan sosial berupa sarana prasarana perekonomian dan santunan penguatan ekonomi di Kota Denpasar sebesar Rp2.714.000.000,00, tercatat pada 17 September 2025;
      8) Bantuan sosial untuk perbaikan tempat suci/ibadah akibat bencana di Kota Denpasar sebesar Rp710.500.000,00, tercatat pada 17 September 2025;
      9) Bantuan sosial pasca bencana/musibah untuk perbaikan rumah masyarakat, fasilitas umum, tempat suci/ibadah, sarana prasarana perekonomian, serta santunan luka berat di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, dan Kota Denpasar sebesar Rp886.500.000,00, tercatat pada 17 November 2025; dan
      10) Bantuan sosial pasca bencana/musibah untuk perbaikan sarana prasarana perekonomian, rumah masyarakat, fasilitas umum, tempat suci/ibadah, serta santunan di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, dan Kota Denpasar sebesar Rp2.524.000.000,00, tercatat pada 11 Desember 2025.
   b. Selain bantuan sosial, BTT pada TA 2025 juga digunakan untuk pembayaran restitusi/pengembalian yang memerlukan tindak lanjut segera sebesar Rp3.426.782.296,00, sebagai berikut:

1) Pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan PKB dan BBNKB Bulan Desember 2024 atas nama Putu Agus Yanta sesuai SK Gubernur Bali Nomor 385/04-E/HK/2025 tanggal 14 April 2025 sebesar Rp21.888.800,00;
2) Pembayaran restitusi Dana BOSP terkait pengembalian SiLPA Dana BOSP TA 2019 sampai dengan TA 2022 melalui KPPN Denpasar ke RKUN sesuai Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Bali Nomor 5004 Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025 sebesar Rp3.056.472.413,00;
3) Pembayaran restitusi Dana BOSP TA 2021 sampai dengan TA 2023 pada SMKN 2 Negara melalui KPPN Denpasar ke RKUN sesuai Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Bali Nomor 5003 Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025 sebesar Rp42.400.000,00;
4) Pembayaran restitusi Dana BOSP terkait belanja barang dan jasa BOSP yang tidak sesuai ketentuan melalui KPPN Denpasar ke RKUN sesuai Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Bali Nomor 5005 Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025 (termasuk pembulatan SIMPONI) sebesar Rp143.132.185,00;
5) Pembayaran restitusi kelebihan setoran ke Kas Daerah terkait SiLPA Dana BOSP TA 2019 sampai dengan TA 2022 pada SMAN 1 Gianyar serta temuan BPK RI atas belanja honorarium BOSP pada SLBN 1 Denpasar sesuai Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Bali Nomor 6755 Tahun 2025 sebesar Rp3.516.500,00; dan
6) Pembayaran restitusi pengembalian Dana BOSP yang tidak sesuai ketentuan melalui KPPN Denpasar ke RKUN sesuai Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Bali Nomor 8792 Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025 (termasuk pembulatan SIMPONI) sebesar Rp159.372.398,00.

c. Terdapat pengembalian/penyetoran kembali sebesar Rp136.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
   1) Pengembalian bantuan sosial kebencanaan di Desa Adat Utu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sebesar Rp85.000.000,00;
   2) Pengembalian bantuan sosial kebencanaan di Kabupaten Buleleng sebesar Rp19.000.000,00;
   3) Pengembalian bantuan sosial berupa sarana prasarana perekonomian dan santunan penguatan ekonomi di Kota Denpasar sebesar Rp12.000.000,00; dan
   4) Pengembalian bantuan sosial pasca bencana/musibah di Desa Sidan, Kabupaten Gianyar sebesar Rp20.000.000,00, tercatat pada 15 Desember 2025.
d. Terdapat penyesuaian dan reklasifikasi pencatatan melalui Jurnal Umum, yang terdiri dari kredit sebesar Rp3.404.893.495,70 dan debit sebesar Rp1.831.300.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
   1) Penyesuaian substansi restitusi sebesar Rp42.400.000,00, dengan Nomor Jurnal 51/09.0/000106/JU/JURNAL-UMUM/5.02.0.00.0.00.02.0000/02/2026;
   2) Penyesuaian substansi restitusi sebesar Rp143.132.185,00, dengan Nomor Jurnal 51/09.0/000110/JU/JURNAL-UMUM/5.02.0.00.0.00.02.0000/02/2026;
   3) Reklasifikasi penyetoran SiLPA BOSP TA 2019 sampai dengan TA 2022 ke RKUN sebesar Rp3.056.472.412,70, dengan Nomor Jurnal 51/09.0/000031/JU/JURNAL-UMUM/5.02.0.00.0.00.02.0000/01/2026;
   4) Penyesuaian substansi restitusi sebesar Rp3.516.500,00, dengan Nomor Jurnal 51/09.0/000108/JU/JURNAL-UMUM/5.02.0.00.0.00.02.0000/02/2026;
   5) Penyesuaian substansi restitusi sebesar Rp159.372.398,00, dengan Nomor Jurnal 51/09.0/000109/JU/JURNAL-UMUM/5.02.0.00.0.00.02.0000/02/2026; dan
   6) Reklasifikasi atas kesalahan pembebanan rekening sebesar Rp1.831.300.000,00, dengan Nomor Jurnal 51/09.0/000032/JU/JURNAL-UMUM/5.02.0.00.0.00.02.0000/01/2026.

3. Pemerintah Provinsi Bali dalam merealisasikan Belanja Tidak Terduga didasarkan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring, dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.
4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada ***Lampiran 18***.

5.1.2.4 BELANJA TRANSFER

Berikut ini adalah Belanja Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.4.1 Rincian Belanja Transfer

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil	1.018.848.956.716,00	965.738.976.448,00	94,78	1.800.971.992.343,00
Belanja Bantuan Keuangan	325.315.879.304,00	280.600.433.855,03	86,25	355.860.433.998,00
Jumlah	**1.344.164.836.020,00**	**1.246.339.410.303,03**	**92,72**	**2.156.832.426.341,00**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Transfer TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp910.493.016.037,97) atau -42,21%.

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Berikut ini adalah Belanja Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.4.1.1 Rincian Belanja Bagi Hasil

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.018.848.956.716,00	965.738.976.448,00	94,78	1.800.971.992.343,00
Jumlah	**1.018.848.956.716,00**	**965.738.976.448,00**	**94,78**	**1.800.971.992.343,00**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Bagi Hasil TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp835.233.015.895,00) atau -46,38%.

5.1.2.4.1.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

Berikut ini adalah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.4.1.1.1 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	1.018.848.956.716,00	965.738.976.448,00	94,78	1.513.443.514.254,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	0,00	0,00	0,00	287.528.478.089,00
Jumlah	**1.018.848.956.716,00**	**965.738.976.448,00**	**94,78**	**1.800.971.992.343,00**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp835.233.015.895,00) atau -46,38%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten memiliki persentase capaian yang mendekati anggaran sebesar 94,78% pada TA 2025 dan realisasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan realisasi TA 2024 dengan penurunan sebesar (Rp547.704.537.806,00). Hal ini dapat terjadi dikarenakan besaran Bagi Hasil Pajak Daerah relatif dipengaruhi oleh realisasi penerimaan pajak provinsi yang menjadi dasar pembagian, seperti PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok; dan
   b. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota memiliki persentase capaian sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp287.528.478.089,00) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:

1) Tidak terdapat penganggaran pada komponen belanja tersebut pada saat penyusunan anggaran TA 2025, di mana Standar Satuan Harga (SSH) untuk komponen Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota belum tersedia pada aplikasi SIPD RI Modul Penganggaran, sehingga alokasi bagi hasil kepada Kota Denpasar tidak dapat dianggarkan melalui mekanisme yang seharusnya; dan
2) Guna memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Bali dalam mendistribusikan bagi hasil pajak daerah kepada Kota Denpasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran bagi hasil dimaksud tetap dianggarkan, dilaksanakan dan dicairkan melalui komponen Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten dengan Kota Denpasar sebagai penerima. Dengan demikian, secara substansial kewajiban bagi hasil pajak daerah kepada Kota Denpasar telah terpenuhi seluruhnya pada TA 2025, meskipun pencatatannya tidak dapat dilakukan pada kode rekening yang semestinya akibat keterbatasan yang terdapat pada SIPD RI Modul Penganggaran.

2. Pemerintah Provinsi Bali merealisasikan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa pada TA 2025 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan direalisasikan pada Bulan Januari TA 2025, berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 224/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota se-Bali Bulan Januari Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2025, kepada:
      1) Kabupaten Buleleng sebesar Rp6.027.263.612,00;
      2) Kabupaten Jembrana sebesar Rp3.407.276.902,00;
      3) Kabupaten Tabanan sebesar Rp4.481.343.417,00;
      4) Kabupaten Badung sebesar Rp6.416.191.194,00;
      5) Kabupaten Gianyar sebesar Rp4.748.542.154,00;
      6) Kabupaten Bangli sebesar Rp2.846.786.954,00;
      7) Kabupaten Klungkung sebesar Rp2.794.511.813,00;
      8) Kabupaten Karangasem sebesar Rp4.327.477.548,00; dan
      9) Kota Denpasar sebesar Rp6.818.746.945,00.
   b. Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan direalisasikan pada Bulan Februari sampai dengan Desember TA 2025 berdasarkan:
      1) Keputusan Gubernur Bali Nomor 364/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota se-Bali Bulan Februari Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 25 Maret 2025, kepada:
         a) Kabupaten Buleleng sebesar Rp4.379.319.052,00;
         b) Kabupaten Jembrana sebesar Rp2.394.451.308,00;
         c) Kabupaten Tabanan sebesar Rp3.192.570.104,00;
         d) Kabupaten Badung sebesar Rp4.618.487.131,00;
         e) Kabupaten Gianyar sebesar Rp3.397.797.091,00;
         f) Kabupaten Bangli sebesar Rp1.969.124.999,00;
         g) Kabupaten Klungkung sebesar Rp1.935.655.517,00;
         h) Kabupaten Karangasem sebesar Rp3.085.380.108,00; dan
         i) Kota Denpasar sebesar Rp4.867.352.400,00.
      2) Keputusan Gubernur Bali Nomor 401/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota se-Bali Bulan Maret Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 17 April 2025, kepada:
         a) Kabupaten Buleleng sebesar Rp5.408.303.202,00;
         b) Kabupaten Jembrana sebesar Rp2.956.347.199,00;
         c) Kabupaten Tabanan sebesar Rp3.942.077.751,00;
         d) Kabupaten Badung sebesar Rp5.706.400.850,00;
         e) Kabupaten Gianyar sebesar Rp4.197.716.421,00;
         f) Kabupaten Bangli sebesar Rp2.432.123.560,00;
         g) Kabupaten Klungkung sebesar Rp2.391.540.797,00;
         h) Kabupaten Karangasem sebesar Rp3.811.165.272,00; dan
         i) Kota Denpasar sebesar Rp6.015.299.345,00.
      3) Keputusan Gubernur Bali Nomor 465/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota se-Bali Bulan April Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 22 Mei 2025, kepada:
         a) Kabupaten Buleleng sebesar Rp5.083.485.119,00;

b) Kabupaten Jembrana sebesar Rp2.778.992.837,00;
c) Kabupaten Tabanan sebesar Rp3.705.498.094,00;
d) Kabupaten Badung sebesar Rp5.362.909.506,00;
e) Kabupaten Gianyar sebesar Rp3.945.166.444,00;
f) Kabupaten Bangli sebesar Rp2.285.960.982,00;
g) Kabupaten Klungkung sebesar Rp2.247.604.146,00;
h) Kabupaten Karangasem sebesar Rp3.582.036.031,00; dan
i) Kota Denpasar sebesar Rp5.652.816.882,00.

4) Keputusan Gubernur Bali Nomor 540/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota se-Bali Bulan Mei Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 16 Juni 2025, kepada:
a) Kabupaten Buleleng sebesar Rp5.256.233.831,00;
b) Kabupaten Jembrana sebesar Rp2.873.496.181,00;
c) Kabupaten Tabanan sebesar Rp3.831.478.585,00;
d) Kabupaten Badung sebesar Rp5.544.898.813,00;
e) Kabupaten Gianyar sebesar Rp4.079.087.152,00;
f) Kabupaten Bangli sebesar Rp2.363.613.046,00;
g) Kabupaten Klungkung sebesar Rp2.323.882.739,00;
h) Kabupaten Karangasem sebesar Rp3.703.684.538,00; dan
i) Kota Denpasar sebesar Rp5.844.512.569,00.

5) Keputusan Gubernur Bali Nomor 747/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota se-Bali Bulan Juli Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 14 Agustus 2025, kepada:
a) Kabupaten Buleleng sebesar Rp5.790.424.094,00;
b) Kabupaten Jembrana sebesar Rp3.165.314.994,00;
c) Kabupaten Tabanan sebesar Rp4.220.681.643,00;
d) Kabupaten Badung sebesar Rp6.109.244.933,00;
e) Kabupaten Gianyar sebesar Rp4.494.110.868,00;
f) Kabupaten Bangli sebesar Rp2.603.923.823,00;
g) Kabupaten Klungkung sebesar Rp2.560.380.659,00;
h) Kabupaten Karangasem sebesar Rp4.080.338.271,00; dan
i) Kota Denpasar sebesar Rp6.439.775.334,00.

6) Keputusan Gubernur Bali Nomor 364/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota se-Bali Bulan Juli Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 25 Maret 2025, kepada:
a) Kabupaten Buleleng sebesar Rp5.314.100.138,00;
b) Kabupaten Jembrana sebesar Rp2.905.185.390,00;
c) Kabupaten Tabanan sebesar Rp3.873.708.014,00;
d) Kabupaten Badung sebesar Rp5.605.734.089,00;
e) Kabupaten Gianyar sebesar Rp4.123.875.062,00;
f) Kabupaten Bangli sebesar Rp2.389.609.468,00;
g) Kabupaten Klungkung sebesar Rp2.349.384.369,00;
h) Kabupaten Karangasem sebesar Rp3.744.395.207,00; dan
i) Kota Denpasar sebesar Rp5.908.527.162,00.

7) Keputusan Gubernur Bali Nomor 818/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota se-Bali Bulan Agustus Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 18 September 2025, kepada:
a) Kabupaten Buleleng sebesar Rp5.888.344.929,00;
b) Kabupaten Jembrana sebesar Rp3.218.831.493,00;
c) Kabupaten Tabanan sebesar Rp4.292.046.593,00;
d) Kabupaten Badung sebesar Rp6.212.601.572,00;
e) Kabupaten Gianyar sebesar Rp4.570.135.215,00;
f) Kabupaten Bangli sebesar Rp2.647.963.570,00;
g) Kabupaten Klungkung sebesar Rp2.603.696.218,00;
h) Kabupaten Karangasem sebesar Rp4.149.353.603,00; dan
i) Kota Denpasar sebesar Rp6.548.746.763,00.

8) Keputusan Gubernur Bali Nomor 913/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota se-Bali Bulan September Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 21 Oktober 2025, kepada:

a) Kabupaten Buleleng sebesar Rp5.773.482.322,00;
b) Kabupaten Jembrana sebesar Rp3.156.138.198,00;
c) Kabupaten Tabanan sebesar Rp4.208.407.323,00;
d) Kabupaten Badung sebesar Rp6.091.047.795,00;
e) Kabupaten Gianyar sebesar Rp4.480.778.054,00;
f) Kabupaten Bangli sebesar Rp2.596.266.935,00;
g) Kabupaten Klungkung sebesar Rp2.552.762.573,00;
h) Kabupaten Karangasem sebesar Rp4.068.301.902,00; dan
i) Kota Denpasar sebesar Rp6.420.427.194,00.

9) Keputusan Gubernur Bali Nomor 983/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota se-Bali Bulan Oktober Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 2 Desember 2025, kepada:
a) Kabupaten Buleleng sebesar Rp5.749.445.306,00;
b) Kabupaten Jembrana sebesar Rp3.142.858.776,00;
c) Kabupaten Tabanan sebesar Rp4.190.762.966,00;
d) Kabupaten Badung sebesar Rp6.066.221.310,00;
e) Kabupaten Gianyar sebesar Rp4.462.426.591,00;
f) Kabupaten Bangli sebesar Rp2.585.520.956,00;
g) Kabupaten Klungkung sebesar Rp2.542.344.030,00;
h) Kabupaten Karangasem sebesar Rp4.051.526.001,00; dan
i) Kota Denpasar sebesar Rp6.394.533.125,00.

10) Keputusan Gubernur Bali Nomor 1005/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota se-Bali Bulan November Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 15 Desember 2025, kepada:
a) Kabupaten Buleleng sebesar Rp6.039.924.909,00;
b) Kabupaten Jembrana sebesar Rp3.301.593.680,00;
c) Kabupaten Tabanan sebesar Rp4.402.447.177,00;
d) Kabupaten Badung sebesar Rp6.372.904.062,00;
e) Kabupaten Gianyar sebesar Rp4.687.995.280,00;
f) Kabupaten Bangli sebesar Rp2.716.172.965,00;
g) Kabupaten Klungkung sebesar Rp2.670.869.175,00;
h) Kabupaten Karangasem sebesar Rp4.256.281.878,00; dan
i) Kota Denpasar sebesar Rp6.717.916.474,00.

c. Bagi Hasil Pajak Rokok direalisasikan menurut Triwulan I sampai dengan IV, berdasarkan:
1) Keputusan Gubernur Bali Nomor 408/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota se-Bali Triwulan IV Bulan Desember Tahun Anggaran 2024 dan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 28 April 2025, kepada:
a) Kabupaten Buleleng sebesar Rp15.716.694.745,00;
b) Kabupaten Jembrana sebesar Rp8.177.579.399,00;
c) Kabupaten Tabanan sebesar Rp10.186.774.121,00;
d) Kabupaten Badung sebesar Rp11.550.265.964,00;
e) Kabupaten Gianyar sebesar Rp10.589.191.187,00;
f) Kabupaten Bangli sebesar Rp6.985.414.134,00;
g) Kabupaten Klungkung sebesar Rp6.503.819.868,00;
h) Kabupaten Karangasem sebesar Rp11.322.292.835,00; dan
i) Kota Denpasar sebesar Rp13.677.283.984,00.

2) Keputusan Gubernur Bali Nomor 702/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota se-Bali Triwulan II Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 1 Agustus 2025, kepada:
a) Kabupaten Buleleng sebesar Rp8.771.053.487,00;
b) Kabupaten Jembrana sebesar Rp4.563.681.326,00;
c) Kabupaten Tabanan sebesar Rp5.684.957.437,00
d) Kabupaten Badung sebesar Rp6.445.884.596,00;
e) Kabupaten Gianyar sebesar Rp5.909.535.293,00;
f) Kabupaten Bangli sebesar Rp3.898.366.800,00;
g) Kabupaten Klungkung sebesar Rp3.629.602.334,00;
h) Kabupaten Karangasem sebesar Rp6.318.659.086,00; dan
i) Kota Denpasar sebesar Rp7.632.914.638,00.

3) Keputusan Gubernur Bali Nomor 920/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota se-Bali Triwulan III Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 27 Oktober 2025, kepada:
   a) Kabupaten Buleleng sebesar Rp9.390.415.718,00;
   b) Kabupaten Jembrana sebesar Rp4.885.942.710,00;
   c) Kabupaten Tabanan sebesar Rp6.086.397.004,00;
   d) Kabupaten Badung sebesar Rp6.901.056.539,00;
   e) Kabupaten Gianyar sebesar Rp6.326.833.279,00;
   f) Kabupaten Bangli sebesar Rp4.173.647.433,00;
   g) Kabupaten Klungkung sebesar Rp3.885.904.340,00;
   h) Kabupaten Karangasem sebesar Rp6.764.847.083,00; dan
   i) Kota Denpasar sebesar Rp8.171.907.935,00.
4) Keputusan Gubernur Bali Nomor 1013/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota se-Bali Triwulan IV Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 19 Desember 2025, kepada:
   a) Kabupaten Buleleng sebesar Rp6.033.644.232,00;
   b) Kabupaten Jembrana sebesar Rp3.139.375.395,00;
   c) Kabupaten Tabanan sebesar Rp3.910.705.902,00;
   d) Kabupaten Badung sebesar Rp4.434.150.865,00;
   e) Kabupaten Gianyar sebesar Rp4.065.193.945,00;
   f) Kabupaten Bangli sebesar Rp2.681.702.761,00;
   g) Kabupaten Klungkung sebesar Rp2.496.818.566,00;
   h) Kabupaten Karangasem sebesar Rp4.346.631.907,00; dan
   i) Kota Denpasar sebesar Rp5.250.713.776,00.

d. Kewajiban Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan TA 2024 direalisasikan berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 845/04-E/HK/2025 tentang Kewajiban Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 25 September 2025, kepada:
   1) Kabupaten Buleleng sebesar Rp41.993.205.593,00;
   2) Kabupaten Jembrana sebesar Rp26.433.506.710,00;
   3) Kabupaten Tabanan sebesar Rp33.330.435.781,00;
   4) Kabupaten Badung sebesar Rp46.083.586.753,00;
   5) Kabupaten Gianyar sebesar Rp34.784.305.253,00;
   6) Kabupaten Bangli sebesar Rp23.105.327.805,00;
   7) Kabupaten Klungkung sebesar Rp22.577.803.210,00;
   8) Kabupaten Karangasem sebesar Rp32.078.368.624,00; dan
   9) Kota Denpasar sebesar Rp50.298.175.523,00.

3. Pemerintah Provinsi Bali dalam merealisasikan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa berdasarkan pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2022 tentang Mekanisme dan Tata Cara Belanja Bagi Hasil.
4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa dapat dilihat pada ***Lampiran 19***.

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Berikut ini adalah Belanja Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.4.2.1 Rincian Belanja Bantuan Keuangan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	236.296.079.304,00	192.057.433.855,03	81,27	269.381.700.098,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	89.019.800.000,00	88.543.000.000,00	99,46	86.478.733.900,00
Jumlah	**325.315.879.304,00**	**280.600.433.855,03**	**86,25**	**355.860.433.998,00**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp75.260.000.142,97) atau -21,15%.

5.1.2.4.2.1 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota

Berikut ini adalah Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.4.2.1.1 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	236.296.079.304,00	192.057.433.855,03	81,27	269.381.700.098,00
Jumlah	**236.296.079.304,00**	**192.057.433.855,03**	**81,27**	**269.381.700.098,00**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp77.324.266.242,97) atau -28,70%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota memiliki persentase sebesar 81,27% pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota yang mensyaratkan kelengkapan dokumen usulan, verifikasi, serta pertanggungjawaban sesuai ketentuan, sehingga penyaluran relatif bergantung pada kesiapan administrasi dan *readiness criteria* dari pemerintah kabupaten/kota.
2. Pemerintah Provinsi Bali merealisasikan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota pada TA 2025 dengan rincian sebagai berikut:
   a. BKK untuk Subak/Subak Abian sebesar Rp2.415.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1/03-O/HK/2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus pada Kabupaten/Kota untuk Subak/Subak Abian yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 23 Januari 2025, kepada:
      1) Kabupaten Buleleng sebesar Rp315.000.000,00;
      2) Kabupaten Jembrana sebesar Rp375.000.000,00;
      3) Kabupaten Badung sebesar Rp285.000.000,00;
      4) Kabupaten Gianyar sebesar Rp570.000.000,00;
      5) Kabupaten Bangli sebesar Rp345.000.000,00;
      6) Kabupaten Klungkung sebesar Rp30.000.000,00;
      7) Kabupaten Karangasem sebesar Rp345.000.000,00; dan
      8) Kota Denpasar sebesar Rp150.000.000,00.
   b. BKK dalam rangka Pengelolaan Sampah sebesar Rp35.417.506.900,03 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 3/03-P/HK/2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus pada Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengelolaan Sampah yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 31 Januari 2025, kepada:
      1) Kabupaten Bangli sebesar Rp3.947.715.000,00;
      2) Kabupaten Buleleng sebesar Rp3.632.300.000,80;
      3) Kabupaten Gianyar sebesar Rp4.486.700.000,00;
      4) Kabupaten Jembrana sebesar Rp3.890.455.000,00;
      5) Kabupaten Karangasem sebesar Rp3.561.425.899,23;
      6) Kabupaten Klungkung sebesar Rp3.900.060.000,00;
      7) Kabupaten Tabanan sebesar Rp4.768.060.000,00; dan
      8) Kota Denpasar sebesar Rp7.230.791.000,00.
   c. BKK untuk Pengendalian Penduduk Pendatang sebesar Rp1.550.000.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 4/03-D/HK/2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus pada Kabupaten Buleleng, Jembrana, dan Karangasem untuk Pengendalian Penduduk Pendatang, yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 31 Januari 2025, kepada:
      1) Kabupaten Buleleng sebesar Rp300.000.000,00;
      2) Kabupaten Jembrana sebesar Rp750.000.000,00; dan

3) Kabupaten Karangasem sebesar Rp500.000.000,00.

d. BKK dalam rangka Pesta Kesenian Bali sebesar Rp3.000.000.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 5/03-J/HK/2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus pada Kabupaten dalam Rangka Pelaksanaan Pesta Kesenian Bali, yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 5 Februari 2025, kepada:
   1) Kabupaten Buleleng;
   2) Kabupaten Jembrana;
   3) Kabupaten Tabanan;
   4) Kabupaten Bangli;
   5) Kabupaten Klungkung; dan
   6) Kabupaten Karangasem;

   Masing-masing sebesar Rp500.000.000,00.

e. BKK kepada Kabupaten Buleleng sebesar Rp8.164.887.000,00 untuk Paket Pengerjaan Pengerasan Jalan Lingkar Turyapada-Tower Lemukih berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 7/03-Q/HK/2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus pada Kabupaten Buleleng, yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 17 Februari 2025;

f. BKK *Sharing* PBI sebesar Rp91.895.501.040,00, berdasarkan:
   1) Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 8/03-B/HK/2025 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada 6 (Enam) Kabupaten di Bali yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 17 Februari 2025; dan
   2) Keputusan Gubernur Bali Nomor 13/03-B/HK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Bali Nomor 8/03-B/HK/2025 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada 6 (Enam) Kabupaten di Bali yang ditetapkan di Denpasar tanggal 6 Oktober 2025.

   Direalisasikan kepada:
   1) Kabupaten Buleleng sebesar Rp32.735.805.480,00;
   2) Kabupaten Jembrana sebesar Rp4.602.059.280,00;
   3) Kabupaten Tabanan sebesar Rp19.534.964.400,00;
   4) Kabupaten Bangli sebesar Rp7.426.535.760,00;
   5) Kabupaten Klungkung sebesar Rp7.205.236.080,00; dan
   6) Kabupaten Karangasem sebesar Rp20.390.900.040,00.

g. BKK kepada Kabupaten Bangli sebesar 1.000.000.000,00 untuk Pengelolaan Batur UNESCO *Global Geopark* berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 11/03-L/HK/2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus pada Kabupaten Bangli untuk Pengelolaan Batur UNESCO *Global Geopark* yang ditetapkan di Denpasar tanggal 14 Mei 2025;

h. BKK dalam rangka Festival Jegog kepada Kabupaten Jembrana sebesar Rp2.500.000.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 15/03-J/HK/2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus pada Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam Rangka Festival Jegog Kabupaten Jembrana yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 13 Oktober 2025;

i. BKK kepada Kabupaten Buleleng sebesar Rp83.472.000,00 untuk Pengadaan *ChromeBook* pada SD Negeri 1 Sembiran, Alamat Banjar Dinas Anyar, Desa Sembiran, Kecamatan Terjakula, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 20/03-A/HK/2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus pada Kabupaten Buleleng, yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 27 Oktober 2025;

j. BKK kepada Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Klungkung sebesar Rp45.687.616.615,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 21/03-Q/HK/2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus pada Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Klungkung yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 28 Oktober 2025, dengan rincian sebagai berikut:
   1) Kabupaten Buleleng sebesar Rp16.662.934.615,00;
   2) Kabupaten Bangli sebesar Rp29.024.682.000,00; dan
   3) Kabupaten Klungkung tidak terdapat realisasi dikarenakan berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Bali Nomor: B.31.900.1.3.3/7628/Set/BPKAD, tanggal 14 November 2025, Hal: Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Fisik pada APBD Perubahan TA 2025 menyatakan bahwa alokasi BKK Fisik sebesar Rp3.500.000.000,00 diperuntukkan untuk penyusunan dokumen perencanaan fisik, yang belum sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring, dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan, dikarenakan permohonan BKK untuk pembangunan infrastruktur fisik wajib dilengkapi *readiness criteria* termasuk ketersediaan dokumen *feasibility study* dan dokumen *Detailed*

Engineering Design (DED), sehingga peruntukan BKK yang tidak sesuai ketentuan tersebut tidak dapat direalisasikan.

k. BKK *Mobil Rescue* kepada Kabupaten Buleleng sebesar Rp697.000.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 22/03-N/HK/2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Buleleng yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 5 November 2025;

3. Pemerintah Provinsi Bali dalam merealisasikan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota berdasarkan pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring, dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.
4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota dapat dilihat pada ***Lampiran 20***.

5.1.2.4.2.2 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Berikut ini adalah Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.4.2.2.1 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	89.019.800.000,00	88.543.000.000,00	99,46	86.478.733.900,00
Jumlah	**89.019.800.000,00**	**88.543.000.000,00**	**99,46**	**86.478.733.900,00**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp2.064.266.100,00 atau 2,39%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa telah mendekati anggaran dengan persentase sebesar 99,46% pada TA 2025 dan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
      1) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa merupakan dukungan program pada Desa se-Bali, khususnya untuk penguatan kelembagaan masyarakat desa melalui Subak/Subak Abian, dukungan kegiatan keagamaan pada Pura Kahyangan Jagat, serta dukungan tambahan penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa, sehingga alokasinya relatif dapat disalurkan hampir seluruhnya pada tahun berjalan;
      2) Penetapan penerima dan besaran BKK pada TA 2025 telah dituangkan melalui beberapa Keputusan Gubernur yang ditetapkan, sehingga proses pengajuan, verifikasi, penyaluran, serta penatausahaan dapat dilaksanakan lebih terarah dan tepat waktu sesuai ketentuan; dan
      3) Selisih yang masih tersisa dari target sebesar 99,46% umumnya dipengaruhi oleh pemenuhan persyaratan penyaluran dan pertanggungjawaban, seperti kelengkapan dokumen, serta penyesuaian kebutuhan riil pada sebagian penerima, sehingga terdapat bagian yang tidak tersalurkan.
2. Pemerintah Provinsi Bali merealisasikan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa pada TA 2025 dengan rincian sebagai berikut:
   a. BKK untuk *Subak/Subak Abian* kepada Desa se-Bali sebesar Rp40.350.000.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 2/03-O/HK/2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus pada Desa untuk Subak/Subak Abian se-Bali, yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 31 Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut:
      1) Desa pada Kabupaten Buleleng sebesar Rp7.560.000.000;
      2) Desa pada Kabupaten Jembrana sebesar Rp3.105.000.000;
      3) Desa pada Kabupaten Bangli sebesar Rp7.065.000.000;
      4) Desa pada Kabupaten Badung sebesar Rp2.775.000.000;

5) Desa pada Kabupaten Gianyar sebesar Rp7.815.000.000;
6) Desa pada Kabupaten Tabanan sebesar Rp6.000.000.000;
7) Desa pada Kabupaten Karangasem sebesar Rp4.320.000.000;
8) Desa pada Kabupaten Klungkung sebesar Rp1.320.000.000; dan
9) Desa pada Kota Denpasar sebesar Rp390.000.000.

b. BKK untuk Kegiatan Keagamaan (*Upakara Aci Nyabran*, *Upakara Ngusabha Kedasa*, *Upakara Pujawali*, dan *Upakara Bhumi Sudha*) pada 18 Pura *Kahyangan Jagat* di Bali sebesar Rp5.600.000.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 6/01-A/HK tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus pada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Keagamaan di Pura Kahyangan Jagat di Bali, yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 7 Februari 2025;

c. BKK untuk Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa se-Bali sebesar Rp42.654.200.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 9/03-D/HK/2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus pada Desa untuk Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa se-Bali dalam Tahun Anggaran 2025, yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 17 Februari 2025, dengan rincian sebagai berikut:
1) Desa pada Kabupaten Jembrana sebesar Rp2.637.000.000,00;
2) Desa pada Kabupaten Tabanan sebesar Rp8.990.900.000,00;
3) Desa pada Kabupaten Badung sebesar Rp3.442.100.000,00;
4) Desa pada Kabupaten Gianyar sebesar Rp4.699.500.000,00;
5) Desa pada Kabupaten Klungkung sebesar Rp3.209.700.000,00;
6) Desa pada Kabupaten Bangli sebesar Rp4.275.900.000,00;
7) Desa pada Kabupaten Karangasem sebesar Rp5.395.800.000,00;
8) Desa pada Kabupaten Buleleng sebesar Rp7.853.800.000,00; dan
9) Desa pada Kota Denpasar sebesar Rp2.149.500.000,00.

3. Pemerintah Provinsi Bali dalam merealisasikan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa berdasarkan pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring, dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.
4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dapat dilihat pada ***Lampiran 20***.

5.1.3 PEMBIAYAAN DAERAH

Berikut ini adalah Pembiayaan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.3.1 Rincian Pembiayaan Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.153.811.060.761,60	620.675.986.790,62	53,79	342.650.523.381,56
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	401.464.808.088,00	401.464.798.088,00	99,99	250.464.798.088,00
Jumlah	**752.346.252.673,60**	**219.211.188.702,62**	**29,13**	**92.185.725.293,56**

Tabel di atas menunjukkan Pembiayaan Daerah TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp127.025.463.409,06 atau 137,79%.

5.1.3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Berikut ini adalah Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.3.1.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	623.732.459.203,32	620.675.986.790,62	99,50	171.480.190.581,56
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	171.170.332.800,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	530.078.601.558,28	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**1.153.811.060.761,60**	**620.675.986.790,62**	**53,79**	**342.650.523.381,56**

Tabel di atas menunjukkan Penerimaan Pembiayaan TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp278.025.463.409,06 atau 81,14%.

5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Berikut ini adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.3.1.1.1 Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pelampauan Penerimaan PAD	623.732.459.203,32	943.575.945.233,49	151,27	(413.705.102.485,34)
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	3.180.000.237,00	0,00	(11.191.766.664,00)
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	6.600.000,00	0,00	(49.994.822.500,00)
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,00	(832.932.027.174,44)	0,00	(670.757.862.495,00)
Penghematan Belanja	0,00	499.573.408.393,23	0,00	1.325.787.678.439,90
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	5.452.215.264,00	0,00	(8.657.933.714,00)
Sisa Belanja Lainnya	0,00	1.819.844.837,34	0,00	0,00
Jumlah	**623.732.459.203,32**	**620.675.986.790,62**	**99,50**	**171.480.190.581,56**

Tabel di atas menunjukkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp449.195.796.209,06 atau 261,95%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pelampauan Penerimaan PAD memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar 151,27% dengan penurunan signifikan sebesar Rp1.357.281.047.718,83 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pelampauan PAD terutama dibentuk oleh penerimaan PKB, BBNKB, dan PBBKB yang melampaui proyeksi, serta didukung oleh penerimaan PAD lain seperti pungutan bagi wisatawan asing, retribusi tertentu, dan denda pajak daerah, sehingga akumulasi pelampauan PAD menjadi relatif meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
   b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar Rp14.371.766.901,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer dibentuk oleh realisasi penyaluran/penetapan transfer dari pemerintah pusat yang pada akhir tahun dapat menghasilkan selisih lebih terhadap proyeksi, terutama pada komponen DBH dan DAU, sehingga terdapat realisasi;
   c. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar Rp50.001.422.500,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pelampauan ini dibentuk oleh penerimaan yang bersifat insidental, yaitu sumbangan pihak ketiga/sejenis;

d. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% pada TA 2025;
e. Penghematan Belanja memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp826.214.270.046,67) pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Penghematan Belanja dibentuk oleh sisa pagu pada berbagai kelompok belanja, terutama belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal, termasuk pula sisa pada pos-pos tertentu seperti belanja tidak terduga, sisa belanja bagi hasil, dan sisa bantuan keuangan, sehingga pada akhir tahun terbentuk akumulasi Penghematan Belanja;
f. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar Rp14.110.148.978,00 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan dibentuk dari sisa dana pengeluaran pembiayaan, yaitu terdapat rencana pengeluaran pembiayaan yang belum terealisasi, sehingga menyisakan dana sisa; dan
g. Sisa Belanja Lainnya memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan realisasi baru sebesar Rp1.819.844.837,34 pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada akhir tahun anggaran terdapat sisa dana pada pengelolaan BLUD sebagai akibat dari realisasi penerimaan dan pelaksanaan belanja BLUD yang tidak seluruhnya terserap sesuai rencana kegiatan, sehingga sisa dana tersebut kemudian dicatat dan disajikan sebagai Sisa Belanja Lainnya.

5.1.3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

Berikut ini adalah Pencairan Dana Cadangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.3.1.2.1 Rincian Pencairan Dana Cadangan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	171.170.332.800,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.170.332.800,00**

Tabel di atas menunjukkan Pencairan Dana Cadangan TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp171.170.332.800,00) atau -100,00%.

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pencairan Dana Cadangan TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   Pencairan Dana Cadangan memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% pada TA 2025. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Dana Cadangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 telah seluruhnya dicairkan pada TA 2024 sebesar Rp171.170.332.800,00 guna mendanai penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024. Dengan telah selesainya penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2024 dan telah terpakainya seluruh Dana Cadangan dimaksud, maka pada TA 2025 tidak terdapat lagi Dana Cadangan yang dapat dicairkan sehingga tidak dilakukan penganggaran.

5.1.3.1.3 Penerimaan Pinjaman Daerah

Berikut ini adalah Penerimaan Pinjaman Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.3.1.3.1 Rincian Penerimaan Pinjaman Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	530.078.601.558,28	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**530.078.601.558,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan Penerimaan Pinjaman Daerah TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.1.3.1.3.1 Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Berikut ini adalah Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.3.1.3.1.1 Rincian Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	530.078.601.558,28	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**530.078.601.558,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) TA 2025 tidak mengalami perubahan dari TA 2024, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Bali mencantumkan anggaran Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah sebesar Rp530.078.601.558,28 dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Penganggaran tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam membangun struktur pembiayaan daerah yang *prudent* dan berimbang, sekaligus sebagai langkah antisipatif dalam menjaga agar posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) akhir tahun dapat terkelola secara optimal sesuai dengan arah kebijakan fiskal daerah yang telah ditetapkan oleh Gubernur Bali; dan
      2) Realisasi Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Menengah pada TA 2025 menunjukkan nilai Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp530.078.601.558,28. Tidak terealisasinya penerimaan pinjaman dimaksud merupakan cerminan dari keberhasilan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengelola keuangan daerah secara mandiri dan efisien sepanjang tahun anggaran berjalan, di mana kondisi fiskal daerah terjaga dengan baik sehingga Pemerintah Provinsi Bali tidak perlu menggunakan instrumen pinjaman yang telah direncanakan. Kondisi serupa juga terjadi pada TA 2024, di mana penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan sebesar Rp832.932.027.174,00 juga tidak terealisasi yang semakin mengukuhkan komitmen Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali untuk senantiasa mengutamakan kemandirian fiskal daerah dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap pengambilan kebijakan pembiayaan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.

5.1.3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Berikut ini adalah Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.3.2.1 Rincian Pengeluaran Pembiayaan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penyertaan Modal Daerah	158.000.000.000,00	158.000.000.000,00	100,00	7.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	243.464.808.088,00	243.464.798.088,00	99,99	243.464.798.088,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Jumlah	**401.464.808.088,00**	**401.464.798.088,00**	**99,99**	**250.464.798.088,00**

Tabel di atas menunjukkan Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp151.000.000.000,00 atau 60,29%.

5.1.3.2.1 Penyertaan Modal Daerah

Berikut ini adalah Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.3.2.1.1 Rincian Penyertaan Modal Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	158.000.000.000,00	158.000.000.000,00	100,00	7.000.000.000,00
Jumlah	**158.000.000.000,00**	**158.000.000.000,00**	**100,00**	**7.000.000.000,00**

Tabel di atas menunjukkan Penyertaan Modal Daerah TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp151.000.000.000,00 atau 2.157,14%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Penyertaan Modal Daerah TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan kenaikan signifikan sebesar Rp151.000.000.000,00 atau 2.157,14% pada TA 2025. Penyertaan Modal Daerah TA 2025 terdiri dari Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali sebesar Rp38.000.000.000,00 dan PT Bank BPD Bali sebesar Rp120.000.000.000,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah berupa uang kepada PT Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali sebesar Rp38.000.000.000,00 dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali. Pelaksanaan kebijakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa penambahan penyertaan modal daerah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
         a) Sebesar Rp7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah) dilaksanakan pada TA 2024; dan
         b) Sebesar Rp38.000.000.000 (tiga puluh delapan miliar rupiah) dilaksanakan pada TA 2025.
   b. Penambahan Penyertaan Modal Daerah berupa uang kepada PT Bank BPD Bali sebesar Rp120.000.000.000,00 dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali. Pelaksanaan kebijakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) yang mengatur bahwa realisasi penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun, dengan rincian sebagai berikut:
      a) Tahun 2021 sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah);
      b) Tahun 2022 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
      c) Tahun 2023 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

   Namun, realisasi pemenuhan penambahan penyertaan modal tersebut baru dapat direalisasikan secara keseluruhan pada TA 2025, sehubungan dengan kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Bali pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara penyesuaian bertahap sesuai dengan kapasitas fiskal daerah.

5.1.3.2.2 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Berikut ini adalah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.3.2.2.1 Rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	243.464.808.088,00	243.464.798.088,00	99,99	243.464.798.088,00
Jumlah	**243.464.808.088,00**	**243.464.798.088,00**	**99,99**	**243.464.798.088,00**

Tabel di atas menunjukkan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2025 tidak mengalami perubahan dari TA 2024, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat memiliki persentase capaian sebesar 99,99% dan realisasi tersebut tercatat sama dengan realisasi TA 2024, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang merupakan Pinjaman Daerah yang berasal dari Pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang digunakan untuk mendanai Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung. Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 42 Tanggal 28 Desember 2020 dan perubahannya, ditentukan sebagai berikut:
         a) Jumlah Pinjaman setinggi-tingginya Rp1.500.000.000.000,00 (*limit* pinjaman);
         b) Jangka waktu pinjaman 96 (sembilan puluh enam) bulan termasuk masa tenggang 24 (dua puluh empat) bulan. Masa tenggang dimulai sejak tanggal pencairan pinjaman pertama kali;
         c) Masa pencairan pinjaman adalah sejak tanggal pencairan pertama pinjaman sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022; dan
         d) Bunga dan biaya pinjaman. Bunga sebesar 0,00%. Biaya Pinjaman yang wajib dibayar:
            (1) Biaya pengelolaan pinjaman sebesar 0,185% dari jumlah baki debet/*outstanding*/terutang pada tanggal ulang tahun perjanjian, yang dibayarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal ulang tahun perjanjian yang berkenaan; dan
            (2) Biaya provisi sebesar 1% dari jumlah kumulatif pinjaman yang dicairkan, dikenakan satu kali yang dibayar saat pencairan tahap ketiga pinjaman atau sebelum tanggal terakhir masa pencairan.
      2) Pembayaran cicilan utang bagian lancar PEN PT SMI dilakukan melalui pemotongan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dari alokasi Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dan Pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga Atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:
         a) Penerimaan DAU dicatat secara kotor (bruto) oleh Bendahara Penerimaan BPKAD Provinsi Bali yang lalu nilai pemotongan untuk pembayaran cicilan PEN dikurangi sesuai dengan data yang ditampilkan pada aplikasi SIKD *Next Generation* Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pencatatan pengurangan nilai DAU tersebut dicatat melalui mekanisme jurnal penyesuaian dengan nilai potongan sebesar Rp20.288.733.174,00 per bulan, rincian nomor jurnal penyesuaian dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1.3.2.2.1.1 Rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Menurut Jurnal Penyesuaian

No.	Bulan	No. Jurnal Penyesuaian	Tanggal Jurnal Penyesuaian
1	Januari 2025	0001/JP-PENATAUSAHAAN/Cicilan PEN/BPKAD/2025	2 Januari 2025
2	Februari 2025	0002/JP-PENATAUSAHAAN/Cicilan PEN/BPKAD/2025	31 Januari 2025
3	Maret 2025	0003/JP-PENATAUSAHAAN/Cicilan PEN/BPKAD/2025	28 Februari 2025
4	April 2025	0004/JP-PENATAUSAHAAN/Cicilan PEN/BPKAD/2025	27 Maret 2025
5	Mei 2025	0005/JP-PENATAUSAHAAN/Cicilan PEN/BPKAD/2025	30 April 2025
6	Juni 2025	0006/JP-PENATAUSAHAAN/Cicilan PEN/BPKAD/2025	28 Mei 2025
7	Juli 2025	0007/JP-PENATAUSAHAAN/Cicilan PEN/BPKAD/2025	30 Juni 2025
8	Agustus 2025	0008/JP-PENATAUSAHAAN/Cicilan PEN/BPKAD/2025	31 Juli 2025
9	September 2025	0009/JP-PENATAUSAHAAN/Cicilan PEN/BPKAD/2025	29 Agustus 2025
10	Oktober 2025	0010/JP-PENATAUSAHAAN/Cicilan PEN/BPKAD/2025	30 September 2025
11	November 2025	0011/JP-PENATAUSAHAAN/Cicilan PEN/BPKAD/2025	31 Oktober 2025
12	Desember 2025	0012/JP-PENATAUSAHAAN/Cicilan PEN/BPKAD/2025	28 November 2025

b) Total pembayaran cicilan PEN melalui pemotongan DAU selama Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp243.464.798.088,00 dengan selisih sebesar Rp10.000,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp243.464.808.088,00.

5.1.4 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

Berikut disajikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta realisasi pada TA 2024. Rincian besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.1 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Daerah	**6.660.624.025.310,00**	**7.048.315.869.271,64**	**105,82**	**7.824.598.583.907,83**
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4.216.263.422.941,00	4.628.083.379.382,63	109,76	5.535.429.679.670,83
Pendapatan Transfer	2.438.603.330.369,00	2.414.142.690.695,00	98,99	2.283.418.060.237,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.757.272.000,00	6.089.799.194,01	105,77	5.750.844.000,00
Belanja Daerah	**7.412.970.277.983,60**	**6.554.652.991.551,62**	**88,42**	**7.293.051.849.998,07**
Belanja Operasi	5.053.188.410.600,60	4.520.551.159.698,76	89,45	4.461.088.682.470,66
Belanja Modal	961.755.254.119,00	773.687.032.749,53	80,44	667.689.607.145,41
Belanja Tidak Terduga	53.861.777.244,00	14.075.388.800,30	26,13	7.441.134.041,00
Belanja Transfer	1.344.164.836.020,00	1.246.339.410.303,03	92,72	2.156.832.426.341,00
Surplus (Defisit)	**(752.346.252.673,60)**	**493.662.877.720,02**	**(65,61)**	**531.546.733.909,76**
Pembiayaan Daerah	**752.346.252.673,60**	**219.211.188.702,62**	**29,13**	**92.185.725.293,56**
Penerimaan Pembiayaan	1.153.811.060.761,60	620.675.986.790,62	53,79	342.650.523.381,56
Pengeluaran Pembiayaan	401.464.808.088,00	401.464.798.088,00	99,99	250.464.798.088,00
SLLPA	**0,00**	**712.874.066.422,64**	**0,00**	**623.732.459.203,32**

Berdasarkan perhitungan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2025 memiliki SiLPA sebesar Rp712.874.066.422,64, yang terdiri atas SiLPA Terikat dan SiLPA Non Terikat, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.1.1 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terikat

SiLPA Terikat TA 2025	Nilai
1. Sisa Dana DAK Fisik	**693.851.793,00**
2. Sisa Dana DAK Non Fisik	**9.849.791.233,40**
a. Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler	6.530.421.296,40
b. Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja	941.988.484,00
c. Dana Tunjangan Profesi Guru	0,00
d. Dana Tambahan Penghasilan PNSD	0,00
e. Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00
f. BOP Museum dan MPRB	538.705.746,00
g. Taman Budaya	118.692.832,00
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	53.722.731,00
i. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	1.647.685.144,00
j. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	5.275.000,00
k. Dana Fasilitas Penanaman Modal	0,00
l. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.300.000,00
3. DAU yang Ditentukan Penggunaannya, yang terdiri atas:	**2.423.344.441,00**
a. DAU Pendidikan	2.272.027.846,00
b. DAU Kesehatan	151.316.595,00
4. Insentif Fiskal	**14.868.313.529,00**
Jumlah	**27.835.300.996,40**

SiLPA tersebut terdiri atas saldo akun-akun yang membentuknya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.1.2 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Non Terikat

Uraian SiLPA	Nilai
1. Kas di Kas Daerah (Rekening Giro pada Bank BPD Bali)	**609.165.272.494,47**
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	**17.321,38**
3. Kas di BLUD	**96.236.366.826,39**
a. Kas di BLUD RSUD Bali Mandara	11.545.168.915,10
b. Kas di BLUD Rumah Sakit Mata Bali Mandara	30.247.848.716,17
c. Kas di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	13.459.001.613,50
d. Kas di BLUD UPTD Pengelolaan Air Limbah	15.677.032.611,38
e. Kas di BLUD UPTD Pengelolaan Air Minum	1.417.318.943,87
f. Kas di BLUD UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	3.045.880.643,11
g. Kas di BLUD UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	11.008.641.026,33
h. Kas di BLUD UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa	8.552.400.887,51
i. Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya	1.283.073.469,42
4. Kas Dana BOSP di Bendahara BOSP SMA/SMK Negeri	**7.472.409.780,40**
Jumlah	**712.874.066.422,64**

Penjelasan SiLPA:

1) Saldo akhir kas di Kas Daerah antara Catatan atas Laporan Arus Kas dengan saldo fisik kas pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Bali Nomor 010.01.00.00000-1 pada PT Bank BPD

Bali menunjukkan kesesuaian (*matching*). Per tanggal 31 Desember 2025, posisi kas di Kas Daerah berdasarkan pembukuan pada SIPD RI tercatat sebesar Rp609.165.272.494,47 dan telah sesuai antara pencatatan akuntansi dan saldo kas secara fisik;

2) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp17.321,38 merupakan koreksi penambahan saldo Jasa Giro per 31 Desember 2025 pada rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD RSU Dharma Yadnya yang belum dicatat sebagai pendapatan dan kas yang dicatat berdasarkan Jurnal Umum Nomor 51/09.0/000007/JU/JURNAL-UMUM/1.02.0.00.0.00.01.0008/05/2026;
3) Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Provinsi Bali TA 2025 sebesar Rp712.874.066.422,64 telah diungkapkan secara konsisten dan terintegrasi dalam:
   a. **Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Catatan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (CaLK)** ***Poin 5.2.5***; dan
   b. **Saldo Akhir Kas pada Catatan atas Laporan Arus Kas (CaLK)** ***Poin 5.5.9.***
4) Pengungkapan tersebut menunjukkan konsistensi antar laporan keuangan serta keselarasan antara informasi SILPA, SAL, dan posisi kas daerah dalam sistem pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali.

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Tabel 5.2.1.1 Perbandingan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	**623.732.459.203,32**	**171.480.190.581,56**

Saldo anggaran lebih awal di atas merupakan saldo akhir Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2 Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas Di Kas Daerah	540.047.220.034,96	93.261.463.025,33
Kas di BLUD:		
- Kas di BLUD UPTD RS Bali Mandara	11.384.643.832,20	23.106.882.669,81
- Kas di BLUD RS Mata Bali Mandara	22.272.848.565,09	13.955.324.668,78
- Kas di BLUD RS Jiwa Provinsi Bali	11.253.136.977,16	9.421.039.081,34
- Kas di BLUD UPTD Pengelolaan Air Limbah	11.397.444.299,21	4.803.618.256,49
- Kas di BLUD UPTD Pengelolaan Air Minum	3.776.013.806,69	4.820.767.557,36
- Kas di BLUD UPT Bapelkesmas	2.591.826.952,86	2.215.539.343,00
- Kas di BLUD UPT PKSDM	7.302.650.158,45	4.199.692.447,04
- Kas di BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan	5.493.460.321,60	3.266.828.045,70
- Kas di BLUD RS Dharma Yadnya	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	4.495.970.420,00
Kas Dana BOS	5.156.741.842,40	7.933.065.066,71
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	3.056.472.412,70	0,00
Jumlah	**623.732.459.203,32**	**171.480.190.581,56**

Saldo di atas merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2024 dan Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Bali. Nilai saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan SiLPA pada tahun anggaran berkenaan pada Laporan Realisasi Anggaran.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Tabel 5.2.2.1 Perbandingan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	**620.675.986.790,62**	**171.480.190.581,56**

Saldo tersebut merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran TA 2024 dan 2023 yang telah dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2025 dan 2024. Seluruh saldo tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional dan pembiayaan Pemerintah Provinsi Bali pada masing-masing tahun anggaran tersebut.

Adapun penggunaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebagai penerimaan pembiayaan TA 2025 menunjukkan selisih sebesar Rp3.056.472.412,70 dibandingkan dengan SiLPA TA 2024. Selisih tersebut terjadi karena adanya koreksi SiLPA yang bersumber dari kas BOSP TA 2019 sampai dengan TA 2022, yang sebelumnya dicatat sebagai SiLPA dan telah dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara.

5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Tabel 5.2.3.1 Perbandingan Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	**712.874.066.422,64**	**623.732.459.203,32**

Saldo tersebut merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran TA 2025 dan 2024. Nilai saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada masing-masing tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran pada tahun berkenaan.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tabel 5.2.4.1 Perbandingan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	**(3.056.472.412,70)**	**0,00**

Terdapat koreksi atas pengakuan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.056.472.412,70. Saldo tersebut merupakan koreksi SiLPA BOSP Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 yang pada Tahun Anggaran 2024 dicatat sebagai Saldo Kas Lainnya, yang masih mengendap pada Rekening Bendahara BOSP di SMAN/SMKN dan SLBN.

Pada Tahun Anggaran 2025, seluruh saldo kas dimaksud telah dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Bali, sehingga dilakukan penyesuaian (koreksi) pengakuan SiLPA dalam laporan keuangan.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Tabel 5.2.5.1 Perbandingan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**712.874.066.422,64**	**623.732.459.203,32**

Saldo Anggaran Lebih Akhir di atas diuraikan berdasarkan komponen kas terdiri dari:

Tabel 5.2.5.2 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	609.165.272.494,47	540.047.220.034,96
Kas di Bendahara Pengeluaran	17.321,38	0,00
Kas di BLUD:		
- Kas di BLUD UPTD RS Bali Mandara	11.545.168.915,10	11.384.643.832,20
- Kas di BLUD RS Dharma Yadnya	1.283.073.469,42	0,00
- Kas di BLUD RS Mata Bali Mandara	30.247.848.716,17	22.272.848.565,09
- Kas di BLUD RS Jiwa Provinsi Bali	13.459.001.613,50	11.253.136.977,16
- Kas di BLUD UPTD Pengelolaan Air Limbah	15.677.032.611,38	11.397.444.299,21
- Kas di BLUD UPTD Pengelolaan Air Minum	1.417.318.943,87	3.776.013.806,69
- Kas di BLUD UPTD BAPELKES	3.045.880.643,11	2.591.826.952,86
- Kas di BLUD UPTD PKSDM	11.008.641.026,33	7.302.650.158,45
- Kas di BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan	8.552.400.887,51	5.493.460.321,60
Kas Dana BOSP	7.472.409.780,40	5.156.741.842,40
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	0,00	3.056.472.412,70
Jumlah	**712.874.066.422,64**	**623.732.459.203,32**

Saldo tersebut merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp712.874.066.422,64, sebagaimana telah dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Realisasi Anggaran pada Poin 5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

5.3. NERACA

Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2025 secara umum digambarkan sebagai berikut:

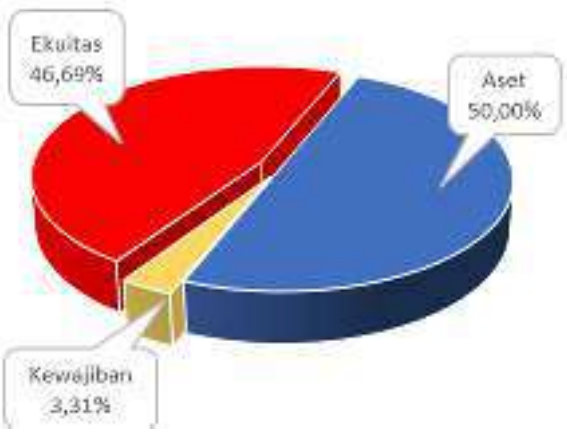

Gambar 5.11 Komposisi Neraca Pmerintah Provinsi Bali Tahun 2025

5.3.1 ASET

Saldo Aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1 Rincian Aset

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Lancar	1.104.842.086.420,35	863.415.737.426,76	241.426.348.993,59	27,96
Investasi Jangka Panjang	7.122.255.477.273,94	6.915.708.269.354,89	206.547.207.919,05	2,98
Aset Tetap	14.009.192.786.281,11	10.422.663.292.333,20	3.586.529.493.947,91	34,41
Aset Lainnya	260.970.253.210,00	261.737.503.949,75	(767.250.739,75)	(0,29)
Properti Investasi	701.321.954.302,03	702.536.128.035,03	(1.214.173.733,00)	(0,17)
Jumlah	**23.198.582.557.487,43**	**19.166.060.931.099,63**	**4.032.521.626.387,80**	**21,03**

Tabel di atas menunjukkan Aset per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp4.032.521.626.387,80 atau 21,03%.

5.3.1.1 ASET LANCAR

Saldo Aset Lancar yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.1 Rincian Aset Lancar

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas dan Setara Kas	712.874.066.422,64	623.732.459.203,32	89.141.607.219,32	14,29
Piutang Pajak Daerah	686.987.500,00	49.838.810.531,04	(49.151.823.031,04)	(98,62)
Piutang Retribusi Daerah	52.160.083.376,74	881.023.472.856,43	(828.863.389.479,69)	(94,07)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.156.897.225,00	3.287.603.356,37	(130.706.131,37)	(3,97)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	180.125.380.000,00	0,00	180.125.380.000,00	100,00
Piutang Lainnya	17.903.688.447,00	3.709.104.636,00	14.194.583.811,00	382,69
Penyisihan Piutang	(19.960.668.142,46)	(862.191.285.296,38)	842.230.617.153,92	(97,68)
Beban Dibayar Dimuka	485.566.225,08	490.726.285,24	(5.160.060,16)	(1,05)
Persediaan	157.410.085.366,35	163.524.845.854,74	(6.114.760.488,39)	(3,73)
Jumlah	**1.104.842.086.420,35**	**863.415.737.426,76**	**241.426.348.993,59**	**27,96**

Tabel di atas menunjukkan Aset Lancar per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp241.426.348.993,59 atau 27,96%.

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.1.1 Rincian Kas dan Setara Kas

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas di Kas Daerah	609.165.272.494,47	540.047.220.034,96	69.118.052.459,51	12,79
Kas di Bendahara Pengeluaran	17.321,38	0,00	17.321,38	100,00
Kas di BLUD	96.236.366.826,39	75.472.024.913,26	20.764.341.913,13	27,51
Kas Lainnya	0,00	3.056.472.412,70	(3.056.472.412,70)	(100,00)
Kas Dana BOSP	7.472.409.780,40	5.156.741.842,40	2.315.667.938,00	44,90
Jumlah	**712.874.066.422,64**	**623.732.459.203,32**	**89.141.607.219,32**	**14,29**

Tabel di atas menunjukkan Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp89.141.607.219,32 atau 14,29%.

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.1.1.1 Rincian Kas di Kas Daerah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas di Kas Daerah	609.165.272.494,47	540.047.220.034,96	69.118.052.459,51	12,80
Jumlah	**609.165.272.494,47**	**540.047.220.034,96**	**69.118.052.459,51**	**12,80**

Tabel di atas menunjukkan Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp69.118.052.459,51 atau 12,80%. Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Buku Kas Umum Daerah dengan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Bali Nomor 010.01.00.00000-1 di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.1.2.1 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	17.321,38	0,00	17.321,38	100,00
Jumlah	**17.321,38**	**0,00**	**17.321,38**	**100,00**

Tabel di atas menunjukkan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp17.321,38 atau 100,00% yang merupakan saldo Jasa Giro di rekening Bendahara Pembantu APBD RSU Darma Yadnya.

5.3.1.1.1.3 Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.1.3.1. Rincian Kas di BLUD

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas di BLUD	96.236.366.826,39	75.472.024.913,26	20.764.341.913,13	27,51
Jumlah	**96.236.366.826,39**	**75.472.024.913,26**	**20.764.341.913,13**	**27,51**

Tabel di atas menunjukkan Kas di BLUD per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp20.764.341.913,13 atau 27,51%.

Tabel 5.3.1.1.1.3.2 Rincian Saldo Kas BLUD

No	Unit	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Setor Kasda	Total Kas
1.	RS Bali Mandara	11.384.643.832,20	177.471.599.546,86	177.311.074.463,96	0,00	11.545.168.915,10
2.	RS Mata Bali Mandara	22.272.848.565,09	91.956.802.649,33	83.981.802.498,25	0,00	30.247.848.716,17
3.	RS Jiwa	11.253.136.977,16	23.055.171.219,46	20.849.306.583,12	0,00	13.459.001.613,50
4.	Pengelolaan Air Limbah	11.397.444.299,21	18.277.977.993,17	13.998.389.681,00	0,00	15.677.032.611,38
5.	Pengelolaan Air Minum	3.776.013.806,69	32.757.240.005,18	35.115.934.868,00	0,00	1.417.318.943,87
6.	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	7.302.650.158,45	21.855.299.007,88	18.149.308.140,00	0,00	11.008.641.026,33
7.	Balai Pelatihan Kesehatan Masyarakat	2.591.826.952,86	3.276.942.797,55	2.822.889.107,30	0,00	3.045.880.643,11
8.	Laboratorium Kesehatan	5.493.460.321,60	6.391.883.311,41	3.332.942.745,50	0,00	8.552.400.887,51
9.	RS Dharma Yadnya	0,00	21.174.328.491,84	19.891.255.022,42	0,00	1.283.073.469,42
	Total	75.472.024.913,26	396.217.245.022,68	375.452.903.109,55	0,00	96.236.366.826,39

5.3.1.1.1.4 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.1.4.1 Rincian Kas Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas Lainnya	0,00	3.056.472.412,70	(3.056.472.412,70)	-100,00
Jumlah	**0,00**	**3.056.472.412,70**	**(3.056.472.412,70)**	**-100,00**

Tabel di atas menunjukkan Kas Lainnya per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp3.056.472.412,70) atau (100,00%).

5.3.1.1.1.5 Kas Dana BOSP

Saldo Kas Dana BOSP yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.1.5.1 Rincian Kas Dana BOSP

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas Dana BOSP	7.472.409.780,40	5.156.741.842,40	2.315.667.938,00	44,91
Jumlah	**7.472.409.780,40**	**5.156.741.842,40**	**2.315.667.938,00**	**44,91**

Tabel di atas menunjukkan Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp2.315.667.938,00 atau 44,91%.

Rincian Kas Dana BOSP dapat dilihat pada ***Lampiran 22***

5.3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.2.1 Rincian Piutang Pajak Daerah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	109.347.500,00	126.767.000,00	(17.419.500,00)	(13,74)
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	247.395.000,00	247.395.000,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0,00	49.049.509.849,04	(49.049.509.849,04)	(100,00)
Piutang Pajak Air Permukaan	0,00	415.138.682,00	(415.138.682,00)	(100,00)
Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	330.245.000,00	0,00	330.245.000,00	100,00
Jumlah	**686.987.500,00**	**49.838.810.531,04**	**(49.151.823.031,04)**	**(98,62)**

Tabel di atas menunjukkan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp49.151.823.031,04) atau (98,62%).

Rincian Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 23***.

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.2.1.1 Rincian Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan	9.763.200,00	9.763.200,00	0,00	0,00
Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep	8.011.500,00	8.985.400,00	(973.900,00)	(10,84)
Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus	54.361.600,00	54.361.600,00	0,00	0,00
Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus	0,00	13.093.600,00	(13.093.600,00)	(100,00)
Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	6.566.700,00	6.566.700,00	0,00	0,00
Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	16.107.200,00	16.107.200,00	0,00	0,00
Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	14.537.300,00	17.889.300,00	(3.352.000,00)	(18,74)
Jumlah	**109.347.500,00**	**126.767.000,00**	**(17.419.500,00)**	**(13,74)**

Tabel di atas menunjukkan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp17.419.500,00) atau (13,74%), berikut penjelasan saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep mengalami penurunan sebesar (Rp973.900,00) atau (10,84%);
2. Komponen Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp13.093.600,00) atau (100%);
3. Komponen Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua mengalami penurunan sebesar (Rp3.352.000,00) atau (18,74%)

Penurunan komponen Piutang tersebut diatas disebabkan adanya Penghapusan secara Bersyarat Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, sesuai Keputusan Gubernur Bali Nomor 1026/04-E/HK/2025 Tanggal 29 Desember 2025.

5.3.1.1.2.2 Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Saldo Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.2.2.1 Rincian Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	65.400.000,00	65.400.000,00	0,00	0,00
Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	55.730.000,00	55.730.000,00	0,00	0,00
Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00
Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	124.605.000,00	124.605.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**247.395.000,00**	**247.395.000,00**	**0,00**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.3.1.1.2.3 Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Saldo Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.2.3.1 Rincian Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar	0,00	7.502.811.151,04	(7.502.811.151,04)	(100,00)
Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya	0,00	41.546.698.698,00	(41.546.698.698,00)	(100,00)
Jumlah	**0,00**	**49.049.509.849,04**	**(49.049.509.849,04)**	**(100,00)**

Tabel di atas menunjukkan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp49.049.509.849,04) atau (100,00%), berikut penjelasan saldo Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp7.502.811.151,04) atau (100,00%);
2. Komponen Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp41.546.698.698,00) atau (100,00%).

Penurunan saldo Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tersebut karena adanya Pelunasan Piutang pada Bulan Januari 2025.

5.3.1.1.2.4 Piutang Pajak Air Permukaan

Saldo Piutang Pajak Air Permukaan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.2.4.1 Rincian Piutang Pajak Air Permukaan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Pajak Air Permukaan	0,00	415.138.682,00	(415.138.682,00)	(100,00)
Jumlah	**0,00**	**415.138.682,00**	**(415.138.682,00)**	**(100,00)**

Tabel di atas menunjukkan Piutang Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp415.138.682,00) atau (100,00%).

5.3.1.1.2.5 Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam (MBLB)

Saldo Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam (MBLB) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.2.5.1 Rincian Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam (MBLB)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam (MBLB)	330.245.000,00	0,00	330.245.000,00	100,00
Jumlah	**330.245.000,00**	**0,00**	**330.245.000,00**	**100,00**

Tabel di atas menunjukkan Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp330.245.000,00 atau 100,00%, merupakan penambahan piutang atas opsen MBLB dari Kabupaten Karangasem yang belum

dilimpahkan ke RKUD Provinsi Bali sesuai LHP PDRD Kabupaten Karangasem Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III Tahun 2025)

5.3.1.1.3 Piutang Retribusi Daerah

Saldo Piutang Retribusi Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.3.1 Rincian Piutang Retribusi Daerah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Retribusi Jasa Umum	44.236.509.612,75	29.539.543.742,75	14.696.965.870,00	49,75
Piutang Retribusi Jasa Usaha	7.923.573.763,99	851.476.404.113,68	(843.552.830.349,69)	(99,07)
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	7.525.000,00	(7.525.000,00)	(100,00)
Jumlah	**52.160.083.376,74**	**881.023.472.856,43**	**(828.863.389.479,69)**	**(94,08)**

Tabel di atas menunjukkan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp828.863.389.479,69) atau (94,08%).

Rincian Piutang Retribusi Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 23***.

5.3.1.1.3.1 Piutang Retribusi Jasa Umum

Saldo Piutang Retribusi Jasa Umum yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.3.1.1 Rincian Piutang Retribusi Jasa Umum

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	41.418.134.612,75	27.174.768.742,75	14.243.365.870,00	52,41
Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan	2.818.375.000,00	2.364.775.000,00	453.600.000,00	19,18
Jumlah	**44.236.509.612,75**	**29.539.543.742,75**	**14.696.965.870,00**	**49,75**

Tabel di atas menunjukkan Piutang Retribusi Jasa Umum per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar 14.696.965.870,00 atau 49,75%. Berikut penjelasan saldo Piutang Retribusi Jasa Umum beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan mengalami peningkatan sebesar Rp14.243.365.870,00 atau 52,41%. Hal ini disebabkan karena adanya koreksi saldo awal piutang atas kesalahan penginputan, klaim pending JKN Bulan Oktober dan Desember 2025, pengakuan pendapatan retribusi pelayanan Kesehatan atas klaim Napza Bulan Desember 2025, dan pengakuan pendapatan retribusi atas klaim pasien Dinas Sosial Bulan Nopember dan Desember 2025.
2. Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan mengalami peningkatan sebesar Rp453.600.000,00 atau 19,18%, yang disebabkan karena adanya penambahan pelanggan baru dan peningkatan volume jasa yang diperlukan.

5.3.1.1.3.2 Piutang Retribusi Jasa Usaha

Saldo Piutang Retribusi Jasa Usaha yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.3.2.1 Rincian Piutang Retribusi Jasa Usaha

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	147.635.000,00	147.635.000,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	7.775.938.763,99	851.328.769.113,68	(843.552.830.349,69)	(99,09)
Jumlah	**7.923.573.763,99**	**851.476.404.113,68**	**(843.552.830.349,69)**	**(99,07)**

Tabel di atas menunjukkan Piutang Retribusi Jasa Usaha per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp843.552.830.349,69) atau (99,07%).

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak mengalami perubahan dari tahun 2024, merupakan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada BKPSDM Provinsi Bali.

Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah atas NII bermula dari kerja sama pemanfaatan lahan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan NII. Kerja sama tersebut pada awalnya merupakan bagian dari *Land Utilization and Land Development Agreement* (LUDA Induk) yang telah berjalan sejak tahun 1989, melibatkan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC), Pemerintah Provinsi Bali, dan NII di Kawasan Pariwisata The Nusa Dua. Berdasarkan Perjanjian Pemisahan tanggal 10 November 2022, pelaksanaan kerja sama atas lahan milik Pemerintah Provinsi Bali dipisahkan dan dituangkan dalam **Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 10 tanggal 23 Desember 2022** antara Pemerintah Provinsi Bali dan NII (LUDA Pemprov Bali), yang mengatur kewajiban NII untuk membayar Kontribusi Tetap atas pemanfaatan lahan HPL seluas ±398.990 m² di Jalan Terompong, Desa Peminge, Kecamatan Benoa, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dalam pelaksanaannya, NII gagal memenuhi kewajiban pembayaran Kontribusi Tetap sehingga pada tanggal **1 Juni 2023** Gubernur Bali menyampaikan surat pengakhiran LUDA Pemprov Bali kepada NII.

Akibat kegagalan tersebut, pada tanggal **6 Juli 2023** kreditur-kreditur NII mengajukan permohonan PKPU terhadap NII di Pengadilan Niaga Surabaya, yang dikabulkan melalui **Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 31 Agustus 2023**. Perjanjian Perdamaian antara NII dan para krediturnya kemudian mendapat pengesahan (homologasi) oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal **25 Oktober 2023**.

Meskipun demikian, kedua belah pihak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang tertunggak. Dalam rangka pelaksanaan Putusan Homologasi, NII bersama PT Globalnet Spektrum Teknologi (GST) mendirikan **PT Bali Destinasi Lestari (BDL)** sebagai entitas baru untuk melanjutkan kerja sama pemanfaatan dan pengembangan lahan. Melalui serangkaian proses pengalihan saham yang selesai pada tanggal **22 April 2024**, komposisi kepemilikan saham BDL menjadi PT Kalibiru Graha Abadi (KGA) sebesar **90,01%** dan Bangkok Bank Public Company Limited sebesar **9,99%**.

Sebagai puncak dari proses penyelesaian tersebut, pada tanggal **2 Desember 2025** ditandatangani **Kesepakatan Bersama** antara Pemerintah Provinsi Bali, NII, dan BDL yang mengatur penyelesaian seluruh tunggakan kewajiban NII berdasarkan LUDA Pemprov Bali. Pada tanggal yang sama, seluruh tunggakan kewajiban NII sebesar **Rp59.884.028.378,98** termasuk di dalamnya piutang retribusi pemanfaatan aset daerah sebesar **Rp56.863.253.645,15** telah diterima melalui transfer ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Bali dan diakui sebagai pendapatan serta Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Laporan Operasional (LO) Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, pada tanggal **11 Desember 2025** kerja sama pemanfaatan lahan dilanjutkan melalui penandatanganan **Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemanfaatan dan Pengembangan Lahan Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Nomor 25** di hadapan Notaris dr. Ketut Mahatma Dharma Wijaya, S.H., M.Kn di Denpasar, yang ditandatangani oleh Wayan Koster selaku Gubernur Bali dan Ferry Ma'ruf selaku Direktur Utama PT BDL. Akta ini bukan merupakan perjanjian baru, melainkan perubahan dan pernyataan kembali atas LUDA Pemprov Bali yang telah ada, sehingga hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian sebelumnya tetap menjadi dasar perhitungan piutang. Atas dasar inilah dilakukan koreksi saldo awal Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah atas NII sebesar **Rp786.802.780.952,68** beserta penyisihannya, untuk menyesuaikan nilai piutang yang sebenarnya terutang berdasarkan hak dan kewajiban yang berlaku dalam LUDA Pemprov Bali sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta Nomor 25 tanggal 11 Desember 2025 tersebut.

Dengan telah diselesaikannya seluruh kewajiban NII dan dinyatakan kembalinya LUDA Pemprov Bali melalui Akta Nomor 25 tanggal 11 Desember 2025, Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah atas NII per **31 Desember 2025 telah terselesaikan seluruhnya**.

5.3.1.1.3.3 Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Saldo Piutang Retribusi Perizinan Tertentu yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.3.3.1 Rincian Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	7.525.000,00	(7.525.000,00)	(100,00)
Jumlah	**0,00**	**7.525.000,00**	**(7.525.000,00)**	**(100,00)**

Tabel di atas menunjukkan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp7.525.000,00) atau (100,00%). Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan piutang macet dan tak tertagih karena debitur yang berjumlah delapan orang tersebut seluruhnya dalam keadaan pailit dan sudah ada yang meninggal dunia sehingga piutang tersebut dihapuskan secara bersyarat pada Tahun Anggaran 2025 dengan SK Gubernur Nomor 1026/04-E/HK/2025 tanggal 29 Desember 2025.

5.3.1.1.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.4.1 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	44.205.930,00	0,00	44.205.930,00	100,00
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	34.560,00	0,00	34.560,00	100,00
Piutang Pendapatan BLUD	3.112.656.735,00	2.796.271.075,00	316.385.660,00	11,31
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	491.332.281,37	(491.332.281,37)	(100,00)
Jumlah	**3.156.897.225,00**	**3.287.603.356,37**	**(130.706.131,37)**	**(3,98)**

Tabel di atas menunjukkan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp130.706.131,37) atau (3,98%).

Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah dapat dilihat pada ***Lampiran 23***.

5.3.1.1.4.1 Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

Saldo Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.4.1.1 Rincian Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam	44.205.930,00	0,00	44.205.930,00	100,00
Jumlah	**44.205.930,00**	**0,00**	**44.205.930,00**	**100,00**

Tabel di atas menunjukkan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp44.205.930,00 atau 100,00%, merupakan piutang atas Opsen MBLB dari Kabupaten Karangasem yang belum dilimpahkan ke RKUD Provinsi Bali (LHP PDRD Kabupaten Karangasem Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III Tahun 2025).

5.3.1.1.4.2 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Saldo Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.4.2.1 Rincian Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	34.560,00	0,00	34.560,00	100,00
Jumlah	**34.560,00**	**0,00**	**34.560,00**	**100,00**

Tabel di atas menunjukkan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp34.560,00 atau 100,00%, merupakan piutang denda retribusi sewa kantin pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

5.3.1.1.4.3 Piutang Pendapatan BLUD

Saldo Piutang Pendapatan BLUD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.4.3.1 Rincian Piutang Pendapatan BLUD

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	3.112.656.735,00	2.796.271.075,00	316.385.660,00	11,31
Jumlah	**3.112.656.735,00**	**2.796.271.075,00**	**316.385.660,00**	**11,31**

Tabel di atas menunjukkan Piutang Pendapatan BLUD per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp316.385.660,00 atau 11,31% merupakan Piutang Penjualan Air Curah pada UPTD. Pengelolaan Air Minum (PAM).

5.3.1.1.4.4 Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Saldo Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.4.4.1 Rincian Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	491.332.281,37	(491.332.281.,37)	(100,00)
Jumlah	**0,00**	**491.332.281,37**	**(491.332.281,37)**	**(100,00)**

Tabel di atas menunjukkan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah per 31 Desember 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp491.332.281,37) atau (100,00%). Piutang denda ini bermula dari kerja sama pemanfaatan lahan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan PT Narendra Interpacific Indonesia (NII). Kerja sama tersebut pada awalnya merupakan bagian dari *Land Utilization and Land Development Agreement* (LUDA Induk) yang telah berjalan sejak tahun 1989, melibatkan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC), Pemerintah Provinsi Bali, dan NII di Kawasan Pariwisata The Nusa Dua.

Seiring perkembangan, berdasarkan Perjanjian Pemisahan tanggal **10 November 2022**, pelaksanaan kerja sama atas lahan milik Pemerintah Provinsi Bali dipisahkan secara khusus dan dituangkan dalam **Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 10 tanggal 23 Desember 2022** antara Pemerintah Provinsi Bali dan NII, yang selanjutnya disebut LUDA Pemprov Bali. Perjanjian ini mengatur kewajiban NII untuk membayar Kontribusi Tetap kepada Pemerintah Provinsi Bali atas pemanfaatan lahan Hak Pengelolaan (HPL) yang berlokasi di Jalan Terompong, Desa Peminge, Kecamatan Benoa, Kabupaten Badung, Provinsi Bali seluas kurang lebih **398.990 m²**. Dalam pelaksanaannya, NII tidak memenuhi kewajiban pembayaran Kontribusi Tetap pada **Triwulan II, III, dan IV Tahun 2022**, sehingga timbul denda keterlambatan yang dicatat sebagai Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar **Rp491.332.281,37**.

Akibat kegagalan NII dalam memenuhi kewajiban pembayaran tersebut, pada tanggal **1 Juni 2023** Gubernur Bali menyampaikan surat pengakhiran LUDA Pemprov Bali kepada NII. Selanjutnya, pada tanggal **6 Juli 2023**, kreditur-kreditur NII mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap NII di Pengadilan Niaga Surabaya.

Permohonan PKPU tersebut dikabulkan melalui **Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 31 Agustus 2023**. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal **25 Oktober 2023** Perjanjian Perdamaian antara NII dan para krediturnya telah mendapat pengesahan (homologasi) oleh Pengadilan Niaga Surabaya melalui **Putusan Homologasi**.

Dalam rangka melaksanakan Putusan Homologasi tersebut, NII bersama PT Globalnet Spektrum Teknologi (GST) mendirikan **PT Bali Destinasi Lestari (BDL)** sebagai entitas baru yang akan melanjutkan kerja sama pemanfaatan dan pengembangan lahan dengan Pemerintah Provinsi Bali. Selanjutnya, melalui serangkaian proses pengalihan saham yang selesai pada tanggal **22 April 2024**, komposisi kepemilikan saham BDL menjadi PT Kalibiru Graha Abadi (KGA) sebesar **90,01%** dan Bangkok Bank Public Company Limited sebesar **9,99%.**

Sebagai bagian dari penyelesaian menyeluruh seluruh kewajiban NII yang tertunggak kepada Pemerintah Provinsi Bali, pada tanggal **2 Desember 2025** ditandatangani **Kesepakatan Bersama** antara Pemerintah Provinsi Bali, NII, dan BDL. Kesepakatan Bersama ini mengatur penyelesaian seluruh tunggakan kewajiban NII berdasarkan LUDA Pemprov Bali, termasuk di dalamnya seluruh denda keterlambatan pembayaran Kontribusi Tetap. Pada tanggal yang sama, **2 Desember 2025**, seluruh tunggakan kewajiban NII sebesar **Rp59.884.028.378,98** telah diterima oleh Pemerintah

Provinsi Bali melalui transfer ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Bali dan diakui sebagai penerimaan pada Tahun Anggaran 2025. Dengan telah diselesaikannya seluruh kewajiban denda NII dalam Tahun Anggaran 2025, saldo Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah per **31 Desember 2025 menjadi nihil (Rp0,00)**.

5.3.1.1.5 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.5.1 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)	180.125.380.000,00	0,00	180.125.380.000,00	100,00
Jumlah	**180.125.380.000,00**	**0,00**	**180.125.380.000,00**	**100,00**

Tabel di atas menunjukkan Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp180.125.380.000,00 atau 100,00%.

Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat dapat dilihat pada ***Lampiran 23***.

5.3.1.1.5.1 Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.5.1.1 Rincian Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang DBH Pajak	180.098.559.000,00	0,00	180.098.559.000,00	100,00
Piutang DBH Sumber Daya Alam (SDA)	26.821.000,00	0,00	26.821.000,00	100,00
Jumlah	**180.125.380.000,00**	**0,00**	**180.125.380.000,00**	**100,00**

Tabel di atas menunjukkan Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp180.125.380.000,00 atau 100,00% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025.

5.3.1.1.6 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.6.1 Rincian Piutang Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.691.104.636,00	3.709.104.636,00	(18.000.000,00)	(0,49)
Uang Muka	14.212.583.811,00	0,00	14.212.583.811,00	100,00
Jumlah	**17.903.688.447,00**	**3.709.104.636,00**	**14.194.583.811,00**	**382,70**

Tabel di atas menunjukkan Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp14.194.583.811,00 atau 382,70%.

Rincian Piutang Lainnya dapat dilihat pada ***Lampiran 23***.

5.3.1.1.6.1 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.6.1.1 Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	3.691.104.636,00	3.709.104.636,00	(18.000.000,00)	(0,49)
Jumlah	**3.691.104.636,00**	**3.709.104.636,00**	**(18.000.000,00)**	**(0,49)**

Tabel di atas menunjukkan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 202 mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar Rp18.000.000,00 atau (0,49%).

5.3.1.1.6.2 Uang Muka

Saldo Uang Muka yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.6.2.1 Rincian Uang Muka

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	14.212.583.811,00	0,00	14.212.583.811,00	100,00
Jumlah	**14.212.583.811,00**	**0,00**	**14.212.583.811,00**	**100,00**

Tabel di atas menunjukkan Uang Muka per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp14.212.583.811 ,00 atau 100,00%, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Uang muka pengadaan barang dan jasa bangunan fasilitas umum pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2. Kelebihan pembayaran belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain untuk pembayaran Sarbagita Bulan Desember Tahun 2025 pada Dinas Perhubungan yang dicatat sebagai uang muka pengadaan barang/jasa.

5.3.1.1.7 Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.7 Rincian Penyisihan Piutang

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Penyisihan Piutang Pendapatan	(16.269.563.506,46)	(858.482.180.660,38)	842.212.617.153,92	(98,10)
Penyisihan Piutang Lainnya	(3.691.104.636,00)	(3.709.104.636,00)	18.000.000,00	(0,49)
Jumlah	**(19.960.668.142,46)**	**(862.191.285.296,38)**	**842.230.617.153,92**	**(97,68)**

Tabel di atas menunjukkan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar Rp842.230.617.153,92 atau (97,68%).

Rincian Penyisihan Piutang dapat dilihat pada ***Lampiran 23***.

5.3.1.1.7.1 Penyisihan Piutang Pendapatan

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.7.1.1 Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(358.393.725,00)	(621.485.242,76)	263.091.517,76	(42,33)
Penyisihan Piutang Retribusi	(14.905.276.565,05)	(857.298.578.937,07)	842.393.302.372,02	(98,26)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(105.266.316,41)	(562.116.480,55)	456.850.164,14	(81,27)
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	(900.626.900,00)	0,00	(900.626.900,00)	(100,00)
Jumlah	**(16.269.563.506,46)**	**(858.482.180.660,38)**	**842.212.617.153,92**	**(98,10)**

Tabel di atas menunjukkan Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar Rp842.212.617.153,92 atau (98,10%). Penjelasan saldo Penyisihan Piutang Pendapatan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Penyisihan Piutang Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp263.091.517,76 atau (42,33%) karena adanya pelunasan piutang pajak dan penghapusan piutang Penghapusan secara Bersyarat Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, sesuai Keputusan Gubernur Bali Nomor 1026/04-E/HK/2025 Tanggal 29 Desember 2025;
2. Komponen Penyisihan Piutang Retribusi mengalami penurunan signifikan sebesar Rp842.393.302.372,02 atau (98,26%);
3. Komponen Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan signifikan sebesar Rp456.850.164,14 atau (81,27%);
4. Komponen Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat memiliki saldo baru sebesar (Rp900.626.900,00) atau (100,00%).

5.3.1.1.7.2 Penyisihan Piutang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.7.2.1 Rincian Penyisihan Piutang Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(3.691.104.636,00)	(3.709.104.636,00)	18.000.000,00	(0,49)
Jumlah	**(3.691.104.636,00)**	**(3.709.104.636,00)**	**18.000.000,00**	**(0,49)**

Tabel di atas menunjukkan Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar Rp18.000.000,00 atau (0,49%).

5.3.1.1.8 Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.8.1 Rincian Beban Dibayar Dimuka

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Dibayar Dimuka	0,00	400,00	(400,00)	(100,00)
Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah	485.566.225,08	490.725.885,24	(5.159.660,16)	(1,05)
Jumlah	**485.566.225,08**	**490.726.285,24**	**(5.160.060,16)**	**(1,05)**

Tabel di atas menunjukkan Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp5.160.060,16) atau (1,05%).

Rincian Beban Dibayar Dimuka dapat dilihat pada ***Lampiran 24***.

5.3.1.1.8.1 Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.8.1.1 Rincian Beban Dibayar Dimuka

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Dibayar Dimuka	0,00	400,00	(400,00)	(100,00)
Jumlah	**0,00**	**400,00**	**(400,00)**	**(100,00)**

Tabel di atas menunjukkan Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp400,00) atau (100,00%).

5.3.1.1.8.2 Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah

Saldo Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.8.2.1 Rincian Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Peralatan dan Mesin	319.217.205,72	157.694.163,93	161.523.041,79	102,43
Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Gedung dan Bangunan	166.349.019,36	333.031.721,31	(166.682.701,95)	(50,05)
Jumlah	**485.566.225,08**	**490.725.885,24**	**(5.159.660,16)**	**(1,05)**

Tabel di atas menunjukkan Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp5.159.660,16) atau (1,05%), berikut penjelasan saldo Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp161.523.041,79 atau 102,43%;

2. Komponen Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Gedung dan Bangunan mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp166.682.701,95) atau (50,05%).

Saldo Beban Dibayar Dimuka berasal dari pembayaran premi asuransi Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya berupa Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 Nomor: B.31.000.3.3/1171/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 11 Juni 2025.

Rincian Beban Dibayar Dimuka dapat dilihat pada ***Lampiran 24***

5.3.1.1.9 Persediaan

Saldo Persediaan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.9.1 Rincian Persediaan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Barang Pakai Habis	157.336.319.853,75	163.409.206.924,14	(6.072.887.070,39)	(3,72)
Barang Tak Habis Pakai	73.765.512,60	115.638.930,60	(41.873.418,00)	(36,21)
Jumlah	**157.410.085.366,35**	**163.524.845.854,74**	**(6.114.760.488,39)**	**(3,74)**

Tabel di atas menunjukkan Persediaan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp6.114.760.588,39) atau (3,74%).

Rincian Persediaan dapat dilihat pada ***Lampiran 25***.

5.3.1.1.9.1 Barang Pakai Habis

Saldo Barang Pakai Habis yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.9.1.1 Rincian Barang Pakai Habis

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bahan	40.782.711.528,56	33.276.009.681,62	7.506.701.846,94	22,76
Suku Cadang	171.269.356,52	100.078.598,67	71.190.757,85	71,13
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	20.345.838.128,68	16.882.653.748,28	3.463.184.380,40	20,51
Obat-obatan	20.374.237.440,90	26.621.649.453,73	(6.247.412.012,83)	(23,47)
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	70.473.946.891,14	81.611.712.942,31	(11.137.766.051,17)	(13,65)
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	2.202.350,00	0,00	2.202.350,00	100,00
Natura dan Pakan	498.997.210,97	467.729.866,85	31.267.344,12	6,68
Persediaan Penelitian	2.284.004.676,98	2.033.291.122,68	250.713.554,30	12,33
Persediaan dalam Proses	2.403.112.270,00	2.416.081.510,00	(12.969.240,00)	(0,54)
Jumlah	**157.336.319.853,75**	**163.409.206.924,14**	**(6.072.887.070,39)**	**(3,72)**

Tabel di atas menunjukkan Barang Pakai Habis per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp6.072.887.070,39) atau (3,72%), berikut penjelasan saldo Barang Pakai Habis beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Suku Cadang mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp71.190.757,85 atau 71,13%;
2. Komponen Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga mengalami saldo baru sebesar Rp2.202.350,00 atau 100,00%.

Selain itu juga terdapat persediaan kadaluarsa pada Dinas Kesehatan dan Sekretarian DPRD seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.3.1.1.9.1.2 Rincian Barang Persediaan Kadaluarsa

NO	SKPD	NAMA BARANG	NILAI	
1.	Dinas Kesehatan	Bahan Kimia	Rp	24.561.475,60
		Bahan Lainnya	Rp	29.254.614,55
		Obat	Rp	162.765.524,06
		Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Rp	2.588.467.226,79
2.	Sekretariat DPRD	Bahan Komputer	Rp	10.175.000,00
	JUMLAH		**Rp**	**2.815.223.841,00**

5.3.1.1.9.2 Barang Tak Habis Pakai

Saldo Barang Tak Habis Pakai yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.1.9.2.1 Rincian Barang Tak Habis Pakai

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Komponen	73.765.512,60	115.638.930,60	(41.873.418,00)	(36,21)
Jumlah	**73.765.512,60**	**115.638.930,60**	**(41.873.418,00)**	**(36,21)**

Tabel di atas menunjukkan Barang Tak Habis Pakai per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp41.873.418,00) atau (36,21%).

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.2.1 Rincian Investasi Jangka Panjang

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6.978.339.830.762,88	6.771.706.852.508,99	206.632.978.253,89	3,05
Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	143.915.646.511,06	144.001.416.845,90	(85.770.334,84)	(0,06)
Jumlah	**7.122.255.477.273,94**	**6.915.708.269.354,89**	**206.547.207.919,05**	**2,98**

Tabel di atas menunjukkan Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp206.547.207.919,05 atau 2,98%.

5.3.1.2.1. Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Saldo Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.2.1.1 Rincian Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6.978.339.830.762,88	6.771.706.852.508,99	206.632.978.253,89	3,05
Jumlah	**6.978.339.830.762,88**	**6.771.706.852.508,99**	**206.632.978.253,89**	**3,05**

Tabel di atas menunjukkan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp206.632.978.253,89 atau 3,32%.

Rincian Penyertaan Modal dapat dilihat pada ***Lampiran 26***.

1. Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
   a. Perumda Kerta Bali Saguna

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Perumda Kerta Bali Saguna	61.460.490.489,00	95.859.986.587,50	(34.399.496.098,50)	(35,89)

Pada Tahun 2022, terjadi perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna. Perubahan bentuk badan hukum ini dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar agar tujuan Perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan perekonomian yang sehat, kuat, produktif, dan berdaya saing agar mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan Masyarakat Bali yang Sejahtera dan Bahagia sesuai Visi Pembangunan Daerah "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Bidang usaha dan jenis usaha Perumda Kerta Bali Saguna meliputi Pengelolaan Aset dan Infrastruktur serta jasa, Industri dan Perdagangan, dan Energi dan Ketenagalistrikan. Laporan Keuangan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika dan Rekan dengan Laporan No. 00014/3.0225/AU.8/05/1756-3/1/III/2026 tanggal 25 Pebruari 2026 dan mendapat opini Wajar dengan Pengecualian

   b. PT. BPD Bali

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
PT. BPD Bali	1.665.235.678.757,30	1.464.824.031.618,88	200.411.647.138,42	13,68

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Bank) didirikan berdasarkan akta No. 131 tanggal 5 Juni 1962. Perubahan badan hukum Bank ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Bali dari PD menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Bali (Bank BPD Bali) yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 2002 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 No.6 Seri D No.3). Penyesuaian bentuk badan hukum Bank menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam akta notaris No. 7 tanggal 12 Mei 2024, yang dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Alit Sudiatmika, S.H. Notaris Ida Bagus Alit Sudiatmika, S.H. Ruang lingkup kegiatan Bank BPD Bali meliputi:

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2) Memberikan kredit
3) Menerbitkan surat pengakuan utang;
4) Menempatkan dana, meminjam dana, dari/atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
5) Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nilai penyertaan modal pada PT. BPD Bali disajikan dengan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada PT. BPD Bali sebesar 29,16%. Laporan Keuangan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin dan Sumargo dengan Laporan No/Ref:00001/2.1127/AU.1/07/0060-5/1/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 dan mendapatkan Opini Wajar. Nilai penyertaan modal pada PT. BPD Bali Tahun 2025 diperoleh dari perhitungan persentase kepemilikan dari laba PT.BPD Bali Tahun 2025 (audited) dikurangi dengan dividen yang dibagikan atas laba Tahun 2024. Pada Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Bali melakukan penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp120.000.000.000,00 sesuai Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 199/01-C/HK/2025 tentang Besaran Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tanggal 18 Pebruari 2025.

c. PT. Jamkrida Bali Mandara

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
PT. Jamkrida Bali Mandara	246.898.956.931,31	203.432.294.659,34	43.466.662.271,97	21,37

PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 27 tanggal 21 November 2010 Tanggal 20 Oktober 2010. PT. Jamkrida Bali Mandara berusaha dalam bidang Jasa Penjaminan Kredit, memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi serta meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Bali melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah berupa uang sebesar Rp38.000.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar rupiah) sesuai Keputusan Gubernur Bali Nomor 196/01-C/HK/2025 tentang Besaran Penyertaan Modal Daerah kepada PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Tanggal 17 Pebruari 2025.Laporan Keuangan Konsolidasian diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika dan Rekan dengan Laporan No. 00012/3.0225/AU.1/09/1756-4/1/III/2026 tanggal 24 Pebruari 2026 dan mendapat opini Wajar.

d. Perseroda Pusat Kebudayaan Bali

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Perseroda Pusat Kebudayaan Bali	5.004.744.704.585,27	5.004.744.704.585,27	0,00	0,00

Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali didirikan dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pusat kebudayaan Bali yang berkualitas, inovatif, transparan dan akuntabel. Pengelolaan Pusat Kebudayaan Bali yang bergerak di bidang kegiatan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Bali; Pengembangan Ekonomi; Pengembangan Kawasan;Perdagangan; Olahraga; Pementasan Seni; Pameran Produk Budaya; Pusat Bisnis (*Central Business District*/CBD); Pelabuhan Penyebrangan dan Marina; *Meeting Incentive Convetion and Exhibition* (MICE); Kesehatan; Hunian; Kawasan Pengembangan Berbasis Transit (*Transit Oriented Development*/TOD); dan Wahana Wisata Alam diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2022

tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali. Pemerintah Provinsi Bali melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroda berupa inbreng atas Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali. Sampai saat ini Perseroda Pusat Kebudayaan Bali belum beroperasi dan belum pernah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik.

e. Perumda Kerthi Bali Santhi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Perumda Kerthi Bali Santhi	0,00	2.845.835.058,00	0,00	(100,00)

Perumda Kerthi Bali Santhi didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2022 Tanggal 2 Maret 2022. Pendirian Perumda Kerthi Bali Santhi dimaksudkan untuk menyelenggaran Pariwisata Digital Budaya Bali secara professional, akuntabel dan transparan. Nilai penyertaan modal pada Perumda Kerthi Bali Santhi disajikan dengan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali sebesar 100%. Laporan Keuangan direviu oleh Kantor Akuntan Publik I Gede Oka dan Rekan dengan Laporan No. 00001/LR/KAP.IGOR/1/III/2026 tanggal 10 Maret 2026.

5.3.1.2.2 Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Saldo Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.2.2.1 Rincian Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	143.915.646.511,06	144.001.416.845,90	(85.770.334,84)	(0,06)
Jumlah	**143.915.646.511,06**	**144.001.416.845,90**	**(85.770.334,84)**	**(0,06)**

Tabel di atas menunjukkan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp85.770.334,84) atau (0,06%). Rincian Penyertaan Modal dapat dilihat pada ***Lampiran 26***.

a. PT. Rumah Sakit Puri Raharja

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
PT Rumah Sakit Puri Raharja	42.765.646.511,06	42.851.416.845,90	(85.770.334,84)	(0,20)

PT. Puri Raharja merupakan salah satu rumah sakit swasta yang bergerak dalam kegiatan usaha berupa membangun, mendirikan dan mengelola rumah sakit untuk umum, termasuk di dalamnya klinik Kesehatan Masyarakat dan laboratorium. Nilai penyertaan modal pada PT. Puri Raharja disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada PT. Puri Raharja sebesar 58,00% dan karena keterbatasan akun, maka Penyertaan Modalnya di catat sebagai Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penambahan nilai penyertaan modal pada PT. Puri Raharja tahun 2025 adalah sebesar persentase kepemilikan dari Laporan Laba (Rugi) Unaudited 2025 dan telah dikurangi nilai deviden yang dibagikan atas Laba Tahun 2024. Laporan Keuangan di audit oleh Kantor Akuntan Publik Ketut Budiartha dan Anggiriawan dengan Laporan Auditor Independen No. 00014/2.1266/AU.8/05/1612-1/1/III/2026 tanggal 25 Maret 2026 dan mendapat opini Wajar.

b. PT. Asuransi Bangun Askrida

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
PT Asuransi Bangun Askrida	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	0,00

PT. Asuransi Bangun Askrida (Perseroan) didirikan berdasarkan Akta Notaris Raharti Sudjardjati, S.H., No. 9 dan dengan persetujuan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Pemerintah No. KEP.192/KM.B/1990, tanggal 14 Maret 1990. PT. Asuransi Bangun Askrida merupakan Perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang asuransi umum dan menawarkan perlindungan asuransi atas semua risiko dan kehilangan,

khususnya bagi gedung-gedung pemerintahan dan juga aset-aset milik pemerintah lainnya.Nilai penyertaan modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida disajikan dengan menggunakan metode *cost,* karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali sebesar 0,39% dan karena keterbatasan akun, maka Penyertaan Modalnya dicatat sebagai Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

c. PT. Jasa Marga Bali Tol

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
PT Jasa Marga Bali Tol	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	0,00

PT Jasa Marga Bali Tol (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta No. 02 tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU57740.AH.01.01.TH 2011 tanggal 25 Nopember 2011. PT. Jasa Marga Bali Tol berusaha dalam bidang pengusahaan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, yang meliputi pendanaan, perencanaan Teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan telah memperoleh izin melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 375/KPTS/2013 tanggal 18 September 2013, dimana hak konsesi diberikan kepada Perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan konstruksi, operasi dan pemeliharaan atas jalan tol Nusa Dua- Ngurah Rai-Benoa selama 45 tahun, terhitung mulai Bulan Oktober 2013. Nilai Penyertaan Modal pada PT Jasa Marga Bali Tol disajikan dengan menggunakan metode biaya, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada PT Jasa Marga Bali Tol sebesar 8,01%. Nilai Penyertaan Modal pada PT Jasa Marga Bali Tol disajikan sebesar biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 yang dikeluarkan berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah. Laporan Keuangan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan Laporan No. 00151/2.1030/AU.1/06/0181-4/1/III/2026 tanggal 27 Pebruari 2026 dan mendapat opini Wajar

5.3.1.3 ASET TETAP

Saldo Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.3.1 Rincian Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanah	8.097.663.457.350,43	5.385.006.936.615,43	2.712.656.520.735,00	50,37
Peralatan dan Mesin	2.502.919.368.695,03	2.196.293.227.099,70	306.626.141.595,33	13,96
Gedung dan Bangunan	4.199.917.279.027,22	3.850.274.091.822,14	349.643.187.205,08	9,08
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.647.587.427.731,03	4.335.363.075.122,41	1.312.224.352.608,62	30,26
Aset Tetap Lainnya	112.910.723.583,04	98.441.316.502,04	14.469.407.081,00	14,69
Konstruksi Dalam Pengerjaan	67.448.741.853,85	43.173.893.899,00	24.274.847.954,85	56,22
Akumulasi Penyusutan	(6.619.254.211.959,49)	(5.485.889.248.727,52)	(1.133.364.963.231,97)	20,65
Jumlah	**14.009.192.786.281,11**	**10.422.663.292.333,20**	**3.586.529.493.947,91**	**34,41**

Tabel di atas menunjukkan Aset Tetap per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp3.586.529.493.947,91 atau 34,41%.

5.3.1.3.1 Tanah

Saldo Tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.3.1.1 Rincian Tanah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanah	8.097.663.457.350,43	5.385.006.936.615,43	2.712.656.520.735,00	50,37
Jumlah	**8.097.663.457.350,43**	**5.385.006.936.615,43**	**2.712.656.520.735,00**	**50,37**

Tabel di atas menunjukkan Tanah per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp2.712.656.520.735,00 atau 50,37%, berikut penjelasan saldo Tanah beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Tanah mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp2.712.656.520.735,00 atau 50,37%. Salah satu penyebab kenaikan tersebut adalah adanya penerimaan hibah berupa tanah untuk jalan provinsi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga serta Pemerintah Kabupaten Tabanan sebesar Rp 2.704.610.360.650,00
2. Pemerintah Provinsi Bali memiliki permasalahan terkait dengan Aset Tetap Tanah, dengan rincian sebagai berikut:
   a. **Tanah Eks HGU Nomor 1 Desa Pemuteran**, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng seluas 2.465.000 m2 (246,5 Ha). Tanah tersebut diklaim oleh PT M selaku pemegang HGU Nomor 1 Desa Pemuteran yang sudah berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, hasil dari Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 13 Oktober 2017, Pemerintah Provinsi Bali menang sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 591PK/Pdt/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 yang sudah inkracht. Proses selanjutnya melakukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Singaraja yang difasilitasi oleh Biro Hukum. Pada tanggal 10 Juni 2021 Perbekel Pemuteran telah membentuk tim melalui Keputusan Perbekel Pemuteran No. 140/25/VI/2021 disebut dengan Tim Tiga Belas, selanjutnya Tim tersebut mohon audiensi dengan Gubernur Bali melalui Surat No. 02/TIM PKPT/VII/2021 Tanggal 7 Juli 2021. Permohonan audiensi difasilitasi melalui rapat tanggal 17 Desember 2021 yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, dengan hasil :
      1) Pemerintah Provinsi Bali bersama Tim Tiga Belas sepakat untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan tanah eks HGU No. 1 / Desa Pemuteran secara damai.
      2) Tim Tiga Belas akan segera menyiapkan data masyarakat yang bertempat tinggal dan/atau menggarap tanah tersebut sesuai permintaan Pemerintah Provinsi Bali, dan akan segera menyampaikannya bersama surat permohonan kepada Gubernur Bali;
      3) Tim Tiga Belas siap mensosialisasikan kepada masyarakat agar ikut mendukung dan kooperatif jika dilaksanakan pendataan dan pemetaan langsung oleh Pemerintah Provinsi Bali ke tanah tersebut. BPKAD Provinsi Bali telah mendaftarkan permohonan pengukuran dan pemetaan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Pada tanggal 1 November 2022 telah dilakukan pengukuran dan pemetaan oleh Pemerintah Provinsi Bali bersama pihak BPN, didapat luas total 2.406.835 m2 sesuai Peta Bidang Tanah Nomor 1063/2022 Tanggal 15 Desember 2022. Hasil pengukuran dan pemetaan tersebut sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Gubernur Bali. Tanggal 30 Januari 2023 dilakukan audiensi antara Tim Tigabelas dengan Gubernur Bali, namun belum juga ada kesepakatan mengenai luas lahan yang akan didistribusikan.

         Tanggal 27 Agustus 2023 dilaksanakan rapat bertempat di Jaya Sabha antara Gubernur Bali, Pj. Bupati Buleleng, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng dan Perwakilan Tim 13 menyepakati :
         1) Menyepakati realokasi tanah eks HGU 1 Pemuteran seluas 85,76 Hektar yang digunakan untuk : Desa Dinas, Desa Adat, Kawasan Pura dan Kuburan, warga penggarap tahun 1963, warga penggarap tahun 1992, TNI (Arhanud), fasilitas umum dan peternakan.
         2) Realokasi sebagaimana dimaksud akan dibicarakan lebih lanjut oleh Tim 13 dengan masyarakat yang difasilitasi oleh Pj. Bupati Buleleng, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.

         Pada tanggal 3 September 2023 dilaksanakan pertemuan langsung antara Gubernur dengan Tim Tigabelas dan warga penggarap bertempat di Kantor Desa Pemuteran untuk menyampaikan hasil pertemuan tanggal 27 Agustus 2023 (poin 1 di atas) secara langsung kepada warga penggarap. Namun pada hari itu Tim Tigabelas meminta waktu kepada Gubernur untuk mensosialisasikan terlebih dahulu kepada warga penggarap karena pada pertemuan itu tidak semua warga penggarap hadir. Gubernur memberikan waktu paling lambat tanggal 4 September 2023 harus sudah ada jawaban dari Tim Tigabelas atas opsi pemberian lahan seluas 85,76 Hektar kepada warga. Sesuai batas waktu yang diberikan, maka Tim Tigabelas menghadap kepada Gubernur di Jayasabha tanggal 4 September 2023.

Dalam pertemuan tersebut telah disepakati luas tanah yang akan dilepaskan hak oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk diredistribusikan kepada warga penggarap, Desa Adat Pemuteran, Desa Dinas Pemuteran, kawasan pura dan kuburan serta fasilitas umum adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari luas hasil ukur terbaru, atau seluas 120,3 Ha. Sedangkan 50% sisanya seluas 120,3 Ha adalah untuk Pemerintah Provinsi Bali termasuk alokasi untuk TNI (Arhanud).

Terhadap kesepakatan tersebut, selanjutnya BPKAD Provinsi Bali melaksanakan rapat pada tanggal 3 Oktober 2023 untuk membahas tindaklanjut penyelesaian permasalahan tanah eks HGU 1, yang bertujuan untuk mendengar secara langsung dari Tim Tigabelas terkait kesepakatan yang telah disetujui bersama Gubernur Bali di Jayasabha. Tim Tigabelas menjelaskan bahwa mereka sudah membuat konsep peta posisi tanah sesuai kesepakatan tanggal 4 September 2023 di Jayasabha. Dalam rapat tersebut juga terdapat usulan dari anggota Kelompok Ahli Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Bali agar dilakukan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 591/PK/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 (Putusan Peninjauan Kembali yang memenangkan Pemerintah Provinsi Bali dalam perkara melawan PT M). Hasil rapat tersebut telah dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

Atas laporan hasil rapat tanggal 3 Oktober 2023 tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Bali menugaskan Kepala Biro Hukum untuk membahas terkait usulan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut sehingga pada tanggal 3 November 2023 Biro Hukum melaksanakan rapat bersama Kelompok Ahli Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Bali, BPKAD Provinsi Bali, dan Inspketorat Daerah Provinsi Bali. Hasil rapat tersebut telah dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

Serikat Petani Suka Makmur melalui Surat Nomor 01/SPSM/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024 yang ditujukan kepada Menteri ATR RI, menyatakan:

1) Menolak kesepakatan antara Tim Tigabelas Desa Pemuteran dan Gubernur Bali tanggal 4 September 2023 (poin 19 huruf h di atas) karena tanpa persetujuan Serikat Petani Suka Makmur.
2) Menolak klaim kepemilikan Pemerintah Provinsi Bali atas tanah eks HGU Nomor 1 Desa Pemuteran.
3) Menuntut redistribusi dan pengakuan hak atas tanah untuk Serikat Petani Suka Makmur.

Pemerintah Provinsi Bali telah bersurat kepada Menteri ATR/Kepala BPN melalui Surat Gubernur Bali Nomor B.31.000.2.3.2/738/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 10 April 2025 yang intinya bahwa tanah eks HGU Nomor 1/Desa Pemuteran adalah sah milik Pemerintah Provinsi Bali yang diperoleh dari hasil pembelian, dan telah dipertegas dalam salah satu amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 591/PK/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang berbunyi ”Menyatakan sah menurut hukum Penggugat (Pemerintah Provinsi Bali) adalah pemilik tanah eks HGU Nomor 1 Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, seluas 2.465.000 m2”, sehingga penolakan kepemilikan Pemerintah Provinsi Bali atas tanah tersebut yang dinyatakan oleh Serikat Petani Suka Makmur adalah tidak benar dan sebagai tindakan melawan hukum.

Tanggal 23 Juli 2025 dilaksanakan rapat di Jayasabha yang dipimpin langsung oleh Gubernur Bali, dihadiri oleh Kepala BPKAD Provinsi Bali, Bupati Buleleng dan Wakil Bupati Buleleng beserta jajarannya, Kepala Desa Pemuteran, Bendesa Adat Pemuteran, Ketua Tim Tigabelas Desa Pemuteran, Perwakilan petani, dengan kesepakatan:

1) Sebanyak 82 rumah akan diberikan kompensasi dan besarannya atas hasil penilaian dari Dinas PUPRPKP Provinsi Bali dan Dinas PU Kabupaten Buleleng.
2) Petani yang masih punya tanaman hanya diijinkan sampai bulan Desember 2025.
3) Tanah wakaf yang semula 1,5 Hektare diberikan tambahan 1,5 Hektare menjadi 3 Hektare diambilkan dari alokasi fasilitas umum jalan yang semula 3 Hektare menjadi 1,5 Hektare. Kekurangan lahan untuk fasilitas umum jalan akan dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Bali seluas maksimum 1,5 Hektare.

4) Kesepakatan pembagian lahan 50%:50% sesuai kesepakatan tanggal 4 September 2023 yaitu atas nama Pemerintah Provinsi Bali seluas 120,3 Hektare dan Desa Adat Pemuteran seluas 120,3 Hektare. Proses pengukuran dan sertifikasi ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Buleleng, Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, Bendesa Adat Pemuteran, Kepala Desa Pemuteran dan Tim Tigabelas.
5) Bupati Buleleng, Camat Gerokgak, Bendesa Adat Pemuteran, Kepala Desa Pemuteran dan Tim Tigabelas bertanggungjawab mengkomunikasikan kepada masyarakat serta menjaga situasi kondusif.
6) Terhadap perlakuan oknum yang mengganggu kesepakatan dan memprovokasi warga agar dilaporkan kepada penegak hukum untuk dilakukan tindakan tegas.

BPKAD Provinsi Bali dan Dinas PUPRPKP Provinsi Bali melaksanakan pendataan dan penilaian terhadap rumah warga yang berada di atas tanah eks HGU Nomor 1 Desa Pemuteran pada tanggal 28 dan 31 Juli 2025, bersama: Camat Gerokgak, Perbekel Pemuteran, Bendesa Adat Pemuteran, Ketua Tim Tigabelas Desa Pemuteran, Sekretaris Tim Tigabelas Desa Pemuteran, Kelian Banjar Dinas Pengumbahan.

Konsorsium Pembaruan Agraria bersurat kepada Gubernur Bali Nomor 435/Seknas-KPA/VII/2025 Tanggal 28 Juli 2025, yang pada intinya menyampaikan:

a. Menganulir hasil rapat Rabu, 23 Juli 2025 sebab akan menimbulkan masalah yang lebih berat dan sulit ditangani di kemudian hari;
b. Menggelar dialog terbuka kembali dengan Petani dan KPA untuk mendengarkan aspirasi dari petani secara langsung; dan
c. Mengeluarkan keputusan pengusulan objek redistribusi tanah kepada Menteri ATR/BPN sebagai percepatan redistribusi tanah di Desa Pemuteran.

b. Tanah Pemerintah Provinsi Bali SHP Nomor 4 Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar seluas 3.000 m2 (0,3 Ha). Di atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik a.n INSA yang telah dijual dan dijadikan perumahan. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Provinsi Bali menggugat Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan INSA ke Pengadilan Negeri Denpasar, namun gugatan tidak dikabulkan karena Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili jenis perkara ini yang semestinya diajukan ke PTUN Denpasar. Pada tanggal 5 Maret 2021 dilaksanakan rapat bersama Kanwil BPN Provinsi Bali, Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan Kelompok Ahli Bantuan Hukum, dengan hasil bahwa untuk tindak lanjut permasalahan tanah SHP No. 4 Desa Sidakarya, Kota Denpasar, BPKAD Provinsi Bali bersama Biro Hukum Setda Provinsi Bali akan segera berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk meminta data para pemegang sertifikat hak milik yang berada di atas tanah SHP No. 4 Desa Sidakarya sebagai bahan penyusunan gugatan. Hasil rapat tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kepala BPKAD Provinsi Bali dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk dapat diberikan data dan informasi yang memuat nama pemegang hak, nomor sertifikat, dan luas bidang tanah/sertifikat yang terbit di atas bidang tanah SHP Nomor 4 / Desa Sidakarya yang akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun upaya hukum penyelesaian permasalahan tanah dimaksud (Surat Nomor B.13.593/1778/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 13 Juni 2022). Sesuai hasil rapat tanggal 16 Januari 2023 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, untuk memenuhi Surat Kepala BPKAD Provinsi Bali tersebut, Kantor Pertanahan Kota Denpasar akan memanggil pihak Pemerintah Provinsi Bali untuk mediasi. Dalam mediasi tersebut akan diuraikan asal-mula tanah SHP Nomor 4 / Sidakarya sampai pada tersebutnya beberapa hak milik di atasnya, serta akan disebutkan nomor dan nama pemegang haknya.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar (Nomor B.13.032/1287/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 11 Mei 2023) untuk meminta agar segera dilakukan mediasi sesuai hasil rapat tanggal 16 Januari 2023.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar telah mengundang Pemerintah Provinsi Bali untuk mediasi penyelesaian permasalahan akibat indikasi tumpang tindih SHP Nomor 4/Sidakarya pada tanggal 13 Desember 2023. Hasil mediasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor IP.02.02/4051-51.71/XII/2023 Tanggal 21 Desember 2023 yang isinya memberikan daftar nama pemegang hak dan nomor sertipikat/hak yang terbit di atas tanah aset Pemerintah Provinsi Bali SHP 4 Sidakarya.

Kepala BPKAD Provinsi Bali telah menyampaikan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor IP.02.02/4051-51.71/XII/2023 Tanggal 21 Desember 2023 kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali melalui Surat Nomor B.13.045.2/12/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 3 Januari 2024.

Pada tanggal 10 Oktober 2024, Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar membalas surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.13.032/1287/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 11 Mei 2023, dengan Surat Nomor IP.02.02/3592-51.71/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024, yang isinya bahwa dalam rangka tertib administrasi di bidang pertanahan dan guna menjamin kepastian hukum, pihak-pihak yang berkeberatan dipersilakan untuk melakukan upaya hukum berupa gugatan di lembaga peradilan.

c. **Berdasarkan Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali**, terdapat tanah aset Pemerintah Provinsi Bali yang terletak di Jalan A. Yani, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng seluas 400 m2, tercatat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan kode barang/register : 01.01.11.04.01/0001. Dinas Perikanan Darat membeli tanah tersebut dari PGM berdasarkan Padol tanggal 9 Desember 1953, Nomor 174/1953, yang diperkuat dengan Surat Keterangan Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Ipeda Singaraja Tanggal 2 Februari 1988 Nomor S.083/WPJ.08/KI. (Sumber : Surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng Nomor 593/11/Um/93.K. Tanggal 12 Januari 1994). Sejak tanggal 1 Januari 1969, tanah tersebut ditempati dan dihasili oleh I Nengah Saban dari Banjar Banyuasri berdasarkan Surat Perjanjian Mengerjakan Tanah Tanggal 1 Juni 1969. Pada tahun 1991, tanah tersebut dipinjamkan kepada Made Tirtayasa (ipar dari pengelola UD Taman Dewata yang bernama Ketut Arta) untuk lokasi pembibitan tanaman hias. (Sumber : Surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng Nomor 593/334/Um/93 Tanggal 12 Januari 1994). Pada tahun 1992, tanah yang sama dijual lagi oleh PG Cs (cucu alm. PGM) kepada KA (Pengelola UD. Taman Dewata) di depan PPAT pada tanggal 3 Desember 1992 dengan Akta Jual-Beli No. : 690/Ket.Bll/98 dan telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 853 atas nama Ketut Arta. Padahal tanah tersebut akan digunakan untuk perluasan pembangunan 1 (satu) unit kerja / Rumah Jabatan. Pada tanggal 9 Maret 1994 dilakukan pertemuan yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setwilda Tingkat II Buleleng, di mana para pihak akan diupayakan untuk bermusyawarah yang nantinya sebagai dasar penyelesaian masalahnya. Tindak lanjut hasil pertemuan tanggal 6 Juli 1994 yang dilakukan di ruangan Asisten I Setwilda Tk. II Buleleng yaitu :

Berdasarkan Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali, terdapat tanah aset Pemerintah Provinsi Bali yang terletak di Jalan A. Yani, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng seluas 400 m2, tercatat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan kode barang/register : 01.01.11.04.01/0001. Dinas Perikanan Darat membeli tanah tersebut dari PGM berdasarkan Padol tanggal 9 Desember 1953, Nomor 174/1953, yang diperkuat dengan Surat Keterangan Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Ipeda Singaraja Tanggal 2 Februari 1988 Nomor S.083/WPJ.08/KI. (Sumber : Surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng Nomor 593/11/Um/93.K. Tanggal 12 Januari 1994). Sejak tanggal 1 Januari 1969, tanah tersebut ditempati dan dihasili oleh INS dari Banjar Banyuasri berdasarkan Surat Perjanjian Mengerjakan Tanah Tanggal 1 Juni 1969. Pada tahun 1991, tanah tersebut dipinjamkan kepada MT (ipar dari pengelola UD TD yang bernama KA) untuk lokasi pembibitan tanaman hias. (Sumber : Surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng Nomor 593/334/Um/93 Tanggal 12 Januari 1994). Pada tahun 1992, tanah yang sama dijual lagi oleh Putu Gunawan Cs (cucu alm. PGM) kepada Ketut Arta (Pengelola UD. Taman Dewata) di depan PPAT pada tanggal 3 Desember 1992 dengan Akta Jual-Beli No. : 690/Ket.Bll/98 dan telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 853 atas nama KA. Padahal tanah tersebut akan digunakan untuk perluasan pembangunan 1 (satu) unit kerja / Rumah Jabatan. Pada tanggal 9 Maret 1994 dilakukan pertemuan yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setwilda Tingkat II Buleleng, di mana para pihak akan diupayakan untuk bermusyawarah yang nantinya sebagai dasar penyelesaian masalahnya. Tindak lanjut hasil pertemuan tanggal 6 Juli 1994 yang dilakukan di ruangan Asisten I Setwilda Tk. II Buleleng yaitu :

1) Pada pertemuan tersebut telah berhasil dirumuskan bahwa tanah Dinas Perikanan di Jalan A. Yani Singaraja akan diganti dengan tanah milik Pemda Tk. II Buleleng yang berlokasi di sebelah barat Gedung Kesenian (Di belakang Kantor Departemen Keuangan) Singaraja, seluas ± 4 are.

2) Setelah pertemuan tersebut dilanjutkan dengan penijauan ke lapangan, ternyata tanah yang direncanakan sebagai ganti tersebut point 1 di atas, ada oknum yang menguasainya, di samping itu tanah tersebut bentuknya kecil memanjang.

Dalam upaya tertib pengelolaan tanah aset Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan penelusuran dokumen dan pengecekan lapangan tanggal 29 Mei 2013 ditemukan bahwa:

1) Tanah yang lokasinya di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kaliuntu, Buleleng ternyata luasnya bukan 400 m2 melainkan 350 m2, dengan Sertifikat Hak Milik No. 853 tanggal 22 Februari 1993 atas nama IKA (almarhum) yang dibeli pada tahun 1992 dari cucu PGM (GCS).
2) Di atas tanah tersebut sudah didirikan bangunan oleh I Ketut Arta (almarhum) dan disewa oleh perusahaan FIF.

Untuk mengetahui kepastian terbitnya SHM No. 853 dimaksud di atas, BPKAD Provinsi Bali telah mengajukan permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, dan telah dilakukan pengukuran pada tanggal 25 Oktober 2022, didapat hasil ukur 400 m2 dengan keterangan berada pada SHM 00853, GS 00011/1993. Hasil ukur tersebut akan dilaporkan kepada Sekda.

Saat ini sedang pengumpulan dokumen pendukung (asli) oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali bersama Biro Hukum Setda Provinsi Bali untuk proses gugatan.

d. Permasalahan Tanah SHP 121 dan 126 Desa Ungasan Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung:

Berdasarkan Buku Tanah Dana Bukti di Kabupaten Badung, terdapat tanah Persil 11 Klas III Luas 191.050 m2 (19,105 Ha) yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta (saat ini Kecamatan Kuta Selatan), Kabupaten Badung, tahun 1970an digarap oleh 19 Orang dengan Surat Ijin Menggarap Nomor 1647 s/d 1665.

Berdasarkan hasil pengecekan bahwa tanah Persil 11 Desa Unggasan, belum bersertipikat, maka Pemerintah Provinsi Bali selanjutnya mengajukan permohonan pensertipikatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada bulan Nopember 2015, sehingga pada tanggal 2 Maret 2016 terbit SHP Nomor 121 seluas 40.400 m2 dan tanggal 1 Juni 2016 terbit SHP Nomor 126 luas 48.450 m2, keduanya atas nama Pemerintah Provinsi Bali (terbit menjadi 2 sertipikat karena adanya batas jalan). Bagian yang terbit sertipikat adalah tanah kosong yang secara fisik tidak ada bangunan di atasnya.

Pada tahun 2023, I Ketut Nulung alias I Nyoman Nulung, dkk mengajukan permohonan pensertipikatan atas keseluruhan tanah Persil 11 Desa Unggasan (termasuk yang sudah terbit SHP Nomor 121 dan SHP Nomor 126). Tanggal 16 Agustus 2023 dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Tanah (Panitia A) Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas permohonan I Ketut Nulung alias I Nyoman Nulung, dkk di Kantor Desa Ungasan, dan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan.

I Ketut Nulung alias I Nyoman Nulung dkk mengajukan permohonan pembatalan SHP 121 dan SHP 126 Desa Ungasan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Kantor Pertanahan Kabupaten Badung memberitahukan adanya permohonan pembatalan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Bali melalui Surat Nomor MP.01.03/4931-51.03/VIII/2023 Tanggal 23 Agustus 2023.

Kantor Pertanahan Kabupaten Badung menyampaikan/meneruskan permohonan pembatalan SHP 121 dan SHP 126 Desa Ungasan yang diajukan oleh I Ketut Nulung alias I Nyoman Nulung dkk tersebut ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali melalui Surat Nomor 4932/51.03.MP.01.03/VIII/2023 Tanggal 23 Agustus 2023.

Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali menyampaikan pemberitahuan penanganan permohonan pembatalan SHP 121 dan SHP 126 Desa Ungasan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Bali melalui Surat Nomor MP.01.02/1360-51/VIII/2023 Tanggal 28 Agustus 2023.

Tanggal 31 Agustus 2023 terbit Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor 168/Pbt/BPN.51/VIII/2023 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 121/Desa Ungasan, Luas 40.400 m2 Dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 126/Desa Ungasan, Luas 48.450 m2 Keduanya Tercatat Atas Nama Pemerintah Provinsi Bali Terletak Di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Menanggapi pembatalan kedua sertipikat tersebut, Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan keberatan atas pembatalan SHP Nomor 121 & SHP Nomor 126 Ungasan kepada Kepala Kantor

Wilayah BPN Provinsi Bali melalui Surat Pj. Gubernur Bali Nomor B.00.180/47488/Setda Tanggal 17 November 2023.

Surat Keberatan Pj. Gubernur Bali dijawab oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali melalui Surat Nomor MP.01.02/1878-51/XI/2023 Tanggal 30 November 2023, yang intinya bahwa pembatalan SHP Nomor 121 dan SHP Nomor 126 Ungasan adalah pembatalan produk hukum karena cacat administrasi dalam rangka memperbaiki kekeliruan dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi pertanahan, namun tidak merubah status keperdataan tanah dimaksud. Tanah dimaksud dapat dimohonkan kembali Sertipikat Hak Atas Tanah setelah seluruh syarat dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Bali telah menempuh upaya hukum dengan menggugat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor 168/Pbt/BPN.51/VIII/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 ke PTUN Denpasar dengan hasil pengadilan sebagai berikut:

1. Pada tahap Gugatan Pemerintah Provinsi Bali kalah, sesuai Putusan PTUN Denpasar Nomor 27/G/2023/PTUN.DPS Tanggal 28 Maret 2024;
2. Pada tahap Banding Pemerintah Provinsi Bali kalah, sesuai Putusan Pengadilan Tinggi TUN Mataram Nomor 20/B/2024/PT.TUN.MTR Tanggal 9 Juli 2024;
3. Pada tahap Kasasi Pemerintah Provinsi Bali kalah, sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/TUN/2024 Tanggal 13 Januari 2025.

Sampai saat ini, tanah eks SHP Nomor 121 dan SHP Nomor 126 Desa Unggasan masih tercatat sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali, sehingga muncul tuntutan dari Ahli Waris I Made Sirta (alm) dkk kepada Bapak Gubernur Bali agar kedua bidang tanah tersebut dihapus dari catatan aset Pemerintah Provinsi Bali.

Mutasi Tanah selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.1.2 Mutasi Tanah

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025	**5.385.006.936.615,43**
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal	1.181.948.000,00
Kapitalisasi Belanja Non Modal	5.178.495.000,00
Penerimaan Hibah	2.716.023.863.906,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	228.720.000,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya	1.814.465.225,00
Koreksi Saldo Awal	238.149.119.920,00
Tukar Menukar	5.558.000.000,00
Mutasi Antar Perangkat Daerah	22.343.445.450,00
Jumlah Mutasi Tambah	2.990.478.057.501,00
Mutasi Kurang:	
Koreksi Saldo Awal	235.693.378.441,00
Mutasi Antar Perangkat Daerah	22.343.445.450,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	19.784.712.875,00
Jumlah Mutasi Kurang	**277.821.536.766,00**
Saldo Akhir 31 Desember 2025	**8.097.663.457.350,43**

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 27***.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.3.2.1 Rincian Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Besar	85.169.307.276,00	70.959.444.466,00	14.209.862.810,00	20,02
Alat Angkutan	256.386.930.593,00	226.963.391.360,00	29.423.539.233,00	12,96
Alat Bengkel dan Alat Ukur	54.784.490.689,96	48.203.113.713,96	6.581.376.976,00	13,65
Alat Pertanian	14.493.991.866,91	14.365.775.866,91	128.216.000,00	0,89
Alat Kantor dan Rumah Tangga	615.712.086.047,87	564.840.721.616,94	50.871.364.430,93	9,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	165.173.037.755,68	126.036.150.182,77	39.136.887.572,91	31,05
Alat Kedokteran dan Kesehatan	567.002.800.363,53	504.846.069.910,53	62.156.730.453,00	12,31
Alat Laboratorium	198.244.763.293,18	171.765.182.507,18	26.479.580.786,00	15,41
Alat Persenjataan	35.614.389.834,10	29.957.170.739,10	5.657.219.095,00	18,88

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Komputer	469.510.138.789,74	412.199.352.455,24	57.310.786.334,50	13,90
Alat Eksplorasi	29.136.000,00	29.136.000,00	0,00	0,00
Alat Pengeboran	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	618.620.320,00	445.680.100,00	172.940.220,00	38,80
Alat Bantu Eksplorasi	5.881.063.162,00	32.700.000,00	5.848.363.162,00	17884,90
Alat Keselamatan Kerja	11.434.400.005,00	10.480.814.485,00	953.585.520,00	9,09
Alat Peraga	790.674.764,00	772.313.100,00	18.361.664,00	2,37
Peralatan Proses/Produksi	8.640.251.740,00	3.986.207.750,00	4.654.043.990,00	116,75
Rambu-rambu	6.407.404.897,56	3.570.604.549,56	2.836.800.348,00	79,44
Peralatan Olahraga	6.960.881.296,50	6.774.398.296,50	186.483.000,00	2,75
Jumlah	**2.502.919.368.695,03**	**2.196.293.227.099,70**	**306.626.141.595,34**	**13,96**

Tabel di atas menunjukkan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp306.626.141.595,34 atau 13,96%, berikut penjelasan saldo Peralatan dan Mesin beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Alat Bantu Eksplorasi mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp5.848.363.162,00 atau 17.884,90%,hal tersebut dikarenakan terdapat Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Alat Bantu Produksi Lainnya senilai Rp5.848.363.162,00;
2. Komponen Peralatan Proses/Produksi mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp4.654.043.990,00 atau 116,75%, hal tersebut dikarenakan terdapat Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Blower dan Peralatan Proses Lainnya senilai Rp2.046.953.054,00 dan terdapat Belanja Modal juga berupa Peralatan Proses lainnya senilai Rp2.151.000.000,00;
3. Komponen Rambu-rambu mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp2.836.800.348,00 atau 79,44%, dikarenakan salah satunya terdapat penerimaan hibah pada Dinas Perhubungan dari Kementerian Perhubungan berupa Rambu tidak bersuar lainnya, Rambu Jalan, dan Guardrail senilai Rp1.921.750.000,00

Mutasi Peralatan dan Mesin selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.2.2 Mutasi Peralatan dan Mesin

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025	**2.196.293.227.099,69**
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal	259.183.049.267,81
Hutang	1.580.232.319,00
Kapitalisasi Belanja Non Modal	657.552.420,00
Penerimaan Hibah	24.711.451.683,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	51.760.700.823,13
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya	69.960.525,00
Koreksi Saldo Awal	6.906.129.660,98
Reklasidikasi dari Aset Ektra ke Intra	20.916.485,00
Mutasi Antar Perangkat Daerah	15.686.440.268,00
Jumlah Mutasi Tambah	**360.576.433.451,92**
Mutasi Kurang:	
Salah Pos Belanja Modal	62.674.945,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	2.372.188.173,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	24.818.178.249,95
Koreksi Saldo Awal	7.322.963.199,00
Dibawah Kapitalisasi	3.687.847.021,63
Mutasi Antar Perangkat Daerah	15.686.440.268,00
Jumlah Mutasi Kurang	**53.950.291.856,58**
Saldo Akhir 31 Desember 2025	**2.502.919.368.695,03**

Terdapat mutasi kurang sebesar Rp32.468.781,00 yang berasal dari koreksi nilai aset akibat kekurangan volume pekerjaan pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 30***.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.3.3.1 Rincian Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bangunan Gedung	3.767.266.473.163,86	3.451.952.262.488,78	315.314.210.675,08	9,13
Monumen	70.251.164.132,50	50.200.883.292,50	20.050.280.840,00	39,94
Bangunan Menara	327.367.097.220,98	327.291.142.220,98	75.955.000,00	0,02
Tugu Titik Kontrol/Pasti	35.032.544.509,88	20.829.803.819,88	14.202.740.690,00	68,18
Jumlah	**4.199.917.279.027,22**	**3.850.274.091.822,14**	**349.643.187.205,08**	**9,08**

Tabel di atas menunjukkan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp349.643.187.205,08 atau 9,08%, berikut penjelasan saldo Gedung dan Bangunan beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Tugu Titik Kontrol/Pasti mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp14.202.740.690,00 atau 68,18%, hal tersebut dikarenakan salah satunya terdapat Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Pagar Permanen senilai Rp11.090.969.679,00

Mutasi Gedung dan Bangunan selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.3.2 Mutasi Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Saldo Awal 1 Januari 2025	**3.850.274.091.822,14**
	Mutasi Tambah:	
	Belanja Modal	240.493.997.597,02
	Kapitalisasi Belanja Non Modal	287.511.064,00
	Penerimaan Hibah	102.964.593.161,00
	Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	308.028.076.375,06
	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya	107.521.964,90
	Koreksi Saldo Awal	69.073.628.461,95
	Reklasidikasi dari Aset Ektra ke Intra	10.000.000,00
	Mutasi Antar Perangkat Daerah	71.757.211.647,00
	Jumlah Mutasi Tambah	**792.722.540.270,93**
	Mutasi Kurang:	
	Salah Pos Belanja Modal	14.319.000,00
	Pembayaran Hutang	315.381.323,60
	Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	295.434.045.933,06
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	19.421.068.621,34
	Koreksi Saldo Awal	38.644.465.648,25
	Dibawah Kapitalisasi	137.860.892,60
	Pembayaran di Muka	17.355.000.000,00
	Mutasi Antar Perangkat Daerah	71.757.211.647,00
	Jumlah Mutasi Kurang	**443.079.353.065,85**
	Saldo Akhir 31 Desember 2025	**4.199.917.279.027,22**

Terdapat mutasi kurang dikarenakan terdapat kekurangan volume pekerjaan pada Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp792.542.743,35 pada SKPD Dinas Kesehatan, Sekretariat DPRD dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 31***.

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.3.4.1 Rincian Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Jalan dan Jembatan	3.296.509.040.775,81	2.613.411.578.530,16	683.097.462.245,65	26,13
Bangunan Air	444.617.500.145,21	355.653.499.408,69	88.964.000.736,52	25,01
Instalasi	1.022.687.134.960,27	589.054.059.025,27	433.633.075.935,00	73,61
Jaringan	883.773.751.849,74	777.243.938.158,29	106.529.813.691,45	13,70
Jumlah	**5.647.587.427.731,03**	**4.335.363.075.122,41**	**1.312.224.352.608,62**	**30,26**

Tabel di atas menunjukkan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.312.224.352.608,62 atau 30,26%, berikut penjelasan saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Instalasi mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp433.633.075.935,00 atau 73,61%, hal tersebut dikarenakan salah satunya terdapat penerimaan hibah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset dari Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Besar senilai Rp634.229.488.611,00

Mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.4.2 Mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025	**4.335.363.075.122,41**
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal	240.687.598.599,81
Hutang	1.143.700.000,00
Penerimaan Hibah	1.117.342.734.174,66
Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	131.649.049.103,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya	41.165.806.000,00
Koreksi Saldo Awal	115.055.000,00
Mutasi Antar Perangkat Daerah	634.625.999.436,00
Jumlah Mutasi Tambah	**2.166.729.942.313,47**
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	219.013.219.352,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	866.370.916,85
Mutasi Antar Perangkat Daerah	634.625.999.436,00
Jumlah Mutasi Kurang	**854.505.589.704,85**
Saldo Akhir 31 Desember 2025	**5.647.587.427.731,03**

Terdapat mutasi kurang dikarenakan terdapat kekurangan volume pekerjaan pada Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp600.798.191,85 pada SKPD Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rincian Mutasi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 32***.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.3.5.1 Rincian Aset Tetap Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bahan Perpustakaan	85.999.488.152,74	72.138.503.436,74	13.860.984.716,00	19,21
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	24.250.994.060,40	23.639.272.060,40	611.722.000,00	2,58
Hewan	435.505.000,00	467.805.000,00	(32.300.000,00)	-6,90
Tanaman	951.987.626,82	922.987.261,82	29.000.365,00	3,14
Aset Tetap Dalam Renovasi	1.272.748.743,08	1.272.748.743,08	0,00	0,00
Jumlah	**112.910.723.583,04**	**98.441.316.502,04**	**14.469.407.081,00**	**14,69**

Tabel di atas menunjukkan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp14.469.407.081,00 atau 14,69%.

Mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.5.2 Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025	**98.441.316.502,04**
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal	31.596.980.320,00
Hutang	1.964.700.000,00
Kapitalisasi Belanja Non Modal	1.999.998,00
Penerimaan Hibah	315.612.875,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	4.654.737.623,00
Koreksi Saldo Awal	265.110.500,00
Jumlah Mutasi Tambah	**38.799.141.316,00**

Uraian	Jumlah (Rp)
Mutasi Kurang:	
Salah Pos Belanja Modal	13.152.883.620,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	841.191.579,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	7.883.373.636,00
Koreksi Saldo Awal	153.067.000,00
Dibawah Kapitalisasi	2.299.218.400,00
Jumlah Mutasi Kurang	**24.329.734.235,00**
Saldo Akhir 31 Desember 2025	**112.910.723.583,04**

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 33***.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.3.6.1 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	29.446.535,00	29.446.535,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	49.405.269.196,85	29.969.608.079,00	19.435.661.117,85	64,85
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.345.755.122,00	12.506.568.285,00	4.839.186.837,00	38,69
Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya	668.271.000,00	668.271.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**67.448.741.853,85**	**43.173.893.899,00**	**24.274.847.954,85**	**56,22**

Tabel di atas menunjukkan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp24.274.847.954,85 atau 56,22%, berikut penjelasan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp19.435.661.117,85 atau 64,85%, hal tersebut dikarenakan salah satunya terdapat Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik berupa Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain senilai Rp24.809.047.000,00

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.6.2 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025	**43.173.893.899,00**
Mutasi Tambah:	
Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	47.912.138.203,27
Jumlah Mutasi Tambah	**47.912.138.203,27**
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	535.513.158,02
Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	23.101.777.090,40
Jumlah Mutasi Kurang	**23.637.290.248,42**
Saldo Akhir 31 Desember 2025	**67.448.741.853,85**

Terdapat mutasi kurang sebesar Rp535.513.158,02 yang berasal dari koreksi nilai aset akibat kekurangan volume pekerjaan pada Belanja Modal Bangunan Gedung pada SKPD Dinas Kesehatan.
Rincian Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 34***.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.3.7.1 Rincian Akumulasi Penyusutan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.936.820.049.064,68)	(1.800.859.499.926,12)	(135.960.549.138,56)	7,55
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(782.418.092.081,30)	(699.678.324.093,94)	(82.739.767.987,36)	11,82
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(3.877.048.453.375,11)	(2.963.822.678.011,06)	(913.225.775.364,05)	30,81
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(22.967.617.438,40)	(21.528.746.696,40)	(1.438.870.742,00)	6,68
Jumlah	**(6.619.254.211.959,49)**	**(5.485.889.248.727,52)**	**(1.133.364.963.231,97)**	**20,66**

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.133.364.963.231,97) atau (20,66%).

Mutasi Akumulasi Penyusutan selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.7.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025	**(5.485.889.248.727,52)**
Mutasi Tambah:	
Beban Penyusutan	443.156.837.539,90
Kapitalisasi Barang Extra ke Intra	10.000.000,00
Koreksi Saldo Awal	78.958.950.072,00
Mutasi Antar Perangkat Daerah	260.495.601.659,00
Penerimaan Hibah	698.000.315.257,66
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya	14.117.300.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	**1.494.739.004.528,56**
Mutasi Kurang:	
Koreksi Saldo Awal	72.132.627.680,64
Mutasi Antar Perangkat Daerah	260.495.601.659,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	28.745.811.956,95
Jumlah Mutasi Kurang	**361.374.041.296,59**
Saldo Akhir 31 Desember 2025	**(6.619.254.211.959,49)**

Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 35***.

5.3.1.4 ASET LAINNYA

Saldo Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.4.1 Rincian Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Tidak Berwujud	36.195.435.167,65	28.998.557.508,65	7.196.877.659,00	24,81
Aset Lain-lain	356.569.130.729,74	347.585.034.803,41	8.984.095.926,33	2,58
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(28.105.557.846,82)	(20.833.551.606,82)	(7.272.006.240,00)	34,90
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(107.855.903.850,22)	(105.330.548.116,98)	(2.525.355.733,24)	2,39
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	4.167.149.009,65	3.513.765.361,49	653.383.648,16	18,59
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	7.804.246.000,00	(7.804.246.000,00)	(100,00)
Jumlah	**260.970.253.210,00**	**261.737.503.949,75**	**(767.250.739,75)**	**(0,29)**

Tabel di atas menunjukkan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp767.250.739,75) atau (0,29%).

5.3.1.4.1 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.4.1.1 Rincian Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Tidak Berwujud	36.195.435.167,65	28.998.557.508,65	7.196.877.659,00	24,81
Jumlah	**36.195.435.167,65**	**28.998.557.508,65**	**7.196.877.659,00**	**24,81**

Tabel di atas menunjukkan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp7.196.877.659,00 atau 24,81%.

Mutasi Aset Tidak Berwujud selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.4.1.2 Mutasi Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		**28.998.557.508,65**
Mutasi Tambah:		
Penerimaan Hibah		82.119.030,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya		6.817.981.654,00
Belanja Modal		543.458.964,90
Jumlah Mutasi Tambah		**7.443.559.648,90**
Mutasi Kurang:		
Koreksi Saldo Awal		49.300.000,00
Penghapusan Aset (BPKAD)		69.899.500,00
Reklasifikasi Ke Aset Tetap		127.482.489,90
Jumlah Mutasi Kurang		**246.681.989,90**
Saldo Akhir 31 Desember 2025		**36.195.435.167,65**

Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 36***.

5.3.1.4.2 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.4.2.1 Rincian Aset Lain-lain

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Lain-lain	356.569.130.729,74	347.585.034.803,41	8.984.095.926,33	2,58
Jumlah	**356.569.130.729,74**	**347.585.034.803,41**	**8.984.095.926,33**	**2,58**

Tabel di atas menunjukkan Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp8.984.095.926,33 atau 2,58%.

Mutasi Aset Lain-lain selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.4.2.2 Mutasi Aset Lain-lain

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		**347.585.034.803,41**
Mutasi Tambah:		
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya		72.141.181.332,16
Koreksi Saldo Awal		1.788.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		**72.142.969.332,16**
Mutasi Kurang:		
Koreksi Saldo Awal		1.362.821.645,76
Penghapusan Aset		32.883.080.535,07
Reklasifikasi ke Aset Tetap		28.912.971.225,00
Jumlah Mutasi Kurang		**63.158.873.405,83**
Saldo Akhir 31 Desember 2025		**356.569.130.729,74**

Berdasarkan tabel di atas, Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp356.569.130.729,74 merupakan saldo awal sebesar Rp347.585.034.803,41 ditambah mutasi tambah sebesar Rp72.142.969.332,16 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp63.158.873.405,83, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp8.984.095.926,33 dibandingkan saldo awal tahun 2024.
Terdapat mutasi tambah sebesar Rp1.961.322.874,22 yang berasal dari koreksi penambahan nilai aset akibat kekurangan volume pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp32.468.781,00;
2. Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp1.328.055.901,37 pada:
   a. SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp702.722.045,98;
   b. SKPD Sekretariat DPRD sebesar Rp89.820.697,37;
   c. SKPD Dinas Kesehatan sebesar Rp535.513.158,02;

3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp600.798.191,85 pada:
   a. SKPD Dinas Kesehatan sebesar Rp165.074.698,48;
   b. SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp435.723.493,37.

Rincian Mutasi Aset Lain-lain pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 38 dan 39.***

5.3.1.4.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.4.3.1 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(28.105.557.846,82)	(20.833.551.606,82)	(7.272.006.240,00)	34,90
Jumlah	**(28.105.557.846,82)**	**(20.833.551.606,82)**	**(7.272.006.240,00)**	**34,90**

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar (Rp7.272.006.240,00) atau (34,90%).

Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.4.3.2 Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		**(20.833.551.606,82)**
Mutasi Tambah:		
Beban Amortisasi		2.914.493.503,00
Penerimaan Hibah		32.250.000,00
Koreksi Saldo Awal		4.416.972.062,00
Jumlah Mutasi Tambah		**7.363.715.565,00**
Mutasi Kurang:		
Koreksi Saldo Awal		21.809.825,00
Penghapusan Aset		69.899.500,00
Jumlah Mutasi Kurang		**91.709.325,00**
Saldo Akhir 31 Desember 2025		**(28.105.557.846,82)**

Rincian Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 43***.

5.3.1.4.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.4.4.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(107.855.903.850,22)	(105.330.548.116,98)	(2.525.355.733,24)	2,39
Jumlah	**(107.855.903.850,22)**	**(105.330.548.116,98)**	**(2.525.355.733,24)**	**2,39**

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar (Rp2.525.355.733,24) atau -2,39%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.4.4.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		**(105.330.548.116,98)**
Mutasi Tambah:		
Reklasifikasi Dari Aset Tetap		34.166.032.346,95
Koreksi Saldo Awal		83.265.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		**34.249.297.346,95**
Mutasi Kurang:		
Penghapusan Aset		31.513.641.120,68
Koreksi Saldo Awal		210.300.493,03
Jumlah Mutasi Kurang		**31.723.941.613,71**
Saldo Akhir 31 Desember 2025		**(107.855.903.850,22)**

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 44 dan 45***.

5.3.1.4.5 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.4.5.1 Rincian Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Uang Jaminan dan/atau Titipan Uang Muka	4.167.149.009,65	3.513.765.361,49	653.383.648,16	18,59
Jumlah	**4.167.149.009,65**	**3.513.765.361,49**	**653.383.648,16**	**18,59**

Tabel di atas menunjukkan Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp653.383.648,16 atau 18,59%.
Rincian Kas yang Dibatasi Penggunaannya dapat dilihat pada ***Lampiran 46.***

5.3.1.4.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Saldo Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.4.6.1 Rincian Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	7.804.246.000,00	(7.804.246.000,00)	(100,00)
Jumlah	**0,00**	**7.804.246.000,00**	**(7.804.246.000,00)**	**(100,00)**

Tabel di atas menunjukkan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp7.804.246.000,00) atau (100,00%).

5.3.1.5 PROPERTI INVESTASI

Saldo Properti Investasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.5.1 Rincian Properti Investasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Properti Investasi Tanah	698.906.498.820,00	700.024.106.820,00	(1.117.608.000,00)	-0,15
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.839.731.638,00	5.839.731.638,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(3.424.276.155,97)	(3.327.710.422,97)	(96.565.733,00)	2,90
Jumlah	**701.321.954.302,03**	**702.536.128.035,03**	**(1.214.173.733,00)**	**-0,17**

Tabel di atas menunjukkan Properti Investasi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.214.173.733,00) atau (0,17%).
Rincian Mutasi Properti Investasi dapat dilihat pada ***Lampiran 47***.

5.3.1.5.1 Properti Investasi Tanah

Saldo Properti Investasi Tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.5.1.1 Rincian Properti Investasi Tanah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Properti Investasi Tanah	698.906.498.820,00	700.024.106.820,00	(1.117.608.000,00)	-0,15
Jumlah	**698.906.498.820,00**	**700.024.106.820,00**	**(1.117.608.000,00)**	**-0,15**

Tabel di atas menunjukkan Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.117.608.000,00) atau -0,15%.

Mutasi Properti Investasi Tanah selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.5.1.2 Mutasi Properti Investasi Tanah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		**700.024.106.820,00**
Mutasi Tambah:		
Jumlah Mutasi Tambah		**0,00**
Mutasi Kurang:		
Koreksi Saldo Awal		610.596.000,00
Penghapusan Aset (BPKAD)		507.012.000,00
Jumlah Mutasi Kurang		**1.117.608.000,00**
Saldo Akhir 31 Desember 2025		**698.906.498.820,00**

5.3.1.5.2 Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Saldo Properti Investasi Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.5.2.1 Rincian Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.839.731.638,00	5.839.731.638,00	0,00	0,00
Jumlah	**5.839.731.638,00**	**5.839.731.638,00**	**0,00**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.3.1.5.3 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.5.3.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan	(3.424.276.155,97)	(3.327.710.422,97)	(96.565.733,00)	2,90
Jumlah	**(3.424.276.155,97)**	**(3.327.710.422,97)**	**(96.565.733,00)**	**2,90**

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp96.565.733,00) atau -2,90%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Properti Investasi selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.5.3.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		**(3.327.710.422,97)**
Mutasi Tambah:		
Penyusutan Properti Investasi		96.565.733,00
Jumlah Mutasi Tambah		**96.565.733,00**
Saldo Akhir 31 Desember 2025		**(3.424.276.155,97)**

Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi dapat dilihat pada ***Lampiran 47.***

5.3.2 KEWAJIBAN

Saldo Kewajiban yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.2.1 Rincian Kewajiban

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kewajiban Jangka Pendek	924.101.597.721,97	707.808.146.491,09	216.293.451.230,88	30,56
Kewajiban Jangka Panjang	612.828.715.702,65	855.640.130.142,49	(242.811.414.439,84)	(28,38)
Jumlah	**1.536.930.313.424,62**	**1.563.448.276.633,58**	**(26.517.963.208,96)**	**(1,69)**

Tabel di atas menunjukkan Kewajiban per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp26.517.963.208,96) atau (1,70%).

Rincian Kewajiban dapat dilihat pada ***Lampiran 48***.

5.3.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Saldo Kewajiban Jangka Pendek yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.2.1.1 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	3.056.472.412,70	(3.056.472.412,70)	(100,00)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	243.464.798.088,00	243.464.798.088,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	514.165.349.793,52	21.702.352.175,15	492.462.997.618,37	2.269,17
Utang Belanja	166.471.449.840,45	439.584.523.815,24	(273.113.073.974,79)	(62,13)
Jumlah	**924.101.597.721,97**	**707.808.146.491,09**	**216.293.451.230,88**	**30,55**

Tabel di atas menunjukkan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp216.293.451.230,88 atau 30,56%.

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.2.1.1.1 Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Taspen	0,00	3.056.472.412,70	(3.056.472.412,70)	(100,00)
Jumlah	**0,00**	**3.056.472.412,70**	**(3.056.472.412,70)**	**(100,00)**

Tabel di atas menunjukkan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp3.056.472.412,70) atau (100,00%).

5.3.2.1.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.2.1.2.1 Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	243.464.798.088,00	243.464.798.088,00	0,00	0,00
Jumlah	**243.464.798.088,00**	**243.464.798.088,00**	**0,00**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 yang mengalami perubahan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.3.2.1.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.2.1.3.1 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	5.553.592.516,04	4.290.844.736,53	1.262.747.779,51	29,43
Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa	508.611.757.277,48	17.411.507.438,62	491.200.249.838,86	2.821,12
Jumlah	**514.165.349.793,52**	**21.702.352.175,15**	**492.462.997.618,37**	**2.269,17**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp492.462.997.618,37 atau 2.269,17%.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada ***Lampiran 49***.

5.3.2.1.3.1 Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III

Saldo Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.2.1.3.1.1 Rincian Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	5.553.592.516,04	4.290.844.736,53	1.262.747.779,51	29,43
Jumlah	**5.553.592.516,04**	**4.290.844.736,53**	**1.262.747.779,51**	**29,43**

Tabel di atas menunjukkan Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.262.747.779,51 atau 29,43%. yang merupakan Pendapatan Diterima Dimuka atas Tenaga Kerja Asing (TKA) pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral, Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Izin Pemanfaatan kawasan Tahura Ngurah Rai pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Data dapat dlihat pada ***Lampiran 49.***

5.3.2.1.3.2 Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.2.1.3.2.1 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah	507.955.540.031,41	16.527.376.353,06	491.428.163.678,35	2.973,42
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan	656.217.246,07	884.131.085,56	(227.913.839,49)	(25,78)
Jumlah	**508.611.757.277,48**	**17.411.507.438,62**	**491.200.249.838,86**	**2.822,43**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp491.200.249.838,86 atau 2.822,43%, berikut penjelasan saldo Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp491.428.163.678,35 atau 2.973,42%. Hal ini disebabkan oleh:
   a) Penambahan perjanjian sewa baru pada tahun berjalan;
   b) Pengakuan pendapatan diterima dimuka atas transaksi sewa jangka Panjang;
   c) Adanya transaksi signifikan dari PT BDL berupa pembayaran sewa tanah periode 50 tahun sebesar Rp425.137.500.000,00 yang dibayarkan pada 11 Desember 2025, Dimana pengakuan pendapatan dilakukan secara akrual sesuai masa manfaat;
   d) Serta transaksi PT BSS atas sewa tanah jangka Panjang 30 tahun sebesar Rp58.380.000.000,00 yang diakui sebagai pendapatan diterima dimuka sesuai periode manfaat ekonomi.

   Kenaikan tersebut mencerminkan penerapan prinsip pengakuan pendapatan berbasis waktu manfaat (*time proportionate basis*).
2. Komponen Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar (Rp227.913.839,49) atau (25,78%). Hal ini disebabkan karena adanya pengakuan pendapatan tahun berjalan atas saldo pendapatan diterima dimuka tahun sebelumnya, reklasifikasi pendapatan menjadi Pendapatan-LO sesuai periode manfaat sewa, dan tidak terdapat penambahan kontrak signifikan pada tahun berjalan.
3. Kebijakan Akuntansi yang Digunakan

   Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka atas Belanja Sewa dilakukan berdasarkan basis akrual sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010, yaitu mengakui pendapatan pada saat ha katas pendapatan tersebut timbul sesuai periode manfaat ekonominya. Untuk kontrak sewa yang tidak dimulai atau berakhir pada awal/akhir bulan, digunakan metode cut-off by date (proporsional harian) dengan rumus:

   Pendapatan Diakui = (Nilai Kontrak ÷ Total Harian Sewa) x Hari yang telah berjalan

   Selisih antara kas yang diterima dengan pendapatan yang telah menjadi hak diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka (liabilitas).

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Belanja Sewa tahun 2025 meningkat signifikan terutama karena transaksi sewa jangka Panjang yang diakui secara akrual dan proporsional sesuai masa manfaat. Penerapan metode *cut-off by date* memastikan bahwa pengakuan pendapatan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual serta mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

5.3.2.1.4 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.2.1.4.1 Rincian Utang Belanja

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Belanja Pegawai	91.580.345.868,73	101.054.700.228,54	(9.474.354.359,81)	(9,38)
Utang Belanja Barang dan Jasa	30.231.881.561,72	27.529.724.017,50	2.702.157.544,22	9,82
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.580.232.319,00	0,00	1.580.232.319,00	100,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	315.384.317,20	(315.384.317,20)	(100,00)
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.143.700.000,00	0,00	1.143.700.000,00	100,00
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	1.964.700.000,00	0,00	1.964.700.000,00	100,00
Utang Belanja Bagi Hasil	39.970.590.091,00	310.684.715.252,00	(270.714.125.161,00)	(87,13)
Jumlah	**166.471.449.840,45**	**439.584.523.815,24**	**(273.113.073.974,79)**	**(62,13)**

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp273.113.073.974,79) atau (62,13%).

5.3.2.1.4.1 Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.2.1.4.1.1 Rincian Utang Belanja Pegawai

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.823.001.673,00	1.915.469.959,13	2.907.531.713,87	151,79
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	53.231.586.118,00	47.334.145.890,00	5.897.440.228,00	12,46
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	33.148.439.478,73	51.805.084.379,41	(18.656.644.900,68)	(36,01)
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	377.318.599,00	0,00	377.318.599,00	100,00
Jumlah	**91.580.345.868,73**	**101.054.700.228,54**	**(9.474.354.359,81)**	**(9,38)**

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp9.474.354.359,81) atau (9,38%), berikut penjelasan saldo Utang Belanja Pegawai beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp2.907.531.713,87 atau 151,79%. Hal ini disebabkan karena adanya Utang BelanjaTambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali;
2. Komponen Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN mengalami kenaikan sebesar Rp5.897.440.228,00 atau 12,46%;
3. Komponen Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN mengalami penurunan sebesar (Rp18.656.644.900,68) atau (36,01%);
4. Komponen Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH mengalami saldo baru sebesar Rp377.318.599,00 atau 100,00% yang merupakan Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Rincian Kewajiban dapat dilihat pada ***Lampiran 48.***

5.3.2.1.4.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.2.1.4.2.1 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Belanja Barang	16.810.030.860,72	18.443.094.706,00	(1.633.063.845,28)	(8,85)
Utang Belanja Jasa	6.772.757.563,00	4.975.114.152,00	1.797.643.411,00	36,13
Utang Belanja Pemeliharaan	4.024.956.049,00	1.917.316.865,50	2.107.639.183,50	109,92
Utang Belanja Perjalanan Dinas	1.499.000,00	6.598.891,00	(5.099.891,00)	(77,28)
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.622.638.089,00	2.175.899.403,00	446.738.686,00	20,53
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	11.700.000,00	(11.700.000,00)	(100,00)
Jumlah	**30.231.881.561,72**	**27.529.724.017,50**	**2.702.157.544,22**	**9,82**

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp2.702.157.544,22 atau 9,82%, berikut penjelasan saldo Utang Belanja Barang dan Jasa beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Utang Belanja Pemeliharaan mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp2.107.639.183,50 atau 109,93% karena adanya penambahan utang baru pada RSUD Bali Mandara
2. Komponen Utang Belanja Perjalanan Dinas mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp5.099.891,00) atau (77,28%) karena sudah dibayarkan pada Bulan Januari 2025 pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
3. Komponen Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp11.700.000,00) atau (100,00%) karena sudah dilakukan pembayaran pada Bulan Mei 2025.

Rincian Kewajiban dapat dilihat pada ***Lampiran 48.***

5.3.2.1.4.3 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.2.1.4.3.1 Rincian Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.580.232.319,00	0,00	1.580.232.319,00	100,00
Jumlah	**1.580.232.319,00**	**0,00**	**1.580.232.319,00**	**100,00**

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.580.232.319,00 atau 100,00% merupakan penambahan utang pada Rumah Sakit Bali Mandara.

5.3.2.1.4.4 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.2.1.4.4.1 Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	315.384.317,20	(315.384.317,20)	-100,00
Jumlah	**0,00**	**315.384.317,20**	**(315.384.317,20)**	**-100,00**

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp315.384.317,20) atau -100,00%, hal ini disebabkan karena sudah dilakukan pembayaran atas Utang Belanja Modal tersebut selama periode Januari-Desember 2025.

5.3.2.1.4.5 Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.2.1.4.5.1 Rincian Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.143.700.000,00	0,00	1.143.700.000,00	100,00
Jumlah	**1.143.700.000,00**	**0,00**	**1.143.700.000,00**	**100,00**

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.143.700.000,00 atau 100,00%. Saldo ini merupakan Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD pada Rumah Sakit Bali Mandara.

5.3.2.1.4.6 Utang Belanja Aset Tetap Lainnya

Saldo Utang Belanja Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.2.1.4.6.1 Rincian Utang Belanja Aset Tetap Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.964.700.000,00	0,00	1.964.700.000,00	100,00
Jumlah	**1.964.700.000,00**	**0,00**	**1.964.700.000,00**	**100,00**

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.964.700.000,00 atau 100,00% pada UPTD Rumah Sakit Bali Mandara.

5.3.2.1.4.7 Utang Belanja Bagi Hasil

Saldo Utang Belanja Bagi Hasil yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.2.1.4.7.1 Rincian Utang Belanja Bagi Hasil

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	33.454.244.356,00	260.386.539.729,00	(226.932.295.373,00)	(87,15)
Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	6.516.345.735,00	50.298.175.523,00	(43.781.829.788,00)	(87,04)
Jumlah	**39.970.590.091,00**	**310.684.715.252,00**	**(270.714.125.161,00)**	**(87,13)**

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Bagi Hasil per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar Rp270.714.125.161,00 atau 87,13%, sesuai dengan Surat Gubernur Bali Nomor B.31.900/1147/PADFE/BPKAD Tanggal 18 Pebruari 2026 Hal Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kota/Kabupaten se-Bali Tahun Anggaran 2025.

Rincian Kewajiban dapat dilihat pada ***Lampiran 48***.

5.3.2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Saldo Kewajiban Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.2.2.1 Rincian Kewajiban Jangka Panjang

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang kepada Pemerintah Pusat	608.661.566.693,00	852.126.364.781,00	(243.464.798.088,00)	(28,57)
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	4.167.149.009,65	3.513.765.361,49	653.383.648,16	18,59
Jumlah	**612.828.715.702,65**	**855.640.130.142,49**	**(242.811.414.439,84)**	**(28,38)**

Tabel di atas menunjukkan Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp242.811.414.439,84) atau (28,38%).

5.3.2.2.1 Utang kepada Pemerintah Pusat

Saldo Utang kepada Pemerintah Pusat yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.2.2.1.1 Rincian Utang kepada Pemerintah Pusat

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri	608.661.566.693,00	852.126.364.781,00	(243.464.798.088,00)	(28,57)
Jumlah	**608.661.566.693,00**	**852.126.364.781,00**	**(243.464.798.088,00)**	**(28,57)**

Tabel di atas menunjukkan Utang kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp243.464.798.088,00) atau (28,57%).

5.3.2.2.2 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Saldo Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.2.2.2.1 Rincian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta	4.167.149.009,65	3.513.765.361,49	653.383.648,16	18,59
Jumlah	**4.167.149.009,65**	**3.513.765.361,49**	**653.383.648,16**	**18,59**

Tabel di atas menunjukkan Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp653.383.648,16 atau 18,59% disebabkan karena adanya penambahan perusahaan atau penambang baru yang sudah memegang izin usaha. Data lebih detail terkait Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta dapat dilihat pada ***Lampiran 46.***

5.3.3 EKUITAS

Saldo Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.3.3.1 Rincian Ekuitas

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Ekuitas	21.661.652.244.062,81	17.602.612.654.466,05	4.059.039.589.596,76	23,05
Jumlah	**21.661.652.244.062,81**	**17.602.612.654.466,05**	**4.059.039.589.596,76**	**23,05**

Tabel di atas menunjukkan Ekuitas per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp4.059.039.589.596,76 atau 23,05%. Saldo Ekuitas yang disajikan di Neraca telah sama dengan saldo ekuitas akhir sebagaimana telah diungkapkan dalam penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas poin **5.6.4**.

5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 PENDAPATAN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.1 Rincian Pendapatan

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	4.097.995.770.279,09	5.671.351.179.818,08	(1.573.355.409.538,99)	-27,74
Pendapatan Transfer-LO	2.586.463.824.695,00	2.263.980.364.237,00	322.483.460.458,00	14,24
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	3.400.566.385.877,13	1.442.181.614.516,44	1.958.384.771.360,69	135,79
Jumlah	**10.085.025.980.851,22**	**9.377.513.158.571,52**	**707.512.822.279,70**	**7,54**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp707.512.822.279,70 atau 7,54%.

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan perbandingan realisasi Pendapatan Daerah antara Tahun 2025 dengan Tahun 2024 digambarkan dalam bentuk diagram dan grafik berikut:

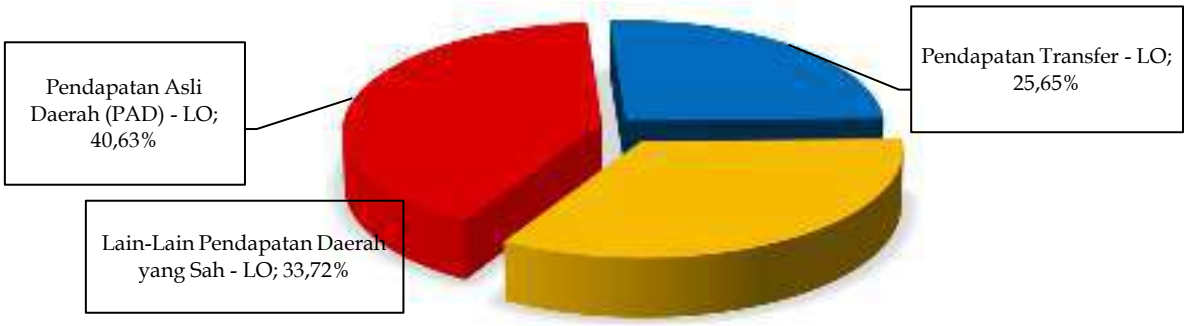

Gambar 5.12 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025

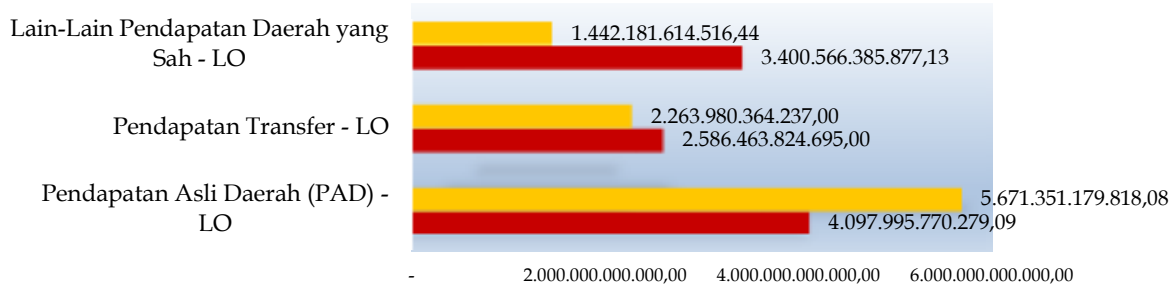

Gambar 5.13 Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah antara Tahun 2025 dengan Tahun 2024

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.1.1 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pajak Daerah-LO	2.816.701.997.992,96	4.518.050.546.030,04	(1.701.348.548.037,08)	-37,66
Retribusi Daerah-LO	385.092.787.203,91	340.629.347.580,42	44.463.439.623,49	13,05
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	319.658.402.673,98	335.046.479.341,41	(15.388.076.667,43)	-4,59
Lain-lain PAD yang Sah-LO	576.542.582.408,24	477.624.806.866,21	98.917.775.542,03	20,71
Jumlah	**4.097.995.770.279,09**	**5.671.351.179.818,08**	**(1.573.355.409.538,99)**	**-27,74**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.573.355.409.538,99) atau -27,74%.

5.4.1.1.1 Pajak Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pajak Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.1.1.1 Rincian Pajak Daerah-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	1.069.465.642.900,00	1.844.964.341.717,00	(775.498.698.817,00)	-42,03
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO	798.076.710.700,00	1.694.519.308.500,00	(896.442.597.800,00)	-52,90
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	581.923.299.163,96	637.045.182.695,04	(55.121.883.531,08)	-8,65
Pajak Air Permukaan-LO	4.861.676.866,00	4.525.145.473,00	336.531.393,00	7,43
Pajak Rokok–LO	343.585.515.178,00	336.996.567.645,00	6.588.947.533,00	1,95
Pajak Alat Berat-LO	147.095.900,00	0,00	147.095.900,00	100,00
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO	18.642.057.285,00	0,00	18.642.057.285,00	100,00
Jumlah	**2.816.701.997.992,96**	**4.518.050.546.030,04**	**(1.701.348.548.037,08)**	**-37,66**

Tabel di atas menunjukkan Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.701.348.548.037,08) atau -37,66%.

Penjelasan:

Pengakuan Pajak Daerah-LO Tahun 2025 lebih kecil dari Pajak Daerah pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp49.134.403.531,04 (Rp2.816.701.997.992,96-Rp2.865.836.401.524,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pajak Daerah-LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.1.1.2 Penjelasan Selisih atas Pajak Daerah-LO

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**(49.134.403.531,04)**
Penjelasan Selisih		
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO		
✓ Saldo Piutang Pajak Daerah Tahun 2025 (Neraca)	686.987.500,00	
✓ Penghapusan Piutang Pajak pada Bapenda sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1026/04-E/HK/2025 Tanggal 29 Desember 2025	17.419.500,00	
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO		
✓ Saldo Piutang Pajak Daerah Tahun 2024 (Neraca)	(49.838.810.531,04)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(49.134.403.531,04)**

5.4.1.1.1.1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.1.1.1.1 Rincian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO	14.665.225.100,00	27.214.938.300,00	(12.549.713.200,00)	-46,11
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO	79.599.249.800,00	135.243.958.900,00	(55.644.709.100,00)	-41,14
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	531.666.094.500,00	901.273.780.700,00	(369.607.686.200,00)	-41,01
PKB-Mobil Bus-Microbus-LO	11.573.630.500,00	20.014.575.800,00	(8.440.945.300,00)	-42,17
PKB-Mobil Bus-Bus-LO	1.202.467.700,00	2.318.928.800,00	(1.116.461.100,00)	-48,15
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	70.663.084.900,00	123.338.497.600,00	(52.675.412.700,00)	-42,71
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	36.591.241.200,00	66.665.556.000,00	(30.074.314.800,00)	-45,11
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	19.941.276.100,00	34.825.750.000,00	(14.884.473.900,00)	-42,74
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO	2.089.655.400,00	3.274.264.800,00	(1.184.609.400,00)	-36,18
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua–LO	301.455.634.200,00	530.759.509.017,00	(229.303.874.817,00)	-43,20
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga–LO	18.083.500,00	34.581.800,00	(16.498.300,00)	-47,71
Jumlah	**1.069.465.642.900,00**	**1.844.964.341.717,00**	**(775.498.698.817,00)**	**-42,03**

Tabel di atas menunjukkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp775.498.698.817,00) atau -42,03%.

5.4.1.1.1.2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.1.1.2.1 Rincian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan -LO	3.745.351.600,00	6.947.410.000,00	(3.202.058.400,00)	-46,09
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO	33.980.088.000,00	70.725.181.500,00	(36.745.093.500,00)	-51,95
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	264.228.211.400,00	685.876.893.300,00	(421.648.681.900,00)	-61,48
BBNKB-Mobil Bus-Microbus-LO	14.003.791.600,00	36.146.981.000,00	(22.143.189.400,00)	-61,26
BBNKB-Mobil Bus-Bus–LO	1.311.674.600,00	1.657.870.000,00	(346.195.400,00)	-20,88
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	51.861.632.000,00	86.484.578.100,00	(34.622.946.100,00)	-40,03
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	11.523.692.300,00	25.223.364.000,00	(13.699.671.700,00)	-54,31
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	16.160.541.200,00	28.440.048.000,00	(12.279.506.800,00)	-43,18
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO	1.938.885.100,00	3.453.580.000,00	(1.514.694.900,00)	-43,86
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	399.315.902.500,00	749.498.266.600,00	(350.182.364.100,00)	-46,72
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO	6.940.400,00	65.136.000,00	(58.195.600,00)	-89,34
Jumlah	**798.076.710.700,00**	**1.694.519.308.500,00**	**(896.442.597.800,00)**	**-52,90**

Tabel di atas menunjukkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp896.442.597.800,00) atau -52,90%.

5.4.1.1.1.3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.1.1.3.1 Rincian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
PBBKB Bahan Bakar Solar–LO	114.150.903.048,96	138.753.895.643,04	(24.602.992.594,08)	-17,73
PBBKB Bahan Bakar Lainnya-LO	467.772.396.115,00	498.291.287.052,00	(30.518.890.937,00)	-6,12
Jumlah	**581.923.299.163,96**	**637.045.182.695,04**	**(55.121.883.531,08)**	**-8,65**

Tabel di atas menunjukkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp55.121.883.531,08) atau -8,65%.

5.4.1.1.1.4 Pajak Air Permukaan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pajak Air Permukaan-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pajak Air Permukaan-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.1.1.4.1 Rincian Pajak Air Permukaan-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pajak Air Permukaan-LO	4.861.676.866,00	4.525.145.473,00	336.531.393,00	7,44
Jumlah	**4.861.676.866,00**	**4.525.145.473,00**	**336.531.393,00**	**7,44**

Tabel di atas menunjukkan Pajak Air Permukaan-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp336.531.393,00 atau 7,44%.

5.4.1.1.1.5 Pajak Rokok–LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pajak Rokok–LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pajak Rokok–LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.1.1.5.1 Rincian Pajak Rokok–LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pajak Rokok-LO	343.585.515.178,00	336.996.567.645,00	6.588.947.533,00	1,96
Jumlah	**343.585.515.178,00**	**336.996.567.645,00**	**6.588.947.533,00**	**1,96**

Tabel di atas menunjukkan Pajak Rokok–LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp6.588.947.533,00 atau 1,96%.

5.4.1.1.1.6 Pajak Alat Berat-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pajak Alat Berat-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pajak Alat Berat-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.1.1.6.1 Rincian Pajak Alat Berat-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pajak Alat Berat-LO	147.095.900,00	0,00	147.095.900,00	100,00
Jumlah	**147.095.900,00**	**0,00**	**147.095.900,00**	**100,00**

Tabel di atas menunjukkan Pajak Alat Berat-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp147.095.900,00.

5.4.1.1.1.7 Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.1.1.7.1 Rincian Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO	18.642.057.285,00	0,00	18.642.057.285,00	100,00
Jumlah	**18.642.057.285,00**	**0,00**	**18.642.057.285,00**	**100,00**

Tabel di atas menunjukkan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp18.642.057.285,00.

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Retribusi Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.1.2.1 Rincian Retribusi Daerah-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Retribusi Jasa Umum-LO	342.950.454.198,35	300.284.087.176,19	42.666.367.022,16	14,21
Retribusi Jasa Usaha-LO	34.658.137.755,07	34.259.897.914,86	398.239.840,21	1,16
Retribusi Perizinan Tertentu-LO	7.484.195.250,49	6.085.362.489,37	1.398.832.761,12	22,99
Jumlah	**385.092.787.203,91**	**340.629.347.580,42**	**44.463.439.623,49**	**13,05**

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp44.463.439.623,49 atau 13,05%.

Penjelasan :

Pengakuan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 lebih kecil dari Retribusi Daerah pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp524.503.129.915,61 (Rp385.092.787.203,91-Rp909.595.917.119,52). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Retribusi Daerah-LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.1.2.2 Penjelasan Selisih atas Retribusi Daerah-LO

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**(524.503.129.915,61)**
Penjelasan Selisih		
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO		
✓ Saldo Piutang Retribusi Daerah Tahun 2025 (Neraca)	52.160.083.376,74	
✓ Saldo Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun 2025 (Neraca)	21.702.352.175,15	
✓ Koreksi atas adanya pembayaran piutang pasien umum pada RSUD Bali Mandara	12.377.003,00	
✓ Koreksi atas adanya pembayaran piutang pasien lost pada RSUD Bali Mandara	51.000.000,00	
✓ Penghapusan Piutang Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	7.525.000,00	
✓ Reklas rekening pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha ke Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada RSU Dharma Yadnya (Reklas dilakukan agar rekening pendapatan piutang di UPTD dan RS menjadi satu rekening)	20.825.174.918,86	
✓ Koreksi Saldo Awal Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PT NII sesuai sesuai Kesepakatan Bersama yang mengatur penyelesaian seluruh tunggakan kewajiban NII kepada Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan LUDA Pemprov Bali.	786.802.780.952,68	
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO		
✓ Saldo Piutang Retribusi Daerah Tahun 2025 (Neraca)	(881.023.472.856,43)	
✓ Saldo Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun 2025 (Neraca)	(514.165.349.793,52)	

Uraian	Nilai	
✓ Koreksi atas adanya kesalahan penginputan atas piutang PT Global Assistance Healthcare pada RSUD Bali Mandara	(50.859.152,00)	
✓ Koreksi Saldo Awal Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun 2025 atas Aset sewa yang baru diterbitkan SK perpanjangan namun pemanfaatan asetnya masih berlangsung sebelum 2025	(1.277.360.883,37)	
✓ Pendapatan Hibah berupa piutang bagian RSU Dharma Yadnya per 1 Juli 2025	(5.045.954.140,00)	
✓ Koreksi saldo awal terkait kesalahan perhitungan dengan nominal sewa ditahun kedua atas PT Premiera Nusantara pada RSUD Bali Mandara	(2.228.337,87)	
✓ Pelunasan Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Kontribusi Tetap PKS Nomor 10	(3.020.774.733,83)	
✓ Reklasifikasi Penerimaan Pembayaran Settlement atas Kesepakatan Bersama Nomor B.31.000.2.3.2/2553/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 November 2025, yang didahului oleh Perjanjian Penyelesaian Sengketa (Perdamaian) tanggal 13 Mei 2024 antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Heru Budihartono terkait pemanfaatan HGB Nomor 80 atas nama PT Abdi Persada Nusantara di atas HPL No. 2	(1.478.423.445,00)	
✓ Reklasifikasi 0,2 sebagai surplus non operasional lainnya (pembulatan dari penerimaan transaksi pelunasan Piutang PKS Nomor 10)	(0,02)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(524.503.129.915,61)**

5.4.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Retribusi Jasa Umum-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Retribusi Jasa Umum-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.1.2.1.1 Rincian Retribusi Jasa Umum-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	324.520.964.198,35	284.264.232.176,19	40.256.732.022,16	14,16
Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO	18.429.490.000,00	16.019.855.000,00	2.409.635.000,00	15,04
Jumlah	**342.950.454.198,35**	**300.284.087.176,19**	**42.666.367.022,16**	**14,21**

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Umum-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp42.666.367.022,16 atau 14,21%.

5.4.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Retribusi Jasa Usaha-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.1.2.2.1 Rincian Retribusi Jasa Usaha-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	66.100.000,00	64.250.000,00	1.850.000,00	2,88
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	94.007.578,00	0,00	94.007.578,00	100,00
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO	65.651.500,00	28.049.000,00	37.602.500,00	134,06

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	4.873.970.011,00	6.432.789.000,00	(1.558.818.989,00)	-24,23
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	1.315.022.000,00	1.226.096.928,00	88.925.072,00	7,25
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	28.243.386.666,07	26.508.712.986,86	1.734.673.679,21	6,54
Jumlah	**34.658.137.755,07**	**34.259.897.914,86**	**398.239.840,21**	**1,16**

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Usaha-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp398.239.840,21 atau 1,16%.

5.4.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Retribusi Perizinan Tertentu-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.1.2.3.1 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	4.256.849,12	55.752.472,45	(51.495.623,33)	-92,36
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	7.479.938.401,37	6.029.610.016,92	1.450.328.384,45	24,05
Jumlah	**7.484.195.250,49**	**6.085.362.489,37**	**1.398.832.761,12**	**22,99**

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Perizinan Tertentu-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.398.832.761,12 atau 22,99%.

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.1.3.1 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	319.523.090.586,82	334.522.261.798,67	(14.999.171.211,85)	-4,48
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO	135.312.087,16	524.217.542,74	(388.905.455,58)	-74,19
Jumlah	**319.658.402.673,98**	**335.046.479.341,41**	**(15.388.076.667,43)**	**-4,59**

Tabel di atas menunjukkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp15.388.076.667,43) atau -4,59%.

Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO adalah sebagai berikut :

5.4.1.1.3.1 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.1.3.1.1 Rincian Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	312.261.066.104,82	265.661.424.824,67	46.599.641.280,15	17,54
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO	7.262.024.482,00	68.860.836.974,00	(61.598.812.492,00)	-89,45
Jumlah	**319.523.090.586,82**	**334.522.261.798,67**	**(14.999.171.211,85)**	**-4,48**

Tabel di atas menunjukkan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp14.999.171.211,85) atau -4,48%.

Penjelasan:

Pengakuan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO Tahun 2025 lebih besar dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp66.140.333.892,39 (Rp319.523.090.586,82-Rp253.382.756.694,43). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.1.3.1.2 Penjelasan Selisih atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**66.140.333.892,39**
Penjelasan Selisih		
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO		
✓ Bagian Laba Perumda Kerta Bali Saguna Tahun 2024	7.262.024.482,00	
✓ Bagian Laba PT BPD Bali Tahun 2024	304.866.240.611,85	
✓ Bagian Laba PT Jamkrida Bali Mandara Tahun 2023	7.394.825.492,97	
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO		
✓ Pembagian Deviden Perumda Kerta Bali Saguna Tahun 2024	(27.000.000.000,00)	
✓ Pembagian Deviden PT BPD Bali Tahun 2024	(224.454.593.473,43)	
✓ Pembagian Deviden PT Jamkrida Bali Mandara Tahun 2024	(1.928.163.221,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**66.140.333.892,39**

5.4.1.1.3.2 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.1.3.2.1 Rincian Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO	135.312.087,16	524.217.542,74	(388.905.455,58)	-74,19
Jumlah	**135.312.087,16**	**524.217.542,74**	**(388.905.455,58)**	**-74,19**

Tabel di atas menunjukkan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp388.905.455,58) atau -74,19%.

Penjelasan:

Pengakuan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO Tahun 2025 lebih kecil dari Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp85.770.334,84 (Rp135.312.087,16-Rp221.082.422,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.1.3.2.2 Penjelasan Selisih atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**(85.770.334,84)**
Penjelasan Selisih		
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO		
✓ Bagian Laba PT Puri Raharja Tahun 2024	135.312.087,16	
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO		
✓ Pembagian Deviden PT Puri Raharja Tahun 2024	(221.082.422,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(85.770.334,84)**

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-lain PAD yang Sah-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.1.4.1 Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	6.812.347.316,00	3.417.445.100,00	3.394.902.216,00	99,34
Jasa Giro-LO	8.480.380.151,00	10.304.453.335,81	(1.824.073.184,81)	-17,70
Pendapatan Bunga-LO	15.267.241.419,64	9.555.179.227,40	5.712.062.192,24	59,78
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	388.650.982,18	2.021.009.936,46	(1.632.358.954,28)	-80,76
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	18.022.513.727,00	71.236.784.994,00	(53.214.271.267,00)	-74,70
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	20.467.706,04	23.266.408,00	(2.798.701,96)	-12,03
Pendapatan dari Pengembalian-LO	96.358.086.765,75	697.704.902,79	95.660.381.862,96	13.710,72
Pendapatan dari BLUD-LO	62.171.144.340,63	62.488.962.961,75	(317.818.621,12)	-0,51
Pendapatan Konsesi Jasa-LO	369.021.750.000,00	317.880.000.000,00	51.141.750.000,00	16,09
Jumlah	**576.542.582.408,24**	**477.624.806.866,21**	**98.917.775.542,03**	**20,71**

Tabel di atas menunjukkan Lain-lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp98.917.775.542,03 atau 20,71%.

Penjelasan:

Pengakuan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 lebih kecil dari Lain-lain PAD yang Sah pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp22.504.639.214,44 (Rp576.542.582.408,24-Rp599.047.221.622,68). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Lain-lain PAD yang Sah-LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.1.4.2 Penjelasan Selisih atas Lain-lain PAD yang Sah-LO

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**(22.504.639.214,44)**
Penjelasan Selisih		
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO		
✓ Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 (Neraca)	3.156.897.225,00	
✓ Pelunasan Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Kontribusi Tetap PKS Nomor 10	3.020.774.733,83	
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO		
✓ Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 (Neraca)	(3.287.603.356,37)	
✓ Reklas rekening pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha ke Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada RSU Dharma Yadnya (Reklas dilakukan agar rekening pendapatan piutang di UPTD dan RS menjadi satu rekening)	(20.825.174.918,86)	
✓ Penyesuaian Hasil Penjualan BMD dari Penghapusan Aset (BPKAD) sebagai perhitungan Surplus Non Operasional	(700.068.400,00)	
✓ Penyesuaian atas pengembalian kelebihan belanja tahun lalu di RSJ yang dicatat Beban dibayar dimuka tahun 2024	(400,00)	
✓ Penyesuaian atas pengembalian kelebihan belanja tahun lalu di RSJ yang dicatat Beban dibayar dimuka tahun 2025	(2.529.442.452,46)	
✓ Penyesuaian TGR atas nama Wiyantara Tahun 2025	(18.000.000,00)	
✓ Pengembalian atas Kekurangan Volume di Tahun 2024 dan dibayarkan di Tahun 2025 sehingga dilakukan eleminasi antara pendapatan pengembalian dengan nilai Aset	(1.322.021.645,58)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(22.504.639.214,44)**

5.4.1.1.4.1 Hasil Kerja Sama Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Hasil Kerja Sama Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Hasil Kerja Sama Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.1.4.1.1 Rincian Hasil Kerja Sama Daerah-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	6.812.347.316,00	3.417.445.100,00	3.394.902.216,00	99,34
Jumlah	**6.812.347.316,00**	**3.417.445.100,00**	**3.394.902.216,00**	**99,34**

Tabel di atas menunjukkan Hasil Kerja Sama Daerah-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp3.394.902.216,00 atau 99,34%.

5.4.1.1.4.2 Jasa Giro-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Jasa Giro-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Jasa Giro-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.1.4.2.1 Rincian Jasa Giro-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	7.140.669.743,77	7.610.111.049,43	(469.441.305,66)	-6,16
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	1.329.865.164,23	1.652.346.726,59	(322.481.562,36)	-19,51
Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO	0,00	1.033.753.904,24	(1.033.753.904,24)	-100,00
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	9.845.243,00	8.241.655,55	1.603.587,45	19,45
Jumlah	**8.480.380.151,00**	**10.304.453.335,81**	**(1.824.073.184,81)**	**-17,70**

Tabel di atas menunjukkan Jasa Giro-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.824.073.184,81) atau -17,70%.

5.4.1.1.4.3 Pendapatan Bunga-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Bunga-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Bunga-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.1.4.3.1 Rincian Pendapatan Bunga-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	15.267.241.419,64	9.555.179.227,40	5.712.062.192,24	59,78
Jumlah	**15.267.241.419,64**	**9.555.179.227,40**	**5.712.062.192,24**	**59,78**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Bunga-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp5.712.062.192,24 atau 59,78%.

5.4.1.1.4.4 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.1.4.4.1 Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	388.650.982,18	2.021.009.936,46	(1.632.358.954,28)	-80,77
Jumlah	**388.650.982,18**	**2.021.009.936,46**	**(1.632.358.954,28)**	**-80,77**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.632.358.954,28) atau -80,77%.

5.4.1.1.4.5 Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.1.4.5.1 Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	17.788.126.600,00	70.448.079.400,00	(52.659.952.800,00)	-74,75
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	104.169.200,00	788.373.200,00	(684.204.000,00)	-86,79
Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	85.577.461,00	0,00	85.577.461,00	100,00
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO	434.536,00	332.394,00	102.142,00	30,73

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO	44.205.930,00	0,00	44.205.930,00	100,00
Jumlah	**18.022.513.727,00**	**71.236.784.994,00**	**(53.214.271.267,00)**	**-74,70**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp53.214.271.267,00) atau -74,70%.

5.4.1.1.4.6 Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.1.4.6.1 Rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO	20.128.156,04	22.265.708,00	(2.137.551,96)	-9,60
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-LO	339.550,00	1.000.700,00	(661.150,00)	-66,06
Jumlah	**20.467.706,04**	**23.266.408,00**	**(2.798.701,96)**	**-12,03**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp2.798.701,96) atau -12,03%.

5.4.1.1.4.7 Pendapatan dari Pengembalian-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan dari Pengembalian-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan dari Pengembalian-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.1.4.7.1 Rincian Pendapatan dari Pengembalian-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	1.633.548.454,00	613.334,00	1.632.935.120,00	266239,13
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	325.387.871,04	42.848.164,00	282.539.707,04	659,39
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO	33.478.481,00	2.976.200,00	30.502.281,00	1024,87
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	42.692.500,00	6.075.000,00	36.617.500,00	602,75
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan-LO	335.093.169,28	324.752.080,16	10.341.089,12	3,18
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO	34.473.585,00	18.262.522,00	16.211.063,00	88,76
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta-LO	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	-100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	93.915.519.097,93	23.773.198,96	93.891.745.898,97	394947,88
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-LO	(164.783.968,50)	217.921.489,15	(382.705.457,65)	-175,61
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-LO	41.630.910,00	0,00	41.630.910,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-LO	0,00	17.982.914,52	(17.982.914,52)	-100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-LO	55.857.000,00	0,00	55.857.000,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-LO	101.385.000,00	37.500.000,00	63.885.000,00	170,36
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-LO	4.666,00	0,00	4.666,00	100,00
Jumlah	**96.358.086.765,75**	**697.704.902,79**	**95.660.381.862,96**	**13.710,72**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan dari Pengembalian-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp95.660.381.862,96 atau 13.710,72%.

5.4.1.1.4.8 Pendapatan dari BLUD-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan dari BLUD-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan dari BLUD-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.1.4.8.1 Rincian Pendapatan dari BLUD-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	58.450.762.983,00	58.856.130.914,45	(405.367.931,45)	-0,68
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	1.052.660.072,00	1.211.019.091,41	(158.359.019,41)	-13,07
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	2.667.721.285,63	2.421.812.955,89	245.908.329,74	10,15
Jumlah	**62.171.144.340,63**	**62.488.962.961,75**	**(317.818.621,12)**	**-0,51**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan dari BLUD-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp317.818.621,12) atau -0,51%.

5.4.1.1.4.9 Pendapatan Konsesi Jasa-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Konsesi Jasa-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Konsesi Jasa-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.1.4.9.1 Rincian Pendapatan Konsesi Jasa-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Konsesi Jasa-LO	369.021.750.000,00	317.880.000.000,00	51.141.750.000,00	16,09
Jumlah	**369.021.750.000,00**	**317.880.000.000,00**	**51.141.750.000,00**	**16,09**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Konsesi Jasa-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp51.141.750.000,00 atau 16,09%.

5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.2.1 Rincian Pendapatan Transfer-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	2.551.638.134.326,00	2.263.980.364.237,00	287.657.770.089,00	12,71
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	34.825.690.369,00	0,00	34.825.690.369,00	100,00
Jumlah	**2.586.463.824.695,00**	**2.263.980.364.237,00**	**322.483.460.458,00**	**14,24**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Transfer-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp322.483.460.458,00 atau 14,24%.

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.2.1.1 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dana Perimbangan-LO	0,00	2.240.823.010.237,00	(2.240.823.010.237,00)	-100,00
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	423.405.887.500,00	0,00	423.405.887.500,00	100,00
Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.403.485.166.622,00	0,00	1.403.485.166.622,00	100,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	711.768.494.204,00	0,00	711.768.494.204,00	100,00
Insentif Fiskal-LO	12.978.586.000,00	23.157.354.000,00	(10.178.768.000,00)	-43,95
Jumlah	**2.551.638.134.326,00**	**2.263.980.364.237,00**	**287.657.770.089,00**	**12,71**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp287.657.770.089,00 atau 12,71%.

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025 lebih besar dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp172.321.134.000,00 (Rp2.551.638.134.326,00-Rp2.379.317.000.326,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.2.1.2 Penjelasan Selisih atas Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**172.321.134.000,00**
Penjelasan Selisih		
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO		
✓ Saldo Piutang DBH Pusat Tahun 2025 (Neraca)	180.125.380.000,00	
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO		
✓ Saldo Piutang DBH Pusat Tahun 2024 (Neraca)	(7.804.246.000,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**172.321.134.000,00**

5.4.1.2.1.1 Dana Perimbangan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Dana Perimbangan-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Dana Perimbangan-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.2.1.1.1 Rincian Dana Perimbangan-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	0,00	171.107.795.110,00	(171.107.795.110,00)	-100,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	0,00	1.367.677.271.075,00	(1.367.677.271.075,00)	-100,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	0,00	87.240.500.926,00	(87.240.500.926,00)	-100,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	0,00	614.797.443.126,00	(614.797.443.126,00)	-100,00
Jumlah	**0,00**	**2.240.823.010.237,00**	**(2.240.823.010.237,00)**	**-100,00**

Tabel di atas menunjukkan Dana Perimbangan-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp2.240.823.010.237,00) atau -100,00%.

5.4.1.2.1.1.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.2.1.1.1.1 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DBH PBB-LO	0,00	1.092.236.000,00	(1.092.236.000,00)	-100,00
DBH PPh Pasal 21-LO	0,00	156.310.354.000,00	(156.310.354.000,00)	-100,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	0,00	12.862.040.000,00	(12.862.040.000,00)	-100,00
DBH CHT-LO	0,00	831.422.110,00	(831.422.110,00)	-100,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	0,00	2.659.000,00	(2.659.000,00)	-100,00
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	0,00	6.767.000,00	(6.767.000,00)	-100,00
DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO	0,00	2.317.000,00	(2.317.000,00)	-100,00
Jumlah	**0,00**	**171.107.795.110,00**	**(171.107.795.110,00)**	**-100,00**

Tabel di atas menunjukkan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp171.107.795.110,00) atau -100,00%.

5.4.1.2.1.1.2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.2.1.1.2.1 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DAU-LO	0,00	1.278.810.466.000,00	(1.278.810.466.000,00)	-100,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	0,00	68.549.360.075,00	(68.549.360.075,00)	-100,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	0,00	7.853.643.000,00	(7.853.643.000,00)	-100,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	0,00	12.463.802.000,00	(12.463.802.000,00)	-100,00
Jumlah	**0,00**	**1.367.677.271.075,00**	**(1.367.677.271.075,00)**	**-100,00**

Tabel di atas menunjukkan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.367.677.271.075,00) atau -100,00%.

5.4.1.2.1.1.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.2.1.1.3.1 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO	0,00	16.877.975.100,00	(16.877.975.100,00)	-100,00
DAK Fisik–Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK-LO	0,00	30.394.505.247,00	(30.394.505.247,00)	-100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	0,00	5.000.023.469,00	(5.000.023.469,00)	-100,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	0,00	3.095.838.636,00	(3.095.838.636,00)	-100,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	0,00	15.293.067.738,00	(15.293.067.738,00)	-100,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	0,00	11.007.204.150,00	(11.007.204.150,00)	-100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	0,00	4.123.353.000,00	(4.123.353.000,00)	-100,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)-LO	0,00	1.448.533.586,00	(1.448.533.586,00)	-100,00
Jumlah	**0,00**	**87.240.500.926,00**	**(87.240.500.926,00)**	**-100,00**

Tabel di atas menunjukkan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp87.240.500.926,00) atau -100,00%.

5.4.1.2.1.1.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.2.1.1.4.1 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	0,00	344.752.312.593,00	(344.752.312.593,00)	-100,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	0,00	5.638.750.000,00	(5.638.750.000,00)	-100,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	0,00	242.031.199.000,00	(242.031.199.000,00)	-100,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	0,00	3.996.750.000,00	(3.996.750.000,00)	-100,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO	0,00	3.727.225.999,00	(3.727.225.999,00)	-100,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya-LO	0,00	1.959.778.106,00	(1.959.778.106,00)	-100,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	0,00	1.177.945.000,00	(1.177.945.000,00)	-100,00
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	302.021.450,00	(302.021.450,00)	-100,00
DAK Non Fisik-PK2UMK-LO	0,00	8.458.820.306,00	(8.458.820.306,00)	-100,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi-LO	0,00	2.752.640.672,00	(2.752.640.672,00)	-100,00
Jumlah	**0,00**	**614.797.443.126,00**	**(614.797.443.126,00)**	**-100,00**

Tabel di atas menunjukkan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp614.797.443.126,00) atau -100,00%.

5.4.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Dana Bagi Hasil (DBH)-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Dana Bagi Hasil (DBH)-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.2.1.2.1 Rincian Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DBH Pajak-LO	423.362.898.500,00	0,00	423.362.898.500,00	100,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO	42.989.000,00	0,00	42.989.000,00	100,00
Jumlah	**423.405.887.500,00**	**0,00**	**423.405.887.500,00**	**100,00**

Tabel di atas menunjukkan Dana Bagi Hasil (DBH)-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp423.405.887.500,00.

5.4.1.2.1.2.1 DBH Pajak-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos DBH Pajak-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo DBH Pajak-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.2.1.2.1.1 Rincian DBH Pajak-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DBH PBB-LO	1.999.811.800,00	0,00	1.999.811.800,00	100,00
DBH PPh Pasal 21-LO	382.729.746.600,00	0,00	382.729.746.600,00	100,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	37.478.718.100,00	0,00	37.478.718.100,00	100,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)-LO	1.154.622.000,00	0,00	1.154.622.000,00	100,00
Jumlah	**423.362.898.500,00**	**0,00**	**423.362.898.500,00**	**100,00**

Tabel di atas menunjukkan DBH Pajak-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp423.362.898.500,00.

5.4.1.2.1.2.2 DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.2.1.2.2.1 Rincian DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	4.439.000,00	0,00	4.439.000,00	100,00
DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO	30.241.000,00	0,00	30.241.000,00	100,00
DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)-LO	7.547.000,00	0,00	7.547.000,00	100,00
DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)-LO	762.000,00	0,00	762.000,00	100,00
Jumlah	**42.989.000,00**	**0,00**	**42.989.000,00**	**100,00**

Tabel di atas menunjukkan DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp42.989.000,00.

5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Dana Alokasi Umum (DAU)-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Dana Alokasi Umum (DAU)-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.2.1.3.1 Rincian Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO	1.226.100.162.762,00	0,00	1.226.100.162.762,00	100,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO	177.385.003.860,00	0,00	177.385.003.860,00	100,00
Jumlah	**1.403.485.166.622,00**	**0,00**	**1.403.485.166.622,00**	**100,00**

Tabel di atas menunjukkan Dana Alokasi Umum (DAU)-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.403.485.166.622,00 atau sebesar 100%.

5.4.1.2.1.3.1 DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.2.1.3.1.1 Rincian DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DAU-LO	1.226.100.162.762,00	0,00	1.226.100.162.762,00	100,00
Jumlah	**1.226.100.162.762,00**	**0,00**	**1.226.100.162.762,00**	**100,00**

Tabel di atas menunjukkan DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.226.100.162.762,00.

5.4.1.2.1.3.2 DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.2.1.3.2.1 Rincian DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	93.786.962.860,00	0,00	93.786.962.860,00	100,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	83.598.041.000,00	0,00	83.598.041.000,00	100,00
Jumlah	**177.385.003.860,00**	**0,00**	**177.385.003.860,00**	**100,00**

Tabel di atas menunjukkan DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp177.385.003.860,00.

5.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.2.1.4.1 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DAK Fisik-LO	84.007.989.018,00	0,00	84.007.989.018,00	100,00
DAK Non Fisik-LO	627.760.505.186,00	0,00	627.760.505.186,00	100,00
Jumlah	**711.768.494.204,00**	**0,00**	**711.768.494.204,00**	**100,00**

Tabel di atas menunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp711.768.494.204,00 atau sebesar 100%.

5.4.1.2.1.4.1 DAK Fisik-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos DAK Fisik-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo DAK Fisik-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.2.1.4.1.1 Rincian DAK Fisik-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO	394.381.253,00	0,00	394.381.253,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK-LO	47.564.269.965,00	0,00	47.564.269.965,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	15.638.212.500,00	0,00	15.638.212.500,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	16.387.013.262,00	0,00	16.387.013.262,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	4.024.112.038,00	0,00	4.024.112.038,00	100,00
Jumlah	**84.007.989.018,00**	**0,00**	**84.007.989.018,00**	**100,00**

Tabel di atas menunjukkan DAK Fisik-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp84.007.989.018,00 atau sebesar 100%.

5.4.1.2.1.4.2 DAK Non Fisik-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos DAK Non Fisik-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo DAK Non Fisik-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.2.1.4.2.1 Rincian DAK Non Fisik-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	346.838.606.116,00	0,00	346.838.606.116,00	100,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	5.719.000.000,00	0,00	5.719.000.000,00	100,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	263.281.297.426,00	0,00	263.281.297.426,00	100,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.088.490.000,00	0,00	1.088.490.000,00	100,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO	4.101.958.564,00	0,00	4.101.958.564,00	100,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya-LO	2.208.487.060,00	0,00	2.208.487.060,00	100,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	4.002.268.020,00	0,00	4.002.268.020,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	263.443.000,00	0,00	263.443.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana-LO	199.955.000,00	0,00	199.955.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian-LO	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	100,00
Jumlah	**627.760.505.186,00**	**0,00**	**627.760.505.186,00**	**100,00**

Tabel di atas menunjukkan DAK Non Fisik-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp627.760.505.186,00 atau sebesar 100%.

5.4.1.2.1.5 Insentif Fiskal-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Insentif Fiskal-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Insentif Fiskal-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.2.1.5.1 Rincian Insentif Fiskal-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Insentif Fiskal-LO	0,00	23.157.354.000,00	(23.157.354.000,00)	-100,00
Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya-LO	12.978.586.000,00	0,00	12.978.586.000,00	100,00
Jumlah	**12.978.586.000,00**	**23.157.354.000,00**	**(10.178.768.000,00)**	**-43,95**

Tabel di atas menunjukkan Insentif Fiskal-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp10.178.768.000,00) atau -43,95%.

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.2.2.1 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bantuan Keuangan	34.825.690.369,00	0,00	34.825.690.369,00	100,00
Jumlah	**34.825.690.369,00**	**0,00**	**34.825.690.369,00**	**100,00**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp34.825.690.369,00.

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2025 sama dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp34.825.690.369,00.

5.4.1.2.2.1 Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.2.2.1.1 Rincian Bantuan Keuangan

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	34.825.690.369,00	0,00	34.825.690.369,00	100,00
Jumlah	**34.825.690.369,00**	**0,00**	**34.825.690.369,00**	**100,00**

Tabel di atas menunjukkan Bantuan Keuangan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp34.825.690.369,00.

5.4.1.2.2.1.1 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.2.2.1.1.1 Rincian Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	34.825.690.369,00	0,00	34.825.690.369,00	100,00
Jumlah	**34.825.690.369,00**	**0,00**	**34.825.690.369,00**	**100,00**

Tabel di atas menunjukkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp34.825.690.369,00.

5.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos LAIN-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.3.1 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Hibah-LO	3.400.091.365.877,13	1.441.939.855.516,44	1.958.151.510.360,69	135,80
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	475.020.000,00	241.759.000,00	233.261.000,00	96,48
Jumlah	**3.400.566.385.877,13**	**1.442.181.614.516,44**	**1.958.384.771.360,69**	**135,79**

Tabel di atas menunjukkan Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.958.384.771.360,69 atau 135,79%.

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.3.1.1 Rincian Pendapatan Hibah-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	3.327.849.902.623,70	1.424.132.917.761,70	1.903.716.984.862,00	133,68
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	15.157.552.988,08	464.924.598,74	14.692.628.389,34	3.160,21
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	90.582.995,00	182.406.500,00	(91.823.505,00)	-50,34
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	56.989.287.270,35	17.153.006.656,00	39.836.280.614,35	232,24
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	4.040.000,00	6.600.000,00	(2.560.000,00)	-38,78
Jumlah	**3.400.091.365.877,13**	**1.441.939.855.516,44**	**1.958.151.510.360,69**	**135,80**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Hibah-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.958.151.510.360,69 atau 135,80%.

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 lebih besar dari Pendapatan Hibah pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp3.394.001.566.683,12 (Rp3.400.091.365.877,13-Rp6.089.799.194,01). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hibah-LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.3.1.2 Penjelasan Selisih atas Pendapatan Hibah-LO

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**3.394.001.566.683,12**
Penjelasan Selisih		
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO		
✓ Penerimaan Hibah berupa Barang dari Pemerintah Pusat	3.327.849.902.623,70	
✓ Penerimaan Hibah berupa Barang dari Pemerintah Daerah lainnya	15.157.552.988,08	
✓ Penerimaan Hibah berupa Barang dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	90.582.995,00	
✓ Penerimaan Hibah berupa Barang dari Badan/Lembaga, Organisasi Dalam Negeri/ Luar Negeri yang sudah dikurangi nilai Kas atas hibah RSDY	50.903.528.076,34	
Jumlah Penjelasan Selisih		**3.394.001.566.683,12**

5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.1.3.2.1 Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat-LO	475.020.000,00	241.759.000,00	233.261.000,00	96,48
Jumlah	**475.020.000,00**	**241.759.000,00**	**233.261.000,00**	**96,48**

Tabel di atas menunjukkan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp233.261.000,00 atau 96,48%.

Penjelasan:

Pengakuan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2025 lebih besar dari - pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp475.020.000,00 (Rp475.020.000,00-Rp000,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.3.2.2 Penjelasan Selisih atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**475.020.000,00**
Penjelasan Selisih		
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO		
✓ Pengakuan Pendapatan dari Produksi semen sapi selama Tahun 2025	475.020.000,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**475.020.000,00**

5.4.2 BEBAN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.2.1 Rincian Beban

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Operasi	5.083.409.266.836,26	5.493.833.077.696,32	(410.423.810.860,06)	-7,47
Beban Transfer	975.625.285.142,03	1.906.374.937.152,00	(930.749.652.009,97)	-48,82
Jumlah	**6.059.034.551.978,29**	**7.400.208.014.848,32**	**(1.341.173.462.870,03)**	**-18,12**

Tabel di atas menunjukkan Beban per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.341.173.462.870,03) atau -18,12%.

5.4.2.1 BEBAN OPERASI

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Operasi yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.2.1.1 Rincian Beban Operasi

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pegawai	2.295.243.928.886,13	2.069.550.805.320,36	225.693.123.565,77	10,90
Beban Barang dan Jasa	1.410.895.187.012,16	1.288.255.443.830,08	122.639.743.182,08	9,51
Beban Subsidi	10.009.000.000,00	2.525.000.000,00	7.484.000.000,00	296,39
Beban Hibah	902.463.875.280,97	1.056.940.040.569,00	(154.476.165.288,03)	-14,61
Beban Bantuan Sosial	14.165.100.000,00	7.529.500.000,00	6.635.600.000,00	88,12
Beban Penyisihan Piutang	4.464.278.881,10	421.883.113.798,14	(417.418.834.917,04)	-98,94
Beban Penyusutan dan Amortisasi	446.167.896.775,90	647.149.174.178,74	(200.981.277.402,84)	-31,05
Jumlah	**5.083.409.266.836,26**	**5.493.833.077.696,32**	**(410.423.810.860,06)**	**-7,47**

Tabel di atas menunjukkan Beban Operasi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp410.423.810.860,06) atau -7,47%.

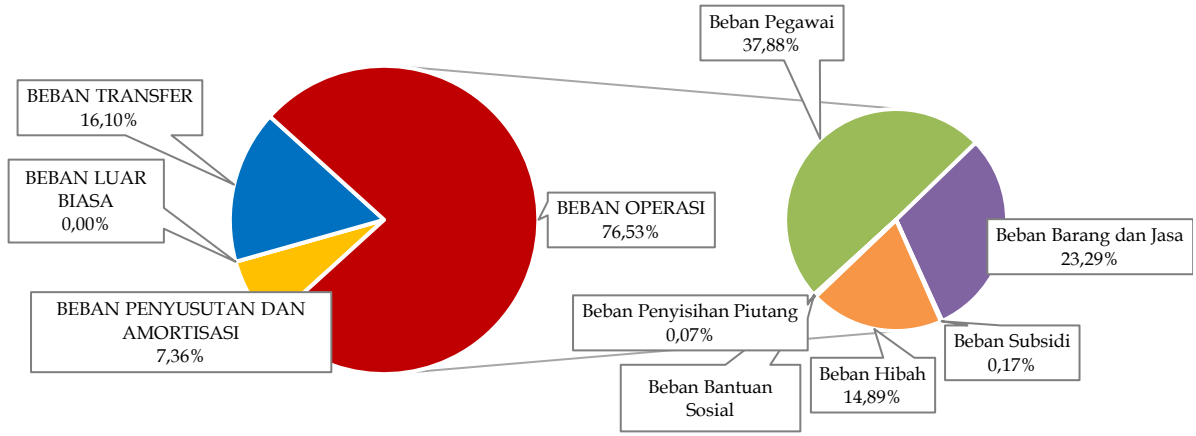

Gambar 5.14 Komposisi Realisasi Beban pada Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.2.1.1.1 Rincian Beban Pegawai

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.097.463.561.432,18	916.027.802.823,82	181.435.758.608,36	19,81
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.012.765.142.474,00	648.584.154.018,00	364.180.988.456,00	56,15
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	118.498.450.958,95	440.856.402.754,54	(322.357.951.795,59)	-73,12
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	58.685.482.937,00	58.811.705.124,00	(126.222.187,00)	-0,21
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.156.291.084,00	180.740.600,00	975.550.484,00	539,75
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	6.675.000.000,00	5.090.000.000,00	1.585.000.000,00	31,14
Jumlah	**2.295.243.928.886,13**	**2.069.550.805.320,36**	**225.693.123.565,77**	**10,91**

Tabel di atas menunjukkan Beban Pegawai per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp225.693.123.565,77 atau 10,91%. Rincian Beban Pegawai berdasarkan Klasifikasi Ekonomi dan Organisasi dapat dilihat pada **Lampiran 53.**

Penjelasan:

Pengakuan Beban Pegawai Tahun 2025 lebih kecil dari Belanja Pegawai pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp9.169.413.421,87 (Rp2.295.243.928.886,13-Rp2.304.413.342.308,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Pegawai, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.1.1.2 Penjelasan Selisih atas Beban Pegawai

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**(9.169.413.421,87)**
Penjelasan Selisih		
➢ Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO		
✓ Saldo Utang Belanja Pegawai Tahun 2025 (Neraca)	91.580.345.868,73	
✓ Koreksi Saldo Awal - Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan pada RSUD Bali Mandara	315.980.715,63	
✓ Koreksi Saldo Awal - Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS pada BPKAD Rp30.844,00 RSUD Bali Mandara sebesar Rp2.091.520,31 dan Badan Penghubung sebesar Rp137.858,00	2.260.222,31	
➢ Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO		
✓ Reklas Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (dari Beban Pegawai ke Beban Barang dan Jasa) pada RSJ	(13.300.000,00)	
✓ Saldo Utang Belanja Pegawai Tahun 2024 (Neraca)	(101.054.700.228,54)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(9.169.413.421,87)**

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.2.1.2.1 Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Barang	525.067.916.906,25	428.161.048.852,52	96.906.868.053,73	22,63
Beban Jasa	608.352.393.421,42	637.424.912.989,37	(29.072.519.567,95)	-4,56
Beban Pemeliharaan	96.284.977.335,35	88.387.409.764,39	7.897.567.570,96	8,94
Beban Perjalanan Dinas	75.916.978.915,60	104.537.795.319,00	(28.620.816.403,40)	-27,38
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	105.272.920.433,54	29.744.276.904,80	75.528.643.528,74	253,93
Jumlah	**1.410.895.187.012,16**	**1.288.255.443.830,08**	**122.639.743.182,08**	**9,52**

Tabel di atas menunjukkan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp122.639.743.182,08 atau 9,52%. Rincian Beban Barang dan Jasa Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi dan Organisasi dapat dilihat pada **Lampiran 54.**

Penjelasan:

Pengakuan Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 lebih besar dari Belanja Barang dan Jasa pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp138.389.359.343,37 (Rp1.410.895.187.012,16-Rp1.272.505.827.668,79). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Barang dan Jasa, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.1.2.2 Penjelasan Selisih atas Beban Barang dan Jasa

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**138.389.359.343,37**
Penjelasan Selisih		
➢ Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO		
✓ Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 (Neraca)	30.231.881.561,72	
✓ Saldo Persediaan Tahun 2024 (Neraca)	163.524.845.854,74	
✓ Saldo Beban dibayar dimuka Tahun 2024 (Neraca)	490.726.285,24	
✓ Penerimaan Hibah Barang Persediaan	128.233.977.684,12	
✓ Salah Pos Belanja Modal	13.229.877.565,00	
✓ Aset Dibawah Kapitalisasi	6.085.611.314,63	
✓ Reklas Beban Pegawai ke Beban Barang dan Jasa	13.300.000,00	
✓ Reklasifikasi Beban Hibah ke Beban Barang untuk dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	31.209.264.441,00	
✓ Kekurangan pengakuan pendapatan dari hasil produksi semen sapi selama tahun 2025 dan pengakuan beban persediaan pada UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Distanpangan	475.020.000,00	
➢ Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO		
✓ Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 (Neraca)	(27.529.724.017,50)	
✓ Saldo Persediaan Tahun 2025 (Neraca)	(157.410.085.366,35)	
✓ Saldo Beban dibayar dimuka Tahun 2025 (Neraca)	(485.566.225,08)	
✓ Koreksi Saldo Awal Persediaan	(40.330.336.348,15)	
✓ Kapitalisasi Belanja Non Modal	(6.125.558.482,00)	
✓ Pemberian Hibah Persediaan ke Kabupaten Jembrana	(161.750.000,00)	
✓ Hibah Ekuitas - Utang RSDY	(2.686.174.713,00)	
✓ Beban Dibayar Dimuka pada RSJ	(400,00)	
✓ Koreksi Saldo Awal Utang Belanja Pemeliharaan	(47.366.000,00)	

Uraian	Nilai
✓ Kelebihan pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain untuk pembayaran Sarbagia Bulan Desember 2025 sehingga dicatat menjadi uang muka	(328.583.811,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	**138.389.359.343,37**

5.4.2.1.3 Beban Subsidi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Subsidi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Subsidi yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.2.1.3.1 Rincian Beban Subsidi

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	10.000.000.000,00	2.500.000.000,00	7.500.000.000,00	300,00
Beban Subsidi kepada Koperasi	9.000.000,00	25.000.000,00	(16.000.000,00)	-64,00
Jumlah	**10.009.000.000,00**	**2.525.000.000,00**	**7.484.000.000,00**	**296,40**

Tabel di atas menunjukkan Beban Subsidi per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp7.484.000.000,00 atau 296,40%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Subsidi adalah sebagai berikut:
   a. Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta pada 2025 sebesar Rp10.000.000.000,00, berasal dari realisasi Belanja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atas pemberian subsidi pupuk organik kepada Badan Usaha Milik Swasta sesuai SK Gubernur Nomer 590/03-F/HK/2025 tgl. 30 Juni 2025.
   b. Beban Subsidi kepada Koperasi sebesar Rp9.000.000,00 atas Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi pada Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam pada Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2. Nilai Beban Subsidi pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp10.009.000.000,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp10.009.000.000,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.4.2.1.4 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.2.1.4.1 Rincian Beban Hibah

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.834.625.000,00	193.756.502.952,00	(190.921.877.952,00)	-98,54
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	161.750.000,00	1.459.122.500,00	(1.297.372.500,00)	-88,91
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	778.415.840.621,97	748.722.466.713,00	29.693.373.908,97	3,97
Beban Hibah Dana BOS	97.210.079.659,00	90.422.943.204,00	6.787.136.455,00	7,51
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	23.841.580.000,00	22.579.005.200,00	1.262.574.800,00	5,59
Jumlah	**902.463.875.280,97**	**1.056.940.040.569,00**	**(154.476.165.288,03)**	**-14,62**

Tabel di atas menunjukkan Beban Hibah per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp154.476.165.288,03) atau -14,62%. Rincian Beban Hibah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi dan Organisasi dapat dilihat pada **Lampiran 55.**

5.4.2.1.4.1 Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.2.1.4.1.1 Rincian Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.834.625.000,00	157.039.446.676,00	(154.204.821.676,00)	-98,19
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	36.717.056.276,00	(36.717.056.276,00)	-100,00
Jumlah	**2.834.625.000,00**	**193.756.502.952,00**	**(190.921.877.952,00)**	**-98,54**

Tabel di atas menunjukkan Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp190.921.877.952,00) atau -98,54%.

Penjelasan :

Pengakuan Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2025 lebih kecil dari Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp3.635.883.238,00 (Rp2.834.625.000,00-Rp6.470.508.238,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.1.4.1.2 Penjelasan Selisih atas Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**(3.635.883.238,00)**
Penjelasan Selisih		
➢ Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO		
✓ Reklas Beban Hibah Barang kepada Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat menjadi Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	(3.635.883.238,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(3.635.883.238,00)**

5.4.2.1.4.2 Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.2.1.4.2.1 Rincian Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	161.750.000,00	1.459.122.500,00	(1.297.372.500,00)	-88,91
Jumlah	**161.750.000,00**	**1.459.122.500,00**	**(1.297.372.500,00)**	**-88,91**

Tabel di atas menunjukkan Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.297.372.500,00) atau -88,91%.

Penjelasan:

Pengakuan Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2025 lebih besar dari - pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp161.750.000,00 (Rp161.750.000,00-Rp000,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.1.4.2.2 Penjelasan Selisih atas Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**161.750.000,00**
Penjelasan Selisih		
➢ Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO		
✓ Pemberian Hibah Barang Persediaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana	161.750.000,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**161.750.000,00**

5.4.2.1.4.3 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.2.1.4.3.1 Rincian Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	528.893.438.859,97	518.273.075.565,00	10.620.363.294,97	2,04
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.347.798.094,00	0,00	5.347.798.094,00	100,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	243.374.603.668,00	230.200.071.448,00	13.174.532.220,00	5,72
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	800.000.000,00	249.319.700,00	550.680.300,00	220,87
Jumlah	**778.415.840.621,97**	**748.722.466.713,00**	**29.693.373.908,97**	**3,97**

Tabel di atas menunjukkan Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp29.693.373.908,97 atau 3,97%.

Penjelasan :

Pengakuan Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2025 lebih kecil dari Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp27.573.381.203,00 (Rp778.415.840.621,97-Rp805.989.221.824,97). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.1.4.3.2 Penjelasan Selisih atas Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**(27.573.381.203,00)**
Penjelasan Selisih		
➢ Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO		
✓ Reklas Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan menjadi Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	(25.009.117.814,00)	
✓ Reklas Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan menjadi Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	(2.564.263.389,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(27.573.381.203,00)**

5.4.2.1.4.4 Beban Hibah Dana BOS

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Dana BOS Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah Dana BOS yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.2.1.4.4.1 Rincian Beban Hibah Dana BOS

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	96.413.028.124,00	89.499.371.704,00	6.913.656.420,00	7,72
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	797.051.535,00	923.571.500,00	(126.519.965,00)	-13,70
Jumlah	**97.210.079.659,00**	**90.422.943.204,00**	**6.787.136.455,00**	**7,51**

Tabel di atas menunjukkan Beban Hibah Dana BOS per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp6.787.136.455,00 atau 7,51%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Hibah Dana BOS adalah sebagai berikut:
   a. Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta pada 2025 sebesar Rp96.413.028.124,00, mengalami kenaikan sebesar Rp6.913.656.420,00 atau 7,72% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp89.499.371.704,00.
   b. Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta pada 2025 sebesar Rp797.051.535,00, mengalami penurunan sebesar Rp126.519.965,00 atau -13,70% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp923.571.500,00.
2. Nilai Beban Hibah Dana BOS pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp97.210.079.659,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp97.210.079.659,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.4.2.1.4.5 Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.2.1.4.5.1 Rincian Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	23.841.580.000,00	22.579.005.200,00	1.262.574.800,00	5,59
Jumlah	**23.841.580.000,00**	**22.579.005.200,00**	**1.262.574.800,00**	**5,59**

Tabel di atas menunjukkan Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.262.574.800,00 atau 5,59%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik adalah sebagai berikut:
   a. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada 2025 sebesar Rp23.841.580.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.262.574.800,00 atau 5,59% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp22.579.005.200,00.
2. Nilai Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp23.841.580.000,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp23.841.580.000,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.2.1.5.1 Rincian Beban Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	7.370.300.000,00	4.123.500.000,00	3.246.800.000,00	78,73
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	6.683.200.000,00	3.406.000.000,00	3.277.200.000,00	96,21
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	111.600.000,00	0,00	111.600.000,00	100,00
Jumlah	**14.165.100.000,00**	**7.529.500.000,00**	**6.635.600.000,00**	**88,13**

Tabel di atas menunjukkan Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp6.635.600.000,00 atau 88,13% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu sebesar Rp7.370.300.000,00 dan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp6.683.200.000,00 merupakan Nilai yang berasal dari Reklasifikasi Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp111.600.000,00 merupakan Belanja Bantuan sosial yang disalurkan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bantuan Sosial Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia) Pada Dinas Sosial, P3A Provinsi Bali.

5.4.2.1.5.1 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.2.1.5.1.1 Rincian Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	7.370.300.000,00	4.123.500.000,00	3.246.800.000,00	78,74
Jumlah	**7.370.300.000,00**	**4.123.500.000,00**	**3.246.800.000,00**	**78,74**

Tabel di atas menunjukkan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp3.246.800.000,00 atau 78,74%.

Penjelasan:

Pengakuan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu Tahun 2025 lebih besar dari - pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp7.370.300.000,00 (Rp7.370.300.000,00-Rp000,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.1.5.1.2 Penjelasan Selisih atas Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**7.370.300.000,00**
Penjelasan Selisih		
➢ Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO		
✓ Reklasifikas dari Beban Tidak Terduga menjadi Beban Bantuan Sosial atas beban bantuan sosial yang direncanakan diberikan kepada individu melalui usulan BPBD	7.370.300.000,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**7.370.300.000,00**

5.4.2.1.5.2 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.2.1.5.2.1 Rincian Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	6.683.200.000,00	3.406.000.000,00	3.277.200.000,00	96,22
Jumlah	**6.683.200.000,00**	**3.406.000.000,00**	**3.277.200.000,00**	**96,22**

Tabel di atas menunjukkan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp3.277.200.000,00 atau 96,22%.

Penjelasan:

Pengakuan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2025 lebih besar dari Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp6.683.200.000,00 (Rp6.683.200.000,00-Rp000,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.1.5.2.2 Penjelasan Selisih atas Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**6.683.200.000,00**
Penjelasan Selisih		
➢ Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO		
✓ Reklasifikas dari Beban Tidak Terduga menjadi Beban Bantuan Sosial atas beban bantuan sosial yang direncanakan diberikan kepada kelompok masyarakat melalui usulan BPBD	6.683.200.000,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**6.683.200.000,00**

5.4.2.1.5.3 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.2.1.5.3.1 Rincian Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	111.600.000,00	0,00	111.600.000,00	100,00
Jumlah	**111.600.000,00**	**0,00**	**111.600.000,00**	**100,00**

Tabel di atas menunjukkan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp111.600.000,00.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) adalah sebagai berikut:
   a. Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) pada 2025 sebesar Rp111.600.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp111.600.000,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00.
2. Nilai Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp111.600.000,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp111.600.000,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.2.1.6.1 Rincian Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.651.225,00	427.371.442,76	(425.720.217,76)	-99,61
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	3.527.518.638,87	421.404.005.596,85	(417.876.486.957,98)	-99,16
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	34.482.117,23	51.736.758,53	(17.254.641,30)	-33,35
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	900.626.900,00	0,00	900.626.900,00	100,00
Jumlah	**4.464.278.881,10**	**421.883.113.798,14**	**(417.418.834.917,04)**	**-98,94**

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp417.418.834.917,04) atau -98,94%.

Penjelasan :

Pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 lebih besar dari selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyisihan Piutang Daerah dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca Per 31 Desember 2025 sebesar Rp846.694.896.035,02 (Rp4.464.278.881,10+(Rp862.191.285.296,38-Rp19.960.668.142,46)). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Penyisihan Piutang Daerah yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.1.6.2 Penjelasan Selisih atas Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Nilai	
Selisih Beban Penyisihan Piutang dengan Perubahan Nilai Penyisihan Piutang		**846.694.896.035,02**
Penjelasan Selisih		
➢ Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO		
✓ Penyesuaian penyisihan piutang dari piutang TA 2024 yang tertagih di RS Bali Mandara	2.519.697.346,81	
✓ Penghapusan Piutang Tak Tertagih di 2025	24.944.500,00	
✓ Penyesuaian penyisihan TGR atas nama Wiyantara 2025	18.000.000,00	
✓ Koreksi Saldo Awal Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PT NII sesuai sesuai Kesepakatan Bersama yang	786.802.780.952,68	

Uraian	Nilai
mengatur penyelesaian seluruh tunggakan kewajiban NII kepada Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan LUDA Pemprov Bali.	
✓ Pelunasan Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PT NII PKS Nomor 10 sesuai Kesepakatan Bersama yang mengatur penyelesaian seluruh tunggakan kewajiban NII kepada Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan LUDA Pemprov Bali.	56.863.253.645,15
✓ Pelunasan Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Kontribusi Tetap PKS Nomor 10	3.020.774.733,83
➢ Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO	
✓ Jurnal koreksi saldo awal penyisihan piutang atas adanya kesalahan perhitungan piutang PT Global Assistance Healthcare, serta adanya pembayaran piutang pasien umum dan pasien lost pada RSUD Bali Mandara	(25.112.690,99)
✓ Koreksi Saldo Awal Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Kontribusi Tetap PKS Nomor 10	(2.529.442.452,46)
Jumlah Penjelasan Selisih	**846.694.896.035,02**

5.4.2.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.2.1.7.1 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	143.915.686.361,51	153.485.323.115,35	(9.569.636.753,84)	-6,23
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	78.728.783.486,00	69.658.650.163,60	9.070.133.322,40	13,02
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	219.067.046.950,39	419.270.877.852,14	(200.203.830.901,75)	-47,75
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.445.320.742,00	1.626.824.943,00	(181.504.201,00)	-11,15
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	2.914.493.503,00	3.010.932.371,65	(96.438.868,65)	-3,20
Beban Penyusutan Properti Investasi	96.565.733,00	96.565.733,00	0,00	0,00
Jumlah	**446.167.896.775,90**	**647.149.174.178,74**	**(200.981.277.402,84)**	**-31,05**

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp200.981.277.402,84) atau -31,06%.

Penjelasan :

1. Pengakuan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 lebih besar dari selisih/perubahan saldo Akumulasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Daerah dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca Per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.955.137.222,94 (Rp143.915.686.361,51-(Rp1.800.859.499.926,11-Rp1.936.820.049.064,68)). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Daerah yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.1.7.2 Penjelasan Selisih atas Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Uraian	Nilai	
Selisih Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin dengan Perubahan Nilai		**7.955.137.222,94**
Penjelasan Selisih		
➢ Penambahan Beban Penyusutan		
✓ Reklasifikasi ke Akumulasi Aset Lainnya	24.053.802.717,96	
✓ Reklasifikasi ke Akumulasi Properti Investasi	6.755.252.193,00	
✓ Mutasi Antar Perangkat Daerah	6.477.180.699,00	
➢ Pengurangan Beban Penyusutan		
✓ Koreksi Pencatatan Saldo Awal Bertambah	(21.848.607.804,00)	
✓ Penyusutan Barang Terima Hibah	(1.005.309.884,00)	
✓ Mutasi Bertambah Antar OPD	(6.477.180.699,00)	
✓ Koreksi Saldo awal menyesuaikan dengan SIMDA	(0,02)	

2. Pengakuan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 lebih kecil dari selisih/perubahan saldo Akumulasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Daerah dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca Per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.010.984.501,36 (Rp78.728.783.486,00-(Rp699.678.324.093,94-Rp782.418.092.081,30)). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Daerah yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.1.7.3 Penjelasan Selisih atas Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai	
Selisih Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan dengan Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		**(4.010.984.501,36)**
Penjelasan Selisih		
➢ Penambahan Beban Penyusutan		
✓ Reklasifikasi ke Akumulasi Aset Lainnya	4.669.427.325,00	
✓ Koreksi Pencatatan Saldo Awal	29.204.291.469,64	
✓ Mutasi Antar Perangkat Daerah	3.500.632.899,00	
➢ Pengurangan Beban Penyusutan		
✓ Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(33.019.559.506,00)	
✓ Penyusutan Barang Terima Hibah	(4.855.143.790,00)	
✓ Reklasifikasi dari Akumulasi Dari ASET EXTRA	(10.000.000,00)	
✓ Mutasi Antar Perangkat Daerah	(3.500.632.899,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(4.010.984.501,36)**

3. Pengakuan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 lebih kecil dari selisih/perubahan saldo Akumulasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Daerah dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca Per 31 Desember 2025 sebesar Rp694.158.728.413,66 (Rp219.067.046.950,39-(Rp2.963.822.678.011,06-Rp3.877.048.453.375,11)). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Daerah yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.1.7.4 Penjelasan Selisih atas Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Uraian	Nilai	
Selisih Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		**(694.158.728.413,66)**
Penjelasan Selisih		
➢ Penambahan Beban Penyusutan		
✓ Reklasifikasi ke Akumulasi Aset Lainnya	16.131.914,00	
✓ Koreksi Pencatatan Saldo Awal	36.173.084.018,00	
✓ Mutasi Antar Perangkat Daerah	250.517.788.061,00	
➢ Pengurangan Beban Penyusutan		
✓ Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(24.090.782.762,00)	
✓ Penyusutan Barang Terima Hibah	(692.139.861.583,66)	
✓ Reklasifikasi dari Akumulasi Aset Lainnya	(14.117.300.000,00)	
✓ Mutasi Antar Perangkat Daerah	(250.517.788.061,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(694.158.728.413,66)**

4. Pengakuan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 lebih besar dari selisih/perubahan saldo Akumulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Daerah dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca Per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.450.000,00 (Rp1.445.320.742,00-(Rp21.528.746.696,40-Rp22.967.617.438,40)). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Daerah yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.1.7.5 Penjelasan Selisih atas Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai	
Selisih Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya dengan Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		**6.450.000,00**
Penjelasan Selisih		
➢ Pengurangan Beban Penyusutan		
✓ Reklasifikasi Bertambah dari akumulasi Aset Lainnya	6.450.000,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**6.450.000,00**

5. Pengakuan Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 lebih kecil dari selisih/perubahan saldo Akumulasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Daerah dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca Per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.357.512.737,00 (Rp2.914.493.503,00-(Rp20.833.551.606,82-Rp28.105.557.846,82)). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Daerah yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.1.7.6 Penjelasan Selisih atas Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud

Uraian	Nilai	
Selisih Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud dengan Perubahan Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		**(4.357.512.737,00)**
Penjelasan Selisih		
➢ Penambahan Beban Amortisasi		
✓ Penghapusan Aset Tidak Berwujud Pada Setwan dan Disperindag	69.899.500,00	
✓ Koreksi Pencatatan Saldo Awal Pada BKPSDM dan Dinkes	21.809.825,00	
➢ Pengurangan Beban Amortisasi		
✓ Koreksi saldo awal bertambah	(4.416.972.062,00)	
✓ Jurnal Penyesuaian untuk mencatat penerimaan Hibah BMN berupa Dermaga Gunaksa dan Penyusunan Value Engineering terhadap Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa dari Kementerian Perhubungan kepada Pemprov Bali	(32.250.000,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(4.357.512.737,00)**

6. Pengakuan Beban Penyusutan Properti Investasi Tahun 2025 sama dengan perubahan saldo Akumulasi Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Daerah dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca Per 31 Desember 2025 sebesar Rp 96.565.733,00.

5.4.2.2 BEBAN TRANSFER

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.2.2.1 Rincian Beban Transfer

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Bagi Hasil	695.024.851.287,00	1.748.842.154.053,00	(1.053.817.302.766,00)	-60,26
Beban Bantuan Keuangan	280.600.433.855,03	157.532.783.099,00	123.067.650.756,03	78,12
Jumlah	**975.625.285.142,03**	**1.906.374.937.152,00**	**(930.749.652.009,97)**	**-48,82**

Tabel di atas menunjukkan Beban Transfer per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp930.749.652.009,97) atau -48,82%.

5.4.2.2.1 Beban Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bagi Hasil yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.2.2.1.1 Rincian Beban Bagi Hasil

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	695.024.851.287,00	1.748.842.154.053,00	(1.053.817.302.766,00)	-60,26
Jumlah	**695.024.851.287,00**	**1.748.842.154.053,00**	**(1.053.817.302.766,00)**	**-60,26**

Tabel di atas menunjukkan Beban Bagi Hasil per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.053.817.302.766,00) atau -60,26%.

Penjelasan:

Pengakuan Beban Bagi Hasil Tahun 2025 lebih kecil dari Belanja Bagi Hasil pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp270.714.125.161,00 (Rp695.024.851.287,00-Rp965.738.976.448,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Bagi Hasil, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.2.1.2 Penjelasan Selisih atas Rincian Beban Bagi Hasil

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**(270.714.125.161,00)**
Penjelasan Selisih		
➢ Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO		
✓ Saldo Utang Belanja Bagi Hasil Tahun 2025 (Neraca)	39.970.590.091,00	
➢ Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO		
✓ Saldo Utang Belanja Bagi Hasil Tahun 2024 (Neraca)	(310.684.715.252,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(270.714.125.161,00)**

5.4.2.2.2 Beban Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.2.2.2.1 Rincian Beban Bantuan Keuangan

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	192.057.433.855,03	81.755.349.199,00	110.302.084.656,03	134,91
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	88.543.000.000,00	75.777.433.900,00	12.765.566.100,00	16,84
Jumlah	**280.600.433.855,03**	**157.532.783.099,00**	**123.067.650.756,03**	**78,12**

Tabel di atas menunjukkan Beban Bantuan Keuangan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp123.067.650.756,03 atau 78,12%.

Penjelasan:

Pengakuan Beban Bantuan Keuangan Tahun 2025 sama dengan Belanja Bantuan Keuangan pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp280.600.433.855,03.

5.4.3 SURPLUS NON OPERASIONAL-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non Operasional-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Surplus Non Operasional-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.3.1 Rincian Surplus Non Operasional-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	724.625.734,00	623.256.918,00	101.368.816,00	16,26
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	30.705.444,00	(30.705.444,00)	-100,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	63.900.149.170,81	1.148.081.836,34	62.752.067.334,47	5.465,81
Jumlah	**64.624.774.904,81**	**1.802.044.198,34**	**62.822.730.706,47**	**3.486,19**

Tabel di atas menunjukkan Surplus Non Operasional-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp62.822.730.706,47 atau 3.486,19%.

5.4.3.1 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.3.1.1 Rincian Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	677.625.734,00	623.256.918,00	54.368.816,00	8,72
Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	100,00
Jumlah	**724.625.734,00**	**623.256.918,00**	**101.368.816,00**	**16,26**

Tabel di atas menunjukkan Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp101.368.816,00 atau 16,26%.

5.4.3.1.1 Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.3.1.1.1 Rincian Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Surplus Penjualan Aset Lain-Lain-LO	677.625.734,00	623.256.918,00	54.368.816,00	8,72
Jumlah	**677.625.734,00**	**623.256.918,00**	**54.368.816,00**	**8,72**

Tabel di atas menunjukkan Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp54.368.816,00 atau 8,72%. Penjelasan lebih lanjut mengenai surplus Penjualan Aset Lain-Lain-LO adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.3.1.1.2 Penjelasan atas Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
Rincian detail transaksi Surplus dari Penjualan Aset dan Perhitungan Sisa Nilai Buku Penghapusan Aset		
1	Penjualan ARB Kendaraan Dinas Roda 2 dari Dinas Kesehatan	7.404.100,00
2	Penjualan ARB Kendaraan Dinas Roda 2 dari Bapenda	88.568.300,00
3	Penjualan ARB Barang Inventaris dari RS Mata Bali Mandara	1.500.000,00
4	Penjualan ARB Barang Inventaris Biro Organisasi Setda	1.700.000,00
5	Penjualan ARB Barang Inventaris Dinas Kebudayaan	2.000.000,00
6	Penjualan ARB Barang Inventaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.100.000,00
7	Penjualan ARB Barang Inventaris dari Sekretariat DPRD	4.400.000,00

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
8	Penjualan ARB RS Umum Daerah Bali Mandara	3.000.000,00
9	Penjualan ARB Barang Inventaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.700.000,00
10	Penjualan ARB Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	150.451.100,00
11	Penjualan ARB Kendaraan Dinas Roda 2 dari RSJ Manah Shanti Mahottama	4.223.100,00
12	Penjualan ARB Kendaraan Dinas Roda 4 Dinas Kebudayaan	9.193.100,00
13	Penjualan ARB Kendaraan Dinas Beroda Empat dari Sekretariat DPRD	73.968.100,00
14	Penjualan ARB Kendaraan Dinas Beroda Tiga dari Sekretariat DPRD	6.522.200,00
15	Penjualan ARB Barang Inventaris Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	600.000,00
16	Penjualan ARB Barang Inventaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.200.000,00
17	Penjualan ARB Barang Inventaris Biro Umum Setda	508.334,00
18	Penjualan ARB Barang Inventaris Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda	5.100.000,00
19	Penjualan ARB Barang Inventaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.500.000,00
20	Penjualan ARB Barang Inventaris Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	3.400.000,00
21	Penghapusan ARB Peralatan dan Mesin BPKAD Provinsi Bali TA 2025	3.200.000,00
22	Reklasifikasi Hasil Penjualan ARB menjadi Surplus Non Operasional (STS Penjualan Tidak Teridentifikasi ARB Induknya)	306.387.400,00
Jumlah (22 transaksi)		**677.625.734,00**

5.4.3.1.2 Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.3.1.2.1 Rincian Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Surplus Tukar Menukar Tanah-LO	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	100,00
Jumlah	**47.000.000,00**	**0,00**	**47.000.000,00**	**100,00**

Tabel di atas menunjukkan Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp47.000.000,00. Penjelasan lebih lanjut mengenai Surplus Tukar Menukar Tanah-LO adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.3.1.2.2 Penjelasan atas Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
Rincian detail transaksi Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan		
1	Transaksi Tukar Menukar Tanah antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Tanah Perorangan (Tukar Menukar Aset)	47.000.000,00
Jumlah (1 transaksi)		**47.000.000,00**

5.4.3.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.3.2.1 Rincian Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	0,00	30.705.444,00	(30.705.444,00)	-100,00
Jumlah	**0,00**	**30.705.444,00**	**(30.705.444,00)**	**-100,00**

Tabel di atas menunjukkan Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp30.705.444,00) atau -100,00%.

5.4.3.2.1 Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.3.2.1.1 Rincian Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-Swasta-Jangka Menengah-LO	0,00	30.705.444,00	(30.705.444,00)	-100,00
Jumlah	**0,00**	**30.705.444,00**	**(30.705.444,00)**	**-100,00**

Tabel di atas menunjukkan Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp30.705.444,00) atau -100,00%.

5.4.3.3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.3.3.1 Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	63.900.149.170,81	1.148.081.836,34	62.752.067.334,47	5.465,82
Jumlah	**63.900.149.170,81**	**1.148.081.836,34**	**62.752.067.334,47**	**5.465,82**

Tabel di atas menunjukkan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp62.752.067.334,47 atau 5.465,82%.

5.4.3.3.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.3.3.1.1 Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	63.900.149.170,81	1.148.081.836,34	62.752.067.334,47	5465,82
Jumlah	**63.900.149.170,81**	**1.148.081.836,34**	**62.752.067.334,47**	**5465,82**

Tabel di atas menunjukkan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp62.752.067.334,47 atau 5.465,82%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah sebagai berikut: Nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Laporan Operasional Tahun 2025 sebesar Rp63.900.149.170,81 meningkat sebesar Rp62.752.067.334,47 atau 5.465,82% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp1.148.081.836,34. Nilai ini merupakan berasal dari pelunasan piutang yang mengakibatkan terhapusnya penyisihan piutang pada perangkat daerah. Berikut adalah rincian transaksinya:

Tabel 5.4.3.3.1.2 Penjelasan atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
Rincian detail transaksi Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
1	Penyesuaian TGR atas nama Wiyantara Januari - Desember 2025	18.000.000,00
2	Pelunasan Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PT NII PKS Nomor 10 sesuai Kesepakatan Bersama yang mengatur penyele	56.863.253.645,15
3	Pelunasan Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Kontribusi Tetap PKS Nomor 10	3.020.774.733,83

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
4	Pengakuan surplus non operasional atas penyesuaian penyisihan piutang tahun 2025 untuk OPD	2.519.684.089,27
5	Reklasifikasi 0,2 sebagai surplus non operasional lainnya (pembulatan dari penerimaan transaksi pelunasan Piutang PKS No	0,02
6	Reklasifikasi Penerimaan Pembayaran Settlement atas Kesepakatan Bersama Nomor B.31.000.2.3.2/2553/UPTD.PBMD/BPKAD	1.478.423.445,00
7	Pelunasan Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah TA 2025	13.257,54
	Jumlah	**63.900.149.170,81**

5.4.4 DEFISIT NON OPERASIONAL-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non Operasional-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Defisit Non Operasional-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.4.1 Rincian Defisit Non Operasional-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	2.423.399.368,05	7.246.745.411,80	(4.823.346.043,75)	-66,56
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	2.845.835.058,00	5.092.414.901,00	(2.246.579.843,00)	-44,12
Jumlah	**5.269.234.426,05**	**12.339.160.312,80**	**(7.069.925.886,75)**	**-57,30**

Tabel di atas menunjukkan Defisit Non Operasional-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp7.069.925.886,75) atau -57,30%.

5.4.4.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.4.1.1 Rincian Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	560.300.573,00	644.280.096,00	(83.979.523,00)	-13,03
Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	1.863.098.795,05	6.602.465.315,80	(4.739.366.520,75)	-71,78
Jumlah	**2.423.399.368,05**	**7.246.745.411,80**	**(4.823.346.043,75)**	**-66,56**

Tabel di atas menunjukkan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp4.823.346.043,75) atau -66,56%.

5.4.4.1.1 Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.4.1.1.1 Rincian Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	0,00	624.686.662,00	(624.686.662,00)	-100,00
Defisit Penjualan Aset Lain-Lain-LO	560.300.573,00	19.593.434,00	540.707.139,00	2759,63
Jumlah	**560.300.573,00**	**644.280.096,00**	**(83.979.523,00)**	**-13,03**

Tabel di atas menunjukkan Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp83.979.523,00) atau -13,03%. Penjelasan lebih lanjut mengenai Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.4.1.1.2 Penjelasan Selisih atas Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
Rincian detail transaksi Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO		
1	Penjualan ARB Bangunan Gedung (SMAN 1 Bangli & SMAN 1 Tembuku) (Bongkaran Gedung) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah	127.954.340,00
2	Penjualan ARB Bangunan Gedung (SMAN 1 Kediri) (Bongkaran Gedung) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	192.321.080,00
3	Penjualan ARB Peralatan dan Mesin (Sekolah Daerah Gianyar dan Bangli) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	240.025.153,00
Jumlah		**560.300.573,00**

5.4.4.1.2 Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.4.1.2.1 Rincian Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Defisit Penghapusan Tanah-LO	0,00	43.433.500,00	(43.433.500,00)	-100,00
Defisit Penghapusan Peralatan dan Mesin-LO	0,00	38.781.346,00	(38.781.346,00)	-100,00
Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan–LO	1.032.058.186,66	0,00	1.032.058.186,66	100,00
Defisit Penghapusan Aset Tetap Lainnya-LO	0,00	629.409.895,30	(629.409.895,30)	-100,00
Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO	831.040.608,39	5.890.840.574,50	(5.059.799.966,11)	-85,89
Jumlah	**1.863.098.795,05**	**6.602.465.315,80**	**(4.739.366.520,75)**	**-71,78**

Tabel di atas menunjukkan Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp4.739.366.520,75) atau -71,78%. Penjelasan lebih lanjut mengenai Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.4.1.2.2 Penjelasan Selisih atas Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
Rincian detail transaksi Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO		
1	Jurnal penyesuaian atas penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan	(229.112.717,64)
2	Jurnal penyesuaian untuk penghapusan koreksi saldo awal gedung dan bangunan berupa pagar	1.261.170.904,30
3	Penghapusan Barang Inventaris ARB dari DISHUB	44.838.083,00
4	Penghapusan Barang Inventaris ARB dari DISKOMINFO	8.413.000,00
5	Penghapusan Barang Inventaris ARB dari DUKCAPIL	32.280,00
6	Penghapusan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah SETDA	16.732.083,00
7	Penghapusan ARB Bangunan Gedung dari RSJ Manah Shanti Mahottama	627.297.989,99
8	Penghapusan ARB Bangunan Gedung (Bongkaran Gedung) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipi	34.639.333,00
9	Penghapusan Barang Inventaris ARB dari Bapenda	82.500,00
10	Penghapusan ARB Peralatan dan Mesin (SLBN 1 Karangasem) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga karena Kebakaran	28.308.977,00
11	Penghapusan ARB Bangunan Gedung (Bongkaran Gedung) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	49.743.038,00
12	Penghapusan ARB Bangunan Gedung (SLBN 2 Buleleng) (Bongkaran Gedung) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	11.248.224,40
13	Penghapusan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah DISTAN	9.705.100,00
Jumlah (13 transaksi)		**1.863.098.795,05**

5.4.4.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.4.2.1 Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	2.845.835.058,00	5.092.414.901,00	(2.246.579.843,00)	-44,12
Jumlah	**2.845.835.058,00**	**5.092.414.901,00**	**(2.246.579.843,00)**	**-44,12**

Tabel di atas menunjukkan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp2.246.579.843,00) atau -44,12%.

5.4.4.2.1 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.4.2.1.1 Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	2.845.835.058,00	5.092.414.901,00	(2.246.579.843,00)	-44,12
Jumlah	**2.845.835.058,00**	**5.092.414.901,00**	**(2.246.579.843,00)**	**-44,12**

Tabel di atas menunjukkan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp2.246.579.843,00) atau -44,11%.

Penjelasan Tren penurunan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah sebagai berikut: Nilai Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Laporan Operasional Tahun 2025 sebesar Rp2.845.835.058,00 menurun sebesar Rp2.246.579.843,00 atau -44,11% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp5.092.414.901,00. Nilai Rp2.845.835.058,00 merupakan pengakuan penurunan investasi dari Perumda Kerthi Bali Santhi sampai dengan tanggal Tahun 2025.

5.4.5 BEBAN LUAR BIASA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Luar Biasa yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.4.5.1 Rincian Beban Luar Biasa

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Luar Biasa	21.888.800,30	0,00	21.888.800,26	100,00
Jumlah	**21.888.800,30**	**0,00**	**21.888.800,26**	**100,00**

Tabel di atas menunjukkan Beban Luar Biasa per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp21.888.800,26 atau 100,00%.

Penjelasan :

Pengakuan Beban Luar Biasa Tahun 2025 lebih kecil dari Belanja Tidak Terduga pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp14.053.500.000,00 (Rp21.888.800,30 - Rp14.075.388.800,30). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Tidak Terduga, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.5.2 Penjelasan Selisih atas Beban Luar Biasa

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**(14.053.500.000,00)**
Penjelasan Selisih		
➢ Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO		
✓ Konversi dari Beban Luar Biasa ke Beban Bantuan Sosial	(14.053.500.000,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(14.053.500.000,00)**

5.4.6 Surplus/(Defisit)-LO

Tabel 5.4.6.1 Rincian Surplus/(Defisit)-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
SURPLUS/DEFISIT-LO	4.085.325.080.551,39	1.966.768.027.608,74	2.118.557.052.942,65	107,72
Jumlah	**4.085.325.080.551,39**	**1.966.768.027.608,74**	**2.118.557.052.942,65**	**107,72**

Saldo tersebut adalah pengakuan Surplus/(Defisit)-LO Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2025 dan 2024. Saldo Surplus/(Defisit)-LO tersebut telah sama dengan yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas poin 5.6.2.

5.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang memengaruhi perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, yaitu aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Berikut gambar diagram pengaruh keempat aktivitas tersebut terhadap perubahan kas dan setara kas pada Pemerintah Provinsi Bali.

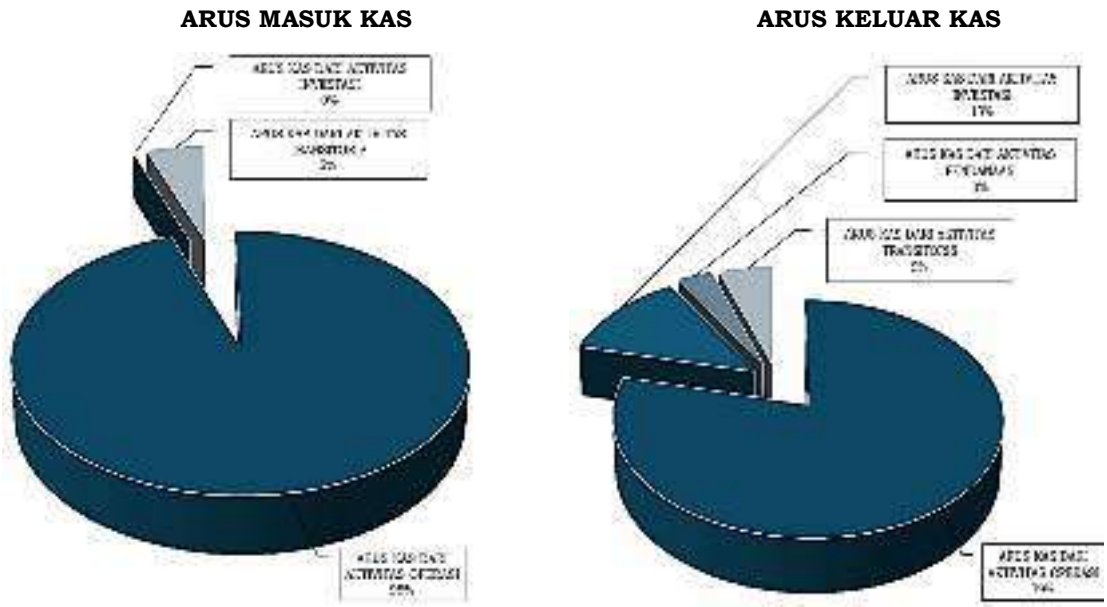

Gambar 5.15 Diagram Pengaruh Empat Aktivitas Arus Kas Terhadap Posisi Kas dan Setara Kas TA 2025



Gambar 5.16 Diagram Perbandingan Tiga Aktivitas Arus Kas Bersih Terhadap Posisi Kas dan Setara Kas TA 2025 dan 2024

Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diungkapkan dan disajikan sebagai berikut.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan Kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.5.1.1 Perbandingan Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas Masuk	7.047.615.800.871,64	7.823.537.090.007,83
Arus Kas Keluar	5.780.965.958.802,09	6.625.362.242.852,66
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**1.266.649.842.069,55**	**1.198.174.847.155,17**

Jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas operasi yaitu arus kas masuk dari aktivitas operasi dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Masuk Kas

Tabel 5.5.1.1.1 Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pajak Daerah	2.865.836.401.524,00	4.520.332.643.486,00
Retribusi Daerah	909.595.917.119,52	338.039.879.379,28
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	253.603.839.116,43	197.369.947.623,03
Lain-lain PAD yang Sah	598.347.153.222,68	478.625.715.282,52
Dana Bagi Hasil	251.084.753.500,00	190.545.491.110,00
Dana Alokasi Umum	1.403.485.166.622,00	1.367.677.271.075,00
Dana Alokasi Khusus – Fisik	84.007.989.018,00	87.240.500.926,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	627.760.505.186,00	614.797.443.126,00
Insentif Fiskal	12.978.586.000,00	23.157.354.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.825.690.369,00	0,00
Hibah	6.089.799.194,01	5.750.844.000,00
Jumlah	**7.047.615.800.871,64**	**7.823.537.090.007,83**

5.5.1.2 Arus Keluar Kas

Tabel 5.5.1.2.1 Rincian Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Belanja Pegawai	2.304.413.342.308,00	2.088.693.065.509,00
Belanja Barang dan Jasa	1.272.505.827.668,79	1.200.096.660.415,66
Belanja Subsidi	10.009.000.000,00	2.525.000.000,00
Belanja Hibah	933.511.389.721,97	1.169.523.956.546,00
Belanja Bantuan Sosial	111.600.000,00	250.000.000,00
Belanja Tak Terduga	14.075.388.800,30	7.441.134.041,00
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	965.738.976.448,00	1.800.971.992.343,00
Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	192.057.433.855,03	269.381.700.098,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	88.543.000.000,00	86.478.733.900,00
Jumlah	**5.780.965.958.802,09**	**6.625.362.242.852,66**

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Nilai arus kas bersih dari aktivitas investasi Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.5.2.1 Perbandingan Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas Masuk	700.068.400,00	172.231.826.700,00
Arus Kas Keluar	931.687.032.749,53	674.689.607.145,41
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(930.986.964.349,53)**	**(502.457.780.445,41)**

Jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas investasi yaitu arus kas masuk dari aktivitas investasi dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi. Rincian arus kas dari aktivitas investasi sebagai berikut:

5.5.2.1 Arus Masuk Kas

Tabel 5.5.2.1.1 Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pencairan Dana Cadangan	0,00	171.170.332.800,00
Penjualan Aset Lain-Lain	700.068.400,00	1.061.493.900,00
Jumlah	**700.068.400,00**	**172.231.826.700,00**

5.5.2.2 Arus Keluar Kas

Tabel 5.5.2.2.1 Rincian Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan Tanah	1.181.948.000,00	3.464.184.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	259.183.049.267,80	130.063.180.613,50
Perolehan Gedung dan Bangunan	240.493.997.597,02	407.489.294.374,22
Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	240.687.598.599,81	94.451.449.090,69
Perolehan Aset Tetap Lainnya	31.596.980.320,00	31.382.599.067,00
Perolehan Aset Lainnya	543.458.964,90	838.900.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	158.000.000.000,00	7.000.000.000,00
Jumlah	**931.687.032.749,53**	**674.689.607.145,41**

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.5.3.1 Perbandingan Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar	243.464.798.088,00	243.464.798.088,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**(243.464.798.088,00)**	**(243.464.798.088,00)**

Jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan yaitu arus kas masuk dari aktivitas pendanaan dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Rincian arus kas dari aktivitas pendanaan sebagai berikut:

5.5.3.1 Arus Masuk Kas

Tabel 5.5.3.1.1 Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**

5.5.3.2 Arus Keluar Kas

Tabel 5.5.3.2.1 Rincian Arus Kas Keluar Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	243.464.798.088,00	243.464.798.088,00
Jumlah	**243.464.798.088,00**	**243.464.798.088,00**

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Provinsi Bali. Nilai arus kas dari aktivitas transitoris Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.5.4.1 Perbandingan Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas Masuk	375.893.982.146,00	371.823.264.458,00
Arus Kas Keluar	378.950.454.558,70	371.823.264.458,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**(3.056.472.412,70)**	**0,00**

Jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas transitoris yaitu arus kas masuk dari aktivitas transitoris dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas transitoris. Rincian arus kas dari aktivitas transitoris sebagai berikut:

5.5.4.1 Arus Masuk Kas

Tabel 5.5.4.1.1 Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pajak Pertambahan Nilai	117.598.972.454,00	93.700.059.524,00
Pajak Penghasilan Pasal 21	83.836.111.547,00	123.233.747.416,00
Pajak Penghasilan Pasal 22	9.490.466.898,00	5.281.908.575,00
Pajak Penghasilan Pasal 23	5.058.473.898,00	3.258.306.411,00
Pajak Penghasilan Pasal 25	-	0,00-
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	14.224.419.103,00	12.283.918.707,00
Pajak Penjualan Barang Mewah Dalam Negeri	892.730.476,00	2.425.775,00
Potongan BPJS	71.247.686.427,00	58.761.758.446,00
IWP 8%	45.658.433.839,00	50.685.610.430,00
IWP 1%	13.563.739.061,00	8.128.675.458,00
Potongan JKK	2.077.657.371,00	1.638.395.005,00
Potongan JKM	5.462.739.130,00	4.908.918.566,00
Iuran JHT Non-ASN	6.782.551.942,00	9.939.540.145,00
Jumlah	**375.893.982.146,00**	**371.823.264.458,00**

5.5.4.2 Arus Keluar Kas

Tabel 5.5.4.2.1 Rincian Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pajak Pertambahan Nilai	117.598.972.454,00	93.700.059.524,00
Pajak Penghasilan Pasal 21	83.836.111.547,00	123.233.747.416,00
Pajak Penghasilan Pasal 22	9.490.466.898,00	5.281.908.575,00
Pajak Penghasilan Pasal 23	5.058.473.898,00	3.258.306.411,00
Pajak Penghasilan Pasal 25	-	-
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	14.224.419.103,00	12.283.918.707,00
Pajak Penjualan Barang Mewah Dalam Negeri	892.730.476,00	2.425.775,00
Potongan BPJS	71.247.686.427,00	58.761.758.446,00
IWP 8%	45.658.433.839,00	50.685.610.430,00
IWP 1%	13.563.739.061,00	8.128.675.458,00
Potongan JKK	2.077.657.371,00	1.638.395.005,00
Potongan JKM	5.462.739.130,00	4.908.918.566,00
Iuran JHT Non-ASN	6.782.551.942,00	9.939.540.145,00
Sisa Dana Kas BOSP yang Dikembalikan ke RKUN	3.056.472.412,70	0,00
Jumlah	**378.950.454.558,70**	**371.823.264.458,00**

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris secara rinci pada ***Lampiran 51.***

5.5.5 Kenaikan /(Penurunan) Kas

Tabel 5.5.5.1 Perbandingan Kenaikan/(Penurunan) Kas Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kenaikan / (Penurunan) Kas	89.141.607.219,32	452.252.268.621,76

Jumlah kenaikan/(penurunan) kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.5.5.2 Rincian Arus Kas Bersih dari Keempat Aktivitas Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	1.266.649.842.069,55	1.198.174.847.155,17
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(930.986.964.349,53)	(502.457.780.445,41)
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	(243.464.798.088,00)	(243.464.798.088,00)
Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	(3.056.472.412,70)	0,00
Jumlah	**89.141.607.219,32**	**452.252.268.621,76**

5.5.6 Saldo Awal Kas

Tabel 5.5.6.1 Perbandingan Saldo Awal Kas Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo Awal Kas	623.732.459.203,32	171.480.190.581,56

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagaimana yang disajikan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih pada ***poin 5.2.1*** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.6.2 Rincian Saldo Awal Kas

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas Di Kas Daerah	540.047.220.034,96	93.261.463.025,33
Kas di BLUD:		
- Kas di BLUD UPTD RS Bali Mandara	11.384.643.832,20	23.106.882.669,81
- Kas di BLUD RS Mata Bali Mandara	22.272.848.565,09	13.955.324.668,78
- Kas di BLUD RS Jiwa Provinsi Bali	11.253.136.977,16	9.421.039.081,34

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
- Kas di BLUD UPTD Pengelolaan Air Limbah	11.397.444.299,21	4.803.618.256,49
- Kas di BLUD UPTD Pengelolaan Air Minum	3.776.013.806,69	4.820.767.557,36
- Kas di BLUD UPT Bapelkesmas	2.591.826.952,86	2.215.539.343,00
- Kas di BLUD UPT PKSDM	7.302.650.158,45	4.199.692.447,04
- Kas di BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan	5.493.460.321,60	3.266.828.045,70
- Kas di BLUD RS Dharma Yadnya	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	4.495.970.420,00
Kas Dana BOS	5.156.741.842,40	7.933.065.066,71
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	3.056.472.412,70	0,00
Jumlah	**623.732.459.203,32**	**171.480.190.581,56**

Saldo tersebut merupakan Saldo Kas dan Setara Kas Tahun 2024 dan Tahun 2023.

5.5.7. Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Tabel 5.5.7.1 Perbandingan Koreksi SiLPA Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi SiLPA Tahun Lalu	0,00	(3.056.472.412,70)

Saldo tersebut merupakan Koreksi SiLPA BOSP TA 2019 s.d. TA 2022 yang mengendap di Rekening BOSP Satuan Pendidikan yang pada tahun sebelumnya masih dicatat sebagai SiLPA. Saldo tersebut sudah dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

5.5.8. Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)-Terkait PFK

Tabel 5.5.8.1 Perbandingan Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	0,00	3.056.472.412,70

Saldo tersebut merupakan pengakuan Utang ke Kas Negara sebesar Koreksi SiLPA BOSP TA 2019 s.d. TA 2022 yang mengendap di Rekening BOSP Satuan Pendidikan. Per 31 Desember 2024, SiLPA tersebut direklasifikasi pada Rekening Kas Lainnya yang sebelumnya dicatat pada Rekening Kas Dana BOSP.

5.5.9. Saldo Akhir Kas

Tabel 5.5.9.1 Perbandingan Saldo Akhir Kas Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Akhir Kas	**712.874.066.422,64**	**623.732.459.203,32**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dengan rincian kas sebagai berikut:

Tabel 5.5.9.1 Rincian Saldo Akhir Kas

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	609.165.272.494,47	540.047.220.034,96
Kas di Bendahara Pengeluaran	17.321,38	0,00
Kas di BLUD:		
- Kas di BLUD UPTD RS Bali Mandara	11.545.168.915,10	11.384.643.832,20
- Kas di BLUD RS Dharma Yadnya	1.283.073.469,42	0,00
- Kas di BLUD RS Mata Bali Mandara	30.247.848.716,17	22.272.848.565,09
- Kas di BLUD RS Jiwa Provinsi Bali	13.459.001.613,50	11.253.136.977,16
- Kas di BLUD UPTD Pengelolaan Air Limbah	15.677.032.611,38	11.397.444.299,21
- Kas di BLUD UPTD Pengelolaan Air Minum	1.417.318.943,87	3.776.013.806,69
- Kas di BLUD UPTD BAPELKES	3.045.880.643,11	2.591.826.952,86
- Kas di BLUD UPTD PKSDM	11.008.641.026,33	7.302.650.158,45
- Kas di BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan	8.552.400.887,51	5.493.460.321,60
Kas Dana BOSP	7.472.409.780,40	5.156.741.842,40
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	0,00	3.056.472.412,70
Jumlah	**712.874.066.422,64**	**623.732.459.203,32**

Saldo Akhir Kas tersebut telah sesuai (*matching*) dengan saldo yang tercantum dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih serta Saldo Kas dan Setara Kas pada Neraca, yaitu sebesar Rp712.874.066.422,64, sehingga menunjukkan konsistensi antar laporan keuangan.

Pada Saldo Akhir Kas tersebut terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non Terikat yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung pelaksanaan aktivitas arus kas pada tahun anggaran berikutnya. Rincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non Terikat tersebut telah diungkapkan secara rinci dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada Poin 5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Tabel 5.6.1.1 Rincian Ekuitas Awal

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Ekuitas Awal	**17.602.612.654.466,05**	**15.648.183.735.009,10**

Saldo tersebut di atas merupakan saldo Ekuitas Awal tahun 2025 dan 2024 yang merupakan saldo Ekuitas Akhir tahun 2024 dan 2023.

5.6.2 Surplus /(Defisit) LO

Tabel 5.6.2.1 Rincian Surplus / (Defisit) LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Surplus /(Defisit) LO	**4.085.325.080.551,39**	**1.966.768.027.608,74**

Saldo tersebut di atas merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai Ekuitas pada Neraca Pemerintah Provinsi Bali.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Tabel 5.6.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	**(26.285.490.954,63)**	**(12.339.108.151,79)**

Saldo tersebut di atas merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Bali melakukan penyesuaian. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.6.3.2 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Ekuitas Kas dan Setara Kas	0,00	(3.056.472.412,70)
Koreksi Ekuitas Persediaan	(40.345.991.347,75)	(5.587.542.695,64)
Koreksi Ekuitas Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	(12.517.851,00)	2.199.400,00
Koreksi Ekuitas Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.277.360.883,37	0,00
Koreksi Ekuitas Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	(8.193.854,00)
Koreksi Ekuitas Penyisihan Piutang	(25.112.690,99)	(10.997,00)
Koreksi Ekuitas Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	(14.661.520.580,50)	(75.000.000.000,00)
Koreksi Ekuitas Tanah	2.455.741.479,00	99.574.952.661,03
Koreksi Ekuitas Peralatan dan Mesin	6.119.486.160,99	20.811.435.833,00
Koreksi Ekuitas Gedung dan Bangunan	32.109.058.428,00	1.912.016.277,41
Koreksi Ekuitas Jalan, Jaringan, dan Irigasi	115.055.000,00	(78.661.983,06)
Koreksi Ekuitas Aset Tetap Lainnya	25.043.500,00	36.999.999,86
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(13.652.153.461,01)	(61.655.396.272,39)
Koreksi Ekuitas Aset Tidak Berwujud	(49.300.000,00)	0,00
Koreksi Ekuitas Aset Lain-lain	(39.012.000,18)	2.292.162.120,54

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.395.162.237,00)	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	127.035.493,03	(2.521.125.380,50)
Koreksi Ekuitas Properti Investasi	4.393.392.000,00	0,00
Koreksi Ekuitas Pendapatan Diterima Dimuka	2.228.337,87	(1.113.944.891,03)
Koreksi Ekuitas Utang Belanja	270.877.931,54	12.052.674.042,69
Koreksi Ekuitas Utang Pihak Ketiga (PFK)	0,00	(200.000,00)
Jumlah	**(26.285.490.954,63)**	**(12.339.108.151,79)**

Komposisi dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar TA 2025 digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut:

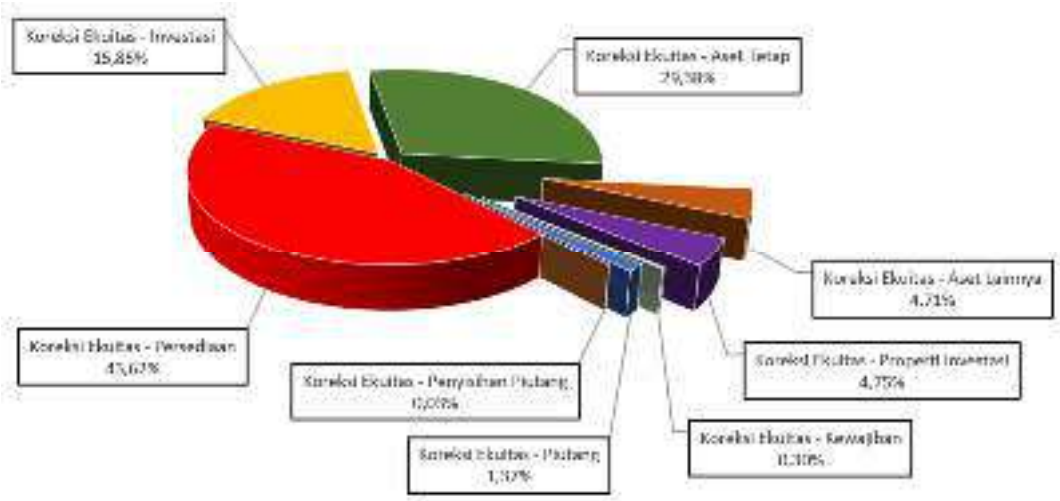

Gambar 5.17 Komposisi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2025

Komposisi dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar TA 2025 didominasi oleh Koreksi Ekuitas–Persediaan sebesar 43,62%, yang menunjukkan bahwa penyesuaian terbesar berasal dari pencatatan persediaan. Selanjutnya, Koreksi Ekuitas–Aset Tetap memberikan kontribusi sebesar 29,38%, sedangkan Koreksi Ekuitas–Investasi sebesar 15,85%. Adapun komponen lainnya terdiri atas Koreksi Ekuitas–Properti Investasi sebesar 4,75%, Aset Lainnya sebesar 4,71%, Piutang sebesar 1,37%, Kewajiban sebesar 0,30%, dan Penyisihan Piutang sebesar 0,03%. Dengan demikian, koreksi pada kelompok persediaan, aset tetap, dan investasi menjadi faktor utama yang mempengaruhi dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dalam LKPD Provinsi Bali Tahun 2025.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Tabel 5.6.4.1 Rincian Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Ekuitas Akhir	**21.661.652.244.062,81**	**17.602.612.654.466,05**

Saldo tersebut di atas merupakan saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2025 dan 2024. Saldo Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji pada Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana dijelaskan pada catatan atas Neraca pada ***poin 5.2.3.***

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NONKEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1. Daftar Pengembangan, Inovasi dan Interoperabilitas Layanan Digital di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Periode 2020 s.d. 2025

1. Sistem *Monitoring* Kemiskinan dan *Stunting* (SiGenting)

Deskripsi :

Dashboard Kemiskinan dan *Stunting* adalah aplikasi inovatif yang dirancang untuk memonitor data kemiskinan dan *stunting* dengan cara yang terstruktur dan informatif. Aplikasi ini mengumpulkan informasi data agregat dan data detail mengenai *stunting* yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan. Selain itu, aplikasi ini juga terintegrasi dengan data keluarga berisiko yang dikelola oleh BKKBN. Data tersebut kemudian ditampilkan secara visual dalam sebuah *dashboard monitoring* yang dapat diakses oleh pimpinan.

Melalui *Dashboard Stunting*, pimpinan dapat melihat gambaran menyeluruh mengenai masalah *stunting* di wilayah yang terkait. Data-data *stunting* yang terkumpul mencakup berbagai aspek, seperti jumlah anak yang teridentifikasi sebagai *stunting*, distribusi geografis, karakteristik keluarga berisiko, dan faktor-faktor risiko yang terkait. Informasi ini membantu pimpinan dalam memahami skala dan lingkup masalah *stunting* yang perlu ditangani.

Dashboard Stunting menjadi alat yang sangat berharga dalam membantu pimpinan dalam mengelola program-program kesehatan terkait *stunting*. Dengan informasi yang terstruktur dan terintegrasi, pimpinan dapat melihat gambaran komprehensif, menganalisis data dengan lebih baik, dan mengambil keputusan yang didukung oleh fakta. Hal ini berpotensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya pencegahan *stunting*, serta mengarahkan sumber daya yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

Akses :

- Website : https://sigenting.baliprov.go.id
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :

https://pse.layanan.go.id/sealid/1988

2. Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis (SIGAPURA)

Deskripsi :

SiGapura merupakan sebuah aplikasi yang didesain untuk mempermudah dan mempercepat penyajian informasi terkait harga dan neraca pangan dalam rangka pengendalian inflasi di Provinsi Bali, termasuk kabupaten/kota di dalamnya. Aplikasi ini memiliki fitur peng-*input*-an data harian dan mingguan yang terkait dengan harga pangan utama strategis dan neraca pangan.

Aplikasi SiGapura Provinsi Bali menyediakan informasi yang lengkap dan akurat tentang harga pangan utama strategis, yang berasal dari berbagai pasar tradisional dan modern di seluruh kecamatan, kabupaten, dan kota di Bali. Dengan demikian, pengguna aplikasi dapat dengan mudah memperoleh informasi terkini tentang harga bahan makanan yang strategis dan penting dalam kegiatan sehari-hari.

Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan informasi neraca pangan yang memberikan gambaran tentang kebutuhan dan ketersediaan pangan di setiap kabupaten dan kota. Informasi ini penting untuk memonitor dan mengendalikan pasokan pangan dalam upaya menjaga stabilitas harga dan mencegah kelangkaan pangan di wilayah Provinsi Bali.

Dengan kehadiran aplikasi SiGapura Provinsi Bali, para pengguna, termasuk masyarakat umum, petani, pedagang, dan pihak berkepentingan lainnya, dapat mengakses informasi harga pangan dan neraca pangan dengan cepat dan efisien. Hal ini akan membantu mereka dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian inflasi, serta memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi di seluruh wilayah Provinsi Bali.

Akses :

- Website : https://sigapura.baliprov.go.id
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/777

3. Sistem Perizinan Elektronik (PRESTISE)

Deskripsi :

Aplikasi "Prestise" merupakan solusi inovatif yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali. Dengan menggunakan Prestise, proses pengajuan izin dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui *platform online*. Keunggulan mengurus perizinan menggunakan layanan Prestise ini mencakup beberapa fitur unggulan, antara lain:

- Pengajuan Permohonan Izin Secara *Online* : Masyarakat dapat mengajukan permohonan izin dengan mudah melalui aplikasi ini. Tidak perlu lagi mengurus izin secara konvensional yang memakan waktu dan tenaga.
- Pemantauan Proses Izin Secara *Realtime* : Dengan Prestise, masyarakat dapat memantau proses pengajuan izin secara *realtime*. Mereka akan mendapatkan informasi terkini tentang status dan perkembangan izin yang diajukan.
- Verifikasi Berkas oleh Petugas Secara *Online:* Proses verifikasi berkas dilakukan secara *online* oleh petugas yang berwenang. Hal ini mempercepat proses izin dan menghindari kebingungan atau keterlambatan yang mungkin terjadi.
- Fitur Notifikasi Proses Izin Melalui Email : Prestise juga menyediakan fitur notifikasi melalui email. Masyarakat akan menerima pemberitahuan mengenai perkembangan izin mereka, sehingga mereka tetap terinformasi dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan.
- Izin Terbit Secara Online Menggunakan Tanda Tangan Elektronik: Izin yang diterbitkan melalui Prestise memiliki keabsahan resmi dan telah ditandatangani secara elektronik. Dengan fitur ini, masyarakat tidak perlu datang ke DPMPTSP Provinsi Bali hanya untuk mengambil izin yang sudah terbit. Kolaborasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) memastikan validitas dan keaslian dokumen elektronik dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Dengan adanya aplikasi Prestise, masyarakat Provinsi Bali dapat mengajukan izin dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Proses pengurusan izin yang transparan dan terintegrasi secara *online* memberikan kenyamanan dan kepraktisan bagi masyarakat. Inovasi ini juga menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempermudah akses masyarakat terhadap izin-izin yang diperlukan.

Akses :

- Website : https://prestise.baliprov.go.id
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/663

4. Website Pusat Investasi Kerthi Bali Sedhana (PIKBS)

Deskripsi :

Website Pusat Investasi Kerthi Bali Sedhana merupakan sebuah sistem untuk mendata dan mempublikasi terkait dengan data potensial proyek, data potensial asset, data UMKM, Data Desa Wisata, Data Pariwisata Bali, Data Realisasi Investasi, Data Peraturan Investasi dan Berika serta Event Terkait dengan Investasi di Bali. Website Pusat Investasi Kerthi Bali Sedhana berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali untuk mewujudkan data yang berkualitas.

Akses :

- Website : https://invest.baliprov.go.id
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/1625

5. Sistem Informasi, Pendataan dan Penyelenggaraan Pungutan Bagi Wisatawan Asing (LOVE BALI)

Deskripsi :

Love Bali merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan wisatawan mancanegara dalam melakukan pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing dengan cepat dan efisien, dengan dukungan berbagai metode pembayaran yang memungkinkan pembayaran dalam mata uang asing. Love Bali terdiri dari aplikasi Love Bali berbasis *Website*, Love Bali Mobile (Android & iOS), Love Bali Endpoint berbasis *Website*, serta *Dashboard* admin.

Melalui Love Bali, wisatawan asing dapat memberikan kontribusi mereka dalam menjaga keberlangsungan dan kemajuan pariwisata Bali. Aplikasi ini juga menyediakan berbagai informasi terkait destinasi wisata (DTW), *event* terbaru, serta berita dan artikel seputar alam dan budaya Bali. Sistem ini juga memberikan informasi yang relevan mengenai kepariwisataan di Bali. Dengan Love Bali, wisatawan dapat dengan mudah menjelajahi dan memahami keindahan dan keunikan Bali, serta berkontribusi dalam melestarikan dan mempromosikan destinasi wisata di pulau Bali.

Sepanjang tahun 2025, Sistem Love Bali terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat ekosistem digital pariwisata Bali. Pengembangan ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan keakuratan data wisatawan, memperluas kanal pembayaran, memperkaya informasi publik, serta memberikan pengalaman digital yang lebih interaktif. Berikut penjelasan dari sejumlah fitur yang dikembangkan pada tahun 2025:

a) Pemisahan *Field Full Name*
   Field Full Name kini dipisah menjadi *First/Given Names* dan *Last Name (Surname)* untuk mengikuti standar global penulisan nama wisatawan. Langkah ini meminimalkan potensi kesalahan urutan nama, terutama pada wisatawan mancanegara dengan format nama berbeda.
b) *Country Code* (Kode Kewarganegaraan)
   Penambahan *Country Code* berfungsi sebagai parameter unik dalam membedakan wisatawan antarnegara. Fitur ini penting karena nomor paspor antarnegara bisa sama, sehingga kombinasi passport number dan country code menghasilkan identitas wisatawan yang lebih akurat.
c) *Section Money Changer*
   Menyediakan informasi resmi mengenai *authorized money changer* di Bali. Fitur ini membantu wisatawan menemukan tempat penukaran valuta asing yang terpercaya dan terverifikasi.
d) Love Bali *Partner Platform*
   Sebuah platform integrasi bagi perusahaan atau pihak ketiga yang ingin bekerja sama dengan Love Bali. Melalui platform ini, mitra dapat menghubungkan sistem mereka untuk kebutuhan pembayaran PWA, pengecekan *Levy Voucher*, atau distribusi *voucher* dan promo khusus bagi wisatawan.
e) Mekanisme *Auto Void*
   Mencegah terjadinya double payment atau pembayaran ganda oleh wisatawan asing. Sistem akan otomatis membatalkan transaksi jika ditemukan indikasi duplikasi.
f) *Virtual Destination Tour 360*
   Menyajikan tampilan interaktif lokasi wisata di Bali menggunakan teknologi AR/VR 360°. Fitur ini memberikan gambaran visual yang menarik bagi wisatawan sebelum berkunjung langsung.
g) *New Engine Levy Voucher Generator*
   Pengembangan *engine* baru untuk mempercepat dan menstabilkan proses pembuatan *Levy Voucher*. Dengan optimasi ini, kinerja sistem menjadi lebih efisien dan handal terutama saat volume transaksi tinggi.
h) Penambahan *Channel* Pembayaran *UnionPay*

Memperluas metode pembayaran resmi dengan dukungan kartu *UnionPay,* memudahkan wisatawan dari Tiongkok dan negara lain dengan jaringan *UnionPay.*

i) Integrasi dengan *Collecting Agent PayChat*
Menyediakan alternatif pembayaran PWA melalui *WhatsApp chat* lewat agen kolektor *PayChat.* Inovasi ini menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih mudah dan familiar bagi wisatawan.

j) Fitur *Verify Levy Voucher*
Digunakan untuk memverifikasi keaslian *Levy Voucher* milik wisatawan. Fitur ini memastikan voucher yang digunakan benar-benar resmi dan dikeluarkan dari sistem Love Bali.

k) Fitur *Resend Levy Voucher*
Memungkinkan sistem mengirim ulang *Levy Voucher* ke email wisatawan, berguna bila terdapat kesalahan dalam pengisian alamat email saat pendaftaran.

l) Fitur *Login* dan Riwayat *Voucher*
Menyediakan akses bagi wisatawan untuk masuk *(login)* dan melihat riwayat *Levy Voucher* yang sudah pernah dibeli atau digunakan sebelumnya.

m) Perjanjian Kerja Sama Elektronik oleh *Endpoint*
Memfasilitasi proses penandatanganan dan pengelolaan perjanjian kerja sama secara digital oleh *Endpoint,* mempercepat proses administrasi tanpa perlu dokumen fisik.

n) Pembayaran Imbal Jasa kepada *Endpoint* dan Mitra Manfaat
Menyediakan mekanisme sistematis dan transparan untuk pembayaran imbal jasa kepada para *Endpoint* dan Mitra Manfaat yang berkontribusi dalam ekosistem Love Bali.

Akses :

- Website : https://lovebali.baliprov.go.id
- Play Store : https://balikom.info/lovebali-playstore
- App Store : https://balikom.info/lovebali-appstore

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/608

6. Sistem Keuangan Desa Adat (SIKUAT)

Deskripsi :

Sistem Keuangan Desa Adat (SIKUAT) adalah sebuah sistem tata kelola keuangan yang diterapkan di Desa Adat, yang mencakup pengelolaan alokasi keuangan dari pemerintah Provinsi Bali, pendapatan asli Desa Adat, serta sumber pendapatan lain yang sah. SIKUAT dirancang untuk mengelola dan mengawasi keuangan Desa Adat dengan efektif dan transparan.

Salah satu komponen utama dari SIKUAT adalah manajemen perencanaan anggaran tahunan. Setiap tahun, rancangan anggaran disusun terlebih dahulu oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (Dinas PMA). Rancangan tersebut mencakup alokasi dana yang akan digunakan untuk berbagai program dan kegiatan di Desa Adat.

Selanjutnya, rancangan anggaran dan belanja diajukan sesuai dengan penetapan dari Dinas PMA. Setelah persetujuan, pencatatan realisasi keuangan dilakukan dengan seksama. Hal ini mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta pembukuan yang akurat dan terperinci.

SIKUAT juga melibatkan proses rekapitulasi dan pelaporan keuangan secara berkala. Laporan keuangan yang dihasilkan akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan Desa Adat, termasuk penerimaan, pengeluaran, dan saldo yang tersedia. Laporan tersebut juga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja keuangan dan sebagai alat pemantauan bagi pihak terkait.

Dengan adanya Sistem Keuangan Desa Adat (SIKUAT), diharapkan pengelolaan keuangan di Desa Adat menjadi lebih teratur dan akuntabel. SIKUAT memastikan bahwa alokasi keuangan yang diterima digunakan dengan tepat sasaran dan diarahkan untuk memajukan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Desa Adat. Dengan manajemen keuangan yang baik, Desa Adat dapat mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan bersama dan pemeliharaan nilai-nilai budaya yang kaya.

Akses :

- Website : https://sikuat.baliprov.go.id
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/775

7. Kantor Virtual

Deskripsi :

Merupakan sebuah sistem yang memungkinkan seluruh pegawai, baik ASN maupun non-ASN, untuk melakukan berbagai aktivitas terkait surat-menyurat dan tugas melalui platform digital. Dalam sistem ini, pegawai dapat mengajukan draf surat kepada pimpinan, menerima disposisi dari pimpinan, melaporkan penugasan, serta mengakses agenda elektronik pegawai dan Unit PD. Sistem juga terintegrasi dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang digunakan oleh seluruh pimpinan Perangkat Daerah, Ka. UPTD, dan Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB Negeri di seluruh Bali. Dengan *tagline* "Pasti Bisa Kerja", Kantor Virtual memperluas cakupan *e-office* ke seluruh pegawai, dari tingkat staf hingga pimpinan, dan memungkinkan mereka untuk bekerja secara sistematis, fleksibel, dan kapan saja, dimanapun mereka berada.

Akses :

- Website : https://kanal.baliprov.go.id
- Play Store : https://balikom.info/kanal-playstore
- App Store : https://balikom.info/kanal-appstore

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/2058

8. Kantor Virtual Publik

Deskripsi :

Masyarakat umum dan instansi publik di luar Pemerintah Provinsi Bali kini dapat melakukan korespondensi dan memantau status surat secara *online* kepada Pemerintah Provinsi Bali. Dengan adanya sistem ini, tidak perlu lagi mengirimkan surat fisik atau menghubungi langsung Kantor Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk menanyakan status surat.

Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengajukan surat secara elektronik dan melacak prosesnya secara *realtime*. Pengguna dapat mengisi formulir elektronik, mengunggah dokumen pendukung, dan mengirimkannya melalui *platform* yang disediakan. Selain itu, pengguna juga dapat melihat status surat mereka, mulai dari proses verifikasi hingga persetujuan akhir.

Dengan adanya sistem ini, interaksi antara masyarakat umum/instansi publik dengan Pemerintah Provinsi Bali menjadi lebih efisien dan transparan. Surat-surat dapat diproses dengan cepat dan secara *online*, menghemat waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengirimkan surat secara fisik.

Akses :

- Website : https://kanal.baliprov.go.id
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/2058

9. Sistem Layanan Kepegawaian (SIMPEG)

Deskripsi :

Merupakan sistem informasi kepegawaian yang dirancang untuk melakukan pendataan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Sistem ini merupakan satu kesatuan yang mencakup pengumpulan dan pengelolaan dokumen elektronik pegawai, seperti data pribadi, riwayat pekerjaan, pelatihan, kinerja, dan lainnya. Melalui SIMPEG, proses pendataan pegawai

menjadi lebih efisien dan terstruktur, memungkinkan instansi pemerintah untuk mengakses informasi pegawai dengan mudah dan akurat. Dengan adanya SIMPEG, diharapkan dapat tercipta pengelolaan kepegawaian yang lebih terintegrasi, transparan, dan efektif dalam mendukung kebutuhan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia di Pemerintah Provinsi Bali.

Akses :
- Website : https://simpeg.baliprov.go.id
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/771

10. Sistem Absensi berbasis Pengenalan Wajah dan Lokasi

Deskripsi :

Sistem Absensi adalah sebuah platform yang memungkinkan pegawai, termasuk ASN dan Non-ASN di lingkungan Provinsi Bali, untuk melakukan absensi berdasarkan jadwal dinamis yang telah ditentukan. Sistem ini menggunakan teknologi pengenalan wajah dan juga memungkinkan penentuan radius lokasi khusus untuk setiap pegawai. Selain itu, sistem absensi ini dilengkapi dengan fitur popup yang dapat menampilkan pengumuman penting atau informasi lainnya saat aplikasi dibuka. Dengan menggunakan sistem absensi ini, pegawai dapat secara efisien mencatat kehadiran mereka dan memperoleh informasi terkait dengan mudah.

Akses :
- Website : https://hadir-app.baliprov.go.id
- Play Store : https://balikom.info/hadir-playstore
- App Store : https://balikom.info/hadir-appstore

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/776

11. Sistem Informasi Kinerja Pegawai Online (SIKEPO)

Deskripsi :

SIKEPO (Sistem Informasi Kinerja Pegawai Online) adalah sebuah sistem yang memungkinkan peng-*input*-an dan pemantauan capaian kinerja pegawai secara *online* setiap bulannya. Sistem ini juga menjadi dasar perhitungan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Dengan menggunakan SIKEPO, proses pengukuran dan evaluasi kinerja pegawai menjadi lebih efisien dan transparan, serta memudahkan dalam penghitungan TPP sesuai dengan capaian kinerja yang dicapai.

Akses :
- Website : https://sikepo.baliprov.go.id
- Play Store : -
- App Strore : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -

12. Sistem Antrean Layanan Publik

Deskripsi :

Dalam rangka memenuhi ketentuan PERDA No 6 Tahun 2020 mengenai Penyelenggaraan Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sejahtera (SIK-KBS), Pemerintah Provinsi Bali telah mengembangkan SIK-KBS sebagai sistem informasi yang memberikan akses mudah bagi Krama Bali dan Faskes (Fasilitas Kesehatan) untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. SIK-KBS memberikan informasi mengenai lokasi Faskes, fasilitas dan pelayanan yang tersedia di Faskes, pendaftaran pasien, ketersediaan tempat tidur rawat inap di Faskes, serta riwayat kesehatan Krama Bali. SIK-KBS merupakan Misi Ketiga dari Gubernur Bali dalam percepatan pengembangan sistem pelayanan kesehatan terintegrasi berbasis aplikasi di seluruh Bali.

Untuk mendukung fitur pendaftaran *online* pada setiap Faskes di Bali dan memenuhi kebutuhan SIK-KBS, pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Bali telah merancang dan membangun aplikasi antrean. Aplikasi antrean ini telah terintegrasi dengan sistem BPJS untuk mencari data pasien BPJS, serta terhubung dengan riwayat kesehatan individu pada sistem Mobile JKN BPJS Kesehatan. Saat ini, Aplikasi antrean yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali telah digunakan di Faskes di 9 Kabupaten/Kota di seluruh Bali.

Akses :

- Website : https://antrean.baliprov.go.id/
- Play Store : https://balikom.info/antrean-playstore
- App Store : https://balikom.info/antrean-appstore

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/770

13. Bali Media Centre (BMC) : Portal Berita, Survei, Konsultasi/HelpDesk, Kontak dan Informasi Publik lainnya

Deskripsi :

BMC (Bali Media Center) adalah aplikasi resmi yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Tujuan utama BMC adalah menyediakan akses berita yang terpercaya serta berfungsi sebagai *helpdesk* atau media konsultasi bagi pengguna layanan dan masyarakat umum. Dengan menggunakan BMC, pengguna dapat menyampaikan pengaduan mereka dengan mudah dan efisien.

Salah satu fitur yang tersedia di aplikasi BMC adalah kemampuan untuk melakukan *survey*. Fitur ini memfasilitasi pelaksanaan *survey* yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali secara mandiri, tanpa perlu menggunakan aplikasi pihak ketiga. Dengan adanya fitur ini, pemerintah dapat mengumpulkan data dan umpan balik dari masyarakat dengan lebih efektif dan efisien, serta melakukan analisis data yang lebih terperinci.

BMC memberikan kemudahan akses kepada pengguna dengan antarmuka yang intuitif dan navigasi yang mudah dipahami. Selain itu, BMC juga menyediakan berita terkini yang berkaitan dengan pemerintahan dan perkembangan di Provinsi Bali. Dengan adanya BMC, pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan aplikasi BMC, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dalam hal komunikasi dengan pemerintah, pelaporan pengaduan, serta berpartisipasi dalam *survey* yang penting bagi pembangunan di Provinsi Bali. Dengan terus mengembangkan aplikasi ini, Pemerintah Provinsi Bali berharap dapat memperkuat hubungan dengan masyarakat, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan mendukung kemajuan dan transparansi pemerintahan.

Akses :

- Website : https://bmc.baliprov.go.id/
- Play Store : https://balikom.info/bmc-playstore
- App Store : https://balikom.info/bmc-appstore

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -

14. Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER)

Deskripsi :

SISNAKER PROVINSI BALI merupakan Layanan Ketenagakerjaan yang diampu oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, dimana terdapat beberapa layanan ketenagakerjaan yaitu :

1. Layanan Pendataan PMI Krama Bali : Layanan yang digunakan untuk melakukan pendataan sekaligus sebagai upaya perlindungan terhadap PMI (Pekerja Migran Indonesia) Krama Bali oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.

2. Layanan Rekomendasi Pemagangan Luar Negeri (SiKomang Luri) adalah Layanan yang digunakan untuk pembuatan Rekomendasi Pemagangan Ke Luar Negeri dan Perpanjangan Rekomendasi Pemagangan Luar Negeri yang diajukan oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS). Rekomendasi Pemagangan ke Luar Negeri ini digunakan sebagai salah satu syarat Lembaga Pelatihan Kerja untuk bisa mendapatkan izin penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia agar dapat menyalurkan siswa magang ke luar negeri. Layanan Rekomendasi Pemagangan Luar Negeri, tidak hanya sebatas layanan untuk permohonan rekomendasi baru dan atau perpanjangan rekomendasi pemagangan luar negeri untuk LPKS, akan tetapi output dari Layanan ini juga diharapkan mampu memberikan informasi LPKS yang memiliki izin untuk melaksanakan magang di luar negeri, sehingga dapat mengurangi kasus penipuan oknum LPKS yang menjanjikan dapat memberangkatkan siswa/peserta didik untuk magang ke luar negeri tetapi tidak kunjung diberangkatkan karena oknum LPKS tersebut bodong tidak memiliki izin.
3. Layanan Pendaftaran Diklat : Layanan yang digunakan untuk memberikan informasi ketersediaan Pelatihan Kerja, dan pendaftaraan serta seleksi calon peserta diklat secara online. Pada Layanan ini, masyarakat umum dapat melihat pelatihan kerja/diklat yang tersedia, serta semua tahapan seleksi baik dari tahapan seleksi Administrasi, Seleksi Pengetahuan Dasar by CAT, dan Seleksi Wawancara dilakukan secara online.

Akses :

- Website : https://sisnaker.baliprov.go.id
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/662

15. Sistem Pelayanan Perikanan (SIMPELKAN)

Deskripsi :

Pengembangan sistem pelayanan publik digital tentu memberikan banyak manfaat bagi pemerintah dan masyarakat perikanan pada khususnya. Keuntungan bagi pemerintah diantaranya adalah efisiensi biaya, waktu, dan tenaga. Pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, transparan dan akuntabel. Produktivitas pekerja juga akan meningkat. Pelayanan publik digital juga menjadi media promosi pemerintah yang tepat terutama untuk mensosialisasikan kinerja dan program pemerintah. Kepuasan masyarakat yang meningkat atas kinerja pelayanan publik yang lebih baik akan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Bagi masyarakat perikanan, pelayanan publik digital akan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Dalam pengaplikasiannya, pelayanan publik digital akan melahirkan mekanisme layanan dengan kemudahan proses dan ketelusuran. Jangkauan pengguna juga akan semakin besar. Proses transaksi atau pengurusan akan berjalan lebih cepat, dapat diakses dari mana saja dengan tingkat kesalahan yang lebih kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan beralih ke sistem pelayanan berbasis digital maka seluruh rangkaian proses pelayanan publik akan berjalan dengan lebih lancar.

Sistem layanan SIMPELKAN ini meliputi 6 ruang lingkup layanan, diantaranya layanan pengurusan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP), Surat Tanda Keterangan Andon (STKA), Surat Keterangan Asal (SKA) Produk Kelautan dan Perikanan, Layanan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Penerbitan Sertifikat Kesesuaian SNI Produk Perikanan dan Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI pada Produk Perikanan. Dalam sistem yang diusulkan, akan ada 3 (tiga) entitas yang saling berhubungan, diantaranya Pemohon/*End User*, Administrator dan *Approver*. Pemohon akan diberikan fasilitas informasi layanan dan penelusuran untuk memudahkan dalam memantau permohonan. Baik Administrator maupun *Approver* akan juga diberikan *single access* untuk melakukan verifikasi permohonan dan memberikan persetujuan.

Akses :

- Website : https://simpelkan.baliprov.go.id
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/773

16. Layanan Bali Digital Festival

Deskripsi :

Layanan *Website* Bali Digital Festival telah dirancang sebagai *platform* yang menyediakan informasi lengkap seputar penyelenggaraan Bali Digital Festival. Melalui *website* ini, pengunjung dapat menemukan informasi umum, jadwal kegiatan, daftar acara, profil pembicara, serta informasi terkait lomba dan hal-hal lainnya yang terkait dengan festival ini.

Selain sebagai sumber informasi, *website* ini juga menyediakan fasilitas pendaftaran untuk peserta lomba/kompetisi, pameran, serta *tenant* kuliner. Khusus untuk acara *pre-event* di tahun 2023, terdapat pendaftaran khusus untuk *campus roadshow*. Semua proses pendaftaran dan seleksi peserta Bali Digital Festival dapat dilakukan melalui fitur yang terintegrasi dalam menu admin.

Dengan adanya fitur kurasi dalam menu admin, semua kebutuhan terkait informasi, registrasi, dan seleksi peserta dapat dilakukan secara efisien dan terpusat dalam satu layanan. Hal ini memberikan kemudahan bagi panitia dalam mengelola peserta dan memastikan proses festival berjalan dengan lancar.

Website Bali Digital Festival hadir sebagai sarana komunikasi yang efektif antara panitia dan peserta, serta untuk memperluas jangkauan festival ini kepada masyarakat luas. Dengan desain yang *user-friendly* dan informasi yang lengkap, *website* ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman *online* yang memudahkan, menyenangkan, dan memfasilitasi partisipasi aktif dalam Bali Digital Festival.

Akses :

- Website : https://digifest.baliprov.go.id
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/2218

17. Sistem Penyelenggaraan Event (EVENTID) : Registrasi, Absensi, Piagam Elektronik

Deskripsi :

EventID adalah layanan inovatif yang memudahkan pengguna dalam mengatur dan mengelola berbagai acara atau *event*. Dengan fitur-fitur yang lengkap dan *user-friendly*, sistem ini menyediakan solusi yang efisien dalam merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan acara dengan lancar.

Salah satu fitur utama dalam sistem ini adalah untuk membuat *event* atau acara dengan mudah serta fitur manajemen *event*. Pengguna dapat dengan cepat membuat deskripsi acara, menentukan tanggal, waktu, dan lokasi, serta menyertakan informasi detail seperti jadwal kegiatan. Dengan antarmuka yang intuitif, pengguna dapat dengan cepat memasukkan semua detail yang diperlukan untuk acara mereka.

Sistem Pengelolaan Event juga menyediakan fitur registrasi peserta acara yang mudah digunakan. Peserta dapat mendaftar secara *online* dan mengisi formulir pendaftaran. Informasi peserta dapat dengan mudah diakses dan dikelola oleh panitia melalui sistem ini.

Selain itu, sistem ini juga mencakup fitur untuk mengisi daftar hadir dengan mudah. Panitia acara dapat menggunakan sistem ini untuk mencatat kehadiran peserta secara digital, menghemat waktu dan usaha yang diperlukan dalam proses administrasi.

Terakhir, sistem pengelolaan *event* ini juga menawarkan fitur sertifikat elektronik. Setelah acara selesai, peserta yang memenuhi syarat dapat secara otomatis menerima sertifikat elektronik yang dihasilkan melalui sistem. Hal ini memberikan kepraktisan dan efisiensi dalam proses penerbitan sertifikat.

Dengan layanan "EventID", pengguna dapat merencanakan, mengelola, dan melaksanakan acara dengan lebih terstruktur dan efisien. Fitur-fitur yang ada mempermudah proses pengorganisasian acara, mulai dari pembuatan *event*, manajemen acara, registrasi peserta, hingga pengelolaan daftar hadir dan sertifikat elektronik. Dengan platform ini, pengguna dapat fokus pada pengalaman yang tak terlupakan bagi peserta acara mereka.

Akses :

- Website : https://undangan.baliprov.go.id
- Play Store : https://balikom.info/undangan-playstore
- App Store : https://balikom.info/undangan-appstore

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/2217

18. *Virtual Reality* (VR) Pura Pulaki

Deskripsi :

Merupakan sebuah aplikasi *virtual reality* yang memberikan pengalaman unik dalam mengunjungi Pura Pulaki di Bali. Dengan menggunakan teknologi 3 dimensi, pengguna dapat menjelajahi dan mengunjungi Pura Pulaki secara virtual. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk merasakan suasana dan keindahan Pura Pulaki dengan detail yang mendalam, seperti melihat arsitektur dan ornamen-ornamen pura secara nyata, mendengar suara-suara lingkungan sekitar, dan bahkan berinteraksi dengan lingkungan virtual tersebut. VR Pulaki menghadirkan sensasi baru dalam menjelajahi dan menghargai keindahan Pura Pulaki, serta memberikan alternatif bagi mereka yang tidak dapat mengunjungi tempat tersebut secara fisik.

Akses :

- Website : https://var.baliprov.go.id/
- Oculus Store : https://www.meta.com/experiences/pura-pulaki/8520498937982721/

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/2211

19. *Virtual Reality* (VR) Gamelan Tradisional Rindik, Kecek, dll

Deskripsi :

Merupakan sebuah aplikasi yang memberikan pengalaman baru dalam bermain Gamelan Bali Khususnya Rindik Bali, Kecek dan beberapa gamelan lainnya dalam bentuk tiga dimensi. Dengan menggunakan teknologi *virtual reality*, pengguna dapat merasakan sensasi bermain alat musik tradisional secara virtual. Aplikasi ini menghadirkan lingkungan virtual yang menampilkan gambar dan suara yang realistis, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan instrumen Rindik dan gamelan lainnya, mengatur irama dan nada, serta mengeksplorasi variasi bunyi yang dihasilkan. Aplikasi ini memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk merasakan keindahan musik Rindik Bali serta gamelan lainnya secara mendalam, bahkan jika mereka tidak memiliki akses langsung ke instrumen fisiknya.

Akses :

- Website : https://var.baliprov.go.id/
- Oculus Store : https://www.meta.com/experiences/pcvr/5882878995056622/

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/2211

20. *Virtual Reality* (VR) Nyomia Bhutakala

Deskripsi :

Merupakan sebuah *game* VR yang menggabungkan konsep *beat* dan budaya Bali. Dalam *game* ini, pemain akan memasuki dunia virtual yang dipenuhi dengan Bhutakala dan elemen budaya Bali lainnya. Tujuan utama *game* ini adalah untuk mengendalikan bhutakala, entitas spiritual dalam kepercayaan Bali, yang terdapat dalam diri pemain. Pemain akan menggunakan *kontroler* VR sebagai senjata untuk "Nyomia Bhutakala" dan melawan kekuatan jahat yang mewakili bhutakala. Setiap gerakan dan serangan harus dilakukan dengan tepat

mengikuti irama musik yang dimainkan, sehingga menguji ketepatan dan keterampilan pemain dalam mengikuti *beat*. Dengan konsep yang unik dan pengalaman virtual yang mendalam, VR Nyomia Bhutakala memberikan sensasi bermain yang menghibur sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Bali kepada pemain.

Akses :
- Website : https://var.baliprov.go.id/
- Oculus Store : https://www.meta.com/experiences/pcvr/5882878995056622/

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/2211

21. *Virtual Tour 360 Experience*

Deskripsi :

Website pameran 360 yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebuah platform interaktif yang memungkinkan pengunjung untuk menjelajahi keindahan dan keberagaman Bali dalam tampilan 360 derajat. Dengan menggabungkan teknologi fotografi panorama dan pengalaman virtual *reality*, *website* ini menawarkan pengalaman mendalam bagi pengguna untuk menjelajahi pameran penuh warna yang mencakup keajaiban alam, budaya, seni, dan kehidupan sehari-hari di Bali.

Dari pantai pasir putih yang indah hingga pura-pura yang megah, *website* ini menghadirkan pandangan menyeluruh tentang kekayaan dan pesona pulau ini kepada pengunjung dari seluruh dunia. Dengan navigasi yang intuitif dan antarmuka yang menarik, pengunjung dapat dengan mudah menjelajahi berbagai pameran, memperbesar gambar, dan merasakan sensasi berada di tempat-tempat tersebut. *Website* pameran 360 Pemerintah Provinsi Bali adalah jendela digital yang menakjubkan ke dalam keindahan dan keajaiban Bali, memperluas daya tarik pulau ini melalui pengalaman *online* yang menarik dan *imersif*.

Akses :
- Website : https://virtualtour360.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/2199

22. *Augmented Reality* (AR) Daerah Tujuan Wisata

Deskripsi :

AR DTW merupakan aplikasi berbasis *Augmented Reality* yang dapat menampilkan informasi seputar DTW yang ada di Bali. Selain itu juga dapat menampilkan *event-event* penting di Bali, seperti festival, konser, atau acara budaya lainnya. Dengan menggunakan teknologi AR, pengguna dapat melihat informasi lengkap seputar daerah tujuan wisata tersebut, termasuk penjelasan/deskripsi, jadwal dan lokasi.

Akses :
- Website : https://var.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/2211

23. *Augmented Reality* (AR) Instagram Filter Bali Era Baru

Deskripsi :

Merupakan kumpulan filter Instagram yang terintegrasi dengan mengangkat tema kebudayaan Bali dan program pembangunan pemerintah yang sedang berlangsung. AR ini menawarkan pengalaman visual yang unik dan menyenangkan bagi para pengguna media sosial. Setiap filter dalam AR ini memberikan pengguna kesempatan untuk merasakan keindahan dan keunikan budaya Bali secara langsung melalui *platform* Instagram. Setiap filter dirancang dengan cermat untuk mencerminkan nuansa dan estetika Bali yang khas. Pengguna dapat memilih *filter*

yang sesuai dengan preferensi mereka dan dengan mudah mengaplikasikannya pada foto-foto atau video mereka.

Akses :

- Website : https://var.baliprov.go.id/link-tree
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -

24. Portal Satu Data Indonesia Provinsi Bali

Deskripsi :

Portal Satu Data Indonesia (SDI) Provinsi Bali atau Bali Satu Data merupakan layanan tata kelola data di Pemerintah Provinsi Bali yang bertujuan untuk menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses, terintegrasi dan dapat dibagi pakaikan antar Instansi di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Bali. Kebijakan ini tertuang dalam Pergub Bali Nomor 53 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi. Melalui SDI Provinsi Bali, seluruh data Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Bali dapat bermuara di Portal Satu Data Indonesia Provinsi Bali (https://balisatudata.baliprov.go.id). Selanjutnya, terintegrasi ke tingkat Nasional dengan Satu Data Indonesia (https://data.go.id/).

Portal Satu Data Indonesia Provinsi Bali merupakan portal resmi data terbuka Provinsi Bali yang dikelola oleh Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Provinsi Bali dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Melalui Portal Satu Data Indonesia Provinsi Bali, kami berupaya penuh untuk memperbaiki tata kelola data demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendukung pembangunan nasional.

Aplikasi Bali Satu Data ini, kini telah digunakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, selain data yang di-*input* secara manual, data yang disajikan pada Aplikasi Bali Satu Data menggunakan data yang diintegrasikan oleh beberapa Aplikasi yang sudah terintegrasi.

Akses :

- Website : https://balisatudata.baliprov.go.id/
- Play Store : https://balikom.info/balisatudata-playstore
- App Store : https://balikom.info/balisatudata-appstore

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/2057

25. *Smart Dashboard*

Deskripsi :

Merupakan pengembangan dari Sistem Bali Satu Data yang sudah ada sebelumnya yang dirancang khusus untuk para pimpinan di lingkungan Provinsi Bali. Aplikasi ini bertujuan untuk menyediakan satu titik akses terpadu ke semua *dashboard* aplikasi yang ada di Provinsi Bali, serta menyoroti *dashboard* yang terkait dengan isu-isu terkini.

Dengan adanya *Dashboard Monitoring* Pimpinan, para pimpinan di Provinsi Bali dapat dengan mudah mengakses dan menganalisis data dari berbagai sumber melalui satu aplikasi yang terpadu dan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat berdasarkan informasi yang terkini dan akurat.

Akses :

- Website : https://smart.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/2204

26. Sistem Pendataan Data Sektoral Provinsi dan Kabupaten/Kota

Deskripsi :

Merupakan suatu sistem yang dibangun untuk mengakomodir proses pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, dan diseminasi data statistik sektoral beserta metadata indikatornya. Fitur tersebut membantu Walidata untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Pergub Bali No. 53 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.

Data yang dikelola pun sesuai dengan Prinsip SDI, yaitu : memiliki kode referensi, dilengkapi dengan standar data, disertai metadata, dan memenuhi sifat interoperabilitas. Data yang dikelola di sistem ini disajikan dalam tabulasi yang bersifat fleksibel. Beragam jenis format tabel dapat disajikan di dalam sistem sesuai dengan kebutuhan produsen data.

Setiap produsen data memiliki satu orang perwakilan yang menjadi Operator untuk meng-*input* datanya di sistem. Walidata memberikan akses kepada Operator untuk dapat mengakses data yang ada di instansinya.

Sistem ini juga memfasilitasi Walidata untuk memeriksa dan memvalidasi data dan *metadata* yang telah ter-*input* oleh Operator. Selanjutnya data dan metadata yang telah valid di-*publish* ke Portal Bali Satu Data dengan API.

Akses :

- Website : https://datasektoral.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -

27. Sistem Pengelolaan Data (CERAKEN) Kebudayaan Bali

Deskripsi :

Ceraken Kebudayaan Bali adalah sistem pengelolaan dan pangkalan data kebudayaan Bali yang terintegrasi secara digital. Sistem ini bertujuan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang berfokus pada peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya yang ada di Provinsi Bali dengan melakukan inventarisasi, dokumentasi, dan pemutakhiran data kebudayaan Bali, sehingga tercipta pangkalan data yang komprehensif dan terkini mengenai kebudayaan Bali. Dengan adanya Ceraken Kebudayaan Bali, diharapkan dapat mempermudah akses informasi dan pengelolaan kebudayaan Bali, serta mendukung upaya pelestarian dan promosi warisan budaya yang kaya di Provinsi Bali.

Akses :

- Website : https://ceraken.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/772

28. Bali *Knowledge Based System* (INSIGHT)

Deskripsi :

Merupakan sebuah sistem *knowledge based system* yang didesain untuk mempermudah mendapatkan informasi yang saat ini sumber informasi pada aplikasi INSIGHT berasal dari surat dan dokumen pada aplikasi yang sudah berjalan pada lingkungan pemerintahan provinsi bali

Selain menjadi sumber informasi , INSIGHT juga menjadi layanan *cloud storage* untuk pegawai pemerintahan provinsi bali yang dimana setiap *user* akan mendapatkan kapasitas *storage* sebesar 2gb per *user* dan bisa di-*upgrade* nantinya.

Dengan menggunakan *design knowledge based*, ini dapat memudahkan *user* untuk mencari dokumen karena bisa mencari dokumen berdasarkan isi dari dokumen tersebut yang sudah di *extract* dengan teknologi OCR.

Akses :

- Website : https://insight.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -

29. Sistem *Single Sign On* (SSO)

Deskripsi :

SSO (*Single Sign On*) adalah sistem *login* terintegrasi yang menghubungkan berbagai aplikasi yang digunakan di lingkup pemerintah Provinsi Bali menjadi satu login. Dengan SSO, pengguna hanya perlu mengingat satu *login* untuk dapat mengakses semua aplikasi yang sesuai dengan kewenangannya.

Sistem ini memberikan kemudahan dan efisiensi dalam penggunaan aplikasi di lingkup pemerintah Provinsi Bali. Sebelum adanya SSO, pengguna mungkin harus mengingat *login* yang berbeda untuk setiap aplikasi yang digunakan. Namun, dengan SSO, pengguna hanya perlu melakukan *login* sekali dan dapat mengakses semua aplikasi yang terhubung dengan sistem ini.

Selain kemudahan, SSO juga meningkatkan keamanan. Dengan adanya satu login tunggal, pengguna dapat lebih mudah mengelola akses dan izin penggunaan aplikasi. Hal ini membantu mengurangi risiko keamanan seperti kehilangan atau penyalahgunaan informasi *login*.

SSO juga mempercepat proses kerja di lingkup pemerintah Provinsi Bali. Dengan *login* yang cepat dan mudah, pengguna dapat mengakses aplikasi yang dibutuhkan dengan lebih efisien. Hal ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan adanya SSO, Pemerintah Provinsi Bali menciptakan lingkungan kerja yang terintegrasi dan efisien dalam penggunaan aplikasi. Sistem ini merupakan solusi yang inovatif dan memberikan nilai tambah dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aplikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Bali.

Akses :

- Website : https://sso.baliprov.go.id
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/2194

30. Sistem Manajemen Talenta (SIMATA)

Deskripsi :

SIMATA (Sistem Manajemen Talenta) merupakan sebuah sistem yang menjadi landasan dalam pencarian dan pengelolaan talenta di Pemerintah Provinsi Bali. Dalam filosofi SIMATA, sistem ini diibaratkan sebagai "mata" yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melihat kualifikasi, kompetensi, dan kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Bali. Melalui SIMATA, diharapkan dapat mengidentifikasi dan menempatkan talenta-talenta yang potensial pada jabatan strategis, sehingga dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

SIMATA memiliki peran penting dalam proses pencarian dan penempatan talenta di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dengan menggunakan sistem ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat secara efektif dan efisien melihat dan menganalisis profil serta potensi para ASN. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing individu, SIMATA membantu dalam mengidentifikasi talenta-talenta yang memiliki kemampuan dan potensi untuk mengisi posisi-strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Dengan adanya SIMATA, diharapkan terwujudnya sinergi antara kebutuhan organisasi dan potensi individu, sehingga dapat menciptakan struktur organisasi yang kuat dan berkinerja tinggi. Melalui pengelolaan talenta yang baik, Pemerintah Provinsi Bali dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berkontribusi

secara optimal dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang diharapkan. SIMATA menjadi alat yang efektif dalam mengelola talenta-talenta yang ada, sehingga dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan yang berkompeten dan berintegritas tinggi untuk memajukan Pemerintah Provinsi Bali.

Akses :
- Website : https://simata.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -

31. Sistem Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Bali

Deskripsi :

Aplikasi Sistem Manajemen Aset Pemerintahan Provinsi Bali adalah sebuah solusi perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu pemerintahan Provinsi Bali dalam mengelola dan melacak aset-aset yang dimiliki. Aplikasi ini berfungsi sebagai pusat kontrol untuk pengelolaan aset-aset pemerintah, termasuk Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Akses :
- Website : https://aset.baliprov.go.id/
- Play Store : https://balikom.info/aset-playstore
- App Store : https://balikom.info/aset-appstore

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -

32. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Deskripsi :

E-SAKIP (Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan sebuah sistem elektronik yang dirancang khusus untuk membantu instansi pemerintah dalam perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Sistem ini memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Dengan adanya E-SAKIP, diharapkan bahwa instansi pemerintah dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Melalui sistem yang terintegrasi ini, pengguna dapat memantau progres kinerja, mengevaluasi capaian hasil, dan melaporkan kinerja dengan lebih cepat dan tepat waktu.

Secara keseluruhan, E-SAKIP menjadi alat penting dalam mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan mengoptimalkan penggunaan sistem ini, diharapkan instansi pemerintah dapat mengelola kinerja mereka secara lebih efektif dan menyeluruh.

Akses :
- Website : https://esakip.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -

33. Sistem Strategi Penguatan Manajemen Resiko Berkualitas (SUPERMANKUAT)

Deskripsi :

SUPERMANKUAT atau Sistem Strategi Penguatan Penerapan Manajemen Risiko Berkualitas Melalui Aplikasi Terintegrasi adalah sebuah sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dengan tujuan untuk memperkuat penerapan manajemen risiko dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Aplikasi ini mengadopsi kerangka manajemen risiko dan melibatkan tiga lini pertahanan (*three lines of defense*) dalam pengelolaan risiko. Tiga lini pertahanan tersebut meliputi pemilik risiko (*risk owner*), pengawas risiko (*risk overseer*), dan penyedia pemastian independen (*independent assurance provider*). Aplikasi Supermankuat diharapkan dapat memudahkan proses pengelolaan risiko bagi tiga lini pertahanan tersebut.

Akses :

- Website : https://supermankuat.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -

34. Sistem Pemantauan Internal Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (PETIEMAS)

Deskripsi :

PETI EMAS atau Sistem Pemantauan Internal Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat merupakan aplikasi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Pemerintah Provinsi Bali dalam mempermudah melaksanakan pemenuhan dokumen hasil pemeriksaan melalui sistem yang telah dibangun. Aplikasi ini bertujuan memudahkan Perangkat Daerah untuk mengontrol pergerakan dari tindak lanjut atas aduan yang diterima sekaligus mengomentari apakah tindak lanjut yang diberikan sudah sesuai atau belum atau perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya dan meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan.

Akses :

- Website : petiemas.baliprov.go.id
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -

35. Layanan *Smartlink*

Deskripsi :

Layanan Smartlink "balikom.info" yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna untuk memperpendek dan mengelola *link* atau tautan dengan mudah. Selain itu, platform ini juga memungkinkan pembuatan *microsite* atau halaman khusus yang berisi kumpulan *link* terkait.

Dengan menggunakan Smartlink Pemprov Bali, pengguna dapat membuat tautan yang pendek dan mudah diingat, sehingga dapat dengan cepat diakses oleh pengguna lain. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur *generate* QR *code*, yang memungkinkan tautan tersebut dapat diakses melalui pemindaian QR *code* menggunakan perangkat *smartphone* masing-masing pengguna.

Smartlink Pemprov Bali memberikan solusi praktis dalam mengelola tautan dan mempermudah proses berbagi informasi atau promosi melalui platform digital. Dengan fitur-fitur yang lengkap dan kemudahan akses melalui *QR code*, Smartlink Pemprov Bali merupakan alat yang efektif dalam mengoptimalkan penggunaan tautan dan memperluas jangkauan komunikasi digital di Pemerintah Provinsi Bali.

Akses :

- Website : https://www.balikom.info/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/2210

36. Sistem Notifikasi Terintegrasi

Deskripsi :

Sistem Notifikasi Terintegrasi adalah sebuah sistem yang menyediakan layanan pengiriman pesan melalui email, SMS, dan pesan WhatsApp secara langsung, serta berfungsi sebagai penghubung atau *gateway* untuk mengirim pesan dari sistem lain yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Dengan integrasi yang baik dengan sistem lainnya, Sistem Notifikasi Terintegrasi memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan dengan mudah dari berbagai aplikasi atau sistem yang digunakan di Pemerintah Provinsi Bali, sehingga mempercepat alur komunikasi dan meningkatkan efisiensi dalam penyebaran informasi serta sudah dimanfaatkan sebagai layanan

pengiriman OTP (*One Time Password*) atau *password* sekali pakai di berbagai sistem yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

Dengan fitur-fitur yang lengkap dan kemampuan untuk mengirim pesan melalui email, SMS, dan WhatsApp, Sistem Notifikasi Terintegrasi menjadi alat yang penting dalam mendukung operasional dan komunikasi yang efektif di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Akses :

- Website : https://notifikasi.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/2214

37. Sistem Pendataan Koperasi (*Online* Data Koperasi)

Deskripsi :

Data Koperasi yang tersedia dalam *Online Data System* (ODS) yang disediakan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM RI saat ini bersifat umum dan tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kebijakan perkoperasian di Provinsi Bali. Oleh karena itu, Provinsi Bali merasa perlu memiliki sistem khusus untuk mengumpulkan dan menampilkan data koperasi secara detail baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali telah mengembangkan Online Data Koperasi (ODK) Provinsi Bali. ODK merupakan sebuah sistem data digital berbasis web yang memuat informasi yang lebih detail mengenai koperasi di Bali. Sistem ini mencakup data koperasi binaan tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan juga binaan nasional yang beroperasi di wilayah Bali.

ODK dibangun secara terpisah dari Online Data System (ODS) yang disediakan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM RI, namun menjadi pelengkap dengan menawarkan data detail yang belum tersedia di ODS. ODK juga melibatkan koperasi secara aktif dalam proses peng-*input*-an dan pengolahan data, sehingga menjadikannya sebuah sistem yang berpartisipasi aktif dari para pelaku koperasi di Bali.

Akses :

- Website : https://koperasi.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -

38. Sistem pendataan IKM dan UMKM

Deskripsi :

Sistem yang diberi nama Office UMKM adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk melakukan pendataan UMKM/IKM & Koperasi dengan tujuan membantu Pemerintah Provinsi Bali dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas dan kesejahteraan UMKM/IKM & Koperasi di Bali.

Melalui Office UMKM, Pemerintah Provinsi Bali dapat secara efisien dan efektif mengumpulkan informasi terkait UMKM/IKM & Koperasi di wilayahnya. Aplikasi ini memberikan kemudahan dalam proses pendataan, termasuk pengumpulan data demografis, data usaha, dan informasi lainnya yang relevan.

Dengan memiliki data yang komprehensif dan terkini, Pemerintah Provinsi Bali dapat menganalisis kondisi UMKM/IKM & Koperasi secara lebih akurat dan merumuskan kebijakan yang tepat dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sektor tersebut. Office UMKM menjadi alat penting dalam mengoptimalkan upaya Pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan dukungan yang efektif kepada UMKM/IKM & Koperasi di Bali guna mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

Akses :

- Website : https://officeumkm.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
Dalam Proses Pendaftaran.

39. Marketplace bagi Produk Koperasi, UMKM dan IKM Bali (Made in Bali)

Deskripsi :

Made in Bali, sebuah aplikasi yang dikembangkan melalui kolaborasi antara Dinas Koperasi UMKM, Disperindag dan Diskominfos Provinsi Bali, merupakan *marketplace* digital yang dirancang khusus untuk mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Industri Kecil Menengah (IKM), dan Koperasi di Bali. Aplikasi ini memiliki tujuan utama untuk memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha lokal tersebut untuk memasarkan produk-produk mereka secara lebih luas.

Dengan menggunakan aplikasi Madeinbali, para pelaku UMKM, IKM, dan Koperasi di Bali dapat memanfaatkan kekuatan teknologi digital untuk meningkatkan visibilitas dan daya jual produk mereka. Aplikasi ini menyediakan platform yang memudahkan proses pemasaran, memungkinkan para pelaku usaha untuk menjangkau konsumen potensial tidak hanya di dalam Bali, tetapi juga di luar pulau Bali.

Melalui fitur-fitur yang inovatif, Madeinbali memungkinkan para pengguna untuk membuat toko *online* mereka sendiri di dalam aplikasi. Hal ini memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk memamerkan produk-produk mereka dengan tampilan yang menarik dan profesional. Dengan demikian, mereka dapat menarik minat konsumen dan meningkatkan penjualan secara signifikan.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, aplikasi Madeinbali juga memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menemukan dan membeli produk-produk lokal Bali dengan cepat dan mudah. Konsumen dapat menjelajahi berbagai kategori produk, membandingkan harga, dan melihat ulasan dari pelanggan lain sebelum melakukan pembelian. Hal ini menciptakan pengalaman berbelanja yang nyaman dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dengan adanya aplikasi Madeinbali, diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih kuat bagi para pelaku UMKM, IKM, dan Koperasi di Bali, serta meningkatkan daya saing produk-produk lokal dalam skala nasional maupun internasional. Aplikasi ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memajukan industri lokal Bali.

Akses :

- Website : https://madeinbali.baliprov.go.id/
- Play Store : https://balikom.info/madeinbali-playstore
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -

40. Integrasi Pembayaran Layanan Aplikasi/ *One Payment Gateway* (SiPAY)

Deskripsi :

Single atau *One Payment Gateway* adalah solusi terbaru yang dikembangkan dengan tujuan utama mendorong penggunaan pembayaran non-tunai dan mendukung akuntabilitas pendapatan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dalam upaya mempermudah transaksi elektronik, One Payment Gateway berkolaborasi dengan lembaga perbankan terkemuka dan telah melalui serangkaian audit keamanan ketat guna memastikan sistemnya aman dan terpercaya.

Sistem ini telah berhasil terintegrasi dengan berbagai layanan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Dalam kerangka integrasi ini, One Payment Gateway menyediakan proses transaksi keuangan yang dapat diakses oleh pengguna melalui platform yang telah dibangun. Sebagai hasilnya, pengguna dapat dengan mudah melakukan pembayaran dan transaksi keuangan secara online melalui berbagai layanan yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Dengan keamanan yang terjamin dan integrasi yang komprehensif, One Payment Gateway menjadi solusi yang tangguh dan andal dalam memfasilitasi transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Melalui penggunaan pembayaran non-tunai, sistem ini membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan memungkinkan pengembangan fitur pembayaran yang lebih canggih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Akses :

- Website : https://sipay.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -

41. Pameran Virtual Pembangunan Bali

Deskripsi :

Pameran Pembangunan Virtual adalah sebuah aplikasi yang dirancang khusus untuk acara Pameran Pembangunan Bali yang diselenggarakan dalam rangka Hari Jadi Provinsi Bali. Aplikasi ini dikembangkan sebagai solusi alternatif mengingat tidak mungkin untuk melakukan pameran secara langsung saat pandemi COVID-19. Dengan adanya pameran pembangunan virtual, pengunjung tetap dapat mengakses informasi terkait pembangunan di Bali tanpa perlu berkumpul di satu tempat secara fisik.

Aplikasi ini telah berhasil diimplementasikan di platform web dengan desain yang responsif, sehingga dapat diakses melalui perangkat mobile dan desktop. Pengunjung dapat merasakan pengalaman yang nyata saat memasuki Pameran Virtual ini berkat adanya grafik 3D yang menawan.

Akses :

- Website : https://pameran.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/2195

42. Permohonan Informasi Publik dalam Portal Bali Satu Data

Deskripsi :

Permohonan Informasi Publik merupakan bagian dari Bali Satu Data, sebuah platform yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan tujuan memberikan pelayanan informasi yang maksimal kepada masyarakat. Dalam hal ini, Permohonan Informasi Publik di Portal Bali Satu Data menggantikan layanan sebelumnya yang dikenal sebagai "SiKI" (Sistem Keterbukaan Informasi), yang dikembangkan secara mandiri pada tahun 2017. SiKI diciptakan sebagai inovasi dalam manajemen informasi dan koordinasi internal serta sebagai sistem yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan informasi publik secara online.

Melalui Bali Satu Data, data dan informasi yang disediakan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga ditampilkan dalam bentuk grafik statistik, tabel angka, dan pelaporan dokumen yang terintegrasi dengan tingkat nasional melalui Satu Data Indonesia. Hal ini memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang relevan dan mendalam mengenai berbagai aspek di Provinsi Bali.

Dalam layanan Permohonan Informasi Publik di Bali Satu Data, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui portal yang disediakan. Dengan proses migrasi dari SiKI ke Bali Satu Data, pengajuan permohonan informasi menjadi lebih efisien dan transparan. Data dan informasi yang diminta akan ditindaklanjuti dengan cepat dan secara terperinci, memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Platform Bali Satu Data membuktikan komitmen Diskominfos Provinsi Bali dalam memberikan layanan informasi publik yang berkualitas dan memenuhi standar transparansi. Dengan akses mudah, presentasi data yang menarik, dan integrasi tingkat nasional, pelayanan informasi publik menjadi lebih terjangkau dan dapat diandalkan oleh masyarakat.

Akses :

- Website : https://balisatudata.baliprov.go.id/
- Play Store : https://balikom.info/balisatudata-playstore
- App Store : https://balikom.info/balisatudata-appstore

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/2057

43. Sistem Perpustakaan Digital (Pustaka Bali)

Deskripsi :

Pustaka Bali adalah sistem informasi perpustakaan yang menyediakan akses lengkap ke koleksi buku yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali. Dengan pemanfaatan teknologi terkini, Pustaka Bali mempermudah akses dan memperkaya pengalaman para pengguna dalam menjelajahi dunia literatur yang kaya dan beragam.

Dalam Pustaka Bali, pengguna dapat dengan mudah mencari dan menemukan buku-buku yang mereka cari. Pengunjung dapat menjelajahi katalog digital yang terdiri dari berbagai genre, mulai dari fiksi hingga buku referensi, dan dari sastra Bali hingga literatur internasional. Informasi rinci tentang setiap buku, termasuk sinopsis, penulis, dan tahun terbit, disajikan secara komprehensif untuk membantu pengguna membuat pilihan yang tepat.

Selain itu, Pustaka Bali juga menyediakan layanan peminjaman dan reservasi buku secara online. Pengunjung dapat memanfaatkan fitur ini untuk memesan buku yang mereka inginkan, dan dengan cepat mengetahui ketersediaan buku tersebut.

Dengan Pustaka Bali, akses ke pengetahuan dan kebijaksanaan yang terdapat dalam buku-buku menjadi lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat Bali. Sebagai sumber daya informasi yang penting, perpustakaan ini tidak hanya melayani kebutuhan pembaca, tetapi juga memainkan peran penting dalam pendidikan, penelitian, dan pengembangan masyarakat. Dengan dedikasi untuk memberikan layanan berkualitas, Pustaka Bali berkomitmen untuk menjadi pusat pengetahuan yang memperkaya budaya dan kreativitas di Provinsi Bali.

Akses :

- Website : https://pustakabali.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -

44. Kelas Virtual

Deskripsi :

Kelas Virtual merupakan sebuah platform layanan pembelajaran elektronik (e-learning) berbasis web dan mobile yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa pada satuan pendidikan jenjang menengah di Provinsi Bali. Kelas Virtual memiliki 4 tingkat pengguna, yaitu Admin, Operator Sekolah, Guru, dan Siswa. Masing-masing tingkat pengguna tersebut memiliki hak akses dan dashboard masing-masing.

Dengan adanya Kelas Virtual, guru dan siswa pada satuan jenjang pendidikan menengah di Provinsi Bali dapat melakukan kegiatan belajar mengajar dengan lebih mudah, dimana saja, dan kapan saja.

Akses :

- Website : https://kelasvirtual.baliprov.go.id/
- Play Store : https://balikom.info/kelasvirtual-playstore
- App Store : https://balikom.info/kelasvirtual-appstore

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -

45. Website Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bung Karno

Deskripsi :

Website Bulan Bung Karno Provinsi Bali adalah platform khusus yang mempromosikan dan mengakomodasi acara Bulan Bung Karno di provinsi Bali. Pengunjung dapat menemukan informasi lengkap tentang lomba, jadwal kegiatan, dan latar belakang kegiatan tersebut. Website ini juga berfungsi sebagai sarana bagi peserta lomba dengan dapat membuat akun dan mengunggah hasil karya mereka, memperlihatkan kreativitas secara online kepada panitia penyelenggara.

Website Bulan Bung Karno Provinsi Bali memastikan acara ini dapat diakses oleh siapa saja tanpa batasan geografis dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pengunjung dapat dengan mudah memperoleh informasi, terlibat dalam lomba, dan menyaksikan perkembangan kegiatan melalui platform online yang nyaman dan aman. Website ini menjadi sumber daya berharga bagi semua pihak yang terlibat, memperkaya budaya dan kesenian di provinsi Bali, serta menghormati warisan Bung Karno.

Akses :

- Website : https://bulanbungkarno.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -

46. Layanan Pemanfaatan Aset

Deskripsi :

Merupakan bagian dari sistem aset yang dikembangkan oleh Tim SPBE Diskominfos Provinsi Bali. Modul layanan pemanfaatan aset pada sistem aset ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam melakukan sewa Aset Pemprov Bali (khususnya tanah) dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan bantuan pengelolaan oleh UPTD. BMD. Dengan adanya platform ini, pengguna dapat melakukan penyewaan aset secara online, bahkan mengetahui dimana saja lokasi aset yang masih kosong atau belum disewakan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengetahui aset mana yang tersedia dan dapat dijadikan pilihan untuk keperluan sewa yang mereka butuhkan. Dengan adanya Pemanfaatan Aset, proses penyewaan aset Pemprov Bali menjadi lebih efisien dan transparan. Masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor atau mengurus secara konvensional, tetapi dapat menggunakan platform ini untuk melakukan proses penyewaan secara online. Hal ini memberikan kemudahan akses dan efisiensi waktu dalam mencari dan menyewa aset yang diperlukan.

Keunggulan layanan ini, pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi lengkap tentang aset yang tersedia untuk disewa, termasuk lokasi dan status ketersediaan. Dengan adanya sistem online, proses penyewaan aset menjadi lebih efisien, menghemat waktu dan biaya yang terkait dengan proses konvensional. Selain itu, platform ini juga membantu Pemerintah Provinsi Bali dalam pengelolaan aset, dengan sistem pengelolaan terintegrasi yang memudahkan pemantauan status penyewaan aset. Seluruh informasi terkait dengan aset, termasuk kontrak penyewaan dan pembayaran, dicatat dan terdokumentasi secara digital, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset.

Selain itu, platform ini juga memberikan manfaat bagi Pemerintah

Provinsi Bali dalam pengelolaan aset, dengan sistem pengelolaan terintegrasi yang memudahkan pemantauan status penyewaan. Pemanfaatan Aset secara digital juga membawa penghematan dokumen fisik, fleksibilitas aksesibilitas, kemampuan monitoring real-time, kolaborasi efisien, dan penggunaan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Akses :

- Website : https://aset.baliprov.go.id/
- Play Store : https://balikom.info/siwa-playstore
- App Store : https://balikom.info/siwa-appstore

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -

47. Layanan Bug Bounty

Deskripsi :

Bali Bug Bounty adalah sebuah platform aplikasi yang dikembangkan oleh Tim SPBE Diskominfos Provinsi Bali bertujuan untuk memberikan sarana bagi pengguna dalam melaporkan masalah bug, error, dan celah keamanan terkait dengan layanan digital yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Dengan adanya platform ini, pengguna dapat berperan aktif dalam meningkatkan keamanan sistem digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Salah satu keunggulan dari Bali Bug Bounty adalah kemampuannya untuk memfasilitasi pelaporan atas beberapa jenis masalah keamanan. Pengguna dapat melaporkan pelanggaran data, akses tidak sah ke data, celah keamanan, dan masalah sejenisnya. Hal ini

memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam mengidentifikasi dan memperbaiki celah keamanan yang ada.

Dengan adanya platform ini, Pemerintah Provinsi Bali dapat mengumpulkan laporan-laporan dari masyarakat secara efisien dan merespon dengan cepat untuk menyelesaikan masalah yang dilaporkan. Ini adalah langkah yang positif dalam memperkuat keamanan dan privasi data dalam lingkungan digital pemerintah.

Bali Bug Bounty memberikan kesempatan bagi masyarakat Bali untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan data dan sistem digital di Provinsi Bali. Dengan menyediakan platform yang mudah digunakan dan fokus pada laporan masalah keamanan, aplikasi ini menjadi alat yang efektif dalam membangun kepercayaan dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan digital.

Akses :

- Website : https://bugbounty.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/2207

48. Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (JIDHAT)

Deskripsi :

Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Adat adalah sebuah aplikasi online yang didesain khusus untuk desa adat di Provinsi Bali. Fungsi utama dari aplikasi ini adalah menjadi pangkalan data yang komprehensif mengenai produk hukum adat di wilayah tersebut. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan kepada Desa Adat dengan menyediakan informasi hukum adat yang lengkap, akurat, mudah diakses, dan cepat.

Dengan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Adat, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih efisien dan terorganisir terhadap produk hukum adat. Aplikasi ini mengumpulkan dan mengintegrasikan berbagai informasi hukum adat yang relevan.

Kelebihan utama dari aplikasi ini adalah kemudahan akses dan pencarian informasi. Pengguna dapat dengan cepat mencari dan mengakses informasi yang mereka butuhkan secara spesifik dan terperinci. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat menghemat waktu dan usaha dalam memperoleh informasi hukum adat yang diperlukan.

Selain itu, Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Adat juga memberikan jaminan keakuratan dan kevalidan informasi. Data yang disediakan melalui aplikasi ini telah melalui proses verifikasi, sehingga Desa Adat dapat mengandalkan informasi tersebut sebagai acuan yang sah dalam mengelola urusan hukum adat di wilayah mereka.

Dengan adanya aplikasi Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Adat, diharapkan pelayanan hukum adat di Provinsi Bali dapat ditingkatkan secara signifikan. Desa Adat akan merasakan manfaat dalam hal akses informasi yang lebih baik, pengambilan keputusan yang lebih tepat, dan efisiensi dalam administrasi hukum adat. Ini merupakan langkah maju dalam memperkuat dan melestarikan warisan budaya hukum adat di Bali, sekaligus mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai adat yang kaya dan beragam.

Akses :

- Website : https://jidhat.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/1088

49. Sistem Sensus Desa Adat

Deskripsi :

Sistem Sensus Desa Adat, yang disebut juga sebagai Sensus Sat Kerthi Semesta Bali Berbasis Desa Adat, merupakan sebuah inisiatif untuk mengembangkan dan memberdayakan desa adat di Bali. Desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal di Bali. Dalam upaya menjaga

keberadaan dan kelestariannya, Sensus Sat Kerthi Semesta Bali Berbasis Desa Adat dilaksanakan untuk mendata kekayaan budaya dan kearifan lokal yang ada di setiap desa adat di Bali.

Sensus ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang perkembangan jumlah penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk, serta atribut sosial penduduk dalam suatu wilayah desa adat. Data yang terkumpul dari sensus ini diyakini menjadi dasar dalam menentukan pembangunan dan merumuskan program-program kebijakan oleh berbagai pihak, baik di pemerintahan maupun sektor swasta. Sensus ini mencakup pemerintahan, kelembagaan, parahyangan, palemahan, dan pawongan di 1.493 desa adat yang ada di Bali.

Dalam rangka mewujudkan visi Nangun Sat Kertih Loka Bali, Sensus Sat Kerthi Semesta Bali Berbasis Desa Adat menjadi langkah penting dalam mendukung program prioritas Gubernur Bali. Melalui sensus ini, diharapkan tercipta pangkalan data berbasis desa adat yang valid dan lengkap guna memperkuat peran, tugas, dan fungsi Desa Adat dalam menjaga kehidupan krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.

Dengan tersedianya sistem dan database sumber daya desa adat, data terpadu desa adat yang mencakup Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan dapat diakses dengan mudah. Informasi yang terkumpul dari sensus ini akan memudahkan pengambilan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk pengembangan potensi desa adat serta pembangunan desa adat di masa depan.

Dalam rangka memenuhi sasaran tersebut, kegiatan sensus ini bertujuan untuk menyusun database akses data terpadu desa adat dan menganalisis hasil Sensus Sat Kerthi Semesta Bali Berbasis Desa Adat. Tujuannya adalah untuk menyediakan data yang komprehensif dan melakukan kajian terhadap data tersebut, yang meliputi aspek Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan dalam desa adat.

Akses :

- Website : https://sensusadat.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/774

50. Sistem Informasi Krama Desa Adat (KRAMA)

Deskripsi :

Sistem Informasi Krama Desa Adat adalah sebuah inovasi yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data terkait dengan krama (penduduk) desa adat di Bali. Dengan sistem ini, manajemen informasi mengenai krama menjadi lebih terstruktur dan efisien.

Sistem ini mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan krama desa adat, seperti data kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, meperas, serta pencetakan kartu penduduk krama dan kartu keluarga krama. Data tersebut dikumpulkan dan diintegrasikan secara elektronik, memungkinkan pengelolaan yang lebih baik dan pemrosesan yang cepat.

Melalui sistem ini, pemerintah dan desa adat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terkini mengenai data krama di Bali. Data-data ini menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, dan pemantauan kondisi sosial masyarakat desa adat.

Selain itu, sistem ini juga memudahkan penerbitan kartu penduduk krama dan kartu keluarga krama. Dengan adanya kartu-kartu ini, identitas dan hubungan keluarga setiap krama dapat tercatat dengan jelas, serta dapat membantu dalam administrasi desa adat.

Dengan Sistem Informasi Krama Desa Adat, desa adat di Bali memiliki alat yang kuat untuk mengelola data krama dengan efisien dan efektif. Sistem ini memastikan integritas data, meningkatkan kualitas pelayanan kepada krama, dan membantu dalam mengambil keputusan yang berdasarkan data yang valid. Sebagai hasilnya, kehidupan masyarakat desa adat dapat dikelola dengan lebih baik dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Akses :

- Website : https://krama.baliprov.go.id/login
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
Dalam Proses Pendaftaran.

51. Sistem Manajemen Aset Desa Adat (PADRUWEN)

Deskripsi :

Padruwen Desa Adat adalah salah satu modul pada sistem aset yang telah dikembangkan sebelumnya dimana sistem ini dirancang khusus untuk membantu Desa Adat dalam mengelola dan melacak aset-aset yang dimiliki. Aplikasi ini berfungsi sebagai pusat kontrol untuk pengelolaan aset-aset desa adat, termasuk Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Akses :

- Website : https://aset.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -

52. Sistem Manajemen Lembaga Usaha Milik Desa Adat (BUPDA)

Deskripsi :

Baga Utsaha Padruwen Masyarakat Adat, atau yang dikenal sebagai BUPDA, merupakan lembaga usaha yang beroperasi dalam sektor riil, jasa, dan/atau Pelayanan Umum. Lembaga ini didirikan berdasarkan hukum adat dan dikelola dengan tata kelola modern, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian Krama Desa Adat. BUPDA menjadi wadah yang memungkinkan masyarakat adat untuk mengembangkan usaha mereka dengan dukungan dan pengelolaan yang baik.

Sistem Pendaftaran dan Monitoring BUPDA adalah sebuah platform yang dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran BUPDA dari setiap Desa Adat secara online, sehingga tidak diperlukan lagi pendaftaran secara offline dengan datang langsung ke dinas terkait. Melalui sistem ini, proses pendaftaran menjadi lebih efisien dan dapat dilakukan dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini meminimalisir hambatan administratif dan meningkatkan aksesibilitas bagi Desa Adat.

Selain itu, sistem ini juga berfungsi sebagai alat manajemen dan monitoring BUPDA. Data umum BUPDA, tata kelola lembaga dan pengurus, tata kelola keuangan, serta data terkait usaha yang dimiliki oleh BUPDA dapat terdokumentasi dengan baik dalam sistem ini. Hal ini memungkinkan pemantauan yang lebih efektif terhadap kinerja dan perkembangan BUPDA secara keseluruhan. Dengan adanya sistem pendaftaran dan monitoring yang terintegrasi, pihak terkait dapat melacak dan mengelola informasi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan BUPDA.

Dengan Sistem Pendaftaran dan Monitoring BUPDA, diharapkan pengelolaan BUPDA menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Sistem ini memberikan kemudahan akses bagi Desa Adat dalam mendaftarkan BUPDA dan memungkinkan pemantauan yang efektif terhadap kinerja lembaga. Dengan tata kelola yang baik, BUPDA dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat adat, serta menjaga dan memperkaya kekayaan budaya dan warisan adat yang dimiliki oleh Desa Adat.

Akses :

- Website : https://aset.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -

53. Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sehat (SIK-KBS)

Deskripsi :

Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sehat (SIK KBS) adalah sistem yang digunakan oleh masyarakat Bali untuk mengakses informasi kesehatan, memberikan masukan terkait JKN KBS, mendapatkan antrian online, serta mengetahui informasi mengenai tanaman

obat dan akupresur melalui menu kesehatan tradisional. SIK KBS terdiri dari dua antarmuka pengguna, yaitu Web dan Aplikasi Mobile.

Fitur yang tersedia pada Web SIK KBS meliputi Informasi Puskesmas, Informasi Klinik, Informasi Rumah Sakit, Data Riwayat Kesehatan berdasarkan SIKDA Generik dan PIS PK per kecamatan/kabupaten/provinsi, serta Data Antrean pasien. Sementara itu, Aplikasi Mobile SIK KBS menyediakan fitur pendaftaran antrian Puskesmas/Rumah Sakit kesehatan tradisional, penanganan keluhan JKN KBS, dan menampilkan profil Puskesmas dan Rumah Sakit.

Akses :

- Website : https://sik-kbs.baliprov.go.id/
- Play Store : https://balikom.info/sik-kbs-playstore
- App Store : https://balikom.info/sik-kbs-appstore

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
Dalam Proses Pendaftaran.

54. Sistem Inventori (SIRI)

Deskripsi :

Siri (Sistem Inventori) adalah sebuah aplikasi yang telah dikembangkan untuk mencatat pergerakan barang masuk, barang keluar, dan pengembalian barang di Pemerintah Provinsi Bali. Dalam aplikasi ini, terdapat penggabungan dari beberapa aplikasi yang sudah ada sebelumnya, yaitu Sistem Inventori Covid dan Inventori O2. Hal ini memungkinkan penggunaan yang lebih efisien dan terpadu dalam manajemen inventori di berbagai lembaga dan organisasi di Provinsi Bali.

Awalnya, Sistem Inventori Covid dan Inventori O2 dikembangkan khusus untuk digunakan oleh Dinas Kesehatan dalam mengelola inventori terkait dengan penanganan Covid-19. Namun, dengan perkembangan dan perluasan fungsionalitasnya, dikembangkanlah Siri yang tidak hanya digunakan oleh Dinas Kesehatan, tetapi juga oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang membutuhkan pencatatan stok/inventori.

Dalam Siri, pengguna dapat mencatat dan memantau dengan mudah pergerakan barang, termasuk barang masuk, barang keluar, dan pengembalian barang. Aplikasi ini memberikan kemudahan dalam mengelola inventori, sehingga pengguna dapat dengan cepat melacak dan memantau ketersediaan barang serta mengoptimalkan penggunaannya.

Dengan adanya Siri, manajemen inventori di Pemerintah Provinsi Bali menjadi lebih teratur, terintegrasi, dan transparan. Aplikasi ini memungkinkan lembaga dan organisasi terkait untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang persediaan barang yang dimiliki, serta dapat melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam penggunaan barang dan pengadaan kebutuhan baru.

Siri memberikan solusi yang komprehensif dalam manajemen inventori, menjadikan proses pencatatan dan pengelolaan stok barang lebih efisien dan akurat. Dengan keberadaan aplikasi ini, Pemerintah Provinsi Bali dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan inventori, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan memastikan ketersediaan barang yang memadai dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik.

Akses :

- Website : https://siri.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -

55. Sistem Layanan Laboratorium Kesehatan

Deskripsi :

SISLABKES (Sistem Layanan Laboratorium Kesehatan) adalah sebuah sistem informasi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan tujuan untuk memudahkan dan mendigitalisasi proses administrasi dan pendataan laporan, serta meningkatkan pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali. Dalam SISLABKES, terdapat berbagai fitur yang tersedia, termasuk Pelayanan Covid dan Pelayanan Umum, yang mencakup proses pendaftaran pasien hingga pengiriman hasil pemeriksaan kepada pasien.

Selain itu, SISLABKES juga dilengkapi dengan fitur Paket Layanan yang memungkinkan Admin CS untuk membuat dan mengelola paket layanan yang digunakan pada pendaftaran pasien. Fitur ini mencakup langkah-langkah seperti menambah, melihat, mengubah, dan menghapus paket yang telah dibuat. Terdapat juga fitur Nomor Register yang digunakan untuk mendaftarkan nomor register layanan pemeriksaan manual di luar sistem SISLABKES, sehingga nomor register tetap teratur baik di dalam maupun di luar sistem.

Pada tahun 2024, terdapat penambahan modul pada SISLABKES yaitu modul SICINTA ALKES (Sistem Informasi Cepat dan Terintegrasi Pendaftaran Pelayanan Pemeliharaan Alat Kesehatan). Modul ini menjadi salah satu fitur yang dibuat untuk memudahkan pendaftaran, pelayanan dan pemeliharaan alat Kesehatan oleh UPTD. Balai Labkes Kerthi Bali Sadhajiwa yang sebelumnya dilakukan secara Manual.

Akses :

- Website : https://labkes.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/1592

56. Sistem Informasi dan Pelayanan Online Pengujian Laboratorium Penyakit Hewan dan Bahan Pangan Asal Hewan (SILEBAH)

Deskripsi :

SILEBAH adalah Sistem Informasi dan Pelayanan Online Pengujian Laboratorium Penyakit Hewan dan Bahan Pangan Asal Hewan. Sistem ini dibangun dengan tujuan utama untuk memberikan informasi dan layanan secara online guna memenuhi kebutuhan yang terkait dengan kesehatan hewan dan bahan pangan asal hewan. Beberapa layanan yang disediakan melalui "Silebah" antara lain:

a. Pengujian Penyakit Hewan:
"Silebah" menyediakan layanan pengujian penyakit hewan yang memungkinkan pengguna untuk mengajukan permohonan pengujian secara online.

b. Pengujian Organoleptik:
Layanan pengujian organoleptik pada "Silebah" memungkinkan pengguna untuk meminta pengujian terhadap produk bahan pangan asal hewan. Pengujian organoleptik ini melibatkan penilaian sensorik terhadap produk, seperti rasa, aroma, tekstur, dan penampilan visual. Dengan menggunakan sistem ini, pihak yang terkait dengan produksi bahan pangan asal hewan dapat memastikan kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

c. Pengujian Cemaran Mikroba:
"Silebah" juga menyediakan layanan pengujian cemaran mikroba pada bahan pangan asal hewan. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan produk bebas dari kontaminasi mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia.

Melalui "Silebah", diharapkan proses pengujian laboratorium penyakit hewan dan bahan pangan asal hewan menjadi lebih efisien, transparan, dan terjangkau. Sistem ini memungkinkan akses yang mudah bagi para pemilik hewan, peternak, dan produsen bahan pangan asal hewan untuk memenuhi kebutuhan mereka terkait dengan kesehatan dan keamanan produk. Dengan menggunakan teknologi informasi dan layanan online, "Silebah" menjadi alat yang berharga dalam meningkatkan kualitas dan keamanan produk hewan serta bahan pangan asal hewan.

Akses :

- Website : https://silebah.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
Dalam Proses Pendaftaran.

57. Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Bali

Deskripsi :

JDIH Provinsi Bali merupakan platform elektronik yang menyediakan akses komprehensif ke berbagai dokumen hukum termasuk peraturan, perundang-undangan, monografi hukum, artikel hukum, dan putusan pengadilan. Layanan ini telah berkembang mulai dari menyediakan informasi hukum yang lengkap dan mudah diakses, hingga menawarkan fitur interaksi seperti pencarian dan pengunduhan dokumen, layanan transaksi termasuk CRUD (Create, Read, Update, Delete) dokumen hukum, analitik data, dan forum diskusi. JDIH Provinsi Bali mengintegrasikan sistemnya dengan layanan elektronik lain, termasuk dashboard Pimpinan Bali Satu Data dan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (BPHN) melalui API, mendukung inisiatif Revitalisasi Hukum Jilid II pemerintah. Dengan berbagai peningkatan dan integrasi, termasuk penambahan fitur-fitur baru dan pengembangan aplikasi mobile, JDIH Provinsi Bali tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas akses informasi hukum bagi pengguna tetapi juga mencerminkan komitmen Provinsi Bali dalam penataan regulasi dan pengembangan sistem informasi hukum yang terpadu, sejalan dengan kebijakan nasional dan mendapatkan pengakuan berupa penghargaan dari BPHN.

Akses :

- Website : https://jdih.baliprov.go.id/
- Play Store : https://balikom.info/jdihprovbali-playstore
- App Store : https://balikom.info/jdihprovbali-appstore

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :

Dalam Proses Pendaftaran.

58. *Whistleblower System* (WBS) Pemprov Bali

Deskripsi :

Whistleblowing System adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Jika terdapat dugaan Tindak Pidana Korupsi atau bentuk pelanggaran lainnya yang dilakukan pegawai Pemerintah Provinsi Bali, dapat melapor ke Inspektorat Pemerintah Provinsi Bali melalui *Whistleblowing System* (WBS) Pemprov Bali. Jika laporan anda memenuhi syarat/kriteria, maka laporan Anda akan diproses lebih lanjut.

Akses :

- Website : https://wbs.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :

Dalam Proses Pendaftaran.

59. Website Turyapada

Deskripsi :

Website Turyapada adalah *platform* resmi Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 yang menyediakan informasi lengkap tentang ikon kebanggaan Provinsi Bali. Melalui fitur-fitur modern seperti Virtual 360, informasi fasilitas, jadwal acara, dan reservasi tiket *online*, website ini memadukan teknologi canggih dengan budaya Bali untuk memberikan pengalaman wisata yang informatif dan memukau. Pengunjung dapat menjelajahi keindahan arsitektur, merencanakan kunjungan, serta menikmati kemudahan layanan hanya dalam satu klik.

Akses :

- Website : https://turyapada.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :

https://pse.layanan.go.id/sealid/2212

60. SIAP SWASTISABA

Deskripsi :

Sistem Aplikasi SWASTISABA (SIAP SWASTISABA) Provinsi Bali adalah aplikasi untuk melakukan penginputan, verifikasi, dan penilaian dokumen pendukung penyelenggaraan penilaian Kabupaten Kota Sehat (KKS). Aplikasi ini memiliki fitur Penginputan hasil *assessment* indikator KKS oleh Tim Pembina KKS Kab/Kota, Penginputan bukti/ dokumen pendukung indikator setiap tatanan KKS, Verifikasi dan penilaian indikator tatanan dan data dukung. Untuk instrumen penilaian dari KKS sendiri terdiri dari Kelembagaan dan Indikator Tatanan. Tatanan yang dinilai adalah Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri, Tatanan Permukiman Dan Rumah Ibadat, Tatanan Satuan Pendidikan, Tatanan Pasar, Tatanan Pariwisata, Tatanan Transportasi Dan Tertib Lalu Lintas Jalan, Tatanan Perkantoran Dan Perindustrian, Tatanan Perlindungan Sosial, Tatanan Pencegahan Dan Penanganan Bencana.

Akses :

- Website : https://swastisaba.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -

61. Sistem Informasi Layanan Cuti Terintegrasi (SILACI)

Deskripsi :

Sistem Pengajuan Cuti Terintegrasi (SILACI) adalah sebuah layanan digital yang dirancang untuk mempermudah proses pengajuan, persetujuan, dan monitoring cuti pegawai secara lebih efisien dan transparan. SILACI merupakan hasil pengembangan fitur dari tiga sistem berbeda, yaitu Sistem Absensi, Kantor Virtual, dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih terintegrasi bagi pegawai dan manajemen. Dengan adanya SILACI, pegawai dapat mengajukan cuti secara online tanpa harus melalui prosedur manual yang memakan waktu. Sistem ini secara otomatis akan mengecek data kehadiran pegawai melalui sistem absensi, menyesuaikan dengan kuota cuti dan data personal pegawai dalam SIMPEG, serta memungkinkan pemrosesan persetujuan dan pemantauan status cuti melalui kantor virtual. Dengan SILACI, pengelolaan cuti menjadi lebih efektif, transparan, dan akurat, mendukung tata kelola kepegawaian yang lebih modern dan profesional.

Akses :

- Website : https://hadir-app.baliprov.go.id
- Play Store : https://balikom.info/hadir-playstore
- App Store : https://balikom.info/hadir-appstore

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/776

62. Sistem Pengawasan dan Pelaporan Terintegrasi E-KTTP (SIWALATRI E-KTPP)

Deskripsi:

Siwalatri e-KTPP merupakan aplikasi pengawasan dan pelaporan yang melibatkan beberapa perangkat daerah, seperti Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali. Pelaporan pada aplikasi SIWALATRI meliputi pelaporan pramuwisata yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaporan pramuwisata dapat berupa pelaporan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pramuwisata serta pelaporan atas pramuwisata ilegal. Pada aplikasi ini diterapkan sistem poin, yang mana secara default poin yang dimiliki oleh pramuwisata pada awalnya adalah 5 poin, selanjutnya akan berkurang sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan. Pengurangan poin ini akan berpengaruh ketika pramuwisata melakukan perpanjangan Kartu Tanda Pramuwisatanya.

Akses :

- Website : https://siwalatri.baliprov.go.id
- Play Store : https://balikom.info/AndroidApp
- App Store : https://balikom.info/IOsApp

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -

63. Sistem Informasi Pengelolaan Air Limbah DSDP

Deskripsi :

Sistem Informasi DSDP (Denpasar Sewerage Development Project) merupakan aplikasi layanan digital yang mendukung pengelolaan air limbah terpusat di wilayah Denpasar, Sanur dan Kuta. Aplikasi ini berfungsi sebagai media informasi dan pelayanan antara pengelola (UPTD Pengelolaan Air Limbah Provinsi Bali) dengan masyarakat, pelanggan, serta pelaku usaha yang terhubung ke jaringan DSDP. Melalui sistem ini, proses pengelolaan air limbah dilakukan secara lebih transparan, terintegrasi, dan terdokumentasi, mulai dari informasi layanan, kepesertaan pelanggan, hingga operasional pengelolaan air limbah di instalasi pengolahan (IPAL).

Fitur utama dalam aplikasi DSDP mencakup penyajian informasi umum tentang DSDP, pendaftaran dan data pelanggan, informasi tarif per kategori dan kewajiban layanan, serta kanal pengaduan/keluhan terkait saluran perpipaan dan komunikasi lain dengan pengelola layanan. *Channel* pembayaran pengolahan air limbah bagi pelanggan dapat menggunakan portal pelanggan DSDP, dapat melalui seluruh BPD Bali dan Kasir Kantor UPTD. Pengelolaan Air Limbah. Selain itu, sistem ini mendukung pembayaran IPLT (truk jasa kuras), monitoring layanan pengelolaan air limbah, publikasi regulasi dan standar layanan, serta edukasi masyarakat terkait pentingnya sanitasi dan perlindungan lingkungan. Dengan keberadaan aplikasi ini, DSDP tidak hanya berperan sebagai infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai platform digital yang meningkatkan kualitas pelayanan, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan air limbah di Provinsi Bali.

Akses :

- Website : https://dsdp.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/2517

64. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan Provinsi Bali

Deskripsi :

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan Provinsi Bali merupakan portal layanan digital yang dikembangkan untuk mengelola program TJSL Perusahaan di wilayah Bali. Melalui portal ini, perangkat daerah dapat melakukan pemetaan, pengelolaan serta pemantauan berbagai program dan bentuk kegiatan TJSL, masyarakat dapat mengajukan usulan kesertaan program atau kebutuhan yang berpotensi didanai melalui skema TJSL, serta Perusahaan peserta TJSL dapat berpartisipasi aktif dalam merencanakan, menyalurkan, serta melaporkan realisasi program dan pendanaan TJSL secara sistematis dan terdokumentasi. Portal TJSL Perusahaan Provinsi Bali diharapkan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan, memastikan keselarasan program TJSL dengan prioritas pembangunan daerah, serta mendorong terciptanya tata kelola TJSL yang transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi pembangunan Bali.

Akses :

- Website : https://tjsl.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -

65. Bali Digital Hub

Deskripsi:

Bali Digital Hub (DigiHub) merupakan layanan satu pintu berbasis *citizen-centric* yang dikembangkan untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Melalui portal ini, seluruh aplikasi dan layanan pemerintah, instansi daerah, lembaga pendidikan, hingga *startup* lokal terhubung dalam satu ekosistem digital terpadu, sehingga masyarakat cukup mengunjungi satu portal untuk menemukan dan mengakses berbagai layanan resmi dengan lebih mudah, cepat, dan terintegrasi.

Akses :
- Website : https://tjsl.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -

66. Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (JDIH) Provinsi Bali

Deskripsi :

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Provinsi Bali merupakan portal resmi yang menyediakan layanan dokumentasi dan informasi hukum secara terpadu, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Website ini berfungsi sebagai sarana publikasi berbagai produk hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Bali, mulai dari peraturan daerah, keputusan DPRD, Monografi Hukum, Artikel Hukum hingga dokumen pendukung lainnya.

Website JDIH DPRD Provinsi Bali memiliki landing page yang dapat diakses oleh masyarakat luas untuk memperoleh informasi terkait dokumen hukum secara terbuka, cepat, dan transparan. Melalui halaman ini, pengguna dapat menelusuri, mencari, dan mengunduh berbagai dokumen hukum yang tersedia sebagai bentuk pelayanan informasi publik.

Selain itu, website ini juga dilengkapi dengan *dashboard* internal yang hanya dapat diakses oleh admin dan operator, yang berfungsi untuk melakukan manajemen konten pada landing page. *Dashboard* tersebut digunakan untuk pengelolaan data dan dokumen hukum, pengaturan informasi pendukung, serta pemeliharaan konten agar selalu mutakhir, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Akses :
- Website : jdih-dprd.baliprov.go.id (Landing Page),
- Dashboard : dashboard-jdihdprd.baliprov.go.id
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -

67. Sistem Taman Penangkaran Anjing Kintamani (TEMANI)

Deskripsi :

Sistem Taman Penangkaran Anjing Kintamani (TEMANI) merupakan sistem informasi digital yang mendukung pengelolaan dan pemantauan Ras Anjing Kintamani pada UPTD. Balai Inseminasi Buatan Daerah, Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Provinsi Bali. Aplikasi ini dikembangkan oleh Tim SPBE Pemerintah Provinsi Bali dan digunakan pada Taman Penangkaran Anjing Kintamani yang berlokasi di Baturiti, Kabupaten Tabanan. TEMANI berfungsi sebagai media pengelolaan data, layanan informasi, serta dokumentasi kegiatan penangkaran secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Melalui aplikasi TEMANI, proses pengelolaan Anjing Kintamani dilakukan secara lebih tertib, transparan, dan terdokumentasi, mulai dari pencatatan data anjing, rekam medis, perawatan dan vaksinasi, hingga pengelolaan adopsi. Sistem ini juga mendukung pencatatan kejadian khusus seperti kematian dan kehilangan, serta pengelolaan data kepemilikan Anjing Kintamani baik di dalam maupun di luar taman penangkaran.

Selain aplikasi internal, TEMANI juga didukung oleh website resmi yang dapat diakses melalui *temani.baliprov.go.id*, yang menyajikan informasi publik terkait Anjing Kintamani, profil Taman Penangkaran, edukasi pelestarian ras lokal Bali, serta informasi layanan adopsi. Dengan keberadaan aplikasi dan website TEMANI, pengelolaan Anjing Kintamani tidak hanya berfokus pada aspek operasional, tetapi juga menjadi platform digital untuk mendukung pelestarian, edukasi, dan peningkatan kualitas layanan publik di Provinsi Bali.

Akses :
- Dashboard : https://temani-dashboard.baliprov.go.id/
- Website : https://temani.baliprov.go.id/
- Play Store : -

- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/2519

68. Sistem Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)

Deskripsi :

Aplikasi RKBMD Pemerintah Provinsi Bali merupakan sistem informasi digital yang dikembangkan untuk mendukung proses perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah secara terintegrasi, efektif, dan akuntabel. Aplikasi ini memfasilitasi seluruh tahapan penyusunan RKBMD, mulai dari pengusulan oleh Perangkat Daerah, penelaahan oleh Pengelola Barang, hingga penetapan RKBMD tahunan. Dengan mengacu pada penggolongan dan kodefikasi barang sesuai Permendagri 108 Tahun 2016 serta memperhatikan standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga, aplikasi ini membantu memastikan kesesuaian jenis, jumlah, dan nilai barang yang diusulkan dengan ketentuan yang berlaku, serta terintegrasi dengan sistem e-SAKIP untuk mengaitkan usulan kebutuhan dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan.

Melalui integrasi dengan data BMD existing, sistem pengelolaan aset daerah, dan e-SAKIP, aplikasi RKBMD mampu menampilkan kebutuhan riil secara otomatis serta memastikan keterkaitan antara perencanaan barang dan perencanaan kinerja. Proses kompilasi usulan seluruh Perangkat Daerah menjadi lebih cepat dan akurat, sementara seluruh tahapan terekam sebagai arsip digital yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, aplikasi ini berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, konsistensi perencanaan, serta akuntabilitas penyusunan RKBMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Akses :

- Dashboard : https://aset.baliprov.go.id/
- Website : https://aset.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -

69. Sistem Manajemen Penugasan Terintegrasi (PERI VIRTUAL)

Deskripsi :

Fitur Manajemen Penugasan Terintegrasi pada Layanan Kantor Virtual Bali dikembangkan untuk menjawab kebutuhan efisiensi dalam proses administrasi penugasan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Melalui fitur ini, proses pembuatan, pengajuan, hingga pencatatan Surat Tugas atau Surat Perintah kini dapat dilakukan secara digital dan otomatis, tanpa harus melalui tahapan manual yang berulang.

Sistem ini menghubungkan dua layanan inti, yaitu modul penugasan pada Kantor Virtual Bali dengan Layanan Absensi Pegawai Pemerintah Provinsi Bali. Integrasi ini memungkinkan setiap pegawai yang tercantum dalam Surat Tugas atau Surat Perintah untuk langsung terdaftar di sistem absensi, tanpa perlu melakukan unggahan dokumen secara terpisah.

Dari sisi pengguna, proses pengajuan surat menjadi lebih sederhana dan efisien. Pegawai cukup mengajukan permohonan melalui menu Draft Surat. Sistem kemudian akan secara otomatis menghasilkan berkas draft Surat Tugas atau Surat Perintah dalam format .docx, lengkap dengan data pegawai dan informasi kegiatan yang dibutuhkan. Sebelum diajukan, pegawai yang bersangkutan dapat melakukan review terhadap isi draf untuk memastikan seluruh data sudah benar dan sesuai kebutuhan.

Tahapan selanjutnya mengikuti mekanisme pengajuan berjenjang sebagaimana prosedur administratif yang berlaku. Setelah dokumen disetujui dan ditandatangani secara elektronik melalui Tanda Tangan Elektronik (TTE), sistem secara otomatis akan mengunggah dokumen final tersebut ke Aplikasi Absensi. Dengan demikian, pegawai tidak perlu lagi mengunggah Surat Tugas secara manual sebagai bukti kehadiran kegiatan dinas luar, karena pencatatan sudah dilakukan secara otomatis oleh sistem.

Dengan adanya Fitur Manajemen Penugasan Terintegrasi ini, proses birokrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Selain menghemat waktu dan tenaga administratif, sistem ini juga meningkatkan akurasi data absensi pegawai yang sedang menjalankan tugas resmi, sekaligus memperkuat ekosistem layanan digital di Pemerintah Provinsi Bali.

Akses :

- Dashboard : https://kanal.baliprov.go.id/home
- Website : https://kanal.baliprov.go.id/draft-letter/create-spt
- Play Store : https://balikom.info/kanal-playstore
- App Store : https://balikom.info/kanal-appstore

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -

70. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Palemahan Kedas (SIPADAS)

Deskripsi :

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Palemahan Kedas (SIPADAS) merupakan platform digital terintegrasi yang dirancang untuk mengoptimalkan manajemen pengelolaan sampah mulai dari tingkat sumber secara akurat dan berkelanjutan. Sistem ini berfungsi sebagai sarana pendataan, pemantauan, dan pelaporan yang mengalihkan proses konvensional ke arah digitalisasi yang lebih transparan. Fitur unggulan seperti master data indikator dan pertanyaan survey yang dinamis dan dashboard pemantauan *real-time,* SIPADAS memungkinkan pemerintah untuk memetakan kondisi pengelolaan sampah di berbagai sektor serta memberikan edukasi langsung kepada masyarakat melalui halaman informasi publik yang tersedia.

Operasional SIPADAS melibatkan tiga aktor utama dengan pembagian tugas yang saling terintegrasi, yaitu Admin Provinsi (Tim DKLH Provinsi Bali), Admin Koordinator Sektor (Tim dari masing-masing OPD sesuai sektor yang diampu) dan Surveyor. Admin Provinsi bertanggung jawab sebagai pengelola pusat yang memegang kendali penuh atas manajemen master data, penyusunan indikator dan pertanyaan survei, serta verifikasi akhir akun pengguna. Admin Koordinator Sektor bertugas untuk melakukan pengawasan dan validasi berjenjang terhadap data yang masuk dari wilayahnya masing-masing guna memastikan kualitas data sebelum disetujui. Sementara itu, Surveyor bertugas sebagai garda terdepan di lapangan yang melakukan pengambilan data, mendaftarkan akun secara mandiri, dan mengunggah hasil survei langsung ke dalam sistem aplikasi.

Melalui alur kerja yang sistematis, setiap data yang telah di-*input* oleh Surveyor dan divalidasi oleh Admin Koordinator akan diolah secara otomatis menjadi laporan komprehensif dan grafik pada dashboard dinamis. Hal ini memudahkan para pemangku kepentingan dalam melakukan evaluasi dan analisis mendalam terkait efektivitas pengelolaan sampah di tiap desa atau instansi yang diampu oleh ASN/Non-ASN. Dengan adanya SIPADAS, koordinasi antar instansi melalui fitur pemetaan OPD menjadi lebih terukur, sehingga kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber dapat diimplementasikan secara lebih efektif demi mewujudkan lingkungan yang bersih dan asri (Palemahan Kedas).

Akses :

- Dashboard : https://kelolasampah.baliprov.go.id/
- Website : https://kelolasampah.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -

71. Sistem Pelayanan Penjualan Benih Ikan Secara Online (SIPULIH)

Deskripsi :

Layanan Penjualan Benih Ikan pada UPTD. Produksi Perikanan Budidaya Sangeh berfungsi sebagai platform layanan digital yang konsepnya menyerupai *e-commerce* khusus penjualan benih dan induk ikan milik Pemerintah Provinsi Bali. Melalui layanan ini, proses pemesanan benih ikan oleh pembudidaya dilakukan secara terstruktur, mulai dari pengajuan permintaan jenis dan jumlah komoditas hingga pengambilan benih di UPTD Produksi Perikanan Budidaya. Untuk memudahkan masyarakat, permohonan diawali melalui WhatsApp dan selanjutnya dikelola secara terpusat di SIMPELKAN oleh Admin. Fitur utama modul ini mencakup pencatatan pesanan, verifikasi data dan ketersediaan benih, persetujuan pimpinan, pembayaran non-tunai (QRIS), serta notifikasi status pesanan secara otomatis. Pemohon juga dapat memantau progres permohonan layaknya fitur pelacakan pesanan pada aplikasi belanja online. Dengan pendekatan ini, SIMPELKAN menghadirkan layanan penjualan benih ikan yang lebih mudah,

transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor perikanan budidaya.

Akses :

- Website : https://simpelkan.baliprov.go.id/benih-ikan
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :
https://pse.layanan.go.id/sealid/662

72. Sipandu Beradat (Sistem Pengamanan Lingkungan Berbasis Desa Adat)

Deskripsi :

Sistem informasi forum dan pelaporan desa adat terkait kegiatan Sipandu Beradat di setiap desa adat. Sistem pengamanan lingkungan berbasis Desa Adat ini mengupayakan seluruh komponen keamanan yang ada di tingkat desa dalam bentuk forum. Forum sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis Desa Adat diharapkan dapat bekerja sinergi dalam penanganan berbagai masalah keamanan dan kerawanan sosial yang terjadi di wilayah (wewidangan) Desa Adat sehingga terbentuk pola pengamanan yang efektif dan tidak terjadi arogansi dalam penanganan kasus dan/atau permasalahan di Desa Adat. Laporan forum dan laporan bulanan yang di input oleh desa adat nantinya akan di monitoring oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Akses :

- Website Publik: https://sipanduberadat.baliprov.go.id
- Dashboard: https://sipanduberadat.baliprov.go.id/dashboard
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) : -

73. Website DEKRANASDA

Deskripsi :

Website Dekranasda adalah *platform* resmi Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Bali yang berfungsi untuk memperkenalkan berbagai produk kerajinan tangan daerah Provinsi Bali kepada masyarakat luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini bertujuan untuk memperluas pasar bagi pengrajin lokal. Website ini juga memberikan informasi mengenai berbagai jenis kerajinan Indonesia, teknik pembuatan, serta sejarah dan budaya yang terkandung dalam setiap produk. Edukasi ini penting untuk meningkatkan apresiasi terhadap kerajinan tangan di Provinsi Bali.

Akses :

- Website : https://dekranasda.baliprov.go.id/
- Play Store : -
- App Store : -

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :

74. Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Bali New Version

Deskripsi :

Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Bali merupakan portal resmi Pemerintah Provinsi Bali yang menyediakan akses terbuka terhadap berbagai produk hukum daerah secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Website ini dikembangkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan informasi hukum serta memperkuat transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bali.

Website JDIH Provinsi Bali telah terintegrasi dengan Portal JDIHN (jdihn.go.id) sebagai wujud implementasi kebijakan nasional dalam penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang terstandar, terkoordinasi, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Fitur yang ditambahkan pada versi terbaru diantaranya yaitu:

a. Integrasi dengan Single Sign On (SSO) Provinsi Bali untuk akses login dan pengelola user aplikasi.
b. Integrasi dengan Bali Media Center (BMC) untuk portal berita.

c. Integrasi dengan Kantor Virtual, yaitu dokumen produk hukum dapat diajukan untuk TTE dokumen salinan dari dashboard admin JDIH Provinsi Bali ke Kantor Virtual dengan proses verifikasi berjenjang. Riwayat verifikasi dapat dilihat melalui dashboard admin JDIH Provinsi Bali.

Melalui portal ini, pengguna dapat mencari, menemukan, dan mengunduh berbagai jenis data dan dokumen hukum, di antaranya:

- Peraturan Perundang-undangan
- Artikel Hukum
- Monografi Hukum
- Putusan Pengadilan

Tujuan utama dari pengembangan Website JDIH Provinsi Bali adalah untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, akademisi, aparatur pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencari, memperoleh, dan memanfaatkan informasi serta produk hukum daerah secara efektif dan terpercaya.

Akses :

- Website : https://jdih.baliprov.go.id/
- Dashboard Admin: https://dashboard-jdih.baliprov.go.id/
- Play Store : https://balikom.info/jdihprovbali-playstore
- App Store : https://balikom.info/jdihprovbali-appstore

Status Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) :

Dalam Proses Pendaftaran.

BAB VII
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025.

Catatan atas Laporan Keuangan ini dimaksudkan agar laporan keuangan mudah dipahami oleh pembaca luas sehingga laporan yang disampaikan bersifat informatif dan dapat memfasilitasi upaya untuk memenuhi tuntutan peningkatan kinerja, kualitas pelayanan, dan efisiensi sumber daya.

Informasi yang disampaikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tersebut telah disesuaikan dengan kondisi realisasi anggaran dan posisi keuangan selaku entitas pelaporan dengan mengkonsolidasikan laporan keuangan dari masing-masing perangkat daerah sebagai entitas akuntansi, sehingga seluruh transaksi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat disajikan secara wajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta telah berupaya secara maksimal memenuhi acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang diharapkan dapat memberikan peningkatan dan perbaikan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bali menuju ke arah transparansi dan akuntabilitasnya.

Dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini mudah-mudahan pembahasannya dapat berjalan dengan lancar dan ditetapkan tepat waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

No.	Jenis Pajak	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	**2.767.839.352.516,00**	**2.865.836.401.524,00**	**103,54**	**4.520.332.643.486,00**
I	**Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**	**1.002.357.827.000,00**	**1.069.465.642.900,00**	**106,69**	**1.844.964.341.717,00**
1	**PKB-Mobil Penumpang-Sedan**	**13.861.802.693,00**	**14.665.225.100,00**	**105,79**	**27.214.938.300,00**
	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	13.473.640.529,00	14.496.485.900,00	107,59	26.663.126.600,00
	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	326.088.252,00	108.555.800,00	33,29	433.299.000,00
	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	18.280.611,00	10.173.300,00	55,65	25.331.800,00
	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	43.793.301,00	50.010.100,00	114,19	93.180.900,00
2	**PKB-Mobil Penumpang-Jeep**	**69.661.761.329,00**	**79.599.249.800,00**	**114,26**	**135.243.958.900,00**
	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	69.559.691.144,00	79.479.891.800,00	114,26	135.069.294.400,00
	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat	40.014.559,00	19.012.200,00	47,51	70.414.300,00
	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	62.055.626,00	100.345.800,00	161,70	104.250.200,00
3	**PKB-Mobil Penumpang-Minibus**	**480.632.154.563,00**	**531.666.094.500,00**	**110,61**	**901.273.780.700,00**
	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	478.051.655.542,00	528.721.547.800,00	110,59	896.793.967.400,00
	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	799.968.252,00	1.019.611.000,00	127,45	1.786.748.800,00
	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	343.315.173,00	169.229.900,00	49,29	444.724.000,00
	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	1.437.215.596,00	1.755.705.800,00	122,16	2.248.340.500,00
4	**PKB-Mobil Bus-Microbus**	**11.438.541.173,00**	**11.573.630.500,00**	**101,18**	**20.014.575.800,00**
	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	9.972.062.010,00	10.633.553.100,00	106,63	18.198.217.000,00
	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	1.255.318.781,00	737.126.800,00	58,72	1.500.984.900,00
	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat	57.094.776,00	26.616.000,00	46,61	69.018.900,00
	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	154.065.606,00	176.334.600,00	114,45	246.355.000,00
5	**PKB-Mobil Bus-Bus**	**1.277.609.935,00**	**1.202.467.700,00**	**94,11**	**2.318.928.800,00**
	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	360.676.089,00	318.995.300,00	88,44	611.873.600,00
	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	903.198.241,00	866.364.900,00	95,92	1.676.873.800,00
	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	3.842.352,00	3.270.500,00	85,11	6.379.600,00
	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	9.893.253,00	13.837.000,00	139,86	23.801.800,00
6	**PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up**	**66.366.560.623,00**	**70.663.084.900,00**	**106,47**	**123.338.497.600,00**
	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	65.719.317.228,00	69.949.732.300,00	106,43	122.283.937.500,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	144.238.494,00	136.349.300,00	94,53	252.349.300,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat	117.846.763,00	50.585.300,00	42,92	133.576.200,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	385.158.138,00	526.418.000,00	136,67	668.634.600,00
7	**PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck**	**35.337.817.811,00**	**36.591.241.200,00**	**103,54**	**66.665.556.000,00**
	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	30.983.887.603,00	33.408.458.300,00	107,82	59.670.273.800,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	4.184.444.976,00	3.043.622.100,00	72,73	6.707.341.700,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat	11.571.335,00	5.016.100,00	43,34	27.339.000,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	157.913.897,00	134.144.700,00	84,94	260.601.500,00
8	**PKB-Mobil Barang/Beban-Truck**	**19.785.591.048,00**	**19.941.276.100,00**	**100,78**	**34.825.750.000,00**
	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	14.164.482.405,00	14.764.939.500,00	104,23	25.666.591.600,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	5.124.747.773,00	4.590.558.500,00	89,57	8.309.205.500,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat	21.224.825,00	8.480.300,00	39,95	29.864.000,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	475.136.045,00	577.297.800,00	121,50	820.088.900,00
9	**PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van**	**821.521.376,00**	**2.089.655.400,00**	**254,36**	**3.274.264.800,00**
	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	818.733.430,00	2.074.012.600,00	253,31	3.258.650.900,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	0,00	807.500,00	0,00	0,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat	245.134,00	503.300,00	205,31	835.500,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	**2.542.812,00**	**14.332.000,00**	**563,62**	**14.778.400,00**
10	**PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua**	303.151.483.965,00	301.455.634.200,00	99,44	530.759.509.017,00
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	302.513.653.292,00	300.884.814.400,00	99,46	529.833.984.217,00
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	110.548.207,00	26.010.400,00	23,52	77.353.100,00
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	527.282.466,00	544.809.400,00	103,32	848.171.700,00
11	**PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga**	**22.982.484,00**	**18.083.500,00**	**78,68**	**34.581.800,00**
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	22.911.642,00	18.083.500,00	78,92	33.993.300,00
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	98.500,00
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	70.842,00	0,00	0,00	490.000,00
II	**Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**	**748.070.632.825,00**	**798.076.710.700,00**	**106,68**	**1.694.519.308.500,00**
1	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	2.900.663.900,00	3.745.351.600,00	129,12	6.947.410.000,00
2	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	30.288.333.351,00	33.980.088.000,00	112,18	70.725.181.500,00
3	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	301.870.504.870,00	264.228.211.400,00	87,53	685.876.893.300,00
4	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	15.995.108.727,00	14.003.791.600,00	87,55	36.146.981.000,00
5	BBNKB-Mobil Bus-Bus	778.837.782,00	1.311.674.600,00	168,41	1.657.870.000,00
6	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	38.284.251.878,00	51.861.632.000,00	135,46	86.484.578.100,00
7	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	11.038.598.929,00	11.523.692.300,00	104,39	25.223.364.000,00
8	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	12.563.255.314,00	16.160.541.200,00	128,63	28.440.048.000,00
9	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	0,00	1.938.885.100,00	0,00	3.453.580.000,00
10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	334.322.009.756,00	399.315.902.500,00	119,44	749.498.266.600,00
11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	29.068.318,00	6.940.400,00	23,87	65.136.000,00
III	**Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)**	**639.365.501.000,00**	**630.972.809.013,00**	**98,68**	**639.365.501.400,00**
1	PBBKB Bahan Bakar Solar	118.887.922.398,00	121.653.714.200,00	102,32	140.444.400.359,00
2	PBBKB Bahan Bakar Lainnya	520.477.578.602,00	509.319.094.813,00	97,85	498.921.101.041,00
IV	**Pajak Air Permukaan**	**4.000.000.000,00**	**5.276.815.548,00**	**131,92**	**4.486.924.224,00**
1	Pajak Air Permukaan	4.000.000.000,00	5.276.815.548,00	131,92	4.486.924.224,00
V	**Pajak Rokok**	**354.875.391.691,00**	**343.585.515.178,00**	**96,81**	**336.996.567.645,00**
1	Pajak Rokok	354.875.391.691,00	343.585.515.178,00	96,81	336.996.567.645,00
VI	**Pajak Alat Berat**	**90.000.000,00**	**147.095.900,00**	**163,43**	**-**
1	Pajak Alat Berat	90.000.000,00	147.095.900,00	163,43	-

No.	Jenis Pajak	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
VII	**Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)**	**19.080.000.000,00**	**18.311.812.285,00**	**95,97**	**-**
1	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	19.080.000.000,00	18.311.812.285,00	95,97	-

Lampiran 2

Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

No.	OPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	**439.467.617.614,00**	**909.595.917.119,52**	**206,97**	**338.039.879.379,28**
I	**Retribusi Pelayanan Kesehatan**	**324.149.890.000,00**	**294.497.267.763,18**	**90,85**	**280.616.753.706,00**
1	Dinas Kesehatan	324.149.890.000,00	294.497.267.763,18	90,85	280.616.753.706,00
II	**Retribusi Pelayanan Kebersihan**	**16.740.000.000,00**	**17.975.890.000,00**	**107,38**	**15.492.361.459,28**
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	16.740.000.000,00	17.975.890.000,00	107,38	15.492.361.459,28
III	**Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila**	**62.500.000,00**	**66.100.000,00**	**105,76**	**64.250.000,00**
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.500.000,00	3.600.000,00	102,86	-
2	Badan Penghubung	59.000.000,00	62.500.000,00	105,93	64.250.000,00
IV	**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**	**94.000.000,00**	**94.007.578,00**	**100,00**	**-**
1	Dinas Kesehatan	94.000.000,00	94.007.578,00	100,00	-
V	**Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan**	**43.272.000,00**	**65.651.500,00**	**151,71**	**28.049.000,00**
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	43.272.000,00	65.651.500,00	151,71	28.049.000,00
VI	**Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga**	**4.358.620.000,00**	**4.873.970.011,00**	**111,82**	**6.432.789.000,00**
1	Dinas Kebudayaan	1.764.620.000,00	3.096.755.011,00	175,49	4.035.779.000,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.594.000.000,00	1.777.215.000,00	68,51	2.397.010.000,00
VII	**Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah**	**897.000.000,00**	**1.315.022.000,00**	**146,60**	**1.226.096.928,00**
1	Dinas Kesehatan	-	-	-	72.525.928,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	125.000.000,00	148.224.000,00	118,58	110.367.000,00
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	772.000.000,00	1.166.798.000,00	151,14	1.043.204.000,00
VIII	**Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah**	**87.722.335.614,00**	**581.961.065.237,34**	**663,41**	**27.237.632.386,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.500.000.000,00	3.207.849.551,00	128,31	3.209.265.150,00
2	Dinas Kesehatan	751.920.000,00	578.553.620,00	76,94	167.101.247,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.782.832.000,00	2.464.735.000,00	138,25	1.989.018.000,00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	9.360.000,00	9.360.000,00	100,00	9.360.000,00
5	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	704.320.000,00	469.238.500,00	66,62	744.047.100,00
6	Dinas Perhubungan	5.664.000,00	5.664.000,00	100,00	5.664.000,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	5.040.000,00
8	Dinas Kebudayaan	355.900.000,00	557.900.000,00	156,76	507.400.000,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	400.000.000,00	854.681.294,00	213,67	622.156.660,00
10	Dinas Pariwisata	5.275.200,00	5.275.200,00	100,00	5.275.200,00
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	156.569.814,00	205.469.513,00	131,23	254.457.605,00
12	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	43.536.000,00	39.220.000,00	90,09	23.133.400,00
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25.760.000,00	30.240.000,00	117,39	38.880.000,00
14	Sekretariat Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	205.537.500,00
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	80.188.303.600,00	572.522.807.759,34	713,97	18.707.544.024,00
16	Badan Pendapatan Daerah	277.855.000,00	272.650.800,00	98,13	302.852.500,00
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	359.000.000,00	581.880.000,00	162,08	440.900.000,00
18	Badan Penghubung	1.000.000,00	500.000,00	50,00	-
IX	**Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)**	**5.400.000.000,00**	**8.746.943.030,00**	**161,98**	**6.941.946.900,00**
1	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	5.400.000.000,00	8.746.943.030,00	161,98	6.941.946.900,00

Lampiran 3

Rincian Anggaran Dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

No	OPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	**253.603.839.112,00**	**253.603.839.116,43**	**100,00**	**197.369.947.623,03**
I	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)**	**226.382.756.690,00**	**226.382.756.694,43**	**100,00**	**196.751.692.444,03**
1	Sekretariat Daerah	226.382.756.690,00	226.382.756.694,43	100,00	196.751.692.444,03
II	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)**	**27.000.000.000,00**	**27.000.000.000,00**	**100,00**	**-**
1	Sekretariat Daerah	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	100,00	-
III	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta**	**221.082.422,00**	**221.082.422,00**	**100,00**	**618.255.179,00**
1	Sekretariat Daerah	221.082.422,00	221.082.422,00	100,00	618.255.179,00

Rincian Anggaran Dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

No	OPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	**755.352.613.699,00**	**599.047.221.622,68**	**79,30**	**479.687.209.182,52**
I	**Hasil Penjualan Aset Lain-Lain**	**390.000.000,00**	**700.068.400,00**	**179,50**	**1.061.493.900,00**
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	390.000.000,00	700.068.400,00	179,50	1.061.493.900,00
II	**Hasil Kerja Sama Daerah**	**6.224.780.000,00**	**6.812.347.316,00**	**109,43**	**3.817.445.100,00**
1	Dinas Perhubungan	3.420.000.000,00	4.200.107.316,00	122,81	231.177.100,00
2	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.191.600.000,00	1.191.600.000,00	100,00	1.603.138.000,00
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.613.180.000,00	1.420.640.000,00	88,06	1.983.130.000,00
III	**Jasa Giro pada Kas Daerah**	**9.269.418.781,00**	**7.140.669.743,77**	**77,03**	**7.610.111.049,43**
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.269.418.781,00	7.140.669.743,77	77,03	7.610.111.049,43
IV	**Jasa Giro pada Kas di Bendahara**	**-**	**1.329.865.164,23**	**-**	**1.652.346.726,59**
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	1.329.865.164,23	-	1.652.346.726,59
V	**Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan**	**-**	**-**	**-**	**1.033.753.904,24**
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	1.033.753.904,24
VI	**Jasa Giro pada Rekening Dana BOS**	**-**	**9.845.243,00**	**-**	**8.241.655,55**
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	9.845.243,00	-	8.241.655,55
VII	**Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah**	**2.645.833.333,00**	**15.267.241.419,64**	**577,02**	**9.555.179.227,40**
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.645.833.333,00	15.267.241.419,64	577,02	9.555.179.227,40
VIII	**Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara**	**5.000.000,00**	**18.000.000,00**	**360,00**	**18.000.000,00**
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.000.000,00	18.000.000,00	360,00	18.000.000,00
IX	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**126.144.212,00**	**388.650.982,18**	**308,10**	**2.021.009.936,46**
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	126.144.212,00	388.650.982,18	308,10	2.021.009.936,46
X	**Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**	**50.000.000.000,00**	**17.788.126.600,00**	**35,57**	**70.448.079.400,00**
1	Badan Pendapatan Daerah	50.000.000.000,00	17.788.126.600,00	35,57	70.448.079.400,00
XI	**Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**	**500.000.000,00**	**104.169.200,00**	**20,83**	**788.373.200,00**
1	Badan Pendapatan Daerah	500.000.000,00	104.169.200,00	20,83	788.373.200,00
XII	**Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan**	**100.000,00**	**434.536,00**	**434,53**	**332.394,00**
1	Badan Pendapatan Daerah	100.000,00	434.536,00	434,53	332.394,00
XIII	**Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha**	**2.773.340,00**	**20.093.596,04**	**724,52**	**22.265.708,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.000.000,00	11.176.920,00	558,85	17.232.874,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	5.000,00	-	-
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	-	-	-	8.400,00
4	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	-	10.800,00	-	43.200,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.400,00	16.800,00	200,00	25.200,00
6	Dinas Kebudayaan	2.400,00	2.400,00	100,00	-
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	70.032,00
8	Dinas Pariwisata	-	-	-	8.792,00
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	25.380,00	25.380,00	100,00	22.920,00
10	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	47.760,00	69.120,00	144,72	-
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.400,00	52.800,00	366,67	33.600,00
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	600.000,00	8.654.126,04	1.442,35	4.685.690,00
13	Badan Pendapatan Daerah	-	12.750,00	-	-
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	75.000,00	67.500,00	90,00	135.000,00
XIV	**Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu**	**-**	**339.550,00**	**-**	**1.000.700,00**
1	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	-	339.550,00	-	1.000.700,00
XV	**Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas**	**-**	**1.633.548.454,00**	**-**	**613.334,00**
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	1.633.548.454,00	-	613.334,00
XVI	**Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	**-**	**325.387.871,04**	**-**	**42.848.164,00**
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	325.387.871,04	-	42.848.164,00
XVII	**Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang**	**-**	**33.478.481,00**	**-**	**2.976.200,00**
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	33.478.481,00	-	2.976.200,00
XVIII	**Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa**	**-**	**42.692.500,00**	**-**	**6.075.000,00**
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	42.692.500,00	-	6.075.000,00
XIX	**Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan**	**-**	**907.585.412,65**	**-**	**324.752.080,16**
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	907.585.412,65	-	324.752.080,16
XX	**Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**-**	**34.473.585,00**	**-**	**18.262.522,00**
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	34.473.585,00	-	18.262.522,00
XXI	**Usaha Milik Swasta**	**-**	**-**	**-**	**5.000.000,00**
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	5.000.000,00
XXII	**Pusat**	**94.996.528.409,00**	**-**	**-**	**-**
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	94.996.528.409,00	-	-	-
XXIII	**Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**-**	**93.915.519.097,93**	**-**	**23.773.198,96**
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	93.915.519.097,93	-	23.773.198,96
XXIV	**Alat Kedokteran dan Kesehatan**	**-**	**3.800.000,00**	**-**	**-**
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	3.800.000,00	-	-
XXV	**Bangunan-Bangunan Gedung**	**-**	**309.678.691,16**	**-**	**217.921.489,15**
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	309.678.691,16	-	217.921.489,15
XXVI	**Irigasi-Jalan dan Jembatan**	**-**	**316.697.652,55**	**-**	**-**
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	316.697.652,55	-	-
XXVII	**Instalasi-Instalasi**	**-**	**-**	**-**	**17.982.914,52**
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	17.982.914,52
XXVIII	**Provinsi ke Kabupaten/Kota**	**-**	**55.857.000,00**	**-**	**-**
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	55.857.000,00	-	-
XXIX	**Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa**	**-**	**101.385.000,00**	**-**	**37.500.000,00**
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	101.385.000,00	-	37.500.000,00
XXX	**Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset**	**-**	**4.666,00**	**-**	**-**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	4.666,00	-	-
XXXI	**Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan**	**64.183.650.000,00**	**57.993.630.323,00**	**90,35**	**59.434.976.862,17**
1	Dinas Kesehatan	3.923.650.000,00	4.251.157.822,00	108,35	4.346.969.716,45
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	39.910.000.000,00	32.662.398.001,00	81,84	32.311.877.645,72
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.350.000.000,00	21.080.074.500,00	103,59	22.776.129.500,00
XXXII	**Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain**	**1.200.000.000,00**	**1.193.407.472,00**	**99,45**	**1.215.081.560,00**
1	Dinas Kesehatan	1.200.000.000,00	1.193.407.472,00	99,45	1.215.081.560,00
XXXIII	**Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah**	**25.808.385.624,00**	**23.492.896.204,49**	**91,02**	**2.421.812.955,89**
1	Dinas Kesehatan	25.458.385.624,00	22.893.621.699,26	89,93	1.947.026.535,43
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	350.000.000,00	396.929.997,35	113,41	331.571.513,05
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	202.344.507,88	-	143.214.907,41
XXXIV	**Pungutan bagi Wisatawan Asing**	**500.000.000.000,00**	**369.021.750.000,00**	**73,80**	**317.880.000.000,00**
1	Dinas Pariwisata	500.000.000.000,00	369.021.750.000,00	73,80	317.880.000.000,00
XXXV	**Pendapatan Denda Pajak Daerah**	**-**	**85.577.461,00**	**-**	**-**
1	Badan Pendapatan Daerah	-	85.577.461,00	-	-

Lampiran 5

Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

No.	OPD	Anggaran					Realisasi				
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial
	JUMLAH	**2.526.874.277.345,60**	**1.562.731.648.119,00**	**10.009.000.000,00**	**953.461.885.136,00**	**111.600.000,00**	**2.304.413.342.308,00**	**1.272.505.827.668,79**	**10.009.000.000,00**	**933.511.389.721,97**	**111.600.000,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.291.832.286.219,00	336.969.206.892,00	-	160.688.300.000,00	-	1.161.616.450.017,00	310.916.027.179,58	-	159.309.694.906,97	-
2	Dinas Kesehatan	421.840.629.366,00	292.729.825.840,00	-	722.335.136,00	-	390.521.888.669,00	251.720.808.047,89	-	437.823.612,00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	41.171.352.915,00	109.481.621.028,00	-	197.619.045.000,00	-	37.974.733.143,00	97.545.230.629,00	-	184.877.559.441,00	-
4	Satuan Polisi Pamong Praja	22.947.873.585,00	30.677.844.107,00	-	-	-	20.819.136.858,00	30.016.550.934,00	-	-	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.437.060.948,00	11.497.917.996,00	-	-	-	13.876.159.805,00	9.492.698.793,92	-	-	-
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	18.896.105.419,00	15.076.596.103,00	-	-	111.600.000,00	17.222.012.848,00	14.178.430.413,00	-	-	111.600.000,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	31.865.452.568,00	6.736.925.066,00	-	-	-	28.992.142.949,00	6.339.195.785,00	-	-	-
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	11.544.283.540,00	9.807.394.723,00	-	4.846.000.000,00	-	10.651.346.987,00	9.112.035.261,00	-	4.446.000.000,00	-
9	Dinas Perhubungan	25.755.672.215,40	76.155.610.813,00	-	1.922.000.000,00	-	20.845.053.875,00	62.959.698.736,00	-	1.922.000.000,00	-
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	24.161.727.824,00	54.745.247.097,00	-	4.891.250.000,00	-	22.147.944.996,00	43.743.744.761,00	-	4.889.048.094,00	-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	13.114.769.179,00	8.951.116.204,00	9.000.000,00	-	-	12.157.539.336,00	8.105.797.052,00	9.000.000,00	-	-
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.871.356.811,00	4.037.316.178,00	-	-	-	12.233.071.326,00	3.370.540.597,00	-	-	-
13	Dinas Kebudayaan	42.363.697.777,00	57.059.686.335,00	-	25.235.000.000,00	-	41.178.988.004,00	52.621.204.789,55	-	25.135.000.000,00	-
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	10.916.832.800,00	5.215.695.606,00	-	470.670.000.000,00	-	9.994.475.509,00	4.574.304.456,00	-	468.670.000.000,00	-
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	25.619.548.375,20	6.677.605.559,00	-	350.000.000,00	-	21.541.726.609,00	6.109.453.268,00	-	350.000.000,00	-
16	Dinas Pariwisata	12.549.424.810,00	18.332.245.885,00	-	-	-	11.058.473.246,00	8.616.400.649,00	-	-	-
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	51.553.930.982,00	36.879.745.066,00	10.000.000.000,00	11.793.000.000,00	-	49.277.233.011,00	32.073.072.794,00	10.000.000.000,00	11.793.000.000,00	-
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	38.018.717.214,00	23.052.096.533,00	-	-	-	35.619.479.225,00	20.030.477.665,00	-	-	-
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.524.042.945,00	9.510.770.510,00	-	506.000.000,00	-	13.622.608.126,00	8.667.225.268,00	-	456.000.000,00	-
20	Sekretariat DPRD	74.349.784.611,00	179.613.285.018,00	-	-	-	69.683.444.936,00	84.941.056.860,00	-	-	-
21	Sekretariat Daerah	85.626.702.965,00	147.489.941.014,00	-	46.242.750.000,00	-	77.821.118.529,00	102.774.821.829,00	-	43.249.058.668,00	-
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.251.820.418,00	7.526.677.219,00	-	-	-	14.280.671.060,00	5.780.427.917,52	-	-	-
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	21.428.130.146,00	15.596.556.135,00	-	-	-	17.489.430.153,00	11.800.355.680,12	-	-	-
24	Badan Pendapatan Daerah	125.104.927.196,00	31.636.194.240,00	-	-	-	120.590.790.262,00	27.645.262.475,61	-	-	-
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29.316.361.161,00	28.579.251.300,00	-	-	-	27.245.776.880,00	25.892.058.594,22	-	-	-
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	10.698.167.860,00	14.274.620.702,00	-	-	-	9.950.233.372,00	11.964.880.452,00	-	-	-
27	Badan Penghubung	3.109.813.101,00	7.034.594.548,00	-	-	-	2.767.866.905,00	6.340.726.756,00	-	-	-
28	Inspektorat	25.989.250.471,00	8.061.900.621,00	-	-	-	24.972.876.259,00	7.283.789.359,00	-	-	-
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.014.553.924,00	9.324.159.781,00	-	27.976.205.000,00	-	8.260.669.413,00	7.889.550.666,38	-	27.976.205.000,00	-

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

No	OPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	**2.526.874.277.345,60**	**2.304.413.342.308,00**	**91,19**	**2.088.693.065.509,00**
I	**Belanja Gaji Pokok ASN**	**810.291.141.327,43**	**778.014.696.295,00**	**96,02**	**682.624.392.348,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	482.831.702.944,00	460.337.108.204,00	95,34	436.666.462.539,00
2	Dinas Kesehatan	94.245.877.783,00	93.199.664.302,00	98,89	75.438.381.380,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	18.259.641.770,40	16.950.977.888,00	92,83	8.458.474.854,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	7.655.647.654,00	7.170.960.453,00	93,67	5.749.158.804,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.525.362.183,00	4.498.019.336,00	99,40	3.899.911.437,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	6.167.942.933,00	5.965.753.710,00	96,72	5.078.070.904,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	8.331.533.830,00	7.999.628.381,00	96,02	7.737.396.610,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	3.688.775.391,00	3.617.660.831,00	98,07	2.668.200.552,00
9	Dinas Perhubungan	7.827.853.632,00	7.662.182.792,00	97,88	5.482.316.338,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	8.020.551.118,00	7.811.878.986,00	97,40	4.187.422.262,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.921.953.210,00	3.843.364.024,00	98,00	3.240.763.431,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.141.834.823,00	4.062.821.630,00	98,09	3.635.357.321,00
13	Dinas Kebudayaan	22.518.727.898,00	22.402.343.372,00	99,48	6.439.333.083,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	3.517.975.000,00	3.433.542.899,00	97,60	2.423.205.549,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.969.086.619,03	6.806.975.867,00	85,42	5.979.559.442,00
16	Dinas Pariwisata	3.598.884.996,00	3.289.795.765,00	91,41	3.069.187.169,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	19.185.645.510,00	19.019.119.154,00	99,13	12.791.146.911,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	11.961.301.234,00	11.726.439.510,00	98,04	10.552.198.756,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.371.313.300,00	4.301.056.164,00	98,39	4.228.091.388,00
20	Sekretariat DPRD	4.316.905.982,00	4.247.657.384,00	98,40	2.943.312.804,00
21	Sekretariat Daerah	23.317.847.296,00	22.040.500.702,00	94,52	15.714.957.461,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.847.598.045,00	4.774.583.833,00	98,49	3.460.435.181,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.046.749.994,00	5.264.406.581,00	87,06	5.594.814.085,00
24	Badan Pendapatan Daerah	27.743.675.767,00	26.543.640.108,00	95,67	18.872.596.726,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.815.307.476,00	7.762.962.497,00	99,33	17.336.597.894,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	3.168.013.587,00	3.136.779.600,00	99,01	2.562.198.422,00
27	Badan Penghubung	1.004.944.136,00	906.618.830,00	90,22	819.933.890,00
28	Inspektorat	6.822.220.826,00	6.793.587.946,00	99,58	5.352.097.945,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.466.266.390,00	2.444.665.546,00	99,12	2.242.809.210,00
II	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**	**76.416.723.711,79**	**69.228.876.492,00**	**90,59**	**61.296.387.446,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	44.964.577.230,00	40.876.364.087,00	90,91	39.083.281.318,00
2	Dinas Kesehatan	8.346.496.668,00	8.200.381.007,00	98,25	6.674.656.288,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.611.009.931,00	1.582.301.352,00	60,60	879.243.348,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	839.328.028,00	680.200.565,00	81,04	598.908.912,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	465.762.682,00	462.253.076,00	99,25	418.564.708,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	682.804.233,00	476.709.436,00	69,82	405.013.846,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	852.231.448,00	746.611.824,00	87,61	725.762.982,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	356.980.185,00	349.130.574,00	97,80	261.215.558,00
9	Dinas Perhubungan	806.657.748,00	659.983.814,00	81,82	498.327.148,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	697.577.555,00	672.502.427,00	96,41	378.441.784,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	370.406.952,00	363.238.952,00	98,06	309.166.666,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	427.429.497,00	362.862.298,00	84,89	307.288.116,00
13	Dinas Kebudayaan	2.150.297.883,00	2.115.535.811,00	98,38	597.493.484,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	354.125.000,00	278.062.567,00	78,52	218.512.260,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	653.061.906,79	553.825.964,00	84,80	502.533.292,00
16	Dinas Pariwisata	390.397.245,00	324.834.822,00	83,21	278.468.424,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.675.828.480,00	1.644.912.921,00	98,16	1.124.652.460,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.175.454.108,00	1.074.851.721,00	91,44	998.391.616,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	373.319.511,00	365.459.842,00	97,89	360.394.148,00
20	Sekretariat DPRD	396.762.629,00	384.643.551,00	96,95	280.872.938,00
21	Sekretariat Daerah	2.444.028.292,00	1.978.361.362,00	80,95	1.456.843.230,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	429.719.555,00	423.915.363,00	98,65	334.722.398,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	579.934.429,00	462.883.402,00	79,82	478.520.754,00
24	Badan Pendapatan Daerah	2.556.617.099,00	2.427.240.545,00	94,94	1.821.901.318,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	710.043.407,00	697.634.244,00	98,25	1.392.808.720,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	255.366.676,00	251.109.784,00	98,33	204.753.574,00
27	Badan Penghubung	104.756.973,00	73.951.441,00	70,59	66.171.400,00
28	Inspektorat	573.092.262,00	568.476.486,00	99,19	493.472.522,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	172.656.099,00	170.637.254,00	98,83	146.004.234,00
III	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**	**7.721.523.623,00**	**7.211.728.590,00**	**93,40**	**6.498.224.950,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	231.700.000,00	215.850.000,00	93,16	229.900.000,00
2	Dinas Kesehatan	855.428.125,00	823.630.000,00	96,28	720.939.950,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	512.420.000,00	338.520.000,00	66,06	304.640.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	216.860.000,00	213.620.000,00	98,51	185.360.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	160.188.750,00	158.760.000,00	99,11	126.000.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	227.198.000,00	220.354.950,00	96,99	171.220.000,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	284.970.000,00	259.780.000,00	91,16	223.440.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	135.170.000,00	130.130.000,00	96,27	122.290.000,00
9	Dinas Perhubungan	353.922.000,00	343.865.000,00	97,16	337.400.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	220.520.000,00	219.980.000,00	99,76	155.120.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	209.638.750,00	203.880.000,00	97,25	171.860.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	75.750.000,00	69.440.000,00	91,67	52.470.000,00
13	Dinas Kebudayaan	254.196.250,00	251.254.950,00	98,84	209.325.000,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	128.660.000,00	121.100.000,00	94,12	123.620.000,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	309.300.000,00	264.540.000,00	85,53	219.340.000,00
16	Dinas Pariwisata	144.520.001,00	129.584.000,00	89,67	151.340.000,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	340.780.000,00	331.420.000,00	97,25	293.640.000,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	375.902.804,00	358.070.000,00	95,26	341.110.000,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	149.826.250,00	148.514.000,00	99,12	187.990.000,00
20	Sekretariat DPRD	86.958.443,00	74.224.950,00	85,36	88.340.000,00
21	Sekretariat Daerah	917.398.500,00	838.518.740,00	91,40	679.400.000,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	150.148.750,00	148.820.000,00	99,12	148.820.000,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	220.050.000,00	202.940.000,00	92,22	205.380.000,00

No	OPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
24	Badan Pendapatan Daerah	452.896.250,00	448.530.000,00	99,04	418.160.000,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	233.700.000,00	230.772.000,00	98,75	239.260.000,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	118.511.250,00	117.590.000,00	99,22	104.120.000,00
27	Badan Penghubung	52.069.500,00	47.880.000,00	91,95	47.880.000,00
28	Inspektorat	160.318.750,00	158.900.000,00	99,12	149.000.000,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	142.521.250,00	141.260.000,00	99,12	90.860.000,00
IV	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**	**61.749.673.648,00**	**58.729.791.963,00**	**95,11**	**57.313.026.797,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	41.118.424.840,00	39.179.364.600,00	95,28	38.051.076.037,00
2	Dinas Kesehatan	10.112.737.751,00	9.766.767.981,00	96,58	8.588.914.400,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	374.350.000,00	239.112.414,00	63,87	162.075.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	563.440.000,00	554.831.666,00	98,47	588.772.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	81.180.433,00	81.122.833,00	99,93	105.442.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	111.048.666,00	90.301.666,00	81,32	117.030.000,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	1.021.209.950,00	939.994.950,00	92,05	961.510.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	188.612.499,00	184.131.429,00	97,62	164.110.000,00
9	Dinas Perhubungan	61.992.499,00	51.842.499,00	83,63	50.200.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	668.427.990,00	658.275.940,00	98,48	384.679.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	116.629.165,00	116.629.165,00	100,00	137.119.900,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	399.456.040,00	241.560.233,00	60,47	318.840.000,00
13	Dinas Kebudayaan	180.692.499,00	177.392.499,00	98,17	182.810.000,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	149.000.000,00	136.317.833,00	91,49	136.230.000,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	257.570.164,00	226.700.164,00	88,01	210.530.000,00
16	Dinas Pariwisata	249.904.393,00	237.190.223,00	94,91	99.070.000,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	966.103.333,00	955.603.333,00	98,91	923.615.000,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	850.284.527,00	831.906.000,00	97,84	868.741.000,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	220.989.950,00	217.511.150,00	98,43	245.600.000,00
20	Sekretariat DPRD	96.018.000,00	95.945.499,00	99,92	103.690.000,00
21	Sekretariat Daerah	1.514.521.094,00	1.388.700.605,00	91,69	1.394.865.930,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	360.804.499,00	355.401.429,00	98,50	355.389.000,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	106.372.000,00	74.358.000,00	69,90	60.920.000,00
24	Badan Pendapatan Daerah	80.153.000,00	76.030.000,00	94,86	68.180.000,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	901.965.690,00	862.265.690,00	95,60	2.054.461.530,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	185.440.000,00	179.569.830,00	96,83	151.484.000,00
27	Badan Penghubung	7.917.000,00	7.236.666,00	91,41	1.560.000,00
28	Inspektorat	716.742.833,00	716.042.833,00	99,90	715.242.000,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	87.684.833,00	87.684.833,00	100,00	110.870.000,00
V	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**	**11.946.782.097,78**	**11.022.675.000,00**	**92,26**	**6.227.531.522,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.668.970.000,00	2.321.535.000,00	86,98	1.516.226.000,00
2	Dinas Kesehatan	987.690.000,00	975.405.000,00	98,76	550.850.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	823.217.752,00	768.920.000,00	93,40	275.125.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	163.720.000,00	152.660.000,00	93,24	51.660.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	155.695.000,00	155.550.000,00	99,91	124.755.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	229.211.000,00	220.040.000,00	96,00	152.540.000,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	159.325.000,00	136.805.000,00	85,87	116.210.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	118.340.000,00	117.425.000,00	99,23	73.745.000,00
9	Dinas Perhubungan	291.540.000,00	284.965.000,00	97,74	159.270.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	180.555.000,00	175.310.000,00	97,10	82.240.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	117.295.000,00	116.240.000,00	99,10	85.120.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	133.310.875,00	130.150.000,00	97,63	93.705.000,00
13	Dinas Kebudayaan	1.106.250.000,00	1.102.470.000,00	99,66	180.490.000,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	134.800.000,00	124.520.000,00	92,37	67.600.000,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	234.209.795,78	197.940.000,00	84,51	173.595.522,00
16	Dinas Pariwisata	110.644.000,00	90.750.000,00	82,02	85.235.000,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	648.575.000,00	645.470.000,00	99,52	308.695.000,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	290.178.875,00	286.195.000,00	98,63	218.125.000,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	122.415.000,00	121.675.000,00	99,40	99.530.000,00
20	Sekretariat DPRD	190.705.000,00	189.085.000,00	99,15	106.230.000,00
21	Sekretariat Daerah	862.696.000,00	638.205.000,00	73,98	336.745.000,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	149.065.000,00	145.475.000,00	97,59	71.475.000,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	228.394.875,00	195.850.000,00	85,75	209.290.000,00
24	Badan Pendapatan Daerah	1.296.778.500,00	1.211.870.000,00	93,45	732.655.000,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	171.475.000,00	167.145.000,00	97,47	132.780.000,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	97.445.000,00	91.285.000,00	93,68	69.650.000,00
27	Badan Penghubung	39.175.425,00	28.975.000,00	73,96	26.430.000,00
28	Inspektorat	159.130.000,00	155.155.000,00	97,50	63.620.000,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	75.975.000,00	75.605.000,00	99,51	63.940.000,00
VI	**Belanja Tunjangan Beras ASN**	**43.873.300.039,00**	**40.204.114.661,00**	**91,64**	**34.012.967.691,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	25.605.889.170,00	23.435.239.780,00	91,52	21.801.532.043,00
2	Dinas Kesehatan	5.157.378.230,00	5.129.737.930,00	99,46	4.059.285.840,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.088.909.327,00	1.005.135.285,00	92,31	447.265.920,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	436.305.760,00	350.567.115,00	80,35	278.165.220,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	241.821.726,00	241.369.825,00	99,81	205.865.783,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	338.944.912,00	277.272.040,00	81,80	216.318.540,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	455.159.700,00	398.961.780,00	87,65	375.280.440,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	198.267.855,00	194.411.490,00	98,05	133.325.220,00
9	Dinas Perhubungan	384.396.916,00	375.787.380,00	97,76	249.559.320,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	427.796.803,00	413.747.323,00	96,72	206.252.160,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	202.776.000,00	200.748.240,00	99,00	157.296.240,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	231.267.235,00	191.472.445,00	82,79	155.703.000,00
13	Dinas Kebudayaan	1.364.816.458,00	1.352.057.260,00	99,07	308.436.780,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	220.000.000,00	165.600.400,00	75,27	114.351.180,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	362.347.437,00	309.553.208,00	85,43	272.154.360,00
16	Dinas Pariwisata	207.918.421,00	173.735.580,00	83,56	147.591.960,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	981.641.030,00	969.474.470,00	98,76	597.102.900,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	624.769.152,00	564.821.685,00	90,40	499.263.480,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	194.954.640,00	193.723.500,00	99,37	182.063.880,00
20	Sekretariat DPRD	234.689.080,00	229.402.420,00	97,75	150.343.920,00
21	Sekretariat Daerah	1.713.338.916,00	1.128.388.090,00	65,86	741.870.480,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	246.646.275,00	241.218.945,00	97,80	168.883.440,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	361.122.480,00	250.283.520,00	69,31	257.525.520,00
24	Badan Pendapatan Daerah	1.562.124.747,00	1.414.724.700,00	90,56	918.575.280,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	395.556.535,00	388.853.155,00	98,31	883.378.685,00

No	OPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	142.668.440,00	140.060.280,00	98,17	111.019.860,00
27	Badan Penghubung	64.590.834,00	43.506.315,00	67,36	38.455.020,00
28	Inspektorat	326.489.880,00	323.910.520,00	99,21	254.339.040,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100.712.080,00	100.349.980,00	99,64	81.762.180,00
VII	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**	**67.632.212.020,95**	**59.916.814.233,00**	**88,59**	**8.023.232.190,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	19.975.525.524,00	17.941.645.525,00	89,82	4.885.912.029,00
2	Dinas Kesehatan	11.568.857.800,00	10.972.631.771,00	94,85	838.156.188,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.489.078.346,00	1.330.626.323,00	89,36	86.667.075,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	1.326.495.093,00	1.110.172.097,00	83,69	85.445.226,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	878.336.788,00	719.899.063,00	81,96	43.905.598,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1.165.097.870,00	911.220.398,00	78,21	62.397.989,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	2.018.593.995,00	1.807.087.014,00	89,52	135.010.569,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	706.028.627,00	578.908.598,00	82,00	40.615.874,00
9	Dinas Perhubungan	1.487.844.926,00	1.029.692.014,00	69,21	75.571.950,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.103.627.708,00	933.400.784,00	84,58	50.071.815,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	767.497.060,00	700.993.474,00	91,34	47.861.619,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	825.213.158,00	714.105.072,00	86,54	61.675.398,00
13	Dinas Kebudayaan	1.349.556.357,00	1.112.903.369,00	82,46	73.530.937,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	663.000.000,00	589.154.320,00	88,86	39.948.514,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.330.337.445,95	1.155.522.600,00	86,86	83.541.220,00
16	Dinas Pariwisata	1.045.261.829,00	688.986.655,00	65,92	44.435.395,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.195.354.042,00	2.095.127.495,00	95,43	171.782.771,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.026.534.263,00	1.886.304.343,00	93,08	154.332.478,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	808.256.009,00	765.287.057,00	94,68	70.776.031,00
20	Sekretariat DPRD	507.626.700,00	448.198.442,00	88,29	32.547.962,00
21	Sekretariat Daerah	5.224.717.400,00	4.492.269.482,00	85,98	267.194.904,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	950.623.404,00	830.142.249,00	87,33	62.430.267,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.172.832.993,00	986.695.294,00	84,13	63.980.696,00
24	Badan Pendapatan Daerah	1.801.905.565,00	1.488.874.230,00	82,63	195.949.166,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.728.642.798,00	1.617.122.097,00	93,55	177.779.209,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	915.581.803,00	594.562.962,00	64,94	39.715.414,00
27	Badan Penghubung	186.084.852,00	132.948.449,00	71,45	7.574.735,00
28	Inspektorat	1.834.462.604,00	1.730.379.638,00	94,33	93.757.259,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	579.237.061,00	551.953.418,00	95,29	30.663.902,00
VIII	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**	**12.684.882,00**	**9.713.113,00**	**76,57**	**8.058.409,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	5.359.181,00	4.827.234,00	90,07	4.580.543,00
2	Dinas Kesehatan	1.846.423,00	1.503.013,00	81,40	1.229.596,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.159.501,00	289.516,00	24,97	109.890,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	135.803,00	99.258,00	73,09	72.167,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	61.259,00	60.788,00	99,23	50.598,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	147.769,00	79.261,00	53,64	58.915,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	157.033,00	96.726,00	61,60	96.952,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	67.811,00	53.417,00	78,77	34.730,00
9	Dinas Perhubungan	118.487,00	115.338,00	97,34	70.846,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	126.080,00	122.229,00	96,95	54.657,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	66.626,00	52.971,00	79,50	39.131,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	70.765,00	55.724,00	78,75	47.110,00
13	Dinas Kebudayaan	521.960,00	433.625,00	83,08	85.999,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	72.800,00	53.470,00	73,45	30.803,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	101.838,00	87.686,00	86,10	67.909,00
16	Dinas Pariwisata	59.148,00	45.557,00	77,02	39.529,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	304.372,00	300.523,00	98,74	181.763,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	180.961,00	155.073,00	85,69	136.477,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	60.368,00	56.664,00	93,86	49.301,00
20	Sekretariat DPRD	98.225,00	66.595,00	67,80	38.993,00
21	Sekretariat Daerah	540.023,00	326.963,00	60,55	199.678,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	76.323,00	67.926,00	89,00	39.533,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	136.669,00	71.716,00	52,47	77.058,00
24	Badan Pendapatan Daerah	437.319,00	401.491,00	91,81	236.697,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	484.550,00	105.038,00	21,68	282.141,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	46.516,00	44.384,00	95,42	34.613,00
27	Badan Penghubung	25.620,00	13.524,00	52,79	11.976,00
28	Inspektorat	187.594,00	93.906,00	50,06	69.975,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	33.858,00	33.497,00	98,93	30.829,00
IX	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**	**78.990.769.573,74**	**63.427.046.146,00**	**80,30**	**54.140.510.327,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	49.870.787.634,00	38.918.270.734,00	78,04	33.350.620.012,00
2	Dinas Kesehatan	8.622.883.997,00	7.805.612.022,00	90,52	6.539.836.938,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.147.015.767,00	1.129.770.222,00	98,50	722.573.312,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	833.017.812,00	563.351.565,00	67,63	508.193.680,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	430.729.075,00	371.582.553,00	86,27	334.227.151,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	584.518.145,00	459.250.100,00	78,57	427.638.298,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	822.839.871,00	697.657.537,00	84,79	684.555.121,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	333.800.873,00	274.134.989,00	82,13	231.322.776,00
9	Dinas Perhubungan	951.637.654,40	561.679.406,00	59,02	461.684.284,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	635.797.758,00	621.863.850,00	97,81	375.532.794,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	349.477.475,00	306.292.814,00	87,64	279.783.186,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	361.599.512,00	310.770.330,00	85,94	304.531.189,00
13	Dinas Kebudayaan	1.380.030.130,00	1.288.918.858,00	93,40	561.286.283,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	309.800.000,00	250.472.051,00	80,85	208.131.784,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.285.472.884,34	564.750.265,00	43,93	508.831.120,00
16	Dinas Pariwisata	435.188.666,00	271.325.779,00	62,35	279.540.649,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.650.862.405,00	1.413.042.144,00	85,59	1.174.499.680,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	983.983.524,00	952.519.411,00	96,80	923.946.697,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	432.000.132,00	352.979.226,00	81,71	360.572.937,00
20	Sekretariat DPRD	357.047.382,00	302.080.977,00	84,61	250.713.807,00
21	Sekretariat Daerah	1.924.159.833,00	1.706.777.401,00	88,70	1.377.214.194,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	430.678.497,00	359.601.588,00	83,50	302.001.694,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	781.089.907,00	458.066.566,00	58,64	512.253.350,00
24	Badan Pendapatan Daerah	1.899.011.724,00	1.712.048.106,00	90,15	1.378.009.258,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	825.395.859,00	679.516.441,00	82,33	1.083.823.916,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	311.774.258,00	249.372.147,00	79,98	216.383.288,00
27	Badan Penghubung	98.319.114,00	76.069.904,00	77,37	72.300.149,00

No	OPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
28	Inspektorat	683.653.651,00	573.883.609,00	83,94	526.075.780,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	258.196.034,00	195.385.551,00	75,67	184.427.000,00
X	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**	**1.853.076.835,00**	**1.633.933.287,00**	**88,17**	**1.405.866.165,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.025.277.520,00	954.651.869,00	93,11	899.598.913,00
2	Dinas Kesehatan	222.706.989,00	195.441.025,00	87,76	155.865.297,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	67.928.929,00	37.602.061,00	55,36	17.408.958,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	17.848.571,00	15.309.828,00	85,78	11.714.824,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.536.833,00	9.444.883,00	89,64	8.049.648,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	14.588.894,00	12.666.174,00	86,82	10.417.152,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	30.282.628,00	16.617.218,00	54,87	15.886.489,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	9.060.411,00	7.761.412,00	85,66	5.473.115,00
9	Dinas Perhubungan	18.896.918,00	16.472.920,00	87,17	11.279.192,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	17.314.906,00	16.690.048,00	96,39	8.775.266,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.291.699,00	8.105.405,00	87,23	6.616.343,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.828.919,00	8.604.269,00	87,54	7.476.638,00
13	Dinas Kebudayaan	59.187.161,00	51.555.395,00	87,11	13.246.972,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	12.500.000,00	7.438.271,00	59,51	4.986.213,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	19.003.860,00	14.158.363,00	74,50	12.326.776,00
16	Dinas Pariwisata	9.961.680,00	6.936.854,00	69,64	6.273.191,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	46.875.375,00	41.213.552,00	87,92	26.240.718,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	26.325.363,00	24.427.989,00	92,79	21.714.021,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.149.624,00	9.002.788,00	88,70	8.683.897,00
20	Sekretariat DPRD	10.913.208,00	9.237.950,00	84,65	6.060.420,00
21	Sekretariat Daerah	58.697.463,00	47.470.762,00	80,87	32.355.467,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.803.357,00	10.253.781,00	86,87	7.149.795,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.994.114,00	10.883.861,00	90,74	11.496.860,00
24	Badan Pendapatan Daerah	68.153.363,00	57.609.433,00	84,53	38.632.766,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.019.270,00	16.275.854,00	77,43	35.605.994,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	7.483.055,00	6.634.502,00	88,66	5.261.152,00
27	Badan Penghubung	2.824.740,00	1.872.989,00	66,31	1.687.791,00
28	Inspektorat	16.876.051,00	14.457.496,00	85,67	11.000.068,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.745.934,00	5.136.335,00	89,39	4.582.229,00
XI	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**	**5.486.841.979,06**	**4.901.742.775,00**	**89,34**	**4.217.575.220,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	3.075.799.093,00	2.863.915.913,00	93,11	2.698.763.758,00
2	Dinas Kesehatan	704.335.909,00	586.321.935,00	83,24	467.599.996,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	155.782.525,00	112.803.945,00	72,41	52.227.326,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	50.546.125,00	45.929.230,00	90,87	35.144.909,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31.610.574,00	28.334.658,00	89,64	24.149.189,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	44.637.774,00	37.998.512,00	85,13	31.251.810,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	69.871.741,00	49.851.654,00	71,35	47.659.791,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	27.181.143,00	23.283.953,00	85,66	16.419.442,00
9	Dinas Perhubungan	56.691.079,00	49.418.387,00	87,17	33.837.825,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	51.943.594,00	50.069.017,00	96,39	26.325.668,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	27.887.028,00	24.316.007,00	87,19	19.849.141,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.700.807,00	25.812.741,00	86,91	22.430.059,00
13	Dinas Kebudayaan	177.560.053,00	154.661.197,00	87,10	39.741.135,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	27.400.000,00	22.314.641,00	81,44	14.958.836,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	57.011.662,06	42.475.177,00	74,50	36.980.682,00
16	Dinas Pariwisata	26.148.831,00	20.810.432,00	79,58	18.819.599,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	140.625.580,00	123.638.803,00	87,92	78.722.846,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	78.976.605,00	73.284.085,00	92,79	65.142.616,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30.449.237,00	27.008.418,00	88,70	26.051.892,00
20	Sekretariat DPRD	31.739.558,00	27.713.505,00	87,32	18.181.361,00
21	Sekretariat Daerah	159.958.247,00	142.410.472,00	89,03	97.067.093,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	35.410.034,00	30.761.051,00	86,87	21.449.459,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	35.982.547,00	32.651.790,00	90,74	34.490.931,00
24	Badan Pendapatan Daerah	204.459.499,00	172.826.134,00	84,53	115.899.113,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	58.857.752,00	48.827.449,00	82,96	106.816.662,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	22.449.253,00	19.903.566,00	88,66	15.783.603,00
27	Badan Penghubung	7.459.799,00	5.618.996,00	75,32	5.063.369,00
28	Inspektorat	49.128.118,00	43.372.146,00	88,28	33.000.367,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.237.812,00	15.408.961,00	89,39	13.746.742,00
XII	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN**	**6.704.005.318,25**	**215,00**	**0,00**	**-**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	5.031.053.842,00	215,00	0,00	-
2	Dinas Kesehatan	239.385.702,00	-	-	-
4	Satuan Polisi Pamong Praja	151.053.609,00	-	-	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.179.773,00	-	-	-
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	243.915.856,00	-	-	-
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	150.752.256,00	-	-	-
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	10.499.629,00	-	-	-
9	Dinas Perhubungan	93.870.571,00	-	-	-
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	40.107.757,00	-	-	-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.306.418,00	-	-	-
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	121.844.904,00	-	-	-
13	Dinas Kebudayaan	84.396.362,00	-	-	-
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	92.700.000,00	-	-	-
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	22.999.991,25	-	-	-
16	Dinas Pariwisata	50.588.000,00	-	-	-
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	56.455.602,00	-	-	-
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.826.706,00	-	-	-
20	Sekretariat DPRD	12.519.876,00	-	-	-
21	Sekretariat Daerah	30.972.502,00	-	-	-
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.927.818,00	-	-	-
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	39.036.848,00	-	-	-
24	Badan Pendapatan Daerah	101.655.684,00	-	-	-
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	38.678.480,00	-	-	-
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	9.047.949,00	-	-	-
27	Badan Penghubung	11.771.100,00	-	-	-
28	Inspektorat	18.305.862,00	-	-	-
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.152.221,00	-	-	-
XIII	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**	**578.329.401.894,60**	**519.865.852.590,00**	**89,89**	**483.232.204.073,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	258.235.936.386,00	227.323.150.239,00	88,03	200.369.675.650,00

No	OPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
2	Dinas Kesehatan	116.377.629.395,00	105.889.772.946,00	90,99	93.130.531.915,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.329.434.302,60	9.253.137.835,00	99,18	9.094.062.492,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	6.766.494.720,00	6.368.555.721,00	94,12	6.622.965.435,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.522.229.124,00	4.455.041.524,00	98,51	4.370.874.446,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	5.547.149.017,00	5.288.582.652,00	95,34	5.585.364.518,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	11.513.468.210,00	10.393.047.844,00	90,27	10.660.008.203,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	3.551.498.918,00	3.180.770.864,00	89,56	3.367.689.632,00
9	Dinas Perhubungan	8.260.119.740,00	6.035.290.802,00	73,07	6.172.432.948,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	7.659.079.340,00	6.709.346.993,00	87,60	4.871.993.315,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.236.952.225,00	3.779.013.369,00	89,19	3.916.705.838,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.306.576.059,00	3.747.947.743,00	87,03	4.111.849.099,00
13	Dinas Kebudayaan	7.187.276.258,00	6.975.802.094,00	97,06	7.071.889.928,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	3.096.300.000,00	2.875.937.526,00	92,88	3.000.735.912,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.053.177.591,00	7.232.311.854,00	89,81	7.006.968.224,00
16	Dinas Pariwisata	3.835.083.955,00	3.599.137.743,00	93,85	3.942.065.809,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	15.349.153.085,00	14.447.587.255,00	94,13	14.639.236.313,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	12.698.934.615,00	11.630.731.618,00	91,59	12.438.301.481,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.890.941.791,00	4.477.864.327,00	91,55	4.977.170.098,00
20	Sekretariat DPRD	3.197.347.186,00	2.925.947.566,00	91,51	3.203.348.643,00
21	Sekretariat Daerah	22.046.578.119,00	21.117.935.124,00	95,79	20.416.674.631,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.797.738.314,00	4.366.149.245,00	91,00	4.567.205.531,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.785.333.735,00	6.259.777.672,00	80,40	6.298.404.220,00
24	Badan Pendapatan Daerah	18.548.699.758,00	16.996.105.244,00	91,63	18.028.341.398,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.788.910.198,00	9.700.414.875,00	89,91	10.578.913.753,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	3.355.211.136,00	3.221.898.530,00	96,03	3.077.591.565,00
27	Badan Penghubung	979.236.637,00	922.227.921,00	94,18	929.809.018,00
28	Inspektorat	8.424.189.705,00	8.074.948.923,00	95,85	8.096.855.191,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.988.722.375,00	2.617.416.541,00	87,58	2.684.538.867,00
XIV	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**	**71.288.717.087,00**	**63.481.721.388,00**	**89,05**	**49.503.669.727,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	17.734.525.554,00	15.305.068.242,00	86,30	15.377.679.845,00
2	Dinas Kesehatan	22.243.802.681,00	19.997.578.063,00	89,90	6.528.238.455,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.420.515.195,00	1.394.776.654,00	98,19	1.383.811.681,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	744.183.891,00	722.418.375,00	97,08	666.528.778,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	811.740.946,00	752.233.895,00	92,67	763.447.216,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1.067.268.032,00	980.793.935,00	91,90	1.031.609.611,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	1.030.111.390,00	931.712.984,00	90,45	911.262.497,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	563.773.571,00	506.771.950,00	89,89	540.474.876,00
9	Dinas Perhubungan	1.535.604.266,00	1.171.127.926,00	76,26	1.144.838.103,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	905.942.435,00	836.895.091,00	92,38	828.882.583,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	815.663.640,00	737.545.859,00	90,42	680.126.346,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	763.074.355,00	710.286.966,00	93,08	758.271.425,00
13	Dinas Kebudayaan	1.222.361.885,00	1.127.469.114,00	92,24	1.198.039.573,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	688.200.000,00	619.815.151,00	90,06	614.928.879,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.201.722.015,00	1.038.284.459,00	86,40	1.044.572.980,00
16	Dinas Pariwisata	680.676.493,00	551.618.448,00	81,04	580.745.435,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.717.269.490,00	1.575.252.405,00	91,73	1.515.632.052,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.577.647.088,00	1.361.896.598,00	86,32	1.486.860.342,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	778.723.697,00	711.413.867,00	91,36	871.960.136,00
20	Sekretariat DPRD	627.577.421,00	534.090.487,00	85,10	533.190.315,00
21	Sekretariat Daerah	5.314.126.311,00	4.871.286.015,00	91,67	4.765.151.858,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	648.562.776,00	600.446.979,00	92,58	587.916.179,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.172.417.040,00	1.002.131.946,00	85,48	1.003.804.629,00
24	Badan Pendapatan Daerah	2.059.437.038,00	1.790.926.067,00	86,96	1.791.274.800,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	967.441.059,00	879.476.695,00	90,91	920.585.398,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	512.748.632,00	483.684.411,00	94,33	482.049.046,00
27	Badan Penghubung	158.062.472,00	152.307.799,00	96,36	150.803.083,00
28	Inspektorat	1.706.196.758,00	1.559.684.363,00	91,41	806.031.726,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	619.340.956,00	574.726.644,00	92,80	534.951.880,00
XV	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN**	**24.687.070,00**	**24.687.070,00**	**100,00**	**30.701.681,00**
1	Sekretariat Daerah	24.687.070,00	24.687.070,00	100,00	30.701.681,00
XVI	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN**	**147.116.117.002,00**	**109.383.849.193,00**	**74,35**	**116.000.083.165,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	54.525.064.276,00	25.881.038.149,00	47,47	24.072.441.244,00
2	Dinas Kesehatan	9.400.590.320,00	8.603.001.229,00	91,52	18.950.486.364,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.881.229.569,00	3.821.099.648,00	98,45	3.518.849.002,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	3.182.796.519,00	2.870.460.985,00	90,19	2.804.401.593,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.110.625.802,00	1.942.487.371,00	92,03	1.792.502.827,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.471.632.318,00	2.280.990.014,00	92,29	2.115.859.545,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	4.953.945.516,00	4.488.690.047,00	90,61	4.355.571.172,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	1.656.226.627,00	1.486.772.480,00	89,77	1.484.338.413,00
9	Dinas Perhubungan	3.624.525.779,00	2.602.630.597,00	71,81	2.524.365.564,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3.532.359.780,00	3.027.862.308,00	85,72	2.116.978.806,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.958.927.931,00	1.757.119.056,00	89,70	1.681.602.067,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.044.399.862,00	1.657.181.875,00	81,06	1.683.776.077,00
13	Dinas Kebudayaan	3.211.217.623,00	2.955.143.460,00	92,03	2.816.751.349,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	1.522.300.000,00	1.370.146.380,00	90,01	1.419.563.462,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.614.636.950,00	3.134.601.002,00	86,72	2.830.578.696,00
16	Dinas Pariwisata	1.764.187.152,00	1.673.721.388,00	94,87	1.835.799.213,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6.598.457.678,00	6.015.070.956,00	91,16	5.721.168.113,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.348.244.095,00	4.847.876.192,00	90,64	5.618.778.298,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.129.816.730,00	1.931.056.123,00	90,67	2.096.340.122,00
20	Sekretariat DPRD	1.356.062.017,00	1.169.667.673,00	86,25	1.365.414.463,00
21	Sekretariat Daerah	10.746.788.443,00	10.076.952.934,00	93,77	9.531.003.726,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.179.017.771,00	1.993.833.671,00	91,50	1.968.842.880,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.673.398.355,00	2.245.773.117,00	84,00	2.369.212.051,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.658.883.087,00	4.194.405.845,00	90,03	4.318.584.747,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.585.880.305,00	1.447.238.376,00	91,26	1.324.659.368,00
27	Badan Penghubung	392.574.899,00	368.639.071,00	93,90	350.088.103,00
28	Inspektorat	4.498.255.577,00	4.259.983.393,00	94,70	4.123.066.191,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.494.072.021,00	1.280.405.853,00	85,70	1.209.059.709,00
XVII	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**352.432.166.283,00**	**332.602.088.108,00**	**94,37**	**2.116.600.000,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	284.931.693.025,00	266.058.420.226,00	93,38	-
2	Dinas Kesehatan	10.650.000,00	3.900.000,00	36,62	-

No	OPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	188.950.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	51.600.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	70.350.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	-	-	-	75.500.000,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	171.000.000,00	125.599.990,00	73,45	-
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	61.200.000,00
9	Dinas Perhubungan	-	-	-	85.350.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	-	-	99.000.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	67.500.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	54.750.000,00
13	Dinas Kebudayaan	116.609.000,00	111.047.000,00	95,23	-
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	-	-	-	103.800.000,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	249.508.215,00	-	-	-
16	Dinas Pariwisata	-	-	-	57.500.000,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	-	-	191.100.000,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-	166.000.000,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	63.000.000,00
20	Sekretariat DPRD	-	-	-	109.800.000,00
21	Sekretariat Daerah	-	-	-	277.300.000,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	53.400.000,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	213.284.160,00	42.656.688,00	20,00	-
24	Badan Pendapatan Daerah	66.728.921.883,00	66.249.964.204,00	99,28	-
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	146.400.000,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	-
27	Badan Penghubung	-	-	-	52.800.000,00
28	Inspektorat	-	-	-	54.300.000,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	87.000.000,00
XVIII	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah**	**-**	**-**	**-**	**80.095.563.004,00**
1	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	80.095.563.004,00
XIX	**Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah**	**-**	**-**	**-**	**166.012.000,00**
1	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	134.100.000,00
2	Dinas Kebudayaan	-	-	-	31.912.000,00
XX	**Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD**	**282.574.013.025,00**	**264.969.930.226,00**	**93,77**	**-**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	282.574.013.025,00	264.969.930.226,00	93,77	-
XXI	**Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD**	**2.357.680.000,00**	**1.088.490.000,00**	**46,17**	**-**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.357.680.000,00	1.088.490.000,00	46,17	-
XXII	**Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN**	**-**	**-**	**-**	**2.700.000,00**
1	Dinas Kesehatan	-	-	-	2.700.000,00
XXIII	**Belanja Honorarium**	**-**	**-**	**-**	**4.020.950.000,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	1.262.200.000,00
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	220.210.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	148.750.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	33.600.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	45.150.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	-	-	-	48.300.000,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	50.550.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	50.400.000,00
9	Dinas Perhubungan	-	-	-	85.350.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	-	-	70.200.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	45.900.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	44.550.000,00
13	Dinas Kebudayaan	-	-	-	69.200.000,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	-	-	-	75.000.000,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	53.100.000,00
16	Dinas Pariwisata	-	-	-	39.500.000,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	-	-	129.900.000,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-	129.700.000,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	37.800.000,00
20	Sekretariat DPRD	-	-	-	81.000.000,00
21	Sekretariat Daerah	-	-	-	204.000.000,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	35.400.000,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	494.190.000,00
24	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	255.600.000,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	111.600.000,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	-	-	43.500.000,00
27	Badan Penghubung	-	-	-	46.800.000,00
28	Inspektorat	-	-	-	51.300.000,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	58.200.000,00
XXIV	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD**	**-**	**-**	**-**	**1.527.600.000,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	632.500.000,00
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	129.600.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	40.200.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	18.000.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	25.200.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	-	-	-	27.200.000,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	26.400.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	10.800.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	-	-	28.800.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	21.600.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	10.200.000,00
13	Dinas Kebudayaan	-	-	-	24.800.000,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	-	-	-	28.800.000,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	31.800.000,00
16	Dinas Pariwisata	-	-	-	18.000.000,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	-	-	61.200.000,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-	36.300.000,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	25.200.000,00
20	Sekretariat DPRD	-	-	-	28.800.000,00
21	Sekretariat Daerah	-	-	-	73.300.000,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	18.000.000,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	75.600.000,00
24	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	52.800.000,00

No	OPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	34.800.000,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	-	-	9.900.000,00
27	Badan Penghubung	-	-	-	6.000.000,00
28	Inspektorat	-	-	-	3.000.000,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	28.800.000,00
XXV	**Belanja Uang Representasi DPRD**	**1.749.300.000,00**	**1.744.800.000,00**	**99,74**	**1.746.900.000,00**
1	Sekretariat DPRD	1.749.300.000,00	1.744.800.000,00	99,74	1.746.900.000,00
XXVI	**Belanja Tunjangan Keluarga DPRD**	**244.902.000,00**	**179.214.000,00**	**73,18**	**163.194.000,00**
1	Sekretariat DPRD	244.902.000,00	179.214.000,00	73,18	163.194.000,00
XXVII	**Belanja Tunjangan Beras DPRD**	**212.440.800,00**	**129.559.380,00**	**60,99**	**119.565.420,00**
1	Sekretariat DPRD	212.440.800,00	129.559.380,00	60,99	119.565.420,00
XXVIII	**Belanja Uang Paket DPRD**	**149.940.000,00**	**149.490.000,00**	**99,70**	**149.700.000,00**
1	Sekretariat DPRD	149.940.000,00	149.490.000,00	99,70	149.700.000,00
XXIX	**Belanja Tunjangan Jabatan DPRD**	**2.536.485.000,00**	**2.529.960.000,00**	**99,74**	**2.533.005.000,00**
1	Sekretariat DPRD	2.536.485.000,00	2.529.960.000,00	99,74	2.533.005.000,00
XXX	**Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD**	**251.343.000,00**	**221.328.000,00**	**88,06**	**184.309.500,00**
1	Sekretariat DPRD	251.343.000,00	221.328.000,00	88,06	184.309.500,00
XXXI	**Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD**	**9.900.000.000,00**	**9.870.000.000,00**	**99,70**	**9.900.000.000,00**
1	Sekretariat DPRD	9.900.000.000,00	9.870.000.000,00	99,70	9.900.000.000,00
XXXII	**Belanja Tunjangan Reses DPRD**	**2.475.000.000,00**	**2.415.000.000,00**	**97,58**	**1.635.000.000,00**
1	Sekretariat DPRD	2.475.000.000,00	2.415.000.000,00	97,58	1.635.000.000,00
XXXIII	**Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD**	**1.723.716.044,00**	**1.486.303.797,00**	**86,23**	**1.437.354.996,00**
1	Sekretariat DPRD	1.723.716.044,00	1.486.303.797,00	86,23	1.437.354.996,00
XXXIV	**Belanja Pembulatan Gaji DPRD**	**65.340,00**	**38.240,00**	**58,52**	**37.008,00**
1	Sekretariat DPRD	65.340,00	38.240,00	58,52	37.008,00
XXXV	**Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD**	**27.411.621.720,00**	**25.319.789.520,00**	**92,37**	**25.324.189.200,00**
1	Sekretariat DPRD	27.411.621.720,00	25.319.789.520,00	92,37	25.324.189.200,00
XXXVI	**Belanja Tunjangan Transportasi DPRD**	**15.912.000.000,00**	**14.640.000.000,00**	**92,01**	**14.880.000.000,00**
1	Sekretariat DPRD	15.912.000.000,00	14.640.000.000,00	92,01	14.880.000.000,00
XXXVII	**Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD**	**-**	**-**	**-**	**738.450.000,00**
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	738.450.000,00
XXXVIII	**Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH**	**64.800.000,00**	**59.400.000,00**	**91,67**	**-**
1	Sekretariat Daerah	64.800.000,00	59.400.000,00	91,67	-
XXXIX	**Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH**	**6.864.000,00**	**5.940.000,00**	**86,54**	**-**
1	Sekretariat Daerah	6.864.000,00	5.940.000,00	86,54	-
XL	**Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH**	**116.640.000,00**	**106.920.000,00**	**91,67**	**-**
1	Sekretariat Daerah	116.640.000,00	106.920.000,00	91,67	-
XLI	**Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH**	**4.055.520,00**	**3.186.480,00**	**78,57**	**-**
1	Sekretariat Daerah	4.055.520,00	3.186.480,00	78,57	-
XLII	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH**	**7.207.946,00**	**4.601.607,00**	**63,84**	**-**
1	Sekretariat Daerah	7.207.946,00	4.601.607,00	63,84	-
XLIII	**Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH**	**2.064,00**	**1.320,00**	**63,95**	**-**
1	Sekretariat Daerah	2.064,00	1.320,00	63,95	-
XLIV	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH**	**6.852.800,00**	**6.264.000,00**	**91,41**	**-**
1	Sekretariat Daerah	6.852.800,00	6.264.000,00	91,41	-
XLV	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH**	**137.920,00**	**129.600,00**	**93,97**	**-**
1	Sekretariat Daerah	137.920,00	129.600,00	93,97	-
XLVI	**Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH**	**397.760,00**	**388.800,00**	**97,75**	**-**
1	Sekretariat Daerah	397.760,00	388.800,00	97,75	-
XLVII	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah**	**2.800.882.752,00**	**826.496.000,00**	**29,51**	**180.740.600,00**
1	Sekretariat Daerah	2.800.882.752,00	826.496.000,00	29,51	180.740.600,00
XLVIII	**Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD**	**360.000.000,00**	**360.000.000,00**	**100,00**	**330.000.000,00**
1	Sekretariat DPRD	360.000.000,00	360.000.000,00	100,00	330.000.000,00
XLIX	**Belanja Dana Operasional KDH/WKDH**	**6.317.806.694,00**	**6.315.000.000,00**	**99,96**	**4.760.000.000,00**
1	Sekretariat Daerah	6.317.806.694,00	6.315.000.000,00	99,96	4.760.000.000,00
L	**Belanja Pegawai BLUD**	**132.751.991.593,00**	**118.380.200.445,00**	**89,17**	**103.561.477.465,00**
1	Dinas Kesehatan	132.742.331.593,00	118.370.540.445,00	89,17	103.554.877.465,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.660.000,00	9.660.000,00	100,00	6.600.000,00

Realisasi Anggaran dan Belanja Barang dan Jasa
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

No	OPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	**1.562.731.648.119,00**	**1.272.505.827.668,79**	**81,42**	**1.200.096.660.415,66**
I	**Belanja Barang Pakai Habis**	**240.787.955.856,00**	**191.522.094.439,40**	**79,54**	**140.807.703.975,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	28.555.320.800,00	25.260.888.276,00	88,46	19.213.359.697,00
2	Dinas Kesehatan	13.606.488.000,00	7.162.339.065,40	52,64	5.248.912.824,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	23.317.909.560,00	21.094.069.569,00	90,46	13.039.009.194,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	2.641.493.670,00	2.536.550.072,00	96,03	2.094.182.770,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.610.308.224,00	4.276.103.839,00	92,75	3.138.934.875,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	5.607.236.800,00	5.297.693.915,00	94,48	2.877.020.865,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	1.098.494.776,00	1.048.900.927,00	95,49	894.278.790,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	4.175.887.950,00	3.915.443.474,00	93,76	2.143.120.240,00
9	Dinas Perhubungan	1.862.239.282,00	1.456.228.003,00	78,20	1.226.524.335,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3.926.412.500,00	2.847.477.590,00	72,52	1.647.659.260,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.755.970.244,00	1.620.849.751,00	92,31	2.768.637.762,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	710.367.500,00	673.168.376,00	94,76	426.192.900,00
13	Dinas Kebudayaan	6.920.294.340,00	5.714.452.227,00	82,58	4.124.203.843,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	982.925.134,00	719.628.703,00	73,21	627.353.500,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.421.774.800,00	2.201.535.364,00	90,91	2.869.090.700,00
16	Dinas Pariwisata	993.610.494,00	871.807.097,00	87,74	705.673.055,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	20.756.127.951,00	17.553.917.226,00	84,57	8.725.419.971,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	9.350.375.287,00	8.452.051.752,00	90,39	4.206.311.035,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.545.242.686,00	1.357.913.932,00	87,88	790.672.175,00
20	Sekretariat DPRD	32.309.427.632,00	29.868.523.800,00	92,45	22.628.287.749,00
21	Sekretariat Daerah	55.194.033.642,00	32.931.194.883,00	59,66	25.374.304.259,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.536.833.912,00	1.009.660.885,00	65,70	895.058.075,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.837.993.430,00	2.058.338.285,00	72,53	1.668.938.363,00
24	Badan Pendapatan Daerah	5.576.192.262,00	4.140.687.011,00	74,26	5.898.249.658,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.288.909.734,00	1.082.261.232,00	83,97	975.323.370,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.275.916.128,00	984.797.336,00	77,18	1.026.743.800,00
27	Badan Penghubung	1.051.531.000,00	950.486.805,00	90,39	967.662.900,00
28	Inspektorat	1.829.784.194,00	1.679.922.343,00	91,81	2.196.515.260,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.048.853.924,00	2.755.202.701,00	90,37	2.410.062.750,00
II	**Belanja Barang Tak Habis Pakai**	**161.920.000,00**	**148.407.000,00**	**91,65**	**-**
1	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	161.920.000,00	148.407.000,00	91,65	-
III	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**	**2.623.954.634,00**	**2.402.825.382,00**	**91,57**	**1.715.780.384,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	112.896.900,00	110.645.113,00	98,01	110.795.000,00
2	Dinas Kesehatan	495.766.254,00	418.916.243,00	84,50	19.138.444,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	12.960.000,00	8.991.000,00	69,38	-
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	40.834.800,00	30.340.740,00	74,30	148.600.000,00
5	Dinas Perhubungan	1.687.792.640,00	1.604.789.536,00	95,08	891.749.690,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	55.197.000,00	45.954.000,00	83,25	-
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	1.042.500,00
8	Dinas Kebudayaan	21.800.900,00	7.677.949,00	35,22	-
9	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	9.609.840,00	9.300.000,00	96,78	-
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.300.000,00	8.436.000,00	81,90	100.950.000,00
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	14.000.000,00	13.850.000,00	98,93	5.200.000,00
12	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	14.564.900,00	13.487.755,00	92,60	-
13	Sekretariat DPRD	142.832.000,00	126.560.038,00	88,61	78.600.000,00
14	Sekretariat Daerah	2.000.000,00	1.999.998,00	100,00	358.154.750,00
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.509.000,00	-	-	-
16	Badan Penghubung	1.890.400,00	1.877.010,00	99,29	1.550.000,00
IV	**Belanja Jasa Kantor**	**391.116.572.808,00**	**353.420.573.807,00**	**90,36**	**406.090.608.132,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	63.021.572.790,00	56.049.817.272,00	88,94	65.463.092.754,00
2	Dinas Kesehatan	49.561.786.850,00	45.782.824.298,00	92,38	67.031.259.331,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	23.539.431.305,00	22.428.907.504,00	95,28	30.517.156.295,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	24.189.851.517,00	24.040.046.460,00	99,38	24.103.179.787,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.038.779.212,00	2.514.209.243,00	82,74	3.227.637.743,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	4.889.955.723,00	4.690.039.204,00	95,91	5.526.267.101,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	3.209.703.907,00	3.030.045.433,00	94,40	3.288.398.654,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	2.401.668.733,00	2.262.291.666,00	94,20	3.102.383.069,00
9	Dinas Perhubungan	3.668.141.461,00	3.476.707.198,00	94,78	5.163.634.406,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	35.986.800.337,00	30.949.434.993,00	86,00	27.370.492.205,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.219.709.576,00	4.737.550.034,00	90,76	6.468.493.044,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.989.168.838,00	1.909.948.588,00	96,02	2.670.570.494,00
13	Dinas Kebudayaan	36.367.189.695,00	34.327.227.565,00	94,39	42.747.422.521,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	3.117.996.672,00	2.879.187.142,00	92,34	3.664.181.062,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.917.686.458,00	2.720.706.693,00	93,25	3.041.466.273,00
16	Dinas Pariwisata	6.440.734.811,00	5.891.537.573,00	91,47	2.312.581.998,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12.870.927.142,00	12.255.968.259,00	95,22	15.288.257.485,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.525.795.096,00	4.249.236.736,00	93,89	4.810.162.137,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.284.791.304,00	4.964.220.721,00	93,93	3.559.854.229,00
20	Sekretariat DPRD	17.172.005.908,00	13.336.259.819,00	77,66	12.215.509.262,00
21	Sekretariat Daerah	34.310.760.861,00	26.432.525.420,00	77,04	27.491.218.462,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.128.127.847,00	3.051.606.236,00	97,55	3.867.063.279,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.563.369.593,00	5.054.511.515,00	90,85	4.991.068.273,00
24	Badan Pendapatan Daerah	18.800.935.288,00	17.557.532.822,00	93,39	24.676.760.100,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.409.128.086,00	3.190.908.327,00	93,60	3.328.339.999,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	7.455.348.854,00	7.328.213.663,00	98,29	1.658.817.004,00
27	Badan Penghubung	5.001.414.820,00	4.551.712.199,00	91,01	3.899.459.426,00
28	Inspektorat	1.674.416.247,00	1.537.677.190,00	91,83	1.905.135.471,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.359.373.877,00	2.219.720.034,00	94,08	2.700.746.268,00
V	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**	**43.724.619.404,00**	**37.522.582.031,00**	**85,82**	**45.125.082.858,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	3.996.302.600,00	3.748.223.576,00	93,79	4.799.838.305,00
2	Dinas Kesehatan	27.743.212.545,00	22.532.241.099,00	81,22	26.047.181.338,00

No	OPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	711.938.254,00	697.381.214,00	97,96	951.646.012,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	234.117.920,00	232.823.020,00	99,45	364.273.154,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	125.745.760,00	118.606.074,00	94,32	180.460.007,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	226.789.580,00	224.458.760,00	98,97	311.867.043,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	1.607.320.370,00	1.563.776.060,00	97,29	144.444.762,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	117.317.940,00	116.541.000,00	99,34	193.079.362,00
9	Dinas Perhubungan	233.340.980,00	230.492.200,00	98,78	405.612.564,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	500.971.660,00	450.189.280,00	89,86	663.558.148,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	304.916.984,00	278.156.450,00	91,22	246.578.130,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	92.714.840,00	91.937.900,00	99,16	153.442.163,00
13	Dinas Kebudayaan	1.480.070.700,00	1.456.503.520,00	98,41	2.646.694.932,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	220.650.960,00	209.255.840,00	94,84	280.655.826,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	149.705.881,00	145.287.780,00	97,05	178.245.809,00
16	Dinas Pariwisata	116.799.980,00	113.692.220,00	97,34	151.983.125,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	671.531.973,00	657.538.891,00	97,92	1.125.423.740,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	200.899.615,00	199.863.638,00	99,48	318.316.452,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	146.064.720,00	141.662.060,00	96,99	175.084.560,00
20	Sekretariat DPRD	284.984.978,00	263.764.425,00	92,55	379.349.880,00
21	Sekretariat Daerah	1.275.019.656,00	1.198.176.150,00	93,97	1.629.078.321,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	188.278.460,00	188.278.460,00	100,00	272.840.106,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.604.130.800,00	1.206.568.530,00	75,22	1.240.963.112,00
24	Badan Pendapatan Daerah	996.037.080,00	968.459.340,00	97,23	1.628.043.217,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	136.223.480,00	133.892.660,00	98,29	175.814.069,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	81.319.720,00	81.319.720,00	100,00	116.723.040,00
27	Badan Penghubung	131.111.328,00	130.276.224,00	99,36	130.866.153,00
28	Inspektorat	84.686.460,00	83.909.520,00	99,08	128.395.324,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	62.414.180,00	59.306.420,00	95,02	84.624.204,00
VI	**Belanja Sewa Tanah**	**28.930.000,00**	**2.222.220,00**	**7,68**	**54.444.616,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	49.222.395,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	900.000,00	-	-	-
3	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	25.030.000,00	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	3.000.000,00
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.000.000,00	2.222.220,00	74,07	2.222.221,00
VII	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**	**44.574.243.896,00**	**35.459.219.142,00**	**79,55**	**24.912.238.526,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.360.807.800,00	2.275.499.407,00	96,39	1.486.980.000,00
2	Dinas Kesehatan	708.743.800,00	67.585.458,00	9,54	38.900.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	49.770.000,00	49.201.860,00	98,86	44.170.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	12.055.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.045.000,00	-	-	-
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	23.747.000,00	19.822.801,00	83,47	41.640.000,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	2.609.000,00	2.500.000,00	95,82	-
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	533.239.100,00	494.849.000,00	92,80	109.360.000,00
9	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.145.751.500,00	373.439.841,00	32,59	33.000.000,00
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	71.497.400,00	32.755.671,00	45,81	60.000.000,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.271.000,00	8.975.021,00	96,81	-
12	Dinas Kebudayaan	4.801.669.800,00	4.642.458.587,00	96,68	3.149.411.648,00
13	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	3.900.000,00	3.263.400,00	83,68	-
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.457.500,00	1.440.410,00	98,83	3.016.500,00
15	Dinas Pariwisata	382.050.100,00	367.786.500,00	96,27	-
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	264.332.000,00	257.160.350,00	97,29	-
17	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.819.500.000,00	3.956.646.960,00	82,10	2.872.600.000,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.268.314.800,00	1.232.428.640,00	97,17	282.435.000,00
19	Sekretariat DPRD	1.302.835.500,00	511.751.000,00	39,28	239.204.000,00
20	Sekretariat Daerah	26.387.389.596,00	20.866.511.237,00	79,08	16.261.481.378,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	26.871.000,00	5.840.000,00	21,73	9.300.000,00
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	16.850.000,00	6.500.000,00	38,58	2.900.000,00
23	Badan Pendapatan Daerah	7.250.000,00	4.650.000,00	64,14	-
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	79.600.000,00
25	Badan Riset dan Inovasi Daerah	7.820.000,00	7.169.999,00	91,69	8.470.000,00
26	Badan Penghubung	10.780.000,00	-	-	-
27	Inspektorat	61.438.000,00	32.803.000,00	53,39	44.395.000,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	226.304.000,00	208.180.000,00	91,99	133.320.000,00
VIII	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**	**13.357.605.000,00**	**11.132.722.964,00**	**83,34**	**10.313.330.000,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.690.855.000,00	1.983.748.000,00	73,72	1.704.855.000,00
2	Dinas Kesehatan	60.900.000,00	43.900.000,00	72,09	9.800.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	2.400.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	372.650.000,00	200.800.000,00	53,88	342.500.000,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	6.700.000,00	3.100.000,00	46,27	6.000.000,00
6	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	2.850.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	95.000.000,00	86.500.000,00	91,05	36.650.000,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	155.250.000,00	155.250.000,00	100,00	1.216.500.000,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	240.000.000,00
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	77.700.000,00
11	Sekretariat DPRD	8.745.000.000,00	7.665.000.000,00	87,65	5.199.000.000,00
12	Sekretariat Daerah	13.000.000,00	5.000.000,00	38,46	28.000.000,00
13	Badan Pendapatan Daerah	365.000.000,00	357.800.000,00	98,03	841.000.000,00
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	67.700.000,00
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	853.250.000,00	631.624.964,00	74,03	538.375.000,00
IX	**Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi**	**90.000.000,00**	**89.948.000,00**	**99,94**	**-**
1	Badan Penghubung	90.000.000,00	89.948.000,00	99,94	-
X	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**	**468.200.000,00**	**433.000.000,00**	**92,48**	**422.700.000,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	108.750.000,00
2	Dinas Kebudayaan	389.000.000,00	375.400.000,00	96,50	265.950.000,00
3	Sekretariat Daerah	79.200.000,00	57.600.000,00	72,73	48.000.000,00
XI	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**	**2.145.810.000,00**	**1.872.400.755,00**	**87,26**	**1.535.990.057,30**
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.550.000.000,00	1.508.462.702,00	97,32	541.544.338,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.000.000,00	-	-	-
3	Dinas Perhubungan	155.158.000,00	145.145.953,00	93,55	-
4	Dinas Kebudayaan	120.000.000,00	-	-	79.380.984,00
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	83.388.000,00	-	-	103.919.421,00

No	OPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
6	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	232.264.000,00	218.792.100,00	94,20	299.457.514,30
7	Sekretariat DPRD	-	-	-	511.687.800,00
XII	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**	**15.781.767.312,00**	**11.373.880.219,70**	**72,07**	**6.178.823.802,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	266.400.000,00	261.516.000,00	98,17	-
2	Dinas Kesehatan	101.000.000,00	98.918.244,00	97,94	-
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.160.061.000,00	5.677.933.754,00	79,30	2.833.039.689,00
4	Dinas Perhubungan	550.000.000,00	541.145.129,00	98,39	68.154.000,00
5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	900.000.000,00	347.094.080,00	38,57	541.226.000,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	199.325.000,00
7	Dinas Kebudayaan	70.000.000,00	69.600.000,00	99,43	-
8	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	100.000.000,00	98.578.350,00	98,58	-
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	170.000.000,00	161.903.046,00	95,24	-
10	Dinas Pariwisata	-	-	-	29.400.000,00
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	100.000.000,00	99.877.200,00	99,88	-
12	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	200.000.000,00	198.942.800,00	99,47	362.159.700,00
13	Sekretariat DPRD	550.000.000,00	223.610.400,00	40,66	88.399.000,00
14	Sekretariat Daerah	46.069.000,00	44.641.000,00	96,90	99.428.250,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	200.000.000,00	198.490.644,00	99,25	-
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.371.987.312,00	761.625.311,70	55,51	246.218.983,00
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	50.000.000,00	49.888.839,00	99,78	-
18	Badan Riset dan Inovasi Daerah	3.796.250.000,00	2.391.036.600,00	62,98	1.612.032.720,00
19	Inspektorat	100.000.000,00	99.078.822,00	99,08	99.440.460,00
XIII	**Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)**	**2.000.000.000,00**	**1.498.000.001,00**	**74,90**	**-**
1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.000.000.000,00	1.498.000.001,00	74,90	-
XIV	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**	**6.796.321.360,00**	**5.408.138.000,00**	**79,57**	**4.264.002.000,00**
1	Dinas Kesehatan	121.199.360,00	85.700.000,00	70,71	9.750.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.400.000,00	2.100.000,00	25,00	-
3	Satuan Polisi Pamong Praja	42.750.000,00	21.375.000,00	50,00	85.500.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	20.000.000,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	74.670.000,00	51.700.000,00	69,24	46.210.000,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	440.000.000,00	331.245.000,00	75,28	102.500.000,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	300.000,00	300.000,00	100,00	-
8	Dinas Pariwisata	95.000.000,00	95.000.000,00	100,00	-
9	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	54.430.000,00	35.530.000,00	65,28	-
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	75.000.000,00	3.851.000,00	5,13	-
11	Sekretariat DPRD	1.900.000.000,00	1.312.500.000,00	69,08	1.045.660.000,00
12	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	45.800.000,00
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.000.000,00	-	-	-
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	85.000.000,00	58.760.000,00	69,13	-
15	Badan Pendapatan Daerah	50.000.000,00	-	-	20.000.000,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.752.072.000,00	2.677.177.000,00	97,28	1.888.090.000,00
17	Inspektorat	1.032.500.000,00	682.900.000,00	66,14	1.000.492.000,00
XV	**Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud**	**4.396.041.100,00**	**3.892.683.808,00**	**88,55**	**49.800.000,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.027.000.000,00	994.750.000,00	96,86	-
2	Dinas Kesehatan	5.000.000,00	-	-	-
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.000.000,00	8.880.000,00	98,67	-
4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3.177.541.100,00	2.723.153.806,00	85,70	-
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	99.000.000,00	98.100.002,00	99,09	-
6	Sekretariat DPRD	12.500.000,00	12.000.000,00	96,00	-
7	Sekretariat Daerah	10.000.000,00	-	-	-
8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	50.000.000,00	49.800.000,00	99,60	49.800.000,00
9	Badan Riset dan Inovasi Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
XVI	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**25.119.035.140,00**	**17.705.335.917,00**	**70,49**	**16.115.207.851,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	642.120.000,00	515.645.539,00	80,30	592.024.600,00
2	Dinas Kesehatan	1.813.000.000,00	1.028.888.691,00	56,75	628.390.328,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.506.790.000,00	1.375.332.998,00	91,28	1.177.265.007,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	635.710.000,00	614.663.876,00	96,69	585.141.900,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.548.195.000,00	1.249.252.077,00	80,69	1.437.851.500,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	312.730.000,00	234.988.522,00	75,14	187.915.500,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	377.642.340,00	333.956.815,00	88,43	269.357.150,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	257.010.000,00	251.928.000,00	98,02	318.623.000,00
9	Dinas Perhubungan	2.519.430.000,00	1.900.847.780,00	75,45	1.363.574.212,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.191.000.000,00	417.474.193,00	35,05	727.320.480,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	220.790.000,00	127.227.250,00	57,62	191.981.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	278.000.000,00	170.686.339,00	61,40	172.278.500,00
13	Dinas Kebudayaan	569.610.000,00	335.566.470,00	58,91	662.303.600,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	213.300.000,00	149.404.921,00	70,04	149.952.000,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	606.510.000,00	523.604.875,00	86,33	364.638.000,00
16	Dinas Pariwisata	165.880.000,00	120.214.459,00	72,47	161.584.500,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	740.650.000,00	626.520.248,00	84,59	570.554.000,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.593.240.000,00	1.223.609.120,00	76,80	1.201.360.926,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	346.410.000,00	249.662.724,00	72,07	264.096.364,00
20	Sekretariat DPRD	1.972.590.000,00	1.375.239.066,00	69,72	1.261.239.200,00
21	Sekretariat Daerah	3.734.767.800,00	2.402.920.178,00	64,34	1.632.393.323,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	432.305.000,00	147.809.065,00	34,19	136.246.331,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	416.000.000,00	200.841.999,00	48,28	162.219.000,00
24	Badan Pendapatan Daerah	1.507.205.000,00	960.313.009,00	63,71	745.349.630,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	314.460.000,00	298.963.003,00	95,07	273.799.000,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	247.720.000,00	118.138.806,00	47,69	198.307.000,00
27	Badan Penghubung	239.950.000,00	125.118.768,00	52,14	96.088.000,00
28	Inspektorat	512.600.000,00	463.451.112,00	90,41	428.508.000,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	203.420.000,00	163.066.014,00	80,16	154.845.800,00
XVII	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**26.449.731.816,00**	**21.031.119.985,23**	**79,51**	**17.233.217.632,78**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.640.688.000,00	2.601.352.421,00	98,51	1.660.151.500,00
2	Dinas Kesehatan	2.653.602.000,00	1.857.762.679,61	70,01	468.332.385,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	302.510.734,00	297.966.501,00	98,50	316.235.850,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	190.000.000,00	187.721.963,00	98,80	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	200.000.000,00	99.633.280,92	49,82	2.869.694.531,67
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	200.000.000,00	195.456.599,00	97,73	25.291.205,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	103.131.673,00	84.902.550,00	82,32	59.080.450,00

No	OPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	191.525.000,00
9	Dinas Perhubungan	350.000.000,00	320.884.830,00	91,68	75.216.306,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	801.000.000,00	188.657.721,00	23,55	130.623.408,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	250.182.869,06
12	Dinas Kebudayaan	2.634.612.900,00	2.208.267.903,55	83,82	1.114.677.626,00
13	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	20.000.000,00	19.869.000,00	99,35	-
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	12.645.920,00	6.637.800,00	52,49	1.678.882.212,00
15	Dinas Pariwisata	300.000.000,00	287.511.064,00	95,84	104.460.384,00
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	111.430.000,00	96.728.574,00	86,81	32.677.520,00
17	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	300.050.600,00	293.309.125,00	97,75	63.882.232,90
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	71.421.000,00	70.302.739,00	98,43	247.303.530,00
19	Sekretariat DPRD	2.805.000.000,00	1.980.547.418,00	70,61	349.335.612,00
20	Sekretariat Daerah	8.031.103.859,00	5.969.006.078,00	74,32	5.245.078.994,03
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	306.000.000,00	117.237.960,52	38,31	29.852.130,00
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.004.000.000,00	892.995.091,42	88,94	130.000.000,00
23	Badan Pendapatan Daerah	2.575.787.610,00	2.462.963.043,61	95,62	2.032.208.959,12
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	278.000.000,00	272.502.181,22	98,02	48.621.690,00
25	Badan Riset dan Inovasi Daerah	35.160.000,00	16.796.999,00	47,77	-
26	Badan Penghubung	302.600.000,00	297.264.505,00	98,24	98.304.238,00
27	Inspektorat	31.885.720,00	29.046.000,00	91,09	7.144.000,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	189.101.800,00	175.795.957,38	92,96	4.455.000,00
XVIII	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**6.705.056.435,00**	**6.139.489.940,00**	**91,57**	**5.842.587.368,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	56.000.000,00	9.630.000,00	17,20	149.447.900,00
2	Dinas Kesehatan	175.000.000,00	97.377.574,00	55,64	85.844.500,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.851.514.100,00	4.837.848.892,00	99,72	4.235.582.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.000.000,00	24.917.204,00	99,67	42.840.000,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	-	-	-	8.900.000,00
6	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	5.000.000,00	4.780.000,00	95,60	84.964.970,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	16.000.000,00	15.584.000,00	97,40	2.850.000,00
8	Dinas Perhubungan	-	-	-	7.900.000,00
9	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	406.980.000,00	343.800.117,00	84,48	5.580.000,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	200.378.000,00	12.358.000,00	6,17	13.376.000,00
11	Dinas Kebudayaan	135.000.000,00	121.084.292,00	89,69	123.983.314,00
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	175.765.311,00
13	Dinas Pariwisata	8.000.000,00	7.881.000,00	98,51	4.954.000,00
14	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	-	-	26.525.000,00
15	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	165.053.035,00	117.342.349,00	71,09	426.543.483,00
16	Sekretariat DPRD	180.070.300,00	177.702.140,00	98,68	66.170.690,00
17	Sekretariat Daerah	427.561.000,00	343.195.890,00	80,27	278.355.200,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.000.000,00	-	-	-
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	35.000.000,00	13.853.455,00	39,58	14.401.000,00
20	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	35.183.500,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.500.000,00	12.135.027,00	97,08	17.510.000,00
22	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	-	-	35.015.500,00
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	895.000,00
XIX	**Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**200.000.000,00**	**197.220.000,00**	**98,61**	**211.736.270,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	14.885.100,00
2	Dinas Kebudayaan	200.000.000,00	197.220.000,00	98,61	196.851.170,00
XX	**Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud**	**77.210.000,00**	**54.300.000,00**	**70,33**	**-**
1	Sekretariat Daerah	22.210.000,00	-	-	-
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	50.000.000,00	49.300.000,00	98,60	-
3	Badan Riset dan Inovasi Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
XXI	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**149.381.910.000,00**	**69.754.349.772,00**	**46,70**	**92.846.467.688,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	7.580.929.000,00	6.043.867.214,00	79,72	5.269.420.012,00
2	Dinas Kesehatan	1.696.702.000,00	1.490.758.548,00	87,86	1.487.688.602,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.689.991.000,00	1.367.301.172,00	50,83	1.694.966.022,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	2.363.921.000,00	2.005.356.019,00	84,83	2.005.954.517,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.471.460.000,00	969.956.336,00	65,92	1.794.792.464,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	764.727.000,00	681.397.946,00	89,10	501.210.688,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	333.023.000,00	270.334.000,00	81,18	281.141.525,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	1.386.271.000,00	1.173.898.121,00	84,68	2.400.551.132,00
9	Dinas Perhubungan	1.268.406.000,00	995.308.856,00	78,47	921.543.818,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	4.207.593.000,00	3.221.824.139,00	76,57	2.400.165.552,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	693.982.000,00	625.007.896,00	90,06	1.096.372.607,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	707.116.000,00	453.166.373,00	64,09	574.224.077,00
13	Dinas Kebudayaan	788.438.000,00	689.746.276,00	87,48	719.086.860,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	297.313.000,00	235.817.100,00	79,32	1.067.722.828,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	333.525.000,00	289.799.650,00	86,89	537.938.145,00
16	Dinas Pariwisata	815.758.000,00	575.983.136,00	70,61	439.389.793,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.231.158.000,00	490.244.046,00	39,82	565.905.508,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	909.474.000,00	432.869.430,00	47,60	438.958.349,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	650.526.000,00	525.083.450,00	80,72	1.081.582.814,00
20	Sekretariat DPRD	92.925.675.000,00	28.087.598.754,00	30,23	38.169.043.505,00
21	Sekretariat Daerah	13.015.065.000,00	9.389.604.771,00	72,14	12.610.194.363,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.687.261.000,00	1.061.504.667,00	62,91	1.795.815.837,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.227.716.000,00	1.446.354.425,00	64,93	1.834.742.220,00
24	Badan Pendapatan Daerah	1.757.787.000,00	1.192.857.250,00	67,86	1.924.634.629,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.565.158.000,00	1.112.903.675,00	71,10	1.997.568.576,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.206.086.000,00	894.607.329,00	74,17	1.328.549.002,00
27	Badan Penghubung	205.317.000,00	194.043.245,00	94,51	100.603.703,00
28	Inspektorat	2.734.590.000,00	2.675.001.372,00	97,82	5.728.981.453,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.866.942.000,00	1.162.154.576,00	62,25	2.077.719.087,00
XXII	**Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri**	**22.028.709.300,00**	**1.100.133.824,00**	**4,99**	**5.412.184.434,00**
1	Dinas Perhubungan	-	-	-	46.565.734,00
2	Dinas Pariwisata	182.835.000,00	151.437.600,00	82,83	-
3	Sekretariat DPRD	19.310.363.700,00	-	-	5.070.245.500,00
4	Sekretariat Daerah	2.535.510.600,00	948.696.224,00	37,42	295.373.200,00
XXIII	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**44.866.000.000,00**	**38.167.813.273,58**	**85,07**	**15.264.134.872,09**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	38.378.500.000,00	31.820.313.273,58	82,91	10.434.834.872,09
2	Dinas Kesehatan	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00	66.000.000,00

No	OPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	825.000.000,00	795.000.000,00	96,36	382.000.000,00
4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	12.000.000,00
6	Dinas Kebudayaan	2.562.000.000,00	2.476.000.000,00	96,64	1.616.800.000,00
7	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	-
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	-
9	Dinas Pariwisata	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	-
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	-
11	Sekretariat Daerah	2.100.000.000,00	2.076.000.000,00	98,86	2.160.000.000,00
12	Badan Riset dan Inovasi Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	514.500.000,00	514.500.000,00	100,00	526.500.000,00
XXIV	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**78.388.194.950,00**	**57.212.260.439,00**	**72,99**	**5.918.163.258,00**
1	Dinas Kesehatan	222.525.000,00	95.380.950,00	42,86	18.260.100,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	300.000.000,00	299.299.650,00	99,77	-
3	Satuan Polisi Pamong Praja	380.000.000,00	378.014.524,00	99,48	-
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.970.040.000,00	2.779.772.666,00	93,59	2.092.923.363,00
5	Dinas Perhubungan	63.861.102.450,00	52.288.149.251,00	81,88	3.697.041.195,00
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	515.000.000,00	515.000.000,00	100,00	-
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	30.000.000,00	26.101.650,00	87,01	-
8	Dinas Pariwisata	8.789.577.500,00	91.550.000,00	1,04	-
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	36.200.000,00	21.268.000,00	58,75	-
10	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	499.500.000,00	490.388.900,00	98,18	-
11	Sekretariat Daerah	256.250.000,00	57.750.000,00	22,54	26.700.000,00
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	430.000.000,00	97.784.848,00	22,74	37.708.600,00
13	Badan Riset dan Inovasi Daerah	98.000.000,00	71.800.000,00	73,27	45.530.000,00
XXV	**Belanja Barang dan Jasa BOS**	**-**	**-**	**-**	**188.119.656.792,61**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	188.119.656.792,61
XXVI	**Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS**	**185.639.814.002,00**	**179.240.131.088,00**	**96,55**	**-**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	185.639.814.002,00	179.240.131.088,00	96,55	-
XXVII	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**255.822.045.106,00**	**225.724.975.660,88**	**88,23**	**211.662.799.898,88**
1	Dinas Kesehatan	193.698.900.031,00	170.892.215.197,88	88,23	159.052.975.041,88
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	43.480.345.075,00	37.900.433.813,00	87,17	33.284.882.502,00
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.642.800.000,00	16.932.326.650,00	90,83	19.324.942.355,00

Lampiran 8

Realisasi Anggaran dan Belanja Subsidi
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

No	OPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	**10.009.000.000,00**	**10.009.000.000,00**	**100,00**	**2.525.000.000,00**
I	**Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**100,00**	**2.500.000.000,00**
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00
II	**Belanja Subsidi kepada Koperasi**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**100,00**	**25.000.000,00**
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	25.000.000,00

Realisasi Anggaran dan Belanja Hibah
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

No	OPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	**953.461.885.136,00**	**933.511.389.721,97**	**97,90**	**1.169.523.956.546,00**
I	**Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat**	**2.834.625.000,00**	**2.834.625.000,00**	**100,00**	**157.039.446.676,00**
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.834.625.000,00	2.834.625.000,00	100,00	157.039.446.676,00
II	**Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat**	**4.025.000.000,00**	**3.635.883.238,00**	**90,33**	**-**
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.025.000.000,00	3.635.883.238,00	90,33	-
III	**Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**	**562.199.085.136,00**	**553.902.556.673,97**	**98,52**	**666.211.925.565,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	62.260.000.000,00	62.099.615.247,97	99,74	53.937.792.926,00
2	Dinas Kesehatan	722.335.136,00	437.823.612,00	60,61	594.675.156,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	30.860.750.000,00	25.009.117.814,00	81,04	-
4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	-	-	1.998.746.727,00
5	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	467.400.000.000,00	465.400.000.000,00	99,57	609.280.710.756,00
6	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-	50.000.000,00
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	456.000.000,00	456.000.000,00	100,00	-
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	350.000.000,00
IV	**Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**	**6.100.000.000,00**	**5.347.798.094,00**	**87,67**	**-**
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.100.000.000,00	3.350.000.000,00	81,71	-
2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.000.000.000,00	1.997.798.094,00	99,89	-
V	**Kemasyarakatan**	**255.183.295.000,00**	**245.938.867.057,00**	**96,38**	**233.021.316.201,00**
1	Dinas Kesehatan	-	-	-	50.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	158.633.295.000,00	152.882.558.389,00	96,37	166.916.244.753,00
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	-	-	-	100.000.000,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	4.846.000.000,00	4.446.000.000,00	91,75	1.506.400.000,00
5	Dinas Perhubungan	1.922.000.000,00	1.922.000.000,00	100,00	1.920.000.000,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.891.250.000,00	2.891.250.000,00	100,00	1.265.000.000,00
7	Dinas Kebudayaan	25.235.000.000,00	25.135.000.000,00	99,60	20.888.600.000,00
8	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	3.270.000.000,00	3.270.000.000,00	100,00	-
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	405.000.000,00
10	Dinas Pariwisata	-	-	-	100.000.000,00
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	11.793.000.000,00	11.793.000.000,00	100,00	3.855.155.000,00
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	715.000.000,00
13	Sekretariat Daerah	46.242.750.000,00	43.249.058.668,00	93,53	35.299.916.448,00
VI	**Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**850.000.000,00**	**800.000.000,00**	**94,11**	**249.319.700,00**
1	Dinas Kesehatan	-	-	-	249.319.700,00
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50.000.000,00	-	-	-
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	-
VII	**Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta**	**97.618.580.000,00**	**96.413.028.124,00**	**98,77**	**89.499.371.704,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	97.618.580.000,00	96.413.028.124,00	98,77	89.499.371.704,00
VIII	**Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta**	**809.720.000,00**	**797.051.535,00**	**98,43**	**923.571.500,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	809.720.000,00	797.051.535,00	98,43	923.571.500,00
IX	**Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**	**23.841.580.000,00**	**23.841.580.000,00**	**100,00**	**22.579.005.200,00**
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	23.841.580.000,00	23.841.580.000,00	100,00	22.579.005.200,00

Lampiran 10

Realisasi Anggaran Dan Belanja Bantuan Sosial
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

No.	OPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	**111.600.000,00**	**111.600.000,00**	**100,00**	**250.000.000,00**
I	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat**	**-**	**-**	**-**	**250.000.000,00**
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	-	-	-	250.000.000,00
II	**(Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)**	**111.600.000,00**	**111.600.000,00**	**100,00**	**-**
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	111.600.000,00	111.600.000,00	100,00	-

Lampiran 11

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

No.	OPD	Anggaran						Realisasi					
		Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Aset Lainnya	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Aset Lainnya
	JUMLAH	**31.063.325.760,00**	**283.723.278.083,00**	**321.617.256.729,00**	**290.219.969.754,00**	**34.418.774.193,00**	**712.649.600,00**	**1.181.948.000,00**	**259.183.049.267,80**	**240.493.997.597,02**	**240.687.598.599,81**	**31.596.980.320,00**	**543.458.964,90**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	86.026.350.543,00	121.144.116.400,00	-	32.013.774.193,00	-	-	83.407.975.614,00	117.044.345.888,50	-	31.211.500.171,00	-
2	Dinas Kesehatan	-	73.283.999.010,00	22.314.817.510,00	10.800.974.205,00	2.060.000.000,00	552.649.600,00	-	67.667.187.165,00	19.288.412.307,07	8.358.298.210,00	42.000.000,00	389.922.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	765.000.000,00	15.292.657.900,00	13.106.111.405,00	265.846.212.097,00	300.000.000,00	-	930.000,00	12.479.420.131,00	12.712.193.115,00	228.684.525.984,00	298.680.549,00	-
4	Satuan Polisi Pamong Praja	-	595.472.700,00	-	-	-	-	-	438.364.795,00	-	-	-	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	5.543.978.669,00	2.313.504.724,00	-	-	-	-	5.103.710.063,00	2.041.600.840,36	-	-	-
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	-	335.583.540,00	9.195.583.825,00	-	-	-	-	321.187.130,00	8.897.856.649,00	-	-	-
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	-	152.010.960,00	-	-	-	-	-	133.674.350,00	-	-	-	-
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	56.263.600,00	10.000.000,00	-	-	-	-	53.628.000,00	9.758.010,00	-	-	-
9	Dinas Perhubungan	-	1.600.107.660,00	-	-	-	100.000.000,00	-	1.337.213.952,00	-	-	-	96.015.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	30.298.325.760,00	24.682.490.218,00	106.680.452.000,00	1.650.000.000,00	-	60.000.000,00	1.181.018.000,00	23.287.293.029,80	50.968.959.245,78	1.446.168.209,45	-	57.521.964,90
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	683.055.300,00	272.000.000,00	-	-	-	-	629.293.989,00	267.978.939,61	-	-	-
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Kebudayaan	-	2.220.395.077,00	9.409.758.873,00	3.616.000.000,00	-	-	-	1.877.016.565,00	1.153.371.254,76	-	-	-
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	-	255.448.843,00	128.700.000,00	-	-	-	-	239.645.800,00	127.932.000,00	-	-	-
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	1.192.855.000,00	2.255.000.000,00	-	-	-	-	1.143.577.589,00	2.126.305.533,00	-	-	-
16	Dinas Pariwisata	-	564.253.888,00	-	160.000.000,00	-	-	-	535.810.750,00	-	159.573.378,00	-	-
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	175.927.660,00	-	-	-	-	-	154.292.700,00	-	-	-	-
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	1.880.039.955,00	338.275.000,00	7.500.778.000,00	-	-	-	1.590.303.800,00	333.285.501,00	1.764.848.474,00	-	-
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	917.231.120,00	-	-	-	-	-	865.532.700,00	-	-	-	-
20	Sekretariat DPRD	-	15.265.738.236,00	23.301.365.912,00	-	45.000.000,00	-	-	11.814.529.577,00	19.008.349.672,00	-	-	-
21	Sekretariat Daerah	-	38.118.088.790,00	288.913.801,00	504.256.452,00	-	-	-	34.364.014.155,00	284.210.624,00	157.065.000,00	44.799.600,00	-
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	1.146.239.040,00	1.926.598.165,00	57.000.000,00	-	-	-	971.637.242,00	268.701.415,00	36.452.400,00	-	-
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	2.694.345.860,00	-	40.000.000,00	-	-	-	2.428.144.692,00	-	38.632.405,00	-	-
24	Badan Pendapatan Daerah	-	3.436.932.029,00	7.262.935.114,00	44.749.000,00	-	-	-	2.930.265.033,00	5.051.564.116,94	42.034.539,36	-	-
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	2.658.383.000,00	1.000.000.000,00	-	-	-	-	1.263.542.599,00	468.631.491,00	-	-	-
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	1.677.862.540,00	236.945.000,00	-	-	-	-	1.224.062.373,00	235.924.035,00	-	-	-
27	Badan Penghubung	-	653.236.665,00	220.179.000,00	-	-	-	-	516.874.497,00	-	-	-	-
28	Inspektorat	-	1.681.023.740,00	212.000.000,00	-	-	-	-	1.553.971.181,00	204.616.959,00	-	-	-
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	933.306.540,00	-	-	-	-	-	850.879.796,00	-	-	-	-

Lampiran 12

Realisasi Dan Anggaran Belanja Modal Tanah
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

No	OPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	**31.063.325.760,00**	**1.181.948.000,00**	**3,80**	**3.464.184.000,00**
I	**Belanja Modal Tanah Persil**	**31.048.325.760,00**	**1.181.948.000,00**	**3,80**	**3.464.184.000,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	3.460.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	750.000.000,00	930.000,00	0,12	4.184.000,00
3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	30.298.325.760,00	1.181.018.000,00	3,90	-
II	**Belanja Modal Lapangan**	**15.000.000,00**	**-**	**-**	**-**
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	15.000.000,00	-	-	-

Rincian Anggaran Dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

No	OPD	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	**283.723.278.083,00**	**259.183.049.267,80**	**91,35**	**130.063.180.613,50**
I	**Belanja Modal Alat Besar Darat**	**1.600.000.000,00**	**1.187.700.000,00**	**74,23**	**359.255.000,00**
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.600.000.000,00	1.187.700.000,00	74,23	359.255.000,00
II	**Belanja Modal Alat Bantu**	**3.278.553.334,00**	**3.151.365.460,00**	**96,12**	**640.760.688,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	44.626.000,00
2	Dinas Kesehatan	215.000.000,00	193.500.000,00	90,00	394.384.688,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	47.598.000,00	44.400.000,00	93,28	-
4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	630.000.000,00	627.000.000,00	99,52	-
5	Dinas Kebudayaan	-	-	-	22.500.000,00
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	179.250.000,00
7	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.145.800.000,00	1.077.810.000,00	94,07	-
8	Sekretariat DPRD	73.522.000,00	73.355.460,00	99,77	-
9	Sekretariat Daerah	1.633.334,00	-	-	-
10	Badan Pendapatan Daerah	1.165.000.000,00	1.135.300.000,00	97,45	-
III	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**	**32.705.892.586,00**	**29.941.202.984,00**	**91,55**	**9.104.940.000,00**
1	Dinas Kesehatan	-	-	-	1.985.000.000,00
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	27.640.000,00
3	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	284.442.312,00	247.000.000,00	86,84	-
4	Sekretariat Daerah	32.071.291.425,00	29.406.767.990,00	91,69	6.717.900.000,00
5	Badan Pendapatan Daerah	218.777.440,00	183.649.995,00	83,94	374.400.000,00
6	Badan Penghubung	131.381.409,00	103.784.999,00	79,00	-
IV	**Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin**	**126.186.800,00**	**112.668.550,00**	**89,29**	**-**
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	40.000.000,00	38.278.350,00	95,70	-
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	68.093.400,00	56.410.200,00	82,84	-
3	Sekretariat DPRD	18.093.400,00	17.980.000,00	99,37	-
V	**Belanja Modal Alat Ukur**	**1.037.132.000,00**	**1.034.361.750,00**	**99,73**	**20.655.000,00**
1	Dinas Kesehatan	-	-	-	6.600.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	1.160.000,00
3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.023.232.000,00	1.023.200.000,00	100,00	-
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.400.000,00	2.136.750,00	48,56	-
5	Inspektorat	9.500.000,00	9.025.000,00	95,00	12.895.000,00
VI	**Belanja Modal Alat Pengolahan**	**-**	**-**	**-**	**48.995.750,00**
1	Dinas Kesehatan	-	-	-	39.200.000,00
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	-	-	9.795.750,00
VII	**Belanja Modal Alat Kantor**	**1.913.603.658,00**	**1.506.112.782,00**	**78,71**	**2.108.674.699,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	359.835.780,00
2	Dinas Kesehatan	74.712.600,00	63.454.970,00	84,93	54.301.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	40.000.000,00	39.750.000,00	99,38	12.400.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	13.662.000,00	12.300.002,00	90,03	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	91.426.400,00	73.093.000,00	79,95	9.750.000,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	842.512.024,00	673.205.565,00	79,90	14.645.000,00
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.968.500,00	4.750.000,00	95,60	59.275.000,00
8	Dinas Kebudayaan	35.520.600,00	15.990.000,00	45,02	-
9	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	20.323.000,00	19.000.000,00	93,49	-
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	97.718.700,00	96.450.000,00	98,70	364.850.900,00
11	Dinas Pariwisata	28.852.700,00	21.423.000,00	74,25	-
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	20.323.000,00	14.596.500,00	71,82	-
13	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.100.000,00	1.998.000,00	95,14	52.000.000,00
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	22.950.000,00
15	Sekretariat DPRD	32.516.800,00	-	-	96.300.000,00
16	Sekretariat Daerah	225.780.134,00	195.655.915,00	86,66	554.019.421,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24.023.000,00	17.955.360,00	74,74	-
18	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	16.669.998,00
19	Badan Pendapatan Daerah	65.620.500,00	64.162.500,00	97,78	445.000.000,00
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.064.600,00	3.000.000,00	73,81	-
21	Badan Riset dan Inovasi Daerah	116.255.000,00	18.499.998,00	15,91	-
22	Badan Penghubung	-	-	-	40.000.000,00
23	Inspektorat	66.571.400,00	65.000.000,00	97,64	6.677.600,00
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	106.652.700,00	105.827.972,00	99,23	-
VIII	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**	**30.313.872.983,00**	**25.207.334.989,00**	**83,15**	**17.956.560.750,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	8.151.253.800,00	7.725.637.550,00	94,78	11.414.828.600,00
2	Dinas Kesehatan	2.252.232.114,00	1.958.320.619,00	86,95	60.522.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	255.410.400,00	208.458.000,00	81,62	19.500.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	374.370.500,00	261.544.993,00	69,86	50.448.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	579.194.140,00	543.091.800,00	93,77	671.098.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	34.439.040,00	34.160.000,00	99,19	21.000.000,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	10.613.160,00	10.370.000,00	97,71	5.660.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	161.993.500,00
9	Dinas Perhubungan	249.047.280,00	198.144.343,00	79,56	138.917.200,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3.117.534.140,00	2.839.089.023,00	91,07	70.455.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	112.009.100,00	107.007.889,00	95,53	93.516.500,00
12	Dinas Kebudayaan	1.187.283.950,00	991.895.004,00	83,54	100.450.000,00
13	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	38.445.840,00	37.695.600,00	98,05	-
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	427.710.600,00	412.730.000,00	96,50	291.275.000,00
15	Dinas Pariwisata	43.416.000,00	42.707.250,00	98,37	147.615.000,00
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12.771.460,00	12.490.200,00	97,80	-
17	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	404.978.900,00	233.601.000,00	57,68	23.511.000,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	393.206.520,00	380.240.700,00	96,70	29.860.000,00
19	Sekretariat DPRD	4.949.481.536,00	2.878.366.335,00	58,15	480.261.400,00
20	Sekretariat Daerah	3.506.845.982,00	2.752.489.899,00	78,49	2.798.865.050,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	653.364.340,00	615.130.823,00	94,15	228.591.000,00
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	506.922.240,00	449.096.905,00	88,59	69.847.900,00
23	Badan Pendapatan Daerah	658.905.460,00	508.497.324,00	77,17	361.816.800,00

No	OPD	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	28.614.500,00	10.545.000,00	36,85	-
25	Badan Riset dan Inovasi Daerah	756.737.740,00	554.753.678,00	73,31	13.500.000,00
26	Badan Penghubung	257.399.341,00	207.542.250,00	80,63	273.500.000,00
27	Inspektorat	937.008.360,00	868.438.980,00	92,68	342.250.000,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	414.676.540,00	365.289.824,00	88,09	87.278.800,00
IX	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**	**885.270.564,00**	**843.653.173,00**	**95,30**	**740.464.400,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	43.800.000,00
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	20.700.000,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	9.614.800,00	8.400.000,00	87,37	-
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	34.954.500,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.614.800,00	8.250.000,00	85,81	-
6	Dinas Kebudayaan	-	-	-	27.200.000,00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	21.840.000,00
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	58.800.000,00
9	Sekretariat DPRD	499.969.600,00	497.100.000,00	99,43	110.275.000,00
10	Sekretariat Daerah	186.090.835,00	162.637.502,00	87,40	283.739.400,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	88.600.000,00
12	Badan Pendapatan Daerah	12.883.929,00	9.004.870,00	69,89	50.555.500,00
13	Badan Riset dan Inovasi Daerah	83.390.800,00	77.000.001,00	92,34	-
14	Badan Penghubung	11.705.800,00	10.212.000,00	87,24	-
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	72.000.000,00	71.048.800,00	98,68	-
X	**Belanja Modal Alat Studio**	**12.076.548.720,00**	**10.368.087.991,80**	**85,85**	**1.733.615.000,00**
1	Dinas Kesehatan	158.661.200,00	108.512.630,00	68,39	-
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	72.144.200,00	70.166.500,00	97,26	82.500.000,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	93.098.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	71.319.100,00	68.021.501,00	95,38	158.000.000,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	26.200.000,00	25.999.530,00	99,23	-
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	24.000.000,00
7	Dinas Perhubungan	23.431.100,00	23.300.000,00	99,44	30.300.000,00
8	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.077.461.350,00	704.774.051,80	65,41	179.900.000,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	205.608.100,00	199.529.500,00	97,04	102.421.000,00
10	Dinas Kebudayaan	231.960.727,00	187.400.001,00	80,79	-
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	125.993.900,00	124.400.000,00	98,73	182.200.000,00
12	Dinas Pariwisata	265.194.428,00	263.500.000,00	99,36	38.950.000,00
13	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-	20.100.000,00
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	24.200.000,00
15	Sekretariat DPRD	9.133.801.500,00	8.033.659.082,00	87,96	56.751.700,00
16	Sekretariat Daerah	136.176.600,00	119.726.999,00	87,92	-
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	185.029.300,00	135.258.999,00	73,10	-
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25.550.000,00	19.250.000,00	75,34	-
19	Badan Riset dan Inovasi Daerah	88.480.100,00	40.549.999,00	45,83	-
20	Badan Penghubung	33.438.115,00	30.898.998,00	92,41	21.040.000,00
21	Inspektorat	98.099.000,00	97.900.001,00	99,80	720.154.300,00
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	118.000.000,00	115.240.200,00	97,66	-
XI	**Belanja Modal Alat Komunikasi**	**3.837.597.569,00**	**3.512.345.250,00**	**91,52**	**1.555.098.750,00**
1	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	15.500.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.772.799.969,00	3.499.719.000,00	92,76	1.449.798.750,00
3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	50.311.800,00	-	-	76.000.000,00
4	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-	13.800.000,00
5	Badan Penghubung	14.485.800,00	12.626.250,00	87,16	-
XII	**Belanja Modal Peralatan Pemancar**	**8.973.442.240,00**	**8.936.193.000,00**	**99,58**	**92.625.000,00**
1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	8.973.442.240,00	8.936.193.000,00	99,58	92.625.000,00
XIII	**Belanja Modal Alat Kedokteran**	**47.558.238.876,00**	**47.382.091.312,00**	**99,63**	**12.097.276.465,00**
1	Dinas Kesehatan	47.546.612.476,00	47.370.916.312,00	99,63	12.097.276.465,00
2	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	11.626.400,00	11.175.000,00	96,12	-
XIV	**Belanja Modal Alat Kesehatan Umum**	**905.519.100,00**	**744.493.500,00**	**82,22**	**-**
1	Dinas Kesehatan	905.519.100,00	744.493.500,00	82,22	-
XV	**Belanja Modal Unit Alat Laboratorium**	**1.279.143.400,00**	**800.337.842,00**	**62,57**	**470.723.238,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	382.366.000,00	381.824.003,00	99,86	12.204.238,00
2	Dinas Kesehatan	26.804.500,00	13.884.000,00	51,80	-
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	778.000.000,00	327.640.000,00	42,11	-
4	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	453.080.000,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	84.660.000,00	71.060.839,00	83,94	-
6	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	762.900,00	490.000,00	64,23	-
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	5.439.000,00
8	Inspektorat	6.550.000,00	5.439.000,00	83,04	-
XVI	**Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah**	**25.674.719.000,00**	**25.526.123.985,00**	**99,42**	**5.360.364.500,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	25.658.185.000,00	25.526.123.985,00	99,49	5.360.364.500,00
2	Dinas Kesehatan	16.534.000,00	-	-	-
XVII	**Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup**	**12.540.083,00**	**9.150.000,00**	**72,97**	**650.774.500,00**
1	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	625.500.000,00
2	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	12.540.083,00	9.150.000,00	72,97	25.274.500,00
XVIII	**Belanja Modal Komputer Unit**	**20.456.515.800,00**	**18.335.791.226,00**	**89,63**	**5.141.927.126,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	6.817.290.600,00	6.036.807.150,00	88,55	514.299.984,00
2	Dinas Kesehatan	1.508.063.100,00	1.343.575.254,00	89,09	29.250.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	236.131.200,00	206.193.600,00	87,32	215.250.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	98.388.000,00	85.914.000,00	87,32	94.812.303,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	565.728.800,00	520.234.800,00	91,96	239.348.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	237.838.000,00	223.998.000,00	94,18	17.750.000,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	99.155.600,00	88.045.200,00	88,79	60.000.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	39.355.200,00	38.628.000,00	98,15	170.630.000,00
9	Dinas Perhubungan	398.925.200,00	358.574.400,00	89,89	196.899.500,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.677.526.500,00	1.581.769.242,00	94,29	262.060.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	320.214.800,00	289.843.200,00	90,52	157.327.000,00
12	Dinas Kebudayaan	573.720.800,00	526.121.200,00	91,70	25.999.998,00
13	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	140.046.000,00	126.673.200,00	90,45	-
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	416.215.200,00	404.900.000,00	97,28	383.839.010,00
15	Dinas Pariwisata	145.237.800,00	133.144.500,00	91,67	205.800.000,00
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	118.833.200,00	105.228.000,00	88,55	25.850.050,00
17	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-	116.139.800,00

No	OPD	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	496.188.000,00	482.517.000,00	97,24	-
19	Sekretariat DPRD	394.192.400,00	249.084.000,00	63,19	184.158.689,00
20	Sekretariat Daerah	1.451.085.800,00	1.318.666.400,00	90,87	925.733.092,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	200.614.000,00	182.484.000,00	90,96	384.067.200,00
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.962.517.400,00	1.772.587.786,00	90,32	499.500.000,00
23	Badan Pendapatan Daerah	897.063.400,00	806.950.797,00	89,95	212.827.500,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	334.519.200,00	292.107.600,00	87,32	42.397.000,00
25	Badan Riset dan Inovasi Daerah	516.267.600,00	462.726.897,00	89,63	-
26	Badan Penghubung	195.071.200,00	144.300.000,00	73,97	107.000.000,00
27	Inspektorat	415.712.800,00	372.233.000,00	89,54	-
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	200.614.000,00	182.484.000,00	90,96	70.988.000,00
XIX	**Belanja Modal Peralatan Komputer**	**12.742.703.047,00**	**10.457.601.456,00**	**82,07**	**3.592.958.700,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.061.752.220,00	1.090.391.000,00	52,89	298.526.000,00
2	Dinas Kesehatan	463.265.820,00	320.221.680,00	69,12	17.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	82.491.000,00	61.050.000,00	74,01	54.000.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	99.437.400,00	70.205.800,00	70,60	36.000.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	207.818.860,00	166.739.760,00	80,23	78.200.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	37.106.500,00	37.029.600,00	99,79	-
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	42.242.200,00	35.259.150,00	83,47	15.600.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	16.908.400,00	15.000.000,00	88,71	87.258.000,00
9	Dinas Perhubungan	69.260.880,00	52.170.000,00	75,32	47.724.500,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	7.290.470.164,00	6.902.062.148,00	94,67	1.206.025.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	30.640.000,00	19.913.400,00	64,99	28.638.000,00
12	Dinas Kebudayaan	188.332.000,00	152.235.360,00	80,83	9.900.000,00
13	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	56.634.003,00	56.277.000,00	99,37	-
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	36.156.600,00	31.900.000,00	88,23	71.480.000,00
15	Dinas Pariwisata	81.552.960,00	75.036.000,00	92,01	43.350.000,00
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	24.000.000,00	21.978.000,00	91,58	-
17	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	17.789.360,00	9.079.800,00	51,04	126.459.200,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.836.600,00	2.775.000,00	97,83	9.900.000,00
19	Sekretariat DPRD	164.161.000,00	64.984.700,00	39,59	237.365.000,00
20	Sekretariat Daerah	539.184.680,00	408.069.450,00	75,68	628.900.000,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	83.208.400,00	20.808.060,00	25,01	153.000.000,00
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	224.906.220,00	206.460.001,00	91,80	174.780.000,00
23	Badan Pendapatan Daerah	418.681.300,00	222.699.547,00	53,19	7.600.000,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	208.434.700,00	190.290.000,00	91,29	20.853.000,00
25	Badan Riset dan Inovasi Daerah	116.731.300,00	70.531.800,00	60,42	-
26	Badan Penghubung	9.755.000,00	7.510.000,00	76,99	3.400.000,00
27	Inspektorat	147.582.180,00	135.935.200,00	92,11	237.000.000,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.363.300,00	10.989.000,00	51,44	-
XX	**Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika**	**17.982.100,00**	**-**	**-**	**45.400.000,00**
1	Dinas Kesehatan	17.982.100,00	-	-	-
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	45.400.000,00
XXI	**Belanja Modal Sumur**	**25.000.000,00**	**-**	**-**	**-**
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25.000.000,00	-	-	-
XXII	**Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi**	**-**	**-**	**-**	**57.300.000,00**
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	24.600.000,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	32.700.000,00
XXIII	**Belanja Modal Alat Pelindung**	**140.000.000,00**	**132.000.002,00**	**94,29**	**775.460.000,00**
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	140.000.000,00	132.000.002,00	94,29	-
2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	-	-	775.460.000,00
XXIV	**Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat**	**959.343.200,00**	**804.092.709,00**	**83,82**	**95.500.000,00**
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	99.900.000,00	99.067.500,00	99,17	-
2	Dinas Perhubungan	859.443.200,00	705.025.209,00	82,03	95.500.000,00
XXV	**Belanja Modal Peralatan Olahraga**	**77.172.500,00**	**74.085.000,00**	**95,99**	**-**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	67.374.500,00	66.960.000,00	99,38	-
2	Dinas Kesehatan	6.221.000,00	3.750.000,00	60,28	-
3	Dinas Kebudayaan	3.577.000,00	3.375.000,00	94,35	-
XXVI	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS**	**-**	**-**	**-**	**42.816.245.711,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	42.816.245.711,00
XXVII	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS**	**42.888.128.423,00**	**42.580.231.926,00**	**99,28**	**-**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	42.888.128.423,00	42.580.231.926,00	99,28	-
XXVII	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**34.238.172.100,00**	**26.536.024.380,00**	**77,50**	**24.597.605.336,50**
1	Dinas Kesehatan	20.092.391.000,00	15.546.558.200,00	77,38	19.171.788.288,50
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	12.088.581.100,00	10.241.116.181,00	84,72	4.775.817.048,00
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.057.200.000,00	748.349.999,00	36,38	650.000.000,00

Rincian Anggran Dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

No	OPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	**321.617.256.729,00**	**240.493.997.597,02**	**74,77**	**407.489.294.374,22**
I	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**	**312.741.552.324,00**	**233.378.554.268,35**	**74,62**	**397.942.559.259,10**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	118.329.116.400,00	114.371.704.888,50	96,66	247.289.638.209,73
2	Dinas Kesehatan	18.619.554.510,00	16.498.295.498,40	88,61	18.938.342.100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.978.670.000,00	11.614.103.745,00	96,96	7.376.168.654,11
4	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	48.672.920,93
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.313.504.724,00	2.041.600.840,36	88,25	678.665.894,40
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	9.195.583.825,00	8.897.856.649,00	96,76	3.826.260.431,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	10.000.000,00	9.758.010,00	97,58	199.516.000,00
8	Dinas Perhubungan	-	-	-	191.145.430,00
9	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	106.680.452.000,00	50.968.959.245,78	47,78	111.831.916.775,00
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	272.000.000,00	267.978.939,61	98,52	-
11	Dinas Kebudayaan	9.259.758.873,00	1.153.371.254,76	12,46	-
12	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	128.700.000,00	127.932.000,00	99,40	-
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.255.000.000,00	2.126.305.533,00	94,29	-
14	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	-	-	1.324.474.165,00
15	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	338.275.000,00	333.285.501,00	98,53	2.272.703.506,48
16	Sekretariat DPRD	23.301.365.912,00	19.008.349.672,00	81,58	424.867.977,00
17	Sekretariat Daerah	288.913.801,00	284.210.624,00	98,37	630.887.389,77
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.926.598.165,00	268.701.415,00	13,95	841.993.711,00
19	Badan Pendapatan Daerah	7.262.935.114,00	5.051.564.116,94	69,55	768.361.526,90
20	Badan Riset dan Inovasi Daerah	161.945.000,00	161.681.235,00	99,84	488.344.520,00
21	Badan Penghubung	220.179.000,00	-	-	220.491.301,00
22	Inspektorat	199.000.000,00	192.895.100,00	96,93	450.619.623,00
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	139.489.123,78
II	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal**	**25.000.000,00**	**22.782.695,00**	**91,13**	**544.286.964,90**
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	25.000.000,00	22.782.695,00	91,13	-
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	544.286.964,90
III	**Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti**	**60.000.000,00**	**24.719.700,00**	**41,19**	**5.651.346.599,00**
1	Dinas Kesehatan	60.000.000,00	24.719.700,00	41,19	-
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	5.541.271.000,00
3	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	110.075.599,00
IV	**Belanja Modal Tugu/Tanda Batas**	**3.418.527.580,00**	**3.100.165.659,00**	**90,69**	**14.818.500,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.815.000.000,00	2.672.641.000,00	94,94	-
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	365.527.580,00	341.560.000,00	93,44	-
3	Dinas Kebudayaan	150.000.000,00	-	-	-
4	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-	14.818.500,00
5	Badan Riset dan Inovasi Daerah	75.000.000,00	74.242.800,00	98,99	-
6	Inspektorat	13.000.000,00	11.721.859,00	90,17	-
V	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	**5.372.176.825,00**	**3.967.775.274,67**	**73,85**	**3.336.283.051,22**
1	Dinas Kesehatan	3.635.263.000,00	2.765.397.108,67	76,07	2.536.038.370,22
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	736.913.825,00	733.746.675,00	99,57	650.793.140,00
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.000.000.000,00	468.631.491,00	46,86	149.451.541,00

Lampiran 15

Rincian Anggran Dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

No	OPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	**290.219.969.754,00**	**240.687.598.599,81**	**82,93**	**94.451.449.090,69**
I	**Belanja Modal Jalan**	**209.408.677.070,00**	**182.648.864.205,36**	**87,22**	**67.093.118.028,00**
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	209.373.928.070,00	182.616.819.666,00	87,22	67.093.118.028,00
2	Badan Pendapatan Daerah	34.749.000,00	32.044.539,36	92,22	-
II	**Belanja Modal Jembatan**	**790.000.000,00**	**641.467.002,00**	**81,20**	**-**
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	790.000.000,00	641.467.002,00	81,20	-
III	**Belanja Modal Bangunan Air Irigasi**	**10.110.892.900,00**	**9.494.258.626,00**	**93,90**	**10.922.844.150,00**
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.110.892.900,00	9.494.258.626,00	93,90	10.922.844.150,00
IV	**Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam**	**11.821.348.420,00**	**9.930.114.574,00**	**84,00**	**531.169.171,00**
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.821.348.420,00	9.930.114.574,00	84,00	531.169.171,00
V	**Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku**	**199.992.000,00**	**199.456.736,00**	**99,73**	**-**
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	199.992.000,00	199.456.736,00	99,73	-
VI	**Belanja Modal Bangunan Air Kotor**	**376.256.452,00**	**29.752.405,00**	**7,91**	**-**
1	Sekretariat Daerah	346.256.452,00	-	-	-
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	30.000.000,00	29.752.405,00	99,17	-
VII	**Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku**	**-**	**-**	**-**	**115.481.041,69**
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	115.481.041,69
VIII	**Belanja Modal Instalasi Air Kotor**	**11.627.374.757,00**	**10.494.498.933,00**	**90,26**	**1.013.233.849,00**
1	Dinas Kesehatan	8.277.374.205,00	8.092.853.133,00	97,77	-
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.350.000.552,00	2.401.645.800,00	71,69	1.013.233.849,00
IX	**Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah**	**6.444.378.000,00**	**716.032.260,00**	**11,11**	**-**
1	Dinas Kesehatan	23.600.000,00	23.430.000,00	99,28	-
2	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.400.778.000,00	692.602.260,00	10,82	-
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.000,00	-	-	-
X	**Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik**	**-**	**-**	**-**	**419.850.000,00**
1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	-	-	419.850.000,00
XI	**Belanja Modal Instalasi Pengaman**	**800.000.000,00**	**604.300.000,00**	**75,54**	**-**
1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	800.000.000,00	604.300.000,00	75,54	-
XII	**Belanja Modal Instalasi Lain**	**810.000.000,00**	**662.466.666,00**	**81,79**	**79.289.000,00**
1	Dinas Kesehatan	200.000.000,00	59.386.666,00	29,69	-
2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	600.000.000,00	594.200.000,00	99,03	-
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	69.805.000,00
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.000.000,00	8.880.000,00	88,80	9.484.000,00
XIII	**Belanja Modal Jaringan Air Minum**	**29.515.550.155,00**	**23.171.395.700,00**	**78,51**	**10.164.880.700,00**
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	29.515.550.155,00	23.171.395.700,00	78,51	10.164.880.700,00
XIV	**Belanja Modal Jaringan Listrik**	**5.331.000.000,00**	**1.682.995.201,45**	**31,57**	**47.240.285,00**
1	Dinas Kesehatan	-	-	-	8.894.285,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	14.885.000,00
3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	250.000.000,00	247.668.209,45	99,07	-
4	Dinas Kebudayaan	3.616.000.000,00	-	-	-
5	Dinas Pariwisata	160.000.000,00	159.573.378,00	99,73	-
6	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.100.000.000,00	1.072.246.214,00	97,48	-
7	Sekretariat Daerah	158.000.000,00	157.065.000,00	99,41	23.461.000,00
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	37.000.000,00	36.452.400,00	98,52	-
9	Badan Pendapatan Daerah	10.000.000,00	9.990.000,00	99,90	-
XV	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD**	**2.984.500.000,00**	**411.996.291,00**	**13,80**	**4.064.342.866,00**
1	Dinas Kesehatan	2.300.000.000,00	182.628.411,00	7,94	71.054.430,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	684.500.000,00	229.367.880,00	33,51	3.868.645.636,00
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	124.642.800,00

Lampiran 16

Rincian Anggaran Dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

No	OPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	**34.418.774.193,00**	**31.596.980.320,00**	**91,80**	**31.382.599.067,00**
I	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak**	**45.000.000,00**	**44.799.600,00**	**99,55**	**98.531.370,00**
1	Sekretariat Daerah	45.000.000,00	44.799.600,00	99,55	98.531.370,00
II	**Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi**	**300.000.000,00**	**298.680.549,00**	**99,56**	**-**
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	300.000.000,00	298.680.549,00	99,56	-
III	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS**	**-**	**-**	**-**	**28.752.067.697,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	28.752.067.697,00
IV	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS**	**32.013.774.193,00**	**31.211.500.171,00**	**97,49**	**-**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	32.013.774.193,00	31.211.500.171,00	97,49	-
V	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD**	**2.060.000.000,00**	**42.000.000,00**	**2,03**	**2.532.000.000,00**
1	Dinas Kesehatan	2.060.000.000,00	42.000.000,00	2,03	2.532.000.000,00

Lampiran 17

Rincian Anggaran Dan Belanja Modal Aset Lainnya
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

No	OPD	TA 2025			TA 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	**712.649.600,00**	**543.458.964,90**	**76,25**	**838.900.000,00**
I	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**	**176.649.600,00**	**153.536.964,90**	**86,91**	**838.900.000,00**
1	Dinas Kesehatan	16.649.600,00	-	-	-
2	Dinas Perhubungan	100.000.000,00	96.015.000,00	96,02	789.600.000,00
3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	60.000.000,00	57.521.964,90	95,87	-
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	49.300.000,00
II	**Belanja Modal Aset Lainnya BLUD**	**536.000.000,00**	**389.922.000,00**	**72,75**	**-**
1	Dinas Kesehatan	536.000.000,00	389.922.000,00	72,75	-

Belanja Tidak Terduga
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Untuk Korban Bencana/Musibah di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan untuk korban Bencana/Musibah di Kabupaten Jembrana,Buleleng,Karangasem,Bangli,Klungkung dan Tabanan Tahun anggaran 2025	1.303.000.000,00	
	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Untuk Korban Bencana/Musibah di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem,Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2025	957.000.000,00	
	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Untuk Korban Bencana / Musibah di Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Klungkung	982.500.000,00	
	Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bulan Desember 2024 atas nama Putu Agus Yanta sesuai SK Gubernur Bali Nomor 385/04-E/HK/2025 tanggal 14 April 2025.	21.888.800,00	
	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Untuk Korban Bencana/Musibah di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025	1.439.300.000,00	
	Belanja Tidak Terduga untuk Restitusi Dana BOSP terkait Pengembalian SiLPA Dana BOSP Th. 2019 s.d 2022 Melalui KPPN Denpasar ke RKUN sesuai Keputusan Kepala BPKAD Prov. Bali No. 5004 Th. 2025, tgl. 31 Juli 2025.	3.056.472.413,00	
	Belanja Tidak Terduga untuk Restitusi Dana BOSP Tahun 2021 s.d Tahun 2023 pada SMKN 2 Negara Melalui KPPN Denpasar ke RKUN sesuai Keputusan Kepala BPKAD Prov. Bali No. 5003 Th. 2025, tgl. 31 Juli 2025.	42.400.000,00	
	Belanja Tidak Terduga untuk Restitusi Dana BOSP terkait Belanja Barang dan Jasa BOSP yang Tidak Sesuai Ketentuan Melalui KPPN Denpasar ke RKUN sesuai Keputusan Kepala BPKAD Prov. Bali No. 5005 Th. 2025, tgl. 31 Juli 2025 dan pembulatan SIMPONI Kemenkeu.	143.132.185,00	
	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Untuk Korban Bencana/Musibah di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2025	766.400.000,00	
	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan berupa Sarana Prasarana Perekonomian dan Santunan Penguatan Ekonomi di Kota Denpasar	2.714.000.000,00	
	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan untuk Perbaikan Tempat Suci/Ibadah Akibat Bencana di Kota Denpasar	710.500.000,00	
	Belanja Tidak Terduga untuk Restitusi Kelebihan Setoran Ke KASDA Prov. Bali Terkait SiLPA Dana BOSP Th. 2019-2022 pada SMAN 1 Gianyar Serta Temuan BPK RI Atas Belanja Honorarium BOSP Pada SLBN 1 DPS sesuai Kep. Kepala BPKAD Prov. Bali No. 6755 Th. 2025	3.516.500,00	
	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Pascabencana/Musibah Berupa Uang untuk Perbaikan Rumah Masyarakat, Fasilitas Umum, Tempat Suci/Ibadah, Sarpras Perekonomian, Santunan Luka Berat di Kab. Buleleng, Bangli, Klungkung, Tabanan, dan Kota Denpasar	886.500.000,00	
	Belanja Tidak Terduga Bantuan Sosial Pascabencana/Musibah berupa Uang untuk Perbaikan Sarpras Perekonomian, Rumah Masyarakat, Fasilitas Umum, Tempat Suci/Ibada, Santunan di Ka. Jembrana, Buleleng, Karangasem, Klungkung, Gianyar, Tabanan, Kota Denpasar	2.524.000.000,00	
	Belanja Tidak Terduga untuk Restitusi Pengembalian Dana BOSP yang tidak sesuai ketentuan melalui KPPN Denpasar ke Rekening Kas Umum Negara sesuai Keputusan Kepala BPKAD Prov Bali No. 8792 Th 2025, tgl 24 Des 2025 dan pembulatan SIMPONI Kementrian Keuangan	159.372.398,00	
	Reklasifikasi Transaksi Penatausahaan Kesalahan Pembebanan Rekening SP2D	1.831.300.000,00	
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		**17.616.282.296,00**
PENGEMBALIAN BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Pengembalian Belanja Tidak terduga untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan untuk Korban Bencana/Musibah di Desa Adat Utu Kec. Penebel Kab.Tabanan	85.000.000,00	
	Penyesuaian BTT substansi Restitusi	42.400.000,00	
	Penyesuaian BTT substansi Restitusi	143.132.185,00	
	Reklasifikasi atas penyetoran SiLPA BOSP TA 2019 s.d 2022 (temuan BPK 2024) ke RKUN	3.056.472.412,70	
	Pengembalian Belanja tidk terduga untuk bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan untuk Korban Bencana/musibah di kab .Buleleng an. Nengah Suarta dan Made Suarta	19.000.000,00	
	Pengembalian Belanja Tidak terduga untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan berupa Sarana Prasarana Perekonomian dan Santunan penguatan Ekonomi di Kota Denpasar	12.000.000,00	
	Penyesuaian BTT substansi Restitusi	3.516.500,00	
	Pengembalian Belanja Tidak Terduga Bantuan Sosial Pascabencana/Musibah di Desa Sidan kabupaten Gianyar	20.000.000,00	
	Penyesuaian BTT substansi Restitusi	159.372.398,00	
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA TIDAK TERDUGA		**3.540.893.495,70**
	JUMLAH		**14.075.388.800,30**

Bagi Hasil Kepada Kabupaten Dan Kota
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

Bagi Hasil Kepada Kabupaten		
Badung		
Kewajiban 2024		
Kewajiban Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten Badung Triwulan IV Bulan November dan Desember Tahun Anggaran 2024	46.083.586.753,00	
Pajak Rokok		
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Badung untuk Pajak Rokok Triwulan IV bulan Desember Tahun Anggaran 2024 dan Triwulan I Tahun Anggaran 2025	11.550.265.964,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Badung untuk Pajak Rokok Triwulan II Tahun Anggaran 2025	6.445.884.596,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Badung untuk Pajak Rokok Triwulan III Tahun Anggaran 2025	6.901.056.539,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten Badung untuk Pajak Rokok Triwulan IV Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2025	4.434.150.865,00	
Reguler 2025		
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Badung untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Februari Tahun Anggaran 2025	4.618.487.131,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Badung untuk Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Bulan Januari Tahun Anggaran 2025	6.416.191.194,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Badung untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Maret Tahun Anggaran 2025	5.706.400.850,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Badung untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan April Tahun Anggaran 2025	5.362.909.506,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Badung untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Mei Tahun Anggaran 2025	5.544.898.813,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Badung untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Juni Tahun Anggaran 2025	6.109.244.933,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Badung untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Juli Tahun Anggaran 2025	5.605.734.089,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Badung untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2025	6.212.601.572,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Badung untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan September Tahun Anggaran 2025	6.091.047.795,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Badung untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Oktober Tahun Anggaran 2025	6.066.221.310,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Badung untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan November Tahun Anggaran 2025	6.372.904.062,00	
Bangli		
Kewajiban 2024		
Kewajiban Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten Bangli Triwulan IV Bulan November dan Desember Tahun Anggaran 2024	23.105.327.805,00	
Pajak Rokok		
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Bangli untuk Pajak Rokok Triwulan IV bulan Desember Tahun Anggaran 2024 dan Triwulan I Tahun Anggaran 2025	6.985.414.134,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Bangli untuk Pajak Rokok Triwulan II Tahun Anggaran 2025	3.898.366.800,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Bangli untuk Pajak Rokok Triwulan III Tahun Anggaran 2025	4.173.647.433,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten Bangli untuk Pajak Rokok Triwulan IV Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2025	2.681.702.761,00	
Reguler 2025		
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Bangli untuk Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Bulan Januari Tahun Anggaran 2025	2.846.786.954,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Bangli untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Februari Tahun Anggaran 2025	1.969.124.999,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Bangli untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Maret Tahun Anggaran 2025	2.432.123.560,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Bangli untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan April Tahun Anggaran 2025	2.285.960.982,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Bangli untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Mei Tahun Anggaran 2025	2.363.613.046,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Bangli untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Juni Tahun Anggaran 2025	2.603.923.823,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Bangli untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Juli Tahun Anggaran 2025	2.389.609.468,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Bangli untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2025	2.647.963.570,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Bangli untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan September Tahun Anggaran 2025	2.596.266.935,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Bangli untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Oktober Tahun Anggaran 2025	2.585.520.956,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Bangli untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan November Tahun Anggaran 2025	2.716.172.965,00	
Buleleng		
Kewajiban 2024		

Bagi Hasil Kepada Kabupaten		
Kewajiban Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten Buleleng Triwulan IV Bulan November dan Desember Tahun Anggaran 2024	41.993.205.593,00	
Pajak Rokok		
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Buleleng untuk Pajak Rokok Triwulan IV bulan Desember Tahun Anggaran 2024 dan Triwulan I Tahun Anggaran 2025	15.716.694.745,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Buleleng untuk Pajak Rokok Triwulan II Tahun Anggaran 2025	8.771.053.487,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Buleleng untuk Pajak Rokok Triwulan III Tahun Anggaran 2025	9.390.415.718,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten Buleleng untuk Pajak Rokok Triwulan IV Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2025	6.033.644.232,00	
Reguler 2025		
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Buleleng untuk Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Bulan Januari Tahun Anggaran 2025	6.027.263.612,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Buleleng untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Februari Tahun Anggaran 2025	4.379.319.052,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Buleleng untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Maret Tahun Anggaran 2025	5.408.303.202,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Buleleng untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan April Tahun Anggaran 2025	5.083.485.119,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Buleleng untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Mei Tahun Anggaran 2025	5.256.233.831,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Buleleng untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Juni Tahun Anggaran 2025	5.790.424.094,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Buleleng untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Juli Tahun Anggaran 2025	5.314.100.138,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Buleleng untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2025	5.888.344.929,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Buleleng untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan September Tahun Anggaran 2025	5.773.482.322,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Buleleng untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Oktober Tahun Anggaran 2025	5.749.445.306,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Buleleng untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan bulan November Tahun Anggaran 2025	6.039.924.909,00	
Gianyar		
Kewajiban 2024		
Kewajiban Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten Gianyar Triwulan IV Bulan November dan Desember Tahun Anggaran 2024	34.784.305.253,00	
Pajak Rokok		
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Gianyar untuk Pajak Rokok Triwulan IV bulan Desember Tahun Anggaran 2024 dan Triwulan I Tahun Anggaran 2025	10.589.191.187,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Gianyar untuk Pajak Rokok Triwulan II Tahun Anggaran 2025	5.909.535.293,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Gianyar untuk Pajak Rokok Triwulan III Tahun Anggaran 2025	6.326.833.279,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten Gianyar untuk Pajak Rokok Triwulan IV Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2025	4.065.193.945,00	
Reguler 2025		
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Gianyar untuk Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Bulan Januari Tahun Anggaran 2025	4.748.542.154,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Gianyar untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Februari Tahun Anggaran 2025	3.397.797.091,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Gianyar untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Maret Tahun Anggaran 2025	4.197.716.421,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Gianyar untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan April Tahun Anggaran 2025	3.945.166.444,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Gianyar untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Mei Tahun Anggaran 2025	4.079.087.152,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Gianyar untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Juni Tahun Anggaran 2025	4.494.110.868,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Gianyar untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Juli Tahun Anggaran 2025	4.123.875.062,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Gianyar untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2025	4.570.135.215,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Gianyar untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan September Tahun Anggaran 2025	4.480.778.054,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Gianyar untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Oktober Tahun Anggaran 2025	4.462.426.591,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Gianyar untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan bulan Nopember Tahun Anggaran 2025	4.687.995.280,00	
Jembrana		
Kewajiban 2024		
Kewajiban Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten Jembrana Triwulan IV Bulan November dan Desember Tahun Anggaran 2024	26.433.506.710,00	
Pajak Rokok		
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Jembrana untuk Pajak Rokok Triwulan IV bulan Desember Tahun Anggaran 2024 dan Triwulan I Tahun Anggaran 2025	8.177.579.399,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Jembrana untuk Pajak Rokok Triwulan II Tahun Anggaran 2025	4.563.681.326,00	

Bagi Hasil Kepada Kabupaten		
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Jembrana untuk Pajak Rokok Triwulan III Tahun Anggaran 2025	4.885.942.710,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten Jembrana untuk Pajak Rokok Triwulan IV Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2025	3.139.375.395,00	
Reguler 2025		
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Jembrana untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Februari Tahun Anggaran 2025	2.394.451.308,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Jembrana untuk Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Bulan Januari Tahun Anggaran 2025	3.407.276.902,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Jembrana untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Maret Tahun Anggaran 2025	2.956.347.199,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Jembrana untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan April Tahun Anggaran 2025	2.778.992.837,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Jembrana untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Mei Tahun Anggaran 2025	2.873.496.181,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Jembrana untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Juni Tahun Anggaran 2025	3.165.314.994,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Jembrana untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Juli Tahun Anggaran 2025	2.905.185.390,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Jembrana untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2025	3.218.831.493,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Jembrana untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan September Tahun Anggaran 2025	3.156.138.198,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Jembrana untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Oktober Tahun Anggaran 2025	3.142.858.776,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Jembrana untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan bulan November Tahun Anggaran 2025	3.301.593.680,00	
Karangasem		
Kewajiban 2024		
Kewajiban Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten Karangasem Triwulan IV Bulan November dan Desember Tahun Anggaran 2024	32.078.368.624,00	
Pajak Rokok		
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Karangasem untuk Pajak Rokok Triwulan IV bulan Desember Tahun Anggaran 2024 dan Triwulan I Tahun Anggaran 2025	11.322.292.835,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Karangasem untuk Pajak Rokok Triwulan II Tahun Anggaran 2025	6.318.659.086,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Karangasem untuk Pajak Rokok Triwulan III Tahun Anggaran 2025	6.764.847.083,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten Karangasem untuk Pajak Rokok Triwulan IV Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2025	4.346.631.907,00	
Reguler 2025		
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Karangasem untuk Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Bulan Januari Tahun Anggaran 2025	4.327.477.548,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Karangasem untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Februari Tahun Anggaran 2025	3.085.380.108,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Karangasem untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Maret Tahun Anggaran 2025	3.811.165.272,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Karangasem untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan April Tahun Anggaran 2025	3.582.036.031,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Karangasem untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Mei Tahun Anggaran 2025	3.703.684.538,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Karangasem untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Juni Tahun Anggaran 2025	4.080.338.271,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Karangasem untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Juli Tahun Anggaran 2025	3.744.395.207,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Karangasem untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2025	4.149.353.603,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Karangasem untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan September Tahun Anggaran 2025	4.068.301.902,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Karangasem untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Oktober Tahun Anggaran 2025	4.051.526.001,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Karangasem untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan November Tahun Anggaran 2025	4.256.281.878,00	
Klungkung		
Kewajiban 2024		
Kewajiban Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten Klungkung Triwulan IV Bulan November dan Desember Tahun Anggaran 2024	22.577.803.210,00	
Pajak Rokok		
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Klungkung untuk Pajak Rokok Triwulan IV bulan Desember Tahun Anggaran 2024 dan Triwulan I Tahun Anggaran 2025	6.503.819.868,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Klungkung untuk Pajak Rokok Triwulan II Tahun Anggaran 2025	3.629.602.334,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Klungkung untuk Pajak Rokok Triwulan III Tahun Anggaran 2025	3.885.904.340,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten Klungkung untuk Pajak Rokok Triwulan IV Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2025	2.496.818.566,00	
Reguler 2025		
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Klungkung untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Februari Tahun Anggaran 2025	1.935.655.517,00	

Bagi Hasil Kepada Kabupaten		
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Klungkung untuk Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Bulan Januari Tahun Anggaran 2025	2.794.511.813,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Klungkung untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Maret Tahun Anggaran 2025	2.391.540.797,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Klungkung untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan April Tahun Anggaran 2025	2.247.604.146,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Klungkung untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Mei Tahun Anggaran 2025	2.323.882.739,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Klungkung untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Juni Tahun Anggaran 2025	2.560.380.659,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Klungkung untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Juli Tahun Anggaran 2025	2.349.384.369,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Klungkung untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2025	2.603.696.218,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Klungkung untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan September Tahun Anggaran 2025	2.552.762.573,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Klungkung untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Oktober Tahun Anggaran 2025	2.542.344.030,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Klungkung untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan November Tahun Anggaran 2025	2.670.869.175,00	
Tabanan		
Kewajiban 2024		
Kewajiban Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten Tabanan Triwulan IV Bulan November dan Desember Tahun Anggaran 2024	33.330.435.781,00	
Pajak Rokok		
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Tabanan untuk Pajak Rokok Triwulan IV bulan Desember Tahun Anggaran 2024 dan Triwulan I Tahun Anggaran 2025	10.186.774.121,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Tabanan untuk Pajak Rokok Triwulan II Tahun Anggaran 2025	5.684.957.437,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Tabanan untuk Pajak Rokok Triwulan III Tahun Anggaran 2025	6.086.397.004,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten Tabanan untuk Pajak Rokok Triwulan IV Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2025	3.910.705.902,00	
Reguler 2025		
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Tabanan untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Februari Tahun Anggaran 2025	3.192.570.104,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Tabanan untuk Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Bulan Januari Tahun Anggaran 2025	4.481.343.417,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Tabanan untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Maret Tahun Anggaran 2025	3.942.077.751,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Tabanan untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan April Tahun Anggaran 2025	3.705.498.094,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Tabanan untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Mei Tahun Anggaran 2025	3.831.478.585,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Tabanan untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Juni Tahun Anggaran 2025	4.220.681.643,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Tabanan untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Juli Tahun Anggaran 2025	3.873.708.014,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Tabanan untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2025	4.292.046.593,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Tabanan untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan September Tahun Anggaran 2025	4.208.407.323,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Tabanan untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Oktober Tahun Anggaran 2025	4.190.762.966,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Tabanan untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan November Tahun Anggaran 2025	4.402.447.177,00	
Jumlah Bagi Hasil Kepada Kabupaten		**813.079.326.399,00**

Bagi Hasil Kepada Kabupaten		
Bagi Hasil Kepada Kota		
Denpasar		
Kewajiban 2024		
Kewajiban Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan untuk Kota Denpasar Triwulan IV Bulan November dan Desember Tahun Anggaran 2024	50.298.175.523,00	
Pajak Rokok		
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kota Denpasar untuk Pajak Rokok Triwulan IV bulan Desember Tahun Anggaran 2024 dan Triwulan I Tahun Anggaran 2025	13.677.283.984,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kota Denpasar untuk Pajak Rokok Triwulan II Tahun Anggaran 2025	7.632.914.638,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kota Denpasar untuk Pajak Rokok Triwulan III Tahun Anggaran 2025	8.171.907.935,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kota Denpasar untuk Pajak Rokok Triwulan IV Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2025	5.250.713.776,00	
Reguler 2025		
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kota Denpasar untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Februari Tahun Anggaran 2025	4.867.352.400,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kota Denpasar untuk Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Bulan Januari Tahun Anggaran 2025	6.818.746.945,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kota Denpasar untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Maret Tahun Anggaran 2025	6.015.299.345,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kota Denpasar untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan April Tahun Anggaran 2025	5.652.816.882,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kota Denpasar untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Mei Tahun Anggaran 2025	5.844.512.569,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kota Denpasar untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Juni Tahun Anggaran 2025	6.439.775.334,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kota Denpasar untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Juli Tahun Anggaran 2025	5.908.527.162,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kota Denpasar untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2025	6.548.746.763,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kota Denpasar untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan September Tahun Anggaran 2025	6.420.427.194,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kota Denpasar untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Bulan Oktober Tahun Anggaran 2025	6.394.533.125,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kota Denpasar untuk Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan bulan November Tahun Anggaran 2025	6.717.916.474,00	
Jumlah Bagi Hasil Kepada Kota		**152.659.650.049,00**
Jumlah Bagi Hasil Kepada Kabupaten dan Kota		**965.738.976.448,00**

Belanja Bantuan Keuangan
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		
BKK kepada Kabupaten Bangli untuk Pelaksanaan Pesta Kesenian Bali Tahun Anggaran 2025	500.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Pembayaran JKN Sharing PBI untuk Bulan Januari sampai dengan Maret 2025	564.112.080,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan dalam rangka Pelaksanaan Pesta Kesenian Bali Tahun Anggaran 2025	500.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	345.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada 6 Kabupaten di Bali untuk Pembayaran Sharing PBI Daerah kepada Kabupaten Buleleng bulan Januari sampai dengan Maret Tahun Anggaran 2025	1.108.946.160,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng untuk Pengendalian Penduduk Pendatang Tahun Anggaran 2025	300.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Klungkung untuk Pembayaran JKN Sharing PBI Daerah Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun Anggaran 2025	1.786.125.600,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk Sharing PBI Daerah Bulan Januari sampai dengan Pebruari Tahun Anggaran 2025	3.289.492.080,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	345.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Kabupaten Jembrana untuk Pengendalian Penduduk Pendatang Tahun 2025	750.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	285.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kota Denpasar untuk pengelolaan Sampah Tahap I Tahun Anggaran 2025.	1.144.666.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng dalam rangka pelaksanaan Pesta Kesenian Bali Tahun Anggaran 2025.	500.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Klungkung dalam rangka Pesta Kesenian Bali Tahun Anggara 2025	500.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kota Denpasar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggran 2025	150.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem dalam rangka pelaksanaan Pesta Kesenian Bali Tahun Anggaran 2025	500.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk Pengendalian Penduduk Pendatang Tahun Anggaran 2025	500.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk Sharing PBI Daerah bulan Maret Tahun Anggaran 2025	1.642.621.680,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Daerah Provinsi kepada Kabupaten Jembrana dalam rangka Pelaksanaan Pesta Kesenian Bali Tahun Anggaran 2025	500.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kota Denpasar untuk Pengelolaan Sampah Tahap II Tahun Anggaran 2025	3.149.325.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	315.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk Sharing PBI Daerah Bulan April Tahun Anggaran 2025	1.641.774.960,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	570.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Pembayaran JKN Sharing PBI untuk Bulan April dan Mei 2025	375.989.040,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kota Denpasar untuk Pengelolaan Sampah Tahap III Tahun Anggaran 2025	500.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Daerah Provinsi kepada Kabupaten Jembrana untuk Subak/ Subak Abian Tahun 2025	375.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk Pembayaran JKN Sharing PBI Daerah Bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei Tahun Anggaran 2025.	8.090.787.600,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Pengelolaan Batur Unesco Global Geopark Tahun Anggaran 2025.	1.000.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk Sharing PBI Bulan Mei Tahun Anggaran 2025	1.641.895.920,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Pengelolaan Sampah Tahun Anggaran 2025	3.947.715.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk Pengelolaan Sampah Tahun Anggaran 2025	4.768.060.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Jembrana untuk Sharing PBI Daerah bulan Januari s/d Mei 2025	1.805.872.320,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Klungkung untuk Pembayaran JKN Sharing PBI Daerah bulan April sampai dengan Juni Tahun Anggaran 2025	1.785.399.840,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Pembayaran JKN Sharing PBI untuk Bulan Juni dan Juli Tahun 2025	376.140.240,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Gianyar untuk Pengelolaan Sampah Tahap I Tahun Anggaran 2025	3.988.150.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada 6 Kabupaten di Bali untuk Pembayaran Sharing PBI Daerah kepada Kabupaten Buleleng dari Bulan April s/d Juni Tahun Anggaran 2025	1.118.048.400,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk Sharing PBI Daerah Bulan Juni Tahun Anggaran 2025	1.642.455.360,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk Pembayaran JKN Sharing PBI Daerah Bulan Juni dan Juli Tahun Anggaran 2025	3.237.237.360,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem dalam rangka Pengelolaan Sampah Tahun Anggaran 2025	1.136.426.000,00	

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk Sharing PBI Daerah Bulan Juli Tahun Anggaran 2025	1.642.198.320,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dalam rangka Pengelolaan Sampah untuk Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025	3.632.300.000,80	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kota Denpasar untuk Penglolaan Sampah Tahap IV Tahun Anggaran 2025	557.800.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem dalam rangka Pengelolaan Sampah Tahun Anggaran 2025	1.467.260.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Klungkung dalam rangka Pengelolaan Sampah Tahap I Tahun Anggaran 2025	1.467.260.000,00	
Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dalam rangka Paket Pekerjaan Pengerasan Jalan Lingkar Turyapada Tower-Lemukih untuk Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025	2.419.783.200,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Jembrana untuk Sharing PBI Daerah bulan Juni,Juli dan Agutus 2025	1.064.070.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk Sharing PBI Daerah Bulan Agustus Tahun Anggaran 2025	1.642.092.480,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kota Denpasar untuk Pengelolaan Sampah Tahap V Tahun Anggaran 2025	157.950.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Pembayaran JKN Sharing PBI untuk Bulan Agustus dan September 2025	375.898.320,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk pembayaran JKN Sharing PBI Daerah Bulan Agustus dan September Tahun Anggaran 2025	3.239.989.200,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk Sharing PBI Daerah Bulan September Tahun Anggaran 2025	1.641.835.440,00	
Belanja Tidak Terduga Bantuan Sosial Pascabencana Berupa Uang untuk Sarana Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat, Fasilitas Umum, Tempat Suci/Ibadah, dan Santunan di Kabupatem Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan	1.831.300.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Klungkung untuk Sharing PBI Daerah Bulan Juli sampai dengan September Tahun Anggaran 2025	1.785.294.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kota Denpasar untuk Pengelolaan Sampah Tahap VI Tahun Anggaran 2025	243.300.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Rekontruksi Jl. Bambang Kaja-Bambang Kelod, Bambang Kaja I, Jl. Bambang Kaja II, Jl. Bambang Kaja III, dan Jl. Bambang Kaja IV untuk Pembayaran Uang Muka Tahun Anggaran 2025	592.779.210,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk kegiatan Rekontruksi Jalan Nusantara 3, Jalan Sugriwa I,II,IV, Tamanbali Guliangkangin I, Uma Anyar-Kuning III, Bunutin-Bunutin untuk Pembayaran Uang Muka Tahun Anggaran 2025	623.442.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk kegiatan Rekontruksi Jalan Bonyoh-Abuan, dan Abuan Sangkaduang untuk Pembayaran Uang Muka Tahun Anggaran 2025	1.051.659.270,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Rekontruksi Jalan Kubu-Samania untuk Pembayaran Uang Muka Tahun Anggaran 2025	385.624.710,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk kegiatan Rekontruksi Jalan Br Bias I untuk Pembayaran Uang Muka Tahun Anggaran 2025	501.656.700,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk kegiatan Rekontruksi Jalan Bunutin-Selati untuk Pembayaran Uang Muka Tahun Anggaran 2025	1.155.034.530,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Rekontruksi Jalan Bangkiangsidem-Peninjoan dan Undisan VI untuk Pembayaran Uang Muka Tahun Anggaran 2025	385.376.130,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Rekontruksi Jalan Batur-Bayung Gede untuk Pembayaran Uang Muka Tahun Anggaran 2025	1.332.677.250,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk kegiatan Rekontruksi Jalan Sukawana-Subak Bila untuk Pembayaran Uang Muka Tahun Anggaran 2025	895.814.130,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Rekontruksi Jalan Pengiangan Kawan-Selat Nyuhan untuk Pembayaran Uang Muka Tahun Anggaran 2025	296.148.510,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Rekontruksi Jalan Tingas-Dukuh untuk Pembayaran Uang Muka Tahun Anggaran 2025	1.067.192.160,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem dalam rangka Pengelolaan Sampah Tahun Anggaran 2025	408.800.003,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dalam rangka Pengerasan Jalan Desa dengan Rabat Beton di Banjar Dinas Bukit Seni Kecamatan Tejakula (Tahap 1) Tahun Anggaran 2025	151.521.300,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) berupa Mobil Rescue Pemadam Kebakaran yang dilengkali dengan alat-alat penyelamatan Tahun Anggaran 2025	697.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dalam rangka Pemeliharaan Museum Soenda Ketjil Tahun Anggaran 2025	59.707.073,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dalam rangka Peningkatan Jalan Dusun Sorga Lokapaksa-Ularan Kecamatan Seririt (Tahap 1) Tahun Anggaran 2025	189.750.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dalam rangka Peningkatan Jalan Lokapaksa-BD Kembang Sari Kecamatan Seririt (Tahap 1) Tahun Anggaran 2025	1.958.256.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dalam rangka Pengerasan Jalan Desa dengan Rabat Beton di Banjar Dinas Panggung Kecamatan Tejakula (Tahap 1) Tahun Anggaran 2025	190.111.800,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dalam rangka Pengerasan Jalan Desa dengan Rabat Beton di Banjar Dinas Anyar Kecamatan Tejakula (Tahap 1) Tahun Anggaran 2025	151.521.300,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Rabat Beton Jalan Lingkungan Penglumbaran Kangin Kecamatan Susut untuk Pembayaran Uang Muka Tahun Anggaran 2025	180.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Penataan Desa Wisata dan Jalan Lingkungan di Desa Wisata Undisan Kecamatan Tembuku untuk Pembayaran Uang Muka Tahun Anggaran 2025	240.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kota Denpasar untuk Pengelolaan Sampah Tahap VII Tahun Anggaran 2025	317.300.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng dalam rangka Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 4 Suwug Kecamatan Sawan (Tahap 1) Tahun Anggaran 2025	123.179.371,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng dalam rangka Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 1 Kampung Anyar Kecamatan Buleleng (Tahap 1) Tahun Anggaran 2025	123.272.904,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng dalam rangka Bantuan SPAMdes berupa sarana dan prasarana air minum di Desa Sembiran Kecamatan Tejakula (Tahap 1) Tahun Anggaran 2025	443.650.500,00	

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng dalam rangka Rehab Gedung dan Penyengker Sekolah SD Negeri 4 Sembiran Kecamatan Tejakula (Tahap 1) Tahun Anggaran 2025	92.916.349,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng dalam rangka Pengadaan Sarana Air Bersih Berbasis Kawasan di Desa Sembiran, Julah dan Bondalem Kecamatan Tejakula (Tahap 1) Tahun Anggaran 2025	1.000.636.627,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Gianyar untuk Pengelolaan Sampah Tahap II Tahun Anggaran 2025	498.550.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk Pembayaran JKN-Sharing PBI Bulan Oktober Tahun Anggaran 2025	1.635.091.920,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk Pembayaran JKN-Sharing PBI Bulan November Tahun Anggaran 2025	1.644.708.240,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Rekontruksi Jalan Nusantara 3, Jalan Sugriwa, I,II,IV, Tamanbali Guliangkangin 1, Uma Anyar-Kuning III, Bunutin-Bunutin untuk Pembayaran Tahap II Tahun Anggaran 2025	935.163.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Rekontruksi Jalan Bangkiangsidem-Peninjoan dan Undisan VI untuk Pembayaran Tahap II Tahun Anggaran 2025	578.064.195,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Pembayaran JKN Sharing PBI untuk Bulan Oktober dan Nopember Tahun Anggaran 2025	3.823.265.880,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Rekontruksi Jalan Bunutin-Selati untuk Pembayaran Tahap II Tahun Anggaran 2025	1.732.551.795,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Rekontruksi Jalan Batur-Bayung Gede untuk Pembayaran Tahap II Tahun Anggaran 2025	1.999.015.875,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Rekontruksi Jalan Bonyoh-Abuan, dan Abuan Sangkaduang untuk Pembayaran Tahap II Tahun Anggaran 2025	1.577.488.905,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Rekontruksi Jalan Tingas-Dukuh untuk Pembayaran Tahap II Tahun Anggaran 2025	1.600.788.240,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng dalam rangka Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 5 Kampung Baru Kecamatan Buleleng (Tahap 1) Tahun Anggaran 2025	86.083.147,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem dalam rangka Pengelolaan Sampah Tahun Anggaran 2025	548.939.896,23	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng dalam rangka Pembuatan Senderan dan Pagar SD Negeri 1 Sembiran Kecamatan Tejakula Tahun Anggaran 2025	101.351.226,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng dalam rangka Pembangunan Senderan/Penyengker SMP Negeri 3 Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Tahun Anggaran 2025	139.098.022,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng dalam rangka Pembangunan Pagar SD Negeri 3 Sembiran Kecamatan Tejakula Tahun Anggaran 2025	86.025.202,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Rekontruksi Jl. Bambang Kaja-Bambang Kelod, Jl. Bambang Kaja I, Jl. Bambang Kaja II, Jl. Bambang Kaja III, dan Jl. Bambang Kaja IV untuk Pembayaran Tahap II Tahun Anggaran 2025	889.168.815,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Rekontruksi Jalan Kubu-Samania untuk Pembayaran Tahap II Tahun Anggaran 2025	578.437.065,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Rekontruksi Jalan Pengiangan Kawan-Selat Nyuhan untuk Pembayaran Tahap II Tahun Anggaran 2025	444.222.765,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kota Denpasar untuk Pengelolaan Sampah Tahap VIII Tahun Anggaran 2025	1.160.450.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Daerah Provinsi kepada Kabupaten Jembrana untuk Festival Jegog Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2025	2.500.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Jembrana dalam rangka Pengelolaan Sampah Tahun Anggaran 2025	3.890.455.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Karangasem untuk Sharing PBI Daerah bulan Desember Tahun Anggaran 2025	1.868.529.600,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng untuk pembayaran Sharing PBI Daerah Bulan September sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2025	29.761.489.800,00	
Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng dalam rangka Pengerasan Jalan Desa dengan Rabat Beton di Banjar Dinas Bukit Seni Kecamatan Tejakula (Tahap II) Tahun Anggaran 2025	353.549.700,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Klungkung Dalam Rangka Pengelolaan Sampah Tahap II Tahun Anggaran 2025	2.432.800.000,00	
Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng dalam rangka Pengerasan Jalan Desa dengan Rabat Beton di Banjar Dinas Anyar Kecamatan Tejakula (Tahap II) Tahun Anggaran 2025	353.549.700,00	
Bantuan Keuangan Khusus dalam Rangka Bantuan SPAMdes berupa sarana dan prasarana air minum di Desa Sembiran Kecamatan Tejakula (Tahap II 45%) Tahun Anggaran 2025	665.475.750,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Kabupaten Jembrana untuk Sharing PBI Daerah bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 2025	1.732.116.960,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Klungkung untuk pembayaran JKN Sharing PBI Daerah Bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2025	1.848.416.640,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng untuk pembayaran Sharing PBI Daerah Bulan Juli dan Agustus Tahun Anggaran 2025	747.321.120,00	
Bantuan Keuangan Khusus dalam Rangka Pengadaan Laptop, Penyengker, Rehab Aula, Finishing Penyengker Padmasana, dan Betonisasi Jaba Padmasana SMP Negeri 3, Kecamatan Tejakula Tahun Anggaran 2025 pada kegiatan Belanja Modal Laptop SMPN 3 Tejakula	401.931.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Karangasem untuk Sharing PBI Daerah bulan Oktober dan Nopember tahun Anggaran 2025	3.738.004.200,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk Pembayaran JKN-Sharing PBI Daerah Bulan Desember Tahun Anggaran 2025	1.687.150.080,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada SD Negeri 1 Sembiran, Banjar Dinas Anyar, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng untuk Pengadaan Chromebook Tahun Anggaran 2025	83.472.000,00	
Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng dalam rangka Pengerasan Jalan Desa dengan Rabat Beton di Banjar Dinas Panggung Kecamatan Tejakula (Tahap II) Tahun Anggaran 2025	443.594.200,00	
Bantuan Keuangan Khusus dalam Rangka Pengadaan Sarana Air Bersih berbasis Kawasan di Desa Sembiran, Julah dan Bondalem Kecamatan Tejakula (Tahap II 70%) Tahun Anggaran 2025	2.334.818.797,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Jalan Batur - Bayung Gede untuk pembayaran Tahap III Tahun Anggaran 2025	1.110.564.375,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Pembayaran JKN Sharing PBI untuk Bulan Desember Tahun Anggaran 2025	1.911.130.200,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Rekontruksi Jalan Sukawana - Subak Bila untuk pembayaran Tahap II Tahun Anggaran 2025	1.343.721.195,00	

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Rekontruksi Jalan Br Bias I untuk Pembayaran Tahap II Tahun Anggaran 2025	752.485.050,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Rekontruksi Jalan Pengiangan Kawan - Selat Nyuhan untuk Pembayaran Tahap III Tahun Anggaran 2025	246.790.425,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Rabat Beton Jalan Lingkungan Penglumbaran Kangin, Kecamatan Susut untuk Pembayaran Tahap II Tahun Anggaran 2025	270.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Rekontruksi Jalan Tingas - Dukuh untuk Pembayaran Tahap III Tahun Anggaran 2025	889.326.800,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Rekontruksi Jl Bambang Kaja-Bambang Kelod, Bambang Kaja I, Jl Bambang Kaja II, Jl Bambang Kaja III, dan Jl Bambang Kaja IV untuk Pembayaran Tahap III Tahun Anggaran 2025	493.982.675,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Rekontruksi Jalan Bangkiangsidem-Peninjoan dan Undisan VI untuk Pembayaran Tahap III Tahun Anggaran 2025	321.146.775,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Rekontruksi Jalan Kubu-Samania untuk Pembayaran Tahap III Tahun Anggaran 2025	321.353.925,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Rekontruksi Jalan Bunutin-Selati untuk Pembayaran Tahap III Tahun Anggaran 2025	962.528.775,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Rekontruksi Jalan Bonyoh-Abuan, dan Abuan Sangkaduang untuk Pembayaran Tahap III Tahun Anggaran 2025	876.382.725,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Penataan Desa Wisata dan Jalan Lingkungan di Desa Wisata Undisan Kecamatan Tembuku untuk Pembayaran Tahap II Tahun Anggaran 2025	360.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Rekontruksi Jalan Nusantara 3, Jalan Sugriwa I, II, IV, Tamanbali Guliangkangin 1, Uma Anyar-Kuning III, Bunutin-Bunutin untuk Pembayaran Tahap III Tahun Anggaran 2025	519.535.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng dalam rangka Peningkatan Jalan Dusun Sorga Lokapaksa-Ularan Keamatan Seririt (Tahap II) Tahun Anggaran 2025	442.750.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng dalam rangka Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 4 Suwug, Kecamatan Sawan (Tahap II) Tahun Anggaran 2025	287.418.532,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng dalam rangka Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 1 Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng (Tahap II) Tahun Anggaran 2025	287.636.775,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng dalam rangka Rehab Gedung dan Penyengker Sekolah SD Negeri 4 Sembiran, Kecamatan Tejakula (Tahap II) Tahun Anggaran 2025	216.804.814,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng dalam rangka Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 5 Kampung Baru, Kecamatan Buleleng (Tahap II) Tahun Anggaran 2025	200.860.675,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Rabat Beton Jalan Lingkungan Penglumbaran Kangin, Kecamatan Susut untuk Pembayaran Tahap III Tahun Anggaran 2025	150.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kab. Buleleng dalam rangka Pengadaan Laptop, Penyengker, Rehab Aula, Finishing Penyengker Padmasana, dan Betonisasi Jaba Padmasana SMP Negeri 3, Kec. Tejakula untuk Pembayaran Tahap II Tahun Anggaran 2025	470.566.901,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Penataan Desa Wisata dan Jalan Lingkungan di Desa Wisata Undisan Kecamatan Tembuku untuk Pembayaran Tahap III Tahun Anggaran 2025	200.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng dalam rangka Bantuan SPAMdes berupa sarana dan prasarana air minum di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula untuk Pembayaran Tahap III Tahun Anggaran 2025	369.708.750,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Rekontruksi Jalan Br Bias I untuk Pembayaran Tahap III Tahun Anggaran 2025	418.047.250,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng untuk Rehab Gedung dan Penyengker Sekolah SD Negeri 4 Sembiran, Kecamatan Tejakula untuk Pembayaran Belanja Modal Jasa Konsultasi Pengawasan Tahun Anggaran 2025	8.700.500,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng dalam rangka Pembuatan Senderan dan Pagar SD Negeri 1 Sembiran Kecamatan Tejakula untuk pembayaran Belanja Modal Jasa Konsultasi Pengawasan Tahun Anggaran 2025	3.056.500,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng dalam rangka Peningkatan Jalan Lokapaksa-BD Kembang Sari, Kecamatan Seririt untuk Pembayaran Tahap II Tahun Anggaran 2025	4.569.264.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng dalam rangka Paket Pekerjaan Pengerasan Jalan Lingkar Turyapada Tower-Lemukih untuk Pembayaran Tahap II Tahun Anggaran 2025	5.745.103.800,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng dalam rangka Pembangunan Pagar SD Negeri 3 Sembiran Kecamatan Tejakula untuk pembayaran Belanja Modal Jasa Konsultasi Pengawasan Tahun Anggaran 2025	2.617.500,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Kegiatan Rekontruksi Jalan Sukawana-Subak Bila untuk Pembayaran Tahap III Tahun Anggaran 2025	746.511.775,00	
JumlahBelanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		**193.888.733.855,03**
Pengembalian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		
Reklasifikasi Transaksi Penatausahaan Kesalahan Pembebanan Rekening SP2D	1.831.300.000,00	
Jumlah Pengembalian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		**1.831.300.000,00**
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Bersih		**192.057.433.855,03**
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa		
Belanja BKK kpd Desa Besakih,Rendang,Karangasem untuk Up Aci Nyabran di lingk. Pakideh Pr. Agung Besakih,Up. Aci Kapat,Up.Bhumi Sudha,Up. Tawur Tabuh Gentuh,Ida Bhatara Turun Kabeh,Up. Tilem Kapitu,Kebersihan dan Listrik di Pr. Agung Besakih Tahun 2025.	2.600.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung untuk Upakara Pujawali Pura Agung Kentel Gumi Tahun Anggaran 2025	100.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Upakara Pujawali di Pura Pucak Penulisan Tahun Anggaran 2025	100.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Dausa, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Upakara Pujawali di Pura Bukit Indrakila Tahun Anggaran 2025	100.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung untuk Upakara Pujawali di Pura Goa Lawah Tahun Anggaran 2025	100.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung untuk Upakara Bhumi Sudha di Pura Segara Watu Klotok Tahun Anggaran 2025	100.000.000,00	

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem untuk Upakara Pujawali di Pura Luhur Andakasa Tahun Anggaran 2025	300.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kota Denpasar untuk Triwulan I (Januari-Maret) Tahun Anggaran 2025.	537.600.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tri Buana, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem untuk Upakara Pujawali di Pura Lempuyang Luhur Tahun Anggaran 2025	300.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Upakara Ngusabha Kedasa Dan Bhumi Sudha di Pura Ulun Danu Batur Tahun Anggaran 2025	500.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan untuk Upakara Pujawali di Pura Luhur Batukau Tahun Anggaran 2025	200.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pelaga Kec.Petang Kab.Badung untuk Upakara Pujawali Di Pura Pucak Mangu Tahun Anggaran 2025	200.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pejeng Kec.Tampaksiring Kab.Gianyar untuk Upakara Pujawali Di Pura Penataran Sasih Tahun Anggaran 2025	100.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pejeng Kec.Tampaksiring Kab.Gianyar untuk Upakara Pujawali Di Pura Pusering Jagat Tahun Anggaran 2025	300.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Sumberklampok Kec.Gerokgak Kab.Buleleng untuk Upakara Pujawali Di Pura Segara Rupek dan Gili Menjangan Tahun Anggaran 2025	100.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bedulu Kec.Blahbatuh Kab.Gianyar untuk Upakara Pujawali Di Pura Samuan Tiga Tahun Anggaran 2025	200.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Klungkung untuk Triwulan I (Januari-Maret) Tahun Anggaran 2025	803.400.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Jembrana untuk Triwulan I (Januari-Maret) Tahun Anggaran 2025.	662.400.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Gianyar untuk Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2025	1.175.700.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Karangasem untuk Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2025	1.348.500.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Tabanan untuk Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2025	2.245.800.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Buleleng untuk Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2025	1.966.300.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Badung untuk Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2025	855.800.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Bangli untuk Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2025	1.071.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Mekar Bhuwana Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung untuk subak/subak abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung untuk Upakara Pujawali di Pura Luhur Uluwatu Tahun Anggaran 2025	100.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Selat Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem untuk subak/subak abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Umeanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kuwum Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung untuk subak/subak abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem untuk subak/subak abian Tahun Anggaran 2025	120.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Wanasari, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Manggis Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem untuk subak/subak abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kalisada Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng untuk subak/subak abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Ngis Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem untuk subak/subak abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahuan Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Duda Timur,Kecamatan Selat,Kab. Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Nyuh Tebel Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahuan Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kesiut, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahuan Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahuan Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahuan Anggaran 2025	120.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Padangbai,Kecamatan Manggis,Kab. Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Geluntung, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahuan Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	165.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sengkidu Kecamatan Manggis Kab. Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Marga Dajan Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahuan Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana untuk Puja Wali di Pura Dang Kahyangan Indra Kusuma Tahun Anggaran 2025	100.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahuan Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahuan Anggaran 2025	135.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Nagasepaha, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sukadana,Kecamatan Kubu,Kab. Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	135.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahuan Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Petiga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahuan Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahuan Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahuan Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pejeng Kelod, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	120.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pangyangan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Manggissari, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Beraban, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tiying Gading, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Paksebali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	135.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Subuk, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kota Denpasar untuk Triwulan II (April-Juni) Tahun 2025	537.600.000,00	

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Karangasem untuk Triwulan II (April-Juni) Tahun 2025	1.348.800.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Klungkung untuk Triwulan II (April-Juni) Tahun 2025	802.800.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Petak Kaja, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	150.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Rejasa, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tegallinggah, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Biaung, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Mundeh Kangin, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	135.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Dalang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	120.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Tabanan untuk Triwulan II (April-Juni) Tahun 2025	2.245.500.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Blimbingsari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng untuk Subak/ Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Bangli untuk Triwulan II (April-Juni) Tahun 2025	899.100.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Pembayaran Kekurangan Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Tabanan untuk Triwulan II (April-Juni) Tahun 2025.	2.700.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Gianyar untuk Triwulan II (April-Juni) Tahun 2025	1.175.400.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Badung untuk Triwulan II (April-Juni) Tahun 2025	857.700.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Buleleng untuk Triwulan II (April-Juni) Tahun 2025	1.888.500.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Jembrana untuk Triwulan II (April-Juni) Tahun 2025	657.600.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa Kabupaten Buleleng untuk Triwulan II (April-Juni) Tahun 2025, sesuai daftar penerimaan terlampir.	72.300.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sesandan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	195.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	165.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Wanasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Buahan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sumita, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Payangan, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tegalmengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sepang Kelod, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sekumpul, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Poh Bergong, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Silangjana, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kalianget, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Galungan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Duda Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Daup, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Taman, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sinduwati, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kenderan, Kecamatan tegallalang, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	165.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	120.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Belok/Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	180.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pesaban, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kertha Mandala, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	180.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	135.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa Kabupaten Bangli untuk Triwulan II (April-Juni) Tahun 2025, sesuai daftar rekapitulasi penerimaan terlampir.	166.800.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tibubiu, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Selanbawak, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	120.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Rangdu, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Peken Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tajen, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pangkung Karung, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Lumbung, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sarimekar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Asahduren, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Ekasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	165.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	135.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pegadungan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	120.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025.	150.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Delodberawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Belega, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025.	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bestala, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025.	135.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025.	195.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025.	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sukawana , Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	435.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	120.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Baru, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pupuan Sawah, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Lembean, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tengkudak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tamanbali, Kecamatan bangli, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	210.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	150.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Lumbung Kauh, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Batannyuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Gadung Sari, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	135.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Laba Sari, Kecamatan Abang , Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Riang Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	300.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bongancina, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pertima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Macang, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Batukaang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	120.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Singapadu Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	150.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tukadsumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	195.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Joanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	180.000.000,00	

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Werdi Bhuwana, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Ularan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	180.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Mangguh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tukadmungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tegallinggah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Nusasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	120.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	150.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Madenan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	225.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Angkah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	315.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	165.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Manikyang, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	180.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sai, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	345.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	135.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Upakara Pujawali di Pura Tuluk Biyu Batur Tahun Anggaran 2025	100.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bengkala, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sakti, Kecamatan Nusa Pernida, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kutampi, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pering Sari, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Batumadeg, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	120.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tegallinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Belantih, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	180.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	210.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tegaljadi, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Wisma Kerta, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Purwa Kerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Gunung Salak, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sanding, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tangkup, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Munduktemu, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Selabih, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	135.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tri Buana, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tohpati, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	270.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Manduang, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	120.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Wanagiri Kauh, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Belanga, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	240.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	180.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bayung Cerik, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	165.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kota Denpasar untuk Triwulan III (Juli-September) Tahun 2025	537.300.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Jembrana untuk Triwulan III (Juli-September) Tahun 2025	658.800.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Dausa, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	195.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Batukandik, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Petak, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Buwit, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Klungkung untuk Triwulan III (Juli-September) Tahun 2025	801.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Karyasari, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Tabanan untuk Triwulan III (Juli-September) Tahun 2025	2.251.200.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pandak Bandung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tegal Tugu, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Binyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	180.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Batuaji, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tangguntiti, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Gunung Bau, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Buleleng untuk Triwulan III (Juli-September) Tahun 2025	1.962.600.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kertha Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	120.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kukuh, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sidan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Telagatawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	210.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	150.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Karangasem untuk Triwulan III (Juli-September) Tahun 2025	1.349.100.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	150.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Yehkuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Buahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Buahan Kaja, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	210.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Gianyar untuk Triwulan III (Juli-September) Tahun 2025	1.173.600.000,00	

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	120.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Mambang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Beringkit Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bajera Utara, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	120.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	195.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Perean Kangin, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Selemadeg, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Banua, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Mundeh, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	165.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	120.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	225.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	135.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sangketan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	135.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	315.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Badung untuk Triwulan III (Juli-September) Tahun 2025	863.700.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	180.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	180.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pangsan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	120.000.000,00	

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Bangli untuk Triwulan III (Juli-September) Tahun 2025	1.067.700.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	120.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Selat, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	255.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	240.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tampekan, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kebon Padangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Penatih Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	150.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Subamia, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	225.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	135.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Mayong, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Terunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	315.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Suwug, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Jelijih Punggang, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Dapdap Putih, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pengejaran, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bengkel Sari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Serai, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	120.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buelelng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	120.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Amerta Bhuana, Kecamatan Selat, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Selulung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	195.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Batur Utara, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Perean Tengah, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Abangsongan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Apuan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Belatungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Serampingan, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Suwat, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sibangkaja, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Padangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tambakan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Langgahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Penarukan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Subaya, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	120.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	165.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	165.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Mundeh Kauh, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pidpid, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Ayunan, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	45.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	150.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	135.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Munduk Bestala, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kota Denpasar untuk Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun Anggaran 2025	537.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pesagi, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Penuktukan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	135.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kelating, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	240.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	135.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Mengani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Tabanan untuk Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2025	2.248.400.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Klungkung untuk Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2025	802.500.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Jembrana untuk Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2025	658.200.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Gianyar untuk Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2025	1.174.800.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Karangasem untuk Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2025	1.349.400.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Badung untuk Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2025	864.900.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Buleleng untuk Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2025	1.964.100.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Bangli untuk Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2025	1.071.300.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Nawa Kerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Tumbak Bayuh, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	135.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Bukit, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	75.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pangkungparuk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng Untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	90.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	60.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025.	180.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025.	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025.	15.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025.	15.000.000,00	

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Belandingan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025.	30.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Abang Batudinding, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	105.000.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa		**88.606.900.000,00**

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		
Pengembalian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa		
Pengembalian Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Kediri Kab Tabanan untuk subak/Subak Abian (Subak Batan Pole)Tahun Anggaran 2025	15.000.000,00	
Pengembalian Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada Desa Tegal Kertha Kota Denpasar untuk Tambahan Penghasilan Perbekel dan perangkat Desa TW IV bulan Desember 2025	300.000,00	
Pengembalian Belanja bantuan Keuangan Khusus 9BKK) kepada Desa untuk Tambahan penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa Mendoyo Dauh Tukad TW IV Tahun Anggaran 2025	600.000,00	
Pemgembalian Belanja Bantuan Keuangan khusus (BKK) Kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada perbekel dan Perangkat Desa Bungkulan TW IV Tahun Anggaran 2025	900.000,00	
Pengembalian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa Praja Rakjaka TW IV Tahun Anggaran 2025	300.000,00	
Pegembalian Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel Tegal Badeng Kab.Tabanan TW IV Tahun Anggaran 2025	1.300.000,00	
Pengembalian Belanja Bantuan Keuangan Khusus(BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel manggis Kab karangasem TW IV Tahun Anggaran 2025	300.000,00	
Pengembalian belanja Bantuan Kauangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa Tegak Kab Klungkung TW IV Tahun Anggaran 2025	300.000,00	
Pengembalian belanja Bantuan Kauangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa Dalung TW IV Tahun Anggaran 2025	300.000,00	
Pengembalian belanja Bantuan Kauangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa Kab Gianyar TW IV Tahun Anggaran 2025	300.000,00	
Pengembalian Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa Umaanyar Kab Buleleng TW IV Tahun Anggaran 2025	1.500.000,00	
Pengembalian Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa Suwat Kab Gianyar TW IV Tahun Anggaran 2025	300.000,00	
Pengembalian Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa Mambal TW IV Tahun Anggaran 2025	300.000,00	
Pengembalian Belanja Bantuan Keuangan khusus (BKK) kepada Desa untuk tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa Gunung Salak Kab Tabanan Tahun Anggaran 2025	1.200.000,00	
Pengembalian Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk tambahan penghasilan kepada perbekel dan Perangkat Desa Gegelang Kab Karangasem bulan Oktober,Nopember dan Desember 2025 TW IV Tahun Anggaran 2025	900.000,00	
Pengembalian Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa Kaliangat Kab Buleleng TW IV Tahun Anggaran 2025	300.000,00	
Pengembalian Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Medahan Kab. gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	13.000.000,00	
Pengembalian belanja Bantuan Kauangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa Kab Gianyar TW IV Tahun Anggaran 2025	300.000,00	
Pengembalian belanja Bantuan Kauangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa Baha Kab Badung TW IV Tahun Anggaran 2025	300.000,00	
Pengembalian belanja Bantuan Kauangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa Tegal Tugu Kab Gianyar TW IV Tahun Anggaran 2025	300.000,00	
Pengembalian belanja Bantuan Kauangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa Tangguntiti Kab.Tabanan TW IV Tahun Anggaran 2025	600.000,00	
Pengembalian belanja Bantuan Kauangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa Bengkala TW IV Tahun Anggaran 2025	600.000,00	
Pengembalian belanja Bantuan Kauangan Khusus (BKK) untuk Dana Aci Pulegembal kepada Subak Pedahanan kepada Desa Jagapati Kab Badung untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	5.000.000,00	
Pengembalian belanja Bantuan Kauangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa Kab Gianyar TW IV Tahun Anggaran 2025	300.000,00	
Pengembalian belanja Bantuan Kauangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa Kedis Kab Buleleng TW IV Tahun Anggaran 2025	300.000,00	
Pengembalian belanja Bantuan Kauangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa Bondalem Kab.Buleleng TW IV Tahun Anggaran 2025	600.000,00	
Pengembalian belanja Bantuan Kauangan Khusus (BKK) kepada Desa Menanga Kab.Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	13.000.000,00	
Pengembalian belanja Bantuan Kauangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa Bungkulan Kab Buleleng TW IV Tahun Anggaran 2025	300.000,00	
Pengembalian belanja Bantuan Kauangan Khusus (BKK) kepada Desa Tamanbali untuk subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2025	5.200.000,00	
Jumlah Pengembalian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa		**63.900.000,00**
Jumlah Bersih Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa		**88.543.000.000,00**
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan		**280.600.433.855,03**

Lampiran 21

Daftar Rekening Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

NO	NAMA SKPD	NOMOR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	NOMOR NPWP BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	NOMOR NPWP BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	NOMOR REKENING BLUD
1	2	3	4	5	6	7
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali (PPKD Selaku BUD)	-	30.143.911.3.903.000 (BUD)	-	-	-
2.	Sekretariat Daerah Provinsi Bali	Kasda	-	010.01.05.01672-5	00.298.233.8-903.000	-
	- Biro Umum	-	-	010.01.05.01674-0	-	-
	- Biro Organisasi	-	-	010.01.05.01675-4	-	-
	- Biro Pengadaan Barang/ Jasa dan Perekonomian	-	-	010.01.05.01675-3	-	-
	- Biro Hukum	-	-	010.01.05.01674-1	-	-
	- Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	010.01.05.01675-2	-	-
	- Biro Humas dan Protokol	-	-	010.01.05.00108-7	-	-
3.	Sekretariat DPRD Provinsi Bali	-	-	010.01.00.02238-1	00.143.754.0.903.000	-
4.	Inspektorat Daerah Provinsi Bali	-	-	010.01.00.01284-0	00.143.755.7.903.000	-
5.	Bappeda Provinsi Bali	-	-	010.01.0001136-8	00.298.204.9.903.000	-
6.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali	-	-	010.01.00.02263-9	00.143.716.9.903.000	-
	- UPTD. BPTEKDIK	-	-	010.01.05.01675-7	-	-
	- UPTD. BPTKK	-	-	010.01.05.00020-3	-	-
7.	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	010.01.0501678-5	-	010.01.0002258-0	00.143.720.1.901.000	-
	- UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Karthi Bali Sadhajiwa	011.01.0500613-3	-	010.01.0501677-3	-	-
	- BLUD	-	-	-	43.907.498.0.901.000	010.01.05.00085-0
	- UPTD. Kesehatan Pengobatan Tradisional	010.01.0501670-0	-	010.01.05.01576-9	00.143.720.1.901.000	-

NO	NAMA SKPD	NOMOR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	NOMOR NPWP BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	NOMOR NPWP BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	NOMOR REKENING BLUD
	- UPTD. Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	-	-	010.01.05.01676-2	-	-
	- BLUD	-	96.722.814.9.903.000	-	96.722.814.9.903.000	010.01.05.00084-9
	- UPTD. RSUD Bali Mandara	-	-	010.01.05.01674-8	00.143.720.1.901.000	-
	- BLUD	3,6801E+13 (BRI) 0652074797 (BNI) 145.00.66690005 (Bank Mandiri)	95.532.291.2.903.000	010.01.05.01677-1	95.532.291.2.903.000	-
	- UPTD. RS. Jiwa	-	-	020.01.00.00196-0	00.143.720.1.901.000	-
	- BLUD	145.00.1297540-1 (Bank Mandiri)	00.008.738.7.907.000	020.01.05.00146-9	00.008.738.7.907.000	-
	- UPTD. RS. Mata Bali Mandara	-	-	-	-	-
	- BLUD	1,45006E+12 (Bank Mandiri)	96.431.650.9.901.000	010.01.05.02691-1	96.431.650.9.901.000	-
		2802028828 (BNI)				
	- UPTD. Pengujian, Pengembangan Obat Tradisonal dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan	010.01.05.00072-2	-	010.01.05.00017-4	00.143.720.1.901.000	-
	- UPTD. Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya	-	-	045.01.05.00007-8	-	045.01.05.00006-6 045.02.02.35982-8 2017102466 (BNI) 145-00-1770204-0 (Bank Mandiri)
8.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	010.01.05.02481-9	-	010.01.00.00850-5	00.298.082.9.901.000	-
	- UPTD. Balai Peralatan dan Pengujian	-	-	010.01.05.01680.5	-	-
	- UPTD. PAM	-	-	010.01.05.01676-5	-	-
	- UPTD. PAL	-	-	010.01.05.01681-1		
	- BLUD UPTD. PAM	010.01.05.01677-2	-	010.01.05.01677-2	96.480.609.5.901.000	-
	- BLUD UPTD. PAL	010.01.05.01672-7	-	010.01.05.01672-7	96.441.749.7.901.000	-
9.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	-	-	010.01.00.01884-3	00.143.729.2.903.000	-
	- UPTD. Diklat Koperasi UMKM	-	-	010.01.05.00071-1	-	-
10.	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	010.01.05.01666-2	-	010.01.00.01311-1	00.298.098.5.903.000	-
11.	Dinas Perhubungan Provinsi Bali	-	-	010.01.00.00667-7	00.143.725.0.903.000	-

NO	NAMA SKPD	NOMOR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	NOMOR NPWP BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	NOMOR NPWP BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	NOMOR REKENING BLUD
12.	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali	-	-	010.01.05.01672-4	00.298.118.1.903.000	-
	- UPTD. Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali	-	-	010.01.05.00094-2	-	-
13.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali	010.01.05.01667-7	-	010.01.0001894-6	00.143.722.7.903.000	-
14.	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	-	-	010.01.0001293-2	00.143.734.2.903.000	-
15.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	-	-	010.01.00.01945-8	00.298.186.8.901.000	-
16.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	-		010.01.00.01500-3	00.143.740.9.903.000	-
	- UPTD. Bali Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Pangan	-	-	010.01.05.01671-6	-	-
	- UPTD. Balai Perlindungan Tanaman, Hortikultura dan Perkebunan	-	-	010.01.05.01672-0	-	-
	- UPTD. Balai Sertifikasi Mutu Komoditas Pangan	-	-	010.01.05.00077-2	-	-
	- UPTD. Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan dan Hijauan	-	-	010.01.05.01678-1	-	-
	- UPTD. Balai Benih Induk Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	-	-	010.01.050.1671-6	-	-
	- UPTD. Balai Pengawasan, dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan	-	-	010.01.050.0090-4	-	-
17.	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	010.01.05.01672-1	-	010.01.05.00171-4	00.298.188.4.903.000	-
	- UPTD. KPH Bali Barat	-	-	010.01.05.01679-0	-	-
	- UPTD. KPH Bali Timur	-	-	010.01.05.01679-9	-	-
	- UPTD. KPH Bali Utara	-	-	010.01.05.01688-1	-	-
	- UPTD. KPH Bali Selatan	-	-	010.01.05.01678-7	-	-
	- UPTD. Tahura Ngurah Rai	-	-	010.01.05.01678-6	-	-
	- UPTD. Pengelolaan Sampah	-		010.01.05.01680-9	-	-
18.	Dinas Pariwisata Provinsi Bali	010.01.05.00087-5	-	010.01.00.02256-0	00.143.738.3.903.000	-
19.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali	-	-	010.01.00.00528-0	00.143.741.7.903.000	-
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Bali	-	-	010.01.05.026.219	00.298.151.2.903.000	-
21.	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	010.01.05.00010-1	00.119.551.0.903.000	-

NO	NAMA SKPD	NOMOR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	NOMOR NPWP BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	NOMOR NPWP BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	NOMOR REKENING BLUD
22.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	-	-	010.01.00.02421-0	00.298.239.5.903.000	-
23.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali	010.01.05.02721-3	-	011.01.00.00355-2	00.143.748.2.903.000	-
	- UPTD. PPRD Kab. Gianyar	-	-	010.01.05.01676-4	-	-
	- UPTD. PPRD Kab. Bangli	-	-	010.01.05.01677-4	-	-
	- UPTD. PPRD Kab. Badung	-	-	010.01.05.01676-3	-	-
	- UPTD. PPRD Kota Denpasar	-	-	010.01.05.01672-2	-	-
	- UPTD. PPRD Kab. Tabanan	-	-	012.01.05.00199-1	-	-
	- UPTD. PPRD Kab. Klungkung	-		021.01.05.00187-0	-	-
	- UPTD. PPRD Kab. Buleleng	-	-	014.01.05.00607-7	-	-
	- UPTD. PPRD Kab. Jembrana	-	-	016.01.05.00071-9	-	-
	- UPTD. Bapenda Kab. Karangasem	-	-	022.01.05.00242-9	-	-
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali	010.01.050.0080-0	-	010.01.00.02236.6	00.143.749.0.903.000	-
	- UPTD. PKSDM	-	-	-	-	-
	- UPTD. PKP	-	-	010.01.05.00074-6	-	-
	- BLUD UPTD. PKSDM	010.01.05.00081-3	010.01.05.00081-3	010.01.05.00081-3	-	-
25.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali	010.01.05.01675-8	-	010.01.05.01674-4	00.298.207.2.901.000	-
	- UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	010.01.05.01678-0	-	-
26.	Badan Penghubung Provinsi Bali	010.01.05.00030.6	-	1230012333748 (Bank Mandiri Cab. TIM Jakarta Pusat)	00.143.756.507.1.000	-
				010.01.05.00098.1		
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali	-	-	010.01.05.02622-0	00.119.550.2.903.000	-
28.	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	010.01.05.00014-8	00.143.750.8.901.000	-
29.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	-	-	010.01.00.01438-2	00.143.721.9.903.000	-

Kas Dana Bos
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

NO	KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	SALDO AWAL	PENDAPATAN BOSP REGULER 2025	PENDAPATAN BOSP KINERJA 2025	KEMBALI KE KASDA TH. 2025	KOREKSI SALDO AUDITED 2024	PENGEMBALIAN BELANJA 2025	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	BELANJA BOSP KINERJA 2025	BELANJA BOSP REGULER 2025	BELANJA DARI SISA BOSP 2024	SISA DANA BOSP 2025	SISA DANA BOSP REKENING KORAN
TOTAL				5.156.741.842,40	251.532.526.457,00	3.815.000.000,00	3.056.472.412,70	5.156.741.842,40	129.514.400,00		3.015.695.674,13	250.017.360.678,87	128.321.510,00	7.472.409.780,40	7.472.409.780,40
1	Badung	SLBN 1 Badung	0320105000946	-	1.040.760.000,00	160.000.000,00	-	-	-	-	160.000.000,00	1.040.760.000,00	-	-	-
2	Badung	SMAN 1 ABIANSEMAL	0400105000529	14.623,00	2.421.075.377,00	0,00	49.262.720,03	14.623,00	-	-	-	2.421.083.549,00	-	6.451,00	6.451,00
3	Badung	SMAN 1 KUTA	0330105000227	271.045.337,00	2.261.554.663,00	0,00	1.483.272,54	271.045.337,00	-	-	-	2.355.006.081,00	-	177.593.919,00	177.593.919,00
4	Badung	SMAN 1 KUTA SELATAN	0320105000050	-	1.536.570.000,00	45.000.000,00	0,01	-	-	-	45.000.000,00	1.536.570.000,00	-	-	-
5	Badung	SMAN 1 KUTA UTARA	0360105000040	134.792.758,00	3.066.867.242,00	45.000.000,00	-	134.792.758,00	-	-	45.000.000,00	3.154.848.577,00	-	46.811.423,00	46.811.423,00
6	Badung	SMAN 1 MENGWI	0260105000480	230.884.044,00	2.560.645.956,00	100.000.000,00	18.389.441,88	230.884.044,00	-	-	84.724.200,00	2.087.378.602,00	-	719.427.198,00	719.427.198,00
7	Badung	SMAN 1 PETANG	0400105000280	140.044,00	1.181.109.956,00	0,00	18.999.743,49	140.044,00	-	-	-	1.180.251.098,00	-	998.902,00	998.902,00
8	Badung	SMAN 2 ABIANSEMAL	0400105000883	153.116,00	1.751.876.884,00	45.000.000,00	-	153.116,00	-	-	44.949.500,00	1.751.948.220,00	-	132.280,00	132.280,00
9	Badung	SMAN 2 KUTA	0130105000410	44.539.874,00	1.563.850.126,00	45.000.000,00	15.016,97	44.539.874,00	-	-	45.000.000,00	1.598.048.875,00	-	10.341.125,00	10.341.125,00
10	Badung	SMAN 2 KUTA SELATAN	0320105000958	7.410.117,00	2.076.052.412,00	45.000.000,00	-	7.410.117,00	-	-	43.821.000,00	2.079.328.459,00	-	5.313.070,00	5.313.070,00
11	Badung	SMAN 2 KUTA UTARA	0360105000455	127.497,00	1.808.602.560,00	0,00	-	127.497,00	-	-	-	1.804.350.000,00	-	4.380.057,00	4.380.057,00
12	Badung	SMAN 2 MENGWI	0090105001860	47.629,00	2.056.272.371,00	45.000.000,00	3.234.778,84	47.629,00	-	-	45.000.000,00	2.056.174.508,00	-	145.492,00	145.492,00
13	Badung	SMAN 3 KUTA SELATAN	0320105001366	8.231.104,00	827.148.901,00	0,00	-	8.231.104,00	-	-	-	835.065.906,00	-	314.099,00	314.099,00
14	Badung	SMAN 3 MENGWI	0260105000944	-	349.650.000,00	0,00	-	-	-	-	-	349.588.900,00	-	61.100,00	61.100,00
15	Badung	SMKN 1 KUTA SELATAN	0320105000568	7.533.030,00	4.030.446.970,00	0,00	17.409.065,92	7.533.030,00	-	-	-	4.019.680.164,00	-	18.299.836,00	18.299.836,00
16	Badung	SMKN 1 MENGWI	260105000956	34.830.443,00	607.529.557,00	45.000.000,00	-	34.830.443,00	-	-	-	621.636.340,00	-	59.698.660,00	59.698.660,00
17	Badung	SMKN 1 PETANG	0400105000239	1.583.569,00	545.836.431,00	0,00	633.094,58	1.583.569,00	-	-	-	547.252.734,00	-	167.266,00	167.266,00
18	Badung	SMKN 2 KUTA SELATAN	0320105001354	8.427,00	1.145.331.573,00	0,00	-	8.427,00	-	-	6.025.000,00	1.145.331.573,00	-	8.705,00	8.705,00
19	Bangli	SLBN 1 BANGLI	0200105001495	368.255,00	636.117.745,00	50.750.000,00	95.939,25	368.255,00	3.000.000,00	-	50.750.000,00	586.516.699,00	6.000,00	52.963.301,00	52.963.301,00
20	Bangli	SMAN 1 BANGLI	0200105001462	381.670.194,00	1.844.329.806,00	45.000.000,00	155.034.278,33	381.670.194,00	-	-	36.818.650,00	2.059.232.489,00	36.652.400,00	138.296.461,00	138.296.461,00
21	Bangli	SMAN 1 KINTAMANI	0480105000053	4.607.254,00	1.605.401.846,00	0,00	682.557,12	4.607.254,00	-	-	-	1.601.179.358,00	-	8.829.742,00	8.829.742,00
22	Bangli	SMAN 1 SUSUT	0200105001491	2.115.123,00	1.252.634.877,00	0,00	-	2.115.123,00	-	-	-	1.250.253.938,00	-	4.496.062,00	4.496.062,00
23	Bangli	SMAN 1 TEMBUKU	0200105001463	34.060.871,00	1.052.689.129,00	45.000.000,00	2.538.794,74	34.060.871,00	-	-	34.105.300,00	1.062.659.308,00	-	34.985.392,00	34.985.392,00
24	Bangli	SMAN 2 BANGLI	0200105001468	-	1.386.000.000,00	0,00	0,61	-	-	-	-	1.386.000.000,00	-	-	-
25	Bangli	SMKN 1 BANGLI	0200105001465	-	1.024.860.000,00	0,00	0,13	-	-	-	-	1.024.851.600,00	-	8.400,00	8.400,00
26	Bangli	SMKN 1 KINTAMANI	0480105000077	16.600,00	243.643.400,00	0,00	19.500,37	16.600,00	-	-	-	243.343.400,00	-	316.600,00	316.600,00
27	Bangli	SMKN 1 SUSUT	0200105001490	-	379.440.000,00	0,00	-	-	-	-	-	374.739.330,00	-	4.700.670,00	4.700.670,00
28	Bangli	SMKN 1 TEMBUKU	0200105001501	21.750.072,00	1.845.689.928,00		0,93	21.750.072,00	-	-	-	1.866.168.259,00	-	1.271.741,00	1.271.741,00
29	Bangli	SMKN 2 BANGLI	0200105001452	-	2.427.300.000,00	0,00	0,85	-	-	-	-	2.416.664.633,00	-	10.635.367,00	10.635.367,00
30	Bangli	SMKN 2 KINTAMANI	0480105000089	40.344.667,00	747.291.212,00	45.000.000,00	71.698.879,97	40.344.667,00	5.400.000,00	-	6.018.500,00	753.368.640,00	-	78.648.739,00	78.648.739,00
31	Bangli	SMKN 3 BANGLI	0200105001464	-	334.800.000,00	0,00	0,32	-	-	-	-	334.800.000,00	-	-	-
32	Bangli	SMKN 3 KINTAMANI	0480105000065	119.173.530,00	1.427.563.470,00	50.750.000,00	-	119.173.530,00	-	-	-	1.319.342.225,00	19.525.000,00	258.619.775,00	258.619.775,00
33	Bangli	SMKN 4 BANGLI	0200105001499	8.917,00	911.391.083,00	0,00	412.462,93	8.917,00	-	-	-	911.352.947,00	-	47.053,00	47.053,00
34	Buleleng	SLBN 1 BULELENG	0140105006581	-	592.200.000,00	36.250.000,00	570,77	-	-	-	-	592.200.000,00	-	36.250.000,00	36.250.000,00
35	Buleleng	SLBN 2 BULELENG	0140105005566	351.700,00	692.648.300,00	0,00	25.041,08	351.700,00	-	-	-	692.939.700,00	-	60.300,00	60.300,00
36	Buleleng	SMAN 1 BANJAR	0150105000962	6.341.149,00	1.379.658.851,00	0,00	12.847,84	6.341.149,00	32.400.000,00	-	-	1.410.430.226,00	-	7.969.774,00	7.969.774,00
37	Buleleng	SMAN 1 BUSUNGBIU	0150105001331	35.127.413,00	1.141.987.587,00	45.000.000,00	3.389.548,77	35.127.413,00	-	-	44.664.500,00	1.145.596.874,00	19.315.000,00	12.538.626,00	12.538.626,00
38	Buleleng	SMAN 1 GEROKGAK	0150105000960	2.408.744,87	1.435.791.255,00	45.000.000,00	-	2.408.744,87	-	-	16.516.795,13	1.436.801.284,87	-	29.881.919,87	29.881.919,87
39	Buleleng	SMAN 1 KUBUTAMBAHAN	0140105006223	3.147.497,00	1.285.652.503,00	50.750.000,00	16.114.694,97	3.147.497,00	-	-	50.746.400,00	1.288.254.491,00	-	549.109,00	549.109,00
40	Buleleng	SMAN 1 SAWAN	0140105006209	1.222.817,00	752.977.183,00	0,00	0,76	1.222.817,00	-	-	-	753.499.556,00	-	700.444,00	700.444,00
41	Buleleng	SMAN 1 SERIRIT	0150105001223	262.089,00	1.995.958.911,00	45.000.000,00	4.766,36	262.089,00	-	-	17.296.200,00	1.996.172.780,00	-	27.752.020,00	27.752.020,00
42	Buleleng	SMAN 1 SINGARAJA	0140105006235	56.765.222,00	2.000.634.778,00	100.000.000,00	209.870,27	56.765.222,00	-	-	100.000.000,00	2.057.321.200,00	-	78.800,00	78.800,00
43	Buleleng	SMAN 1 SUKASADA	0140105006210	527,00	561.599.473,00	45.000.000,00	0,44	527,00	-	-	33.286.000,00	561.600.000,00	-	11.714.000,00	11.714.000,00
44	Buleleng	SMAN 1 TEJAKULA	0140105006194	2.278.642,00	1.434.121.358,00	0,00	448,18	2.278.642,00	-	-	-	1.434.292.026,00	-	2.107.974,00	2.107.974,00
45	Buleleng	SMAN 2 BANJAR	0150105001337	191.142.013,00	1.296.385.879,00	0,00	4.829.348,18	191.142.013,00	-	-	-	1.322.005.700,00	9.580.000,00	155.942.192,00	155.942.192,00
46	Buleleng	SMAN 2 BUSUNGBIU	0470105000074	5.280.000,00	657.120.000,00	0,00	346.286,94	5.280.000,00	-	-	-	656.313.943,00	-	6.086.057,00	6.086.057,00
47	Buleleng	SMAN 2 GEROKGAK	0150105001333	-	619.200.000,00	45.000.000,00	0,19	-	-	-	22.750.560,00	619.200.000,00	-	22.249.440,00	22.249.440,00
48	Buleleng	SMAN 2 SINGARAJA	0140105006171	81.709,00	2.154.518.291,00	36.250.000,00	0,67	81.709,00	-	-	36.249.800,00	2.151.007.020,00	-	3.593.180,00	3.593.180,00
49	Buleleng	SMAN 2 TEJAKULA	0140105006302	15.714,00	655.184.286,00	0,00	75.105,18	15.714,00	-	-	-	655.189.230,00	-	10.770,00	10.770,00
50	Buleleng	SMAN 3 SINGARAJA	0140105006247	807,00	2.051.999.193,00	45.000.000,00	0,60	807,00	-	-	8.577.000,00	2.051.554.134,00	-	36.868.866,00	36.868.866,00
51	Buleleng	SMAN 4 SINGARAJA	0140105006285	28.041.171,00	2.472.158.829,00	45.000.000,00	254.597.219,00	28.041.171,00	-	-	8.581.000,00	2.461.327.841,00	-	75.291.159,00	75.291.159,00
52	Buleleng	SMAN BALI MANDARA	0460105000655	441.100,00	674.549.500,00	100.000.000,00	48.597.251,89	441.100,00	-	-	100.024.000,00	674.899.800,00	-	66.800,00	66.800,00
53	Buleleng	SMKN 1 BANJAR	0150105001513	26.000,00	449.254.000,00	0,00	-	26.000,00	-	-	-	446.532.215,00	-	2.747.785,00	2.747.785,00
54	Buleleng	SMKN 1 BUSUNGBIU	0150105001227	23.380.797,00	1.053.739.203,00	0,00	9.237,47	23.380.797,00	-	-	-	1.046.088.904,00	-	31.031.096,00	31.031.096,00
55	Buleleng	SMKN 1 GEROKGAK	0150105001335	325.292,67	2.090.554.707,00	0,00	-	325.292,67	3.000.000,00	-	-	2.093.428.314,00	-	451.685,67	451.685,67
56	Buleleng	SMKN 1 KUBUTAMBAHAN	0140105006156	1.321.555,00	2.200.918.445,00	0,00	33.734,99	1.321.555,00	-	-	-	2.202.201.193,00	-	38.807,00	38.807,00
57	Buleleng	SMKN 1 SAWAN	0140105006168	21.458.212,00	1.971.501.788,00	0,00	0,04	21.458.212,00	27.000.000,00	-	-	1.979.315.267,00	-	40.644.733,00	40.644.733,00

NO	KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	SALDO AWAL	PENDAPATAN BOSP REGULER 2025	PENDAPATAN BOSP KINERJA 2025	KEMBALI KE KASDA TH. 2025	KOREKSI SALDO AUDITED 2024	PENGEMBALIAN BELANJA 2025	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	BELANJA BOSP KINERJA 2025	BELANJA BOSP REGULER 2025	BELANJA DARI SISA BOSP 2024	SISA DANA BOSP 2025	SISA DANA BOSP REKENING KORAN
58	Buleleng	SMKN 1 SERIRIT	0150105001229	26.891.281,00	2.505.588.719,00	0,00	0,37	26.891.281,00	-	-	-	2.507.686.212,00	-	24.793.788,00	24.793.788,00
59	Buleleng	SMKN 1 SINGARAJA	0140105006297	19.579.051,00	3.336.580.949,00	100.000.000,00	140,86	19.579.051,00	-	-	67.750.000,00	3.240.842.199,00	-	147.567.801,00	147.567.801,00
60	Buleleng	SMKN 1 SUKASADA	0140105006259	7.835.831,00	2.699.364.169,00	87.000.000,00	0,15	7.835.831,00	-	-	78.936.920,00	2.637.612.239,00	-	77.650.841,00	77.650.841,00
61	Buleleng	SMKN 1 TEJAKULA	0140105006273	163.234.666,00	1.695.325.334,00		-	163.234.666,00	-	-	-	1.624.047.794,00	-	234.512.206,00	234.512.206,00
62	Buleleng	SMKN 2 SERIRIT	0150105001225	373.330,00	1.483.786.670,00		1.786,58	373.330,00	-	-	-	1.483.836.100,00	-	323.900,00	323.900,00
63	Buleleng	SMKN 2 SINGARAJA	0140105006260	5.878.790,00	3.684.361.210,00		-	5.878.790,00	-	-	-	3.687.835.600,00	-	2.404.400,00	2.404.400,00
64	Buleleng	SMKN 2 Tejakula	0140105000097	3.743.697,00	288.096.303,00		-	3.743.697,00	-	-	-	289.216.192,00	-	2.623.808,00	2.623.808,00
65	Buleleng	SMKN 3 SINGARAJA	0140105006182	5.000.000,00	3.385.720.000,00		-	5.000.000,00	-	-	-	3.389.333.000,00	-	1.387.000,00	1.387.000,00
66	Buleleng	SMKN BALI MANDARA	0460105000667	37.352,00	479.962.648,00	45.000.000,00	32.203.161,00	37.352,00	-	-	44.976.500,00	479.983.450,00	-	40.050,00	40.050,00
67	Denpasar	SLBN 1 DENPASAR	0340105000152	1.609.819,34	938.170.181,00	0,00	-	1.609.819,34	-	-	56.599.040,00	883.180.960,00	-	0,34	0,34
68	Denpasar	SLBN 2 DENPASAR	0340105000151	2.862.052,00	1.027.997.948,00	36.250.000,00	851.865,67	2.862.052,00	-	-	8.507.500,00	1.013.776.232,00	-	44.826.268,00	44.826.268,00
69	Denpasar	SLBN 3 DENPASAR	0100105000277	35.304,00	1.117.793.496,00	0,00	459.024,00	35.304,00	-	-	-	1.085.591.000,00	28.800,00	32.209.000,00	32.209.000,00
70	Denpasar	SMAN 1 DENPASAR	0270105000091	325.621.596,00	2.290.438.404,00	45.000.000,00	4.856.198,14	325.621.596,00	-	-	43.800.000,00	2.472.870.974,00	-	144.389.026,00	144.389.026,00
71	Denpasar	SMAN 10 DENPASAR	0490105000147	2.242.595,00	1.571.287.405,00		10.082,00	2.242.595,00	-	-	-	1.572.647.175,00	-	882.825,00	882.825,00
72	Denpasar	SMAN 11 DENPASAR	0330105000377	50.986.011,00	1.115.443.989,00	45.000.000,00	-	50.986.011,00	-	-	39.399.500,00	1.094.036.934,00	-	77.993.566,00	77.993.566,00
73	Denpasar	SMAN 2 DENPASAR	0340105000153	298.971.617,00	2.646.308.383,00	87.000.000,00	-	298.971.617,00	12.000.000,00	-	87.000.000,00	2.678.893.046,00	-	278.386.954,00	278.386.954,00
74	Denpasar	SMAN 3 DENPASAR	0100105016788	1.619.786,00	1.592.444.514,00	160.000.000,00	1.082.273,11	1.619.786,00	-	-	157.039.500,00	1.590.445.121,00	-	6.579.679,00	6.579.679,00
75	Denpasar	SMAN 4 DENPASAR	0390105000041	18.681.875,00	2.476.161.460,00	45.000.000,00	160.574,76	18.681.875,00	-	-	37.973.600,00	2.479.240.971,00	-	22.628.764,00	22.628.764,00
76	Denpasar	SMAN 5 DENPASAR	0490105000018	76.090.704,00	2.157.649.296,00	87.000.000,00	0,41	76.090.704,00	-	-	87.000.000,00	2.201.234.414,00	-	32.505.586,00	32.505.586,00
77	Denpasar	SMAN 6 DENPASAR	0110105006211	7.390.831,00	1.819.249.169,00	36.250.000,00	16.427.669,12	7.390.831,00	-	-	29.791.700,00	1.826.396.825,00	-	6.701.475,00	6.701.475,00
78	Denpasar	SMAN 7 DENPASAR	0110105006201	188.441,00	2.622.954.259,00	45.000.000,00	886.249.217,16	188.441,00	-	-	44.557.700,00	2.589.186.123,00	-	34.398.877,00	34.398.877,00
79	Denpasar	SMAN 8 DENPASAR	0110105006195	168.073.351,00	2.586.046.649,00		9.411.018,91	168.073.351,00	-	-	-	2.539.537.399,00	-	214.582.601,00	214.582.601,00
80	Denpasar	SMAN 9 DENPASAR	0100105000344	18.645.694,00	1.938.974.306,00	50.750.000,00	84.971,00	18.645.694,00	-	-	50.750.000,00	1.949.538.700,00	-	8.081.300,00	8.081.300,00
81	Denpasar	SMKN 1 DENPASAR	0500105000210	76.765.714,00	4.623.664.286,00	0,00	-	76.765.714,00	-	-	-	4.545.004.609,00	-	155.425.391,00	155.425.391,00
82	Denpasar	SMKN 2 DENPASAR	0110105006277	18.006.599,00	2.106.353.401,00	45.000.000,00	-	18.006.599,00	-	-	45.000.000,00	2.092.644.367,00	-	31.715.633,00	31.715.633,00
83	Denpasar	SMKN 3 DENPASAR	0270105000088	56.553.522,00	3.001.466.478,00	0,00	0,22	56.553.522,00	-	-	-	3.017.621.697,00	-	40.398.303,00	40.398.303,00
84	Denpasar	SMKN 4 DENPASAR	0100105016789	23.327.670,00	2.095.362.330,00	0,00	-	23.327.670,00	-	-	-	2.092.839.338,00	-	25.850.662,00	25.850.662,00
85	Denpasar	SMKN 5 DENPASAR	0100105016895	114.411.617,00	3.620.228.383,00	100.000.000,00	7.063.608,42	114.411.617,00	-	-	100.000.000,00	3.625.887.854,00	-	108.752.146,00	108.752.146,00
86	Denpasar	SMKN 6 DENPASAR	0270105000052	2.655.468,00	392.354.532,00	0,00	0,10	2.655.468,00	-	-	-	394.831.640,00	-	178.360,00	178.360,00
87	Gianyar	SLBN 1 GIANYAR	0180105002681	119.000,00	974.311.000,00	0,00	-	119.000,00	-	-	-	971.945.430,00	-	2.484.570,00	2.484.570,00
88	Gianyar	SMAN 1 BLAHBATUH	0180105002685	24.818.332,00	2.281.821.668,00	36.250.000,00	0,76	24.818.332,00	-	-	2.506.500,00	2.296.115.522,00	-	44.267.978,00	44.267.978,00
89	Gianyar	SMAN 1 GIANYAR	0180105002684	43.913.844,00	2.592.846.156,00	100.000.000,00	80.824,67	43.913.844,00	6.500,00	-	99.934.900,00	2.588.662.629,00	-	48.168.971,00	48.168.971,00
90	Gianyar	SMAN 1 PAYANGAN	0310105000084	19.500,00	825.580.500,00	0,00	-	19.500,00	-	-	-	825.561.000,00	-	39.000,00	39.000,00
91	Gianyar	SMAN 1 SUKAWATI	0300105000200	29.439.446,00	2.196.240.554,00	100.000.000,00	60.363.048,00	29.439.446,00	-	-	100.000.000,00	2.224.020.818,00	-	1.659.182,00	1.659.182,00
92	Gianyar	SMAN 1 TAMPAKSIRING	0520105000023	1.099.774,00	1.147.860.226,00	0,00	10.627.608,46	1.099.774,00	-	-	-	1.148.843.140,00	-	116.860,00	116.860,00
93	Gianyar	SMAN 1 TEGALLALANG	0190105000298	11.934.205,00	1.303.865.795,00		1.063.547,90	11.934.205,00	-	-	-	1.296.254.568,00	-	19.545.432,00	19.545.432,00
94	Gianyar	SMAN 1 UBUD	0190105000315	-	1.862.760.000,00	36.250.000,00	9,73	-	-	-	36.250.000,00	1.862.760.000,00	-	-	-
95	Gianyar	SMAN 2 GIANYAR	0180105002542	18.393.490,00	991.246.510,00	0,00	-	18.393.490,00	-	-	-	1.008.885.098,00	-	754.902,00	754.902,00
96	Gianyar	SMAN 2 SUKAWATI	0300105000885	-	873.760.000,00	45.000.000,00	-	-	2.900,00	-	44.925.000,00	873.762.900,00	-	75.000,00	75.000,00
97	Gianyar	SMKN 1 GIANYAR	0180105002683	1.396.180,00	1.965.853.820,00	0,00	0,94	1.396.180,00	-	-	-	1.967.250.000,00	-	-	-
98	Gianyar	SMKN 1 MAS UBUD	0190105000303	7.755.859,00	2.594.504.141,00	0,00	133.352,00	7.755.859,00	-	-	-	2.596.912.333,00	-	5.347.667,00	5.347.667,00
99	Gianyar	SMKN 1 SUKAWATI	0300105000201	18.426,71	839.951.574,00	0,00	-	18.426,71	-	-	-	839.374.533,00	-	595.467,71	595.467,71
100	Gianyar	SMKN 1 TAMPAK SIRING	0520105000010	49.710.496,00	3.473.039.504,00	0,00	23.771.608,00	49.710.496,00	-	-	-	3.489.988.275,00	-	32.761.725,00	32.761.725,00
101	Gianyar	SMKN 1 TEGALLALANG	0190105000327	10.712.056,00	1.665.569.244,00	0,00	62.178.692,00	10.712.056,00	-	-	-	1.646.901.521,00	-	29.379.779,00	29.379.779,00
102	Gianyar	SMKN 2 SUKAWATI	0300105000202	245.538.707,00	2.947.811.293,00	45.000.000,00	7.895.441,91	245.538.707,00	11.600.000,00	-	25.069.000,00	3.178.052.726,00	-	46.828.274,00	46.828.274,00
103	Gianyar	SMKN 2 TEGALLALANG	0190105000286	893.679,00	123.546.321,00	0,00	61.732,00	893.679,00	-	-	-	124.211.180,00	-	228.820,00	228.820,00
104	Gianyar	SMKN 3 SUKAWATI	0300105000203	620.290,00	1.816.569.710,00	160.000.000,00	404.224,33	620.290,00	-	-	160.000.000,00	1.813.429.454,00	-	3.760.546,00	3.760.546,00
105	Jembrana	SLBN 1 JEMBRANA	0160105000722	3.535.555,00	838.164.445,00	36.250.000,00	915.734,00	3.535.555,00	-	-	-	841.679.400,00	-	36.270.600,00	36.270.600,00
106	Jembrana	SMAN 1 MELAYA	0160105000735	8.232.739,00	1.785.966.271,00	45.000.000,00	5.785.774,48	8.232.739,00	-	-	22.287.576,00	1.779.455.774,00	599.010,00	36.856.650,00	36.856.650,00
107	Jembrana	SMAN 1 MENDOYO	0160105000720	62.924.606,00	1.552.075.394,00	0,00	0,22	62.924.606,00	-	-	-	1.526.384.799,00	-	88.615.201,00	88.615.201,00
108	Jembrana	SMAN 1 NEGARA	0160105000725	49.527.123,00	2.149.665.177,00	36.250.000,00	1.287.392,48	49.527.123,00	-	-	6.406.500,00	1.691.259.722,00	-	537.776.078,00	537.776.078,00
109	Jembrana	SMAN 1 PEKUTATAN	0420105000029	87.117.064,00	1.180.182.936,00	0,00	0,25	87.117.064,00	-	-	-	876.920.696,00	-	390.379.304,00	390.379.304,00
110	Jembrana	SMAN 2 MENDOYO	0160105000724	141.397.714,00	1.736.738.286,00	50.750.000,00	2,97	141.397.714,00	-	-	47.919.400,00	1.856.864.805,00	6.636.000,00	17.465.795,00	17.465.795,00
111	Jembrana	SMAN 2 NEGARA	0160105000734	40.668,00	2.072.859.332,00	0,00	-	40.668,00	-	-	-	2.072.847.329,00	-	52.671,00	52.671,00
112	Jembrana	SMAN 3 NEGARA	0160105003101	15.685.649,00	1.054.492.310,00	0,00	-	15.685.649,00	-	-	-	1.053.436.600,00	15.678.000,00	1.063.359,00	1.063.359,00
113	Jembrana	SMKN 1 NEGARA	0160105000890	209.815,00	2.356.620.185,00	0,00	0,23	209.815,00	-	-	-	2.270.457.908,00	-	86.372.092,00	86.372.092,00
114	Jembrana	SMKN 2 NEGARA	0160105000888	9.226.130,00	1.561.993.870,00		645.463.478,00	9.226.130,00	12.000.000,00	-	-	1.549.592.836,00	-	33.627.164,00	33.627.164,00
115	Jembrana	SMKN 3 NEGARA	0160105000726	43.165.202,00	590.194.798,00	0,00	10.442.135,14	43.165.202,00	-	-	-	624.334.934,00	-	9.025.066,00	9.025.066,00
116	Jembrana	SMKN 4 NEGARA	0160105000727	39.075.161,00	1.633.657.509,00		501.707,51	39.075.161,00	-	-	-	1.605.320.860,00	-	67.411.810,00	67.411.810,00
117	Jembrana	SMKN 5 NEGARA	0420105000030	3.308.038,00	1.843.991.962,00	0,00	211.148.723,99	3.308.038,00	-	-	-	1.829.903.699,00	-	17.396.301,00	17.396.301,00
118	Karangasem	SLBN 1 KARANGASEM	0220105002471	1.280.544,00	752.199.456,00	0,00	224.240,00	1.280.544,00	-	-	-	675.764.409,00	-	77.715.591,00	77.715.591,00
119	Karangasem	SMAN 1 ABANG	0220105000215	23.071.321,00	1.069.639.279,00	45.000.000,00	7.680.050,00	23.071.321,00	-	-	8.103.500,00	1.062.787.470,00	-	66.819.630,00	66.819.630,00
120	Karangasem	SMAN 1 AMLAPURA	0220105002470	109.794,00	2.178.760.207,00	45.000.000,00	82.579,89	109.794,00	-	-	23.110.000,00	2.179.252.539,00	-	21.507.462,00	21.507.462,00
121	Karangasem	SMAN 1 BEBANDEM	0220105002462	5.586.439,00	1.249.343.561,00	45.000.000,00	277.449,55	5.586.439,00	5.000.000,00	-	40.980.180,00	1.251.296.975,00	-	12.652.845,00	12.652.845,00

NO	KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	SALDO AWAL	PENDAPATAN BOSP REGULER 2025	PENDAPATAN BOSP KINERJA 2025	KEMBALI KE KASDA TH. 2025	KOREKSI SALDO AUDITED 2024	PENGEMBALIAN BELANJA 2025	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	BELANJA BOSP KINERJA 2025	BELANJA BOSP REGULER 2025	BELANJA DARI SISA BOSP 2024	SISA DANA BOSP 2025	SISA DANA BOSP REKENING KORAN
122	Karangasem	SMAN 1 KUBU	0220105002459	15.490.762,00	1.259.689.238,00		45,82	15.490.762,00	-	-	-	1.200.415.018,00	2.700.000,00	72.064.982,00	72.064.982,00
123	Karangasem	SMAN 1 MANGGIS	0220105002476	10.529.586,00	1.203.690.414,00	0,00	324.474,77	10.529.586,00	-	-	-	1.177.969.498,00	-	36.250.502,00	36.250.502,00
124	Karangasem	SMAN 1 RENDANG	0510105000066	1.393.853,00	1.363.276.147,00	0,00	3.261.443,87	1.393.853,00	-	-	-	1.284.366.731,00	-	80.303.269,00	80.303.269,00
125	Karangasem	SMAN 1 SELAT	0220105002473	21.714.180,00	1.397.825.820,00	0,00	4.546.579,33	21.714.180,00	-	-	-	1.411.955.464,00	-	7.584.536,00	7.584.536,00
126	Karangasem	SMAN 1 SIDEMEN	0220105002469	124.439.535,00	831.360.465,00	0,00	994.752,50	124.439.535,00	-	-	-	749.871.631,00	-	205.928.369,00	205.928.369,00
127	Karangasem	SMAN 2 AMLAPURA	0220105002457	20.899.788,00	1.913.293.736,00	36.250.000,00	28.964.160,56	20.899.788,00	-	-	36.250.000,00	1.921.017.567,00	-	13.175.957,00	13.175.957,00
128	Karangasem	SMAN 3 AMLAPURA	0530105000026	93.140.324,00	1.542.339.676,00	0,00	5.657.876,47	93.140.324,00	17.400.000,00	-	-	1.621.308.679,00	-	31.571.321,00	31.571.321,00
129	Karangasem	SMKN 1 ABANG	0220105002472	155.327.734,00	1.485.192.266,00	0,00	46.626.411,23	155.327.734,00	-	-	-	1.526.430.514,00	-	114.089.486,00	114.089.486,00
130	Karangasem	SMKN 1 AMLAPURA	0220105002490	1.389.524,00	3.818.301.676,00	0,00	-	1.389.524,00	-	-	-	3.626.987.986,00	1.200,00	192.702.014,00	192.702.014,00
131	Karangasem	SMKN 1 BEBANDEM	0220105002477	4.902.882,00	1.274.627.118,00	0,00	1.719.844,57	4.902.882,00	-	-	-	1.201.282.663,00	-	78.247.337,00	78.247.337,00
132	Karangasem	SMKN 1 KUBU	0220105002445	-	2.749.950.000,00	45.000.000,00	-	-	-	-	45.000.000,00	2.629.314.325,00	-	120.635.675,00	120.635.675,00
133	Karangasem	SMKN 1 MANGGIS	0220105002479	18.696.714,00	2.056.523.286,00	0,00	0,24	18.696.714,00	-	-	-	2.061.039.132,00	-	14.180.868,00	14.180.868,00
134	Karangasem	SMKN 2 KUBU	0220105000227	158.100,00	215.301.900,00	0,00	-	158.100,00	-	-	-	215.381.800,00	-	78.200,00	78.200,00
135	Klungkung	SLBN 1 KLUNGKUNG	0210105002208	11.663.413,81	602.059.450,00	36.250.000,00	-	11.663.413,81	-	-	-	586.218.926,00	-	63.753.937,81	63.753.937,81
136	Klungkung	SMAN 1 BANJARANGKAN	0210105002215	23.998.589,00	845.659.251,00	45.000.000,00	38.529.946,00	23.998.589,00	-	-	6.079.000,00	868.702.691,00	-	39.876.149,00	39.876.149,00
137	Klungkung	SMAN 1 DAWAN	0210105002237	28.223.694,00	1.060.776.306,00	45.000.000,00	9.599.429,00	28.223.694,00	-	-	4.095.500,00	1.058.545.400,00	-	71.359.100,00	71.359.100,00
138	Klungkung	SMAN 1 NUSA PENIDA	0230105000111	13.511.100,00	798.600.000,00	0,00	3.483.402,61	13.511.100,00	-	-	-	798.600.000,00	13.511.100,00	-	-
139	Klungkung	SMAN 1 SEMARAPURA	0210105002204	145.203.435,00	1.770.687.765,00	45.000.000,00	50.161.972,00	145.203.435,00	-	-	4.091.900,00	1.740.186.921,00	-	216.612.379,00	216.612.379,00
140	Klungkung	SMAN 2 SEMARAPURA	0210105002226	36.484.111,00	1.997.965.889,00	45.000.000,00	14.887.160,67	36.484.111,00	-	-	10.171.500,00	1.979.776.012,00	-	89.502.488,00	89.502.488,00
141	Klungkung	SMAN SATU ATAP KLUMPU	0230105000344	1.245,00	115.498.755,00	0,00	94.350,68	1.245,00	-	-	-	115.479.519,00	-	20.481,00	20.481,00
142	Klungkung	SMAN SATU ATAP LEMBONGAN	0230105000357	2.775.916,00	340.430.584,00	0,00	153.559.876,23	2.775.916,00	-	-	-	337.608.545,00		5.597.955,00	5.597.955,00
143	Klungkung	SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA	0230105000348	98.789,00	258.951.211,00	0,00	4.091.730,96	98.789,00	-	-	-	259.050.000,00	-	-	-
144	Klungkung	SMKN 1 KLUNGKUNG	0210105002193	2.651.610,00	1.973.828.390,00	0,00	562.955,15	2.651.610,00	-	-	-	1.974.039.983,00	-	2.440.017,00	2.440.017,00
145	Klungkung	SMKN 1 NUSA PENIDA	0230105000343	87.693.240,00	1.741.366.760,00	0,00	4.568.283,88	87.693.240,00	-	-	-	1.702.920.120,00	4.089.000,00	122.050.880,00	122.050.880,00
146	Tabanan	SLBN 1 TABANAN	0120105001956	49.114,00	864.510.886,00	0,00	88.880,15	49.114,00	-	-	-	864.136.431,00	-	423.569,00	423.569,00
147	Tabanan	SMAN 1 BATURITI	0120105001951	1.552.246,00	1.027.003.088,00	0,00	-	1.552.246,00	-	4.666,00	-	1.024.022.714,00	-	4.537.286,00	4.537.286,00
148	Tabanan	SMAN 1 KEDIRI	0240100000157	7.539.700,00	1.757.020.300,00	0,00	2.491.124,47	7.539.700,00	-	-	-	1.678.752.500,00	-	85.807.500,00	85.807.500,00
149	Tabanan	SMAN 1 KERAMBITAN	0120105001957	8.836.968,00	738.203.032,00	0,00	116.819,22	8.836.968,00	-	-	-	729.360.332,00	-	17.679.668,00	17.679.668,00
150	Tabanan	SMAN 1 MARGA	0580105000020	28.381.653,00	437.138.347,00		25.702,90	28.381.653,00	-	-	-	465.516.194,00	-	3.806,00	3.806,00
151	Tabanan	SMAN 1 PENEBEL	0440105000013	11.686.697,00	899.113.303,00	0,00	573.269,74	11.686.697,00	-	-	-	902.494.787,00	-	8.305.213,00	8.305.213,00
152	Tabanan	SMAN 1 PUPUAN	0470105000086	18.884.260,00	1.377.675.740,00	45.000.000,00	-	18.884.260,00	-	-	44.992.800,00	1.395.840.047,00	-	727.153,00	727.153,00
153	Tabanan	SMAN 1 SELEMADEG	0410105000179	18.500.597,00	1.205.099.403,00		823.112,00	18.500.597,00	-	-	-	1.211.197.028,00	-	12.402.972,00	12.402.972,00
154	Tabanan	SMAN 1 TABANAN	1,20105E+11	-	2.971.600.000,00	87.000.000,00	-	-	-	-	86.997.100,00	2.951.273.667,00	-	20.329.233,00	20.329.233,00
155	Tabanan	SMAN 2 TABANAN	0120105001952	44.888.622,00	2.705.911.378,00	50.750.000,00	3.310.632,33	44.888.622,00	-	-	50.750.000,00	2.694.260.520,00	-	56.539.480,00	56.539.480,00
156	Tabanan	SMKN 1 TABANAN	0120105001953	281.639,00	2.155.723.061,00	0,00	1.602,23	281.639,00	-	-	-	2.155.370.281,00	-	634.419,00	634.419,00
157	Tabanan	SMKN 2 TABANAN	0580105000019	33.222.086,00	2.369.737.914,00	0,00	30,56	33.222.086,00	-	-	-	2.371.056.808,00	-	31.903.192,00	31.903.192,00
158	Tabanan	SMKN 3 TABANAN	0410105000167	461.758,00	2.761.178.242,00	-	66,77	461.758,00	-	-	-	2.747.366.668,00	-	14.273.332,00	14.273.332,00
159	Denpasar	SMAN 12 DENPASAR		-	247.800.000,00	45.000.000,00	-	-	705000	-	44788953	248.437.840,00	-	278.207,00	278.207,00
160	Denpasar	SMKN 7 DENPASAR		-	444.150.000,00	-	-	-	-	0	-	440.567.579,00	-	3.582.421,00	3.582.421,00

Lampiran 23

Rincian Piutang Dan Penyisihan Piutang Daerah
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

Kode/Nama Akun Piutang			Piutang Per 1 Januari 2024 (Rp)	Koreksi Saldo Awal		Jumlah Setelah KSA	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Des 2025	Kategori Klasifikasi Piutang				Total Penyisihan
				Bertambah	Berkurang					Kualitas Lancar	Kualitas Kurang Lancar	Kualitas Diragukan	Kualitas Macet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.03-Piutang Pajak Daerah	1.1.03.01-Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.1.03.01.01-Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan	9.763.200,00	-	-	9.763.200,00	-	-	9.763.200,00	-	-	-	9.763.200,00	9.763.200,00
		1.1.03.01.02-Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep	8.985.400,00	-	-	8.985.400,00		973.900,00	8.011.500,00	-	-	-	8.011.500,00	8.011.500,00
		1.1.03.01.03-Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus	54.361.600,00	-	-	54.361.600,00	-	-	54.361.600,00	-	-	-	54.361.600,00	54.361.600,00
		1.1.03.01.04-Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus	13.093.600,00			13.093.600,00		13.093.600,00	-	-	-	-	-	-
		1.1.03.01.06-Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	6.566.700,00	-	-	6.566.700,00	-	-	6.566.700,00	-	-	-	6.566.700,00	6.566.700,00
		1.1.03.01.08-Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	16.107.200,00	-	-	16.107.200,00	-	-	16.107.200,00	-	-	-	16.107.200,00	16.107.200,00
		1.1.03.01.09-Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.1.03.01.10-Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	17.889.300,00	-	-	17.889.300,00	-	3.352.000,00	14.537.300,00	-	-	-	14.537.300,00	14.537.300,00
	1.1.03.01-Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Total		126.767.000,00	-	-	126.767.000,00	-	17.419.500,00	109.347.500,00	-	-	-	109.347.500,00	109.347.500,00
	1.1.03.02-Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.1.03.02.02-Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	65.400.000,00	-	-	65.400.000,00	-	-	65.400.000,00	-	-	-	65.400.000,00	65.400.000,00
		1.1.03.02.03-Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	55.730.000,00	-	-	55.730.000,00	-	-	55.730.000,00	-	-	-	55.730.000,00	55.730.000,00
		1.1.03.02.06-Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	1.660.000,00	-	-	1.660.000,00	-	-	1.660.000,00	-	-	-	1.660.000,00	1.660.000,00
		1.1.03.02.08-Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.1.03.02.09-Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.1.03.02.10-Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	124.605.000,00	-	-	124.605.000,00	-	-	124.605.000,00	-	-	-	124.605.000,00	124.605.000,00
	1.1.03.02-Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Total		247.395.000,00	-	-	247.395.000,00	-	-	247.395.000,00	-	-	-	247.395.000,00	247.395.000,00
	1.1.03.03-Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.1.03.03.01-Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.1.03.03.02-Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar	7.502.811.151,04	-	-	7.502.811.151,04	-	7.502.811.151,04	-	-	-	-	-	-
		1.1.03.03.04-Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya	41.546.698.698,00	-	-	41.546.698.698,00	-	41.546.698.698,00	-	-	-	-	-	-
	1.1.03.03-Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Total		49.049.509.849,04	-	-	49.049.509.849,04	-	49.049.509.849,04	-	-	-	-	-	-
	1.1.03.04-Piutang Pajak Air Permukaan	1.1.03.04.01-Piutang Pajak Air Permukaan	415.138.682,00	-	-	415.138.682,00	-	415.138.682,00	-	-	-	-	-	-
	1.1.03.04-Piutang Pajak Air Permukaan Total		415.138.682,00	-	-	415.138.682,00	-	415.138.682,00	-	-	-	-	-	-
	1.1.03.05-Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	1.1.03.05.01-Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	-	-	-	-	330.245.000,00	-	330.245.000,00	330.245.000,00	-	-	-	1.651.225,00

Kode/Nama Akun Piutang			Piutang Per 1 Januari 2024 (Rp)	Koreksi Saldo Awal		Jumlah Setelah KSA	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Des 2025	Kategori Klasifikasi Piutang				Total Penyisihan
				Bertambah	Berkurang					Kualitas Lancar	Kualitas Kurang Lancar	Kualitas Diragukan	Kualitas Macet	
	1.1.03.05-Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)		-	-	-	-	330.245.000,00	-	330.245.000,00	330.245.000,00	-	-	-	1.651.225,00
1.1.03-Piutang Pajak Daerah Total			**49.838.810.531,04**	**-**	**-**	**49.838.810.531,04**	**330.245.000,00**	**49.482.068.031,04**	**686.987.500,00**	**330.245.000,00**	**-**	**-**	**356.742.500,00**	**358.393.725,00**
1.1.04-Piutang Retribusi Daerah	1.1.04.01-Piutang Retribusi Jasa Umum	1.1.04.01.01-Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	27.174.768.742,75	50.859.152,00	63.377.003,00	27.162.250.891,75	44.753.375.320,00	30.497.491.599,00	41.418.134.612,75	22.986.718.097,00	14.626.707.796,00	975.435.684,00	2.829.273.035,75	4.894.595.247,89
		1.1.04.01.14-Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan	2.364.775.000,00	-	-	2.364.775.000,00	886.480.000,00	432.880.000,00	2.818.375.000,00	144.695.000,00	184.640.000,00	557.145.000,00	1.931.895.000,00	2.229.654.975,00
	1.1.04.01-Piutang Retribusi Jasa Umum Total		29.539.543.742,75	50.859.152,00	63.377.003,00	29.527.025.891,75	45.639.855.320,00	30.930.371.599,00	44.236.509.612,75	23.131.413.097,00	14.811.347.796,00	1.532.580.684,00	4.761.168.035,75	7.124.250.222,89
	1.1.04.02-Piutang Retribusi Jasa Usaha	1.1.04.02.01-Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	147.635.000,00	-	-	147.635.000,00	-	-	147.635.000,00	-	-	-	147.635.000,00	147.635.000,00
		1.1.04.02.20-Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	851.328.769.113,68	-	786.802.780.952,68	64.673.623.161,00	240.021.339,00	56.990.070.736,01	7.775.938.763,99	42.152.631,00	4.178.000,00	193.690.708,00	7.535.917.425,00	7.633.391.342,16
	1.1.04.02-Piutang Retribusi Jasa Usaha Total		851.476.404.113,68	-	786.802.780.952,68	64.821.258.161,00	240.021.339,00	56.990.070.736,01	7.923.573.763,99	42.152.631,00	4.178.000,00	193.690.708,00	7.683.552.425,00	7.781.026.342,16
	1.1.04.03-Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	1.1.04.03.04-Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan	7.525.000,00	-	-	7.525.000,00	-	7.525.000,00	-	-	-	-	-	-
	1.1.04.03-Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Total		7.525.000,00	-	-	7.525.000,00	-	7.525.000,00	-	-	-	-	-	-
1.1.04-Piutang Retribusi Daerah Total			**881.023.472.856,43**	**50.859.152,00**	**786.866.157.955,68**	**94.355.809.052,75**	**45.879.876.659,00**	**87.927.967.335,01**	**52.160.083.376,74**	**23.173.565.728,00**	**14.815.525.796,00**	**1.726.271.392,00**	**12.444.720.460,75**	**14.905.276.565,05**
1.1.06-Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.1.06.12-Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.1.06.12.18-Piutang Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	-	-	-	-	44.205.930,00	-	44.205.930,00	44.205.930,00	-	-	-	221.029,65
	1.1.06.12-Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah Total		-	-	-	-	44.205.930,00	-	44.205.930,00	44.205.930,00	-	-	-	221.029,65
	1.1.06.13-Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.1.06.13.02-Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	-	-	-	34.560,00	-	34.560,00	17.280,00	17.280,00	-	-	1.814,40
	1.1.06.13-Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah Total		-	-	-	-	34.560,00	-	34.560,00	17.280,00	17.280,00	-	-	1.814,40
	1.1.06.16-Piutang Pendapatan BLUD	1.1.06.16.02-Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.796.271.075,00	-	-	2.796.271.075,00	3.112.656.735,00	2.796.271.075,00	3.112.656.735,00	2.747.678.227,00	227.960.432,00	137.018.076,00	-	105.043.472,36
	1.1.06.16-Piutang Pendapatan BLUD Total		2.796.271.075,00	-	-	2.796.271.075,00	3.112.656.735,00	2.796.271.075,00	3.112.656.735,00	2.747.678.227,00	227.960.432,00	137.018.076,00	-	105.043.472,36
	1.1.06.21-Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.1.06.21.01-Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	491.332.281,37	2.529.442.452	-	3.020.774.733,83	-	3.020.774.734	0,00	-	-	-	-	0,00
	1.1.06.21-Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Total		491.332.281,37	2.529.442.452	-	3.020.774.734	-	3.020.774.734	0,00	-	-	-	-	-
1.1.06-Piutang Lain-lain PAD yang Sah Total			**3.287.603.356,37**	**2.529.442.452,46**	**-**	**5.817.045.808,83**	**3.156.897.225,00**	**5.817.045.808,83**	**3.156.897.225,00**	**2.791.901.437,00**	**227.977.712,00**	**137.018.076,00**	**-**	**105.266.316,41**
1.1.07-Piutang Transfer Pemerintah Pusat	1.1.07.07-Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)	1.1.07.07.01-Piutang DBH Pajak	-	-	-	-	180.098.559.000,00	-	180.098.559.000,00	180.098.559.000,00	-	-	-	900.492.795,00
		1.1.07.07.02-Piutang DBH Sumber Daya Alam (SDA)	-	-	-	-	26.821.000,00	-	26.821.000,00	26.821.000,00	-	-	-	134.105,00

Kode/Nama Akun Piutang			Piutang Per 1 Januari 2024 (Rp)	Koreksi Saldo Awal		Jumlah Setelah KSA	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Des 2025	Kategori Klasifikasi Piutang				Total Penyisihan
				Bertambah	Berkurang					Kualitas Lancar	Kualitas Kurang Lancar	Kualitas Diragukan	Kualitas Macet	
1.1.07-Piutang Transfer Pemerintah Pusat Total			-	-	-	-	180.125.380.000,00	-	180.125.380.000,00	180.125.380.000,00	-	-	-	900.626.900,00
1.1.09-Piutang Lainnya	1.1.09.04-Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.1.09.04.01-Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	3.709.104.636,00	-	-	3.709.104.636,00	-	18.000.000	3.691.104.636,00	-	-	-	3.691.104.636,00	3.691.104.636,00
	1.1.09.04-Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Total		3.709.104.636,00	-	-	3.709.104.636,00	-	18.000.000	3.691.104.636,00	-	-	-	3.691.104.636,00	3.691.104.636,00
	1.1.09.05-Uang Muka	1.1.09.05.01-Uang Muka	-	-	-	-	17.683.583.811,00	3.471.000.000,00	14.212.583.811,00	-	-	-	-	-
	1.1.09.05-Uang Muka Total		-	-	-	-	17.683.583.811,00	3.471.000.000,00	14.212.583.811,00	-	-	-	-	-
1.1.09-Piutang Lainnya Total			**3.709.104.636,00**	**0,00**	**0,00**	**3.709.104.636,00**	**17.683.583.811,00**	**3.489.000.000,00**	**17.903.688.447,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.691.104.636,00**	**3.691.104.636,00**
Grand Total			**937.858.991.379,84**	**2.580.301.604,46**	**786.866.157.955,68**	**153.720.770.028,62**	**247.175.982.695,00**	**146.716.081.174,88**	**254.033.036.548,74**	**206.421.092.165,00**	**15.043.503.508,00**	**1.863.289.468,00**	**16.492.567.596,75**	**19.960.668.142,46**

Rincian Beban Dibayar Dimuka
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

Kode/Nama Akun	OPD	Uraian Beban Dibayar Dimuka	Nama Perusahaan/Peroran gan Yang Terikat	Lokasi	Nomor SK Perjanjian	Periode Pembayaran BDM		Jumlah Dibayar (Rp)	Jumlah Hari atas Pembayaran	Nilai Per/Hari (Rp)	Saldo Awal BDM 2025 (Rp)	Jumlah Hari Pengakuan BDM' di Tahun 2024	Beban LO Tahun 2025 dari BDM (Rp)
						Mulai	Berakhir						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.11.01-Beban Dibayar Dimuka	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	Kelebihan Transfer Pembayaran belanja obat tahun 2024		Bangli	00054/STS/STS BLUD-Tanpa Penetapan/1.02.02/2025	30/12/2024	10/01/2025	400,00	12	33,33	400,00	10,00	400,00
1.1.11.01-Beban Dibayar Dimuka Total													**400,00**
1.1.11.03-Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali	Asuransi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024	PT Asuransi Sinar Mas	Lingkup Aset Provinsi Bali	B.31.000.3.3/1284/UPTD.PBMD/BPKAD	11/06/2024	11/06/2025	356.272.000,00	366	2.055.751,37	333.031.721,31	162	333.031.721,31
		Asuransi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024	PT Asuransi Sinar Mas	Lingkup Aset Provinsi Bali	B.31.000.3.3/1284/UPTD.PBMD/BPKAD	11/06/2024	11/06/2025		366	973.420,77	157.694.163,93	162	157.694.163,93
		Asuransi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025	PT Asuransi Bangun Askrida	Lingkup Aset Provinsi Bali	B.31.000.3.3/1171/UPTD.PBMD/BPKAD	11/06/2025	11/06/2026		366	1.970.476,58	0	204	401.977.222,02
		Asuransi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025	PT Asuransi Bangun Askrida	Lingkup Aset Provinsi Bali	B.31.000.3.3/1171/UPTD.PBMD/BPKAD	11/06/2025	11/06/2026	752.405.000,00	366	1.026.845,80	0	204	209.476.542,90
1.1.11.03-Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah Total													**1.102.179.650,16**
Grand Total													**1.102.180.050,16**

Lampiran 24

Beban Dibayar Dimuka Tahun 2025 (Rp)
15
-
-
0
0
319.217.205,72
166.349.019,36
485.566.225,08
485.566.225,08

Lampiran 24

Rincian Persediaan
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

No.	OPD	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bahan Kimia	Bahan Bakar dan Pelumas	Bahan Baku	Bahan Kimia Nuklir	Bahan/Bibit Tanaman	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Isi Tabung Gas
		716.772.751,00	**5.023.498.515,91**	**14.355.811.001,05**	**414.588.897,99**	**111.000,00**	**90.105.149,00**	**30.630.210,00**	**54.265.245,96**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	6.982.701,00	38.471.000,00	182.668.526,10	414.588.897,99	111.000,00	1.260.000,00	-	458.000,00
2	Dinas Kesehatan	-	3.490.575.995,15	1.348.532.898,15	-	-	-	-	50.083.045,96
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	313.146.660,00	1.340.201.731,76	1.108.156.651,82	-	-	-	17.565.750,00	-
4	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	1.162.306.400,00	-	-	-	-	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	1.540.653.250,00	-	-	-	-	3.724.200,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	-	-	241.357.800,00	-	-	-	-	-
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	-	3.645.240,00	58.016.700,00	-	-	-	-	-
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Perhubungan	-	-	378.900.600,00	-	-	-	-	-
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	-	868.643.100,00	-	-	-	-	-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	82.827.100,00	-	-	-	-	-
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	251.576.200,00	-	-	-	-	-
13	Dinas Kebudayaan	563.200,00	-	41.433.110,00	-	-	-	-	-
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	-	-	551.756.600,00	-	-	-	-	-
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	27.650,00	60.858.000,00	-	-	-	-	-
16	Dinas Pariwisata	-	-	96.241.000,00	-	-	-	-	-
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	137.601.490,00	1.061.305.100,00	-	-	-	1.980.000,00	-
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	396.080.190,00	5.938.009,00	1.236.923.833,98	-	-	88.845.149,00	-	-
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	7.037.400,00	458.118.600,00	-	-	-	-	-
20	Sekretariat Daerah	-	-	1.902.980.331,00	-	-	-	8.292.810,00	-
21	Sekretariat DPRD	-	0,00	338.967.000,00	-	-	-	2.791.650,00	-
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	71.453.100,00	-	-	-	-	-
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	248.201.100,00	-	-	-	-	-
24	Badan Pendapatan Daerah	-	-	317.933.800,00	-	-	-	-	-
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	136.587.700,00	-	-	-	-	-
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	-	217.688.800,00	-	-	-	-	-
27	Badan Penghubung	-	-	211.756.400,00	-	-	-	-	-
28	Inspektorat	-	-	34.571.400,00	-	-	-	-	-
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	145.395.900,00	-	-	-	-	-

No.	OPD	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Bahan Lainnya	Suku Cadang Alat Kedokteran	Suku Cadang Alat Laboratorium	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	Suku Cadang Alat Pertanian	Suku Cadang Alat Bengkel	Suku Cadang Lainnya
		63.000.000,00	**20.033.928.757,65**	**-**	**15.000.000,00**	**337.500,00**	**-**	**56.200.246,43**	**99.731.610,09**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	1.509.120.163,64	-	15.000.000,00	337.500,00	0,00	-	18.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	-	16.665.893.023,13	-	-	-	-	56.200.246,43	81.731.610,09
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	1.739.141.760,88	-	-	-	-	-	-
4	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Kebudayaan	-	0,00	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	63.000.000,00	13.446.500,00	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	102.748.200,00	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	1.111.110,00	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	0,00	-	-	-	-	-	-
20	Sekretariat Daerah	-	0,00	-	-	-	-	-	-
21	Sekretariat DPRD	-	0,00	-	-	-	-	-	-
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	2.468.000,00	-	-	-	-	-	-
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	0,00	-	-	-	-	-	-
24	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	0,00	-	-	-	-	-	-
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	0,00	-	-	-	-	-	-
27	Badan Penghubung	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	OPD	Alat Tulis Kantor	Kertas dan Cover	Bahan Cetak	Benda Pos	Bahan Komputer	Perabot Kantor	Alat Listrik	Perlengkapan Dinas
		8.082.531.106,27	**656.074.611,34**	**665.686.594,97**	**138.003.685,39**	**1.360.097.768,03**	**2.287.504.367,01**	**1.413.173.852,86**	**31.649.958,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	6.670.786.313,54	142.442.411,06	259.444.992,92	55.897.685,39	183.125.656,04	1.614.449.629,06	922.454.778,48	5.400.000,00
2	Dinas Kesehatan	829.055.414,18	266.471.379,98	56.365.200,00	27.092.000,00	225.737.779,99	543.262.220,95	208.425.256,38	11.825.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	50.776.967,78	11.579.000,00	16.837.346,05	3.320.000,00	2.508.000,00	-	6.236.100,00	175.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	579.500,00	1.462.200,00	-	110.000,00	-	-	3.539.970,00	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.552.000,00	2.356.000,00	-	3.440.000,00	0,00	-	10.988.590,00	14.249.958,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	30.634.936,00	9.035.925,00	5.089.700,00	710.000,00	270.000,00	12.605.514,00	9.410.097,00	-
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	14.994.340,00	4.099.230,00	490.002,00	490.000,00	0,00	-	2.323.550,00	-
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	2.943.055,00	6.696.000,00	1.095.000,00	550.000,00	0,00	-	0,00	-
9	Dinas Perhubungan	21.105.650,00	1.688.000,00	21.114.300,00	6.110.000,00	8.275.200,00	1.138.500,00	3.281.700,00	-
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	574.990,00	522.450,00	-	970.000,00	2.053.000,00	-	6.799.993,00	-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20.000,00	406.000,00	-	130.000,00	1.500.000,00	-	-	-
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	450.000,00	2.177.000,00	1.195.200,00	100.000,00	0,00	-	-	-
13	Dinas Kebudayaan	7.472.680,00	4.633.335,00	2.298.300,00	1.702.000,00	4.049.000,00	7.802.745,00	34.106.340,00	-
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	310.500,00	2.542.000,00	654.900,00	-	10.789.989,00	0,00	-	-
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.418.069,00	643.202,00	922.408,00	610.000,00	12.800.000,00	-	1.643.483,00	-
16	Dinas Pariwisata	900.947,00	3.554.705,00	0,00	892.000,00	1.500.000,00	-	80.000,00	-
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	19.901.026,77	25.877.220,00	5.470.500,00	640.000,00	3.130.000,00	52.036.000,00	5.074.984,00	-
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.785.800,00	2.604.000,00	2.195.999,00	3.510.000,00	861.000,00	892.000,00	13.735.764,00	-
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	378.350,00	3.003.030,00	846.000,00	800.000,00	1.865.002,00	205.997,00	474.080,00	-
20	Sekretariat Daerah	227.154.074,00	85.557.830,00	74.258.652,00	6.220.000,00	71.008.337,00	26.725.211,00	136.338.416,00	-
21	Sekretariat DPRD	90.399.336,00	15.860.200,00	28.720.000,00	3.400.000,00	422.228.609,00	8.960.400,00	-	-
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.592.051,00	1.526.250,00	1.078.500,00	4.370.000,00	20.983.497,00	10.030.987,00	22.992.785,00	-
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14.243.000,00	10.731.200,00	3.414.499,00	4.510.000,00	78.829.250,00	3.134.998,00	5.527.004,00	-
24	Badan Pendapatan Daerah	53.019.131,00	45.147.038,30	181.291.087,00	3.240.000,00	288.453.051,00	-	13.268.935,00	-
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.764.505,00	2.935.005,00	2.904.009,00	460.000,00	3.974.997,00	4.465.565,00	5.431.027,00	-
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	353.000,00	753.000,00	-	3.930.000,00	0,00	1.060.000,00	861.000,00	-
27	Badan Penghubung	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Inspektorat	4.097.000,00	978.000,00	-	300.000,00	0,00	734.600,00	-	-
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.268.470,00	793.000,00	-	4.500.000,00	16.155.400,00	-	180.000,00	-

No.	OPD	Perlengkapan Pendukung Olahraga	Suvenir/Cendera Mata	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Obat	Obat-obatan Lainnya	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-
		326.758.733,64	**490.219.325,00**	**4.894.138.126,17**	**20.051.224.364,53**	**323.013.076,37**	**50.185.628.465,12**	**20.288.318.426,02**	**2.202.350,00**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	285.058.741,64	8.025.000,00	2.499.857.479,63	238.708.326,57	60.192.516,37	-	11.420.000,00	2.202.350,00
2	Dinas Kesehatan	-	-	316.471.975,54	17.739.282.387,96	258.631.760,00	-	20.021.019.706,02	-
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	2.729.000,00	-	-	43.861.688.181,00	-	-
4	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	41.699.992,00	-	11.999.988,00	-	-	1.487.681.066,50	-	-
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	-	-	27.119.897,00	0,00	-	10.143.291,00	-	-
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Perhubungan	-	-	1.811.000,00	-	-	-	-	-
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	-	-	-	-	39.713.580,00	-	-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Kebudayaan	-	-	13.489.195,00	-	-	-	49.119.720,00	-
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	-	-	0,00	-	-	-	-	-
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	489.373,00	-	4.188.800,00	-	-	-
16	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	-	1.944.383.490,00	2.073.233.650,00	0,00	4.778.302.346,62	206.759.000,00	-
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	2.954.056,00	-	0,00	-	-	-
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	620.812,00	-	0,00	-	-	-
20	Sekretariat Daerah	-	368.484.320,00	20.408.884,00	-	-	8.100.000,00	-	-
21	Sekretariat DPRD	-	113.710.005,00	29.487.308,00	-	-	-	-	-
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0,00	10.979.950,00	-	-	-	-	-
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	5.730.182,00	-	-	-	-	-
24	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	1.693.036,00	-	-	-	-	-
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	-	890.000,00	-	-	-	-	-
27	Badan Penghubung	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Inspektorat	-	-	3.022.500,00	-	-	-	-	-
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	OPD	Natura	Pakan	Natura dan Pakan Lainnya	Persediaan Penelitian Teknologi	Persediaan Penelitian Lainnya	Persediaan Dalam Proses	Persediaan Dalam Proses Lainnya	Komponen Lainnya
		224.559.010,97	**166.271.940,00**	**108.166.260,00**			**7.437.000,00**	**2.395.675.270,00**	**73.765.512,60**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	0,00	97.364.400,00	340.551.465,00	1.943.453.211,98	7.437.000,00	29.970,00	-
2	Dinas Kesehatan	224.559.010,97	3.981.000,00	2.900.360,00	-	-	-	-	-
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	2.395.645.300,00	73.765.512,60
4	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	5.827.500,00	-	-	-	-	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	3.981.190,00	874.000,00	-	-	-	-	-
16	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	158.309.750,00	1.200.000,00	-	-	-	-	-
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Badan Penghubung	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	OPD	Total Persediaan	Nomor Berita Acara Stock Of Name
		157.410.085.366,35	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	17.535.299.716,41	B.10.000.2.3.2/9144/UK/DIKPORA
2	Dinas Kesehatan	62.428.097.270,88	B.11.000.6/665/Umum.Kepeg/Diskes
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	50.943.472.961,89	B.25.000.6/24468/SEKRET/DISPUPR.PERKIM
4	Satuan Polisi Pamong Praja	1.173.825.570,00	B.22.000/12778/Set/SATPOLPP
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.118.345.044,50	B.33.000.2.3.1/10546/SET/BPBD
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	346.377.160,00	B.13.000.6/5044/SEKRET/DSP3A
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	84.059.062,00	B.21.000.2.3.1/325/I/DISNAKER.ESDM
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	11.284.055,00	B.12.000.2.3.1/8982/SET/DPMDDUKCAPIL
9	Dinas Perhubungan	443.424.950,00	B.16.000.2.1.2/393/SEKRET/DISHUB
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	919.277.113,00	B.14.000.6/239/SKRET/D.KOMINFOS
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	84.883.100,00	B.17.000.2.3.1/3527/SET/DISKOP.UKM
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	255.498.400,00	B.27.000/6040/SEKRET/DPMPTSP
13	Dinas Kebudayaan	166.669.625,00	1876 Tahun 2025
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	566.053.989,00	B.23.000.2.3.1/18/SET/DPMA
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	168.902.675,00	B.26.000/SEKRET/DISKELKAN
16	Dinas Pariwisata	103.168.652,00	B.20.000.6/4136/Sekret/Dispar
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10.577.952.757,39	10241 Tahun 2025
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.758.436.910,98	B.24.000.2.3.1/6404/Sekret/DKLH/2025
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	473.349.271,00	B.18.000.2.3.2/13380/Sekret/Disperindag
20	Sekretariat Daerah	2.935.528.865,00	B.40.900.1/4755/AKA/B.UM
21	Sekretariat DPRD	1.054.524.508,00	B.08.000.6/1502/Umum/Setwan
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	154.475.120,00	B.28.000.2.3.2/5028/Set/Bappeda
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	374.321.233,00	B.31.000.6/131/Set/BPKAD
24	Badan Pendapatan Daerah	902.353.042,30	B.32.000.2.3.2/8144/SET/BAPENDA
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	162.215.844,00	B.31.000.2.3.1/86972/SET/BKPSDM
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	225.535.800,00	B.29.000.6/262/SEKRET/BRIDA
27	Badan Penghubung	211.756.400,00	B.35.000.2.3.2/5150/TU/BANHUB
28	Inspektorat	43.703.500,00	B.09.000.2.3.2/7019/Set/Itprov
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	187.292.770,00	B.34.000/11215/SET/BKBP

Lampiran 26

DAFTAR INVESTASI JANGKA PANJANG
PEMERINTAH PROVINSI BALI
PER 31 DESEMBER 2025

No	Perusahaan	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal		Piutang Deviden 2025	% Kepemilikan	Laba/Rugi Tahun Berjalan	PENAMBAHAN		PENGURANGAN	Saldo Akhir	Metode Penilaian Investasi	Keterangan
			Penambahan	Pengurangan				Bagian Laba / Rugi Tahun Berjalan	Penyertaan Modal	Pembagian Deviden 2025			
	Jumlah	**6.915.708.269.354,89**	**-**	**14.661.520.580,50**	**-**		**7.006.679.315.520,00**	**341.293.299.968,01**	**155.154.164.942,00**	**253.603.839.116,43**	**7.122.255.477.273,94**		
	BUMD	**6.771.706.852.508,99**	**-**	**14.661.520.580,50**	**-**		**1.060.890.903.486,00**	**319.523.090.586,82**	**155.154.164.942,00**	**253.382.756.694,43**	**6.978.339.830.762,88**		
1	Perumda Kerta Bali Saguna	95.859.986.587,50		14.661.520.580,50		100,00	7.262.024.482,00	7.262.024.482,00	-	27.000.000.000,00	61.460.490.489,00	Ekuitas	LK Audited
2	Perumda Kerti Bali Santhi	2.845.835.058,00				100,00			(2.845.835.058,00)		-	Ekuitas	LK Audited
3	Perseroda Pusat Kebudayaan Bali	5.004.744.704.585,27				100,00	-	-		-	5.004.744.704.585,27	Ekuitas	
4	PT. BPD Bali	1.464.824.031.618,88			-	29,16	1.045.494.652.304,00	304.866.240.611,85	120.000.000.000,00	224.454.593.473,43	1.665.235.678.757,30	Ekuitas	LK Audited
5	PT. Jamkrida Bali Mandara	203.432.294.659,34			-	90,91	8.134.226.700,00	7.394.825.492,97	38.000.000.000,00	1.928.163.221,00	246.898.956.931,31	Ekuitas	LK Audited
	SWASTA	**144.001.416.845,90**	**-**	**-**	**-**		**5.945.788.412.034,00**	**21.770.209.381,19**	**-**	**221.082.422,00**	**143.915.646.511,06**		
1	PT. Rumah Sakit Puri Raharja (BUMD)	42.851.416.845,90			-	58,00	233.296.702,00	135.312.087,16	-	221.082.422,00	42.765.646.511,06	Ekuitas	LK Audited
2	PT Asuransi Bangun Askrida	1.150.000.000,00			-	0,39	5.966.709.115.332,00	22.971.830.094,03	-		1.150.000.000,00	Cost	LK Unaudited
3	PT. Jasa Marga Bali Tol	100.000.000.000,00			-	6,32	(21.154.000.000,00)	(1.336.932.800,00)	-	-	100.000.000.000,00	Cost	LK Audited

Lampiran 27

Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

No	SKPD	Saldo Awal	UNIT	Mutasi											
				Belanja Modal	UNIT	Hutang	UNIT	Pembayaran di Muka	UNIT	Kapitaliasi Belanja Non Modal	UNIT	Penerimaan Hibah	UNIT	Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	UNIT
	Jumlah	**5.385.006.936.615,43**	**64.793**	**1.181.948.000,00**	**1**	**-**	**-**			**5.178.495.000,00**	**7**	**2.716.023.863.906,00**	**14**	**228.720.000,00**	**-**
1	Sekretariat DPRD	52.595.040.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	12.915.320.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	2.084.389.783,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	93.089.817.000,00	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	55.404.256.000,00	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	22.841.516.932,00	13	1.181.018.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	48.779.189.316,57	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Kebudayaan	196.031.405.000,00	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	5.479.783.250,00	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	4.553.815.000,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	6.689.550.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	28.953.953.500,00	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1.912.186.829.989,43	3.803	-	-	-	-	-	-	-	-	11.413.503.256,00	-	-	-
14	Inspektorat	5.908.000.000,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	6.155.360.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	100.000.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	5.779.200.000,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.735.000.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.540.480.000,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	23.285.829.000,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	2.286.375.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	8.018.088.625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	6.171.200.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2.167.503.408.594,00	789	930.000,00	-	-	-	-	-	5.178.495.000,00	7,00	2.704.610.360.650,00	14,00	228.720.000,00	-
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	24.989.572.500,00	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	516.293.736.337,50	59.978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	63.327.854.637,93	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	11.037.600.000,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.561.600.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	61.544.062.150,00	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	6.164.704.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Tambah													
		Reklasifikasi				Koreksi Pencatatan Saldo Awal	UNIT	Reklasifikasi dari Aset Extra ke Intra	UNIT	Penerimaan Tukar Menukar	UNIT	Mutasi Antar OPD	UNIT	Salah Pos Belanja Modal	UNIT
		Dari Aset Lainnya	UNIT	Dari Properti Investasi	UNIT										
	Jumlah	**1.814.465.225,00**	**7,00**	**-**	**-**	**238.149.119.920,00**	**20**	**-**	**-**	**5.558.000.000,00**	**-**	**22.343.445.450,00**	**17**	**-**	**-**
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	170.086.225,00	-	-	-	22.054.704.000,00	-	-	-	5.558.000.000,00	-	11.353.414.000,00	-	-	-
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	704.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-			183.633.250,00	6,00	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	939.429.000,00	7,00	-	-	-	-	-	-			3.159.440.000,00	7,00	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	213.748.835.920,00	20,00	-	-			823.069.700,00	1,00	-	-
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	-	2.345.580.000,00	-	-	-			1.265.888.500,00	1,00	-	-
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-			5.558.000.000,00	2,00	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-

No	SKPD	Mutasi Kurang													
		Penghapusan	UNIT	Pemabayaran Hutang	UNIT	Pengeluaran Hibah	UNIT	Reklasifikasi						Koreksi Pencatatan Saldo Awal	UNIT
								Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	UNIT	Ke Aset Lainnya	UNIT	Ke Properti Investasi	UNIT		
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19.784.712.875,00**	**-**	**-**	**-**	**235.693.378.441,00**	**100**
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	16.441.639.625,00	-	-	-	46.574.806.375,00	-
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	183.633.250,00	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	3.159.440.000,00	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174.392.747.566,00	91,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.609.844.500,00	2,00
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.980.000,00	7,00
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Dibawah Kapitalisasi	UNIT	Pembayaran di Muka	UNIT	Mutasi Antar OPD	UNIT	Saldo Akhir	UNIT
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.343.445.450,00**	**11**	**8.097.663.457.350,43**	**64.748**
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	52.595.040.000,00	1
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	12.915.320.000,00	1
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	2.084.389.783,00	1
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	93.089.817.000,00	7
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	55.404.256.000,00	10
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	24.022.534.932,00	14
7	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	2.172.480.000,00	-	46.606.709.316,57	15
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	497.900.000,00	1,00	195.533.505.000,00	5
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	5.479.783.250,00	25
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	4.553.815.000,00	3
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	6.689.550.000,00	1
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	3.570.225.000,00	1,00	25.383.728.500,00	18
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	10.990.031.450,00	-	1.888.730.060.020,43	3.803
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	5.908.000.000,00	2
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	6.155.360.000,00	1
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	1
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	5.779.200.000,00	2
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	5.735.000.000,00	1
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	18.540.480.000,00	3
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	23.285.829.000,00	2
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	2.286.375.000,00	1
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	704.950.000,00	-	8.018.088.625,00	6
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	939.429.000,00	7,00	6.171.200.000,00	8
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	3.468.430.000,00	2,00	4.914.232.642.298,00	738
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	24.989.572.500,00	14
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	505.295.360.337,50	59.977
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	68.769.874.637,93	44
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	11.037.600.000,00	3
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	10.561.600.000,00	1
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	61.544.062.150,00	39
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	6.164.704.000,00	1

Daftar Tanah Yang Disewa Dan Dipinjamkan Sebagian Luas Dari Keseluruhan Luas
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

Sewa

No.	OPD	Jenis Aset	Kode	Register	Luas (M2)	Tahun	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Sertifikat	No. Sertifikat	Penggunaan	Asal-usul	Nilai (Rupiah)	Perjanjian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	BPKAD	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	01.01.01.01.002	000029	1.695,00	1961	Jalan Hayam Wuruk, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur	Hak Pakai	28/06/1997	22.09.02.09.4.00047	Rmh Dinas. tmpt usaha (sewa) &kntr lembaga bantu..	Hibah	577.774.650,00	Perjanjian Sewa dengan G. Manggala Perdana Jaya, SH No. 593.1/840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 22-3-2021 (sewa sebagian luas 200 m2) Perjanjian Sewa dengan Desy Heryani Parwatha No. B.13.593.1/3231/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 1 Oktober 2021 (sewa sebagian luas 250 m2)
2	BPKAD	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	01.01.01.01.002	000034	960,00	1998	JL Nusa Indah 22,Denpasar	Hak Pakai	26/11/1998	22.09.02.06.4.00034	Rumah Dinas, gudang garase mobil (sewa)	Pembelian	489.120.000,00	Perjanjian Sewa dengan I Wayan Wide 593,1/1809/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 19 Oktober 2020 (sewa sebagian luas 220m2)
3	BPKAD	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	01.01.01.01.002	000052	733,00	1954	Jln. Pudak No. 3 Denpasar	Hak Pakai	20/09/2007	22.09.02.07.4.00037	Rumah Dinas, IDEYANA (sewa)	Hibah	515.665.500,00	Perjanjian sewa dengan Ikatan Doktor Ekonomi Udayana (IDEYANA) B.13.593.1/1389/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 2-6-2021 (sebagian luas 320m2)
4	BPKAD	Tanah Bangunan Gudang	01.01.01.02.003	000006	4.700,00	1954	Denpasar\Denpasar Timur\Ds. Sumerta\Jln. Hayam Wuruk No.151	Hak Pakai	31/08/1981	12	disewa untuk tempat Usaha dan Klinik	Hibah	3.995.000,00	Sewa Perpanjangan II oleh PT Klinik Semesta Mandiri No. B.13.032/3951/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 21 November 2022 (Sewa sebagian luas 2300 m2) dan sewa Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi (900m2) tanggal B.13.032/2157/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 31 Juli 2023
5	BPKAD	Tanah Bangunan Gudang	01.01.01.02.003	000055	1.490,00	1993	Batur Selatan Kintamani Bangli	Hak Pakai	13/09/1993	22.04.02.10.4.00006	Bangunan Gudang, kebun bunga potong (sewa)	Pembelian	32.035.000,00	Perjanjian Sewa dengan I Ketut Sandra No.593.1/655/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 2-3-2021 (sewa sebagian luas 1390 m2)
6	BPKAD	Tanah Bangunan Terminal Darat	01.01.01.02.007	000002	15.000,00	2020	Tabanan\Tabanan\Kelurahan Dauh Peken	Hak Pakai	30/03/1995	22.02.08.04.4.00033	Terminal/Stasiun Bus Pesiapan, kntr Gapensi tab..	Hibah	8.100.000.000,00	Perjanjian Sewa dengan Gapensi Tabanan No. 593.1/1443/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 10 Agustus 2020 (sewa sebagian luas 280m2)
7	BPKAD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000104	2.760,00	1954	Denpasar\Denpasar Timur\Ds. Sumerta Klod\Jln. Ir. Juanda No. 2 Niti Mandala Renon	Hak Pakai	22/06/1993	22.03.02.09.4.00031	Kantor	Hibah	1.280.640.000,00	Perjanjian Sewa dengan DPD Partai Demokrat perpanjangan I perjanjian nomor 593.1/101/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 11 Januari 2021 (sewa sebagian)
8	BPKAD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000244	1.250,00	2022	Buleleng\Buleleng\Kel. Kampung Anyar (Jln. Dewi Sartika)	Hak Pakai	19/07/2021	22.04.05.1.3.4.00016	Bangunan Tempat Usaha	Hibah	3.532.500.000,00	Perjanjian Sewa dengan Ketut Suartika nomor B.13.593.1/469/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 10 Februari 2022 (sebagian luas 353m2)
9	BPKAD	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	01.01.02.01.003	000011	10.375,00	1990	Tabanan\Baturiti\Ds. Baturiti	Hak Pakai	05/12/1990	28	Kolam Air Tawar	Pembelian	357.937.532,70	Perjanjian Sewa dengan Gde Ketut Nugrahita Pendit Nomor B.13.032/1936/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 10 Agustus 2023 (sewa sebagian 5000m2)
10	BPKAD	Tanah Sawah Irigasi	01.01.02.01.005	000433	832,00	1954	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Takmung	Pakai	03/12/2002	22.06.03.06.4.00034	Pertanian	Hibah	38.272.000,00	Perjanjian Sewa dengan Komang Artisti Sekar Linuwih No. 593.1/1634/UPTD.PBMD tanggal 10 Juli 2019 (sewa sebagian 500m2)
11	BPKAD	Tanah Sawah Irigasi	01.01.02.01.005	001552	19.390,00	2015	Denpasar\Denpasar Selatan\Ds. Pedungan	Hak Pakai	10/06/2015	22.09.03.05.4.00075	pembangunan pembangkit listrik tenaga gas dan uap	Hibah	39.070.850.000,00	Perjanjian Sewa dengan Perusahaan Daerah Provinsi Bali No.B.13.593.1/3979/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 29 Desember 2021 (Sewa sebagian luas 15760 m2)
12	BPKAD	Tanah Sawah Irigasi	01.01.02.01.005	001577	340,00	2015	klungkung\Klungkung\Ds. Gelgel	Hak Pakai	15/12/2015	22.06.01.14.4.00073	tempat menimbun bahan material	Hibah	24.140.000,00	Perjanjian Sewa dengan Nengah Madra No. 593.1/519/UPTD.PBMD tanggal 1 Maret 2019 (sewa sebagian 280m2)
13	BPKAD	Tanah Sawah Irigasi	01.01.02.01.005	001799	275,00	1954	Desa Ped\Nusa Panida\Klungkung	Hak Pakai	23/11/2020	22.06.04.13.4.00048	Pertanian, Warung (sewa)	Hibah	1.925.000,00	Perjanjian sewa dengan I Made Sukarta perpanjangan I No. B.13.032/2975/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 13 oktober 2023 (sebagian luas 120m2)

No.	OPD	Jenis Aset	Kode	Register	Luas (M2)	Tahun	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Sertifikat	No. Sertifikat	Penggunaan	Asal-usul	Nilai (Rupiah)	Perjanjian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	BPKAD	Tanah Sawah Irigasi	01.01.02.01.005	001804	1.300,00	1954	Badung\Kuta Utara\Desa Tibubeneng (Jl. Raya Semat)	Hak Pakai	12/07/2021	22.03.08.06.4.00367	tempat usaha	Hibah	8.656.700.000,00	Perjanjian Sewa dengan Drs. Made Ngurah Artana No. B.13.032/1407/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 12 Meil 2022 (Sewa Sebagian Luas 1230m2)
15	BPKAD	Tanah Tegalan	01.01.02.02.001	000026	6.330,00	1954	Badung\Kuta Utara\Ds. Tibubeneng	Hak Pakai	31/01/2005	22.03.08.06.4.00010	rmh sewa, akomodasi, penunjang & atraksi wisata	Hibah	1.731.255.000,00	Perjanjian Sewa Dengan CV. Berawa bali Utara No. B.13.032/782/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 23 Maret 2022 (Sewa Sebagian Luas 6330m2)
16	BPKAD	Tanah Tegalan	01.01.02.02.001	000633	2.260,00	1954	Gianyar\Gianyar\Ds. Lebih	Hak Pakai	24/05/2007	22.05.01.04.4.00017	Ruko BUMDES	Hibah	16.159.000,00	Perjanjian Sewa dengan Desa Lebih No. 593.1/8671/PPA.Aset tgl 15 Oktober 2014 perpanjangan I no 593.1/2292/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 17 November 2020 (Sewa Sebagian Luas)
17	BPKAD	Tanah Tegalan	01.01.02.02.001	000687	1.350,00	1954	Gianyar\Gianyar\Ds. Temesi	Hak Pakai	31/12/2002	22.05.01.14.4.00007	Koperasi Subak Lumbung Sari Temesi	Hibah	9.652.500,00	Perjanjian Sewa dengan Koperasi Krama Subak Lumbung Sari Desa Temesi No. 593.1/578/PPA.Aset tanggal 15-02-2016 perpanjangan I perjanjian nomor B.13.593.1/2070/UPTD.PBMD/BPKAD (sewa sebagian luas 100m2)
18	BPKAD	Tanah Tegalan	01.01.02.02.001	000938	770,00	1954	Gianyar\Tampaksiring\Ds. Pejeng Kaja	Hak Pakai	23/01/2006	22.05.07.04.4.00002	Pertanian, PDAM (sewa)	Hibah	5.505.500,00	Perjanjian Sewa dengam PDAM Gianyar 593.1/4106/UPT.P2.BPKAD tanggal 7 September 2018 (sewa sebagian luas 250m2)
19	BPKAD	Tanah Tegalan	01.01.02.02.001	001386	13.550,00	1954	Karangasem\Kubu\Ds. Sukadana	Hak Pakai	10/10/2004	22.08.08.08.4.00070	Pertanian, tower (sewa)	Hibah	23.035.000,00	Perjanjian Sewa dengan PLN Nomor B.13.032/347/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 26 Februari 2023 (sewa sebagian 225 m2)
20	BPKAD	Tanah Tegalan	01.01.02.02.001	001478	1.960,00	1954	Klungkung\Klungkung\Ds. Akah	Hak Pakai	24/12/2002	22.06.01.05.4.00043	Pertanian, reservori (sewa)	Hibah	19.600.000,00	Perjanjian Sewa dengan Badan Pengelola Air Minum Desa Akah B.13.032/1866/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 20 Juni 2022 (sebagian luas 200m2)
21	BPKAD	Tanah Tegalan	01.01.02.02.001	001599	375,00	1954	Klungkung\Dawan\Ds. Pesinggahan	Hak Pakai	15/02/2006	22.06.02.05.4.00052	Pertanian, warung(sewa)	Hibah	9.937.500,00	Perjanjian sewa dengan Wayan Sudiarsana 593.1/969/UPT.P2.BPKAD tanggal 28 Februari 2018, B.13.032/2708/UPTD.PBMD/BPKAD 19 September 2023 (sebagian luas 102m2)
22	BPKAD	Tanah Tegalan	01.01.02.02.001	001654	1.947,00	1954	Klungkung\Dawan\Ds. Sampalan Klod	Hak Pakai	24/10/2002	20	usaha penjualan material bahan bangunan	Hibah	51.595.500,00	Perjanjian Sewa dengan Gede Putrawan nomor B.13.032/4185/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 9 Desember 2022
23	BPKAD	Tanah Tegalan	01.01.02.02.001	001805	300,00	1954	Denpasar\Denpasar Barat\Ds. Padangsambian Klod	Hak Pakai	19/12/2002	22.09.01.11.4.00012	Pertanian, tempat usaha (sewa)	Hibah	59.850.000,00	Perjanjian Sewa dengan Ida Bagus Kompyang Gede 593.1/4774/UPT.P2.BPKAD tgl 22 Oktober 2018 (sewa sebagian luas 300m2)
24	BPKAD	Tanah Tegalan	01.01.02.02.001	001817	1.990,00	1954	Denpasar\Denpasar Timur\Ds. Penatih	Hak Pakai	19/12/2002	22.09.02.01.4.00013	rumah tinggal dan pesraman brahmacarya	Hibah	923.360.000,00	Perjanjian Sewa dgn Ida Bagus Ngurah Yama, Perpanjangan I perjanjian no B.13.593.1/3099/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 14-9-2021; Per Sewa dgn Dewa Alit Suandana, Perpanj I no B.13.032/1617/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 30-5-2022 (sewa sebagian)
25	BPKAD	Tanah Tegalan	01.01.02.02.001	001840	858,00	1954	Denpasar\Denpasar Timur\Ds. Sumerta Kauh	Hak Pakai	04/04/2005	22.09.02.07.4.00027	bangunan tempat tinggal (sewa)	Hibah	369.798.000,00	Perjanjian Sewa dengan Thomas Sutrisno No. 593.1/1937/UPTD.PBMD tgl 21 Oktober 2020 (sewa sebagian 212 m2) Perjanjian Sewa dengan I Ketut Kertayasa No. 593.1/1935/UPTD.PBMD tgl 21 Oktober 2020 (sewa sebagian luas 195 m2)
26	BPKAD	Tanah Tegalan	01.01.02.02.001	001867	909,00	1954	Denpasar\Denpasar Timur\Kel Dangin Puri Klod	Hak Pakai	04/04/2005	22.09.02.05.4.00129	toko dan kos-kosan	Hibah	421.776.000,00	Perjanjian Sewa dengan Dewi Ayu Indah, Perpanjangan I no. B.13.032/1637/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 30 Mei 2022 (sewa sebagian)
27	BPKAD	Tanah Tegalan	01.01.02.02.001	001883	10.023,00	1954	Denpasar\Denpasar Timur\Kel Dangin Puri Klod	Hak Pengelolaan	25/04/2020	22.09.02.05.5.00001	usaha kuliner	Hibah	11.706.864.000,00	Perjanjian Sewa dengan I Made Kembang Hartawan No. B.13.593.1/1219/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 10-5-2021 (sebagian luas 1000 m2)

No.	OPD	Jenis Aset	Kode	Register	Luas (M2)	Tahun	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Sertifikat	No. Sertifikat	Penggunaan	Asal-usul	Nilai (Rupiah)	Perjanjian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	BPKAD	Tanah Tegalan	01.01.02.02.001	001894	7.103,00	1954	Denpasar\Denpasar selatan\Kel. Pedungan	Hak Pakai	10/02/2007	22.09.03.05.4.00035	Pertanian	Hibah	217.984.000,00	Perjanjian sewa dengan PT Wisnukarya Putra Internasional No. 593.1/467/UPTD.PBMD tanggal 10 Pebruari 2020 (Sewa sebagian luas 923,72 m2) serta Perjanjian Sewa dengan I Rai Putra Sudanta (seluas 2000 m2) No. B.13.032/3527/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2023
29	BPKAD	Tanah Tegalan	01.01.02.02.001	001913	6.135,00	1954	Tabanan\Baturiti\Ds.Baturiti	Hak Pakai	01/03/1991	22.02.01.06.4.00029	warung, kantor, reservoir	Hibah	211.657.500,00	Perjanjian Sewa dengan Putu Witha No. 593.1/1772/UPTD.PBMD tgl 13 Oktober 2020 (sewa sebagian luas 500m2) Perjanjian Sewa dengan PDAM Tirta Amertha Buana No.593.1/1000/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 16-4-2021 (sewa sebagian luas 135 m2)
30	BPKAD	Tanah Lapangan Lainnya	01.01.03.01.025	000012	2.030,00	2020	Denpasar\Denpasar Barat\Kelurahan Tegal Kertha	Hak Pakai	16/08/2019	22.09.01.17.4.00016	Lapangan Olahraga, gudang (sewa)	Hibah	2.477.615.000,00	Perjanjian Sewa dengan Ni Luh Tuti Damayanti No. B.13.593,1/1912/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 2 Agustus 2021 (sewa sebagian luas 500 m2) Perjanjian Sewa dengan I Wayan Wide nomor B.13.593.1/3998/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 31 Desember 2021 (sewa sebagian luas 600 m2)
31	BPKAD	Tanah Lapangan Apel/Upacara	01.01.03.02.006	000001	3.725,00	1954	Denpasar\Denpasar Timur\Kel. Dangin Puri Klod	Hak Pakai	16/08/1993	22.03.02.05.4.00088	rumah makan dan pertokoan ...	Hibah	4.272.575.000,00	Perjanjian Sewa dgn IB Hartawan, Perpanjangan I no 593,1/2112/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 9-11-2020(sewa sebagian 700m2) Per Sewa dgn Pengadilan Barus, Perpanj I No 593,1/1396/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 29-7-2020(sewa sebagian 288m2) Perjanjian Sewa dgn A.A. Ngurah...
32	BPKAD	Tanah Lapangan Apel/Upacara	01.01.03.02.006	000002	1.605,00	1954	Denpasar\Denpasar Timur\Kel. Dangin Puri Klod	Hak Pakai	16/08/1993	22.03.02.05.4.00089	Parkir Utara, toko dan rumah makan (sewa)	Hibah	1.840.935.000,00	Perjanjian sewa denga I Nyoman Nuryana 593.1/1755/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 12 Oktober 2020 (sewa sebagian luas 441m2) dan Perjanjian Sewa dengan IB. Oka Suyatra Wibawa, SE593.1/1508/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 18 Agustus 2020 (sebagian luas 372m2)
33	BPKAD	Tanah Lapangan Apel/Upacara	01.01.03.02.006	000003	1.035,00	1954	Denpasar\Denpasar Timur\Kel. Dangin Puri Klod	Hak Pakai	16/08/1993	22.03.02.05.4.00090	Parkir Tengah	Hibah	1.187.145.000,00	Perjanjian Sewa PT. Grita Artha Kreamindo B.13.032/629/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 9 Maret 2022 (sebagian luas 290m2)
34	BPKAD	Tanah Untuk Jalan Propinsi	01.01.03.07.002	000076	19.285,00	1954	Klungkung\Dawan\Ds.Dawan Klod	Hak Pakai	02/03/2007	22.06.02.03.4.000001	Jalan	Hibah	511.052.500,00	Perjanjian Sewa dengan Ni Luh Sutresni No. B.13.593.1/305/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 31 Januari 2022 (Sebagian Luas 100m2)
35	BPKAD	Tanah Untuk Jalan Propinsi	01.01.03.07.002	000080	7.602,00	1993	Denpasar\Denpasar Timur\Ds. Sumerta Klod\Jl.Ir.H.Juanda	Hak Pakai	22/06/1993	22.03.02.09.4.00036	Areal Parkir	Hibah	8.719.494.000,00	Perjanjian Sewa Kerjasama Pengelolaan Parkir dg Kota Denpasar (Perumda BPS) addendum II no 075/1673/KB/B.Tapem Tanggal 8 Januari 2015 (sebagian luas 7550m2)
36	BPKAD	Tanah Tegalan	01.01.02.02.001	001931	8.870,00	1954	Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten tabanan	Hak Pakai	26/11/1990	22.02.05.04.4.00005	menara telekomunikasi bersama	Hibah	66.525.000,00	Perjanjian sewa Nomor B.13.032/4073/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 29 November 2022 dengan PT. Dayamitra Telekomunikasi (400m2)
37	BPKAD	Tanah Sawah Irigasi	01.01.02.01.005	001793	1.700,00	2005	Badung\Mengwi\Ds. Kapal	Hak Pakai	31/12/2005	Akan Di Proses/Persil 18	Balai Subak Tegan, Tempat Usaha (sewa)	Hibah	42.600.000,00	Perjanjiann sewa dengan Drs. I Made Gede Nuada B.13.593.1/2027/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27-8-2021 (sebagian luas 200m2)
38	BPKAD	Tanah Tegalan	01.01.02.02.001	002085	14.442,00	2010	Des.Singapadu,Kec.Sukawati,Kab.Gianyar	Hak Pakai	31/12/2010	22.05.03.07.4.00024	Workshop Bina Marga dan pengembangan Bali Zoo Park	Hibah	389.934.000,00	Perjanjian Sewa dengan Bali Zoo. perpanjangan II nomor 593,1/2021/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 2 Nov 2020 (sewa sebagian Luas 11622 m2)
39	BPKAD	Tanah Sawah Irigasi	01.01.02.01.005	001717	2.320,00	1954	Desa Unggasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung	Hak Pakai	12/07/2023	22.03.09.02.4.00546	Untuk Taman Suci (sewa)	Hibah	953.520.000,00	Perjanjian Sewa dengan Yayasan Kepustakaan Bung Karno No. B.13.593.1/1739/UPTD.PBM/BPKAD tanggal 10 Juni 2022 (Sewa Sebagian Luas 2600m2)

Pinjam Pakai

No.	OPD	Jenis Aset	Kode	Register	Luas (M2)	Tahun	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Sertifikat	No. Sertifikat	Penggunaan	Asal-usul	Nilai (Rupiah)	Perjanjian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	BPKAD	Tanah Bangunan Gudang	01.01.01.02.003	000056	22.350,00	2020	Karangasem\Rendang\Desa Rendang	Hak Pakai	02/12/2019	22.08.03.03.4.00046	Taman Gumi Banten dan BPP	Hibah	54.757.500,00	Perjanjian Pinjam Pakai No. B.13.593/1436/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 02-06-2021 (sebagian 15.000m2)
2	BPKAD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000016	1.085,00	1954	Tabanan\Tabanan\Ds.Bongan	Hak Pakai	25/07/2007	22.02.08.02.4.00012	Polsek Tabanan	Hibah	47.197.500,00	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kepolisian Resor Tabanan, Nomor : 593.1/246/UPT.P2.BPKAD, Tanggal 28 Januari 2019 (PP Sebagian Luas 1000m2)
3	BPKAD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000050	2.340,00	1988	Denpasar\Denpasar Timur\Ds. Dangin Puri Kangin	Hak Pakai	22/06/1993	22.03.02.05.4.00018	Gedung Kantor	Pembelian	1.646.190.000,00	Perjanjian Pinjam Pakai Dengan BABINMINVETCADDAM IX/UDAYANA NOMOR : B.13.032/3265/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 November 2023 (PP Sebagian luas 680m2)
4	BPKAD	Tanah Sawah Irigasi	01.01.02.01.005	000495	5.058,00	1954	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Tusan	Hak Pakai	24/10/2002	22.06.03.09.4.00018	Jalan	Hibah	146.682.000,00	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Nomor 593/704/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 08 Maret 2021 (PP Sebagian Luas 5002)
5	BPKAD	Tanah Sawah Irigasi	01.01.02.01.005	001564	2.400,00	2015	Gianyar\Gianyar\Ds. Beng	Hak Pakai	28/12/2015	22.05.01.07.4.00004	Tempat Pengolahan Sampah	Hibah	600.000.000,00	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Gianyar Nomor B.13.593/2045/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 31-08-2021 (PP Sebagian Luas 200m2)
6	BPKAD	Tanah Tegalan	01.01.02.02.001	000477	13.600,00	1954	Bangli\Bangli\Ds. Pengotan	Hak Pakai	18/09/2002	22.07.01.07.4.00005	Tempat Penelitian Fakultas	Hibah	536.520.000,00	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Fakultas Peternakan Universitas Udayana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : B.13.593/1497/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 11-06-2021(Pinjam Pakai Sebagian)
7	BPKAD	Tanah Tegalan	01.01.02.02.001	000480	4.730,00	1954	Bangli\Bangli\Ds. Pengotan	Hak Pakai	21/12/2021	22.07.01.07.4.00016	Tempat Penelitian Fakultas	Hibah	186.598.500,00	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Fakultas Peternakan Universitas Udayana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : B.13.593/1497/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 11-06-2021(Pinjam Pakai Sebagian)
8	BPKAD	Tanah Tegalan	01.01.02.02.001	000855	3.615,00	1954	Gianyar\Payangan\Ds. Buahan	Hak Pakai	30/12/2002	22.05.05.05.4.00004	Untuk Jalan	Hibah	386.805.000,00	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Gianyar Nomor 593/199/UPTD.PBMD tanggal 16 januari 2020 (PP Sebagian Luas 243)
9	BPKAD	Tanah Tegalan	01.01.02.02.001	001789	1.330,00	1954	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Ped	Hak Pakai	02/04/2024	22.06.04.13.4.00056	Koramil	Hibah	9.310.000,00	Perjanjian pinjam pakai dengan Koramil NOMOR : B.13.032/445/UPTD.PBMD/BPKAD (sebagian luas 1000m2)
10	BPKAD	Tanah Tegalan	01.01.02.02.001	002085	14.442,00	2010	Des.Singapadu,Kec.Sukawati,Kab.Gianyar	Hak Pakai	31/12/2010	22.05.03.07.4.00024	Workshop Bina Marga dan pengembangan Bali Zoo Park	Hibah	389.934.000,00	Perjanjian Pinjam Pakai dgn Pemkab Gianyar Nomor 593/4224/UPT.P2.BPKAD tgl 24 Sep 2018 (PP Sebagian Luas 3000)
11	BPKAD	Tanah Tegalan	01.01.02.02.001	002098	16.108,00	1954	Subak.Anggasari/Br.Unggasan/Kec.Kuta selatan/Badung	Hak Pakai	15/11/2011	22.03.09.02.4.00088	Menara Komunikasi, TPS, Balai Penyuluhan	Hibah	6.620.388.000,00	Perjanjian Pinjam Pakai dgn Kejaksaan Agung RI No B.13.593/1344/UPTD.PBMD/BPKAD Tgl 25-05-2021 (PP Sebagian Luas 100m2 dan 5000m2)
12	BPKAD	Tanah Tegalan	01.01.02.02.001	002174	15.855,00	2022	Kel. Semarapura Kaja, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung	Hak Pakai		24	Disdik dan Dinas Kearsipan Kab. Klungkung	Hibah	1.300.110.000,00	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pekab Klungkung No. B.13.593/1436/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 02-06-2021 (sebagian 3.310 m2)
13	BPKAD	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	01.01.02.02.002	000005	5.470,00	1996	Kab. Gianyar, Kec. Blahbatuh Ds Bedulu (Sebelah Pura Samuan Tiga)	Hak Pakai	12/09/1996	HP 8	PTPST&PLUT	Hibah	853.320.000,00	perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Gianyar No B.13.593/2045/UPTD.PBMD/BPKAD Tgl 31-08-2021(sebagian luas 2500m2)
14	BPKAD	Tanah Lapangan Lainnya	01.01.03.01.025	000006	6.500,00	2010	Ds.Kerobokan Kaja,Kc.Kuta Utara,Kab.Badung	Hak Pakai	02/02/2011	22.03.08.04.4.00011	GOR	Hibah	2.694.250.000,00	Perjanjian pinjam pakai dengan Pemkab. Badung No. 593.1/1221/UPTD.BPKAD tanggal 1 Juli 2020 (pinjam pakai sebagian untuk GOR)
15	BPKAD	Tanah Sawah Irigasi	01.01.02.01.005	001222	270,00	2010	Ds.Sading,Kec.Mengwi,Kab.Badung	Hak Pakai	02/02/2011	22.03.05.14.4.00019	Balai Subak Delod Sema	Hibah	23.490.000,00	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No. 593/3459/UPTD.PBMD tanggal 10 Desember 2019 (PP Sebagian Luas 200m2)
16	BPKAD	Tanah Tegalan	01.01.02.02.001	000185	2655	1954	Badung\Mengwi\Ds. Sobangan	Hak Pakai	37610	22.03.05.13.5.00075	Pertanian	Hibah	22.766.625,00	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No. B.31.000.2.3.2/433/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 25 Februari 2025
17	BPKAD	Tanah Tegalan	01.01.02.02.001	000224	1943	1954	Badung\Mengwi\Ds. Sobangan	Hak Pakai	37610	22.03.05.13.5.00114	Pertanian	Hibah	16.661.225,00	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No. B.31.000.2.3.2/433/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 25 Februari 2025

No.	OPD	Jenis Aset	Kode	Register	Luas (M2)	Tahun	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Sertifikat	No. Sertifikat	Penggunaan	Asal-usul	Nilai (Rupiah)	Perjanjian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	BPKAD	Tanah Tegalan	01.01.02.02.001	000226	4985	1954	Badung\Mengwi\Ds. Sobangan	Hak Pakai	37610	22.03.05.13.5.00116	Pertanian	Hibah	42.746.375,00	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No. B.31.000.2.3.2/433/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 25 Februari 2025
19	BPKAD	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	01.01.02.02.002	000001	1425	2010	Jalan Supratman, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	Hak Pakai	22/12/2010	22.09.02.12.4.00043	Monumen Situs Kerajaan Kertalangu	Hibah	49.065.857,13	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkot Denpasar No. B.31.000.2.3.2/1513/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 18 Juli 2025
20	BPKAD	Tanah Bangunan Rumah Sakit	01.01.01.04.003	000033	9962		Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung			Belum bersertifikat	Rumah Sakit Tipe C	Hibah	3.540.000.000,00	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No. B.31.000.2.3.2/1718/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 11 Agustus 2025
21	BPKAD	Tanah Tegalan	01.01.02.02.001□	002101	10584		Ds.Sembung/Kec.Mengwi/Kab.Badung	Hak Pakai	12/08/2015	22.03.05.07.4.00093	Kantor dan Barak Batalyon B Satbrimob Polda Bali	Hibah	158.625.000,00	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kepolisian Daerah Bali No. B.31.000.2.3.2/2093/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 23 September 2025

Aset Tetap Tanah Yang Masi Bermasalah
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

No.	OPD	Jenis Aset	Kode	Register	Luas (M2)	Tahun	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Sertifikat	No. Sertifikat	Penggunaan	Asal-usul	Nilai (Rp)
1	BPKAD	Tanah Kebun Entres	01.01.02.03.001	000001	2.465.000,00	1951	Des.Pemuteran/Kec.Grogak/Kab. Buleleng	Hak Pakai	31/12/1951	Akan Diproses/ Akte jual beli no.14	Perkebunan	Pembelian	66.924.550.000
2	BPKAD	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	01.01.01.04.026	000006	3.000,00	1954	Densel/Desa Sidakarya Dps	Hak Pakai	31/12/1954	HP 4	Gedung PDI	Pembelian	2.007.000.000
3	DISKELKAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	400,00	1954	Jl A Yani Singaraja	Belum Sertifikat			Bangunan Kantor Pemerintah	Pembelian	15.000.000

Lampiran 30

Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin

Pemerintah Provinsi Bali

Per 31 Desember 2025

No	SKPD	Saldo Awal	UNIT	Belanja Modal	UNIT	Hutang	UNIT	Kapitaliasi Belanja Non Modal	UNIT	Kapitaliasi Belanja Non Modal	UNIT	Penerimaan Hibah	UNIT
	Jumlah	**2.196.293.227.099,70**	**224.089**	**259.183.049.267,80**	**15.005**	**1.580.232.319,00**	**24**	**-**	**-**	**657.552.420,00**	**83**	**24.711.451.683,00**	**3.583**
1	Sekretariat DPRD	39.134.316.576,00	2.757,00	11.814.529.577,00	729,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	9.854.458.610,94	753,00	1.129.248.363,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	2.371.025.464,00	159,00	1.003.224.528,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	73.950.287.351,50	5.846,00	32.231.541.264,00	306,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	38.554.543.950,56	972,00	1.337.213.952,00	87,00	-	-	-	-	327.819.297,00	4,00	2.333.500.000,00	129,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	71.333.908.033,84	3.517,00	23.287.293.029,80	78,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	764.195.325.040,26	31.240,00	67.667.187.165,00	1.380,00	1.580.232.319,00	24,00	-	-	164.943.831,00	14,00	10.842.751.195,00	2.612,00
8	Dinas Kebudayaan	41.818.523.832,32	2.098,00	1.877.016.565,00	195,00	-	-	-	-	11.400.002,00	12,00	176.000.000,00	1,00
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	22.349.724.779,51	1.332,00	1.143.577.589,00	109,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	5.850.583.975,00	556,00	629.293.989,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	6.142.419.578,00	645,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	37.625.418.193,16	5.358,00	2.930.265.033,00	251,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	18.656.747.094,23	1.568,00	2.428.144.692,00	-	-	-	-	-	-	-	49.002.750,00	-
14	Inspektorat	16.471.135.748,00	1.375,00	1.553.971.181,00	186,00	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	3.393.722.520,00	274,00	535.810.750,00	15,00	-	-	-	-	7.881.000,00	-	39.794.900,00	150,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6.490.415.949,00	384,00	850.879.796,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	10.521.464.899,00	640,00	438.364.795,00	55,00	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70.500.524.989,20	2.191,00	5.103.710.063,00	405,00	-	-	-	-	30.340.740,00	2,00	4.868.931.444,00	17,00
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.380.123.118,66	3.957,00	1.263.542.599,00	47,00	-	-	-	-	-	-	25.200.000,00	15,00
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	6.832.263.199,00	584,00	516.874.497,00	62,00	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	4.085.756.645,69	341,00	1.224.062.373,00	28,00	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	4.470.754.210,00	492,00	239.645.800,00	-	-	-	-	-	9.300.000,00	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	5.392.028.714,00	500,00	53.628.000,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	96.311.028.097,04	3.676,00	12.479.420.131,00	621,00	-	-	-	-	8.991.000,00	2,00	-	-
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9.934.736.435,98	1.467,00	321.187.130,00	25,00	-	-	-	-	-	-	191.957.000,00	7,00
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	677.165.723.827,82	141.466,00	83.407.975.614,01	10.075,00	-	-	-	-	94.016.550,00	45,00	5.477.808.987,00	497,00
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	45.275.690.462,00	3.544,00	154.292.700,00	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	22.180.217.620,33	1.904,00	133.674.350,00	5,00	-	-	-	-	-	-	462.122.368,00	106,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.184.571.305,68	1.472,00	971.637.242,00	153,00	-	-	-	-	2.860.000,00	4,00	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	39.864.096.818,02	2.132,00	1.590.303.800,00	68,00	-	-	-	-	-	-	244.383.039,00	49,00
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	8.001.690.060,93	889,00	865.532.700,00	82,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Mutasi Tambah																
Reklasifikasi						Koreksi Pencatatan Saldo Awal	UNIT	Reklasifikasi dari Aset Extra ke Intra	UNIT	Mutasi Antar OPD	UNIT	Salah Pos Belanja Modal	UNIT	Penghapusan	UNIT
Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	UNIT	Dari Aset Lainnya	UNIT	Dari Properti Investasi	UNIT										
51.760.700.823,13	**2.123**	**69.960.525,00**	**1**	**-**	**-**	**6.906.129.661,00**	**47**	**20.916.485,00**	**2**	**15.686.440.268,00**	**40**	**62.674.945,00**	**276,00**	**-**	**-**
368.235.457,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.481.713.341,00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	6.004.162.267,00	13,00	-	-	107.892.000,00	3,00	-	-	-	-
10.802.051.000,00	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.708.355.996,00	11,00	-	-	-	-
653.299.003,13	48,00	69.960.525,00	1,00	-	-	545.205.000,00	4,00	-	-	1.543.618.337,00	12,00	-	-	-	-
53.149.999,00	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	20.916.485,00	2,00	-	-	-	-	-	-
59.396.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165.880.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.690.600,00	-	4.770.005,00	-	-	-
11.721.859,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212.300.000,00	1,00	-	-	-	-
115.240.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.696.800,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.898.998,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.800.419.995,00	9,00	-	-	-	-
13.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.991.768.308,00	2.011,00	-	-	-	-	-	-	-	-	507.499.999,00	1,00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241.950.000,00	3,00	-	-	-	-
289.393.800,00	39,00	-	-	-	-	356.762.394,00	30,00	-	-	-	-	57.904.940,00	276,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147.468.999,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mutasi Kurang															
Pembayaran Hutang	UNIT	Pengeluaran Hibah	UNIT	Reklasifikasi						Koreksi Pencatatan Saldo Awal	UNIT	Dibawah Kapitalisasi	UNIT	Pembayar di Muka	UNIT
				Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	UNIT	Ke Aset Lainnya	UNIT	Ke Properti Investasi	UNIT						
-	-	-	-	2.372.188.173,00	50,00	24.785.709.468,95	2.073,00	-	-	7.322.963.199,02	102,00	3.687.847.021,63	2.705,00	-	-
-	-	-	-	368.235.457,00	-	938.508.691,00	-	-	-	-	-	1.900.000,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.888.398,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2.620.120.825,08	-	-	-	-	-	32.234.400,00	-	-	-
-	-	-	-	200.324.541,00	6,00	620.531.300,00	70,00	-	-	-	-	425.710.000,00	100,00	-	-
-	-	-	-	-	-	1.527.613.703,00	148,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	453.326.079,00	19,00	2.599.284.681,72	182,00	-	-	501.600.000,00	3,00	219.977.430,00	910,00	-	-
-	-	-	-	35.549.999,00	4,00	699.019.500,00	67,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.567.519.699,00	64,00	-	-	-	-
-	-	-	-	59.396.400,00	-	297.648.975,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	279.766.380,00	41,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	28.479.000,00	1,00	1.186.396.746,74	168,00	-	-	-	-	67.800.000,00	2,00	-	-
-	-	-	-	157.000.000,00	-	862.116.764,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	229.850.000,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	147.117.800,00	23,00	-	-	-	-	39.794.900,00	150,00	-	-
-	-	-	-	115.240.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	327.498.228,00	69,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	58.696.800,00	3,00	603.415.420,00	131,00	-	-	-	-	15.655.000,00	59,00	-	-
-	-	-	-	-	-	433.092.368,00	107,00	-	-	-	-	250.000,00	1,00	-	-
-	-	-	-	30.898.998,00	-	240.513.000,00	-	-	-	-	-	24.153.950,00	-	-	-
-	-	-	-	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	63.950.450,00	39,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	367.069.600,00	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	321.012.000,00	1,00	998.615.318,00	112,00	-	-	881.800.000,00	7,00	1.400.997.335,00	671,00	-	-
-	-	-	-	-	-	818.694.932,53	162,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	395.269.700,00	14,00	7.328.023.384,34	467,00	-	-	372.043.500,00	28,00	1.452.512.758,63	808,00	-	-
-	-	-	-	-	-	557.122.252,00	97,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	135.258.999,00	2,00	26.767.000,00	4,00	-	-	-	-	482.850,00	3,00	-	-
-	-	-	-	-	-	950.845.530,00	136,00	-	-	-	-	490.000,00	1,00	-	-
-	-	-	-	-	-	94.595.400,00	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Mutasi Antar OPD	UNIT	Saldo Akhir	UNIT
15.686.440.268,00	**26,00**	**2.502.919.368.695,03**	**239.765**
2.796.173.341,00	-	47.212.264.121,00	3.486,00
-	-	10.983.706.973,94	753,00
-	-	3.368.361.594,00	159,00
11.112.136.331,00	-	96.899.050.400,42	6.152,00
-	-	47.418.565.625,56	1.032,00
-	-	106.603.994.356,64	3.466,00
9.899.996,00	6,00	843.478.434.228,67	34.215,00
-	-	43.201.520.899,32	2.243,00
-	-	17.946.699.154,51	1.379,00
-	-	6.182.228.989,00	576,00
-	-	5.862.653.198,00	604,00
-	-	39.273.007.479,42	5.438,00
-	-	20.358.578.366,69	1.568,00
-	-	17.806.978.788,00	1.560,00
-	-	4.002.596.470,00	267,00
-	-	7.341.295.745,00	384,00
-	-	10.632.331.466,00	626,00
-	-	79.884.436.816,20	2.425,00
-	-	22.235.523.349,66	3.911,00
1.685.540.000,00	6,00	11.199.350.741,00	649,00
-	-	5.309.819.018,69	369,00
-	-	4.655.749.560,00	453,00
-	-	5.078.587.114,00	485,00
82.690.600,00	14,00	144.613.592.282,04	5.506,00
-	-	9.871.135.633,45	1.340,00
-	-	757.185.926.889,86	150.559,00
-	-	44.872.860.910,00	3.466,00
-	-	22.776.014.338,33	2.015,00
-	-	17.144.028.697,68	1.625,00
-	-	40.747.448.127,02	2.112,00
-	-	8.772.627.360,93	942,00

Lampiran 31

Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Pemerintah Provinsi Bali

Per 31 Desember 2025

No	SKPD	Saldo Awal	UNIT	Belanja Modal	UNIT	Hutang	UNIT	Pembayar di Muka	UNIT	Kapitaliasi Belanja Non Modal	UNIT	Penerimaan Hibah	UNIT
	Jumlah	**3.850.274.091.822,14**	**4.376**	**240.493.997.597,02**	**126,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**287.511.064,00**	**-**	**102.964.593.161,00**	**71,00**
1	Sekretariat DPRD	13.745.500.034,11	18,00	19.008.349.672,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	23.693.777.217,04	12,00	143.931.624,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	646.017.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	33.129.483.733,10	40,00	140.279.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	13.046.651.038,00	83,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	329.139.150.674,98	22,00	50.968.959.245,78	14,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	618.678.064.584,90	125,00	19.288.412.307,07	29,00	-	-	-	-	-	-	20.203.942.481,00	30,00
8	Dinas Kebudayaan	69.151.262.409,58	60,00	1.153.371.254,76	3,00	-	-	-	-	-	-	367.500.900,00	3,00
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	22.950.748.326,08	120,00	2.126.305.533,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	8.697.575.714,00	9,00	267.978.939,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	5.277.990.461,06	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	63.023.039.850,41	94,00	5.051.564.116,94	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	35.672.998.276,01	163,00	-	-	-	-	-	-	-	-	53.098.488.171,00	8,00
14	Inspektorat	11.498.425.303,87	15,00	204.616.959,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	1.493.928.545,00	13,00	-	-	-	-	-	-	287.511.064,00	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.345.336.877,06	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	1.811.113.920,93	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.663.383.052,00	10,00	2.041.600.840,36	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.330.008.810,40	38,00	468.631.491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	8.474.536.500,43	26,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	1.854.206.011,00	8,00	235.924.035,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	7.923.653.691,20	13,00	127.932.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	1.456.321.518,00	10,00	9.758.010,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	484.199.551.179,21	100,00	12.712.193.115,00	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	21.097.975.924,00	47,00	8.897.856.649,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	1.760.813.942.327,98	3.023,84	117.044.345.888,50	46,00	-	-	-	-	-	-	2.781.848.613,00	25,00
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	84.305.604.720,05	168,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	32.771.449.321,83	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.675.994.127,94	18,00	268.701.415,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	153.809.765.759,90	97,00	333.285.501,00	1,00	-	-	-	-	-	-	26.512.812.996,00	5,00
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	4.896.634.912,07	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Mutasi Tambah											
		Reklasifikasi						Koreksi Pencatatan Saldo Awal	UNIT	Reklasifikasi dari Aset Extra ke Intra	UNIT	Mutasi Antar OPD	UNIT
		Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	UNIT	Dari Aset Lainnya	UNIT	Dari Properti Investasi	UNIT						
	Jumlah	**308.028.076.375,06**	**73,00**	**107.521.964,90**	**-**	**-**	**-**	**69.073.628.461,95**	**54,00**	**10.000.000,00**	**1,00**	**71.757.211.647,00**	**19,00**
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.570.027.171,00	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	658.215.000,00	28,00	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	57.521.964,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	174.021.915,00	1,00	-	-	-	-	6.838.820.131,31	2,00	-	-	-	-
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	1,00	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	108.087.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	7.350.724.000,00	4,00	-	-	13.456.263.966,00	15,00
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	207.523.618,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	285.776.081.030,00	68,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.121.607.178,66	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	19.714.403.587,40	2,00	50.000.000,00	-	-	-	54.225.869.330,64	20,00	-	-	5.730.920.510,00	4,00
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	926.352.046,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Mutasi Kurang											
		Salah Pos Belanja Modal	UNIT	Penghapusan	UNIT	Pembayaran Hutang	UNIT	Pengeluaran Hibah	UNIT	Reklasifikasi			
										Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	UNIT	Ke Aset Lainnya	UNIT
	Jumlah	**14.319.000,00**	**1**	**-**	**-**	**315.381.323,60**	**1**	**-**	**-**	**295.434.045.933,06**	**54**	**19.421.068.621,34**	**29,00**
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	79.087.944,00	-	89.820.697,37	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	29.000.365,00	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.753.000,00	4,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	256.336.800,00	-	-	-	32.140.098.000,00	11,00	-	-
7	Dinas Kesehatan	14.319.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	15.251.228.136,00	19,00	778.423.188,99	2,00
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	896.666.364,00	3,00	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	34.056.398,40	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.445.590.100,00	10,00
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	11.721.859,00	1,00	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	41.504.723,60	1,00	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.600.000,00	1,00
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	246.712.778.727,00	19,00	-	-
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	225.672.914,66	1,00	284.606.829,00	3,00
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	-	17.539.800,00	-	-	-	-	-	1.528.886.805,98	8,00
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	53.735.225,00	-	133.388.000,00	1,00
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Ke Properti Investasi	UNIT	Koreksi Pencatatan Saldo Awal	UNIT	Dibawah Kapitalisasi	UNIT	Pembayar di Muka	UNIT	Mutasi Antar OPD	UNIT	Saldo Akhir	UNIT
	Jumlah	**-**	**-**	**38.644.465.648,25**	**18**	**137.860.892,60**	**12**	**17.355.000.000,00**	**-**	**71.757.211.647,00**	**22**	**4.199.917.279.027,22**	**4.583**
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.584.941.064,74	18,00
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.808.708.476,04	12,00
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646.017.000,00	1,00
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.839.789.904,10	41,00
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.589.113.038,00	107,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	19.478.679,60	1,00	17.355.000.000,00	-	-	-	330.394.718.406,06	24,00
7	Dinas Kesehatan	-	-	8.099.991.035,61	3,00	35.109.333,00	6,00	-	-	-	-	641.004.190.725,68	156,00
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	97.000.000,00	1,00	69.688.468.200,34	63,00
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	418.724.710,00	5,00	-	-	-	-	-	-	24.658.329.149,08	119,00
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.965.554.653,61	9,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.277.990.461,06	8,00
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.148.634.568,95	99,00
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	52.570.027.171,00	1,00	40.562.857.142,01	179,00
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.691.320.403,87	15,00
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.781.439.609,00	13,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.345.336.877,06	10,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.811.113.920,93	4,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.871.002.786,76	10,00
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.798.640.301,40	38,00
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.474.536.500,43	26,00
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.090.130.046,00	8,00
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.051.585.691,20	13,00
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	9.758.010,00	1,00	-	-	-	-	1.411.721.518,00	9,00
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	27.344.258,00	2,00	-	-	19.090.184.476,00	20,00	516.857.517.863,21	143,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.607.160.008,00	47,00
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	-	-	30.125.749.902,64	10,00	39.808.000,00	2,00	-	-	-	-	1.928.649.345.748,90	3.100,84
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.305.604.720,05	168,00
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.771.449.321,83	13,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	6.362.612,00	-	-	-	-	-	6.677.561.751,94	19,00
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.655.864.256,90	103,00
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.896.634.912,07	7,00

Lampiran 32

Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pemerintah Provinsi Bali

Per 31 Desember 2025

No	SKPD	Saldo Awal	UNIT	Belanja Modal	UNIT	Hutang	UNIT	Pembayar di Muka	UNIT	Kapitaliasi Belanja Non Modal	UNIT	Penerimaan Hibah	UNIT
	Jumlah	**4.335.363.075.122,41**	**1.050**	**240.687.598.599,81**	**85**	**1.143.700.000,00**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.117.342.734.175**	**20**
1	Sekretariat DPRD	2.096.630.480,00	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	333.387.032,17	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	157.065.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	3.243.817.777,00	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	12.402.514.658,00	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.393.816.000,00	1,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	17.280.000,00	1,00	1.446.168.209,45	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	12.529.311.204,61	54,00	8.358.298.210,00	7,00	1.143.700.000,00	1,00	-	-	-	-	603.990.230,00	9,00
8	Dinas Kebudayaan	3.123.309.650,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.274.991.000,00	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	39.324.062.164,69	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.754.249.000,00	1,00
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	264.662.691,69	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	131.691.734,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	2.512.547.120,00	22,00	42.034.539,36	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1.925.726.975,00	8,00	38.632.405,00	2,00	-	-	-	-	-	-	634.229.488.611,00	2,00
14	Inspektorat	129.460.000,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	190.834.765,00	6,00	159.573.378,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12.525.000,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	34.380.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	586.440.500,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.714.425.400,00	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	41.321.500,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	23.325.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	137.978.800,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	4.050.660.439.540,88	510,00	228.684.525.984,00	69,00	-	-	-	-	-	-	448.470.926.087,66	4,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	37.889.000,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	20.440.920.533,51	129,68	-	-	-	-	-	-	-	-	31.057.000,00	1,00
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	6.856.031.580,16	47,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	5.817.304.206,70	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	853.089.800,00	9,00	36.452.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	169.833.720.509,00	42,00	1.764.848.474,00	1,00	-	-	-	-	-	-	8.584.216.246,00	2,00
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	88.047.500,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Mutasi Tambah											
		Reklasifikasi						Koreksi Pencatatan Saldo Awal	UNIT	Reklasifikasi dari Aset Extra ke Intra	UNIT	Mutasi Antar OPD	UNIT
		Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	UNIT	Dari Aset Lainnya	UNIT	Dari Properti Investasi	UNIT						
	Jumlah	**131.649.049.103**	**31**	**41.165.806.000**	**2**	**-**	**-**	**115.055.000**	**5**	**-**	**-**	**634.625.999.436**	**7**
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	200.324.541,00	6,00	27.048.506.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.510.825,00	5,00
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	131.156.060.232,00	23,00	14.117.300.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	634.229.488.611,00	2,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	292.664.330,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	115.055.000,00	5,00	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Mutasi Kurang											
		Salah Pos Belanja Modal	UNIT	Penghapusan	UNIT	Pembayaran Hutang	UNIT	Pengeluaran Hibah	UNIT	Reklasifikasi			
										Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	UNIT	Ke Aset Lainnya	UNIT
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**219.013.219.352,00**	**31,00**	**866.370.916,85**	**5,00**
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.280.000,00	1,00
7	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	59.386.666,00	1,00	165.074.698,48	-
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	8.880.000,00	1,00	248.292.725,00	4,00
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	218.944.952.686,00	29,00	435.723.493,37	-
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Ke Properti Investasi	UNIT	Koreksi Pencatatan Saldo Awal	UNIT	Dibawah Kapitalisasi	UNIT	Pembayar di Muka	UNIT	Mutasi Antar OPD	UNIT	Saldo Akhir	UNIT
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**634.625.999.436,00**	**7,00**	**5.647.587.427.731,03**	**1.158**
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.096.630.480,00	9,00
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333.387.032,17	4,00
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.065.000,00	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.243.817.777,00	19,00
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.045.161.199,00	88,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.446.168.209,45	4,00
7	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.410.838.280,13	70,00
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.398.300.650,00	20,00
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.078.311.164,69	26,00
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.662.691,69	4,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.691.734,00	4,00
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.554.581.659,36	24,00
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	634.229.488.611,00	2,00	2.103.697.480,00	10,00
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.460.000,00	4,00
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.408.143,00	6,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.525.000,00	4,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.380.000,00	1,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586.440.500,00	10,00
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.714.425.400,00	19,00
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.321.500,00	1,00
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.325.000,00	1,00
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.978.800,00	3,00
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	396.510.825,00	5,00	5.287.541.553.451,17	575,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.889.000,00	2,00
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.764.641.863,51	132,68
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.856.031.580,16	47,00
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.817.304.206,70	9,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.004.597.200,00	14,00
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.182.785.229,00	45,00
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.047.500,00	2,00

Lampiran 33

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

Pemerintah Provinsi Bali

Per 31 Desember 2025

No	SKPD	Saldo Awal	UNIT	Belanja Modal	UNIT	Hutang	UNIT	Pembayar di Muka	UNIT	Kapitaliasi Belanja Non Modal	UNIT	Penerimaan Hibah	UNIT
	Jumlah	**98.441.316.502,04**	**346.150,00**	**31.596.980.320,00**	**187.508,00**	**1.964.700.000,00**	**1,00**	**-**	**-**	**1.999.998,00**	**10,00**	**315.612.875,00**	**8,00**
1	Sekretariat DPRD	396.341.550,00	635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	940.603.500,00	28,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	738.150.322,00	774,00	44.799.600,00	590,00	-	-	-	-	1.999.998,00	10,00	-	-
5	Dinas Perhubungan	20.620.000,00	63,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	23.037.000,00	23,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	379.480.520,00	122,00	42.000.000,00	2,00	1.964.700.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Kebudayaan	1.815.924.136,90	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	11.573.000,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	550.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	24.500.000,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Inspektorat	8.457.505,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	45.232.000,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.100.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	30.320.000,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70.477.300,00	304,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	811.019.140,00	260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.400.000,00	2,00
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	1.568.117.500,00	59,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	2.600.000,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	26.300.000,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	990.331.160,00	17,00	298.680.549,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	163.263.277,00	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	88.003.017.290,24	342.977,00	31.211.500.171,00	186.914,00	-	-	-	-	-	-	310.212.875,00	6,00
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	1.950.260.364,90	154,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	4.696.000,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	235.099.400,00	58,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	159.245.536,00	34,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	21.000.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Mutasi Tambah											
		Reklasifikasi						Koreksi Pencatatan Saldo Awal	UNIT	Reklasifikasi dari Aset Extra ke Intra	UNIT	Mutasi Antar OPD	UNIT
		Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	UNIT	Dari Aset Lainnya	UNIT	Dari Properti Investasi	UNIT						
	Jumlah	**4.654.737.623,00**	**10,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**265.110.500,00**	**63,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	29.000.365,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	4.474.844.658,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	150.892.600,00	7,00	-	-	-	-	265.110.500,00	63,00	-	-	-	-
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Salah Pos Belanja Modal	UNIT	Penghapusan	UNIT	Pembayaran Hutang	UNIT	Pengeluaran Hibah	UNIT	Mutasi Kurang			
										Reklasifikasi			
										Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	UNIT	Ke Aset Lainnya	UNIT
	Jumlah	**13.152.883.620,00**	**172.806**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**841.191.579,00**	**234,00**	**7.883.373.636,00**	**1.181,00**
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.437.000,00	1,00
7	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.006.700.000,00	3,00
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	298.680.549,00	2,00	4.474.844.658,00	3,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	13.152.883.620,00	172.806,00	-	-	-	-	-	-	542.511.030,00	232,00	1.367.091.978,00	1.172,00
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.300.000,00	2,00
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Ke Properti Investasi	UNIT	Koreksi Pencatatan Saldo Awal	UNIT	Dibawah Kapitalisasi	UNIT	Pembayar di Muka	UNIT	Mutasi Antar OPD	UNIT	Saldo Akhir	UNIT
	Jumlah	**-**	**-**	**153.067.000,00**	**32**	**2.299.218.400,00**	**34.090**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.910.723.583,04**	**325.407,00**
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.341.550,00	635,00
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	969.603.865,00	28,00
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	36.974.100,00	530,00	-	-	-	-	747.975.820,00	844,00
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.620.000,00	63,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.600.000,00	22,00
7	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379.480.520,00	122,00
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.815.924.136,90	600,00
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.573.000,00	4,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.000,00	1,00
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.500.000,00	2,00
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.457.505,00	2,00
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.232.000,00	2,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100.000,00	1,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.320.000,00	10,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.477.300,00	304,00
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816.419.140,00	262,00
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.568.117.500,00	59,00
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600.000,00	2,00
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.300.000,00	2,00
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990.331.160,00	17,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163.263.277,00	13,00
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	-	-	153.067.000,00	32,00	2.262.244.300,00	33.560,00	-	-	-	-	102.462.935.508,24	322.165,00
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.917.960.364,90	152,00
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.696.000,00	2,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235.099.400,00	58,00
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159.245.536,00	34,00
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000.000,00	1,00

Lampiran 34

Rincian Mutasi Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan

Pemerintah Provinsi Bali

Per 31 Desember 2025

No	SKPD	Saldo Awal	UNIT	Mutasi Tambah											
				Belanja Modal	UNIT	Hutang	UNIT	Pembayar di Muka	UNIT	Kapitaliasi Belanja Non Modal	UNIT	Penerimaan Hibah	UNIT	Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	UNIT
	Jumlah	**43.173.893.899,00**	**80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.912.138.203,27**	**41**
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.087.944,00	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.809.047.000,00	-
7	Dinas Kesehatan	684.460.505,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.936.619.962,87	10,00
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	879.066.364,00	2,00
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	79.812.260,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	114.345.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	79.608.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.056.398,40	1,00
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Inspektorat	194.585.700,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	207.523.618,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	97.995.960,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	16.175.390.040,00	47,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.132.735.309,00	26,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	895.934.264,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	23.717.886.506,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	926.352.046,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.525.225,00	2,00
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Reklasifikasi				Koreksi Pencatatan Saldo Awal	UNIT	Reklasifikasi dari Aset Extra ke Intra	UNIT	Mutasi Antar OPD	UNIT	Salah Pos Belanja Modal	UNIT	Penghapusan	UNIT
		Dari Aset Lainnya	UNIT	Dari Properti Investasi	UNIT										
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Mutasi Kurang													
		Pembayaran Hutang	UNIT	Pengeluaran Hibah	UNIT	Reklasifikasi						Koreksi Pencatatan Saldo Awal	UNIT	Dibawah Kapitalisasi	UNIT
						Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	UNIT	Ke Aset Lainnya	UNIT	Ke Properti Investasi	UNIT				
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.101.777.090,40**	**10**	**535.513.158,02**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	535.513.158,02	1,00	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	79.608.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	207.523.618,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	1.482.785.575,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	895.934.264,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	-	19.509.573.587,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	926.352.046,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Pembayar di Muka	UNIT	Mutasi Antar OPD	UNIT	Saldo Akhir	UNIT
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**	**67.448.741.853,85**	**110**
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	79.087.944,00	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	24.809.047.000,00	-
7	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	15.085.567.309,85	12,00
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	879.066.364,00	2,00
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	79.812.260,00	2,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	114.345.000,00	1,00
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	34.056.398,40	1,00
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-
14	Inspektorat	-	-	-	-	194.585.700,00	2,00
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	97.995.960,00	1,00
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	21.825.339.774,00	67,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	-	4.208.312.918,60	20,00
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	41.525.225,00	2,00
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-

Daftar Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2025

No	SKPD	Saldo Awal					B. Peny			
							Semester 1			
		Total	PM	GB	JIJ	ATL	PM	GB	JIJ	ATL
Jumlah		**5.485.889.248.727,52**	**1.800.859.499.926,12**	**699.678.324.093,94**	**2.963.822.678.011,06**	**21.528.746.696,40**	**67.896.891.795,19**	**37.195.921.041,00**	**59.917.092.166,00**	**710.873.329,00**
1	Sekretariat DPRD	37.819.902.573,00	30.500.726.834,00	6.585.557.745,00	576.178.994,00	157.439.000,00	936.541.853,00	123.333.998,00	37.228.763,00	6.976.000,00
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	13.895.765.092,94	8.537.613.291,94	4.621.377.688,00	79.610.087,00	657.164.026,00	332.049.895,00	228.213.878,00	11.033.341,00	63.720.350,00
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	907.583.732,00	715.510.820,00	192.072.912,00	-	-	161.149.121,00	11.998.522,00	-	-
4	Sekretariat Daerah	80.551.596.560,52	66.156.533.002,52	12.507.740.436,00	1.643.498.372,00	243.824.750,00	1.920.305.920,00	327.473.000,00	101.853.909,00	3.142.500,00
5	Dinas Perhubungan	49.570.595.620,00	32.539.787.845,00	11.155.886.086,00	5.861.686.689,00	13.235.000,00	747.259.863,00	63.746.375,00	1.022.150.505,00	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	65.328.327.763,80	63.829.761.016,80	1.473.762.747,00	11.304.000,00	13.500.000,00	2.092.360.710,00	4.105.468.375,00	-	-
7	Dinas Kesehatan	742.684.929.194,95	634.115.747.764,95	105.408.488.686,00	2.911.528.412,00	249.164.332,00	19.839.171.650,49	6.236.085.149,00	204.802.605,00	5.702.000,00
8	Dinas Kebudayaan	74.256.216.251,26	39.938.458.445,32	30.904.275.852,53	1.983.278.579,00	1.430.203.374,40	397.064.762,00	625.188.578,00	36.804.151,00	999.000,00
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	48.352.856.619,69	18.378.047.412,51	6.603.733.089,00	23.371.076.118,18	-	536.639.658,00	215.806.516,00	245.722.206,00	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	7.847.237.901,00	5.275.577.080,00	2.532.588.655,00	39.072.166,00	-	89.433.899,00	88.460.631,00	3.891.663,00	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	6.966.415.423,00	5.537.555.813,00	1.387.859.448,00	41.000.162,00	-	145.462.156,00	52.990.685,00	2.461.550,00	-
12	Badan Pendapatan	52.207.253.466,16	29.820.749.656,16	21.328.890.211,00	1.057.613.599,00	-	1.294.049.861,00	610.254.734,00	106.715.725,00	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	37.598.238.685,23	15.942.137.425,23	20.888.983.592,00	742.617.668,00	24.500.000,00	465.968.648,00	434.754.060,00	27.471.714,00	-
14	Inspektorat	14.126.871.855,00	11.927.316.078,00	2.183.470.338,00	16.085.439,00	-	679.385.430,00	109.297.068,00	1.683.333,00	-
15	Dinas Pariwisata	3.687.096.880,00	2.943.176.292,00	628.362.102,00	70.326.486,00	45.232.000,00	64.633.774,00	15.060.733,00	1.879.403,00	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.902.596.276,81	6.235.472.449,00	1.656.582.264,81	9.441.563,00	1.100.000,00	49.544.424,00	29.221.647,00	313.125,00	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	10.703.807.616,00	9.830.052.371,00	834.587.745,00	13.847.500,00	25.320.000,00	131.887.072,00	14.824.019,00	573.000,00	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	66.883.259.732,20	65.061.794.704,20	1.553.777.846,00	267.687.182,00	-	985.522.212,00	63.062.796,00	14.043.841,00	-
20	Badan Kepegawaian Daerah	26.523.485.728,66	19.772.311.289,66	5.605.320.750,00	632.068.083,00	513.785.606,00	387.533.512,00	207.934.785,00	28.345.913,00	15.963.331,00
21	Badan Penghubung Provinsi Bali	11.341.344.424,00	5.831.920.502,00	4.943.745.170,00	-	565.678.752,00	205.766.825,00	84.638.554,00	-	6.078.750,00
23	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	4.628.029.128,69	3.687.221.086,69	931.550.687,00	6.657.355,00	2.600.000,00	138.168.659,00	17.454.483,00	688.692,00	-
24	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	9.022.787.520,00	3.757.075.974,00	5.263.233.265,00	2.478.281,00	-	149.584.991,00	74.206.254,00	291.563,00	-
25	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	5.494.455.723,00	4.848.618.256,00	567.218.356,00	52.319.111,00	26.300.000,00	87.225.165,00	14.685.394,00	2.013.586,00	-
26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2.970.459.161.156,38	72.472.075.778,04	54.777.832.309,60	2.843.177.446.451,74	31.806.617,00	3.290.375.019,00	2.259.662.427,00	48.960.681.767,00	2.449.208,00
27	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	18.874.283.146,98	8.620.881.669,98	10.088.678.325,00	7.425.375,00	157.297.777,00	192.667.710,00	204.147.644,00	548.983,00	-
28	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	881.577.758.745,50	519.451.380.473,50	340.165.534.806,00	5.739.756.401,00	16.221.087.065,00	30.132.858.109,70	17.819.468.418,00	455.228.033,00	556.327.711,00
29	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	62.857.445.795,14	40.239.753.406,00	17.337.915.435,00	4.428.462.557,14	851.314.397,00	821.495.127,00	842.891.595,00	99.982.531,00	49.514.479,00
30	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	28.337.456.705,92	20.148.874.202,92	6.174.115.921,00	2.014.466.582,00	-	286.766.023,00	327.931.186,00	137.927.581,00	-
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18.023.856.753,68	14.927.099.778,68	2.640.997.286,00	228.565.689,00	227.194.000,00	235.277.940,00	62.579.576,00	12.572.826,00	-
32	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	119.147.938.309,02	32.951.468.803,02	17.355.347.437,00	68.791.122.069,00	50.000.000,00	859.582.868,00	1.870.318.967,00	8.398.597.835,00	-
33	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	8.310.694.347,00	6.864.800.404,00	1.378.836.903,00	46.057.040,00	21.000.000,00	241.158.938,00	54.760.994,00	1.584.022,00	-

No	SKPD	Mutasi Tambah								
		rusutan				Koreksi Pencatatan Saldo Awal				
		Semester 2								
		PM	GB	JIJ	ATL	PM	GB	JIJ	ATL	PM
Jumlah		**76.018.794.566,32**	**41.532.862.445,00**	**159.149.954.784,39**	**734.447.413,00**	**21.848.607.804,00**	**33.019.559.506,00**	**24.090.782.762,00**	**-**	**1.005.309.884,00**
1	Sekretariat DPRD	1.297.382.686,00	150.976.038,00	37.228.762,00	6.976.000,00	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	311.082.841,00	228.399.436,00	11.033.343,00	51.512.041,00	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	182.882.095,00	11.998.522,00	654.438,00	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	2.940.877.587,00	327.940.599,00	101.853.907,00	3.142.500,00	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	1.248.137.913,00	41.770.144,00	1.083.277.037,00	-	73.230.918,00	137.333.060,00	-	-	436.684.000,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	2.780.247.036,00	4.110.391.112,00	1.774.933,00	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	21.102.153.726,30	6.398.904.225,00	257.037.377,00	5.702.000,00	40.932.644,00	137.947.318,00	-	-	-
8	Dinas Kebudayaan	502.087.749,00	628.404.930,00	520.594.591,00	999.000,00	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	551.219.409,00	217.239.097,00	245.722.206,00	-	20.916.485,00	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	120.644.210,00	88.648.495,00	3.891.662,00	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	117.620.071,00	52.990.685,00	2.461.550,00	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	1.415.594.922,00	620.163.917,00	105.379.034,00	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	542.254.578,00	343.352.930,00	23.643.425,00	-	-	3.834.627.686,00	-	-	48.127.750,00
14	Inspektorat	777.674.464,00	109.698.934,00	1.683.333,00	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	94.272.164,00	16.179.815,00	2.308.364,00	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	98.361.842,00	29.221.646,00	313.125,00	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	149.890.602,00	14.824.019,00	573.000,00	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.497.777.185,00	66.492.561,00	14.043.841,00	-	-	-	-	-	-
20	Badan Kepegawaian Daerah	389.398.988,00	209.064.524,00	27.988.004,00	16.380.001,00	-	-	-	-	-
21	Badan Penghubung Provinsi Bali	510.200.417,00	84.638.555,00	-	6.078.750,00	-	-	-	-	-
23	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	163.433.650,00	18.723.926,00	688.692,00	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	165.713.774,00	73.907.935,00	291.562,00	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	77.991.788,00	14.685.394,00	2.013.586,00	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	3.698.757.384,00	2.290.038.745,00	147.478.080.294,00	2.449.208,00	21.705.252.753,00	20.618.213.743,00	24.090.782.762,00	-	-
27	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	201.577.183,00	237.826.097,00	548.983,00	-	-	-	-	-	126.011.905,00
28	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	32.564.648.783,26	21.979.259.811,00	455.065.507,39	591.693.433,00	-	8.291.437.699,00	-	-	3.172.468,00
29	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	782.375.688,00	842.891.591,00	89.291.394,00	49.514.480,00	-	-	-	-	-
30	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	292.249.294,00	327.931.190,00	137.927.582,00	-	-	-	-	-	287.100.653,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	294.221.076,00	62.572.465,00	127.740.334,00	-	8.275.004,00	-	-	-	-
32	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	893.179.234,00	1.878.964.113,00	8.415.260.898,00	-	-	-	-	-	104.213.108,00
33	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	254.886.226,76	54.760.994,00	1.584.020,00	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Penyusutan Barang Terima Hibah			Reklasifikasi dari akumulasi Aset Lainnya				Reklasifikasi dari Akun	
		GB	JIJ	ATL	PM	GB	JIJ	ATL	PM	GB
Jumlah		**4.855.143.790,00**	**692.139.861.583,66**	**-**	**-**	**-**	**14.117.300.000,00**	**-**	**-**	**-**
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	-	13.982.716.200,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Kebudayaan	395.841,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	2.754.249.000,00	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	3.460.917.294,00	250.506.805.434,00	-	-	-	-	-	-	-
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	423.107.712.564,66	-	-	-	14.117.300.000,00	-	-	-
27	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	1.393.830.655,00	1.788.378.385,00	-	-	-	-	-	-	-
33	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	ulasi Properti Investasi		Reklasifikasi dari Akumulasi Aset Tetap Ekstra				Mutasi Antar OPD		
		JIJ	ATL	PM	GB	JIJ	ATL	PM	GB	JIJ
Jumlah		**-**	**-**	**-**	**10.000.000,00**	**-**	**-**	**6.477.180.699,00**	**3.500.632.899,00**	**250.517.788.061,00**
1	Sekretariat DPRD	-	-					-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-					-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-					-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-					4.481.713.341,00	3.241.818.342,00	-
5	Dinas Perhubungan	-	-					-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-					-	-	-
7	Dinas Kesehatan	-	-					1.534.048.341,00	-	-
8	Dinas Kebudayaan	-	-		10.000.000,00			-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-					-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-					-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-					-	-	-
12	Badan Pendapatan	-	-					-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-					7.169.017,00	249.263.023,00	10.982.627,00
14	Inspektorat	-	-					-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-					212.300.000,00	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-					-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-					-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-					-	-	-
20	Badan Kepegawaian Daerah	-	-					-	-	-
21	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-					-	-	-
23	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-					-	-	-
24	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-					-	-	-
25	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-					-	-	-
26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	-					-	-	250.506.805.434,00
27	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-					241.950.000,00	-	-
28	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	-	-					-	9.551.534,00	-
29	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-					-	-	-
30	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-					-	-	-
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					-	-	-
32	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-					-	-	-
33	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-					-	-	-

No	SKPD	Mutasi Kurang								
			Akumulasi Penyusutan Aset yang Dihibahkan				Reklasifikasi ke Akumulasi Aset Lainnya			
		ATL	PM	GB	JIJ	ATL	PM	GB	JIJ	ATL
Jumlah		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.053.802.717,95**	**4.669.427.325,00**	**16.131.914,00**	**6.450.000,00**
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	938.508.691,00	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	2.602.097.076,08	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	619.757.967,00	71.688.250,00	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	1.426.321.519,00	-	11.304.000,00	-
7	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	2.599.284.681,72	151.125.199,00	-	-
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	699.019.500,00	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	297.648.975,00	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	279.766.380,00	-	-	-
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	-	1.186.314.246,74	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	801.861.506,54	3.940.734.459,00	4.827.914,00	-
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	229.850.000,00	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	147.117.800,00	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	327.498.228,00	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	603.415.420,00	-	-	-
20	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	433.092.368,00	-	-	-
21	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	240.513.000,00	-	-	-
23	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	63.950.450,00	-	-	-
25	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	367.037.320,00	9.960.667,00	-	-
26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	998.615.318,00	-	-	-
27	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	818.694.932,53	230.646.375,00	-	-
28	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	-	-	6.753.812.256,34	215.696.502,00	-	6.450.000,00
29	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	547.417.152,00	-	-	-
30	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	26.767.000,00	49.575.873,00	-	-
32	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	950.845.530,00	-	-	-
33	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	94.595.400,00	-	-	-

No	SKPD	Mutasi Kurang								
		Reklasifikasi ke Akumulasi Properti Investasi				Koreksi Pencatatan Saldo Awal				
		PM	GB	JIJ	ATL	PM	GB	JIJ	ATL	PM
Jumlah		-	-	-	-	6.755.252.193,00	29.204.291.469,64	36.173.084.018,00	-	-
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	5.952.381,00	367.060.035,64	-	-	-
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	5.564.977.855,00	147.196.982,00	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	23.660.000,00	-	-	-	-
23	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	881.800.000,00	10.093.344.851,00	36.173.084.018,00	-	-
27	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	-	275.674.453,00	18.596.636.166,00	-	-	-
29	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	3.187.504,00	53.435,00	-	-	-
32	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Penghapusan			Mutasi Antar OPD					
		GB	JIJ	ATL	PM	GB	JIJ	ATL	PM	GB
Jumlah		**-**	**-**	**-**	**6.477.180.699,00**	**3.500.632.899,00**	**250.517.788.061,00**	**-**	**1.936.820.049.064,68**	**782.418.092.081,30**
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	2.796.173.341,00	-	-	-	28.999.969.341,00	6.859.867.781,00
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	9.180.746.027,94	5.077.991.002,00
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	1.059.542.036,00	216.069.956,00
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	1.987.968.341,00	-	-	-	70.909.364.433,43	16.404.972.377,00
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	34.425.342.572,00	11.327.047.415,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	67.276.047.243,80	9.689.622.234,00
7	Dinas Kesehatan	-	-	-	330.000,00	-	-	-	674.026.487.064,02	117.663.240.143,36
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	56.421.667,00	-	-	40.138.591.456,32	32.111.843.534,53
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	13.921.845.109,51	6.889.581.720,00
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	5.188.006.214,00	2.709.697.781,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	5.520.871.660,00	1.493.840.818,00
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	31.344.080.192,42	22.559.308.862,00
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	3.241.818.342,00	250.506.805.434,00	-	16.203.795.911,69	22.029.345.784,00
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	13.154.525.972,00	2.402.466.340,00
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	3.167.264.430,00	659.602.650,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	6.383.378.715,00	1.715.025.557,81
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	9.784.331.817,00	864.235.783,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	66.941.678.681,20	1.683.333.203,00
20	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	-	20.116.151.421,66	6.022.320.059,00
21	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	1.685.540.000,00	-	-	-	4.598.174.744,00	5.113.022.279,00
23	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	3.988.823.395,69	967.729.096,00
24	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	4.008.424.289,00	5.411.347.454,00
25	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	4.646.797.889,00	586.628.477,00
26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	-	-	7.169.017,00	202.392.890,00	10.982.627,00	-	99.278.876.599,04	69.650.009.483,60
27	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	8.564.393.535,45	10.300.005.691,00
28	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	575.122.573.125,12	369.452.919.600,00
29	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	41.296.207.069,00	19.023.698.621,00
30	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	21.014.990.172,92	6.829.978.297,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	15.434.919.294,68	2.716.520.019,00
32	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	33.857.598.483,02	22.498.461.172,00
33	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	7.266.250.168,76	1.488.358.891,00

No	SKPD	Saldo Akhir		
		JIJ	ATL	TOTAL
	Jumlah	**3.877.048.453.375,11**	**22.967.617.438,40**	**6.619.254.211.959,49**
1	Sekretariat DPRD	650.636.519,00	171.391.000,00	36.681.864.641,00
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	101.676.771,00	772.396.417,00	15.132.810.217,94
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	654.438,00	-	1.276.266.430,00
4	Sekretariat Daerah	1.847.206.188,00	250.109.750,00	89.411.652.748,43
5	Dinas Perhubungan	21.949.830.431,00	13.235.000,00	67.715.455.418,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	1.774.933,00	13.500.000,00	76.980.944.410,80
7	Dinas Kesehatan	3.373.368.394,00	260.568.332,00	795.323.663.933,38
8	Dinas Kebudayaan	2.540.677.321,00	1.432.201.374,40	76.223.313.686,26
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	26.616.769.530,18	-	47.428.196.359,69
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	46.855.491,00	-	7.944.559.486,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	45.923.262,00	-	7.060.635.740,00
12	Badan Pendapatan	1.269.708.358,00	-	55.173.097.412,42
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	799.887.520,00	24.500.000,00	39.057.529.215,69
14	Inspektorat	19.452.105,00	-	15.576.444.417,00
15	Dinas Pariwisata	74.514.253,00	45.232.000,00	3.946.613.333,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	10.067.813,00	1.100.000,00	8.109.572.085,81
17	Satuan Polisi Pamong Praja	14.993.500,00	25.320.000,00	10.688.881.100,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	295.774.864,00	-	68.920.786.748,20
20	Badan Kepegawaian Daerah	688.402.000,00	546.128.938,00	27.373.002.418,66
21	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	577.836.252,00	10.289.033.275,00
23	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	8.034.739,00	2.600.000,00	4.967.187.230,69
24	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	3.061.406,00	-	9.422.833.149,00
25	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	56.346.283,00	26.300.000,00	5.316.072.649,00
26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	3.715.254.742.628,40	36.705.033,00	3.884.220.333.744,04
27	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	8.523.341,00	157.297.777,00	19.030.220.344,45
28	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	6.650.049.941,39	17.362.658.209,00	968.588.200.875,51
29	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	4.617.736.482,14	950.343.356,00	65.887.985.528,14
30	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	2.290.321.745,00	-	30.135.290.214,92
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	368.878.849,00	227.194.000,00	18.747.512.162,68
32	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	87.393.359.187,00	50.000.000,00	143.799.418.842,02
33	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	49.225.082,00	21.000.000,00	8.824.834.141,76

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

Pemerintah Provinsi Bali

Per 31 Desember 2025

No	SKPD	Saldo Awal	UNIT	Saldo Awal Amortisasi	Saldo Awal Netto	Belanja Modal	UNIT	Kapitaliasi Belanja Non Modal	UNIT	Penerimaan Hibah	UNIT	Dari Aset Tetap
	Jumlah	**28.998.557.508,65**	**1.405**	**20.833.551.606,82**	**8.165.005.901,83**	**543.458.964,90**	**1**	**-**	**-**	**82.119.030,00**	**1**	**6.817.981.654,00**
1	Sekretariat DPRD	20.372.000,00	1,00	20.372.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	1.429.160.493,00	15,00	1.288.150.935,00	141.009.558,00	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	3.051.050.000,00	7,00	842.715.833,00	2.208.334.167,00	96.015.000,00	1,00	-	-	64.500.000,00	1,00	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	748.033.800,00	9,00	732.779.217,00	15.254.583,00	57.521.964,90	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	9.022.193.571,65	16,00	6.006.302.481,65	3.015.891.090,00	389.922.000,00	-	-	-	17.619.030,00	-	2.006.700.000,00
8	Dinas Kebudayaan	88.200.000,00	3,00	80.000.000,00	8.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	261.551.700,00	1,00	-	261.551.700,00	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	464.625.000,00	2,00	343.666.667,00	120.958.333,00	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	324.456.600,00	11,00	324.456.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Inspektorat	337.186.000,00	7,00	315.599.334,00	21.586.666,00	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.009.198.500,00	9,00	1.002.379.508,00	6.818.992,00	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	702.285.000,00	7,00	624.183.417,00	78.101.583,00	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	702.078.000,00	5,00	442.133.000,00	259.945.000,00	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	144.896.700,00	4,00	136.104.033,00	8.792.667,00	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	4.303.220.395,00	8,00	4.271.692.973,00	31.527.422,00	-	-	-	-	-	-	4.474.844.658,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	5.736.292.809,00	1.253,00	3.766.083.596,17	1.970.209.212,83	-	-	-	-	-	-	336.436.996,00
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	1.100.000,00	1,00	1.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	86.900.000,00	42,00	86.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	466.756.940,00	2,00	449.932.012,00	16.824.928,00	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	99.000.000,00	2,00	99.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

ampiran 36

No	SKPD	Mutasi Tambah												
		Reklasifikasi					Koreksi Pencatatan Saldo Awal	UNIT	Mutasi Antar OPD	UNIT	Salah Pos Belanja Modal	UNIT	Pengeluaran Hibah	UNIT
		UNIT	Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	UNIT	Dari Aset Lainnya	UNIT								
	Jumlah	**74,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	68,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Mutasi Kurang											
		Penghapusan	UNIT	Reklasifikasi				Koreksi Pencatatan Saldo Awal	UNIT	Dibawah Kapitalisasi	UNIT	Mutasi Antar OPD	UNIT
				Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	UNIT	Ke Aset Lainnya	UNIT						
	Jumlah	**69.899.500,00**	**2,00**	**127.482.489,90**	**1,00**	**-**	**-**	**49.300.000,00**	**1,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	Sekretariat DPRD	20.372.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	57.521.964,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	-	-	69.960.525,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	49.300.000,00	1,00	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	49.527.500,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Saldo Akhir	UNIT	Saldo Akhir Amortisasi	Saldo Akhir Netto
	Jumlah	**36.195.435.167,65**	**1.477**	**28.105.557.846,82**	**8.089.877.320,83**
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	1.429.160.493,00	15	1.394.386.849,00	34.773.644
5	Dinas Perhubungan	3.211.565.000,00	9	1.504.077.083,00	1.707.487.917
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	748.033.800,00	9	748.033.800,00	-
7	Dinas Kesehatan	11.366.474.076,65	18	6.766.044.104,65	4.600.429.972
8	Dinas Kebudayaan	88.200.000,00	3	88.200.000,00	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	261.551.700,00	1	-	261.551.700
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	464.625.000,00	2	427.341.667,00	37.283.333
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	324.456.600,00	11	324.456.600,00	-
14	Inspektorat	337.186.000,00	7	330.344.334,00	6.841.666
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.009.198.500,00	9	1.009.198.500,00	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	652.985.000,00	6	652.154.750,00	830.250
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	702.078.000,00	5	570.932.600,00	131.145.400
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	144.896.700,00	4	140.900.033,00	3.996.667
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	8.778.065.053,00	11	8.701.710.865,00	76.354.188
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	6.072.729.805,00	1.321	4.843.547.221,17	1.229.182.584
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	1.100.000,00	1	1.100.000,00	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	86.900.000,00	42	86.900.000,00	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	466.756.940,00	2	466.756.940,00	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	49.472.500,00	1	49.472.500,00	-

Rincian Aset yang Dioperasionalkan Pihak Lain
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

Tanah

No	Jenis Barang (per Golongan)	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Asal Usul	Dokumen Perjanjian	Tanggal Dokumen	Alamat Tanah (Desa/Kec./Kab.)	Luas M²	Hak Tanah	SHP No.	Tanggal Sertifikat	Penyewa/Pemimjam	Penggunaan	OPD yang mencatat
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2003	14.000.000,00	Hibah	028/513/SET/DPMA	26/01/2021	Desa Duda Kec. Selat, Kab. Karangasem	1.000	Hak Pakai	SHP 9	23/09/2003	Bandesa Alitan Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Selat	Kantor Majelis Desa Adat kecamatan Selat	Dinas PMA
2	Tanah Sawah Irigasi	1954	18.000.000,00	Hibah	B.27.028/11767/SET/DPMA	08/11/2021	Jalan Raya Manduang Selisihan Kangin, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	500	Hak Pakai	Persil 95		Kelihan Subak Selisihan Kangin	Balai Subak dan Irigasi perpompaan	Dinas PMA
3	Tanah Sawah Irigasi	1954	5.287.500,00	Hibah	593/1846/IV/DPMA	13/04/2020	Desa Sembung, Kec. Mengwi, Kab. Badung	500	Hak Pakai	SHP 37	20/12/2002	Kelihan Subak Abian Jaga Satru	Pura Pengulun Subak	Dinas PMA
4	Tanah Tegalan	1954	50.460.000,00	Hibah	B.27.028/12608/SET/DPMA	08/12/2021	Gianyar\Gianyar\ Ds. Siangan	580	Hak Pakai	SHP 2	07/05/2007	Pekaseh Subak Delod Siangan	Pura dan balai Subak	Dinas PMA
5	Tanah Untuk Bangunan Pura	1954	405.250.000,00	Hibah	B.27.028/11294/SET/DPMA	20/10/2021	Jalan Nagasari Dusun Taman, Desa Penatih, Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar	500	Hak Pakai	SHP 1	09/08/1998	Pekaseh Subak Taman	Pura Subak dan Wantilan	Dinas PMA
6	Tanah Sawah Irigasi	2010	97.750.000,00	Hibah	B.27.028/4817/SET/DPMA	03/07/2023	Ds.Sempidi,Kec.Mengwi,Kab.Badung	1.150	Hak Pakai	SHP 3	31/01/2011	Kantor Majelis Subak Sempidi	Kantor Majelis Madya Subak dan Balai Subak Sempidi	Dinas PMA
7	Tanah Tegalan	2002	3.500.000,00	Hibah	B.27.028/973/SET/DPMA	01/03/2023	Desa tista,Kab.karangasem	1.000	Hak Pakai	SHP 10	04/12/2002	Bandesa Adat Ngis	TPS3R	Dinas PMA
8	Tanah untuk bangunan ibadah lainnya	2011	54.700.000,00	Hibah	B.23.000.2.3.2/1891/SET/DPMA	08/04/2025	Desa Tibubeneng,Kec.Kuta Utara Kab.Badung	200,00	Hak Pakai	22.03.08.06.4.00 056	21/12/2011	Pekaseh Subak Semat	Pura Subak Semat	Dinas PMA
9	Tanah Sawah Irigasi	2010	65.550.000,00	Hibah	B.23.000.2.3.2/1893/SET/DPMA	08/04/2025	Desa Tumbak Bayuh,Kec Mengwi,Kab Badung	950,00	Hak Pakai	22.03.05.17.4.00 006	31/01/2011	Pekaseh Subak Klepekan	Balai Subak	Dinas PMA
10	Tanah Sawah Irigasi	2010	8.660.750,00	Hibah	B.23.000.2.3.2/1890/SET/DPMA	08/04/2025	Desa Sangeh,Kec Abiansemal,Kab Badung	1.010,00	Hak Pakai	22.03.06.01.4.00 023	31/10/2011	Pekaseh Subak Gerana	Pembangunan Balai Subak	Dinas PMA
11	Tanah Sawah Irigasi	2010	5.812.500,00	Hibah	B.23.000.2.3.2/1892/SET/DPMA	08/04/2025	Desa Taman,Kec Abiansemal,Kab Badung	775,00	Hak Pakai	22.03.06.02.4.00 010	01/02/2011	Pekaseh Subak Taman	Pembangunan Balai Subak	Dinas PMA
12	Tanah Sawah Irigasi	2010	44.160.000,00	Hibah	B.23.000.2.3.2/2083/SET/DPMA	08/04/2025	Desa Sibang Kaja,Kec Abiansemal,Kab Badung	640,00	Hak Pakai	22.03.06.11.4.00 002	26/01/2011	Pekaseh Subak Uma Lambing	Pembangunan Balai Subak	Dinas PMA
13	Tanah Sawah Irigasi	1954	4.750.000,00	Hibah	B.23.000.2.3.2/1889/SET/DPMA	08/04/2025	Desa Baru,Kec Marga,Kab Tabanan	500,00	Hak Pakai	22.02.04.11.4.00 018	27/04/2006	Pekaseh Subak Pinge	Pembangunan Balai Subak	Dinas PMA
14	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst.)	1999	3.566.200.000,00	Hibah	B.18.028/7087/UMUM.KEPEG/DISKES	18/08/2021	Jalan Trengguli Kelurahan Penatih Denpasar	4.400	Hak Pakai	SHP 10	02/08/2022	PMI Canter	Dipergunakan oleh PMI Provinsi Bali	Dinas Kesehatan
15	Tanah Bangunan	2022	2.629.344.000,00	Pembelian	B.18.028/5563/UMUM DISKES/ 2022	15/09/2022	Seminyak Kuta	3.592	Hak Pakai	SHP 47	12/08/2022	Gudang PBR	Dipergunakan oleh Kementerian Pusat/Pusat Krisiss	Dinas Kesehatan
16	Tanah Bangunan	2022	916.464.000,00	Pembelian	B.18.028/5563/UMUM DISKES/ 2022	15/09/2022	Seminyak Kuta	1.252	Hak Pakai	SHP 48	12/08/2022	Asrama	Dipergunakan oleh Kementerian Pusat/Pusat Krisiss	Dinas Kesehatan
17	Tanah Bangunan Tempat Kerja lainnya (dst)	2022	418.218.000,00	Hibah	No : B.24.032/19687/SEKRET/D.KOMINFOS	06/11/2023	Jl. Trengguli I Penatih-Denpasar	516	Hak Pakai	SHP 10	27/09/1999	ORARI Daerah Bali	Sekretariat ORARI Bali	DISKOMINFOS
18	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2020	70.470.000,00	Pembelian	19.593/25069/II/Dispmd DUKCAPIL,	01/09/2020	Kabupaten Gianyar, Kecamatan Tampak Siring, Ds. Pejeng Kangin	290	Hak Pakai	SHP 11	11/08/2022	Pemerintah Desa Pejeng Kangin	Bangunan Kantor Desa Pejeng	Dinas PMDDUKCAPIL
19	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2021	36.000.000,00	Hibah	B/28.593/14302/II/DISPMD DUKCAPIL,	08/06/2021	Desa Selat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem	850	Hak Pakai	SHP 19	19/01/2005	Pemerintah Desa Selat	Kantor Desa Selat	Dinas PMDDUKCAPIL
20	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1954	43.500.000,00	Hibah	B.28.593/839/II/DPMD DUKCAPIL,	09/03/2022	Desa Bongan, Kec.Tabanan, Kab.Tabanan	1.000	Hak Pakai	SHP 12	25/07/2007	Pemerintah Desa Bongan	Kantor Desa Bongan	Dinas PMDDUKCAPIL
21	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2010	10.045.750,00	Hibah	B.28.028/636/UMUM/DPMD DUKCAPIL,	09/03/2022	Kec.Belayu Kab.Tabanan	1.405	Hak Pakai	SHP 10	19/02/2010	Pemerintah Desa Cau Belayu	Kantor Desa Cau Belayu	Dinas PMDDUKCAPIL
22	Tanah Bangunan Poliklinik	2015	23.175.000,00	Hibah	19.593/29209/II/DISPMD DUKCAPIL,	02/11/2020	Kab. Tabanan, Kec. Selemadeg, Desa Berembeng	900	Hak Pakai	SHP 19	22/01/2015	Pemerintah Desa Berembeng	Poliklinik Desa Berembeng	Dinas PMDDUKCAPIL
23	Tanah Sawah Irigasi	1954	21.870.000,00	Hibah	593/24513/III/DISPMD,	18/12/2019	Tabanan\Penebel\Ds.Riang Gede	3.600	Pakai	SHP 18	17/09/2002	Pemerintah Desa Riang Gede	Membangun Gedung PAUD/TK dan Lapangan Olahraga	Dinas PMDDUKCAPIL
24	Tanah Sawah Irigasi	2010	1.210.166.000,00	Hibah	593/25909/II/Dispmd Dukcapil,	29/09/2020	Ds.Buduk,Kc.Mengwi,Kab.Badung	14.480	Hak Pakai	SHP 28	26/01/2011	Pemerintah Desa Buduk	Lapangan umum desa buduk	Dinas PMDDUKCAPIL
25	Tanah Sawah Irigasi	2010	65.188.500,00	Hibah	593/25909/II/Dispmd Dukcapil,	29/09/2020	Ds.Buduk,Kc.Mengwi,Kec.Badung	780	Hak Pakai	SHP 25	26/01/2011	Pemerintah Desa Buduk	Kantor Perbekel Desa Buduk	Dinas PMDDUKCAPIL
26	Tanah Sawah Irigasi	1954	41.040.000,00	Hibah	19.593/2067/II/Dispmd Dukcapil,	02/02/2021	Tabanan\Tabanan\Ds.Gubug	760	Pakai	SHP 75	08/11/1995	Pemerintah Desa Gubug	Sekolah TK dan PAUD	Dinas PMDDUKCAPIL
27	Tanah Sawah Irigasi	2015	336.600.000,00	Hibah	19.593/32313/II/Dispmd Dukcapil,	18/12/2020	Tabanan\Kerambitan\Ds. Samsam	3.740	Hak Pakai	SHP 24	23/04/2015	Pemerintah Desa Samsam	Tempat Pengolahan Sampah	Dinas PMDDUKCAPIL
28	Tanah Sawah Irigasi	1954	14.012.500,00	Hibah	B.28.028/539/II/DPMD DUKCAPIL,	16/02/2022	Tabanan\Penebel\Ds.Jegu	1.475	Pakai	SHP 1	17/09/2002	Pemerintah Desa Jegu	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
29	Tanah Sawah Irigasi	2010	110.400.000,00	Hibah	B.28.593/977/II/DPMD DUKCAPIL,	16/02/2022	Subak.Sibang Gede/Ds.Sibang/Kec.Abiansemal/Bad	1.600	Hak Pakai	SHP 24	08/12/2011	Pemerintah Desa Sibang Gede	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
30	Tanah Tegalan	1954	106.275.000,00	Hibah	B.28.593/626/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Gianyar\Gianyar\Ds. Babakan	1.950	Pakai	SHP 3	25/06/2007	Pemerintah Desa Babakan	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
31	Tanah Tegalan	1954	36.105.000,00	Hibah	B.28.593/628/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Gianyar\Gianyar\Ds. Siangan	415	Pakai	SHP 5	24/05/2007	Pemerintah Desa Siangan	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
32	Tanah Tegalan	1954	31.850.000,00	Hibah	B.28.593/637/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Gianyar\Tampaksiring\Ds. Tampaksiring	490	Pakai	SHP 16	18/11/2002	Pemerintah Desa Tampaksiring	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
33	Tanah Tegalan	1954	81.900.000,00	Hibah	B.28.593/653/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Gianyar\Payangan\Ds. Kerta	780	Pakai	SHP 19	11/04/2006	Pemerintah Desa Kerta	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
34	Tanah Tegalan	1954	42.000.000,00	Hibah	B.28.593/653/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Gianyar\Payangan\Ds. Kerta	400	Pakai	SHP 18	11/04/2006	Pemerintah Desa Kerta	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL

No	Jenis Barang (per Golongan)	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Asal Usul	Dokumen Perjanjian	Tanggal Dokumen	Alamat Tanah (Desa/Kec./Kab.)	Luas M²	Hak Tanah	SHP No.	Tanggal Sertifikat	Penyewa/Pemimjam	Penggunaan	OPD yang mencatat
35	Tanah Tegalan	1954	213.132.500,00	Hibah	B.28.593/494/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Gianyar\Sukawati\Ds. Sukawati	665	Pakai	SHP 41	23/09/2005	Pemerintah Desa Sukawati	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
36	Tanah Tegalan	1954	20.800.000,00	Hibah	B.28.028/537/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Tabanan\Kerambitan\Ds.Kelating	1.300	Pakai	SHP 5	17/09/2002	Pemerintah Desa Kelating	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
37	Tanah Tegalan	1954	6.004.250,00	Hibah	B.28.593/938/II/DPMD DUKCAPIL,	16/02/2022	Tabanan\Penebel\Ds.Pitra	730	Pakai	SHP 10	27/04/2006	Pemerintah Desa Pitra	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
38	Tanah Tegalan	1954	18.225.000,00	Hibah	B.28.028/547/II/DPMD DUKCAPIL,	16/02/2022	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Bungbungan	1.350	Pakai	SHP 23	01/11/2002	Pemerintah Desa Bungbungan	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
39	Tanah Tegalan	2015	25.750.000,00	Hibah	B.28.028/638/UMUM/DPMD DUKCAPIL,	09/03/2022	Desa Berembeng, Kec.Selemadeg, Kab.Tabanan	1.000	Hak Pakai	SHP 18	22/01/2015	Pemerintah Desa Berembeng	Kantor Desa Berembeng dan PAUD	Dinas PMDDUKCAPIL
40	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2020	12.664.285,71	Hibah	19.593/2067/II/Dispmd Dukcapil,	02/02/2021	Jln Pesiapan Yeh Gangga, Ds. Gubug, Kab. Tabanan	335	Hak Pakai	SHP 43	12/04/2022	Pemerintah Desa Gubug	Lapangan Desa Gubug	Dinas PMDDUKCAPIL
41	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2020	147.245.948,83	Hibah	19.593/2067/II/Dispmd Dukcapil,	02/02/2021	Jln Pesiapan Yeh Gangga, Ds. Gubug, Kab. Tabanan	3.895	Hak Pakai	SHP 44	12/04/2022	Pemerintah Desa Gubug	TK Desa Gubug	Dinas PMDDUKCAPIL
42	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2021	53.362.500,00	Hibah	B.28.593/19015/II/DPMD DUKCAPIL,	18/08/2021	Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan	1.500	Hak Pakai	belum sertifikat		Pemerintah Desa Baturiti	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Dinas PMDDUKCAPIL
43	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2021	53.362.500,00	Hibah	B.28.593/19015/II/DPMD DUKCAPIL,	18/08/2021	Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan	1.500	Hak Pakai	SHP 13	29/12/2014	Pemerintah Desa Baturiti	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Dinas PMDDUKCAPIL
44	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2021	40.643.750,00	Hibah	B.28.593/3822/III/DISPMD DUKCAPIL,	02/03/2021	Desa batuaji, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan	1.750	Hak Pakai	SHP 14	17/09/2002	Pemerintah Desa Batuaji	Pengolahan Sampah Terpadu	Dinas PMDDUKCAPIL
45	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2021	47.987.500,00	Hibah	Nomor B.28.593/11025/II/Dpmd Dukcapil,	15/06/2021	Desa Selat, Kecamatan Kelungkung, Kabupaten Klungkung	1.745	Hak Pakai	SHP 57	24/12/2002	Pemerintah Desa Selat	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Dinas PMDDUKCAPIL
46	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	4.900.000,00	Hibah	B.28.593/25303/IIDPMD DUKCAPIL,	23/11/2021	Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem	2.000	Hak Pakai	SHP 17	04/12/2002	Pemerintah Desa Nongan	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Dinas PMDDUKCAPIL
47	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	669.000.000,00	Hibah	B.28.593/900/II/DPMD DUKCAPIL,	14/04/2022	Jalan Kerta Dalem GG XXI Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan	1.000	Hak Pakai	SHP 20	19/12/2020	Pemerintah Desa Sidakarya	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
48	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1989	1.480.000.000,00	Pembelian	B.28.593/902/II/DPMD DUKCAPIL,	14/01/2022	Jalan Danau Tempe I Desa Sanur Kauh	2.000	Hak Pakai	SHP 22	14/12/1989	Pemerintah Desa Sanur Kauh	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
49	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	54.000.000,00	Hibah	B.28.593/904/II/DPMD DUKCAPIL,	03/01/2022	Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan	1.000	Hak Pakai	SHP 30	12/02/2004	Pemerintah Desa Lalanglinggah	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
50	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	10.250.000,00	Pembelian	B.28.593/908/II/DPMD DUKCAPIL,	03/01/2022	BBI Luwus Tabanan	500	Hak Pakai	SHP 35	25/07/2007	Pemerintah Desa Luwus	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
51	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2010	138.238.250,00	Hibah	B.28.593/21815/II/DPMDDUKCAPIL,	28/09/2021	Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung	2.510	Hak Pakai	SHP 58	26/01/2011	Pemerintah Desa Munggu	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Dinas PMDDUKCAPIL
52	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2010	121.165.000,00	Hibah	B.28.593/21815/II/DPMDDUKCAPIL,	28/09/2021	Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, kabupaten badung	2.200	Hak Pakai	SHP 65	01/02/2011	Pemerintah Desa Munggu	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Dinas PMDDUKCAPIL
53	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	86.921.250,00	Hibah	B.28.593/906/II/DPMD DUKCAPIL,	03/01/2022	Desa Belalang, Kecamatan Kediri, kabupaten tabanan	1.950	Hak Pakai	SHP 4	26/11/1990	Pemerintah Desa Belalang	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
54	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	85.680.000,00	Hibah	B.28.593/601/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Desa Celuk, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar	800	Hak Pakai	belum sertifikat		Pemerintah Desa Celuk	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
55	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	27.000.000,00	Hibah	B.28.593/603/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Desa Singapadu, Kec Sukawati, Kab Gianyar	1.000	Hak Pakai	SHP 24	31/12/2010	Pemerintah Desa Singapadu	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
56	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	36.000.000,00	Hibah	B.28.593/618/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Desa Medahaan, Kec Payangan, Kab Gianyar	1.000	Hak Pakai	Persil 93		Pemerintah Desa Medahaan	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
57	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	45.630.000,00	Hibah	B.28.593/620/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Banjar Prajamukti Desa Bona, Kec Blahbatuh, Kab Gianyar	1.500	Hak Pakai	persil 56 SDJ		Pemerintah Desa Bona	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
58	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	131.500.000,00	Hibah	B.28.593/622/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Desa Lebih, Kec Gianyar, Kab Gianyar	1.000	Hak Pakai	SHP 12	24/05/2007	Pemerintah Desa Lebih	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
59	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	7.150.000,00	Hibah	B.28.593/624/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Desa Temesi, Kec Gianyar, Kab Gianyar	1.000	Hak Pakai	SHP 7	31/12/2002	Pemerintah Desa Temesi	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
60	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	181.000.000,00	Hibah	B.28.593/632/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Kelurahan Samplangan, Desa Tegal Tugu, Kec Gianyar, Kab Gianyar	1.000	Hak Pakai	SHP 17	14/06/2007	Pemerintah Desa Tegal Tugu	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
61	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	52.585.000,00	Hibah	B.28.593/657/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Desa Pejeng kaja, Kec Tampaksiring, Kab Gianyar	809	Hak Pakai	SHP 2	26/08/1994	Pemerintah Desa Pejeng kaja	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
62	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	107.000.000,00	Hibah	B.28.593/649/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Desa Melinggih, Kec Payangan, Kab Gianyar	1.000	Hak Pakai	SHP 12	22/03/2006	Pemerintah Desa Melinggih	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
63	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	48.000.000,00	Hibah	B.28.593/651/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Desa Kelusa, Kec Payangan, Kab Gianyar	1.000	Hak Pakai	SHP 13	27/01/2006	Pemerintah Desa Kelusa	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
64	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	107.000.000,00	Hibah	B.28.593/643/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Desa Bukian, Kec Payangan, Kab Gianyar	1.000	Hak Pakai	SHP 6	23/01/2006	Pemerintah Desa Bukian	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
65	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	39.960.000,00	Hibah	B.28.593/647/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Desa Buahan, Kab Gianyar	1.480	Hak Pakai	SHP 25	27/04/2023	Pemerintah Desa Buahan	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
66	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	31.050.000,00	Hibah	B.28.593/641/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Desa Buahan Kaja, Kab Gianyar	1.000	Hak Pakai	persil 77		Pemerintah Desa Buahan Kaja	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
67	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	65.000.000,00	Hibah	B.28.593/639/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Desa Singapadu kaler, Kec Sukawati, Kab Gianyar	1.000	Hak Pakai	SHP 10	22/09/2005	Pemerintah Desa Singapadu kaler	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL

No	Jenis Barang (per Golongan)	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Asal Usul	Dokumen Perjanjian	Tanggal Dokumen	Alamat Tanah (Desa/Kec./Kab.)	Luas M²	Hak Tanah	SHP No.	Tanggal Sertifikat	Penyewa/Pemimjam	Penggunaan	OPD yang mencatat
68	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	14.000.000,00	Hibah	Nomor B.28.593/889/II/Dpmd Dukcapil,	08/02/2022	Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kab. Klungkung	1.000	Hak Pakai	belum sertifikat		Pemerintah Desa Jumpai	Tempat Pengolahan Sampah	Dinas PMDDUKCAPIL
69	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	7.500.000,00	Hibah	B.28.593/277/II/DPMD DUKCAPIL,	14/01/2022	Subak Getasan Banjar Getasan Kec Petang, Kab Badung	1.000	Hak Pakai	SHP 23	28/12/2011	Pemerintah Desa Getasan	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Dinas PMDDUKCAPIL
70	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	69.000.000,00	Hibah	B.28.593/288/II/DPMD DUKCAPIL,	14/01/2022	Subak Darmasaba Banjar Darmasaba Kec Abiansemal, Kab Badung	1.000	Hak Pakai	SHP 23	21/12/2011	Pemerintah Desa Darmasaba	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Dinas PMDDUKCAPIL
71	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	10.575.000,00	Hibah	B.28.593/288/II/DPMD DUKCAPIL,	14/01/2022	Subak Uma Tegal Desa Sembung Kec Mengwi, Kab Badung	1.000	Hak Pakai	SHP 39	20/01/2002	Pemerintah Desa Sembung	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Dinas PMDDUKCAPIL
72	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	1.722.000.000,00	Hibah	B.28.593/385/II/DPMD DUKCAPIL,	14/01/2022	Subak Tungkub Munduk Delod sema, Kec Mengwi, Kab Badung	1.000	Hak Pakai	belum sertifikat		Pemerintah Desa Mengwi	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Dinas PMDDUKCAPIL
73	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	83.575.000,00	Hibah	B.28.593/297/II/DPMD DUKCAPIL,	14/01/2022	Subak Dukuh Banjar Werdibuana Kec Mengwi, Kab Badung	1.000	Hak Pakai	SHP 34	20/12/2011	Pemerintah Desa Werdibuana	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Dinas PMDDUKCAPIL
74	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	8.575.000,00	Hibah	B.28.593/293/II/DPMD DUKCAPIL,	14/01/2022	Desa Selat Kec.Abiansemal, Kab Badung	1.000	Hak Pakai	SHP 3	08/02/2005	Pemerintah Desa Selat	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Dinas PMDDUKCAPIL
75	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2010	18.462.000,00	Hibah	B.28.593/203/II/DPMD DUKCAPIL,	14/01/2022	Ds. Gulingan, Kec. Mengwi, Kab. Badung	1.360	Hak Pakai	SHP 15	26/01/2011	Pemerintah Desa Gulingan	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Dinas PMDDUKCAPIL
76	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2010	10.588.500,00	Hibah	B.28.593/203/II/DPMD DUKCAPIL,	14/01/2022	Desa Gulingan Kec Mengwi, Kab Badung	780	Hak Pakai	SHP 14	27/01/2011	Pemerintah Desa Gulingan	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Dinas PMDDUKCAPIL
77	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2010	7.602.000,00	Hibah	B.28.593/203/II/DPMD DUKCAPIL,	14/01/2022	Desa Gulingan Kec Mengwi, Kab Badung	560	Hak Pakai	SHP 16	28/01/2011	Pemerintah Desa Gulingan	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Dinas PMDDUKCAPIL
78	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	136.227.250,00	Hibah	B.28.593/374/II/DPMD DUKCAPIL,	14/01/2022	Subak Cemagi Let Desa Cemagi Kec Mengwi, Kab Badung	1.630	Hak Pakai	SHP 8	31/01/2005	Pemerintah Desa Cemagi	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Dinas PMDDUKCAPIL
79	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	8.775.000,00	Hibah	B.28.593/680/II/DPMD DUKCAPIL,	14/01/2022	Banjar Batulantang Desa Sulanggai Kec Petang, Kab Badung	1.170	Hak Pakai	SHP 6	08/02/2005	Pemerintah Desa Sulanggai	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Dinas PMDDUKCAPIL
80	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	2.475.000,00	Hibah	B.28.593/680/II/DPMD DUKCAPIL,	14/01/2022	Banjar Batulantang Desa Sulanggai Kec Petang, Kab Badung	330	Hak Pakai	SHP 8	08/02/2005	Pemerintah Desa Sulanggai	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Dinas PMDDUKCAPIL
81	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	405.000,00	Hibah	B.28.593/680/II/DPMD DUKCAPIL,	14/01/2022	Banjar Batulantang Desa Sulanggai Kec Petang, Kab Badung	54	Hak Pakai	SHP 9	08/02/2005	Pemerintah Desa Sulanggai	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Dinas PMDDUKCAPIL
82	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2010	11.850.000,00	Hibah	B.28.593/675/II/DPMD DUKCAPIL,	14/01/2022	Desa Bongkasa Pertiwi Kec Abiansemal, Kab Badung	1.580	Hak Pakai	SHP 12	08/02/2012	Pemerintah Desa Bongkasa Pertiwi	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Dinas PMDDUKCAPIL
83	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	14.400.000,00	Hibah	B.28.593/673/II/DPMD DUKCAPIL,	14/01/2022	Desa Bongkasa Kec Abiansemal, Kab Badung	1.920	Hak Pakai	SHP 14	08/02/2005	Pemerintah Desa Bongkasa	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Dinas PMDDUKCAPIL
84	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2010	139.200.000,00	Hibah	B.28.593/678/II/DPMD DUKCAPIL,	14/01/2022	Desa Mengwitani Kec Mengwi, Kab Badung	1.600	Hak Pakai	SHP 11	02/02/2011	Pemerintah Desa Mengwitani	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Dinas PMDDUKCAPIL
85	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	9.517.500,00	Hibah	B.28.593/295/II/DPMD DUKCAPIL,	14/01/2022	Desa Baha Kec.Mengwi, Kab Badung	900	Hak Pakai	SHP 21	20/12/2002	Pemerintah Desa Baha	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Dinas PMDDUKCAPIL
86	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	131.200.000,00	Hibah	B.28.593/645/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Desa Buruan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar	1.600	Hak Pakai	belum sertifikat		Pemerintah Desa Buruan	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
87	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	35.100.000,00	Pembelian	B.28.028/545/II/DPMD DUKCAPIL,	16/02/2022	Dusun Selat, Desa Banjarangkan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung	600	Hak Pakai	SHP 75	03/12/2002	Pemerintah Desa Banjarangkan	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
88	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	67.575.000,00	Hibah	B.28.593/916/II/DPMD DUKCAPIL,	16/02/2022	Banjar Dirgahayu, Desa Adat Gerih, Kec. Abiansemal, Kab Badung	1.000	Hak Pakai	SHP 33	08/02/2005	Pemerintah Desa Gerih	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
89	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	6.300.000,00	Hibah	B.28.028/543/II/DPMD DUKCAPIL,	16/02/2022	Desa Bakas, Kec.Banjarangkan Kab.Klungkung	600	Hak Pakai	SHP 3	01/11/2002	Pemerintah Desa Bakas	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
90	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	9.000.000,00	Hibah	B.28.028/541/II/DPMD DUKCAPIL,	16/02/2022	Dusun Sengkiding, Desa Aan, Kec.Banjarangkan, Kab.Klungkung	600	Hak Pakai	SHP 56	24/10/2002	Pemerintah Desa Aan	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
91	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	12.500.000,00	Hibah	B.28.028/634/UMUM/DPMD DUKCAPIL,	09/03/2022	Desa Rejasa, Kec.Penebel, Kab.Tabanan	1.000	Hak Pakai	SHP 19	27/04/2006	Pemerintah Desa Rejasa	Tempat Pengolahan Sampah	Dinas PMDDUKCAPIL
92	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	153.725.000,00	Hibah	B.28.028/4420/II/DPMD DUKCAPIL,	17/06/2022	Desa Mendoyo Dauh Tukad, Jembrana	21.500	Hak Pakai	SHP 21	21/02/2005	Pemerintah Desa Mendoyo	Fasilitas umum dan TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
93	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2022	14.000.000,00	Hibah	B.28.028/795/Umum/DPMD DUKCAPIL,	31/03/2022	Subak Kacang Dewa Dawa, Desa Kamasan, Kec.Klungkung	1.000	Hak Pakai	Persil 51		Pemerintah Desa Kamasan	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
94	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2022	30.000.000,00	Hibah	B.28.593/975/II/DPMD DUKCAPIL,	31/03/2022	Subak Kedampal, Desa Mengesta, Kec.Penebel, Kab.Tabanan	1.500	Hak Pakai	Persil 13		Pemerintah Desa Mengesta	TPS3R, PAUD TK	Dinas PMDDUKCAPIL
95	Tanah Sawah Irigasi	2022	20.000.000,00	Hibah	B.28.593/975/II/DPMD DUKCAPIL,	31/03/2022	Subak Kedampal, Desa Mangesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan	1.000	Hak Pakai	belum sertifikat		Pemerintah Desa Mengesta	Kantor Desa	Dinas PMDDUKCAPIL
96	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	179.550.000,00	Hibah	B.28.593/195/UMUM/DPMD DUKCAPIL,	04/01/2022	Desa Padangsambian Kelod	900	Hak Pakai	SHP 12.	19/12/2002	Pemerintah Desa Padangsambian Kelod	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
97	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1998	810.500.000,00	Hibah	B.28.028/7566/UMUM/DPMD DUKCAPIL,	03/10/2022	Desa Penatih Dangin Puri, Kota Denpasar	1.000	Hak Pakai	SHP 1.	09/08/1998	Pemerintah Desa Penatih Dangin Puri	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
98	Tanah Sawah Irigasi	1954	1.925.000,00	Hibah	B.28.028/640/UMUM/DPMD DUKCAPIL,	09/03/2022	Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan	550	Hak Pakai	SHP No.3	30/01/1990	Pemerintah Desa Beraban	Kantor Desa	Dinas PMDDUKCAPIL

No	Jenis Barang (per Golongan)	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Asal Usul	Dokumen Perjanjian	Tanggal Dokumen	Alamat Tanah (Desa/Kec./Kab.)	Luas M²	Hak Tanah	SHP No.	Tanggal Sertifikat	Penyewa/Pemimjam	Penggunaan	OPD yang mencatat
99	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1986	24.000.000,00	Pembelian	B.28.028/7562/SET/DPMD DUKCAPIL,	09/10/2022	Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan	1.500	Hak Pakai	SHP No.7	18/12/1986	Pemerintah Desa Timpag	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
100	Tanah Tegalan	2022	36.450.000,00	Hibah	B.28.028/660/SET/DPMD DUKCAPIL,	31/03/2022	Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan	1.350	Hak Pakai	Persil 7		Pemerintah Desa Kuwum	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
101	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2015	18.500.000,00	Hibah	B.28.028/5899/SET/DPMD DUKCAPIL,	03/08/2022	Desa Biaung, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan	1.000	Hak Pakai	SHP No.11	13/052015	Pemerintah Desa Biaung	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
102	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2002	4.630.500,00	Hibah	B.28.028/7628/UMUM/DPMD DUKCAPIL,	04/10/2022	Desa Sobangan Kec Mengwi, Kab Badung	540	Hak Pakai	SHP 87	20/12/2002	Pemerintah Desa Sobangan	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
103	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2002	8.746.500,00	Hibah	B.28.028/7628/UMUM/DPMD DUKCAPIL,	04/10/2022	Desa Sobangan Kec Mengwi, Kab Badung	1.020	Hak Pakai	SHP 128	20/12/2002	Pemerintah Desa Sobangan	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
104	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2002	4.973.500,00	Hibah	B.28.028/7628/UMUM/DPMD DUKCAPIL,	04/10/2022	Desa Sobangan Kec Mengwi, Kab Badung	580	Hak Pakai	SHP 129	20/12/2002	Pemerintah Desa Sobangan	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
105	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1996	14.000.000,00	Hibah	B.28.028/6658/SET/DPMD DUKCAPIL,	05/09/2022	Desa Munduk, Kec Banjar Kab Buleleng	500	Hak Pakai	SHP 4	22/02/1996	Pemerintah Desa Munduk	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
106	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	107.000.000,00	Hibah	B.28.028/6680/SET/DPMD DUKCAPIL,	06/09/2022	Desa Kedisan, Kec.Tegalalang Kab.Gianyar	1.000	Hak Pakai	SHP 3	17/01/2006	Pemerintah Desa Kedisan	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
107	Tanah Sawah Irigasi	2015	181.980.000,00	Hibah	B.28.028/6682/SET/DPMD DUKCAPIL,	06/09/2022	Desa Belega, Kec.Blahbatuh Kab.Gianyar	1.348	Hak Pakai	SHP 13	28/12/2012	Pemerintah Desa Belega	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
108	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2002	11.100.000,00	Hibah	B.28.028/7447/SET/DPMD DUKCAPIL,	29/09/2022	Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung	600	Hak Pakai	SHP No. 6.	19/11/2002	Pemerintah Desa Timuhun	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
109	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2002	26.500.000,00	Hibah	B.28.028/5894/UMUM/DPMD DUKCAPIL,	03/08/2022	Desa Dawan Kaler, Dawan, Klungkung	1.000	Hak Pakai	No. 5.	19/10/2002	Pemerintah Desa Dawan Kaler	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
110	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	41.340.000,00	Hibah	B.28.028/5894/UMUM/DPMD DUKCAPIL,	03/08/2022	Desa Dawan Kaler, Dawan, Klungkung	1.560	Hak Pakai	No.16.	19/10/2002	Pemerintah Desa Dawan Kaler	Fasilitas umum	Dinas PMDDUKCAPIL
111	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	36.835.000,00	Hibah	B.28.028/5894/UMUM/DPMD DUKCAPIL,	03/08/2022	Desa Dawan Kaler, Dawan, Klungkung	1.390	Hak Pakai	No.18.	30/12/2002	Pemerintah Desa Dawan Kaler	Fasilitas umum	Dinas PMDDUKCAPIL
112	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2022	14.000.000,00	Hibah	B.28.028/5928/SET/DPMD DUKCAPIL,	04/08/2022	Subak Selat Br. Dinas Bajing, Desa Tegak, Klungkung	1.000	Hak Pakai	belum sertifikat		Pemerintah Desa Tegak	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
113	Tanah Sawah Irigasi	1954	10.987.500,00	Hibah	B.28.028/5892/SET/DPMD DUKCAPIL,	03/08/2022	Desa Selisihan, Klungkung	1.465	Hak Pakai	No.17.	24/12/2002	Pemerintah Desa Selisihan	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
114	Tanah Tegalan	2022	78.900.000,00	Hibah	B.28.028/6161/Set/DPMD DUKCAPIL	15/08/2022	Desa Pengotan Kec Bangli, Kab Bangli	2.000	Hak Pakai	No.6	18/09/2002	Pemerintah Desa Pengotan	TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
115	Tanah Sawah Irigasi	2010	63.887.000,00	Hibah	B.28.028/5215/SET/DPMD DUKCAPIL,	10/05/2023	Ds.Munggu,Kc.Mengwi,Kab.Badung	1.160	Hak Pakai	No. 62	28/02/2011	Perbekel Desa Munggu,	Jalan Menuju Tempat Pengelolaan Sampah Desa Munggu	Dinas PMDDUKCAPIL
116	Tanah Sawah Irigasi	2015	303.020.000,00	Hibah	B.28.028/5694/SET/DPMD DUKCAPIL,	22/05/2023	Tabanan\Tabanan\Ds. Subamia	5.560	Hak Pakai	No. 7	30/12/2015	Perbekel Desa Subamia,	Lapangan Olahraga	Dinas PMDDUKCAPIL
117	Tanah Sawah Irigasi	2010	68.310.000,00	Hibah	B.28.028/5696/SET/DPMD DUKCAPIL,	22/05/2023	Ds.Tumbah Bayuh,Kec.Mengwi,Kab.Badung	990	Hak Pakai	No. 7	02/02/2011	Perbekel Desa Tumbak Bayuh,	Gedung Serba Guna	Dinas PMDDUKCAPIL
118	Tanah Sawah Irigasi	1954	23.423.625,00	Hibah	B.28.032/9630/SET/DPMD DUKCAPIL,	18/09/2023	Badung\Mengwi\Ds. Sembung	2.215	Hak Pakai	No.11	20/12/2002	Pemerintah Desa Kuwum	Dioperasikan oleh pihak lain (Pemerintah Desa Kuwum) untuk TPS3R, Lapangan Umum Desa dan Gedung Olahraga	Dinas PMDDUKCAPIL
119	Tanah Sawah Irigasi	1954	21.097.125,00	Hibah	B.28.032/9630/SET/DPMD DUKCAPIL,	18/09/2023	Badung\Mengwi\Ds. Sembung	1.995	Hak Pakai	No.12	20/12/2002	Pemerintah Desa Kuwum	Dioperasikan oleh pihak lain (Pemerintah Desa Kuwum) untuk TPS3R, Lapangan Umum Desa dan Gedung Olahraga	Dinas PMDDUKCAPIL
120	Tanah Sawah Irigasi	1954	49.120.875,00	Hibah	B.28.032/9630/SET/DPMD DUKCAPIL,	18/09/2023	Badung\Mengwi\Ds. Sembung	4.645	Hak Pakai	No.13	20/12/2002	Pemerintah Desa Kuwum	Dioperasikan oleh pihak lain (Pemerintah Desa Kuwum) untuk TPS3R, Lapangan Umum Desa dan Gedung Olahraga	Dinas PMDDUKCAPIL
121	Tanah Sawah Irigasi	1954	20.039.625,00	Hibah	B.28.032/9630/SET/DPMD DUKCAPIL,	18/09/2023	Badung\Mengwi\Ds. Sembung	1.895	Hak Pakai	No.14	20/12/2002	Pemerintah Desa Kuwum	Dioperasikan oleh pihak lain (Pemerintah Desa Kuwum) untuk TPS3R, Lapangan Umum Desa dan Gedung Olahraga	Dinas PMDDUKCAPIL
122	Tanah Sawah Irigasi	1954	23.846.625,00	Hibah	B.28.032/9630/SET/DPMD DUKCAPIL,	18/09/2023	Badung\Mengwi\Ds. Sembung	2.255	Hak Pakai	No.16.	20/12/2002	Pemerintah Desa Kuwum	Dioperasikan oleh pihak lain (Pemerintah Desa Kuwum) untuk TPS3R, Lapangan Umum Desa dan Gedung Olahraga	Dinas PMDDUKCAPIL
123	Tanah Sawah Irigasi	1954	70.180.000,00	Hibah	B.12.000.2.3.2/7167/SET/DPMD DUKCAPIL,	10/10/2024	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Tusan	2.420,00	Hak Pakai	22.06.03.09.4.00 014	10/24/2002	Desa Tusan	dioperasikan oleh Desa Tusan untuk TPS3R dan Kantor Perbekel	Dinas PMDDUKCAPIL
124	Tanah Sawah Irigasi	2010	12.240.000,00	Hibah	B.12.000.2.3.2/4813/SET/DPMD DUKCAPIL,	15/07/2025	Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kab.Badung	765,00	Hak Pakai	no.26	2010	Pemerintah Desa Kekeran	Dioperasikan oleh pihak lain (Pemerintah Desa Kekeran) untuk Kantor Perbekel Desa Kekeran	Dinas PMDDUKCAPIL
125	Tanah Sawah Irigasi	2010	17.280.000,00	Hibah	B.12.000.2.3.2/4813/SET/DPMD DUKCAPIL,	15/07/2025	Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kab.Badung	1.080,00	Hak Pakai	no.20	2010	Pemerintah Desa Kekeran	Dioperasikan oleh pihak lain (Pemerintah Desa Kekeran) untuk lapangan Volley	Dinas PMDDUKCAPIL
126	Tanah Sawah Irigasi	2010	112.370.000,00	Hibah	B.12.000.2.3.2/4807/SET/DPMD DUKCAPIL,	15/07/2025	Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kab.Badung	170,00	0	no.116	2015	Pemerintah Desa Munggu	Dioperasikan oleh pihak lain (Pemerintah Desa Munggu) untuk Taman Desa	Dinas PMDDUKCAPIL

No	Jenis Barang (per Golongan)	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Asal Usul	Dokumen Perjanjian	Tanggal Dokumen	Alamat Tanah (Desa/Kec./Kab.)	Luas M²	Hak Tanah	SHP No.	Tanggal Sertifikat	Penyewa/Pemimjam	Penggunaan	OPD yang mencatat
127	Tanah Lapangan Lainnya	1982	2.170.000.000,00	Hibah	B.12.000.2.3.2/4815/SET/DPMD DUKCAPIL,	15/07/2025	Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Kab.Tabanan	10.850,00	Hak Pakai	belum sertifikat		Pemerintah Desa Penatahan	Dioperasikan oleh pihak lain (Pemerintah Desa Penatahan) untuk Lapangan sepak bola	Dinas PMDDUKCAPIL
128	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1982	580.000.000,00	Hibah	B.12.000.2.3.2/4815/SET/DPMD DUKCAPIL,	15/07/2025	Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Kab.Tabanan	2.900,00	Hak Pakai	belum sertifikat		Pemerintah Desa Penatahan	Dioperasikan oleh pihak lain (Pemerintah Desa Penatahan) untuk Kantor perbekel desa penatahan dan gedung olahraga	Dinas PMDDUKCAPIL
129	Tanah Lapangan Lainnya	1982	240.000.000,00	Hibah	B.12.000.2.3.2/4815/SET/DPMD DUKCAPIL,	15/07/2025	Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Kab.Tabanan	1.200,00	Hak Pakai	belum sertifikat		Pemerintah Desa Penatahan	Dioperasikan oleh pihak lain (Pemerintah Desa Penatahan) untuk Lapangan Volley	Dinas PMDDUKCAPIL
130	Tanah Tegalan	1954	27.550.000,00	Hibah	B.12.000.2.3.2/3357/SET/DPMD DUKCAPIL,	22/05/2025	Desa Gelgel, Klungkung	950,00	Hak Pakai	No.18.	1954	Pemerintah Desa Gelgel	Dioperasikan oleh pihak lain (Pemerintah Desa Gelgel) untuk TPS3R	Dinas PMDDUKCAPIL
131	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1986	1.088.000	1.088.000	**B.12.000.2.3.2/4488/SET/DPMD DUKC**	03/07/2025	Desa Timpag, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan	68	Hak Pakai	22.02.000013201.0		12/11/2024	Tempat Pengolahan Sampah (TPS3R)	Dinas PMDDUKCAPIL
132	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	700.000	700.000	**B.12.000.2.3.2/4003/SET/DPMD DUKC**	12/06/2025	Desa Jumpai, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung	50	Hak Pakai	22.06.000002130.0		14/04/2025	Tempat Pengolahan Sampah	Dinas PMDDUKCAPIL
131	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2010	1.680.000.000,00	Pembelian	027/39856/UK/Disikpora	29/06/2020	Denpasar\Denpasar Timur\Ds. Sumerta Klod (Jl. Kapten Tantular No. 11 Niti Mandala Renon Denpasar.)	1.500	Hak Pakai	No. 131	14/04/2005	Kwartir Daerah		Dnis Pendidikan
132	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Terbuka	1985	663.200.000,00	Hibah	B.31.593/49024/UK/DIKPORA	06/07/2021	Kelurahan Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung	1.600	Hak Pakai	No. 8	12/09/2007	Pencak Silat Kertha Wisesa		Dnis Pendidikan
133	Tanah Sawah Irigasi	2020	596.117.250,00	Hibah	027/39857/UK/Disikpora	29/06/2020	Tabanan\Marga\Ds. Marga Dauh Puri	27.630	Hak Pakai	No. 1	30/12/2015	Kwartir Daerah		Dnis Pendidikan
134	Tanah Sawah Irigasi	2021	178.350.000,00	Hibah	B.31.593/51390/UK/DIKPORA	06/07/2021	Ds.Sading,Kc,Mengwi,Kab.Badung	2.050	Hak Pakai	No. 8	26/01/2011	Pencak Silat Bhakti Negara		Dnis Pendidikan
135	Tanah Lapangan Parkir Konstruksi Aspal	1954	165.800.000,00	Hibah	B.31.593/49024/UK/DIKPORA	06/07/2021	Kelurahan kerobokan Kaca, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung	400	Hak Pakai	47/HP/BPN-51.03/2020		Pencak Silat Kertha Wisesa		Dnis Pendidikan
136	Tanah Tegalan	1954	850.925.000,00	Hibah	B.10.000.2.3.2/21011/UK/DIKPORA	16/05/2024	Buleleng\Sukasada\Ds. Sukasada	33.700,00	Hak Pakai	22.04.06.01.1.000	14/11/2002	KONI Buleleng	KONI Buleleng	Dnis Pendidikan
137	Tanah Tegalan	1954	568.125.000,00	Hibah	B.10.000.2.3.2/21011/UK/DIKPORA	16/05/2024	Buleleng\Sukasada\Ds. Sukasada	22.500,00	Hak Pakai	22.04.06.01.1.000	14/11/2002	KONI Buleleng	KONI Buleleng	Dnis Pendidikan
138	Tanah Sawah Irigasi	2010	107.100.000,00	Hibah	B.26.000.2.3.2/1085/Sekret/Diskelkan	26-Apr-24	Desa Sempidi, Kec. Mengwi, Kabupaten Badunh	1260	Pakai	28	31/01/2011	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Bali	Pembangunan Gedung Kantor DPD HNSI Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan
139	Tanah Tegalan	1954	70.560.000	Hibah	B.31.000.2.3.2/2363/PBMD/BPKAD	09-Apr-25	Desa Suwat, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar	1.680	Hak Pakai	22.05.01.12.4.000	7 mei 2007	Desa Suwat	Pertanian	BPKAD
	Total		**27.807.287.609,54**											

Peralatan dan Mesin

No	Jenis Barang (per Golongan)	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Asal Usul	Dokumen	Tanggal Dokumen	Alamat Tanah (Desa/Kec./Kab.)	Luas M²	Hak Tanah	SHP No.	Tanggal Sertifikat	Penyewa/Pemimjam	Penggunaan	OPD yang mencatat
1	Station Wagon	2013	150.000.000,00	Hibah	B.31.020/15854/UK/DIKPORA	10/02/2022	-					Kwartir Daerah		Dnis Pendidikan
2	Mini Bus	2008	193.616.000,00	Pembelian	B.31.020/15854/UK/DIKPORA	10/02/2022	-					Kwartir Daerah		Dnis Pendidikan
3	Sepeda Motor	2013	15.656.800,00	Hibah	B.31.020/15854/UK/DIKPORA	10/02/2022	-					Kwartir Daerah		Dnis Pendidikan
4	Jet Pump	2024	127.207.000,00	Pembelian	B.11.2.3.2/11488/UMUM KEPEGAWAIAN/DISKES	12/12/2024	Jalan Trengguli Kelurahan Penatih Denpasar	-	-	-	-	PMI Provinsi Bali		Dinas Kesehatan
5	Switcher/Patch Panel	2024	6.290.000,00	Pembelian	B.11.2.3.2/11488/UMUM KEPEGAWAIAN/DISKES	12/12/2024	Jalan Trengguli Kelurahan Penatih Denpasar	-	-	-	-	PMI Provinsi Bali		Dinas Kesehatan
6	Tangki Penyimpan	2024	15.390.000,00	Pembelian	B.11.2.3.2/11488/UMUM KEPEGAWAIAN/DISKES	12/12/2024	Jalan Trengguli Kelurahan Penatih Denpasar	-	-	-	-	PMI Provinsi Bali		Dinas Kesehatan
	Total		**508.159.800,00**											

Gedung

No	Jenis Barang (per Golongan)	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Asal Usul	Dokumen	Tanggal Dokumen	Alamat Tanah (Desa/Kec./Kab.)	Luas M²	Hak Tanah	SHP No.	Tanggal Sertifikat	Penyewa/Pemimjam	Penggunaan	OPD yang mencatat
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2021	2.085.624.000,00	Hibah	B.18.028/4676/UMUM.KEPEG/DISKES	02/08/2022	Jalan Trengguli Kelurahan Penatih Denpasar	545.6 M²				PMI Canter		Dinas Kesehatan
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2021	441.411.000,00	Hibah	B.18.028/4676/UMUM.KEPEG/DISKES	02/08/2022	Jalan Trengguli Kelurahan Penatih Denpasar	161.2 M²				PMI Canter		Dinas Kesehatan
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2024	4.490.691.183,11	Pembelian	B.11.2.3.2/11488/UMUM KEPEGAWAIAN/DISKES	12/12/2024	Jalan Trengguli Kelurahan Penatih Denpasar	863 M²	-	-	-	PMI Canter	Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Bali	Dinas Kesehatan
4	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	2024	34.324.000,00	Pembelian	B.11.2.3.2/11488/UMUM KEPEGAWAIAN/DISKES	12/12/2024	Jalan Trengguli Kelurahan Penatih Denpasar	6.77 M²	-	-	-	PMI Canter	Aset PMI Power House PMI Provinsi Bali	Dinas Kesehatan
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2020	167.049.200,00	Hibah	B.13.028/4716/PBMD.BPKAD	23/11/2023	JL. HAYAM WURUK NO. 151 DPS					Komite Nasional Pemuda Indonesia		Dnis Pendidikan

No	Jenis Barang (per Golongan)	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Asal Usul	Dokumen Perjanjian	Tanggal Dokumen	Alamat Tanah (Desa/Kec./Kab.)	Luas M²	Hak Tanah	SHP No.	Tanggal Sertifikat	Penyewa/Pemimjam	Penggunaan	OPD yang mencatat
6	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	2010	734.712.000,00	Pembelian	027/39856/UK/Disikpora	29/06/2023	Desa Marga, Tabanan					Kwartir Daerah		Dnis Pendidikan
7	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	2012	2.320.020.750,00	Pembelian	B.29.028/8858/SEKRET/PUPRKIM	02/08/2023	Padepokan Perisai Diri Bali di Denpasar					Pencak Silat Perisai Diri		Dnis Pendidikan
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2022	268.116.000,00	Hibah	No : B.24.032/19687/SEKRET/D.KOMINFOS	06/11/2023	Jalan Trengguli 1 Kelurahan Penatih Denpasar	99,62	Hak Pakai	SHP 10	30/06/2022	Sekretariat ORARI Bali	Sekretariat ORARI Bali	DISKOMINFOS Provinsi Bali
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2022	194.817.000,00	Hibah	No : B.24.032/19687/SEKRET/D.KOMINFOS	06/11/2023	Jalan Trengguli 1 Kelurahan Penatih Denpasar	71,54	Hak Pakai	SHP 10	30/06/2022	Sekretariat ORARI Bali	Sekretariat ORARI Bali	DISKOMINFOS Provinsi Bali
	Total		**10.736.765.133,11**											

Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	Jenis Barang (per Golongan)	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Asal Usul	Dokumen	Tanggal Dokumen	Alamat Tanah (Desa/Kec./Kab.)	Luas M²	Hak Tanah	SHP No.	Tanggal Sertifikat	Penyewa/Pemimjam	Penggunaan	OPD yang mencatat
1	Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan	2024	18.873.000,00	Pembelian	B.11.2.3.2/11488/UMUM KEPEGAWAIAN/DISKES	12/12/2024	Jalan Trengguli Kelurahan Penatih Denpasar	-	-	-	-	PMI Provinsi Bali	dipergunakan oleh PMI Provinsi Bali	Dinas Kesehatan
2	Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan	2024	83.103.000,00	Pembelian	B.11.2.3.2/11488/UMUM KEPEGAWAIAN/DISKES	12/12/2024	Jalan Trengguli Kelurahan Penatih Denpasar	-	-	-	-	PMI Provinsi Bali	dipergunakan oleh PMI Provinsi Bali	Dinas Kesehatan
3	Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan	2024	37.993.000,00	Pembelian	B.11.2.3.2/11488/UMUM KEPEGAWAIAN/DISKES	12/12/2024	Jalan Trengguli Kelurahan Penatih Denpasar	-	-	-	-	PMI Provinsi Bali	dipergunakan oleh PMI Provinsi Bali	Dinas Kesehatan
4	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)	2024	1.321.000,00	Pembelian	B.11.2.3.2/11488/UMUM KEPEGAWAIAN/DISKES	12/12/2024	Jalan Trengguli Kelurahan Penatih Denpasar	-	-	-	-	PMI Provinsi Bali	dipergunakan oleh PMI Provinsi Bali	Dinas Kesehatan
5	Sumur Resapan	2024	10.544.000,00	Pembelian	B.11.2.3.2/11488/UMUM KEPEGAWAIAN/DISKES	12/12/2024	Jalan Trengguli Kelurahan Penatih Denpasar	-	-	-	-	PMI Provinsi Bali	dipergunakan oleh PMI Provinsi Bali	Dinas Kesehatan
	Total		**151.834.000,00**											

Lampiran 38

Rincian Mutasi Aset Tetap Rusak Berat
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2025

No	SKPD	SALDO AWAL	UNIT	Saldo Awal									
				PM	UNIT	GB	UNIT	JIJ	UNIT	ATL	UNIT	TOTAL AKUM RB	TOTAL RB NETTO
	Jumlah	**27.319.681.313,00**	**10.045**	**18.137.843.342,95**	**3.158**	**5.316.442.640,40**	**36**	**102.110.000,00**	**3**	**3.763.285.329,65**	**6.848**	**21.049.152.557,95**	**6.270.528.755,05**
1	Sekretariat DPRD	479.774.000,00	3,00	479.774.000,00	3,00	-	-	-	-	-	-	479.774.000,00	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	229.216.500,00	3,00	229.216.500,00	3,00	-	-	-	-	-	-	229.216.500,00	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	1.496.298.700,00	4,00	1.495.848.700,00	4,00	-	-	450.000,00	-	-	-	1.496.231.200,00	67.500,00
8	Dinas Kebudayaan	14.000.000,00	1,00	14.000.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	14.000.000,00	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	358.608.915,00	53,00	358.608.915,00	53,00	-	-	-	-	-	-	358.608.915,00	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	275.250.500,00	-	275.250.500,00	-	-	-	-	-	-	-	275.250.500,00	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	566.315.166,00	94,00	556.438.166,00	93,00	-	-	9.877.000,00	1,00	-	-	561.047.435,00	5.267.731,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	40.000.000,00	1,00	40.000.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	40.000.000,00	-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	21.882.534.632,00	9.762,00	12.951.298.461,95	2.882,00	5.076.167.840,40	30,00	91.783.000,00	2,00	3.763.285.329,65	6.848,00	15.910.789.829,95	5.971.744.802,05
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	640.286.700,00	61,00	640.286.700,00	61,00	-	-	-	-	-	-	624.867.063,00	15.419.637,00
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	83.265.000,00	11,00	83.265.000,00	11,00	-	-	-	-	-	-	-	83.265.000,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	1.254.131.200,00	52,00	1.013.856.400,00	46,00	240.274.800,00	6,00	-	-	-	-	1.059.367.115,00	194.764.085,00
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Reklasifikasi dari Aset Tetap Kondisi Baik								Penerimaan Hibah		Anta		
		PM	UNIT	GB	UNIT	JIJ	UNIT	ATL	UNIT	PM	UNIT	PM	UNIT	GB
	Jumlah	29.300.849.544,37	1.876	2.557.060.487,99	21	17.280.000,00	1	1.375.141.978,00	1.113	-	-	-	-	-
1	Sekretariat DPRD	938.508.691,00	-	-	-	-	-	-	-					
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-					
4	Sekretariat Daerah	2.508.447.577,50	-	-	-	-	-	-	-					
5	Dinas Perhubungan	620.531.300,00	70	115.753.000,00	4,00	-	-	-	-					
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	1.256.569.703,00	144	-	-	17.280.000,00	1,00	2.437.000	1					
7	Dinas Kesehatan	2.599.284.681,72	182	778.423.188,99	-	-	-	-	-					
8	Dinas Kebudayaan	699.019.500,00	67	-	-	-	-	-	-					
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	5.567.519.699,00	63	418.724.710,00	5,00	-	-	-	-					
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	297.648.975,00	-	-	-	-	-	-	-					
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	-					
12	Badan Pendapatan	1.186.396.746,74	-	-	-	-	-	-	-					
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	793.903.264,54	-	-	-	-	-	-	-					
14	Inspektorat	229.850.000,00	2	-	-	-	-	-	-					
15	Dinas Pariwisata	147.117.800,00	23	-	-	-	-	-	-					
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-					
17	Satuan Polisi Pamong Praja	327.498.228,00	69	-	-	-	-	-	-					
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	603.415.420,00	131	-	-	-	-	-	-					
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	433.092.368,00	107	-	-	-	-	-	-					
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	240.513.000,00	-	-	-	-	-	-	-					
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-					
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	63.950.450,00	-	-	-	-	-	-	-					
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	367.069.600,00	19	-	-	-	-	-	-					
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	998.615.318,00	112	-	-	-	-	-	-					
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	818.694.932,53	162	284.606.829,00	3,00	-	-	-	-					
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	6.985.804.607,34	461	826.164.760,00	8,00	-	-	1.340.404.978	1.110					
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	545.189.752,00	95	-	-	-	-	32.300.000	2					
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-					
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	26.767.000,00	4	133.388.000,00	1,00	-	-	-	-					
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	950.845.530,00	136	-	-	-	-	-	-					
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	94.595.400,00	29	-	-	-	-	-	-					

No	SKPD	Mutasi Tambah												
		r Aset Tetap Tahun Berjalan					Koreksi Pencatatan Saldo Awal							
		UNIT	JIJ	UNIT	ATL	UNIT	PM	UNIT	GB	UNIT	JIJ	UNIT	ATL	UNIT
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Sekretariat DPRD													
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali													
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali													
4	Sekretariat Daerah													
5	Dinas Perhubungan													
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik													
7	Dinas Kesehatan													
8	Dinas Kebudayaan													
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan													
10	Dinas Koperasi Dan Ukm													
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp													
12	Badan Pendapatan													
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah													
14	Inspektorat													
15	Dinas Pariwisata													
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik													
17	Satuan Polisi Pamong Praja													
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah													
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia													
20	Badan Penghubung Provinsi Bali													
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali													
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali													
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa													
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman													
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak													
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga						-	-						
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan						-	-						
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral													
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup													
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan													

No	SKPD	Mutasi Antar Perangkat Daerah								Pengeluaran Hibah				
		PM	UNIT	GB	UNIT	JIJ	UNIT	ATL	UNIT	PM	UNIT	GB	UNIT	JIJ
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Sekretariat DPRD													
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali													
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali													
4	Sekretariat Daerah													
5	Dinas Perhubungan													
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik													
7	Dinas Kesehatan													
8	Dinas Kebudayaan													
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan													
10	Dinas Koperasi Dan Ukm													
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp													
12	Badan Pendapatan													
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah													
14	Inspektorat													
15	Dinas Pariwisata													
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik													
17	Satuan Polisi Pamong Praja													
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah													
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia													
20	Badan Penghubung Provinsi Bali													
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali													
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali													
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa													
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman													
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak													
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga													
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan													
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral													
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup													
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan													

No	SKPD				Penghapusan									
		UNIT	ATL	UNIT	PM	UNIT	GB	UNIT	JIJ	UNIT	ATL	UNIT	PM	UNIT
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**16.980.535.329,10**	**1.849**	**1.653.854.958,39**	**7**	**17.280.000,00**	**1**	**2.437.000,00**	**1**	**-**	**-**
1	Sekretariat DPRD				1.418.282.691,00	3,00	-	-	-	-	-	-		
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali				-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali				-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Sekretariat Daerah				1.579.114.277,50	-	-	-	-	-	-	-		
5	Dinas Perhubungan				396.975.300,00	68,00	115.753.000,00	4,00	-	-	-	-		
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik				1.076.069.703,00	142,00	-	-	17.280.000,00	1,00	2.437.000,00	1,00		
7	Dinas Kesehatan				1.060.179.826,32	144,00	778.423.188,99	-	-	-	-	-		
8	Dinas Kebudayaan				713.019.500,00	68,00	-	-	-	-	-	-		
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan				-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Dinas Koperasi Dan Ukm				297.648.975,00	-	-	-	-	-	-	-		
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp				-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Badan Pendapatan				1.461.647.246,74	-	-	-	-	-	-	-		
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah				603.066.264,54	-	-	-	-	-	-	-		
14	Inspektorat				-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Dinas Pariwisata				147.117.800,00	23,00	-	-	-	-	-	-		
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Satuan Polisi Pamong Praja				166.498.228,00	56,00	-	-	-	-	-	-		
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				603.415.420,00	131,00	-	-	-	-	-	-		
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia				433.092.368,00	107,00	-	-	-	-	-	-		
20	Badan Penghubung Provinsi Bali				-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali				-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali				63.950.450,00	-	-	-	-	-	-	-		
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa				367.069.600,00	19,00	-	-	-	-	-	-		
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman				-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				-	-	210.181.829,00	2,00	-	-	-	-		
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga				4.943.945.777,00	831,00	549.496.940,40	1,00	-	-	-	-		
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan				538.719.452,00	82,00	-	-	-	-	-	-		
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral				83.265.000,00	11,00	-	-	-	-	-	-		
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				-	-	-	-	-	-	-	-		
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup				932.862.050,00	135,00	-	-	-	-	-	-		
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan				94.595.400,00	29,00	-	-	-	-	-	-		

No	SKPD	Mutasi Kurang												
		Reklasifikasi ke Aset Tetap						Antar Aset Tetap Tahun Berjalan						
		GB	UNIT	JIJ	UNIT	ATL	UNIT	PM	UNIT	GB	UNIT	JIJ	UNIT	ATL
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Sekretariat DPRD													
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali													
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali													
4	Sekretariat Daerah													
5	Dinas Perhubungan													
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik													
7	Dinas Kesehatan													
8	Dinas Kebudayaan													
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan													
10	Dinas Koperasi Dan Ukm													
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp													
12	Badan Pendapatan													
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah													
14	Inspektorat													
15	Dinas Pariwisata													
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik													
17	Satuan Polisi Pamong Praja													
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah													
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia													
20	Badan Penghubung Provinsi Bali													
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali													
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali													
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa													
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman													
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak													
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga													
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan													
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral													
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup													
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan													

No	SKPD		Koreksi Pencatatan Saldo Awal								Mutasi Antar P			
		UNIT	PM	UNIT	GB	UNIT	JIJ	UNIT	ATL	UNIT	PM	UNIT	GB	UNIT
	Jumlah	-	-	-	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Sekretariat DPRD													
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali													
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali													
4	Sekretariat Daerah													
5	Dinas Perhubungan													
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik													
7	Dinas Kesehatan													
8	Dinas Kebudayaan													
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan													
10	Dinas Koperasi Dan Ukm													
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp													
12	Badan Pendapatan													
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah													
14	Inspektorat													
15	Dinas Pariwisata													
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik													
17	Satuan Polisi Pamong Praja													
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah													
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia													
20	Badan Penghubung Provinsi Bali													
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali													
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali													
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa													
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman													
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak													
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga				50.000.000,00									
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		-	-										
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral													
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup													
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan													

No	SKPD	rangkat Daerah			
		JIJ	UNIT	ATL	UNIT
	Jumlah	-	-	-	-
1	Sekretariat DPRD				
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali				
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali				
4	Sekretariat Daerah				
5	Dinas Perhubungan				
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik				
7	Dinas Kesehatan				
8	Dinas Kebudayaan				
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan				
10	Dinas Koperasi Dan Ukm				
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp				
12	Badan Pendapatan				
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah				
14	Inspektorat				
15	Dinas Pariwisata				
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				
17	Satuan Polisi Pamong Praja				
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia				
20	Badan Penghubung Provinsi Bali				
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali				
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali				
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa				
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman				
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga				
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan				
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral				
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup				
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan				

No	SKPD	Saldo Akhir											
		PM	UNIT	GB	UNIT	JIJ	UNIT	ATL	UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL AKUM RB	TOTAL RB NETTO
	Jumlah	**30.458.157.558,22**	**3.185**	**6.169.648.170,00**	**50**	**102.110.000,00**	**3**	**5.135.990.307,65**	**7.960**	**41.865.906.035,87**	**11.198**	**33.778.836.353,22**	**8.087.069.682,65**
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	1.158.549.800,00	3,00	-	-	-	-	-	-	1.158.549.800,00	3,00	1.158.549.800,00	-
5	Dinas Perhubungan	223.556.000,00	2,00	-	-	-	-	-	-	223.556.000,00	2,00	223.556.000,00	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	180.500.000,00	2,00	-	-	-	-	-	-	180.500.000,00	2,00	180.500.000,00	-
7	Dinas Kesehatan	3.034.953.555,40	42,00	-	-	450.000,00	-	-	-	3.035.403.555,40	42,00	3.035.336.055,40	67.500,00
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	5.926.128.614,00	116,00	418.724.710,00	5,00	-	-	-	-	6.344.853.324,00	121,00	6.070.783.752,00	274.069.572,00
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	- 0,00	-	-	-	-	-	-	-	- 0,00	-	- 0,00	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	190.837.000,00	-	-	-	-	-	-	-	190.837.000,00	-	190.837.000,00	-
14	Inspektorat	229.850.000,00	2,00	-	-	-	-	-	-	229.850.000,00	2,00	229.850.000,00	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	161.000.000,00	13,00	-	-	-	-	-	-	161.000.000,00	13,00	161.000.000,00	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	240.513.000,00	-	-	-	-	-	-	-	240.513.000,00	-	240.513.000,00	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1555053484,00	205,00	-	-	9.877.000,00	1,00	-	-	1.564.930.484,00	206,00	1.559.662.753,00	5.267.731,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	858.694.932,53	163,00	74.425.000,00	1,00	-	-	-	-	933.119.932,53	164,00	928.902.516,53	4.217.416,00
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	14.993.157.292,29	2.512,00	5.302.835.660,00	37,00	91.783.000,00	2,00	5.103.690.307,65	7.958,00	25.491.466.259,94	10.509,00	18.014.314.645,29	7.477.151.614,65
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	646.757.000,00	74,00	-	-	-	-	32.300.000,00	2,00	679.057.000,00	76,00	631.337.363,00	47.719.637,00
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	26.767.000,00	4,00	133.388.000,00	1,00	-	-	-	-	160.155.000,00	5,00	76.342.873,00	83.812.127,00
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	1.031.839.880,00	47,00	240.274.800,00	6,00	-	-	-	-	1.272.114.680,00	53,00	1.077.350.595,00	194.764.085,00
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lampiran 39

Rincian Mutasi Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2025

No	SKPD	SALDO AWAL	UNIT	Saldo Awal									
				TANAH	UNIT	PM	UNIT	GB	UNIT	JIJ	UNIT	ATL	UNIT
	Jumlah	**320.265.353.490,41**	**515,00**	**82.966.324.309,54**	**210,00**	**1.478.545.127,00**	**16,00**	**31.950.757.316,61**	**31,00**	**176.821.220.737,26**	**257,00**	**-**	**-**
1	Sekretariat DPRD	-	-										
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-										
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-										
4	Sekretariat Daerah	-	-										
5	Dinas Perhubungan	27.048.506.000,00	1,00										
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	1.430.239.097,66	1,00	418.218.000,00	1,00			1.012.021.097,66					
7	Dinas Kesehatan	14.654.233.050,85	22,00	7.112.008.000,00	3,00	148.887.000,00	10,00	7.241.504.050,85	4,00	151.834.000,00	5,00		
8	Dinas Kebudayaan	-	-										
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	107.100.000,00	-	107.100.000,00		-	-						
10	Dinas Koperasi Dan UKM	-	-										
11	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	-	-										
12	Badan Pendapatan	-	-										
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	77.434.725.630,00	99,00	56.930.078.950,00	76,00	970.385.327,00	3,00	17.718.108.503,00	18,00	1.816.152.850,00	2,00		
14	Inspektorat	-	-										
15	Dinas Pariwisata	-	-										
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-										
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-										
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-										
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-										
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-										
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-										
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	1.299.197.500,00	10,00	1.299.197.500,00	10,00								
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	12.397.204.609,54	113,00	12.397.204.609,54	113,00								
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	177.325.566.810,26	254,00					2.472.332.923,00	4,00	174.853.233.887,26	250,00		
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-										
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	8.568.580.792,10	15,00	4.702.517.250,00	7,00	359.272.800,00	3,00	3.506.790.742,10	5,00			-	-
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-										
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-									-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-										
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-										
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-										

No	SKPD					Reklasifikasi dari Aset Tetap Kondisi Baik								
		KDP	UNIT	SALDO AWAL PENYUSUTAN	SALDO AWAL NETTO	TANAH	UNIT	PM	UNIT	GB	UNIT	JIJ	UNIT	ATL	UNIT
	Jumlah	**27.048.506.000,00**	**1,00**	**84.281.395.559,03**	**235.983.957.931,38**	**19.784.712.875,00**	**21,00**	**483.399.528,58**	**6**	**17.773.646.001,37**	**-**	**849.090.916,85**	**-**	**-**	**-**
1	Sekretariat DPRD			-	-					89.820.697,37					
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali			-	-										
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali			-	-										
4	Sekretariat Daerah			-	-			111.673.247,58							
5	Dinas Perhubungan	27.048.506.000,00	1,00	-	27.048.506.000,00										
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik			224.123.328,00	1.206.115.769,66			271.044.000,00	6						
7	Dinas Kesehatan			1.145.904.956,00	13.508.328.094,85			-	-	535.513.158,02	-	165.074.698,48	-		
8	Dinas Kebudayaan			-	-										
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan			-	107.100.000,00	-	-								
10	Dinas Koperasi Dan UKM			-	-										
11	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP			-	-										
12	Badan Pendapatan			-	-										
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah			6.347.890.049,00	71.086.835.581,00	16.441.639.625,00	13,00	68.213.500,00		16.445.590.100,00		248.292.725,00			
14	Inspektorat			-	-										
15	Dinas Pariwisata			-	-										
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik			-	-										
17	Satuan Polisi Pamong Praja			-	-										
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			-	-										
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia			-	-										
20	Badan Penghubung Provinsi Bali			-	-										
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali			-	-										
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali			-	1.299.197.500,00	183.633.250,00	1,00								
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa			-	12.397.204.609,54	3.159.440.000,00	7,00								
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman			75.880.323.753,03	101.445.243.057,23							435.723.493,37			
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			-	-										
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga			683.153.473,00	7.885.427.319,10	-	-	32.468.781,00		702.722.045,98					
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan			-	-										
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral			-	-										
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			-	-										
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup			-	-										
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan			-	-										

No	SKPD	Mutasi Tambah																			
		Reklasifikasi Antar Aset Lainnya				Mutasi Antar SKPD						Koreksi Pencatatan Saldo Awal									
		TANAH	UNIT	GB	UNIT	PM	GB	JIJ	ATL	KDP	ATB	TANAH	UNIT	PM	GB	JIJ	ATL	KDP	ATB	TANAH	UNIT
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.788.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Sekretariat DPRD																				
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali																				
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali																				
4	Sekretariat Daerah																				
5	Dinas Perhubungan																				
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik			-	-																
7	Dinas Kesehatan																				
8	Dinas Kebudayaan																				
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan													-							
10	Dinas Koperasi Dan UKM																				
11	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP																				
12	Badan Pendapatan																				
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah											-	-								
14	Inspektorat																				
15	Dinas Pariwisata																				
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik																				
17	Satuan Polisi Pamong Praja																				
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah																				
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia																				
20	Badan Penghubung Provinsi Bali																				
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali																				
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali																				
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa											1.788.000,00									
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman			-	-																
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak																				
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga																				
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan																				
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral																				
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																				
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup																				
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan																				

No	SKPD	Penghapusan												
		PM	UNIT	GB	UNIT	JIJ	UNIT	ATL	UNIT	KDP	UNIT	TANAH	UNIT	PM
	Jumlah	**111.673.247,58**	**-**	**-**	**-**	**14.117.300.000,00**	**2,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40.800.000,00**	**-**	**-**
1	Sekretariat DPRD													
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali													
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali													
4	Sekretariat Daerah	111.673.247,58												
5	Dinas Perhubungan													
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik			-	-									
7	Dinas Kesehatan													
8	Dinas Kebudayaan													
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-											
10	Dinas Koperasi Dan UKM													
11	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP													
12	Badan Pendapatan													
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah											40.800.000,00	-	
14	Inspektorat													
15	Dinas Pariwisata													
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik													
17	Satuan Polisi Pamong Praja													
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah													
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia													
20	Badan Penghubung Provinsi Bali													
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali													
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali													
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa											-		
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman					14.117.300.000,00	2,00							
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak													
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga							-	-					
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan													
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral							-						
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup													
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan													

No	SKPD	Mutasi Kurang																
		Koreksi Saldo Awal						Pengeluaran Hibah										
		UNIT	GB	UNIT	JIJ	UNIT	ATL	UNIT	TANAH	UNIT	PM	GB	UNIT	JIJ	UNIT	ATL	KDP	ATB
	Jumlah	**-**	**1.023.550.757,50**	**2,00**	**298.470.888,26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	Sekretariat DPRD																	
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali																	
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali																	
4	Sekretariat Daerah																	
5	Dinas Perhubungan																	
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik		549.088.097,66															
7	Dinas Kesehatan		189.453.867,74															
8	Dinas Kebudayaan																	
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan																	
10	Dinas Koperasi Dan UKM																	
11	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP																	
12	Badan Pendapatan																	
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah								-	-								
14	Inspektorat																	
15	Dinas Pariwisata																	
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik																	
17	Satuan Polisi Pamong Praja																	
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah																	
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia																	
20	Badan Penghubung Provinsi Bali																	
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali																	
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali																	
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa																	
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman				298.470.888,26													
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak																	
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga		285.008.792,10	2,00														
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan																	
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral																	
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																	
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup																	
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan																	

No	SKPD	Reklasifikasi ke Aset Tetap									TANAH	UNIT	PM	UNIT	GB	UNIT
		TANAH	UNIT	PM	GB	UNIT	JIJ	ATL	KDP	ATB						
	Jumlah	**1.814.465.225,00**	**8,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.048.506.000,00**	**1,00**	**100.897.559.959,54**	**223,00**	**1.850.271.408,00**	**22,00**	**48.700.852.560,48**	**29,00**
1	Sekretariat DPRD										-	-	-	-	89.820.697,37	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali										-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali										-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah										-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan								27.048.506.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik										418.218.000,00	1,00	271.044.000,00	6,00	462.933.000,00	-
7	Dinas Kesehatan										7.112.008.000,00	3,00	148.887.000,00	10,00	7.587.563.341,13	4,00
8	Dinas Kebudayaan										-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan										107.100.000,00	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan UKM										-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP										-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan										-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	170.086.225,00			-	-					73.160.832.350,00	89,00	1.038.598.827,00	3,00	34.163.698.603,00	18,00
14	Inspektorat										-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata										-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik										-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja										-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah										-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia										-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali										-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali										-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	704.950.000,00	1,00								777.880.750,00	10,00	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	939.429.000,00	7,00								14.619.003.609,54	113,00	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman										-	-	-	-	2.472.332.923,00	4,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak										-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga										4.702.517.250,00	7,00	391.741.581,00	3,00	3.924.503.995,98	3,00
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan										-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral										-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup										-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan										-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Saldo Akhir									
		JIJ	UNIT	ATL	UNIT	KDP	UNIT	TOTAL	UNIT	SALDO AKHIR PENYUSUTAN	SALDO AKHIR NETTO
	Jumlah	**163.254.540.765,85**	**255,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**314.703.224.693,87**	**529,00**	**74.077.067.497,00**	**240.626.157.196,87**
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	89.820.697,37	-	-	89.820.697,37
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	1.152.195.000,00	7,00	392.731.211,00	759.463.789,00
7	Dinas Kesehatan	316.908.698,48	5,00	-	-	-	-	15.165.367.039,61	22,00	1.145.589.200,00	14.019.777.839,61
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	107.100.000,00	-	-	107.100.000,00
10	Dinas Koperasi Dan UKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	2.064.445.575,00	2,00	-	-	-	-	110.427.575.355,00	112,00	10.301.410.664,00	100.126.164.691,00
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	777.880.750,00	10,00	-	777.880.750,00
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	14.619.003.609,54	113,00	-	14.619.003.609,54
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	160.873.186.492,37	248,00	-	-	-	-	163.345.519.415,37	252,00	61.554.657.963,00	101.790.861.452,37
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	9.018.762.826,98	13,00	682.678.459,00	8.336.084.367,98
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RINCIAN ASET PINJAM PAKAI
PEMERINTAH PROVINSI BALI
PER 31 DESEMBER 2025

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan/SHP	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl Perjanjian	Luas (M2)	Peminjam	Posisi Per 1 Januari 2025			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2025			Posisi Per 31 Desember 2025		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Ekstra Kompatibel		Penambahan	Pengurangan	Ekstra Kompatibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
													Nilai	Nilai	nilai			
Jumlah Aset di Pinjam Pakai									**77.434.725.630,00**	**(6.347.890.049,00)**	**-**	**77.434.725.630,00**	**33.133.175.950,00**	**210.886.225,00**	**-**	**110.357.015.355,00**	**(10.301.410.664,00)**	**100.055.604.691,00**
Jumlah Aset Tetap Tanah di Pinjam Pakai							**523.904,00**		**56.930.078.950,00**	**-**	**-**	**56.930.078.950,00**	**16.371.079.625,00**	**210.886.225,00**	**-**	**73.090.272.350,00**	**-**	**73.090.272.350,00**
1	01.01.02.02.001	000973	Tanah Tegalan	22.01.02.21.4.00011	Jembrana\Negara\Ds. Sangkaragung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari 2022	11.620,00	Pemkab Jembrana	162.680.000,00			162.680.000,00				162.680.000,00		162.680.000,00
2	01.01.02.02.001	000974	Tanah Tegalan	22.01.02.21.4.00012	Jembrana\Negara\Ds. Sangkaragung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari 2022	5.790,00	Pemkab Jembrana	81.060.000,00			81.060.000,00				81.060.000,00		81.060.000,00
3	01.01.02.02.001	000975	Tanah Tegalan	22.01.02.21.4.00013	Jembrana\Negara\Ds. Sangkaragung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari 2022	5.080,00	Pemkab Jembrana	71.120.000,00			71.120.000,00				71.120.000,00		71.120.000,00
4	01.01.02.02.001	000976	Tanah Tegalan	22.01.02.21.4.00014	Jembrana\Negara\Ds. Sangkaragung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari 2022	5.600,00	Pemkab Jembrana	78.400.000,00			78.400.000,00				78.400.000,00		78.400.000,00
5	01.01.02.02.001	000977	Tanah Tegalan	22.01.02.21.4.00015	Jembrana\Negara\Ds. Sangkaragung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari 2022	5.050,00	Pemkab Jembrana	70.700.000,00			70.700.000,00				70.700.000,00		70.700.000,00
6	01.01.02.02.001	000978	Tanah Tegalan	22.01.02.21.4.00016	Jembrana\Negara\Ds. Sangkaragung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari 2022	7.200,00	Pemkab Jembrana	100.800.000,00			100.800.000,00				100.800.000,00		100.800.000,00
7	01.01.02.02.001	000979	Tanah Tegalan	22.01.02.21.4.00017	Jembrana\Negara\Ds. Sangkaragung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari 2022	5.150,00	Pemkab Jembrana	72.100.000,00			72.100.000,00				72.100.000,00		72.100.000,00
8	01.01.02.02.001	000980	Tanah Tegalan	22.01.02.21.4.00018	Jembrana\Negara\Ds. Sangkaragung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari 2022	5.000,00	Pemkab Jembrana	70.000.000,00			70.000.000,00				70.000.000,00		70.000.000,00
9	01.01.02.02.001	000982	Tanah Tegalan	22.01.02.21.4.00020	Jembrana\Negara\Ds. Sangkaragung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari 2022	8.640,00	Pemkab Jembrana	120.960.000,00			120.960.000,00				120.960.000,00		120.960.000,00
10	01.01.02.01.005	001390	Tanah Sawah Irigasi	22.03.06.04.4.00030	Subak.Blahkiuh/Br.Blahkiuh/Kec.Abiansemal/Badung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No. B.13.000.2.3.2/483/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 20 Maret 2024	14.340,00	Pemkab Badung	125.475.000,00			125.475.000,00				125.475.000,00		125.475.000,00
11	01.01.02.02.001	001081	Tanah Tegalan	22.08.02.04.4.00062	Karangasem\Manggis\Ds. Antiga Klod	Perjanjian pinjam pakai dengan pemkab karangasem No. B.13.032/552/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27 Pebruari 2023	1.410,00	Pemkab Karangasem	4.935.000,00			4.935.000,00				4.935.000,00		4.935.000,00
12	01.01.02.02.001	001082	Tanah Tegalan	22.08.02.04.4.00066	Karangasem\Manggis\Ds. Antiga Klod	Perjanjian pinjam pakai dengan pemkab karangasem No. B.13.032/552/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27 Pebruari 2023	4.920,00	Pemkab Karangasem	17.220.000,00			17.220.000,00				17.220.000,00		17.220.000,00
13	01.01.02.02.001	001189	Tanah Tegalan	22.08.03.05.4.00013	Karangasem\Rendang\Ds. Nongan	Perjanjian pinjam pakai dengan pemkab karangasem No. B.13.032/552/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27 Pebruari 2023	3.440,00	Pemkab Karangasem	8.428.000,00			8.428.000,00				8.428.000,00		8.428.000,00
14	01.01.01.04.003	000016	Tanah Bangunan Rumah Sakit	shp 229	Jln. Singaraja Karangasem,Ds.Kubu,Kec.Kubu,Kab.Karangasem	Perjanjian pinjam pakai dengan pemkab karangasem No. B.13.032/552/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27 Pebruari 2023	880,00	Pemkab Karangasem	12.320.000,00			12.320.000,00				12.320.000,00		12.320.000,00
15	01.01.01.04.001	000085	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22.09.03.04.4.00077	Des.Sesetan,Kec.Densel,Kota Dps	Perpanjangan I Perjanjian Pinjam Pakai dengam Universitas Terbuka No. B.13.593/1878/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 26 Juli 2021	1.975,00	Universitas Terbuka	1.060.575.000,00			1.060.575.000,00				1.060.575.000,00		1.060.575.000,00
16	01.01.02.02.001	001258	Tanah Tegalan	22.08.07.01.4.00022	Karangasem\Abang\Ds. Tista	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Karangasem Nomor: 593/610/UPTD.PBMD tanggal 24 Pebruari 2020	4.050,00	Pemkab Karangasem	14.175.000,00			14.175.000,00				14.175.000,00		14.175.000,00
17	01.01.02.02.001	000043	Tanah Tegalan	22.03.05.02.4.00026	Badung\Mengwi\Ds. Baha	Perpanjangan Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No. B.31.000.2.3.2/2323/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 121 Oktober 2024	3.480,00	Pemkab Badung	36.801.000,00			36.801.000,00				36.801.000,00		36.801.000,00
18	01.01.02.02.001	000044	Tanah Tegalan	22.03.05.02.4.00027	Badung\Mengwi\Ds. Baha	Perpanjangan Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No. B.31.000.2.3.2/2323/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 121 Oktober 2024	3.330,00	Pemkab Badung	35.214.750,00			35.214.750,00				35.214.750,00		35.214.750,00
19	01.01.02.02.001	000045	Tanah Tegalan	22.03.05.02.4.00028	Badung\Mengwi\Ds. Baha	Perpanjangan Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No. B.31.000.2.3.2/2323/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 121 Oktober 2024	1.330,00	Pemkab Badung	14.064.750,00			14.064.750,00				14.064.750,00		14.064.750,00

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan/SHP	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl Perjanjian	Luas (M2)	Peminjam	Posisi Per 1 Januari 2025			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2025			Posisi Per 31 Desember 2025		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Ekstra Kompatibel		Penambahan	Pengurangan	Ekstra Kompatibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
													Nilai	Nilai	nilai			
20	01.01.02.01.005	000111	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.19.4.00007	Badung\Mengwi\Ds. Cemagi	Perubahan I Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No. B.13.032/892/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 31 Maret 2022	1.935,00	Pemkab Badung	161.717.625,00			161.717.625,00				161.717.625,00		161.717.625,00
21	01.01.02.01.005	000115	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.19.4.00011	Badung\Mengwi\Ds. Cemagi	Perubahan I Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No. B.13.032/892/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 31 Maret 2022	1.115,00	Pemkab Badung	93.186.125,00			93.186.125,00				93.186.125,00		93.186.125,00
22	01.01.02.01.005	000119	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.19.4.00015	Badung\Mengwi\Ds. Cemagi	Perubahan I Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No. B.13.032/892/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 31 Maret 2022	1.035,00	Pemkab Badung	86.500.125,00			86.500.125,00				86.500.125,00		86.500.125,00
23	01.01.02.01.005	001333	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.10.4.00053	Subak.Cemagi/Ds.Cemagi/Kec.Mengwi/Badung	Perubahan I Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No. B.13.032/892/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 31 Maret 2022	1.640,00	Pemkab Badung	137.063.000,00			137.063.000,00				137.063.000,00		137.063.000,00
24	01.01.02.01.005	001334	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.19.4.00052	Subak.Cemagi/Br.Cemagi/Kec.Mengwi/Badung	Perubahan I Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No. B.13.032/892/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 31 Maret 2022	1.050,00	Pemkab Badung	87.753.750,00			87.753.750,00				87.753.750,00		87.753.750,00
25	01.01.02.01.005	001805	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.19.4.00078	Badung\Kuta Utara\Desa Cemagi	Perubahan I Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No. B.13.032/892/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 31 Maret 2022	1.415,00	Pemkab Badung	179.874.800,00			179.874.800,00				179.874.800,00		179.874.800,00
26	01.01.01.02.003	000034	Tanah Bangunan Gudang	16	Desa Bebalang, Kab. Bangli	Perpanjangan I Perjanjian Pinjam Pakai dengan dengan Kodim 1626/Bangli No. B.13.032/714/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 18 Maret 2022	500,00	Kodim 1626/Bangli	13.500.000,00			13.500.000,00				13.500.000,00		13.500.000,00
27	01.01.02.01.005	001568	Tanah Sawah Irigasi	22.01.03.11.4.00024	Jembrana\Mendoyo\Ds. Yeh Embang Kangin	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari 2022	10.300,00	Pemkab Jembrana	448.050.000,00			448.050.000,00				448.050.000,00		448.050.000,00
28	01.01.02.01.005	001572	Tanah Sawah Irigasi	22.01.03.11.4.00023	Jembrana\Mendoyo\Ds. Yeh Embang Kangin	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari 2022	17.800,00	Pemkab Jembrana	774.300.000,00			774.300.000,00				774.300.000,00		774.300.000,00
29	01.01.02.03.002	000002	Tanah Kebun Induk	shp 4	Kec.Melaya,Ds. Melaya ,Kab Jembrana	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari 2022	13.090,00	Pemkab Jembrana	353.430.000,00			353.430.000,00				353.430.000,00		353.430.000,00
30	01.01.02.03.002	000003	Tanah Kebun Induk	shp 3	Kec.Melaya,Ds. Melaya ,Kab Jembrana	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari 2022	46.270,00	Pemkab Jembrana	1.249.290.000,00			1.249.290.000,00				1.249.290.000,00		1.249.290.000,00
31	01.01.01.04.001	000082	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22.09.04.11.4.00056	Des.Dangin Puri Kangin,Kec.Dps.Utara,Kota Dps	Perjanjian Pinjam Pakai dengan BNN Kota Denpasar No. B.13.539/3893/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14	1.160,00	BNN Kota Denpasar	930.320.000,00			930.320.000,00				930.320.000,00		930.320.000,00
32	01.01.02.01.005	001601	Tanah Sawah Irigasi	22.06.04.13.4.00043	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Ped	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Klungkung Nomor 593/613/UPTD.PBMD tanggal 24 Pebruari 2020	2.860,00	Pemkab Klungkung	20.020.000,00			20.020.000,00				20.020.000,00		20.020.000,00
33	01.01.02.02.001	001776	Tanah Tegalan	22.06.04.13.4.00015	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Ped	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Klungkung Nomor 593/613/UPTD.PBMD tanggal 24 Pebruari 2020	2.800,00	Pemkab Klungkung	19.600.000,00			19.600.000,00				19.600.000,00		19.600.000,00
34	01.01.02.02.001	001777	Tanah Tegalan	22.06.04.13.4.00016	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Ped	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Klungkung Nomor 593/613/UPTD.PBMD tanggal 24 Pebruari 2020	3.100,00	Pemkab Klungkung	21.700.000,00			21.700.000,00				21.700.000,00		21.700.000,00
35	01.01.02.02.001	001778	Tanah Tegalan	22.06.04.13.4.00017	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Ped	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Klungkung Nomor 593/613/UPTD.PBMD tanggal 24 Pebruari 2020	2.650,00	Pemkab Klungkung	18.550.000,00			18.550.000,00				18.550.000,00		18.550.000,00
36	01.01.02.02.001	001779	Tanah Tegalan	22.06.04.13.4.00018	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Ped	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Klungkung Nomor 593/613/UPTD.PBMD tanggal 24 Pebruari 2020	3.000,00	Pemkab Klungkung	21.000.000,00			21.000.000,00				21.000.000,00		21.000.000,00
37	01.01.02.05.005	000001	Tanah Tandus lainnya	22.06.04..4.00044	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Ped	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Nomor: B.13.593/1975/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 10 Agustus 2021	16.865,00	Pemkab Klungkung	751.757.375,00			751.757.375,00				751.757.375,00		751.757.375,00
38	01.01.01.04.001	000251	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Belum Sertifikat	jalan Melati Nomor 18 Denpasar	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar No. B. 13.032/3835/UPTD.PBMD.BPKAD tanggal 15 November 2022	1.108,00	Bawaslu Kota Denpasar	2.606.016.000,00			2.606.016.000,00				2.606.016.000,00		2.606.016.000,00
39	01.01.02.02.001	000695	Tanah Tegalan	22.05.01.15.4.00015	Gianyar\Gianyar\Ds. Temesi	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Gianyar Nomor : B.13.593/1646/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 25-06-2021	1.940,00	Pemkab Gianyar	255.110.000,00			255.110.000,00				255.110.000,00		255.110.000,00
40	01.01.01.04.001	000018	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22.02.08.02.4.00014	Tabanan\Tabanan\Ds.Bongan	Pinjam Pakai dengan Kepolisian RI No B.13.032/3010/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 18 Oktober 2023	7.250,00	Kepolisian RI	315.375.000,00			315.375.000,00				315.375.000,00		315.375.000,00
41	01.01.02.02.001	001172	Tanah Tegalan	22.08.03.03.4.00031	Karangasem\Rendang\Ds. Rendang	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor B.13.032/552/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 27 Pebruari 2023	5.300,00	Pemkab Karangasem	12.985.000,00			12.985.000,00				12.985.000,00		12.985.000,00

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan/SHP	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl Perjanjian	Luas (M2)	Peminjam	Posisi Per 1 Januari 2025			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2025			Posisi Per 31 Desember 2025		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Ekstra Kompatibel		Penambahan	Pengurangan	Ekstra Kompatibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
													Nilai	Nilai	nilai			
42	01.01.02.02.001	002084	Tanah Tegalan	22.03.07.02.4.00003	Badung\Petang\Ds.Pelaga	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Badung, Nomor B.13/032/3502/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 21 Oktober 2022	8.275,00	Pemkab Badung	55.856.250,00			55.856.250,00				55.856.250,00		55.856.250,00
43	01.01.02.02.001	002101	Tanah Tegalan	22.03.05.07.4.00093	Ds.Sembung,/Kec.Mengwi/Kab.Badung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Badung, Nomor B.13/032/3502/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 21 Oktober 2022	15.000,00	Pemkab Badung	158.625.000,00			158.625.000,00				158.625.000,00		158.625.000,00
44	01.01.02.02.001	000133	Tanah Tegalan	22.03.05.13.5.00022	Badung\Mengwi\Ds. Sobangan	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Badung, Nomor B.13/032/3502/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 21 Oktober 2022	2.206,00	Pemkab Badung	18.916.450,00			18.916.450,00				18.916.450,00		18.916.450,00
45	01.01.02.02.001	000137	Tanah Tegalan	22.03.05.13.5.00026	Badung\Mengwi\Ds. Sobangan	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Badung, Nomor B.13/032/3502/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 21 Oktober 2022	2.846,00	Pemkab Badung	24.404.450,00			24.404.450,00				24.404.450,00		24.404.450,00
46	01.01.01.04.001	000266	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	SHP 376	Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Badung, Nomor B.13/032/3502/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 21 Oktober 2022	1.050,00	Pemkab Badung	5.906.250.000,00			5.906.250.000,00				5.906.250.000,00		5.906.250.000,00
47	01.01.02.02.001	001018	Tanah Tegalan	22.01.03.11.4.00013	Jembrana\Mendoyo\Ds. Yehembang Kangin	Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Jembrana, Nomor : B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 19/01/2022	4.400,00	Pemkab Jembrana	44.000.000,00			44.000.000,00				44.000.000,00		44.000.000,00
48	01.01.01.04.001	000131	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	shp 15	Jln. Amlapura,Ulakan,Manggis,Kab.Karangasem	Perjanjian pinjam pakai dengan pemkab karangasem No. B.13.032/552/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27 Pebruari 2023	500,00	Pemkab Karangasem	7.000.000,00			7.000.000,00				7.000.000,00		7.000.000,00
49	01.01.02.01.005	001757	Tanah Sawah Irigasi	Belum Sertifikat	desa menanga kecamatan rendang kabupaten karangasem	Perjanjian pinjam pakai dengan pemkab karangasem No. B.13.032/552/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27 Pebruari 2023	600,00	Pemkab Karangasem	1.020.000,00			1.020.000,00				1.020.000,00		1.020.000,00
50	01.01.02.02.001	001194	Tanah Tegalan	22.08.03.02.4.00010	Karangasem\Rendang\ Ds. Pempatan	Perjanjian pinjam pakai dengan pemkab karangasem No. B.13.032/552/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27 Pebruari 2023	250,00	Pemkab Karangasem	425.000,00			425.000,00				425.000,00		425.000,00
51	01.01.01.04.001	000209	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	24	Karangasem\Karangasem\Kel. Karangasem	Perjanjian pinjam pakai dengan pemkab karangasem No. B.13.032/552/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27 Pebruari 2023	1.000,00	Pemkab Karangasem	48.710.000,00			48.710.000,00				48.710.000,00		48.710.000,00
52	01.01.01.04.001	000127	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22.08.01.01.4.00186	Jln. Bayangkara,RT.Bayangkara,Kab.Karangasem	Perjanjian pinjam pakai dengan pemkab karangasem No. B.13.032/552/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27 Pebruari 2023	4.420,00	Pemkab Karangasem	212.160.000,00			212.160.000,00				212.160.000,00		212.160.000,00
53	01.01.01.04.001	000203	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22.08.07.02.4.00018	Karangasem\Abang\Ds. Abang	Perjanjian pinjam pakai dengan pemkab karangasem No. B.13.032/552/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27 Pebruari 2023	1.430,00	Pemkab Karangasem	18.000.000,00			18.000.000,00				18.000.000,00		18.000.000,00
54	01.01.01.04.001	000132	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	shp 4	Ds.Amed,Purwekerti,Abang,Culik,Kab.Karangasem	Perjanjian pinjam pakai dengan pemkab karangasem No. B.13.032/552/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27 Pebruari 2023	1.110,00	Pemkab Karangasem	3.885.000,00			3.885.000,00				3.885.000,00		3.885.000,00
55	01.01.03.01.025	000017	Tanah Lapangan Lainnya	Belum Sertifikat	Denpasar\Denpasar Barat\Kel. Tegal Kertha	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkot Denpasar No. B.13.032/463/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 17 Pebruari 2023	30.000,00	Pemkot Denpasar	13.920.000.000,00			13.920.000.000,00				13.920.000.000,00		13.920.000.000,00
56	01.01.02.02.001	001541	Tanah Tegalan	22.06.01.16.4.00006	Klungkung\Klungkung\Ds. Tangkas	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kepolisan Negara Republik Indonesia Resor Klungkung Nomor B.13.032/1518/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 05-06-2023	1.715,00	Kepolisan Negara Republik Indonesia	31.727.500,00			31.727.500,00				31.727.500,00		31.727.500,00
57	01.01.02.02.001	000016	Tanah Tegalan	22.03.09.01.4.00047	Badung\Kuta Selatan\Ds. Jimbaran	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : B.13.032/1756/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 22 juni 2023	1.500,00	Kementertian Hukum dan HAM	1.080.000.000,00			1.080.000.000,00				1.080.000.000,00		1.080.000.000,00
58	01.01.03.09.005	000001	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Listrik	22.04.01.08.3.00001	Buleleng\Gerokgak\Ds. Musi	Pinjam Pakai Dengan Balai Teknik Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU No: B.31.000.2.3.2/842/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 November 2024	28.900,00	Kementeriaan PUPR	1.028.117.500,00			1.028.117.500,00				1.028.117.500,00		1.028.117.500,00
59	01.01.02.02.001	000432	Tanah Tegalan	22.03.07.05.4.00010	Badung\Petang\Ds. Pangsan	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No. 31.000.2.3.2/431/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 25 Februari 2025	2.020,00	Pemkab Badung	19.190.000,00			19.190.000,00				19.190.000,00		19.190.000,00
60	01.01.01.02.003	000039	Tanah Bangunan Gudang	22.09.02.05.4.00109	Jl. Kapten Tjok. Agung Tresna No. 8 Dps.	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 593/2782/UPTD.PBMD Tanggal 21 Oktober 2019	1.209,00	KPU Provinsi Bali	1.354.080.000,00			1.354.080.000,00				1.354.080.000,00		1.354.080.000,00
61	01.01.01.02.003	000040	Tanah Bangunan Gudang	22.09.02.09.4.00046	Jl. Kapten Tjok. Agung Tresna, No. 8 Dps.	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 593/2782/UPTD.PBMD Tanggal 21 Oktober 2019	1.325,00	KPU Provinsi Bali	1.484.000.000,00			1.484.000.000,00				1.484.000.000,00		1.484.000.000,00
62	01.01.02.02.001	001257	Tanah Tegalan	22.08.07.01.4.00021	Karangasem\Abang\Ds. Tista	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Karangasem Nomor: 593/1039/UPTD.PBMD tanggal 6 Mei 2019	2.870,00	Pemkab Karangasem	10.045.000,00			10.045.000,00				10.045.000,00		10.045.000,00

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan/SHP	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl Perjanjian	Luas (M2)	Peminjam	Posisi Per 1 Januari 2025			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2025			Posisi Per 31 Desember 2025		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Ekstra Kompatibel		Penambahan	Pengurangan	Ekstra Kompatibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
													Nilai	Nilai	nilai			
63	01.01.02.02.001	001256	Tanah Tegalan	22.08.07.01.4.00020	Karangasem\Abang\Ds. Tista	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Karangasem Nomor: 593/1039/UPTD.PBMD tanggal 6 Mei 2019 dan Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Karangasem Nomor:	3.620,00	Pemkab Karangasem	12.670.000,00			12.670.000,00				12.670.000,00		12.670.000,00
64	01.01.02.02.001	001481	Tanah Tegalan	22.06.01.05.4.00046	Klungkung\Klungkung \Ds. Akah	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Klungkung Nomor: 593/1536/UPTD.PBMD tanggal 8 Juli 2019	2.376,00	Pemkab Klungkung	87.912.000,00			87.912.000,00		87.912.000,00		-		0,00
65	01.01.02.01.005	000519	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.09.4.00042	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Tusan	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Nomor : 593/1536/UPTD.PBMD, Tanggal 8 Juli 2019	1.005,00	Pemkab Klungkung	29.145.000,00			29.145.000,00				29.145.000,00		29.145.000,00
66	01.01.02.01.005	000520	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.09.4.00043	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Tusan	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Nomor : 593/1536/UPTD.PBMD, Tanggal 8 Juli 2019	3.265,00	Pemkab Klungkung	94.685.000,00			94.685.000,00				94.685.000,00		94.685.000,00
67	01.01.02.01.005	000521	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.09.4.00044	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Tusan	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Nomor : 593/1536/UPTD.PBMD, Tanggal 8 Juli 2019	1.840,00	Pemkab Klungkung	53.360.000,00			53.360.000,00				53.360.000,00		53.360.000,00
68	01.01.02.01.005	001199	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.18.4.00039	Ds.Pererenan,Kc.Mengwi ,Kab.Badung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Badung, Nomor : 593.1/659/UPTD.PBMD Tanggal 21 Maret 2019	2.430,00	Pemkab Badung	89.910.000,00			89.910.000,00				89.910.000,00		89.910.000,00
69	01.01.01.04.003	000033	Tanah Bangunan Rumah Sakit	Belum Sertifikat	Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Badung, Nomor 593.1/132/UPT.P2.BPKAD, Tanggal 14 Januari 2019	11.800,00	Pemkab Badung	3.540.000.000,00			3.540.000.000,00				3.540.000.000,00		3.540.000.000,00
70	01.01.02.02.001	002198	Tanah Tegalan	Persil 13	Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Nomor : 593/1536/UPTD.PBMD, Tanggal 8 Juli 2019	12.400,00	Pemkab Klungkung	6.981.200.000,00			6.981.200.000,00				6.981.200.000,00		6.981.200.000,00
71	01.01.02.02.001	002199	Tanah Tegalan	Sdj 15	Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Nomor : 593/1536/UPTD.PBMD, Tanggal 8 Juli 2019	14.150,00	Pemkab Klungkung	720.000.000,00			720.000.000,00		40.800.000,00		679.200.000,00		679.200.000,00
72	01.01.01.04.001	000159	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	SHP 85/ SHP 87/ SHP 88	Kec.Mendoyo,Ds. Poh Santen ,Kab Jembrana	Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Jembrana, Nomor : B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 19/01/2022	10.735,00	Pemkab Jembrana	51.325.000,00			51.325.000,00				51.325.000,00		51.325.000,00
73	01.01.02.03.002	000008	Tanah Kebun Induk	22.01.01.05.4.00051	Jembrana\Melaya\Ds. nusasari	Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Jembrana, Nomor : B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 19/01/2022	43.110,00	Pemkab Jembrana	603.540.000,00			603.540.000,00				603.540.000,00		603.540.000,00
74	01.01.01.04.001	000073	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22.04.05.16.4.00026	Jln.Acmad Yani No.67 Singaraja Kaliuntu	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Universitas Pendidikan Ganesha No. B.31.000.2.3.2/533/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 7 Maret 2024	12.200,00	Universitas Pendidikan Ganesha	2.440.000.000,00			2.440.000.000,00				2.440.000.000,00		2.440.000.000,00
75	01.01.02.02.001	002051	Tanah Tegalan	22.09.02.15.4.00008	Denpasar\Denpasar Timur\Penatih Dangin Puri	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkot Denpasar No. B.13.000.2.3.2/520/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 01 Maret 2024	3.885,00	Pemkot Denpasar	3.148.792.500,00			3.148.792.500,00				3.148.792.500,00		3.148.792.500,00
76	01.01.02.01.005	001798	Tanah Sawah Irigasi	SHP 155	Jl Baypass IB Mantra Ds. Kesiman	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kepolisian Negara RI No. B.13.000.2.3.2/1065/UPTD.PBMD/BPKAD	1.000,00	Kepolisian RI	2.937.000.000,00			2.937.000.000,00				2.937.000.000,00		2.937.000.000,00
77	01.01.02.02.001	001129	Tanah Tegalan	SHP 22	Badung\Abiansemal\Bongkasa	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No. B.31.000.2.3.2/2325/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 16 Oktober 2024	2.250,00	Pemkab Badung	0,00			0,00	16.875.000,00			16.875.000,00		16.875.000,00
78	01.01.01.04.026	000001	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	22.09.02.14.4.00010	Denpasar\Denpasar Timur\Penatih	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkot Denpasar No. B.31.000.2.3.2/2031/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 5 September 2024	15.109,00	Pemkot Denpasar	0,00			0,00	12.245.844.500,00			12.245.844.500,00		12.245.844.500,00
79	01.01.02.02.001	000182	Tanah Tegalan	22.03.05.13.5.00072	Badung\Mengwi\Ds. Sobangan	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No .B.31.000.2.3.2/434/UPTD.PBMD/BPKAD tangal 25 Februari 2025	2.588,00	Pemkab Badung	0,00			0,00	22.192.100,00			22.192.100,00		22.192.100,00
80	01.01.02.02.001	000186	Tanah Tegalan	22.03.05.13.5.00076	Badung\Mengwi\Ds. Sobangan	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No .B.31.000.2.3.2/434/UPTD.PBMD/BPKAD tangal 25 Februari 2025	2.740,00	Pemkab Badung	0,00			0,00	23.495.500,00			23.495.500,00		23.495.500,00
81	01.01.02.02.001	000187	Tanah Tegalan	22.03.05.13.5.00077	Badung\Mengwi\Ds. Sobangan	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No .B.31.000.2.3.2/434/UPTD.PBMD/BPKAD tangal 25 Februari 2025	1.572,00	Pemkab Badung	0,00			0,00	13.479.900,00			13.479.900,00		13.479.900,00
82	01.01.02.02.001	000223	Tanah Tegalan	22.03.05.13.5.00113	Badung\Mengwi\Ds. Sobangan	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No .B.31.000.2.3.2/434/UPTD.PBMD/BPKAD tangal 25 Februari 2025	2.044,00	Pemkab Badung	0,00			0,00	17.527.300,00			17.527.300,00		17.527.300,00
83	01.01.02.02.001	000225	Tanah Tegalan	22.03.05.13.5.00115	Badung\Mengwi\Ds. Sobangan	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No .B.31.000.2.3.2/434/UPTD.PBMD/BPKAD tangal 25 Februari 2025	2.308,00	Pemkab Badung	0,00			0,00	19.791.100,00			19.791.100,00		19.791.100,00
84	01.01.02.02.001	01.01.02.02	Tanah Tegalan	22.03.05.13.5.00075	Badung\Mengwi\Ds. Sob	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No. B.31.000.2.3.2/433/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 25 Februari 2025	2.655,00	Pemkab Badung					22.766.625,00	22.766.625,00		-		0,00
85	01.01.02.02.001	01.01.02.02	Tanah Tegalan	22.03.05.13.5.00114	Badung\Mengwi\Ds. Sob	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No. B.31.000.2.3.2/433/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 25 Februari 2025	1.943,00	Pemkab Badung					16.661.225,00	16.661.225,00		-		0,00
86	01.01.02.02.001	01.01.02.02	Tanah Tegalan	22.03.05.13.5.00116	Badung\Mengwi\Ds. Sob	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No. B.31.000.2.3.2/433/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 25 Februari 2025	4.985,00	Pemkab Badung					42.746.375,00	42.746.375,00		-		0,00

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan/SHP	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl Perjanjian	Luas (M2)	Peminjam	Posisi Per 1 Januari 2025			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2025			Posisi Per 31 Desember 2025		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Ekstra Kompatibel		Penambahan	Pengurangan	Ekstra Kompatibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
													Nilai	Nilai	nilai			
87	01.01.01.04.001	000226	Tanah kosong yang Sudah Diperuntukan	SHP 63	Jalan Raya Sesetan Denpasar	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkot Denpasar No. B.31.000.2.3.2/1922/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 2 September 2025	5.000,00	Pemkot Denpasar	0,00			0,00	3.305.000.000,00			3.305.000.000,00		3.305.000.000,00
88	01.01.01.04.001	000048	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	SHP 5	Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No. B.31.000.2.3.2/1718/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 11 Agustus 2025	1.300,00	Pemkab Badung	0,00			0,00	544.700.000,00			544.700.000,00		544.700.000,00
89	01.01.01.01.002□	000001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	SHP 26	Jembrana\Negara\Ds. Dauh Waru	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B.31.000.2.3.2/2460/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 5 Nopember 2025	500,00	Pemkab Jembrana	0,00			0,00	80.000.000,00			80.000.000,00		80.000.000,00
Jumlah Aset Tetap Gedung di Pinjam Pakai							**12.856,11**		**17.718.108.503,00**	**- 5.153.277.681,00**	**-**	**17.718.108.503,00**	**16.445.590.100,00**	**-**	**-**	**34.163.698.603,00**	**- 9.094.012.140,00**	**25.069.686.463,00**
1	03.01.01.18.001	000001	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan /Bandara Permanen		Tanah Ampo Karangasem	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementrian Perhubungan Republik Indonesia No. B.13.032/3261/UPTD.PBMD/BPKAD tanggan 2 Januari 2023	1075	Kementerian Perhubungan	5.244.862.000,00	(1.197.576.823)		5.244.862.000,00				5.244.862.000,00	(1.197.576.823)	4.047.285.177
2	03.01.01.18.001	000002	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan /Bandara Permanen		Tanah Ampo Karangasem	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementrian Perhubungan Republik Indonesia No. B.13.032/3261/UPTD.PBMD/BPKAD tanggan 2 Januari 2023	908,14	Kementerian Perhubungan	2.063.548.430,00	(429.905.921)		2.063.548.430,00				2.063.548.430,00	(429.905.921)	1.633.642.509
3	03.01.01.18.001	000003	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan /Bandara Permanen		Tanah Ampo Karangasem	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementrian Perhubungan Republik Indonesia No. B.13.032/3261/UPTD.PBMD/BPKAD tanggan 2 Januari 2023	152,46	Kementerian Perhubungan	545.136.000,00	(113.570.000)		545.136.000,00				545.136.000,00	(113.570.000)	431.566.000
4	03.01.01.18.001	000004	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan /Bandara Permanen		Tanah Ampo Karangasem	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementrian Perhubungan Republik Indonesia No. B.13.032/3261/UPTD.PBMD/BPKAD tanggan 2 Januari 2023	476,58	Kementerian Perhubungan	2.443.956.000,00	(509.157.500)		2.443.956.000,00				2.443.956.000,00	(509.157.500)	1.934.798.500
5	03.01.01.18.001	000005	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan /Bandara Permanen		Tanah Ampo Karangasem	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementrian Perhubungan Republik Indonesia No. B.13.032/3261/UPTD.PBMD/BPKAD tanggan 2 Januari 2023	6,30	Kementerian Perhubungan	155.810.000,00	(32.460.417)		155.810.000,00				155.810.000,00	(32.460.417)	123.349.583
6	03.01.01.18.001	000006	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan /Bandara Permanen		Tanah Ampo Karangasem	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementrian Perhubungan Republik Indonesia No. B.13.032/3261/UPTD.PBMD/BPKAD tanggan 2 Januari 2023	50,20	Kementerian Perhubungan	366.198.673,00	(76.291.392)		366.198.673,00				366.198.673,00	(76.291.392)	289.907.281
7	03.01.01.18.001	000007	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan /Bandara Permanen		Tanah Ampo Karangasem	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementrian Perhubungan Republik Indonesia No. B.13.032/3261/UPTD.PBMD/BPKAD tanggan 2 Januari 2023	50,81	Kementerian Perhubungan	226.109.000,00	(47.106.042)		226.109.000,00				226.109.000,00	(47.106.042)	179.002.958
8	03.01.01.18.001	000008	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan /Bandara Permanen		Tanah Ampo Karangasem	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementrian Perhubungan Republik Indonesia No. B.13.032/3261/UPTD.PBMD/BPKAD tanggan 2 Januari 2023	259,62	Kementerian Perhubungan	1.730.746.000,00	(360.572.083)		1.730.746.000,00				1.730.746.000,00	(360.572.083)	1.370.173.917
9	03.01.01.18.001	000009	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan /Bandara Permanen		Tanah Ampo Karangasem	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementrian Perhubungan Republik Indonesia No. B.13.032/3261/UPTD.PBMD/BPKAD tanggan 2 Januari 2023	56	Kementerian Perhubungan	174.563.000,00	(36.367.292)		174.563.000,00				174.563.000,00	(36.367.292)	138.195.708
10	03.01.01.18.001	000010	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan /Bandara Permanen		Tanah Ampo Karangasem	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementrian Perhubungan Republik Indonesia No. B.13.032/3261/UPTD.PBMD/BPKAD tanggan 2 Januari 2023		Kementerian Perhubungan	518.215.000,00	(84.641.783)		518.215.000,00				518.215.000,00	(84.641.783)	433.573.217
11	03.01.01.18.001	000011	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan /Bandara Permanen		Tanah Ampo Karangasem	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementrian Perhubungan Republik Indonesia No. B.13.032/3261/UPTD.PBMD/BPKAD tanggan 2 Januari 2023	10.952	Kementerian Perhubungan	1.432.147.500,00	(274.494.938)		1.432.147.500,00				1.432.147.500,00	(274.494.938)	1.157.652.562
12	03.01.01.18.001	000012	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan /Bandara Permanen		Tanah Ampo Karangasem	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementrian Perhubungan Republik Indonesia No. B.13.032/3261/UPTD.PBMD/BPKAD tanggan 2 Januari 2023		Kementerian Perhubungan	143.174.900,00	(27.441.856)		143.174.900,00				143.174.900,00	(27.441.856)	115.733.044
13	03.01.01.01.001	000035	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jl. Kapten Cok. Agung Tresna No. 8 Dps.	Nomor : 593/2782/UPTD.PBMD Tanggal 21 Oktober 2019 penggunaan Kantor KPU Provinsi Bali	600	KPU Provinsi Bali	320.867.000,00	(176.476.850)		320.867.000,00				320.867.000,00	(176.476.850)	144.390.150
14	03.01.01.01.001	000036	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jl. Kapten Cok. Agung Tresna No. 8 Dps.	Nomor : 593/2782/UPTD.PBMD Tanggal 21 Oktober 2019 penggunaan Kantor KPU Provinsi Bali	600	KPU Provinsi Bali	320.867.000,00	(176.476.850)		320.867.000,00				320.867.000,00	(176.476.850)	144.390.150
15	03.01.01.01.001	000051	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jln. Melati No. 21 Denpasar	Perjanjian Pinjam Pakai dengan BNN Kota Denpasar No. B.13.593/3893/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14	330	BNN Kota Denpasar	226.600.000,00	(106.502.000)		226.600.000,00				226.600.000,00	(106.502.000)	120.098.000
16	03.01.01.01.001	000055	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jl. Melati 18 Dps	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar No. B. 13.032/3835/UPTD.PBMD.BPKAD tanggal 15 November 2022	630	Bawaslu Kota Denpasar	412.000.000,00	(180.593.334)		412.000.000,00				412.000.000,00	(180.593.334)	231.406.666
17	03.01.01.01.001	000016	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jln. Kamboja No.57 Denpasar	Perjanjian Pinjam Pakai Dengan BABINMINVETCADDAM IX/UDAYANA NOMOR : B.13.032/3265/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 November 2023	380	BABINMINVETCADDAM IX/UDAYANA	1.393.308.000,00	(1.323.642.600)		1.393.308.000,00				1.393.308.000,00	(1.323.642.600)	69.665.400

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan/SHP	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl Perjanjian	Luas (M2)	Peminjam	Posisi Per 1 Januari 2025			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2025			Posisi Per 31 Desember 2025		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Ekstra Kompatibel		Penambahan	Pengurangan	Ekstra Kompatibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
													Nilai	Nilai	nilai			
18	03.01.01.01.001	000027	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Denpasar\Denpasar Timur\Penatih	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkot Denpasar No. B.31.000.2.3.2/2031/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 5 September 2024	60,06	Pemkot Denpasar	0,00			0,00	162.683.000,00			162.683.000,00	-84866298	77.816.702
19	03.01.01.01.001	000028	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Denpasar\Denpasar Timur\Penatih	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkot Denpasar No. B.31.000.2.3.2/2031/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 5 September 2024	560,48	Pemkot Denpasar	0,00			0,00	2.147.823.000,00			2.147.823.000,00	-1120447665	1.027.375.335
20	03.01.01.01.001	000029	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Denpasar\Denpasar Timur\Penatih	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkot Denpasar No. B.31.000.2.3.2/2031/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 5 September 2024	680,13	Pemkot Denpasar	0,00			0,00	2.605.932.000,00			2.605.932.000,00	-1359427860	1.246.504.140
21	03.01.01.01.001	000030	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Denpasar\Denpasar Timur\Penatih	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkot Denpasar No. B.31.000.2.3.2/2031/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 5 September 2024	634,28	Pemkot Denpasar	0,00			0,00	2.434.286.000,00			2.434.286.000,00	-1269885863	1.164.400.137
22	1.3.3.01.001.008.004	000018	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)		Jalan Supratman, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkot Denpasar No. B.31.000.2.3.2/1513/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 18 Juli 2025	3,10	Pemkot Denpasar	0,00			0,00	47.223.900,00			47.223.900,00	-550946	46.672.954
23	1.3.3.01.001.009.007	000001	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)		Jalan Supratman, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkot Denpasar No. B.31.000.2.3.2/1513/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 18 Juli 2025	214,00	Pemkot Denpasar	0,00			0,00	4.633.183.600,00			4.633.183.600,00	-54053809	4.579.129.791
24	1.3.3.01.001.036.003	000004	Taman lainnya		Jalan Supratman, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkot Denpasar No. B.31.000.2.3.2/1513/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 18 Juli 2025	412,53	Pemkot Denpasar	0,00			0,00	117.607.500,00			117.607.500,00	-1372088	116.235.412
25	1.3.3.02.001.001.002	000004	candi lainnya (dst)		Jalan Supratman, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkot Denpasar No. B.31.000.2.3.2/1513/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 18 Juli 2025	13,40	Pemkot Denpasar	0,00			0,00	2.851.910.700,00			2.851.910.700,00	-33272292	2.818.638.408
26	1.3.3.04.001.004.001	000002	Pagar Permanen		Jalan Supratman, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkot Denpasar No. B.31.000.2.3.2/1513/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 18 Juli 2025	461,40	Pemkot Denpasar	0,00			0,00	1.382.575.200,00			1.382.575.200,00	-16130044	1.366.445.156
27	1.3.3.04.001.004.001	000003	Pagar Permanen		Jalan Supratman, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkot Denpasar No. B.31.000.2.3.2/1513/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 18 Juli 2025	1,91	Pemkot Denpasar	0,00			0,00	62.365.200,00			62.365.200,00	-727594	61.637.606
Jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Pinjam Pakai							-		**970.385.327,00**	**- 895.115.519,00**	-	**970.385.327,00**	**68.213.500,00**	-	-	1.038.598.827,00	-903.073.761,00	135.525.066,00
1	02.06.02.06.50.0069	000048	Eskalator			Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementrian Perhubungan Republik Indonesia No. B.13.032/3261/UPTD.PBMD/BPKAD tanggan 2 Januari 2023		Kementerian Perhubungan	410.750.000,00	(410.750.000)		410.750.000,00				410.750.000,00	(410.750.000)	-
2	02.06.02.06.50.0070	000049	Eskalator			Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementrian Perhubungan Republik Indonesia No. B.13.032/3261/UPTD.PBMD/BPKAD tanggan 2 Januari 2023		Kementerian Perhubungan	410.750.000,00	(410.750.000)		410.750.000,00				410.750.000,00	(410.750.000)	-
3	02.09.03.06.01.0003	000001	Generator Set			Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementrian Perhubungan Republik Indonesia No. B.13.032/3261/UPTD.PBMD/BPKAD tanggan 2 Januari 2023		Kementerian Perhubungan	148.885.327,00	(73.615.519)		148.885.327,00				148.885.327,00	(73.615.519)	75.269.808
4	1.3.2.05.001.005.040	000001	Penangkal Petir		Jalan Supratman, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkot Denpasar No. B.31.000.2.3.2/1513/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 18 Juli 2025		Pemkot Denpasar	-	-		-	34.777.200,00			34.777.200,00	(4.057.340)	30.719.860
5	1.3.2.05.002.004.006	000019 s/d 000020	Kipas Angin		Jalan Supratman, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkot Denpasar No. B.31.000.2.3.2/1513/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 18 Juli 2025		Pemkot Denpasar	-	-		-	5.112.600,00			5.112.600,00	(596.470)	4.516.130
6	1.3.2.05.002.004.007	000030 s/d 000035	Exhause Fan		Jalan Supratman, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkot Denpasar No. B.31.000.2.3.2/1513/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 18 Juli 2025		Pemkot Denpasar	-	-		-	18.930.600,00			18.930.600,00	(2.208.570)	16.722.030
7	1.3.2.05.002.004.007	000036	Exhause Fan		Jalan Supratman, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkot Denpasar No. B.31.000.2.3.2/1513/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 18 Juli 2025		Pemkot Denpasar	-	-		-	3.030.300,00			3.030.300,00	(353.535)	2.676.765
8	1.3.2.05.002.006.077	000019	Alat Rumah Tangga Lain-lain		Jalan Supratman, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkot Denpasar No. B.31.000.2.3.2/1513/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 18 Juli 2025		Pemkot Denpasar	-	-		-	4.586.100,00			4.586.100,00	(535.045)	4.051.055
9	1.3.2.05.002.006.077	000020	Alat Rumah Tangga Lain-lain		Jalan Supratman, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkot Denpasar No. B.31.000.2.3.2/1513/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 18 Juli 2025		Pemkot Denpasar	-	-		-	1.776.700,00			1.776.700,00	(207.282)	1.569.418
Jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan di Pinjam Pakai							-		**1.816.152.850,00**	**(299.496.849,00)**	-	**1.816.152.850,00**	**248.292.725,00**	-	-	**2.064.445.575,00**	**(304.324.763,00)**	**1.760.120.812,00**
1	04.03.06.01.002	00001	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang			Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementrian Perhubungan Republik Indonesia No. B.13.032/3261/UPTD.PBMD/BPKAD tanggan 2 Januari 2023		Kementerian Perhubungan	1.177.613.000,00	(218.349.077)		1.177.613.000,00				1.177.613.000,00	(218.349.077)	959.263.923
2	04.03.06.02.002	00001	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang			Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementrian Perhubungan Republik Indonesia No. B.13.032/3261/UPTD.PBMD/BPKAD tanggan 2 Januari 2023		Kementerian Perhubungan	638.539.850,00	(81.147.772)		638.539.850,00				638.539.850,00	(81.147.772)	557.392.078

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan/SHP	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl Perjanjian	Luas (M2)	Peminjam	Posisi Per 1 Januari 2025			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2025			Posisi Per 31 Desember 2025		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Ekstra Kompatibel		Penambahan	Pengurangan	Ekstra Kompatibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
													Nilai	Nilai	nilai			
3	1.3.4.02.005.002.001	000003	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)		Jalan Supratman, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkot Denpasar No. B.31.000.2.3.2/1513/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 18 Juli 2025		Pemkot Denpasar	-			-	13.785.025,00			13.785.025,00	(268.042)	13.516.983
4	1.3.4.02.005.005.001	000001	Bak Penampung/Kolam/ Menara		Jalan Supratman, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkot Denpasar No. B.31.000.2.3.2/1513/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 18 Juli 2025		Pemkot Denpasar	-			-	5.700.200,00			5.700.200,00	(110.837)	5.589.363
5	1.3.4.02.005.005.001	000002	Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan		Jalan Supratman, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkot Denpasar No. B.31.000.2.3.2/1513/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 18 Juli 2025		Pemkot Denpasar	-			-	59.280.300,00			59.280.300,00	(1.152.673)	58.127.627
6	1.3.4.02.005.005.005	000005	Bangunan Pengaman Pengembangan Lain-lain		Jalan Supratman, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkot Denpasar No. B.31.000.2.3.2/1513/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 18 Juli 2025		Pemkot Denpasar	-			-	169.527.200,00			169.527.200,00	(3.296.362)	166.230.838

Rincian Aset Tetap yang akan Dihibahkan
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

No	Kode Aset	No. Register	Jenis Aset	Lokasi	Perolehan		Nilai Perolehan	Sisa Manfaat		Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022	Nilai Buku	Keterangan
								Tahun	Bulan			
							162.909.795.922,00			**61.555.394.676,00**	**99.324.096.323,00**	
Jalan, Irigasi dan Jaringan												
	Jumlah						**160.437.462.999,00**			**61.472.880.851,00**	**98.964.582.148,00**	
1	4.13.1.2.1	31	Jalan Propinsi Kelas I	Jl Darmawangsa (Semarapura)	12	2000	257.400.000,00	0	0	257.400.000,00	0,00	
2	4.13.1.2.1	32	Jalan Propinsi Kelas I	Jl Jempiring (Semarapura)	12	2000	471.900.000,00	0	0	471.900.000,00	0,00	
3	4.13.1.2.1	36	Jalan Propinsi Kelas I	Simp Mengwi-Blahkiuh	12	2000	11.932.362.000,00	0	0	11.932.362.000,00	0,00	
4	4.13.1.2.1	59	Jalan Propinsi Kelas I	Jimbaran-Uluwatu	12	2000	1.796.342.000,00	0	0	1.796.342.000,00	0,00	
5	4.13.1.2.1	62	Jalan Propinsi Kelas I	Jl Gunung Merapi (Semarapura)	12	2000	546.975.000,00	0	0	546.975.000,00	0,00	
6	4.13.1.2.1	77	Jalan Propinsi Kelas I	Jalan Nusa Lembongan	12	2006	250.000.000,00	0	0	250.000.000,00	0,00	
7	4.13.1.2.1	84	Jalan Propinsi Kelas I	Jalan Menuju Pura Bisbis	12	2007	1.740.000.000,00	0	0	1.740.000.000,00	0,00	
8	4.13.1.2.1	85	Jalan Propinsi Kelas I	Jalan Menuju Pura Taman sari/Toh Langkir	12	2007	2.980.000.000,00	0	0	2.980.000.000,00	0,00	
9	4.13.1.2.1	86	Jalan Propinsi Kelas I	Jalan Pujungan	12	2007	749.999.000,00	0	0	749.999.000,00	0,00	
10	4.13.1.2.1	89	Jalan Propinsi Kelas I	Jalan Tampaksiring - Selat	12	2007	5.348.957.000,00	0	0	5.348.957.000,00	0,00	
11	4.13.1.2.1	91	Jalan Propinsi Kelas I	Jln. Menuju SD No.8 Seraya , areal parkir Pura Bisbis	12	2007	119.652.000,00	0	0	119.652.000,00	0,00	
12	4.13.1.2.1	92	Jalan Propinsi Kelas I	Dusun Kubukelod Desa Bungkulan	12	2007	308.104.000,00	0	0	308.104.000,00	0,00	
13	4.13.1.2.1	103	Jalan Propinsi Kelas I	Kampus UNHI Denpasar	12	2008	56.746.000,00	0	0	56.746.000,00	0,00	
14	4.13.1.2.1	110	Jalan Propinsi Kelas I	Jalan lintas Undisan-Pura Dalem Undisan di Kabupaten	12	2008	565.635.000,00	0	0	565.635.000,00	0,00	
15	4.13.1.2.1	113	Jalan Propinsi Kelas I	Bangli	12	2009	213.552.454,00	0	11	193.976.813,00	19.575.641,00	
16	4.13.1.2.1	123	Jalan Propinsi Kelas I	Batumadeg-Pengubengan	12	2011	1.873.803.000,00	2	11	1.327.277.125,00	546.525.875,00	
17	4.13.1.2.8	2	Jalan Propinsi Lokal	Kampus Universitas Udayana Denpasar	12	2008	745.359.000,00	0	0	745.359.000,00	0,00	
18	4.13.1.2.10	2	Jalan Propinsi Lain-lain	Buleleng	12	2009	49.515.000,00	0	11	44.976.125,00	4.538.875,00	
19	4.13.1.2.11	1	Lampu Lalulintas dan Marka Jalan Provinsi	Tohpati - Kusamba	12	2006	920.000.000,00	0	0	920.000.000,00	0,00	
20	4.13.1.2.11	3	Lampu Lalulintas dan Marka Jalan Provinsi	Tohpati - Kusamba	12	2007	56.032.000,00	0	0	56.032.000,00	0,00	
21	4.13.1.2.11	4	Lampu Lalulintas dan Marka Jalan Provinsi	Tohpati - Kusamba	12	2007	932.500.000,00	0	0	932.500.000,00	0,00	
22	4.13.1.3.6	1	Jalan Kabupaten Lokal	Jalan Arteri Sanglah-Sumuh	12	1995	583.718.000,00	0	0	583.718.000,00	0,00	
23	4.13.1.3.6	3	Jalan Kabupaten Lokal	Bangli/Sidem Bunut	12	1997	94.887.000,00	0	0	94.887.000,00	0,00	
24	4.13.1.3.6	4	Jalan Kabupaten Lokal	Buleleng/Pengaringan	12	1997	37.906.000,00	0	0	37.906.000,00	0,00	
25	4.13.1.3.6	6	Jalan Kabupaten Lokal	Gianyar / Medahan	12	1997	28.400.000,00	0	0	28.400.000,00	0,00	
26	4.13.1.3.6	7	Jalan Kabupaten Lokal	Klungkung/Banjarangkang	12	1997	94.880.000,00	0	0	94.880.000,00	0,00	
27	4.13.1.3.6	8	Jalan Kabupaten Lokal	Tabanan Sungsang	12	1997	70.150.000,00	0	0	70.150.000,00	0,00	
28	4.13.1.3.6	10	Jalan Kabupaten Lokal	Jembrana /Sidem Bunut	12	2000	117.660.000,00	0	0	117.660.000,00	0,00	
29	4.13.1.3.6	11	Jalan Kabupaten Lokal	Jembrana /Tibu Beleng	12	2000	151.536.000,00	0	0	151.536.000,00	0,00	
30	4.13.1.3.6	12	Jalan Kabupaten Lokal	Klungkung/ Aan Dangin	12	2000	67.000.000,00	0	0	67.000.000,00	0,00	
31	4.13.1.3.6	14	Jalan Kabupaten Lokal	Buleleng/Busungbiu/tunju	12	2001	236.600.000,00	0	0	236.600.000,00	0,00	
32	4.13.1.3.6	15	Jalan Kabupaten Lokal	Buleleng/Puluran&Badung Bulian	12	2001	187.230.000,00	0	0	187.230.000,00	0,00	
33	4.13.1.3.6	16	Jalan Kabupaten Lokal	Buleleng/Sankan Gunung	12	2001	123.173.000,00	0	0	123.173.000,00	0,00	
34	4.13.1.3.6	17	Jalan Kabupaten Lokal	Buleleng/Tirta Gangga	12	2001	117.625.000,00	0	0	117.625.000,00	0,00	
35	4.13.1.3.6	18	Jalan Kabupaten Lokal	Sinagaraja	12	2001	88.000.000,00	0	0	88.000.000,00	0,00	
36	4.13.1.3.6	22	Jalan Kabupaten Lokal	Kedungdung Menange	12	2002	1.592.019.000,00	0	0	1.592.019.000,00	0,00	
37	4.13.1.3.6	24	Jalan Kabupaten Lokal	Lingkar Bukit (Badung)	12	2002	2.403.098.000,00	0	0	2.403.098.000,00	0,00	

No	Kode Aset	No. Register	Jenis Aset	Lokasi	Perolehan		Nilai Perolehan	Sisa Manfaat		Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022	Nilai Buku	Keterangan
								Tahun	Bulan			
38	4.13.1.3.6	25	Jalan Kabupaten Lokal	Tohpati - Kusamba	12	2002	1.604.805.000,00	0	0	1.604.805.000,00	0,00	
39	4.13.1.3.6	28	Jalan Kabupaten Lokal	Jln. Tegalinggah-Pura Muncak Sari Km.36.80 & Km.39.70	12	2007	64.718.000,00	0	0	64.718.000,00	0,00	
40	4.13.2.2.1	2	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bukit Titiles	12	1954	15.000.000,00	0	0	15.000.000,00	0,00	
41	4.13.2.2.1	6	Jembatan Beton Propinsi	Tk Banyu Asri II	12	1954	129.910.000,00	0	0	129.910.000,00	0,00	
42	4.13.2.2.1	7	Jembatan Beton Propinsi	Tk Brombang II	12	1954	15.000.000,00	0	0	15.000.000,00	0,00	
43	4.13.2.2.1	8	Jembatan Beton Propinsi	Tk Grokgak II	12	1954	69.500.000,00	0	0	69.500.000,00	0,00	
44	4.13.2.2.1	9	Jembatan Beton Propinsi	Tk Grokgak III	12	1954	12.100.000,00	0	0	12.100.000,00	0,00	
45	4.13.2.2.1	10	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pemuteran	12	1954	12.000.000,00	0	0	12.000.000,00	0,00	
46	4.13.2.2.1	11	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pejarakan I	12	1954	17.200.000,00	0	0	17.200.000,00	0,00	
47	4.13.2.2.1	12	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pejarakan II	12	1954	24.000.000,00	0	0	24.000.000,00	0,00	
48	4.13.2.2.1	13	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pejarakan III	12	1954	16.000.000,00	0	0	16.000.000,00	0,00	
49	4.13.2.2.1	14	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tegal Muara	12	1954	24.000.000,00	0	0	24.000.000,00	0,00	
50	4.13.2.2.1	15	Jembatan Beton Propinsi	Tk Lebuah Lalang	12	1954	24.000.000,00	0	0	24.000.000,00	0,00	
51	4.13.2.2.1	16	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok III	12	1954	49.861.000,00	0	0	49.861.000,00	0,00	
52	4.13.2.2.1	17	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok IV	12	1954	12.000.000,00	0	0	12.000.000,00	0,00	
53	4.13.2.2.1	18	Jembatan Beton Propinsi	Tk Gondol I	12	1954	15.000.000,00	0	0	15.000.000,00	0,00	
54	4.13.2.2.1	19	Jembatan Beton Propinsi	Tk Yeh Aya	12	1954	20.000.000,00	0	0	20.000.000,00	0,00	
55	4.13.2.2.1	23	Jembatan Beton Propinsi	TK Banyumala	12	1954	92.500.000,00	0	0	92.500.000,00	0,00	
56	4.13.2.2.1	24	Jembatan Beton Propinsi	Tk Yeh Kuning	12	1954	8.391.000,00	0	0	8.391.000,00	0,00	
57	4.13.2.2.1	25	Jembatan Beton Propinsi	Tk Temukus I	12	1954	8.391.000,00	0	0	8.391.000,00	0,00	
58	4.13.2.2.1	26	Jembatan Beton Propinsi	Tk Langking	12	1954	23.500.000,00	0	0	23.500.000,00	0,00	
59	4.13.2.2.1	27	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bangka	12	1954	84.376.000,00	0	0	84.376.000,00	0,00	
60	4.13.2.2.1	28	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tubuh	12	1954	7.500.000,00	0	0	7.500.000,00	0,00	
61	4.13.2.2.1	29	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bedugul	12	1954	6.000.000,00	0	0	6.000.000,00	0,00	
62	4.13.2.2.1	30	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kambing	12	1954	17.157.000,00	0	0	17.157.000,00	0,00	
63	4.13.2.2.1	31	Jembatan Beton Propinsi	Tk Celincing	12	1954	2.500.000,00	0	0	2.500.000,00	0,00	
64	4.13.2.2.1	33	Jembatan Beton Propinsi	Tk Batang	12	1954	15.600.000,00	0	0	15.600.000,00	0,00	
65	4.13.2.2.1	34	Jembatan Beton Propinsi	Tk Galar	12	1954	35.600.000,00	0	0	35.600.000,00	0,00	
66	4.13.2.2.1	35	Jembatan Beton Propinsi	Tk Biu	12	1954	32.000.000,00	0	0	32.000.000,00	0,00	
67	4.13.2.2.1	36	Jembatan Beton Propinsi	Bon Biu	12	1954	24.600.000,00	0	0	24.600.000,00	0,00	
68	4.13.2.2.1	37	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tambak	12	1954	10.500.000,00	0	0	10.500.000,00	0,00	
69	4.13.2.2.1	38	Jembatan Beton Propinsi	Tk Puseh	12	1954	13.500.000,00	0	0	13.500.000,00	0,00	
70	4.13.2.2.1	40	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pintu	12	1954	24.000.000,00	0	0	24.000.000,00	0,00	
71	4.13.2.2.1	41	Jembatan Beton Propinsi	Tk Praya	12	1954	31.775.000,00	0	0	31.775.000,00	0,00	
72	4.13.2.2.1	42	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pengawan	12	1954	30.750.000,00	0	0	30.750.000,00	0,00	
73	4.13.2.2.1	43	Jembatan Beton Propinsi	Tk Eya	12	1954	9.000.000,00	0	0	9.000.000,00	0,00	
74	4.13.2.2.1	44	Jembatan Beton Propinsi	Tk Berata	12	1954	10.886.000,00	0	0	10.886.000,00	0,00	
75	4.13.2.2.1	45	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tenga	12	1954	9.977.000,00	0	0	9.977.000,00	0,00	
76	4.13.2.2.1	46	Jembatan Beton Propinsi	Tk Banda	12	1958	24.000.000,00	0	0	24.000.000,00	0,00	
77	4.13.2.2.1	47	Jembatan Beton Propinsi	Tk Takmung I	12	1958	11.000.000,00	0	0	11.000.000,00	0,00	
78	4.13.2.2.1	48	Jembatan Beton Propinsi	Tk Takmung II	12	1958	24.000.000,00	0	0	24.000.000,00	0,00	
79	4.13.2.2.1	49	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tlb Cau	12	1958	38.000.000,00	0	0	38.000.000,00	0,00	
80	4.13.2.2.1	50	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pendem	12	1958	15.000.000,00	0	0	15.000.000,00	0,00	
81	4.13.2.2.1	51	Jembatan Beton Propinsi	Tk Cutak	12	1958	14.000.000,00	0	0	14.000.000,00	0,00	
82	4.13.2.2.1	52	Jembatan Beton Propinsi	Tk Delod Pangeh	12	1958	30.000.000,00	0	0	30.000.000,00	0,00	
83	4.13.2.2.1	53	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kutuh	12	1958	26.500.000,00	0	0	26.500.000,00	0,00	

No	Kode Aset	No. Register	Jenis Aset	Lokasi	Perolehan		Nilai Perolehan	Sisa Manfaat		Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022	Nilai Buku	Keterangan
								Tahun	Bulan			
84	4.13.2.2.1	54	Jembatan Beton Propinsi	Tk Candi Negara	12	1958	33.000.000,00	0	0	33.000.000,00	0,00	
85	4.13.2.2.1	57	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pengumbahan	12	1958	116.000.000,00	0	0	116.000.000,00	0,00	
86	4.13.2.2.1	58	Jembatan Beton Propinsi	Tk Buluh	12	1958	10.000.000,00	0	0	10.000.000,00	0,00	
87	4.13.2.2.1	59	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pengojongan	12	1958	19.200.000,00	0	0	19.200.000,00	0,00	
88	4.13.2.2.1	60	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pedung	12	1958	27.000.000,00	0	0	27.000.000,00	0,00	
89	4.13.2.2.1	61	Jembatan Beton Propinsi	Tk Lawan	12	1958	32.000.000,00	0	0	32.000.000,00	0,00	
90	4.13.2.2.1	62	Jembatan Beton Propinsi	Tk Teluk Terima I	12	1959	25.000.000,00	0	0	25.000.000,00	0,00	
91	4.13.2.2.1	63	Jembatan Beton Propinsi	Tk Teluk Terima II	12	1959	30.000.000,00	0	0	30.000.000,00	0,00	
92	4.13.2.2.1	64	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok I	12	1959	30.000.000,00	0	0	30.000.000,00	0,00	
93	4.13.2.2.1	65	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok II	12	1959	72.420.000,00	0	0	72.420.000,00	0,00	
94	4.13.2.2.1	66	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tegal	12	1959	26.750.000,00	0	0	26.750.000,00	0,00	
95	4.13.2.2.1	67	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tk Teluk Terima	12	1960	84.000.000,00	0	0	84.000.000,00	0,00	
96	4.13.2.2.1	68	Jembatan Beton Propinsi	Tk Ketapang	12	1960	25.000.000,00	0	0	25.000.000,00	0,00	
97	4.13.2.2.1	69	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sampalan	12	1965	35.000.000,00	0	0	35.000.000,00	0,00	
98	4.13.2.2.1	72	Jembatan Beton Propinsi	Tk Hee	12	1968	24.000.000,00	0	0	24.000.000,00	0,00	
99	4.13.2.2.1	73	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kali Untu	12	1969	16.250.000,00	0	11	15.952.083,00	297.917,00	
100	4.13.2.2.1	74	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bugbug	12	1974	96.000.000,00	5	11	84.640.000,00	11.360.000,00	
101	4.13.2.2.1	76	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok V	12	1975	25.000.000,00	6	11	21.541.667,00	3.458.333,00	
102	4.13.2.2.1	77	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok VI	12	1975	35.496.000,00	6	11	30.585.720,00	4.910.280,00	
103	4.13.2.2.1	78	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok VII	12	1975	15.000.000,00	6	11	12.925.000,00	2.075.000,00	
104	4.13.2.2.1	79	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok VIII	12	1975	15.000.000,00	6	11	12.925.000,00	2.075.000,00	
105	4.13.2.2.1	80	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok IX	12	1975	66.500.000,00	6	11	57.300.833,00	9.199.167,00	
106	4.13.2.2.1	81	Jembatan Beton Propinsi	Tk Batok	12	1975	25.000.000,00	6	11	21.541.667,00	3.458.333,00	
107	4.13.2.2.1	82	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kelompok I	12	1975	21.000.000,00	6	11	18.095.000,00	2.905.000,00	
108	4.13.2.2.1	83	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kelompok II	12	1975	25.000.000,00	6	11	21.541.667,00	3.458.333,00	
109	4.13.2.2.1	84	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kelompok III	12	1975	26.000.000,00	6	11	22.403.333,00	3.596.667,00	
110	4.13.2.2.1	85	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kelompok IV	12	1975	15.000.000,00	6	11	12.925.000,00	2.075.000,00	
111	4.13.2.2.1	86	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bunut Panggang	12	1975	20.700.000,00	6	11	17.836.500,00	2.863.500,00	
112	4.13.2.2.1	87	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sawah Ketapang	12	1975	15.000.000,00	6	11	12.925.000,00	2.075.000,00	
113	4.13.2.2.1	88	Jembatan Beton Propinsi	Tk Padang Kerta	12	1975	179.161.000,00	6	11	154.377.062,00	24.783.938,00	
114	4.13.2.2.1	89	Jembatan Beton Propinsi	Tk Gelulung	12	1977	22.700.000,00	8	11	18.651.833,00	4.048.167,00	
115	4.13.2.2.1	90	Jembatan Beton Propinsi	Tk Jinah	12	1977	96.000.000,00	8	11	78.880.000,00	17.120.000,00	
116	4.13.2.2.1	92	Jembatan Beton Propinsi	Tk Banyu Mumbul	12	1977	7.883.000,00	8	11	6.477.198,00	1.405.802,00	
117	4.13.2.2.1	96	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pulu	12	1977	12.100.000,00	8	11	9.942.167,00	2.157.833,00	
118	4.13.2.2.1	97	Jembatan Beton Propinsi	Tk Banyupoh	12	1977	18.000.000,00	8	11	14.790.000,00	3.210.000,00	
119	4.13.2.2.1	98	Jembatan Beton Propinsi	Tk Uma Panji	12	1977	10.349.000,00	8	11	8.503.428,00	1.845.572,00	
120	4.13.2.2.1	99	Jembatan Beton Propinsi	Tk Manuk	12	1977	8.218.000,00	8	11	6.752.457,00	1.465.543,00	
121	4.13.2.2.1	100	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tanjung Sangiang	12	1977	30.234.000,00	8	11	24.842.270,00	5.391.730,00	
122	4.13.2.2.1	101	Jembatan Beton Propinsi	Tk Temukus II	12	1977	20.000.000,00	8	11	16.433.333,00	3.566.667,00	
123	4.13.2.2.1	102	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tampakan	12	1977	9.440.000,00	8	11	7.756.533,00	1.683.467,00	
124	4.13.2.2.1	103	Jembatan Beton Propinsi	Tk Mendaung	12	1977	31.395.000,00	8	11	25.796.225,00	5.598.775,00	
125	4.13.2.2.1	104	Jembatan Beton Propinsi	Tk Mumbul	12	1977	10.000.000,00	8	11	8.216.667,00	1.783.333,00	
126	4.13.2.2.1	105	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tirta Gangga	12	1977	11.244.000,00	8	11	9.238.820,00	2.005.180,00	
127	4.13.2.2.1	106	Jembatan Beton Propinsi	Tk Uma Anyar	12	1978	24.000.000,00	9	11	19.240.000,00	4.760.000,00	
128	4.13.2.2.1	107	Jembatan Beton Propinsi	Tk Carik Desa	12	1978	11.150.000,00	9	11	8.938.583,00	2.211.417,00	
129	4.13.2.2.1	108	Jembatan Beton Propinsi	Tk Musi I	12	1978	12.280.000,00	9	11	9.844.467,00	2.435.533,00	
130	4.13.2.2.1	109	Jembatan Beton Propinsi	Tk Musi II	12	1978	12.280.000,00	9	11	9.844.467,00	2.435.533,00	

No	Kode Aset	No. Register	Jenis Aset	Lokasi	Perolehan		Nilai Perolehan	Sisa Manfaat		Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022	Nilai Buku	Keterangan
								Tahun	Bulan			
131	4.13.2.2.1	110	Jembatan Beton Propinsi	Tk Penyabangan	12	1978	43.855.000,00	9	11	35.157.092,00	8.697.908,00	
132	4.13.2.2.1	111	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pengiris	12	1978	9.230.000,00	9	11	7.399.383,00	1.830.617,00	
133	4.13.2.2.1	112	Jembatan Beton Propinsi	Tk Serumbung	12	1978	13.844.000,00	9	11	11.098.273,00	2.745.727,00	
134	4.13.2.2.1	113	Jembatan Beton Propinsi	Tk Cangging	12	1978	9.703.000,00	9	11	7.778.572,00	1.924.428,00	
135	4.13.2.2.1	114	Jembatan Beton Propinsi	Tk Culuk	12	1978	15.331.000,00	9	11	12.290.352,00	3.040.648,00	
136	4.13.2.2.1	115	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kali Genit	12	1978	5.000.000,00	9	11	4.008.333,00	991.667,00	
137	4.13.2.2.1	116	Jembatan Beton Propinsi	Tk Penitis	12	1978	27.000.000,00	9	11	21.645.000,00	5.355.000,00	
138	4.13.2.2.1	119	Jembatan Beton Propinsi	Tk Anyar I	12	1979	32.500.000,00	10	11	25.404.167,00	7.095.833,00	
139	4.13.2.2.1	122	Jembatan Beton Propinsi	Tk Banyu Asri I	12	1979	11.200.000,00	10	11	8.754.667,00	2.445.333,00	
140	4.13.2.2.1	123	Jembatan Beton Propinsi	Tk Gondol II	12	1979	12.500.000,00	10	11	9.770.833,00	2.729.167,00	
141	4.13.2.2.1	124	Jembatan Beton Propinsi	Tk Batan Bekul	12	1979	18.761.000,00	10	11	14.664.848,00	4.096.152,00	
142	4.13.2.2.1	125	Jembatan Beton Propinsi	Tk Ababi	12	1979	19.000.000,00	10	11	14.851.667,00	4.148.333,00	
143	4.13.2.2.1	126	Jembatan Beton Propinsi	Tk Lodpah	12	1980	16.000.000,00	11	11	12.186.667,00	3.813.333,00	
144	4.13.2.2.1	127	Jembatan Beton Propinsi	Tk Samplan	12	1980	16.975.000,00	11	11	12.929.292,00	4.045.708,00	
145	4.13.2.2.1	128	Jembatan Beton Propinsi	Tk Brombang I	12	1980	18.000.000,00	11	11	13.710.000,00	4.290.000,00	
146	4.13.2.2.1	129	Jembatan Beton Propinsi	Tk Patas	12	1980	25.000.000,00	11	11	19.041.667,00	5.958.333,00	
147	4.13.2.2.1	130	Jembatan Beton Propinsi	Tk Batu Pulu	12	1980	36.052.000,00	11	11	27.459.607,00	8.592.393,00	
148	4.13.2.2.1	131	Jembatan Beton Propinsi	Tk Peladung	12	1980	32.695.000,00	11	11	24.902.692,00	7.792.308,00	
149	4.13.2.2.1	132	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tanke	12	1980	6.000.000,00	11	11	4.570.000,00	1.430.000,00	
150	4.13.2.2.1	133	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tinga-Tinga	12	1981	59.710.000,00	12	11	44.284.917,00	15.425.083,00	
151	4.13.2.2.1	135	Jembatan Beton Propinsi	Tk Anyar II	12	1982	45.000.000,00	13	11	32.475.000,00	12.525.000,00	
152	4.13.2.2.1	137	Jembatan Beton Propinsi	Tk Anyar	12	1982	29.000.000,00	13	11	20.928.333,00	8.071.667,00	
153	4.13.2.2.1	138	Jembatan Beton Propinsi	Tk Mangga	12	1982	149.048.000,00	13	11	107.562.973,00	41.485.027,00	
154	4.13.2.2.1	139	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pengapalan	12	1982	16.775.000,00	13	11	12.105.958,00	4.669.042,00	
155	4.13.2.2.1	140	Jembatan Beton Propinsi	Tk Desa II	12	1982	28.000.000,00	13	11	20.206.667,00	7.793.333,00	
156	4.13.2.2.1	141	Jembatan Beton Propinsi	Tk Puana	12	1982	20.000.000,00	13	11	14.433.333,00	5.566.667,00	
157	4.13.2.2.1	143	Jembatan Beton Propinsi	Tk Prakpak	12	1983	67.180.000,00	14	11	47.137.967,00	20.042.033,00	
158	4.13.2.2.1	144	Jembatan Beton Propinsi	Tk Banges	12	1983	67.180.000,00	14	11	47.137.967,00	20.042.033,00	
159	4.13.2.2.1	145	Jembatan Beton Propinsi	Tk Cicing	12	1984	70.690.000,00	15	11	48.187.017,00	22.502.983,00	
160	4.13.2.2.1	146	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tanahampo	12	1984	53.990.000,00	15	11	36.803.183,00	17.186.817,00	
161	4.13.2.2.1	147	Jembatan Beton Propinsi	Tk Manggis	12	1984	140.648.000,00	15	11	95.875.053,00	44.772.947,00	
162	4.13.2.2.1	148	Jembatan Beton Propinsi	Pacuan	12	1984	38.857.000,00	15	11	26.487.522,00	12.369.478,00	
163	4.13.2.2.1	149	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pati	12	1984	119.890.000,00	15	11	81.725.017,00	38.164.983,00	
164	4.13.2.2.1	150	Jembatan Beton Propinsi	Tk Ambangan	12	1984	36.000.000,00	15	11	24.540.000,00	11.460.000,00	
165	4.13.2.2.1	151	Jembatan Beton Propinsi	Pesedahan	12	1985	34.500.000,00	16	11	22.827.500,00	11.672.500,00	
166	4.13.2.2.1	152	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sakenan Jasi	12	1985	139.590.000,00	16	11	92.362.050,00	47.227.950,00	
167	4.13.2.2.1	153	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kubu Jati	12	1985	92.354.000,00	16	11	61.107.563,00	31.246.437,00	
168	4.13.2.2.1	154	Jembatan Beton Propinsi	Tk Ampo	12	1985	53.990.000,00	16	11	35.723.383,00	18.266.617,00	
169	4.13.2.2.1	155	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pacuan II	12	1985	38.857.000,00	16	11	25.710.382,00	13.146.618,00	
170	4.13.2.2.1	156	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pesedahan	12	1985	34.500.000,00	16	11	22.827.500,00	11.672.500,00	
171	4.13.2.2.1	159	Jembatan Beton Propinsi	Tk Panes	12	1985	160.000.000,00	16	11	105.866.667,00	54.133.333,00	
172	4.13.2.2.1	160	Jembatan Beton Propinsi	Tk Baas	12	1986	234.952.000,00	17	11	150.760.867,00	84.191.133,00	
173	4.13.2.2.1	161	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pangpang	12	1986	38.510.000,00	17	11	24.710.583,00	13.799.417,00	
174	4.13.2.2.1	162	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bubuh	12	1986	320.000.000,00	17	11	205.333.333,00	114.666.667,00	
175	4.13.2.2.1	165	Jembatan Beton Propinsi	Yeh Tagtag	12	1986	76.819.000,00	17	11	49.292.192,00	27.526.808,00	
176	4.13.2.2.1	166	Jembatan Beton Propinsi	Tk Petiwasan	12	1988	501.486.000,00	19	11	301.727.410,00	199.758.590,00	
177	4.13.2.2.1	167	Jembatan Beton Propinsi	Tk Grokgak I	12	1988	111.829.000,00	19	11	67.283.782,00	44.545.218,00	

No	Kode Aset	No. Register	Jenis Aset	Lokasi	Perolehan		Nilai Perolehan	Sisa Manfaat		Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022	Nilai Buku	Keterangan
								Tahun	Bulan			
178	4.13.2.2.1	168	Jembatan Beton Propinsi	Tk Asangan	12	1988	210.760.000,00	19	11	126.807.267,00	83.952.733,00	
179	4.13.2.2.1	169	Jembatan Beton Propinsi	Tk Grokgak	12	1988	111.829.000,00	19	11	67.283.782,00	44.545.218,00	
180	4.13.2.2.1	171	Jembatan Beton Propinsi	Tk Area	12	1989	76.500.000,00	20	11	44.497.500,00	32.002.500,00	
181	4.13.2.2.1	172	Jembatan Beton Propinsi	Tk Embang	12	1989	311.000.000,00	20	11	180.898.333,00	130.101.667,00	
182	4.13.2.2.1	173	Jembatan Beton Propinsi	Tk Banyu Raras	12	1989	174.026.000,00	20	11	101.225.123,00	72.800.877,00	
183	4.13.2.2.1	174	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bindu	12	1989	150.000.000,00	20	11	87.250.000,00	62.750.000,00	
184	4.13.2.2.1	175	Jembatan Beton Propinsi	Tk Penatih	12	1989	150.000.000,00	20	11	87.250.000,00	62.750.000,00	
185	4.13.2.2.1	178	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bakah	12	1990	310.000.000,00	21	11	174.116.667,00	135.883.333,00	
186	4.13.2.2.1	179	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bangkeh II	12	1990	10.000.000,00	21	11	5.616.667,00	4.383.333,00	
187	4.13.2.2.1	180	Jembatan Beton Propinsi	Tk Ejekan Kebo	12	1990	22.800.000,00	21	11	12.806.000,00	9.994.000,00	
188	4.13.2.2.1	181	Jembatan Beton Propinsi	Tk Penarukan	12	1990	426.686.000,00	21	11	239.655.303,00	187.030.697,00	
189	4.13.2.2.1	182	Jembatan Beton Propinsi	Tk Brombong III	12	1990	76.332.000,00	21	11	42.873.140,00	33.458.860,00	
190	4.13.2.2.1	183	Jembatan Beton Propinsi	Tk Lalang	12	1992	40.000.000,00	23	11	20.866.667,00	19.133.333,00	
191	4.13.2.2.1	184	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bumbung	12	1992	32.000.000,00	23	11	16.693.333,00	15.306.667,00	
192	4.13.2.2.1	185	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bayad	12	1992	11.500.000,00	23	11	5.999.167,00	5.500.833,00	
193	4.13.2.2.1	186	Jembatan Beton Propinsi	Tk Glebeg	12	1992	9.000.000,00	23	11	4.695.000,00	4.305.000,00	
194	4.13.2.2.1	187	Jembatan Beton Propinsi	Tk Puyung	12	1992	52.000.000,00	23	11	27.126.667,00	24.873.333,00	
195	4.13.2.2.1	188	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bila	12	1992	13.000.000,00	23	11	6.781.667,00	6.218.333,00	
196	4.13.2.2.1	189	Jembatan Beton Propinsi	Tk Menanga	12	1992	26.000.000,00	23	11	13.563.333,00	12.436.667,00	
197	4.13.2.2.1	190	Jembatan Beton Propinsi	Tk Penyusuan	12	1992	7.000.000,00	23	11	3.651.667,00	3.348.333,00	
198	4.13.2.2.1	191	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bantes	12	1993	9.340.000,00	24	11	4.685.567,00	4.654.433,00	
199	4.13.2.2.1	192	Jembatan Beton Propinsi	Tk Gelantang	12	1993	6.000.000,00	24	11	3.010.000,00	2.990.000,00	
200	4.13.2.2.1	193	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bantes II	12	1993	8.000.000,00	24	11	4.013.333,00	3.986.667,00	
201	4.13.2.2.1	194	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bantes	12	1993	9.340.000,00	24	11	4.685.567,00	4.654.433,00	
202	4.13.2.2.1	195	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tegallinggah	12	1994	16.800.000,00	25	11	8.092.000,00	8.708.000,00	
203	4.13.2.2.1	196	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumaga	12	1995	53.900.000,00	26	11	24.883.833,00	29.016.167,00	
204	4.13.2.2.1	197	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bulakan	12	1995	26.400.000,00	26	11	12.188.000,00	14.212.000,00	
205	4.13.2.2.1	198	Jembatan Beton Propinsi	Tk Les	12	1995	12.750.000,00	26	11	5.886.250,00	6.863.750,00	
206	4.13.2.2.1	199	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pojok Batu	12	1995	12.500.000,00	26	11	5.770.833,00	6.729.167,00	
207	4.13.2.2.2	1	Jembatan Baja Propinsi	Tk Unda	12	1985	390.031.000,00	16	11	258.070.512,00	131.960.488,00	
208	4.14.1.2.2	1	Bendung dengan Pintu Bilas	Gianyar	6	2009	262.000.000,00	40	5	50.216.667,00	211.783.333,00	
209	4.14.1.3.2	1	Saluran Induk	Gianyar/Medahan	12	1997	28.400.000,00	28	11	11.975.333,00	16.424.667,00	
210	4.14.1.3.2	6	Saluran Induk	Tabanan/Sungsang	12	1997	70.150.000,00	28	11	29.579.917,00	40.570.083,00	
211	4.14.1.3.2	10	Saluran Induk	Gianyar/Ubud	12	2000	114.825.000,00	31	11	41.528.375,00	73.296.625,00	
212	4.14.1.3.2	11	Saluran Induk	Buleleng/Sangkan Gunung	12	2001	123.173.000,00	32	11	42.084.108,00	81.088.892,00	
213	4.14.1.3.2	12	Saluran Induk	Buleleng/Busungbiu Tunju	12	2001	236.600.000,00	32	11	80.838.333,00	155.761.667,00	
214	4.14.1.3.2	15	Saluran Induk	Gianyar	12	2002	194.000.000,00	33	11	62.403.333,00	131.596.667,00	
215	4.14.1.3.2	16	Saluran Induk	Gianyar	12	2002	143.000.000,00	33	11	45.998.333,00	97.001.667,00	
216	4.14.1.3.2	19	Saluran Induk	Tabanan	12	2002	172.000.000,00	33	11	55.326.667,00	116.673.333,00	
217	4.14.1.3.2	22	Saluran Induk	Karngasem	12	2003	216.000.000,00	34	11	65.160.000,00	150.840.000,00	
218	4.14.1.3.2	28	Saluran Induk	Gianyar	12	2004	143.493.000,00	35	11	40.417.195,00	103.075.805,00	
219	4.14.1.3.2	31	Saluran Induk	Tabanan	12	2005	360.887.000,00	36	11	94.432.098,00	266.454.902,00	
220	4.14.1.3.2	34	Saluran Induk	Gianyar	12	2006	1.181.697.000,00	37	11	285.576.775,00	896.120.225,00	
221	4.14.1.3.2	44	Saluran Induk	Gianyar	12	2007	292.675.000,00	38	11	64.876.292,00	227.798.708,00	
222	4.14.1.3.2	54	Saluran Induk	Badung	12	2008	1.979.982.000,00	39	11	399.296.370,00	1.580.685.630,00	
223	4.14.1.3.2	65	Saluran Induk	Buleleng	12	2008	4.650.000.000,00	39	11	937.750.000,00	3.712.250.000,00	
224	4.14.1.3.2	67	Saluran Induk	Tk. Ayung (DI Tumbak Bayuh)	12	2008	1.699.934.000,00	39	11	342.820.023,00	1.357.113.977,00	

No	Kode Aset	No. Register	Jenis Aset	Lokasi	Perolehan		Nilai Perolehan	Sisa Manfaat		Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022	Nilai Buku	Keterangan
								Tahun	Bulan			
225	4.14.1.3.2	68	Saluran Induk	Tk. Daya	12	2008	470.656.000,00	39	11	94.915.627,00	375.740.373,00	
226	4.14.1.3.2	69	Saluran Induk	Tk. Banyuning	12	2008	909.875.000,00	39	11	183.491.458,00	726.383.542,00	
227	4.14.1.3.2	70	Saluran Induk	Tukad Candigara	12	2008	2.183.998.000,00	39	11	440.439.597,00	1.743.558.403,00	
228	4.14.1.3.2	88	Saluran Induk	Nusa Penida Klungkung	12	2014	4.115.843.000,00	45	11	149.028.974,00	3.966.814.026,00	
229	4.14.1.3.2	90	Saluran Induk	Kabupaten Badung dan Kota Denpasar	12	2014	4.849.194.000,00	45	11	396.017.510,00	4.453.176.490,00	
230	4.14.1.3.2	106	Saluran Induk	Desa Busungbiu, kec. busung biu kab buleleng	12	2014	49.556.000,00	45	11	4.047.073,00	45.508.927,00	
231	4.14.1.3.2	107	Saluran Induk	Guyangan di Kec. Nusa Penida kab. Klungkung	12	2014	73.917.800,00	45	11	6.036.620,00	67.881.180,00	
232	4.14.1.3.2	108	Saluran Induk	Guyangan di Kec. Nusa Penida kab. Klungkung	12	2014	49.785.000,00	45	11	4.065.775,00	45.719.225,00	
233	4.14.1.3.2	109	Saluran Induk	desa pacung,kec.tejakula kab buleleng	12	2014	48.200.000,00	45	11	3.936.333,00	44.263.667,00	
234	4.14.1.3.2	110	Saluran Induk	desa manukaya anyar, kec. tampaksiring, kab. Gianyar	12	2014	48.680.000,00	45	11	3.975.533,00	44.704.467,00	
235	4.14.1.3.2	115	Saluran Induk	spam penet	12	2014	33.618.101.970,00	45	11	2.745.478.328,00	30.872.623.642,00	
236	4.14.1.3.2	128	Saluran Induk	D.I. Caguh	12	2006	4.127.319.000,00	37	11	934.276.914,00	3.193.042.086,00	
237	4.14.1.3.2	129	Saluran Induk	D.I. Cangi	12	2008	2.829.399.600,00	39	11	559.057.074,00	2.270.342.526,00	
238	4.14.1.3.2	130	Saluran Induk	D.I. Gadungan Lambuk	12	2008	3.336.147.400,00	39	11	601.040.202,00	2.735.107.198,00	
239	4.14.1.3.2	131	Saluran Induk	D.I. Luwus Carangsari	12	2008	3.442.410.600,00	39	11	658.699.972,00	2.783.710.628,00	
240	4.14.1.3.2	132	Saluran Induk	D.I. Pame Palean	12	2008	4.378.804.800,00	39	11	869.001.592,00	3.509.803.208,00	
241	4.14.1.3.2	133	Saluran Induk	D.I. Pejeng	12	2007	1.735.169.000,00	38	11	318.141.892,00	1.417.027.108,00	
242	4.14.1.3.2	134	Saluran Induk	D.I. Tengkulak Mawang	12	2008	3.815.808.000,00	39	11	758.909.608,00	3.056.898.392,00	
243	4.14.1.3.2	135	Saluran Induk	D.I. Tinjak Menjangan	12	2008	2.169.351.200,00	39	11	428.676.709,00	1.740.674.491,00	
244	4.14.1.3.2	136	Saluran Induk	D.I. Tungkub	12	2007	20.604.041.175,00	40	8	2.122.086.656,00	18.481.954.519,00	
245	4.14.1.5.3	4	Bangunan Pengaman Irigasi Lain-lain	D.I. Gunung Sari di Kabupaten Gianyar	12	2010	5.379.701.000,00	41	11	869.718.328,00	4.509.982.672,00	
246	4.14.3.3.2	1	Saluran Induk	Tabanan	8	2009	98.591.000,00	15	7	37.135.943,00	61.455.057,00	
247	4.14.4.2.1	1	Bangunan Pengambilan Pengamanan sungai	Jembrana	5	2009	1.263.090.000,00	0	4	1.220.987.000,00	42.103.000,00	
248	4.15.7.1.4	2	Instalasi	SMP negeri 3 sukawati, Gianyar	12	2012	809.950.000,00	23	11	164.239.862,00	645.710.138,00	

Gedung dan Bangunan

Jumlah							**2.472.332.923,00**			**82.513.825,00**	**359.514.175,00**	
1	3.11.1.21.1	1	Bangunan Gedung	Kawasan Padangbay dan Tanah Ampo, Karangasem	12	2011	219.499.000,00		0	39.875.652,00	179.623.348,00	PUPRKIM
2	3.11.1.21.1	2	Bangunan Gedung	Kawasan Padangbay dan Tanah Ampo, Karangasem	12	2011	176.762.000,00		0	32.111.763,00	144.650.237,00	PUPRKIM
3	3.12.1.1.2	5	Lain-lain	Desa Jegu, Penebel, Tabanan	7	2009	45.767.000,00		0	10.526.410,00	35.240.590,00	PUPRKIM
4	3.11.1.21.1		Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen	Kesiman, Denpasar Timur		2024	2.030.304.923,00					PUPRKIM

Daftar Barang Yang Tidak Ditemukan Fisiknya
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

No.	SKDP	Nama Barang	Kode Barang	Tahun Perolehan	Jumlah (unit)	Nilai Perolehan (Rp)
1	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Camera Video	1.3.2.05.002.006.021	2000	1	42.125.300,00
2	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Camera Video	1.3.2.05.002.006.021	2000	1	40.551.500,00
3	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Camera Digital	1.3.2.06.001.002.126	2001	1	32.945.000,00
4	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Camera Digital	1.3.2.06.001.002.126	2001	1	52.791.600,00
5	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Camera Digital	1.3.2.06.001.002.126	2023	1	52.791.600,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Camera Digital	1.3.2.06.001.002.126	2023	1	49.839.000,00
		Total nilai				**271.044.000,00**

Daftar Barang Kurang Volume
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

No.	SKDP	Nama Barang	Kode Barang	Tahun Perolehan	Jumlah (unit)	Nilai Perolehan (Rp)
1	Sekretariat DPRD	Bangunan Gedung Kan	1.3.3.01.001.001.001	2025	1	89.820.697,37
2	Rumah Sakit Jiwa	Bangunan Rumah Sakit	1.3.3.01.001.006.004	2025	1	535.513.158,02
3	Rumah Sakit Bali Mandara	Bangunan Air Kotor La	1.3.4.02.007.006.001	2025	1	165.074.698,48
4	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	Alat Peraga Praktek Sek	1.3.2.08.003.016.001	2025	1	32.468.781,00
5	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	Bangunan Gedung Pen	1.3.3.01.001.010.001	2025	1	12.529.662,04
6	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	Bangunan Gedung Pen	1.3.3.01.001.010.002	2025	1	12.664.110,43
7	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	Bangunan Gedung Pen	1.3.3.01.001.010.003	2025	1	101.330.713,01
8	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	Bangunan Gedung Pen	1.3.3.01.001.010.004	2025	1	263.688.620,50
9	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	Bangunan Gedung Pen	1.3.3.01.001.010.005	2025	1	148.663.395,63
10	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	Bangunan Gedung Pen	1.3.3.01.001.010.006	2025	1	113.089.183,36
11	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	Bangunan Gedung Pen	1.3.3.01.001.010.007	2025	1	50.756.361,01
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.001.002.001	2025	1	129.221.063,24
13	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.001.002.002	2025	1	20.060.397,20
14	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.001.002.003	2025	1	64.889.617,27
15	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.001.002.004	2025	1	37.287.750,08
16	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.001.002.005	2025	1	117.338.953,45
17	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.001.002.006	2025	1	66.925.712,13
		Total nilai				**1.961.322.874,22**

Lampiran 43

Rincian Mutasi Amortisasi

Pemerintah Provinsi Bali

Per 31 Desember 2025

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi Tambah					
			Beban Amortisasi		Penerimaan Hibah	Reklasifikasi		
			Semester 1	Semester 2		Dari Aset Tetap	Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	Dari Aset Lainnya
	Jumlah	**20.833.551.606,82**	**1.449.032.057,00**	**1.465.461.446,00**	**32.250.000,00**	**-**	**-**	**-**
1	Sekretariat DPRD	20.372.000,00	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	1.288.150.935,00	61.961.164,00	44.274.750,00	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	842.715.833,00	310.555.000,00	318.556.250,00	32.250.000,00	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	732.779.217,00	15.254.583,00	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	6.006.302.481,65	351.486.414,00	429.243.367,00	-	-	-	-
8	Dinas Kebudayaan	80.000.000,00	4.920.000,00	3.280.000,00	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	343.666.667,00	46.462.500,00	37.212.500,00	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	324.456.600,00	-	-	-	-	-	-
14	Inspektorat	315.599.334,00	7.837.800,00	6.907.200,00	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.002.379.508,00	5.844.850,00	974.142,00	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	624.183.417,00	21.311.500,00	7.481.500,00	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	442.133.000,00	64.399.800,00	64.399.800,00	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	136.104.033,00	2.398.000,00	2.398.000,00	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	4.271.692.973,00	6.522.915,00	6.522.915,00	-	-	-	-
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	3.766.083.596,17	535.656.164,00	541.807.461,00	-	-	-	-
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	1.100.000,00	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	86.900.000,00	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	449.932.012,00	14.421.367,00	2.403.561,00	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	99.000.000,00	-	-	-	-	-	-

No	SKPD			Mutasi Kurang				
		Koreksi Pencatatan Saldo Awal	Mutasi Antar OPD	Salah Pos Belanja Modal	Pengeluaran Hibah	Penghapusan	Reklasifikasi	
							Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	Ke Aset Lainnya
	Jumlah	**4.416.972.062,00**	**-**	**-**	**-**	**69.899.500,00**	**-**	**-**
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	20.372.000,00	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	4.416.972.062,00	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	49.527.500,00	-	-

No	SKPD	Koreksi Pencatatan Saldo Awal	Mutasi Antar OPD	Saldo Akhir
	Jumlah	**21.809.825,00**	**-**	**28.105.557.846,82**
1	Sekretariat DPRD	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	1.394.386.849,00
5	Dinas Perhubungan	-	-	1.504.077.083,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	748.033.800,00
7	Dinas Kesehatan	20.988.158,00	-	6.766.044.104,65
8	Dinas Kebudayaan	-	-	88.200.000,00
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	427.341.667,00
12	Badan Pendapatan	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	324.456.600,00
14	Inspektorat	-	-	330.344.334,00
15	Dinas Pariwisata	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	1.009.198.500,00
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	821.667,00	-	652.154.750,00
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	570.932.600,00
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	140.900.033,00
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	-	8.701.710.865,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	-	-	4.843.547.221,17
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	1.100.000,00
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	86.900.000,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	466.756.940,00
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	49.472.500,00

Lampiran 44

Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2025

No	SKPD	SALDO AWAL	Saldo Awal				Reklasifikasi dari Aset Tetap			
			PM	GB	JIJ	ATL	PM	GB	JIJ	ATL
	Jumlah	21.049.152.557,95	17.724.121.763,95	1.747.676.725,00	41.309.769,00	1.536.044.300,00	29.064.135.570,37	865.929.181,00	11.304.000,00	6.450.000,00
1	Sekretariat Dprd	479.774.000,00	479.774.000,00	-	-	-	938.508.691,00	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	229.216.500,00	229.216.500,00	-	-	-	2.507.155.911,50	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	619.757.967,00	71.688.250,00	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	1.256.569.703,00	-	11.304.000,00	-
7	Dinas Kesehatan	1.496.231.200,00	1.495.848.700,00	-	382.500,00	-	2.599.284.681,72	151.125.199,00	-	-
8	Dinas Kebudayaan	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	-	699.019.500,00	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	358.608.915,00	358.608.915,00	-	-	-	5.564.977.855,00	147.196.982,00	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	297.648.975,00	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	275.250.500,00	275.250.500,00	-	-	-	1.186.314.246,74	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	793.903.264,54	-	-	-
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	229.850.000,00	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	147.117.800,00	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	327.498.228,00	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	603.415.420,00	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	433.092.368,00	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	240.513.000,00	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	63.950.450,00	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	367.037.320,00	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	561.047.435,00	556.438.166,00	-	4.609.269,00	-	998.615.318,00	-	-	-
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	818.694.932,53	230.646.375,00	-	-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	15.910.789.829,95	12.636.261.519,95	1.702.166.010,00	36.318.000,00	1.536.044.300,00	6.753.812.256,34	215.696.502,00	-	6.450.000,00
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	624.867.063,00	624.867.063,00	-	-	-	545.189.752,00	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	26.767.000,00	49.575.873,00	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	1.059.367.115,00	1.013.856.400,00	45.510.715,00	-	-	950.845.530,00	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	94.595.400,00	-	-	-

No	SKPD	Mutasi Tambah								
		Antar Aset Tetap Tahun Berjalan				Koreksi Pencatatan Saldo Awal				
		PM	GB	JIJ	ATL	PM	GB	JIJ	ATL	PM
	Jumlah	-	-	-	-	83.265.000,00	-	-	-	-
1	Sekretariat Dprd									
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali									
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali									
4	Sekretariat Daerah									-
5	Dinas Perhubungan									
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik									
7	Dinas Kesehatan									
8	Dinas Kebudayaan									
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan									
10	Dinas Koperasi Dan Ukm									
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp									
12	Badan Pendapatan									
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah									
14	Inspektorat									
15	Dinas Pariwisata									
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik									
17	Satuan Polisi Pamong Praja									
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia									
20	Badan Penghubung Provinsi Bali									
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali									
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali									
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa									
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman									
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak									
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga					-				-
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan					-				
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-				83.265.000,00				
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup									
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan									

No	SKPD	Mutasi Antar Perangkat Daerah			Akumulasi Aset Lainnya yang Dihibahkan				Pengh	
		GB	JIJ	ATL	PM	GB	JIJ	ATL	PM	GB
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.694.521.420,10**	**595.574.536,00**
1	Sekretariat Dprd								1.418.282.691,00	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali								-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali								-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-					1.577.822.611,50	-
5	Dinas Perhubungan								396.201.967,00	71.688.250,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik								1.076.069.703,00	-
7	Dinas Kesehatan								1.060.179.826,32	151.125.199,00
8	Dinas Kebudayaan								713.019.500,000	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan								-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm								297.648.975,00	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp								-	-
12	Badan Pendapatan								1.461.564.746,74	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-				-			603.066.264,54	-
14	Inspektorat								-	-
15	Dinas Pariwisata								147.117.800,00	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik								-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja								166.498.228,00	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								603.415.420,00	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia								433.092.368,00	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali								-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali								-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali								63.950.450,00	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa								367.037.320,00	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman								-	-
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak								-	160.438.791,00
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga								4.660.111.647,00	212.322.296,00
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan								538.719.452,00	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral								83.265.000,00	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup				-	-	-	-	932.862.050,00	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan								94.595.400,00	-

No	SKPD	Mutasi Kurang								
		apusan		Antar Aset Tetap Tahun Berjalan				Reklasifikasi ke Aset Tetap		
		JIJ	ATL	PM	GB	JIJ	ATL	PM	GB	JIJ
	Jumlah	**11.304.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	Sekretariat Dprd	-	-							
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-							
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-							
4	Sekretariat Daerah	-	-							
5	Dinas Perhubungan	-	-							
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	11.304.000,00	-							
7	Dinas Kesehatan	-	-							
8	Dinas Kebudayaan	-	-							
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-							
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-							
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-							
12	Badan Pendapatan	-	-							
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-							
14	Inspektorat	-	-							
15	Dinas Pariwisata	-	-					-		
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-							
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-							
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-							
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-							
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-							
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-							
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-							
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-							
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	-							
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-							
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	-	-						-	
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-							
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-						
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-							
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-					-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-							

No	SKPD		Koreksi Pencatatan Saldo Awal				Mutasi Antar Perangkat Daerah			
		ATL	PM	GB	JIJ	ATL	PM	GB	JIJ	ATL
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Sekretariat Dprd		-							
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali									
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali									
4	Sekretariat Daerah		-	-	-	-	-			
5	Dinas Perhubungan									
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik		-							
7	Dinas Kesehatan							-		
8	Dinas Kebudayaan									
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan									
10	Dinas Koperasi Dan Ukm									
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp									
12	Badan Pendapatan									
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah			-						
14	Inspektorat									
15	Dinas Pariwisata									
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik									
17	Satuan Polisi Pamong Praja									
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia									
20	Badan Penghubung Provinsi Bali									
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali									
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali									
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa									
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman		-							
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak									
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga		-							
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		-							
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral									
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-								
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan									

No	SKPD	Saldo Akhir				
		PM	GB	JIJ	ATL	TOTAL
	Jumlah	**30.177.000.914,22**	**2.018.031.370,00**	**41.309.769,00**	**1.542.494.300,00**	**33.778.836.353,22**
1	Sekretariat Dprd	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	1.158.549.800,00	-	-	-	1.158.549.800,00
5	Dinas Perhubungan	223.556.000,00	-	-	-	223.556.000,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	180.500.000,00	-	-	-	180.500.000,00
7	Dinas Kesehatan	3.034.953.555,40	-	382.500,00	-	3.035.336.055,40
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	5.923.586.770,00	147.196.982,00	-	-	6.070.783.752,00
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	- 0,00	-	-	-	- 0,00
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	190.837.000,00	-	-	-	190.837.000,00
14	Inspektorat	229.850.000,00	-	-	-	229.850.000,00
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	161.000.000,00	-	-	-	161.000.000,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	240.513.000,00	-	-	-	240.513.000,00
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.555.053.484,00	-	4.609.269,00	-	1.559.662.753,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	858.694.932,53	70.207.584,00	-	-	928.902.516,53
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	14.729.962.129,29	1.705.540.216,00	36.318.000,00	1.542.494.300,00	18.014.314.645,29
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	631.337.363,00	-	-	-	631.337.363,00
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	0,00	-	-	-	0,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	26.767.000,00	49.575.873,00	-	-	76.342.873,00
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	1.031.839.880,00	45.510.715,00	-	-	1.077.350.595,00
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-

Lampiran 45

Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2025

No	SKPD	SALDO AWAL	Saldo Awal				Reklasifikasi dari Aset Tetap			
			PM	GB	JIJ	ATL	PM	GB	JIJ	ATL
	Jumlah	**84.281.395.559,03**	**1.254.388.319,00**	**6.928.963.750,00**	**76.098.043.490,03**	**-**	**272.651.222,58**	**3.940.734.459,00**	**4.827.914,00**	**-**
1	Sekretariat Dprd	-					-			
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-								
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-								
4	Sekretariat Daerah	-					94.941.164,58			
5	Dinas Perhubungan	-								
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	224.123.328,00	-	224.123.328,00			169.751.816,00	-		
7	Dinas Kesehatan	1.145.904.956,00	-	1.145.904.956,00			-	-		
8	Dinas Kebudayaan	-								
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-								
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-								
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-								
12	Badan Pendapatan	-								
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	6.347.890.049,00	895.115.519,00	5.153.277.681,00	299.496.849,00		7.958.242,00	3.940.734.459,00	4.827.914,00	
14	Inspektorat	-								
15	Dinas Pariwisata	-								
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-								
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-								
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-								
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-								
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-								
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-								
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-								
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-								
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	75.880.323.753,03		81.777.112,00	75.798.546.641,03					
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-								
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	683.153.473,00	359.272.800,00	323.880.673,00				-		
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-								
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-								
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-								
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-								
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-								

No	SKPD	Mutasi Tambah								
		Mutasi Antar SKPD						Koreksi Saldo Awal		
		PM	GB	JIJ	ATL	KDP	ATB	PM	GB	JIJ
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Sekretariat Dprd									
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali									
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali									
4	Sekretariat Daerah									
5	Dinas Perhubungan									
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik									
7	Dinas Kesehatan									
8	Dinas Kebudayaan									
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan									
10	Dinas Koperasi Dan Ukm									
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp									
12	Badan Pendapatan									
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah									
14	Inspektorat									
15	Dinas Pariwisata									
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik									
17	Satuan Polisi Pamong Praja									
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia									
20	Badan Penghubung Provinsi Bali									
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali									
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali									
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa									
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman									
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak									
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga									
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan									
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral									
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup									
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan									

No	SKPD		Aset Lainnya yang Dihibahkan						Peng	
		ATL	PM	GB	JIJ	ATL	KDP	ATB	PM	GB
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94.941.164,58**	**-**
1	Sekretariat Dprd								-	
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali									
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali									
4	Sekretariat Daerah								94.941.164,58	
5	Dinas Perhubungan									
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik								-	
7	Dinas Kesehatan									
8	Dinas Kebudayaan									
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan									
10	Dinas Koperasi Dan Ukm									
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp									
12	Badan Pendapatan									
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah									
14	Inspektorat									
15	Dinas Pariwisata									
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik									
17	Satuan Polisi Pamong Praja									
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia									
20	Badan Penghubung Provinsi Bali									
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali									
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali									
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa									
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman									
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak									
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga									
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan									
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral									
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup									
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan									

No	SKPD	Mutasi Kurang								
		apusan		Koreksi Saldo Awal				Mutasi Ar		
		JIJ	ATL	PM	GB	JIJ	ATL	PM	GB	JIJ
	Jumlah	**14.117.300.000,00**	**-**	**-**	**1.934.703,00**	**208.365.790,03**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	Sekretariat Dprd									
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali									
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali									
4	Sekretariat Daerah									
5	Dinas Perhubungan									
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik			-	1.143.933,00					
7	Dinas Kesehatan				315.756,00					
8	Dinas Kebudayaan									
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan									
10	Dinas Koperasi Dan Ukm									
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp									
12	Badan Pendapatan									
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah									
14	Inspektorat									
15	Dinas Pariwisata									
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik									
17	Satuan Polisi Pamong Praja									
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia									
20	Badan Penghubung Provinsi Bali									
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali									
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali									
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa									
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	14.117.300.000,00				208.365.790,03				
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak									
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga				475.014,00					
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan									
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral									
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup									
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan									

No	SKPD	ıtar SKPD			Antar Aset Tetap Tahun Berjalan			Reklasifikasi ke A		
		ATL	KDP	ATB	PM	GB	JIJ	PM	GB	JIJ
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Sekretariat Dprd									
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali									
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali									
4	Sekretariat Daerah									
5	Dinas Perhubungan									
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik									
7	Dinas Kesehatan									
8	Dinas Kebudayaan									
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan									
10	Dinas Koperasi Dan Ukm									
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp									
12	Badan Pendapatan									
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah								-	
14	Inspektorat									
15	Dinas Pariwisata									
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik									
17	Satuan Polisi Pamong Praja									
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia									
20	Badan Penghubung Provinsi Bali									
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali									
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali									
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa									
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman									-
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak									
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga									
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan									
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral									
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup									
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan									

No	SKPD	Set Tetap			Saldo Akhir				
		ATL	KDP	ATB	PM	GB	JIJ	ATL	TOTAL
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**1.432.098.377,00**	**10.867.763.506,00**	**61.777.205.614,00**	**-**	**74.077.067.497,00**
1	Sekretariat Dprd				-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali				-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali				-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah				-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan				-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik				169.751.816,00	222.979.395,00	-	-	392.731.211,00
7	Dinas Kesehatan				-	1.145.589.200,00	-	-	1.145.589.200,00
8	Dinas Kebudayaan				-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan				-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm				-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp				-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan				-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah				903.073.761,00	9.094.012.140,00	304.324.763,00	-	10.301.410.664,00
14	Inspektorat				-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata				-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja				-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia				-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali				-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali				-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali				-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa				-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman				-	81.777.112,00	61.472.880.851,00	-	61.554.657.963,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga				359.272.800,00	323.405.659,00	-	-	682.678.459,00
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan				-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral				-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup				-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan				-	-	-	-	-

Data Nominal Reklamasi Dan Pascatambang dan Jaminan Kesungguhan Eksplorasi (Pokok + Bunga)
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

No	Nama Perusahaan/Pemilik IUP-OP	Tanggal berlaku izin	Rekening	Bank	Jaminan Reklamasi dan Pascatambang yang ditetapkan (Rp.)	Nilai Jaminan Reklamasi per akhir 2021 Pokok + Bunga	Nilai Jaminan Reklamasi per akhir 2022 Pokok + Bunga	Bunga deposito tahun 2023	Nilai Jaminan Reklamasi per akhir 2023 Pokok + Bunga	Bunga deposito tahun 2024	Nilai Jaminan Reklamasi per akhir 2024 Pokok + Bunga	Bunga deposito tahun 2025	Nilai Jaminan Reklamasi per akhir 2025 Pokok + Bunga	Keterangan
1	**PT. BUMI PASIR MANDIRI** 91202056029740017, tanggal 13 Nov 2024	13 Nov 2024 s/d 13 Nov 2029	036801005853408	BRI	195.000.000,00	241.354.465,00	245.974.078,00	4.956.509,00	250.930.587,00	7.501.950,00	258.432.537,00	7.312.397,00	265.744.934,00	Izin masih berlaku
2	**PT. DHARMA BUANA KARYA** 540/5989/IV-B/DISPMPT, tanggal 23 Des 2019	23 Des 2019 s/d 23 Juni 2022	036801006386404	BRI	44.976.568,00	52.672.655,00	53.578.614,00	889.119,00	54.467.733,00	1.431.281,00	55.899.014,00	1.489.830,00	57.388.844,00	
3	**PT. DHARMA BUANA KARYA** 540/17352/IV/BPMP, tanggal 21 Des 2016	21 Des 2016 s/d 21 Des 2021	036801006390403	BRI	57.769.651,00	67.654.848,00	68.818.508,00	1.142.044,00	69.960.552,00	1.838.334,00	71.798.886,00	1.913.603,00	73.712.489,00	
4	**PT. BALE DHANA** 540/17350/IV/BPMP, tanggal 21 Desember 2016	21 Des 2019 s/d 21 Des 2021	036801006389402	BRI	91.261.952,00	106.878.090,00	108.716.310,00	1.804.135,00	110.520.445,00	2.904.100,00	113.424.545,00	3.022.996,00	116.447.541,00	
5	**SUANTARA** 540/1257/IV-B/DISPMPT, tanggal 10 Mei 2019	10 Mei 2019 s/d 17 Mei 2022	036801006391409	BRI	29.501.449,00	34.549.499,00	35.143.714,00	583.215,00	35.726.929,00	938.829,00	36.665.758,00	977.265,00	37.643.023,00	
6	**ADI GUNA** 540/3364/IV-B/DISPMPT, tanggal 24 Okt 2019	24 Okt 2019 s/d 24 April 2022	036801006383406	BRI	50.208.819,00	58.800.209,00	59.811.478,00							cair Juni 2023
7	**LILIGUNDI** 540/14324/IV/BPMP, tanggal 11 Oktober 2016	11 Okt 2016 s/d 11 Okt 2019	036801006392405	BRI	27.367.125,00	32.049.914,00	32.601.184,00	541.095,00	33.142.279,00	870.877,00	34.013.156,00	906.557,00	34.919.713,00	
8	**SUMBER BATU** 540/2899/IV-B/DISPMPT, tanggal 18 Sept 2019	18 Sept 2019 s/d 18 Mei 2022	036801006385408	BRI	27.688.116,00	32.425.783,00	32.983.500,00	547.337,00	33.530.837,00	881.062,00	34.411.899,00	917.164,00	35.329.063,00	
9	**I KETUT DAYUH (ABU PASIR INDAH)** 540/8594/IV-B/DISPMPT, tanggal 3 Des 2018	3 Des 2018 s/d 3 Des 2021	036801006642402	BRI	19.519.374,00	22.664.587,00	23.054.364,00	382.568,00	23.436.932,00	615.856,00	24.052.788,00	641.065,00	24.693.853,00	
10	**UD. Parmana I (I Wayan Parka)** 540/106/IV-C/DISPMPT, 14 Jan 2020	14 Jan 2020 s/d 14 Jan 2023	036801006635405	BRI	55.574.244,00	64.529.098,00	65.638.961,00	1.089.234,00	66.728.195,00	1.753.374,00	68.481.569,00	1.825.182,00	70.306.751,00	
11	**ADI PRATAMA I (: I PUTU GUSTIKA)** 540/15275/IV/BPMP, 13 Okt 2020	13 Okt 2020 s/d 13 April 2023	036801006844402	BRI	41.918.698,00	48.397.869,00	49.230.272,00							cair Agustus 2023
12	**ADI PRATAMA II (: I PUTU GUSTIKA)** 540/15276/IV/BPMP, tanggal 7 November 2016	7 Nov 2016 s/d 7 Nov 2018	036801006842400	BRI	22.048.076,00	25.455.930,00	25.893.786,00	429.693,00	26.323.479,00	691.676,00	27.015.155,00	719.997,00	27.735.152,00	
13	**GEMPITA (I WAYAN SUKADANA)** 540/2836/IV-B/DISPMPT, tanggal 9 Sept 2019	9 Sept 2019 s/d 9 April 2022	036801006843406	BRI	27.989.146,00	32.315.232,00	32.871.027,00	545.467,00	33.416.494,00	878.138,00	34.294.632,00	914.026,00	35.208.658,00	
14	**PT. SURYA MAS JAYA RAYA** 540/2837/IV-B/DISPMPT, 9 Sept 2019	9 Sept 2019 s/d 9 Maret 2022	036801006960402	BRI	42.685.259,00	49.009.131,00	49.843.589,00	904.625,00	50.748.214,00	1.372.908,00	52.121.122,00	1.271.566,00	53.392.688,00	
15	**HARTA RASIH (I NYOMAN TARKA)** 540/8263/IV-B/DISPMPT, 30 Okt 2018	30 Okt 2018 s/d 30 Okt 2020	036801006739403	BRI	22.308.644,00	25.790.046,00	26.275.470,00	436.034,00	26.711.504,00	729.799,00	27.441.303,00	724.882,00	28.166.185,00	
16	**CV. SUAS KARYA (I NENGAH WIRTA)** 540/737/Izin C/DISPMPT, 4 Maret 2020	4 Maret 2020 s/d 4 Maret 2022	036801006737401	BRI	59.175.083,00	68.409.538,00	69.697.211,00	1.156.643,00	70.853.854,00	1.935.817,00	72.789.671,00	1.922.822,00	74.712.493,00	
17	**NI KETUT SASTRA SRI WIDIANI** 540/6183/Izin C/DISPMPT, 9 Nov 2020	9 Nov 2020 s/d 9 Sept 2023	036801007725407	BRI	38.605.655,00	42.976.494,00	43.708.244,00	793.248,00	44.501.492,00	1.218.916,00	45.720.408,00	1.207.797,00	46.928.205,00	
18	**I NENGAH KOMPIANG DARMAWAN** 540/7069/IV-B/DISPMPT, 30 Juli 2018	30 Juli 2018 s/d 30 Juli 2020	036801007705407	BRI	16.506.802,00	18.392.662,00	18.738.853,00	310.956,00	19.049.809,00	520.444,00	19.570.253,00	516.910,00	20.087.163,00	
19	**I MADE SUDARSANA (4,46 Ha)** 540/4687/IV-B/DISPMPT , 18 Mei 2018	18 Mei 2018 s/d 18 Nov 2021	036801007711408	BRI	103.902.815,00	115.773.045,00	117.952.311,00	1.957.414,00	119.909.725,00	3.276.070,00	123.185.795,00	3.254.119,00	126.439.914,00	
20	**I MADE SUDARSANA (1,77 Ha)** 540/4023/Izin C/DISPMPT, 10 Juli 2020	10 Juli 2020 s/d 10 Juli 2022	036801007710402	BRI	35.131.686,00	39.145.272,00	39.882.133,00	661.848,00	40.543.981,00	1.107.693,00	41.651.674,00	1.100.306,00	42.751.980,00	
21	**I NYOMAN DANA KERTI** 540/862/Izin C/DISPMPT, 9 Maret 2020	9 Maret 2020 s/d 9 Juni 2021	036801007742409	BRI	10.448.899,00	11.625.954,00	11.825.870,00							cair Oktober 2023
22	**I MADE MUSTARA** 540/7266/IV-B/DISPMPT, 16 Agst 2018	16 Agst 2018 s/d 16 Feb 2021	036801007763405	BRI	30.206.324,00	33.602.493,00	34.180.429,00	567.233,00	34.747.662,00	913.026,00	35.660.688,00	950.403,00	36.611.091,00	
23	**I MADE GARA** 540/6288/IV-B/DISPMPT, 3 juli 2018	3 Juli 2018 s/d 3 Maret 2021	036801007779406	BRI	45.562.623,00	50.604.502,00	51.557.047,00							cair Februari 2023
24	**I GEDE SUMERTA, SE** 540/6289/IV-B/DISPMPT, 3 Juli 2018	3 Juli 2018 s/d 3 Juli 2021	036801007778400	BRI	60.048.258,00	66.693.208,00	67.948.616,00							cair Juni 2023

25	**GEDE RUSWIDHIARTANA** 540/7485/IV-B/DISPMPT, 31 Agst 2018	31 Agst 2018 s/d 30 April 2021	036801007773400	BRI	31.265.740,00	34.781.061,00	35.379.244,00	587.103,00	35.966.347,00	945.042,00	36.911.389,00	983.763,00	37.895.152,00	
26	**I KETUT DARSANA** 540/7265/IV-B/DISPMPT, 16 Agst 2018	16 Agst 2018 s/d 16 Feb 2020	036801007772404	BRI	21.555.845,00	23.979.413,00	24.391.867,00	404.793,00	24.796.660,00	651.575,00	25.448.235,00	678.246,00	26.126.481,00	
27	**I NYOMAN WASTIKA** 540/7737/IV-B/DISPMPT , 25 Sept 2018	25 Sept 2018 s/d 25 Sept 2020	036801007847403	BRI	27.753.148,00	30.728.307,00	31.306.708,00	519.499,00	31.826.207,00	836.304,00	32.662.511,00	862.840,00	33.525.351,00	
28	**I PUTU SASTRA PUJAWAN, SH** 540/7300/IV-B/DISPMPT, 20 Agst 2018	20 Agst 2018 s/d 20 Feb 2020	036801007820401	BRI	14.852.588,00	16.478.172,00	16.758.734,00	304.170,00	17.062.904,00	461.603,00	17.524.507,00	427.533,00	17.952.040,00	
29	**I KETUT POLIH** 540/8399/IV-B/DISPMPT, 9 Nov 2018	9 Nov 2018 s/d 9 April 2021	036801007986401	BRI	19.325.000,00	21.304.578,00	21.667.342,00	393.329,00	22.060.671,00	596.823,00	22.657.494,00	552.740,00	23.210.234,00	
30	**CV. NS (NENGAH SUBRATA)** 540/5501/Izin C/DISPMPT, 24 Sept 2020	24 Sept 2020 s/d 24 Sept 2022	036801008145406	BRI	23.769.257,00	26.024.488,00	26.472.052,00	439.291,00	26.911.343,00	707.126,00	27.618.469,00			cair April 2025
31	**I KOMANG SERINTEN** 540/1197/IV-B/DISPMPT , 6 Mei 2019	6 Mei 2019 s/d 6 Nov 2021	036801008350409	BRI	24.500.000,00	26.510.694,00	26.962.080,00	489.324,00	27.451.404,00	751.919,00	28.203.323,00	745.032,00	28.948.355,00	
32	**I MADE PARNAWA** 540/1683/IV-B/DISPMPT , 26 Juni 2019	26 Juni 2019 s/d 26 Juni 2021	036801008502404	BRI	11.200.000,00	12.053.661,00	12.280.533,00	203.783,00	12.484.316,00	328.064,00	12.812.380,00	338.459,00	13.150.839,00	
33	**PT. DHARMA BUANA KARYA** 540/2021/IV-B/DISPMPT, 10 Juli 2019	10 Juli 2019 s/d 10 juli 2023	036801008530407	BRI	88.053.164,42	94.708.707,42	96.484.960,42	1.601.151,58	98.086.112,00	2.686.647,42	100.772.759,42	2.662.012,00	103.434.771,42	
34	**I NYOMAN DANGIN SANJAYA** 540/2022/IV-B/DISPMPT , 10 Juli 2019	10 juli 2019 s/d 10 juli 2022	036801008527404	BRI	43.872.487,30	47.188.585,30	48.073.592,30	797.806,70	48.871.399,00	1.338.654,30	50.210.053,30	1.326.383,00	51.536.436,30	
35	**I NYOMAN TUNAS** 540/2023/IV-B/DISPMPT, 10 Juli 2019	10 juli 2019 s/d 10 juli 2022	036801008528400	BRI	31.979.480,37	34.396.641,37	35.041.754,37	581.489,63	35.623.244,00	975.787,37	36.599.031,37	966.778,00	37.565.809,37	
36	**I NYOMAN SUARTA** 540/2024/IV-B/DISPMPT, 10 Juli 2019	10 juli 2019 s/d 10 juli 2022	036801008529406	BRI	58.873.685,20	63.323.685,20	64.511.289,20	1.070.551,80	65.581.841,00	1.796.315,20	67.378.156,20	1.779.850,00	69.158.006,20	
37	**I NYOMAN SUAMA** 540/2261/IV-B/DISPMPT, 16 Agst 2019	16 Agst 2019 s/d 16 Agst 2022	036801008765400	BRI	34.194.192,94	36.508.570,94	37.136.487,94	616.275,06	37.752.763,00	992.016,94	38.744.779,94	1.032.649,00	39.777.428,94	
38	**I GUSTI LANANG PUTU** 540/2835/IV-B/DISPMPT, 9 Sept 2019	9 Sept 2019 s/d 9 Sept 2022	036801008729404	BRI	38.831.000,00	41.462.992,00	42.175.869,00	765.412,00	42.941.281,00	1.161.750,00	44.103.031,00	1.075.927,00	45.178.958,00	
39	**I NYOMAN SUARTA ADNYANA** 540/2900/IV-B/DISPMPT, 18 Sept 2019	18 Sept 2019 s/d 18 Sept 2022	036801008730405	BRI	26.260.000,00	28.039.926,00	28.522.020,00	517.648,00	29.039.668,00	785.619,00	29.825.287,00	727.623,00	30.552.910,00	
40	**I KADEK SUGATA** 540/2928/IV-B/DISPMPT, 20 Sept 2019	20 Sept 2019 s/d 20 Sept 2021	036801008745400	BRI	17.515.000,00	18.700.437,00	19.022.059,00	315.669,00	19.337.728,00	508.117,00	19.845.845,00	528.940,00	20.374.785,00	
41	**I NYOMAN LANUS** 540/2929/IV-B/DISPMPT, 20 Sept 2019	20 Sept 2019 s/d 20 Sept 2022	036801008749404	BRI	43.700.000,00	46.657.732,00	47.460.206,00	787.605,00	48.247.811,00	1.267.794,00	49.515.605,00	1.319.724,00	50.835.329,00	
42	**I NYOMAN RENTEN** 540/2930/IV-B/DISPMPT, 20 Sept 2019	20 Sept 2019 s/d 20 Sept 2021	036801008748408	BRI	22.655.000,00	24.188.393,00	24.604.401,00	408.318,00	25.012.719,00	657.251,00	25.669.970,00	684.157,00	26.354.127,00	
43	**I NENGAH OKA** 540/2931/IV-B/DISPMPT, 20 Sept 2019	20 Sept 2019 s/d 20 Sept 2021	036801008744404	BRI	18.155.000,00	19.383.818,00	19.717.215,00	327.207,00	20.044.422,00	526.756,00	20.571.178,00	548.260,00	21.119.438,00	
44	**I NYOMAN KEMPEN** 540/3144 /IV-B/DISPMPT, 10 Okt 2019	10 Okt 2019 s/d 10 Juli 2022	036801008796401	BRI	25.210.000,00	26.844.084,00	27.301.160,00	495.504,00	27.796.664,00	751.967,00	28.548.631,00	696.437,00	29.245.068,00	
45	**I NYOMAN SUASTIKA DWIYANA** 540/1316/IV-B/DISPMPT, 21 Mei 2019	21 Mei 2019 s/d 21 Mei 2022	036801008800404	BRI	52.524.746,00	55.929.355,00	56.881.629,00							cair April 2023
46	**I GEDE ARIANA (PANCA PANDAWA)** 540/8505 /IV-B/DISPMPT, 23 Nov 2018	23 Nov 2018 s/d 23 Nov 2021	036801008798403	BRI	23.796.257,00	25.338.725,00	25.770.136,00	467.716,00	26.237.852,00	709.828,00	26.947.680,00	657.429,00	27.605.109,00	
47	**I NYOMAN ARYA (PASIR REJEKI)** 540/5687 /Izin C/DISPMPT, 6 Okt 2020	6 Okt 2020 s/d 6 Okt 2022	036801008797407	BRI	23.796.257,00	25.338.725,00	25.770.136,00	467.716,00	26.237.852,00	709.828,00	26.947.680,00	657.429,00	27.605.109,00	
48	**I KETUT ARDIKA (CV. ZERO)** 540/5752 /Izin C/DISPMPT, 9 Okt 2020	9 Okt 2020 s/d 9 Okt 2022	036801008799409	BRI	23.796.257,00	25.338.725,00	25.770.136,00	467.716,00	26.237.852,00	709.828,00	26.947.680,00	657.429,00	27.605.109,00	
49	**I MADE WARSA** 540/3365 /IV-B/DISPMPT, 24 Okt 2019	24 Okt 2019 s/d 24 Okt 2021	036801008901404	BRI	22.118.000,00	23.467.908,00	23.871.391,00	433.285,00	24.304.676,00					cair januari 2024
50	**I KOMANG WIRAWAN (CV. AGUNG PERMATA)** 540/2839 /IV-B/DISPMPT, 9 Sept 2019	9 Sept 2019 s/d 9 Maret 2022	036801008881400	BRI	24.888.404,00	26.416.396,00	26.866.223,00	487.620,00	27.353.843,00	740.067,00	28.093.910,00	685.352,00	28.779.262,00	
51	**PT. LION JOBS INDONESIA** 12540001119230000, 5 Desember 2023	5 Des 2023 s/d 5 Des 2028	036801008902400	BRI	82.776.000,00	87.828.122,00	89.338.261,00	1.621.425,00	90.959.686,00	2.460.794,00	93.420.480,00	2.279.071,00	95.699.551,00	Izin masih berlaku
52	**I KETUT ARDANA** 540/2262 /IV-B/DISPMPT, 16 Agst 2019	16 Agst 2019 s/d 16 Agst 2022	036801008910403	BRI	38.950.455,39	41.323.874,39	42.034.641,39	697.555,61	42.732.197,00					cair Desember 2024
	TUNIK SUGIANTO													

53	540/5703 /IV-B/DISPMPT, 26 Nov 2019	26 Nov 2019 s/d 26 Nov 2023	036801008926404	BRI	96.354.000,00	102.225.216,00	103.983.456,00	1.725.623,00	105.709.079,00	2.777.698,00	108.486.777,00	2.891.408,00	111.378.185,00	
54	**I MADE MANGKU TIRTA** 540/5702 /IV-B/DISPMPT, 26 Nov 2019	26 Nov 2019 s/d 26 Mei 2022	036801008925408	BRI	29.405.000,00	31.196.741,00	31.733.288,00	526.666,00	32.259.954,00	847.707,00	33.107.661,00	882.371,00	33.990.032,00	
55	**I GEDE NGURAH KUSUMA YUDA** 540/5701 /IV-B/DISPMPT, 26 Nov 2019	26 Nov 2019 s/d 26 Nov 2022	036801008936409	BRI	38.912.000,00	41.217.232,00	41.993.063,00	696.924,00	42.689.987,00	1.166.327,00	43.856.314,00	1.158.539,00	45.014.853,00	
56	**PT ANUGERAH KARYA AGRA SENTOSA** 540/5704 /IV-B/DISPMPT, 26 Nov 2019	26 Nov 2019 s/d 26 Nov 2021	036801008945408	BRI	8.043.244,00	8.519.794,00	8.680.180,00	144.049,00	8.824.229,00	241.715,00	9.065.944,00	239.462,00	9.305.406,00	
57	**I NYOMAN TODIYASA** 540/6084 /IV-B/DISPMPT, 31 Des 2019	31 Des 2019 s/d 30 April 2022	036801009017402	BRI	25.210.000,00	26.617.626,00	27.118.597,00							cair Februari 2023
58	**I NYOMAN SUASTIKA DWIYANA** 540/1316 /IV-B/DISPMPT, 21 Mei 2019	21 Mei 2019 s/d 21 Mei 2022	036801008998401	BRI	92.522.363,00	97.844.387,00	99.527.246,00	1.651.678,00	101.178.924,00	2.658.655,00	103.837.579,00	2.767.483,00	106.605.062,00	
59	**I WAYAN WAHYU PRAYOGA** 540/114 /IV-C/DISPMPT, 15 Jan 2020	15 Jan 2020 s/d 15 Jan 2023	036801009071406	BRI	43.892.000,00	46.268.677,00	47.064.236,00	854.212,00	47.918.448,00	1.296.396,00	49.214.844,00	1.200.612,00	50.415.456,00	
60	**I KOMANG PUTU** 540/3208 /IV-B/DISPMPT, 18 Okt 2019	18 OKT 2019 s/d 18 Okt 2021	036801008806400	BRI	30.683.280,00	32.066.998,00	32.612.965,00	591.864,00	33.204.829,00	898.310,00	34.103.139,00	831.974,00	34.935.113,00	
61	**I NYOMAN MANGKU LEBIH** 540/195/Izin C/DISPMPT, 10 Feb 2020	10 Feb 2020 s/d 10 Juli 2022	036801009113402	BRI	25.376.000,00	26.706.729,00	27.209.407,00	451.532,00	27.660.939,00	755.691,00	28.416.630,00	750.652,00	29.167.282,00	
62	**PT. SARI MINERAL PUTRA BALI** 540/2182/Izin C/DISPMPT, 18 Juni 2020	18 Juni 2020 s/d 18 Des 2022	0331000126	BPD	18.415.000,00	19.353.263,95	19.945.001,65	597.343,42	20.542.345,07	343.948,19	20.886.293,26	515.620,08	21.401.913,34	
63	**I MADE TARSI ADIPA** 540/34/IV-C/DISPMPT, 8 Jan 2020	8 Jan 2020 s/d 8 Jan 2023	0331000114	BPD	85.361.000,00	89.666.699,29	92.140.606,48	2.484.621,30	94.625.227,78					cair april 2024
64	**I MADE SUWECA (PANDAWA JAYA)** 540/5751IV-B/DISPMPT, 9 Okt 2020	9 Okt 2020 s/d 9 Okt 2022	0331000085	BPD	17.001.928,00	17.933.274,02	18.421.488,01	494.282,63	18.915.770,64	424.489,39	19.340.260,03	476.054,04	19.816.314,07	
65	**PT. KEMBANG SERONI ABADI** 540/1040/Izin C/DISPMPT, 16 Maret 2020	16 Maret 2020 s/d 16 Maret 2024	0331000097	BPD	96.049.206,00	100.892.725,32	103.668.289,69	2.787.285,36	106.455.575,05	2.483.434,67	108.939.009,72	2.689.377,84	111.628.387,56	
66	**I KOMANG SANTIKA WIBAWA** 540/2183/Izin C/DISPMPT, 18 Juni 2020	18 Juni 2020 s/d 18 Juni 2021	0331000141	BPD	18.415.000,00	19.357.269,52	19.942.728,72	590.929,34	20.533.658,06	352.635,20	20.886.293,26	515.620,08	21.401.913,34	
67	**I GUSTI GEDE LANANG ADNYANA** 540/1318/IV-B/DISPMPT, 21 Mei 2019	21 Mei 2019 s/d 21 Mei 2022	0331000138	BPD	61.508.298,00	64.613.912,39	66.422.075,55	1.818.136,31	68.240.211,86	1.522.499,62	69.762.711,48	1.722.232,32	71.484.943,80	
68	**HASAN YANDI, ST.,M.SC** 540/94/Izin C/DISPMPT, 5 Feb 2020	5 Feb 2020 s/d 5 Agst 2022	0331000102	BPD	35.919.000,00	37.737.830,10	38.817.026,87	1.085.302,19	39.902.329,06	717.270,74	40.619.599,80	1.125.462,00	41.745.061,80	
69	**NENGAH GINATRA** 540/252/Izin C/DISPMPT, 11 Feb 2020	11 Feb 2020 s/d 11 Agst 2022	0331000059	BPD	28.461.000,00	30.223.909,37	31.044.350,64	829.441,59	31.873.792,23	757.692,97	32.631.485,20	730.499,00	33.361.984,20	
70	**I KADEK SUDIARTANA** 540/3349/Izin C/DISPMPT, 30 Juni 2020	30 juni 2020 s/d 30 Des 2022	0331000152	BPD	27.857.000,00	29.181.079,01	30.032.504,09	856.781,29	30.889.285,38	613.267,10	31.502.552,48	779.995,92	32.282.548,40	
71	**I WAYAN MALIASA ADNYANA** 540/3350/Izin C/DISPMPT, 30 Juni 2020	30 Juni 2020 s/d 30 Juni 2023	0331000164	BPD	51.371.000,00	53.799.120,75	55.313.559,79	1.521.985,76	56.835.545,55	1.258.205,73	58.093.751,28	1.438.387,92	59.532.139,20	
72	**I KOMANG DUDUN** 540/3284/Izin C/DISPMPT, 29 Juni 2020	29 Juni 2020 s/d 29 Des 2022	0331000176	BPD	40.500.000,00	42.417.602,67	43.625.469,05	1.214.393,63	44.839.862,68	960.237,32	45.800.100,00	1.134.000,00	46.934.100,00	
73	**DRS. I KETUT GIRI** 540/3768/Izin C/DISPMPT, 6 Juli 2020	6 Juli 2020 s/d 6 Jan 2023	0331000188	BPD	41.320.000,00	43.276.091,84	44.507.069,92							cair Oktober 2023
74	**AA KURNIAWAN** 540/3770/Izin C/DISPMPT, 6 Juli 2020	6 Juli 2020 s/d 6 Juli 2023	0331000191	BPD	30.257.000,00	31.693.699,18	32.612.754,46	924.624,59	33.537.379,05	679.253,43	34.216.632,48	847.195,92	35.063.828,40	
75	**I NYOMAN SEPIL** 540/4361/Izin C/DISPMPT, 22 juli 2020	22 Juli 2020 s/d 22 Jan 2023	0331000205	BPD	28.443.000,00	29.798.486,05	30.666.544,54	874.455,87	31.541.000,41	624.240,19	32.165.240,60	796.404,00	32.961.644,60	
76	**I KETUT NGURAH SUBRATA** 540/3283/Izin C/DISPMPT, 29 Juni 2020	29 Juni 2020 s/d 29 Maret 2022	0331000815	BPD	16.625.000,00	17.425.575,35	17.960.357,67	540.084,45	18.500.442,12	300.215,96	18.800.658,08	465.499,92	19.266.158,00	
77	**I MADE WARSA** 540/173/Izin C/DISPMPT, 20 Jan 2020	20 Jan 2020 s/d 20 Juli 2022	0331000827	BPD	29.709.000,00	31.027.757,09	31.931.186,17	908.960,59	32.840.146,76	-32.840.146,76				Cair Januari 2024
78	**I GEDE CIDRA** 540/4360 /Izin C/DISPMPT, 22 Juli 2020	22 Juli 2020 s/d 22 Juli 2022	0331000839	BPD	22.548.000,00	23.553.690,99	24.255.249,81	706.419,75	24.961.669,56	464.206,84	25.425.876,40	631.344,00	26.057.220,40	
79	**I GEDE PUTRA** 540/863/Izin C/DISPMPT, 9 Maret 2020	9 Maret 2020 s/d 9 Maret 2023	0331000840	BPD	23.287.800,00	24.325.807,79	25.048.211,47							Cair April 2023
80	**I PUTU GUSTIKA** 540/4022/Izin C/DISPMPT, 10 Juli 2020	10 Juli 2020 s/d 10 Jan 2023	0331000853	BPD	36.672.000,00	38.295.008,37	39.394.635,70	1.105.802,65	40.500.438,35	852.131,25	41.352.569,60	1.026.816,00	42.379.385,60	
	PT. LION JOBS INDONESIA (2)													

81	540/4024/Izin C/DISPMPT, 10 Juli 2020	10 Juli 2020 s/d 10 Juli 2023	0331000865	BPD	50.993.000,00	53.241.988,01	54.745.276,44	1.510.796,94	56.256.073,38	1.245.332,93	57.501.406,31	1.427.803,92	58.929.210,23	
82	**I KADEK ARTANADI** 540/172/IV-C/DISPMPT, 20 Jan 2020	20 Jan 2020 s/d 20 Juli 2022	036801009166405	BRI	30.773.000,00	32.345.922,00	32.902.228,00	546.001,00	33.448.229,00	878.966,00	34.327.195,00	914.927,00	35.242.122,00	
83	**I NYOMAN SUTAWAN** 540/3799/Izin C/DISPMPT, 7 Juli 2020	7 Juli 2020 s/d 7 Juli 2023	0331000889	BPD	45.530.000,00	47.540.077,76	48.889.301,03							Cair Juli 2023
84	**I KOMANG DANA** 540/4733/Izin C/DISPMPT, 3 Agst 2020	3 Agst 2020 s/d 3 Agst 2022	0331000890	BPD	26.728.000,00	27.833.766,83	28.652.896,29	824.381,34	29.477.277,63	575.685,87	30.052.963,50	748.384,08	30.801.347,58	
85	**PT. PALGUNA JAYA** 540/4359/Izin C/DISPMPT, 22 Juli 2020	22 Juli 2020 s/d 22 Mei 2023	0331000877	BPD	32.029.000,00	33.449.065,81	34.417.815,98	974.493,28	35.392.309,26	724.659,03	36.116.968,29	896.812,08	37.013.780,37	
86	**I MADE SUJATI WIRA KUSUMA** 540/5018/Izin C/DISPMPT, 14 Agst 2020	14 Agst 2020 s/d 14 Agst 2022	0331000918	BPD	18.237.000,00	19.002.991,16	19.582.869,24	585.329,42	20.168.198,66	337.484,14	20.505.682,80	510.636,00	21.016.318,80	
87	**PT. PASIR TOYA ANYAR KUBU** 540/5502/Izin C/DISPMPT, 24 Sept 2020	24 Sept 2020 s/d 24 Sept 2023	0331000921	BPD	86.508.000,00	89.756.395,91	92.259.106,92	2.513.532,72	94.772.639,64	2.217.246,36	96.989.886,00	2.422.224,00	99.412.110,00	
88	**I GEDE MERTHAYASA** 540/3769/Izin C/DISPMPT, 6 Juli 2020	6 Juli 2020 s/d 6 Juli 2023	0331000932	BPD	33.630.000,00	34.909.965,02	35.923.206,28	1.019.132,26	36.942.338,54	762.496,46	37.704.835,00	941.640,00	38.646.475,00	
89	**I WAYAN PUTU** 540/4309/Izin C/DISPMPT, 21 Juli 2020	21 Juli 2020 s/d 21 Juli 2022	0331000944	BPD	19.104.000,00	19.785.286,28	20.389.194,03	608.445,29	20.997.639,32	359.359,08	21.356.998,40	534.912,00	21.891.910,40	
90	**KOPERASI YEHSAH BHUWANA BALI** 540/6309/Izin C/DISPMPT, 12 Nov 2020	12 Nov 2020 s/d 12 Nov 2025	0331000956	BPD	24.805.000,00	25.679.933,16	26.444.275,52	769.407,32	27.213.682,84	516.653,76	27.730.336,60	694.540,08	28.424.876,68	
91	**PT. PUTRA ARYA SATYA** 22112100082360007	22 Okt 2024 s/d 22 Okt 2029	0331001156	BPD	45.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.367,26	46.489.367,26	
92	**PT. PASIR TOYA ANYAR KUBU** 8120112011416 0016	13 Sept 2024 s/d 13 Sept 2029	0301071418	BPD	55.349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.367,26	56.512.367,26	
93	**PT. PASIR AGUNG PERTIWI** 01102100099880002	11 Feb 2025 s/d 11 Feb 2030	0331001235	BPD	263.126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069.803,30	266.195.803,30	
94	**CV. NS (NENGAH SUBRATA)** 12980002326690004	13 Juni 2025 s/d 13 Juni 2030	0331001297	BPD	124.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.127,98	125.174.127,98	
95	**CV. AYU ASTA** 12410004318670002	11 Feb 2025 s/d 11 Feb 2029	0331001302	BPD	45.167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.779,32	45.377.779,32	
TOTAL					**4.073.299.349,62**	**3.866.797.895,61**	**3.947.375.414,63**	**71.302.298,67**	**3.575.859.621,88**	**53.211.590,70**	**3.467.409.111,80**	**95.649.284,32**	**4.068.711.927,12**	

DATA NOMINAL JAMINAN KESUNGGUHAN EKSPLORASI PER AKHIR TAHUN
(POKOK+BUNGA)

No	Nama Perusahaan/Pemilik WIUP	Lokasi Tambang	Rekening	Bank	Jaminan Kesungguhan Eksplorasi yang ditetapkan (Rp.)	Nilai Jaminan Kesungguhan Eksplorasi per akhir 2023 Pokok + Bunga (Rp.)	Bunga Per Desember 2023	Nilai Jaminan Kesungguhan Eksplorasi per akhir 2024 Pokok + Bunga (Rp.)	Bunga Per Desember 2024	Nilai Jaminan Kesungguhan Eksplorasi per akhir 2025 Pokok + Bunga (Rp.)	Bunga Per Desember 2025
1	**CV. PUTRA SABANDA PRATAMA** B.23.540/1/V/Disnakeresdm	Banjar Dinas Butus, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem	0331000994	BPD	5.000.000,00	5.142.083,31	142.083,31	5.277.083,27	277.083,27	5.452.083,23	174.999,96
2	**CV. JANU YUSRA MANGGALA** B.23.540/2/V/Disnakeresdm	Banjar Dinas Untalan, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem	0331001003	BPD	5.000.000,00	5.036.166,66	36.166,66	5.204.166,62	204.166,62	5.379.166,58	174.999,96
3	**CV. ADI PRATAMA ABADI** B.23.540/3/V/Disnakeresdm	Banjar Dinas Umanyar, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem	0331001015	BPD	5.000.000,00	5.014.583,33	14.583,33	5.189.583,29	189.583,29	5.364.583,25	174.999,96
4	**PT BAYU SEJATI ADI MANUNGGAL** B.23.540/4/V/Disnakeresdm	Banjar Dinas Galih, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem	0331001027	BPD	5.000.000,00	5.014.583,33	14.583,33	5.189.583,29	189.583,29	5.364.583,25	174.999,96
5	**PT PASIR TOYA ANYAR KUBU** B.23.540/5/V/Disnakeresdm	Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali	0331001039	BPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.174.999,96	174.999,96	5.349.999,92	174.999,96
6	**PT PUTRA ARYA SATYA (0,86 Ha)** B.23.540/1/V/Disnakeresdm	Banjar Dinas Lusuh Kauh, Desa Peringsari, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem	0331001053	BPD	5.000.000,00		0,00	5.145.833,30	145.833,30	5.320.833,26	174.999,96
7	**CV PANDAWA JAYA BALI** B.23.540/2/V/Disnakeresdm	Banjar Dinas Mekar Sari, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem	0331001118	BPD	5.000.000,00		0,00	5.102.083,31	102.083,31	5.277.083,27	174.999,96
8	**PT PURUSA SALATRA BIASYA** B.23.540/3/V/Disnakeresdm	Banjar Dinas Muntig, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem	0331001121	BPD	5.000.000,00		0,00	5.072.916,65	72.916,65	5.247.916,61	174.999,96
9	**CV ZERO BALI** B.23.540/4/V/Disnakeresdm	Banjar Dinas Darmawinangun, Desa/Kelurahan Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem	0331001144	BPD	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	0,00	5.174.999,96	174.999,96
10	**CV. AMERTHA SARI BUANA** B.21.500.10.2.3/1/V/DISNAKER.ESDM	Banjar Dinas Pura, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem	0331001210	BPD	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	0,00	5.087.499,98	87.499,98
11	**PT. SUMBER JAYA TEKNIK** B.21.500.10.2.3/2/V/DISNAKER.ESDM	Banjar Dinas Pamesan, Desa/Kelurahan Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng	0331001223	BPD	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	0,00	5.072.916,65	72.916,65
12	**PT. PUTRA ARYA SATYA (1,1 Ha)** B.21.500.10.2.3/3/V/DISNAKER.ESDM	Banjar Dinas Badeg Kelodan, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem	0331001247	BPD	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	0,00	5.061.249,97	61.249,97
13	**CV. BALI TIMUR MATERIAL** B.21.500.10.2.3/5/V/DISNAKER.ESDM	Banjar Dinas Butus, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem	0331001259	BPD	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	0,00	5.072.916,65	72.916,65
14	**PT. HARDI VANDRA JAYA** B.21.500.10.2.3/4/V/DISNAKER.ESDM	Banjar Dinas Mekarsari, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem	0331001260	BPD	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	0,00	5.072.916,65	72.916,65
15	**CV. PASIR UTAMA** B.21.500.10.2.3/6/V/DISNAKER.ESDM	Banjar Dinas Sebudi, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem	0331001273	BPD	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	0,00	5.058.333,32	58.333,32
16	**CV. PASIR CATUR MESARI** B.21.500.10.2.3/7/V/DISNAKER.ESDM	Banjar Dinas Badeg Kelodan, Desa Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem	0331001285	BPD	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	0,00	5.043.749,99	43.749,99
17	**CV. ABADI ANUGERAH ALAM** B.21.500.10.2.3/8/V/DISNAKER.ESDM	Banjar Dinas Sebudi, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem	0301073557	BPD	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	0,00	5.024.166,66	24.166,66
18	**CV. SARI NADI** B.21.500.10.2.3/9/V/DISNAKER.ESDM	Banjar Dinas Mekar Sari, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem	0301073674	BPD	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	0,00	5.012.083,33	12.083,33
19	**CV. GROUP ICON BALI** B.21.500.10.2.3/10/V/DISNAKER.ESDM	Br. Dinas Sukaluwih, Desa Amerta Bhuana, Kec. Selat, Kab. Karangasem	0331001314	BPD	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
		TOTAL			**95.000.000,00**	**25.207.416,63**	207.416,63	**96.356.249,69**	1.356.249,69	**98.437.082,53**	2.080.832,84

Rincian Aset Properti Investasi
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

No	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2025			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2025			Posisi Per 31 Desember 2025		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompatibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompatibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
													Nilai	Nilai	nilai			
Jumlah Aset Tetap Dikerjasamakan									**705.863.838.458,00**	**(3.327.710.422,97)**	**19.074.369,00**	**705.863.838.458,00**	**-**	**1.117.608.000,00**	**19.074.369,00**	**704.746.230.458,00**	**(3.424.276.155,97)**	**701.321.954.302,03**
Jumlah Aset Tetap Tanah Dikerjasamakan							**1.436.231,00**		**700.024.106.820,00**			**700.024.106.820,00**		**1.117.608.000,00**		**698.906.498.820,00**		**698.906.498.820,00**
1	01.01.01.01.002	000027	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	22.09.02.07.4.00036	Denpasar\Denpasar Timur\Ds. Sumerta Kauh\Jalan Pudak\Kamboja	Perjanjian Sewa dengan DPW IMO (Ikatan Media Online) No. 593.1/1665/UPTD.PBMD tgl 21 September 2020	130,00	DPW Ikatan Media Online	91.455.000,00			91.455.000,00				91.455.000,00		91.455.000,00
2	01.01.01.01.002	000042	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	22.09.03.04.4.00046	Jln. Gurita Sesetan Denpasar	Perjanjian Sewa dengan Ni Ketut Supadmi No. 593.1/928/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 31-3-2021	301,00	Ni Ketut Supadmi	139.200.000,00			139.200.000,00				139.200.000,00		139.200.000,00
3	01.01.01.01.002	000022	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	22.04.05.14.4.00086	Buleleng\Buleleng\Kel. Banjar Bali	Perjanjian Sewa dengan DPC Organda No. 593.1/4327/UPT.P2.BPKAD tanggal 13 Agustus 2018	1.800,00	DPC Organda	540.000.000,00			540.000.000,00				540.000.000,00		540.000.000,00
4	01.01.01.01.002	000020	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	22.03.04.04.4.00122	Badung\Kuta\Kel. Kuta	Perjanjian Sewa dengan Gana Paramananda No. 593/1269/UPTD.PBMD tgl 10 Juni 2019	440,00	Gana Pramananda	1.647.800.000,00			1.647.800.000,00				1.647.800.000,00		1.647.800.000,00
5	01.01.01.01.005	000018	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	21	Badung\Kuta\Ds. Kuta\Kel.Kuta ex asrama Transito Jln. Imambonjol	Perjanjian Sewa dengan Putu Kangen Disastra, perubahan III nomor 593/4222/UPT.P2.BPKAD tgl 6 Agustus 2018	400,00	Putu Kangen Disastra	1.525.000,00			1.525.000,00				1.525.000,00		1.525.000,00
6	01.01.01.01.005	000017	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	20	Badung\Kuta\Ds. Kuta\Kel.Kuta ex asrama Transito Jln. Imambonjol	Perjanjian Sewa dengan Putu Kangen Disastra, perubahan III nomor 593/4222/UPT.P2.BPKAD tgl 6 Agustus 2018	600,00	Putu Kangen Disastra	2.913.000,00			2.913.000,00				2.913.000,00		2.913.000,00
7	01.01.01.01.005	000015	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	18	Badung\Kuta\Ds. Kuta\Kel.Kuta Ex.Asrama Transito Jln. Imambonjol	Perjanjian Sewa dengan Putu Kangen Disastra, Perubahan III nomor 593/4222/UPT.P2.BPKAD tgl 6 Agustus 2018	2.000,00	Putu Kangen Disastra	7.260.000,00			7.260.000,00				7.260.000,00		7.260.000,00
8	01.01.01.01.005	000016	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	17	Badung\Kuta\Ds. Kuta\Kel.Kuta ex asrama Transito Jln. Imambonjol	Perjanjian Sewa dengan Putu Kangen Disastra, perubahan III nomor 593/4222/UPT.P2.BPKAD tgl 6 Agustus 2018	3.000,00	Putu Kangen Disastra	9.000.000,00			9.000.000,00				9.000.000,00		9.000.000,00
9	01.01.01.01.005	000019	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	115	Tabanan/Baturiti/Ds.Candikuning	Perjanjian Sewa dengan Gde Ketut Nugrahita Pendit, Perpanjangan I no B.13.593/1223/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 5 Mei 2023	7.050,00	Gde Ketut Nugrahita Pendit	24.675.000,00			24.675.000,00				24.675.000,00		24.675.000,00
10	01.01.01.01.005	000020	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	116	Tabanan/Baturiti/Ds.Candikuning	Perjanjian Sewa dengan Gde Ketut Nugrahita Pendit, Perpanjangan I no B.13.593/1223/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 5 Mei 2023	14.300,00	Gde Ketut Nugrahita Pendit	50.050.000,00			50.050.000,00				50.050.000,00		50.050.000,00
11	01.01.01.01.006	000001	Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalaow/Cottage	22.03.08.02.5.00005	Badung\Kuta Utara\Ds. Canggu	Perjanjian Sewa dengan PT Citrakarya Sukses, Perpanjangan I no 593.1/1719/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 10 Agustus 2020	3.677,00	PT Citrakarya Sukses	3.677.000.000,00			3.677.000.000,00				3.677.000.000,00		3.677.000.000,00
12	01.01.01.01.012	000003	Tanah Kaveling (dst)	22.03.04.15.4.00003	Badung\Kuta\Kel. Legian\Jln.Nakula (Depan Pura Ulun Tanjung)	Perjanjian Sewa dengan I Gede Rai Ardiana, Perpanjangan I nomor 593.1/2721/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 29 Desember 2020	585,00	I Gede Rai Ardiana	311.250.000,00			311.250.000,00				311.250.000,00		311.250.000,00
13	01.01.01.02.003	000047	Tanah Bangunan Gudang	22.03.05.16.4.00005	Badung\Mengwi\Kel. Abianbase	Perjanjian Sewa oleh I Bagus Putra Waisnawa No. 593.1/8667/PPA.Aset tgl 23 Oktober 2014 Perpanjangan I No 593.1/3416/UPTD.PBMD tgl 4 Desember 2019	480,00	I Bagus Putra Waisnawa	3.718.000,00			3.718.000,00				3.718.000,00		3.718.000,00

No	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2025			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2025			Posisi Per 31 Desember 2025		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompatibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompatibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
													Nilai	Nilai	nilai			
14	01.01.01.02.003	000045	Tanah Bangunan Gudang	22.01.02.06.4.00019	Ds. Baler Bale Agung Kec.Negara Kab. Jembrana	Perjanjian Sewa dengan Pemkab Jembrana No. B.13.032/4364/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27 Desember 2022	2.770,00	Pemkab Jembrana	8.300.000,00			8.300.000,00				8.300.000,00		8.300.000,00
15	01.01.01.02.003	000017	Tanah Bangunan Gudang	22.09.02.09.4.00068	Jln.Moh. Yamin Denpasar	Perjanjian Sewa dengan A.A. Ngurah Anom ST, Perpanjangan II nomor 593,1/2020/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27 Oktober 2020	369,00	A.A. Ngurah Anom ST	13.284.000,00			13.284.000,00				13.284.000,00		13.284.000,00
16	01.01.01.02.003	000015	Tanah Bangunan Gudang	22.03.04.08.4.00010	Badung\Kuta\Kel. Legian\Subak.Legian	Perjanjian Sewa dengan I Wayan Rumantik, Perpanjangan II no B.13.032/1820/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 16 Juni 2022	65,00	I Wayan Rumantik	25.610.000,00			25.610.000,00				25.610.000,00		25.610.000,00
17	01.01.01.02.003	000018	Tanah Bangunan Gudang	22.03.04.12.4.00013	Badung\Kuta\Kel. Seminyak	Perjanjian sewa dengan I Wayan Adnyana 593.1/19567/PPA.Aset tgl 10 Desember 2014 perpanjangan I nomor 593.1/1276/UPTD.PBMD tgl 10 Juli 2020	290,00	I Wayan Adnyana	155.730.000,00			155.730.000,00				155.730.000,00		155.730.000,00
18	01.01.01.02.003	000007	Tanah Bangunan Gudang	22.03.04.15.4.00002	Badung\Kuta\Kel. Legian\Jln.Dewi Sri Gang I	Perjanjian Sewa dengan Komang Armoni, Perpanjangan II No. 593.1/2718/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 29 Desember 2020	1.255,00	Komang Armoni	494.470.000,00			494.470.000,00				494.470.000,00		494.470.000,00
19	01.01.01.02.003	000008	Tanah Bangunan Gudang	22.09.04.11.4.00054	Jln. Mawar No.8 Denpasar	Perjanjian Sewa dengan Yayasan Pertiwi Dewata. Perpanjangan II nomor 593.1/2720/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 29 Desember 2020	1.300,00	Yayasan Pertiwi Dewata	798.200.000,00			798.200.000,00				798.200.000,00		798.200.000,00
20	01.01.01.02.003	000051	Tanah Bangunan Gudang	22.09.02.09.4.00122	Jalan Cok Agung Tresna, Renon, Denpasar	Perpanjangan I Perjanjian Sewa dengan PT Bali Ekspres Intermedia No. B.13.032/3204/UPTD.PBMD.BPKAD tanggal 30 September 2022	870,00	PT Bali Ekspres Intermedia	1.000.231.170,00			1.000.231.170,00				1.000.231.170,00		1.000.231.170,00
21	01.01.01.02.003	000005	Tanah Bangunan Gudang	22.09.02.05.3.00138	Denpasar\Denpasar Timur\Kel. Dangin Puri Klod\Jln. Tantular	Perjanjian Sewa dengan I Gd. Mahardika, Perpanjangan II perjanjian 593,1/1543/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 26 Agustus 2020	2.003,00	I Gd. Mahardika	1.013.518.000,00			1.013.518.000,00				1.013.518.000,00		1.013.518.000,00
22	01.01.01.02.003	000037	Tanah Bangunan Gudang	22.09.01.02.4.00095	Denpasar\Denpasar Barat\Ds. Dauh Puri Kaja\Jln. Ayani Denpasar	Perjanjian Sewa oleh Pos Bali 593.1/1721/PPA.Aset tgl 19 Mei 2016, Perpanjangan I no B.13.593.1/1490/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 2 Juni 2021	3.191,00	Pos Bali	3.366.384.000,00			3.366.384.000,00				3.366.384.000,00		3.366.384.000,00
23	01.01.01.02.006	000005	Tanah Bangunan Hotel/Penginapan/Motel	22.09.03.08.5.00001	Denpasar\Denpasar Selatan\Kel. Sanur Kauh	Perjanjian Sewa dengan PT. Industri Perhotelan Surya Beach/PT. Jakarta Setiabudi Internasional Tbk, Perubahan II nomor B.13.593.1/3100/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 14 September 2021	26.000,00	PT. Industri Perhotelan Surya Beach/PT. Jakarta Setiabudi Internasional Tbk	4.160.000.000,00			4.160.000.000,00				4.160.000.000,00		4.160.000.000,00
24	01.01.01.02.006	000006	Tanah Bangunan Hotel/Penginapan/Motel	22.03.02.12.5.00001	Denpasar\Denpasar Timur\Ds. Kesiman Kertalangu	Perjanjian Sewa dengan PT.Graha Nusantara Aji, perubahan II No. 593.1/1864/PPA.Aset (002/GNA/V/2013/PT GNA) tggl 16 Mei 2013	120.450,00	PT.Graha Nusantara Aji	4.057.200.000,00			4.057.200.000,00				4.057.200.000,00		4.057.200.000,00
25	01.01.01.02.007	000001	Tanah Bangunan Terminal Darat	22.03.04.04.5.00003	Badung\Kuta\Kel. Kuta	Perjanjian Sewa dengan PT. Kuta Central Manunggal, Addendum Akta Notaris 35 tanggal 26 Februari 2014	29.965,00	PT. Kuta Central Manunggal	22.473.750.000,00			22.473.750.000,00				22.473.750.000,00		22.473.750.000,00
26	01.01.01.04.001	000228	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22.07.02.27.4.00027	Desa Kintamani Kecamatan Kintamani Bangli	Perjanjian Sewa dengan I Nengah Wardana, ST No. B.13.593.1/3647/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 25 Nopember 2021	1.015,00	I Nengah Wardana, ST	21.822.500,00			21.822.500,00				21.822.500,00		21.822.500,00
27	01.01.01.04.001	000078	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22.09.02.06.4.00039	Denpasar\Denpasar Timur\Ds. Sumerta	Perpanjangan II Perjanjian Sewa dengan I Ketut Mandia, SE No. B.13.032/4209/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 11 Desember 2022	790,00	I Ketut Mandia, SE	3.282.450.000,00			3.282.450.000,00				3.282.450.000,00		3.282.450.000,00
28	01.01.02.01.003	000003	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	22.08.05.01.4.00010	Karangasem\Sidemen\Ds. Sidemen	Perjanjian Sewa dengan Perbekel Sinduwati No. 593.1/4588/UPT.P2.BPKAD tanggal 21 September 2018	1.825,00	Perbekel Sinduwati	13.048.750,00			13.048.750,00				13.048.750,00		13.048.750,00

No	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2025			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2025			Posisi Per 31 Desember 2025		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompatibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompatibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
													Nilai	Nilai	nilai			
29	01.01.02.01.005	000752	Tanah Sawah Irigasi	22.09.03.09.4.00025	Denpasar\Denpasar selatan\Ds. Sidakarya	Perjanjian Sewa dengan Kades Sidakarya No. 59.1/289/PPA.Aset tanggal 12-1-2016, perpanjangan I 593.1/572/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 22-2-2021	160,00	Kades Sidakarya	20.480.000,00			20.480.000,00				20.480.000,00		20.480.000,00
30	01.01.02.01.005	001700	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.02.4.00053	Badung\Mengwi\Ds. Baha	Perjanjian Sewa dengan PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung No. 593.1/1006/UPTD.PBMD tanggal 2 Mei 2019	105,00	PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung	25.777.500,00			25.777.500,00				25.777.500,00		25.777.500,00
31	01.01.02.01.005	000760	Tanah Sawah Irigasi	22.09.03.09.4.00034	Denpasar\Denpasar selatan\Ds. Sidakarya	Perjanjian Sewa dengan Kades Sidakarya No. 59.1/289/PPA.Aset tanggal 12-1-2016, perpanjangan I 593.1/572/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 22-2-2021	235,00	Kades Sidakarya	30.080.000,00			30.080.000,00				30.080.000,00		30.080.000,00
32	01.01.02.01.005	001197	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.18.4.00035	Ds.Pererenan,Kc.Mengwi,Kab.Badung	Perjanjian Sewa dengan Lakhsmi Dipil Patel No. B.13.032/4256/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Desember 2022	1.240,00	Lakhsmi Dipil Patel	45.880.000,00			45.880.000,00				45.880.000,00		45.880.000,00
33	01.01.02.01.005	000754	Tanah Sawah Irigasi	22.09.03.09.4.00027	Denpasar\Denpasar selatan\Ds. Sidakarya\Jl.Kerta Winangun II No.1	Perjanjian Sewa dengan KSU Dana Rahayu, perpanjangan I no 593.1/1395/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 29 Juli 2020	365,00	KSU Dana Rahayu	46.720.000,00			46.720.000,00				46.720.000,00		46.720.000,00
34	01.01.02.01.005	000448	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.06.4.00049	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Takmung	Perjanjian Sewa dengan Ir. Pande Nyoman Merdana No. B.13.032/2563/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 23 Agustus 2022	1.190,00	Ir. Pande Nyoman Merdana	54.740.000,00			54.740.000,00				54.740.000,00		54.740.000,00
35	01.01.02.01.005	001459	Tanah Sawah Irigasi	22.03.08.06.4.00059	Badung\Kuta Utara\Ds. Tibubeneng\Subak.Tibubeneng	Perjanjian Sewa dengan I Md. Wiranatha, perpanjangan I no 593.1/2020/UPTD.PBMD tgl 27 Agustus 2019	1.200,00	I Md. Wiranatha	76.800.000,00			76.800.000,00				76.800.000,00		76.800.000,00
36	01.01.02.01.005	001481	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.16.4.00003	Subak/Dusun Tebe,Desa/Br.Abian Basa,Kec.Mengwi,Kab.Badung	Perjanjian Sewa dengan IBP Whaisnawa,SE perpanjangan II nomor 593.1/1032/UPTD.PBMD tgl 5 Mei 2019	940,00	IBP Whaisnawa,SE	77.080.000,00			77.080.000,00				77.080.000,00		77.080.000,00
37	01.01.02.01.005	000755	Tanah Sawah Irigasi	22.09.03.09.4.00028	Denpasar\Denpasar selatan\Ds. Sidakarya\Jl. Sidakarya	Perjanjian Sewa dengan I Kt. Subitayasa, Perpanjangan II nomor 593.1/1109/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 28 April 2021	610,00	I Kt. Subitayasa	78.080.000,00			78.080.000,00				78.080.000,00		78.080.000,00
38	01.01.02.01.005	001211	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.14.4.00009	Badung\Mengwi\Ds. Sading	Perjanjian Sewa dengan I Gusti Bagus Suka No. 593.1/185/UPTD.PBMD tgl 15 Januari 2020	915,00	I Gusti Bagus Suka	79.605.000,00			79.605.000,00				79.605.000,00		79.605.000,00
39	01.01.02.01.005	000738	Tanah Sawah Irigasi	22.09.01.16.4.00004	Denpasar\Denpasar Utara\Ds. Ubung Kaja	Perjanjian Sewa dengan Yayasan Pendidikan, perpanjangan I perjanjian nomor B.13.593.1/3358/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 18 Oktober 2021	740,00	Yayasan Pendidikan Nusantara	118.400.000,00			118.400.000,00				118.400.000,00		118.400.000,00
40	01.01.02.01.005	001198	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.18.4.00036	Ds.Pererenan,Kc.Mengwi,Kab.Badung	Perjanjian Sewa dengan Lakhsmi Dipil Patel No. B.13.032/4256/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Desember 2022	3.400,00	Lakhsmi Dipil Patel	125.800.000,00			125.800.000,00				125.800.000,00		125.800.000,00
41	01.01.02.01.005	000750	Tanah Sawah Irigasi	22.09.03.09.4.00021	Denpasar\Denpasar selatan\Ds. Sidakarya	Perpanjangan I Perjanjian Sewa dengan Yayasan Universal School No. B.13.032/2743/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 30 Agustus 2022	1.120,00	Yayasan Universal School	143.360.000,00			143.360.000,00				143.360.000,00		143.360.000,00
42	01.01.02.01.005	000743	Tanah Sawah Irigasi	22.09.01.22.4.00016	Denpasar\Denpasar Utara\Ds. Peguyangan\Jl.A.Yani Gang Merpati	Perjanjian Sewa dengan Pasemeton Pasek Telengan No. 593,1/1475/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 12 Agustus 2020	310,00	Pasemeton Pasek Telengan	143.840.000,00			143.840.000,00				143.840.000,00		143.840.000,00
43	01.01.02.01.005	001225	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.09.4.00054	Ds.Munggu,Kc.Mengwi,Kab.Badung	Perjanjian Sewa dengan Ida Gede Kresna Budi Nomor B.13.032/1355/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 16 Februari 2023	2.650,00	Ida Gede Kresna Budi	145.948.750,00			145.948.750,00				145.948.750,00		145.948.750,00
44	01.01.02.01.005	001458	Tanah Sawah Irigasi	22.03.08.06.4.00058	Badung\Kuta Utara\Ds. Tibubeneng	Perjanjian Sewa dengan I Md. Wiranatha, perpanjangan I no 593.1/2020/UPTD.PBMD tgl 27 Agustus 2019	3.395,00	I Md. Wiranatha	217.280.000,00			217.280.000,00				217.280.000,00		217.280.000,00
45	01.01.02.01.005	001814	Tanah Sawah Irigasi	22.03.08.02.4.00008	Badung/Kuta Utara/Ds. Canggu	Perjanjian Sewa dengan Lakhsmi Dipil Patel No. B.13.032/4256/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Desember 2022	900,00	Lakhsmi Dipil Patel	247.950.000,00			247.950.000,00				247.950.000,00		247.950.000,00

No	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2025			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2025			Posisi Per 31 Desember 2025		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompatibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompatibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
													Nilai	Nilai	nilai			
46	01.01.02.01.005	001689	Tanah Sawah Irigasi	22.03.04.07.4.00029	Badung\Kuta\Ds. Seminyak	Perjanjian sewa dengan G. Manggala Perdana Jaya, SH B.13.032/1213/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 4 Mei 2023	140,00	G. Manggala Perdana Jaya, SH	748.860.000,00			748.860.000,00				748.860.000,00		748.860.000,00
47	01.01.02.01.005	001453	Tanah Sawah Irigasi	22.03.08.06.4.00054	Subak.Tibubeneng/Br.Tibubeneng/Kec.Kuta Utara/Badung	Perjanjian Sewa dengan Rai Irma Santini No. B.13.032/4386/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 29 Desember 2022	3.080,00	Rai Irma Santini	842.380.000,00			842.380.000,00				842.380.000,00		842.380.000,00
48	01.01.02.01.005	001718	Tanah Sawah Irigasi	22.03.04.04.4.00155	Persimpangan Jln. Imam Bonjol dan Sunset Road, Kel. Kuta Badung	Perjanjian Sewa dengan dengan Ketut Sri Sudarminiani No. B.593.1/1673/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 23 September 2022 dan Perjanjian Sewa dengan Gana Pramananda Perpanjangan I No. 13.593.1/300/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 31 Januari 2022	400,00	Ketut Sri Sudarminiani	1.347.800.000,00			1.347.800.000,00				1.347.800.000,00		1.347.800.000,00
49	01.01.02.01.005	001151	Tanah Sawah Irigasi	22.03.08.06.4.00004	Badung\Kuta Utara\Ds. Tibubeneng	Perjanjian Sewa dengan Gede Ray Ardian Mancini Yasa, Perpanjangan I Nomor B.13.593.1/1857/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 23 Juli 2021	1.505,00	Gede Ray Ardian Mancini Yasa	1.505.000.000,00			1.505.000.000,00				1.505.000.000,00		1.505.000.000,00
50	01.01.02.01.005	001479	Tanah Sawah Irigasi	22.09.02.12.4.00030	Des.Kesiman Kertalangu/Kec.Dentim/Denpasar	Perjanjian Sewa dengan Yayasan Kepustakaan Bung Karno No. B.13.593.1/78/UPTD.PBMD/BPKAD tangal 17 Januari 2022	642,00	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	1.885.554.000,00			1.885.554.000,00				1.885.554.000,00		1.885.554.000,00
51	01.01.02.01.005	001692	Tanah Sawah Irigasi	22.03.09.01.4.00135	Badung\Kuta Utara\Ds. Jimbaran	Perjanjian Perpanjangan Sewa dengan I B Gde Budi Hartawan B.13.032/2733/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 29 Agustus 2022 dan Perjanjian Sewa I Wayan Supartama B.13.032/2310/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 6 Juli 2022	1.435,00	I B Gde Budi Hartawa dan I Wayan Supartama	2.283.085.000,00			2.283.085.000,00				2.283.085.000,00		2.283.085.000,00
52	01.01.02.01.005	001687	Tanah Sawah Irigasi	22.03.09.05.4.00012	Badung\Kuta Selatan\Ds. Tanjung Benoa	Perjanjian Sewa dengan PT. Genta Buana, perpanjangan I no. 593.1/2830/UPTD.PBMD tgl 28 Oktober 2019	2.400,00	PT. Genta Buana	4.062.000.000,00			4.062.000.000,00				4.062.000.000,00		4.062.000.000,00
53	01.01.02.01.005	001690	Tanah Sawah Irigasi	22.03.04.07.4.00027	Badung\Kuta\Ds. Seminyak	Perjanjian sewa dengan G. Manggala Perdana Jaya, SH, Kadek yasa dan Dewa Kresna Mahaputra B.13.032/1213/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 4 Mei 2023 (sewa sebagian luas 146 m2), 593.1/5084/UPT.P2.BPKAD tgl 28 Nopember 2018 (300m2), .13.593.1/1942/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 5 Agustus 2021 (346m2)	800,00	G. Manggala Perdana Jaya, SH, Kadek yasa dan Dewa Kresna Mahaputra	4.279.200.000,00			4.279.200.000,00				4.279.200.000,00		4.279.200.000,00
54	01.01.02.02.001	001758	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00065	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	20,00	PT. Empora Dhanalaksmi	49.000,00			49.000,00				49.000,00		49.000,00
55	01.01.02.02.001	001747	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00054	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	195,00	PT. Empora Dhanalaksmi	477.750,00			477.750,00				477.750,00		477.750,00
56	01.01.02.02.001	001746	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00053	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	250,00	PT. Empora Dhanalaksmi	612.500,00			612.500,00				612.500,00		612.500,00
57	01.01.02.02.001	001765	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00072	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	250,00	PT. Empora Dhanalaksmi	612.500,00			612.500,00				612.500,00		612.500,00

No	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2025			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2025			Posisi Per 31 Desember 2025		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompatibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompatibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
													Nilai	Nilai	nilai			
58	01.01.02.02.001	001601	Tanah Tegalan	22.06.02.05.4.00054	Klungkung\Dawan\Ds. Pesinggahan	Perjanjian Sewa dengan Ni Nengah Rapeg No. B.13.032/2709/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal19 September 2023	26,00	Ni Nengah Rapeg	689.000,00			689.000,00				689.000,00		689.000,00
59	01.01.02.02.001	001756	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00063	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	305,00	PT. Empora Dhanalaksmi	747.250,00			747.250,00				747.250,00		747.250,00
60	01.01.02.02.001	001754	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00061	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	320,00	PT. Empora Dhanalaksmi	784.000,00			784.000,00				784.000,00		784.000,00
61	01.01.02.02.001	001738	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00045	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	380,00	PT. Empora Dhanalaksmi	931.000,00			931.000,00				931.000,00		931.000,00
62	01.01.02.02.001	001750	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00057	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	410,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.004.500,00			1.004.500,00				1.004.500,00		1.004.500,00
63	01.01.02.02.001	001757	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00064	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	495,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.212.750,00			1.212.750,00				1.212.750,00		1.212.750,00
64	01.01.02.02.001	001729	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00036	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	520,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.274.000,00			1.274.000,00				1.274.000,00		1.274.000,00
65	01.01.02.02.001	001730	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00037	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	520,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.274.000,00			1.274.000,00				1.274.000,00		1.274.000,00
66	01.01.02.02.001	001735	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00042	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	580,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.421.000,00			1.421.000,00				1.421.000,00		1.421.000,00
67	01.01.02.02.001	001598	Tanah Tegalan	22.06.02.05.4.00051	Klungkung\Dawan\Ds. Pesinggahan	Perjanjian Sewa dengan Ni Nengah Rapeg No. B.13.032/2709/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal19 September 2023	59,00	Ni Nengah Rapeg	1.563.500,00			1.563.500,00				1.563.500,00		1.563.500,00
68	01.01.02.02.001	001766	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00073	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	790,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.935.500,00			1.935.500,00				1.935.500,00		1.935.500,00
69	01.01.02.02.001	001723	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00030	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	800,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.960.000,00			1.960.000,00				1.960.000,00		1.960.000,00

No	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2025			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2025			Posisi Per 31 Desember 2025		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompatibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompatibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
													Nilai	Nilai	nilai			
70	01.01.02.02.001	001727	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00034	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	800,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.960.000,00			1.960.000,00				1.960.000,00		1.960.000,00
71	01.01.02.02.001	001725	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00032	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	890,00	PT. Empora Dhanalaksmi	2.180.500,00			2.180.500,00				2.180.500,00		2.180.500,00
72	01.01.02.02.001	001771	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00078	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	925,00	PT. Empora Dhanalaksmi	2.266.250,00			2.266.250,00				2.266.250,00		2.266.250,00
73	01.01.02.02.001	001773	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00080	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.100,00	PT. Empora Dhanalaksmi	2.695.000,00			2.695.000,00				2.695.000,00		2.695.000,00
74	01.01.02.02.001	001737	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00044	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.105,00	PT. Empora Dhanalaksmi	2.707.250,00			2.707.250,00				2.707.250,00		2.707.250,00
75	01.01.02.02.001	001748	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00055	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.160,00	PT. Empora Dhanalaksmi	2.842.000,00			2.842.000,00				2.842.000,00		2.842.000,00
76	01.01.02.02.001	001770	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00077	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.240,00	PT. Empora Dhanalaksmi	3.038.000,00			3.038.000,00				3.038.000,00		3.038.000,00
77	01.01.02.02.001	001749	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00056	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.305,00	PT. Empora Dhanalaksmi	3.197.250,00			3.197.250,00				3.197.250,00		3.197.250,00
78	01.01.02.02.001	001728	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00035	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.315,00	PT. Empora Dhanalaksmi	3.221.750,00			3.221.750,00				3.221.750,00		3.221.750,00
79	01.01.02.02.001	001719	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00026	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021	470,00	PT. Empora Dhanalaksmi	3.290.000,00			3.290.000,00				3.290.000,00		3.290.000,00
80	01.01.02.02.001	001762	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00069	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.350,00	PT. Empora Dhanalaksmi	3.307.500,00			3.307.500,00				3.307.500,00		3.307.500,00
81	01.01.02.02.001	001755	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00062	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.385,00	PT. Empora Dhanalaksmi	3.393.250,00			3.393.250,00				3.393.250,00		3.393.250,00

No	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2025			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2025			Posisi Per 31 Desember 2025		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompatibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompatibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
													Nilai	Nilai	nilai			
82	01.01.02.02.001	001731	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00038	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.550,00	PT. Empora Dhanalaksmi	3.797.500,00			3.797.500,00				3.797.500,00		3.797.500,00
83	01.01.02.02.001	001734	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00041	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.550,00	PT. Empora Dhanalaksmi	3.797.500,00			3.797.500,00				3.797.500,00		3.797.500,00
84	01.01.02.02.001	001764	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4..00071	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.690,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.140.500,00			4.140.500,00				4.140.500,00		4.140.500,00
85	01.01.02.02.001	001752	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00059	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.850,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.532.500,00			4.532.500,00				4.532.500,00		4.532.500,00
86	01.01.02.02.001	001761	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00068	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.930,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.728.500,00			4.728.500,00				4.728.500,00		4.728.500,00
87	01.01.02.02.001	001721	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00028	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.000,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.900.000,00			4.900.000,00				4.900.000,00		4.900.000,00
88	01.01.02.02.001	001739	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00046	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.000,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.900.000,00			4.900.000,00				4.900.000,00		4.900.000,00
89	01.01.02.02.001	001742	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00049	Klungkung\Nusa Penida\Ds.Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.000,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.900.000,00			4.900.000,00				4.900.000,00		4.900.000,00
90	01.01.02.02.001	001743	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00050	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.000,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.900.000,00			4.900.000,00				4.900.000,00		4.900.000,00
91	01.01.02.02.001	001744	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00051	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.000,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.900.000,00			4.900.000,00				4.900.000,00		4.900.000,00
92	01.01.02.02.001	001769	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00076	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.000,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.900.000,00			4.900.000,00				4.900.000,00		4.900.000,00
93	01.01.02.02.001	001759	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00066	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.030,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.973.500,00			4.973.500,00				4.973.500,00		4.973.500,00

No	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2025			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2025			Posisi Per 31 Desember 2025		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompatibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompatibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
													Nilai	Nilai	nilai			
94	01.01.02.02.001	001736	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00043	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.290,00	PT. Empora Dhanalaksmi	5.610.500,00			5.610.500,00				5.610.500,00		5.610.500,00
95	01.01.02.02.001	001753	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00060	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.360,00	PT. Empora Dhanalaksmi	5.782.000,00			5.782.000,00				5.782.000,00		5.782.000,00
96	01.01.02.02.001	001741	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00048	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.400,00	PT. Empora Dhanalaksmi	5.880.000,00			5.880.000,00				5.880.000,00		5.880.000,00
97	01.01.02.02.001	001733	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00040	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.520,00	PT. Empora Dhanalaksmi	6.174.000,00			6.174.000,00				6.174.000,00		6.174.000,00
98	01.01.02.02.001	001745	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00052	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.520,00	PT. Empora Dhanalaksmi	6.174.000,00			6.174.000,00				6.174.000,00		6.174.000,00
99	01.01.02.02.001	001740	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00047	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.590,00	PT. Empora Dhanalaksmi	6.345.500,00			6.345.500,00				6.345.500,00		6.345.500,00
100	01.01.02.02.001	001767	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00074	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.630,00	PT. Empora Dhanalaksmi	6.443.500,00			6.443.500,00				6.443.500,00		6.443.500,00
101	01.01.02.02.001	001763	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00070	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.640,00	PT. Empora Dhanalaksmi	6.468.000,00			6.468.000,00				6.468.000,00		6.468.000,00
102	01.01.02.02.001	001768	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00075	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.970,00	PT. Empora Dhanalaksmi	7.276.500,00			7.276.500,00				7.276.500,00		7.276.500,00
103	01.01.02.02.001	001720	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00027	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	3.300,00	PT. Empora Dhanalaksmi	8.085.000,00			8.085.000,00				8.085.000,00		8.085.000,00
104	01.01.02.02.001	001732	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00039	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	3.635,00	PT. Empora Dhanalaksmi	8.905.750,00			8.905.750,00				8.905.750,00		8.905.750,00
105	01.01.02.02.001	001718	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00025	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	3.760,00	PT. Empora Dhanalaksmi	9.212.000,00			9.212.000,00				9.212.000,00		9.212.000,00

No	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2025			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2025			Posisi Per 31 Desember 2025		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompatibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompatibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
													Nilai	Nilai	nilai			
106	01.01.02.02.001	001726	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00033	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	3.930,00	PT. Empora Dhanalaksmi	9.628.500,00			9.628.500,00				9.628.500,00		9.628.500,00
107	01.01.02.02.001	000369	Tanah Tegalan	22.03.06.06.5.00027	Badung\Abiansemal\Ds. Abiansemal	Perjanjian Sewa dengan PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung No. 593.1/1006/UPTD.PBMD tanggal 2 Mei 2019	158,00	PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung	10.676.850,00			10.676.850,00				10.676.850,00		10.676.850,00
108	01.01.02.02.001	001760	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00067	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	4.375,00	PT. Empora Dhanalaksmi	10.718.750,00			10.718.750,00				10.718.750,00		10.718.750,00
109	01.01.02.02.001	000106	Tanah Tegalan	22.03.05.21.4.00001	Badung\Mengwi\Ds. Kuwum	Perjanjian Sewa dengan Bendesa Adat Kuwum Nyelati No. 593.1/5221/UPT.P2.BPKAD tgl 11 Desember 2018	1.200,00	Bendesa Adat Kuwum Nyelati	11.400.000,00			11.400.000,00				11.400.000,00		11.400.000,00
110	01.01.02.02.001	001600	Tanah Tegalan	22.06.02.05.4.00053	Klungkung\Dawan\Ds. Pesinggahan	Perjanjian Sewa dengan Ketut Resmiyasa No. B.13.593.1/2004/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 23-8-2021	431,00	Ketut Resmiyasa	11.421.500,00			11.421.500,00				11.421.500,00		11.421.500,00
111	01.01.02.02.001	002058	Tanah Tegalan	22.09.01.11.4.00036	Denpasar\Denpasar Barat\Padang Sambian Klod	Perjanjian Sewa dengan Oke Marokeh Rachmat Nomor B.13.032/3038/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 20 September 2022	120,00	Oke Marokeh Rachmat	23.940.000,00			23.940.000,00				23.940.000,00		23.940.000,00
112	01.01.02.02.001	000843	Tanah Tegalan	22.05.05.04.4.00003	Gianyar\Payangan\Ds. Bukian	Perjanjian Sewa dengan PDAM Tirta Sanjiwani No. 593.1/479/UPTD.PBMD tgl 11 Pebruari 2020	670,00	PDAM Tirta Sanjiwani	71.690.000,00			71.690.000,00				71.690.000,00		71.690.000,00
113	01.01.02.02.001	001869	Tanah Tegalan	22.09.02.05.3.00135	Denpasar\Denpasar Timur\Kel Dangin Puri Klod	Perjanjian Sewa dengan Yayasan Kepustakaan No. 593.1/2679/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 23 Desember 2020	65,00	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	75.920.000,00			75.920.000,00				75.920.000,00		75.920.000,00
114	01.01.02.02.001	001866	Tanah Tegalan	22.09.02.05.4.00124	Denpasar\Denpasar Timur\Kel. Dangin Puri Klod\Jl. Raya Puputan Belangan RM Bumbu Desa	Perjanjian perpanjangan II Sewa dengan Kt. Tompel nomor B.13.032/3903/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 17 November 2022	182,00	Kt. Tompel	84.448.000,00			84.448.000,00				84.448.000,00		84.448.000,00
115	01.01.02.02.001	001885	Tanah Tegalan	22.09.02.05.3.00152	Denpasar\Denpasar Timur\Kel Dangin Puri Klod	Perjanjian Sewa dengan Putu Mahardika, Perpanjangan I No. B.13.593.1/103/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 18 Januari 2022	220,00	Putu Mahardika	111.320.000,00			111.320.000,00				111.320.000,00		111.320.000,00
116	01.01.02.02.001	000006	Tanah Tegalan	22.03.04.04.4.00105	Badung\Kuta Tengah\Kel. Kuta	Perjanjian Sewa dengan Ananditha Paramaningrum Perpanjangan I nomor B.13.593.1/303/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 31 Januari 2022	165,00	Ananditha Paramaningrum	123.750.000,00			123.750.000,00				123.750.000,00		123.750.000,00
117	01.01.02.02.001	001879	Tanah Tegalan	22.09.02.05.3.00146	Denpasar\Denpasar Timur\Kel Dangin Puri Klod	Perjanjian Sewa dengan DPD Partai Gerindra, Perpanjangan I No. 593,1/1502/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 18 Agustus 2020	272,00	DPD Partai Gerindra	137.632.000,00			137.632.000,00				137.632.000,00		137.632.000,00
118	01.01.02.02.001	002072	Tanah Tegalan	22.09.01.02.4.00093	Denpasar\Denpasar Utara\Ds. Dauh Puri Kaja	Perjanjian Sewa dengan Ni Made Ayu Sriyanti No.593.1/1522/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 24 Agustus 2020	273,00	Ni Made Ayu Sriyanti	191.646.000,00			191.646.000,00				191.646.000,00		191.646.000,00
119	01.01.02.02.001	001852	Tanah Tegalan	22.09.02.09.4.00079	Denpasar\Denpasar Timur\Ds. Sumerta Klod	Perjanjian Sewa dengan Ni Komang Devi, Perpanjangan I No.593.1/1878/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 19 Oktober 2020	414,00	Ni Komang Devi	192.096.000,00			192.096.000,00				192.096.000,00		192.096.000,00
120	01.01.02.02.001	002135	Tanah Tegalan	Belum Sertifikat	Gianyar\Kec. Blahbatuh\Desa Keramas	Perjanjian Sewa dengan Gusti Putu Karyawan No. 593.1/566/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 22-2-2021	200,00	Gusti Putu Karyawan	200.000.000,00			200.000.000,00				200.000.000,00		200.000.000,00
121	01.01.02.02.001	001847	Tanah Tegalan	22.09.02.01.4.00064	Denpasar\Denpasar Timur\Ds. Sumerta Kelod\jl. Hayam Wuruk 102	Perjanjian Sewa dengan I Wayan Tinggen, Perpanjangan II No. B.13.593.1/1430/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 2 Juni 2021	435,00	I Wayan Tinggen	201.840.000,00			201.840.000,00				201.840.000,00		201.840.000,00

No	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2025			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2025			Posisi Per 31 Desember 2025		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompatibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompatibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
													Nilai	Nilai	nilai			
122	01.01.02.02.001	001878	Tanah Tegalan	22.09.02.05.3.00145	Denpasar\Denpasar Timur\Kel. Dangin Puri Klod\Jln.Raya Puputan	Perjanjian Sewa dengan Yayasan Kepustakaan, Perubahan I No 593.1/4678/PPA.Aset tgl 8 Juni 2015	400,00	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	202.400.000,00			202.400.000,00				202.400.000,00		202.400.000,00
123	01.01.02.02.001	001851	Tanah Tegalan	22.09.02.09.4.00078	Denpasar\Denpasar Timur\Ds. Sumerta Kelod	Sewa Desak Amertani perpj I no.593.1/2541/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 14-12-2020 (174 m2) Sewa I Gusti Lanang Ngurah Biasama No. 593.1/2662/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 22-12-2020 (174m2) Sewa Dewi Sinaryati no. B.13.032/1586/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 27-5-2022 (101 m2)	449,00	Desak Amertani, Gusti Lanang Ngurah Biasama dan Dewi Sinaryati	208.336.000,00			208.336.000,00				208.336.000,00		208.336.000,00
124	01.01.02.02.001	001875	Tanah Tegalan	22.09.02.05.3.00142	Denpasar\Denpasar Timur\Kel Dangin Puri Klod	Perjanjian Sewa dengan Yayasan Kepustakaan Bung Karno No. 593.1/3634/PPA.Aset tgl 15 September 2016	425,00	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	215.050.000,00			215.050.000,00				215.050.000,00		215.050.000,00
125	01.01.02.02.001	000001	Tanah Tegalan	22.03.04.04.5.00096	Badung\Kuta Tengah\Kel. Kuta\By Pass Ngurah Rai Simpang Siur	Perjanjian Sewa dengan Cahaya Wirawan Hadi Perpanjangan II No B.13.593.1/3646/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 25 November 2021	325,00	Cahaya Wirawan Hadi	243.750.000,00			243.750.000,00				243.750.000,00		243.750.000,00
126	01.01.02.02.001	001800	Tanah Tegalan	22.09.01.08.4.00015	Denpasar\Denpasar Barat\Ds. Pemecutan Klod	Perjanjian Sewa dengan SMA PGRI 2 Denpasar, Perpanjangan II 593.1/3569/UPTD.PBMD tgl 23 Desember 2019	490,00	SMA PGRI 2 Denpasar	263.130.000,00			263.130.000,00				263.130.000,00		263.130.000,00
127	01.01.02.02.001	001877	Tanah Tegalan	22.09.02.05.3.00144	Denpasar\Denpasar Timur\Kel Dangin Puri Klod	Perjanjian Sewa dengan Yayasan Kepustakaan Bung Karno No. 593.1/2122/UPTD.PBMD tanggal 2 September 2019	245,00	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	286.160.000,00			286.160.000,00				286.160.000,00		286.160.000,00
128	01.01.02.02.001	000844	Tanah Tegalan	22.05.05.04.4.00004	Gianyar\Payangan\Ds. Bukian	Perjanjian Sewa dengan PDAM Tirta Sanjiwani No. 593.1/479/UPTD.PBMD tgl 11 Pebruari 2020	2.750,00	PDAM Tirta Sanjiwani	294.250.000,00			294.250.000,00				294.250.000,00		294.250.000,00
129	01.01.02.02.001	002111	Tanah Tegalan	22.03.09.01.4.00048	Badung\Kuta Selatan\Kel. Jimbaran\JL. Bay Pass Ngurah Rai	Perjanjian Sewa dengan Yudi Kurnianingsih, Perpanjangan I nomor 593.1/1006/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 19 April 2021	420,00	Yudi Kurnianingsih	302.400.000,00			302.400.000,00				302.400.000,00		302.400.000,00
130	01.01.02.02.001	001886	Tanah Tegalan	22.09.02.05.3.00153	Denpasar\Denpasar Timur\Kel Dangin Puri Klod	Perjanjian Sewa dengan Yayasan Kepustakaan Bung Karno No. 593.1/1568/PPA.Aset tanggal 7 Mei 2012 perpanjangan I 593.1/912/UPT.P2.BPKAD tgl 27 Februari 2018 perpanjangan II nomor B.13.593,1/1362/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 11 Mei 2022	670,00	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	339.020.000,00			339.020.000,00				339.020.000,00		339.020.000,00
131	01.01.02.02.001	000023	Tanah Tegalan	22.03.08.06.4.00006	Badung\Kuta Utara\Ds. Tibubeneng	Perjanjian Sewa dengan PT. Bali Pawiwahan No. 593.1/2669/UPTD.PBMD tanggal 15 Oktober 2019	1.310,00	PT. Bali Pawiwahan	358.285.000,00			358.285.000,00				358.285.000,00		358.285.000,00
132	01.01.02.02.001	000015	Tanah Tegalan	22.03.04.15.4.00004	Badung\Kuta Tengah\Kel. Legian	Sewa Oleh I Nengah Tamba No. 593.1/19548/PPA.Aset tgl 15 Desember 2014 dan perpanjangan I nomor 593.1/2114/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 9 November 2020	560,00	I Nengah Tamba	420.000.000,00			420.000.000,00				420.000.000,00		420.000.000,00
133	01.01.02.02.001	000024	Tanah Tegalan	22.03.08.06.4.00008	Badung\Kuta Utara\Ds. Tibubeneng	Perjanjian Sewa dengan PT. Bali Pawiwahan No. 593.1/2669/UPTD.PBMD tanggal 15 Oktober 2019	1.730,00	PT. Bali Pawiwahan	473.155.000,00			473.155.000,00				473.155.000,00		473.155.000,00
134	01.01.02.02.001	001871	Tanah Tegalan	22.09.02.05.3.00137	Denpasar\Denpasar Timur\Kel Dangin Puri Klod	Perpanjangan II Perjanjian sewa dengan DPD PDIP Prov.Bali nomor B.13.032/2147/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 13 Juli 2022	1.002,00	DPD PDIP Prov.Bali	507.012.000,00			507.012.000,00		507.012.000,00		-		-
135	01.01.02.02.001	000003	Tanah Tegalan	22.03.04.04.4.00101	Badung\Kuta\Kel. Kuta\Jl.Sunset Road	Perjanjian Sewa dengan Rudy Alianto No. 593.1/1668/UPTD.PBMD tanggal 15 Juli 2019	900,00	Rudy Alianto	675.000.000,00			675.000.000,00				675.000.000,00		675.000.000,00

No	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2025			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2025			Posisi Per 31 Desember 2025		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompatibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompatibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
													Nilai	Nilai	nilai			
136	01.01.02.02.001	002118	Tanah Tegalan	58	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	Perjanjian Sewa dengan PT NII, amandemen IV tanggal 18 September 2017	860,00	PT NII	877.200.000,00			877.200.000,00				877.200.000,00		877.200.000,00
137	01.01.02.02.001	002050	Tanah Tegalan	22.09.02.06.4.00038	Denpasar\Denpasar Timur\Sumerta	Perjanjian Sewa dengan Yayasan Korpri/Universitas Warmadewa No. 593.1/7619/PPA.Aset tgl 24 Juli 2014 perpanjangan I nomor 593.1/1324/UPTD.PBMD tanggal 21 Juli 2020	2.085,00	Yayasan Korpri/Universitas Warmadewa	967.440.000,00			967.440.000,00				967.440.000,00		967.440.000,00
138	01.01.02.02.001	000021	Tanah Tegalan	22.03.08.06.4.00003	Badung\Kuta Utara\Ds. Tibubeneng	Perjanjian Sewa dengan I Made Wiranatha, Perpanjangan I perjanjian nomor 593.1/2130/UPTD.PBMD tanggal 2 September 2019	3.810,00	I Made Wiranatha	1.042.035.000,00			1.042.035.000,00				1.042.035.000,00		1.042.035.000,00
139	01.01.02.02.001	001858	Tanah Tegalan	22.03.02.05.4.00079	Denpasar\Denpasar Timur\Kel. Dangin Puri Klod	Perjanjian Perpanjangan I Sewa dengan Suka Duka Korpri Provinsi Bali B.13.032/2729/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 29 Agustus 2022	1.120,00	Suka Duka Korpri Provinsi Bali	1.284.640.000,00			1.284.640.000,00				1.284.640.000,00		1.284.640.000,00
140	01.01.02.02.001	000025	Tanah Tegalan	22.03.08.06.4.00009	Badung\Kuta Utara\Ds. Tibubeneng	Perjanjian Sewa dengan PT. Bali Pawiwahan No. 593.1/2669/UPTD.PBMD tanggal 15 Oktober 2019	5.170,00	PT. Bali Pawiwahan	1.413.995.000,00			1.413.995.000,00				1.413.995.000,00		1.413.995.000,00
141	01.01.02.02.001	002116	Tanah Tegalan	50	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	Perjanjian Sewa dengan PT NII, amandemen IV tanggal 18 September 2017	2.000,00	PT NII	2.040.000.000,00			2.040.000.000,00				2.040.000.000,00		2.040.000.000,00
142	01.01.02.02.001	001848	Tanah Tegalan	22.09.02.09.4.00066	Denpasar\Denpasar Timur\Ds. Sumerta Kelod	Perjanjian Sewa dengan I Gusti Ngurah Arie, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/1823/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Juli 2021 dan Sewa oleh Yayasan Korpri, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/1858/UPTD.PBMD/BPKAD	5.188,00	I Gusti Ngurah Arie dan Yayasan Korpri	2.407.232.000,00			2.407.232.000,00				2.407.232.000,00		2.407.232.000,00
143	01.01.02.02.001	000027	Tanah Tegalan	22.03.08.06.4.00011	Badung\Kuta Utara\Ds. Tibubeneng	Perjanjian Sewa dengan I Made Wiranatha, Perpanjangan I perjanjian nomor 593.1/2130/UPTD.PBMD tanggal 2 September 2019	3.635,00	I Made Wiranatha	3.635.000.000,00			3.635.000.000,00				3.635.000.000,00		3.635.000.000,00
144	01.01.02.02.001	000028	Tanah Tegalan	22.03.08.06.4.00012	Badung\Kuta Utara\Ds. Tibubeneng	Perjanjian Sewa dengan I Made Wiranatha, Perpanjangan I perjanjian nomor 593.1/2130/UPTD.PBMD tanggal 2 September 2019	4.045,00	I Made Wiranatha	4.045.000.000,00			4.045.000.000,00				4.045.000.000,00		4.045.000.000,00
145	01.01.02.02.001	000029	Tanah Tegalan	22.03.08.06.4.00013	Badung\Kuta Utara\Ds. Tibubeneng	Perjanjian Sewa dengan I Made Wiranatha, Perpanjangan I perjanjian nomor 593.1/2130/UPTD.PBMD tanggal 2 September 2019	4.280,00	I Made Wiranatha	4.280.000.000,00			4.280.000.000,00				4.280.000.000,00		4.280.000.000,00
146	01.01.02.02.001	002117	Tanah Tegalan	52	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	Perjanjian Sewa dengan PT NII, amandemen IV tanggal 18 September 2017	7.500,00	PT NII	7.650.000.000,00			7.650.000.000,00				7.650.000.000,00		7.650.000.000,00
147	01.01.02.02.001	002119	Tanah Tegalan	61	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	Perjanjian Sewa dengan PT NII, amandemen IV tanggal 18 September 2017	12.270,00	PT NII	12.515.400.000,00			12.515.400.000,00				12.515.400.000,00		12.515.400.000,00
148	01.01.02.02.001	002121	Tanah Tegalan	22.03.04.09.4.00094	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	Perjanjian Sewa dengan PT PRBI, Perubahan Akta Notaris No. 5 tanggal 13 April 2015	18.800,00	PT PRBI	19.176.000.000,00			19.176.000.000,00				19.176.000.000,00		19.176.000.000,00
149	01.01.02.02.001	002120	Tanah Tegalan	85	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	Perjanjian Sewa dengan PT NII, amandemen IV tanggal 18 September 2017	89.560,00	PT NII	91.351.200.000,00			91.351.200.000,00				91.351.200.000,00		91.351.200.000,00
150	01.01.02.02.001	002114	Tanah Tegalan	15	Ds. Benoa/Kuta Selatan/Badung	Perjanjian Sewa dengan PT NII, amandemen IV tanggal 18 September 2017	108.150,00	PT NII	110.313.000.000,00			110.313.000.000,00				110.313.000.000,00		110.313.000.000,00
151	01.01.01.04.001	000261	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22.06.70.09.4.00109	Jalan Kartini No 3 Klungkung	Perjanjian Sewa dengan I Ketut Juliarta B.13.032/2928/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 13 September 2022	400,00	I Ketut Juliarta	68.000.000,00			68.000.000,00				68.000.000,00		68.000.000,00
152	01.01.02.02.001	002115	Tanah Tegalan	18	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	Perjanjian Sewa dengan PT NII, amandemen IV tanggal 18 September 2017	178.650,00	PT NII	182.223.000.000,00			182.223.000.000,00				182.223.000.000,00		182.223.000.000,00

No	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2025			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2025			Posisi Per 31 Desember 2025		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompatibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompatibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
													Nilai	Nilai	nilai			
153	01.01.02.02.002	000003	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	121	Ds.Kuta,Kc.Kuta,Kab.Badung	Perjanjian Sewa dengan Gusti Ketut Merta No. 593.1/528/UPT.P2.BPKAD tgl 1 Maret 2017	140,00	Gusti Ketut Merta	222.740.000,00			222.740.000,00				222.740.000,00		222.740.000,00
154	01.01.02.02.002	000005	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	22.09.01.17.4.00015	Denpasar/Denpasar Barat/Desa Tegal Kerta	Perjanjian Sewa dengan Yayasan Corti No. 593.1/2648/UPTD.PBMD tgl 14 Oktober 2019	2.120,00	Yayasan Corti	2.608.660.000,00			2.608.660.000,00				2.608.660.000,00		2.608.660.000,00
155	01.01.02.02.002	000003	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	22.03.08.06.4.00081	Badung/Kuta Utara/Desa Tibubeneng	Perjanjian Sewa dengan I Md. Wiranatha, Perpanjangan I no 593.1/2020/UPTD.PBMD tgl 27 Agustus 2019	2.100,00	I Md. Wiranatha	13.983.900.000,00			13.983.900.000,00				13.983.900.000,00		13.983.900.000,00
156	01.01.03.01.025	000002	Tanah Lapangan Lainnya	22.03.08.05.4.00394	Badung\Kuta Tengah\Kel Seminyak	Perjanjian Sewa dengan I Wayan Sadia No. B.13.032/2855/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 7 September 2022 (666 m2) dan Perjanjian Sewa dengan Paguyuban Taman Merthanadi Transport No. B.13.593.1/1419/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 2 Juni 2022 (320 m2)	986,00	I Wayan Sadia	721.752.000,00			721.752.000,00				721.752.000,00		721.752.000,00
157	01.01.03.01.025	000001	Tanah Lapangan Lainnya	22.03.08.05.4.00384	Badung\Kuta Utara\Kerobokan Klod	Perjanjian sewa dengan Komang Gilang Pradnya Taksu Natha no. B.13.032/3525/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2023	1.200,00	Komang Gilang Pradnya Taksu	878.400.000,00			878.400.000,00				878.400.000,00		878.400.000,00
158	01.01.03.02.006	000004	Tanah Lapangan Apel/Upacara	22.09.01.08.4.00050	Subak Semila/Kel.Pemecutan/Kec.Denbar	Perjanjian Sewa dengan SMA PGRI 2 Denpasar, Perpanjangan II 593.1/3569/UPTD.PBMD tgl 23 Desember 2019	850,00	SMA PGRI 2 Denpasar	687.600.000,00			687.600.000,00				687.600.000,00		687.600.000,00
159	01.01.03.07.001	000082	Tanah Untuk Jalan Nasional	22.03.04.04.4.00104	Badung /Kuta Tengah/Kel Kuta Jln. Sunset Road Simpang Siur Kuta	Perjanjian Sewa dengan AAP Syafrudin, Perpanjangan II No. B.13.593.1/2025/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 27 Agustus 2021	380,00	AAP Syafrudin	285.000.000,00			285.000.000,00				285.000.000,00		285.000.000,00
160	01.01.03.07.001	000081	Tanah Untuk Jalan Nasional	22.03.02.05.4.00062	Denpasar\Dentim\Kel. Dangin Puri Klod\Jl.Tjok Agung Kresna	Perjanjian Sewa Kerjasama Pengelolaan Parkir dg Kota Denpasar, addendum II no 075/1673/KB/B.Tapem Tanggal 8 Januari 2015	1.125,00	Kota Denpasa	1.290.375.000,00			1.290.375.000,00				1.290.375.000,00		1.290.375.000,00
161	01.01.03.08.006	000001	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	22.03.06.05.4.00097	Badung/Abiansemal/Desa Ayunan	Perjanjian Sewa dengan PDAM Badung, Perpanjangan II no B.13.032/1639/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 31 Mei 2022	200,00	PDAM Badung	94.500.000,00			94.500.000,00				94.500.000,00		94.500.000,00
162	01.01.03.08.006	000002	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	22.03.06.05.4.00098	Badung/Abiansemal/Desa ayunan	Perjanjian Sewa dengan PDAM Badung, Perpanjangan II no B.13.032/1639/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 31 Mei 2022	300,00	PDAM Badung	141.750.000,00			141.750.000,00				141.750.000,00		141.750.000,00
163	01.01.02.01.005	001255	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.09.4.00091	Ds.Munggu,Kc.Mengwi,Kab.Badung	Perjanjian Sewa dengan Somvir Nomor B.13.032/456/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 16 Februari 2023	1.180,00	Somvir	64.988.500,00			64.988.500,00				64.988.500,00		64.988.500,00
164	01.01.02.01.005	001698	Tanah Sawah Irigasi	22.03.08.02.4.00062	Badung\Kuta Utara\Ds. Canggu	Perjanjian Sewa dengan IB Marhen Nomor B.13.032/1023/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 13 April 2023	3.700,00	IB Marhen	3.028.450.000,00			3.028.450.000,00				3.028.450.000,00		3.028.450.000,00
165	01.01.01.02.003	000041	Tanah Bangunan Gudang	22.03.08.06.4.00083	Badung/Kuta Utara/Desa Tibubeneng	Perjanjian Sewa dengan Shri IB Darmika Marhaen W.P.S No.B.13.032/1031/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 April 2023	3.900,00	Shri IB Darmika Marhaen W.P.S	25.970.100.000,00			25.970.100.000,00				25.970.100.000,00		25.970.100.000,00
166	01.01.01.01.005	000031	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	22.09.02.05.4.00147	Jl. Kapten Tantular Niti Mandala . Kel. Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Timur (Renon)	Perjanjian Sewa dengan DPD Partai Gerindra No. B.13.032/1939/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 10 Agustus 2023	277,00	DPD Partai Gerindra	323.536.000,00			323.536.000,00				323.536.000,00		323.536.000,00
167	01.01.02.01.005	001467	Tanah Sawah Irigasi	22.03.08.02.4.00042	Subak.Canggu/Br.Canggu/Kec. Kuta Utara/Badung	Perjanjian Sewa dengan Rai Irma Santini B.13.032/2415/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 28 Agustus 2023	2.900,00	Rai Irma Santini	798.950.000,00			798.950.000,00				798.950.000,00		798.950.000,00
168	01.01.02.07.001	000001	Tanah Usaha	22.03.05.11.4.00080	Badung\Mengwi\Ds Gulingan	Perjanjian Sewa dengan I Made Sudja No. B.13.032/2313/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 16 Agustus 2023	1.440,00	I Made Sudja	1.900.800.000,00			1.900.800.000,00				1.900.800.000,00		1.900.800.000,00

No	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2025			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2025			Posisi Per 31 Desember 2025		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompatibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompatibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
													Nilai	Nilai	nilai			
169	01.01.02.01.005	001232	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.09.4.00061	Ds.Munggu,Kc.Mengwi,Kab.Badung	Perjanjian Sewa dengan I Dewa Agung Ayu Indriyani No. B.13.032/2438/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 29 Agustus 2023	1.350,00	I Dewa Agung Ayu Indriyani	74.351.250,00			74.351.250,00				74.351.250,00		74.351.250,00
170	01.01.11.05.02	1158	Tanah Sawah Irigasi	22.03.08.06.4.00014	Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Badung	Perjanjian sewa menyewa dengan PT. Bali Bounty No.593.1/4542/UPT.P2.BPKAD tanggal 9 Oktober 2017, Perpanjangan I Perjanjian B.13.032/373/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 8 Februari 2023	3.225,00	PT. Bali Bounty	882.037.500,00			882.037.500,00				882.037.500,00		882.037.500,00
171	01.01.02.02.001	000077	Tanah Tegalan	22.03.05.09.5.00025	Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung	Perjanjian sewa dengan Dewa Made Merta Sedana Nomor B.13.032/3266/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 15 November 2023	845,00	Dewa Made Merta Sedana	46.538.375,00			46.538.375,00				46.538.375,00		46.538.375,00
172	01.01.02.01.005	001703	Tanah Sawah Irigasi	22.03.08.02.4.00060	Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung	Perjanjian sewa dengan Dewa Komang Derdy Antoni Nomor B.13.032/2922/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 9 Oktober 2023	3.080,00	Dewa Komang Derdy Antoni	2.520.980.000,00			2.520.980.000,00				2.520.980.000,00		2.520.980.000,00
173	01.01.01.04.001	000197	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22.03.02.09.4.00021	Jalan Raya Puputan, Niti Mandala, Kelurahan Sumertha Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar	Sewa oleh BPD dengan Akta Notaris No. 14 tanggal 04-09-2023	5.000,00	BPD Bali	5.697.500.000,00			5.697.500.000,00				5.697.500.000,00		5.697.500.000,00
174	01.01.02.02.001	001889	Tanah Tegalan	22.09.03.02.4.00017	Denpasar\Denpasar selatan\Kel. Renon	Perjanjian Sewa dengan PT. Sinar Emas Garuda Sukses No. B.13.032/1791/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 16 Juni 2022 (300m2) Perjanjian Sewa dengan I Dewa Gede Wibawa Putra (600m2), Billy Pandiatama (sebagian 300m2), dan I Ketut Suwandhi B.13.032/1126/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 26 April 2023 (800m2)	2.000,00	PT. Sinar Emas Garuda Sukses, I Dewa Gede Wibawa Putra, Billy Pandiatama dan I Ketut Suwandhi	1.012.000.000,00			1.012.000.000,00				1.012.000.000,00		1.012.000.000,00
175	01.01.02.01.005	001203	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.18.4.00043	Ds.Pererenan,Kec.Mengwi,Kab.Badung	Perjanjian Sewa dengan Pengadilan Barus No.B.13.032/941/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 4 April 2022 (Sewa Sebagian Luas 4880m2) dan Desak Ketut Plavina Dina B.13.032/2332/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 21 Agustus 2023 (1500 m2)	6.380,00	Pengadilan Barus dan Desak Ketut Plavina Dina	236.060.000,00			236.060.000,00				236.060.000,00		236.060.000,00
176	01.01.02.01.005	001699	Tanah Sawah Irigasi	22.03.08.02.4.00061	Badung\Kuta Utara\Ds. Canggu	Perjanjian Sewa dengan Gede Ray Ardian Manchini Yasa Perjanjian Nomor B.13.032/2258/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 10 Agustus 2023 (1500 m2) dan Dr I Ketut Rochineng SH MH Nomor B.13.032/2256/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 10 Agustus 2023 (2980 m2)	4.480,00	Gede Ray Ardian Manchini Yasa dan Dr I Ketut Rochineng SH MH	3.666.880.000,00			3.666.880.000,00				3.666.880.000,00		3.666.880.000,00
177	01.01.02.02.002	000015	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Persil 4	Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung	Perjanjian dengan I Ketut Parsana Nomor B.13.032/2965/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 12 Oktober 2023	800,00	I Ketut Parsana	21.600.000,00			21.600.000,00				21.600.000,00		21.600.000,00
178	01.01.03.01.005	000020	Tanah Lapangan Lainnya	SHP 402	Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung	Perjanjian sewa dengan Komang Gilang Pradnya Taksu Natha no. B.13.032/3525/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2023	195,00	Komang Gilang Pradnya Taksu Natha	156.648.000,00			156.648.000,00				156.648.000,00		156.648.000,00
179	01.01.02.02.001	000005	Tanah Tegalan	22.03.04.04.4.00103	Badung\Kuta Tengah\Kel. Kuta	Perjanjian Sewa dengan Dewa Made Mahayadnya B.13.032/3630/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 31 Juli 2023	2.400,00	Dewa Made Mahayadnya	3.818.400.000,00			3.818.400.000,00				3.818.400.000,00		3.818.400.000,00
180	01.01.02.02.002	000001	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	22.03.04.07.5.00001	Badung\Kuta Selatan\Ds. Unggasan	Perjanjian Sewa dengan PT.Garuda Adhimatra, Perpanjangan I perjanjian nomor B.13.593.1/3987/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 17 Desember 2021	34.700,00	PT.Garuda Adhimatra	13.456.962.000,00			13.456.962.000,00				13.456.962.000,00		13.456.962.000,00

No	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2025			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2025			Posisi Per 31 Desember 2025		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompatibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompatibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
													Nilai	Nilai	nilai			
181	01.01.02.02.002	000014	Bangunan dan Tanah Kosong	22.03.09.05.4.00054	Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung	Perjanjian Sewa Dengan I Gusti Ayu Kade Harry Adhisukmawati,Perjanjian Nomor B.13.000.2.3.2/1552/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 10 Oktober 2024	1.210,00	I Gusti Ayu Kade Harry Adhisukmawati	3.751.000.000,00			3.751.000.000,00				3.751.000.000,00		3.751.000.000,00
182	01.01.03.01.025	000007	Tanah Lapangan Lainnya	22.03.08.06.4.00371	Subak.Tibubeneng/Br.Tibubeneng/Kec.Kuta Utara/Badung	Perjanjian sewa denganKetut Dharma Satria Wicaksana Nomor B.13.032/2228/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 10 Agustus 2023 (seluas 10630) Sewa oleh Pemerintah Desa Tibubeneng B.13.032/3935/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 21 November 2022 (2000 m2)	12.630,00	Ketut Dharma Satria Wicaksana (Hari-Hari Mesari) dan Pemerintah Desa Tibebeneng	3.454.305.000,00			3.454.305.000,00				3.454.305.000,00		3.454.305.000,00
183	01.01.02.01.005	001226	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.09.4.00055	Ds.Munggu,Kc.Mengwi,Kab.Badung	Salinan Akta Notaris No. 4 tanggal 15 Agustus 2024 Sewa Menyewa tanah antara Pemerintah Rrovinsi Bali dengan I Ketut Juliarta	1.330,00	I Ketut Juliarta	73.249.750,00			73.249.750,00				73.249.750,00		73.249.750,00
184	01.01.02.01.005	001249	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.09.4.00080	Ds.Munggu,Kc.Mengwi,Kab.Badung	Salinan Akta Notaris No. 4 tanggal 15 Agustus 2024 Sewa Menyewa tanah antara Pemerintah Rrovinsi Bali dengan I Ketut Juliarta	3.960,00	I Ketut Juliarta	218.097.000,00			218.097.000,00				218.097.000,00		218.097.000,00
185	01.01.02.01.005	001150	Tanah Sawah Irigasi	22.03.04.09.5.00045	Badung\Kuta Selatan\ Kel. Benoa		8.065,00		8.226.300.000,00			8.226.300.000,00				8.226.300.000,00		8.226.300.000,00
186	01.01.02.01.005	001403	Tanah Sawah Irigasi	22.03.06.09.4.00013	Subak.Uma Bun/Br.Angantaka/Kec.Abiansemal/Badung		6.920,00		578.339.000,00			578.339.000,00				578.339.000,00		578.339.000,00
187	01.01.02.01.005	001463	Tanah Sawah Irigasi	22.03.08.02.4.00040	Subak.Canggu/Br.Canggu/Kec. Kuta utara/Badung		6.000,00		1.653.000.000,00			1.653.000.000,00				1.653.000.000,00		1.653.000.000,00
188	01.01.02.01.005	001702	Tanah Sawah Irigasi	22.03.08.02.4.00065	Badung\Kuta Utara\Ds. Canggu		6.700,00		5.483.950.000,00			5.483.950.000,00				5.483.950.000,00		5.483.950.000,00
189	01.01.02.02.001	000020	Tanah Tegalan	22.03.04.09.5.00044	Badung\Kuta Selatan\Kel. Benoa		7.600,00		7.905.000.000,00			7.905.000.000,00		153.000.000,00		7.752.000.000,00		7.752.000.000,00
190	01.01.02.02.001	000033	Tanah Tegalan	22.03.05.02.5.00016	Badung\Mengwi\Ds. Baha		5.151,00		54.471.825,00			54.471.825,00				54.471.825,00		54.471.825,00
191	01.01.02.02.001	000051	Tanah Tegalan	22.03.05.05.4.00013	Badung\Mengwi\Ds. Kapal		5.690,00		403.990.000,00			403.990.000,00				403.990.000,00		403.990.000,00
192	01.01.02.02.001	000173	Tanah Tegalan	22.03.05.13.5.00063	Badung\Mengwi\Ds. Sobangan		5.063,00		43.415.225,00			43.415.225,00				43.415.225,00		43.415.225,00
193	01.01.02.02.001	000405	Tanah Tegalan	22.03.06.14.4.00012	Badung\Abiansemal\Ds. Punggul		7.350,00		69.825.000,00			69.825.000,00				69.825.000,00		69.825.000,00
194	01.01.02.02.001	000422	Tanah Tegalan	22.03.07.04.4.00012	Badung\Petang\Ds. Carangsari		5.240,00		39.300.000,00			39.300.000,00				39.300.000,00		39.300.000,00
195	01.01.02.02.001	000455	Tanah Tegalan	22.03.07.07.4.00012	Badung\Petang\Ds. Getasan		6.705,00		50.287.500,00			50.287.500,00				50.287.500,00		50.287.500,00
196	01.01.02.02.001	000675	Tanah Tegalan	22.05.01.16.4.00001	Gianyar\Gianyar\Ds. Sumita		8.340,00		258.540.000,00			258.540.000,00				258.540.000,00		258.540.000,00
197	01.01.02.02.001	000804	Tanah Tegalan	22.05.05.02.4.000013	Gianyar\Payangan\Ds. Kerta		5.330,00		559.650.000,00			559.650.000,00				559.650.000,00		559.650.000,00
198	01.01.02.02.001	000817	Tanah Tegalan	22.05.05.02.4.00026	Gianyar\Payangan\Ds. Kerta		12.600,00		1.323.000.000,00			1.323.000.000,00				1.323.000.000,00		1.323.000.000,00
199	01.01.02.02.001	000818	Tanah Tegalan	22.05.05.02.4.00027	Gianyar\Payangan\Ds. Kerta		5.510,00		578.550.000,00			578.550.000,00				578.550.000,00		578.550.000,00
200	01.01.02.02.001	000858	Tanah Tegalan	22.05.05.07.4.00003	Gianyar\Payangan\Ds. Melinggih Klod		8.250,00		882.750.000,00			882.750.000,00				882.750.000,00		882.750.000,00
201	01.01.02.02.001	000471	Tanah Tegalan	22.07.01.05.4.00010	Bangli\Bangli\Ds. Kayubihi		8.900,00		351.105.000,00			351.105.000,00				351.105.000,00		351.105.000,00
202	01.01.02.02.001	000472	Tanah Tegalan	22.07.01.08.4.00009	Bangli\Bangli\Ds. Kayubihi		6.000,00		236.700.000,00			236.700.000,00				236.700.000,00		236.700.000,00
203	01.01.02.02.001	000473	Tanah Tegalan	22.07.01.05.4.00022	Bangli\Bangli\Ds. Kayubihi		6.100,00		240.645.000,00			240.645.000,00				240.645.000,00		240.645.000,00
204	01.01.02.02.001	000562	Tanah Tegalan	9	Bangli\Tembuku\Ds. Tembuku		7.930,00		146.308.500,00			146.308.500,00				146.308.500,00		146.308.500,00
205	01.01.02.02.001	000603	Tanah Tegalan	22.04.01.05.4.00007	Buleleng\Gerokgak\Ds. Patas		11.500,00		304.750.000,00			304.750.000,00				304.750.000,00		304.750.000,00
206	01.01.02.01.005	000363	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.02.4.00036	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Timuhun		5.250,00		97.125.000,00			97.125.000,00				97.125.000,00		97.125.000,00
207	01.01.02.01.005	000574	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.11.4.00039	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Nyalian		5.040,00		52.920.000,00			52.920.000,00				52.920.000,00		52.920.000,00
208	01.01.02.01.005	000621	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.08.4.00056	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Banjarangkan		5.150,00		301.275.000,00			301.275.000,00				301.275.000,00		301.275.000,00

No	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2025			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2025			Posisi Per 31 Desember 2025		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompatibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompatibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
													Nilai	Nilai	nilai			
209	01.01.02.01.005	001174	Tanah Sawah Irigasi	22.06.02.01.4.00004	Des.Besan,Kec.Dawan,Kab.Klungkung		7.530,00		199.545.000,00			199.545.000,00				199.545.000,00		199.545.000,00
210	01.01.02.01.005	001175	Tanah Sawah Irigasi	22.06.02.01.4.00005	Des.Besan,Kec.Dawan,Kab.Klungkung		17.320,00		458.980.000,00			458.980.000,00				458.980.000,00		458.980.000,00
211	01.01.02.01.005	001584	Tanah Sawah Irigasi	22.06.01.05.4.00073	Klungkung\Klungkung\Ds. Akah		5.470,00		319.995.000,00			319.995.000,00				319.995.000,00		319.995.000,00
212	01.01.02.02.001	001624	Tanah Tegalan	22.06.02.07.4.00037	Klungkung\Dawan\Ds. Kusamba		6.388,00		169.282.000,00			169.282.000,00				169.282.000,00		169.282.000,00
213	01.01.02.02.001	001637	Tanah Tegalan	22.06.02.08.4.00046	Klungkung\Dawan\Ds. Gunaksa		6.340,00		168.010.000,00			168.010.000,00				168.010.000,00		168.010.000,00
214	01.01.02.02.001	001638	Tanah Tegalan	22.06.02.08.4.00047	Klungkung\Dawan\Ds. Gunaksa		6.445,00		170.792.500,00			170.792.500,00				170.792.500,00		170.792.500,00
215	01.01.02.02.001	001669	Tanah Tegalan	22.06.02.11.4.00012	Klungkung\Dawan\Ds. Paksebali		6.810,00		180.465.000,00			180.465.000,00				180.465.000,00		180.465.000,00
216	01.01.02.07.001	000003	Tanah Usaha	22.09.02.06.4.00089	Jln. Anyelir No. 1 Denpasar		400,00		153.200.000,00			153.200.000,00				153.200.000,00		153.200.000,00
217	01.01.02.01.005	000746	Tanah Sawah Irigasi	22.09.03.03.4.00024	Denpasar\Denpasar selatan\Kel. Panjer		2.053,00		2.132.040.500,00			2.132.040.500,00				2.132.040.500,00		2.132.040.500,00
218	01.01.02.02.001	001305	Tanah Tegalan	22.08.08.07.4.00006	Karangasem\Kubu\Ds. Baturinggit		8.400,00		117.600.000,00			117.600.000,00				117.600.000,00		117.600.000,00
219	01.01.02.02.001	001891	Tanah Tegalan	22.09.03.05.4.00025	Denpasar\Denpasar selatan\Kel. Pedungan		295,00		197.355.000,00			197.355.000,00				197.355.000,00		197.355.000,00
220	01.01.02.02.001	001892	Tanah Tegalan	22.09.03.05.4.00029	Denpasar\Denpasar selatan\Kel. Pedungan		225,00		28.800.000,00			28.800.000,00				28.800.000,00		28.800.000,00
221	01.01.02.02.001	001895	Tanah Tegalan	22.09.03.05.4.00036	Denpasar\Denpasar selatan\Kel. Pedungan		2.288,00		1.988.268.000,00			1.988.268.000,00		457.596.000,00		1.530.672.000,00		1.530.672.000,00
222	01.01.02.02.001	001896	Tanah Tegalan	22.03.03.08.4.00008	Denpasar\Denpasar selatan\Ds. Sanur kauh		2.020,00		1.494.800.000,00			1.494.800.000,00				1.494.800.000,00		1.494.800.000,00
223	01.01.02.02.001	001897	Tanah Tegalan	22.03.03.08.4.00009	Denpasar\Denpasar selatan\Ds. Sanur kauh		4.000,00		2.960.000.000,00			2.960.000.000,00				2.960.000.000,00		2.960.000.000,00
224	01.01.02.03.002	000007	Tanah Kebun Induk	22.08.08.09.4.00083	Kabupaten Karangasem Kecamatan Kubu Desa Tulamben		14.800,00		13.468.000,00			13.468.000,00				13.468.000,00		13.468.000,00
225	01.01.01.04.004	000001	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	22.08.08.09.4.00086/ 22.08.000014147.0	Kab. Karangasem/Kec. Kubu/Desa Tulamben		2.100,00		1.911.000,00			1.911.000,00				1.911.000,00		1.911.000,00
	01.01.01.04.002	000019	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	22.08.08.09.4.00086/ 22.08.000014148.0	Kab. Karangasem/Kec. Kubu/Desa Tulamben		56.700,00		51.597.000,00			51.597.000,00				51.597.000,00		51.597.000,00
	01.01.01.04.002	000020	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	22.08.08.09.4.00086/ 22.08.000014149.0	Kab. Karangasem/Kec. Kubu/Desa Tulamben		16.000,00		14.560.000,00			14.560.000,00				14.560.000,00		14.560.000,00
	01.01.02.02.001	002240	Tanah Tegalan	22.08.08.09.4.00086/ 22.08.000014150.0	Kab. Karangasem/Kec. Kubu/Desa Tulamben		2.400,00		2.184.000,00			2.184.000,00				2.184.000,00		2.184.000,00
	01.01.03.07.011	000007	Tanah untuk Jalan lainnya	22.08.08.09.4.00086/ 22.08.000014146.0	Kab. Karangasem/Kec. Kubu/Desa Tulamben		5.500,00		5.005.000,00			5.005.000,00				5.005.000,00		5.005.000,00
226	01.01.02.02.001	000625	Tanah Tegalan	22.05.01.04.4.00009	Gianyar\Gianyar\Ds. Lebih		350,00		2.502.500,00			2.502.500,00				2.502.500,00		2.502.500,00
227	01.01.02.02.001	001597	Tanah Tegalan	22.06.02.05.4.00050	Klungkung\Dawan\Ds. Pesinggahan		600,00		15.900.000,00			15.900.000,00				15.900.000,00		15.900.000,00
228	01.01.02.02.001	000004	Tanah Tegalan	22.03.04.04.4.00102	Badung\Kuta Tengah\Kel. Kuta		1.420,00		1.065.000.000,00			1.065.000.000,00				1.065.000.000,00		1.065.000.000,00
229	01.01.01.04.001	000064	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22.09.02.04.4.000036	Denpasar\Denpasar Timur\Ds. Dangin Puri Kangin		1.269,00		892.741.500,00			892.741.500,00				892.741.500,00		892.741.500,00
230	01.01.01.01.006	000002	Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalaow/Cottage	22.02.01.07.5.00004	Des.Candikuning/Kab.Tabanan		17.805,00		1.488.052.875,00			1.488.052.875,00				1.488.052.875,00		1.488.052.875,00
231	01.01.02.01.005	000427	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.06.4.00028	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Takmung		3.220,00		148.120.000,00			148.120.000,00				148.120.000,00		148.120.000,00
232	01.01.02.01.005	000434	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.06.4.00035	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Takmung		927,00		42.642.000,00			42.642.000,00				42.642.000,00		42.642.000,00
233	01.01.02.01.005	000435	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.06.4.00036	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Takmung		440,00		20.240.000,00			20.240.000,00				20.240.000,00		20.240.000,00
234	01.01.02.01.005	000436	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.06.4.00037	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Takmung		1.370,00		63.020.000,00			63.020.000,00				63.020.000,00		63.020.000,00
235	01.01.02.01.005	000437	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.06.4.00038	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Takmung		1.555,00		71.530.000,00			71.530.000,00				71.530.000,00		71.530.000,00
236	01.01.02.01.005	000438	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.06.4.00039	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Takmung		1.645,00		75.670.000,00			75.670.000,00				75.670.000,00		75.670.000,00
237	01.01.02.01.005	000439	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.06.4.00040	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Takmung		2.084,00		95.864.000,00			95.864.000,00				95.864.000,00		95.864.000,00

No	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2025			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2025			Posisi Per 31 Desember 2025		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompatibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompatibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
													Nilai	Nilai	nilai			
238	01.01.02.01.005	000440	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.06.4.00041	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Takmung		824,00		37.904.000,00			37.904.000,00				37.904.000,00		37.904.000,00
239	01.01.02.01.005	000441	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.06.4.00042	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Takmung		2.103,00		96.738.000,00			96.738.000,00				96.738.000,00		96.738.000,00
240	01.01.02.01.005	000442	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.06.4.00043	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Takmung		1.907,00		87.722.000,00			87.722.000,00				87.722.000,00		87.722.000,00
241	01.01.02.01.005	000443	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.06.4.00044	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Takmung		1.783,00		82.018.000,00			82.018.000,00				82.018.000,00		82.018.000,00
242	01.01.02.01.005	000444	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.06.4.00045	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Takmung		1.035,00		47.610.000,00			47.610.000,00				47.610.000,00		47.610.000,00
243	01.01.02.01.005	000453	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.06.4.00054	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Takmung		2.100,00		96.600.000,00			96.600.000,00				96.600.000,00		96.600.000,00
244	01.01.02.01.005	000454	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.06.4.00055	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Takmung		1.650,00		75.900.000,00			75.900.000,00				75.900.000,00		75.900.000,00
245	01.01.02.01.005	000455	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.06.4.00056	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Takmung		3.715,00		170.890.000,00			170.890.000,00				170.890.000,00		170.890.000,00
246	01.01.02.01.005	000456	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.06.4.00057	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Takmung		2.740,00		126.040.000,00			126.040.000,00				126.040.000,00		126.040.000,00
247	01.01.02.01.005	000457	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.06.4.00058	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Takmung		2.825,00		129.950.000,00			129.950.000,00				129.950.000,00		129.950.000,00
248	01.01.02.01.005	000458	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.06.4.00059	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Takmung		1.280,00		58.880.000,00			58.880.000,00				58.880.000,00		58.880.000,00
249	01.01.02.01.005	000459	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.06.4.00060	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Takmung		809,00		37.214.000,00			37.214.000,00				37.214.000,00		37.214.000,00
250	01.01.02.01.005	000460	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.06.4.00061	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Takmung		1.310,00		60.260.000,00			60.260.000,00				60.260.000,00		60.260.000,00
251	01.01.02.01.005	001200	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.18.4.00040	Ds.Pererenan,Kec.Mengwi,Kab.Badung		2.120,00		78.440.000,00			78.440.000,00				78.440.000,00		78.440.000,00
252	01.01.02.01.005	001202	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.18.4.00042	Ds.Pererenan,Kc.Mengwi,Kab.Badung		435,00		16.095.000,00			16.095.000,00				16.095.000,00		16.095.000,00
253	01.01.02.01.005	001204	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.18.4.00037	Ds.Pererenan,Kc.Mengwi,Kab.Badung		670,00		24.790.000,00			24.790.000,00				24.790.000,00		24.790.000,00
254	01.01.02.01.005	001205	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.18.4.00038	Ds.Pererenan,Kc.Mengwi,Kab.Badung		2.070,00		76.590.000,00			76.590.000,00				76.590.000,00		76.590.000,00
255	01.01.01.04.001	000025	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22.01.02.17.4.00078	Jembrana\Negara\Ds. Dauh Waru		500,00		80.000.000,00			80.000.000,00				80.000.000,00		80.000.000,00
256	01.01.01.04.003	000021	Tanah Bangunan Rumah Sakit	shp 8	Jln.Letda Ida Bagus Puja,Ds.Banjarangkan,Kab.Klungkung		100,00		5.850.000,00			5.850.000,00				5.850.000,00		5.850.000,00
257	01.01.02.01.003	000008	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	shp 2	Ds. Demulih,Susut,Kab.Bangli		150,00		7.267.500,00			7.267.500,00				7.267.500,00		7.267.500,00
258	01.01.01.04.001	000101	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22.04.07.01.4.00033	Ds.Bungkulan,Kec.Sawan Singaraja		2.400,00		147.600.000,00			147.600.000,00				147.600.000,00		147.600.000,00
259	01.01.01.04.001	000139	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22.01.02.19.4.00003	Br.Tengah,Air Kuning, Kab. Negara		1.070,00		63.130.000,00			63.130.000,00				63.130.000,00		63.130.000,00
260	01.01.03.06.005	000001	Tanah Lapangan Terbang Pendidikan	22.04.01.12.4.00067	Buleleng\Gerokgak\Ds. Sumberkima		13.560,00		1.647.540.000,00			1.647.540.000,00				1.647.540.000,00		1.647.540.000,00
261	01.01.02.02.001	002192	Tanah Tegalan	22.04.09.02.4.00008	Buleleng\Tejakula\Ds. Sambirenteng		200,00		33.300.000,00			33.300.000,00				33.300.000,00		33.300.000,00
262	01.01.02.01.005	001604	Tanah Sawah Irigasi	22.04.02.09.4.00001	Buleleng\Seririt\Ds. Tangguwisia		1.000,00		171.075.000,00			171.075.000,00				171.075.000,00		171.075.000,00
263	01.01.01.01.012	000004	Tanah Kaveling (dst)	1	Ds. Kerobokan/Sawan/buleleng		250,00		1.248.750.000,00			1.248.750.000,00				1.248.750.000,00		1.248.750.000,00
264	01.01.01.04.001	000175	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	jungutan kec. bebandem kab. karangasem		300,00		735.000,00			735.000,00				735.000,00		735.000,00
265	01.01.02.02.001	001603	Tanah Tegalan	22.06.02.05.4.00056	Klungkung\Dawan\Ds. Pesinggahan		897,00		23.770.500,00			23.770.500,00				23.770.500,00		23.770.500,00
266	01.01.01.04.026	000007	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	shp 4	Kec. Kintamani, Ds. Kedisan,Kab Bangli		50,00		1.075.000,00			1.075.000,00				1.075.000,00		1.075.000,00
267	01.01.01.01.012	000005	Tanah Kaveling (dst)	2	Buleleng\Sawan\Ds. Kerobokan		250,00		1.248.750.000,00			1.248.750.000,00				1.248.750.000,00		1.248.750.000,00
268	01.01.02.02.002	000002	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	22.03.05.19.4.00069	Badung/Mengwi/Desa Cemagi		480,00		40.116.000,00			40.116.000,00				40.116.000,00		40.116.000,00
269	01.01.02.01.005	001693	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.09.4.00116	Badung\Mengwi\Ds. Munggu		170,00		112.370.000,00			112.370.000,00				112.370.000,00		112.370.000,00
270	01.01.02.02.001	002187	Tanah Tegalan	22.05.02.09.4.00042	Gianyar/Kec. Blahbatuh/Desa Bona (Banjar Prajamukti)		1.780,00		48.060.000,00			48.060.000,00				48.060.000,00		48.060.000,00

No	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2025			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2025			Posisi Per 31 Desember 2025		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompatibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompatibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
													Nilai	Nilai	nilai			
271	01.01.02.02.001	001156	Tanah Tegalan	22.08.03.03.4.00015	Karangasem\Rendang\Ds. Rendang		1.485,00		3.638.250,00			3.638.250,00				3.638.250,00		3.638.250,00
272	01.01.02.02.001	001193	Tanah Tegalan	22.08.03.05.4.00017	Karangasem\Rendang\Ds. Nongan		15.440,00		37.828.000,00			37.828.000,00				37.828.000,00		37.828.000,00
273	01.01.02.02.002	000010	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	22.02.03.08.4.00024	Tabanan\Kerambitan\Ds. Meliling		310,00		24.800.000,00			24.800.000,00				24.800.000,00		24.800.000,00
274	01.01.02.02.002	000011	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	22.02.03.08.4.00025	Tabanan\Kerambitan\Ds. Meliling		1.740,00		139.200.000,00			139.200.000,00				139.200.000,00		139.200.000,00
275	01.01.02.02.001	002186	Tanah Tegalan	22.05.02.09.4.00045	Gianyar/Kec. Blahbatuh/Desa Bona (Banjar Prajamukti)		1.500,00		40.500.000,00			40.500.000,00				40.500.000,00		40.500.000,00
276	01.01.02.01.005	001557	Tanah Sawah Irigasi	22.05.03.08.4.00014	Gianyar\Sukawati\Ds. Batuan		1.801,00		585.325.000,00			585.325.000,00				585.325.000,00		585.325.000,00
277	01.01.02.01.005	001715	Tanah Sawah Irigasi	22.03.08.06.4.00359	Badung\Kuta Utara\Ds. Tibubeneng		5.720,00		38.089.480.000,00			38.089.480.000,00				38.089.480.000,00		38.089.480.000,00
278	01.01.02.02.001	002195	Tanah Tegalan	22.04.02.03.4.00003	Buleleng\Seririt\Ds. Tangguwisia		1.400,00		239.505.000,00			239.505.000,00				239.505.000,00		239.505.000,00
279	01.01.01.02.003	000057	Tanah Bangunan Guda	22.06.04.13.4.00046	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Ped		150,00		6.686.250,00			6.686.250,00				6.686.250,00		6.686.250,00
280	01.01.02.01.005	000445	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.06.4.00046	Pantai Lepang Klungkung\Banjarangkan\Ds. Takmung		2.855,00		39.970.000,00			39.970.000,00				39.970.000,00		39.970.000,00
281	01.01.02.01.005	000446	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.06.4.00047	pantai Lepang Klungkung\Banjarangkan\Ds. Takmung		3.120,00		43.680.000,00			43.680.000,00				43.680.000,00		43.680.000,00
282	01.01.02.01.005	000449	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.06.4.00050	pantai Lepang Klungkung\Banjarangkan\Ds. Takmung		3.950,00		55.300.000,00			55.300.000,00				55.300.000,00		55.300.000,00
283	01.01.02.01.005	000450	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.06.4.00051	Pantai Lepang Klungkung\Banjarangkan\Ds. Takmung		1.600,00		22.400.000,00			22.400.000,00				22.400.000,00		22.400.000,00
284	01.01.02.01.005	000451	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.06.4.00052	Pantai Lepang Klungkung\Banjarangkan\Ds. Takmung		600,00		8.400.000,00			8.400.000,00				8.400.000,00		8.400.000,00
285	01.01.02.01.005	000452	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.06.4.00053	Pantai Lepang Klungkung\Banjarangkan\Ds. Takmung		770,00		10.780.000,00			10.780.000,00				10.780.000,00		10.780.000,00
Jumlah Aset Tetap Gedung Dikerjasamakan							**2.670,00**		**5.839.731.638,00**	**(3.327.710.422,97)**	**19.074.369,00**	**5.839.731.638,00**		**-**	**19.074.369,00**	**5.839.731.638,00**	**- 3.424.276.155,97**	**2.415.455.482,03**
1	03.01.01.01.001	000025	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jl. Ahmad Yani Denpasar (Gedung Wanita Karya Graha)	Perpanjangan I Perjanjian Sewa No. B.13.593.1/1490/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 2 Juni 2021 dan Perjanjian No. B.13.593.1/3616/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 23 November 2021	1106	PT. Sinar Bali Media Cemerlang, PT. Bio Green	2.169.149.140,00	-827.891.920,97		2.169.149.140,00				2.169.149.140,00	-871.274.902,97	1.297.874.237,03
2	03.01.01.09.001	000007	Bangunan Gedung		Jalan Pudak	Perjanjian Sewa No.	70	DPW Ikatan Media	33.675.000,00	-33.675.000,00		33.675.000,00				33.675.000,00	-33.675.000,00	-
3	03.01.01.01.001	000040	Bangunan Gedung Kantor Permanen		jln. IR. Juanda	Perpanjangan I Perjanjian Sewa No. 593.1/101/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 11 Januari 2021	70.8	DPD Partai Demokrat	153.049.776,00	-89.023.957,00		153.049.776,00				153.049.776,00	-92.084.953,00	60.964.823,00
4	03.01.01.01.001	000041	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jln. Juanda No. 2 renon Denpasar	Perpanjangan I Perjanjian Sewa No. 593.1/101/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 11 Januari 2021	270.15	DPD Partai Demokrat	861.112.562,00	-500.880.479,00		861.112.562,00				861.112.562,00	-518.102.730,00	343.009.832,00
5	03.01.01.01.001	000085	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jln. Pudak No. 3 A Denpasar	Perjanjian Sewa No. B.13.593.1/1389/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 2-6-2021	100	Ikatan Doktor Ekonomi Udayana (IDEYANA)	295.700.000,00	-119.998.377,00		295.700.000,00				295.700.000,00	-126.777.861,00	168.922.139,00
6	03.01.01.01.001	000054	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jl. Imambonjol Km.7 Denpasar	Perjanjian Sewa No. 593.1/1269/UPTD.PBMD tanggal 10 Juni 2019	120	Gana Pramananda Sudibya	295.680.000,00	-207.468.800,00		295.680.000,00				295.680.000,00	-213.382.400,00	82.297.600,00
7	03.01.01.08.001	000004	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen		Jln.Hayam Wuruk No.151 Denpasar	Perpanjangan II No. B.13.032/3951/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 21 November 2022		PT.Klinik Semesta Mandiri	37.000.000,00	-37.000.000,00		37.000.000,00				37.000.000,00	-37.000.000,00	-
8	03.01.01.01.001	000087	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jln. Cok Agung Tresna Renon Denpasar	Perpanjangan I No. B.13.032/3204/UPTD.PBMD.BPKAD tanggal 30 September 2022	150	Bali Ekspres Intermedia	144.202.000,00	-75.225.377,00		144.202.000,00				144.202.000,00	-78.109.417,00	66.092.583,00
9	03.01.01.14.001	000001	Gedung Garasi/Pool Permanen		Jln. Moh. Yamin Denpasar Renon	perpanjangan II nomor 593,1/2020/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27 Oktober 2020	369	A.A. Ngurah Anom ST			16.081.369,00	-			16.081.369,00	-	0,00	-
10	03.01.01.01.001	000014	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jln.Hayam Wuruk No.151 Denpasar	Perpanjangan II No. B.13.032/3951/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 21 November 2022	200	PT.Klinik Semesta Mandiri			2.993.000,00	-			2.993.000,00	-	0,00	-

No	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2025			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2025			Posisi Per 31 Desember 2025		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompatibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompatibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
													Nilai	Nilai	nilai			
11	03.01.01.12.004	000001	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)		Jln. Anyelir No. 1 Dps	Perjanjian Sewa Nomor :B.13.032/2665/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 15 September2023	100	I Dewa Nyoman Rai Dharmadi	25.000.000,00	-24.041.667,00		25.000.000,00				25.000.000,00	-24.541.667,00	458.333,00
12	03.01.01.01.001	000088	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jalan Akasia Nomor 2 Denpasar	Perjanjian Sewa No. 13.032/2157/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 31 Juli 2023	158.95	Perumda Kerthi Bali Santhi	77.739.000,00	-60.765.985,00		77.739.000,00				77.739.000,00	-62.320.765,00	15.418.235,00
13	03.01.01.01.001	000008	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jalan Kamboja 27 Denpasar	-	330	-	984.044.160,00	-984.044.160,00		984.044.160,00				984.044.160,00	-984.044.160,00	-
14	03.01.01.01.001	000009	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jalan Kamboja No. 27 Dps	-	225	-	763.380.000,00	-367.694.700,00		763.380.000,00				763.380.000,00	-382.962.300,00	380.417.700,00

Rincian Kewajiban
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

Kode/Nama Akun Utang			Piutang Per 1 Januari 2025 (Rp)	Koreksi Saldo Awal		Jumlah Setelah KSA	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Des 2025
				Bertambah	Berkurang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1-KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.1.01-Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.1.01.01-Utang Taspen	3.056.472.412,70	0,00	0	3.056.472.412,70	0,00	3.056.472.412,70	0
	2.1.01-Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Total		**3.056.472.412,70**	**0,00**	**0**	**3.056.472.412,70**	**0,00**	**3.056.472.412,70**	**0**
	2.1.04-Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	2.1.04.01-Bagian Lancar Utang Jangka	243.464.798.088,00	0	0	243.464.798.088,00	243.464.798.088,00	243.464.798.088,00	243.464.798.088,00
	2.1.04-Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Total		**243.464.798.088,00**	**0**	**0**	**243.464.798.088,00**	**243.464.798.088,00**	**243.464.798.088,00**	**243.464.798.088,00**
	2.1.05-Pendapatan Diterima Dimuka	2.1.05.01-Setoran Kelebihan Pembayaran	4.290.844.736,53	0	0	4.290.844.736,53	1.267.004.628,63	4.256.849,12	5.553.592.516,04
		2.1.05.04-Pendapatan Diterima Dimuka-	17.411.507.438,62	0,00	2.228.337,87	17.409.279.100,75	496.436.031.634,00	5.233.553.457,27	508.611.757.277,48
	2.1.05-Pendapatan Diterima Dimuka Total		**21.702.352.175,15**	**0,00**	**2.228.337,87**	**21.700.123.837,28**	**497.703.036.262,63**	**5.237.810.306,39**	**514.165.349.793,52**
	2.1.06-Utang Belanja	2.1.06.01-Utang Belanja Pegawai	101.054.700.228,54	0,00	318.240.937,94	100.736.459.290,60	92.925.327.343,70	102.081.440.765,57	91.580.345.868,73
		2.1.06.02-Utang Belanja Barang dan Jasa	27.529.724.017,50	47.366.000,00	0,00	27.577.090.017,50	38.844.635.113,06	36.189.843.568,84	30.231.881.561,72
		2.1.06.05-Utang Belanja Hibah	0	0	0	0,00	0	0,00	0
		2.1.06.07-Utang Belanja Modal Peralatan	0	0	0	0,00	1.580.232.319,00	0,00	1.580.232.319,00
		2.1.06.08-Utang Belanja Modal Gedung	315.384.317,20	0	2.972,00	315.381.345,20	0,00	315.381.345,20	0,00
		2.1.06.09-Utang Belanja Modal Jalan,	0	0	0	0,00	1.143.700.000,00	0,00	1.143.700.000,00
		2.1.06.10-Utang Belanja Aset Tetap	0	0	0	0,00	1.964.700.000,00	0,00	1.964.700.000,00
		2.1.06.12-Utang Belanja Bagi Hasil	310.684.715.252,00	0	0	310.684.715.252,00	39.970.590.091,00	310.684.715.252,00	39.970.590.091,00
		2.1.06.13-Utang Belanja Bantuan	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2.1.06-Utang Belanja Total		**439.584.523.815,24**	**47.366.000,00**	**318.243.909,94**	**439.313.645.905,30**	**176.429.184.866,76**	**449.271.380.931,61**	**166.471.449.840,45**
2.1-KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Total			**707.808.146.491,09**	**47.366.000,00**	**320.472.247,81**	**707.535.040.243,28**	**917.597.019.217,39**	**701.030.461.738,70**	**924.101.597.721,97**
2.2-KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	2.2.01-Utang kepada Pemerintah Pusat	2.2.01.01-Utang atas Penerusan Pinjaman	852.126.364.781,00	0	0	852.126.364.781,00	0	243.464.798.088,00	608.661.566.693,00
	2.2.01-Utang kepada Pemerintah Pusat Total		**852.126.364.781,00**	**0**	**0**	**852.126.364.781,00**	**0**	**243.464.798.088,00**	608.661.566.693,00
	2.2.03-Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	2.2.03.03-Utang kepada Lembaga	3.513.765.361,49	0	0	3.513.765.361,49	653.383.648,16	0,00	4.167.149.009,65
	2.2.03-Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Total		**3.513.765.361,49**	**0**	**0**	**3.513.765.361,49**	**653.383.648,16**	-	4.167.149.009,65
2.2-KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Total			**855.640.130.142,49**	**0,00**	**0,00**	**855.640.130.142,49**	**653.383.648,16**	**243.464.798.088,00**	**612.828.715.702,65**
TOTAL UTANG			**1.563.448.276.633,58**	**47.366.000,00**	**320.472.247,81**	**1.563.175.170.385,77**	**918.250.402.865,55**	**944.495.259.826,70**	**1.536.930.313.424,62**

Pendapatan Diterima Dimuka
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

Kode/Nama Akun	OPD	Keterangan (Kategori PDD)/Aset yang disewa)	Nama Perusahaan/Perorangan Yang Menyewa	Lokasi	Nomor SK Perjanjian	Periode Pembayaran PDD		Jumlah Diterima (Rp)	Jumlah Hari atas Pembayaran	Nilai Per/Hari (Rp)	Saldo Awal 2025 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)		Saldo setelah Koreksi Saldo Awal (Rp)	Menjadi Bagian Piutang (Case Khusus) dan Dihitung di kertas kerja berbeda	Jumlah Hari Pengakuan PDD di Tahun 2025	Pendapatan LO Tahun 2025 dari PDD (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 (Rp)
						Mulai	Berakhir					Bertambah	Berkurang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1.05.01-Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III																		
	Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM	TKA	CYRIL OBOJTEK	PT. OCEAN ADVENTURE DIVE		01/02/2024	31/01/2025	18.060.000,00	366	49.344,26	1.529.672,13	0	0	1.529.672,13		31	1.529.672,13	0
			CYRIL OBOJTEK	ATLANTIS INTERNATIONAL, PT		01/02/2024	31/01/2025	18.060.000,00	366	49.344,26	1.529.672,13	0	0	1.529.672,13		31	1.529.672,13	0
			AMY HELENA BENNET	PT. COMPLETE ISLAND LIVING		19/01/2024	18/01/2025	18.420.000,00	366	50.327,87	905.901,64	0	0	905.901,64		18	905.901,64	0
			CALEB CHAPELET	PT. PLASTIC BANK INDONESIA		19/01/2024	18/01/2025	18.420.000,00	366	50.327,87	905.901,64	0	0	905.901,64		18	905.901,64	0
			MACHANDO DE ANDRADE JOAO FELIPE	PT. RUMAH TORAJA BAMBU		01/01/2024	31/12/2025	18.660.000,00	731	25.526,68	9.317.236,66	0	0	9.317.236,66		365	9.317.236,66	0
			AMICHAI SHLOMO GANIEL	PT. PURI SARI LESTARI		11/01/2024	10/01/2025	18.360.000,00	366	50.163,93	501.639,34	0	0	501.639,34		10	501.639,34	0
			MICHAEL CHRISTOPHER KING	PT. BUMI MATA LINDO		05/01/2024	04/01/2025	18.360.000,00	366	50.163,93	200.655,74	0	0	200.655,74		4	200.655,74	0
			VALENTINA RAMIREZ OCHOA	PT. APNEA BALI FREEDIVING		30/01/2024	29/01/2025	18.360.000,00	366	50.163,93	1.454.754,10	0	0	1.454.754,10		29	1.454.754,10	0
			LIZA MARIE GERREYN	REGIONAL SALES MANAGER		15/01/2024	14/01/2025	18.420.000,00	366	50.327,87	704.590,16	0	0	704.590,16		14	704.590,16	0
			JESUS GISBERT CARBONELL	HOTEL PANDAN ARUM, PT.		15/01/2024	14/01/2025	18.300.000,00	366	50.000,00	700.000,00	0	0	700.000,00		14	700.000,00	0
			ANNA POZNYAK	PT. ORIENTAL BALI CONSULTING		29/01/2024	28/01/2025	18.240.000,00	366	49.836,07	1.395.409,84	0	0	1.395.409,84		28	1.395.409,84	0
			YUMIKO MORISHIGE	PT. BALI GALATEYA		20/01/2024	19/01/2025	18.180.000,00	366	49.672,13	943.770,49	0	0	943.770,49		19	943.770,49	0
			DAVID MARCUS MARTIN NUETZEL	DESTINATION ASIA, PT.		20/01/2024	19/01/2025	18.240.000,00	366	49.836,07	946.885,25	0	0	946.885,25		19	946.885,25	0
			NICOLAS FRANCOIS	CONCEPTS SELAM INDONESIA, PT		05/01/2024	04/01/2025	18.300.000,00	366	50.000,00	200.000,00	0	0	200.000,00		4	200.000,00	0
			XAVIER SEBASTIEN MARTINEAU	PT. FRENCH KISS DIVERS		17/02/2024	16/02/2025	18.360.000,00	366	50.163,93	2.357.704,92	0	0	2.357.704,92		47	2.357.704,92	0
			EMMA JO ROSS	PT. ELEVATION BARN INDONESIA		22/01/2024	23/01/2025	18.180.000,00	368	49.402,17	1.136.250,00	0	0	1.136.250,00		23	1.136.250,00	0
			EVGENY FEKLISTOV	SHAMBHALA PAYANGAN INDAH, PT.		20/01/2024	19/01/2025	18.180.000,00	366	49.672,13	943.770,49	0	0	943.770,49		19	943.770,49	0
			VALENTINA TSURIKOVA	PT. BALI BUSINESS CONSULTING		22/01/2024	21/01/2025	18.240.000,00	366	49.836,07	1.046.557,38	0	0	1.046.557,38		21	1.046.557,38	0
			KIRAN BEENA VIJAY	INDAH PERMATA PULAU, PT		20/01/2024	19/01/2025	18.240.000,00	366	49.836,07	946.885,25	0	0	946.885,25		19	946.885,25	0
			ANNA MARIE RICHARDSON	PT. TIRTA SEMARA		20/02/2024	19/02/2025	18.240.000,00	366	49.836,07	2.491.803,28	0	0	2.491.803,28		50	2.491.803,28	0
			RANDOLF KEVIN KLOER	BALI HOMES MANAJEMEN, PT		23/02/2024	22/02/2025	18.120.000,00	366	49.508,20	2.623.934,43	0	0	2.623.934,43		53	2.623.934,43	0
			PANG YOON HWA	PT. PURI ZUQNI		11/02/2024	10/02/2025	18.120.000,00	366	49.508,20	2.029.836,07	0	0	2.029.836,07		41	2.029.836,07	0
			EDWARD ARTHUR GRIFFITH	PT. ORIENT CONSULTING INDONESIA		31/01/2024	30/01/2025	18.120.000,00	366	49.508,20	1.485.245,90	0	0	1.485.245,90		30	1.485.245,90	0
			KISHAN SINGH	QUEENS TANDOOR, PT.		20/01/2024	19/01/2025	18.120.000,00	366	49.508,20	940.655,74	0	0	940.655,74		19	940.655,74	0
			CHILKIT PAREEK	QUEENS TANDOOR, PT.		14/01/2024	13/01/2025	18.120.000,00	366	49.508,20	643.606,56	0	0	643.606,56		13	643.606,56	0
			YONES RAHMATI	PT. MACHINE INSPIRED ART		07/01/2024	06/01/2025	18.120.000,00	366	49.508,20	297.049,18	0	0	297.049,18		6	297.049,18	0
			SEAN CHRISTOPER FONTE	BALI GIRI KENCANA, PT		15/01/2024	14/01/2025	18.060.000,00	366	49.344,26	690.819,67	0	0	690.819,67		14	690.819,67	0
			CAMILLA CHAIM HUI LEE	BALI GIRI KENCANA, PT		30/01/2024	29/01/2025	18.060.000,00	366	49.344,26	1.430.983,61	0	0	1.430.983,61		29	1.430.983,61	0
			PAOLA ZANCANARO	NAMU CEMPAKA BALI, PT.		03/03/2024	02/03/2025	18.240.000,00	365	49.972,60	3.048.328,77	0	0	3.048.328,77		61	3.048.328,77	0
			NARENDER SINGH	QUEENS OF INDIA, PT.		05/01/2024	04/01/2025	18.240.000,00	366	49.836,07	199.344,26	0	0	199.344,26		4	199.344,26	0
			JULIEN ALBERIC R BOGAERTS	CONCEPTS SELAM INDONESIA, PT.		13/01/2024	12/07/2025	9.120.000,00	547	16.672,76	3.217.842,78	0	0	3.217.842,78		193	3.217.842,78	0
			KAMAL JEET SINGH	PT BOLLYWOOD INDIAN CUISINE		19/01/2024	18/01/2025	18.240.000,00	366	49.836,07	897.049,18	0	0	897.049,18		18	897.049,18	0
			MARAT ESTEMESOV	PT. BALI FINC CONSULTING		13/01/2024	12/01/2025	18.240.000,00	366	49.836,07	598.032,79	0	0	598.032,79		12	598.032,79	0
			IVAN DAVID LAVELLE	PT PUTRA SAMUDERA MENYELAM		16/02/2024	15/02/2025	18.240.000,00	366	49.836,07	2.292.459,02	0	0	2.292.459,02		46	2.292.459,02	0
			EKATERINA DEMENTEVA	PT. BALI INVESTMENT SFG		09/02/2024	08/02/2025	18.240.000,00	366	49.836,07	1.943.606,56	0	0	1.943.606,56		39	1.943.606,56	0
			TEJADA EDWIN ALEX LORICO	PT. MILLIE UTAMA SAKTI		15/01/2024	14/01/2025	18.240.000,00	366	49.836,07	697.704,92	0	0	697.704,92		14	697.704,92	0
			CARL ERIKSON MONCAYO GICA	PT. SHAN RESTORAN BALI		06/02/2024	05/02/2025	18.240.000,00	366	49.836,07	1.794.098,36	0	0	1.794.098,36		36	1.794.098,36	0
			PAULO MARTIN MONCAYO GICA	PT. MILLIE UTAMA SAKTI		09/02/2024	08/02/2025	18.240.000,00	366	49.836,07	1.943.606,56	0	0	1.943.606,56		39	1.943.606,56	0
			GEORGIE EPHRAIM EWTON	PT. MILLIE UTAMA SAKTI		04/02/2024	03/02/2025	18.240.000,00	366	49.836,07	1.694.426,23	0	0	1.694.426,23		34	1.694.426,23	0
			NATHALIE MARY HARVEY	PT. BALILOCATIONS		06/03/2024	05/03/2025	18.240.000,00	365	49.972,60	3.198.246,58	0	0	3.198.246,58		64	3.198.246,58	0
			ALEXANDR SAVITSKII	PT. BALI YOGA PROFESIONAL		17/02/2024	16/02/2025	18.360.000,00	366	50.163,93	2.357.704,92	0	0	2.357.704,92		47	2.357.704,92	0
			RAM SINGH	PT PETANG RETREAT CENTER		29/01/2024	28/01/2025	18.360.000,00	366	50.163,93	1.404.590,16	0	0	1.404.590,16		28	1.404.590,16	0
			DANIELLE FRANCES WAGNER	SURYA MIMPI, PT.		06/02/2024	05/02/2025	18.360.000,00	366	50.163,93	1.805.901,64	0	0	1.805.901,64		36	1.805.901,64	0
			BETRAND MARIE JACQUES MESLIN	LIMAJARI INTERBHUANA, PT.		25/02/2024	24/02/2025	18.360.000,00	366	50.163,93	2.759.016,39	0	0	2.759.016,39		55	2.759.016,39	0
			NICOLAS JEAN PAUL DENIS PATRICK SENES	BALI GIRIKENCANA, PT.		27/02/2024	26/02/2025	18.360.000,00	366	50.163,93	2.859.344,26	0	0	2.859.344,26		57	2.859.344,26	0
			MATTHEW SCOTT YOUNG	AUTOGRILL SERVICES INDONESIA, PT.		24/03/2024	23/03/2025	18.360.000,00	365	50.301,37	4.124.712,33	0	0	4.124.712,33		82	4.124.712,33	0
			NAOKO FUJIKAWA	PT. HARMONI BALI SEJAHTERA		29/01/2024	28/01/2025	18.360.000,00	366	50.163,93	1.404.590,16	0	0	1.404.590,16		28	1.404.590,16	0
			GRIGORII BURKOV	PT. LOTUS BALI CONSULTING		23/02/2024	22/02/2025	18.360.000,00	366	50.163,93	2.658.688,52	0	0	2.658.688,52		53	2.658.688,52	0
			NICOLAS CHARLY MARIE PEILLON BENOIT	PT. FRENCH KISS DIVERS		15/02/2024	14/02/2025	18.360.000,00	366	50.163,93	2.257.377,05	0	0	2.257.377,05		45	2.257.377,05	0
			CLOE MALLET	PT. FRENCH KISS DIVERS		27/02/2024	26/02/2025	18.360.000,00	366	50.163,93	2.859.344,26	0	0	2.859.344,26		57	2.859.344,26	0
			HERBERT MARLIN WATTS	PT. ANUGRAH MERTA SARI SEDANA		19/02/2024	18/02/2025	18.420.000,00	366	50.327,87	2.466.065,57	0	0	2.466.065,57		49	2.466.065,57	0
			STEFANIE NADINE BARTHELMESS	PT. PURE DIVE RESORT		16/02/2024	15/02/2025	18.420.000,00	366	50.327,87	2.315.081,97	0	0	2.315.081,97		46	2.315.081,97	0
			RAMA GRANT WATTS	ANUGRAH MERTA SARI SEDANA, PT.		30/01/2024	29/01/2025	18.540.000,00	366	50.655,74	1.469.016,39	0	0	1.469.016,39		29	1.469.016,39	0
			DEEPAK MEHTA	INDIIA BALI JAYA, PT.		29/02/2024	28/02/2025	18.540.000,00	366	50.655,74	2.988.688,52	0	0	2.988.688,52		59	2.988.688,52	0
			MANSOUR GRAND	PT. EMERHUB EVENT MANAGEMENT		02/03/2024	01/03/2025	18.540.000,00	365	50.794,52	3.047.671,23	0	0	3.047.671,23		60	3.047.671,23	0
			DAVINA JAYNE STEPHENS	ANUGRAH MERTA SARI SEDANA, PT		24/03/2024	23/03/2025	18.540.000,00	365	50.794,52	4.165.150,68	0	0	4.165.150,68		82	4.165.150,68	0
			LINO ALBERTO DE ZORDO	SARAN ABADI UATAMA, PT.		15/02/2024	14/02/2025	18.540.000,00	366	50.655,74	2.279.508,20	0	0	2.279.508,20		45	2.279.508,20	0
			CHRISTOPHER LAWRENCE BAILEY	EAST INDO FAIR TRADING, PT.		08/03/2024	07/03/2025	18.540.000,00	365	50.794,52	3.352.438,36	0	0	3.352.438,36		66	3.352.438,36	0

Kode/Nama Akun	OPD	Keterangan (Kategori PDD/Aset yang disewa)	Nama Perusahaan/Perorangan Yang Menyewa	Lokasi	Nomor SK Perjanjian	Periode Pembayaran PDD		Jumlah Diterima (Rp)	Jumlah Hari atas Pembayaran	Nilai Per/Hari (Rp)	Saldo Awal 2025 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)		Saldo setelah Koreksi Saldo Awal (Rp)	Menjadi Bagian Piutang (Case Khusus) dan Dihitung di kertas kerja berbeda	Jumlah Hari Pengakuan PDD di Tahun 2025	Pendapatan LO Tahun 2025 dari PDD (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 (Rp)
						Mulai	Berakhir					Bertambah	Berkurang					
			NAOMI SHIMANE	BALI GALATEYA, PT		22/02/2024	21/02/2025	10.815.000,00	366	29.549,18	1.536.557,38	0	0	1.536.557,38		52	1.536.557,38	0
			ANTOINE PIERRE REPITION PRENEUF	NAUTIC ASIA LIMITED		04/03/2024	03/03/2025	18.480.000,00	365	50.630,14	3.139.068,49	0	0	3.139.068,49		62	3.139.068,49	0
			STEPHANE ADELE KHAN	BLUE CORNER, PT		25/02/2024	24/02/2025	18.480.000,00	366	50.491,80	2.777.049,18	0	0	2.777.049,18		55	2.777.049,18	0
			SCHONELL DAVID RICHARD	OCEAN BLUE MUTIARA, PT		11/04/2024	10/04/2025	18.480.000,00	365	50.630,14	5.063.013,70	0	0	5.063.013,70		100	5.063.013,70	0
			ZACHARY JOHN HOLTMAN	DWI MITRA NUSANTARA, PT		07/03/2024	06/03/2025	18.480.000,00	365	50.630,14	3.290.958,90	0	0	3.290.958,90		65	3.290.958,90	0
			HIROMI YUKUTAKE	RAKUTEN TRAVEL SINGAPORE PTE LTD		13/03/2024	12/03/2025	18.480.000,00	365	50.630,14	3.594.739,73	0	0	3.594.739,73		71	3.594.739,73	0
			PETER GAJDICS	ARPAN BALI UTAMA, PT		19/02/2024	18/02/2025	18.480.000,00	366	50.491,80	2.474.098,36	0	0	2.474.098,36		49	2.474.098,36	0
			TANYA ALISA WATSON	PT. PUTRA NADI WIBAWA		14/02/2024	13/02/2025	18.480.000,00	366	50.491,80	2.221.639,34	0	0	2.221.639,34		44	2.221.639,34	0
			CARRIE BRADFORD	PT. SHAN RESTORAN BALI		19/02/2024	18/02/2025	18.480.000,00	366	50.491,80	2.474.098,36	0	0	2.474.098,36		49	2.474.098,36	0
			ASHLEY LEONARD GARVEY	PT. SHAN RESTORAN BALI		20/02/2024	19/02/2025	18.420.000,00	366	50.327,87	2.516.393,44	0	0	2.516.393,44		50	2.516.393,44	0
			SPENCER JAMES SPIRES	PT. BRAZILLIAN AUSSIE BBQ		19/03/2024	18/03/2025	18.360.000,00	365	50.301,37	3.873.205,48	0	0	3.873.205,48		77	3.873.205,48	0
			EVGENII VAFIEV	PT. NEO PAPAZIAN BERNIAGA		02/03/2024	01/03/2025	18.360.000,00	365	50.301,37	3.018.082,19	0	0	3.018.082,19		60	3.018.082,19	0
			CORENTIN DAMIEN LORE	PT. BALI LEGAL INTERNATIONAL		20/03/2024	19/03/2025	18.360.000,00	365	50.301,37	3.923.506,85	0	0	3.923.506,85		78	3.923.506,85	0
			MASAHIRO KAJIHARA	BALI GIRI KENCANA, PT		07/04/2024	06/04/2025	18.360.000,00	365	50.301,37	4.828.931,51	0	0	4.828.931,51		96	4.828.931,51	0
			AMANDA JULIE GALE	SHAMBALA PAYANGAN INDAH, PT		15/03/2024	14/03/2025	18.360.000,00	365	50.301,37	3.672.000,00	0	0	3.672.000,00		73	3.672.000,00	0
			ANDREI BEREZIN	PT. ASIA CRISDOM INVESTMENT		02/03/2024	01/03/2025	18.420.000,00	365	50.465,75	3.027.945,21	0	0	3.027.945,21		60	3.027.945,21	0
			ICHIHARA KAZUO	GLORY RETAILINDO, PT.		27/03/2024	26/03/2025	18.300.000,00	365	50.136,99	4.261.643,84	0	0	4.261.643,84		85	4.261.643,84	0
			KYLIE LAURETTE TURNER	BALI OCEAN MAGIC PT		02/03/2024	01/03/2025	18.480.000,00	365	50.630,14	3.037.808,22	0	0	3.037.808,22		60	3.037.808,22	0
			MELINDA ANG MEI LING	SANDY BAY PT		26/03/2024	25/03/2025	18.480.000,00	365	50.630,14	4.252.931,51	0	0	4.252.931,51		84	4.252.931,51	0
			YAROSLAV VIHONOVSKYI	PURI ULUWATU, PT		27/05/2024	26/05/2025	18.480.000,00	365	50.630,14	7.392.000,00	0	0	7.392.000,00		146	7.392.000,00	0
			DANA CHOWDHRY	PT SHAN RESTORAN BALI		10/03/2024	09/03/2025	18.480.000,00	365	50.630,14	3.442.849,32	0	0	3.442.849,32		68	3.442.849,32	0
			JENIFFER TOLENTINO HABABAG	PT PRETTY SALLY INDONESIA		11/04/2024	10/04/2025	18.420.000,00	365	50.465,75	5.046.575,34	0	0	5.046.575,34		100	5.046.575,34	0
			KHAOULA CHAFIK	BALI GIRIKENCANA PT		27/05/2024	26/05/2025	18.420.000,00	365	50.465,75	7.368.000,00	0	0	7.368.000,00		146	7.368.000,00	0
			MARK ALEXANDER TULLOCH	PESONA AUSTINA PROPERTY PT		23/03/2024	22/03/2025	18.300.000,00	365	50.136,99	4.061.095,89	0	0	4.061.095,89		81	4.061.095,89	0
			JANASZKIEWICK EMILIA JOANNA	PT PETANG RETREAT CENTER		25/03/2024	24/03/2025	18.300.000,00	365	50.136,99	4.161.369,86	0	0	4.161.369,86		83	4.161.369,86	0
			TAKESHI OTSUKA	BALI GALATEYA PT		23/03/2024	22/03/2025	18.300.000,00	365	50.136,99	4.061.095,89	0	0	4.061.095,89		81	4.061.095,89	0
			MATTEO LINGUA	SCUBASPA ZEN INDONESIA PT		11/04/2024	10/04/2025	18.360.000,00	365	50.301,37	5.030.136,99	0	0	5.030.136,99		100	5.030.136,99	0
			DARYA TOLKACHEVA	PT BALI INVESTMENT SFG		19/04/2024	18/04/2025	18.360.000,00	365	50.301,37	5.432.547,95	0	0	5.432.547,95		108	5.432.547,95	0
			KHATARINA HANSEN	PT HATIKU TOKO UBUD		24/03/2024	23/03/2025	18.480.000,00	365	50.630,14	4.151.671,23	0	0	4.151.671,23		82	4.151.671,23	0
			YUKARI MATSUEDA	AMANDA ARUMDHANI PT		19/02/2024	18/02/2025	18.480.000,00	366	50.491,80	2.474.098,36	0	0	2.474.098,36		49	2.474.098,36	0
			SUDHEESH SUGATHAN	INDAH PERMATA PULAU PT		13/04/2024	12/04/2025	18.480.000,00	365	50.630,14	5.164.273,97	0	0	5.164.273,97		102	5.164.273,97	0
			SIMONA PAOLICCHI	PT KULINER ARTISAN ITALIA		24/03/2024	23/03/2025	18.480.000,00	365	50.630,14	4.151.671,23	0	0	4.151.671,23		82	4.151.671,23	0
			ROBERT SHARAFUTDINOV	PT WOODEN FISH VILLAGE		15/04/2024	14/04/2025	18.480.000,00	365	50.630,14	5.265.534,25	0	0	5.265.534,25		104	5.265.534,25	0
			BRIAN ROBERT HARTMAN	PT WOODEN FISH VILLAGE		23/03/2024	22/03/2025	18.480.000,00	365	50.630,14	4.101.041,10	0	0	4.101.041,10		81	4.101.041,10	0
			MARIIA SUKHORUKOVA	PT WOODEN FISH VILLAGE		21/03/2024	20/03/2025	18.480.000,00	365	50.630,14	3.999.780,82	0	0	3.999.780,82		79	3.999.780,82	0
			SHOKO TERAOKA	GLORY RETAILINDO, PT		10/03/2024	09/03/2025	18.420.000,00	365	50.465,75	3.431.671,23	0	0	3.431.671,23		68	3.431.671,23	0
			BINOY BIJIMON	KARYA TANGAN SENI PT		07/04/2024	06/04/2025	18.480.000,00	365	50.630,14	4.860.493,15	0	0	4.860.493,15		96	4.860.493,15	0
			ANNA PAULINE DOURTHE	PT SMRAT ADVISORY SOLUTIONS		30/03/2024	29/03/2025	18.480.000,00	365	50.630,14	4.455.452,05	0	0	4.455.452,05		88	4.455.452,05	0
			EVGENII KRUTSKIKH	MUAY THAI AND MIXED MARTIAL ARTS PT		12/02/2024	11/02/2025	18.480.000,00	366	50.491,80	2.120.655,74	0	0	2.120.655,74		42	2.120.655,74	0
			LU NHAT MY	PT. GAIRAH SCUBA INDO		02/04/2024	01/04/2025	18.660.000,00	365	51.123,29	4.652.219,18	0	0	4.652.219,18		91	4.652.219,18	0
			JESSIE NOY LITTLE	SINAR SAMUDERA SEMPURNA, PT.		12/05/2024	11/05/2025	18.660.000,00	365	51.123,29	6.697.150,68	0	0	6.697.150,68		131	6.697.150,68	0
			ILJAS ALEXSANDER LINNBARK	WYNNCOR BALI, PT.		10/05/2024	09/04/2025	18.720.000,00	335	55.880,60	5.532.179,10	0	0	5.532.179,10		99	5.532.179,10	0
			OSAMU FUJIKAWA	HARMONI BALI SEJAHTERA, PT		23/04/2024	22/04/2025	18.720.000,00	365	51.287,67	5.744.219,18	0	0	5.744.219,18		112	5.744.219,18	0
			MCKNIGHT LISA JANE	TUBUH PIKIRAN SEHAT, PT.		10/05/2024	09/05/2025	18.720.000,00	365	51.287,67	6.616.109,59	0	0	6.616.109,59		129	6.616.109,59	0
			ARTUR MUSTAEV	PT. PURE DIVE RESORT		11/05/2024	10/05/2025	18.660.000,00	365	51.123,29	6.646.027,40	0	0	6.646.027,40		130	6.646.027,40	0
			JUSTIN ROGER ANDRE MAUTE	PT. MAYA RESORT		31/05/2024	30/05/2025	18.660.000,00	365	51.123,29	7.668.493,15	0	0	7.668.493,15		150	7.668.493,15	0
			HUDD IAN CHARLES	PT. EDEN RESTAURANT EVENTS		29/04/2024	28/04/2025	18.960.000,00	365	51.945,21	6.129.534,25	0	0	6.129.534,25		118	6.129.534,25	0
			MARCEL MELL BASTIAN ALFREDO	PT. EDEN RESTAURANT EVENTS		29/04/2024	28/04/2025	18.960.000,00	365	51.945,21	6.129.534,25	0	0	6.129.534,25		118	6.129.534,25	0
			SANJAY SINGH	SUPRABA SARI PT		29/04/2024	28/04/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	6.168.328,77	0	0	6.168.328,77		118	6.168.328,77	0
			PAVEL KURKIN	PT. BALI INVESTMENT SFG		29/04/2024	28/04/2025	19.020.000,00	365	52.109,59	6.148.931,51	0	0	6.148.931,51		118	6.148.931,51	0
			OLEG SHLYAEV	PT BALI YOGA PROFESIONAL		03/06/2024	02/06/2025	19.020.000,00	365	52.109,59	7.972.767,12	0	0	7.972.767,12		153	7.972.767,12	0
			RAJENDRA SINGH	SUPRABA SARI PT		19/04/2024	18/04/2025	19.140.000,00	365	52.438,36	5.663.342,47	0	0	5.663.342,47		108	5.663.342,47	0
			ALEJANDRO GISBERT BLANCO	DESTINATION ASIA PT		04/05/2024	03/05/2025	19.140.000,00	365	52.438,36	6.449.917,81	0	0	6.449.917,81		123	6.449.917,81	0
			TERRY STEVEN SWAIN	YAYASAN PROEDUCATION INTERNATIONAL CENTER		24/07/2024	23/07/2025	19.140.000,00	365	52.438,36	10.697.424,66	0	0	10.697.424,66		204	10.697.424,66	0
			VALENTIN KHALIL ESSADDI	CONCEPTS SELAM INDONESIA, PT		18/04/2024	17/04/2025	19.140.000,00	365	52.438,36	5.610.904,11	0	0	5.610.904,11		107	5.610.904,11	0
			BENOIT CLAUDINE MARIE DESTRESSE	SPEEDOC PTE, LTD		28/04/2024	27/04/2025	19.020.000,00	365	52.109,59	6.096.821,92	0	0	6.096.821,92		117	6.096.821,92	0
			DAVID PEDER ERIC GAVIN	BALI GIRIKENCANA, PT.		11/05/2024	10/05/2025	19.020.000,00	365	52.109,59	6.774.246,58	0	0	6.774.246,58		130	6.774.246,58	0
			GEOFFREY ROMAIN ANDRE DOMINIQUE ALDIGERI	PT. BALI TANPA BATAS		12/05/2024	11/05/2025	19.020.000,00	365	52.109,59	6.826.356,16	0	0	6.826.356,16		131	6.826.356,16	0
			JOAO BATISTA DOS SANTOS	BRAZILLIAN AUSSIE BBQ, PT		15/04/2024	14/04/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	5.436.493,15	0	0	5.436.493,15		104	5.436.493,15	0
			ANTOINE JACQUES BERNARD MESLIER	PT. OCEAN ADVENTURE DIVE		17/05/2024	16/05/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	7.109.260,27	0	0	7.109.260,27		136	7.109.260,27	0
			CLEMENT YANNICK JEAN CLAUDE	PT. MANIK SEKECAP BALI		06/05/2024	05/05/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	6.534.246,58	0	0	6.534.246,58		125	6.534.246,58	0
			JORDI MICHAEL KOENDERS	AUTOGRILL SERVICES INDONESIA, PT.		21/04/2024	20/04/2025	19.020.000,00	365	52.109,59	5.732.054,79	0	0	5.732.054,79		110	5.732.054,79	0
			ANJA NEIPP HOMMANN	JAYA NASIHAT SINAT, PT.		16/05/2024	15/05/2025	19.020.000,00	365	52.109,59	7.034.794,52	0	0	7.034.794,52		135	7.034.794,52	0
			JAMIE LEE DORMEHL	YAYASAN PROEDUCATION INTERNATIONAL CENTER		10/07/2024	09/07/2025	19.020.000,00	365	52.109,59	9.900.821,92	0	0	9.900.821,92		190	9.900.821,92	0
			TENG SENG LEE	DWI MITRA NUSANTARA, PT		01/06/2024	31/05/2025	19.020.000,00	365	52.109,59	7.868.547,95	0	0	7.868.547,95		151	7.868.547,95	0
			LAURA RUZ MONFORT	PT. BALI INTERIOR PERSADA		13/05/2024	12/05/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	6.900.164,38	0	0	6.900.164,38		132	6.900.164,38	0
			MARLENE KYOENEN	PT. PARAS AGUNG BALI		15/06/2024	14/06/2025	18.900.000,00	365	51.780,82	8.543.835,62	0	0	8.543.835,62		165	8.543.835,62	0
			NAVEN SINGH RAWAT	PT. BALI SARI AGUNG		19/05/2024	18/05/2025	18.900.000,00	365	51.780,82	7.145.753,42	0	0	7.145.753,42		138	7.145.753,42	0
			ANASTASHA SELEDKOVA	PT. BALI FINC CONSULTING		15/06/2024	14/06/2025	18.840.000,00	365	51.616,44	8.516.712,33	0	0	8.516.712,33		165	8.516.712,33	0
			NICOLAS PATRICK SAINT JEAN	EARTH KISSED SOFTLY PT		30/05/2024	29/05/2025	18.840.000,00	365	51.616,44	7.690.849,32	0	0	7.690.849,32		149	7.690.849,32	0
			TU JINGYUE	PT. MEGA BLUE ROCK		08/05/2024	07/05/2025	18.840.000,00	365	51.616,44	6.555.287,67	0	0	6.555.287,67		127	6.555.287,67	0
			DENNIS ROBERT WALKER	BAMBU BAMBU PT		07/08/2024	06/08/2025	18.900.000,00	365	51.780,82	11.288.219,18	0	0	11.288.219,18		218	11.288.219,18	0
			VADIM GRISHAEV	JUMANJI DEVELOPMENT GROUP		15/05/2024	14/05/2025	18.900.000,00	365	51.780,82	6.938.630,14	0	0	6.938.630,14		134	6.938.630,14	0

Kode/Nama Akun	OPD	Keterangan (Kategori PDD/Aset yang disewa)	Nama Perusahaan/Perorangan Yang Menyewa	Lokasi	Nomor SK Perjanjian	Periode Pembayaran PDD		Jumlah Diterima (Rp)	Jumlah Hari atas Pembayaran	Nilai Per/Hari (Rp)	Saldo Awal 2025 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)		Saldo setelah Koreksi Saldo Awal (Rp)	Menjadi Bagian Piutang (Case Khusus) dan Dihitung di kertas kerja berbeda	Jumlah Hari Pengakuan PDD di Tahun 2025	Pendapatan LO Tahun 2025 dari PDD (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 (Rp)
						Mulai	Berakhir					Bertambah	Berkurang					
			CAMERON MARK FIDLER	PT EFFICIENT ENERGY SOLUTIONS		26/05/2024	25/05/2025	18.900.000,00	365	51.780,82	7.508.219,18	0	0	7.508.219,18		145	7.508.219,18	0
			ANTHONY LANBRIDGE	PT SHAN RESTORAN BALI		16/05/2024	15/05/2025	18.900.000,00	365	51.780,82	6.990.410,96	0	0	6.990.410,96		135	6.990.410,96	0
			STEPHEN JAMES CASTLEY	DEWA KRISHNA SENI, PT.		18/06/2024	17/06/2025	18.900.000,00	365	51.780,82	8.699.178,08	0	0	8.699.178,08		168	8.699.178,08	0
			THIERRY DIDIER NOBILE	MODE DISTRIBUSI INDONESIA PT		06/06/2024	05/06/2025	18.960.000,00	365	51.945,21	8.103.452,05	0	0	8.103.452,05		156	8.103.452,05	0
			CHRISTOFFER JIMMY LINDBERG	SARANA PANTAI MITRA SENTOSA PT		24/06/2024	23/06/2025	18.960.000,00	365	51.945,21	9.038.465,75	0	0	9.038.465,75		174	9.038.465,75	0
			NUKUI MAYUMI	AMBISI MAX, PT.		31/05/2024	30/05/2025	18.900.000,00	365	51.780,82	7.767.123,29	0	0	7.767.123,29		150	7.767.123,29	0
			HIGURE MITSUO	AMBISI MAX, PT.		31/05/2024	30/05/2025	18.900.000,00	365	51.780,82	7.767.123,29	0	0	7.767.123,29		150	7.767.123,29	0
			IMDATUL ISLAM	EXOTIC GEMS PT		31/05/2024	30/05/2025	18.900.000,00	365	51.780,82	7.767.123,29	0	0	7.767.123,29		150	7.767.123,29	0
			AUSTIN DIX	MUAY THAI AND MIXED MARTIAL ARTS, PT		21/06/2024	20/06/2025	18.900.000,00	365	51.780,82	8.854.520,55	0	0	8.854.520,55		171	8.854.520,55	0
			LUCIANO ANTONIO DA SILVA	BRAZILIAN AUSSIE BBQ, PT		23/06/2024	22/06/2025	18.780.000,00	365	51.452,05	8.901.205,48	0	0	8.901.205,48		173	8.901.205,48	0
			SHANE ANDREW VEENSTRA	SHAMBALA PAYANGAN INDAH, PT		06/06/2024	05/06/2025	18.780.000,00	365	51.452,05	8.026.520,55	0	0	8.026.520,55		156	8.026.520,55	0
			TEREZA FILIPOVA	SHAMBALA PAYANGAN INDAH, PT		06/06/2024	05/06/2025	18.780.000,00	365	51.452,05	8.026.520,55	0	0	8.026.520,55		156	8.026.520,55	0
			JULIEN ALBERIC R BOGAERTS	CONCEPTS SELAM INDONESIA, PT		13/07/2024	12/01/2025	9.390.000,00	184	51.032,61	612.391,30	0	0	612.391,30		12	612.391,30	0
			FABIO ALDERIGI	PT. KULINER ARTISAN ITALIA		19/06/2024	18/06/2025	18.780.000,00	365	51.452,05	8.695.397,26	0	0	8.695.397,26		169	8.695.397,26	0
			EDWARD JONATHAN LEESE	GREEN TRADING BALI, PT		19/06/2024	18/06/2025	18.780.000,00	365	51.452,05	8.695.397,26	0	0	8.695.397,26		169	8.695.397,26	0
			RANDY NOBORU SHIMABUKU	BALI GIRIKENCANA, PT		19/06/2024	18/06/2025	18.840.000,00	365	51.616,44	8.723.178,08	0	0	8.723.178,08		169	8.723.178,08	0
			RAFFAELE BRUOGNOLO	BALI GIRIKENCANA, PT		09/07/2024	08/07/2025	18.840.000,00	365	51.616,44	9.755.506,85	0	0	9.755.506,85		189	9.755.506,85	0
			LIAM JAMES MICHAEL NEALON	BALI GIRIKENCANA, PT		28/06/2024	27/06/2025	18.840.000,00	365	51.616,44	9.187.726,03	0	0	9.187.726,03		178	9.187.726,03	0
			KARL JAMES WILKINS	PT. UNGGUL INDO PROPERTI		27/05/2024	26/05/2025	18.840.000,00	365	51.616,44	7.536.000,00	0	0	7.536.000,00		146	7.536.000,00	0
			KRISTAPS BASKERS	PT. SHAN RESTORAN BALI		25/03/2024	24/03/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	4.338.739,73	0	0	4.338.739,73		83	4.338.739,73	0
			NICOLE SHAAKIRA HEYDER	PT HOLISTIK YOGA LESTARI		11/07/2024	10/07/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	9.984.328,77	0	0	9.984.328,77		191	9.984.328,77	0
			MARIIA PETROVA	PT MIMPI MANIS INDONESIA		14/07/2024	13/07/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	10.141.150,68	0	0	10.141.150,68		194	10.141.150,68	0
			ALLISON SUSAN RICHARD	YAYASAN PROEDUCATIONAL INTERNATIONAL CENTER		04/07/2024	03/07/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	9.618.410,96	0	0	9.618.410,96		184	9.618.410,96	0
			MARISA ERASMUS	YAYASAN PROEDUCATIONAL INTERNATIONAL CENTER		13/07/2024	12/07/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	10.088.876,71	0	0	10.088.876,71		193	10.088.876,71	0
			NANDITA REBELLO BEDI	YAYASAN PROEDUCATIONAL INTERNATIONAL CENTER		15/07/2024	14/07/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	10.193.424,66	0	0	10.193.424,66		195	10.193.424,66	0
			KARIN VAN BEECK	ACTIVE WATERS PT		01/07/2024	30/06/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	9.461.589,04	0	0	9.461.589,04		181	9.461.589,04	0
			PETER JOSEPH MACEDA	YAYASAN STARKEN CAHAYA DEWATA		24/06/2024	23/06/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	9.095.671,23	0	0	9.095.671,23		174	9.095.671,23	0
			PHILLIP JOHN BURCHETT	YAYASAN STARKEN CAHAYA DEWATA		04/07/2024	03/07/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	9.618.410,96	0	0	9.618.410,96		184	9.618.410,96	0
			MAX WILLIAM CHARLES MUNRO	PT. BALI YOGA PROFESIONAL		19/06/2024	18/06/2025	19.020.000,00	365	52.109,59	8.806.520,55	0	0	8.806.520,55		169	8.806.520,55	0
			WONG HAN CHEN	PT. BALI SERENITY YOGA		10/07/2024	09/07/2025	19.020.000,00	365	52.109,59	9.900.821,92	0	0	9.900.821,92		190	9.900.821,92	0
			JONATHAN ROBERT MONTOLIEU	AMANDA ARUMDHANI, PT		28/06/2024	27/06/2025	19.020.000,00	365	52.109,59	9.275.506,85	0	0	9.275.506,85		178	9.275.506,85	0
			RAHUL GUPTA	QUEENS TANDOOR PT		14/06/2024	13/06/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	8.572.931,51	0	0	8.572.931,51		164	8.572.931,51	0
			GARCIA MORENO BEATRIZ	IMPIAN PROPERTY MANAGEMENT, PT		20/06/2024	19/06/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	8.886.575,34	0	0	8.886.575,34		170	8.886.575,34	0
			NATHAN MARK RYAN	PESONA ALAM NIRWANA PROPERTY, PT		05/06/2024	04/06/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	8.102.465,75	0	0	8.102.465,75		155	8.102.465,75	0
			ARDHANA KAIESH IYER VOHRA	VOHRA PTE LTD		20/07/2024	19/07/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	10.454.794,52	0	0	10.454.794,52		200	10.454.794,52	0
			NICOLAS PIERRE ROBERT LONCLE	PT REVALUE BUMI INDONESIA		24/05/2024	23/05/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	7.475.178,08	0	0	7.475.178,08		143	7.475.178,08	0
			LUISA ANDERSON	BALI GIRIKENCANA, PT		14/07/2024	13/07/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	10.141.150,68	0	0	10.141.150,68		194	10.141.150,68	0
			ELEANOR CLAIRE BITTNER	PT. LOTUS BALI CONSULTING		21/06/2024	20/06/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	8.938.849,32	0	0	8.938.849,32		171	8.938.849,32	0
			SHARON KRISTEN BARTHOLOMEW	PT. GLOBAL VISA INTERNATIONAL		27/07/2024	26/07/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	10.820.712,33	0	0	10.820.712,33		207	10.820.712,33	0
			DAVID SHAWN MAC LEAN	WYNNCOR BALI PT		14/06/2024	13/06/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	8.572.931,51	0	0	8.572.931,51		164	8.572.931,51	0
			NALLAMUTHU MANIVEL	QUEENS OF INDIA PT		20/06/2024	19/06/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	8.886.575,34	0	0	8.886.575,34		170	8.886.575,34	0
			OLGA GRAZYNA KACZYNSKA	PT SCUBASPA ZEN INDONESIA		09/07/2024	08/07/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	9.879.780,82	0	0	9.879.780,82		189	9.879.780,82	0
			DOMINIC JAMES STEWART-WHITE	PT SCUBASPA ZEN INDONESIA		19/07/2024	18/07/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	10.402.520,55			10.402.520,55		199	10.402.520,55	0
			NITTIN SILSWAL	BOLLYWOOD MASALAZ UBUD, PT		08/06/2024	07/06/2025	19.140.000,00	365	52.438,36	8.285.260,27			8.285.260,27		158	8.285.260,27	0
			NATTHE SINGH	BOLLYWOOD MASALAZ UBUD, PT		08/06/2024	07/06/2025	19.140.000,00	365	52.438,36	8.285.260,27			8.285.260,27		158	8.285.260,27	0
			JESSICA LOUISE CLAIRE BROWN	PT UBUD YOGA SENTRAL		10/07/2024	09/07/2025	19.140.000,00	365	52.438,36	9.963.287,67			9.963.287,67		190	9.963.287,67	0
			CHRISTOPHER JAMES NEWBOULD	SOLUSI TIMUR BARAT, PT		26/07/2024	25/07/2025	19.140.000,00	365	52.438,36	10.802.301,37			10.802.301,37		206	10.802.301,37	0
			SARATH SASIDHARAN	KARYA TANGAN SENI, PT		20/08/2024	19/08/2025	19.140.000,00	365	52.438,36	12.113.260,27			12.113.260,27		231	12.113.260,27	0
			BOB ENDRIKO HARING	PT. LUMINARY DIGITAL BALI		13/08/2024	12/08/2025	19.140.000,00	365	52.438,36	11.746.191,78			11.746.191,78		224	11.746.191,78	0
			MARLEEN SCHUT	MARLEEN SCHUT INTERNATIONAL, PT		04/07/2024	03/07/2025	19.140.000,00	365	52.438,36	9.648.657,53			9.648.657,53		184	9.648.657,53	0
			MAKOTONAKAMURA	PT. KIZUNA JEPANG INDONESIA		28/08/2024	27/08/2025	19.140.000,00	365	52.438,36	12.532.767,12			12.532.767,12		239	12.532.767,12	0
			DIMITRI ERIC GERARD	CONCEPTS SELAM INDONESIA, PT		25/07/2024	24/07/2025	19.140.000,00	365	52.438,36	10.749.863,01			10.749.863,01		205	10.749.863,01	0
			PETR HINDRICH	YAYASAN GREEN BOOKS INDONESIA		28/07/2024	27/07/2025	19.260.000,00	365	52.767,12	10.975.561,64			10.975.561,64		208	10.975.561,64	0
			SIMON PAUL TE HENNEPE	TRAVLR GUIDES INDONESIA, PT		07/07/2024	06/07/2025	19.260.000,00	365	52.767,12	9.867.452,05			9.867.452,05		187	9.867.452,05	0
			NELSON DANIEL CARBALLO	PEMASOK MIMPI MANIS, PT		22/07/2024	21/07/2025	19.260.000,00	365	52.767,12	10.658.958,90			10.658.958,90		202	10.658.958,90	0
			SPENCER WILLIAM HANSEN	PT. BALI SARI BUMI		08/08/2024	07/08/2025	19.260.000,00	365	52.767,12	11.556.000,00			11.556.000,00		219	11.556.000,00	0
			JIANG HUI	INTI DUFREE PROMOSINDO, PT.		05/07/2024	04/07/2025	19.260.000,00	365	52.767,12	9.761.917,81			9.761.917,81		185	9.761.917,81	0
			OKSANA SHABANOVA	PT. WOODEN FISH VILLAGE		04/07/2024	03/07/2025	19.320.000,00	365	52.931,51	9.739.397,26			9.739.397,26		184	9.739.397,26	0
			FILIPP MILASH	PT. WOODEN FISH VILLAGE		04/07/2024	03/07/2025	19.320.000,00	365	52.931,51	9.739.397,26			9.739.397,26		184	9.739.397,26	0
			BEATRICE FLORENCE BOUVIER	PT. KARMA KOMA ORIGIN		03/08/2024	02/08/2025	19.320.000,00	365	52.931,51	11.327.342,47			11.327.342,47		214	11.327.342,47	0
			MARGARETHA CATHARINA DEKKER	PT COCOK BALI UTAMA		28/07/2024	27/07/2025	19.320.000,00	365	52.931,51	11.009.753,42			11.009.753,42		208	11.009.753,42	0
			DANIEL MYLES BARTLETT	PT. PURI SARI LESTARI		27/07/2024	26/07/2025	19.260.000,00	365	52.767,12	10.922.794,52			10.922.794,52		207	10.922.794,52	0
			CHRISTOPHER JOHN JAMES	BILLABONG INDONESIA PT		14/04/2024	13/04/2025	19.260.000,00	365	52.767,12	5.435.013,70			5.435.013,70		103	5.435.013,70	0
			CHRISTOPHER JOHN SALANS	MOZAIC PT		27/08/2024	26/08/2025	19.260.000,00	365	52.767,12	12.558.575,34			12.558.575,34		238	12.558.575,34	0
			TAKANORI KISHIDA	PT. RED DRAGON RAMEN		14/04/2024	13/04/2025	19.260.000,00	365	52.767,12	5.435.013,70			5.435.013,70		103	5.435.013,70	0
			EVGENIYA SUPRUN	PT. ORIENTAL BALI CONSULTING		27/08/2024	26/08/2025	19.200.000,00	365	52.602,74	12.519.452,05			12.519.452,05		238	12.519.452,05	0
			KIRSTY ELIZABETH SIMPSON	PT THE PILATES PROJECT		22/07/2024	21/07/2025	19.200.000,00	365	52.602,74	10.625.753,42			10.625.753,42		202	10.625.753,42	0
			FENGMING LI	PT. APNEA BALI FREEDIVING		05/07/2024	04/07/2025	19.200.000,00	365	52.602,74	9.731.506,85			9.731.506,85		185	9.731.506,85	0

Kode/Nama Akun	OPD	Keterangan (Kategori PDD/Aset yang disewa)	Nama Perusahaan/Perorangan Yang Menyewa	Lokasi	Nomor SK Perjanjian	Periode Pembayaran PDD		Jumlah Diterima (Rp)	Jumlah Hari atas Pembayaran	Nilai Per/Hari (Rp)	Saldo Awal 2025 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)		Saldo setelah Koreksi Saldo Awal (Rp)	Menjadi Bagian Piutang (Case Khusus) dan Dihitung di kertas kerja berbeda	Jumlah Hari Pengakuan PDD di Tahun 2025	Pendapatan LO Tahun 2025 dari PDD (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 (Rp)
						Mulai	Berakhir					Bertambah	Berkurang					
			GONCALO BARRETO DE LARA MIRANDA	PT. BIRO BENDA INDONESIA		08/08/2024	07/08/2025	19.200.000,00	365	52.602,74	11.520.000,00			11.520.000,00		219	11.520.000,00	0
			MANON MEERTENS	DESTINATION ASIA, PT		15/08/2024	14/08/2025	19.200.000,00	365	52.602,74	11.888.219,18			11.888.219,18		226	11.888.219,18	0
			ANASTASIIA YARKOVA	PT. MARCHI INVESTMENT INDONESIA		14/08/2024	13/08/2025	19.140.000,00	365	52.438,36	11.798.630,14			11.798.630,14		225	11.798.630,14	0
			JODEE MAY WARNER	PT BALI CINTA WEDDINGS		12/07/2024	11/07/2025	19.140.000,00	365	52.438,36	10.068.164,38			10.068.164,38		192	10.068.164,38	0
			NICOLAS MARTIN DELACRESSONNIERE	PT. SUMBER AIR DEWA		18/07/2024	17/07/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	10.350.246,58			10.350.246,58		198	10.350.246,58	0
			DMITRII STEPANOV	PT. BALI INVESTMENT SFG		31/07/2024	30/07/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	11.029.808,22			11.029.808,22		211	11.029.808,22	0
			GERALDINE CAROLE JAPY	PT. NEO PAPAZIAN BERNIAGA		16/07/2024	15/07/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	10.245.698,63			10.245.698,63		196	10.245.698,63	0
			STANISLAS PAUL JACQUES KLEIN	PT. SHAN RESTORAN BALI		26/07/2024	25/07/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	10.768.438,36			10.768.438,36		206	10.768.438,36	0
			DARDO MATIAS SCHELASNITZKI	PT. MILLIE UTAMA SAKTI		04/08/2024	03/08/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	11.238.904,11			11.238.904,11		215	11.238.904,11	0
			LADISLAV DURINA	PT. MILLIE UTAMA SAKTI		30/08/2024	29/08/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	12.598.027,40			12.598.027,40		241	12.598.027,40	0
			MITCHELL JOHN RILETT	HARMONI INDAH BALI, PT		02/08/2024	01/08/2025	18.960.000,00	365	51.945,21	11.064.328,77			11.064.328,77		213	11.064.328,77	0
			ABBY KATHLEN FRANCES MURPHY	PT. BALI CINTA WEDDINGS		03/08/2024	02/08/2025	18.960.000,00	365	51.945,21	11.116.273,97			11.116.273,97		214	11.116.273,97	0
			TALITHA CINDY GRAZIANO	PT. BALI CINTA WEDDINGS		23/08/2024	22/08/2025	18.960.000,00	365	51.945,21	12.155.178,08			12.155.178,08		234	12.155.178,08	0
			JANNICK EVERS	MAGALI PASCAL, PT		04/08/2024	03/08/2025	18.960.000,00	365	51.945,21	11.168.219,18			11.168.219,18		215	11.168.219,18	0
			FRANCISCO DUARTE SOARES PEREIRA ALVES PIMENTA	BALI OCEAN MAGIC, PT		30/07/2024	29/07/2025	19.020.000,00	365	52.109,59	10.943.013,70			10.943.013,70		210	10.943.013,70	0
			STAM MARIT KARINA	KAMIBANTU, PT		08/08/2024	07/08/2025	19.020.000,00	365	52.109,59	11.412.000,00			11.412.000,00		219	11.412.000,00	0
			BARRY POLYCARPUS GERARDUS DOESBURG	KAMIBANTU, PT		17/08/2024	16/08/2025	19.020.000,00	365	52.109,59	11.880.986,30			11.880.986,30		228	11.880.986,30	0
			STEVEN WILES	PT. TWO FISH BALI		17/08/2024	16/08/2025	19.020.000,00	365	52.109,59	11.880.986,30			11.880.986,30		228	11.880.986,30	0
			WILLIAM J COLLIER	KATARINA BLU PT		01/10/2024	30/09/2025	19.020.000,00	365	52.109,59	14.225.917,81			14.225.917,81		273	14.225.917,81	0
			BRETT ANTONY CHITTENDEN	SARANA PANTAI MITRA SENTOSA, PT		27/08/2024	26/08/2025	19.020.000,00	365	52.109,59	12.402.082,19			12.402.082,19		238	12.402.082,19	0
			SVEN RONNY WAGENKNECHT	REPUBLIK SABUN ABADI, PT		09/08/2024	08/08/2025	19.020.000,00	365	52.109,59	11.464.109,59			11.464.109,59		220	11.464.109,59	0
			NATALIA JADWIGA LIS	DIVING INDO PT		05/08/2024	04/08/2025	19.020.000,00	365	52.109,59	11.255.671,23			11.255.671,23		216	11.255.671,23	0
			ANNA LUSHCHIKOVA	DIVING INDO PT		16/08/2024	17/08/2025	19.020.000,00	367	51.825,61	11.868.065,40			11.868.065,40		229	11.868.065,40	0
			CHLOE LOUISE LUCAS	THE STUDIO SPACE PT		27/08/2024	26/08/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	12.441.205,48			12.441.205,48		238	12.441.205,48	0
			WILLIAM ANDREW CHARLTON	PT CIMICA MITRA WISATA		13/09/2024	12/09/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	13.329.863,01			13.329.863,01		255	13.329.863,01	0
			AURELIEN GEORGES HUBERT CHEVALIER	PT. BALILOCATIONS		13/08/2024	12/08/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	11.709.369,86			11.709.369,86		224	11.709.369,86	0
			EMI KAKOO	PURI ZUQNI PT		14/08/2024	13/08/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	11.761.643,84			11.761.643,84		225	11.761.643,84	0
			JOCELYN NICOLAS JOEL ARGAUD	PURI ZUQNI PT		06/08/2024	05/08/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	11.343.452,05			11.343.452,05		217	11.343.452,05	0
			ALEXANDER CHARLES WALKER	PENYELAM PENYELAM BALI KRISTAL, PT		17/08/2024	16/08/2025	19.140.000,00	365	52.438,36	11.955.945,21			11.955.945,21		228	11.955.945,21	0
			MANDEEP DHYANI	NEW DELHI INDIAN RESTAURANT, PT		17/08/2024	16/08/2025	19.140.000,00	365	52.438,36	11.955.945,21			11.955.945,21		228	11.955.945,21	0
			ENG BONG CHENG	INTI DUFREE PROMOSINDO, PT		17/08/2024	16/08/2025	19.140.000,00	365	52.438,36	11.955.945,21			11.955.945,21		228	11.955.945,21	0
			RAJANDER SINGH	PT. BOLLYWOOD INDIAN CUISINE		05/08/2024	04/08/2025	19.140.000,00	365	52.438,36	11.326.684,93			11.326.684,93		216	11.326.684,93	0
			YANNICK XAVIER JACQUES CASTERA	CONCEPTS SELAM INDONESIA, PT		28/08/2024	27/08/2025	19.020.000,00	365	52.109,59	12.454.191,78			12.454.191,78		239	12.454.191,78	0
			SAMUEL WILLIAM MCBRIDE	PT. PARADISE PROPERTY GROUP		08/08/2024	07/08/2025	19.020.000,00	365	52.109,59	11.412.000,00			11.412.000,00		219	11.412.000,00	0
			ADITYA KUMAR MEHTA	BALI GIRIKENCANA, PT		24/09/2024	23/09/2025	19.020.000,00	365	52.109,59	13.861.150,68			13.861.150,68		266	13.861.150,68	0
			ALEXANDRA VERESHCHAGINA	PT. PUTRI HANGTUAH BALI		27/07/2024	26/07/2025	19.020.000,00	365	52.109,59	10.786.684,93			10.786.684,93		207	10.786.684,93	0
			ANDREA BAKKER	DESTINATION ASIA, PT		01/10/2024	30/09/2025	18.840.000,00	365	51.616,44	14.091.287,67			14.091.287,67		273	14.091.287,67	0
			KEVIN MAURICE CLAUDE BORGEAIS	CONCEPTS SELAM INDONESIA, PT		19/08/2024	18/08/2025	18.840.000,00	365	51.616,44	11.871.780,82			11.871.780,82		230	11.871.780,82	0
			DOMINIQUE KAROLIEN MARIA VAN DEN BROEK	BALI CRUISES NUSANTARA, PT		25/10/2024	24/10/2025	18.780.000,00	365	51.452,05	15.281.260,27			15.281.260,27		297	15.281.260,27	0
			FINBARR MAGNUS IRVIN STUBBS	PT SOLUSI BERLAYAR CEMERLANG		14/09/2024	13/09/2025	18.780.000,00	365	51.452,05	13.171.726,03			13.171.726,03		256	13.171.726,03	0
			VAN OVCHINNIKOV	ECOCOMPLECT GROUP INDONESIA PT		30/09/2024	29/09/2025	18.480.000,00	365	50.630,14	13.771.397,26			13.771.397,26		272	13.771.397,26	0
			DHARMA WANGSA WATTS	ANUGRAH MERTA SARI SEDANA PT		02/09/2024	01/09/2025	18.480.000,00	365	50.630,14	12.353.753,42			12.353.753,42		244	12.353.753,42	0
			ARLEEN SAMONTE	PT. BALI LEGAL INTERNATIONAL		04/11/2024	03/11/2025	18.480.000,00	365	50.630,14	15.543.452,05			15.543.452,05		307	15.543.452,05	0
			MARIE ROSE MAURICIO ESPANOL	PT. GLOBAL VISA INTERNATIONAL		07/10/2024	06/10/2025	18.480.000,00	365	50.630,14	14.125.808,22			14.125.808,22		279	14.125.808,22	0
			PHAM LE VAN TRANG	PT. ORIENTAL BALI CONSULTING		06/09/2024	05/09/2025	18.360.000,00	365	50.301,37	12.474.739,73			12.474.739,73		248	12.474.739,73	0
			DIVA JOSEPH KHOURY	PT MARCHI INVESTMENT INDONESIA		11/09/2024	10/09/2025	18.360.000,00	365	50.301,37	12.726.246,58			12.726.246,58		253	12.726.246,58	0
			EVELYN TATIANE ONO	PT OSS LEGAL		07/09/2024	06/09/2025	18.360.000,00	365	50.301,37	12.525.041,10			12.525.041,10		249	12.525.041,10	0
			BLAKE OWEN THORNLEY	MOZAIC PT		28/10/2024	27/10/2025	18.480.000,00	365	50.630,14	15.189.041,10			15.189.041,10		300	15.189.041,10	0
			SARA DEBORD	CONCEPTS SELAM INDONESIA, PT		23/08/2024	22/08/2025	18.240.000,00	365	49.972,60	11.693.589,04			11.693.589,04		234	11.693.589,04	0
			KENNETH JAMES LEWICKI	PT PETANG RETREAT CENTER		23/08/2024	22/08/2025	18.240.000,00	365	49.972,60	11.693.589,04			11.693.589,04		234	11.693.589,04	0
			MICKAEL PIERRE EDOUARD MAXANT	PT WOODEN FISH VILLAGE		23/08/2024	22/08/2025	18.240.000,00	365	49.972,60	11.693.589,04			11.693.589,04		234	11.693.589,04	0
			KARINA ANDREA BONANNO	LUXURY BALI VILLAS PT		25/08/2024	24/08/2025	18.240.000,00	365	49.972,60	11.793.534,25			11.793.534,25		236	11.793.534,25	0
			OEL HINDSON	PT MAKANAN VEGAN MAJU		05/11/2024	04/11/2025	18.240.000,00	365	49.972,60	15.391.561,64			15.391.561,64		308	15.391.561,64	0
			MEGHAN ELIZABETH CURRIE	ASANA KREASI HARMONI PT		14/09/2024	13/09/2025	18.240.000,00	365	49.972,60	12.792.986,30			12.792.986,30		256	12.792.986,30	0
			NAOMI SHIMANE	BALI GALATEYA PT		22/09/2024	21/09/2025	18.120.000,00	365	49.643,84	13.105.972,60			13.105.972,60		264	13.105.972,60	0
			ANASTASIA KOSTITSYNA	PT BALI INVESTMENT SFG		01/09/2024	31/08/2025	18.180.000,00	365	49.808,22	12.103.397,26			12.103.397,26		243	12.103.397,26	0
			YASMIN AZURA CHURCH	CONCEPTS SELAM INDONESIA, PT		27/09/2024	26/09/2025	18.360.000,00	365	50.301,37	13.531.068,49			13.531.068,49		269	13.531.068,49	0
			MARIA PILAR NEBREDA	PT YOGA SELAM INDONESIA		27/09/2024	26/09/2025	18.360.000,00	365	50.301,37	13.531.068,49			13.531.068,49		269	13.531.068,49	0
			DOMINIQUE NACIR CROWDER	PT PETANG RETREAT CENTER		29/08/2024	28/08/2025	18.120.000,00	365	49.643,84	11.914.520,55			11.914.520,55		240	11.914.520,55	0
			JUHA PEKKA KURIKKA	PT LOTUS BALI CONSULTING		01/09/2024	31/08/2025	18.120.000,00	365	49.643,84	12.063.452,05			12.063.452,05		243	12.063.452,05	0
			ANASTASIA POPOVA	PT MITRA JEMBA MANAJEMEN		20/10/2024	19/10/2025	18.120.000,00	365	49.643,84	14.496.000,00			14.496.000,00		292	14.496.000,00	0
			SHIRA VAN SPANJE	PT RAJA LIMA GROUP		01/10/2024	30/09/2025	18.180.000,00	365	49.808,22	13.597.643,84			13.597.643,84		273	13.597.643,84	0

Kode/Nama Akun	OPD	Keterangan (Kategori PDD/Aset yang disewa)	Nama Perusahaan/Perorangan Yang Menyewa	Lokasi	Nomor SK Perjanjian	Periode Pembayaran PDD		Jumlah Diterima (Rp)	Jumlah Hari atas Pembayaran	Nilai Per/Hari (Rp)	Saldo Awal 2025 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)		Saldo setelah Koreksi Saldo Awal (Rp)	Menjadi Bagian Piutang (Case Khusus) dan Dihitung di kertas kerja berbeda	Jumlah Hari Pengakuan PDD di Tahun 2025	Pendapatan LO Tahun 2025 dari PDD (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 (Rp)
						Mulai	Berakhir					Bertambah	Berkurang					
			TEITO LAURENT FURUKAWA	IMPERIAL INDO MULIA, PT		14/09/2024	13/09/2025	18.180.000,00	365	49.808,22	12.750.904,11			12.750.904,11		256	12.750.904,11	0
			BENEDICTE NOIROT	PT FRENCH KISS DIVERS		31/08/2024	30/08/2025	18.060.000,00	365	49.479,45	11.974.027,40			11.974.027,40		242	11.974.027,40	0
			NICOLAS PIERRE ANTOINE GRAZIANA	PT BALI TANPA BATAS		27/09/2024	26/09/2025	18.060.000,00	365	49.479,45	13.309.972,60			13.309.972,60		269	13.309.972,60	0
			REGIS CRESPO	PT. FRENCH KISS DIVERS		09/09/2024	08/09/2025	18.120.000,00	365	49.643,84	12.460.602,74			12.460.602,74		251	12.460.602,74	0
			VIKRAM SINGH	PT. BOLLYWOOD INDIAN CUISINE		12/09/2024	11/09/2025	18.240.000,00	365	49.972,60	12.693.041,10			12.693.041,10		254	12.693.041,10	0
			SERGIO CRESPO DEL RIO	PT. SMART ADVISORY SOLUTIONS		01/10/2024	30/09/2025	18.175.950,00	365	49.797,12	13.594.614,66			13.594.614,66		273	13.594.614,66	0
			JUNNOSUKE NAKAMURA	APPKEY PT		29/09/2024	28/09/2025	18.240.000,00	365	49.972,60	13.542.575,34			13.542.575,34		271	13.542.575,34	0
			CARLOTTA MARIE ANNE DYEVRE	PT. SMART ADVISORY SOLUTIONS		26/09/2024	25/09/2025	18.175.950,00	365	49.797,12	13.345.629,04			13.345.629,04		268	13.345.629,04	0
			ROGER JAMES HAMILTON	XL BALI VILLAS PT		19/10/2024	18/10/2025	18.240.000,00	365	49.972,60	14.542.027,40			14.542.027,40		291	14.542.027,40	0
			AXELLE MARIE , ALIX BRESSON	MAGALI PASCAL PT		17/09/2024	18/09/2025	18.240.000,00	367	49.700,27	12.971.771,12			12.971.771,12		261	12.971.771,12	0
			TANIA MARIA MEJIA CAPISTRAN	NUSA PENIDA INVESTMENS PT		28/09/2024	27/09/2025	18.240.000,00	365	49.972,60	13.492.602,74			13.492.602,74		270	13.492.602,74	0
			SABINA MARIA DE JONG	PT BALI ARTIS MANAJEMEN		14/10/2024	13/10/2025	18.120.000,00	365	49.643,84	14.198.136,99			14.198.136,99		286	14.198.136,99	0
			FREDERIC EMILE VICTOR	BANYAN EMPAT BELAS, PT		11/10/2024	10/10/2025	18.060.000,00	365	49.479,45	14.002.684,93			14.002.684,93		283	14.002.684,93	0
			SHARON CELESTE BITTNER	PT. BALI YOGA PROFESIONAL		05/10/2024	04/10/2025	18.060.000,00	365	49.479,45	13.705.808,22			13.705.808,22		277	13.705.808,22	0
			FABIO DONATI	ACTIVE WATERS PT		19/11/2024	18/11/2025	18.180.000,00	365	49.808,22	16.038.246,58			16.038.246,58		322	16.038.246,58	0
			ANNELISE CHANTAL SOPHIE REYMONDIER EP JOUFFRIEAU	MOSHA JUANA BALI PT		12/09/2024	11/09/2025	18.180.000,00	365	49.808,22	12.651.287,67			12.651.287,67		254	12.651.287,67	0
			BENOIT JEAN DIDIER JOUFFRIEAU	MOSHA JUANA BALI PT		21/09/2024	20/09/2025	18.180.000,00	365	49.808,22	13.099.561,64			13.099.561,64		263	13.099.561,64	0
			MAN SINGH	NEW DELHI INDIAN RESTAURANT, PT		25/10/2024	24/10/2025	18.180.000,00	365	49.808,22	14.793.041,10			14.793.041,10		297	14.793.041,10	0
			NGUYEN HOANG ANH THU	PT. GAIRAH SCUBA INDO		01/11/2024	30/10/2025	18.120.000,00	364	49.780,22	15.083.406,59			15.083.406,59		303	15.083.406,59	0
			SARAH RAMARRI MASSIE	IMPERIAL INDO MULIA, PT		25/10/2024	24/10/2025	18.120.000,00	365	49.643,84	14.744.219,18			14.744.219,18		297	14.744.219,18	0
			JOHN FRANCIS LINCOLN	PT. LIMA ARSITEKS INDONESIA		23/10/2024	22/10/2025	18.060.000,00	365	49.479,45	14.596.438,36			14.596.438,36		295	14.596.438,36	0
			BRENDAN CHARLES DEARLING	WISATA PETUALANGAN AUSSIE BALI PT		08/10/2024	07/10/2025	18.060.000,00	365	49.479,45	13.854.246,58			13.854.246,58		280	13.854.246,58	0
			MATHILDE DENISE YVONNE ADAM	BALI GIRIKENCANA, PT		20/10/2024	19/10/2025	18.060.000,00	365	49.479,45	14.448.000,00			14.448.000,00		292	14.448.000,00	0
			NATHANIEL LAMAR HAYWOOD	HYWD GLOBAL INVESTMENTS PT		02/11/2024	01/11/2025	18.060.000,00	365	49.479,45	15.091.232,88			15.091.232,88		305	15.091.232,88	0
			DJAMAL SAOULI	SEMARA JAYA INDONESIA, PT		02/11/2024	01/11/2025	18.000.000,00	365	49.315,07	15.041.095,89			15.041.095,89		305	15.041.095,89	0
			KIM HAZEL SPENCER	SHAMBALA PAYANGAN INDAH PT		12/08/2024	11/08/2025	18.000.000,00	365	49.315,07	10.997.260,27			10.997.260,27		223	10.997.260,27	0
			STEFAN MUELLER	MAKMUR ABADI SUKSES, PT		07/11/2024	06/11/2025	18.000.000,00	365	49.315,07	15.287.671,23			15.287.671,23		310	15.287.671,23	0
			SELMA HARING E/V VAN DOKKUM	PT SMOKY ROSE QUARTZ		25/09/2024	24/09/2025	18.000.000,00	365	49.315,07	13.167.123,29			13.167.123,29		267	13.167.123,29	0
			WILLIAM NEVILLE ROBERTSON	PT PUTRA NADI WIBAWA		05/10/2024	04/10/2025	18.000.000,00	365	49.315,07	13.660.273,97			13.660.273,97		277	13.660.273,97	0
			DAMIEN COLLETA	PT. BALILOCATIONS		01/10/2024	30/10/2025	17.820.000,00	395	45.113,92	13.669.518,99			13.669.518,99		303	13.669.518,99	0
			LEI YUHAO	PT. MEGA BLUE ROCK		04/10/2024	03/10/2025	17.760.000,00	365	48.657,53	13.429.479,45			13.429.479,45		276	13.429.479,45	0
			HELENA BERANKOVA	PT. BALI YOGA PROFESIONAL		09/10/2024	08/10/2025	17.760.000,00	365	48.657,53	13.672.767,12			13.672.767,12		281	13.672.767,12	0
			SAMANTHA ANGELA COUSINS	PT. BALI YOGA PROFESIONAL		09/10/2024	08/10/2025	17.760.000,00	365	48.657,53	13.672.767,12			13.672.767,12		281	13.672.767,12	0
			ARVIND KOTNALA	INDIIA BALI JAYA, PT.		09/10/2024	08/10/2025	17.760.000,00	365	48.657,53	13.672.767,12			13.672.767,12		281	13.672.767,12	0
			VINCENZO PAOLO SACCONE	KATARINA BLU, PT.		10/10/2024	09/10/2025	17.820.000,00	365	48.821,92	13.767.780,82			13.767.780,82		282	13.767.780,82	0
			CALUDINE DAIGNEAULT	ABYYS OCEAN WORLD, PT		07/11/2024	06/11/2025	17.820.000,00	365	48.821,92	15.134.794,52			15.134.794,52		310	15.134.794,52	0
			ANDREI ABASKALOV	BALI FINC CONSULTING		31/10/2024	30/10/2025	17.820.000,00	365	48.821,92	14.793.041,10			14.793.041,10		303	14.793.041,10	0
			MARTIN GILLES ROBERT FERRAND	WND SUSTAINABLE MARKETING, PT		10/10/2024	09/10/2025	17.820.000,00	365	48.821,92	13.767.780,82			13.767.780,82		282	13.767.780,82	0
			DARIA REBENKOVA	INDONESIA BALI NUSANTARA, PT		22/10/2024	21/10/2025	17.820.000,00	365	48.821,92	14.353.643,84			14.353.643,84		294	14.353.643,84	0
			MARTINUS LAURENTIUS DE SWART	BIRO PERJALANAN WISATA IS INDONESIA PT		06/10/2024	05/10/2025	18.000.000,00	365	49.315,07	13.709.589,04			13.709.589,04		278	13.709.589,04	0
			ANDREW ADRIAN ISSENMANN	DWI SATRIA JAYA, PT		19/10/2024	18/10/2025	18.000.000,00	365	49.315,07	14.350.684,93			14.350.684,93		291	14.350.684,93	0
			ANDREA BUCARIA	PT. ACA BIN SALABIN		15/10/2024	14/10/2025	18.360.000,00	365	50.301,37	14.436.493,15			14.436.493,15		287	14.436.493,15	0
			ANIL SINGH	NEW DELHI INDIAN RESTAURANT, PT		15/10/2024	14/10/2025	18.360.000,00	365	50.301,37	14.436.493,15			14.436.493,15		287	14.436.493,15	0
			DHAN SINGH	NEW DELHI INDIAN RESTAURANT, PT		15/10/2024	14/10/2025	18.360.000,00	365	50.301,37	14.436.493,15			14.436.493,15		287	14.436.493,15	0
			YEN CHEN CHANG	WYNNCOR BALI, PT		04/11/2024	03/11/2025	18.420.000,00	365	50.465,75	15.492.986,30			15.492.986,30		307	15.492.986,30	0
			LOIC VINCENT ROMAIN GREUET	SINAR HIJAU BALI, PT		25/10/2024	24/10/2025	18.420.000,00	365	50.465,75	14.988.328,77			14.988.328,77		297	14.988.328,77	0
			DENYS ALMENDIEIEV	PT. PURE DIVE RESORT		02/11/2024	01/11/2025	18.420.000,00	365	50.465,75	15.392.054,79			15.392.054,79		305	15.392.054,79	0
			ALLISON LEE GRIFFIN	PT. GURU YOGA CANGGU		01/11/2024	30/10/2025	18.360.000,00	364	50.439,56	15.283.186,81			15.283.186,81		303	15.283.186,81	0
			DAVID JOHN O BOYLE	PT. PUTRA BUANA NUSA		19/10/2024	18/10/2025	18.360.000,00	365	50.301,37	14.637.698,63			14.637.698,63		291	14.637.698,63	0
			MARCO VAN DER MERWE	LIGHT SPACE DESIGN PT		26/11/2024	25/11/2025	18.360.000,00	365	50.301,37	16.549.150,68			16.549.150,68		329	16.549.150,68	0
			YOSHIYO KONNO (ITO)	BALI CRUISES NUSANTARA PT		19/11/2024	18/11/2025	18.360.000,00	365	50.301,37	16.197.041,10			16.197.041,10		322	16.197.041,10	0
			JULIEN BEQUET	PT. JULIEN TAHAR DAN PANDAWA INVESTASI		20/10/2024	19/10/2025	18.360.000,00	365	50.301,37	14.688.000,00			14.688.000,00		292	14.688.000,00	0
			MARK CRAIG KEATINGE	BALEGEDE INTERNATIONAL, PT		12/05/2024	11/05/2025	18.360.000,00	365	50.301,37	6.589.479,45			6.589.479,45		131	6.589.479,45	0
			CAMERON GLENN DOUGLAS	PESONA AUSTINA PROPERTY PT		04/11/2024	03/11/2025	18.300.000,00	365	50.136,99	15.392.054,79			15.392.054,79		307	15.392.054,79	0
			ANDREW ALAN COOLEY	PESONA ALAM NIRWANA PROPERTY, PT		26/11/2024	25/11/2025	18.300.000,00	365	50.136,99	16.495.068,49			16.495.068,49		329	16.495.068,49	0
			NICOLA WALPEN	PT. YOGA BALI SHANTI		04/11/2024	03/11/2025	18.300.000,00	365	50.136,99	15.392.054,79			15.392.054,79		307	15.392.054,79	0
			KENJI SASAKI	PT KAPS ART STUDIO		29/10/2024	28/10/2025	18.300.000,00	365	50.136,99	15.091.232,88			15.091.232,88		301	15.091.232,88	0
			PRADEEP SINGH	PT. BALI SARI AGUNG		18/11/2024	17/11/2025	18.240.000,00	365	49.972,60	16.041.205,48			16.041.205,48		321	16.041.205,48	0
			EKREM REYHANCIOGLU	NAUTIC ASIA LIMITED		02/11/2024	01/11/2025	18.240.000,00	365	49.972,60	15.241.643,84			15.241.643,84		305	15.241.643,84	0
			INDRANIL RAMCHANDRA KHADE	BALI GIRIKENCANA		03/11/2024	02/11/2025	18.240.000,00	365	49.972,60	15.291.616,44			15.291.616,44		306	15.291.616,44	0
			JASMIN KLEINBUB	BALI FINC CONSULTING		04/11/2024	03/11/2025	18.240.000,00	365	49.972,60	15.341.589,04			15.341.589,04		307	15.341.589,04	0
			RASITHA LAKSHAN AILAPPERUMA	PT. WASKITA WANGSA ABADI JAYA DUA		31/10/2024	30/10/2025	18.240.000,00	365	49.972,60	15.141.698,63			15.141.698,63		303	15.141.698,63	0
			NATALIA RODNIKOVA	WONDERLAND BALI EVENTS PT		17/11/2024	16/11/2025	18.240.000,00	365	49.972,60	15.991.232,88			15.991.232,88		320	15.991.232,88	0
			G MEI LING SERENA	PT. BLUE PALM MANAGEMENT		27/11/2024	26/11/2025	18.240.000,00	365	49.972,60	16.490.958,90			16.490.958,90		330	16.490.958,90	0
			POPOV EVGENII	EAST SIDE PARTNERSHIP PT		23/11/2024	22/11/2025	18.240.000,00	365	49.972,60	16.291.068,49			16.291.068,49		326	16.291.068,49	0
			BRAM BREDERO			01/11/2024	30/10/2025	18.360.000,00	364	50.439,56	15.283.186,81			15.283.186,81		303	15.283.186,81	0

Kode/Nama Akun	OPD	Keterangan (Kategori PDD/Aset yang disewa)	Nama Perusahaan/Perorangan Yang Menyewa	Lokasi	Nomor SK Perjanjian	Periode Pembayaran PDD		Jumlah Diterima (Rp)	Jumlah Hari atas Pembayaran	Nilai Per/Hari (Rp)	Saldo Awal 2025 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)		Saldo setelah Koreksi Saldo Awal (Rp)	Menjadi Bagian Piutang (Case Khusus) dan Dihitung di kertas kerja berbeda	Jumlah Hari Pengakuan PDD di Tahun 2025	Pendapatan LO Tahun 2025 dari PDD (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 (Rp)
						Mulai	Berakhir					Bertambah	Berkurang					
			RAVI KUMAR	PT. BOLLYWOOD INDIAN CUISINE		22/12/2024	21/12/2025	16.830.000,00	365	46.109,59	16.368.904,11			16.368.904,11		355	16.368.904,11	0
			MATTHIEU PAUL ALEXANDRE HOREAU	IMPERIAL INDO MULIA, PT		04/11/2024	03/11/2025	18.360.000,00	365	50.301,37	15.442.520,55			15.442.520,55		307	15.442.520,55	0
			FREDDY MIRA	CONCEPTS SELAM INDONESIA, PT		04/11/2024	03/11/2025	18.360.000,00	365	50.301,37	15.442.520,55			15.442.520,55		307	15.442.520,55	0
			MITSUNORI FUKUDA	PT. KOMEDA COFFEE INDONESIA		14/11/2024	13/11/2025	18.360.000,00	365	50.301,37	15.945.534,25			15.945.534,25		317	15.945.534,25	0
			NEETU GUPTA	CITRUS TREE GROUP, PT		10/12/2024	09/12/2025	18.360.000,00	365	50.301,37	17.253.369,86			17.253.369,86		343	17.253.369,86	0
			DARIA KONYSHEVA	PT. MIMPI MANIS INDONESIA		28/11/2024	27/11/2025	18.360.000,00	365	50.301,37	16.649.753,42			16.649.753,42		331	16.649.753,42	0
			VIOLAINE JEHANNE BOSQUILLON DE JENLIS	PT. VALRHONA CHOCOLATE PARK		25/11/2024	24/11/2025	18.480.000,00	365	50.630,14	16.606.684,93			16.606.684,93		328	16.606.684,93	0
			SKYLER LEE GRANT	SUPA DUPA SPICE PT		05/11/2024	04/11/2025	18.480.000,00	365	50.630,14	15.594.082,19			15.594.082,19		308	15.594.082,19	0
			AMY HELENA BENNETT	PT. COMPLETE ISLAND LIVING		19/01/2025	18/01/2026	18.480.000,00	365	50.630,14	18.480.000,00			18.480.000,00		347	17.568.657,53	911.342,47
			JESUS GISBERT CARBONELL	HOTEL PANDAN ARUM PT		15/01/2025	14/01/2026	18.420.000,00	365	50.465,75	18.420.000,00			18.420.000,00		351	17.713.479,45	706.520,55
			VERENA LIESELOTTE LEHNER	MAGALI PASCAL PT		13/11/2024	12/11/2025	18.420.000,00	365	50.465,75	15.947.178,08			15.947.178,08		316	15.947.178,08	0
			SATBEER SINGH	PT BALI SARI AGUNG		26/11/2024	25/11/2025	18.420.000,00	365	50.465,75	16.603.232,88			16.603.232,88		329	16.603.232,88	0
			THORSTEN WOLFGANG MEINHOLZ	PT MITRA PRESTASI GEMILANG		06/11/2024	05/11/2025	18.480.000,00	365	50.630,14	15.644.712,33			15.644.712,33		309	15.644.712,33	0
			JORDAN THOMAS CULLEN POROZNY	PT PARADISE PROPERTY GROUP		11/11/2024	10/11/2025	18.540.000,00	365	50.794,52	15.949.479,45			15.949.479,45		314	15.949.479,45	0
			KENNETH JAMES WICKES	PT SHAN RESTORAN BALI		26/11/2024	25/11/2025	18.540.000,00	365	50.794,52	16.711.397,26			16.711.397,26		329	16.711.397,26	0
			ANDRE FOURIE	BALI CRUISES NUSANTARA, PT		07/12/2024	06/12/2025	18.540.000,00	365	50.794,52	17.270.136,99			17.270.136,99		340	17.270.136,99	0
			MARINA CHESNOVA	LAZY YOUNG AMBITIOUS GUYS PT		25/11/2024	24/11/2025	18.420.000,00	365	50.465,75	16.552.767,12			16.552.767,12		328	16.552.767,12	0
			XAVIER REGIS LOUP	PT PMA CELERITY VISA		03/12/2024	02/12/2025	18.480.000,00	365	50.630,14	17.011.726,03			17.011.726,03		336	17.011.726,03	0
			BENJAMIN DANIEL PHILIPPE ANDRE LECHEVALIER	PT MEME NYAKAN ROTI		07/12/2024	06/12/2025	18.480.000,00	365	50.630,14	17.214.246,58			17.214.246,58		340	17.214.246,58	0
			VICTORIANO COMBALICER BUENDICHO	THE VILLA VILLA PT		03/12/2024	02/12/2025	18.480.000,00	365	50.630,14	17.011.726,03			17.011.726,03		336	17.011.726,03	0
			PHILIPPE JEAN MARIE MILLIAT	SEMBILANSATU DELAPANENAM PT		26/11/2024	25/11/2025	18.480.000,00	365	50.630,14	16.657.315,07			16.657.315,07		329	16.657.315,07	0
			YUMIKO MORISHIGE	BALI GALATEYA PT		20/01/2025	19/01/2026	18.480.000,00	365	50.630,14	18.480.000,00			18.480.000,00		346	17.518.027,40	961.972,60
			YOSHIMI MIZUTA	BALI GALATEYA PT		05/11/2024	04/11/2025	18.480.000,00	365	50.630,14	15.594.082,19			15.594.082,19		308	15.594.082,19	0
			FABIANA ZANATI	PT LURETTA KONSULTAN GRUP		29/12/2024	28/12/2025	18.540.000,00	365	50.794,52	18.387.616,44			18.387.616,44		362	18.387.616,44	0
			ALEXANDER CHERTKOV	SERENDIPITY CONSULTANT INDONESIA PT		06/11/2024	05/11/2025	18.660.000,00	365	51.123,29	15.797.095,89			15.797.095,89		309	15.797.095,89	0
			THORSTEN DHEUREUSE	PT TROPLAND DESAIN KONSULTAN		03/12/2024	02/12/2025	18.600.000,00	365	50.958,90	17.122.191,78			17.122.191,78		336	17.122.191,78	0
			ALEXEY EZHELOV	SERENDIPITY CONSULTANT INDONESIA PT		28/11/2024	27/11/2025	18.600.000,00	365	50.958,90	16.867.397,26			16.867.397,26		331	16.867.397,26	0
			AMICHAI SHLOMO GANIEL	PT. PURI SARI LESTARI		11/01/2025	10/01/2026	18.720.000,00	365	51.287,67	18.720.000,00			18.720.000,00		355	18.207.123,29	512.876,71
			RODERICK DOUGLAS MYERS	PT. DALA RISET GLOBAL		02/02/2024	01/02/2025	18.720.000,00	366	51.147,54	1.636.721,31			1.636.721,31		32	1.636.721,31	0
			NAHMIAS HAROLD BLAISE AARON WILLIAM	WHITE STORK BALI, PT		25/11/2024	24/11/2025	18.720.000,00	365	51.287,67	16.822.356,16			16.822.356,16		328	16.822.356,16	0
			HERVE RICHARD RENE MAZELLA	WYNNCOR BALI PT		23/12/2024	22/12/2025	18.720.000,00	365	51.287,67	18.258.410,96			18.258.410,96		356	18.258.410,96	0
			VALENTINA RAMIREZ OCHOA	PT APNEA BALI FREEDIVING		30/01/2025	29/01/2026	18.720.000,00	365	51.287,67	18.720.000,00			18.720.000,00		336	17.232.657,53	1.487.342,47
			VIJAY PRAKASH RATURI	INDIIA BALI JAYA, PT		26/11/2024	25/11/2025	18.720.000,00	365	51.287,67	16.873.643,84			16.873.643,84		329	16.873.643,84	0
			MOHIT KUMAR PANT	INDIIA BALI JAYA, PT		26/11/2024	25/11/2025	18.720.000,00	365	51.287,67	16.873.643,84			16.873.643,84		329	16.873.643,84	0
			ARKADII ALMENDIEIEV	PT PURE DIVE RESORT		30/12/2024	29/12/2025	18.720.000,00	365	51.287,67	18.617.424,66			18.617.424,66		363	18.617.424,66	0
			DEV CHAND	NEW DELHI INDIAN RESTAURANT, PT		03/12/2024	02/12/2025	18.660.000,00	365	51.123,29	17.177.424,66			17.177.424,66		336	17.177.424,66	0
			JAYVEER SINGH	NEW DELHI INDIAN RESTAURANT, PT		03/12/2024	02/12/2025	18.660.000,00	365	51.123,29	17.177.424,66			17.177.424,66		336	17.177.424,66	0
			HU CHANGZHU	PT. INDONESIA KAISHI TOURISM PROPERTY INVESTMENT		29/11/2024	28/11/2025	18.660.000,00	365	51.123,29	16.972.931,51			16.972.931,51		332	16.972.931,51	0
			SEAN BRIAN MCALONEY	PT. MILLIE UTAMA SAKTI		22/12/2024	21/12/2025	18.600.000,00	365	50.958,90	18.090.410,96			18.090.410,96		355	18.090.410,96	0
			EMMA JO ROSS	PT. ELEVATION BARN INDONESIA		17/02/2025	16/12/2025	18.720.000,00	303	61.782,18	18.720.000,00			18.720.000,00		303	18.720.000,00	0
			RIA RAMBULAN TEMPLER	SUPA DUPA SPICE PT		31/12/2024	30/12/2025	18.720.000,00	365	51.287,67	18.668.712,33			18.668.712,33		364	18.668.712,33	0
			KATHLEEN FEARS COOK	TUBUH PIKIRAN SEHAT PT		24/12/2024	23/12/2025	18.660.000,00	365	51.123,29	18.251.013,70			18.251.013,70		357	18.251.013,70	0
			NEIL CHARLES ANDREW DALGLIESH	PT. BALI HIGH CREATIONS		29/11/2024	28/11/2025	18.660.000,00	365	51.123,29	16.972.931,51			16.972.931,51		332	16.972.931,51	0
			AHMED SALALUDDIN	QUEENS OF INDIA PT		29/12/2024	28/12/2025	18.660.000,00	365	51.123,29	18.506.630,14			18.506.630,14		362	18.506.630,14	0
			PAVAN KUMAR GOUR	QUEENS OF INDIA PT		29/12/2024	28/12/2025	18.660.000,00	365	51.123,29	18.506.630,14			18.506.630,14		362	18.506.630,14	0
			DAVID MARCUS MARTIN NUETZEL	DESTIANTION ASIA, PT		20/01/2025	19/01/2026	18.600.000,00	365	50.958,90	18.600.000,00			18.600.000,00		346	17.631.780,82	968.219,18
			PAOLA ZANCANARO	NAMU CEMPAKA BALI PT		03/03/2025	02/03/2026	18.600.000,00	365	50.958,90	18.600.000,00			18.600.000,00		304	15.491.506,85	3.108.493,15
			NIKOLAI GALCHENKO	PT BALI INVESTMENT SFG		15/12/2024	14/12/2025	18.600.000,00	365	50.958,90	17.733.698,63			17.733.698,63		348	17.733.698,63	0
			TYLER JUDSON TOLMAN	PT TOLMAN HEALTH EVENTS		31/12/2024	20/12/2025	18.600.000,00	355	52.394,37	18.547.605,63			18.547.605,63		354	18.547.605,63	0
			CARLOS ESPARZA BORRELL PENADES	PT PMA BALI TENNIS INTERNATIONAL		09/01/2025	08/01/2026	18.600.000,00	365	50.958,90	18.600.000,00			18.600.000,00		357	18.192.328,77	407.671,23
			ZENG MIN	PT LOTUS CONSULTING		22/12/2024	21/12/2025	18.600.000,00	365	50.958,90	18.090.410,96			18.090.410,96		355	18.090.410,96	0
			MARTIN MALNOU CASTETBON	PT. GAIA PLASTIK RESYCLING		16/12/2024	15/12/2025	18.600.000,00	365	50.958,90	17.784.657,53			17.784.657,53		349	17.784.657,53	0
			MAKIKO OKI	PT. BALI BAGUS BAHANA		17/12/2024	16/12/2025	18.600.000,00	365	50.958,90	17.835.616,44			17.835.616,44		350	17.835.616,44	0
			NICOLAS FRANCOIS KARL LIOT	CONCEPTS SELAM INDONESIA, PT		22/01/2025	21/01/2026	18.660.000,00	365	51.123,29	18.660.000,00			18.660.000,00		344	17.586.410,96	1.073.589,04
			ANDREA SAGASTUME DORE KROEYTZER	PENYELAM PENYELAM BALI CRYSTAL PT		11/01/2025	10/01/2026	18.660.000,00	365	51.123,29	18.660.000,00			18.660.000,00		355	18.148.767,12	511.232,88
			AVALON MERU CARVENTER	PT DJANJI DJATI DJAYA		18/11/2024	18/11/2025	18.660.000,00	366	50.983,61	16.416.721,31			16.416.721,31		322	16.416.721,31	0
			STEPHANE JEAN CLEMENT SENSEY	KREASI SENI MANDIRI INDOENSIA, PT		16/12/2024	16/12/2025	18.660.000,00	366	50.983,61	17.844.262,30			17.844.262,30		350	17.844.262,30	0
			MICHAEL CRISTHOPER KING	PT. BUMI MATA LINDO		05/01/2025	04/01/2026	18.720.000,00	365	51.287,67	18.720.000,00			18.720.000,00		361	18.514.849,32	205.150,68
			ANNA MARIE RICHARDSON	PT. TIRTA SEMARA		22/01/2025	21/01/2026	18.720.000,00	365	51.287,67	18.720.000,00			18.720.000,00		344	17.642.958,90	1.077.041,10
			XAVIER SEBASTIEN MARTINEAU	PT. FRENCH KISS DIVERS		10/03/2025	09/03/2026	18.720.000,00	365	51.287,67	18.720.000,00			18.720.000,00		297	15.232.438,36	3.487.561,64
			ALISTER STUART CRAN	PT. ORIENTAL BALI CONSULTING		22/12/2024	21/12/2025	18.720.000,00	365	51.287,67	18.207.123,29			18.207.123,29		355	18.207.123,29	0
			MELNIKOVA ALEKSANDRA	PT. INDOSARANA BALI WISATA		17/12/2024	16/12/2025	18.720.000,00	365	51.287,67	17.950.684,93			17.950.684,93		350	17.950.684,93	0
			NGO MY CHAO	PT. GAIRAH SCUBA INDO		28/01/2025	27/01/2026	18.780.000,00	365	51.452,05	18.780.000,00			18.780.000,00		338	17.390.794,52	1.389.205,48
			GAURAV NAINWAL	NEW DELHI INDIAN RESTAURANT		21/12/2024	20/12/2025	18.780.000,00	365	51.452,05	18.214.027,40			18.214.027,40		354	18.214.027,40	0
			KONSTANTIN GORDON	PT. WOODEN FISH VILLAGE		20/12/2024	19/12/2025	18.780.000,00	365	51.452,05	18.162.575,34			18.162.575,34		353	18.162.575,34	0
			LORENZO GIOTTO CASTIGLIONI	PT. BANYU SAKTI JAYA		15/01/2025	15/01/2026	18.780.000,00	366	51.311,48	18.780.000,00			18.780.000,00		351	18.010.327,87	769.672,13

Kode/Nama Akun	OPD	Keterangan (Kategori PDD/Aset yang disewa)	Nama Perusahaan/Perorangan Yang Menyewa	Lokasi	Nomor SK Perjanjian	Periode Pembayaran PDD		Jumlah Diterima (Rp)	Jumlah Hari atas Pembayaran	Nilai Per/Hari (Rp)	Saldo Awal 2025 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)		Saldo setelah Koreksi Saldo Awal (Rp)	Menjadi Bagian Piutang (Case Khusus) dan Dihitung di kertas kerja berbeda	Jumlah Hari Pengakuan PDD di Tahun 2025	Pendapatan LO Tahun 2025 dari PDD (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 (Rp)
						Mulai	Berakhir					Bertambah	Berkurang					
			ELISABETTA VIDALI	PT. INCISE TRAINING CENTER		28/12/2024	27/12/2025	19.080.000,00	365	52.273,97	18.870.904,11			18.870.904,11		361	18.870.904,11	0
			CAMILLA CHIAM HUI LEE	BALI GIRIKENCANA		30/01/2025	29/01/2026	18.960.000,00	365	51.945,21	18.960.000,00			18.960.000,00		336	17.453.589,04	1.506.410,96
			VICENTE JOSHUA BRUNO GARDNER	PT. BALI HIGH CREATIONS		15/02/2025	14/02/2026	19.020.000,00	365	52.109,59	19.020.000,00			19.020.000,00		320	16.675.068,49	2.344.931,51
			HIROMI YUKUTAKE	RAKUTEN SINGAPORE TRAVEL PTE LTD		13/03/2025	12/03/2026	19.020.000,00	365	52.109,59	19.020.000,00			19.020.000,00		294	15.320.219,18	3.699.780,82
			ARUP DAS	QUEENS OF INDIA PT		19/01/2025	18/01/2026	19.020.000,00	365	52.109,59	19.020.000,00			19.020.000,00		347	18.082.027,40	937.972,60
			BRANDON VENTER	QUEENS TANDOOR PT		03/01/2025	02/01/2026	19.020.000,00	365	52.109,59	19.020.000,00			19.020.000,00		363	18.915.780,82	104.219,18
			BEATRICE GARCIA	SUPERNOBA MARKETING AGENCY PT		24/01/2025	23/01/2026	19.080.000,00	365	52.273,97	19.080.000,00			19.080.000,00		342	17.877.698,63	1.202.301,37
			KISHAN SINGH	QUEENS TANDOOR PT		07/01/2025	06/01/2026	19.020.000,00	365	52.109,59	19.020.000,00			19.020.000,00		359	18.707.342,47	312.657,53
			BLAINE TREVOR TOMS	BALI MOON		05/01/2025	04/01/2026	19.020.000,00	365	52.109,59	19.020.000,00			19.020.000,00		361	18.811.561,64	208.438,36
			BRENTON LEIGH BANNER	PT.KERA EMAS BALI		18/01/2025	17/01/2026	19.080.000,00	365	52.273,97				0		348	18.191.342,47	888.657,53
			GUIDO DIRK H GEENS	PT.NOMINASI CHANDRA WISATA		28/02/2025	27/02/2026	19.020.000,00	365	52.109,59				0		307	15.997.643,84	3.022.356,16
			STEFANIE NADINE BARTHELMESS	PT.PURE DIVE RESORT		16/02/2025	15/02/2026	19.020.000,00	365	52.109,59				0		319	16.622.958,90	2.397.041,10
			RAM SINGH	PT.PETANG RETREAT CENTER		29/01/2025	28/01/2026	19.020.000,00	365	52.109,59				0		337	17.560.931,51	1.459.068,49
			ELENA SMOLNIKOVA	PT.KAMALA INDOPURA HANJAYA		18/01/2025	17/01/2026	19.020.000,00	365	52.109,59				0		348	18.134.136,99	885.863,01
			VIKTORIA TRIP	PT.INCENSE TRAINING CENTER		16/01/2025	15/01/2026	19.020.000,00	365	52.109,59				0		350	18.238.356,16	781.643,84
			MARAT ESTEMESOV	BALI FINC CONSULTING		13/01/2025	12/01/2026	19.020.000,00	365	52.109,59				0		353	18.394.684,93	625.315,07
			KAMAL JEET SINGH	PT.BOLLYWOOD INDIAN CUISINE		19/01/2025	18/01/2026	19.020.000,00	365	52.109,59				0		347	18.082.027,40	937.972,60
			MIN HYE CHO	PT.BAEKJEONG KOREAN RESTAURANT INDONESIA		12/01/2025	11/01/2026	19.020.000,00	365	52.109,59				0		354	18.446.794,52	573.205,48
			NAOKO FUJIKAWA	PT.HARMONI BALI SEJAHTERA		29/01/2025	28/01/2026	19.020.000,00	365	52.109,59				0		337	17.560.931,51	1.459.068,49
			CHILKIT PAREEK	PT.QUEENS TANDOOR		14/02/2025	13/02/2026	19.080.000,00	365	52.273,97				0		321	16.779.945,21	2.300.054,79
			SURESH RAM	PT.SATTVIK FOOD AND CATERING		12/01/2025	11/01/2026	19.080.000,00	365	52.273,97				0		354	18.504.986,30	575.013,70
			AMRENDRA SINGH BIST	PT.SATTVIK FOOD AND CATERING		12/01/2025	11/01/2026	19.080.000,00	365	52.273,97				0		354	18.504.986,30	575.013,70
			JULIENNE KRISTIN ZUERN	PT.BIRO BENDA INDONESIA		07/02/2025	06/02/2026	19.020.000,00	365	52.109,59				0		328	17.091.945,21	1.928.054,79
			ANNA POZNYAK	PT.ORIENTAL BALI CONSULTING		29/01/2025	28/01/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		337	17.671.726,03	1.468.273,97
			ALEXANDR SAVITSKII	PT.BALI YOGA PROFESIONAL		17/02/2025	16/02/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		318	16.675.397,26	2.464.602,74
			ELEFTHERIOU PANTELIS-PATRIC	PT.MITRA PRODIN		18/02/2025	17/02/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		317	16.622.958,90	2.517.041,10
			CARRIE BRADFORD JAMES	PT.SHAN RESTORAN BALI		19/02/2025	18/02/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		316	16.570.520,55	2.569.479,45
			CARL ERIKSON MONCAYO GICA	PT.SHAN RESTORAN BALI		06/02/2025	05/02/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		329	17.252.219,18	1.887.780,82
			RODERICK DOUGLAS MYERS	PT.DALA RISET GLOBAL		02/02/2025	01/02/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		333	17.516.712,33	1.683.287,67
			CHAUHAN ANKIT	PT.PETANG RETREAT CENTER		01/02/2025	31/01/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		334	17.569.315,07	1.630.684,93
			KELSANG DOLMA	PT.WOODEN FISH VILLAGE		21/02/2025	20/02/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		314	16.517.260,27	2.682.739,73
			TIMO INGENABEL	BALI MEDIA KOMERSIAL		08/02/2025	07/02/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		327	17.201.095,89	1.998.904,11
			MATTHEW SCOTT YOUNG	PT.AUTOGRILL SERVICES INDONESIA		24/03/2025	23/03/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		283	14.886.575,34	4.313.424,66
			ASHLEY LEONARD GARVEY	PT.SHAN RESTORAN BALI		20/02/2025	19/02/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		315	16.569.863,01	2.630.136,99
			DIONE TAYLOR REED	PT.CHILL LONGEVITY RESORT		06/02/2025	05/02/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		329	17.252.219,18	1.887.780,82
			ANDREI KUMSKOV	PT.WOODEN FISH VILLAGE		01/02/2025	31/01/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		334	17.514.410,96	1.625.589,04
			YUKI TAKAOKA	PT.INDONESIA DESIGN CONSULTING		24/01/2025	23/01/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		342	17.933.917,81	1.206.082,19
			HASNAA BOUROUIS EP. TAGEMOUATI	PT PMA CELERITY VISA		06/02/2025	05/02/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		329	17.252.219,18	1.887.780,82
			DEVENDRA DATT	PT.WYNNCOR BALI		14/01/2025	13/01/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		352	18.458.301,37	681.698,63
			MICHAEL KARL BUGDOLL	PT.SMART ADVISORY SOLUTIONS		07/02/2025	06/02/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		328	17.199.780,82	1.940.219,18
			HENRIK CHRISTENSEN	PT REJUVIE ESTETIKA		04/02/2025	03/02/2026	19.080.000,00	365	52.273,97				0		331	17.302.684,93	1.777.315,07
			CORENTIN DAMIEN LORE	PT BALI LEGAL INTERNASIONAL		20/03/2025	19/03/2026	19.080.000,00	365	52.273,97				0		287	15.002.630,14	4.077.369,86
			ANJA LANGHOFF	PT REJUVIE ESTETIKA		04/02/2025	03/02/2026	19.080.000,00	365	52.273,97				0		331	17.302.684,93	1.777.315,07
			ROMAN YUMATOV	PT. ECOLIT KONTRAKTOR BALI		02/02/2025	01/02/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		333	17.461.972,60	1.678.027,40
			NICOLE BETTINA BUSCH	MUNTIGUNUNG PRODUKTEVERTRIEB GMBH		16/02/2025	15/02/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		319	16.727.835,62	2.412.164,38
			NATHALIE MARY HARVEY	PT. BALILOCATIONS		06/03/2025	05/03/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		301	15.783.945,21	3.356.054,79
			ANTOINE PIERRE REPITON PRENEUF	NAUTIC ASIA LIMITED		04/03/2025	03/03/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		303	15.988.438,36	3.271.561,64
			KIRK DOUGLAS	PT BALI YOGA PROFESIONAL		04/02/2025	03/02/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		331	17.465.917,81	1.794.082,19
			EKATERINA DEMENTEVA	PT BALI INVESTMENT SFG		09/02/2025	08/02/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		326	17.202.082,19	2.057.917,81
			STEPHANE ADELE KHAN	PT.BLUE CORNER		25/02/2025	24/02/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		310	16.357.808,22	2.902.191,78
			ALISHER UGLI ULUGBEK MAKHMUDOV	PT. ALEX VILLAS PROJECT		10/02/2025	09/02/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		325	17.095.890,41	2.104.109,59
			NICOLAS JEAN PAUL DENIS PATRICK SENES	PT BALI GIRIKENCANA		15/02/2025	14/02/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		320	16.832.876,71	2.367.123,29
			HERBERT MARLIN WATTS	PT. ANUGRAH MERTA SARI SEDANA		19/02/2025	18/02/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		316	16.570.520,55	2.569.479,45
			IVAN DAVID LAVELLE	PT PUTRA SAMUDRA MENYELAM		16/02/2025	15/02/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		319	16.727.835,62	2.412.164,38
			PATRICIA LOUISE WESTON	PT BALI BUDDIES MEDIA		09/02/2025	08/02/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		326	17.094.904,11	2.045.095,89
			RAMA GRANT WATTS	PT. ANUGRAH MERTA SARI SEDANA		30/01/2025	29/01/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		336	17.619.287,67	1.520.712,33
			MICHAEL JOEL OGLE	PT. BAMBOO PURE		15/02/2025	14/02/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		320	16.832.876,71	2.367.123,29
			YULIA MESHCHERIAKOVA	PT WOODEN FISH VILLAGE		17/02/2025	16/02/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		318	16.779.945,21	2.480.054,79
			ARTURO II VASQUEZ INTING	PT. GALA GROUP INDONESIA		17/02/2025	16/02/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		318	16.779.945,21	2.480.054,79
			PETER GAJDICS	PT. ARPAN BALI UTAMA		19/02/2025	18/02/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		316	16.674.410,96	2.585.589,04
			REGINA KURBANGALIEVA	PT. RASSVET DIGITAL INDONESIA		01/03/2025	28/02/2026	19.080.000,00	365	52.273,97				0		306	15.995.835,62	3.084.164,38
			GRIGORII BURKOV	PT LOTUS BALI CONSULTING		23/02/2025	22/02/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		312	16.412.054,79	2.787.945,21
			DEEPAK MEHTA	PT. INDIIA BALI JAYA		01/03/2025	28/02/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		306	16.096.438,36	3.103.561,64
			TIMUR MANSUROV	PT MILLIE UTAMA SAKTI		31/03/2025	30/03/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		276	14.518.356,16	4.681.643,84
			KRISTAPS BASKERS	PT SHAN RESTORAN BALI		25/03/2025	24/03/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		282	14.833.972,60	4.366.027,40
			KYLIE LAURETTE TURNER	PT. BALI OCEAN MAGIC		02/03/2025	01/03/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		305	16.043.835,62	3.156.164,38
			MAMI INOUE	PT. INDONESIA DESIGN CONSULTING		27/03/2025	26/03/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		280	14.774.794,52	4.485.205,48
			DAVINA JAYNE STEPHENS	PT ANUGRAH MERTA SARI SEDANA		24/03/2025	23/03/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		283	14.933.095,89	4.326.904,11
			ZACHARY JOHN HOLTMAN	PT. DWI MITRA NUSANTARA		07/03/2025	06/03/2026	19.440.000,00	365	53.260,27				0		300	15.978.082,19	3.461.917,81
			DAVID MAXIMILIEN LASNET	PT NEO PAPAZIAN BERNIAGA		24/04/2025	23/04/2026	19.320.000,00	365	52.931,51				0		252	13.338.739,73	5.981.260,27
			TAKESHI OTSUKA	PT. BALI GALATEYA		23/03/2025	22/03/2026	19.320.000,00	365	52.931,51				0		284	15.032.547,95	4.287.452,05
			MELINDA ANG MEI LING	PT. SANDY BAY		26/03/2025	25/03/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		281	14.781.369,86	4.418.630,14
			FREDERIC PIERRE PATRICK TAFFIN	PT PIONEER WISATA NUSANTARA		28/03/2025	27/03/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		279	14.722.027,40	4.537.972,60
			ELSHAN BAGIROV	PT BALI INVESTMENT SFG		19/03/2025	18/03/2026	19.320.000,00	365	52.931,51				0		288	15.244.273,97	4.075.726,03
			MARINE KA LAI CHAN USAGE CHAN BOURGEOIS	PT FRENCH KISS DIVERS		13/03/2025	12/03/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		294	15.465.205,48	3.734.794,52

Kode/Nama Akun	OPD	Keterangan (Kategori PDD/Aset yang disewa)	Nama Perusahaan/Perorangan Yang Menyewa	Lokasi	Nomor SK Perjanjian	Periode Pembayaran PDD		Jumlah Diterima (Rp)	Jumlah Hari atas Pembayaran	Nilai Per/Hari (Rp)	Saldo Awal 2025 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)		Saldo setelah Koreksi Saldo Awal (Rp)	Menjadi Bagian Piutang (Case Khusus) dan Dihitung di kertas kerja berbeda	Jumlah Hari Pengakuan PDD di Tahun 2025	Pendapatan LO Tahun 2025 dari PDD (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 (Rp)
						Mulai	Berakhir					Bertambah	Berkurang					
			JANASZKIEWICZ EMILIA JOANNA	PT PETANG RETREAT CENTER		25/03/2025	24/03/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		282	14.880.328,77	4.379.671,23
			KYUIL HAN	PT. BIBIMBAP KOREAN RESTAURANT		24/03/2025	23/03/2026	19.440.000,00	365	53.260,27				0		283	15.072.657,53	4.367.342,47
			SHOKO TERAOKA	PT. GLORY RETAILINDO		10/03/2025	09/03/2026	19.440.000,00	365	53.260,27				0		297	15.818.301,37	3.621.698,63
			DARYA TOLKACHEVA	PT BALI INVESTMENT SFG		19/04/2025	18/04/2026	19.380.000,00	365	53.095,89				0		257	13.645.643,84	5.734.356,16
			ANNA PAULINE DOURTHE	PT. SMART ADVISORY SOLUTIONS		30/03/2025	29/03/2026	19.380.000,00	365	53.095,89				0		277	14.707.561,64	4.672.438,36
			STEPHANE BRUNEL	PT FRENCH KISS DIVERS		19/04/2025	18/04/2026	19.380.000,00	365	53.095,89				0		257	13.645.643,84	5.734.356,16
			ANJA NEIPP HOMMANN	JAYA NASIHAT SINAR PT		16/05/2025	15/05/2026	19.380.000,00	365	53.095,89				0		230	12.212.054,79	7.167.945,21
			THOMAS ERIC NADEAU	PT BALI LEGAL INTERNASIONAL		02/04/2025	01/04/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		274	14.638.356,16	4.861.643,84
			MASAHIRO KAJIHARA	PT BALI GIRIKENCANA		07/04/2025	06/04/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		269	14.371.232,88	5.128.767,12
			CESAREO DE LA CALLE FERNANDEZ	PT. BENTHOS BALI		07/04/2025	06/04/2026	19.860.000,00	365	54.410,96				0		269	14.636.547,95	5.223.452,05
			JENNIFER TOLENTINO HABABAG	PT PRETTY SALLY INDONESIA		11/04/2025	10/04/2026	19.860.000,00	365	54.410,96				0		265	14.418.904,11	5.441.095,89
			ALEJANDRO GISBERT BLANCO	PT DESTINATION ASIA		04/05/2025	03/05/2026	19.860.000,00	365	54.410,96				0		242	13.167.452,05	6.692.547,95
			ELISE DANIELE DIXON	PT BLUE CORNER		25/05/2025	25/05/2026	19.920.000,00	366	54.426,23				0		221	12.028.196,72	7.891.803,28
			CONOR THOMAS HOGAN	PT BUMI MATA LINDO		18/05/2025	17/05/2026	19.920.000,00	365	54.575,34				0		228	12.443.178,08	7.476.821,92
			FAKHRUDDIN FAKHRUDDIN	PT. BERRY NICE INDO		20/04/2025	19/04/2026	19.740.000,00	365	54.082,19				0		256	13.845.041,10	5.894.958,90
			SANJAY SINGH	SUPRABA SARI PT		18/04/2025	17/04/2026	19.740.000,00	365	54.082,19				0		258	13.953.205,48	5.786.794,52
			SANCIE LUCILE CASTAN	PT VALRHONA BALI CHOCOLATE PARK		16/05/2025	15/05/2026	19.800.000,00	365	54.246,58				0		230	12.476.712,33	7.323.287,67
			TEOH YIK MING	PT LAUTAN BALI SEJAHTERA		21/05/2025	20/05/2026	19.800.000,00	365	54.246,58				0		225	12.205.479,45	7.594.520,55
			LISA MARIA STUEMPEL	PT LENOX AND EVE		28/04/2025	27/04/2026	19.800.000,00	365	54.246,58				0		248	13.453.150,68	6.346.849,32
			ALEX GOMEZ VELASCO	PT HOLISTIC MEDICINE BALI		09/06/2025	08/06/2026	19.740.000,00	365	54.082,19				0		206	11.140.931,51	8.599.068,49
			BRIAN ROBERT HARTMAN	PT WOODEN FISH VILLAGE		28/04/2025	27/04/2026	19.740.000,00	365	54.082,19				0		248	13.412.383,56	6.327.616,44
			ADRIEN BRUNO M. DE HARLEZ DE DEULIN (CHEVALIER)	PT LIMAJARI INTERBHUANA		15/05/2025	14/05/2026	19.740.000,00	365	54.082,19				0		231	12.492.986,30	7.247.013,70
			ANDREA ABIAN CERVELLO	PT. GURU YOGA CANGGU		24/05/2025	23/05/2026	19.860.000,00	365	54.410,96				0		222	12.079.232,88	7.780.767,12
			JUSTIN ROGER ANDRE MAUTE	PT MAYA RESORT		31/05/2025	30/05/2026	19.800.000,00	365	54.246,58				0		215	11.663.013,70	8.136.986,30
			BENOIT, CLAUDINE, MARIE DESTRESSE	SPEEDOC PTE, LTD.		28/04/2025	27/04/2026	19.800.000,00	365	54.246,58				0		248	13.453.150,68	6.346.849,32
			OSAMU FUJIKAWA	PT. HARMONI BALI SEJAHTERA		23/04/2025	22/04/2026	19.800.000,00	365	54.246,58				0		253	13.724.383,56	6.075.616,44
			VALENTIN KHALIL ESSADDI	PT. CONCEPTS SELAM INDONESIA		18/04/2025	17/04/2026	19.800.000,00	365	54.246,58				0		258	13.995.616,44	5.804.383,56
			ARNO DUVENHAGE	ARNO DUVENHAGE		01/05/2025	30/04/2026	19.800.000,00	365	54.246,58				0		245	13.290.410,96	6.509.589,04
			ARTUR MUSTAEV	PT PURE DIVE RESORT		11/05/2025	10/05/2026	19.800.000,00	365	54.246,58				0		235	12.747.945,21	7.052.054,79
			GEOFFREY ROMAIN ANDRE DOMINIQUE ALDIGERI	PT BALI TANPA BATAS		12/05/2025	11/05/2026	19.800.000,00	365	54.246,58				0		234	12.693.698,63	7.106.301,37
			JESSIE NOY LITTLE	PT. SINAR SAMUDERA SEMPURNA		12/05/2025	11/05/2026	19.680.000,00	365	53.917,81				0		234	12.616.767,12	7.063.232,88
			KYLE DAVID OSBORNE	PT BAHARI CITRA DEWATA		13/05/2025	12/05/2026	19.680.000,00	365	53.917,81				0		233	12.562.849,32	7.117.150,68
			VINOD SINGH	PT.NEW DELHI INDIAN RESTAURANT		29/05/2025	28/05/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		217	11.593.150,68	7.906.849,32
			JELLY LALAMUNAN BAROJA	YAYASAN PROEDUCATION INTERNATIONAL CENTER		02/08/2025	01/08/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		152	8.120.547,95	11.379.452,05
			ILJAS ALEXSANDER LINNBARK	PT. WYNNCOR BALI		10/05/2025	09/05/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		236	12.608.219,18	6.891.780,82
			NUKUI MAYUMI	PT.AMBISI MAX		31/05/2025	30/05/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		215	11.344.931,51	7.915.068,49
			HIGURE MITSUO	PT.AMBISI MAX		31/05/2025	30/05/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		215	11.344.931,51	7.915.068,49
			KARL SINGERY	OCEAN ADVENTURE DIVE		13/06/2025	12/06/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		202	10.658.958,90	8.601.041,10
			MCKNIGHT LISA JANE	PT. TUBUH PIKIRAN SEHAT		10/05/2025	09/05/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		236	12.453.041,10	6.806.958,90
			VIKTORIA LEIDLMAIR	PT SAYA GROUP GLOBAL		10/06/2025	09/06/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		205	10.817.260,27	8.442.739,73
			ANTHONY LANDBRIDGE	PT SHAN RESTORAN BALI		16/05/2025	15/05/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		230	12.136.438,36	7.123.561,64
			NAO SASAKI	PT. WELINA JEGEG BALI		09/05/2025	08/05/2026	19.380.000,00	365	53.095,89				0		237	12.583.726,03	6.796.273,97
			THIERRY DIDIER NOBILE	PT. MODE DISTRIBUSI INDONESIA		06/06/2025	05/06/2026	19.380.000,00	365	53.095,89				0		209	11.097.041,10	8.282.958,90
			DAVID PEDER ERIC GAVIN	PT BALI GIRIKENCANA		11/05/2025	10/05/2026	19.380.000,00	365	53.095,89				0		235	12.477.534,25	6.902.465,75
			CLEMENT YANNICK JEAN CLAUDE	PT MANIK SEKECAP BALI		09/05/2025	08/05/2026	19.380.000,00	365	53.095,89				0		237	12.583.726,03	6.796.273,97
			TU JINGYUE	PT. MEGA BLUE ROCK		08/05/2025	07/05/2026	19.440.000,00	365	53.260,27				0		238	12.675.945,21	6.764.054,79
			RAHUL GUPTA	PT. QUEENS TANDOOR		14/06/2025	13/06/2026	19.440.000,00	365	53.260,27				0		201	10.705.315,07	8.734.684,93
			MARYLENE HENRY	PT NEO PAPAZIAN BERNIAGA		17/05/2025	16/05/2026	19.440.000,00	365	53.260,27				0		229	12.196.602,74	7.243.397,26
			BYRNE CONNOR MARK	PT THE PILATES PROJECT		02/05/2025	01/05/2026	19.440.000,00	365	53.260,27				0		244	12.995.506,85	6.444.493,15
			NICOLAS PIERRE ROBERT LONCLE	PT REVALUE BUMI INDONESIA		24/05/2025	23/05/2026	19.440.000,00	365	53.260,27				0		222	11.823.780,82	7.616.219,18
			OLEG SHLYAEV	PT BALI YOGA PROFESIONAL		03/06/2025	02/06/2026	19.440.000,00	365	53.260,27				0		212	11.291.178,08	8.148.821,92
			FABIO ALDERIGI	PT KULINER ARTISAN ITALIA		19/06/2025	18/06/2026	19.440.000,00	365	53.260,27				0		196	10.439.013,70	9.000.986,30
			VADIM GRISHAEV	JUMANJI DEVELOPMENT GROUP		15/05/2025	14/05/2026	19.440.000,00	365	53.260,27				0		231	12.303.123,29	7.136.876,71
			VIPIN SINGH	PT BALI SARI AGUNG		21/05/2025	20/05/2026	19.440.000,00	365	53.260,27				0		225	11.983.561,64	7.456.438,36
			YUKARI MATSUEDA	PT AMANDA ARUMDHANI		19/02/2025	18/02/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		316	16.882.191,78	2.617.808,22
			HADLEY DEAN DRISCOLL	PT. SMART ADVISORY SOLUTIONS		31/05/2025	30/05/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		215	11.486.301,37	8.013.698,63
			HENRY GIOVANNI SCOTT	PT. SHAMBHALA PAYANGAN INDAH		19/06/2025	18/06/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		196	10.471.232,88	9.028.767,12
			PABLO OLIVA MUNOZ	PT. BENTHOS BALI		25/06/2025	24/06/2026	19.320.000,00	365	52.931,51				0		190	10.056.986,30	9.263.013,70
			DAVID SHAWN MAC LEAN	PT. WYNNCOR BALI		14/06/2025	13/06/2026	19.320.000,00	365	52.931,51				0		201	10.639.232,88	8.680.767,12
			KHAOULA CHAFIK	PT BALI GIRIKENCANA		27/05/2025	26/03/2026	16.100.000,00	304	52.960,53				0		219	11.598.355,26	4.501.644,74
			JUAN FRANCISCO VIAL COMBER	PT WOODEN FISH VILLAGE		27/05/2025	26/05/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		219	11.520.000,00	7.680.000,00
			LEILA FRIEDMAN	PT BALI YOGA PROFESIONAL		08/06/2025	07/06/2026	19.020.000,00	365	52.109,59				0		207	10.786.684,93	8.233.315,07
			NANDITA REBELLO BEDI	YAYASAN PROEDUCATION INTERNATIONAL CENTER		15/07/2025	14/07/2026	19.080.000,00	365	52.273,97				0		170	8.886.575,34	10.193.424,66
			KARL JAMES WILKINS	PT UNGGUL INDO PROPERTI		27/05/2025	26/05/2026	19.080.000,00	365	52.273,97				0		219	11.448.000,00	7.632.000,00
			KARIN VAN BEECK	PT. ACTIVE WATERS		01/07/2025	30/06/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		184	9.648.657,53	9.491.342,47
			LIAM JAMES MICHAEL NEALON	BALI GIRIKENCANA		28/06/2025	27/06/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		187	9.805.972,60	9.334.027,40
			RANDY NOBORU SHIMABUKU	BALI GIRIKENCANA		19/06/2025	18/06/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		196	10.277.917,81	8.862.082,19
			NATALIA TSITOVICH	PT. PERUSAHAAN KONSEP KREATIF		04/06/2025	03/06/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		211	11.064.493,15	8.075.506,85
			GARY EUGENE SADAVAGE	PT SUMBER AIR DEWA		08/06/2025	07/06/2026	18.481.680,00	365	50.634,74				0		207	10.481.391,12	8.000.288,88
			LEONOR ZAPATER PINTENO	PT. ZEST FOOD BALI		24/06/2025	23/06/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		191	10.015.726,03	9.124.273,97

Kode/Nama Akun	OPD	Keterangan (Kategori PDD/Aset yang disewa)	Nama Perusahaan/Perorangan Yang Menyewa	Lokasi	Nomor SK Perjanjian	Periode Pembayaran PDD		Jumlah Diterima (Rp)	Jumlah Hari atas Pembayaran	Nilai Per/Hari (Rp)	Saldo Awal 2025 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)		Saldo setelah Koreksi Saldo Awal (Rp)	Menjadi Bagian Piutang (Case Khusus) dan Dihitung di kertas kerja berbeda	Jumlah Hari Pengakuan PDD di Tahun 2025	Pendapatan LO Tahun 2025 dari PDD (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 (Rp)
						Mulai	Berakhir					Bertambah	Berkurang					
			NICOLAS PAPON	PT USAHA KELUARGA SUKSES		18/07/2025	17/07/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		167	8.757.205,48	10.382.794,52
			FAWAZ HAMID D ALHARBI	PT. MOOZ TECH SOLUTIONS BALI		11/06/2025	10/06/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		204	10.730.958,90	8.469.041,10
			DEWI MARGAUX MICHELE LE ROUX	PT. MAGALI PASCAL		04/07/2025	03/07/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		181	9.521.095,89	9.678.904,11
			GARCIA MORENO BEATRIZ	PT. IMPIAN PROPERTY MANAGEMENT		20/06/2025	19/06/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		195	10.257.534,25	8.942.465,75
			NALLAMUTHU MANIVEL	PT. QUEENS OF INDIA		20/06/2025	19/06/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		195	10.225.479,45	8.914.520,55
			NICOLAS MARTIN DELACRESSONNIERE	PT SUMBER AIR DEWA		31/07/2025	30/07/2026	19.072.200,00	365	52.252,60				0		154	8.046.900,82	11.025.299,18
			MAKOTO NAKAMURA	PT KIZUNA JEPANG INDONESIA		28/08/2025	27/08/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		126	6.607.232,88	12.532.767,12
			ARUNA DEVI HANNAH	YAYASAN PROEDUCATION INTERNATIONAL CENTER		24/07/2025	23/07/2026	19.080.000,00	365	52.273,97				0		161	8.416.109,59	10.663.890,41
			BENJAMIN LEE POLLY	PT MILLIE UTAMA SAKTI		21/06/2025	20/06/2026	19.080.000,00	365	52.273,97				0		194	10.141.150,68	8.938.849,32
			ELEANOR CLAIRE BITTNER	PT LOTUS BALI CONSULTING		21/06/2025	20/06/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		194	10.173.041,10	8.966.958,90
			GABRIELA MACKANICOVA	BALI FINC CONSULTING		26/06/2025	25/06/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		189	9.910.849,32	9.229.150,68
			NATHAN MARK RYAN	PT.PESONA ALAM NIRWANA PROPERTY.		05/06/2025	04/06/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		210	11.046.575,34	8.153.424,66
			HUGO TAEK	PT. SMART ADVISORY SOLUTIONS		28/07/2025	27/07/2026	19.555.200,00	365	53.575,89				0		157	8.411.414,79	11.143.785,21
			MAX WILLIAM CHARLES MUNRO	PT BALI YOGA PROFESIONAL		19/06/2025	18/06/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		196	10.277.917,81	8.862.082,19
			OLGA GRAZYNA KACZYNSKA	PT SCUBASPA ZEN INDONESIA		09/07/2025	08/07/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		176	9.229.150,68	9.910.849,32
			DOMINIC JAMES STEWART-WHITE	PT SCUBASPA ZEN INDONESIA		18/07/2025	17/07/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		167	8.757.205,48	10.382.794,52
			JULIEN BERTHEMIN	PT NEO PAPAZIAN BERNIAGA		02/08/2025	01/08/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		152	7.970.630,14	11.169.369,86
			JUDITH SPIELHOFER	PT. MASA ANGKA		07/08/2025	06/08/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		147	7.708.438,36	11.431.561,64
			SONNY SALOMON	PT.CONCEPTS SELAM INDONESIA		08/06/2025	07/06/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		207	10.888.767,12	8.311.232,88
			MALIKA LILI TAFFIN	PT PIONEER WISATA NUSANTARA		24/06/2025	23/06/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		191	10.047.123,29	9.152.876,71
			TERRY STEVEN SWAIN	YAYASAN PROEDUCATION INTERNATIONAL CENTER		24/07/2025	23/07/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		161	8.495.506,85	10.764.493,15
			SVEN RONNY WAGENKNECHT	PT. REPUBLIK SABUN ABADI		13/07/2025	12/07/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		172	9.075.945,21	10.184.054,79
			MASSIMILIANO FLAMINIO MOTTA	PT. NINE DEGREES CONSULTING		04/07/2025	03/07/2026	19.380.000,00	365	53.095,89				0		181	9.610.356,16	9.769.643,84
			CHRISTOPHER JOHN SALANS	PT. MOZAIC		05/07/2025	04/06/2026	17.765.000,00	335	53.029,85				0		180	9.545.373,13	8.219.626,87
			ANNA LUSHCHIKOVA	PT. DIVING INDO		05/08/2025	04/08/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		149	7.862.301,37	11.397.698,63
			NATALIA JADWIGA LIS	PT. DIVING INDO		09/08/2025	08/08/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		145	7.651.232,88	11.608.767,12
			YARI ORSINI	PT. DUNE WELLNES BALI		29/06/2025	28/06/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		186	9.753.534,25	9.386.465,75
			WONG HAN CHEN	PT BALI SERENITY YOGA		10/07/2025	09/07/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		175	9.176.712,33	9.963.287,67
			MITCHELL JOHN BLAIR	PT WHITE RHINO INDONESIA		30/07/2025	29/07/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		155	8.127.945,21	11.012.054,79
			BERNARD CUMMINS	PT. MURTI JAYA SENTOSA		27/08/2025	26/08/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		127	6.659.671,23	12.480.328,77
			JULIEN MUHAR	PT. PILLAR FORTUNE PARTNERS		27/07/2025	26/07/2026	19.020.000,00	365	52.109,59				0		158	8.233.315,07	10.786.684,93
			KIRSTY ELIZABETH SIMPSON	PT THE PILATES PROJECT		05/07/2025	04/07/2026	19.020.000,00	365	52.109,59				0		180	9.379.726,03	9.640.273,97
			ALEXANDER CHARLES WALKER	PENYELAM BALI KRISTAL		14/08/2025	13/08/2026	19.020.000,00	365	52.109,59				0		140	7.295.342,47	11.724.657,53
			JAMES DAVID TOMBLESON	PT DETIGA NEANO RESORT BALI		03/08/2025	02/08/2026	19.020.000,00	365	52.109,59				0		151	7.868.547,95	11.151.452,05
			DANIEL MYLES BARTLETT	PT. PURI SARI LESTARI		27/07/2025	26/07/2026	19.080.000,00	365	52.273,97				0		158	8.259.287,67	10.820.712,33
			FILIPP MILASH	PT WOODEN FISH VILLAGE		04/07/2025	03/07/2026	19.080.000,00	365	52.273,97				0		181	9.461.589,04	9.618.410,96
			KOVALEVA NATALIIA	NATALAI SALON BALI		25/07/2025	24/07/2026	19.080.000,00	365	52.273,97				0		160	8.363.835,62	10.716.164,38
			PAWAN DEEP BHATNAGAR	PT. HANUMANA INDAH SEJAHTERA		08/07/2025	07/07/2026	19.080.000,00	365	52.273,97				0		177	9.252.493,15	9.827.506,85
			POOJA BHATNAGAR	PT. HANUMANA INDAH SEJAHTERA		08/07/2025	07/07/2026	19.080.000,00	365	52.273,97				0		177	9.252.493,15	9.827.506,85
			RAJA SETHUPATHY MANIVASAGAN GANSAN	PT. TANDOOR INDIAN RESTAURANT		03/08/2025	02/08/2026	19.080.000,00	365	52.273,97				0		151	7.893.369,86	11.186.630,14
			ANRAJIT SAHNI	PT. TANDOOR INDIAN RESTAURANT		03/08/2025	02/08/2026	19.080.000,00	365	52.273,97				0		151	7.893.369,86	11.186.630,14
			TALITHA CINDY GRAZIANO	PT BALI CINTA WEDDINGS		04/08/2025	03/08/2026	19.080.000,00	365	52.273,97				0		150	7.841.095,89	11.238.904,11
			JODEE MAY WARNER	PT BALI CINTA WEDDINGS		18/07/2025	17/07/2026	19.080.000,00	365	52.273,97				0		167	8.729.753,42	10.350.246,58
			ABBY KATHLEEN FRANCES MURPHY	PT BALI CINTA WEDDINGS		23/08/2025	22/08/2026	19.080.000,00	365	52.273,97				0		131	6.847.890,41	12.232.109,59
			DUSTIN ROCKY GARCIA	PT SHAN RESTORAN BALI		26/07/2025	25/07/2026	19.080.000,00	365	52.273,97				0		159	8.311.561,64	10.768.438,36
			FENGMING LI	PT. APNEA BALI FREEDIVING		08/08/2025	07/08/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		146	7.656.000,00	11.484.000,00
			ALINA MAGOMEDOVA	PT WOODEN FISH VILLAGE		12/07/2025	11/07/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		173	9.071.835,62	10.068.164,38
			JOHN SATHIASEELAN DURAIKANNU	QUEENS OF INDIA PT		28/08/2025	27/08/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		126	6.607.232,88	12.532.767,12
			AURELIEN GEORGES HUBERT CHEVALIER	PT. BALILOCATIONS		27/08/2025	26/08/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		127	6.659.671,23	12.480.328,77
			JESSICA LOUISE CLAIRE BROWN	PT UBUD YOGA SENTRAL		10/07/2025	09/07/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		175	9.176.712,33	9.963.287,67
			SAHAB SINGH	PT SATTVIK FOOD AND CATERING		31/07/2025	20/07/2026	19.080.000,00	355	53.746,48				0		154	8.276.957,75	10.803.042,25
			STAM MARIT KARINA	PT. KAMIBANTU		17/08/2025	16/08/2026	19.080.000,00	365	52.273,97				0		137	7.161.534,25	11.918.465,75
			BARRY POLYCARPUS GERARDUS DOESBURG	PT. KAMIBANTU		17/08/2025	16/08/2026	19.080.000,00	365	52.273,97				0		137	7.161.534,25	11.918.465,75
			SURESH KUMAR SAINI	PT. HANUMANA INDAH SEJAHTERA		17/07/2025	16/07/2026	19.080.000,00	365	52.273,97				0		168	8.782.027,40	10.297.972,60
			AVTAR SINGH	PT. HANUMANA INDAH SEJAHTERA		17/07/2025	16/07/2026	19.080.000,00	365	52.273,97				0		168	8.782.027,40	10.297.972,60
			KEVIN MAURICE CLAUDE BORGEAIS	PT.CONCEPTS SELAM INDONESIA		19/08/2025	18/08/2026	19.080.000,00	365	52.273,97				0		135	7.056.986,30	12.023.013,70
			SARA DEBORD	PT.CONCEPTS SELAM INDONESIA		23/08/2025	22/08/2026	19.080.000,00	365	52.273,97				0		131	6.847.890,41	12.232.109,59
			VASILII MAKAROVSKII	INDONESIA BALI NUSANTARA PT		30/08/2025	29/08/2026	19.080.000,00	365	52.273,97				0		124	6.481.972,60	12.598.027,40
			DMITRII STEPANOV	PT BALI INVESTMENT SFG		16/07/2025	15/07/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		169	8.862.082,19	10.277.917,81
			MILES IAN NEALE	PT.THE GRADUAL PATH		10/08/2025	09/08/2026	19.238.400,00	365	52.707,95				0		144	7.589.944,11	11.648.455,89
			CHLOE LOUISE LUCAS	THE STUDIO SPACE PT		16/08/2025	15/08/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		138	7.236.493,15	11.903.506,85
			ATSUSHI HASEGAWA	PT. KEIHAI BALI GLOBAL		21/08/2025	20/08/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		133	6.974.301,37	12.165.698,63
			AGUSTIN ELEJALDE ANGEL	PT ORIENTAL BALI CONSULTING		30/08/2025	29/08/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		124	6.502.356,16	12.637.643,84
			WILLIAM ANDREW CHARLTON MEYRICK	PT CIMICA MITRA WISATA		16/08/2025	15/08/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		138	7.236.493,15	11.903.506,85
			CHRISTOPHER JAMES NEWBOULD	SOLUSI TIMUR BARAT, PT		26/07/2025	25/07/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		159	8.337.698,63	10.802.301,37
			YANNICK XAVIER JACQUES CASTERA	PT. CONCEPTS SELAM INDONESIA		28/08/2025	27/08/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		126	6.607.232,88	12.532.767,12
			PREETI BHAGWANJI RAWAT	INDIAN TALKS RESTAURANT PT		24/07/2025	23/07/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		161	8.442.575,34	10.697.424,66

Kode/Nama Akun	OPD	Keterangan (Kategori PDD/Aset yang disewa)	Nama Perusahaan/Perorangan Yang Menyewa	Lokasi	Nomor SK Perjanjian	Periode Pembayaran PDD		Jumlah Diterima (Rp)	Jumlah Hari atas Pembayaran	Nilai Per/Hari (Rp)	Saldo Awal 2025 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)		Saldo setelah Koreksi Saldo Awal (Rp)	Menjadi Bagian Piutang (Case Khusus) dan Dihitung di kertas kerja berbeda	Jumlah Hari Pengakuan PDD di Tahun 2025	Pendapatan LO Tahun 2025 dari PDD (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 (Rp)
						Mulai	Berakhir					Bertambah	Berkurang					
			TIASHA FERGUSON	SEASONS BALI RETREAT PT		26/08/2025	25/08/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		128	6.712.109,59	12.427.890,41
			BENEDICTE NOIROT	PT FRENCH KISS DIVERS		31/08/2025	30/08/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		123	6.449.917,81	12.690.082,19
			MAKSIM LASKEEV	PT WOODEN FISH VILLAGE		27/07/2025	26/07/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		158	8.285.260,27	10.854.739,73
			MANON MEERTENS	DESTINATION ASIA		14/08/2025	13/08/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		140	7.341.369,86	11.798.630,14
			REGIS CRESPO	PT FRENCH KISS DIVERS		09/09/2025	08/09/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		114	5.977.972,60	13.162.027,40
			EMI KAKOO	PURI ZUQNI PT		13/09/2025	12/09/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		110	5.768.219,18	13.371.780,82
			GOH LI CHEE	AZURE LAND DEVELOPMENT PT		03/08/2025	02/08/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		151	7.918.191,78	11.221.808,22
			MARCO LASTRUCCI	QUARZIA BATIK BALI, PT		05/09/2025	04/09/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		118	6.187.726,03	12.952.273,97
			SIMONETTA QUARTI	QUARZIA BATIK BALI, PT		05/09/2025	04/09/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		118	6.187.726,03	12.952.273,97
			STREET RENEE MARIE	WISATA INDAH NASIONAL PT		07/08/2025	06/08/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		147	7.732.602,74	11.467.397,26
			VERONIQUE GINETTE MIREILLE BAILLY	PT USAHA KELUARGA SUKSES		27/08/2025	26/08/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		127	6.680.547,95	12.519.452,05
			NATALIA KHRULEVA	CHILDREN INTERNATIONAL CENTRE		15/08/2025	14/08/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		139	7.311.780,82	11.888.219,18
			ALEKSANDR SUSEKIN	PT BALI INVESTMENT SFG		01/08/2025	31/07/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		153	8.073.369,86	11.186.630,14
			FINBARR MAGNUS IRVIN STUBBS	PT SOLUSI BERLAYAR CEMERLANG		14/09/2025	13/09/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		109	5.751.616,44	13.508.383,56
			FRANCISCO DUARTE SOARES PEREIRA ALVES PIMENTA	BALI OCEAN MAGIC PT		08/08/2025	07/08/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		146	7.704.000,00	11.556.000,00
			NURNADIA ERINA NOORAZMAN WRIGHT	THE TREE HOUSE PT		09/08/2025	08/08/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		145	7.651.232,88	11.608.767,12
			ISABEL MARTIN SOPO	PENDIDIKAN CILI BALI		28/08/2025	27/08/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		126	6.648.657,53	12.611.342,47
			MARIANNA LATSINOGLOU	PENDIDIKAN CILI BALI		31/08/2025	30/08/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		123	6.490.356,16	12.769.643,84
			SAMUEL WILLIAM MCBRIDE	PT PARADISE PROPERTY GROUP		08/08/2025	07/08/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		146	7.704.000,00	11.556.000,00
			GONCALO BARRETO DE LARA MIRANDA	PT BIRO BENDA INDONESIA		15/08/2025	14/08/2026	19.320.000,00	365	52.931,51				0		139	7.357.479,45	11.962.520,55
			EKATERINA KOROLEVA	PT. RASSVET DIGITAL INDONESIA		30/08/2025	29/08/2026	19.320.000,00	365	52.931,51				0		124	6.563.506,85	12.756.493,15
			NIKITA BATES HARITOS	PT. THE TREE HOUSE		19/09/2025	18/09/2026	19.320.000,00	365	52.931,51				0		104	5.504.876,71	13.815.123,29
			MANDEEP DHYANI	PT. NEW DELHI INDIAN RESTAURANT		06/08/2025	05/08/2026	19.320.000,00	365	52.931,51				0		148	7.833.863,01	11.486.136,99
			SYBILLE MAURICETTE SABINE ASLOUN	PT LAUTAN BALI SEJAHTERA		03/09/2025	02/09/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		120	6.332.054,79	12.927.945,21
			JASON DEAN COOPER	YAYASAN PROEDUCATION INTERNATIONAL CENTER		05/09/2025	04/09/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		118	6.226.520,55	13.033.479,45
			JEANNE WELSH	PT. BALI DHARMA USADHA		09/09/2025	08/09/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		114	6.015.452,05	13.244.547,95
			STEVEN WILES	PT. TWO FISH BALI		01/10/2025	30/09/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		92	4.854.575,34	14.405.424,66
			PARCHMENT TEISHA MENISHA	PT. PETANG RETREAT CENTER		18/08/2025	17/02/2026	9.630.000,00	184	52.336,96				0		136	7.117.826,09	2.512.173,91
			VICKY VALLEE	YAYASAN PROEDUCATION INTERNATIONAL CENTER		30/08/2025	29/08/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		124	6.543.123,29	12.716.876,71
			BRETT SORENSEN	PT. SINAR CERAH BERLIAN		17/08/2025	16/08/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		137	7.229.095,89	12.030.904,11
			NAOMI SHIMANE	PT. BALI GALATEYA		22/09/2025	21/09/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		101	5.312.876,71	13.887.123,29
			EVELYN TATIANE ONO	PT. OSS LEGAL		07/09/2025	06/09/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		116	6.101.917,81	13.098.082,19
			STEFAN MUELLER	MAKMUR ABADI SUKSES		12/08/2025	11/08/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		142	7.469.589,04	11.730.410,96
			RODERICK ALEXANDER EDUARD SCHLIMMER	PT. TIGA TEMAN INTERNATIONAL		03/09/2025	02/09/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		120	6.312.328,77	12.887.671,23
			PRYSCILLA AMIJO	PT. SARI RASA NUSATIMUR		01/09/2025	30/08/2026	19.200.000,00	364	52.747,25				0		122	6.435.164,84	12.764.835,16
			YEN CHEN CHANG	PT. WYNNCOR BALI		04/11/2025	03/11/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		58	3.041.424,66	16.098.575,34
			KENNETH JAMES LEWICKI	PT. PETANG RETREAT CENTER		23/08/2025	22/08/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		131	6.869.424,66	12.270.575,34
			EVA MARIA MANTZIOU	XL BALI VISION VILLAS		21/09/2025	20/09/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		102	5.348.712,33	13.791.287,67
			GEORGIA NEVE KAUTEN	PT. NJG INVESTMENT MANAGEMENT		21/08/2025	20/08/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		133	6.974.301,37	12.165.698,63
			PHAM LE VAN TRANG	PT. ORIENTAL BALI CONSULTING		06/09/2025	05/09/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		117	6.135.287,67	13.004.712,33
			KATELYN SUE LONSDALE	TAMAN SEMESTA PENDIDIKAN		12/09/2025	11/09/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		111	5.820.657,53	13.319.342,47
			DAVE REDELINGHUYS	TAMAN SEMESTA PENDIDIKAN		17/09/2025	16/09/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		106	5.558.465,75	13.581.534,25
			ANDREA BAKKER	DESTINATION ASIA		01/10/2025	30/09/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		92	4.824.328,77	14.315.671,23
			XIANFENG ZHONG	PT. RUMAH NYAMAN BAHAGIA		04/09/2025	03/09/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		119	6.240.164,38	12.899.835,62
			XIANGPING WEI	PT. RUMAH NYAMAN BAHAGIA		04/09/2025	03/09/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		119	6.240.164,38	12.899.835,62
			POURYA GHADERI	PT. NUR DEWATA		19/09/2025	18/09/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		104	5.453.589,04	13.686.410,96
			JOSHUA LEE CULLEN POROZNY	PT PARADISE PROPERTY GROUP		17/08/2025	16/08/2026	19.020.000,00	365	52.109,59				0		137	7.139.013,70	11.880.986,30
			MARK CRAIG KEATINGE	PT.BALEGEDE INTERNASIONAL		02/05/2025	01/05/2026	19.020.000,00	365	52.109,59				0		244	12.714.739,73	6.305.260,27
			MURARI LAL	PT. QUEENS OF INDIA		21/08/2025	20/08/2026	19.020.000,00	365	52.109,59				0		133	6.930.575,34	12.089.424,66
			CHRISTINE RENE BAGNALL	YAYASAN PROEDUCATION INTERNATIONAL CENTER		13/09/2025	12/09/2026	19.020.000,00	365	52.109,59				0		110	5.732.054,79	13.287.945,21
			YASMIN AZURA CHURCH	PT. CONCEPTS SELAM INDONESIA		27/09/2025	26/09/2026	19.020.000,00	365	52.109,59				0		96	5.002.520,55	14.017.479,45
			AXELLE, MARIE, ALIX BRESSON	PT. MAGALI PASCAL		17/09/2025	16/09/2026	19.020.000,00	365	52.109,59				0		106	5.523.616,44	13.496.383,56
			ALESSIA INTRIGILA	PT. INCENSE TRAINING CENTER		15/09/2025	14/09/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		108	5.681.095,89	13.518.904,11
			BRENDAN CHARLES DEARLING	PT. WISATA PETUALANGAN AUSSIE BALI		23/10/2025	22/10/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		70	3.682.191,78	15.517.808,22
			ACHUTHAN JAYAPAL BINDHUKUMARI	PT. AUM BALI SCHOOL		27/09/2025	26/09/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		96	5.049.863,01	14.150.136,99
			ANDREW ADRIAN ISSENMANN	PT. DWI SATRIA JAYA		19/10/2025	18/10/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		74	3.892.602,74	15.307.397,26
			HENSBY ROBERT GORDON	PT. MITRA PRODIN		14/10/2025	13/10/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		79	4.142.630,14	14.997.369,86
			NICOLAS PIERRE ANTOINE GRAZIANA	PT. BALI TANPA BATAS		27/09/2025	26/09/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		96	5.034.082,19	14.105.917,81
			STEPHEN DOUGLAS FRAME	PT. WHITE RHINO INDONESIA		23/09/2025	22/09/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		100	5.243.835,62	13.896.164,38
			CHELSI PUGLIESE	BALI FINC CONSULTING		24/09/2025	23/09/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		99	5.191.397,26	13.948.602,74
			RANJEET KUMAR YADAV	PT. SATTVIK FOOD AND CATERING		06/09/2025	05/09/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		117	6.135.287,67	13.004.712,33
			ANASTASIA KOSTITSYNA	PT. BALI INVESTMENT SFG		01/09/2025	30/08/2026	19.140.000,00	364	52.582,42				0		122	6.415.054,95	12.724.945,05
			CATALINA CORNELIA BADICI	PT. MERLIN MAGIC GROUP		14/09/2025	13/09/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		109	5.715.780,82	13.424.219,18
			SHIRA VAN SPANJE	PT. RAJA LIMA GROUP		01/10/2025	30/09/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		92	4.824.328,77	14.315.671,23
			DHARMA WANGSA WATTS	ANUGRAH MERTA SARI SEDANA		02/09/2025	01/09/2026	19.140.000,00	365	52.438,36				0		121	6.345.041,10	12.794.958,90
			DARINA DEVETIAROVA	PT. RASSVET DIGITAL INDONESIA		30/09/2025	29/09/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		93	4.892.054,79	14.307.945,21
			WILLIAM NEVILLE ROBERTSON	PT. PUTRA NADI WIBAWA		25/09/2025	24/09/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		98	5.155.068,49	14.044.931,51
			YUNA TAKEOKA	PT. WELINA JEGEG BALI		27/09/2025	26/09/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		96	5.049.863,01	14.150.136,99

Kode/Nama Akun	OPD	Keterangan (Kategori PDD/Aset yang disewa)	Nama Perusahaan/Perorangan Yang Menyewa	Lokasi	Nomor SK Perjanjian	Periode Pembayaran PDD		Jumlah Diterima (Rp)	Jumlah Hari atas Pembayaran	Nilai Per/Hari (Rp)	Saldo Awal 2025 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)		Saldo setelah Koreksi Saldo Awal (Rp)	Menjadi Bagian Piutang (Case Khusus) dan Dihitung di kertas kerja berbeda	Jumlah Hari Pengakuan PDD di Tahun 2025	Pendapatan LO Tahun 2025 dari PDD (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 (Rp)
						Mulai	Berakhir					Bertambah	Berkurang					
			GONZALO PICARDO TROYANO	PT. USAHA KELUARGA SUKSES		09/09/2025	08/09/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		114	5.996.712,33	13.203.287,67
			ADITYA KUMAR MEHTA	BALI GIRIKENCANA		24/09/2025	23/08/2026	17.600.000,00	334	52.694,61				0		99	5.216.766,47	12.383.233,53
			ANNELISE CHANTAL SOPHIE REYMONDIER EP JOUFFRIEAU	PT. MOSHA JUANA BALI		12/09/2025	11/09/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		111	5.838.904,11	13.361.095,89
			BENOIT JEAN DIDIER JOUFFRIEAU	PT. MOSHA JUANA BALI		12/09/2025	11/09/2026	19.200.000,00	365	52.602,74				0		111	5.838.904,11	13.361.095,89
			MANOJ SINGH	PT. PADMA MAHALAKSHMI PENIDA		26/09/2025	25/09/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		97	5.118.410,96	14.141.589,04
			BLAKE OWEN THORNLEY	MOZAIC (54)		28/10/2025	27/10/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		65	3.429.863,01	15.830.136,99
			LOIC VINCENT ROMAIN GREUET	PT. SINAR HIJAU BALI		25/10/2025	24/10/2026	19.380.000,00	365	53.095,89				0		68	3.610.520,55	15.769.479,45
			NAGI NURWULAN MATSUOKA	PT. NUSA DAMAI JAYA		21/09/2025	20/09/2026	19.320.000,00	365	52.931,51				0		102	5.399.013,70	13.920.986,30
			IURII PATRAKHIN	PT KAMALA INDOPURA HANJAYA		14/09/2025	13/09/2026	19.320.000,00	365	52.931,51				0		109	5.769.534,25	13.550.465,75
			SABINA MARIA DE JONG	PT BALI ARTIS MANAJEMEN		14/10/2025	13/10/2026	19.320.000,00	365	52.931,51				0		79	4.181.589,04	15.138.410,96
			SHAFIE NOUBAKHT	PT. NUR DEWATA		13/10/2025	12/10/2026	19.320.000,00	365	52.931,51				0		80	4.234.520,55	15.085.479,45
			PHILIPPA ROSE SMALL	PT ORIENTAL BALI CONSULTING		30/09/2025	29/09/2026	19.380.000,00	365	53.095,89				0		93	4.937.917,81	14.442.082,19
			MARK JAMES CORNELL	PT. ACTIVE WATERS		29/10/2025	28/10/2026	19.380.000,00	365	53.095,89				0		64	3.398.136,99	15.981.863,01
			SERGEI VERGUN	PT MIMPI MANIS INDONESIA		23/09/2025	22/09/2026	19.380.000,00	365	53.095,89				0		100	5.309.589,04	14.070.410,96
			VLADIMIR KLIMCHUK	PT MIMPI MANIS INDONESIA		27/09/2025	26/09/2026	19.380.000,00	365	53.095,89				0		96	5.097.205,48	14.282.794,52
			ROGER JAMES HAMILTON	XL BALI VISION VILLAS		19/10/2025	18/10/2026	19.380.000,00	365	53.095,89				0		74	3.929.095,89	15.450.904,11
			ARLEEN SAMONTE	PT BALI LEGAL INTERNASIONAL		04/11/2025	03/11/2026	19.320.000,00	365	52.931,51				0		58	3.070.027,40	16.249.972,60
			DARIA REBENKOVA	PT. INDONESIA BALI NUSANTARA		22/10/2025	21/10/2026	19.320.000,00	365	52.931,51				0		71	3.758.136,99	15.561.863,01
			VINCENZO PAOLO SACCONE	PT. KATARINA BLU		10/10/2025	09/10/2026	19.320.000,00	365	52.931,51				0		83	4.393.315,07	14.926.684,93
			BERTRAND MARIE JACQUES MESLIN	LIMAJARI INTERBHUANA		15/08/2025	14/08/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		139	7.334.630,14	11.925.369,86
			DOMINIQUE KAROLIEN MARIA VAN DEN BROEK	PT. BALI CRUISES NUSANTARA		25/10/2025	24/10/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		68	3.588.164,38	15.671.835,62
			ALLISON LEE GRIFFIN	PT. GURU YOGA CANGGU		01/11/2025	31/10/2026	19.260.000,00	365	52.767,12				0		61	3.218.794,52	16.041.205,48
			MARTINUS LAURENTIUS DE SWART	BIRO PERJALANAN WISATA IS INDONESIA		06/11/2025	05/11/2026	19.320.000,00	365	52.931,51				0		56	2.964.164,38	16.355.835,62
			SERGIO CRESPO DEL RIO	PT. SMART ADVISORY SOLUTIONS		01/10/2025	30/03/2026	9.679.200,00	181	53.476,24				0		92	4.919.814,36	4.759.385,64
			NGUYEN TRUNG THUAN	PT. GAIRAH SCUBA INDO		24/09/2025	23/09/2026	19.320.000,00	365	52.931,51				0		99	5.240.219,18	14.079.780,82
			JENNIFER ANN NEIDER	PT. EDUKA BALI UTAMA		02/10/2025	01/10/2026	19.440.000,00	365	53.260,27				0		91	4.846.684,93	14.593.315,07
			SOPHIE ELIZABETH LINES	PT BALI CINTA WEDDINGS		18/10/2025	17/10/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		75	4.019.178,08	15.540.821,92
			OCTAVIAN LOGHIN	LIMAJARI INTERBHUANA		16/11/2025	15/11/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		46	2.465.095,89	17.094.904,11
			VEERCHAND N/A	PT. NEW DELHI INDIAN RESTAURANT		02/10/2025	01/04/2026	9.780.000,00	182	53.736,26				0		91	4.890.000,00	4.890.000,00
			DHAN SINGH	PT. NEW DELHI INDIAN RESTAURANT		15/10/2025	14/10/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		78	4.179.945,21	15.380.054,79
			RAUL JORGE BORMANN DE QUEIROZ	PT INCENSE TRAINING CENTER		27/09/2025	26/09/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		96	5.128.767,12	14.371.232,88
			HELENA BERANKOVA	PT BALI YOGA PROFESIONAL		04/10/2025	03/10/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		89	4.754.794,52	14.745.205,48
			SALLY RUTH MCMANUS	PT BALI SERENITY YOGA		10/10/2025	09/10/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		83	4.434.246,58	15.065.753,42
			SHAMIL CHATUEV	PT WOODEN FISH VILLAGE		10/10/2025	09/10/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		83	4.434.246,58	15.065.753,42
			DAVID JOHN O BOYLE	PT PUTRA BUANA NUSA		19/10/2025	18/10/2026	19.620.000,00	365	53.753,42				0		74	3.977.753,42	15.642.246,58
			KENJI SASAKI	PT KAPS ART STUDIO		29/10/2025	28/10/2026	19.620.000,00	365	53.753,42				0		64	3.440.219,18	16.179.780,82
			SHARON CELESTE BITTNER	PT BALI YOGA PROFESIONAL		05/10/2025	04/10/2026	19.680.000,00	365	53.917,81				0		88	4.744.767,12	14.935.232,88
			ALEXANDRE CHARLES CHRISTIAN HUMBEY	PT PMA BALI TENNIS INTERNATIONAL		18/10/2025	17/10/2026	19.680.000,00	365	53.917,81				0		75	4.043.835,62	15.636.164,38
			LEI YUHAO	PT. MEGA BLUE ROCK		01/10/2025	30/09/2026	19.740.000,00	365	54.082,19				0		92	4.975.561,64	14.764.438,36
			GRANT COLIN WILLIAMS	PT. BALI TENNIS CLAY		09/11/2025	08/11/2026	19.620.000,00	365	53.753,42				0		53	2.848.931,51	16.771.068,49
			FABIO DONATI	ACTIVE WATERS PT		19/11/2025	18/11/2026	19.620.000,00	365	53.753,42				0		43	2.311.397,26	17.308.602,74
			OLIVIA KATE MC MAHON	PT ORIENTAL BALI CONSULTING		17/10/2025	16/10/2026	19.620.000,00	365	53.753,42				0		76	4.085.260,27	15.534.739,73
			KIM MARINA JACQUES KLOPROGGE	PT ORIENTAL BALI CONSULTING		12/10/2025	11/10/2026	19.620.000,00	365	53.753,42				0		81	4.354.027,40	15.265.972,60
			SAMANTHA ANGELA COUSINS	PT BALI YOGA PROFESIONAL		09/10/2025	08/10/2026	19.620.000,00	365	53.753,42				0		84	4.515.287,67	15.104.712,33
			INDRANIL RAMCHANDRA KHADE	BALI GIRIKENCANA		03/11/2025	02/11/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		59	3.161.753,42	16.398.246,58
			VIOLAINE JEHANNE BOSQUILLON DE JENLIS	PT VALRHONA BALI CHOCOLATE PARK		25/11/2025	24/11/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		37	1.982.794,52	17.577.205,48
			FREDERIC EMILE VICTOR BAHON	PT. BANYAN EMPAT BELAS		11/10/2025	10/10/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		82	4.394.301,37	15.165.698,63
			LADEVEZE LUCAS MARTIN	PT PROVIDER VISA INDONESIA		26/10/2025	25/10/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		67	3.590.465,75	15.969.534,25
			FREDDY MIRA	PT. CONCEPTS SELAM INDONESIA		04/11/2025	03/11/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		58	3.108.164,38	16.451.835,62
			NG MEI LING SERENA	PT BLUE PALM MANAGEMENT		27/11/2025	26/11/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		35	1.875.616,44	17.684.383,56
			CAMERON GLENN DOUGLAS	PT. PESONA AUSTINA PROPERTY		04/11/2025	03/11/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		58	3.108.164,38	16.451.835,62
			EMMA JANE CURTIS	PT. EDUKA BALI UTAMA		16/10/2025	15/10/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		77	4.113.698,63	15.386.301,37
			NATALIA RODNIKOVA	PT. WONDERLAND BALI EVENTS		17/11/2025	16/11/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		45	2.404.109,59	17.095.890,41
			NAOKI HAGINO	PT. WDI INDONESIA WDI INDONESIA PT		01/11/2025	31/10/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		61	3.258.904,11	16.241.095,89
			JULIEN BEQUET	PT JULIEN TAHAR DAN PANDAWA INVESTASI		20/10/2025	19/10/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		73	3.900.000,00	15.600.000,00
			SATBEER SINGH	PT BALI SARI AGUNG		26/11/2025	25/11/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		36	1.923.287,67	17.576.712,33
			DJAMAL SAOULI	SEMARA JAYA INDONESIA		02/11/2025	01/11/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		60	3.205.479,45	16.294.520,55
			BENITA ANNE FAEHSE	PT TOLMAN HEALTH EVENTS		15/10/2025	14/10/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		78	4.167.123,29	15.332.876,71
			SASCHA ROBERT ZBAREN	PT. BUFFALO TOURS INDONESIA		28/10/2025	27/10/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		65	3.483.287,67	16.076.712,33
			SUCHET JONES	PT. EDUKA BALI UTAMA		27/10/2025	26/10/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		66	3.536.876,71	16.023.123,29
			CHOI KYUNG HEE	PT. KANG NAM BALI		21/11/2025	20/11/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		41	2.197.150,68	17.362.849,32
			YOO YOUNG IL	PT. KANG NAM BALI		21/11/2025	20/11/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		41	2.197.150,68	17.362.849,32
			KHAKSAR ASEFNAZ	PT. NUR DEWATA		11/11/2025	10/11/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		51	2.733.041,10	16.826.958,90
			YOSHIYO KONNO (ITO)	PT. BALI CRUISES NUSANTARA		19/11/2025	18/11/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		43	2.304.328,77	17.255.671,23
			NATHANIEL LAMAR HAYWOOD	PT. HYWD GLOBAL INVESTMENTS		20/10/2025	19/10/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		73	3.912.000,00	15.648.000,00
			ANDREI ABASKALOV	BALI FINC CONSULTING		31/10/2025	30/10/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		62	3.312.328,77	16.187.671,23
			GUELCIN EMIR	PT BALI SERENITY YOGA		08/11/2025	07/11/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		54	2.884.931,51	16.615.068,49

Kode/Nama Akun	OPD	Keterangan (Kategori PDD/Aset yang disewa)	Nama Perusahaan/Perorangan Yang Menyewa	Lokasi	Nomor SK Perjanjian	Periode Pembayaran PDD		Jumlah Diterima (Rp)	Jumlah Hari atas Pembayaran	Nilai Per/Hari (Rp)	Saldo Awal 2025 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)		Saldo setelah Koreksi Saldo Awal (Rp)	Menjadi Bagian Piutang (Case Khusus) dan Dihitung di kertas kerja berbeda	Jumlah Hari Pengakuan PDD di Tahun 2025	Pendapatan LO Tahun 2025 dari PDD (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 (Rp)
						Mulai	Berakhir					Bertambah	Berkurang					
			SEAN MICHAEL GILL	PT BALI LEGAL INTERNASIONAL		02/11/2025	01/11/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		60	3.205.479,45	16.294.520,55
			ESTEBAN MANZANARES UYARRA	PT. LIGATENNIS SPORTS MANAGEMENT		13/11/2025	12/11/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		49	2.617.808,22	16.882.191,78
			VALERIO CHESSA	PT NJG INVESTMENT MANAGEMENT		19/10/2025	18/10/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		74	3.953.424,66	15.546.575,34
			JOEL HINDSON	PT. MAKANA VEGAN MAJU		05/11/2025	04/11/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		57	3.045.205,48	16.454.794,52
			LESZEK SLAWOMIR ZAREBINSKI	PT. ZMP BALI PARTNERS		25/10/2025	24/10/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		68	3.632.876,71	15.867.123,29
			JOHN FRANCIS LINCOLN	PT. LIMA ARSITEKS INDONESIA		25/10/2025	24/10/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		68	3.632.876,71	15.867.123,29
			NELSON DARIO GUTIERREZ	PT JUNGLE PADEL BALI		29/11/2025	28/11/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		33	1.763.013,70	17.736.986,30
			HIMANSHU SINGH	PT. HANUMANA INDAH SEJAHTERA		27/10/2025	26/10/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		66	3.526.027,40	15.973.972,60
			DHOOM SINGH	PT. HANUMANA INDAH SEJAHTERA		27/10/2025	26/10/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		66	3.526.027,40	15.973.972,60
			MIAN ANTON VAN SCHALKWYK	PT BUMI MATA LINDO		28/11/2025	27/11/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		34	1.816.438,36	17.683.561,64
			DMITRY SUCHKOV	PT BALI INVESTMENT SFG		14/11/2025	13/11/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		48	2.564.383,56	16.935.616,44
			PRADEEP SINGH	PT BALI SARI AGUNG		18/11/2025	17/11/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		44	2.350.684,93	17.149.315,07
			MARCO VAN DER MERWE	PT. LIGHT SPACE DESIGN		26/11/2025	25/11/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		36	1.923.287,67	17.576.712,33
			JASMIN KLEINBUB	BALI FINC CONSULTING		04/11/2025	03/11/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		58	3.098.630,14	16.401.369,86
			REIKO HOSOI	PT. SARI GUMI BALI TOURS		23/11/2025	22/11/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		39	2.083.561,64	17.416.438,36
			GERMAN SADURTDINOV	PT. LOYO DEVELOPMENT BALI		28/10/2025	27/10/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		65	3.472.602,74	16.027.397,26
			SKYLER LEE GRANT	SUPA DUPA SPICE		05/11/2025	04/11/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		57	3.045.205,48	16.454.794,52
			KATE PEARL MCGREGOR	PT THE PILATES PROJECT		09/11/2025	08/11/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		53	2.831.506,85	16.668.493,15
			CHARLOTTE MOAZZAMI	ATAS AWAN BALI PT		22/11/2025	21/11/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		40	2.136.986,30	17.363.013,70
			YAN TYCHKOVSKYI	RIAK BELANTARA SAMUDRA PT		18/12/2025	17/12/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		14	747.945,21	18.752.054,79
			ALEKSANDR SHVAREV	PT BALI INVESTMENT SFG		14/11/2025	13/11/2026	19.500.000,00	365	53.424,66				0		48	2.564.383,56	16.935.616,44
			MICHEL ESCHMANN	BALI GIRIKENCANA		07/11/2025	06/11/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		55	2.947.397,26	16.612.602,74
			KAIRI IWASEYA	PT. IMPERIAL INDO MULIA		19/10/2025	18/10/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		74	3.965.589,04	15.594.410,96
			ALEXANDER CHERTKOV	PT. SERENDIPTY CONSULTANT INDONESIA		06/11/2025	05/11/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		56	3.000.986,30	16.559.013,70
			ALEXEY EZHELOV	PT. SERENDIPTY CONSULTANT INDONESIA		23/11/2025	22/11/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		39	2.089.972,60	17.470.027,40
			STEFANO REIS HAGN	PT. THE DWA CHANDRA		05/11/2025	04/11/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		57	3.054.575,34	16.505.424,66
			NICOLA WALPEN	PT. YOGA BALI SHANTI		04/11/2025	03/11/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		58	3.108.164,38	16.451.835,62
			EKREM KEYHANCIOGLU	NAUTIC ASIA LIMITED		02/11/2025	01/11/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		60	3.215.342,47	16.344.657,53
			YUMIKO MORISHIGE	PT. BALI GALATEYA		05/11/2025	04/11/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		57	3.054.575,34	16.505.424,66
			VIJAY PRAKASH RATURI	PT. INDIIA BALI JAYA		26/11/2025	25/11/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		36	1.929.205,48	17.630.794,52
			AVALON MERU CARVENTER	PT. DJANJI DJATI DJAYA		18/11/2025	17/11/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		44	2.357.917,81	17.202.082,19
			BENJAMIN DANIEL PHILIPPE ANDRE LECHEVALIER	PT MEME NYAKAN ROTI		07/12/2025	06/12/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		25	1.339.726,03	18.220.273,97
			YOO WONSANG	PT. KANG NAM BALI		28/12/2025	27/12/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		4	214.356,16	19.345.643,84
			ANDRE FOURIE	PT. BALI CRUISES NUSANTARA		07/12/2025	06/12/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		25	1.339.726,03	18.220.273,97
			MOHIT KUMAR PANT	PT. INDIIA BALI JAYA		26/11/2025	25/11/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		36	1.929.205,48	17.630.794,52
			SARAH RAMARRI MASSIE	PT. IMPERIAL INDO MULIA		01/11/2025	31/10/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		61	3.268.931,51	16.291.068,49
			ANDREW ALAN COOLEY	PT. PESONA ALAM NIRWANA PROPERTY		26/11/2025	25/11/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		36	1.929.205,48	17.630.794,52
			KIRILL POPOV	KUNCI UTAMA LAUTAN		01/12/2025	30/11/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		31	1.661.260,27	17.898.739,73
			W SCOTT LUNDAHL	PT DETIGA NEANO RESORT BALI		16/12/2025	15/12/2026	19.620.000,00	365	53.753,42				0		16	860.054,79	18.759.945,21
			ANDREAS LUKOVNJAK	PT. ALAM ANDA		11/11/2025	10/11/2026	19.680.000,00	365	53.917,81				0		51	2.749.808,22	16.930.191,78
			ARKADII ALMENDIEIEV	PT PURE DIVE RESORT		30/12/2025	29/12/2026	19.680.000,00	365	53.917,81				0		2	107.835,62	19.572.164,38
			GARY JOHN LEIGHTON	PT. BALI LEGALS GROUP		07/12/2025	06/12/2026	19.680.000,00	365	53.917,81				0		25	1.347.945,21	18.332.054,79
			THORSTEN DHEUREUSE	PT. TROPLAND DESAIN KONSULTAN		03/12/2025	02/12/2026	19.620.000,00	365	53.753,42				0		29	1.558.849,32	18.061.150,68
			ALAN GEOFFREY DAVIES	PT. EDUKA BALI UTAMA		21/11/2025	20/11/2026	19.620.000,00	365	53.753,42				0		41	2.203.890,41	17.416.109,59
			MATTHIAS MISOF	PT. DIVING 4 IMAGES		20/01/2026	19/01/2027	19.620.000,00	365	53.753,42				0		0	0	19.620.000,00
			LORENZO GIOTTO CASTIGLIONI	PT BANYU SAKTI JAYA		15/01/2026	14/01/2027	19.620.000,00	365	53.753,42				0		0	0	19.620.000,00
			VALENTINA RAMIREZ OCHOA	PT. APNEA BALI FREEDIVING		30/01/2026	29/01/2027	19.620.000,00	365	53.753,42				0		0	0	19.620.000,00
			JAMES DAVID BOWEN	PT. OVERCRANK MEDIA PRODUCTION		01/02/2026	31/01/2027	19.620.000,00	365	53.753,42				0		0	0	19.620.000,00
			NEETU GUPTA	PT. CITRUS TREE GROUP		10/12/2025	09/12/2026	19.680.000,00	365	53.917,81				0		22	1.186.191,78	18.493.808,22
			BOONE JEROME ANDRE C	PT. WISATA INDAH NASIONAL		02/12/2025	01/12/2026	19.680.000,00	365	53.917,81				0		30	1.617.534,25	18.062.465,75
			MATTHIEU PAUL ALEXANDRE HOREAU	PT. IMPERIAL INDO MULIA		22/12/2025	21/12/2026	20.160.000,00	365	55.232,88				0		10	552.328,77	19.607.671,23
			BENJAMIN ARTHUR SORS	PT. PURI SARI LESTARI		07/01/2026	06/01/2027	20.160.000,00	365	55.232,88				0		0	0	20.160.000,00
			DARIA KONYSHEVA	PT. MIMPI MANIS INDONESIA		28/11/2025	27/11/2026	20.160.000,00	365	55.232,88				0		34	1.877.917,81	18.282.082,19
			SHINOBU ISHIMOTO	PT. KEIHAI BALI GLOBAL		16/12/2025	15/12/2026	19.680.000,00	365	53.917,81				0		16	862.684,93	18.817.315,07
			MAKIKO OKI	PT. BALI BAGUS BAHANA		17/12/2025	16/12/2026	19.680.000,00	365	53.917,81				0		15	808.767,12	18.871.232,88
			FLORENT PIERRE ROGER DELENTE	PT.ILA GLOBAL CONSULTING		10/12/2025	09/12/2026	19.609.950,00	365	53.725,89				0		22	1.181.969,59	18.427.980,41
			SEAN BRIAN MCALONEY	PT. MILLIE UTAMA SAKTI		22/12/2025	21/12/2026	19.680.000,00	365	53.917,81				0		10	539.178,08	19.140.821,92
			KENNETH JAMES WICKES	PT. SHAN RESTORAN BALI		26/11/2025	25/11/2026	19.680.000,00	365	53.917,81				0		36	1.941.041,10	17.738.958,90
			YOSHIMI MIZUTA	PT. BALI GALATEYA		20/01/2026	19/01/2027	19.680.000,00	365	53.917,81				0		0	0	19.680.000,00
			SPIRIDONOV ANTON	PT. ECOLIT KONTRAKTOR BALI		23/11/2025	22/11/2026	19.680.000,00	365	53.917,81				0		39	2.102.794,52	17.577.205,48
			VICTORIANO COMBALICER BUENDICHO	PT. THE VILLA VILLA		03/12/2025	02/12/2026	19.680.000,00	365	53.917,81				0		29	1.563.616,44	18.116.383,56
			ASLAK GIRGIS LIOKOURAS	PT. BOGARD JOINT VENTURES		27/11/2025	26/11/2026	19.680.000,00	365	53.917,81				0		35	1.887.123,29	17.792.876,71
			MANOJ KUMAR	PT. SATTVIK FOOD AND CATERING		29/11/2025	28/11/2026	19.680.000,00	365	53.917,81				0		33	1.779.287,67	17.900.712,33
			JOANNE LIZABETH WILKINSON	PT. EDUKA BALI UTAMA		16/12/2025	15/12/2026	19.680.000,00	365	53.917,81				0		16	862.684,93	18.817.315,07
			NICOLA KATE BRADLEY	PT. EDUKA BALI UTAMA		10/12/2025	09/12/2026	19.680.000,00	365	53.917,81				0		22	1.186.191,78	18.493.808,22
			MARK FRANCIS ROBBERDS	PT. DEEPIKA MARK INDO		18/12/2025	17/12/2026	19.680.000,00	365	53.917,81				0		14	754.849,32	18.925.150,68
			DEEPIKA MEHTA	PT. DEEPIKA MARK INDO		18/12/2025	17/12/2026	19.680.000,00	365	53.917,81				0		14	754.849,32	18.925.150,68
			PAUL BOYER	PT. MAGNITUDE CONSTRUCTION BALI		07/12/2025	06/12/2026	19.620.000,00	365	53.753,42				0		25	1.343.835,62	18.276.164,38
			FABIANA ZANATI	PT. LURETTA KONSULTAN GRUP		29/12/2025	28/12/2026	19.620.000,00	365	53.753,42				0		3	161.260,27	19.458.739,73
			MOHAMED HAMZA	KUNCI UTAMA LAUTAN		10/12/2025	09/12/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		22	1.178.958,90	18.381.041,10
			FLORENT JEAN ANTOINE MURCIA	ATAS AWAN BALI PT		08/01/2026	07/01/2027	19.560.000,00	365	53.589,04				0		0	0	19.560.000,00
			ZENG MIN	PT LOTUS BALI CONSULTING		22/12/2025	21/12/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		10	535.890,41	19.024.109,59
			PAVAN KUMAR GOUR	QUEENS OF INDIA PT		29/12/2025	28/12/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		3	160.767,12	19.399.232,88
			AHMED SALALUDDIN	QUEENS OF INDIA PT		29/12/2025	28/12/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		3	160.767,12	19.399.232,88
			TYLER JUDSON TOLMAN	PT TOLMAN HEALTH EVENTS		31/12/2025	30/12/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		1	53.589,04	19.506.410,96

Kode/Nama Akun	OPD	Keterangan (Kategori PDD/Aset yang disewa)	Nama Perusahaan/Perorangan Yang Menyewa	Lokasi	Nomor SK Perjanjian	Periode Pembayaran PDD		Jumlah Diterima (Rp)	Jumlah Hari atas Pembayaran	Nilai Per/Hari (Rp)	Saldo Awal 2025 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)		Saldo setelah Koreksi Saldo Awal (Rp)	Menjadi Bagian Piutang (Case Khusus) dan Dihitung di kertas kerja berbeda	Jumlah Hari Pengakuan PDD di Tahun 2025	Pendapatan LO Tahun 2025 dari PDD (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 (Rp)
						Mulai	Berakhir					Bertambah	Berkurang					
			FIONA MARINE PALUMBO	PT INCENSE TRAINING CENTER		28/12/2025	27/12/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		4	214.356,16	19.345.643,84
			WALKER ROBERTS CLAUDIA ASHLEY	PT THE PILATES PROJECT		05/01/2026	04/01/2027	19.560.000,00	365	53.589,04				0		0	0	19.560.000,00
			STEPHANE JEAN CLEMENT SENSEY	KREASI SENI MANDIRI INDONESIA PT		16/12/2025	15/12/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		16	857.424,66	18.702.575,34
			MICHAEL CHRISTOPHER KING	PT BUMI MATA LINDO		05/01/2026	04/01/2027	19.560.000,00	365	53.589,04				0		0	0	19.560.000,00
			ADAM KENNY	PT MILLIE UTAMA SAKTI		12/12/2025	11/12/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		20	1.071.780,82	18.488.219,18
			KONSTANTIN GORDON	PT WOODEN FISH VILLAGE		20/12/2025	19/12/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		12	643.068,49	18.916.931,51
			NIKOLAI GALCHENKO	PT BALI INVESTMENT SFG		15/12/2025	14/12/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		17	911.013,70	18.648.986,30
			KATHLEEN FEARS COOK	TUBUH PIKIRAN SEHAT PT		24/12/2025	23/12/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		8	428.712,33	19.131.287,67
			ANNA MARIE RICHARDSON	PT. TIRTA SEMARA		22/01/2026	21/01/2027	19.560.000,00	365	53.589,04				0		0	0	19.560.000,00
			RIA RAMBULAN TEMPLER	SUPA DUPA SPICE		31/12/2025	30/12/2026	19.560.000,00	365	53.589,04				0		1	53.589,04	19.506.410,96
			JOHN NORMAN STANSBIE	YAYASAN PROEDUCATION INTERNATIONAL CENTER		12/01/2026	11/01/2027	19.560.000,00	365	53.589,04				0		0	0	19.560.000,00
			CAROLINE BEVERLEY LAMB	EDUKA BALI UTAMA PT		04/01/2026	03/01/2027	19.560.000,00	365	53.589,04				0		0	0	19.560.000,00
			RONALD PERSOON	PT.AQUA DIVE RESORT		13/12/2025	12/12/2026	19.976.400,00	365	54.729,86				0		19	1.039.867,40	18.936.532,60
			ALISTER STUART CRAN	PT ORIENTAL BALI CONSULTING		22/12/2025	21/12/2026	19.620.000,00	365	53.753,42				0		10	537.534,25	19.082.465,75
			JOHAN SNG KOON KUAN	PT MAJA CREATIONS BALI		27/12/2025	26/12/2026	19.620.000,00	365	53.753,42				0		5	268.767,12	19.351.232,88
			KISHAN SINGH	QUEENS TANDOOR PT		07/01/2026	06/01/2027	19.620.000,00	365	53.753,42				0		0	0	19.620.000,00
			ARUP DAS	QUEENS TANDOOR PT		19/01/2026	18/01/2027	19.620.000,00	365	53.753,42				0		0	0	19.620.000,00
			BRANDON VENTER	QUEENS TANDOOR PT		03/01/2026	02/01/2027	19.620.000,00	365	53.753,42				0		0	0	19.620.000,00
			MURRAY SHAUN DANIEL	MURRAY FAMILY TRUST PT		10/01/2026	09/01/2027	19.620.000,00	365	53.753,42				0		0	0	19.620.000,00
			JAMES STEVEN KALLESKE	ARPAN BALI UTAMA PT		08/01/2026	07/01/2027	19.620.000,00	365	53.753,42				0		0	0	19.620.000,00
			ROSE MEGAN HODGE	BALI UNIQ VENTURES PT		07/01/2026	06/01/2027	19.620.000,00	365	53.753,42				0		0	0	19.620.000,00
			RAPHAEL JORDAN DE ASIS SANCHEZ	LIGATENNIS SPORTS MANAGEMENT PT		04/01/2026	03/01/2027	19.620.000,00	365	53.753,42				0		0	0	19.620.000,00
			CARLOS ESPARZA BORRELL PENADES	PT PMA BALI TENNIS INTERNATIONAL		09/01/2026	08/01/2027	19.620.000,00	365	53.753,42				0		0	0	19.620.000,00
			KHRYSTYNA ANDRIEIEVA	SUNNY MANAGEMENT REAL ESTATE PT		20/12/2025	19/12/2026	19.620.000,00	365	53.753,42				0		12	645.041,10	18.974.958,90
			ELISABETTA VIDALI	PT INCENSE TRAINING CENTER		28/12/2025	27/12/2026	19.620.000,00	365	53.753,42				0		4	215.013,70	19.404.986,30
			KAMAL JEET SINGH	PT BOLLYWOOD INDIAN CUISINE		19/01/2026	18/01/2027	19.620.000,00	365	53.753,42				0		0	0	19.620.000,00
			MARAT ESTEMESOV	BALI FINC CONSULTING		13/01/2026	12/01/2027	19.620.000,00	365	53.753,42				0		0	0	19.620.000,00
			MIN HYE CHO	BAEKJEONG KOREAN RESTAURANT INDONESIA PT		12/01/2026	11/01/2027	19.620.000,00	365	53.753,42				0		0	0	19.620.000,00
			NAOTO YOSHIDA	IIN BALI INDONESIA PT		20/02/2026	19/02/2027	19.680.000,00	365	53.917,81				0		0	0	19.680.000,00
			NICOLE BETTINA BUSCH	MUNTIGUNUNG PRODUKTEVERTRIEB GMBH		16/02/2026	15/02/2027	19.680.000,00	365	53.917,81				0		0	0	19.680.000,00
			ANAIS DESIREE PUCCI	NICO DIVES COOL, PT		23/02/2026	22/02/2027	19.680.000,00	365	53.917,81				0		0	0	19.680.000,00
			PETE MICHAEL DRAYTON	GOOD KARMA BALI PT		18/01/2026	17/01/2027	19.680.000,00	365	53.917,81				0		0	0	19.680.000,00
			AMRENDRA SINGH BIST	PT SATTVIK FOOD AND CATERING		12/01/2026	11/01/2027	19.680.000,00	365	53.917,81				0		0	0	19.680.000,00
			GREGORY MARIE BAZIN	KELAPA WEB STUDIO PT		31/12/2025	30/12/2026	19.680.000,00	365	53.917,81				0		1	53.917,81	19.626.082,19
			ELENA SMOLNIKOVA	PT KAMALA INDOPURA HANJAYA		18/01/2026	17/01/2027	19.740.000,00	365	54.082,19				0		0	0	19.740.000,00
			MICHAEL KARL BUGDOLL	PT. SMART ADVISORY SOLUTIONS		07/02/2026	06/02/2027	19.740.000,00	365	54.082,19				0		0	0	19.740.000,00
			BRENTON LEIGH BANNER	PT. Kera Emas Bali		18/01/2026	17/01/2027	19.740.000,00	365	54.082,19				0		0	0	19.740.000,00
			CHERNUSHCHENKO SVETLANA	SUNNY MANAGEMENT REAL ESTATE PT		15/01/2026	14/01/2027	19.740.000,00	365	54.082,19				0		0	0	19.740.000,00
			BEATRIZ GARCIA-OLALLA ARCOS	SUPERNOBA MARKETING AGENCY PT		24/01/2026	23/01/2027	19.680.000,00	365	53.917,81				0		0	0	19.680.000,00
			PAOLA ZANCANARO	NAMU CEMPAKA BALI PT		03/03/2026	02/03/2027	19.740.000,00	365	54.082,19				0		0	0	19.740.000,00
	Dinas Perikanan dan Kelautan	IZIN	ANDI RAHMAN	SIUP, 2 KAPAL, a' 19 GT		21/04/2022	21/04/2052	1.178.000,00	10.959	107,4916	1.072.013,32			1.072.013,32		365	39.234,42	1.032.778,90
			SUBHAN	SIUP, 1 KAPAL , 30 GT		21/04/2022	21/04/2052	930.000,00	10.959	84,8618	846.326,31			846.326,31		365	30.974,54	815.351,77
			AHMAD NURIADI	SIUP, 1 KAPAL , 14 GT		27/04/2022	27/04/2052	434.000,00	10.959	39,6022	395.189,88			395.189,88		365	14.454,79	380.735,09
			FEBRYANTO	SIUP 1 KAPAL, 30 GT		12/05/2022	12/05/2052	1.320.000,00	10.959	120,4489	1.203.766,77			1.203.766,77		365	43.963,87	1.159.802,90
			ROBY	SIUP 1 KAPAL, 30 GT		13/05/2022	13/05/2052	1.320.000,00	10.959	120,4489	1.203.887,22			1.203.887,22		365	43.963,87	1.159.923,35
			NURUDIN	SIUP 1 KAPAL, 25 GT		03/06/2022	03/06/2052	775.000,00	10.959	70,7181	708.312,80			708.312,80		365	25.812,12	682.500,68
			AHMAD SOYAN HABIBI	SIUP, 2 KAPAL, 21,18 GT		20/06/2022	20/06/2052	1.209.000,00	10.959	110,3203	1.106.843,42			1.106.843,42		365	40.266,90	1.066.576,52
			I KT SUASTIKA YASA	SIUP, 2 KAPAL, 25,28 GT		20/06/2022	20/06/2052	1.643.000,00	10.959	149,9224	1.504.171,82			1.504.171,82		365	54.721,69	1.449.450,13
			I PT ARI PRINAWA	SIUP, 2 KAPAL, 25,23 GT		21/06/2022	21/06/2052	1.488.000,00	10.959	135,7788	1.362.404,59			1.362.404,59		365	49.559,27	1.312.845,32
			I KETUT WARTA	SIUP 2 KAPAL, 17,25 GT		06/07/2022	06/07/2052	1.302.000,00	10.959	118,8065	1.193.886,12			1.193.886,12		365	43.364,36	1.150.521,76
			YAHYA A NOER	SIUP 2 KAPAL, 17,18 GT		07/07/2022	07/07/2052	1.209.000,00	10.959	110,3203	1.108.718,87			1.108.718,87		365	40.266,90	1.068.451,97
			H. SURADI	SIUP 1 KAPAL 28 GT		07/07/2022	07/07/2052	868.000,00	10.959	79,2043	796.003,28			796.003,28		365	28.909,57	767.093,71
			HENDRIK KOSASIH	SIUP 11 KAPAL, 30 GT		08/05/2022	08/05/2052	10.015.000,00	10.959	913,8608	9.129.468,92			9.129.468,92		365	333.559,18	8.795.909,74
			AHMAD NURIADI	SIUP 2 KAPAL. 15 GT		30/08/2022	30/08/2052	930.000,00	10.959	84,8618	857.443,20			857.443,20		365	30.974,54	826.468,66
			I NYOMAN MORIS	SIUP ,10 KAPAL,		09/02/2022	09/02/2052	12.364.000,00	10.958	1.128,31	11.171.378,35			11.171.378,35		365	411.832,45	10.759.545,90
			CAHYADI T	SIUP, 6 KAPAL		09/02/2022	09/02/2052	7.788.000,00	10.958	710,7136	7.036.775,69			7.036.775,69		365	259.410,48	6.777.365,21
			TARNO	SIUP, 2 KAPAL		09/02/2022	09/02/2052	2.640.000,00	10.958	240,9199	2.385.347,70			2.385.347,70		365	87.935,75	2.297.411,95
			PT. SUMBER MINA SMD.	SIUP, 3 KAPAL		09/02/2022	09/02/2052	3.916.000,00	10.958	357,3645	3.538.265,74			3.538.265,74		365	130.438,04	3.407.827,70
			ALDI FERDIANSYAH HSN	SIUP, 2 KAPAL		09/09/2022	09/09/2052	930.000,00	10.959	84,8618	858.291,82			858.291,82		365	30.974,54	827.317,28
			I GST ARYA EMAN HMW.	SIUP, 1 KAPAL		20/09/2022	20/09/2052	1.232.000,00	10.959	112,419	1.138.242,54			1.138.242,54		365	41.032,94	1.097.209,60
			PT. INTIMAS SURYA	SIUP, 4 KAPAL		22/09/2022	22/09/2052	1.922.000,00	10.959	175,381	1.776.083,04			1.776.083,04		365	64.014,05	1.712.068,99
			TONI	SIUP, 3 KAPAL		22/09/2022	22/09/2052	3.872.000,00	10.959	353,3169	3.578.040,33			3.578.040,33		365	128.960,67	3.449.079,66
			PT. SENTRAL BEN0A	SIUP, 8 KAPAL		22/09/2022	22/09/2052	5.828.000,00	10.959	531,8003	5.385.542,10			5.385.542,10		365	194.107,13	5.191.434,97
			ASMANDI	SIUP, 1 KAPAL		28/09/2022	28/09/2052	713.000,00	10.959	65,0607	659.259,88			659.259,88		365	23.747,15	635.512,73
			I WAYAN SUDRA B	SIUP, 3 KAPAL		28/09/2022	28/09/2052	2.573.000,00	10.959	234,7842	2.379.068,25			2.379.068,25		365	85.696,23	2.293.372,02
			PT. PERINTIS JAYA INTERN.	SIUP, 16 KAPAL		04/10/2022	04/10/2052	18.348.000,00	10.959	1.674,24	16.975.122,91			16.975.122,91		365	611.097,73	16.364.025,18
			I KETUT SUWIRYA	SIUP, 1 KAPAL		22/11/2022	22/11/2052	1.276.000,00	10.959	116,434	1.186.229,40			1.186.229,40		365	42.498,40	1.143.731,00
			SALIM	SIUP, 1 KAPAL		19/10/2022	19/10/2052	836.000,00	10.959	76,2843	774.591,11			774.591,11		365	27.843,78	746.747,33
			DARTO	SIUP, 1 KAPAL		16/11/2022	16/11/2052	1.232.000,00	10.959	112,419	1.144.650,43			1.144.650,43		365	41.032,94	1.103.617,49
			I KT. SUWIRYA	SIUP, 3 KAPAL		22/11/2022	22/11/2052	5.236.000,00	10.959	477,7808	4.867.630,99			4.867.630,99		365	174.390,00	4.693.240,99
			JOVEN	SIUP, 4 KAPAL		24/11/2022	24/11/2052	5.236.000,00	10.959	477,7808	4.868.586,55			4.868.586,55		365	174.390,00	4.694.196,55
			AGUS SALIM HINDRATO	SIUP, 1 KAPAL		05/12/2022	05/12/2052	3.652.000,00	10.959	333,2421	3.399.402,50			3.399.402,50		365	121.633,36	3.277.769,14
			CHARLES	SIUP, 1 KAPAL		29/12/2022	29/12/2052	1.276.000,00	10.959	116,434	1.190.537,46			1.190.537,46		365	42.498,40	1.148.039,06
			I Wayan Sadru	SIUP, 1 KAPAL		01/02/2023	01/02/2053	744.000,00	10.959	67,8894	696.477,42			696.477,42		365	24.779,63	671.697,79
			I Wayan Tamu	SIUP, 1 KAPAL		01/02/2023	01/02/2053	713.000,00	10.959	65,0607	667.457,52			667.457,52		365	23.747,15	643.710,37
			Merry Sanni	SIUP, 1 KAPAL		18/01/2023	18/01/2053	1.320.000,00	10.959	120,4489	1.233.999,46			1.233.999,46		365	43.963,87	1.190.035,59

Kode/Nama Akun	OPD	Keterangan (Kategori PDD/Aset yang disewa)	Nama Perusahaan/Perorangan Yang Menyewa	Lokasi	Nomor SK Perjanjian	Periode Pembayaran PDD		Jumlah Diterima (Rp)	Jumlah Hari atas Pembayaran	Nilai Per/Hari (Rp)	Saldo Awal 2025 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)		Saldo setelah Koreksi Saldo Awal (Rp)	Menjadi Bagian Piutang (Case Khusus) dan Dihitung di kertas kerja berbeda	Jumlah Hari Pengakuan PDD di Tahun 2025	Pendapatan LO Tahun 2025 dari PDD (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 (Rp)
						Mulai	Berakhir					Bertambah	Berkurang					
			PT. IAMBEU MINA UTAMA	SIUP, 1 kapal (I AM BE U TUAKILANG)		25/01/2023	25/01/2053	1.188.000,00	10.959	108,4041	1.111.358,34			1.111.358,34		365	39.567,48	1.071.790,86
			HASAN BASRI	SIUP, 1 KAPAL (BINTANG LAGI 02)		20/07/2023	20/07/2053	930.000,00	10.959	84,8618	884.938,41			884.938,41		365	30.974,54	853.963,87
			SULAIMIK	SIUP, 1 KAPAL (BINTANG NARMADA II S)		25/07/2023	25/07/2053	930.000,00	10.959	84,8618	885.362,72			885.362,72		365	30.974,54	854.388,18
			MIFTAH SURGANA	SIUP (BINTANG AMANAH 01)		23/11/2023	23/11/2053	930.000,00	10.959	84,8618	895.630,99			895.630,99		365	30.974,54	864.656,45
			NUR BARO'AH	SIUP (MAJU JAYA I NB & MAJU JAYA II NB)		08/12/2023	08/12/2053	1.736.000,00	10.959	158,4086	1.674.220,64			1.674.220,64		365	57.819,14	1.616.401,50
			ANDRI SUBAHTIAR	SIUP (BINTANG ANUGRAH II AS)		14/12/2023	14/12/2053	930.000,00	10.959	84,8618	897.413,09			897.413,09		365	30.974,54	866.438,55
			MASKANAH	SIUP (BINTANG GALAXI II)		14/12/2023	14/12/2053	930.000,00	10.959	84,8618	897.413,09			897.413,09		365	30.974,54	866.438,55
			NURUL FAWAID	SIUP (BERLIAN NURVA I & BERLIAN NURVA II)		20/12/2023	20/12/2053	1.674.000,00	10.959	152,7512	1.616.260,06			1.616.260,06		365	55.754,17	1.560.505,89
			SUBHAN	SIUP (ISTAMBUL 01 & ISTAMBUL II)		21/12/2023	21/12/2053	1.736.000,00	10.959	158,4086	1.676.279,96			1.676.279,96		365	57.819,14	1.618.460,82
			AVENT YACOB	SIUP CERIA ISTAMBUL I &CERIA ISTAMBUL II		21/12/2023	21/12/2053	1.860.000,00	10.959	169,7235	1.796.014,23			1.796.014,23		365	61.949,08	1.734.065,15
			DEVA MARTHA	BUNGA ISTAMBUL 1 & BUNGA ISTAMBUL 2		21/12/2023	21/12/2053	1.829.000,00	10.959	166,8948	1.766.080,67			1.766.080,67		365	60.916,60	1.705.164,07
			HERI HUMAINI	INTAN ISTAMBUL II &INTAN ISTAMBUL 03		21/12/2023	21/12/2053	1.860.000,00	10.959	169,7235	1.796.014,23			1.796.014,23		365	61.949,08	1.734.065,15
			ANDI RAHMAN	NIKMAT LAGI 01 AR & NIKMAT LAGI 02 AR		21/12/2023	21/12/2053	1.178.000,00	10.959	107,4916	1.137.475,68			1.137.475,68		365	39.234,42	1.098.241,26
			IMAM TAJUDIN NUR	DINDA ISTAMBUL I DAN DINDA ISTAMBUL II		27/12/2023	27/12/2053	1.829.000,00	10.959	166,8948	1.767.082,04			1.767.082,04		365	60.916,60	1.706.165,44
	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Izin	PT. Indonesia Power Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan (UPJP) Bali	Pemanfaatan kawasan hutan Tahura Ngurah Rai untuk penempatan trafo PLTG unit 3 dan unit 4	522/151/THR.NR-3 dan 0077.PJ060/BLI2016	13/09/2016	13/09/2021	50.447.400,00	1.827	27.612,15	27.204.000,00			27.204.000,00		0	0	27.204.000,00
2.1.05.01-Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III Total																	**7.476.180.250,49**	**5.553.592.516,04**
2.1.05.04-Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa	Dinas Kesehatan	Bangunan Gedung Kantor	BPD BALI	Sewa menyewa atas ruang ATM	445/01/PKS/RSM.BM	02/01/2020	02/01/2025	60.000.000,00	1.828	32.822,76	65.645,51			65.645,51		2	65.645,51	-
			BPD BALI	Sewa menyewa atas ruang ATM	B.42.000.4.7.2/01/ADUM/RSM.BM	02/01/2025	02/01/2030	60.000.000,00	1.827	32.840,72	0			0		364	11.954.022,99	48.045.977,01
			KKPN Tambak Sari Husada (Ruang 4, 5 dan 6)	Adendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa	B.44.000.4.7.2/28553/HHP/RSBM	03/03/2025	02/03/2026	149.500.000,00	365	409.589,04	0			0		304	124.515.068,49	24.984.931,51
			KKPN Tambak Sari Husada (Gerai Sido Muncul)	Perjanjian Sewa Menyewa	B.43.000.4.7.2/8725/HHP/RSBM	03/03/2025	03/03/2026	1.576.000,00	366	4.306,01	0			0		304	1.309.027,32	266.972,68
			KKPN Tambak Sari Husada (Ruang No.7-65 m2)	Perjanjian Sewa Menyewa	B.44.000.4.7.2/30943/HHP/RSBM	01/09/2025	01/09/2026	43.000.000,00	366	117.486,34	0			0		122	14.333.333,33	28.666.666,67
			KKPN Tambak Sari Husada (2 m2)	Perjanjian Sewa Menyewa	B.43.000.4.7.2/8727/HHP/RSBM	03/03/2025	02/03/2028	2.040.000,00	1.096	1.861,31	0			0		304	565.839,42	1.474.160,58
			PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Perjanjian Sewa Menyewa	B.43.000.4.7.2/1812/HHP/RSBM	06/01/2025	05/01/2026	10.000.000,00	365	27.397,26	0			0		360	9.863.013,70	136.986,30
		Bangunan Kesehatan	PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Sewa Menyewa Lahan ATM		03/10/2022	03/10/2027	50.000.000,00	1827	27.367,27	27.531.472,36			27.531.472,36		365	9.989.053,09	17.542.419,27
			PT Bank Negara Indonesia	Sewa Menyewa Lahan ATM		12/09/2022	12/09/2024	20.000.000,00	732	27.322,40	-			-		0	0	-
			PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Sewa Menyewa Lahan ATM		02/01/2023	02/01/2024	10.000.000,00	366	27.322,40	-			-		0	0	-
			PT Bank Mandiri	Sewa Menyewa Ruangan		30/12/2022	02/01/2024	30.000.000,00	369	81.300,81	-			-		0	0	-
			PT Bank Pembangunan Daerah Bali (KPK)	Sewa Menyewa Ruang Kegiatan Pelayanan Kas Rumah Sakit Bali Mandara		10/05/2023	10/05/2028	8.581.500,00	1828	4.694,47	5.755.426,16			5.755.426,16		365	1.713.483,32	4.041.942,84
			PT Morula Indonesia	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor		27/02/2020	26/02/2024	148.000.000,00	1461	101.300,48	-			-		0	0	-
			KKPN Tambak Sari Husada (50,215 m2)	Perpanjangan Sewa Menyewa Ruangan		01/11/2023	01/11/2024	46.500.000,00	367	126.703,00	-			-		0	0	-
			KKPN Tambak Sari Husada (65 m2)	Sewa Menyewa Ruangan		30/12/2022	01/01/2024	67.000.000,00	368	182.065,22	-			-		0	0	-
			KKPN Tambak Sari Husada (20 m2)	Sewa Menyewa Ruangan		01/09/2023	01/09/2024	17.200.000,00	367	46.866,49	-			-		0	0	-
			PT Premiera Nusantara	Sewa Menyewa Ruangan		22/06/2023	22/01/2024	4.700.000,00	215	21.860,47	-			-		0	0	-
			PT Bank Mandiri	Sewa Menyewa Ruangan		05/01/2024	04/01/2026	18.000.000,00	731	24.623,80	9.086.183,31			9.086.183,31		365	8.987.688,10	98.495,21
			CV Cofalkes Indonesia (JC Medical & Lounge)	Sewa Menyewa Ruangan		05/01/2024	04/01/2025	45.500.000,00	366	124.316,94	497.267,76			497.267,76		4	497.267,76	-
			PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Sewa Menyewa Ruangan		05/01/2024	04/01/2025	10.000.000,00	366	27.322,40	109.289,62			109.289,62		4	109.289,62	-
			Tjap Pakboi Coffee	Sewa Menyewa Ruangan		01/04/2024	01/04/2026	37.000.000,00	731	50.615,60	23.080.711,35			23.080.711,35		365	18.474.692,20	4.606.019,15
			PT Premiera Nusantara	Sewa Menyewa Ruangan		22/06/2024	23/06/2025	4.700.000,00	367	12.806,54	2.228.337,87		2228337,87	-		174	0	-
			KKPN Tambak Sari Husada (65 m2)	Sewa Menyewa Ruangan		02/01/2024	02/01/2025	55.000.000,00	367	149.863,76	299.727,52			299.727,52		2	299.727,52	-
			KKPN Tambak Sari Husada (20 m2)	Sewa Menyewa Ruangan		01/09/2024	01/09/2025	17.200.000,00	366	46.994,54	11.466.666,67			11.466.666,67		244	11.466.666,67	-
			Drs. I.G.K Wijaya, MARS	Sewa (Jump Start Vending Machine)		01/07/2024	01/07/2026	8.112.000,00	731	11.097,13	6.070.128,59			6.070.128,59		365	4.050.451,44	2.019.677,15
			KKPN Tambak Sari Husada (20 m2)	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kegiatan Pelayanan Kas Rumah Sakit Bali Mandara	B.37.075/34007/HHP/RSBM/2023	01/09/2025	01/09/2026	17.200.000,00	366	46.994,54	0			-		122	5.733.333,33	11.466.666,67
	Dinas Perhubungan	Sewa menyewa atas bangunan dermaga seluas 40m X 12m di Pelabuhan Celukan Bawang	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Bali Nusa Tenggara	Pelabuhan Celukan Bawang	B.34.900/4640/SEKRET/DISHUB	01/09/2022	31/08/2027	1.025.000.000,00	1.826	561.336,25	546.180.175,25			546.180.175,25		365	204.887.732,75	341.292.442,50

Kode/Nama Akun	OPD	Keterangan (Kategori PDD/Aset yang disewa)	Nama Perusahaan/Perorangan Yang Menyewa	Lokasi	Nomor SK Perjanjian	Periode Pembayaran PDD		Jumlah Diterima (Rp)	Jumlah Hari atas Pembayaran	Nilai Per/Hari (Rp)	Saldo Awal 2025 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)		Saldo setelah Koreksi Saldo Awal (Rp)	Menjadi Bagian Piutang (Case Khusus) dan Dihitung di kertas kerja berbeda	Jumlah Hari Pengakuan PDD di Tahun 2025	Pendapatan LO Tahun 2025 dari PDD (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 (Rp)
						Mulai	Berakhir					Bertambah	Berkurang					
	Sekretariat Daerah	Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	PT. TOWER BERSAMA	Sewa Menyewa Atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	NOMOR: B.40.000.2.3.2/30485/AKAK/B.UMPRO	07/07/2024	07/07/2029	205.537.500,00	1.827	112.500,00	185.512.500,00			185.512.500,00		365	41.062.500,00	144.450.000,00
		Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	PT. TELEKOMUNIKASI SELULER	Sewa Menyewa Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali Untuk Pemasangan Selter Besert Jaringan Penguat Sinyal	NOMOR: 032/30159/AKA/UMPRO	29/12/2020	29/12/2025	150.000.000,00	1.827	82.101,81	29.802.955,67			29.802.955,67		363	29.802.955,67	0
			PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	Sewa Menyewa Atas Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Dan Ruangan Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	NOMOR: B.44.032/9166/AKAK/B.UMPRO	19/04/2022	19/04/2027	78.657.500,00	1.827	43.052,82	36.121.315,00			36.121.315,00		365	15.714.278,87	20.407.036,13
			PT. TELEKOMUNIKASI SELULER	Sewa Menyewa Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali Untuk Pemasangan Selter Besert Jaringan Penguat Sinyal	NOMOR : B.40.000/61485/AKA/B.UM	29/12/2025	29/12/2030	150.000.000,00	1.827	82.101,81	0			0		3	246.305,42	149.753.694,58
		Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	KOPERASI PEGAWAI PRAJA	Sewa Menyewa Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali Untuk Usaha Koperasi Dengan Koperasi Pegawai Praja	NOMOR: 032/3862/AKA/UMPRO	01/03/2021	01/03/2026	37.340.000,00	1.827	20.437,88	8.686.097,42			8.686.097,42		365	7.459.824,85	1.226.272,57
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	I Putu Juni Suprianta, S.E	SIP Rumah Dinas		03/11/2023	03/11/2025	5.400.000,00	732	7.377,05	2.264.754,10			2.264.754,10		307	2.264.754,10	-
			I Gusti Bagus Ngurah Aditara, S.Sos	SIP Rumah Dinas		09/05/2023	09/05/2025	2.400.000,00	732	3.278,69	422.950,82			422.950,82		129	422.950,82	-
			Ketut Ngurah Darma Adnyana, SE. MM	SIP Rumah Dinas		26/07/2023	26/07/2025	10.800.000,00	732	14.754,10	3.054.098,36			3.054.098,36		207	3.054.098,36	-
			Ida Ayu Gede Wartini, SKM	SIP Rumah Dinas		10/09/2023	10/09/2025	2.400.000,00	732	3.278,69	829.508,20			829.508,20		253	829.508,20	-
			Ni Nyoman Darmi	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/1571/UPTD.PBMD/BPKAD	27/06/2024	27/06/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	1.750.819,67			1.750.819,67		178	1.750.819,67	-
			Ibrahim, SH	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/851/UPTD.PBMD/BPKAD	31/03/2024	31/03/2025	5.400.000,00	366	14.754,10	1.327.868,85			1.327.868,85		90	1.327.868,85	-
			Luh Putu Darmiasih	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3./1747/UPTD.PBMD/BPKAD	15/07/2024	15/07/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	1.927.868,85			1.927.868,85		196	1.927.868,85	-
			I Putu Tista Negara	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/1774/UPTD.PBMD/BPKAD	19/07/2024	19/07/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	1.967.213,11			1.967.213,11		200	1.967.213,11	-
			Ketut Widiari	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/1773/UPTD.PBMD/BPKAD	19/07/2024	19/07/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	1.967.213,11			1.967.213,11		200	1.967.213,11	-
			I Wayan Kartana	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3./1430/UPTD.PBMD/BPKAD	06/06/2024	06/06/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	1.544.262,30			1.544.262,30		157	1.544.262,30	-
			I Dewa Gede Sura Aditama	SIP Rumah Dinas	B.13.012/3517/UPTD.PBMD/BPKAD	08/11/2024	08/11/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	3.068.852,46			3.068.852,46		312	3.068.852,46	-
			I Putu Andhika Putra, S.STP	SIP Rumah Dinas	B.13.012/3516/UPTD.PBMD/BPKAD	09/09/2024	09/09/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	2.478.688,52			2.478.688,52		252	2.478.688,52	-
			Dewa Gede Oka, S.Sos	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3./2628/UPTD.PBMD/BPKAD	31/10/2024	31/10/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	2.990.163,93			2.990.163,93		304	2.990.163,93	-
			Ketut Giriada, A.Md. Kep	SIP Rumah Dinas	B.13.012/1710/UPTD.PBMD/BPKAD	19/06/2024	19/06/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	1.672.131,15			1.672.131,15		170	1.672.131,15	-
			Gede Putu Ary Angga Wijaya Kusuma	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/2097/UPTD.PBMD/BPKAD	01/08/2024	01/08/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	2.095.081,97			2.095.081,97		213	2.095.081,97	-
			Valeria Erna Suryandari	SIP Rumah Dinas	B.13.012/89/UPTD.PBMD/BPKAD	03/01/2024	03/01/2025	3.600.000,00	367	9.809,26	29.427,79			29.427,79		3	29.427,79	-
			Putu Emy Indrayani, A.Md.Keb	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/2773/UPTD.PBMD/BPKAD	24/11/2024	24/11/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	3.226.229,51			3.226.229,51		328	3.226.229,51	-
			I Putu Juni Suprianta, S.E	SIP Rumah Dinas	B.13.012/3181/UPTD.PBMD/BPKAD	03/11/2024	03/11/2025	5.400.000,00	366	14.754,10	4.529.508,20			4.529.508,20		307	4.529.508,20	-
			I Putu Agus Suwenten	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/2709/UPTD.PBMD/BPKAD	15/10/2024	15/10/2025	2.400.000,00	366	6.557,38	1.888.524,59			1.888.524,59		288	1.888.524,59	-
			Ni Made Narmi STP	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/1183/UPTD.PBMD/BPKAD	29/05/2024	29/05/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	1.465.573,77			1.465.573,77		149	1.465.573,77	-
			Nyoman Tri Uda Wilantara, SH.	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/1312/UPTD.PBMD/BPKAD	04/06/2024	04/06/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	1.524.590,16			1.524.590,16		155	1.524.590,16	-
			I Made Raditia Putra, S. STP, MAP	SIP Rumah Dinas	B.13.000/853/UPTD.PBMD/BPKAD	21/04/2024	21/04/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	1.091.803,28			1.091.803,28		111	1.091.803,28	-

Kode/Nama Akun	OPD	Keterangan (Kategori PDD/Aset yang disewa)	Nama Perusahaan/Perorangan Yang Menyewa	Lokasi	Nomor SK Perjanjian	Periode Pembayaran PDD		Jumlah Diterima (Rp)	Jumlah Hari atas Pembayaran	Nilai Per/Hari (Rp)	Saldo Awal 2025 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)		Saldo setelah Koreksi Saldo Awal (Rp)	Menjadi Bagian Piutang (Case Khusus) dan Dihitung di kertas kerja berbeda	Jumlah Hari Pengakuan PDD di Tahun 2025	Pendapatan LO Tahun 2025 dari PDD (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 (Rp)
						Mulai	Berakhir					Bertambah	Berkurang					
			I Komang Murja Artawan	SIP Rumah Dinas	B.13.600.1.15.3/439/UPTD.PBMD/BPKAD	16/02/2024	16/02/2025	2.400.000,00	367	6.539,51	307.356,95			307.356,95		47	307.356,95	-
			I Gusti Agung Putra S.Sos	SIP Rumah Dinas	B.13.012/2250/UPTD.PBMD/BPKAD	04/08/2024	04/08/2025	2.400.000,00	366	6.557,38	1.416.393,44			1.416.393,44		216	1.416.393,44	-
			I Nyoman Suarta	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/2971/UPTD.PBMD/BPKAD	08/12/2024	08/12/2025	2.400.000,00	366	6.557,38	2.242.622,95			2.242.622,95		342	2.242.622,95	-
			Ni Ketut Marsusilawati	SIP Rumah Dinas	B.31. 600.1.15.3/2612/UPTD. PBMD/BPKAD	11/12/2024	11/12/2025	1.500.000,00	366	4.098,36	1.413.934,43			1.413.934,43		345	1.413.934,43	-
			Ni Nyoman Oka Darmini,S.I.Kom	SIP Rumah Dinas	B.31.000/1677/UPTD.PBMD/BPKAD	08/07/2024	08/07/2025	1.200.000,00	366	3.278,69	619.672,13			619.672,13		189	619.672,13	-
			I Wayan Budiasa	SIP Rumah Dinas	B.13.012/469/UPTD.PBMD/BPKAD	25/02/2024	25/02/2025	7.800.000,00	367	21.253,41	1.190.190,74			1.190.190,74		56	1.190.190,74	-
			I Gede Supartawan, S.STP, M.AP	SIP Rumah Dinas	B.13.012/250/UPTD.PBMD/BPKAD	26/01/2024	26/01/2025	5.400.000,00	367	14.713,90	382.561,31			382.561,31		26	382.561,31	-
			Ni Luh Ayu Nusantini, S.Psi, M.Par	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/1570/UPTD.PBMD/BPKAD	05/07/2024	05/07/2025	5.400.000,00	366	14.754,10	2.744.262,30			2.744.262,30		186	2.744.262,30	-
			Anak Agung Bagus Suryawan, AP. MAP.	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/1291/UPTD.PBMD/BPKAD	08/06/2024	08/06/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	1.563.934,43			1.563.934,43		159	1.563.934,43	-
			Pande Made Suparja, SE	SIP Rumah Dinas	B.13.012/833/UPTD.PBMD/BPKAD	23/03/2024	23/03/2025	2.400.000,00	366	6.557,38	537.704,92			537.704,92		82	537.704,92	-
			I Made Sugiantara, S.IP	SIP Rumah Dinas	B.13.012/3052//UPTD. PBMD/BPKAD	10/10/2024	10/10/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	2.783.606,56			2.783.606,56		283	2.783.606,56	-
			I Made Artana Yasa B	SIP Rumah Dinas	B.13.012/339/UPTD.PBMD/BPKAD	02/02/2024	02/02/2025	5.400.000,00	367	14.713,90	485.558,58			485.558,58		33	485.558,58	-
			Dw Gd Mahendra Putra, SH, MH	SIP Rumah Dinas	B.13.012/4363/UPTD.PBMD/BPKAD	07/02/2024	07/02/2025	5.400.000,00	367	14.713,90	559.128,07			559.128,07		38	559.128,07	-
			I Gede Kardyasa, ST, M.Si	SIP Rumah Dinas	B.13.012/46/UPTD.PBMD/BPKAD	01/11/2024	01/11/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	3.000.000,00			3.000.000,00		305	3.000.000,00	-
			Ni Kadek Indah Sudartini	SIP Rumah Dinas	B.13.012/1626/UPTD.PBMD/BPKAD	06/04/2024	06/04/2025	1.200.000,00	366	3.278,69	314.754,10			314.754,10		96	314.754,10	-
			Ni Made Arya Dwi Damayanti, SH	SIP Rumah Dinas	B.13.032/3093/UPTD.PBMD/BPKAD	01/04/2024	01/04/2025	1.200.000,00	366	3.278,69	298.360,66			298.360,66		91	298.360,66	-
			I Komang Rai Sujana	SIP Rumah Dinas	B.13.012/2602/UPTD.PBMD/BPKAD	08/09/2024	08/09/2025	1.200.000,00	366	3.278,69	822.950,82			822.950,82		251	822.950,82	-
			Made Adhie Yudhia Gunawan,S.Kom	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/760/UPTD.PBMD/BPKAD	03/04/2024	03/04/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	914.754,10			914.754,10		93	914.754,10	-
			Ketut Rai Minarniwati Dewi, S.E.M.SI	SIP Rumah Dinas	B.31.000.2.3.2/2707/UPTD.PBMD/BPKAD	12/11/2024	12/11/2025	1.200.000,00	366	3.278,69	1.036.065,57			1.036.065,57		316	1.036.065,57	-
			I Made Suartawan, S.sos	SIP Rumah Dinas	B.31.000.2.3.2/668/UPTD.PBMD/BPKAD	02/01/2024	02/01/2025	3.600.000,00	367	9.809,26	19.618,53			19.618,53		2	19.618,53	-
			I Komang Geden	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/2260/UPTD/BPKAD	10/07/2024	10/07/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	1.878.688,52			1.878.688,52		191	1.878.688,52	-
			I Made Sukariawan Bandem, SSTP.,M.A.P.	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/852/UPTD.PBMD/BPKAD	14/04/2024	14/04/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	1.022.950,82			1.022.950,82		104	1.022.950,82	-
			I Putu Irpan Eka Ferdian., S.STP., M.AP	SIP Rumah Dinas	B.13.012/718/UPTD.PBMD/BPKAD	18/03/2024	18/03/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	757.377,05			757.377,05		77	757.377,05	-
			I Wayan Pumamarta, S.IP., MAP	SIP Rumah Dinas	B.13.012/47/UPTD.PBMD/BPKAD	06/01/2024	06/01/2025	3.600.000,00	367	9.809,26	58.855,59			58.855,59		6	58.855,59	-
			Drs. I Ketut Gede Arnawa, MAP	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/1335/UPTD.PBMD/BPKAD	12/01/2024	12/04/2025	6.750.000,00	457	14.770,24	1.506.564,55			1.506.564,55		102	1.506.564,55	-
			Ni Wayan Ana Pradnya Dewi, ST, M.Par	SIP Rumah Dinas	B.13.593/271/UPTD.PBMD/BPKAD	24/02/2024	24/02/2025	3.600.000,00	367	9.809,26	539.509,54			539.509,54		55	539.509,54	-
			I Komang Adi Santika, S.Sos	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/1573/UPTD.PBMD/BPKAD	09/07/2024	09/07/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	1.868.852,46			1.868.852,46		190	1.868.852,46	-
			Sang Ayu Putu Prismariyanti	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/2096/UPTD.PBMD/BPKAD	06/09/2024	06/09/2025	2.400.000,00	366	6.557,38	1.632.786,89			1.632.786,89		249	1.632.786,89	-
			I Nengah Warta	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/1092/UPTD.PBMD/BPKAD	31/05/2024	31/12/2025	3.800.000,00	580	6.551,72	2.391.379,31			2.391.379,31		365	2.391.379,31	-
			Ni Kadek Dwi Rahayu	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/1670/UPTD.PBMD/BPKAD	22/07/2024	22/07/2025	5.400.000,00	366	14.754,10	2.995.081,97			2.995.081,97		203	2.995.081,97	-
			I Ketut Wijaya	SIP Rumah Dinas	B.13.012/832/UPTD.PBMD/BPKAD	23/03/2024	23/03/2025	2.400.000,00	366	6.557,38	537.704,92			537.704,92		82	537.704,92	-
			Wahyuddin	SIP Rumah Dinas	B.31.000.2.3.2/1090/UPTD.PBMD/BPKAD	10/05/2024	10/05/2025	2.400.000,00	366	6.557,38	852.459,02			852.459,02		130	852.459,02	-
			I Wayan Puma,S.Sos	SIP Rumah Dinas	B.13.012/2600/UPTD.PBMD/BPKAD	08/09/2024	08/09/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	2.468.852,46			2.468.852,46		251	2.468.852,46	-
			Niko Trisnawati, SE	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/1184/UPTD.PBMD/BPKAD	16/05/2024	16/05/2025	5.400.000,00	366	14.754,10	2.006.557,38			2.006.557,38		136	2.006.557,38	-
			Ni Nyoman Sukawati	SIP Rumah Dinas	B.13.012/674/UPTD.PBMD/BPKAD	19/01/2024	19/01/2025	3.600.000,00	367	9.809,26	186.376,02			186.376,02		19	186.376,02	-

Kode/Nama Akun	OPD	Keterangan (Kategori PDD/Aset yang disewa)	Nama Perusahaan/Perorangan Yang Menyewa	Lokasi	Nomor SK Perjanjian	Periode Pembayaran PDD		Jumlah Diterima (Rp)	Jumlah Hari atas Pembayaran	Nilai Per/Hari (Rp)	Saldo Awal 2025 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)		Saldo setelah Koreksi Saldo Awal (Rp)	Menjadi Bagian Piutang (Case Khusus) dan Dihitung di kertas kerja berbeda	Jumlah Hari Pengakuan PDD di Tahun 2025	Pendapatan LO Tahun 2025 dari PDD (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 (Rp)
						Mulai	Berakhir					Bertambah	Berkurang					
			Ngakan Made Gari Gargita, SIP, MH.	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/1748/UPTD.PBMD/BPKAD.	06/06/2024	06/06/2025	2.400.000,00	366	6.557,38	1.029.508,20			1.029.508,20		157	1.029.508,20	-
			I Made Adi Sathya Pratama, S.STP	SIP Rumah Dinas	B.13.012/3389/UPTD.PBMD/BPKAD	08/11/2024	08/11/2025	2.400.000,00	366	6.557,38	2.045.901,64			2.045.901,64		312	2.045.901,64	-
			Dw Gd Aditya Nova Prawisandi	SIP Rumah Dinas	B.13.012/2529/UPTD.PBMD/BPKAD	25/08/2024	25/08/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	2.331.147,54			2.331.147,54		237	2.331.147,54	-
			I Gusti Putu Wijayadnya	SIP Rumah Dinas	B.13.012/3136/UPTD.PBMD/BPKAD	26/10/2024	26/10/2025	2.400.000,00	366	6.557,38	1.960.655,74			1.960.655,74		299	1.960.655,74	-
			Ir. Nyoman Suastika, M.Si	SIP Rumah Dinas	B.13.012/2692/UPTD.PBMD/BPKAD	08/09/2024	08/09/2025	2.400.000,00	366	6.557,38	1.645.901,64			1.645.901,64		251	1.645.901,64	-
			I Dewa Gede Suharta, S.Sos	SIP Rumah Dinas	B.13.032/3094/UPTD.PBMD/BPKAD	21/09/2024	21/09/2025	5.400.000,00	366	14.754,10	3.895.081,97			3.895.081,97		264	3.895.081,97	-
			Ida Bagus Kade Ganda Susila, SH	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/2986/UPTD.PBMD/BPKAD	09/05/2024	09/05/2025	1.200.000,00	366	3.278,69	422.950,82			422.950,82		129	422.950,82	-
			Kadek Dewi Yuniasri, S.Pd	SIP Rumah Dinas	B.13.012/89/UPTD.PBMD/BPKAD	12/01/2024	12/01/2025	1.200.000,00	367	3.269,75	39.237,06			39.237,06		12	39.237,06	-
			I Made Arnata	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/1848/UPTD.PBMD/BPKAD	27/06/2024	27/06/2025	1.200.000,00	366	3.278,69	583.606,56			583.606,56		178	583.606,56	-
			Made Gita Heryadi, S.TP	SIP Rumah Dinas	B.13.012/646/UPTD.PBMD/BPKAD	03/03/2024	03/03/2025	5.400.000,00	366	14.754,10	914.754,10			914.754,10		62	914.754,10	-
			Luh Nyoman Widiatmikawati, SH.MH	SIP Rumah Dinas	B.13.012/3356/UPTD.PBMD/BPKAD	10/11/2024	10/11/2025	5.400.000,00	366	14.754,10	4.632.786,89			4.632.786,89		314	4.632.786,89	-
			I Made Arbawa	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/1689/UPTD.PBMD/BPKAD	24/07/2024	24/07/2025	5.400.000,00	366	14.754,10	3.024.590,16			3.024.590,16		205	3.024.590,16	-
			I G.A.K. Kartika Jaya Seputra, SH, MH	SIP Rumah Dinas	B.13.012/177/UPTD.PBMD/BPKAD	21/02/2024	21/02/2025	5.400.000,00	367	14.713,90	765.122,62			765.122,62		52	765.122,62	-
			Gede Suralaga, S.IP, M.Si	SIP Rumah Dinas	B.13.012/3518/UPTD.PBMD/BPKAD	04/08/2024	04/08/2025	7.800.000,00	366	21.311,48	4.603.278,69			4.603.278,69		216	4.603.278,69	-
			I Gede Made Dwidhapradnya Wira Putra, SH	SIP Rumah Dinas	B.13.012/2723/UPTD.PBMD/BPKAD	20/09/2024	20/09/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	2.586.885,25			2.586.885,25		263	2.586.885,25	-
			Dr.Ir. IGW Samsi Gunarta, M.Appl.Sc	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/1290/UPTD.PBMD/BPKAD	07/08/2024	07/08/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	2.154.098,36			2.154.098,36		219	2.154.098,36	-
			Nyoman Arya Widia Atmaja, S.STP., M.A.P	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/2044/UPTD.PBMD/BPKAD	03/09/2024	03/09/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	2.419.672,13			2.419.672,13		246	2.419.672,13	-
			Komang Nopariawan, S.IP, M.AP	SIP Rumah Dinas	B.13.012/48/UPTD.PBMD/BPKAD	19/01/2024	19/01/2026	7.200.000,00	732	9.836,07	3.777.049,18			3.777.049,18		365	3.590.163,93	186.885,25
			I Putu Irvan Ade Candra P, S.STP, M.AP	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/1969/UPTD.PBMD/BPKAD	11/08/2024	11/08/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	2.193.442,62			2.193.442,62		223	2.193.442,62	-
			I Gusti Ngurah Kusuma Wijaya, S.STP	SIP Rumah Dinas	B.13.012/1754/UPTD.PBMD/BPKAD	20/06/2024	20/06/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	1.681.967,21			1.681.967,21		171	1.681.967,21	-
			Hesti Sagiri, S.Hut	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/761/UPTD.PBMD/BPKAD	03/04/2024	03/04/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	914.754,10			914.754,10		93	914.754,10	-
			I Ketut Nilon	SIP Rumah Dinas	B.13.032/3357/UPTD.PBMD/BPKAD	08/11/2024	08/11/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	3.068.852,46			3.068.852,46		312	3.068.852,46	-
			I Made Purnama Putera S.STP, M.AP	SIP Rumah Dinas	B.13.012/3471/UPTD.PBMD/BPKAD	11/11/2024	11/11/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	3.098.360,66			3.098.360,66		315	3.098.360,66	-
			I Gede Agus Sumantika, SH	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/1471/UPTD.PBMD/BPKAD	27/06/2024	27/06/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	1.750.819,67			1.750.819,67		178	1.750.819,67	-
			I Made Winarta, S.E	SIP Rumah Dinas	B.13.012/1011/UPTD.PBMD/BPKAD	12/04/2024	12/04/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	1.003.278,69			1.003.278,69		102	1.003.278,69	-
			Agus Budi Arthana	SIP Rumah Dinas	B.13.012/816/UPTD.PBMD/BPKAD	16/02/2024	16/02/2025	3.600.000,00	367	9.809,26	461.035,42			461.035,42		47	461.035,42	-
			Putu Eska Triyana	SIP Rumah Dinas	B.13.012/2133/UPTD.PBMD/BPKAD	28/07/2024	28/07/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	2.055.737,70			2.055.737,70		209	2.055.737,70	-
			Luh Sri Wedaningsih, S.Sl	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/1334/UPTD.PBMD/BPKAD	08/06/2024	08/06/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	1.563.934,43			1.563.934,43		159	1.563.934,43	-
			I Putu Agus Sudiwartana, S.STP., MAP	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/2768/UPTD.PBMD/BPKAD	24/11/2024	24/11/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	3.226.229,51			3.226.229,51		328	3.226.229,51	-
			I Kadek Adi Mahendra, S.STP.,M.AP	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3./1336/UPTD.PBMD/BPKAD	22/04/2024	22/04/2025	2.400.000,00	366	6.557,38	734.426,23			734.426,23		112	734.426,23	-
			Ida Ayu Ketut Yudiani	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/1472/UPTD.PBMD/BPKAD	27/06/2024	27/06/2025	2.400.000,00	366	6.557,38	1.167.213,11			1.167.213,11		178	1.167.213,11	-
			I Gusti Putu Satrya Widnyana, S.IP,M.AP	SIP Rumah Dinas	B.13.032/3627/UPTD.PBMD/BPKAD	30/12/2024	30/12/2025	2.400.000,00	366	6.557,38	2.386.885,25			2.386.885,25		364	2.386.885,25	-
			Putu Eka Purnami, SH	SIP Rumah Dinas	B.31.000.2.3.2/665/UPTD.PBMD/BPKAD	15/12/2024	15/12/2025	2.400.000,00	366	6.557,38	2.288.524,59			2.288.524,59		349	2.288.524,59	-
			Luh Widiastini, A.Md.Keb	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/1218/UPTD.PBMD/BPKAD	16/05/2024	16/05/2025	1.200.000,00	366	3.278,69	445.901,64			445.901,64		136	445.901,64	-
			Gede Pancatria Kweranata, S.STP. M.AP	SIP Rumah Dinas	B.13.012/2249/UPTD.PBMD/BPKAD	09/08/2024	09/08/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	2.173.770,49			2.173.770,49		221	2.173.770,49	-

Kode/Nama Akun	OPD	Keterangan (Kategori PDD/Aset yang disewa)	Nama Perusahaan/Perorangan Yang Menyewa	Lokasi	Nomor SK Perjanjian	Periode Pembayaran PDD		Jumlah Diterima (Rp)	Jumlah Hari atas Pembayaran	Nilai Per/Hari (Rp)	Saldo Awal 2025 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)		Saldo setelah Koreksi Saldo Awal (Rp)	Menjadi Bagian Piutang (Case Khusus) dan Dihitung di kertas kerja berbeda	Jumlah Hari Pengakuan PDD di Tahun 2025	Pendapatan LO Tahun 2025 dari PDD (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 (Rp)
						Mulai	Berakhir					Bertambah	Berkurang					
			I Wayan Adi Sucita, S.IP, MH	SIP Rumah Dinas	B.13.600.1.15.3/447/UPTD.PBMD/BPKAD	24/02/2024	24/02/2025	3.600.000,00	367	9.809,26	539.509,54			539.509,54		55	539.509,54	-
			I Kadek Hermayadi	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/1091/UPTD.PBMD/BPKAD	09/05/2024	09/05/2025	2.400.000,00	366	6.557,38	845.901,64			845.901,64		129	845.901,64	-
			Ida Ayu Nyoman Nandari Patni, S.Sos	SIP Rumah Dinas	B.13.012/2898/UPTD.PBMD/BPKAD	09/09/2024	09/09/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	2.478.688,52			2.478.688,52		252	2.478.688,52	-
			I Ketut Sukita, SE	SIP Rumah Dinas	B.13.012/1627/UPTD.PBMD/BPKAD	20/04/2024	20/04/2025	1.200.000,00	366	3.278,69	360.655,74			360.655,74		110	360.655,74	-
			Ni Nyoman Puspadi,S.Sos	SIP Rumah Dinas	B.31.000.2.3.2/2523/UPTD.PBMD/BPKAD	30/10/2024	30/10/2025	1.200.000,00	366	3.278,69	993.442,62			993.442,62		303	993.442,62	-
			Ni Luh Kusniati Giri,S.Sos	SIP Rumah Dinas	B.13.012/3388/UPTD.PBMD/BPKAD	30/10/2024	30/10/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	2.980.327,87			2.980.327,87		303	2.980.327,87	-
			I Nyoman Sumbawa,SH	SIP Rumah Dinas	B.31.000.2.3.2/2524/UPTD.PBMD/BPKAD	30/10/2024	30/10/2025	2.400.000,00	366	6.557,38	1.986.885,25			1.986.885,25		303	1.986.885,25	-
			I Ketut Pasek	SIP Rumah Dinas	B.13.012/340/UPTD.PBMD/BPKAD	06/01/2024	06/01/2025	2.400.000,00	367	6.539,51	39.237,06			39.237,06		6	39.237,06	-
			I Wayan Kartawan, SP	SIP Rumah Dinas	B.13.012/2601/UPTD.PBMD/BPKAD	08/09/2024	08/09/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	2.468.852,46			2.468.852,46		251	2.468.852,46	-
			Gede Nova Widiarta	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/1572/UPTD.PBMD/BPKAD	10/03/2024	10/03/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	678.688,52			678.688,52		69	678.688,52	-
			Ketut Yudi Ariyawan	SIP Rumah Dinas	B.13.012/4271/UPTD.PBMD/BPKAD	27/06/2024	27/06/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	1.750.819,67			1.750.819,67		178	1.750.819,67	-
			Anak Agung Ngurah Darma Putra, SE, M.Si	SIP Rumah Dinas	B.13.012/88/UPTD.PBMD/BPKAD	10/02/2024	10/01/2025	3.300.000,00	336	9.821,43	98.214,29			98.214,29		10	98.214,29	-
			I Ketut Swika, SE.Ak. MAP	SIP Rumah Dinas	B.31.600.1.15.3/1431/UPTD.PBMD/BPKAD	10/05/2024	10/05/2025	3.600.000,00	366	9.836,07	1.278.688,52			1.278.688,52		130	1.278.688,52	-
			I Made Sunarta	SIP Rumah Dinas	B.31.012/176/UPTD.PBMD/BPKAD	20/01/2024	20/01/2025	3.600.000,00	367	9.809,26	196.185,29			196.185,29		20	196.185,29	-
		Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	Ir. Hendarto Tjokro Setio	Hasil Sewa BMD		05/05/2006	05/05/2036	551.550.000,00	10.959	50.328,50	208.510.963,59			208.510.963,59		365	18.369.901,45	190.141.062,14
		Tanah Bangunan Gudang	Gede Mahardika	Hasil Sewa BMD		23/12/2024	23/12/2029	399.715.250,00	1.827	218.782,29	-	-	-	0,00	1.969.040,64	365	79.855.537,08	317.890.672,28
			PT Bali Budaya Semesta	Hasil KSP	Akta Notaris No 18 Tanggal 25 November 2025	25/11/2025	25/11/2055	58.380.000.000,00	10.958	5.327.614,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	197.121.737,54	58.182.878.262,46
		Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	I Gusti Ngurah Bahaduri (Perjanjian sebelumnya atas nama Putu Kangen Disastra)	Hasil Sewa BMD		01/03/2023	01/03/2028	1.689.334.200,00	1.828	924.143,44	0,00	-	-	0	621.024.388,62	365	337.312.353,94	730.997.457,44
		Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalaow/Cottage	PT. Citrakarya Sukses Bersama	Hasil Sewa BMD		10/04/2025	10/04/2030	6.254.025.000,00	1.827	3.423.111,66				0		266	910.547.701,15	5.343.477.298,85
		Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal-Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	DPD Partai Gerindra	Hasil Sewa BMD		10/07/2023	10/07/2028	34.625.000,00	1.828	18.941,47	24.377.666,85			24.377.666,85		365	6.913.635,12	17.464.031,73
		Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal-Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalaow/Cottage	Moh. Shodikin	Hasil Sewa BMD		26/11/2020	26/11/2025	15.000.000,00	1.827	8.210,18	2.709.359,60			2.709.359,60		330	2.709.359,60	-
			PT. Citrakarya Sukses Bersama	Hasil Sewa BMD		10/04/2020	10/04/2025	1.158.255.000,00	1.827	633.965,52	63.396.551,73			63.396.551,73		100	63.396.551,73	-
			I Gusti Agung Ngurah Niryawan	Hasil Sewa BMD		16/04/2021	16/04/2026	15.000.000,00	1.827	8.210,18	3.866.995,07			3.866.995,07		365	2.996.715,93	870.279,14
		Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal-Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	I Wayan Wide	Hasil Sewa BMD		19/10/2020	19/10/2025	16.500.000,00	1.827	9.031,20	2.637.110,02			2.637.110,02		292	2.637.110,02	-
			DPW IMO (Ikatan Media Online)	Hasil Sewa BMD		21/09/2020	21/09/2025	30.160.000,00	1.827	16.507,94	4.358.095,24			4.358.095,24		264	4.358.095,24	-
			G. Manggala Perdana Jaya, SH	Hasil Sewa BMD		22/03/2021	22/03/2026	25.000.000,00	1.827	13.683,63	6.102.900,93			6.102.900,93		365	4.994.526,55	1.108.374,38
			Ni Ketut Supadmi	Hasil Sewa BMD		31/03/2021	31/03/2026	37.625.000,00	1.827	20.593,87	9.370.210,73			9.370.210,73		365	7.516.762,45	1.853.448,28
			Ikatan Doktor Ekonomi Udayana (IDEYANA)	Hasil Sewa BMD		02/06/2021	02/06/2026	50.330.000,00	1.827	27.547,89	14.269.808,43			14.269.808,43		365	10.054.980,84	4.214.827,59
			Desy Heryani Parwatha	Hasil Sewa BMD		01/10/2021	01/10/2026	25.000.000,00	1.827	13.683,63	8.743.842,36			8.743.842,36		365	4.994.526,55	3.749.315,81
			Ikatan Doktor Ekonomi Udayana (IDEYANA)	Hasil Sewa BMD		02/06/2021	02/06/2026	10.066.000,00	1.827	5.509,58	2.853.961,68			2.853.961,68		365	2.010.996,17	842.965,51
			I Dewa Nyoman Rai Dharmadi	Hasil Sewa BMD		15/09/2023	15/09/2028	68.239.482,00	1.828	37.330,13	50.544.999,25			50.544.999,25		365	13.625.498,32	36.919.500,93
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Gana Paramananda	Hasil Sewa BMD		10/06/2025	10/06/2026	35.934.300,00	366	98.181,15				0		205	20.127.135,25	15.807.164,75
		Tanah Basah-Tanah Sawah Irigasi	I Gusti Bagus Suka Arjawa	Hasil Sewa BMD		15/01/2020	15/01/2025	13.725.000,00	1.828	7.508,21	112.623,08			112.623,08		15	112.623,08	-
			Ketut Sri Sudarmiani	Hasil Sewa BMD		24/06/2020	24/06/2025	70.400.000,00	1.827	38.533,11	6.743.295,02			6.743.295,02		175	6.743.295,02	-
			Pasemetonan Pasek Telengan	Hasil Sewa BMD		12/08/2020	12/08/2025	4.650.000,00	1.827	2.545,16	570.114,94			570.114,94		224	570.114,94	-
			I Kt Subitayasa,SE	Hasil Sewa BMD		23/06/2021	23/06/2026	76.250.000,00	1.827	41.735,08	22.495.210,72			22.495.210,72		365	15.233.305,97	7.261.904,75
			LPD Desa Beraban	Hasil Sewa BMD		15/02/2021	15/02/2026	7.500.000,00	1.827	4.105,09	1.687.192,13			1.687.192,13		365	1.498.357,96	188.834,17
			Yayasan Pendidikan Nusantara	Hasil Sewa BMD		31/10/2021	31/10/2026	74.000.000,00	1.827	40.503,56	27.096.880,13			27.096.880,13		365	14.783.798,58	12.313.081,55
			Dewa Gede Kresna Mahaputra	Hasil Sewa BMD		05/08/2021	05/08/2026	43.250.000,00	1.827	23.672,69	13.777.504,10			13.777.504,10		365	8.640.530,93	5.136.973,17
			Drs. I Made Gede Nuada	Hasil Sewa BMD		27/08/2021	27/08/2026	20.000.000,00	1.827	10.946,91	6.611.932,13			6.611.932,13		365	3.995.621,24	2.616.310,89

Kode/Nama Akun	OPD	Keterangan (Kategori PDD/Aset yang disewa)	Nama Perusahaan/Perorangan Yang Menyewa	Lokasi	Nomor SK Perjanjian	Periode Pembayaran PDD		Jumlah Diterima (Rp)	Jumlah Hari atas Pembayaran	Nilai Per/Hari (Rp)	Saldo Awal 2025 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)		Saldo setelah Koreksi Saldo Awal (Rp)	Menjadi Bagian Piutang (Case Khusus) dan Dihitung di kertas kerja berbeda	Jumlah Hari Pengakuan PDD di Tahun 2025	Pendapatan LO Tahun 2025 dari PDD (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 (Rp)
						Mulai	Berakhir					Bertambah	Berkurang					
			Dewa Komang Indra	Hasil Sewa BMD		12/11/2021	12/11/2026	80.000.000,00	1.827	43.787,63	29.819.376,02			29.819.376,02		365	15.982.484,95	13.836.891,07
			I Made Sugiantara	Hasil Sewa BMD		05/11/2021	05/11/2026	165.750.000,00	1.827	90.722,50	61.146.962,23			61.146.962,23		365	33.113.711,00	28.033.251,23
			Angga Syafriel Prasetyo	Hasil Sewa BMD		05/11/2021	05/11/2026	189.000.000,00	1.827	103.448,28	69.724.137,93			69.724.137,93		365	37.758.620,69	31.965.517,24
			Perusahaan Daerah Provinsi Bali	Hasil Sewa BMD		29/12/2021	29/12/2026	362.480.000,00	1.827	198.401,75	144.436.475,10			144.436.475,10		365	72.416.639,30	72.019.835,80
			Drs. Made Ngurah Artana	Hasil Sewa BMD		12/05/2022	12/05/2027	215.250.000,00	1.827	117.816,09	101.557.471,26			101.557.471,26		365	43.002.873,56	58.554.597,70
			I Wayan Supartama	Hasil Sewa BMD		19/09/2022	19/09/2027	108.750.000,00	1.827	59.523,81	59.047.619,04			59.047.619,04		365	21.726.190,48	37.321.428,56
			Lakhsmi Dilip Patel	Hasil Sewa BMD		19/12/2022	19/12/2047	1.037.000.000,00	9.132	113.556,72	952.513.797,63			952.513.797,63		365	41.448.204,12	911.065.593,51
			G. Manggala Perdana Jaya, SH	Hasil Sewa BMD		04/05/2023	04/05/2028	37.500.000,00	1.828	20.514,22	25.027.352,30			25.027.352,30		365	7.487.691,47	17.539.660,83
			Made Arie Satryawan	Hasil Sewa BMD		16/07/2023	16/07/2028	140.000.000,00	1.828	76.586,43	99.026.258,21			99.026.258,21		365	27.954.048,14	71.072.210,07
			Ida Gede Kresna Budi	Hasil Sewa BMD		17/05/2023	17/05/2028	198.750.000,00	1.828	108.725,38	134.058.397,16			134.058.397,16		365	39.684.764,77	94.373.632,39
			Somvir	Hasil Sewa BMD		23/02/2023	23/02/2028	206.500.000,00	1.827	113.026,82	129.867.816,09			129.867.816,09		365	41.254.789,27	88.613.026,82
			Gede Ray Ardian Manchini Yasa	Hasil Sewa BMD		10/08/2023	10/08/2028	187.500.000,00	1.828	102.571,12	135.188.730,85			135.188.730,85		365	37.438.457,33	97.750.273,52
			Dr I Ketut Rochineng SH MH	Hasil Sewa BMD		10/08/2023	10/08/2028	372.500.000,00	1.828	203.774,62	268.574.945,29			268.574.945,29		365	74.377.735,23	194.197.210,06
			Dewa Komang Derdy Antoni	Hasil Sewa BMD		09/10/2023	09/10/2028	616.000.000,00	1.828	336.980,31	464.358.862,15			464.358.862,15		365	122.997.811,82	341.361.050,33
			Desak Ketut Plavina Dina	Hasil Sewa BMD		21/08/2023	21/08/2028	262.500.000,00	1.828	143.599,56	190.843.818,39			190.843.818,39		365	52.413.840,26	138.429.978,13
			I Dewa Agung Ayu Indriyani	Hasil Sewa BMD		29/08/2023	29/08/2028	135.000.000,00	1.828	73.851,20	98.739.059,08			98.739.059,08		365	26.955.689,28	71.783.369,80
		Tanah Basah-Tanah Sawah Irigasi dan Tanah Kering-Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Gusti Ketut Merta	Hasil Sewa BMD		01/03/2022	01/03/2027	68.250.000,00	1.827	37.356,32	29.511.494,26			29.511.494,26		365	13.635.057,47	15.876.436,79
		Tanah Kering-Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal	Gusti Putu Karyawan	Hasil Sewa BMD		22/02/2021	22/02/2026	15.000.000,00	1.827	8.210,18	3.431.855,50			3.431.855,50		365	2.996.715,93	435.139,57
		Tanah Basah-Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	Gde Ketut Nugrahita Pendit	Hasil Sewa BMD		13/06/2023	13/06/2028	35.000.000,00	1.828	19.146,61	24.124.726,48			24.124.726,48		365	6.988.512,04	17.136.214,44
		Tanah Kering-Tanah Tegalan	PT. Wisnukarya Internasional	Hasil Sewa BMD		27/01/2020	27/01/2025	120.083.600,00	1.828	65.691,25	1.773.663,68			1.773.663,68		27	1.773.663,68	-
			PDAM Tirta Sanjiwani	Hasil Sewa BMD		11/02/2020	11/02/2025	256.500.000,00	1.828	140.317,29	5.893.326,04			5.893.326,04		42	5.893.326,04	-
			Ni Made Ayu Sriyanti	Hasil Sewa BMD		24/08/2020	24/08/2025	34.125.000,00	1.827	18.678,16	4.408.045,97			4.408.045,97		236	4.408.045,97	-
			Putu Witha	Hasil Sewa BMD		13/10/2020	13/10/2025	37.750.000,00	1.827	20.662,29	5.909.414,35			5.909.414,35		286	5.909.414,35	-
			DPD Partai Gerindra	Hasil Sewa BMD		11/03/2020	11/03/2025	27.200.000,00	1.827	14.887,79	1.042.145,59			1.042.145,59		70	1.042.145,59	-
			Yayasan Kepustakaan Bung Karno	Hasil Sewa BMD		23/12/2020	23/12/2025	3.250.000,00	1.827	1.778,87	635.057,48			635.057,48		357	635.057,48	-
			I Gusti Lanang Ngurah Biasama	Hasil Sewa BMD		22/12/2020	22/12/2025	34.800.000,00	1.827	19.047,62	6.780.952,38			6.780.952,38		356	6.780.952,38	-
			Yudi Kumianingsih	Hasil Sewa BMD		18/04/2021	18/04/2026	84.000.000,00	1.827	45.977,01	21.747.126,43			21.747.126,43		365	16.781.609,20	4.965.517,23
			PDAM Tirta Amertha Buana	Hasil Sewa BMD		16/04/2021	16/04/2026	7.150.000,00	1.827	3.913,52	1.843.267,66			1.843.267,66		365	1.428.434,59	414.833,07
			Koperasi Krama Subak Lumbung Sari Desa Temesi	Hasil Sewa BMD		15/02/2021	15/02/2026	7.500.000,00	1.827	4.105,09	1.687.192,13			1.687.192,13		365	1.498.357,96	188.834,17
			Cahaya Wirawan Hadi	Hasil Sewa BMD		21/11/2021	21/11/2026	51.290.000,00	1.827	28.073,34	19.370.607,55			19.370.607,55		365	10.246.770,66	9.123.836,89
			I gusti ngurah arie pidada	Hasil Sewa BMD		19/07/2021	19/07/2026	268.800.000,00	1.827	147.126,44	83.126.436,78			83.126.436,78		365	53.701.149,43	29.425.287,35
			Yayasan Korpri	Hasil Sewa BMD		18/10/2021	18/10/2026	250.000.000,00	1.827	136.836,34	89.764.641,49			89.764.641,49		365	49.945.265,46	39.819.376,03
			Kt Tompel	Hasil Sewa BMD		12/01/2022	12/01/2027	18.200.000,00	1.827	9.961,69	7.391.570,88			7.391.570,88		365	3.636.015,33	3.755.555,55
			Yayasan Kepustakaan Bung Karno/utk mess	Hasil Sewa BMD		07/05/2022	07/05/2027	67.000.000,00	1.827	36.672,14	31.428.024,09			31.428.024,09		365	13.385.331,14	18.042.692,95
			putu mahardika	Hasil Sewa BMD		18/01/2022	18/01/2027	27.500.000,00	1.827	15.052,00	11.258.894,36			11.258.894,36		365	5.493.979,20	5.764.915,16
			dewa alit suandana	Hasil Sewa BMD		21/04/2022	21/04/2027	25.250.000,00	1.827	13.820,47	11.623.015,88			11.623.015,88		365	5.044.471,81	6.578.544,07
			PT. Berawa Bali Utama	Hasil Sewa BMD		23/03/2022	23/03/2027	791.250.000,00	1.827	433.087,03	351.666.666,66			351.666.666,66		365	158.076.765,19	193.589.901,47
			Dewi Sinaryati	Hasil Sewa BMD		27/05/2022	27/05/2027	6.312.500,00	1.827	3.455,12	3.030.138,21			3.030.138,21		365	1.261.117,95	1.769.020,26
			I Gede Billy Pandiatama	Hasil Sewa BMD		02/08/2022	02/08/2027	22.500.000,00	1.827	12.315,27	11.625.615,77			11.625.615,77		365	4.495.073,89	7.130.541,88
			PT. Dayamitra Telekomunikasi	Hasil Sewa BMD		29/11/2022	29/11/2027	150.000.000,00	1.827	82.101,81	87.274.220,03			87.274.220,03		365	29.967.159,28	57.307.060,75
			PLN	Hasil Sewa BMD		06/02/2023	06/02/2028	16.875.000,00	1.827	9.236,45	10.455.665,03			10.455.665,03		365	3.371.305,42	7.084.359,61
			I Rai Putra Sudanta	Hasil Sewa BMD		14/12/2023	14/12/2028	150.000.000,00	1.828	82.056,89	118.490.153,17			118.490.153,17		365	29.950.765,86	88.539.387,31
			PT Bali Pawiwahan	Hasil Sewa BMD		15/10/2024	15/10/2029	4.484.712.500,00	1.827	2.454.686,64	4.293.246.941,71			4.293.246.941,71		365	895.960.625,34	3.397.286.316,37
			I Wayan Tinggen	Hasil Sewa BMD		02/06/2021	02/06/2026	54.375.000,00	1.827	29.761,90	15.416.666,67			15.416.666,67		365	10.863.095,24	4.553.571,43
		Tanah Kering-Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	PT. Garuda Adhimatra Indonesia	Hasil Sewa BMD		29/12/2021	29/12/2026	5.205.000.000,00	1.827	2.848.932,68	2.074.022.988,50			2.074.022.988,50		365	1.039.860.426,93	1.034.162.561,57
			I Ketut Parsana	Hasil Sewa BMD		12/10/2023	12/10/2028	30.000.000,00	1.828	16.411,38	22.664.113,79			22.664.113,79		365	5.990.153,17	16.673.960,62
			Yayasan Corti	Hasil Sewa BMD		03/07/2024	03/07/2029	106.000.000,00	1.827	58.018,61	95.440.613,03			95.440.613,03		365	21.176.792,56	74.263.820,47
		Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	I Gusti Ayu Kade Harry Adhisukmawati	Hasil Sewa BMD		10/07/2024	10/07/2029	302.500.000,00	1.827	165.571,98	273.524.904,21			273.524.904,21		365	60.433.771,21	213.091.133,00
		Tanah Lapangan Parkir-Tanah Lapangan Apel/Upacara	Pengadilan Barus	Hasil Sewa BMD		17/02/2020	17/02/2025	57.600.000,00	1.828	31.509,85	1.512.472,65			1.512.472,65		48	1.512.472,65	0
			I Gede Purana	Hasil Sewa BMD		27/03/2020	27/03/2025	44.400.000,00	1.827	24.302,13	2.089.983,58			2.089.983,58		86	2.089.983,58	0
		Tanah Lapangan Olah Raga-Tanah Lapangan Lainnya	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Hasil Sewa BMD		30/12/2020	30/12/2025	150.000.000,00	1.827	82.101,81	29.885.057,47			29.885.057,47		364	29.885.057,47	-
			Paguyuban Taman merthanadi Transport	Hasil Sewa BMD		02/06/2021	02/06/2026	40.000.000,00	1.827	21.893,82	11.340.996,17			11.340.996,17		365	7.991.242,47	3.349.753,70
			Pemerintah Desa Gubug	Hasil Sewa BMD		21/12/2021	21/12/2026	28.125.000,00	1.827	15.394,09	11.083.743,85			11.083.743,85		365	5.618.842,36	5.464.901,49
			I Wayan Sadia	Hasil Sewa BMD		07/09/2022	07/09/2027	166.500.000,00	1.827	91.133,00	89.310.344,83			89.310.344,83		365	33.263.546,80	56.046.798,03
			Oke Marokeh Rachmat	Hasil Sewa BMD		20/09/2022	20/09/2027	15.000.000,00	1.827	8.210,18	8.152.709,36			8.152.709,36		365	2.996.715,93	5.155.993,43
			Pemerintah Desa Tibubeneng	Hasil Sewa BMD		21/11/2022	21/11/2027	160.000.000,00	1.827	87.575,26	92.391.899,28			92.391.899,28		365	31.964.969,90	60.426.929,38
			Komang Gilang Pradnya Taksu Natha	Hasil Sewa BMD		14/12/2023	14/12/2028	174.375.000,00	1.828	95.391,14	137.744.803,06			137.744.803,06		365	34.817.765,32	102.927.037,74
		Tanah Lapangan Apel/Upacara	Pengadilan Barus	Hasil Sewa BMD		17/02/2025	17/02/2030	58.445.500,00	1.827	31.989,87				0		318	10.172.779,97	48.272.720,03
			IB. Oka Suyatra Wibawa, SE	Hasil Sewa BMD		11/08/2024	11/08/2029	75.492.000,00	1.827	41.320,20				0		365	15.081.871,92	54.501.339,90
			I Nyoman Nuryana	Hasil Sewa BMD		02/05/2024	02/05/2029	89.494.500,00	1.827	48.984,40				0		365	17.879.306,24	59.663.000,00
			A.A Gede Putra Prabawa	Hasil Sewa BMD		04/03/2025	04/03/2026	26.949.174,00	366	73.631,62				0		303	22.310.381,75	4.638.792,25
			I Gede Purana	Hasil Sewa BMD		27/03/2025	27/03/2030	83.250.000,00	1.827	45.566,50				0		280	12.758.620,69	70.491.379,31
			Anak Agung Ngurah Manik Sumarejaya	Hasil Sewa BMD		03/03/2025	03/03/2030	150.000.000,00	1.827	82.101,81				0		304	24.958.949,10	125.041.050,90
		Tanah Pertanian-Tanah Usaha	I Made Sudja	Hasil Sewa BMD		16/08/2023	16/08/2028	43.000.000,00	1.828	23.522,98	31.144.420,13			31.144.420,13		365	8.585.886,21	22.558.533,92
		Tanah Sawah Irigasi	I Ketut Juliarta	Hasil Sewa BMD		06/05/2024	06/05/2029	925.750.000,00	1.827	506.704,98	804.140.804,60			804.140.804,60		365	184.947.318,01	619.193.486,59
			I Made Wiranatha	Hasil Sewa BMD		22/11/2023	22/11/2028	1.137.073.973,00	1.828	622.031,71	884.529.097,16			884.529.097,16		365	227.041.575,57	657.487.521,59

Kode/Nama Akun	OPD	Keterangan (Kategori PDD/Aset yang disewa)	Nama Perusahaan/Perorangan Yang Menyewa	Lokasi	Nomor SK Perjanjian	Periode Pembayaran PDD		Jumlah Diterima (Rp)	Jumlah Hari atas Pembayaran	Nilai Per/Hari (Rp)	Saldo Awal 2025 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)		Saldo setelah Koreksi Saldo Awal (Rp)	Menjadi Bagian Piutang (Case Khusus) dan Dihitung di kertas kerja berbeda	Jumlah Hari Pengakuan PDD di Tahun 2025	Pendapatan LO Tahun 2025 dari PDD (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 (Rp)
						Mulai	Berakhir					Bertambah	Berkurang					
			Heni Susilowati	Hasil Sewa BMD		15/10/2024	15/10/2029	449.632.750,00	1.827	246.104,41				0		365	89.828.108,24	340.608.498,08
			IBP Whaisnawa,SE	Hasil Sewa BMD		21/12/2023	21/12/2028	117.500.000,00	1.828	64.277,90				0		365	23.461.433,26	69.805.798,69
			PDAM Tirta Mangutama Badung	Hasil Sewa BMD		02/05/2024	02/05/2029	40.000.000,00	1.827	21.893,82				0		365	7.991.242,47	26.666.666,67
			Kadek Yasa Permana	Hasil Sewa BMD		28/11/2023	28/11/2028	42.278.197,00	1.828	23.128,12				0		365	8.441.762,53	24.585.187,86
			PT. Genta Buana Lestari	Hasil Sewa BMD		10/10/2024	10/10/2029	2.331.550.000,00	1.827	1.276.163,11				0		365	465.799.534,76	1.759.828.927,20
			I Bagus Putra Whaisnawa	Hasil Sewa BMD		23/10/2024	23/10/2029	62.400.000,00	1.827	34.154,35				0		365	12.466.338,26	47.542.857,14
			I B Gde Budi Hartawan	Hasil Sewa BMD		09/12/2024	09/12/2029	142.054.750,00	1.827	77.753,01				0		365	28.379.848,80	111.886.581,96
			Koperasi Dana Kahayu	Hasil Sewa BMD		22/12/2024	22/12/2029	50.383.699,00	1.827	27.577,28				0		365	10.065.708,89	40.042.217,26
			Bunny Gawah	Hasil Sewa BMD		29/03/2025	29/03/2030	263.200.000,00	1.827	144.061,30				0		278	40.049.042,15	223.150.957,85
		Tanah Tegalan	Rudy Alianto	Hasil Sewa BMD		15/07/2024	15/07/2029	146.944.750,00	1.827	80.429,53				0	13.673.019,98	365	29.356.778,19	103.914.951,83
			Bendesa Adat Kuwum Nyelati	Hasil Sewa BMD		11/12/2023	11/12/2028	148.128.000,00	1.828	81.032,82				0	31.359.702,41	365	29.576.980,31	87.191.317,28
			I Made Wiranatha	Hasil Sewa BMD		26/05/2024	26/05/2029	3.304.728.000,00	1.827	1.808.827,59				0	397.942.068,97	365	660.222.068,97	2.246.563.862,06
			Yayasan Korpri/Universitas Warmadewa	Hasil Sewa BMD		24/07/2024	24/07/2029	163.515.000,00	1.827	89.499,18				0	14.409.367,82	365	32.667.200,33	116.438.431,85
			Ida Bagus Indra Wiratma Pidada (Perjanjian Sebelumnya atas nama Andy Asmarajaya)	Hasil Sewa BMD		09/01/2025	09/01/2026	30.559.275,00	366	83.495,29				0		357	29.807.817,42	751.457,58
			Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjiwani	Hasil Sewa BMD		11/02/2025	11/02/2030	256.500.000,00	1.827	140.394,09				0		324	45.487.684,73	211.012.315,27
			Dra. Utami Dwi Suryadi (Perjanjian sebelumnya atas nama I Nengah Tamba, SH)	Hasil Sewa BMD		15/12/2024	15/12/2029	189.116.505,00	1.827	103.512,04				0	1.759.704,75	365	37.781.896,18	149.574.904,07
			Perusahaan Daerah Air Minum Gianyar	Hasil Sewa BMD		07/09/2023	07/09/2028	30.000.000,00	1.828	16.411,38				0	7.910.284,46	365	5.990.153,17	16.099.562,37
			I Gusti Lanang Ngurah Biasama	Hasil Sewa BMD		22/12/2025	22/12/2030	46.151.250,00	1.827	25.260,67				0		10	252.606,73	45.898.643,27
			Ida Bagus Indra Wiratma Pidada (Perjanjian Sebelumnya atas nama Andy Asmarajaya)	Hasil Sewa BMD		12/11/2025	12/11/2026	30.656.002,50	366	83.759,57				0		50	4.187.978,48	26.468.024,02
			Bali Zoo	Hasil Sewa BMD		29/10/2025	29/10/2026	599.194.260,00	366	1.637.142,79				0		64	104.777.138,36	494.417.121,64
			Desak Ketut Dwi Amertani	Hasil Sewa BMD		14/12/2025	14/12/2030	44.865.000,00	1.827	24.556,65				0		18	442.019,70	44.422.980,30
			DPD Partai Gerindra	Hasil Sewa BMD		11/03/2025	11/03/2030	102.000.000,00	1.827	55.829,23				0		296	16.525.451,56	85.474.548,44
			Dewa Made Merta Sedana	Hasil Sewa BMD		15/11/2025	15/11/2026	13.446.908,00	366	36.740,19				0		47	1.726.788,73	11.720.119,27
			Dewa Made Merta Sedana	Hasil Sewa BMD		15/11/2026	15/11/2027	13.850.315,00	366	37.842,39				0		0	0	13.850.315,00
			Dewa Made Merta Sedana	Hasil Sewa BMD		15/11/2027	15/11/2028	14.265.824,00	367	38.871,46				0		0	0	14.265.824,00
			PT Bali Destinasi Lestari	Hasil KSP	Akta Notaris No 5 Tanggal 11 Desember 2025	11/12/2025	11/12/2075	425.137.500.000,00	18.263	23.278.623,45						21	488.851.092,37	424.648.648.907,63
		Tanah Untuk Bangunan Ged. Perdagangan/Perusahaan-Tanah Bangunan Perdagangan lainnya (dst)	PT Danau Winata Indah	Hasil Sewa BMD		14/03/2007	14/03/2037	4.715.800.000,00	10.959	430.312,98	1.917.474.660,10			1.917.474.660,10		365	157.064.239,44	1.760.410.420,66
		Tanah Untuk Bangunan Ged.Perdagangan/Perusahaan-Tanah Bangunan Gudang	I Ketut Sandra	Hasil Sewa BMD		02/03/2021	02/03/2026	55.600.000,00	1.827	30.432,40	12.964.203,61			12.964.203,61		365	11.107.827,04	1.856.376,57
			I Wayan Rumantik	Hasil Sewa BMD		27/01/2022	27/01/2027	8.125.000,00	1.827	4.447,18	3.366.516,14			3.366.516,14		365	1.623.221,13	1.743.295,01
			Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi	Hasil Sewa BMD		31/07/2023	31/07/2028	103.838.000,00	1.828	56.804,16	74.299.838,08			74.299.838,08		365	20.733.517,51	53.566.320,57
		Tanah Untuk bangunan Air-Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	PDAM tirta mangutama Badung	Hasil Sewa BMD		28/05/2022	28/05/2027	78.905.000,00	1.827	43.188,29	37.919.315,82			37.919.315,82		365	15.763.724,69	22.155.591,13
		Tanah Untuk Bangunan Ged.Perdagangan/Perusahaan-Tanah Bangunan Terminal Darat	Gapensi Tabanan	Hasil Sewa BMD		10/08/2020	10/08/2025	28.000.000,00	1.827	15.325,67	3.402.298,85			3.402.298,85		222	3.402.298,85	-
		Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja-Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	PT. Jamkrida Bali Mandara	Hasil Sewa BMD		15/12/2021	15/12/2026	793.880.000,00	1.827	434.526,55	310.251.954,02			310.251.954,02		365	158.602.189,38	151.649.764,64
			Pratisentana Bandesa Manik Mas Pusat	Hasil Sewa BMD		22/09/2021	22/09/2026	20.736.000,00	1.827	11.349,75	7.150.344,83			7.150.344,83		365	4.142.660,10	3.007.684,73
			I Nengah Wardana, ST	Hasil Sewa BMD		25/11/2021	25/11/2026	101.500.000,00	1.827	55.555,56	38.555.555,56			38.555.555,56		365	20.277.777,78	18.277.777,78
			Ketut Suartika	Hasil Sewa BMD		10/02/2022	10/02/2027	26.475.000,00	1.827	14.490,97	11.172.536,95			11.172.536,95		365	5.289.203,61	5.883.333,34
			I Ketut Juliarta	Hasil Sewa BMD		13/09/2022	13/09/2027	30.000.000,00	1.827	16.420,36	16.190.476,18			16.190.476,18		365	5.993.431,86	10.197.044,32
			BPD Bali	Hasil Sewa BMD		01/09/2023	01/09/2028	875.000.000,00	1.828	478.665,21	641.411.378,56			641.411.378,56		365	174.712.800,88	466.698.577,68
		Tanah Untuk Jalan Propinsi	AAP.Syafrudin M	Hasil Sewa BMD		10/12/2024	10/12/2029	87.500.000,00	1.827	47.892,72				0		365	17.480.842,91	68.965.517,24
	Badan Pendapatan Daerah	Bangunan Gedung Tempat Kerja	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Denpasar - Gajah Mada.	Di UPTD. PPRD. Provinsi Bali di Kota Denpasar, Jln. Kapt. Tantular Denpasar	No. 1181 Tahun 2024 dan No. B. 7674/KC-XI/LOG/12/2024	13/12/2024	13/12/2025	5.201.700,00	366	14.212,30	4.931.666,39			4.931.666,39		347	4.931.666,39	0
2.1.05.04-Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa Total																	**9.054.037.349,40**	**508.611.757.277,48**
Grand Total																	**16.530.217.599,89**	**514.165.349.793,52**

Rincian Pendapatan Hibah
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

Kode/Nama Akun	OPD	Nama Pemberi Hibah	No BAST	Tanggal BAST	Uraian Hibah Yang diterima (Obat/Kendaraan Bermotor Beroda Dua/CCTV/PC Deskop)	Nilai Hibah/Aset (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Hibah Bersih (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3.01.01.01.0001 - Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Hibah APBN 2016	B.10.000/5266/4009/SMKN1BGL/DIKPORA	08/08/2025	Alat Musik Tradisional (Gambelan)	90.000.000,00		90.000.000,00
		Hibah Dari Kementerian Perhubungan	BA-DRJD 700 Tahun 2025	28/05/2025	Micro Bus ISUZU	599.800.000,00		599.800.000,00
	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	Kemenkes RI	B.11.300.2.9/3068/Bapelkesmas	23/09/2025	Alat Pemadam Kebakaran	3.900.000,00		3.900.000,00
		RS Prof Ngoerah Kota Denpasar	-	26/05/2025	Bahan Kimia	657.973,60		657.973,60
		Kemenkes RI	KN.02.03/C.1.5/6162.10/2024; 442/001/1/2025; PS-00059871; PS-00060894; PS-00058382; PS-00059865; PS-00059866; PS-00060472; KN.02.03/C.1.5/121.03/2025;	31/01/2025	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	1.961.230.928,54		1.961.230.928,54
		Kemenkes RI	KN.02.03/C.1.5/6162.10/2024; 442/001/1/2025; PS-00059871; PS-00060894; PS-00058382; PS-00059865; PS-00059866; PS-00060472; KN.02.03/C.1.5/121.03/2025;	31/01/2025	Obat	834.499.500,00		834.499.500,00
		Kemenkes RI	PS-PBF-023-09688; PS-00061001; PS-00060676; PS-00061637; PS-00061965; PS-00061976; PS-00061944; 143/D/IFP/II/2025; 083/D/IFP/II/2025; 1763/03/BL/II/2025; 102/D/IFP/II/2025; KN.02.03/C.1.5/447.09/2025; 39/IFP/II/2025; 09-ARV/IFP/SDK/Diskes/2024; KN.02.03/C.1.5/481.04/2025; 149/D/IFP/II/2025; 164/D/IFP/II/2025; 020/0470/IF/2025; 171/D/IFP/II/2025; 015/IDC/SPB/HB-I/II/2025; 113/V.2.Kes/II/2025; 016/IDC/SPB/HC-I/II/2025; 0258/FARM/II/2025	28/02/2025	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	5.955.320.690,91		5.955.320.690,91
		Kemenkes RI	KN.02.03/C.1.5/447/2025; PS-00062407; PS-00062383; PS-00062640; PS-00062656; 442/079/BA/OBAT-PROGRAM/KES/X.02/2025; 210/D/IFP/III/2025; 1831/03/BL/III/2025;	31/03/2025	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	8.262.972.981,60		8.262.972.981,60
		Kemenkes RI	KN.02.03/C.1.5/447/2025; PS-00062407; PS-00062383; PS-00062640; PS-00062656; 442/079/BA/OBAT-PROGRAM/KES/X.02/2025; 210/D/IFP/III/2025; 1831/03/BL/III/2025; 017/39/SYMTD/II/2025; 1844/01/BL/III/2025; 000.2.3.1/88/Bid.Yankes & SDK/Dinkes; 228/D/IFP/III/2025; KN.02.03/C.1.5/.15/2025; KN.02.03/C.1.5/1299.16/2025; 38/00/BSY/UKL/03/2025; 229/D/IFP/III/2025; KN.02.03/C.1.5/964.17/2025; 261/D/IFP/III/2025; 278/D/IFP/III/2025; 46/00/BSY/UKL/03/2025	31/03/2025	Obat	87.967.500,00		87.967.500,00

Kode/Nama Akun	OPD	Nama Pemberi Hibah	No BAST	Tanggal BAST	Uraian Hibah Yang diterima (Obat/Kendaraan Bermotor Beroda Dua/CCTV/PC Deskop)	Nilai Hibah/Aset (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Hibah Bersih (Rp)
		Kemenkes RI	013/LOG-DIPA/HEP/III/2025; PS-00063126; PS-00063109; PS-00063137; PS-00063087; 127/MUP-JKT1/EXT/III/2025; PS-00063523; PS-00063496; PS-00063500; 017/SPB-MPH/MJG/IV/2025; 057/SPB-MPH/MJG/IV/2025; 95/00/BSY/UKL/04/2025; 301/D/IFP/III/2025; KN.02.03/C.1.5/.12/2025; 1959/02/BL/IV/2025; 442/210/BA/OBAT-PROGRAM/KES/X.04/2025; KN.02.03/C.1.5/.09/2025; 232/MUP-JKT1/EXT/IV/2025; 1104/BUR-DINKES/023; 225/00/BSY/UKL/04/2025; 1967/04/BL/IV/2025; 195/00/BSY/UKL/04/2025; 112/00/BSY/UKL/04/2025; 269/MUP-JKT1/EXT/IV/2025; 017/SPB/DNA/IV/2025; 254/00/BSY/UKL/04/2025; 236/00/BSY/UKL/04/2025	30/04/2025	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	10.676.655.412,10		10.676.655.412,10
		Kemenkes RI	013/LOG-DIPA/HEP-II/IV/2025; JE8525BALI; PS-00063877; PS-00063952; 010/BPB-ADS-005ML/APBN/PIVT-1/IV/2025; 2904/BUR-DINKES/049; KN.02.03/C.1.5/.17/2025;	31/05/2025	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	5.507.490.568,24		5.507.490.568,24
		Kemenkes RI	PS-00063324; PS-00064028; PS-00056439; PS-00064336; PS-00064270; PS-00064267; PS-00060476; PS-00064018; PS-00064270; JE19625BALI;	30/06/2025	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	9.396.085.628,26		9.396.085.628,26
		Kemenkes RI	635/00/BSY/UKL/07/2025; PS-00064963; 3192/CAB-JKT/VII/2025; PS-00065212; PS-00065206; PS-00065199; PS-00064028; 548/D/IFP/VII/2025; 1980/SD1/523/2025; 017/BPB-ADS-05ML/APBN/PLVT-BMHP/VI/2025; 2095/04/BL/VII/2025; KN.01.06/E.IV/4692.16/2025; KN.01.06/E.IV/5917.16/2025; KN.01.06/E.IV/4692.16/2025; KN.01.06/E.IV/5917.16/2025; KN.02.03/C.1.5//2025; KN.02.03/C.1.5/17/2025; KN.01.08/C.III/2919/2025; 577/D/IFP/VII/2025; KN.01.06/E.IV/5917.16/2025; KN.01.06/E.IV/4692.16/2025; KN.02.03/C.1.5//2025; KN.02.03/C.1.5/.15/2025	31/07/2025	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	18.210.588.004,50		18.210.588.004,50
		Kemenkes RI	635/00/BSY/UKL/07/2025; PS-00064963; 3192/CAB-JKT/VII/2025; PS-00065212; PS-00065206; PS-00065199; PS-00064028; 548/D/IFP/VII/2025; 1980/SD1/523/2025; 017/BPB-ADS-05ML/APBN/PLVT-BMHP/VI/2025; 2095/04/BL/VII/2025; KN.01.06/E.IV/4692.16/2025; KN.01.06/E.IV/5917.16/2025; KN.01.06/E.IV/4692.16/2025; KN.01.06/E.IV/5917.16/2025; KN.02.03/C.1.5//2025; KN.02.03/C.1.5/17/2025; KN.01.08/C.III/2919/2025; 577/D/IFP/VII/2025; KN.01.06/E.IV/5917.16/2025; KN.01.06/E.IV/4692.16/2025; KN.02.03/C.1.5//2025; KN.02.03/C.1.5/.15/2025	31/07/2025	Obat	74.492.100,00		74.492.100,00
		Kemenkes RI	PS-00066013; PS-02-06; PS-00065652; PS-00064883; PS-00058887; PS-00065860; 022/SBBK-ATP/PCV/VIII/2025; KN.01.06/E.IV/5917.16/2025;	31/08/2025	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	5.829.197.972,60		5.829.197.972,60

Kode/Nama Akun	OPD	Nama Pemberi Hibah	No BAST	Tanggal BAST	Uraian Hibah Yang diterima (Obat/Kendaraan Bermotor Beroda Dua/CCTV/PC Deskop)	Nilai Hibah/Aset (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Hibah Bersih (Rp)
		Kemenkes RI	PS-00066013; PS-02-06; PS-00065652; PS-00064883; PS-00058887; PS-00065860; 022/SBBK-ATP/PCV/VIII/2025; KN.01.06/E.IV/5917.16/2025; 400.7.18.2/5485/SDK/DIKES/2025; B.800/1670/Diskes/2025; KN.01.06/E.IV/5917.16/2025; 002/HM/NDC/07/2025; 666/MUP-JKT1/EXT/VIII/2025; 2041/03/BL/VIII/2025; 400.7.8.1/5867/P2/DIKES/2025; KN.02.03/C.1.5/2516.17/2025; 063/24/SYMTD/III/2025; KN.01.06/E.IV/4692.16/2025; 042/24/SYMTD/III/2025	31/08/2025	Obat	4.979.069.700,00		4.979.069.700,00
		Kemenkes RI	952/00/BSY/UKL./08/2025; PS-00060401-1; PS-00065887; PS-00066621; PS-00066622; 1609/CAB-JKT-VIII/2025; PS-00066116; PS-00064270; PS-00065848; PS-00066717;	30/09/2025	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	12.435.959.512,30		12.435.959.512,30
		Kemenkes RI	952/00/BSY/UKL/08/2025; PS-00060401-1; PS-00065887; PS-00066621; PS-00066622; 1609/CAB-JKT-VIII/2025; PS-00066116; PS-00064270; PS-00065848; PS-00066717;	30/09/2025	Obat	74.492.100,00		74.492.100,00
		Kemenkes RI	IFP/B/2025/10/00914; PS-00067300; 051/SBBK.ATP/PCV/X/2025; PS-00067149; PS-00067475; 021/SPB-Distribusi Vaksin PCV/RN/2025; 18704/KU.03.07/SDK; KN.01.02/C.1.1/2818.04/2025; IFP/B/2025/10/00905; 0310/BUR-DINKES/046; 0310/BUR-DINKES/047; 017/IDC/SPB/BE/X/2025; 1034/00/BSY/UKL/09/2025; IFP/B/2025/10/00894; 1077/00/BSY/UKL/10/2025; 1089/00/BSY/UKL/10/2025; PS-00067478; 1125/00/BSY/UKL/10/2025; IFP/B/2025/10/00934; KN.01.02/C.1.1/2925/2025; 1147/00/BSY/UKL/10/2025; TRX-SO-251015-271; KN.0203/C.1.1/3001/2025; 1176/00/BSY/UKL/10/2025; KN.02.03/C.I.1/3077/2025; TRX-SO-251028-304	31/10/2025	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	12.254.890.488,74		12.254.890.488,74
		Kemenkes RI	PS-00066717; PS-00068124; PS-00068465; 2246/03/BL/X/2025; BKH/JKT2/AMS.DIST/X/45/25; KN.01442/0353/BAST-IFP/DK-PB/XI/2025.02/C.1.1/2946.02/2025; 913/MUP-JKT1/EXT/XI/2025; 1272/00/BSY/UKL/11/2025; 1296/00/BSY/UKL/11/2025; 1302/00/BSY/UKL/11/2025; 1221/00/BSY/UKL/11/2025; 2259/04/BL/XI/2025; KN.02.03/C.I.1/3186/2025	30 Nopember 2025	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	16.779.554.270,40		16.779.554.270,40
		Kemenkes RI	PS-00068643; KN-02.03/C.I.1/3326/2025; PS-00068724; PS-00068796; PS-00066717; PS-00069021; IFP/B/2025/12/01168; 013/SPB/ALB/M/INST/XI/2025;	31/12/2025	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	5.031.445.598,84		5.031.445.598,84

Kode/Nama Akun	OPD	Nama Pemberi Hibah	No BAST	Tanggal BAST	Uraian Hibah Yang diterima (Obat/Kendaraan Bermotor Beroda Dua/CCTV/PC Deskop)	Nilai Hibah/Aset (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Hibah Bersih (Rp)
		Kemenkes RI	PS-00068643; KN-02.03/C.I.1/3326/2025; PS-00068724; PS-00068796; PS-00066717; PS-00069021; IFP/B/2025/12/01168; 013/SPB/ALB/M/INST/XI/2025; 014/SPB/ALB/M/INST/XI/2025; KN.02.03/C.I.1/3268/2025; TRX-SO-251125-370; 17/BPB-TBK-15ML/JKT/XII/2025; 12/SST-JKT1/XI/2025; 1316/00/BSY/UKL/12/2025; KN.02.03/C.I.1/3269/2025; 2289/01/BL/XII/2025; IFP/B/2025/12/01234; IFP/B/2025/12/01229; 017/IDC/SPB/HS/XII/2025; 2306/03/BL/XII/2025; KN.02.03/C.I.1/19/2025; 44/BM/JKT2/AMS.DIST/XII/25; PS-00069114; 1389/00/BSY/UKL/12/2025	31/12/2025	Obat	7.354.921.072,07		7.354.921.072,07
	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI	Satker PJN III	231/BA/Bb8.15/BA/2025	03/02/2025	Tanah untuk Jalan dan Jalan Provinsi	3.000.902.384.717,00	297.912.138.717,00	2.702.990.246.000,00
		Satker PJN II	641/BA/Bb8.14/BA/2025	14/04/2025	Jembatan pada Jalan Provinsi	26.465.961.937,00	1.102.748.414,00	25.363.213.523,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BNPB	BAST 283/DSP-103/LOGPAL-BALI/D-III/BNPB/09.2025	12/09/2025	Pompa	2.512.391.944,00		2.512.391.944,00
		BNPB	BAST-290/DSP-103/LOGPAL-BALI/D=III/BNPB/09/2025	16/09/2025	Alat Kelesamatan Kerja	87.488.000,00		87.488.000,00
		BNPB	BAST-290/DSP-103/LOGPAL-BALI/D=III/BNPB/09/2025	16/09/2025	Peralatan Proses / Produksi	295.020.000,00		295.020.000,00
		BNPB	BAST No.179/BNPB/OJLP/LP.02.03/12/2025	02/12/2025	Kendaraan Dinas Perorangan	695.000.000,00		695.000.000,00
		BNPB	BAST Nomor 145/BNPB/PDin/BP.03.03/12/2025	18/12/2025	Alat komunikasi digital dan konvensional	884.281.500,00		884.281.500,00
	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Meja Resepsionis	9.851.050,00	4.104.604,00	5.746.446,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Rak Kayu	5.705.700,00	2.377.375,00	3.328.325,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Rak Kayu	1.685.200,00	702.167,00	983.033,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Rak Kayu	5.588.550,00	2.328.563,00	3.259.987,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Rak Kayu	8.575.050,00	3.572.938,00	5.002.112,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Alat Kantor Lainnya	3.518.350,00	1.465.979,00	2.052.371,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Alat Kantor Lainnya	13.095.500,00	5.456.458,00	7.639.042,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Rak Besi	1.941.500,00	808.958,00	1.132.542,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Tempat Tidur Kayu	15.292.200,00	6.371.750,00	8.920.450,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Kasur/Spring Bed	6.149.000,00	2.562.084,00	3.586.916,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Nakas	3.983.100,00	1.659.624,00	2.323.476,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Meja Rias	3.942.400,00	1.642.667,00	2.299.733,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Lemari Kayu	7.667.550,00	3.194.813,00	4.472.737,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Alat Kantor Lainnya	6.248.550,00	2.603.563,00	3.644.987,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Televisi	7.646.650,00	3.186.104,00	4.460.546,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Meja Tamu Biasa	7.020.200,00	6.493.686,00	526.514,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Kursi Tamu	26.231.700,00	10.929.876,00	15.301.824,00

Kode/Nama Akun	OPD	Nama Pemberi Hibah	No BAST	Tanggal BAST	Uraian Hibah Yang diterima (Obat/Kendaraan Bermotor Beroda Dua/CCTV/PC Deskop)	Nilai Hibah/Aset (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Hibah Bersih (Rp)
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Alat Kantor Lainnya	3.667.950,00	1.528.314,00	2.139.636,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Mesun Penghisap Debu/ Vacuum Cleaner	5.694.700,00	2.372.792,00	3.321.908,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Mesin Cuci	1.553.200,00	647.167,00	906.033,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Mesin Cuci	2.970.000,00	1.237.500,00	1.732.500,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Mesin Pengering Pakaian	7.053.200,00	2.938.833,00	4.114.367,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Jemuran	2.211.000,00	921.250,00	1.289.750,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Mesin Hitung Listrik	1.056.550,00	440.229,00	616.321,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Meja Kerja Kayu	2.317.700,00	965.708,00	1.351.992,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Kursi Putar	2.024.000,00	843.334,00	1.180.666,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Kursi Besi/Metal	12.223.200,00	5.093.008,00	7.130.192,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Meja Kerja Besi/Metal	3.894.000,00	1.622.500,00	2.271.500,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Papan Tulis	1.663.200,00	693.000,00	970.200,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	LCD Projector/Infocus	6.156.000,00	2.565.000,00	3.591.000,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1.181.000,00	492.083,00	688.917,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Alat Kantor Lainnya	7.737.238,00	3.223.848,00	4.513.390,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Rak Kayu	3.358.619,00	1.399.424,00	1.959.195,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Facsimile	3.471.050,00	1.446.271,00	2.024.779,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Telephone	4.988.500,00	2.078.542,00	2.909.958,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5.208.800,00	2.170.332,00	3.038.468,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Handy Talky	4.929.100,00	2.053.792,00	2.875.308,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Mesin Strika Uap	2.024.000,00	527.084,00	1.496.916,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Card Reader	4.000.150,00	2.083.411,00	1.916.739,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Lap Top	46.664.112,00	24.304.224,00	22.359.888,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	P.C Unit	36.600.000,00	19.062.501,00	17.537.499,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Printer	1.955.600,00	1.018.542,00	937.058,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	Printer	2.951.250,00	1.537.110,00	1.414.140,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	B.21.000.4.3.2/18125/III/DISNAKER.ESDM	20/03/2025	P.C Unit	12.630.999,00	6.578.645,00	6.052.354,00
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	No.B.21.000/12432/I/DISNAKER.ESDM	18/09/2025	LCD Projector/Infocus	33.000.000,00	33.000.000,00	-
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	No.B.21.000/12432/I/DISNAKER.ESDM	18/09/2025	AC	3.000.000,00	3.000.000,00	-
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	No.B.21.000/12432/I/DISNAKER.ESDM	18/09/2025	Fucosing Screen/layar LCD P	15.040.000,00	15.040.000,00	-

Kode/Nama Akun	OPD	Nama Pemberi Hibah	No BAST	Tanggal BAST	Uraian Hibah Yang diterima (Obat/Kendaraan Bermotor Beroda Dua/CCTV/PC Deskop)	Nilai Hibah/Aset (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Hibah Bersih (Rp)
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	No.B.21.000/12432/I/DISNAKER.ESDM	18/09/2025	Slide Projector	19.580.000,00	19.580.000,00	-
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	No.B.21.000/12432/I/DISNAKER.ESDM	18/09/2025	Lap Top	47.375.000,00	47.375.000,00	-
		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	No.B.21.000/12432/I/DISNAKER.ESDM	18/09/2025	note book	19.800.000,00	19.800.000,00	-
	Dinas Perhubungan	Kementerian Perhubungan	B.16.000.4.3.2/1235/SEKRET/DISHUB	17/03/2025	Rambu Tidak Bersuar	1.921.750.000,00	24.934.000,00	1.896.816.000,00
		Kementerian Perhubungan	B.16.000.4.3.2/1244/SEKRET/DISHUB	17/03/2025	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	15.393.816.000,00	13.982.716.200,00	1.411.099.800,00
		Kementerian Perhubungan	B.16.000.4.3.2/1244/SEKRET/DISHUB	17/03/2025	Kajian	64.500.000,00	32.250.000,00	32.250.000,00
	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	Kementeriaan Pekerjaan Umum	16.1/BA/Dc/2025 dan B.00.600.1/4898/Setda	21/01/2025	CCTV	61.272.000,00	25.530.000,00	35.742.000,00
		Kementeriaan Pekerjaan Umum	16.1/BA/Dc/2025 dan B.00.600.1/4898/Setda	21/01/2025	A.C. Split	16.802.292,00	7.000.954,00	9.801.338,00
		Kementeriaan Pekerjaan Umum	16.1/BA/Dc/2025 dan B.00.600.1/4898/Setda	21/01/2025	Televisi microphone Loudspeaker Amplifier Equalizer box hydran recorder dan water heater	112.079.919,00	46.699.962,00	65.379.957,00
		Kementeriaan Pekerjaan Umum	16.1/BA/Dc/2025 dan B.00.600.1/4898/Setda	21/01/2025	Hydran kebakaran	8.239.974,00	3.433.322,00	4.806.652,00
		Kementeriaan Pekerjaan Umum	16.1/BA/Dc/2025 dan B.00.600.1/4898/Setda	21/01/2025	Compact Disk Player dan Audio Video selector	20.620.248,00	8.591.770,00	12.028.478,00
		Kementeriaan Pekerjaan Umum	16.1/BA/Dc/2025 dan B.00.600.1/4898/Setda	21/01/2025	Routers dan Switch	22.913.730,00	11.934.235,00	10.979.495,00
		Kementeriaan Pekerjaan Umum	16.1/BA/Dc/2025 dan B.00.600.1/4898/Setda	21/01/2025	Jet Pump	2.454.876,00	1.022.865,00	1.432.011,00
		Kementeriaan Pekerjaan Umum	16.1/BA/Dc/2025 dan B.00.600.1/4898/Setda	21/01/2025	Taman Permanen	1.288.800.452,00	53.700.018,00	1.235.100.434,00
		Kementeriaan Pekerjaan Umum	16.1/BA/Dc/2025 dan B.00.600.1/4898/Setda	21/01/2025	Toilet Premium	1.734.780.694,00	361.412.644,00	1.373.368.050,00
		Kementeriaan Pekerjaan Umum	16.1/BA/Dc/2025 dan B.00.600.1/4898/Setda	21/01/2025	Monumen G-20 dan wantilan	22.604.975.939,00	941.873.997,00	21.663.101.942,00
		Kementeriaan Pekerjaan Umum	16.1/BA/Dc/2025 dan B.00.600.1/4898/Setda	21/01/2025	Pagar Permanen	884.255.911,00	36.843.996,00	847.411.915,00
		Kementeriaan Pekerjaan Umum	16.1/BA/Dc/2025 dan B.00.600.1/4898/Setda	21/01/2025	Jalan Khusus Inspeksi dan Jalan Khusus Lainnya	8.584.216.246,00	1.788.378.385,00	6.795.837.861,00
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali	Kementerian Pekerjaan Umum	BAST No.734.1/BA/Dc/2024 dan B.25.000.2.3.2/15647/SEKRET/DISPUPR.PERKIM	14/10/2025	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	52.570.027.171,00	3.241.818.342,00	49.328.208.829,00
		Kementerian Pekerjaan Umum	BAST No.734.1/BA/Dc/2024 dan B.25.000.2.3.2/15647/SEKRET/DISPUPR.PERKIM	14/10/2025	Instalasi Air Buangan Domestik	634.229.488.611,00	250.506.805.434,00	383.722.683.177,00
					JUMLAH	3.898.226.836.531,70	570.376.933.908,00	3.327.849.902.623,70
7.3.01.02.01.0001 - Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	Dinkes Kota Denpasar	400.7.10/11271/Dikes	07/10/2025	Bahan Kimia	1.170.924.000,00	-	1.170.924.000,00
		Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	B.400.7.18/075/BAPB.GF/2025	03/02/2025	Obat	566.100,00	-	566.100,00
		Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	B.400.7.18/075.a/BAPB.GF/2025	28/02/2025	Bahan Lainnya	164.100,00	-	164.100,00
		Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	B.400.7.18/269/BAPB.GF/2025	05/05/2025	Bahan Lainnya	164.100,00	-	164.100,00
		Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	B.400.7.18/453/BAPB.GF/2025	28/07/2025	Bahan Lainnya	164.100,00	-	164.100,00
		Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	B.400.7.18/555/BAPB.GF/2025	13/08/2025	Bahan Lainnya	346.350,00	-	346.350,00
		Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	B.400.7.18/592/BAPB.GF/2025	11/09/2025	Obat	566.100,00	-	566.100,00
		Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	B.400.7.18/602/BAPB.GF/2025	11/09/2025	Obat	566.100,00	-	566.100,00
		Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	B.400.7.18/612/BAPB.GF/2025	25/09/2025	Bahan Lainnya	358.000,00	-	358.000,00
		Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	B.400.7.18/681/BAPB.GF/2025	17/10/2025	Bahan Lainnya	176.250,00	-	176.250,00
		Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	B.400.7.18/715/BAPB.GF/2025	21/11/2025	Obat	1.327.898,00	-	1.327.898,00
		Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	B.400.7.18/783/BAPB.GF/2025	11/12/2025	Obat	87.000,00	-	87.000,00
		Dinas Kesehatan Kota Denpasar		31/12/2025	Obat	285.089.857,20	-	285.089.857,20
		Dinas Kesehatan Kota Denpasar		31/12/2025	Bahan lainnya	326.283.308,00	-	326.283.308,00
		Dinas Kesehatan Kota Denpasar	0476/FARM/IV/2025	29/04/2025	Obat	902.091,00	-	902.091,00
		Dinas Kesehatan Kota Denpasar	1156/FARM/XI/2025	12/11/2025	Obat	8.432.788,00	-	8.432.788,00
		Dinas Kesehatan Kota Denpasar	0762/FARM/VII/2025	15/07/2025	Obat	5.417.774,88	-	5.417.774,88

Kode/Nama Akun	OPD	Nama Pemberi Hibah	No BAST	Tanggal BAST	Uraian Hibah Yang diterima (Obat/Kendaraan Bermotor Beroda Dua/CCTV/PC Deskop)	Nilai Hibah/Aset (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Hibah Bersih (Rp)
		Dinas Kesehatan Kota Denpasar	1180/FARM/XI/2025	24/11/2025	Obat	2.779.000,00	-	2.779.000,00
		Dinas Kesehatan Kota Denpasar	1091/FARM/X/2025	23/10/2025	Obat	1.389.500,00	-	1.389.500,00
		Dinas Kesehatan Kota Denpasar	0843/FARM/VIII/2025	11/08/2025	Obat	5.454.897,00	-	5.454.897,00
		Dinas Kesehatan Kota Denpasar	0959/FARM/IX/2025	23/09/2025	Obat	2.538.720,00	-	2.538.720,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI	Kab. Tabanan	620/7350/DPUPRPKP/2025	04/06/2025	Jalan Provinsi	76.601.170,66	76.601.170,66	-
		Kab. Tabanan	620/8004/DPUPRPKP/2025	23/06/2025	Tanah untuk Jalan	1.620.114.650,00	-	1.620.114.650,00
		Kab. Badung	000.4.3.2/2850/PUPR	04/08/2025	Jalan Provinsi	124.016.224.263,00	124.016.224.263,00	-
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali	Pemerintah Kabupaten Buleleng	B.000.2.3.2/126.3/Bid.VI-BPKPD/VII/2025	30/07/2025	Tanah Lapangan Terbang	10.884.005.046,00	-	10.884.005.046,00
		Pemerintah Kabupaten Buleleng	B.000.2.3.2/126.3/Bid.VI-BPKPD/VII/2025	30/07/2025	Tanah untuk Jalan	529.498.210,00	-	529.498.210,00
		Pemerintah Kabupaten Buleleng	B.000.2.3.2/126.3/Bid.VI-BPKPD/VII/2025	30/07/2025	Alat Kantor Lainnya	1.500.000,00	625.000,00	875.000,00
		Pemerintah Kabupaten Buleleng	B.000.2.3.2/126.3/Bid.VI-BPKPD/VII/2025	30/07/2025	Alat Komunikasi Radio SSB	39.541.250,00	39.541.250,00	-
		Pemerintah Kabupaten Buleleng	B.000.2.3.2/126.3/Bid.VI-BPKPD/VII/2025	30/07/2025	Alat Ukur Lain-Lain	1.300.000,00	1.300.000,00	-
		Pemerintah Kabupaten Buleleng	B.000.2.3.2/126.3/Bid.VI-BPKPD/VII/2025	30/07/2025	Alat Komunikasi Radio HF/FM	1.694.000,00	1.694.000,00	-
		Pemerintah Kabupaten Buleleng	B.000.2.3.2/126.3/Bid.VI-BPKPD/VII/2025	30/07/2025	Meteorological Equipment	4.967.500,00	4.967.500,00	-
		Pemerintah Kabupaten Buleleng	B.000.2.3.2/126.3/Bid.VI-BPKPD/VII/2025	30/07/2025	Bangunan Gedung Kantor	283.500.000,00	137.302.500,00	146.197.500,00
		Pemerintah Kabupaten Buleleng	B.000.2.3.2/126.3/Bid.VI-BPKPD/VII/2025	30/07/2025	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	114.171.000,00	41.291.845,00	72.879.155,00
		Pemerintah Kabupaten Buleleng	B.000.2.3.2/126.3/Bid.VI-BPKPD/VII/2025	30/07/2025	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	54.835.000,00	14.348.492,00	40.486.508,00
		Pemerintah Kabupaten Buleleng	B.000.2.3.2/126.3/Bid.VI-BPKPD/VII/2025	30/07/2025	Bangunan Menara Telekomunikasi	75.955.000,00	26.156.115,00	49.798.885,00
					JUMLAH	139.517.605.123,74	124.360.052.135,66	15.157.552.988,08
7.3.01.03.01.0001 - Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	Dokter Intership	B.45.000.2.5/673/ASD/RSDY	25/08/2025	Alat Kedokteran Umum	1.200.000,00	-	1.200.000,00
	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Suka Duka ASN Provinsi Bali	B.13.000.2.3.2/2451/SEKRET/DSP3A	18/07/2025	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	145.000.000,00	126.011.905,00	18.988.095,00
	Dinas Pariwisata Prov.Bali	PT. Sucofindo Denpasar	N0. 1119/DPS-II/DB/2025	10/02/2025	Meja Lipat dan Kursi Lipat	39.794.900,00	-	39.794.900,00
	BKPSDM	Kelompok Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II Tahun 2024 /Kelompok masyarakat/perorangan	BAST No: B.30.000.4.3.2/366/UPTD.PKSDM/BKPSDM	18/02/2025	Alat Pendingin- Lemari Es	2.950.000,00	-	2.950.000,00
		Kelompok Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II Tahun 2024 /Kelompok masyarakat/perorangan	BAST No: B.30.000.4.3.2/366/UPTD.PKSDM/BKPSDM	18/02/2025	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)-Dispenser	5.700.000,00	-	5.700.000,00
		Kelompok Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II Tahun 2024 /Kelompok masyarakat/perorangan	BAST No: B.30.000.4.3.2/373/UPTD.PKSDM/BKPSDM	20/02/2025	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)-Dispenser dan Sound System	11.800.000,00	-	11.800.000,00
		Kelompok Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II Tahun 2024 /Kelompok masyarakat/perorangan	BAST No: B.30.000.4.3.2/373/UPTD.PKSDM/BKPSDM	20/02/2025	Peralatan Studio Audio-Microphone/wireless Mic	2.500.000,00	-	2.500.000,00
		Kelompok Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II Tahun 2024 /Kelompok masyarakat/perorangan	BAST No: B.30.000.4.3.2/373/UPTD.PKSDM/BKPSDM	20/02/2025	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)-Bracket Standing	250.000,00	-	250.000,00
		Kelompok Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2025/Kelompok masyarakat/perorangan	BAST No: B.30.000.4.3.2/1272/UPTD.PKSDM/BKPSDM	19/06/2025	Alat Pendingin- Lemari Es	2.000.000,00	-	2.000.000,00

Kode/Nama Akun	OPD	Nama Pemberi Hibah	No BAST	Tanggal BAST	Uraian Hibah Yang diterima (Obat/Kendaraan Bermotor Beroda Dua/CCTV/PC Deskop)	Nilai Hibah/Aset (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Hibah Bersih (Rp)
		Kelompok Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2025/Kelompok masyarakat/perorangan	BAST No: B.30.000.4.3.2/1272/UPTD.PKSDM/BKPSDM	19/06/2025	Pahatan kayu-Patung Kayu Khas Papua	5.000.000,00	-	5.000.000,00
		Kelompok Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2025/Kelompok masyarakat/perorangan	BAST No: B.30.000.4.3.2/1272/UPTD.PKSDM/BKPSDM	19/06/2025	Lukisan Asli (Art Original)	400.000,00	-	400.000,00
					JUMLAH	216.594.900,00	126.011.905,00	90.582.995,00
7.3.01.04.01.0001 - Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pembelian Hibah Komite	BAST Nomor: B.10.400.3.13/479/SMAN1TBK/DIKPORA	07/06/2025	Speaker active Baretone	3.500.000,00	-	3.500.000,00
		Pembelian Hibah Komite	BAST Nomor: B.10.400.3.13/479/SMAN1TBK/DIKPORA	07/06/2025	Pengeras Suara / Amplifier TOA 2060	2.500.000,00	-	2.500.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.4.3.2/8084/SMKN 1 BGL/DIKPORA	09/12/2025	TV CCTV (Samsung)	5.400.000,00	-	5.400.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.4.3.2/8084/SMKN 1 BGL/DIKPORA	09/12/2025	AC Daikin	19.400.000,00	-	19.400.000,00
		Hibah Komite	BAST/SUSJ-0020/BAST_2510_110332	10/12/2025	Lukisan Kanvas	600.000,00	-	600.000,00
		Hibah SMK-PK	B.10.400.3.13/7634/SMKN1TBK/DISDIK	31/12/2024	Meja Resepsionis (Front Office Counter)	16.000.000,00	-	16.000.000,00
		Hibah SMK-PK	B.10.400.3.13/7634/SMKN1TBK/DISDIK	31/12/2024	Rak Besi (Bill Rack)	1.110.000,00	-	1.110.000,00
		Hibah SMK-PK	B.10.400.3.13/7634/SMKN1TBK/DISDIK	31/12/2024	Kursi Tamu (Guest Chair)	20.601.600,00	-	20.601.600,00
		Hibah SMK-PK	B.10.400.3.13/7634/SMKN1TBK/DISDIK	31/12/2024	Meja Tamu Biasa (Guest Table)	1.887.000,00	-	1.887.000,00
		Hibah SMK-PK	B.10.400.3.13/7634/SMKN1TBK/DISDIK	31/12/2024	Sofa	9.500.000,00	-	9.500.000,00
		Hibah SMK-PK	B.10.400.3.13/7634/SMKN1TBK/DISDIK	31/12/2024	Tempat Tidur Kayu (Divan)	35.797.500,00	-	35.797.500,00
		Hibah SMK-PK	B.10.400.3.13/7634/SMKN1TBK/DISDIK	31/12/2024	Lemari Kayu (Wardrobe)	23.310.000,00	-	23.310.000,00
		Hibah SMK-PK	B.10.400.3.13/7634/SMKN1TBK/DISDIK	31/12/2024	Rak Kayu (Lunggage Rack)	10.989.000,00	-	10.989.000,00
		Hibah SMK-PK	B.10.400.3.13/7634/SMKN1TBK/DISDIK	31/12/2024	Sice (Set Coffee Table + Chair)	13.320.000,00	-	13.320.000,00
		Hibah SMK-PK	B.10.400.3.13/7634/SMKN1TBK/DISDIK	31/12/2024	Nakas (Night Table)	6.260.400,00	-	6.260.400,00
		Hibah SMK-PK	B.10.400.3.13/7634/SMKN1TBK/DISDIK	31/12/2024	Televisi (Smart TV)	16.650.000,00	-	16.650.000,00
		Hibah SMK-PK	B.10.400.3.13/7634/SMKN1TBK/DISDIK	31/12/2024	Meja Kerja Kayu (Television Table)	17.982.000,00	-	17.982.000,00
		Hibah SMK-PK	B.10.400.3.13/7634/SMKN1TBK/DISDIK	31/12/2024	Lemari Es (Refrigerator 2 Pintu)	12.654.000,00	-	12.654.000,00
		Hibah SMK-PK	B.10.400.3.13/7634/SMKN1TBK/DISDIK	31/12/2024	Lemari Es (Mini Bar)	7.500.000,00	-	7.500.000,00
		Hibah SMK-PK	B.10.400.3.13/7634/SMKN1TBK/DISDIK	31/12/2024	Lampu (Night Lamp)	3.300.000,00	-	3.300.000,00
		Hibah SMK-PK	B.10.400.3.13/7634/SMKN1TBK/DISDIK	31/12/2024	Mesin Cuci	3.138.500,00	-	3.138.500,00
		Hibah SMK-PK	B.10.400.3.13/7634/SMKN1TBK/DISDIK	31/12/2024	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	800.000.000,00	-	800.000.000,00
		Hibah Komite	B.10.400.3.13/7366/SMKN1TBK/DIKPORA	08/12/2025	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	140.000.000,00	-	140.000.000,00
		Hibah Komite	01/1/Komite SMAN 1 Petang	13/01/2025	Kursi Susun Merk Fronline	5.600.000,00	-	5.600.000,00
		Hibah Komite	01/1/Komite SMAN 1 Petang	13/01/2025	Lemari Arsip Sleding Merk VIP	8.000.000,00	-	8.000.000,00
		Hibah Komite	B.31.000.4.3.2/4139/SLBN1BDG/DIKPORA	18/08/2025	Televisi	3.000.000,00	-	3.000.000,00
		Hibah Komite	33.BAST-DR/XI/2025	06/11/2025	Axio Mybook Hype 3 (G11)	50.000.000,00	-	50.000.000,00
		Komite	B.10.400.3.13/2278/SMA.1 KUTA/DIKPORA	23/06/2025	AC Gree 2 PK	117.600.000,00	-	117.600.000,00
		Komite	B.10.400.3.13/2279/SMA.1 KUTA/DIKPORA	23/06/2025	AC Gree 2 PK	29.400.000,00	-	29.400.000,00
		Komite	B.10.400.3.13/2280/SMA.1 KUTA/DIKPORA	23/06/2025	AC Daikin 1 PK Std Thailand (STC25NV)	5.600.000,00	-	5.600.000,00
		Hibah Komite	01/KOMITE/SMAN1KUTSEL/2025	24/06/2025	Lap top (Laptop HP)	14.000.000,00	-	14.000.000,00
		Hibah Komite	01/KOMITE/SMAN1KUTSEL/2025	24/06/2025	Personal Komputer Lainnya (AIO Lenovo)	39.200.000,00	-	39.200.000,00
		Hibah Komite	11/1/KOMITESLBN3DENPASAR/2025	09/01/2025	Alat Musik Daerah	4.500.000,00	-	4.500.000,00
		Hibah Komite	11/1/KOMITESLBN3DENPASAR/2025	09/01/2025	WIRELESS	768.000,00	-	768.000,00
		Hibah Komite	11/1/KOMITESLBN3DENPASAR/2025	09/01/2025	Breket standing peralatan	400.000,00	-	400.000,00
		Hibah Komite	11/1/KOMITESLBN3DENPASAR/2025	09/01/2025	Sound System	3.500.000,00	-	3.500.000,00
		Hibah Komite	B.10.500.3.10.2/4831/SMKN 3 DENPASAR/DIKPORA	07/11/2025	Lemari stainless kaca	29.000.000,00	-	29.000.000,00
		Hibah Komite	B.10.500.3.10.2/3658/SMKN 3 DENPASAR/DIKPORA	06/08/2025	Papan interaktif IT Board	52.000.000,00	-	52.000.000,00

Kode/Nama Akun	OPD	Nama Pemberi Hibah	No BAST	Tanggal BAST	Uraian Hibah Yang diterima (Obat/Kendaraan Bermotor Beroda Dua/CCTV/PC Deskop)	Nilai Hibah/Aset (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Hibah Bersih (Rp)
		Hibah Komite	B.10.500.3.10.2/3778/SMKN 3 DENPASAR/DIKPORA	14/08/2025	Sound system	50.400.000,00	-	50.400.000,00
		Hibah Komite	B.10.500.3.10.2/4632/SMKN 3 DENPASAR/DIKPORA	22/10/2025	Trolly Kebersihan Hotel	12.000.000,00	-	12.000.000,00
		Hibah Komite	B.10.500.3.10.2/4623/SMKN 3 DENPASAR/DIKPORA	21/10/2025	Printer Epson	15.425.000,00	-	15.425.000,00
		Hibah Komite	B.10.500.3.10.2/4622/SMKN 3 DENPASAR/DIKPORA	21/10/2025	Komputer AIO Lenovo	10.100.000,00	-	10.100.000,00
		Hibah Komite	B.10.500.3.10.2/3379/SMKN 3 DENPASAR/DIKPORA	24/07/2025	AC 15 PK	144.000.000,00	-	144.000.000,00
		Hibah Komite	K.VII/1531/KOMITE.SMKN4DPS/2025	28/07/2025	AC Midea 1.5 PK R32 MSFC12CRN1 / MSFC 12 CRN1	266.271.000,00	-	266.271.000,00
		Hibah Komite	K.VII/1531/KOMITE.SMKN4DPS/2025	28/07/2025	Midea AC 1PK MSFC-09CRN1	8.920.000,00	-	8.920.000,00
		Hibah	10031	12/01/2025	Tabung + Isi Tabung Serbuk Powder 3 Kg-Pressure Gauge	1.829.000,00	-	1.829.000,00
		Hibah	10031	12/01/2025	Tabung + Isi Tabung Serbuk Powder 6 Kg-Pressure Gauge	3.515.445,00	-	3.515.445,00
		Komite	B.10.900/4335/SMKN5DENPASAR/DIKPORA	11/12/2024	AC Midea 1.5 pk	111.440.000,00	-	111.440.000,00
		Komite	B.10.900/4335/SMKN5DENPASAR/DIKPORA	11/12/2024	AC Midea 1 pk	3.900.000,00	-	3.900.000,00
		Komite	B.10.900/4335/SMKN5DENPASAR/DIKPORA	11/12/2024	AC Midea 2 pk	7.500.000,00	-	7.500.000,00
		Komite	B.10.900/1295/SMKN5DENPASAR/DIKPORA	15/04/2025	Papan IT Board	350.000.000,00	-	350.000.000,00
		Komite	B.10.900/1420/SMKN5DENPASAR/DIKPORA	25/04/2025	CCTV	40.602.213,00	-	40.602.213,00
		Komite	B.10.900/1420/SMKN5DENPASAR/DIKPORA	25/04/2025	CCTV	4.511.358,00	-	4.511.358,00
		Komite	B.10.400.3.8/1985/SMAN 5 DPS/DIKPORA	28/05/2025	A.C. Split	109.200.000,00	-	109.200.000,00
		Komite	B.10.400.3.8/1985/SMAN 5 DPS/DIKPORA	28/05/2025	A.C. Split	58.080.000,00	-	58.080.000,00
		Komite	B.10.400.3.8/1985/SMAN 5 DPS/DIKPORA	28/05/2025	A.C. Split	43.560.000,00	-	43.560.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.1.2/1387/SMKN2.Dps/Dikpora	18/12/2025	Printer Epson L121	15.300.000,00	-	15.300.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.1.2/1387/SMKN2.Dps/Dikpora	18/12/2025	Scanner Epson DS410	23.925.000,00	-	23.925.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.1.2/1387/SMKN2.Dps/Dikpora	18/12/2025	Komputer PC Core i7	17.500.000,00	-	17.500.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.1.2/1387/SMKN2.Dps/Dikpora	18/12/2025	Laptop HP 14s	9.600.000,00	-	9.600.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.1.2/1387/SMKN2.Dps/Dikpora	18/12/2025	Laptop HP 14s	9.600.000,00	-	9.600.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.1.2/1387/SMKN2.Dps/Dikpora	18/12/2025	Printer Epson L121	5.100.000,00	-	5.100.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.1.2/1387/SMKN2.Dps/Dikpora	18/12/2025	AIO Accer C22 1700 All in one PC	194.140.000,00	-	194.140.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.1.2/1387/SMKN2.Dps/Dikpora	18/12/2025	Laptop MSI Core i5	13.825.000,00	-	13.825.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.1.2/1387/SMKN2.Dps/Dikpora	18/12/2025	Komputer PC AIO	128.000.000,00	-	128.000.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.1.2/1387/SMKN2.Dps/Dikpora	18/12/2025	Meja Pingpong	9.000.000,00	-	9.000.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.1.2/1387/SMKN2.Dps/Dikpora	18/12/2025	Ampli ALS Pro	9.000.000,00	-	9.000.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.1.2/1387/SMKN2.Dps/Dikpora	18/12/2025	Speaker aktif 15 inch	16.400.000,00	-	16.400.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.1.2/1387/SMKN2.Dps/Dikpora	18/12/2025	Meja Sekolah	24.000.000,00	-	24.000.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.1.2/1387/SMKN2.Dps/Dikpora	18/12/2025	Kursi Sekolah	16.000.000,00	-	16.000.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.1.2/1387/SMKN2.Dps/Dikpora	18/12/2025	AC Panasonic 2 PK	23.200.000,00	-	23.200.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.1.2/1387/SMKN2.Dps/Dikpora	18/12/2025	TV COOCAA 50 inch	9.925.000,00	-	9.925.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.1.2/1387/SMKN2.Dps/Dikpora	18/12/2025	Kursi Spons Merah	3.576.000,00	-	3.576.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.1.2/1387/SMKN2.Dps/Dikpora	18/12/2025	Kursi Kerja Hitam	1.977.000,00	-	1.977.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.1.2/1387/SMKN2.Dps/Dikpora	18/12/2025	Sofa	5.399.000,00	-	5.399.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.1.2/1387/SMKN2.Dps/Dikpora	18/12/2025	Kursi Kerja Merah Hitam	3.954.000,00	-	3.954.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.1.2/1387/SMKN2.Dps/Dikpora	18/12/2025	Meja Kerja	6.897.000,00	-	6.897.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.1.2/1387/SMKN2.Dps/Dikpora	18/12/2025	Meja Kerja	2.598.000,00	-	2.598.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.1.2/1387/SMKN2.Dps/Dikpora	18/12/2025	Kursi Spons Coklat	2.980.000,00	-	2.980.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.1.2/1387/SMKN2.Dps/Dikpora	18/12/2025	Kursi Kerja Hitam	6.590.000,00	-	6.590.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.1.2/1387/SMKN2.Dps/Dikpora	18/12/2025	Gitar Yamaha APX-600	4.750.000,00	-	4.750.000,00
		Hibah Komite	031/156/KOMITE SMKN 6 DENPASAR/TAHUN 2025	10/06/2025	Alat Kantor Lainnya (Switch Hup)	998.000,00	-	998.000,00
		Hibah Komite	031/15/KOMITE SMKN 6 DENPASAR/TAHUN 2025	15/01/2025	Alat Rumah Tangga Lainnya (Kulkas)	2.900.000,00	-	2.900.000,00
		Hibah Komite 2025	B.10.000.4.3.2/845/SMAN 1 SUKAWATI/DIKPORA	18/06/2025	AC Gree air conditioner 2PK Indoor +Outdoor GWC18MOO5A	115.258.000,00	-	115.258.000,00
		Hibah Komite 2025	B.10.000.4.3.2/845/SMAN 1 SUKAWATI/DIKPORA	18/06/2025	AC Split Gree 2PK	37.516.000,00	-	37.516.000,00
		Hibah Komite 2025	B.10.027/1024.3/SMAN 1 SUKAWATI/DIKPORA	12/01/2025	AC Gree 2PK	98.982.000,00	-	98.982.000,00
		Hibah Komite 2025	B.10.027/1024.3/SMAN 1 SUKAWATI/DIKPORA	12/01/2025	TV Led Changhong U50H7 Pro	4.500.500,00	-	4.500.500,00

Kode/Nama Akun	OPD	Nama Pemberi Hibah	No BAST	Tanggal BAST	Uraian Hibah Yang diterima (Obat/Kendaraan Bermotor Beroda Dua/CCTV/PC Deskop)	Nilai Hibah/Aset (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Hibah Bersih (Rp)
		Hibah Komite 2025	B.10.027/1024.3/SMAN 1 SUKAWATI/DIKPORA	12/01/2025	CCTV Hilooxvision (11 Titik)	9.850.000,00	-	9.850.000,00
		Hibah Komite 2025	B.10.027/1024.3/SMAN 1 SUKAWATI/DIKPORA	12/01/2025	Kantin Sekolah 2	36.838.200,00	-	36.838.200,00
		Hibah Komite 2025	B.10.027/1024.3/SMAN 1 SUKAWATI/DIKPORA	12/01/2025	Kantin Sekolah 3 dan Gudang	139.410.500,00	-	139.410.500,00
		Hibah Komite 2025	B.10.027/1024.3/SMAN 1 SUKAWATI/DIKPORA	12/01/2025	Toilet Ruang Guru	40.247.000,00	-	40.247.000,00
		Hibah Komite 2025	B.10.027/1024.3/SMAN 1 SUKAWATI/DIKPORA	12/01/2025	Toilet Ruang Kepala Sekolah	65.330.063,00	-	65.330.063,00
		Hibah Komite 2025	B.10.027/1024.3/SMAN 1 SUKAWATI/DIKPORA	12/01/2025	Toilet Ruang Parkir	23.099.200,00	-	23.099.200,00
		Hibah	B.10.400.3.13/694/SMKN1GR/DISDIK	14/03/2025	Lap top	7.999.000,00	-	7.999.000,00
		Hibah	B.10.400.3.13/694/SMKN1GR/DISDIK	16/03/2025	Lap top	8.799.000,00	-	8.799.000,00
		Hibah	B 10/000 3/20301/SMK/DIKPORA	04/06/2025	Kompuer PC	68.731.200,00	-	68.731.200,00
		Hibah	B 10/000 3/27342/smk/dikpora	10/06/2025	Printer	21.978.000,00	-	21.978.000,00
		Hibah kmt	B.10.400.3.13/696/SMKN1GR/DISDIK	14/03/2025	Dry Cabinet	1.150.000,00	-	1.150.000,00
		Hibah kmt	B.10.400.3.13/598/SMKN1GR/DISDIK	05/03/2025	Gong/Gamelan bali	210.000.000,00	-	210.000.000,00
		Hibah Komite	B.10.400.3.13/6218/SMKN4.NGR/DIKPORA	03/11/2025	Gedung/Bangunan Scabic PPPK dan BKK	82.568.000,00	-	82.568.000,00
		Hibah Komite	B.10.400.3.13/4094/SMKN4.NGR/DIKPORA	01/07/2025	Gedung/Bangunan Laundry dan Gudang	26.500.000,00	-	26.500.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.3.2/1331/SMAN 1 AMLAPURA/DIKPORA	17/03/2025	Speaker / Loudspeaker	4.100.000,00	-	4.100.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.3.2/5719/SMAN 1 AMLAPURA/DIKPORA	24/11/2025	Meja Kayu Panjang	21.000.000,00	-	21.000.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.3.2/5719/SMAN 1 AMLAPURA/DIKPORA	24/11/2025	Meja Kerja Kayu (Meja Guru)	6.800.000,00	-	6.800.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.3.2/5719/SMAN 1 AMLAPURA/DIKPORA	24/11/2025	Mixer	4.060.000,00	-	4.060.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.3.2.1331/SMAN 1 AMLAPURA	17/03/2025	Patung Penari	66.985.000,00	-	66.985.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.3.2.1331/SMAN 1 AMLAPURA	17/03/2025	Patung Gajah Mada	33.492.500,00	-	33.492.500,00
		Hibah Komite	B.10.000.2.3.2.1331/SMAN 1 AMLAPURA	17/03/2025	Patung Ki Hajar Dewantara	33.492.500,00	-	33.492.500,00
		Komite	012/KOMITE.SMAN.1.Dw	03/03/2025	AC SPLIT	23.400.000,00	-	23.400.000,00
		HIBAH DANA MASYARAKAT	B.10.900/5884/SMAN 1 BANJARANGKAN/DIKPORA	24/02/2023	AC daikin 1 PK	5.564.000,00	-	5.564.000,00
		HIBAH DANA MASYARAKAT	B.10.900/5884/SMAN 1 BANJARANGKAN/DIKPORA	29/04/2024	AC daikin 2PK	9.395.000,00	-	9.395.000,00
		HIBAH DANA MASYARAKAT	B.10.900/5884/SMAN 1 BANJARANGKAN/DIKPORA	29/04/2024	AC daikin 1 PK	6.142.500,00	-	6.142.500,00
		HIBAH KOMITE	B.10.000.2.3.2/4381/SMAN 1 Selemadeg/DIKPORA	07/08/2025	CCTV	40.400.000,00	-	40.400.000,00
		HIBAH KOMITE	B.10.000.2.3.2/4379/SMAN 1 Selemadeg/DIKPORA	07/08/2025	TOWER AIR	38.370.000,00	-	38.370.000,00
		HIBAH KOMITE	B.10.000.2.3.2/4380/SMAN 1 Selemadeg/DIKPORA	07/08/2025	TEMBOK PENYENGKER	169.500.000,00	-	169.500.000,00
		Hibah Komite	sman 2 tabanan	18/09/2024	Bangunan Gedung Kamar Mandi	150.300.000,00	-	150.300.000,00
		Dana Komite 2025	017/1/ST/2025	07/08/2025	AC GREE 2pk	65.200.000,00	-	65.200.000,00
		Dana Komite	B.10.000.3/1612/SMAN 1 PENEBEL/DIKPORA	26/08/2025	Mic Wireless	1.223.000,00	-	1.223.000,00
		Dana Komite	B.10.000.3/1932/SMAN 1 PENEBEL/DIKPORA	20/10/2025	CCTV	12.450.000,00	-	12.450.000,00
		Dana Komite	B.10.000.3/1612/SMAN 1 PENEBEL/DIKPORA	26/08/2025	Mixer	1.277.000,00	-	1.277.000,00
		HIBAH/KOMITE	01/BMD/SMAN 1 BANJAR/2025	02/01/2025	Meja Resepsionis	5.000.000,00	-	5.000.000,00
		HIBAH/KOMITE	02/BMD/SMAN 1 BANJAR/2025	21/05/2025	Air Conditioner Gree 2pk	9.750.000,00	-	9.750.000,00
		HIBAH/KOMITE	01/BMD/SMAN 1 BANJAR/2025	02/01/2025	AIO Lenovo Ideacenter 3 (Intel core L5-12450H, Memory 8 GB DDR4, SSD Nume 512 GB, Led 22 in FHD, Windows 11)	57.000.000,00	-	57.000.000,00
		HIBAH/KOMITE	01/BMD/SMAN 1 BANJAR/2025	02/01/2025	Epson L3210 (Print, scan dan foto copy)	4.000.000,00	-	4.000.000,00
		hibah	smkn 1 gerokgak	29/10/2025	Gedung Pendidikan	151.488.600,00	-	151.488.600,00
		hibah komite	B.10.000.2.3.2/3943/SMAN1KBT/DIKPORA	14/08/2025	rehab kantin	145.645.000,00	-	145.645.000,00
		KOMITE	B.10.400.3.13/2141/SMAN 1 SAWAN/DIKPORA	02/06/2025	Loudspeaker	13.225.000,00	-	13.225.000,00
		KOMITE	B.10.400.3.13/2141/SMAN 1 SAWAN/DIKPORA	02/06/2025	Kursi Tamu	3.400.000,00	-	3.400.000,00
		KOMITE	B.10.400.3.13/2141/SMAN 1 SAWAN/DIKPORA	02/06/2025	Gamelan	104.000.000,00	-	104.000.000,00
		KOMITE	B.10.400.3.13/2141/SMAN 1 SAWAN/DIKPORA	02/06/2025	Air Conditioning (AC)	8.000.000,00	-	8.000.000,00
		KOMITE	B.10.400.3.13/2141/SMAN 1 SAWAN/DIKPORA	02/06/2025	Air Conditioning (AC)	8.000.000,00	-	8.000.000,00
		KOMITE	B.10.400.3.13/2141/SMAN 1 SAWAN/DIKPORA	02/06/2025	Air Conditioning (AC)	8.200.000,00	-	8.200.000,00

Kode/Nama Akun	OPD	Nama Pemberi Hibah	No BAST	Tanggal BAST	Uraian Hibah Yang diterima (Obat/Kendaraan Bermotor Beroda Dua/CCTV/PC Deskop)	Nilai Hibah/Aset (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Hibah Bersih (Rp)
		KOMITE	B.10.400.3.13/2141/SMAN 1 SAWAN/DIKPORA	02/06/2025	Air Conditioning (AC)	8.200.000,00	-	8.200.000,00
		KOMITE	B.10.400.3.13/2141/SMAN 1 SAWAN/DIKPORA	02/06/2025	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	83.972.050,00	-	83.972.050,00
		komite		6-Oct-25	Printer L3250	2.950.000,00	-	2.950.000,00
		komite		20-May-25	Tablet	2.000.000,00	-	2.000.000,00
		komite		8-Aug-25	PC Komputer	125.700.000,00	-	125.700.000,00
		komite		1-Aug-25	Air Conditioning (AC)	32.850.000,00	-	32.850.000,00
		komite		18/09/2025	Air Conditioning (AC)	7.290.000,00	-	7.290.000,00
		Hibah	B.31.420/1236/SMAN1SKSD/DIKPORA	01/07/2025	Belanja Modal Papan Instansi SMAN 1 Sukasada	9.250.000,00	-	9.250.000,00
		Hibah	B.900/3597/SMAN1SKSD/DIKPORA	17/11/2025	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pojok Baca	6.000.000,00	-	6.000.000,00
		Hibah	B.10.000/3124/SMAN1SKSD/DIKPORA	22/10/2025	Belanja Modal Pengadaan HP Sekolah SMAN 1 Sukasada	3.746.550,00	-	3.746.550,00
		Hibah	B.900/3212/SMAN1SKSD/DIKPORA	15/10/2025	Belanja Modal Penataan Tempat parkir Berupa Pemasangan Kanopi Minimalis	40.000.000,00	-	40.000.000,00
		Hibah	B.900/2703/SMAN1SKSD/DIKPORA	28/08/2025	Belanja Modal Penataan Tempat parkir Berupa Pemasangan Paving SMAN 1 Sukasada	39.015.000,00	-	39.015.000,00
		komite	B.10.400.3.13.2/1928/SMAN 1 TEJAKULA/DIKPORA	23/06/2025	Kantin sekolah	48.023.000,00	-	48.023.000,00
		Hibah Komite	10.400.3.13.2/655/SMAN 2 BUSUNGBIU/DIKPORA	10 Pebruari 2025	Bangunan Gedung lain-lain (dst) (Tempat Pengolahan Sampah)	21.082.000,00	-	21.082.000,00
		Hibah Komite 2025	B.10.400.7.22.1/1355/SMAN 2 Grk.BLL/DIKPORA	08/08/2025	Meja kerja kayu	15.225.000,00	-	15.225.000,00
		Hibah Komite 2025	B.10.400.7.22.1/1355/SMAN 2 Grk.BLL/DIKPORA	08/08/2025	Meja kerja kayu	531.500,00	-	531.500,00
		Hibah Komite 2025		17/01/2025	A.C Split	195.690.000,00	-	195.690.000,00
		Hibah Komite 2025		13/10/2025	AC Gree	99.330.000,00	-	99.330.000,00
		Hibah Komite 2025		13/10/2025	AC Gree	62.965.000,00	-	62.965.000,00
		Hibah Komite 2025		13/10/2025	AC Gree	7.095.000,00	-	7.095.000,00
		Hibah Komite 2025		13/10/2025	AC Gree	63.855.000,00	-	63.855.000,00
		Hibah Komite 2025		17/03/2025	video Mixer Swictcher	17.000.000,00	-	17.000.000,00
		Hibah Komite 2025		17/03/2025	Headphone SR850 Samson	2.950.000,00	-	2.950.000,00
		Hibah Komite 2025		17/03/2025	Maono Sound Pads	2.850.000,00	-	2.850.000,00
		Hibah Komite			Bangunan Sekaenem	95.000.000,00	-	95.000.000,00
		Hibah Komite	B.10.800/3365/SMKN1Grk/DIKPORA	10/12/2025	Sepeda Motor	12.500.000,00	-	12.500.000,00
		Hibah Komite	B.10.800/3366/SMKN1Grk/DIKPORA	10/12/2025	Sepeda Motor	12.000.000,00	-	12.000.000,00
		hibah komite	B.10.800/906/SMKN1Grk/DIKPORA	17/04/2025	gedung pos jaga permanen	36.490.000,00	-	36.490.000,00
		Hibah Komite	B.10.800/1175/SMKN1Grk/DIKPORA	19/05/2025	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	31.057.000,00	-	31.057.000,00
		DAK	B.31.400.3/9166/SMKN1SKSD/DIKPORA	30/12/2024	Masema Standard Gas Food Oven 3 Deck 6 Tray	84.880.000,00	-	84.880.000,00
		DAK	B.31.400.3/9166/SMKN1SKSD/DIKPORA	30/12/2024	Mesin Cutter Pembuat Kemasan	67.000.000,00	-	67.000.000,00
		DAK	B.31.400.3/9166/SMKN1SKSD/DIKPORA	30/12/2024	Lensa Kamera Canon	20.020.000,00	-	20.020.000,00
		DAK	B.31.400.3/9166/SMKN1SKSD/DIKPORA	30/12/2024	Tripod Video Fluid Head	8.600.000,00	-	8.600.000,00
		DAK	B.31.400.3/9166/SMKN1SKSD/DIKPORA	30/12/2024	Printer Epson L3210	19.500.000,00	-	19.500.000,00
		Hibah Komite	10.400.3.13.2/4445/SMKN1-Tjkl/DIKPORA	14/11/2025	Bor Impact	895.420,00	-	895.420,00
		Hibah Komite	10.400.3.13.2/4478/SMKN1-Tjkl/DIKPORA	21/11/2025	Grinder Kopi LD-019	2.507.820,00	-	2.507.820,00
		Hibah Komite	10.400.3.13.2/4479/SMKN1-Tjkl/DIKPORA	21/11/2025	Grinder Kopi 500	2.692.420,00	-	2.692.420,00
		Hibah Komite	10.400.3.13.2/3002/SMKN1-Tjkl/DIKPORA	28/07/2025	Kipas Angin	24.966.000,00	-	24.966.000,00
		Hibah Komite	10.400.3.13.2/4461/SMKN1-Tjkl/DIKPORA	17/11/2025	Box Hardcase Mixer	1.500.000,00	-	1.500.000,00
		Hibah Komite	10.400.3.13.2/4480/SMKN1-Tjkl/DIKPORA	21/11/2025	Mesin Kopi Ferratti Ferro	6.262.420,00	-	6.262.420,00
		Hibah Komite	10.400.3.13.2/4460/SMKN1-Tjkl/DIKPORA	17/11/2025	Mic Wireless	2.000.000,00	-	2.000.000,00
		Hibah Komite	10.400.3.13.2/0520/SMKN1-Tjkl/DIKPORA	07/02/2025	Pembangunan Ruang Teaching Factory	155.000.000,00	-	155.000.000,00
		Hibah	B.10.000.4.3.2/2843/SMKN2-TJKL/DIKPORA	20/06/2025	Central Park	50.000,00	-	50.000,00
		Hibah	B.10.000.4.3.2/2843/SMKN2-TJKL/DIKPORA	20/06/2025	So, I Married The Anti-fan	25.000,00	-	25.000,00
		Hibah	B.10.000.4.3.2/2843/SMKN2-TJKL/DIKPORA	20/06/2025	Imitation #1	25.000,00	-	25.000,00
		Hibah	B.10.000.4.3.2/2843/SMKN2-TJKL/DIKPORA	20/06/2025	Imitation #2	25.000,00	-	25.000,00
		Hibah	B.10.000.4.3.2/2843/SMKN2-TJKL/DIKPORA	20/06/2025	Imitation #3	25.000,00	-	25.000,00
		Hibah	B.10.000.4.3.2/2843/SMKN2-TJKL/DIKPORA	20/06/2025	Imitation #4	25.000,00	-	25.000,00
		Hibah	B.10.000.4.3.2/2843/SMKN2-TJKL/DIKPORA	20/06/2025	Best Time	25.000,00	-	25.000,00
		Hibah	B.10.000.4.3.2/2843/SMKN2-TJKL/DIKPORA	20/06/2025	Then She Smiles	25.000,00	-	25.000,00

Kode/Nama Akun	OPD	Nama Pemberi Hibah	No BAST	Tanggal BAST	Uraian Hibah Yang diterima (Obat/Kendaraan Bermotor Beroda Dua/CCTV/PC Deskop)	Nilai Hibah/Aset (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Hibah Bersih (Rp)
		Hibah	B.10.000.4.3.2/2843/SMKN2-TJKL/DIKPORA	20/06/2025	Last Love Story of Walden Brothers	25.000,00	-	25.000,00
		Hibah	B.10.000.4.3.2/2843/SMKN2-TJKL/DIKPORA	20/06/2025	Follow Me Back	25.000,00	-	25.000,00
		Hibah	B.10.000.4.3.2/2843/SMKN2-TJKL/DIKPORA	20/06/2025	What To Say Next	25.000,00	-	25.000,00
		Hibah	B.10.000.4.3.2/2843/SMKN2-TJKL/DIKPORA	20/06/2025	Seyogia	25.000,00	-	25.000,00
		Hibah	B.10.000.4.3.2/2843/SMKN2-TJKL/DIKPORA	20/06/2025	Seoul Vivor	12.875,00	-	12.875,00
		Hibah	B.10.000.4.3.2/2843/SMKN2-TJKL/DIKPORA	20/06/2025	My Boyfriend's Wedding Dress	25.000,00	-	25.000,00
		Hibah	B.10.400.3.8.1/1633/SMKN BALI MANDARA/ DIKPORA	30/12/2024	Carlift Cuci Mobil Tipe H	86.781.950,00	-	86.781.950,00
		Hibah	B.10.400.3.8.1/1633/SMKN BALI MANDARA/ DIKPORA	30/12/2024	Shelving Steel rak Besi	5.482.721,00	-	5.482.721,00
		Hibah	B.10.400.3.8.1/1633/SMKN BALI MANDARA/ DIKPORA	30/12/2024	Air Hose Rel	1.514.784,00	-	1.514.784,00
		Hibah	B.10.400.3.8.1/1633/SMKN BALI MANDARA/ DIKPORA	30/12/2024	Bor Listrik	1.864.000,00	-	1.864.000,00
		Hibah	B.10.400.3.8.1/1633/SMKN BALI MANDARA/ DIKPORA	30/12/2024	Digital Multimeter	1.546.500,00	-	1.546.500,00
		Hibah	B.10.400.3.8.1/1633/SMKN BALI MANDARA/ DIKPORA	30/12/2024	Tangga Lipat Teleskopik	4.120.000,00	-	4.120.000,00
		Hibah	B.10.400.3.8.1/1633/SMKN BALI MANDARA/ DIKPORA	30/12/2024	Mesin Absensi Wajah dan Sidik Jari	853.500,00	-	853.500,00
		Hibah	B.10.400.3.8.1/1633/SMKN BALI MANDARA/ DIKPORA	30/12/2024	Mesin Absensi Sidik Jari	585.000,00	-	585.000,00
		Hibah	B.10.400.3.8.1/1633/SMKN BALI MANDARA/ DIKPORA	30/12/2024	Paket CCTV Dahua	1.722.000,00	-	1.722.000,00
		Hibah	B.10.400.3.8.1/1633/SMKN BALI MANDARA/ DIKPORA	30/12/2024	Paket CCTV Hilook	1.722.000,00	-	1.722.000,00
		Hibah	B.10.400.3.8.1/1633/SMKN BALI MANDARA/ DIKPORA	30/12/2024	Paket CCTV IP Camera Hikvision	4.508.801,00	-	4.508.801,00
		Hibah	B.10.400.3.8.1/1633/SMKN BALI MANDARA/ DIKPORA	30/12/2024	Fusion Splicer	34.440.000,00	3.172.468,00	31.267.532,00
		Hibah	B.10.400.3.8.1/1633/SMKN BALI MANDARA/ DIKPORA	30/12/2024	Optical Power Meter	1.518.000,00	-	1.518.000,00
		Hibah	B.10.400.3.8.1/1633/SMKN BALI MANDARA/ DIKPORA	30/12/2024	Optical Light Source	3.435.000,00	-	3.435.000,00
		Hibah	B.10.400.3.8.1/1633/SMKN BALI MANDARA/ DIKPORA	30/12/2024	Digital Infrared Preheating Blower Station	1.107.000,00	-	1.107.000,00
		Hibah	B.10.400.3.8.1/1633/SMKN BALI MANDARA/ DIKPORA	30/12/2024	Flasher Bios	1.120.000,00	-	1.120.000,00
		Hibah	B.10.400.3.8.1/1633/SMKN BALI MANDARA/ DIKPORA	30/12/2024	Controlled Switching Power Supply	1.537.500,00	-	1.537.500,00
		Hibah	B.10.400.3.8.1/1633/SMKN BALI MANDARA/ DIKPORA	30/12/2024	Printer Epson	2.681.500,00	-	2.681.500,00
		Hibah	B.10.400.3.8.1/1633/SMKN BALI MANDARA/ DIKPORA	30/12/2024	Switch PoE 8 Port	2.064.000,00	-	2.064.000,00
		Hibah	B.10.400.3.8.1/1633/SMKN BALI MANDARA/ DIKPORA	30/12/2024	Wireless Router AX	4.305.000,00	-	4.305.000,00
		Hibah	B.10.400.3.8.1/1633/SMKN BALI MANDARA/ DIKPORA	30/12/2024	Tablet / Hp	5.748.885,00	-	5.748.885,00
		Hibah	B.10.400.3.8.1/1633/SMKN BALI MANDARA/ DIKPORA	30/12/2024	Unifi 6 Lite	8.404.000,00	-	8.404.000,00
		Hibah	B.10.400.3.8.1/1633/SMKN BALI MANDARA/ DIKPORA	30/12/2024	Cloud Key	4.853.500,00	-	4.853.500,00
		Hibah	B.10.400.3.8.1/1633/SMKN BALI MANDARA/ DIKPORA	01/01/2025	Renovasi Ruang Teaching Factory Program Keahlian TKR dan TKJ SMK Negeri Bali Mandara	120.000.000,00	-	120.000.000,00
		Hibah	B.10.000.5.6.3/1227/SLBN 2 BULELENG/DIKPORA	09/07/2025	MESIN CUCI	2.800.000,00	-	2.800.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.4.3.2/1099/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	17/06/2025	Cillingfan Panasonic 1511	39.000.000,00	-	39.000.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.4.3.2/1099/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	17/06/2025	Wall Fan Maspion PW-456 W 18" Besi	30.156.000,00	-	30.156.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.4.3.2/1099/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	17/06/2025	Power Stand Kipas Maspion PW18X2 18 Inch	4.490.000,00	-	4.490.000,00

Kode/Nama Akun	OPD	Nama Pemberi Hibah	No BAST	Tanggal BAST	Uraian Hibah Yang diterima (Obat/Kendaraan Bermotor Beroda Dua/CCTV/PC Deskop)	Nilai Hibah/Aset (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Hibah Bersih (Rp)
		Hibah Komite	B.10.000.4.3.2/1099/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	17/06/2025	Podium Sekolah Kayu Jati	2.300.000,00	-	2.300.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.4.3.2/1099/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	17/06/2025	CCTV	45.889.000,00	-	45.889.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.4.3.2/1099/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	17/06/2025	Soundsystem TOA	28.600.000,00	-	28.600.000,00
		hibah	B.10.000.5.6.1/1858/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	16/12/2025	MIC WISDOM OLTRA4000H	6.300.000,00	-	6.300.000,00
		hibah	B.10.000.5.6.1/1858/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	16/12/2025	SPEAKER KARAOKE JETE SB2 BLACK	3.500.000,00	-	3.500.000,00
		hibah	B.10.000.5.6.1/1858/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	16/12/2025	SPEAKER COLUM TOA ZS-207-AS	21.000.000,00	-	21.000.000,00
		hibah	B.10.000.5.6.1/1858/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	16/12/2025	AC GREE 1,5 PK	24.000.000,00	-	24.000.000,00
		Hibah Komite	B.10.000.4.3.2/1099/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	17/06/2025	Printer HP Laserjet Pro MFP 3103FDN	8.200.000,00	-	8.200.000,00
		hibah	B.10.000.5.6.1/1858/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	16/12/2025	PC Rakitan Core I3	330.000.000,00	-	330.000.000,00
		hibah	B.10.000.5.6.1/1858/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	16/12/2025	Closed Circuit Television (CCTV)	30.200.000,00	-	30.200.000,00
	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	KPN Widya Karya Husada	167/KPN-WKH/XII/2025	2 December 2025	Alat Rumah Tangga Lainnya	2.100.000,00	-	2.100.000,00
		KPN Widya Karya Husada	167/KPN-WKH/XII/2025	2 December 2025	Alat Dapur	25.000.000,00	-	25.000.000,00
		KPN Widya Karya Husada	175/KPN-WHK/XII/2025	24 December 2025	Alat Dapur	400.000,00	-	400.000,00
		KPN Widya Karya Husada	175/KPN-WHK/XII/2025	24-Dec-25	Alat Dapur dan Peralatan Personal Computer	4.850.000,00	-	4.850.000,00
		PERSI	098/PERSI Wil BALI/VIII/2025	19-Aug-25	Alat Kedokteran Umum	288.300.300,00	-	288.300.300,00
		PERSI	098/PERSI Wil BALI/VIII/2025	19 August 2025	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	27.193.940,00	-	27.193.940,00
		Rotary Club	GG 2567615/251113	13 Nopember 2025	Alat Kedokteran Bedah	9.620.669,00	-	9.620.669,00
		Rotary Club	GG 2567615/251113	13 Nopember 2025	Alat Kedokteran Bedah Jantung	7.648.756,00	-	7.648.756,00
		Rotary Club	GG 2567615/251113	13 Nopember 2025	Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	8.078.649,00	-	8.078.649,00
		Rotary Club	GG 2567615/251113	13 Nopember 2025	Alat Kedokteran Gigi	7.817.628,00	-	7.817.628,00
		Rotary Club	GG 2567615/251113	13 Nopember 2025	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	7.954.491,00	-	7.954.491,00
		Rotary Club	GG 2567615/251113	13 Nopember 2025	Alat Kedokteran Poliklinik	6.364.697,00	-	6.364.697,00
		Rotary Club	GG 2567615/251113	13 Nopember 2025	Alat Kedokteran THT	16.653.650,00	-	16.653.650,00
		Rotary Club	GG 2567615/251113	13 Nopember 2025	Alat Kedokteran Umum	37.617.406,00	-	37.617.406,00
		Rotary Club	GG 2567615/251113	13 Nopember 2025	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3.451.619,00	-	3.451.619,00
		PT. Aditya Farmatama	028/AF/III/2025	3 March 2025	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	450.000,00	-	450.000,00
		PT. Lestari Dini Tunggul	125/MD/LDT/XI/2025	11 Nopember 2025	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	23.310.000,00	-	23.310.000,00
		PT. Intergastra Nusantara	IN/C/IS/25.08.0475	6 August 2025	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.925.000,00	-	8.925.000,00
		PT. Likuid Pharmalab Indonesia	003/BA-LKPI/VII/2025	1 August 2025	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.140.000,00	-	7.140.000,00
		PT Lestari Dini Tunggul Indonesia	132/MD/LDT/XII/2025	12/12/2025	Perabot kantor	976.800,00	-	976.800,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bank Indonesia	BAST No..27/25/Dpr-TMI/BA	6 Nopember 2025	Kendaraan Dinas Perorangan	394.750.000,00	-	394.750.000,00
	Dinas Kebudayaan	PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Nomor: B.4581/RO-DPS/ROP/LOG/11/2025	26/11/2025	Mobil Pengangkut Sampah	176.000.000,00		176.000.000,00
		PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Nomor: B.4581/RO-DPS/ROP/LOG/11/2025	26/11/2025	Renovasi Lapangan Basket	116.940.000,00		116.940.000,00
		PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Nomor: B.4581/RO-DPS/ROP/LOG/11/2025	26/11/2025	Pembangunan Lapangan Skatepark	203.060.000,00		203.060.000,00
		PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)	Nomor: 57/FTJSL/PROV.BALI/IX/2025	02/09/2025	Penataan Jogging Track Monumen Perjuangan Rakyat Bali	7.274.991.000,00		7.274.991.000,00
		BPJS Kesehatan	Nomor: 83/BA/KEPWILXI/0824	29/08/2024	Taman Semi Permanen	47.500.900,00	395.841,00	47.105.059,00
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali	PT Jasa Raharja	NPHD NOMOR P/6/SP/2025 dan B.32.000.4.3.2/4811/Set/Bapenda	07/06/2025	Kas	5.753.232.000,00	-	5.753.232.000,00
					JUMLAH	22.371.454.980,00	3.568.309,00	22.367.886.671,00
7.3.01.04.03.0001 - Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	CV. Sari Yoga	06/SY/III/2025	6 March 2025	Alat Pendingin	5.800.000,00	-	5.800.000,00
		PT. Global Onkolab Farma Tbk	001/GOF.HC.ONCO/IV/2025	10/04/2025	Mebel	59.990.000,00	-	59.990.000,00
		PT. Trijaya Nasional	01/HB-RSBM/TJN/III/2025	17 March 2025	Bangunan Parkir	273.730.000,00	-	273.730.000,00
		PT. Ferron Par Pharmaceuticals	-	22 January 2025	Bangunan Kesehatan	236.119.200,00	-	236.119.200,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Bangunan Kesehatan	19.126.015.173,00	-	19.126.015.173,00

Kode/Nama Akun	OPD	Nama Pemberi Hibah	No BAST	Tanggal BAST	Uraian Hibah Yang diterima (Obat/Kendaraan Bermotor Beroda Dua/CCTV/PC Deskop)	Nilai Hibah/Aset (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Hibah Bersih (Rp)
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Bangunan Terbuka	182.777.697,00	-	182.777.697,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	174.720.000,00	-	174.720.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Taman	58.557.777,00	-	58.557.777,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Bangunan Parkir	46.109.000,00	-	46.109.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Bangunan Gudang	31.360.000,00	-	31.360.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Bangunan Gedung Instalasi	29.450.000,00	-	29.450.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	11.550.000,00	-	11.550.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Bangunan Gedung Kantor	7.191.333,00	-	7.191.333,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Candi	20.862.301,00	-	20.862.301,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Pagar	5.500.000,00	-	5.500.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Jalan Lainnya	30.823.230,00	-	30.823.230,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	13.000.000,00	-	13.000.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	5.460.000,00	-	5.460.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Instalasi Air Kotor Lainnya	226.707.000,00	-	226.707.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Komputer Jaringan	506.202.730,00	-	506.202.730,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	8.000.000,00	-	8.000.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Jaringan Listrik Lainnya	320.000.000,00	-	320.000.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Laboratorium Hidrokimia	260.000.000,00	-	260.000.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Radiation Application Equipment	20.500.000,00	-	20.500.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	11.325.000,00	-	11.325.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Laboratorium Umum	57.145.000,00	-	57.145.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Laboratorium Mikrobiologi	20.418.749,00	-	20.418.749,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Laboratorium Kualitas Udara	4.000.000,00	-	4.000.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Laboratorium Pertanian	3.115.250,00	-	3.115.250,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Laboratorium Tambang	2.447.550,00	-	2.447.550,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Laboratorium Patologi	1.760.000,00	-	1.760.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	System/Power Supply	1.200.000,00	-	1.200.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	1.500.000,00	-	1.500.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Peralatan Jaringan	292.675.000,00	-	292.675.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Komputer Jaringan	53.000.000,00	-	53.000.000,00

Kode/Nama Akun	OPD	Nama Pemberi Hibah	No BAST	Tanggal BAST	Uraian Hibah Yang diterima (Obat/Kendaraan Bermotor Beroda Dua/CCTV/PC Deskop)	Nilai Hibah/Aset (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Hibah Bersih (Rp)
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Personal Computer	634.366.996,00	-	634.366.996,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Peralatan Komputer Lainnya	32.750.000,00	-	32.750.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Peralatan Mainframe	7.000.000,00	-	7.000.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Peralatan Personal Computer	166.893.222,00	-	166.893.222,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Pompa	17.000.000,00	-	17.000.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.842.105,00	-	4.842.105,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Kendaraan Bermotor Khusus	51.164.474,00	-	51.164.474,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Peralatan Ukur, Gip dan Feeting	5.900.000,00	-	5.900.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	2.375.000,00	-	2.375.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	3.898.000,00	-	3.898.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Kantor Lainnya	128.164.000,00	-	128.164.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	387.020.737,00	-	387.020.737,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	343.411.029,00	-	343.411.029,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Mebel	1.113.877.185,00	-	1.113.877.185,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Pendingin	661.063.262,00	-	661.063.262,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Lemari dan Arsip Pejabat	26.136.894,00	-	26.136.894,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Pemadam Kebakaran	12.150.000,00	-	12.150.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Pembersih	10.150.000,00	-	10.150.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	3.087.500,00	-	3.087.500,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Dapur	8.899.550,00	-	8.899.550,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.563.750,00	-	2.563.750,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Pengukur Waktu	505.000,00	-	505.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Sumber Tenaga	100.000.000,00	-	100.000.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Komunikasi Telephone	28.185.000,00	-	28.185.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Peralatan Studio Audio	35.350.000,00	-	35.350.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Peralatan Studio Video dan Film	5.600.000,00	-	5.600.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	1.700.878.329,00	-	1.700.878.329,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	358.981.280,00	-	358.981.280,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Kedokteran Jantung	302.550.000,00	-	302.550.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Kedokteran ICCU	155.000.000,00	-	155.000.000,00

Kode/Nama Akun	OPD	Nama Pemberi Hibah	No BAST	Tanggal BAST	Uraian Hibah Yang diterima (Obat/Kendaraan Bermotor Beroda Dua/CCTV/PC Deskop)	Nilai Hibah/Aset (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Hibah Bersih (Rp)
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Kedokteran Umum	910.165.227,00	-	910.165.227,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Kedokteran Gawat Darurat	199.998.471,00	-	199.998.471,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	94.803.241,00	-	94.803.241,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Kedokteran Bedah	315.803.648,00	-	315.803.648,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Kedokteran Anak	102.162.703,00	-	102.162.703,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Kedokteran Mata	27.967.720,00	-	27.967.720,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Kedokteran Lainnya	138.274.985,00	-	138.274.985,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	242.095.500,00	-	242.095.500,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Kedokteran Gigi	77.094.576,00	-	77.094.576,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Kedokteran Nuklir	10.720.629,00	-	10.720.629,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	7.237.000,00	-	7.237.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	5.982.000,00	-	5.982.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Kedokteran Bedah Jantung	6.561.900,00	-	6.561.900,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Kedokteran THT	49.464.534,00	-	49.464.534,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Kedokteran Poliklinik	18.054.922,00	-	18.054.922,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Alat Kesehatan Umum Lainnya	65.000,00	-	65.000,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Transport and Storage Equipment for Liquid	46.422,00	-	46.422,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya	B.31.000.2.3.2/3687/P.BMD/BPKAD dan 06/YDURM/VI/out/DPS/2025	10 June 2025	Software	17.619.030,00	-	17.619.030,00
		Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya		1 July 2025	Ekuitas dari penjurnalan hibah Piutang Persediaan dan Utang	3.268.689.768,35	-	3.268.689.768,35
		PT Elo Karsa Utama	B.43.000.4.3.2/13929/YANMED/RSM.BM	3 Nopember 2025	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit kandungan	433.584.000,00	-	433.584.000,00
		Yayasan Rotary	GG 2567615	18 June 2025	Alat Kedokteran Anak	125.000.000,00	-	125.000.000,00
		PT. Lestari Dini Unggul	132/MD/LDT/II/2025	2 December 2025	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	3.148.000,00	-	3.148.000,00
		PT. Lestari Dini Unggul	132/MD/LDT/II/2025	2 December 2025	Mebel	277.520,00	-	277.520,00
		PT. Lestari Dini Unggul	132/MD/LDT/II/2025	2 December 2025	Alat Komunikasi Telephone	253.800,00	-	253.800,00
		PT. Intisumber Hasil Sempurna Global	00001/IHSG-DPS/I/2025	02/09/2025	Alat penyimpan perlengkapan kantor	4.995.000,00	-	4.995.000,00
		PT Elo Karsa Utama	392/SU-EKU/2025	7 March 2025	Bahan Lainnya	92.702.700,00	-	92.702.700,00
		PT Mensa Bina Sukses	237.A/DPS1/MBS/VIII/2025	6 August 2025	Bahan Lainnya	2.900.000,00	-	2.900.000,00
	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretariat Daerah Provinsi Bali	B.13.000.2.3.2/3678/SEKRET/DSP3A	14/10/2025	Alat Pendingin	2.105.000,00	-	2.105.000,00
		Sekretariat Daerah Provinsi Bali	B.13.000.2.3.2/3678/SEKRET/DSP3A	14/10/2025	Alat Laboratorium Kualitas Udara	4.000.000,00	-	4.000.000,00
		Sekretariat Daerah Provinsi Bali	B.13.000.2.3.2/3678/SEKRET/DSP3A	14/10/2025	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40.852.000,00	-	40.852.000,00
					JUMLAH	34.621.400.599,35	-	34.621.400.599,35
7.3.01.05.01.0001 - Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	UPTD. Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		09/01/2025	Hasil Demplot Tanaman Jagung	4.040.000,00	-	4.040.000,00
					JUMLAH	4.040.000,00	-	4.040.000,00
JUMLAH PENDAPATAN HIBAH						4.094.957.932.134,79	694.866.566.257,66	3.400.091.365.877,13

Pemerintah Provinsi Bali
Rincian Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris
Per 31 Desember 2025

REKAPITULASI PENERIMAAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)

URAIAN PFK	BUD	BLUD										TOTAL
		UPTD RS Bali Mandara	RS Mata Bali Mandara	RS Jiwa Provinsi Bali	UPTD Pengelolaan Air Limbah	UPTD Pengelolaan Air Minum	UPTD BAPELKES	UPTD PKSDM	UPTD Laboratorium Kesehatan	RSU Dharma Yadnya	JUMLAH BLUD	
Penerimaan BPJS Kesehatan	71.199.006.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.680.325,00	0,00	0,00	48.680.325,00	71.247.686.427,00
Penerimaan IWP 8%	45.658.433.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.658.433.839,00
Potongan JKK	2.070.178.332,00	0,00	0,00	259.200,00	0,00	0,00	0,00	2.653.848,00	0,00	4.565.991,00	7.479.039,00	2.077.657.371,00
Potongan JKM	5.446.274.157,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	3.317.310,00	0,00	12.823.663,00	16.464.973,00	5.462.739.130,00
Penerimaan IWP 1%	13.562.178.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.217,00	1.560.217,00	13.563.739.061,00
Penerimaan Taperum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Penghasilan 21	79.725.947.465,00	2.317.728.400,00	970.900.943,00	63.948.014,00	483.000,00	0,00	62.665.250,00	537.455.000,00	1.105.000,00	155.878.475,00	4.110.164.082,00	83.836.111.547,00
Pajak Pertambahan Nilai	100.775.425.971,00	8.928.805.341,00	4.251.342.411,00	1.195.424.731,00	0,00	1.736.094.371,00	64.825.105,00	167.210.061,00	280.221.333,00	199.623.130,00	16.823.546.483,00	117.598.972.454,00
Pajak Penghasilan 23	4.384.712.730,00	229.412.072,00	127.264.339,00	16.201.985,00	95.231.595,00	127.935.197,00	9.317.014,00	14.041.299,00	5.389.097,00	48.968.570,00	673.761.168,00	5.058.473.898,00
Pajak Penghasilan 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	14.136.732.407,00	25.059.274,00	6.100.000,00	16.769.923,00	19.255.309,00	6.960.000,00	6.153.855,00	7.388.335,00	0,00	0,00	87.686.696,00	14.224.419.103,00
Pajak Penghasilan 22	7.556.963.170,00	1.001.770.016,00	464.658.715,00	168.561.800,00	39.581.113,00	147.584.858,00	1.773.635,00	12.612.314,00	73.700.623,00	23.260.654,00	1.933.503.728,00	9.490.466.898,00
PPnBM Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	892.730.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.730.476,00	892.730.476,00
Iuran JHT Non-ASN	6.652.152.744,00	0,00	0,00	3.996.000,00	0,00	0,00	0,00	40.912.137,00	0,00	85.491.061,00	130.399.198,00	6.782.551.942,00
JUMLAH	**351.168.005.761,00**	**12.502.775.103,00**	**5.820.266.408,00**	**1.465.485.653,00**	**1.047.281.493,00**	**2.018.574.426,00**	**144.734.859,00**	**834.270.629,00**	**360.416.053,00**	**532.171.761,00**	**24.725.976.385,00**	**375.893.982.146,00**

REKAPITULASI PENYETORAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)

URAIAN PFK	BUD	BLUD										TOTAL
		UPTD RS Bali Mandara	BLUD RS Mata Bali Mandara	BLUD RS Jiwa Provinsi Bali	UPTD Pengelolaan Air Limbah	UPTD Pengelolaan Air Minum	UPTD BAPELKES	UPTD PKSDM	UPTD Laboratorium Kesehatan	RSU Dharma Yadnya	JUMLAH BLUD	
Penerimaan BPJS Kesehatan	71.199.006.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.680.325,00	0,00	0,00	48.680.325,00	71.247.686.427,00
Penerimaan IWP 8%	45.658.433.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.658.433.839,00
Potongan JKK	2.070.178.332,00	0,00	0,00	259.200,00	0,00	0,00	0,00	2.653.848,00	0,00	4.565.991,00	7.479.039,00	2.077.657.371,00
Potongan JKM	5.446.274.157,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	3.317.310,00	0,00	12.823.663,00	16.464.973,00	5.462.739.130,00
Penerimaan IWP 1%	13.562.178.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.217,00	1.560.217,00	13.563.739.061,00
Penerimaan Taperum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Penghasilan 21	79.725.947.465,00	2.317.728.400,00	970.900.943,00	63.948.014,00	483.000,00	0,00	62.665.250,00	537.455.000,00	1.105.000,00	155.878.475,00	4.110.164.082,00	83.836.111.547,00
Pajak Pertambahan Nilai	100.775.425.971,00	8.928.805.341,00	4.251.342.411,00	1.195.424.731,00	0,00	1.736.094.371,00	64.825.105,00	167.210.061,00	280.221.333,00	199.623.130,00	16.823.546.483,00	117.598.972.454,00
Pajak Penghasilan 23	4.384.712.730,00	229.412.072,00	127.264.339,00	16.201.985,00	95.231.595,00	127.935.197,00	9.317.014,00	14.041.299,00	5.389.097,00	48.968.570,00	673.761.168,00	5.058.473.898,00
Pajak Penghasilan 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	14.136.732.407,00	25.059.274,00	6.100.000,00	16.769.923,00	19.255.309,00	6.960.000,00	6.153.855,00	7.388.335,00	0,00	0,00	87.686.696,00	14.224.419.103,00
Pajak Penghasilan 22	7.556.963.170,00	1.001.770.016,00	464.658.715,00	168.561.800,00	39.581.113,00	147.584.858,00	1.773.635,00	12.612.314,00	73.700.623,00	23.260.654,00	1.933.503.728,00	9.490.466.898,00
PPnBM Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	892.730.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.730.476,00	892.730.476,00
Iuran JHT Non-ASN	6.652.152.744,00	0,00	0,00	3.996.000,00	0,00	0,00	0,00	40.912.137,00	0,00	85.491.061,00	130.399.198,00	6.782.551.942,00
Sisa Dana Kas BOSP yang Dikembalikan ke RKUN	3.056.472.412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056.472.412,70
JUMLAH	**354.224.478.173,70**	**12.502.775.103,00**	**5.820.266.408,00**	**1.465.485.653,00**	**1.047.281.493,00**	**2.018.574.426,00**	**144.734.859,00**	**834.270.629,00**	**360.416.053,00**	**532.171.761,00**	**24.725.976.385,00**	**378.950.454.558,70**

Pemerintah Provinsi Bali
Laporan Tematik
Belanja Fungsi Pendidikan
Per 31 Desember 2025

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
1	**1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**	Rp.2.010.650.562.280,00	Rp.1.595.973.755.446,05	79,38
	1.01.02.1.01.0001 - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Rp.68.000.000.000,00	Rp.66.250.897.900,00	97,43
	1.01.02.1.01.0012 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Rp.3.000.000.000,00	Rp.2.887.436.700,00	96,25
	1.01.02.1.01.0036 - Pengadaan Mebel Sekolah	Rp.1.980.000.000,00	Rp.1.910.480.000,00	96,49
	1.01.02.1.01.0041 - Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp.382.366.000,00	Rp.381.824.003,00	99,86
	1.01.02.1.01.0045 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Rp.4.704.150.000,00	Rp.4.424.232.449,00	94,05
	1.01.02.1.01.0049 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp.2.768.028.800,00	Rp.2.240.371.572,00	80,94
	1.01.02.1.01.0050 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rp.27.034.056.126,00	Rp.26.859.488.373,00	99,35
	1.01.02.1.01.0051 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rp.77.120.000,00	Rp.73.643.740,00	95,49
	1.01.02.1.01.0052 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Rp.125.380.000,00	Rp.113.656.250,00	90,65
	1.01.02.1.01.0053 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Rp.165.426.169.948,00	Rp.86.810.411.062,00	52,48
	1.01.02.1.01.0054 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Rp.57.409.900,00	Rp.54.025.333,00	94,10
	1.01.02.1.01.0060 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp.76.299.900,00	Rp.68.166.750,00	89,34
	1.01.02.1.01.0061 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp.44.690.000,00	Rp.41.927.850,00	93,82
	1.01.02.1.01.0072 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp.8.871.116.400,00	Rp.8.533.684.208,00	96,20
	1.01.02.1.01.0075 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Rp.86.942.800,00	Rp.80.216.000,00	92,26
	1.01.02.1.01.0078 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp.10.881.822.600,00	Rp.6.856.017.757,00	63,00
	1.01.02.1.02.0001 - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Rp.22.612.384.000,00	Rp.21.545.770.400,00	95,28
	1.01.02.1.02.0010 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp.11.150.616.000,00	Rp.10.642.894.000,00	95,45
	1.01.02.1.02.0028 - Pengadaan Mebel Sekolah	Rp.3.914.925.900,00	Rp.3.630.371.550,00	92,73
	1.01.02.1.02.0033 - Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp.47.370.185.000,00	Rp.47.227.767.258,58	99,70
	1.01.02.1.02.0037 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Rp.5.633.745.400,00	Rp.5.374.220.085,00	95,39
	1.01.02.1.02.0041 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp.1.718.208.400,00	Rp.1.667.194.202,00	97,03
	1.01.02.1.02.0042 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rp.16.854.550.194,00	Rp.14.554.422.576,00	86,35
	1.01.02.1.02.0043 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rp.88.862.000,00	Rp.59.915.980,00	67,43
	1.01.02.1.02.0045 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Rp.460.992.000,00	Rp.440.815.690,00	95,62
	1.01.02.1.02.0046 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Rp.182.279.551.870,00	Rp.143.896.092.713,00	78,94
	1.01.02.1.02.0047 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Rp.51.250.000,00	Rp.49.596.800,00	96,77
	1.01.02.1.02.0053 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp.37.600.000,00	Rp.34.193.690,00	90,94
	1.01.02.1.02.0054 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp.68.960.000,00	Rp.65.710.860,00	95,29
	1.01.02.1.02.0069 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Rp.4.012.000.000,00	Rp.3.944.381.000,00	98,31
	1.01.02.1.02.0072 - Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Rp.9.211.539.880,00	Rp.7.612.930.980,00	82,65
	1.01.02.1.02.0073 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Rp.86.574.200,00	Rp.79.828.000,00	92,21
	1.01.02.1.03.0008 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp.1.880.000.000,00	Rp.1.751.895.534,72	93,19
	1.01.02.1.03.0044 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Rp.3.523.966.200,00	Rp.3.346.270.232,00	94,96
	1.01.02.1.03.0048 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp.1.322.189.000,00	Rp.766.274.153,00	57,95
	1.01.02.1.03.0049 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Rp.3.487.687.843,00	Rp.3.174.730.130,00	91,03
	1.01.02.1.03.0051 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Rp.752.324.300,00	Rp.679.704.762,00	90,35
	1.01.02.1.03.0052 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Rp.11.264.294.800,00	Rp.10.907.652.062,00	96,83
	1.01.02.1.03.0053 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Rp.15.547.600,00	Rp.15.025.850,00	96,64
	1.01.02.1.03.0059 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp.90.910.000,00	Rp.80.278.760,00	88,31
	1.01.02.1.03.0060 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp.16.171.600,00	Rp.15.382.020,00	95,12
	1.01.02.1.03.0069 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp.1.918.000.000,00	Rp.1.799.264.297,78	93,81
	1.01.02.1.03.0071 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Rp.362.880.000,00	Rp.344.459.478,00	94,92
	1.01.04.1.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Rp.26.079.400,00	Rp.23.321.600,00	89,43
	1.01.04.1.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Rp.34.239.700,00	Rp.22.640.420,00	66,12
	2.19.02.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Rp.9.731.599.800,00	Rp.3.231.166.419,00	33,20
	2.19.02.1.01.0010 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Rp.36.390.000,00	Rp.4.126.701,00	11,34
	2.19.02.1.01.0011 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Rp.148.051.900,00	Rp.36.380.960,00	24,57
	2.19.02.1.01.0012 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Rp.192.831.500,00	Rp.16.668.000,00	8,64
	2.19.02.1.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Rp.778.887.500,00	Rp.616.883.472,00	79,20
	2.19.02.1.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Rp.98.707.500,00	Rp.79.075.928,00	80,11
	2.19.03.1.02.0004 - Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Rp.14.310.452.700,00	Rp.13.184.702.273,00	92,13

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
	2.19.03.1.02.0006 - Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Rp.7.182.727.400,00	Rp.6.520.831.071,00	90,78
	2.19.03.1.03.0008 - Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Rp.316.840.000,00	Rp.301.025.000,00	95,01
	2.19.03.1.04.0003 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Rp.60.760.000.000,00	Rp.60.671.464.198,97	99,85
	2.19.04.1.01.0005 - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Rp.1.500.000.000,00	Rp.1.428.151.049,00	95,21
	1.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.1.291.832.286.219,00	Rp.1.018.543.795.343,00	78,84
2	**1.01.2.19.0.00.01.0001 - UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan**	Rp.1.163.362.000,00	Rp.1.123.287.164,00	96,56
	1.01.02.1.01.0057 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp.94.290.000,00	Rp.93.472.000,00	99,13
	1.01.02.1.01.0058 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Rp.14.040.000,00	Rp.13.968.000,00	99,49
	1.01.02.1.01.0059 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp.31.636.000,00	Rp.28.665.286,00	90,61
	1.01.02.1.01.0078 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp.545.681.000,00	Rp.528.378.796,00	96,83
	1.01.02.1.02.0050 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp.77.760.000,00	Rp.77.142.000,00	99,21
	1.01.02.1.02.0051 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Rp.13.950.000,00	Rp.11.680.000,00	83,73
	1.01.02.1.02.0052 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp.31.374.000,00	Rp.30.870.286,00	98,39
	1.01.02.1.02.0072 - Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Rp.354.631.000,00	Rp.339.110.796,00	95,62
3	**1.01.2.19.0.00.01.0002 - UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan**	Rp.161.438.100,00	Rp.143.567.832,00	88,93
	1.01.03.1.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Rp.67.654.800,00	Rp.65.283.616,00	96,50
	1.01.03.1.02.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Rp.34.643.300,00	Rp.30.515.336,00	88,08
	1.01.06.1.01.0006 - Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Rp.59.140.000,00	Rp.47.768.880,00	80,77
4	**1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan**	Rp.227.375.200,00	Rp.185.446.890,00	81,56
	1.02.05.1.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Rp.227.375.200,00	Rp.185.446.890,00	81,56
5	**1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional**	Rp.64.996.400,00	Rp.64.971.400,00	99,96
	1.02.02.1.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp.64.996.400,00	Rp.64.971.400,00	99,96
6	**1.06.2.08.0.00.06.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak**	Rp.576.057.900,00	Rp.534.435.770,00	92,77
	1.06.04.1.01.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp.155.516.600,00	Rp.154.796.161,00	99,54
	1.06.04.1.02.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp.226.861.200,00	Rp.200.283.910,00	88,28
	1.06.04.1.03.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Rp.14.352.200,00	Rp.13.828.406,00	96,35
	2.08.02.1.01.0008 - Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Rp.37.085.800,00	Rp.30.063.250,00	81,06
	2.08.02.1.02.0003 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Rp.132.283.500,00	Rp.126.243.693,00	95,43
	2.08.04.1.02.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Rp.9.958.600,00	Rp.9.220.350,00	92,59
7	**1.06.2.08.0.00.06.0001 - UPTD Pelayanan Sosial**	Rp.390.746.400,00	Rp.282.654.233,00	72,34
	1.06.04.1.02.0007 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp.125.759.400,00	Rp.108.274.233,00	86,10
	1.06.04.1.02.0009 - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp.100.000.000,00	Rp.30.810.000,00	30,81
	1.06.04.1.03.0007 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp.164.987.000,00	Rp.143.570.000,00	87,02
8	**1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	Rp.322.469.200,00	Rp.202.291.990,00	62,73
	1.05.03.1.02.0030 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Rp.322.469.200,00	Rp.202.291.990,00	62,73
9	**1.05.0.00.0.00.04.0001 - UPTD Pengendalian Bencana Daerah**	Rp.209.259.900,00	Rp.118.321.400,00	56,54
	1.05.03.1.02.0030 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Rp.209.259.900,00	Rp.118.321.400,00	56,54
10	**2.07.3.29.0.00.01.0001 - UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata**	Rp.260.122.500,00	Rp.251.898.836,00	96,84
	2.07.03.1.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp.260.122.500,00	Rp.251.898.836,00	96,84
11	**2.13.2.12.2.14.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan**	Rp.274.756.630,00	Rp.254.423.561,00	92,60
	2.14.03.1.01.0013 - Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp.274.756.630,00	Rp.254.423.561,00	92,60
12	**2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan**	Rp.70.876.000,00	Rp.52.179.800,00	73,62
	2.15.02.1.10.0003 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Rp.70.876.000,00	Rp.52.179.800,00	73,62
13	**2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	Rp.38.900.000,00	Rp.7.250.000,00	18,64
	2.18.05.1.01.0006 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Rp.38.900.000,00	Rp.7.250.000,00	18,64
14	**2.22.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan**	Rp.59.138.144.358,00	Rp.57.762.430.242,00	97,67
	2.22.02.1.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp.1.267.700.522,00	Rp.920.004.475,00	72,57
	2.22.02.1.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Rp.13.355.731.504,00	Rp.13.272.671.005,00	99,38
	2.22.02.1.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Rp.15.400.739.935,00	Rp.14.775.790.479,00	95,94
	2.22.02.1.02.0003 - Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Rp.1.341.511.591,00	Rp.1.243.958.444,00	92,73
	2.22.02.1.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Rp.25.467.753.050,00	Rp.25.365.032.428,00	99,60
	2.22.03.1.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Rp.1.129.837.200,00	Rp.1.118.808.654,00	99,02
	2.22.03.1.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Rp.331.594.665,00	Rp.282.910.799,00	85,32
	2.22.04.1.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Rp.144.883.000,00	Rp.144.078.300,00	99,44
	2.22.05.1.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya	Rp.167.324.115,00	Rp.162.226.160,00	96,95
	2.22.05.1.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya	Rp.274.241.876,00	Rp.252.075.937,00	91,92
	2.22.05.1.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya	Rp.52.108.700,00	Rp.44.498.640,00	85,40
	2.22.05.1.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya	Rp.114.107.300,00	Rp.100.326.757,00	87,92
	2.22.05.1.02.0004 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Rp.90.610.900,00	Rp.80.048.164,00	88,34
15	**2.22.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Taman Budaya**	Rp.2.687.762.600,00	Rp.2.490.903.868,00	92,68
	2.22.02.1.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Rp.2.317.246.600,00	Rp.2.140.214.921,00	92,36
	2.22.02.1.01.0003 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Rp.370.516.000,00	Rp.350.688.947,00	94,65
16	**2.22.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Museum Bali**	Rp.2.599.414.100,00	Rp.2.329.019.766,00	89,60

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
	2.22.06.1.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Rp.879.170.300,00	Rp.835.664.742,00	95,05
	2.22.06.1.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Rp.1.551.494.500,00	Rp.1.347.952.065,00	86,88
	2.22.06.1.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Rp.168.749.300,00	Rp.145.402.959,00	86,17
17	**2.22.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali**	Rp.3.059.503.000,00	Rp.2.672.426.224,00	87,35
	2.22.06.1.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Rp.756.260.200,00	Rp.714.862.079,00	94,53
	2.22.06.1.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Rp.2.038.410.200,00	Rp.1.744.508.786,00	85,58
	2.22.06.1.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Rp.264.832.600,00	Rp.213.055.359,00	80,45
18	**3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan**	Rp.384.957.289,00	Rp.370.974.234,00	96,37
	3.25.02.1.03.0001 - Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp.55.796.492,00	Rp.54.356.492,00	97,42
	3.25.06.1.02.0004 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Rp.329.160.797,00	Rp.316.617.742,00	96,19
19	**3.25.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan**	Rp.490.625.400,00	Rp.418.323.240,00	85,26
	3.25.06.1.02.0004 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Rp.490.625.400,00	Rp.418.323.240,00	85,26
20	**3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata**	Rp.846.076.583,00	Rp.776.909.896,00	91,83
	3.26.05.1.01.0004 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Rp.267.634.092,00	Rp.239.381.278,00	89,44
	3.26.05.1.01.0014 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Rp.217.836.094,00	Rp.210.747.845,00	96,75
	3.26.05.1.01.0017 - Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Rp.360.606.397,00	Rp.326.780.773,00	90,62
21	**3.27.2.09.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	Rp.12.114.734.647,00	Rp.12.056.361.487,00	99,52
	3.27.02.1.04.0001 - Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Rp.12.043.454.132,00	Rp.11.985.602.212,00	99,52
	3.27.07.1.02.0002 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Rp.71.280.515,00	Rp.70.759.275,00	99,27
22	**3.28.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	Rp.1.147.597.615,00	Rp.1.018.023.920,00	88,71
	2.11.08.1.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Rp.1.131.077.115,00	Rp.1.007.748.820,00	89,10
	3.28.05.1.01.0004 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Rp.16.520.500,00	Rp.10.275.100,00	62,20
23	**5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Pendapatan Daerah**	Rp.142.974.800,00	Rp.58.412.780,00	40,86
	5.02.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp.142.974.800,00	Rp.58.412.780,00	40,86
24	**5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah**	Rp.11.361.453.700,00	Rp.9.511.040.515,00	83,71
	5.05.02.1.01.0002 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Rp.6.274.365.000,00	Rp.6.190.284.222,00	98,66
	5.05.02.1.01.0008 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Rp.292.539.000,00	Rp.210.398.300,00	71,92
	5.05.02.1.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Rp.245.784.000,00	Rp.209.452.810,00	85,22
	5.05.02.1.01.0013 - Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Rp.1.693.920.000,00	Rp.218.691.919,00	12,91
	5.05.02.1.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Rp.394.398.800,00	Rp.365.618.458,00	92,70
	5.05.02.1.03.0003 - Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Rp.231.500.000,00	Rp.228.542.395,00	98,72
	5.05.02.1.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Rp.894.682.000,00	Rp.889.120.770,00	99,38
	5.05.02.1.03.0006 - Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp.234.732.500,00	Rp.231.072.755,00	98,44
	5.05.02.1.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Rp.218.611.000,00	Rp.216.976.619,00	99,25
	5.05.02.1.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Rp.668.500.000,00	Rp.577.873.523,00	86,44
	5.05.02.1.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Rp.61.661.400,00	Rp.52.914.051,00	85,81
	5.05.02.1.04.0005 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Rp.150.760.000,00	Rp.120.094.693,00	79,66
25	**4.01.2.23.2.24.01.0001 - Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	Rp.18.096.092.088,00	Rp.5.990.174.825,00	33,10
	4.01.04.1.01.0001 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Rp.17.541.811.336,00	Rp.5.609.244.703,00	31,98
	4.01.04.1.01.0002 - Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Rp.554.280.752,00	Rp.380.930.122,00	68,73
26	**4.01.2.23.2.24.01.0005 - Biro Organisasi**	Rp.368.970.632,00	Rp.335.937.754,00	91,05
	2.23.02.1.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Rp.32.877.705,00	Rp.31.375.510,00	95,43
	2.23.02.1.01.0009 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Rp.77.277.605,00	Rp.76.668.730,00	99,21
	2.23.02.1.01.0016 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Rp.65.458.710,00	Rp.58.424.937,00	89,25
	2.23.02.1.02.0001 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Rp.41.177.005,00	Rp.35.713.504,00	86,73
	2.23.02.1.02.0004 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Rp.76.875.410,00	Rp.66.973.442,00	87,12
	2.23.03.1.01.0001 - Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Rp.75.304.197,00	Rp.66.781.631,00	88,68
27	**8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	Rp.3.448.095.300,00	Rp.3.154.678.413,00	91,49
	8.01.02.1.01.0012 - Pembentukan Paskibraka	Rp.3.448.095.300,00	Rp.3.154.678.413,00	91,49
28	**2.22.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Pemajuan Masyarakat Adat**	Rp.472.760.533.514,00	Rp.470.586.762.232,00	99,54
	2.22.09.8.01.0001 - Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Rp.471.741.628.706,00	Rp.469.656.050.725,00	99,56
	2.22.09.8.01.0002 - Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Rp.187.054.302,00	Rp.165.012.979,00	88,22
	2.22.09.8.02.0001 - Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Rp.65.165.900,00	Rp.55.656.707,00	85,41
	2.22.09.8.02.0002 - Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Rp.463.272.491,00	Rp.435.451.264,00	93,99
	2.22.09.8.03.0003 - Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Rp.303.412.115,00	Rp.274.590.557,00	90,50
	TOTAL ALOKASI MANDATORY SPENDING FUNGSI PENDIDIKAN (Rp.)	**Rp.2.603.057.858.136,00**	**Rp.2.168.726.863.718,05**	**83,31**
	TOTAL BELANJA DAERAH (Rp.)	**Rp.7.412.970.277.983,60**	**Rp.6.555.001.412.634,62**	**88,42**
	PERSENTASE ALOKASI MANDATORY SPENDING FUNGSI PENDIDIKAN (MINIMAL 20%)	**35,11%**	**33,09%**	

Pemerintah Provinsi Bali
Laporan Tematik
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
Per 31 Desember 2025

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
1	**1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**	**Rp.233.304.931.884,00**	**Rp.218.372.188.104,08**	**93,60**
	1.01.02.1.01.0001 - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Rp.68.000.000.000,00	Rp.66.250.897.900,00	97,43
	1.01.02.1.01.0012 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Rp.3.000.000.000,00	Rp.2.887.436.700,00	96,25
	1.01.02.1.01.0036 - Pengadaan Mebel Sekolah	Rp.1.980.000.000,00	Rp.1.910.480.000,00	96,49
	1.01.02.1.01.0041 - Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp.382.366.000,00	Rp.381.824.003,00	99,86
	1.01.02.1.01.0052 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Rp.125.380.000,00	Rp.113.656.250,00	90,65
	1.01.02.1.01.0060 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp.76.299.900,00	Rp.68.166.750,00	89,34
	1.01.02.1.01.0072 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp.8.871.116.400,00	Rp.8.533.684.208,00	96,20
	1.01.02.1.01.0078 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp.10.881.822.600,00	Rp.6.856.017.757,00	63,00
	1.01.02.1.02.0001 - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Rp.22.612.384.000,00	Rp.21.545.770.400,00	95,28
	1.01.02.1.02.0010 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp.11.150.616.000,00	Rp.10.642.894.000,00	95,45
	1.01.02.1.02.0028 - Pengadaan Mebel Sekolah	Rp.3.914.925.900,00	Rp.3.630.371.550,00	92,73
	1.01.02.1.02.0033 - Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp.47.370.185.000,00	Rp.47.227.767.258,58	99,70
	1.01.02.1.02.0042 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rp.16.854.550.194,00	Rp.14.554.422.576,00	86,35
	1.01.02.1.02.0053 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp.37.600.000,00	Rp.34.193.690,00	90,94
	1.01.02.1.02.0069 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Rp.4.012.000.000,00	Rp.3.944.381.000,00	98,31
	1.01.02.1.02.0072 - Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Rp.9.211.539.880,00	Rp.7.612.930.980,00	82,65
	1.01.02.1.03.0008 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp.1.880.000.000,00	Rp.1.751.895.534,72	93,19
	1.01.02.1.03.0044 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Rp.3.523.966.200,00	Rp.3.346.270.232,00	94,96
	1.01.02.1.03.0049 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Rp.3.487.687.843,00	Rp.3.174.730.130,00	91,03
	1.01.02.1.03.0059 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp.90.910.000,00	Rp.80.278.760,00	88,31
	1.01.02.1.03.0069 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp.1.918.000.000,00	Rp.1.799.264.297,78	93,81
	1.01.02.1.03.0071 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Rp.362.880.000,00	Rp.344.459.478,00	94,92
	1.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.77.429.500,00	Rp.50.693.815,00	65,47
	1.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.107.771.400,00	Rp.59.860.062,00	55,54
	1.01.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp.145.430.500,00	Rp.132.822.023,00	91,33
	1.01.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.766.145.000,00	Rp.734.137.300,00	95,82
	1.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.616.832.360,00	Rp.562.497.184,00	91,19
	1.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.95.000.000,00	Rp.89.357.500,00	94,06
	1.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.10.840.000,00	Rp.8.916.390,00	82,25
	1.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.31.526.250,00	Rp.26.352.000,00	83,59
	1.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.978.222.150,00	Rp.807.419.687,00	82,54
	1.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.7.531.089.807,00	Rp.6.199.873.407,00	82,32
	1.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.954.685.000,00	Rp.812.833.100,00	85,14
	1.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.1.977.200.000,00	Rp.1.928.174.269,00	97,52
	1.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.268.530.000,00	Rp.267.457.912,00	99,60
2	**1.01.2.19.0.00.01.0001 - UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan**	**Rp.1.970.350.065,00**	**Rp.1.887.789.421,00**	**95,81**
	1.01.02.1.01.0057 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp.94.290.000,00	Rp.93.472.000,00	99,13
	1.01.02.1.01.0058 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Rp.14.040.000,00	Rp.13.968.000,00	99,49
	1.01.02.1.01.0059 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp.31.636.000,00	Rp.28.665.286,00	90,61
	1.01.02.1.01.0078 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp.545.681.000,00	Rp.528.378.796,00	96,83
	1.01.02.1.02.0050 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp.77.760.000,00	Rp.77.142.000,00	99,21
	1.01.02.1.02.0051 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Rp.13.950.000,00	Rp.11.680.000,00	83,73
	1.01.02.1.02.0052 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp.31.374.000,00	Rp.30.870.286,00	98,39
	1.01.02.1.02.0072 - Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Rp.354.631.000,00	Rp.339.110.796,00	95,62
	1.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.139.084.200,00	Rp.110.776.312,00	79,65
	1.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.3.499.600,00	Rp.2.804.380,00	80,13
	1.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.556.164.265,00	Rp.556.164.265,00	100,00
	1.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.98.400.000,00	Rp.85.532.300,00	86,92
	1.01.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	Rp.1.440.000,00	Rp.1.350.000,00	93,75
	1.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.8.400.000,00	Rp.7.875.000,00	93,75
3	**1.01.2.19.0.00.01.0002 - UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan**	**Rp.558.468.635,00**	**Rp.491.855.978,00**	**88,07**
	1.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.8.613.000,00	Rp.6.162.900,00	71,55
	1.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.6.547.600,00	Rp.3.960.812,00	60,49
	1.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.452.498.035,00	Rp.423.198.166,00	93,52
	1.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.90.810.000,00	Rp.58.534.100,00	64,46
4	**1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan**	**Rp.9.306.077.745,00**	**Rp.7.258.236.435,23**	**77,99**
	1.02.02.1.02.0025 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Rp.37.500.000,00	Rp.15.250.000,00	40,67
	1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp.73.251.405,00	Rp.66.817.703,00	91,22
	1.02.02.1.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp.101.876.540,00	Rp.101.445.890,00	99,58
	1.02.02.1.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp.94.839.680,00	Rp.82.849.760,00	87,36
	1.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.51.666.800,00	Rp.36.366.216,00	70,39
	1.02.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.29.457.705,00	Rp.29.332.705,00	99,58
	1.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.8.583.700,00	Rp.4.160.098,00	48,47
	1.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.1.061.851.700,00	Rp.810.835.658,00	76,36
	1.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.273.968.394,00	Rp.267.147.300,00	97,51
	1.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.90.081.400,00	Rp.66.186.251,00	73,47
	1.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.484.500.000,00	Rp.232.926.815,00	48,08
	1.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.5.582.328.921,00	Rp.4.891.832.211,00	87,63
	1.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.515.400.000,00	Rp.224.796.809,00	43,62
	1.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.141.169.500,00	Rp.77.988.600,00	55,24
	1.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.759.602.000,00	Rp.350.300.419,23	46,12
5	**1.02.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa**	**Rp.9.683.150.316,00**	**Rp.5.454.089.416,68**	**56,33**
	1.02.02.1.01.0007 - Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Rp.139.008.800,00	Rp.139.008.800,00	100,00
	1.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.67.379.000,00	Rp.32.301.000,00	47,94
	1.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.410.045.300,00	Rp.352.641.339,00	86,00
	1.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.644.000.000,00	Rp.513.286.529,00	79,70
	1.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.875.547.216,00	Rp.816.397.766,00	93,24
	1.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.108.100.000,00	Rp.74.180.301,00	68,62
	1.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.146.070.000,00	Rp.101.505.694,00	69,49
	1.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.93.000.000,00	Rp.91.825.242,18	98,74

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
	1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp.7.200.000.000,00	Rp.3.332.942.745,50	46,29
6	**1.02.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat**	**Rp.5.542.997.592,00**	**Rp.5.125.048.848,90**	**92,46**
	1.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.17.924.000,00	Rp.17.923.900,00	100,00
	1.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.111.911.800,00	Rp.97.789.775,00	87,38
	1.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.155.458.100,00	Rp.141.362.800,00	90,93
	1.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.6.134.000,00	Rp.5.480.000,00	89,34
	1.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.363.900.000,00	Rp.234.588.159,00	64,47
	1.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.745.574.692,00	Rp.731.178.069,00	98,07
	1.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.39.175.000,00	Rp.23.479.904,00	59,94
	1.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.52.920.000,00	Rp.34.337.004,00	64,88
	1.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.1.050.000.000,00	Rp.1.016.029.130,60	96,76
	1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp.3.000.000.000,00	Rp.2.822.880.107,30	94,10
7	**1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional**	**Rp.7.969.122.832,00**	**Rp.6.712.624.359,00**	**84,23**
	1.02.02.1.02.0023 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp.3.374.682.883,00	Rp.2.845.048.226,00	84,31
	1.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.5.015.500,00	Rp.4.761.900,00	94,94
	1.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.1.629.400.514,00	Rp.1.271.445.498,00	78,03
	1.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.202.695.800,00	Rp.199.445.000,00	98,40
	1.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.19.790.800,00	Rp.13.969.600,00	70,59
	1.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.98.500.000,00	Rp.67.243.555,00	68,27
	1.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.939.542.395,00	Rp.928.239.715,00	98,80
	1.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.263.900.000,00	Rp.160.235.905,00	60,72
	1.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.52.490.000,00	Rp.31.327.401,00	59,68
	1.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.1.383.104.940,00	Rp.1.190.907.559,00	86,10
8	**1.02.0.00.0.00.01.0004 - RSUD Bali Mandara**	**Rp.279.657.255.619,00**	**Rp.255.557.744.092,96**	**91,38**
	1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp.45.978.212.000,00	Rp.45.923.500.000,00	99,88
	1.02.02.1.01.0026 - Pengembangan Rumah Sakit	Rp.8.277.374.205,00	Rp.8.092.853.133,00	97,77
	1.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.25.401.669.414,00	Rp.24.230.316.496,00	95,39
	1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp.200.000.000.000,00	Rp.177.311.074.463,96	88,66
9	**1.02.0.00.0.00.01.0005 - Rumah Sakit Jiwa**	**Rp.54.906.260.683,00**	**Rp.45.583.888.609,12**	**83,02**
	1.02.02.1.01.0026 - Pengembangan Rumah Sakit	Rp.16.659.813.670,00	Rp.14.936.303.825,00	89,65
	1.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.1.114.110.402,00	Rp.901.268.545,00	80,90
	1.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.9.132.336.611,00	Rp.8.897.009.714,00	97,42
	1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp.28.000.000.000,00	Rp.20.849.306.525,12	74,46
10	**1.02.0.00.0.00.01.0006 - Rumah Sakit Mata Bali Mandara**	**Rp.93.000.000.000,00**	**Rp.83.981.802.498,25**	**90,30**
	1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp.93.000.000.000,00	Rp.83.981.802.498,25	90,30
11	**1.02.0.00.0.00.01.0007 - UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan**	**Rp.9.181.695.802,00**	**Rp.6.514.283.805,00**	**70,95**
	1.02.02.1.01.0025 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Rp.360.783.000,00	Rp.179.684.000,00	49,80
	1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Rp.4.392.453.430,00	Rp.2.745.476.154,00	62,50
	1.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.11.575.400,00	Rp.9.768.000,00	84,39
	1.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.255.392.200,00	Rp.217.536.400,00	85,18
	1.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.408.786.200,00	Rp.341.215.200,00	83,47
	1.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.3.720.300,00	Rp.2.065.000,00	55,51
	1.02.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	Rp.56.126.200,00	Rp.52.470.000,00	93,49
	1.02.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.950.000.000,00	Rp.778.780.002,00	81,98
	1.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.780.000.000,00	Rp.379.120.071,00	48,61
	1.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.983.217.972,00	Rp.941.926.480,00	95,80
	1.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.40.800.000,00	Rp.36.205.806,00	88,74
	1.02.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	Rp.57.000.000,00	Rp.34.315.650,00	60,20
	1.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.389.841.100,00	Rp.315.287.200,00	80,88
	1.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.492.000.000,00	Rp.480.433.842,00	97,65
12	**1.02.0.00.0.00.01.0008 - Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya**	**Rp.33.472.419.456,00**	**Rp.23.911.827.806,82**	**71,44**
	1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp.1.944.262.582,00	Rp.1.300.536.467,00	66,89
	1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Rp.3.601.134.200,00	Rp.643.518.347,40	17,87
	1.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.1.206.619.050,00	Rp.946.632.807,00	78,45
	1.02.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	Rp.217.865.000,00	Rp.114.177.544,00	52,41
	1.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.325.000.000,00	Rp.122.502.960,00	37,69
	1.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.586.753.000,00	Rp.0,00	0,00
	1.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.174.000.000,00	Rp.104.661.400,00	60,15
	1.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.271.900.000,00	Rp.102.126.141,00	37,56
	1.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.1.280.000.000,00	Rp.686.417.118,00	53,63
	1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp.23.864.885.624,00	Rp.19.891.255.022,42	83,35
13	**1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**Rp.535.903.661.431,00**	**Rp.479.484.527.754,00**	**89,47**
	1.03.02.1.01.0082 - Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Rp.216.563.500,00	Rp.209.303.050,00	96,65
	1.03.02.1.01.0096 - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Rp.11.293.200.000,00	Rp.9.425.961.300,00	83,47
	1.03.02.1.01.0105 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Rp.310.353.300,00	Rp.288.699.750,00	93,02
	1.03.02.1.01.0121 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Rp.209.216.200,00	Rp.208.203.836,00	99,52
	1.03.02.1.01.0122 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Rp.570.738.220,00	Rp.545.005.574,00	95,49
	1.03.02.1.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp.9.527.085.215,00	Rp.8.945.211.922,00	93,89
	1.03.02.1.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp.3.354.753.009,00	Rp.3.252.363.763,00	96,95
	1.03.02.1.02.0032 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Rp.1.472.533.935,00	Rp.1.295.657.178,00	87,99
	1.03.03.1.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Rp.1.517.285.649,00	Rp.1.373.224.943,00	90,51
	1.03.03.1.01.0017 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Rp.29.543.323.255,00	Rp.23.189.545.990,00	78,49
	1.03.05.1.01.0013 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Rp.3.167.010.552,00	Rp.2.229.748.415,00	70,41
	1.03.05.1.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp.258.946.400,00	Rp.240.206.137,00	92,76
	1.03.07.1.01.0031 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Rp.2.762.994.300,00	Rp.2.177.847.786,00	78,82
	1.03.09.1.01.0008 - Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Rp.203.922.650.800,00	Rp.190.906.210.670,00	93,62
	1.03.09.1.01.0009 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp.6.476.786.500,00	Rp.4.898.627.001,00	75,63
	1.03.10.1.01.0028 - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Rp.79.206.000,00	Rp.64.522.000,00	81,46
	1.03.10.1.01.0030 - Rehabilitasi Jalan	Rp.23.776.643.413,00	Rp.22.887.617.109,00	96,26
	1.03.10.1.01.0031 - Rekonstruksi Jalan	Rp.58.369.753.120,00	Rp.55.719.758.000,00	95,46
	1.03.10.1.01.0033 - Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp.24.248.378.226,00	Rp.22.070.118.421,00	91,02

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
	1.03.10.1.01.0038 - Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp.106.169.930.112,00	Rp.85.359.913.085,00	80,40
	1.03.10.1.01.0040 - Pelebaran Jalan Menuju Standar	Rp.16.099.635.262,00	Rp.14.277.255.377,00	88,68
	1.03.10.1.01.0041 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp.8.909.202.000,00	Rp.8.008.242.564,00	89,89
	1.03.10.1.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Rp.1.655.604.788,00	Rp.1.544.683.254,00	93,30
	1.03.10.1.01.0044 - Pengelolaan Leger Jalan	Rp.100.000.000,00	Rp.99.707.748,00	99,71
	1.03.11.1.01.0014 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Rp.770.597.107,00	Rp.666.816.007,00	86,53
	1.03.11.1.03.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Rp.131.915.802,00	Rp.92.292.756,00	69,96
	1.03.11.1.03.0008 - Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Rp.259.557.625,00	Rp.253.498.380,00	97,67
	1.03.12.1.01.0005 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Rp.36.792.100,00	Rp.17.937.286,00	48,75
	1.03.12.1.02.0006 - Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Rp.231.192.935,00	Rp.171.189.499,00	74,05
	1.03.12.1.03.0004 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp.114.918.425,00	Rp.101.373.025,00	88,21
	1.03.12.1.03.0006 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Rp.39.332.600,00	Rp.34.495.511,00	87,70
	1.03.12.1.04.0014 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Rp.385.439.812,00	Rp.352.284.335,00	91,40
	1.04.02.1.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Rp.88.481.225,00	Rp.88.418.525,00	99,93
	1.04.02.1.01.0008 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Rp.111.749.700,00	Rp.107.668.285,00	96,35
	1.04.02.1.03.0006 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Rp.1.065.829.405,00	Rp.1.040.408.617,00	97,61
	1.04.03.1.02.0003 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp.5.552.140.100,00	Rp.5.474.092.663,00	98,59
	1.04.03.1.02.0014 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp.991.436.000,00	Rp.933.897.924,00	94,20
	1.04.05.1.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Rp.358.918.400,00	Rp.327.729.150,00	91,31
	1.04.05.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Rp.1.173.894.825,00	Rp.1.079.190.575,00	91,93
	1.04.05.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Rp.71.073.000,00	Rp.31.107.330,00	43,77
	2.10.05.1.01.0003 - Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.5.882.758.000,00	Rp.5.216.311.500,00	88,67
	2.10.06.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp.23.521.700,00	Rp.10.370.500,00	44,09
	2.10.10.1.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Rp.207.200.000,00	Rp.174.984.900,00	84,45
	1.03.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.242.784.732,00	Rp.206.610.882,00	85,10
	1.03.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.208.609.412,00	Rp.143.095.312,00	68,59
	1.03.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.22.172.600,00	Rp.18.177.000,00	81,98
	1.03.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.57.485.000,00	Rp.42.401.500,00	73,76
	1.03.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.50.820.120,00	Rp.50.722.000,00	99,81
	1.03.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.66.734.000,00	Rp.47.812.450,00	71,65
	1.03.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.15.816.000,00	Rp.14.696.000,00	92,92
	1.03.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	Rp.82.638.800,00	Rp.79.365.000,00	96,04
	1.03.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.462.242.500,00	Rp.426.953.800,00	92,37
	1.03.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.436.600.000,00	Rp.424.651.205,00	97,26
	1.03.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.49.770.000,00	Rp.49.201.860,00	98,86
	1.03.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.548.895.440,00	Rp.521.664.880,00	95,04
	1.03.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.1.527.199.476,00	Rp.1.453.616.731,00	95,18
	1.03.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.143.863.115,00	Rp.136.352.115,00	94,78
	1.03.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.479.487.719,00	Rp.477.505.378,00	99,59
14	**1.03.1.04.0.00.01.0001 - UPTD Balai Peralatan dan Pengujian**	**Rp.3.602.376.627,00**	**Rp.2.910.415.665,00**	**80,79**
	1.03.11.1.03.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Rp.2.614.977.855,00	Rp.2.085.658.283,00	79,76
	1.03.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.11.782.000,00	Rp.10.975.000,00	93,15
	1.03.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.20.930.200,00	Rp.15.085.500,00	72,08
	1.03.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.32.500.000,00	Rp.31.040.000,00	95,51
	1.03.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.4.638.700,00	Rp.3.425.100,00	73,84
	1.03.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.4.446.000,00	Rp.3.888.000,00	87,45
	1.03.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	Rp.66.640.000,00	Rp.25.641.000,00	38,48
	1.03.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.47.615.500,00	Rp.22.899.300,00	48,09
	1.03.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.80.000.000,00	Rp.40.327.894,00	50,41
	1.03.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.140.000.000,00	Rp.137.524.950,00	98,23
	1.03.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.263.965.060,00	Rp.225.154.326,00	85,30
	1.03.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.23.960.000,00	Rp.22.385.000,00	93,43
	1.03.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.290.921.312,00	Rp.286.411.312,00	98,45
15	**1.03.1.04.0.00.01.0002 - UPTD Pengelolaan Air Minum**	**Rp.43.218.719.622,00**	**Rp.38.315.121.244,00**	**88,65**
	1.03.03.1.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Rp.43.218.719.622,00	Rp.38.315.121.244,00	88,65
16	**1.03.1.04.0.00.01.0003 - UPTD Pengelolaan Air Limbah**	**Rp.18.340.072.150,00**	**Rp.15.310.085.831,00**	**83,48**
	1.03.05.1.01.0018 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp.18.340.072.150,00	Rp.15.310.085.831,00	83,48
17	**1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja**	**Rp.25.314.863.715,00**	**Rp.25.002.422.185,00**	**98,77**
	1.05.02.1.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Rp.29.999.900,00	Rp.778.000,00	2,59
	1.05.02.1.01.0013 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Rp.20.450.348.273,00	Rp.20.443.954.446,00	99,97
	1.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.16.000.000,00	Rp.13.422.015,00	83,89
	1.05.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.5.000.000,00	Rp.4.508.940,00	90,18
	1.05.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.40.706.800,00	Rp.31.088.568,00	76,37
	1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.544.290.200,00	Rp.398.457.112,00	73,21
	1.05.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.106.033.390,00	Rp.94.512.500,00	89,13
	1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.12.301.900,00	Rp.7.788.700,00	63,31
	1.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	Rp.103.985.300,00	Rp.85.924.993,00	82,63
	1.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.165.000.000,00	Rp.128.006.251,00	77,58
	1.05.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.48.720.000,00	Rp.43.474.074,00	89,23
	1.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.679.232.067,00	Rp.677.246.591,00	99,71
	1.05.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.2.839.245.885,00	Rp.2.808.249.782,00	98,91
	1.05.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp.75.000.000,00	Rp.72.788.250,00	97,05
	1.05.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.199.000.000,00	Rp.192.221.963,00	96,59
18	**1.06.2.08.0.00.06.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak**	**Rp.5.129.668.054,00**	**Rp.5.001.350.731,00**	**97,50**
	1.06.06.1.01.0003 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Rp.3.240.000,00	Rp.0,00	0,00
	1.06.07.1.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Rp.329.238.400,00	Rp.317.523.044,00	96,44
	2.08.04.1.02.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Rp.9.958.600,00	Rp.9.220.350,00	92,59
	2.08.05.1.01.0001 - Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Rp.2.732.700,00	Rp.2.678.550,00	98,02
	2.08.06.1.02.0005 - Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.95.200.000,00	Rp.93.797.000,00	98,53

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
	2.08.07.1.03.0006 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Rp.13.743.600,00	Rp.13.705.350,00	99,72
	1.06.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.5.717.600,00	Rp.4.999.567,00	87,44
	1.06.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp.4.952.200,00	Rp.2.971.455,00	60,00
	1.06.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.24.234.800,00	Rp.22.565.700,00	93,11
	1.06.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.7.508.200,00	Rp.6.950.595,00	92,57
	1.06.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.140.288.640,00	Rp.129.645.530,00	92,41
	1.06.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.96.022.700,00	Rp.91.991.250,00	95,80
	1.06.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.5.647.200,00	Rp.1.803.195,00	31,93
	1.06.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.180.000.000,00	Rp.137.176.371,00	76,21
	1.06.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.488.462.484,00	Rp.488.395.444,00	99,99
	1.06.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.1.189.080.364,00	Rp.1.151.961.517,00	96,88
	1.06.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.1.745.930.825,00	Rp.1.745.127.962,00	99,95
	1.06.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.787.709.741,00	Rp.780.837.851,00	99,13
19	**1.06.2.08.0.00.06.0001 - UPTD Pelayanan Sosial**	**Rp.5.430.032.541,00**	**Rp.5.087.449.418,00**	**93,69**
	1.06.04.1.02.0009 - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp.100.000.000,00	Rp.30.810.000,00	30,81
	1.06.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.9.813.400,00	Rp.9.813.400,00	100,00
	1.06.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.169.028.000,00	Rp.166.455.600,00	98,48
	1.06.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.159.941.800,00	Rp.158.150.000,00	98,88
	1.06.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.216.100.000,00	Rp.182.772.326,00	84,58
	1.06.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.337.221.344,00	Rp.327.798.844,00	97,21
	1.06.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.263.322.984,00	Rp.165.652.908,00	62,91
	1.06.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.3.484.397.000,00	Rp.3.374.073.249,00	96,83
	1.06.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.690.208.013,00	Rp.671.923.091,00	97,35
20	**1.06.2.08.0.00.06.0002 - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak**	**Rp.645.389.273,00**	**Rp.488.617.105,00**	**75,71**
	2.08.07.1.03.0008 - Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Rp.69.018.000,00	Rp.62.340.068,00	90,32
	2.08.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.1.528.800,00	Rp.1.507.500,00	98,61
	2.08.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.26.266.900,00	Rp.25.086.000,00	95,50
	2.08.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.5.000.000,00	Rp.4.722.009,00	94,44
	2.08.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.129.131.492,00	Rp.108.747.191,00	84,21
	2.08.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.183.510.884,00	Rp.57.378.661,00	31,27
	2.08.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.230.933.197,00	Rp.228.835.676,00	99,09
21	**1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**Rp.8.892.869.446,00**	**Rp.7.575.481.630,28**	**85,19**
	1.05.03.1.04.0007 - Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Rp.154.667.000,00	Rp.143.905.796,00	93,04
	1.05.03.1.04.0018 - Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Rp.208.097.500,00	Rp.29.975.000,00	14,40
	1.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.34.621.000,00	Rp.15.700.003,00	45,35
	1.05.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.54.301.000,00	Rp.28.420.003,00	52,34
	1.05.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.9.982.800,00	Rp.7.141.000,00	71,53
	1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.116.047.800,00	Rp.74.490.000,00	64,19
	1.05.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.86.229.424,00	Rp.86.216.400,00	99,98
	1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.20.258.600,00	Rp.12.457.040,00	61,49
	1.05.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.868.666.700,00	Rp.798.303.790,00	91,90
	1.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.258.000.000,00	Rp.124.307.561,00	48,18
	1.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.1.037.609.398,00	Rp.969.701.201,00	93,46
	1.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.2.287.969.800,00	Rp.2.070.098.040,00	90,48
	1.05.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.22.380.000,00	Rp.13.252.000,00	59,21
	1.05.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.2.413.504.724,00	Rp.2.141.234.121,28	88,72
	1.05.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.15.000.000,00	Rp.14.919.232,00	99,46
	1.05.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.82.210.000,00	Rp.37.042.600,00	45,06
	1.05.03.1.03.0030 - Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Rp.248.042.000,00	Rp.226.080.000,00	91,15
	1.05.03.1.04.0023 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Rp.89.756.100,00	Rp.62.354.000,00	69,47
	1.05.03.1.02.0030 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Rp.322.469.200,00	Rp.202.291.990,00	62,73
	1.05.03.1.02.0028 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Rp.445.606.400,00	Rp.410.775.103,00	92,18
	1.05.03.1.02.0023 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp.8.175.000,00	Rp.3.318.750,00	40,60
	1.05.03.1.01.0004 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Rp.109.275.000,00	Rp.103.498.000,00	94,71
22	**1.05.0.00.0.00.04.0001 - UPTD Pengendalian Bencana Daerah**	**Rp.7.630.304.443,00**	**Rp.6.748.648.230,00**	**88,45**
	1.05.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.16.846.800,00	Rp.16.758.780,00	99,48
	1.05.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.25.992.300,00	Rp.25.786.800,00	99,21
	1.05.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.1.648.697.100,00	Rp.1.334.227.511,00	80,93
	1.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.240.000.000,00	Rp.117.949.642,00	49,15
	1.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.799.108.674,00	Rp.754.453.418,00	94,41
	1.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.140.800.000,00	Rp.118.181.625,00	83,94
	1.05.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.110.000.000,00	Rp.9.997.972,00	9,09
	1.05.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.312.657.600,00	Rp.255.617.500,00	81,76
	1.05.03.1.02.0029 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp.751.322.000,00	Rp.666.769.570,00	88,75
	1.05.03.1.04.0022 - Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Rp.3.375.620.069,00	Rp.3.330.584.012,00	98,67
	1.05.03.1.02.0030 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Rp.209.259.900,00	Rp.118.321.400,00	56,54
23	**5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	**Rp.5.887.659.766,00**	**Rp.4.998.954.238,77**	**84,91**
	5.02.02.1.06.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Rp.65.933.500,00	Rp.40.859.660,00	61,97
	5.02.03.1.01.0003 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp.22.166.000,00	Rp.17.737.960,00	80,02
	5.02.03.1.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp.214.630.000,00	Rp.176.322.790,00	82,15
	5.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.44.873.000,00	Rp.29.810.200,00	66,43
	5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.17.024.700,00	Rp.13.900.005,00	81,65
	5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.2.733.897.270,00	Rp.2.466.810.097,00	90,23
	5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.239.052.922,00	Rp.177.363.992,00	74,19
	5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.11.930.200,00	Rp.5.113.760,00	42,86
	5.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.7.999.900,00	Rp.6.486.000,00	81,08
	5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.285.300.000,00	Rp.231.357.588,00	81,09
	5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.771.551.076,00	Rp.553.404.486,00	71,73

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
	5.02.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	Rp.6.400.000,00	Rp.6.360.000,00	99,38
	5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.158.637.005,00	Rp.85.423.936,00	53,85
	5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.1.308.264.193,00	Rp.1.188.003.764,77	90,81
24	**5.02.0.00.0.00.02.0001 - UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Rp.3.294.377.044,00**	**Rp.2.389.640.218,65**	**72,54**
	5.02.03.1.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp.2.102.504.000,00	Rp.1.400.827.079,00	66,63
	5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.43.748.500,00	Rp.32.084.799,00	73,34
	5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.9.449.100,00	Rp.6.284.759,00	66,51
	5.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.4.200.000,00	Rp.2.100.000,00	50,00
	5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.57.000.000,00	Rp.6.333.964,00	11,11
	5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.154.525.000,00	Rp.145.719.599,00	94,30
	5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.15.260.000,00	Rp.13.624.250,00	89,28
	5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.907.690.444,00	Rp.782.665.768,65	86,23
25	**2.07.3.29.3.32.01.0000 - Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral**	**Rp.2.900.352.094,00**	**Rp.2.677.201.618,00**	**92,31**
	3.29.02.1.01.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Rp.4.160.000,00	Rp.4.105.260,00	98,68
	2.07.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.14.992.900,00	Rp.13.879.000,00	92,57
	2.07.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.41.179.800,00	Rp.39.035.310,00	94,79
	2.07.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.65.133.994,00	Rp.63.590.000,00	97,63
	2.07.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.15.124.600,00	Rp.10.677.800,00	70,60
	2.07.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.8.614.000,00	Rp.7.482.500,00	86,86
	2.07.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.106.276.700,00	Rp.92.118.900,00	86,68
	2.07.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.394.053.040,00	Rp.298.477.524,00	75,75
	2.07.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.741.404.467,00	Rp.736.529.672,00	99,34
	2.07.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.755.917.508,00	Rp.727.896.869,00	96,29
	2.07.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.213.265.968,00	Rp.158.688.766,00	74,41
	2.07.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.540.229.117,00	Rp.524.720.017,00	97,13
26	**2.07.3.29.0.00.01.0001 - UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata**	**Rp.616.542.828,00**	**Rp.596.128.114,00**	**96,69**
	2.07.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.3.252.600,00	Rp.2.897.100,00	89,07
	2.07.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.6.117.700,00	Rp.5.557.240,00	90,84
	2.07.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.12.899.394,00	Rp.12.244.800,00	94,93
	2.07.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.986.500,00	Rp.690.550,00	70,00
	2.07.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.45.734.260,00	Rp.41.555.450,00	90,86
	2.07.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.24.000.000,00	Rp.21.193.804,00	88,31
	2.07.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.233.489.192,00	Rp.230.172.792,00	98,58
	2.07.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.62.770.000,00	Rp.59.670.409,00	95,06
	2.07.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.35.131.673,00	Rp.31.597.260,00	89,94
	2.07.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.192.161.509,00	Rp.190.548.709,00	99,16
27	**2.07.3.29.0.00.01.0002 - UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja**	**Rp.542.628.904,00**	**Rp.531.942.946,00**	**98,03**
	2.07.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.4.980.300,00	Rp.4.930.000,00	98,99
	2.07.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.7.896.400,00	Rp.7.473.990,00	94,65
	2.07.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.14.944.274,00	Rp.14.616.000,00	97,80
	2.07.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.2.884.000,00	Rp.1.787.160,00	61,97
	2.07.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.12.000.000,00	Rp.9.499.833,00	79,17
	2.07.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.119.220.212,00	Rp.117.182.896,00	98,29
	2.07.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.129.566.492,00	Rp.127.853.936,00	98,68
	2.07.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.15.000.000,00	Rp.14.816.000,00	98,77
	2.07.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.236.137.226,00	Rp.233.783.131,00	99,00
28	**2.13.2.12.2.14.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Rp.4.517.442.669,00**	**Rp.4.200.423.968,00**	**92,98**
	2.13.05.1.01.0004 - Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.2.018.805.710,00	Rp.1.820.952.746,00	90,20
	2.13.05.1.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp.265.604.710,00	Rp.258.921.592,00	97,48
	2.13.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.15.715.000,00	Rp.9.813.407,00	62,45
	2.13.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.157.209.602,00	Rp.153.402.904,00	97,58
	2.13.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.5.992.400,00	Rp.5.311.350,00	88,63
	2.13.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.91.786.700,00	Rp.82.056.010,00	89,40
	2.13.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.75.738.750,00	Rp.75.680.000,00	99,92
	2.13.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.6.048.100,00	Rp.5.114.095,00	84,56
	2.13.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.4.626.600,00	Rp.3.902.500,00	84,35
	2.13.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.6.439.600,00	Rp.5.761.320,00	89,47
	2.13.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.174.800.000,00	Rp.117.551.650,00	67,25
	2.13.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.434.482.069,00	Rp.425.415.889,00	97,91
	2.13.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.1.151.383.428,00	Rp.1.132.781.505,00	98,38
	2.13.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.108.810.000,00	Rp.103.759.000,00	95,36
29	**2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan**	**Rp.7.117.819.319,00**	**Rp.6.444.623.250,00**	**90,54**
	2.15.02.1.05.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Rp.216.395.017,00	Rp.216.195.017,00	99,91
	2.15.02.1.05.0005 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rp.22.500.000,00	Rp.21.500.000,00	95,56
	2.15.02.1.10.0003 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Rp.70.876.000,00	Rp.52.179.800,00	73,62
	2.15.02.1.13.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp.363.091.435,00	Rp.338.724.835,00	93,29
	2.15.03.1.08.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Rp.527.945.725,00	Rp.440.963.500,00	83,52
	2.15.05.1.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Rp.501.276.230,00	Rp.483.107.649,00	96,38
	2.15.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.12.200.000,00	Rp.9.179.000,00	75,24
	2.15.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.25.967.000,00	Rp.20.752.740,00	79,92
	2.15.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.6.993.800,00	Rp.6.779.000,00	96,93
	2.15.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.739.471.694,00	Rp.612.146.786,00	82,78
	2.15.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.75.600.000,00	Rp.75.010.000,00	99,22
	2.15.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.9.253.700,00	Rp.6.254.800,00	67,59
	2.15.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.1.922.000.000,00	Rp.1.922.000.000,00	100,00
	2.15.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	Rp.72.849.000,00	Rp.54.000.013,00	74,13
	2.15.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.295.000.000,00	Rp.222.234.613,00	75,33
	2.15.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.342.775.436,00	Rp.328.885.854,00	95,95
	2.15.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.918.767.984,00	Rp.659.303.873,00	71,76
	2.15.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.73.770.000,00	Rp.60.245.002,00	81,67
	2.15.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.921.086.298,00	Rp.915.160.768,00	99,36

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
30	**2.15.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Pusat Pengendalian LLAJ**	**Rp.2.151.446.085,00**	**Rp.1.719.195.788,00**	**79,91**
	2.15.02.1.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp.596.800.000,00	Rp.366.693.529,00	61,44
	2.15.02.1.05.0001 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rp.1.192.208.593,00	Rp.1.102.396.970,00	92,47
	2.15.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.4.244.400,00	Rp.4.050.000,00	95,42
	2.15.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.70.987.700,00	Rp.62.104.330,00	87,49
	2.15.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.800.000,00	Rp.496.000,00	62,00
	2.15.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.57.860.000,00	Rp.50.979.167,00	88,11
	2.15.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.42.765.792,00	Rp.42.191.692,00	98,66
	2.15.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.167.299.600,00	Rp.75.774.100,00	45,29
	2.15.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.18.480.000,00	Rp.14.510.000,00	78,52
31	**2.15.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita**	**Rp.65.609.688.293,00**	**Rp.53.848.051.038,00**	**82,07**
	2.15.02.1.08.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp.65.065.269.141,00	Rp.53.431.485.806,00	82,12
	2.15.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.915.400,00	Rp.880.000,00	96,13
	2.15.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.148.589.960,00	Rp.133.366.300,00	89,75
	2.15.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.20.324.588,00	Rp.16.193.600,00	79,67
	2.15.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.9.876.000,00	Rp.9.234.400,00	93,50
	2.15.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	Rp.23.685.000,00	Rp.7.500.000,00	31,67
	2.15.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.33.300.000,00	Rp.20.274.828,00	60,89
	2.15.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.40.910.892,00	Rp.40.456.492,00	98,89
	2.15.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.248.677.312,00	Rp.179.549.612,00	72,20
	2.15.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.18.140.000,00	Rp.9.110.000,00	50,22
32	**2.15.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Perlengkapan Jalan**	**Rp.3.652.029.402,00**	**Rp.3.298.876.617,00**	**90,33**
	2.15.02.1.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Rp.2.586.181.610,00	Rp.2.337.376.633,00	90,38
	2.15.02.1.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp.840.412.420,00	Rp.773.809.792,00	92,08
	2.15.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.5.276.800,00	Rp.4.154.000,00	78,72
	2.15.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.60.454.080,00	Rp.54.700.800,00	90,48
	2.15.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.150.654.492,00	Rp.120.890.392,00	80,24
	2.15.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.9.050.000,00	Rp.7.945.000,00	87,79
33	**2.15.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan**	**Rp.242.423.860,00**	**Rp.198.627.308,00**	**81,93**
	2.15.03.1.09.0004 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Rp.56.582.200,00	Rp.52.746.000,00	93,22
	2.15.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.57.137.660,00	Rp.51.855.000,00	90,75
	2.15.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.2.320.000,00	Rp.1.438.400,00	62,00
	2.15.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.120.984.000,00	Rp.90.487.908,00	74,79
	2.15.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.5.400.000,00	Rp.2.100.000,00	38,89
34	**2.16.2.20.2.21.02.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**	**Rp.184.523.100.524,00**	**Rp.94.753.779.823,68**	**51,35**
	2.21.02.1.01.0003 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp.10.312.800,00	Rp.9.401.500,00	91,16
	2.16.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.18.173.700,00	Rp.14.027.700,00	77,19
	2.16.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.13.890.300,00	Rp.10.847.900,00	78,10
	2.16.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.15.443.000,00	Rp.14.700.000,00	95,19
	2.16.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.42.914.800,00	Rp.33.272.250,00	77,53
	2.16.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.87.500.000,00	Rp.76.016.000,00	86,88
	2.16.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.13.670.400,00	Rp.6.840.300,00	50,04
	2.16.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.31.522.600,00	Rp.29.568.000,00	93,80
	2.16.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	Rp.199.037.500,00	Rp.133.772.550,00	67,21
	2.16.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.580.000.000,00	Rp.352.620.129,95	60,80
	2.16.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.688.390.980,00	Rp.657.654.989,00	95,54
	2.16.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.418.943.500,00	Rp.321.301.360,00	76,69
	2.16.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.180.000.000,00	Rp.179.760.000,00	99,87
	2.16.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.2.153.928.888,00	Rp.1.907.224.191,00	88,55
	2.16.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	Rp.3.600.000,00	Rp.3.000.000,00	83,33
	2.16.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.99.490.000,00	Rp.60.844.346,00	61,16
	2.16.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.781.886.036,00	Rp.777.269.357,00	99,41
	2.16.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.86.180.000,00	Rp.84.820.399,00	98,42
	2.16.03.1.02.0029 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Rp.157.949.018.500,00	Rp.72.298.712.071,73	45,77
	2.16.03.1.02.0030 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.18.278.810.100,00	Rp.16.861.220.062,00	92,24
	2.16.03.1.02.0025 - Koordinasi penyusunan proses bisnis	Rp.2.588.539.600,00	Rp.661.923.955,00	25,57
	2.20.02.1.01.0011 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Rp.91.192.610,00	Rp.85.334.793,00	93,58
	2.20.02.1.01.0008 - Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Rp.98.217.405,00	Rp.89.767.224,00	91,40
	2.20.02.1.01.0007 - Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Rp.92.437.805,00	Rp.83.880.746,00	90,74
35	**2.16.2.20.2.21.02.0001 - UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital**	**Rp.7.513.820.490,00**	**Rp.6.103.582.442,00**	**81,23**
	2.16.03.1.02.0016 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Rp.3.414.422.240,00	Rp.2.680.052.865,00	78,49
	2.16.03.1.02.0014 - Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Rp.4.099.398.250,00	Rp.3.423.529.577,00	83,51
36	**2.16.2.20.2.21.02.0002 - UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali**	**Rp.17.127.079.150,00**	**Rp.12.813.759.031,25**	**74,82**
	2.16.03.1.02.0018 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Rp.10.003.000.592,00	Rp.6.518.442.212,00	65,16
	2.16.03.1.02.0019 - Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.7.124.078.558,00	Rp.6.295.316.819,25	88,37
37	**2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**Rp.3.379.398.983,00**	**Rp.3.086.295.820,61**	**91,33**
	2.17.08.1.01.0001 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Rp.174.608.394,00	Rp.161.399.821,00	92,44
	2.17.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.102.343.902,00	Rp.84.564.932,00	82,63
	2.17.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.8.264.900,00	Rp.6.920.800,00	83,74
	2.17.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.10.997.800,00	Rp.9.901.200,00	90,03
	2.17.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.48.405.800,00	Rp.36.311.500,00	75,01
	2.17.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.76.071.194,00	Rp.75.400.000,00	99,12
	2.17.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.21.500.000,00	Rp.14.501.920,00	67,45
	2.17.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.683.055.300,00	Rp.629.293.989,00	92,13
	2.17.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.246.000.000,00	Rp.178.603.990,00	72,60
	2.17.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.700.216.668,00	Rp.690.898.039,00	98,67
	2.17.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.788.476.657,00	Rp.707.253.857,00	89,70
	2.17.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.49.920.000,00	Rp.33.605.250,00	67,32
	2.17.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.469.538.368,00	Rp.457.640.522,61	97,47
38	**2.17.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**	**Rp.473.909.894,00**	**Rp.413.860.456,00**	**87,33**
	2.17.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.699.600,00	Rp.616.050,00	88,06
	2.17.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.13.146.100,00	Rp.7.954.360,00	60,51
	2.17.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.56.904.050,00	Rp.56.404.040,00	99,12
	2.17.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.999.700,00	Rp.299.700,00	29,98
	2.17.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.48.500.000,00	Rp.14.491.034,00	29,88
	2.17.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.160.265.968,00	Rp.160.487.714,00	100,14

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
	2.17.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.101.191.492,00	Rp.94.856.592,00	93,74
	2.17.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.2.070.000,00	Rp.1.885.000,00	91,06
	2.17.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.90.132.984,00	Rp.76.865.966,00	85,28
39	**2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**Rp.2.609.038.484,00**	**Rp.2.236.719.459,00**	**85,73**
	2.18.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.5.073.400,00	Rp.4.131.000,00	81,42
	2.18.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.73.134.300,00	Rp.52.886.398,00	72,31
	2.18.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.70.000.000,00	Rp.69.944.500,00	99,92
	2.18.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.24.133.700,00	Rp.16.276.480,00	67,44
	2.18.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.152.000.000,00	Rp.130.971.783,00	86,17
	2.18.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.1.105.108.724,00	Rp.1.091.150.101,00	98,74
	2.18.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.926.700.460,00	Rp.809.976.400,00	87,40
	2.18.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.252.887.900,00	Rp.61.382.797,00	24,27
40	**2.22.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan**	**Rp.49.110.654.291,00**	**Rp.46.993.605.052,31**	**95,69**
	2.22.02.1.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp.1.267.700.522,00	Rp.920.004.475,00	72,57
	2.22.02.1.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Rp.15.400.739.935,00	Rp.14.775.790.479,00	95,94
	2.22.02.1.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Rp.25.467.753.050,00	Rp.25.365.032.428,00	99,60
	2.22.04.1.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Rp.144.883.000,00	Rp.144.078.300,00	99,44
	2.22.05.1.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya	Rp.167.324.115,00	Rp.162.226.160,00	96,95
	2.22.05.1.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya	Rp.274.241.876,00	Rp.252.075.937,00	91,92
	2.22.05.1.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya	Rp.52.108.700,00	Rp.44.498.640,00	85,40
	2.22.05.1.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya	Rp.114.107.300,00	Rp.100.326.757,00	87,92
	2.22.05.1.02.0004 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Rp.90.610.900,00	Rp.80.048.164,00	88,34
	2.22.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.90.191.520,00	Rp.85.546.910,00	94,85
	2.22.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.4.174.500,00	Rp.3.426.133,00	82,07
	2.22.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp.2.000.000,00	Rp.1.417.980,00	70,90
	2.22.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.27.085.500,00	Rp.20.067.478,00	74,09
	2.22.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.1.562.007.227,00	Rp.1.378.899.101,00	88,28
	2.22.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.105.000.000,00	Rp.96.377.850,00	91,79
	2.22.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.5.600.000,00	Rp.3.470.264,00	61,97
	2.22.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.22.915.200,00	Rp.19.275.324,00	84,12
	2.22.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.720.000.000,00	Rp.387.693.034,00	53,85
	2.22.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.24.950.000,00	Rp.24.538.770,00	98,35
	2.22.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.926.732.698,00	Rp.725.396.006,00	78,27
	2.22.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.885.787.460,00	Rp.749.610.628,00	84,63
	2.22.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.14.950.000,00	Rp.14.793.000,00	98,95
	2.22.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.1.739.790.788,00	Rp.1.639.011.234,31	94,21
41	**2.22.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Taman Budaya**	**Rp.8.233.019.285,00**	**Rp.3.911.285.683,00**	**47,51**
	2.22.02.1.01.0003 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Rp.370.516.000,00	Rp.350.688.947,00	94,65
	2.22.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.69.997.000,00	Rp.48.427.454,00	69,19
	2.22.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.49.998.700,00	Rp.47.456.420,00	94,92
	2.22.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.5.500.000,00	Rp.1.859.758,00	33,81
	2.22.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.8.340.000,00	Rp.2.732.400,00	32,76
	2.22.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.242.247.950,00	Rp.226.374.528,00	93,45
	2.22.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.985.600.000,00	Rp.658.540.792,00	66,82
	2.22.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.14.930.000,00	Rp.9.547.200,00	63,95
	2.22.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.772.980.843,00	Rp.772.051.341,00	99,88
	2.22.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.65.000.000,00	Rp.49.487.603,00	76,13
	2.22.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.3.519.480.000,00	Rp.18.684.870,00	0,53
	2.22.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.2.128.428.792,00	Rp.1.725.434.370,00	81,07
42	**2.22.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Museum Bali**	**Rp.14.460.915.359,00**	**Rp.5.430.486.159,00**	**37,55**
	2.22.06.1.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Rp.879.170.300,00	Rp.835.664.742,00	95,05
	2.22.06.1.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Rp.1.551.494.500,00	Rp.1.347.952.065,00	86,88
	2.22.06.1.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Rp.168.749.300,00	Rp.145.402.959,00	86,17
	2.22.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.61.517.500,00	Rp.42.879.100,00	69,70
	2.22.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.105.000.000,00	Rp.100.586.700,00	95,80
	2.22.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.8.301.000,00	Rp.6.202.200,00	74,72
	2.22.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.5.402.000,00	Rp.3.953.000,00	73,18
	2.22.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.429.308.200,00	Rp.281.291.106,00	65,52
	2.22.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.256.000.000,00	Rp.170.323.999,00	66,53
	2.22.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.19.264.840,00	Rp.11.217.973,00	58,23
	2.22.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.762.752.266,00	Rp.762.752.266,00	100,00
	2.22.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.101.600.000,00	Rp.79.723.604,00	78,47
	2.22.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.157.080.000,00	Rp.5.432.748,00	3,46
	2.22.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.9.955.275.453,00	Rp.1.637.103.697,00	16,44
43	**2.22.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali**	**Rp.6.616.789.319,00**	**Rp.5.815.847.004,00**	**87,90**
	2.22.06.1.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Rp.756.260.200,00	Rp.714.862.079,00	94,53
	2.22.06.1.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Rp.2.038.410.200,00	Rp.1.744.508.786,00	85,58
	2.22.06.1.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Rp.264.832.600,00	Rp.213.055.359,00	80,45
	2.22.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.29.995.300,00	Rp.29.406.120,00	98,04
	2.22.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.53.057.000,00	Rp.49.019.709,00	92,39
	2.22.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.51.593.100,00	Rp.50.398.000,00	97,68
	2.22.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.6.777.400,00	Rp.1.316.083,00	19,42
	2.22.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.4.440.000,00	Rp.4.020.000,00	90,54
	2.22.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.35.000.000,00	Rp.33.606.360,00	96,02
	2.22.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.350.000.000,00	Rp.167.905.136,00	47,97
	2.22.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.42.930.000,00	Rp.29.384.658,00	68,45
	2.22.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.842.220.495,00	Rp.701.121.380,00	83,25
	2.22.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.123.975.000,00	Rp.104.620.784,00	84,39
	2.22.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.14.970.000,00	Rp.10.711.547,00	71,55
	2.22.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.2.002.328.024,00	Rp.1.961.911.003,00	97,98
44	**3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan**	**Rp.5.760.371.397,00**	**Rp.5.471.965.579,00**	**94,99**
	3.25.03.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Rp.416.024.197,00	Rp.415.724.197,00	99,93
	3.25.04.1.05.0004 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Rp.159.720.000,00	Rp.155.035.000,00	97,07
	3.25.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.36.018.000,00	Rp.32.897.104,00	91,34
	3.25.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.7.459.500,00	Rp.4.871.790,00	65,31
	3.25.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.728.957.900,00	Rp.707.600.000,00	97,07
	3.25.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.189.642.400,00	Rp.148.340.993,00	78,22
	3.25.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.18.923.500,00	Rp.10.445.211,00	55,20
	3.25.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.267.565.620,00	Rp.263.730.000,00	98,57
	3.25.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.158.050.000,00	Rp.133.375.418,00	84,39
	3.25.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.964.364.936,00	Rp.932.963.636,00	96,74

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
	3.25.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.2.738.415.344,00	Rp.2.608.035.180,00	95,24
	3.25.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.75.230.000,00	Rp.58.947.050,00	78,36
45	**3.25.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut**	**Rp.1.437.590.254,00**	**Rp.1.349.922.534,00**	**93,90**
	3.25.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.4.664.000,00	Rp.4.400.000,00	94,34
	3.25.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.7.117.200,00	Rp.5.970.500,00	83,89
	3.25.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.32.500.000,00	Rp.30.306.540,00	93,25
	3.25.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.1.996.000,00	Rp.1.237.520,00	62,00
	3.25.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.38.554.200,00	Rp.34.500.000,00	89,48
	3.25.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.128.599.200,00	Rp.89.231.002,00	69,39
	3.25.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.166.497.984,00	Rp.155.300.684,00	93,27
	3.25.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.265.346.476,00	Rp.260.198.094,00	98,06
	3.25.04.1.06.0003 - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp.792.315.194,00	Rp.768.778.194,00	97,03
46	**3.25.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan**	**Rp.619.918.858,00**	**Rp.556.840.002,00**	**89,82**
	3.25.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.8.433.000,00	Rp.5.810.000,00	68,90
	3.25.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.32.500.000,00	Rp.30.721.180,00	94,53
	3.25.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.1.000.000,00	Rp.700.000,00	70,00
	3.25.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.37.072.080,00	Rp.36.800.000,00	99,27
	3.25.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.117.000.000,00	Rp.84.161.868,00	71,93
	3.25.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.92.232.000,00	Rp.69.730.500,00	75,60
	3.25.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.316.901.778,00	Rp.315.076.654,00	99,42
	3.25.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.14.780.000,00	Rp.13.839.800,00	93,64
47	**3.25.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali**	**Rp.898.970.152,00**	**Rp.769.703.729,00**	**85,62**
	3.25.02.1.01.0002 - Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Rp.44.960.000,00	Rp.38.694.000,00	86,06
	3.25.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.4.366.900,00	Rp.3.227.880,00	73,92
	3.25.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.8.286.000,00	Rp.7.412.021,00	89,45
	3.25.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.41.500.000,00	Rp.36.435.225,00	87,80
	3.25.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.15.804.200,00	Rp.12.624.795,00	79,88
	3.25.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.16.500.000,00	Rp.2.602.840,00	15,77
	3.25.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.133.600.000,00	Rp.95.108.545,00	71,19
	3.25.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.633.953.052,00	Rp.573.598.423,00	90,48
48	**3.25.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Pelabuhan Perikanan**	**Rp.266.558.725,00**	**Rp.236.907.190,00**	**88,88**
	3.25.03.1.06.0003 - Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Rp.23.854.000,00	Rp.20.690.944,00	86,74
	3.25.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.26.835.900,00	Rp.20.098.321,00	74,89
	3.25.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.32.500.000,00	Rp.30.103.252,00	92,63
	3.25.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.20.445.200,00	Rp.18.750.000,00	91,71
	3.25.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.12.000.000,00	Rp.5.211.968,00	43,43
	3.25.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.127.800.000,00	Rp.124.775.000,00	97,63
	3.25.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.23.123.625,00	Rp.17.277.705,00	74,72
49	**3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata**	**Rp.12.832.068.978,00**	**Rp.3.570.135.148,00**	**27,82**
	3.26.02.1.03.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp.149.195.900,00	Rp.68.669.831,00	46,03
	3.26.03.1.01.0005 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp.289.838.394,00	Rp.288.291.029,00	99,47
	3.26.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.90.441.402,00	Rp.84.148.885,00	93,04
	3.26.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.7.216.600,00	Rp.5.346.000,00	74,08
	3.26.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.621.745.088,00	Rp.572.037.662,00	92,01
	3.26.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.69.617.494,00	Rp.64.737.200,00	92,99
	3.26.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.9.882.600,00	Rp.6.290.338,00	63,65
	3.26.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.182.008.200,00	Rp.116.775.447,00	64,16
	3.26.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.10.332.496.300,00	Rp.1.371.484.055,00	13,27
	3.26.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.577.947.000,00	Rp.504.439.259,00	87,28
	3.26.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.501.680.000,00	Rp.487.915.442,00	97,26
50	**3.27.2.09.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	**Rp.33.357.331.201,00**	**Rp.32.743.085.586,00**	**98,16**
	2.09.05.1.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Rp.84.535.015,00	Rp.83.709.945,00	99,02
	3.27.02.1.01.0001 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Rp.15.137.996.310,00	Rp.15.113.591.956,00	99,84
	3.27.02.1.04.0001 - Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Rp.12.043.454.132,00	Rp.11.985.602.212,00	99,52
	3.27.03.1.01.0001 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Rp.543.948.422,00	Rp.542.709.977,00	99,77
	3.27.03.1.01.0009 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Rp.1.010.261.800,00	Rp.910.107.950,00	90,09
	3.27.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.296.633.227,00	Rp.291.753.727,00	98,36
	3.27.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.188.487.922,00	Rp.179.516.580,00	95,24
	3.27.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.245.687.540,00	Rp.239.817.210,00	97,61
	3.27.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.19.263.000,00	Rp.13.068.000,00	67,84
	3.27.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.212.430.700,00	Rp.178.051.360,00	83,82
	3.27.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.67.003.400,00	Rp.63.300.560,00	94,47
	3.27.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.417.000.000,00	Rp.343.321.313,00	82,33
	3.27.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.341.687.236,00	Rp.341.176.411,00	99,85
	3.27.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.1.944.486.888,00	Rp.1.665.328.388,00	85,64
	3.27.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.593.655.609,00	Rp.586.255.599,00	98,75
	3.27.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.210.800.000,00	Rp.205.774.398,00	97,62
51	**3.27.2.09.0.00.01.0009 - UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan**	**Rp.878.972.708,00**	**Rp.805.184.142,00**	**91,61**
	2.09.05.1.01.0006 - Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Rp.246.234.104,00	Rp.200.332.494,00	81,36
	2.09.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.3.927.800,00	Rp.3.901.000,00	99,32
	2.09.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.31.702.360,00	Rp.26.950.209,00	85,01
	2.09.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.32.500.000,00	Rp.31.904.000,00	98,17
	2.09.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.127.230.000,00	Rp.125.188.795,00	98,40
	2.09.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.124.254.476,00	Rp.124.131.476,00	99,90
	2.09.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.185.930.984,00	Rp.173.129.684,00	93,12
	2.09.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.85.132.984,00	Rp.80.132.984,00	94,13
	2.09.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.42.060.000,00	Rp.39.513.500,00	93,95
52	**3.27.2.09.0.00.01.0012 - UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**	**Rp.1.139.927.251,00**	**Rp.1.059.623.954,00**	**92,96**
	3.27.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.599.900,00	Rp.531.500,00	88,60
	3.27.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.5.056.000,00	Rp.3.919.520,00	77,52
	3.27.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.50.000.000,00	Rp.49.600.000,00	99,20
	3.27.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.220.520.000,00	Rp.168.269.006,00	76,31

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
	3.27.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.204.364.660,00	Rp.204.160.960,00	99,90
	3.27.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.245.299.476,00	Rp.229.706.376,00	93,64
	3.27.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.408.887.215,00	Rp.398.461.592,00	97,45
	3.27.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.5.200.000,00	Rp.4.975.000,00	95,67
53	**3.27.2.09.0.00.01.0013 - UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**	**Rp.2.908.218.025,00**	**Rp.2.591.168.272,00**	**89,10**
	3.27.02.1.04.0004 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Rp.1.951.140.851,00	Rp.1.674.430.833,00	85,82
	3.27.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.6.095.200,00	Rp.5.756.000,00	94,43
	3.27.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.11.126.500,00	Rp.7.075.440,00	63,59
	3.27.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.32.500.000,00	Rp.31.665.800,00	97,43
	3.27.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.66.000.000,00	Rp.41.657.841,00	63,12
	3.27.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.289.015.144,00	Rp.288.861.944,00	99,95
	3.27.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.265.015.968,00	Rp.255.973.868,00	96,59
	3.27.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.282.454.362,00	Rp.281.796.546,00	99,77
	3.27.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.4.870.000,00	Rp.3.950.000,00	81,11
54	**3.27.2.09.0.00.01.0014 - UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**	**Rp.428.638.176,00**	**Rp.348.584.895,00**	**81,32**
	3.27.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.3.197.300,00	Rp.2.364.000,00	73,94
	3.27.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.7.269.200,00	Rp.5.296.444,00	72,86
	3.27.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.32.500.000,00	Rp.32.400.000,00	99,69
	3.27.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.135.109.000,00	Rp.70.697.325,00	52,33
	3.27.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.85.096.184,00	Rp.84.644.984,00	99,47
	3.27.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.133.666.492,00	Rp.123.109.292,00	92,10
	3.27.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.19.950.000,00	Rp.19.000.000,00	95,24
	3.27.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.11.850.000,00	Rp.11.072.850,00	93,44
55	**3.27.2.09.0.00.01.0015 - UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**	**Rp.466.690.851,00**	**Rp.419.240.176,00**	**89,83**
	3.27.02.1.03.0004 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Rp.47.194.200,00	Rp.46.108.200,00	97,70
	3.27.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.1.996.900,00	Rp.1.684.000,00	84,33
	3.27.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.5.998.100,00	Rp.4.968.365,00	82,83
	3.27.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.35.000.000,00	Rp.30.752.000,00	87,86
	3.27.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.117.912.191,00	Rp.81.984.951,00	69,53
	3.27.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.121.021.476,00	Rp.120.883.476,00	99,89
	3.27.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.92.081.492,00	Rp.87.627.292,00	95,16
	3.27.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.42.566.492,00	Rp.42.531.892,00	99,92
	3.27.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.2.920.000,00	Rp.2.700.000,00	92,47
56	**3.28.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**Rp.2.919.956.731,00**	**Rp.2.492.667.582,00**	**85,37**
	2.11.02.1.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Rp.101.639.800,00	Rp.100.847.115,00	99,22
	2.11.04.1.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Rp.40.041.000,00	Rp.300.000,00	0,75
	2.11.05.1.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp.37.816.300,00	Rp.13.245.200,00	35,03
	3.28.03.1.05.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Rp.103.565.115,00	Rp.74.575.557,00	72,01
	3.28.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.37.694.200,00	Rp.23.005.700,00	61,03
	3.28.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.102.479.800,00	Rp.86.351.700,00	84,26
	3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.17.097.000,00	Rp.16.105.000,00	94,20
	3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.362.417.312,00	Rp.277.783.992,00	76,65
	3.28.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.97.000.000,00	Rp.95.705.000,00	98,66
	3.28.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.10.350.000,00	Rp.5.154.195,00	49,80
	3.28.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.208.560.000,00	Rp.191.540.396,00	91,84
	3.28.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.413.283.344,00	Rp.388.234.953,00	93,94
	3.28.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.836.290.360,00	Rp.674.836.044,00	80,69
	3.28.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.390.056.395,00	Rp.389.510.354,00	99,86
	3.28.06.1.01.0008 - Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Rp.161.666.105,00	Rp.155.472.376,00	96,17
57	**3.28.2.11.0.00.01.0001 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara**	**Rp.694.526.804,00**	**Rp.676.905.054,00**	**97,46**
	3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.3.205.900,00	Rp.2.875.100,00	89,68
	3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.10.025.900,00	Rp.9.314.200,00	92,90
	3.28.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.34.650.000,00	Rp.33.296.200,00	96,09
	3.28.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.31.500.000,00	Rp.25.926.967,00	82,31
	3.28.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.43.753.592,00	Rp.43.301.492,00	98,97
	3.28.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.133.427.705,00	Rp.125.200.838,00	93,83
	3.28.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.437.963.707,00	Rp.436.990.257,00	99,78
58	**3.28.2.11.0.00.01.0002 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur**	**Rp.680.499.259,00**	**Rp.639.698.867,00**	**94,00**
	3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.3.129.800,00	Rp.2.830.500,00	90,44
	3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.13.443.900,00	Rp.8.650.000,00	64,34
	3.28.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.37.000.000,00	Rp.34.769.000,00	93,97
	3.28.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.3.698.100,00	Rp.2.203.416,00	59,58
	3.28.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.21.050.000,00	Rp.18.787.559,00	89,25
	3.28.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.72.334.092,00	Rp.63.572.992,00	87,89
	3.28.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.390.888.367,00	Rp.371.387.848,00	95,01
	3.28.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.138.955.000,00	Rp.137.497.552,00	98,95
59	**3.28.2.11.0.00.01.0003 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan**	**Rp.358.423.094,00**	**Rp.345.234.567,00**	**96,32**
	3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.1.373.700,00	Rp.1.059.000,00	77,09
	3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.11.355.700,00	Rp.8.835.200,00	77,80
	3.28.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.25.000.000,00	Rp.24.994.000,00	99,98
	3.28.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.1.707.300,00	Rp.750.000,00	43,93
	3.28.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.8.000.000,00	Rp.6.147.891,00	76,85
	3.28.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.77.841.902,00	Rp.77.250.902,00	99,24
	3.28.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.223.154.492,00	Rp.217.437.574,00	97,44
	3.28.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.9.990.000,00	Rp.8.760.000,00	87,69
60	**3.28.2.11.0.00.01.0004 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat**	**Rp.328.579.476,00**	**Rp.309.846.007,00**	**94,30**
	3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.3.137.000,00	Rp.2.753.910,00	87,79

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
	3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.10.811.900,00	Rp.8.499.600,00	78,61
	3.28.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.34.000.000,00	Rp.33.981.650,00	99,95
	3.28.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.2.502.800,00	Rp.1.908.200,00	76,24
	3.28.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.23.940.000,00	Rp.20.351.217,00	85,01
	3.28.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.44.379.792,00	Rp.43.735.597,00	98,55
	3.28.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.123.425.000,00	Rp.113.431.449,00	91,90
	3.28.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.86.382.984,00	Rp.85.184.384,00	98,61
61	**3.28.2.11.0.00.01.0005 - UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai**	**Rp.1.335.246.827,00**	**Rp.1.069.609.917,00**	**80,11**
	3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.2.530.500,00	Rp.1.802.000,00	71,21
	3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.6.920.800,00	Rp.5.731.000,00	82,81
	3.28.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.15.000.000,00	Rp.13.728.000,00	91,52
	3.28.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.324.000.000,00	Rp.195.421.061,00	60,32
	3.28.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.243.354.292,00	Rp.239.975.480,00	98,61
	3.28.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.112.130.000,00	Rp.57.222.200,00	51,03
	3.28.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.619.341.235,00	Rp.555.730.176,00	89,73
	3.28.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.11.970.000,00	Rp.0,00	0,00
62	**3.28.2.11.0.00.01.0006 - UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup**	**Rp.430.892.490,00**	**Rp.329.750.804,00**	**76,53**
	2.11.03.1.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Rp.284.186.892,00	Rp.240.107.313,00	84,49
	2.11.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.4.866.500,00	Rp.2.665.500,00	54,77
	2.11.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.935.500,00	Rp.0,00	0,00
	2.11.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.75.488.188,00	Rp.41.422.581,00	54,87
	2.11.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.65.415.410,00	Rp.45.555.410,00	69,64
63	**3.28.2.11.0.00.01.0007 - UPTD Pengelolaan Sampah**	**Rp.24.223.522.482,00**	**Rp.16.358.484.536,00**	**67,53**
	2.11.11.1.01.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Rp.23.816.651.520,00	Rp.15.997.849.154,00	67,17
	2.11.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.5.229.000,00	Rp.4.550.000,00	87,01
	2.11.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.11.701.300,00	Rp.7.523.000,00	64,29
	2.11.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.42.000.000,00	Rp.41.449.100,00	98,69
	2.11.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.3.917.000,00	Rp.2.333.450,00	59,57
	2.11.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.225.753.662,00	Rp.195.714.832,00	86,69
	2.11.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.118.270.000,00	Rp.109.065.000,00	92,22
64	**3.31.3.30.0.00.02.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Rp.2.918.213.843,00**	**Rp.2.404.094.150,00**	**82,38**
	3.31.02.1.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp.176.162.000,00	Rp.119.644.010,00	67,92
	3.31.04.1.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Rp.26.959.900,00	Rp.3.360.000,00	12,46
	3.30.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.41.290.800,00	Rp.34.910.655,00	84,55
	3.30.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.18.267.000,00	Rp.14.277.910,00	78,16
	3.30.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.557.763.600,00	Rp.454.182.655,00	81,43
	3.30.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.67.483.394,00	Rp.61.585.500,00	91,26
	3.30.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.14.840.000,00	Rp.10.589.532,00	71,36
	3.30.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.6.424.000,00	Rp.4.542.400,00	70,71
	3.30.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.340.000.000,00	Rp.175.733.657,00	51,69
	3.30.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.429.631.805,00	Rp.397.174.099,00	92,45
	3.30.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.227.194.900,00	Rp.223.310.632,00	98,29
	3.30.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.848.042.460,00	Rp.741.747.377,00	87,47
	3.30.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.164.153.984,00	Rp.163.035.723,00	99,32
65	**3.31.3.30.0.00.02.0001 - UPTD Rumah Kreatif**	**Rp.669.147.857,00**	**Rp.645.633.464,00**	**96,49**
	3.31.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.533.071.660,00	Rp.524.312.345,00	98,36
	3.31.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.1.225.000,00	Rp.0,00	0,00
	3.31.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.3.212.000,00	Rp.2.482.000,00	77,27
	3.31.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.27.587.705,00	Rp.26.177.720,00	94,89
	3.31.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.104.051.492,00	Rp.92.661.399,00	89,05
66	**3.31.3.30.0.00.02.0002 - UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang**	**Rp.371.591.325,00**	**Rp.342.041.741,00**	**92,05**
	3.30.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.1.455.700,00	Rp.1.051.170,00	72,21
	3.30.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.77.451.360,00	Rp.73.270.972,00	94,60
	3.30.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.16.038.040,00	Rp.14.390.400,00	89,73
	3.30.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.2.100.000,00	Rp.467.632,00	22,27
	3.30.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.12.000.000,00	Rp.6.424.500,00	53,54
	3.30.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.141.577.181,00	Rp.139.067.181,00	98,23
	3.30.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.120.969.044,00	Rp.107.369.886,00	88,76
67	**5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Rp.9.058.854.260,00**	**Rp.5.960.858.327,52**	**65,80**
	5.01.02.1.01.0006 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Rp.1.114.761.117,00	Rp.1.010.547.377,00	90,65
	5.01.02.1.03.0004 - Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.156.066.800,00	Rp.111.193.510,00	71,25
	5.01.02.1.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Rp.44.481.300,00	Rp.26.167.690,00	58,83
	5.01.03.1.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp.69.671.910,00	Rp.47.455.395,00	68,11
	5.01.03.1.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp.84.909.605,00	Rp.46.426.307,00	54,68
	5.01.03.1.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp.411.747.307,00	Rp.344.904.770,00	83,77
	5.01.03.1.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp.176.782.102,00	Rp.100.576.199,00	56,89
	5.01.03.1.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp.171.803.907,00	Rp.134.107.771,00	78,06
	5.01.03.1.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp.170.370.402,00	Rp.129.416.249,00	75,96
	5.01.03.1.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp.66.715.405,00	Rp.42.177.970,00	63,22
	5.01.03.1.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rp.132.648.210,00	Rp.97.089.180,00	73,19
	5.01.03.1.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp.198.104.730,00	Rp.154.977.845,00	78,23
	5.01.03.1.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp.50.477.700,00	Rp.28.205.294,00	55,88
	5.01.03.1.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp.174.897.625,00	Rp.130.407.819,00	74,56

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
	5.01.03.1.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rp.51.187.600,00	Rp.43.038.268,00	84,08
	5.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.155.075.999,00	Rp.144.272.468,00	93,03
	5.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.11.474.400,00	Rp.7.091.650,00	61,80
	5.01.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp.11.444.900,00	Rp.5.486.305,00	47,94
	5.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.4.869.600,00	Rp.3.099.228,00	63,64
	5.01.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp.95.670.102,00	Rp.89.018.918,00	93,05
	5.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.47.723.105,00	Rp.42.498.674,00	89,05
	5.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.871.296.032,00	Rp.685.674.478,00	78,70
	5.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.129.063.004,00	Rp.115.173.492,00	89,24
	5.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.40.205.505,00	Rp.31.057.375,00	77,25
	5.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.46.905.705,00	Rp.42.009.705,00	89,56
	5.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	Rp.361.989.600,00	Rp.355.843.800,00	98,30
	5.01.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.49.155.092,00	Rp.45.488.842,00	92,54
	5.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.197.266.492,00	Rp.181.568.781,00	92,04
	5.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.710.497.477,00	Rp.690.904.765,00	97,24
	5.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.729.044.165,00	Rp.540.724.650,00	74,17
	5.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.186.882.705,00	Rp.71.795.285,00	38,42
	5.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.2.335.664.657,00	Rp.462.458.267,52	19,80
68	**5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Pendapatan Daerah**	**Rp.16.292.571.376,00**	**Rp.12.383.544.677,51**	**76,01**
	5.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.20.336.100,00	Rp.13.443.420,00	66,11
	5.02.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.24.941.200,00	Rp.17.129.930,00	68,68
	5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.10.556.000,00	Rp.9.755.800,00	92,42
	5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.318.006.500,00	Rp.244.363.200,00	76,84
	5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.101.575.894,00	Rp.96.821.300,00	95,32
	5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.324.960.300,00	Rp.307.789.000,00	94,72
	5.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.2.428.800,00	Rp.1.987.200,00	81,82
	5.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.218.777.440,00	Rp.183.649.995,00	83,94
	5.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.1.390.847.900,00	Rp.1.070.609.344,00	76,98
	5.02.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.8.232.214.553,00	Rp.5.883.644.843,64	71,47
	5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.387.433.104,00	Rp.280.486.475,00	72,40
	5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.434.453.373,00	Rp.406.757.536,00	93,63
	5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.124.469.592,00	Rp.61.045.936,00	49,04
	5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.1.434.609.652,00	Rp.756.674.902,00	52,74
	5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.465.547.215,00	Rp.445.523.465,00	95,70
	5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.1.666.207.210,00	Rp.1.586.807.153,87	95,23
	5.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.1.135.206.543,00	Rp.1.017.055.177,00	89,59
69	**5.02.0.00.0.00.03.0001 - UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng**	**Rp.1.558.961.271,00**	**Rp.1.448.375.428,00**	**92,91**
	5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.5.259.300,00	Rp.4.698.500,00	89,34
	5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.192.580.600,00	Rp.177.569.060,00	92,21
	5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.25.000.000,00	Rp.22.640.000,00	90,56
	5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.10.239.200,00	Rp.4.686.198,00	45,77
	5.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.4.854.500,00	Rp.4.124.500,00	84,96
	5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.261.000.000,00	Rp.213.237.755,00	81,70
	5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.270.000.000,00	Rp.265.138.376,00	98,20
	5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.47.000.000,00	Rp.42.973.250,00	91,43
	5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.175.714.492,00	Rp.151.677.122,00	86,32
	5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.21.180.000,00	Rp.20.376.600,00	96,21
	5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.529.409.379,00	Rp.527.898.067,00	99,71
	5.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.16.723.800,00	Rp.13.356.000,00	79,86
70	**5.02.0.00.0.00.03.0002 - UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana**	**Rp.1.116.010.700,00**	**Rp.936.259.944,00**	**83,89**
	5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.3.664.700,00	Rp.3.267.000,00	89,15
	5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.129.410.120,00	Rp.98.744.152,00	76,30
	5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.25.000.000,00	Rp.24.135.000,00	96,54
	5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.4.691.900,00	Rp.3.813.014,00	81,27
	5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.181.000.000,00	Rp.145.688.430,00	80,49
	5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.190.000.000,00	Rp.187.558.064,00	98,71
	5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.46.703.000,00	Rp.26.937.220,00	57,68
	5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.154.708.392,00	Rp.94.351.801,00	60,99
	5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.41.020.000,00	Rp.13.755.000,00	33,53
	5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.326.376.788,00	Rp.325.929.016,00	99,86
	5.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.13.435.800,00	Rp.12.081.247,00	89,92
71	**5.02.0.00.0.00.03.0003 - UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan**	**Rp.1.406.519.180,00**	**Rp.1.285.759.845,00**	**91,41**
	5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.6.949.800,00	Rp.5.832.500,00	83,92
	5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.142.850.490,00	Rp.112.489.025,00	78,75
	5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.27.000.000,00	Rp.26.128.500,00	96,77
	5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.6.783.700,00	Rp.6.218.000,00	91,66
	5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.184.000.000,00	Rp.134.178.048,00	72,92
	5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.294.000.000,00	Rp.292.361.080,00	99,44
	5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.45.855.000,00	Rp.40.267.900,00	87,82
	5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.225.937.992,00	Rp.202.980.992,00	89,84
	5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.21.460.000,00	Rp.18.492.500,00	86,17
	5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.435.432.198,00	Rp.433.561.300,00	99,57
	5.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.16.250.000,00	Rp.13.250.000,00	81,54
72	**5.02.0.00.0.00.03.0004 - UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung**	**Rp.2.069.007.003,00**	**Rp.1.852.673.185,00**	**89,54**
	5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.8.924.100,00	Rp.8.687.500,00	97,35
	5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.174.516.890,00	Rp.129.539.008,00	74,23
	5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.25.000.000,00	Rp.23.865.000,00	95,46
	5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.17.186.050,00	Rp.13.741.980,00	79,96
	5.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.4.840.000,00	Rp.3.672.000,00	75,87
	5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.378.000.000,00	Rp.246.676.338,00	65,26
	5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.437.230.947,00	Rp.436.619.624,00	99,86

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
	5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.36.265.000,00	Rp.31.766.300,00	87,59
	5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.188.338.992,00	Rp.163.729.392,00	86,93
	5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.19.920.000,00	Rp.19.730.000,00	99,05
	5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.750.945.024,00	Rp.748.803.330,00	99,71
	5.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.27.840.000,00	Rp.25.842.713,00	92,83
73	**5.02.0.00.0.00.03.0005 - UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar**	**Rp.2.693.715.290,00**	**Rp.2.296.660.843,08**	**85,26**
	5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.4.435.800,00	Rp.4.405.500,00	99,32
	5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.404.759.830,00	Rp.284.582.119,00	70,31
	5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.57.122.194,00	Rp.53.769.000,00	94,13
	5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.65.536.700,00	Rp.46.401.368,00	70,80
	5.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.6.424.000,00	Rp.4.828.500,00	75,16
	5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.474.550.000,00	Rp.326.795.350,00	68,86
	5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.391.923.894,00	Rp.388.680.536,00	99,17
	5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.51.270.800,00	Rp.33.077.604,00	64,52
	5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.226.489.104,00	Rp.177.156.879,00	78,22
	5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.17.040.000,00	Rp.14.450.500,00	84,80
	5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.945.518.368,00	Rp.922.689.037,08	97,59
	5.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.48.644.600,00	Rp.39.824.450,00	81,87
74	**5.02.0.00.0.00.03.0006 - UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar**	**Rp.1.570.800.939,00**	**Rp.1.380.027.195,18**	**87,86**
	5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.16.931.000,00	Rp.16.413.200,00	96,94
	5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.145.966.580,00	Rp.110.037.460,00	75,39
	5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.56.718.634,00	Rp.56.644.000,00	99,87
	5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.22.463.600,00	Rp.10.283.200,00	45,78
	5.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.8.212.500,00	Rp.5.378.400,00	65,49
	5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.250.000.000,00	Rp.186.816.961,00	74,73
	5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.337.094.457,00	Rp.336.000.619,00	99,68
	5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.49.500.000,00	Rp.38.738.100,00	78,26
	5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.147.497.500,00	Rp.108.878.400,00	73,82
	5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.38.300.000,00	Rp.22.025.000,00	57,51
	5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.463.096.668,00	Rp.462.516.855,18	99,87
	5.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.35.020.000,00	Rp.26.295.000,00	75,09
75	**5.02.0.00.0.00.03.0007 - UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli**	**Rp.1.155.488.364,00**	**Rp.940.227.930,00**	**81,37**
	5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.7.009.700,00	Rp.6.202.600,00	88,49
	5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.116.788.300,00	Rp.83.854.220,00	71,80
	5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.29.500.000,00	Rp.28.313.000,00	95,98
	5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.3.399.700,00	Rp.1.951.900,00	57,41
	5.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.3.250.800,00	Rp.2.178.000,00	67,00
	5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.130.000.000,00	Rp.84.906.959,00	65,31
	5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.359.849.487,00	Rp.356.633.408,00	99,11
	5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.47.995.000,00	Rp.39.875.150,00	83,08
	5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.104.518.700,00	Rp.68.801.200,00	65,83
	5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.14.290.000,00	Rp.13.457.000,00	94,17
	5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.330.787.477,00	Rp.246.654.493,00	74,57
	5.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.8.099.200,00	Rp.7.400.000,00	91,37
76	**5.02.0.00.0.00.03.0008 - UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung**	**Rp.1.367.986.089,00**	**Rp.1.189.211.876,00**	**86,93**
	5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.2.660.400,00	Rp.2.564.400,00	96,39
	5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.110.050.400,00	Rp.78.899.800,00	71,69
	5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.30.280.000,00	Rp.30.278.000,00	99,99
	5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.3.674.000,00	Rp.3.584.500,00	97,56
	5.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.2.580.000,00	Rp.1.696.000,00	65,74
	5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.210.000.000,00	Rp.141.710.158,00	67,48
	5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.218.000.000,00	Rp.216.767.272,00	99,43
	5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.42.835.000,00	Rp.26.868.431,00	62,73
	5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.152.991.500,00	Rp.106.206.841,00	69,42
	5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.16.390.000,00	Rp.10.300.550,00	62,85
	5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.560.964.789,00	Rp.554.375.925,00	98,83
	5.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.17.560.000,00	Rp.15.959.999,00	90,89
77	**5.02.0.00.0.00.03.0009 - UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem**	**Rp.1.128.743.389,00**	**Rp.997.172.309,14**	**88,34**
	5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.3.827.100,00	Rp.3.687.500,00	96,35
	5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.122.245.980,00	Rp.92.585.900,00	75,74
	5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.27.837.000,00	Rp.26.732.180,00	96,03
	5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.5.182.900,00	Rp.3.403.125,00	65,66
	5.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.2.175.000,00	Rp.1.440.200,00	66,22
	5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.165.000.000,00	Rp.140.751.714,00	85,30
	5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.237.000.000,00	Rp.234.738.272,00	99,05
	5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.52.490.000,00	Rp.48.443.700,00	92,29
	5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.123.835.592,00	Rp.78.913.992,00	63,72
	5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.21.390.000,00	Rp.10.993.440,00	51,40
	5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.352.455.017,00	Rp.341.168.656,14	96,80
	5.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.15.304.800,00	Rp.14.313.630,00	93,52
78	**5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah**	**Rp.7.219.467.142,00**	**Rp.6.245.013.341,00**	**86,50**
	5.05.02.1.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Rp.394.398.800,00	Rp.365.618.458,00	92,70
	5.05.02.1.03.0003 - Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Rp.231.500.000,00	Rp.228.542.395,00	98,72
	5.05.02.1.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Rp.894.682.000,00	Rp.889.120.770,00	99,38
	5.05.02.1.03.0006 - Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp.234.732.500,00	Rp.231.072.755,00	98,44
	5.05.02.1.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Rp.218.611.000,00	Rp.216.976.619,00	99,25
	5.05.02.1.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Rp.668.500.000,00	Rp.577.873.523,00	86,44
	5.05.02.1.04.0002 - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Rp.167.232.700,00	Rp.153.932.645,00	92,05
	5.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.23.789.000,00	Rp.21.085.500,00	88,64

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
	5.05.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.35.162.000,00	Rp.31.536.531,00	89,69
	5.05.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.21.938.000,00	Rp.13.457.000,00	61,34
	5.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.205.509.000,00	Rp.125.021.000,00	60,83
	5.05.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.107.436.400,00	Rp.88.381.349,00	82,26
	5.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.24.180.200,00	Rp.15.992.200,00	66,14
	5.05.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.14.998.700,00	Rp.12.105.600,00	80,71
	5.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	Rp.607.456.200,00	Rp.452.099.975,00	74,43
	5.05.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.1.070.406.340,00	Rp.771.962.398,00	72,12
	5.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.167.200.000,00	Rp.112.105.709,00	67,05
	5.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.341.506.444,00	Rp.323.500.444,00	94,73
	5.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.784.032.101,00	Rp.708.294.373,00	90,34
	5.05.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.1.006.195.757,00	Rp.906.334.097,00	90,08
79	**4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD**	**Rp.60.015.254.220,00**	**Rp.44.926.926.274,00**	**74,86**
	4.02.02.1.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rp.5.644.015.800,00	Rp.1.697.994.921,00	30,08
	4.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.495.356.005,00	Rp.287.012.636,00	57,94
	4.02.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.287.448.605,00	Rp.81.069.775,00	28,20
	4.02.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp.135.563.805,00	Rp.113.825.769,00	83,96
	4.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.498.521.386,00	Rp.383.544.993,00	76,94
	4.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.1.941.833.246,00	Rp.1.530.867.341,00	78,84
	4.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.141.209.600,00	Rp.73.926.574,00	52,35
	4.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.1.096.920.000,00	Rp.1.049.040.000,00	95,64
	4.02.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.15.543.338.236,00	Rp.12.090.497.577,00	77,79
	4.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.950.000.000,00	Rp.727.414.254,00	76,57
	4.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.2.005.449.087,00	Rp.1.735.974.853,00	86,56
	4.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.3.915.956.238,00	Rp.3.502.553.122,00	89,44
	4.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.26.216.602.212,00	Rp.21.015.251.446,00	80,16
	4.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.1.143.040.000,00	Rp.637.953.013,00	55,81
80	**4.01.2.23.2.24.01.0001 - Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Rp.19.236.907.175,00**	**Rp.7.146.891.568,00**	**37,15**
	4.01.04.1.01.0001 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Rp.17.541.811.336,00	Rp.5.609.244.703,00	31,98
	4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.218.269.427,00	Rp.202.574.182,00	92,81
	4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.15.976.600,00	Rp.14.876.850,00	93,12
	4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.410.206.320,00	Rp.347.034.540,00	84,60
	4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.31.727.000,00	Rp.26.460.870,00	83,40
	4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.919.956.492,00	Rp.899.452.923,00	97,77
	4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.86.160.000,00	Rp.47.247.500,00	54,84
	4.01.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.12.800.000,00	Rp.0,00	0,00
81	**4.01.2.23.2.24.01.0003 - Biro Umum dan Protokol**	**Rp.54.231.844.982,00**	**Rp.43.987.139.281,00**	**81,11**
	4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.413.080.028,00	Rp.395.034.557,00	95,63
	4.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.262.467.532,00	Rp.256.328.776,00	97,66
	4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.620.027.020,00	Rp.515.831.683,00	83,20
	4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.2.403.493.583,00	Rp.1.943.608.616,00	80,87
	4.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp.351.252.742,00	Rp.333.854.062,00	95,05
	4.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.2.069.469.360,00	Rp.1.675.174.542,00	80,95
	4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.25.565.733.308,00	Rp.20.219.069.654,00	79,09
	4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.5.529.123.017,00	Rp.5.365.198.122,00	97,04
	4.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.7.375.876.952,00	Rp.6.277.955.778,00	85,11
	4.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.9.641.321.440,00	Rp.7.005.083.491,00	72,66
82	**4.01.0.00.0.00.01.0004 - Biro Hukum**	**Rp.1.878.432.828,00**	**Rp.1.669.759.300,00**	**88,89**
	4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.13.740.700,00	Rp.11.731.250,00	85,38
	4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.774.122.914,00	Rp.660.488.235,00	85,32
	4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.10.990.900,00	Rp.7.714.092,00	70,19
	4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.466.545.689,00	Rp.456.570.192,00	97,86
	4.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.555.142.625,00	Rp.477.698.531,00	86,05
	4.01.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	Rp.1.600.000,00	Rp.1.527.000,00	95,44
	4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.56.290.000,00	Rp.54.030.000,00	95,99
83	**4.01.2.23.2.24.01.0005 - Biro Organisasi**	**Rp.1.526.363.890,00**	**Rp.1.340.772.417,00**	**87,84**
	2.23.02.1.01.0009 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Rp.77.277.605,00	Rp.76.668.730,00	99,21
	4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.16.460.400,00	Rp.14.282.092,00	86,77
	4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.613.945.407,00	Rp.539.904.991,00	87,94
	4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.738.230.478,00	Rp.675.479.055,00	91,50
	4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.80.450.000,00	Rp.34.437.549,00	42,81
84	**4.01.2.23.2.24.01.0007 - Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian**	**Rp.34.607.450.198,00**	**Rp.31.553.210.357,00**	**91,17**
	4.01.07.1.01.0001 - Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.21.330.000,00	Rp.19.348.000,00	90,71
	4.01.07.1.01.0002 - Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.32.119.695.425,00	Rp.29.435.144.873,00	91,64
	4.01.07.1.02.0001 - Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Rp.51.105.000,00	Rp.15.661.250,00	30,65
	4.01.07.1.02.0002 - Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.47.894.000,00	Rp.21.335.236,00	44,55
	4.01.07.1.03.0001 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.73.676.000,00	Rp.70.466.549,00	95,64
	4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.13.950.000,00	Rp.4.540.000,00	32,54
	4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.1.596.019.273,00	Rp.1.506.562.818,00	94,40
	4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.35.000.500,00	Rp.15.791.740,00	45,12
	4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.557.480.000,00	Rp.400.868.441,00	71,91
	4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.91.300.000,00	Rp.63.491.450,00	69,54
85	**4.01.2.23.2.24.01.0008 - Biro Humas dan Protokol**	**Rp.77.440.000,00**	**Rp.12.498.931,00**	**16,14**
	4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.77.440.000,00	Rp.12.498.931,00	16,14
86	**6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat**	**Rp.4.871.422.044,00**	**Rp.4.497.487.412,00**	**92,32**
	6.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.18.521.800,00	Rp.13.290.950,00	71,76
	6.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.24.137.200,00	Rp.23.019.440,00	95,37
	6.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.49.999.400,00	Rp.46.165.000,00	92,33
	6.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.99.997.800,00	Rp.84.115.024,00	84,12
	6.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.158.109.394,00	Rp.123.415.003,00	78,06
	6.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.40.070.300,00	Rp.25.185.150,00	62,85
	6.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.44.140.800,00	Rp.35.956.800,00	81,46
	6.01.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.1.694.023.740,00	Rp.1.565.693.040,00	92,42
	6.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.318.500.000,00	Rp.270.308.766,00	84,87
	6.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.309.560.560,00	Rp.289.961.460,00	93,67
	6.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.1.617.453.428,00	Rp.1.560.661.140,00	96,49

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
	6.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.341.752.212,00	Rp.320.673.729,00	93,83
	6.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.155.155.410,00	Rp.139.041.910,00	89,61
87	**5.07.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penghubung**	**Rp.4.519.698.186,00**	**Rp.3.851.912.853,00**	**85,23**
	5.07.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.4.999.300,00	Rp.4.865.800,00	97,33
	5.07.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.14.989.400,00	Rp.14.041.500,00	93,68
	5.07.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.67.693.600,00	Rp.63.250.640,00	93,44
	5.07.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.90.000.000,00	Rp.90.000.000,00	100,00
	5.07.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.6.090.500,00	Rp.5.566.900,00	91,40
	5.07.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.544.230.256,00	Rp.435.150.748,00	79,96
	5.07.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.306.800.000,00	Rp.187.355.219,00	61,07
	5.07.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.1.213.956.466,00	Rp.1.192.324.141,00	98,22
	5.07.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.1.581.337.868,00	Rp.1.431.997.175,00	90,56
	5.07.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.537.975.000,00	Rp.309.388.694,00	57,51
	5.07.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.151.625.796,00	Rp.117.972.036,00	77,80
88	**8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Rp.3.178.550.934,00**	**Rp.2.981.334.671,38**	**93,80**
	8.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.57.956.000,00	Rp.50.193.500,00	86,61
	8.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.22.640.000,00	Rp.18.160.400,00	80,21
	8.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.14.921.500,00	Rp.14.592.262,00	97,79
	8.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.240.117.300,00	Rp.205.901.000,00	85,75
	8.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.77.229.424,00	Rp.76.655.996,00	99,26
	8.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.35.880.500,00	Rp.28.065.687,00	78,22
	8.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.4.996.100,00	Rp.3.796.500,00	75,99
	8.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	Rp.294.406.500,00	Rp.278.750.814,00	94,68
	8.01.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.416.922.740,00	Rp.378.655.982,00	90,82
	8.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.139.100.000,00	Rp.115.091.349,00	82,74
	8.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.830.659.070,00	Rp.828.212.410,00	99,71
	8.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.804.100.000,00	Rp.759.665.814,00	94,47
	8.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.19.960.000,00	Rp.18.697.000,00	93,67
	8.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.181.981.800,00	Rp.169.208.079,38	92,98
	8.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.37.680.000,00	Rp.35.687.878,00	94,71
89	**2.22.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Pemajuan Masyarakat Adat**	**Rp.3.189.668.935,00**	**Rp.2.813.210.109,00**	**88,20**
	2.22.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.24.904.900,00	Rp.19.476.562,00	78,20
	2.22.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.11.892.400,00	Rp.9.605.241,00	80,77
	2.22.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.10.934.200,00	Rp.8.443.000,00	77,22
	2.22.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.36.145.200,00	Rp.23.271.477,00	64,38
	2.22.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.19.243.700,00	Rp.16.219.500,00	84,28
	2.22.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.265.058.683,00	Rp.248.945.800,00	93,92
	2.22.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.562.166.834,00	Rp.368.402.328,00	65,53
	2.22.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.566.441.852,00	Rp.508.505.592,00	89,77
	2.22.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.1.692.881.166,00	Rp.1.610.340.609,00	95,12
90	**5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Rp.3.516.883.989,00**	**Rp.3.257.734.492,22**	**92,63**
	5.03.02.1.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp.132.931.602,00	Rp.118.405.071,00	89,07
	5.03.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.10.200.000,00	Rp.8.355.000,00	81,91
	5.03.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.37.042.600,00	Rp.81.463,00	0,22
	5.03.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.51.540.000,00	Rp.47.040.000,00	91,27
	5.03.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.17.762.400,00	Rp.15.895.000,00	89,49
	5.03.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.153.768.400,00	Rp.115.455.000,00	75,08
	5.03.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.85.079.034,00	Rp.84.482.000,00	99,30
	5.03.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.10.280.400,00	Rp.7.936.380,00	77,20
	5.03.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.4.137.000,00	Rp.3.175.500,00	76,76
	5.03.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.575.633.000,00	Rp.495.942.600,00	86,16
	5.03.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.253.600.000,00	Rp.230.463.090,00	90,88
	5.03.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.720.630.233,00	Rp.720.630.233,00	100,00
	5.03.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.1.010.648.320,00	Rp.979.951.174,00	96,96
	5.03.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.316.731.000,00	Rp.301.314.451,22	95,13
	5.03.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.136.900.000,00	Rp.128.607.530,00	93,94
91	**5.03.5.04.0.00.02.0001 - UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai**	**Rp.260.775.622,00**	**Rp.238.431.422,00**	**91,43**
	5.03.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.3.176.400,00	Rp.1.405.000,00	44,23
	5.03.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.25.550.000,00	Rp.19.250.000,00	75,34
	5.03.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.143.732.722,00	Rp.143.732.722,00	100,00
	5.03.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.78.656.500,00	Rp.65.540.200,00	83,32
	5.03.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.9.660.000,00	Rp.8.503.500,00	88,03
92	**5.03.5.04.0.00.02.0002 - UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia**	**Rp.21.700.000.000,00**	**Rp.18.149.308.140,00**	**83,64**
	5.03.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp.21.700.000.000,00	Rp.18.149.308.140,00	83,64
	TOTAL ALOKASI MANDATORY SPENDING BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK (Rp.)	**Rp.2.138.615.498.744,00**	**Rp.1.788.117.115.228,62**	**83,61**
	TOTAL BELANJA DAERAH DILUAR BELANJA TRANSFER(Rp.)	**Rp.6.068.805.441.963,60**	**Rp.5.308.662.002.331,59**	**88,42**
	ASE ALOKASI MANDATORY SPENDING BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK (MINIMAL 40%)	**35,24%**	**33,68%**	

Pemerintah Provinsi Bali
Laporan Tematik
Belanja Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Per 31 Desember 2025

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	PRESENTASE (%)
1	**Angka Partisipasi Sekolah**					**Rp117.562.171.900,00**	**Rp113.602.095.474,00**	**96,63**
A	**1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**					**Rp117.562.171.900,00**	**Rp113.602.095.474,00**	**96,63**
	1.01.02.1.01.0001 - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	8	Unit	Rp68.000.000.000,00	Rp66.250.897.900,00	97,43
	1.01.02.1.01.0045 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	300	Peserta didik	Rp4.704.150.000,00	Rp4.424.232.449,00	94,05
	1.01.02.1.01.0060 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	Dokumen	Rp76.299.900,00	Rp68.166.750,00	89,34
	1.01.02.1.01.0072 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	14	Ruang	Rp8.871.116.400,00	Rp8.533.684.208,00	96,20
	1.01.02.1.02.0001 - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4	Unit	Rp22.612.384.000,00	Rp21.545.770.400,00	95,28
	1.01.02.1.02.0037 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	360	Peserta didik	Rp5.633.745.400,00	Rp5.374.220.085,00	95,39
	1.01.02.1.02.0053 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	Dokumen	Rp37.600.000,00	Rp34.193.690,00	90,94
	1.01.02.1.02.0069 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10	Ruang	Rp4.012.000.000,00	Rp3.944.381.000,00	98,31
	1.01.02.1.03.0044 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2337	Peserta Didik	Rp3.523.966.200,00	Rp3.346.270.232,00	94,96
	1.01.02.1.03.0059 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	14	Dokumen	Rp90.910.000,00	Rp80.278.760,00	88,31
2	**Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas**					**Rp891.654.300,00**	**Rp805.041.012,00**	**90,29**
A	**1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**					**Rp877.704.300,00**	**Rp793.361.012,00**	**90,39**

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	PRESENTASE (%)
	1.01.02.1.01.0052 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	155	Satuan Pendidikan	Rp125.380.000,00	Rp113.656.250,00	90,65
	1.01.02.1.03.0051 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14	Satuan Pendidikan	Rp752.324.300,00	Rp679.704.762,00	90,35
B	**1.01.2.19.0.00.01.0001 - UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan**					**Rp13.950.000,00**	**Rp11.680.000,00**	**83,73**
	1.01.02.1.02.0051 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	Konten Digital	Rp13.950.000,00	Rp11.680.000,00	83,73
3	**Kekhususan SMK**					**Rp49.724.821.600,00**	**Rp49.475.521.130,58**	**99,50**
A	**1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**					**Rp49.724.821.600,00**	**Rp49.475.521.130,58**	**99,50**
	1.01.02.1.02.0033 - Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	32	Paket	Rp47.370.185.000,00	Rp47.227.767.258,58	99,70
	1.01.02.1.02.0041 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	680	Peserta Didik	Rp1.718.208.400,00	Rp1.667.194.202,00	97,03
	1.01.02.1.02.0043 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100	Orang	Rp88.862.000,00	Rp59.915.980,00	67,43
	1.01.02.1.02.0045 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	172	Satuan Pendidikan	Rp460.992.000,00	Rp440.815.690,00	95,62
	1.01.02.1.02.0073 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	900	Orang	Rp86.574.200,00	Rp79.828.000,00	92,21
4	**Literasi dan Numerasi**					**Rp43.058.841.469,00**	**Rp38.480.825.583,00**	**89,37**
A	**1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**					**Rp42.373.194.469,00**	**Rp37.816.341.501,00**	**89,25**
	1.01.02.1.01.0041 - Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5	Paket	Rp382.366.000,00	Rp381.824.003,00	99,86

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	PRESENTASE (%)
	1.01.02.1.01.0050 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1249	Orang	Rp27.034.056.126,00	Rp26.859.488.373,00	99,35
	1.01.02.1.01.0051 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100	Orang	Rp77.120.000,00	Rp73.643.740,00	95,49
	1.01.02.1.01.0075 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	900	Orang	Rp86.942.800,00	Rp80.216.000,00	92,26
	1.01.02.1.01.0078 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	90	Satuan Pendidikan	Rp10.881.822.600,00	Rp6.856.017.757,00	63,00
	1.01.02.1.03.0049 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	149	Orang	Rp3.487.687.843,00	Rp3.174.730.130,00	91,03
	1.01.02.1.03.0071 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	14	Satuan Pendidikan	Rp362.880.000,00	Rp344.459.478,00	94,92
	1.01.04.1.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2	Dokumen	Rp26.079.400,00	Rp23.321.600,00	89,43
	1.01.04.1.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	3	Laporan	Rp34.239.700,00	Rp22.640.420,00	66,12
B	**1.01.2.19.0.00.01.0001 - UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan**					**Rp685.647.000,00**	**Rp664.484.082,00**	**96,91**
	1.01.02.1.01.0057 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	Orang	Rp94.290.000,00	Rp93.472.000,00	99,13

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	PRESENTASE (%)
	1.01.02.1.01.0058 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	Konten Digital	Rp14.040.000,00	Rp13.968.000,00	99,49
	1.01.02.1.01.0059 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	Orang	Rp31.636.000,00	Rp28.665.286,00	90,61
	1.01.02.1.01.0078 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-	Satuan Pendidikan	Rp545.681.000,00	Rp528.378.796,00	96,83
TOTAL						**Rp211.237.489.269,00**	**Rp202.363.483.199,58**	**95,80**
b. TOTAL BELANJA DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PENDIDIKAN (Rp)						**Rp1.933.617.545.947,00**		
c. TOTAL BELANJA PEGAWAI PADA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PENDIDIKAN (Rp)						**Rp1.291.832.286.219,00**		
TOTAL BELANJA DAERAH DIKURANGI BELANJA PEGAWAI PADA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PENDIDIKAN [b - c] (Rp)						**Rp641.785.259.728,00**		
e. PERSENTASE ALOKASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN [(a : d) x 100%] (%)						**32.91 %**		

Pemerintah Provinsi Bali
Laporan Tematik
Belanja Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Per 31 Desember 2025

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	PRESENTASE (%)
1	**Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi**					**Rp70.891.400,00**	**Rp69.766.400,00**	**98,41**
A	**1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan**					**Rp70.891.400,00**	**Rp69.766.400,00**	**98,41**
	1.02.02.1.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	130000	Orang	Rp70.891.400,00	Rp69.766.400,00	98,41
2	**Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi**					**Rp186.176.380,00**	**Rp165.773.290,00**	**89,04**
A	**1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan**					**Rp186.176.380,00**	**Rp165.773.290,00**	**89,04**
	1.02.02.1.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	4380824	Orang	Rp186.176.380,00	Rp165.773.290,00	89,04
TOTAL						**Rp257.067.780,00**	**Rp235.539.690,00**	**91,63**

Pemerintah Provinsi Bali
Laporan Tematik
Belanja Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Per 31 Desember 2025

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	PRESENTASE (%)
1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**					**Rp21.766.029.102,00**	**Rp17.780.040.383,00**	**81,69**
A	**1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman**					**Rp3.425.956.952,00**	**Rp2.469.954.552,00**	**72,10**
	1.03.05.1.01.0013 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	0 Rumah Tang	M³/Hari	Rp3.167.010.552,00	Rp2.229.748.415,00	70,41
	1.03.05.1.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2	Dokumen	Rp258.946.400,00	Rp240.206.137,00	92,76
B	**1.03.1.04.0.00.01.0003 - UPTD Pengelolaan Air Limbah**					**Rp18.340.072.150,00**	**Rp15.310.085.831,00**	**83,48**
	1.03.05.1.01.0018 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara	-	Unit	Rp18.340.072.150,00	Rp15.310.085.831,00	83,48
2	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**					**Rp74.279.328.526,00**	**Rp62.877.892.177,00**	**84,65**
A	**1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman**					**Rp31.060.608.904,00**	**Rp24.562.770.933,00**	**79,08**
	1.03.03.1.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	3	Dokumen	Rp1.517.285.649,00	Rp1.373.224.943,00	90,51
	1.03.03.1.01.0017 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	15	Liter/Detik	Rp29.543.323.255,00	Rp23.189.545.990,00	78,49
B	**1.03.1.04.0.00.01.0002 - UPTD Pengelolaan Air Minum**					**Rp43.218.719.622,00**	**Rp38.315.121.244,00**	**88,65**
	1.03.03.1.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	-	Unit	Rp43.218.719.622,00	Rp38.315.121.244,00	88,65
					TOTAL	**Rp96.045.357.628,00**	**Rp80.657.932.560,00**	**83,98**

Pemerintah Provinsi Bali
Laporan Tematik
Belanja Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
Per 31 Desember 2025

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	PRESENTASE (%)
1	**Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi**					**Rp200.230.925,00**	**Rp196.086.810,00**	**97,93**
A	**1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman**					**Rp200.230.925,00**	**Rp196.086.810,00**	**97,93**
	1.04.02.1.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1	Dokumen	Rp88.481.225,00	Rp88.418.525,00	99,93
	1.04.02.1.01.0008 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1	Dokumen	Rp111.749.700,00	Rp107.668.285,00	96,35
					TOTAL	**Rp200.230.925,00**	**Rp196.086.810,00**	**97,93**

Pemerintah Provinsi Bali
Laporan Tematik
Belanja Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
Per 31 Desember 2025

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	PRESENTASE (%)
1	**Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi**					**Rp341.811.800,00**	**Rp333.582.844,00**	**97,59**
A	**1.06.2.08.0.00.06.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak**					**Rp341.811.800,00**	**Rp333.582.844,00**	**97,59**
	1.06.06.1.01.0003 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	2	Unit	Rp3.240.000,00	Rp0,00	0,00
	1.06.06.1.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	100	Orang	Rp3.240.000,00	Rp960.000,00	29,63
	1.06.06.1.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	595	Orang	Rp335.331.800,00	Rp332.622.844,00	99,19
2	**Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti**					**Rp2.756.429.500,00**	**Rp2.599.419.588,00**	**94,30**
A	**1.06.2.08.0.00.06.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak**					**Rp840.468.300,00**	**Rp797.362.685,00**	**94,87**
	1.06.04.1.02.0002 - Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1087	Orang	Rp600.647.100,00	Rp584.381.526,00	97,29
	1.06.04.1.02.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	40	Orang	Rp226.861.200,00	Rp200.283.910,00	88,28
	1.06.04.1.02.0010 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	30	Orang	Rp12.960.000,00	Rp12.697.249,00	97,97
B	**1.06.2.08.0.00.06.0001 - UPTD Pelayanan Sosial**					**Rp1.915.961.200,00**	**Rp1.802.056.903,00**	**94,05**
	1.06.04.1.02.0001 - Pengasuhan	Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	-	Orang	Rp91.401.500,00	Rp91.087.200,00	99,66
	1.06.04.1.02.0002 - Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	-	Orang	Rp1.478.250.000,00	Rp1.455.545.500,00	98,46
	1.06.04.1.02.0003 - Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	-	Orang	Rp89.750.000,00	Rp86.122.680,00	95,96

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	PRESENTASE (%)
	1.06.04.1.02.0005 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	-	Orang	Rp21.680.300,00	Rp21.577.290,00	99,52
	1.06.04.1.02.0007 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	-	Orang	Rp125.759.400,00	Rp108.274.233,00	86,10
	1.06.04.1.02.0009 - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	-	Orang	Rp100.000.000,00	Rp30.810.000,00	30,81
	1.06.04.1.02.0010 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	-	Orang	Rp9.120.000,00	Rp8.640.000,00	94,74
3	**Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti**					**Rp1.764.982.400,00**	**Rp1.593.698.471,00**	**90,30**
A	**1.06.2.08.0.00.06.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak**					**Rp456.825.400,00**	**Rp368.609.896,00**	**80,69**
	1.06.04.1.03.0001 - Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	321	Orang	Rp151.012.500,00	Rp149.462.834,00	98,97
	1.06.04.1.03.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	260	Orang	Rp14.352.200,00	Rp13.828.406,00	96,35
	1.06.04.1.03.0010 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	50	Orang	Rp30.570.600,00	Rp29.664.154,00	97,03
	1.06.04.1.03.0012 - Pemulasaraan	Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	30	Orang	Rp260.890.100,00	Rp175.654.502,00	67,33
B	**1.06.2.08.0.00.06.0001 - UPTD Pelayanan Sosial**					**Rp1.308.157.000,00**	**Rp1.225.088.575,00**	**93,65**
	1.06.04.1.03.0001 - Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	-	Orang	Rp996.450.000,00	Rp973.497.500,00	97,70
	1.06.04.1.03.0002 - Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	-	Orang	Rp70.000.000,00	Rp67.277.100,00	96,11
	1.06.04.1.03.0005 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	-	Orang	Rp10.000.000,00	Rp9.903.975,00	99,04

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	PRESENTASE (%)
	1.06.04.1.03.0007 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	-	Orang	Rp164.987.000,00	Rp143.570.000,00	87,02
	1.06.04.1.03.0010 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	-	Orang	Rp6.720.000,00	Rp3.840.000,00	57,14
	1.06.04.1.03.0012 - Pemulasaraan	Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	-	Orang	Rp60.000.000,00	Rp27.000.000,00	45,00
4	**Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti**					**Rp2.833.626.800,00**	**Rp2.823.081.575,00**	**99,63**
A	**1.06.2.08.0.00.06.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak**					**Rp2.833.626.800,00**	**Rp2.823.081.575,00**	**99,63**
	1.06.04.1.01.0001 - Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	155	Orang	Rp57.784.600,00	Rp56.220.068,00	97,29
	1.06.04.1.01.0004 - Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	103	Orang	Rp120.325.600,00	Rp119.977.680,00	99,71
	1.06.04.1.01.0005 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	30	Orang	Rp2.500.000.000,00	Rp2.492.087.666,00	99,68
	1.06.04.1.01.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	580	Orang	Rp155.516.600,00	Rp154.796.161,00	99,54
5	**Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti**					**Rp178.839.400,00**	**Rp108.499.701,00**	**60,67**
A	**1.06.2.08.0.00.06.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak**					**Rp178.839.400,00**	**Rp108.499.701,00**	**60,67**
	1.06.04.1.04.0001 - Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	430	Orang	Rp19.999.400,00	Rp13.344.701,00	66,73
	1.06.04.1.04.0010 - Pemulangan ke Daerah Asal	Terlaksananya Pemulangan Gelandangan dan Pengemis/Keluarga ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	430	Orang	Rp158.840.000,00	Rp95.155.000,00	59,91
					TOTAL	**Rp7.875.689.900,00**	**Rp7.458.282.179,00**	**94,70**

Pemerintah Provinsi Bali
Laporan Tematik
Belanja Urusan Pengawasan
Per 31 Desember 2025

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE (%)
1	**6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat**	**Rp9.904.224.361,00**	**Rp8.992.877.499,00**	**90,80**
	6.01.02.1.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp92.116.810,00	Rp87.814.090,00	95,33
	6.01.02.1.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp159.626.210,00	Rp158.530.410,00	99,31
	6.01.02.1.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	Rp48.013.500,00	Rp33.709.500,00	70,21
	6.01.02.1.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	Rp142.605.705,00	Rp141.706.555,00	99,37
	6.01.02.1.01.0005 - Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Rp547.158.610,00	Rp531.179.190,00	97,08
	6.01.02.1.01.0006 - Kerjasama Pengawasan Internal	Rp283.700.300,00	Rp273.687.840,00	96,47
	6.01.02.1.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	Rp196.177.910,00	Rp192.626.880,00	98,19
	6.01.02.1.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Rp50.875.110,00	Rp50.277.970,00	98,83
	6.01.02.1.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp514.691.215,00	Rp504.058.465,00	97,93
	6.01.03.1.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rp299.286.015,00	Rp292.935.831,00	97,88
	6.01.03.1.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Rp1.291.866.617,00	Rp902.553.157,00	69,86
	6.01.03.1.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp211.249.315,00	Rp197.556.115,00	93,52
	6.01.03.1.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp141.882.800,00	Rp138.058.072,00	97,30
	6.01.03.1.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp283.068.900,00	Rp278.190.730,00	98,28
	6.01.03.1.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp77.916.400,00	Rp71.788.000,00	92,13
	6.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp18.521.800,00	Rp13.290.950,00	71,76
	6.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp24.137.200,00	Rp23.019.440,00	95,37
	6.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp49.999.400,00	Rp46.165.000,00	92,33
	6.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp99.997.800,00	Rp84.115.024,00	84,12
	6.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp158.109.394,00	Rp123.415.003,00	78,06
	6.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp40.070.300,00	Rp25.185.150,00	62,85
	6.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp44.140.800,00	Rp35.956.800,00	81,46
	6.01.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp39.960.000,00	Rp40.436.250,00	101,19
	6.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp647.514.000,00	Rp598.311.032,00	92,40
	6.01.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp1.694.023.740,00	Rp1.565.693.040,00	92,42
	6.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp5.092.900,00	Rp1.970.000,00	38,68
	6.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp318.500.000,00	Rp270.308.766,00	84,87
	6.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp309.560.560,00	Rp289.961.460,00	93,67
	6.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Rp1.617.453.428,00	Rp1.560.661.140,00	96,49
	6.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp341.752.212,00	Rp320.673.729,00	93,83
	6.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp155.155.410,00	Rp139.041.910,00	89,61
TOTAL ALOKASI MANDATORY SPENDING UNSUR PENGAWASAN (Rp.)		**Rp9.904.224.361,00**	**Rp8.992.877.499,00**	**90,80**
TOTAL BELANJA DAERAH (Rp.)		**Rp.7.412.970.277.983,60**	**Rp.6.555.001.412.634,62**	**88,42**
DAN BESARAN ALOKASI MANDATORY SPENDING UNSUR PENGAWASAN (0,60% DAN Rp.36.000.000.000,00)		**0,13%**	**0,14%**	

Pemerintah Provinsi Bali
Laporan Tematik
Belanja Optimalisasi Pelaksanaan Pengetasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Per 31 Desember 2025

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	PRESENTASE(%)
1	**1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**				**Rp.411.545.433.218,00**	**Rp.288.287.015.400,50**	**70,05**
A	**Mengurangi Beban Pengeluaran**				**Rp.383.713.700.818,00**	**Rp.261.614.896.360,00**	**68,18**
	1.01.02.1.01.0045 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	300	Peserta didik	Rp.4.704.150.000,00	Rp.4.424.232.449,00	94,05
	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp.50.709.600,00	Rp.39.601.520,00	78,09
	5.1.02.01.01.0010 - Belanja Bahan-Isi Tabung Gas				Rp.149.940.000,00	Rp.89.760.000,00	59,86
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.159.900.000,00	Rp.154.950.000,00	96,90
	5.1.02.01.01.0030 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				Rp.75.855.000,00	Rp.52.913.700,00	69,76
	5.1.02.01.01.0032 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas				Rp.364.130.000,00	Rp.356.874.935,00	98,01
	5.1.02.01.01.0034 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga				Rp.60.090.000,00	Rp.58.875.066,00	97,98
	5.1.02.01.01.0036 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				Rp.83.228.600,00	Rp.65.880.165,00	79,16
	5.1.02.01.01.0037 - Belanja Obat-Obatan-Obat				Rp.24.147.800,00	Rp.23.528.551,00	97,44
	5.1.02.01.01.0043 - Belanja Natura dan Pakan-Natura				Rp.2.306.980.000,00	Rp.2.226.271.492,00	96,50
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.19.800.000,00	Rp.19.780.200,00	99,90
	5.1.02.01.01.0065 - Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)				Rp.447.320.000,00	Rp.438.319.261,00	97,99
	5.1.02.02.01.0048 - Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi				Rp.40.000.000,00	Rp.38.206.058,00	95,52
	5.1.02.02.01.0059 - Belanja Tagihan Telepon				Rp.176.000.000,00	Rp.140.832.842,00	80,02
	5.1.02.02.01.0060 - Belanja Tagihan Air				Rp.1.000.000,00	Rp.282.000,00	28,20
	5.1.02.02.01.0061 - Belanja Tagihan Listrik				Rp.215.000.000,00	Rp.200.645.270,00	93,32
	5.1.02.02.01.0067 - Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan				Rp.8.500.000,00	Rp.3.886.900,00	45,73
	5.1.02.02.01.0073 - Belanja Medical Check Up				Rp.154.125.000,00	Rp.151.425.000,00	98,25
	5.1.02.03.02.0035 - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				Rp.54.000.000,00	Rp.50.897.224,00	94,25
	5.1.02.03.02.0038 - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua				Rp.8.400.000,00	Rp.8.397.265,00	99,97
	5.1.02.03.03.0001 - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				Rp.181.744.000,00	Rp.179.995.000,00	99,04
	5.1.02.03.04.0079 - Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya				Rp.10.000.000,00	Rp.9.630.000,00	96,30
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.113.280.000,00	Rp.113.280.000,00	100,00
	1.01.02.1.01.0053 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	156	Satuan Pendidikan	Rp.165.426.169.948,00	Rp.86.810.411.062,00	52,48
	5.1.02.89.01.0001 - Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler				Rp.99.839.599.551,00	Rp.48.165.659.554,87	48,24
	5.1.02.89.01.0002 - Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja				Rp.2.429.121.696,00	Rp.127.006.695,13	5,23
	5.1.05.06.03.0001 - Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta				Rp.22.924.200.000,00	Rp.22.120.367.369,00	96,49
	5.2.02.89.01.0001 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler				Rp.21.593.873.362,00	Rp.11.191.447.848,00	51,83
	5.2.02.89.01.0002 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja				Rp.129.976.752,00	Rp.0,00	0,00
	5.2.05.89.01.0001 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler				Rp.18.231.707.087,00	Rp.5.205.929.595,00	28,55
	5.2.05.89.01.0002 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja				Rp.277.691.500,00	Rp.0,00	0,00
	1.01.02.1.01.0078 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	90	Satuan Pendidikan	Rp.10.881.822.600,00	Rp.6.856.017.757,00	63,00
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.375.056.200,00	Rp.232.778.500,00	62,06
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.182.292.000,00	Rp.125.017.857,00	68,58
	5.1.02.01.01.0027 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp.30.740.600,00	Rp.19.580.000,00	63,69
	5.1.02.01.01.0036 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				Rp.2.700.000.000,00	Rp.2.682.000.000,00	99,33
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.2.171.025.000,00	Rp.954.325.000,00	43,96
	5.1.02.02.01.0003 - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				Rp.2.491.200.000,00	Rp.436.050.000,00	17,50
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.216.000.000,00	Rp.35.040.000,00	16,22
	5.2.02.10.01.0002 - Belanja Modal Personal Computer				Rp.2.715.508.800,00	Rp.2.371.226.400,00	87,32
	1.01.02.1.02.0037 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	360	Peserta didik	Rp.5.633.745.400,00	Rp.5.374.220.085,00	95,39
	5.1.02.01.01.0001 - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi				Rp.2.999.500,00	Rp.2.999.500,00	100,00
	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp.111.595.900,00	Rp.107.593.800,00	96,41
	5.1.02.01.01.0008 - Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman				Rp.6.495.500,00	Rp.6.345.000,00	97,68
	5.1.02.01.01.0010 - Belanja Bahan-Isi Tabung Gas				Rp.91.875.000,00	Rp.55.000.000,00	59,86
	5.1.02.01.01.0012 - Belanja Bahan-Bahan Lainnya				Rp.12.600.000,00	Rp.12.600.000,00	100,00
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.130.707.200,00	Rp.100.119.500,00	76,60
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.16.182.000,00	Rp.10.910.000,00	67,42
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.58.955.700,00	Rp.57.687.283,00	97,85
	5.1.02.01.01.0027 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp.7.850.000,00	Rp.3.200.000,00	40,76
	5.1.02.01.01.0030 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				Rp.179.696.900,00	Rp.177.411.000,00	98,73
	5.1.02.01.01.0031 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				Rp.24.397.700,00	Rp.24.134.000,00	98,92
	5.1.02.01.01.0032 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas				Rp.230.100.000,00	Rp.219.426.953,00	95,36

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	PRESENTASE(%)
	5.1.02.01.01.0034 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga				Rp.211.064.800,00	Rp.206.035.930,00	97,62
	5.1.02.01.01.0036 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				Rp.269.603.100,00	Rp.266.963.200,00	99,02
	5.1.02.01.01.0037 - Belanja Obat-Obatan-Obat				Rp.16.266.900,00	Rp.16.207.640,00	99,64
	5.1.02.01.01.0038 - Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya				Rp.8.890.000,00	Rp.8.600.000,00	96,74
	5.1.02.01.01.0043 - Belanja Natura dan Pakan-Natura				Rp.2.203.585.000,00	Rp.2.162.137.766,00	98,12
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.28.800.000,00	Rp.27.242.730,00	94,59
	5.1.02.01.01.0058 - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				Rp.25.110.000,00	Rp.18.518.511,00	73,75
	5.1.02.01.01.0065 - Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)				Rp.276.145.500,00	Rp.273.198.000,00	98,93
	5.1.02.01.01.0074 - Belanja Pakaian Adat Daerah				Rp.113.100.000,00	Rp.109.779.000,00	97,06
	5.1.02.01.01.0076 - Belanja Pakaian Olahraga				Rp.120.000.000,00	Rp.110.241.630,00	91,87
	5.1.02.01.04.0318 - Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga				Rp.4.464.000,00	Rp.4.140.056,00	92,74
	5.1.02.01.04.0323 - Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya				Rp.9.372.000,00	Rp.8.940.051,00	95,39
	5.1.02.01.04.0504 - Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik				Rp.1.666.200,00	Rp.1.662.000,00	99,75
	5.1.02.01.04.0505 - Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan				Rp.5.516.500,00	Rp.5.485.000,00	99,43
	5.1.02.02.01.0011 - Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan				Rp.111.000.000,00	Rp.110.100.000,00	99,19
	5.1.02.02.01.0059 - Belanja Tagihan Telepon				Rp.177.630.000,00	Rp.166.153.211,00	93,54
	5.1.02.02.01.0061 - Belanja Tagihan Listrik				Rp.275.955.000,00	Rp.212.057.520,00	76,84
	5.1.02.02.01.0062 - Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah				Rp.19.170.000,00	Rp.17.040.000,00	88,89
	5.1.02.02.01.0067 - Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan				Rp.9.000.000,00	Rp.5.948.500,00	66,09
	5.1.02.02.01.0073 - Belanja Medical Check Up				Rp.190.000.000,00	Rp.188.460.000,00	99,19
	5.1.02.02.04.0036 - Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang				Rp.34.483.000,00	Rp.34.051.104,00	98,75
	5.1.02.02.04.0117 - Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya				Rp.25.690.000,00	Rp.25.359.000,00	98,71
	5.1.02.03.02.0023 - Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa				Rp.15.000.000,00	Rp.14.373.250,00	95,82
	5.1.02.03.02.0035 - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				Rp.54.000.000,00	Rp.53.416.000,00	98,92
	5.1.02.03.02.0121 - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin				Rp.12.200.000,00	Rp.12.100.000,00	99,18
	5.1.02.03.02.0405 - Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer				Rp.10.950.000,00	Rp.10.800.000,00	98,63
	5.1.02.03.03.0001 - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				Rp.181.744.000,00	Rp.181.305.000,00	99,76
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.54.720.000,00	Rp.54.720.000,00	100,00
	5.2.02.10.01.0002 - Belanja Modal Personal Computer				Rp.295.164.000,00	Rp.291.757.950,00	98,85
	1.01.02.1.02.0046 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	175	Satuan Pendidikan	Rp.182.279.551.870,00	Rp.143.896.092.713,00	78,94
	5.1.02.89.01.0001 - Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler				Rp.74.858.484.636,00	Rp.54.561.421.203,00	72,89
	5.1.02.89.01.0002 - Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja				Rp.587.605.094,00	Rp.140.502.800,00	23,91
	5.1.05.06.03.0001 - Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta				Rp.74.694.380.000,00	Rp.74.292.660.755,00	99,46
	5.2.02.89.01.0001 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler				Rp.19.518.885.909,00	Rp.10.535.337.555,00	53,98
	5.2.02.89.01.0002 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja				Rp.181.236.000,00	Rp.0,00	0,00
	5.2.05.89.01.0001 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler				Rp.12.363.849.455,00	Rp.4.366.170.400,00	35,31
	5.2.05.89.01.0002 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja				Rp.75.110.776,00	Rp.0,00	0,00
	1.01.02.1.03.0044 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2337	Peserta Didik	Rp.3.523.966.200,00	Rp.3.346.270.232,00	94,96
	5.1.02.01.01.0010 - Belanja Bahan-Isi Tabung Gas				Rp.79.380.000,00	Rp.0,00	0,00
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.2.628.400,00	Rp.2.182.000,00	83,02
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.2.155.000,00	Rp.1.337.500,00	62,06
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.3.217.000,00	Rp.1.992.545,00	61,94
	5.1.02.01.01.0027 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp.2.355.000,00	Rp.1.500.000,00	63,69
	5.1.02.01.01.0030 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				Rp.65.203.200,00	Rp.53.436.042,00	81,95
	5.1.02.01.01.0036 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				Rp.13.227.600,00	Rp.12.671.995,00	95,80
	5.1.02.01.01.0043 - Belanja Natura dan Pakan-Natura				Rp.3.346.200.000,00	Rp.3.263.550.150,00	97,53
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.9.600.000,00	Rp.9.600.000,00	100,00
	1.01.02.1.03.0052 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	14	Satuan Pendidikan	Rp.11.264.294.800,00	Rp.10.907.652.062,00	96,83
	5.1.02.89.01.0001 - Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler				Rp.7.569.218.225,00	Rp.7.455.104.687,00	98,49
	5.1.02.89.01.0002 - Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja				Rp.355.784.800,00	Rp.275.891.340,00	77,54
	5.1.05.06.04.0001 - Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta				Rp.809.720.000,00	Rp.797.051.535,00	98,44
	5.2.02.89.01.0001 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler				Rp.1.464.156.400,00	Rp.1.431.987.500,00	97,80
	5.2.05.89.01.0001 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler				Rp.1.065.415.375,00	Rp.947.617.000,00	88,94
B	**Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan**				**Rp.27.831.732.400,00**	**Rp.26.672.119.040,50**	**95,83**
	1.01.02.1.01.0072 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	14	Ruang	Rp.8.871.116.400,00	Rp.8.533.684.208,00	96,20
	5.2.03.01.01.0010 - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan				Rp.8.871.116.400,00	Rp.8.533.684.208,00	96,20
	1.01.02.1.02.0010 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4	Unit	Rp.11.150.616.000,00	Rp.10.642.894.000,00	95,45
	5.2.03.01.01.0009 - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan				Rp.1.680.000.000,00	Rp.1.604.784.000,00	95,52
	5.2.03.01.01.0010 - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan				Rp.6.755.616.000,00	Rp.6.459.711.000,00	95,62
	5.2.03.04.01.0004 - Belanja Modal Pagar				Rp.2.715.000.000,00	Rp.2.578.399.000,00	94,97

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	PRESENTASE(%)
	1.01.02.1.02.0069 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10	Ruang	Rp.4.012.000.000,00	Rp.3.944.381.000,00	98,31
	5.2.03.01.01.0010 - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan				Rp.4.012.000.000,00	Rp.3.944.381.000,00	98,31
	1.01.02.1.03.0008 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2	Unit	Rp.1.880.000.000,00	Rp.1.751.895.534,72	93,19
	5.2.03.01.01.0008 - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah				Rp.500.000.000,00	Rp.482.085.473,97	96,42
	5.2.03.01.01.0010 - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan				Rp.1.380.000.000,00	Rp.1.269.810.060,75	92,02
	1.01.02.1.03.0069 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Unit	Rp.1.918.000.000,00	Rp.1.799.264.297,78	93,81
	5.1.02.03.03.0001 - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				Rp.600.000.000,00	Rp.586.912.000,00	97,82
	5.2.03.01.01.0010 - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan				Rp.1.218.000.000,00	Rp.1.118.110.297,78	91,80
	5.2.03.04.01.0004 - Belanja Modal Pagar				Rp.100.000.000,00	Rp.94.242.000,00	94,24
2	**1.01.2.19.0.00.01.0001 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**				**Rp.545.681.000,00**	**Rp.528.378.796,00**	**96,83**
A	**Mengurangi Beban Pengeluaran**				**Rp.545.681.000,00**	**Rp.528.378.796,00**	**96,83**
	1.01.02.1.01.0078 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-	Satuan Pendidikan	Rp.545.681.000,00	Rp.528.378.796,00	96,83
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.15.885.000,00	Rp.15.179.000,00	95,56
	5.1.02.02.15.0005 - Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software				Rp.509.600.000,00	Rp.493.950.000,00	96,93
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.20.196.000,00	Rp.19.249.796,00	95,31
3	**1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan**				**Rp.25.571.966.520,00**	**Rp.20.435.912.935,00**	**79,92**
A	**Mengurangi Beban Pengeluaran**				**Rp.25.571.966.520,00**	**Rp.20.435.912.935,00**	**79,92**
	1.02.02.1.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	4380824	Orang	Rp.186.176.380,00	Rp.165.773.290,00	89,04
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.343.100,00	Rp.187.250,00	54,58
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.14.310.000,00	Rp.13.862.760,00	96,87
	5.1.02.02.01.0003 - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				Rp.36.000.000,00	Rp.16.200.000,00	45,00
	5.1.02.02.01.0014 - Belanja Jasa Tenaga Kesehatan				Rp.71.700.000,00	Rp.71.700.000,00	100,00
	5.1.02.02.02.0005 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				Rp.2.788.000,00	Rp.2.788.000,00	100,00
	5.1.02.02.02.0006 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Rp.167.280,00	Rp.167.280,00	100,00
	5.1.02.02.02.0007 - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				Rp.209.100,00	Rp.209.100,00	100,00
	5.1.02.02.02.0010 - Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN				Rp.2.578.900,00	Rp.2.578.900,00	100,00
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.58.080.000,00	Rp.58.080.000,00	100,00
	1.02.02.1.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	130000	Orang	Rp.70.891.400,00	Rp.69.766.400,00	98,41
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.1.125.000,00	Rp.0,00	0,00
	5.1.02.02.01.0014 - Belanja Jasa Tenaga Kesehatan				Rp.38.000.000,00	Rp.38.000.000,00	100,00
	5.1.02.02.02.0005 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				Rp.1.440.000,00	Rp.1.440.000,00	100,00
	5.1.02.02.02.0006 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Rp.86.400,00	Rp.86.400,00	100,00
	5.1.02.02.02.0007 - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				Rp.108.000,00	Rp.108.000,00	100,00
	5.1.02.02.02.0010 - Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN				Rp.1.332.000,00	Rp.1.332.000,00	100,00
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.28.800.000,00	Rp.28.800.000,00	100,00
	1.02.02.1.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	Dokumen	Rp.204.191.520,00	Rp.198.944.732,00	97,43
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.1.353.000,00	Rp.983.987,00	72,73
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.20.655.000,00	Rp.20.476.498,00	99,14
	5.1.02.02.01.0003 - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				Rp.19.800.000,00	Rp.19.800.000,00	100,00
	5.1.02.02.01.0014 - Belanja Jasa Tenaga Kesehatan				Rp.96.800.000,00	Rp.96.800.000,00	100,00
	5.1.02.02.02.0005 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				Rp.3.792.000,00	Rp.3.792.000,00	100,00
	5.1.02.02.02.0006 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Rp.227.520,00	Rp.227.520,00	100,00
	5.1.02.02.02.0007 - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				Rp.284.400,00	Rp.284.400,00	100,00
	5.1.02.02.02.0010 - Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN				Rp.3.507.600,00	Rp.3.507.600,00	100,00
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.57.772.000,00	Rp.53.072.727,00	91,87
	1.02.02.1.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1	Dokumen	Rp.53.127.000,00	Rp.46.017.392,00	86,62
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.87.900,00	Rp.87.793,00	99,88
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.172.400,00	Rp.147.599,00	85,61
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.4.503.500,00	Rp.0,00	0,00
	5.1.02.01.01.0036 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				Rp.263.200,00	Rp.222.000,00	84,35
	5.1.02.01.01.0053 - Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				Rp.13.600.000,00	Rp.12.160.000,00	89,41
	5.1.02.02.01.0003 - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				Rp.14.500.000,00	Rp.14.000.000,00	96,55
	5.1.02.02.05.0009 - Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan				Rp.2.000.000,00	Rp.2.000.000,00	100,00
	5.1.02.02.05.0042 - Belanja Sewa Asrama				Rp.9.000.000,00	Rp.9.000.000,00	100,00

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	PRESENTASE(%)
	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				Rp.9.000.000,00	Rp.8.400.000,00	93,33
	1.02.02.1.02.0016 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	Dokumen	Rp.24.657.838.700,00	Rp.19.572.140.150,00	79,37
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.815.100,00	Rp.613.050,00	75,21
	5.1.02.02.01.0042 - Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan				Rp.390.000,00	Rp.360.000,00	92,31
	5.1.02.02.02.0002 - Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI				Rp.24.647.993.600,00	Rp.19.562.527.100,00	79,37
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.8.640.000,00	Rp.8.640.000,00	100,00
	1.02.02.1.02.0019 - Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1	Dokumen	Rp.399.741.520,00	Rp.383.270.971,00	95,88
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.150.000,00	Rp.133.395,00	88,93
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.271.800,00	Rp.260.999,00	96,03
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.740.000,00	Rp.517.717,00	69,96
	5.1.02.01.01.0036 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				Rp.263.200,00	Rp.263.000,00	99,92
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.45.975.000,00	Rp.41.762.040,00	90,84
	5.1.02.02.01.0003 - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				Rp.30.500.000,00	Rp.26.250.000,00	86,07
	5.1.02.02.01.0014 - Belanja Jasa Tenaga Kesehatan				Rp.96.800.000,00	Rp.96.800.000,00	100,00
	5.1.02.02.02.0005 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				Rp.3.792.000,00	Rp.3.792.000,00	100,00
	5.1.02.02.02.0006 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Rp.227.520,00	Rp.227.520,00	100,00
	5.1.02.02.02.0007 - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				Rp.284.400,00	Rp.284.400,00	100,00
	5.1.02.02.02.0010 - Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN				Rp.3.507.600,00	Rp.3.507.600,00	100,00
	5.1.02.02.05.0009 - Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan				Rp.2.500.000,00	Rp.2.500.000,00	100,00
	5.1.02.02.05.0042 - Belanja Sewa Asrama				Rp.13.000.000,00	Rp.9.800.000,00	75,38
	5.1.02.02.09.0008 - Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan				Rp.98.000.000,00	Rp.96.492.300,00	98,46
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.72.480.000,00	Rp.72.480.000,00	100,00
	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				Rp.31.250.000,00	Rp.28.200.000,00	90,24
4	**1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman**				**Rp.47.722.486.891,00**	**Rp.39.529.851.680,00**	**82,83**
A	**Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan**				**Rp.47.722.486.891,00**	**Rp.39.529.851.680,00**	**82,83**
	1.03.02.1.01.0105 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	5	Unit	Rp.310.353.300,00	Rp.288.699.750,00	93,02
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.1.561.800,00	Rp.1.345.800,00	86,17
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.1.125.000,00	Rp.1.039.000,00	92,36
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.178.500,00	Rp.124.950,00	70,00
	5.1.02.01.01.0027 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp.314.000,00	Rp.200.000,00	63,69
	5.1.02.01.01.0032 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas				Rp.2.114.000,00	Rp.2.110.000,00	99,81
	5.1.02.01.01.0036 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				Rp.3.020.000,00	Rp.2.600.000,00	86,09
	5.1.02.02.01.0021 - Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air				Rp.264.000.000,00	Rp.264.000.000,00	100,00
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.23.040.000,00	Rp.17.280.000,00	75,00
	5.2.01.01.03.0008 - Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air				Rp.15.000.000,00	Rp.0,00	0,00
	1.03.02.1.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	4,981	KM	Rp.9.527.085.215,00	Rp.8.945.211.922,00	93,89
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.2.974.000,00	Rp.2.275.500,00	76,51
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.1.600.700,00	Rp.1.482.000,00	92,58
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.900.500,00	Rp.630.350,00	70,00
	5.1.02.01.01.0027 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp.314.000,00	Rp.200.000,00	63,69
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.6.750.000,00	Rp.6.450.000,00	95,56
	5.1.02.02.01.0026 - Belanja Jasa Tenaga Administrasi				Rp.47.948.415,00	Rp.47.948.415,00	100,00
	5.1.02.02.02.0005 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				Rp.1.978.875,00	Rp.1.978.875,00	100,00
	5.1.02.02.02.0006 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Rp.107.880,00	Rp.107.880,00	100,00
	5.1.02.02.02.0007 - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				Rp.134.850,00	Rp.134.850,00	100,00
	5.1.02.02.02.0010 - Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN				Rp.1.663.095,00	Rp.1.663.095,00	100,00
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.51.270.000,00	Rp.29.760.000,00	58,05
	5.2.04.02.01.0005 - Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi				Rp.9.411.442.900,00	Rp.8.852.580.957,00	94,06
	1.03.02.1.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	172.972	KM	Rp.3.354.753.009,00	Rp.3.252.363.763,00	96,95
	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp.3.732.000,00	Rp.0,00	0,00
	5.1.02.01.01.0023 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya				Rp.4.000.000,00	Rp.0,00	0,00
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.2.140.800,00	Rp.1.784.200,00	83,34
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.1.905.200,00	Rp.1.760.000,00	92,38
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.476.000,00	Rp.333.200,00	70,00
	5.1.02.01.01.0027 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp.471.000,00	Rp.300.000,00	63,69
	5.1.02.01.01.0032 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas				Rp.17.334.800,00	Rp.17.302.000,00	99,81
	5.1.02.01.01.0036 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				Rp.24.764.000,00	Rp.21.320.000,00	86,09
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.17.100.000,00	Rp.15.910.000,00	93,04
	5.1.02.02.01.0021 - Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air				Rp.2.164.800.000,00	Rp.2.142.100.000,00	98,95
	5.1.02.02.01.0026 - Belanja Jasa Tenaga Administrasi				Rp.473.487.589,00	Rp.454.508.223,00	95,99

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	PRESENTASE(%)
	5.1.02.02.01.0061 - Belanja Tagihan Listrik				Rp.25.440.000,00	Rp.0,00	0,00
	5.1.02.02.02.0005 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				Rp.19.656.825,00	Rp.18.865.275,00	95,97
	5.1.02.02.02.0006 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Rp.1.071.608,00	Rp.1.028.456,00	95,97
	5.1.02.02.02.0007 - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				Rp.1.339.510,00	Rp.1.285.570,00	95,97
	5.1.02.02.02.0010 - Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN				Rp.16.520.077,00	Rp.15.854.839,00	95,97
	5.1.02.03.04.0031 - Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya				Rp.520.033.600,00	Rp.515.372.000,00	99,10
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.60.480.000,00	Rp.44.640.000,00	73,81
	1.03.02.1.02.0032 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	9	Dokumen	Rp.1.472.533.935,00	Rp.1.295.657.178,00	87,99
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.1.518.700,00	Rp.1.157.000,00	76,18
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.1.160.300,00	Rp.1.080.000,00	93,08
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.423.500,00	Rp.296.450,00	70,00
	5.1.02.01.01.0027 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp.392.500,00	Rp.250.000,00	63,69
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.6.750.000,00	Rp.1.720.000,00	25,48
	5.1.02.02.01.0003 - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				Rp.14.400.000,00	Rp.0,00	0,00
	5.1.02.02.01.0026 - Belanja Jasa Tenaga Administrasi				Rp.111.879.635,00	Rp.111.879.635,00	100,00
	5.1.02.02.02.0005 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				Rp.4.617.375,00	Rp.4.617.375,00	100,00
	5.1.02.02.02.0006 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Rp.251.720,00	Rp.251.720,00	100,00
	5.1.02.02.02.0007 - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				Rp.314.650,00	Rp.314.650,00	100,00
	5.1.02.02.02.0010 - Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN				Rp.3.880.555,00	Rp.3.880.555,00	100,00
	5.1.02.02.09.0011 - Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei				Rp.199.965.000,00	Rp.199.496.956,00	99,77
	5.1.02.02.09.0012 - Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik				Rp.300.000.000,00	Rp.297.945.168,00	99,32
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.127.530.000,00	Rp.31.090.000,00	24,38
	5.2.04.02.01.0005 - Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi				Rp.699.450.000,00	Rp.641.677.669,00	91,74
	1.03.03.1.01.0017 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	15	Liter/Detik	Rp.29.543.323.255,00	Rp.23.189.545.990,00	78,49
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.3.297.600,00	Rp.1.757.000,00	53,28
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.847.000,00	Rp.786.000,00	92,80
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.85.500,00	Rp.59.790,00	69,93
	5.1.02.01.01.0027 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp.471.000,00	Rp.300.000,00	63,69
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.1.350.000,00	Rp.1.327.500,00	98,33
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.21.722.000,00	Rp.13.920.000,00	64,08
	5.2.04.04.01.0005 - Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya				Rp.29.515.550.155,00	Rp.23.171.395.700,00	78,51
	1.03.05.1.01.0013 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	300 Rumah Tangga	M^3/Hari	Rp.3.167.010.552,00	Rp.2.229.748.415,00	70,41
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.2.636.400,00	Rp.1.319.000,00	50,03
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.674.600,00	Rp.627.000,00	92,94
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.1.122.000,00	Rp.784.615,00	69,93
	5.1.02.01.01.0027 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp.157.000,00	Rp.100.000,00	63,69
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.900.000,00	Rp.889.000,00	98,78
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.11.520.000,00	Rp.7.200.000,00	62,50
	5.2.04.03.02.0001 - Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik				Rp.3.150.000.552,00	Rp.2.218.828.800,00	70,44
	1.03.05.1.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2	Dokumen	Rp.258.946.400,00	Rp.240.206.137,00	92,76
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.2.309.300,00	Rp.1.622.000,00	70,24
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.607.800,00	Rp.562.000,00	92,46
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.444.000,00	Rp.310.489,00	69,93
	5.1.02.01.01.0027 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp.455.300,00	Rp.0,00	0,00
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.2.250.000,00	Rp.2.212.500,00	98,33
	5.1.02.02.09.0011 - Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei				Rp.50.000.000,00	Rp.49.802.148,00	99,60
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.2.880.000,00	Rp.2.880.000,00	100,00
	5.2.04.03.02.0001 - Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik				Rp.200.000.000,00	Rp.182.817.000,00	91,41
	1.04.02.1.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1	Dokumen	Rp.88.481.225,00	Rp.88.418.525,00	99,93
	5.1.02.01.01.0027 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp.172.700,00	Rp.110.000,00	63,69
	5.1.02.02.01.0026 - Belanja Jasa Tenaga Administrasi				Rp.79.914.025,00	Rp.79.914.025,00	100,00
	5.1.02.02.02.0005 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				Rp.3.298.125,00	Rp.3.298.125,00	100,00
	5.1.02.02.02.0006 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Rp.179.800,00	Rp.179.800,00	100,00
	5.1.02.02.02.0007 - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				Rp.224.750,00	Rp.224.750,00	100,00
	5.1.02.02.02.0010 - Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN				Rp.2.771.825,00	Rp.2.771.825,00	100,00
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.1.920.000,00	Rp.1.920.000,00	100,00
5	**1.03.1.04.0.00.01.0002 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman**				**Rp.43.218.719.622,00**	**Rp.38.315.121.244,00**	**88,65**
A	**Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan**				**Rp.43.218.719.622,00**	**Rp.38.315.121.244,00**	**88,65**

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	PRESENTASE(%)
	1.03.03.1.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	-	Unit	Rp.43.218.719.622,00	Rp.38.315.121.244,00	88,65
	5.1.02.02.01.0026 - Belanja Jasa Tenaga Administrasi				Rp.2.974.760.462,00	Rp.2.956.781.096,00	99,40
	5.1.02.02.02.0005 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				Rp.124.273.350,00	Rp.123.481.800,00	99,36
	5.1.02.02.02.0006 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Rp.6.774.864,00	Rp.6.731.712,00	99,36
	5.1.02.02.02.0007 - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				Rp.8.468.580,00	Rp.8.414.640,00	99,36
	5.1.02.02.02.0010 - Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN				Rp.104.442.366,00	Rp.103.777.128,00	99,36
	5.1.02.99.99.9999 - Belanja Barang dan Jasa BLUD				Rp.30.975.005.075,00	Rp.26.576.034.643,00	85,80
	5.2.02.99.99.9999 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				Rp.8.178.581.100,00	Rp.8.143.486.400,00	99,57
	5.2.03.99.99.9999 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD				Rp.196.913.825,00	Rp.196.913.825,00	100,00
	5.2.04.99.99.9999 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD				Rp.649.500.000,00	Rp.199.500.000,00	30,72
6	**1.03.1.04.0.00.01.0003 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman**				**Rp.18.340.072.150,00**	**Rp.15.310.085.831,00**	**83,48**
A	**Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan**				**Rp.18.340.072.150,00**	**Rp.15.310.085.831,00**	**83,48**
	1.03.05.1.01.0018 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara	-	Unit	Rp.18.340.072.150,00	Rp.15.310.085.831,00	83,48
	5.1.01.99.99.9999 - Belanja Pegawai BLUD				Rp.9.660.000,00	Rp.9.660.000,00	100,00
	5.1.02.02.01.0069 - Belanja Pengolahan Air Limbah				Rp.1.242.000.000,00	Rp.1.215.750.000,00	97,89
	5.1.02.02.02.0005 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				Rp.48.252.150,00	Rp.47.196.750,00	97,81
	5.1.02.02.02.0006 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Rp.2.820.000,00	Rp.2.759.400,00	97,85
	5.1.02.02.02.0007 - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				Rp.3.525.000,00	Rp.3.449.250,00	97,85
	5.1.02.02.02.0010 - Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN				Rp.43.475.000,00	Rp.42.540.750,00	97,85
	5.1.02.99.99.9999 - Belanja Barang dan Jasa BLUD				Rp.12.505.340.000,00	Rp.11.324.399.170,00	90,56
	5.2.02.99.99.9999 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				Rp.3.910.000.000,00	Rp.2.097.629.781,00	53,65
	5.2.03.99.99.9999 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD				Rp.540.000.000,00	Rp.536.832.850,00	99,41
	5.2.04.99.99.9999 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD				Rp.35.000.000,00	Rp.29.867.880,00	85,34
7	**1.06.2.08.0.00.06.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak**				**Rp.5.434.770.000,00**	**Rp.5.253.147.477,00**	**96,66**
A	**Meningkatkan Pendapatan**				**Rp.251.992.000,00**	**Rp.228.577.084,00**	**90,71**
	1.06.02.1.02.0002 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	57	Orang	Rp.78.398.500,00	Rp.62.373.391,00	79,56
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.1.519.900,00	Rp.720.390,00	47,40
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.329.800,00	Rp.277.500,00	84,14
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.948.800,00	Rp.875.501,00	92,27
	5.1.02.02.01.0020 - Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial				Rp.68.400.000,00	Rp.53.300.000,00	77,92
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.7.200.000,00	Rp.7.200.000,00	100,00
	1.06.02.1.02.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	1	Lembaga	Rp.41.310.000,00	Rp.39.960.000,00	96,73
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.6.750.000,00	Rp.5.400.000,00	80,00
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.34.560.000,00	Rp.34.560.000,00	100,00
	2.08.02.1.02.0003 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	130	Orang	Rp.132.283.500,00	Rp.126.243.693,00	95,43
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.418.400,00	Rp.339.920,00	81,24
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.674.600,00	Rp.566.100,00	83,92
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.110.500,00	Rp.77.273,00	69,93
	5.1.02.01.01.0036 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				Rp.9.600.000,00	Rp.9.590.400,00	99,90
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.25.560.000,00	Rp.21.150.000,00	82,75
	5.1.02.02.01.0003 - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				Rp.10.000.000,00	Rp.8.600.000,00	86,00
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.85.920.000,00	Rp.85.920.000,00	100,00
B	**Mengurangi Beban Pengeluaran**				**Rp.5.182.778.000,00**	**Rp.5.024.570.393,00**	**96,95**
	1.06.04.1.01.0001 - Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	155	Orang	Rp.57.784.600,00	Rp.56.220.068,00	97,29
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.810.500,00	Rp.659.222,00	81,34
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.674.600,00	Rp.566.100,00	83,92
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.233.100,00	Rp.176.740,00	75,82
	5.1.02.01.01.0039 - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				Rp.53.186.400,00	Rp.51.938.006,00	97,65
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.2.880.000,00	Rp.2.880.000,00	100,00
	1.06.04.1.01.0004 - Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	103	Orang	Rp.120.325.600,00	Rp.119.977.680,00	99,71
	5.1.02.01.01.0039 - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				Rp.120.325.600,00	Rp.119.977.680,00	99,71
	1.06.04.1.01.0005 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	30	Orang	Rp.2.500.000.000,00	Rp.2.492.087.666,00	99,68
	5.1.02.05.02.0001 - Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain				Rp.2.500.000.000,00	Rp.2.492.087.666,00	99,68

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	PRESENTASE(%)
	1.06.04.1.01.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	580	Orang	Rp.155.516.600,00	Rp.154.796.161,00	99,54
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.1.266.400,00	Rp.1.028.852,00	81,24
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.847.000,00	Rp.710.400,00	83,87
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.378.200,00	Rp.291.941,00	77,19
	5.1.02.01.01.0039 - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				Rp.13.000.000,00	Rp.12.739.968,00	98,00
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.23.625.000,00	Rp.23.625.000,00	100,00
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.4.800.000,00	Rp.4.800.000,00	100,00
	5.1.06.04.01.0001 - Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)				Rp.111.600.000,00	Rp.111.600.000,00	100,00
	1.06.04.1.02.0002 - Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1087	Orang	Rp.600.647.100,00	Rp.584.381.526,00	97,29
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.534.100,00	Rp.430.458,00	80,60
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.760.800,00	Rp.638.250,00	83,89
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.145.100,00	Rp.108.541,00	74,80
	5.1.02.01.01.0039 - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				Rp.590.567.100,00	Rp.574.564.277,00	97,29
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.8.640.000,00	Rp.8.640.000,00	100,00
	1.06.04.1.02.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	40	Orang	Rp.226.861.200,00	Rp.200.283.910,00	88,28
	5.1.02.01.01.0012 - Belanja Bahan-Bahan Lainnya				Rp.7.920.000,00	Rp.7.875.000,00	99,43
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.1.191.800,00	Rp.876.010,00	73,50
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.595.900,00	Rp.499.500,00	83,82
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.1.625.500,00	Rp.1.005.000,00	61,83
	5.1.02.01.01.0032 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas				Rp.6.652.000,00	Rp.6.615.600,00	99,45
	5.1.02.01.01.0039 - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				Rp.76.076.000,00	Rp.76.012.800,00	99,92
	5.1.02.01.01.0057 - Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial				Rp.27.000.000,00	Rp.27.000.000,00	100,00
	5.1.02.02.01.0003 - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				Rp.16.200.000,00	Rp.12.800.000,00	79,01
	5.1.02.02.01.0011 - Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan				Rp.14.400.000,00	Rp.14.400.000,00	100,00
	5.1.02.02.12.0001 - Belanja Kursus Singkat/Pelatihan				Rp.41.600.000,00	Rp.19.600.000,00	47,12
	5.1.02.04.01.0003 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Rp.8.000.000,00	Rp.8.000.000,00	100,00
	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				Rp.25.600.000,00	Rp.25.600.000,00	100,00
	1.06.04.1.02.0010 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	30	Orang	Rp.12.960.000,00	Rp.12.697.249,00	97,97
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.534.100,00	Rp.430.458,00	80,60
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.760.800,00	Rp.638.250,00	83,89
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.145.100,00	Rp.108.541,00	74,80
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.11.520.000,00	Rp.11.520.000,00	100,00
	1.06.04.1.03.0001 - Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	321	Orang	Rp.151.012.500,00	Rp.149.462.834,00	98,97
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.171.800,00	Rp.85.914,00	50,01
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.674.600,00	Rp.566.100,00	83,92
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.113.600,00	Rp.86.513,00	76,16
	5.1.02.01.01.0039 - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				Rp.145.252.500,00	Rp.143.924.307,00	99,09
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.4.800.000,00	Rp.4.800.000,00	100,00
	1.06.04.1.03.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	260	Orang	Rp.14.352.200,00	Rp.13.828.406,00	96,35
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.939.400,00	Rp.541.431,00	57,64
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.509.700,00	Rp.427.350,00	83,84
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.168.100,00	Rp.124.625,00	74,14
	5.1.02.01.01.0057 - Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial				Rp.6.075.000,00	Rp.6.075.000,00	100,00
	5.1.02.02.01.0011 - Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan				Rp.900.000,00	Rp.900.000,00	100,00
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.5.760.000,00	Rp.5.760.000,00	100,00
	1.06.04.1.03.0010 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	50	Orang	Rp.30.570.600,00	Rp.29.664.154,00	97,03
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.1.170.700,00	Rp.688.970,00	58,85
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.760.800,00	Rp.638.250,00	83,89
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.254.100,00	Rp.184.765,00	72,71
	5.1.02.01.01.0039 - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				Rp.22.625.000,00	Rp.22.392.169,00	98,97
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.5.760.000,00	Rp.5.760.000,00	100,00
	1.06.04.1.03.0012 - Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	30	Orang	Rp.260.890.100,00	Rp.175.654.502,00	67,33
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.171.200,00	Rp.98.620,00	57,61
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.760.800,00	Rp.638.250,00	83,89
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.158.100,00	Rp.117.632,00	74,40

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	PRESENTASE(%)
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.4.800.000,00	Rp.4.800.000,00	100,00
	5.1.02.05.02.0002 - Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat				Rp.255.000.000,00	Rp.170.000.000,00	66,67
	1.06.04.1.04.0001 - Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	430	Orang	Rp.19.999.400,00	Rp.13.344.701,00	66,73
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.727.300,00	Rp.559.100,00	76,87
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.847.000,00	Rp.710.400,00	83,87
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.145.100,00	Rp.115.201,00	79,39
	5.1.02.01.01.0039 - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				Rp.18.280.000,00	Rp.11.960.000,00	65,43
	1.06.05.1.02.0001 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	192	Keluarga	Rp.29.142.000,00	Rp.27.996.141,00	96,07
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.2.077.700,00	Rp.1.068.708,00	51,44
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.431.000,00	Rp.360.750,00	83,70
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.233.300,00	Rp.166.683,00	71,45
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.26.400.000,00	Rp.26.400.000,00	100,00
	1.06.05.1.02.0002 - Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	100	Keluarga	Rp.9.480.000,00	Rp.9.407.601,00	99,24
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.45.200,00	Rp.21.201,00	46,90
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.314.800,00	Rp.266.400,00	84,63
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.9.120.000,00	Rp.9.120.000,00	100,00
	1.06.06.1.01.0003 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	2	Unit	Rp.3.240.000,00	Rp.0,00	0,00
	5.1.02.01.01.0039 - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				Rp.2.280.000,00	Rp.0,00	0,00
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.960.000,00	Rp.0,00	0,00
	1.06.06.1.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	100	Orang	Rp.3.240.000,00	Rp.960.000,00	29,63
	5.1.02.01.01.0039 - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				Rp.2.280.000,00	Rp.0,00	0,00
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.960.000,00	Rp.960.000,00	100,00
	1.06.06.1.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	595	Orang	Rp.335.331.800,00	Rp.332.622.844,00	99,19
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.85.800,00	Rp.39.294,00	45,80
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.401.000,00	Rp.338.550,00	84,43
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.27.225.000,00	Rp.27.225.000,00	100,00
	5.1.02.02.01.0020 - Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial				Rp.238.000.000,00	Rp.237.200.000,00	99,66
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.9.120.000,00	Rp.9.120.000,00	100,00
	5.1.02.04.01.0003 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Rp.60.500.000,00	Rp.58.700.000,00	97,02
	2.08.05.1.01.0001 - Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1	Dokumen	Rp.2.732.700,00	Rp.2.678.550,00	98,02
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.482.700,00	Rp.428.550,00	88,78
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.2.250.000,00	Rp.2.250.000,00	100,00
	2.08.06.1.02.0001 - Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	200	Orang	Rp.648.691.600,00	Rp.648.506.400,00	99,97
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.314.800,00	Rp.266.400,00	84,63
	5.1.02.01.01.0027 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp.376.800,00	Rp.240.000,00	63,69
	5.1.02.02.01.0029 - Belanja Jasa Tenaga Ahli				Rp.648.000.000,00	Rp.648.000.000,00	100,00
8	**1.06.2.08.0.00.06.0001 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak**				**Rp.3.224.118.200,00**	**Rp.3.027.145.478,00**	**93,89**
A	**Mengurangi Beban Pengeluaran**				**Rp.3.224.118.200,00**	**Rp.3.027.145.478,00**	**93,89**
	1.06.04.1.02.0001 - Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	-	Orang	Rp.91.401.500,00	Rp.91.087.200,00	99,66
	5.1.02.01.01.0036 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				Rp.91.401.500,00	Rp.91.087.200,00	99,66
	1.06.04.1.02.0002 - Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	-	Orang	Rp.1.478.250.000,00	Rp.1.455.545.500,00	98,46
	5.1.02.01.01.0039 - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				Rp.1.478.250.000,00	Rp.1.455.545.500,00	98,46
	1.06.04.1.02.0003 - Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	-	Orang	Rp.89.750.000,00	Rp.86.122.680,00	95,96
	5.1.02.01.01.0039 - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				Rp.89.750.000,00	Rp.86.122.680,00	95,96
	1.06.04.1.02.0005 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	-	Orang	Rp.21.680.300,00	Rp.21.577.290,00	99,52
	5.1.02.01.01.0039 - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				Rp.21.680.300,00	Rp.21.577.290,00	99,52
	1.06.04.1.02.0007 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	-	Orang	Rp.125.759.400,00	Rp.108.274.233,00	86,10
	5.1.02.01.01.0010 - Belanja Bahan-Isi Tabung Gas				Rp.66.150.000,00	Rp.49.500.000,00	74,83
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.37.259.400,00	Rp.37.008.732,00	99,33
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.862.000,00	Rp.854.700,00	99,15
	5.1.02.01.01.0027 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp.1.256.000,00	Rp.800.000,00	63,69

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	PRESENTASE(%)
	5.1.02.02.01.0051 - Belanja Jasa Pengolahan Sampah				Rp.9.600.000,00	Rp.9.600.000,00	100,00
	5.1.02.02.04.0036 - Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang				Rp.10.632.000,00	Rp.10.510.801,00	98,86
	1.06.04.1.02.0009 - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	-	Orang	Rp.100.000.000,00	Rp.30.810.000,00	30,81
	5.1.02.01.01.0039 - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				Rp.100.000.000,00	Rp.30.810.000,00	30,81
	1.06.04.1.02.0010 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	-	Orang	Rp.9.120.000,00	Rp.8.640.000,00	94,74
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.9.120.000,00	Rp.8.640.000,00	94,74
	1.06.04.1.03.0001 - Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	-	Orang	Rp.996.450.000,00	Rp.973.497.500,00	97,70
	5.1.02.01.01.0039 - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				Rp.996.450.000,00	Rp.973.497.500,00	97,70
	1.06.04.1.03.0002 - Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	-	Orang	Rp.70.000.000,00	Rp.67.277.100,00	96,11
	5.1.02.01.01.0039 - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				Rp.70.000.000,00	Rp.67.277.100,00	96,11
	1.06.04.1.03.0005 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	-	Orang	Rp.10.000.000,00	Rp.9.903.975,00	99,04
	5.1.02.01.01.0039 - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				Rp.10.000.000,00	Rp.9.903.975,00	99,04
	1.06.04.1.03.0007 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	-	Orang	Rp.164.987.000,00	Rp.143.570.000,00	87,02
	5.1.02.01.01.0010 - Belanja Bahan-Isi Tabung Gas				Rp.79.380.000,00	Rp.59.400.000,00	74,83
	5.1.02.01.01.0030 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				Rp.37.107.000,00	Rp.36.270.000,00	97,74
	5.1.02.01.01.0039 - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				Rp.29.300.000,00	Rp.28.700.000,00	97,95
	5.1.02.02.01.0051 - Belanja Jasa Pengolahan Sampah				Rp.19.200.000,00	Rp.19.200.000,00	100,00
	1.06.04.1.03.0010 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	-	Orang	Rp.6.720.000,00	Rp.3.840.000,00	57,14
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.6.720.000,00	Rp.3.840.000,00	57,14
	1.06.04.1.03.0012 - Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	-	Orang	Rp.60.000.000,00	Rp.27.000.000,00	45,00
	5.1.02.05.02.0001 - Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain				Rp.60.000.000,00	Rp.27.000.000,00	45,00
9	**1.06.2.08.0.00.06.0002 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak**				**Rp.4.365.172.000,00**	**Rp.4.210.174.656,00**	**96,45**
A	**Mengurangi Beban Pengeluaran**				**Rp.4.365.172.000,00**	**Rp.4.210.174.656,00**	**96,45**
	2.08.03.1.02.0001 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	-	Orang	Rp.3.360.000,00	Rp.349.650,00	10,41
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.416.000,00	Rp.349.650,00	84,05
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.64.000,00	Rp.0,00	0,00
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.2.880.000,00	Rp.0,00	0,00
	2.08.03.1.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	-	Layanan	Rp.4.361.812.000,00	Rp.4.209.825.006,00	96,52
	5.1.02.01.01.0030 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				Rp.2.529.600,00	Rp.2.111.553,00	83,47
	5.1.02.01.01.0036 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				Rp.8.174.400,00	Rp.7.520.916,00	92,01
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.5.085.000,00	Rp.0,00	0,00
	5.1.02.01.01.0057 - Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial				Rp.23.175.000,00	Rp.22.735.500,00	98,10
	5.1.02.02.01.0005 - Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara				Rp.9.000.000,00	Rp.0,00	0,00
	5.1.02.02.01.0073 - Belanja Medical Check Up				Rp.1.200.000,00	Rp.315.000,00	26,25
	5.1.02.02.04.0036 - Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang				Rp.3.700.000,00	Rp.600.000,00	16,22
	5.1.02.02.05.0043 - Belanja Sewa Hotel				Rp.4.200.000,00	Rp.600.000,00	14,29
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.188.492.000,00	Rp.151.500.000,00	80,37
	5.1.02.05.02.0002 - Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat				Rp.1.000.000,00	Rp.330.000,00	33,00
	5.2.03.01.01.0001 - Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor				Rp.1.991.992.000,00	Rp.1.942.430.075,00	97,51
	5.2.03.01.01.0032 - Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum				Rp.2.123.264.000,00	Rp.2.081.681.962,00	98,04
10	**1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah**				**Rp.1.657.773.900,00**	**Rp.1.572.561.601,00**	**94,86**
A	**Mengurangi Beban Pengeluaran**				**Rp.1.657.773.900,00**	**Rp.1.572.561.601,00**	**94,86**
	1.05.03.1.03.0028 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	900	Orang	Rp.1.657.773.900,00	Rp.1.572.561.601,00	94,86
	5.1.02.01.01.0010 - Belanja Bahan-Isi Tabung Gas				Rp.7.767.600,00	Rp.0,00	0,00
	5.1.02.01.01.0039 - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				Rp.1.650.006.300,00	Rp.1.572.561.601,00	95,31
11	**2.07.3.29.3.32.01.0000 - Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral**				**Rp.1.776.258.150,00**	**Rp.1.704.203.078,00**	**95,94**
A	**Meningkatkan Pendapatan**				**Rp.65.223.300,00**	**Rp.62.730.460,00**	**96,18**
	2.07.04.1.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	20	Orang	Rp.65.223.300,00	Rp.62.730.460,00	96,18
	5.1.02.01.01.0012 - Belanja Bahan-Bahan Lainnya				Rp.32.000.000,00	Rp.30.525.000,00	95,39
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.1.585.800,00	Rp.1.505.960,00	94,97

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	PRESENTASE(%)
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.862.000,00	Rp.818.900,00	95,00
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.1.130.000,00	Rp.700.600,00	62,00
	5.1.02.01.01.0027 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp.235.500,00	Rp.150.000,00	63,69
	5.1.02.01.01.0058 - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				Rp.7.650.000,00	Rp.7.270.000,00	95,03
	5.1.02.02.01.0011 - Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan				Rp.9.600.000,00	Rp.9.600.000,00	100,00
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.8.160.000,00	Rp.8.160.000,00	100,00
	5.1.02.04.01.0003 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Rp.4.000.000,00	Rp.4.000.000,00	100,00
B	**Mengurangi Beban Pengeluaran**				**Rp.1.711.034.850,00**	**Rp.1.641.472.618,00**	**95,93**
	2.07.05.1.03.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	11321	Orang	Rp.1.711.034.850,00	Rp.1.641.472.618,00	95,93
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.906.500,00	Rp.853.175,00	94,12
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.1.043.200,00	Rp.991.040,00	95,00
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.553.500,00	Rp.343.170,00	62,00
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.18.000.000,00	Rp.15.525.000,00	86,25
	5.1.02.02.01.0004 - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				Rp.48.000.000,00	Rp.48.000.000,00	100,00
	5.1.02.02.02.0012 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan				Rp.672.467.400,00	Rp.654.495.600,00	97,33
	5.1.02.02.02.0013 - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan				Rp.840.584.250,00	Rp.818.119.500,00	97,33
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.129.480.000,00	Rp.103.145.133,00	79,66
12	**2.07.3.29.0.00.01.0001 - Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral**				**Rp.260.122.500,00**	**Rp.251.898.836,00**	**96,84**
A	**Meningkatkan Pendapatan**				**Rp.260.122.500,00**	**Rp.251.898.836,00**	**96,84**
	2.07.03.1.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	-	Orang	Rp.260.122.500,00	Rp.251.898.836,00	96,84
	5.1.02.01.01.0009 - Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran				Rp.2.797.800,00	Rp.999.000,00	35,71
	5.1.02.01.01.0012 - Belanja Bahan-Bahan Lainnya				Rp.36.000.000,00	Rp.35.799.942,00	99,44
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.3.534.300,00	Rp.2.983.824,00	84,42
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.2.177.000,00	Rp.2.068.150,00	95,00
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.2.923.400,00	Rp.2.797.668,00	95,70
	5.1.02.01.01.0039 - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				Rp.125.120.000,00	Rp.123.225.472,00	98,49
	5.1.02.01.01.0058 - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				Rp.31.410.000,00	Rp.29.064.780,00	92,53
	5.1.02.02.01.0011 - Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan				Rp.21.600.000,00	Rp.20.400.000,00	94,44
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.5.760.000,00	Rp.5.760.000,00	100,00
	5.1.02.04.01.0003 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Rp.28.800.000,00	Rp.28.800.000,00	100,00
13	**2.13.2.12.2.14.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				**Rp.8.604.374.347,00**	**Rp.7.979.591.606,00**	**92,74**
A	**Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan**				**Rp.99.284.120,00**	**Rp.95.640.920,00**	**96,33**
	2.13.05.1.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2	Dokumen	Rp.99.284.120,00	Rp.95.640.920,00	96,33
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.1.580.900,00	Rp.1.326.500,00	83,91
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.866.400,00	Rp.647.000,00	74,68
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.338.000,00	Rp.236.600,00	70,00
	5.1.02.01.01.0027 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp.628.000,00	Rp.400.000,00	63,69
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.1.800.000,00	Rp.880.000,00	48,89
	5.1.02.02.01.0026 - Belanja Jasa Tenaga Administrasi				Rp.63.931.220,00	Rp.63.931.220,00	100,00
	5.1.02.02.02.0005 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				Rp.2.638.500,00	Rp.2.638.500,00	100,00
	5.1.02.02.02.0006 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Rp.143.840,00	Rp.143.840,00	100,00
	5.1.02.02.02.0007 - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				Rp.179.800,00	Rp.179.800,00	100,00
	5.1.02.02.02.0010 - Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN				Rp.2.217.460,00	Rp.2.217.460,00	100,00
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.24.960.000,00	Rp.23.040.000,00	92,31
B	**Meningkatkan Pendapatan**				**Rp.8.505.090.227,00**	**Rp.7.883.950.686,00**	**92,70**
	2.13.05.1.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	Laporan	Rp.8.505.090.227,00	Rp.7.883.950.686,00	92,70
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.17.274.000,00	Rp.15.780.000,00	91,35
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.9.482.000,00	Rp.7.040.000,00	74,25
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.104.433.400,00	Rp.89.532.110,00	85,73
	5.1.02.01.01.0027 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp.2.355.000,00	Rp.1.500.000,00	63,69
	5.1.02.01.01.0032 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas				Rp.18.301.400,00	Rp.11.832.600,00	64,65
	5.1.02.01.01.0036 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				Rp.17.000.000,00	Rp.16.635.000,00	97,85
	5.1.02.01.01.0039 - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				Rp.1.272.750.000,00	Rp.1.181.826.755,00	92,86
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.112.500.000,00	Rp.110.025.000,00	97,80
	5.1.02.01.01.0058 - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				Rp.720.100.000,00	Rp.717.525.000,00	99,64
	5.1.02.01.01.0062 - Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)				Rp.48.100.000,00	Rp.48.099.974,00	100,00
	5.1.02.02.01.0004 - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				Rp.197.500.000,00	Rp.197.500.000,00	100,00
	5.1.02.02.01.0026 - Belanja Jasa Tenaga Administrasi				Rp.148.838.367,00	Rp.148.838.367,00	100,00

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	PRESENTASE(%)
	5.1.02.02.01.0043 - Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan				Rp.70.000.000,00	Rp.68.764.500,00	98,23
	5.1.02.02.01.0055 - Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan				Rp.17.500.000,00	Rp.17.500.000,00	100,00
	5.1.02.02.02.0005 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				Rp.6.200.475,00	Rp.6.200.475,00	100,00
	5.1.02.02.02.0006 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Rp.338.024,00	Rp.338.024,00	100,00
	5.1.02.02.02.0007 - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				Rp.422.530,00	Rp.422.530,00	100,00
	5.1.02.02.02.0010 - Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN				Rp.5.211.031,00	Rp.5.211.031,00	100,00
	5.1.02.02.04.0036 - Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang				Rp.10.522.000,00	Rp.6.878.000,00	65,37
	5.1.02.02.04.0117 - Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya				Rp.283.930.000,00	Rp.267.506.000,00	94,22
	5.1.02.02.04.0132 - Belanja Sewa Peralatan Studio Audio				Rp.111.000.000,00	Rp.107.700.000,00	97,03
	5.1.02.02.04.0133 - Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film				Rp.28.000.000,00	Rp.27.400.000,00	97,86
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.442.332.000,00	Rp.368.895.320,00	83,40
	5.1.02.05.01.0001 - Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan				Rp.65.000.000,00	Rp.65.000.000,00	100,00
	5.1.05.05.03.0001 - Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan				Rp.4.796.000.000,00	Rp.4.396.000.000,00	91,66
14	**2.15.0.00.0.00.01.0004 - Dinas Perhubungan**				**Rp.56.582.200,00**	**Rp.52.746.000,00**	**93,22**
A	**Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan**				**Rp.56.582.200,00**	**Rp.52.746.000,00**	**93,22**
	2.15.03.1.09.0004 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	-	Laporan	Rp.56.582.200,00	Rp.52.746.000,00	93,22
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.646.400,00	Rp.335.000,00	51,83
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.775.800,00	Rp.531.000,00	68,45
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.55.160.000,00	Rp.51.880.000,00	94,05
15	**2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**				**Rp.578.792.215,00**	**Rp.542.975.130,00**	**93,81**
A	**Meningkatkan Pendapatan**				**Rp.578.792.215,00**	**Rp.542.975.130,00**	**93,81**
	2.17.07.1.01.0001 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	205	Unit Usaha	Rp.338.343.821,00	Rp.326.750.299,00	96,57
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.1.090.600,00	Rp.1.075.000,00	98,57
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.2.952.800,00	Rp.2.216.000,00	75,05
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.1.375.200,00	Rp.910.478,00	66,21
	5.1.02.01.01.0027 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp.1.507.200,00	Rp.960.000,00	63,69
	5.1.02.01.01.0029 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				Rp.7.659.200,00	Rp.5.950.000,00	77,68
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.5.400.000,00	Rp.5.280.000,00	97,78
	5.1.02.02.01.0003 - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				Rp.14.100.000,00	Rp.6.100.000,00	43,26
	5.1.02.02.01.0026 - Belanja Jasa Tenaga Administrasi				Rp.254.721.441,00	Rp.254.721.441,00	100,00
	5.1.02.02.02.0005 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				Rp.10.685.925,00	Rp.10.685.925,00	100,00
	5.1.02.02.02.0006 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Rp.582.552,00	Rp.582.552,00	100,00
	5.1.02.02.02.0007 - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				Rp.728.190,00	Rp.728.190,00	100,00
	5.1.02.02.02.0010 - Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN				Rp.8.980.713,00	Rp.8.980.713,00	100,00
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.22.560.000,00	Rp.22.560.000,00	100,00
	5.1.02.04.01.0003 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Rp.6.000.000,00	Rp.6.000.000,00	100,00
	2.17.07.1.01.0002 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	100	Orang	Rp.65.840.000,00	Rp.54.825.010,00	83,27
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.761.000,00	Rp.558.500,00	73,39
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.1.746.000,00	Rp.1.320.000,00	75,60
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.2.276.400,00	Rp.2.121.210,00	93,18
	5.1.02.01.01.0029 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				Rp.2.784.600,00	Rp.2.730.000,00	98,04
	5.1.02.01.01.0035 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata				Rp.3.000.000,00	Rp.2.775.000,00	92,50
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.1.125.000,00	Rp.1.100.000,00	97,78
	5.1.02.02.01.0003 - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				Rp.2.700.000,00	Rp.2.500.000,00	92,59
	5.1.02.02.01.0037 - Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan				Rp.3.600.000,00	Rp.3.600.000,00	100,00
	5.1.02.02.01.0055 - Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan				Rp.16.300.000,00	Rp.16.261.500,00	99,76
	5.1.02.02.04.0117 - Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya				Rp.7.947.000,00	Rp.7.858.800,00	98,89
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.9.600.000,00	Rp.0,00	0,00
	5.1.02.05.01.0001 - Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan				Rp.14.000.000,00	Rp.14.000.000,00	100,00
	2.17.08.1.01.0001 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	110	Unit Usaha	Rp.174.608.394,00	Rp.161.399.821,00	92,44
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.471.300,00	Rp.401.900,00	85,27
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.1.147.000,00	Rp.880.000,00	76,72
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.1.265.400,00	Rp.1.016.150,00	80,30
	5.1.02.01.01.0027 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp.251.200,00	Rp.160.000,00	63,69
	5.1.02.01.01.0029 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				Rp.2.835.100,00	Rp.2.000.000,00	70,54
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.5.850.000,00	Rp.5.720.000,00	97,78
	5.1.02.02.01.0003 - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				Rp.29.200.000,00	Rp.27.400.000,00	93,84

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	PRESENTASE(%)
	5.1.02.02.01.0026 - Belanja Jasa Tenaga Administrasi				Rp.105.883.074,00	Rp.96.893.391,00	91,51
	5.1.02.02.02.0005 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				Rp.4.485.450,00	Rp.4.089.675,00	91,18
	5.1.02.02.02.0006 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Rp.244.528,00	Rp.222.952,00	91,18
	5.1.02.02.02.0007 - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				Rp.305.660,00	Rp.278.690,00	91,18
	5.1.02.02.02.0010 - Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN				Rp.3.769.682,00	Rp.3.437.063,00	91,18
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.2.400.000,00	Rp.2.400.000,00	100,00
	5.1.02.04.01.0003 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Rp.16.500.000,00	Rp.16.500.000,00	100,00
16	**2.22.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan**				**Rp.1.129.837.200,00**	**Rp.1.118.808.654,00**	**99,02**
A	**Meningkatkan Pendapatan**				**Rp.1.129.837.200,00**	**Rp.1.118.808.654,00**	**99,02**
	2.22.03.1.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	135	Orang	Rp.1.129.837.200,00	Rp.1.118.808.654,00	99,02
	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp.4.500.000,00	Rp.4.489.600,00	99,77
	5.1.02.01.01.0027 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp.1.507.200,00	Rp.1.500.000,00	99,52
	5.1.02.01.01.0036 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				Rp.7.500.000,00	Rp.7.492.500,00	99,90
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.45.575.000,00	Rp.42.333.500,00	92,89
	5.1.02.01.01.0058 - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				Rp.137.205.000,00	Rp.135.375.600,00	98,67
	5.1.02.02.01.0003 - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				Rp.72.100.000,00	Rp.67.900.000,00	94,17
	5.1.02.02.01.0025 - Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan				Rp.90.600.000,00	Rp.90.600.000,00	100,00
	5.1.02.02.01.0029 - Belanja Jasa Tenaga Ahli				Rp.14.000.000,00	Rp.14.000.000,00	100,00
	5.1.02.02.01.0037 - Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan				Rp.32.000.000,00	Rp.31.800.000,00	99,38
	5.1.02.02.01.0047 - Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara				Rp.301.550.000,00	Rp.300.017.456,00	99,49
	5.1.02.02.01.0055 - Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan				Rp.7.500.000,00	Rp.7.499.998,00	100,00
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.4.800.000,00	Rp.4.800.000,00	100,00
	5.1.02.05.01.0001 - Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan				Rp.411.000.000,00	Rp.411.000.000,00	100,00
17	**3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan**				**Rp.631.540.689,00**	**Rp.625.115.689,00**	**98,98**
A	**Meningkatkan Pendapatan**				**Rp.631.540.689,00**	**Rp.625.115.689,00**	**98,98**
	3.25.02.1.03.0001 - Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	40	Orang	Rp.55.796.492,00	Rp.54.356.492,00	97,42
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.2.250.000,00	Rp.2.250.000,00	100,00
	5.1.02.02.01.0003 - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				Rp.1.800.000,00	Rp.1.800.000,00	100,00
	5.1.02.02.01.0026 - Belanja Jasa Tenaga Administrasi				Rp.36.958.732,00	Rp.36.958.732,00	100,00
	5.1.02.02.02.0005 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				Rp.1.583.100,00	Rp.1.583.100,00	100,00
	5.1.02.02.02.0006 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Rp.86.304,00	Rp.86.304,00	100,00
	5.1.02.02.02.0007 - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				Rp.107.880,00	Rp.107.880,00	100,00
	5.1.02.02.02.0010 - Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN				Rp.1.330.476,00	Rp.1.330.476,00	100,00
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.7.680.000,00	Rp.6.240.000,00	81,25
	5.1.02.04.01.0003 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Rp.4.000.000,00	Rp.4.000.000,00	100,00
	3.25.03.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1	Unit	Rp.416.024.197,00	Rp.415.724.197,00	99,93
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.1.000.000,00	Rp.700.000,00	70,00
	5.1.02.02.01.0026 - Belanja Jasa Tenaga Administrasi				Rp.52.941.537,00	Rp.52.941.537,00	100,00
	5.1.02.02.02.0005 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				Rp.2.242.725,00	Rp.2.242.725,00	100,00
	5.1.02.02.02.0006 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Rp.122.264,00	Rp.122.264,00	100,00
	5.1.02.02.02.0007 - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				Rp.152.830,00	Rp.152.830,00	100,00
	5.1.02.02.02.0010 - Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN				Rp.1.884.841,00	Rp.1.884.841,00	100,00
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.7.680.000,00	Rp.7.680.000,00	100,00
	5.1.05.05.03.0001 - Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan				Rp.350.000.000,00	Rp.350.000.000,00	100,00
	3.25.04.1.05.0004 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3	Unit	Rp.159.720.000,00	Rp.155.035.000,00	97,07
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.500.000,00	Rp.350.000,00	70,00
	5.1.02.01.01.0039 - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				Rp.147.700.000,00	Rp.143.165.000,00	96,93
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.11.520.000,00	Rp.11.520.000,00	100,00
18	**3.27.2.09.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**				**Rp.14.286.684.411,00**	**Rp.14.214.471.136,00**	**99,49**
A	**Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan**				**Rp.2.243.230.279,00**	**Rp.2.228.868.924,00**	**99,36**
	2.09.03.1.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	3	Laporan	Rp.1.625.509.142,00	Rp.1.615.044.182,00	99,36
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.5.207.400,00	Rp.2.601.840,00	49,96
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.4.011.000,00	Rp.3.340.650,00	83,29
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.5.521.000,00	Rp.4.914.650,00	89,02
	5.1.02.01.01.0032 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas				Rp.3.074.400,00	Rp.2.940.000,00	95,63
	5.1.02.01.01.0036 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				Rp.22.271.400,00	Rp.18.100.000,00	81,27
	5.1.02.01.01.0043 - Belanja Natura dan Pakan-Natura				Rp.436.400,00	Rp.418.500,00	95,90
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.9.000.000,00	Rp.8.800.000,00	97,78
	5.1.02.01.01.0058 - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				Rp.15.900.000,00	Rp.15.900.000,00	100,00
	5.1.02.02.01.0003 - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				Rp.5.400.000,00	Rp.4.365.000,00	80,83

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	PRESENTASE(%)
	5.1.02.02.01.0025 - Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan				Rp.105.000.000,00	Rp.105.000.000,00	100,00
	5.1.02.02.01.0026 - Belanja Jasa Tenaga Administrasi				Rp.196.786.782,00	Rp.196.786.782,00	100,00
	5.1.02.02.01.0047 - Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara				Rp.1.000.000.000,00	Rp.999.210.000,00	99,92
	5.1.02.02.02.0005 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				Rp.8.179.350,00	Rp.8.179.350,00	100,00
	5.1.02.02.02.0006 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Rp.445.904,00	Rp.445.904,00	100,00
	5.1.02.02.02.0007 - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				Rp.557.380,00	Rp.557.380,00	100,00
	5.1.02.02.02.0010 - Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN				Rp.6.874.126,00	Rp.6.874.126,00	100,00
	5.1.02.02.04.0117 - Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya				Rp.2.684.000,00	Rp.2.450.000,00	91,28
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.32.160.000,00	Rp.32.160.000,00	100,00
	5.1.02.04.01.0003 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Rp.2.000.000,00	Rp.2.000.000,00	100,00
	5.1.05.05.03.0001 - Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan				Rp.200.000.000,00	Rp.200.000.000,00	100,00
	2.09.04.1.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1	Dokumen	Rp.73.772.715,00	Rp.71.114.765,00	96,40
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.4.416.400,00	Rp.2.058.970,00	46,62
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.1.233.200,00	Rp.1.006.680,00	81,63
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.3.330.000,00	Rp.3.256.000,00	97,78
	5.1.02.02.01.0026 - Belanja Jasa Tenaga Administrasi				Rp.47.948.415,00	Rp.47.948.415,00	100,00
	5.1.02.02.02.0005 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				Rp.1.978.875,00	Rp.1.978.875,00	100,00
	5.1.02.02.02.0006 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Rp.107.880,00	Rp.107.880,00	100,00
	5.1.02.02.02.0007 - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				Rp.134.850,00	Rp.134.850,00	100,00
	5.1.02.02.02.0010 - Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN				Rp.1.663.095,00	Rp.1.663.095,00	100,00
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.12.960.000,00	Rp.12.960.000,00	100,00
	3.27.03.1.01.0001 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1	Dokumen	Rp.543.948.422,00	Rp.542.709.977,00	99,77
	5.1.02.01.01.0005 - Belanja Bahan-Bahan Baku				Rp.5.292.300,00	Rp.5.022.000,00	94,89
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.942.300,00	Rp.716.218,00	76,01
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.866.400,00	Rp.686.890,00	79,28
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.267.000,00	Rp.177.822,00	66,60
	5.1.02.01.01.0036 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				Rp.1.862.600,00	Rp.1.831.500,00	98,33
	5.1.02.01.01.0039 - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				Rp.19.961.000,00	Rp.19.588.725,00	98,13
	5.1.02.01.01.0058 - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				Rp.3.150.000,00	Rp.3.080.000,00	97,78
	5.1.02.02.01.0003 - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				Rp.10.800.000,00	Rp.10.800.000,00	100,00
	5.1.02.02.01.0026 - Belanja Jasa Tenaga Administrasi				Rp.452.511.662,00	Rp.452.511.662,00	100,00
	5.1.02.02.02.0005 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				Rp.18.733.350,00	Rp.18.733.350,00	100,00
	5.1.02.02.02.0006 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Rp.1.021.264,00	Rp.1.021.264,00	100,00
	5.1.02.02.02.0007 - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				Rp.1.276.580,00	Rp.1.276.580,00	100,00
	5.1.02.02.02.0010 - Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN				Rp.15.743.966,00	Rp.15.743.966,00	100,00
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.11.520.000,00	Rp.11.520.000,00	100,00
B	**Meningkatkan Pendapatan**				**Rp.12.043.454.132,00**	**Rp.11.985.602.212,00**	**99,52**
	3.27.02.1.04.0001 - Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3	Dokumen	Rp.12.043.454.132,00	Rp.11.985.602.212,00	99,52
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.2.183.200,00	Rp.1.837.160,00	84,15
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.1.724.000,00	Rp.1.354.200,00	78,55
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.1.728.000,00	Rp.1.123.200,00	65,00
	5.1.02.01.01.0039 - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				Rp.389.610.800,00	Rp.333.959.520,00	85,72
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.19.800.000,00	Rp.18.920.000,00	95,56
	5.1.02.02.01.0026 - Belanja Jasa Tenaga Administrasi				Rp.164.821.172,00	Rp.164.821.172,00	100,00
	5.1.02.02.02.0005 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				Rp.6.860.100,00	Rp.6.860.100,00	100,00
	5.1.02.02.02.0006 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Rp.373.984,00	Rp.373.984,00	100,00
	5.1.02.02.02.0007 - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				Rp.467.480,00	Rp.467.480,00	100,00
	5.1.02.02.02.0010 - Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN				Rp.5.765.396,00	Rp.5.765.396,00	100,00
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.45.120.000,00	Rp.45.120.000,00	100,00
	5.1.05.05.03.0001 - Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan				Rp.11.405.000.000,00	Rp.11.405.000.000,00	100,00
19	**3.27.2.09.0.00.01.0012 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**				**Rp.342.943.450,00**	**Rp.327.311.904,00**	**95,44**
A	**Meningkatkan Pendapatan**				**Rp.342.943.450,00**	**Rp.327.311.904,00**	**95,44**
	3.27.05.1.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	-	Ha	Rp.342.943.450,00	Rp.327.311.904,00	95,44
	5.1.02.01.01.0001 - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi				Rp.6.086.800,00	Rp.4.990.000,00	81,98
	5.1.02.01.01.0002 - Belanja Bahan-Bahan Kimia				Rp.10.338.900,00	Rp.8.830.000,00	85,41
	5.1.02.01.01.0005 - Belanja Bahan-Bahan Baku				Rp.79.615.500,00	Rp.75.503.000,00	94,83
	5.1.02.01.01.0008 - Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman				Rp.2.542.300,00	Rp.2.390.000,00	94,01
	5.1.02.01.01.0010 - Belanja Bahan-Isi Tabung Gas				Rp.6.247.500,00	Rp.5.100.000,00	81,63

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	PRESENTASE(%)
	5.1.02.01.01.0012 - Belanja Bahan-Bahan Lainnya				Rp.3.578.000,00	Rp.3.440.200,00	96,15
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.7.431.500,00	Rp.6.106.600,00	82,17
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.1.812.000,00	Rp.1.550.000,00	85,54
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.1.154.300,00	Rp.983.800,00	85,23
	5.1.02.01.01.0036 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				Rp.7.518.400,00	Rp.5.961.652,00	79,29
	5.1.02.01.01.0037 - Belanja Obat-Obatan-Obat				Rp.8.268.700,00	Rp.6.551.002,00	79,23
	5.1.02.01.01.0038 - Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya				Rp.8.057.700,00	Rp.7.378.000,00	91,56
	5.1.02.01.01.0045 - Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya				Rp.649.400,00	Rp.610.000,00	93,93
	5.1.02.02.01.0016 - Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum				Rp.6.000.000,00	Rp.6.000.000,00	100,00
	5.1.02.02.01.0026 - Belanja Jasa Tenaga Administrasi				Rp.159.828.050,00	Rp.159.828.050,00	100,00
	5.1.02.02.01.0050 - Belanja Jasa Kalibrasi				Rp.12.225.400,00	Rp.10.500.600,00	85,89
	5.1.02.02.02.0005 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				Rp.6.596.250,00	Rp.6.596.250,00	100,00
	5.1.02.02.02.0006 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Rp.359.600,00	Rp.359.600,00	100,00
	5.1.02.02.02.0007 - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				Rp.449.500,00	Rp.449.500,00	100,00
	5.1.02.02.02.0010 - Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN				Rp.5.543.650,00	Rp.5.543.650,00	100,00
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.8.640.000,00	Rp.8.640.000,00	100,00
20	**2.22.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Pemajuan Masyarakat Adat**				**Rp.528.438.391,00**	**Rp.491.107.971,00**	**92,94**
A	**Meningkatkan Pendapatan**				**Rp.528.438.391,00**	**Rp.491.107.971,00**	**92,94**
	2.22.09.8.02.0001 - Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	30	Desa	Rp.65.165.900,00	Rp.55.656.707,00	85,41
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.2.786.900,00	Rp.1.995.500,00	71,60
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.4.333.800,00	Rp.3.311.000,00	76,40
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.558.000,00	Rp.390.209,00	69,93
	5.1.02.01.01.0029 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				Rp.1.591.200,00	Rp.1.559.998,00	98,04
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.22.500.000,00	Rp.22.000.000,00	97,78
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.33.396.000,00	Rp.26.400.000,00	79,05
	2.22.09.8.02.0002 - Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	45	Desa	Rp.463.272.491,00	Rp.435.451.264,00	93,99
	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp.1.054.000,00	Rp.680.000,00	64,52
	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp.4.420.000,00	Rp.3.375.000,00	76,36
	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp.75.500,00	Rp.52.797,00	69,93
	5.1.02.01.01.0029 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				Rp.530.400,00	Rp.519.999,00	98,04
	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp.27.000.000,00	Rp.12.317.500,00	45,62
	5.1.02.02.01.0026 - Belanja Jasa Tenaga Administrasi				Rp.158.824.611,00	Rp.149.834.928,00	94,34
	5.1.02.02.02.0005 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				Rp.6.728.175,00	Rp.6.332.400,00	94,12
	5.1.02.02.02.0006 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Rp.366.792,00	Rp.345.216,00	94,12
	5.1.02.02.02.0007 - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				Rp.458.490,00	Rp.431.520,00	94,12
	5.1.02.02.02.0010 - Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN				Rp.5.654.523,00	Rp.5.321.904,00	94,12
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp.8.160.000,00	Rp.6.240.000,00	76,47
	5.1.02.05.01.0002 - Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi				Rp.250.000.000,00	Rp.250.000.000,00	100,00
				TOTAL ANGGARAN UNTUK PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM	**Rp.589.821.767.054,00**	**Rp.443.777.625.102,50**	**75,24**
				TOTAL BELANJA DAERAH	**Rp.7.412.970.277.983,60**	**Rp.6.555.001.412.634,62**	**88,42**
				PERSENTASE	**7,96%**	**6,77%**	

Pemerintah Provinsi Bali
Laporan Tematik
Pencegahan Dan Percepatan Penurunan Stunting
Per 31 Desember 2025

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	PRESENTASE (%)	BOBOT SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN PERHITUNGAN BOBOT SUB KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PERHITUNGAN BOBOT SUB KEGIATAN	PRESENTASE (%)
1	**1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**					**165.723.201.448**	**87.081.877.302**	**52,55**		**33.183.586.770**	**17.453.281.679**	**52,60**
	1.01.02.1.01.0053 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	156	Satuan Pendidikan	165.426.169.948	86.810.411.062	52,48	0,2	33.085.233.990	17.362.082.212	52,48
	1.01.02.1.01.0060 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1,00	Dokumen	76.299.900	68.166.750	89,34	0,2	15.259.980	13.633.350	89,34
	1.01.02.1.01.0061 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1,00	Dokumen	44.690.000	41.927.850	93,82	0,5	22.345.000	20.963.925	93,82
	1.01.02.1.02.0054 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1,00	Dokumen	68.960.000	65.710.860	95,29	0,5	34.480.000	32.855.430	95,29
	1.01.02.1.03.0059 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	14,00	Dokumen	90.910.000	80.278.760	88,31	0,2	18.182.000	16.055.752	88,31
	1.01.02.1.03.0060 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	14,00	Dokumen	16.171.600	15.382.020	95,12	0,5	8.085.800	7.691.010	95,12
2	**1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan**					**356.607.873.059**	**309.624.864.884**	**86,83**		**284.656.546.043**	**247.116.687.060**	**86,81**
	1.02.02.1.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1,00	Dokumen	149.964.615	144.295.165	96,22	0,2	29.992.923	28.859.033	96,22
	1.02.02.1.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1,00	Dokumen	137.301.520	136.657.520	99,53	0,2	27.460.304	27.331.504	99,53
	1.02.02.1.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1,00	Dokumen	204.191.520	198.944.732	97,43	0,8	153.143.640	149.208.549	97,43
	1.02.02.1.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1,00	Dokumen	90.493.200	90.027.200	99,49	0,3	22.623.300	22.506.800	99,49
	1.02.02.1.02.0017 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1,00	Dokumen	112.280.000	72.390.000	64,47	0,5	56.140.000	36.195.000	64,47
	1.02.02.1.02.0021 - Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Terlaksananya Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1,00	Dokumen	58.533.800	58.515.050	99,97	1,0	58.533.800	58.515.050	99,97
	1.02.03.1.01.0001 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	29000,00	Orang	156.328.860	151.698.960	97,04	0,8	125.063.088	121.359.168	97,04
	1.02.05.1.01.0001 - Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1,00	Dokumen	308.484.615	303.870.259	98,50	0,2	61.696.923	60.774.052	98,50
	1.02.05.1.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1,00	Dokumen	227.375.200	185.446.890	81,56	0,2	45.475.040	37.089.378	81,56

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	PRESENTASE (%)	BOBOT SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN PERHITUNGAN BOBOT SUB KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PERHITUNGAN BOBOT SUB KEGIATAN	PRESENTASE (%)
	1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0,00	Unit Kerja	7.200.000.000	3.332.942.746	46,29	0,8	5.760.000.000	2.666.354.196	46,29
	1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0,00	Unit Kerja	3.000.000.000	2.822.880.107	94,10	0,8	2.400.000.000	2.258.304.086	94,10
	1.02.02.1.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	Dokumen	98.034.105	93.757.745	95,64	0,3	24.508.526	23.439.436	95,64
	1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0,00	Unit Kerja	200.000.000.000	177.311.074.464	88,66	0,8	160.000.000.000	141.848.859.571	88,66
	1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0,00	Unit Kerja	28.000.000.000	20.849.306.525	74,46	0,8	22.400.000.000	16.679.445.220	74,46
	1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0,00	Unit Kerja	93.000.000.000	83.981.802.498	90,30	0,8	74.400.000.000	67.185.441.999	90,30
	1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0,00	Unit Kerja	23.864.885.624	19.891.255.022	83,35	0,8	19.091.908.499	15.913.004.018	83,35
3	**1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman**					**96.116.430.628**	**80.689.039.890**	**83,95**		**47.504.023.799**	**39.851.158.422**	**83,89**
	1.03.03.1.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	3,00	Dokumen	1.517.285.649	1.373.224.943	90,51	0,2	303.457.130	274.644.989	90,51
	1.03.03.1.01.0017 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	15,00	Liter/Detik	29.543.323.255	23.189.545.990	78,49	0,5	14.771.661.628	11.594.772.995	78,49
	1.03.05.1.01.0013 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	0,00	M^3/Hari	3.167.010.552	2.229.748.415	70,41	0,5	1.583.505.276	1.114.874.208	70,41
	1.03.05.1.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2,00	Dokumen	258.946.400	240.206.137	92,76	0,2	51.789.280	48.041.227	92,76
	1.04.05.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1,00	Laporan	71.073.000	31.107.330	43,77	0,2	14.214.600	6.221.466	43,77
	1.03.03.1.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	0,00	Unit	43.218.719.622	38.315.121.244	88,65	0,5	21.609.359.811	19.157.560.622	88,65
	1.03.05.1.01.0018 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara	0,00	Unit	18.340.072.150	15.310.085.831	83,48	0,5	9.170.036.075	7.655.042.916	83,48
4	**1.06.2.08.0.00.06.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak**					**1.225.246.500**	**1.192.525.103**	**97,33**		**62.227.200**	**55.651.815**	**89,43**
	1.06.04.1.01.0001 - Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	155,00	Orang	57.784.600	56.220.068	97,29	0,8	46.227.680	44.976.054	97,29

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	PRESENTASE (%)	BOBOT SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN PERHITUNGAN BOBOT SUB KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PERHITUNGAN BOBOT SUB KEGIATAN	PRESENTASE (%)
	1.06.04.1.03.0001 - Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	321,00	Orang	151.012.500	149.462.834	98,97	0,0	0	0	0,00
	1.06.04.1.04.0001 - Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	430,00	Orang	19.999.400	13.344.701	66,73	0,8	15.999.520	10.675.761	66,73
	1.06.04.1.03.0001 - Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	0,00	Orang	996.450.000	973.497.500	97,70	0,0	0	0	0,00
5	**5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**					**194.972.400**	**94.789.948**	**48,62**		**38.994.480**	**18.957.990**	**48,62**
	5.02.02.1.02.0005 - Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	9,00	Dokumen	194.972.400	94.789.948	48,62	0,2	38.994.480	18.957.990	48,62
6	**2.13.2.12.2.14.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					**9.028.789.082**	**8.393.366.091**	**92,96**		**2.231.012.328**	**2.072.870.753**	**92,91**
	2.13.04.1.01.0002 - Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1,00	Dokumen	95.504.715	95.332.215	99,82	0,2	19.100.943	19.066.443	99,82
	2.13.04.1.01.0008 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1,00	Dokumen	328.910.020	318.442.270	96,82	0,2	65.782.004	63.688.454	96,82
	2.13.05.1.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2,00	Dokumen	99.284.120	95.640.920	96,33	0,2	19.856.824	19.128.184	96,33
	2.13.05.1.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1,00	Laporan	8.505.090.227	7.883.950.686	92,70	0,3	2.126.272.557	1.970.987.672	92,70
7	**2.16.2.20.2.21.02.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**					**2.949.015.748**	**2.725.984.724**	**92,44**		**589.803.150**	**545.196.945**	**92,44**
	2.16.02.1.01.0024 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	100,00	Media	2.949.015.748	2.725.984.724	92,44	0,2	589.803.150	545.196.945	92,44
8	**3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan**					**819.786.197**	**734.940.982**	**89,65**		**409.893.099**	**367.470.491**	**89,65**
	3.25.06.1.02.0004 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	30,00	Kegiatan	329.160.797	316.617.742	96,19	0,5	164.580.399	158.308.871	96,19

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	PRESENTASE (%)	BOBOT SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN PERHITUNGAN BOBOT SUB KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PERHITUNGAN BOBOT SUB KEGIATAN	PRESENTASE (%)
	3.25.06.1.02.0004 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	0,00	Kegiatan	490.625.400	418.323.240	85,26	0,5	245.312.700	209.161.620	85,26
9	**3.31.3.30.0.00.02.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan**					**5.205.849.261**	**5.046.449.875**	**96,94**		**1.041.169.852**	**1.009.289.975**	**96,94**
	3.31.02.1.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6,00	Dokumen	4.482.427.761	4.324.649.875	96,48	0,2	896.485.552	864.929.975	96,48
	3.31.02.1.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	0,00	Dokumen	723.421.500	721.800.000	99,78	0,2	144.684.300	144.360.000	99,78
10	**5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**					**156.066.800**	**111.193.510**	**71,25**		**31.213.360**	**22.238.702**	**71,25**
	5.01.02.1.03.0004 - Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasi/Evaluasinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	27,00	Dokumen	156.066.800	111.193.510	71,25	0,2	31.213.360	22.238.702	71,25
11	**5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**					**21.700.000.000**	**18.149.308.140**	**83,64**		**17.360.000.000**	**14.519.446.512**	**83,64**
	5.03.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0,00	Unit Kerja	21.700.000.000	18.149.308.140	83,64	0,8	17.360.000.000	14.519.446.512	83,64
					TOTAL ANGGARAN UNTUK PENURUNAN STUNTING	**659.727.231.123**	**513.844.340.449**	**77,89**		**387.108.470.080**	**323.032.250.344**	**83,45**
					TOTAL BELANJA DAERAH	**7.412.970.277.984**	**6.555.001.412.635**	**88,42**				
					PERSENTASE	**8,90%**	**7,84%**					

Pemerintah Provinsi Bali
Laporan Tematik
Belanja Pengendalian Inflasi
Per 31 Desember 2025

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	PRESENTASE (%)
1	**2.07.3.29.3.32.01.0000 - Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya M**					**Rp.1.800.000,00**	**Rp.1.800.000,00**	**100,00**
A	K1 - Ketersediaan Pasokan					Rp.1.800.000,00	Rp.1.800.000,00	100,00
	2.07.05.1.03.0003 - Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	1	Surat Keputusan	Rp.1.800.000,00	Rp.1.800.000,00	100,00
2	**3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan**					**Rp.159.720.000,00**	**Rp.155.035.000,00**	**97,07**
A	K2 - Keterjangkauan Harga					Rp.159.720.000,00	Rp.155.035.000,00	97,07
	3.25.04.1.05.0004 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3	Unit	Rp.159.720.000,00	Rp.155.035.000,00	97,07
3	**3.27.2.09.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**					**Rp.32.732.892.747,00**	**Rp.31.882.094.647,00**	**97,40**
A	K2 - Keterjangkauan Harga					Rp.32.732.892.747,00	Rp.31.882.094.647,00	97,40
	3.27.02.1.01.0001 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	3	Laporan	Rp.15.137.996.310,00	Rp.15.113.591.956,00	99,84
	3.27.02.1.02.0005 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	3	laporan	Rp.3.925.951.568,00	Rp.3.259.323.277,00	83,02
	3.27.02.1.04.0001 - Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3	Dokumen	Rp.12.043.454.132,00	Rp.11.985.602.212,00	99,52
	3.27.03.1.01.0001 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Tersusunnya Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1	Dokumen	Rp.543.948.422,00	Rp.542.709.977,00	99,77
	3.27.03.1.01.0009 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1	Laporan	Rp.1.010.261.800,00	Rp.910.107.950,00	90,09
	3.27.07.1.02.0002 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	102	Kelompok	Rp.71.280.515,00	Rp.70.759.275,00	99,27
4	**3.27.2.09.0.00.01.0014 - UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tan**					**Rp.209.912.459,00**	**Rp.178.554.317,00**	**85,06**
A	K2 - Keterjangkauan Harga					Rp.209.912.459,00	Rp.178.554.317,00	85,06
	3.27.02.1.02.0005 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	-	laporan	Rp.209.912.459,00	Rp.178.554.317,00	85,06
5	**1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Peruma**					**Rp.79.206.000,00**	**Rp.64.522.000,00**	**81,46**

NO	SKPD/UNIT SKPD/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	REALISASI SUB KEGIATAN	PRESENTASE (%)
A	K3 - Kelancaran Distribusi					Rp.79.206.000,00	Rp.64.522.000,00	81,46
	1.03.10.1.01.0028 - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	805.35	KM	Rp.79.206.000,00	Rp.64.522.000,00	81,46
6	**2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan**					**Rp.216.395.017,00**	**Rp.216.195.017,00**	**99,91**
A	K3 - Kelancaran Distribusi					Rp.216.395.017,00	Rp.216.195.017,00	99,91
	2.15.02.1.05.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1	Laporan	Rp.216.395.017,00	Rp.216.195.017,00	99,91
7	**3.31.3.30.0.00.02.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan**					**Rp.160.623.400,00**	**Rp.140.345.009,00**	**87,38**
A	K3 - Kelancaran Distribusi					Rp.13.442.800,00	Rp.13.120.004,00	97,60
	3.30.03.1.01.0002 - Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	36	Laporan	Rp.13.442.800,00	Rp.13.120.004,00	97,60
B	K4 - Komunikasi Efektif					Rp.147.180.600,00	Rp.127.225.005,00	86,44
	3.30.04.1.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	5	Laporan	Rp.147.180.600,00	Rp.127.225.005,00	86,44
8	**4.01.2.23.2.24.01.0001 - Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**					**Rp.208.208.307,00**	**Rp.159.241.045,00**	**76,48**
A	K3 - Kelancaran Distribusi					Rp.208.208.307,00	Rp.159.241.045,00	76,48
	4.01.03.1.03.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	-	Dokumen	Rp.208.208.307,00	Rp.159.241.045,00	76,48
					TOTAL ANGGARAN UNTUK PENGENDALIAN INFLASI	**Rp.33.768.757.930,00**	**Rp.32.797.787.035,00**	**97,12**
					TOTAL BELANJA DAERAH	**Rp.7.412.970.277.983,60**	**Rp.6.555.001.412.634,62**	**88,42**
					PERSENTASE	**0,46%**	**0,50%**	

Lampiran 53

Rincian Beban Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi dan Organisasi
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

No	Nama Akun	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	Beban Tambahan Penghasilan ASN	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	Total
	JUMLAH	**1.097.463.561.432,18**	**1.012.765.142.474,00**	**118.498.450.958,95**	**58.685.482.937,00**	**1.156.291.084,00**	**6.675.000.000,00**	**2.295.243.928.886,13**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	627.732.846.648,00	532.049.252.270,00	-	-	-	-	**1.159.782.098.918,00**
2	Dinas Kesehatan	138.532.324.466,18	137.276.660.729,00	116.254.798.381,95	-	-	-	**392.063.783.577,13**
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	23.559.887.771,00	14.599.527.891,00	9.660.000,00	-	-	-	**38.169.075.662,00**
4	Satuan Polisi Pamong Praja	10.919.106.559,00	9.967.941.941,00	-	-	-	-	**20.887.048.500,00**
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.741.724.223,00	7.195.148.215,00	-	-	-	-	**13.936.872.438,00**
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	8.721.844.900,00	8.555.362.303,00	-	-	-	-	**17.277.207.203,00**
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	13.151.876.375,00	15.905.478.540,00	900.000,00	-	-	-	**29.058.254.915,00**
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.514.552.470,00	5.216.910.242,00	-	-	-	-	**10.731.462.712,00**
9	Dinas Perhubungan	11.041.814.019,00	9.812.518.687,00	-	-	-	-	**20.854.332.706,00**
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	11.634.130.539,00	10.819.014.624,00	-	-	-	-	**22.453.145.163,00**
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.924.794.425,00	6.323.753.757,00	-	-	-	-	**12.248.548.182,00**
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.161.925.088,00	6.070.628.443,00	-	-	-	-	**12.232.553.531,00**
13	Dinas Kebudayaan	30.065.061.458,00	11.087.339.851,00	-	-	-	-	**41.152.401.309,00**
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	5.166.152.843,00	4.879.429.642,00	-	-	-	-	**10.045.582.485,00**
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.204.923.658,00	11.554.296.244,00	-	-	-	-	**21.759.219.902,00**
16	Dinas Pariwisata	5.271.890.591,00	5.820.536.602,00	-	-	-	-	**11.092.427.193,00**
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	27.341.380.781,00	22.049.658.272,00	-	-	-	-	**49.391.039.053,00**
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	17.778.118.624,00	17.845.983.772,00	-	-	-	-	**35.624.102.396,00**
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.549.499.190,00	7.138.324.261,00	-	-	-	-	**13.687.823.451,00**
20	Sekretariat Daerah	34.782.349.182,00	36.598.147.967,00	89.873.931,00	-	1.156.291.084,00	6.315.000.000,00	**78.941.662.164,00**
21	Sekretariat DPRD	6.008.031.502,00	4.628.453.150,00	-	58.685.482.937,00	-	360.000.000,00	**69.681.967.589,00**
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.368.557.828,00	6.957.481.443,00	-	-	-	-	**14.326.039.271,00**
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.992.796.390,00	9.543.246.037,00	2.143.218.646,00	-	-	-	**19.679.261.073,00**
24	Badan Pendapatan Daerah	35.553.794.747,00	70.543.962.803,00	-	-	-	-	**106.097.757.550,00**
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.568.067.567,00	14.773.331.117,00	-	-	-	-	**27.341.398.684,00**
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	4.827.837.979,00	5.224.320.654,00	-	-	-	-	**10.052.158.633,00**
27	Badan Penghubung	1.332.063.461,00	1.447.544.118,00	-	-	-	-	**2.779.607.579,00**
28	Inspektorat	11.193.506.747,00	14.072.355.940,00	-	-	-	-	**25.265.862.687,00**
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.822.701.401,00	4.808.532.959,00	-	-	-	-	**8.631.234.360,00**

Lampiran 54

Rincian Beban Barang dan Jasa Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi dan Organisasi
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

No	Nama Akun	Beban Barang	Beban Jasa	Beban Pemeliharaan	Beban Perjalanan Dinas	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Total
	JUMLAH	**525.067.916.906,25**	**608.352.393.421,42**	**96.284.977.335,35**	**75.916.978.915,60**	**105.272.920.433,54**	**1.410.895.187.012,16**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	113.346.294.285,71	148.704.538.730,00	24.569.529.623,00	8.978.679.194,00	31.820.463.273,58	327.419.505.106,29
2	Dinas Kesehatan	253.856.774.400,63	95.305.165.095,56	23.040.106.024,73	2.550.449.466,60	10.404.819.945,96	385.157.314.933,48
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	22.447.863.288,03	53.551.538.281,00	16.005.517.621,00	1.960.995.906,00	299.299.650,00	94.265.214.746,03
4	Satuan Polisi Pamong Praja	1.679.149.002,00	24.296.632.319,00	802.385.839,00	2.005.356.019,00	378.014.524,00	29.161.537.703,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.998.184.094,50	2.847.576.937,00	1.373.802.561,92	969.956.336,00	-	7.189.519.929,42
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	5.304.189.695,00	5.000.906.600,00	430.445.121,00	681.397.946,00	2.660.432.202,00	14.077.371.564,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	1.040.276.915,00	4.593.068.826,00	423.639.365,00	270.334.000,00	-	6.327.319.106,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.922.256.739,00	2.959.389.838,00	267.512.000,00	1.173.898.121,00	795.000.000,00	9.118.056.698,00
9	Dinas Perhubungan	2.893.634.211,00	4.392.072.195,00	2.338.382.313,00	995.308.856,00	51.959.565.440,00	62.578.963.015,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.124.692.736,60	36.672.492.168,00	949.932.031,00	3.221.824.139,00	6.000.000,00	42.974.941.074,60
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.616.744.051,00	5.206.999.760,00	127.227.250,00	625.007.896,00	529.000.000,00	8.104.978.957,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	458.758.876,00	2.061.220.884,00	183.044.339,00	453.166.373,00	-	3.156.190.472,00
13	Dinas Kebudayaan	5.764.201.526,00	40.934.522.642,00	2.850.738.663,55	689.746.276,00	2.476.000.000,00	52.715.209.107,55
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	835.829.814,00	3.193.377.877,00	169.273.921,00	235.817.100,00	250.000.000,00	4.684.298.712,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.275.709.539,00	3.024.515.842,00	530.242.675,00	289.799.650,00	50.101.650,00	6.170.369.356,00
16	Dinas Pariwisata	921.185.457,00	6.471.906.755,00	120.214.459,00	727.420.736,00	230.732.000,00	8.471.459.407,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	14.853.111.395,08	13.267.841.915,00	723.248.822,00	490.244.046,00	21.268.000,00	29.355.714.178,08
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.717.638.382,00	8.893.299.243,00	1.634.260.594,00	432.869.430,00	490.388.900,00	19.168.456.549,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.269.542.561,00	6.440.495.793,00	319.965.463,00	525.083.450,00	24.000.000,00	8.579.087.267,00
20	Sekretariat Daerah	32.392.140.775,00	48.684.317.528,00	8.715.122.146,00	10.338.300.995,00	2.133.750.000,00	102.263.631.444,00
21	Sekretariat DPRD	29.820.293.459,00	23.265.542.112,00	3.533.488.624,00	28.087.598.754,00	-	84.706.922.949,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.011.341.022,00	3.443.774.844,00	262.187.025,52	1.061.504.667,00	-	5.778.807.558,52
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.023.301.157,00	7.099.864.391,86	1.107.690.545,42	1.446.354.425,00	97.784.848,00	11.774.995.367,28
24	Badan Pendapatan Daerah	5.279.697.148,70	18.892.141.406,00	3.423.276.052,61	1.192.857.250,00	-	28.787.971.857,31
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.110.634.631,00	19.000.489.155,00	989.572.144,22	1.587.201.362,00	-	25.687.897.292,22
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	841.357.536,00	9.815.178.120,00	139.935.805,00	894.607.329,00	131.800.000,00	11.822.878.790,00
27	Badan Penghubung	887.631.415,00	4.773.189.674,00	422.877.223,00	194.043.245,00	-	6.277.741.557,00
28	Inspektorat	1.721.625.843,00	2.440.342.074,00	492.497.112,00	2.675.001.372,00	-	7.329.466.401,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.653.856.951,00	3.119.992.416,00	338.861.971,38	1.162.154.576,00	514.500.000,00	7.789.365.914,38

Lampiran 55

Rincian Beban Hibah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi dan Organisasi
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2025

No	Nama Akun	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Beban Hibah Dana BOS	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Total
	JUMLAH	**2.834.625.000,00**	**161.750.000,00**	**778.415.840.621,97**	**97.210.079.659,00**	**23.841.580.000,00**	**902.463.875.280,97**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	62.099.615.247,97	97.210.079.659,00	-	159.309.694.906,97
2	Dinas Kesehatan	-	-	437.823.612,00	-	-	437.823.612,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	153.668.295.000,00	-	-	153.668.295.000,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	4.446.000.000,00	-	-	4.446.000.000,00
5	Dinas Perhubungan	-	-	1.922.000.000,00	-	-	1.922.000.000,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	-	4.889.048.094,00	-	-	4.889.048.094,00
7	Dinas Kebudayaan	-	-	25.135.000.000,00	-	-	25.135.000.000,00
8	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	-	-	468.670.000.000,00	-	-	468.670.000.000,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	350.000.000,00	-	-	350.000.000,00
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	161.750.000,00	11.793.000.000,00	-	-	11.954.750.000,00
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	456.000.000,00	-	-	456.000.000,00
12	Sekretariat Daerah	-	-	43.249.058.668,00	-	-	43.249.058.668,00
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.834.625.000,00	-	1.300.000.000,00	-	23.841.580.000,00	27.976.205.000,00

RSUD BALI MANDARA
PROVINSI BALI

LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
dan
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
Jl. By Pass Ngurah Rai No.548 Sanur - 80234, Telp. (0361) 243350
Website : https://rsbm.baliprov.go.id
Email : rsud.balimandara@gmail.com

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
RSUD BALI MANDARA
Jl. By Pass Ngurah Rai No. 548, Sanur, Denpasar, 80227
Email : rsud.balimandara@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
TAHUN 2025

Memenuhi ketentuan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bali Mandara Provinsi Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya, M.Kes
   Alamat Kantor : Jl. By Pass Ngurah Rai No.548 Sanur
   Alamat Rumah sesuai KTP : Jl. Gandapura III D No.12, Banjar/Lingkungan Kertalangu Kelurahan/Desa Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur
   Jabatan : Direktur

2. Nama : dr. I Ketut Widiyasa, MPH
   Alamat Kantor : Jl. By Pass Ngurah Rai No.548 Sanur
   Alamat Rumah sesuai KTP : Jl. Cokroaminoto No.152 Denpasar Banjar/Lingkungan Sedana Merta Kelurahan/Desa Ubung, Kec. Denpasar Utara
   Jabatan : Wakil Direktur Pelayanan

3. Nama : Ns. Ellien Christiansen Nainggolan S.ST., M.SC
   Alamat Kantor : Jl. By Pass Ngurah Rai No.548 Sanur
   Alamat Rumah sesuai KTP : Jl. Sedap Malam III Gang Ratna XII No 8 Denpasar
   : Br. Kebon Kuri Mangku, Kel. Kesiman, Kec. Denpasar Selatan
   Jabatan : Wakil Direktur Penunjang

4. Nama : dr. Ni Nyoman Tri Darmayanti, MARS
   Alamat Kantor : Jl. By Pass Ngurah Rai No.548 Sanur
   Alamat Rumah sesuai KTP : Jl. Trengguli Gang IV Nomor 11 Kelurahan/Desa Penatih, Kec. Denpasar Timur
   Jabatan : Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
RSUD BALI MANDARA
Jl. By Pass Ngurah Rai No. 548, Sanur, Denpasar, 80227
Email : rsud.balimandara@gmail.com

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025.
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 217/PMK.05/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar
   b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Untuk dan atas nama Direksi BLUD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali,

Bali, 27 Maret 2026

DIREKTUR,



dr. I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya, M.Kes
Pembina Tk.I/IV/b
NIP. 19740701 200212 1 008

Wakil Direktur Pelayanan,

dr. I Ketut Widiyasa, MPH
Pembina Tk.I (IVb)
NIP.19780610 200501 1 011

Wakil Direktur Penunjang,

Ns. Ellien Christiansen Nainggolan S.ST., M.Sc
Pembina Tk.I/IV/b
NIP.19731212 199603 2 003

Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya,

dr. Ni Nyoman Tri Darmayanti, MARS
Pembina Tk.I (IVb)
NIP.19731108 200212 2 003

KETUT BUDIARTHA DAN ANGGIRIAWAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
LICENSE 321/KM.1/2019

Jalan Padang Mekar II, No. 22,
Padangsambian, Denpasar,
Bali 80117

Tlp. 0361-9078774,
E. info@kapbud.com
www.kapbud.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No : 00016/2.1266/AU.5/11/1612-2/1/III/2026

Pengguna Laporan Keuangan
RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **RSUD Bali Mandara Provinsi Bali** yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan Atas Laporan Keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

KETUT BUDIARTHA DAN ANGGIRIAWAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
LICENSE 321/KM.1/2019

Jalan Padang Mekar II, No. 22,
Padangsambian, Denpasar,
Bali 80117

Tlp. 0361-9078774,
E. info@kapbud.com
www.kapbud.com

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami.

Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
- Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KETUT BUDIARTHA DAN ANGGIRIAWAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
LICENSE 321/KM.1/2019

Jalan Padang Mekar II, No. 22,
Padangsambian, Denpasar,
Bali 80117

Tlp. 0361-9078774,
E. info@kapbud.com
www.kapbud.com

Laporan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Pengendalian Internal

Untuk memeroleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Pengendalian Internal. Laporan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Pengendalian Internal berupa Resume Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Resume Sistem Pengendalian Internal disajikan dalam Laporan Nomor: 00016.a/2.1266/AU.5/11/1612-2/1/III/2026 dan Nomor: 00016.b/2.1266/AU.5/11/1612-2/1/III/2026 tertanggal 27 Maret 2026 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Denpasar, 27 Maret 2026
Kantor Akuntan Publik
Ketut Budiartha dan Anggiriawan



Dr. Putu Budi Anggiriawan, S.E., M.Si., CA., CPA., ASEAN CPA.
Nomor Registrasi Akuntan Publik : AP. 1612



RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Pendapatan	***4.1***				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	*4.1.a*	198.200.000.000,00	175.710.054.787,81	88,65%	156.101.502.159,00
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	*4.1.b*	-	-	-	-
Pendapatan Hasil Kerja Sama	*4.1.c*	1.710.000.000,00	1.520.495.472,00	88,92%	1.215.081.560,00
Pendapatan Hibah	*4.1.d*	-	-	-	-
Pendapatan Usaha Lainnya	*4.1.e*	90.000.000,00	241.049.287,05	267,83%	238.855.495,93
Jumlah Pendapatan		**200.000.000.000,00**	**177.471.599.546,86**	**88,74%**	**157.555.439.214,93**
Belanja					
Belanja Operasi	***4.2***				
Belanja Pegawai	*4.2.a*	80.000.000.000,00	74.610.937.595,00	93,26%	63.459.689.347,00
Belanja Barang dan Jasa	*4.2.b*	133.786.906.414,00	120.873.289.398,96	90,35%	133.591.764.075,51
Jumlah Belanja Operasi		**213.786.906.414,00**	**195.484.226.993,96**	**91,44%**	**197.051.453.422,51**
Belanja Modal	***4.3***				
Belanja Modal Tanah	*4.3.a*	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	*4.3.b*	52.978.212.000,00	50.923.057.211,00	96,12%	14.863.265.967,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	*4.3.c*	1.114.763.000,00	946.018.344,00	84,86%	20.086.943.044,03
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	*4.3.d*	9.777.374.205,00	8.204.441.544,00	83,91%	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	*4.3.e*	2.000.000.000,00	-	0,00%	980.000.000,00
Jumlah Belanja Modal		**65.870.349.205,00**	**60.073.517.099,00**	**91,20%**	**35.930.209.011,03**
Jumlah Belanja		**279.657.255.619,00**	**255.557.744.092,96**	**91,38%**	**232.981.662.433,54**
Surplus (Defisit)		**(79.657.255.619,00)**	**(78.086.144.546,10)**	**98,03%**	**(75.426.223.218,61)**
Pembiayaan					
Penerimaan Pembiayaan					
Penerimaan SILPA Tahun Sebelumnya		-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman		-	-	-	-
Jumlah Penerimaan		**-**	**-**	**-**	**-**
Pengeluaran Pembiayaan					
Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-	-
Pemberian Pinjaman		-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran			**-**	**-**	**-**
Pembiayaan Neto		**-**	**-**	**-**	**-**
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran		**(79.657.255.619,00)**	**(78.086.144.546,10)**	**98,03%**	**(75.426.223.218,61)**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 27 Maret 2026
Direktur
RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

dr. I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya, M.Kes
Pembina Tk.I/IV/b
NIP. 19740701 200212 1 008

RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	*5.1*	**11.384.643.832,20**	**23.106.882.669,81**
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	*5.2*	-	-
Sub Total		**11.384.643.832,20**	**23.106.882.669,81**
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	*5.3*	(78.086.144.546,10)	(75.426.223.218,61)
Sub Total		**(66.701.500.713,90)**	**(52.319.340.548,80)**
Pendapatan APBD	*5.4*	78.246.669.629,00	63.703.984.381,00
Setoran ke Kas Daerah	*5.5*	-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	*5.6*	**11.545.168.915,10**	**11.384.643.832,20**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 27 Maret 2026
Direktur
RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

dr. I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya, M.Kes
Pembina Tk.I/IV/b
NIP. 19740701 200212 1 008

RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	*6.1*	-	-
Kas pada BLUD	*6.2*	11.545.168.915,10	11.384.643.832,20
Piutang Operasional BLUD	*6.3*	27.857.557.967,00	18.868.625.775,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	*6.3*	(3.524.239.819,70)	(3.416.025.427,68)
Persediaan BLUD	*6.4*	15.230.851.223,23	20.252.126.889,58
Jumlah Aset Lancar		**51.109.338.285,63**	**47.089.371.069,10**
Aset Tetap	*6.5*		
Tanah		15.001.240.000,00	15.001.240.000,00
Peralatan dan Mesin		534.913.560.291,62	482.864.665.539,02
Gedung dan Bangunan		330.702.317.997,41	329.639.083.711,15
Jalan, Jaringan dan Irigasi		13.182.891.939,86	3.834.750.395,86
Aset Tetap Lainnya		40.125.400,00	40.125.400,00
Konstruksi dalam Pengerjaan		99.506.370,00	-
Jumlah Harga Perolehan		**893.939.641.998,89**	**831.379.865.046,03**
Akumulasi Penyusutan		(473.261.750.070,50)	(441.224.821.970,67)
Jumlah Aset Tetap		**420.677.891.928,39**	**390.155.043.075,36**
Aset Lainnya	*6.6*		
Aset Tak Berwujud		7.574.553.169,65	5.679.813.694,63
Aset Lain-lain		809.445.773,40	146.689.290,00
Jumlah Harga Perolehan		**8.383.998.943,05**	**5.826.502.984,63**
Akumulasi Amortisasi		(5.717.122.276,03)	(4.813.863.950,63)
Jumlah Aset Lainnya		**2.666.876.667,02**	**1.012.639.034,00**
Jumlah Aset		**474.454.106.881,04**	**438.257.053.178,46**
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	*6.7*		
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		40.881.875.493,40	39.325.055.091,54
Pendapatan Diterima Dimuka		95.304.938,03	86.125.211,21
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**40.977.180.431,43**	**39.411.180.302,75**
Jumlah Kewajiban		**40.977.180.431,43**	**39.411.180.302,75**
Ekuitas	*6.8*		
Ekuitas		398.935.207.029,82	405.283.769.802,57
Surplus/Defisit Tahun Berjalan		34.541.719.419,79	(6.437.896.926,86)
Jumlah Ekuitas		**433.476.926.449,61**	**398.845.872.875,71**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		**474.454.106.881,04**	**438.257.053.178,46**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 27 Maret 2026
Direktur
RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

dr. I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya, M.Kes
Pembina Tk.I/IV/b
NIP. 19740701 200212 1 008

RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
Kegiatan Operasional					
Pendapatan	***7.1***				
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	*7.1.1)*	184.709.504.830,81	159.164.680.264,00	25.544.824.566,81	16,05%
Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan	*7.1.2)*	-	-	-	-
Pendapatan hasil kerjasama	*7.1.3)*	1.511.087.407,31	1.239.520.701,60	271.566.705,71	21,91%
Pendapatan hibah	*7.1.4)*	1.236.488.485,20	1.714.260.980,74	(477.772.495,54)	-27,87%
Pendapatan usaha lainnya	*7.1.5)*	241.049.287,05	238.855.495,93	2.193.791,12	0,92%
Pendapatan APBD	*7.1.6)*	78.246.669.629,00	63.703.984.381,00	14.542.685.248,00	22,83%
Jumlah Pendapatan		**265.944.799.639,37**	**226.061.301.823,27**	**39.883.497.816,10**	**17,64%**
Beban	***7.2***				
Beban Pegawai	*7.2.1)*	72.446.125.244,04	63.975.123.929,37	8.471.001.314,66	13,24%
Beban Barang dan Jasa	*7.2.2)*	111.844.423.570,27	105.516.434.111,24	6.327.989.459,03	6,00%
Beban Pemeliharaan	*7.2.3)*	13.697.467.536,00	15.563.213.298,80	(1.865.745.762,80)	-11,99%
Beban Perjalanan Dinas	*7.2.4)*	405.452.092,00	405.840.878,00	(388.786,00)	-0,10%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	*7.2.5)*	2.111.157.766,30	2.176.539.048,76	(65.381.282,47)	-3,00%
Beban Penyusutan dan	*7.2.6)*	32.926.510.076,23	45.574.218.287,79	(12.647.708.211,56)	-27,75%
Beban Lain-lain	*7.2.7)*	-	13.729.301,00	(13.729.301,00)	-100,00%
Jumlah Beban		**233.431.136.284,83**	**233.225.098.854,96**	**206.037.429,87**	**0,09%**
Surplus (Defisit) dari Operasi		**32.513.663.354,54**	**(7.163.797.031,69)**	**39.677.460.386,23**	**-553,86%**
Kegiatan Non Operasional	***7.3***				
Kegiatan Non Operasional		2.028.056.065,26	725.900.104,83	1.302.155.960,43	179,39%
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		**2.028.056.065,26**	**725.900.104,83**	**1.302.155.960,43**	**179,39%**
Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		**34.541.719.419,79**	**(6.437.896.926,86)**	**40.979.616.346,65**	**-636,54%**
Pos Luar Biasa					
Pendapatan (Beban) Pos Luar Biasa		-	-	-	-
Jumlah Pos Luar Biasa		**-**	**-**	**-**	**-**
Surplus (Defisit)-LO		**34.541.719.419,79**	**(6.437.896.926,86)**	**40.979.616.346,65**	**-636,54%**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 27 Maret 2026
Direktur
RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

dr. I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya, M.Kes
Pembina Tk.I/IV/b
NIP. 19740701 200212 1 008

RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
Arus kas dari Aktivitas Operasi	***8.1***		
Arus Kas Masuk	***8.1.1)***		
Pendapatan APBD		78.246.669.629,00	63.703.984.381,00
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		175.710.054.787,81	156.101.502.159,00
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan		-	-
Pendapatan Hasil Kerja Sama		1.520.495.472,00	1.215.081.560,00
Pendapatan Hibah		-	-
Pendapatan Usaha Lainnya		241.049.287,05	238.855.495,93
Jumlah Arus Kas Masuk		**255.718.269.175,86**	**221.259.423.595,93**
Arus Kas Keluar	***8.1.2)***		
Belanja Pegawai		74.610.937.595,00	63.459.689.347,00
Belanja Barang dan Jasa		120.873.289.398,96	133.591.764.075,51
Jumlah Arus Kas Keluar		**195.484.226.993,96**	**197.051.453.422,51**
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**60.234.042.181,90**	**24.207.970.173,42**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	***8.2***		
Arus Arus Kas Masuk	***8.2.1)***		
Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		-	-
Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		**-**	**-**
Arus Kas Keluar	***8.2.2)***		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		50.923.057.211,00	14.863.265.967,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		946.018.344,00	20.086.943.044,03
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		8.204.441.544,00	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		-	980.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**60.073.517.099,00**	**35.930.209.011,03**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		**(60.073.517.099,00)**	**(35.930.209.011,03)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	***8.3***		
Arus Kas Masuk	***8.3.1)***	**-**	**-**
Jumlah Arus Kas Masuk		**-**	**-**
Arus Kas Keluar	***8.3 2)***		
Setoran Kas ke BUD		-	-
Jumlah Arus Kas Keluar		**-**	**-**
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		**-**	**-**

RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	*8.4*		
Arus Kas Masuk	*8.4 1)*		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		19.208.523.358,00	17.392.463.158,00
Jumlah Arus Kas Masuk		**19.208.523.358,00**	**17.392.463.158,00**
Arus Kas Keluar	*8.4 2)*		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		19.208.523.358,00	17.392.463.158,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**19.208.523.358,00**	**17.392.463.158,00**
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**-**	**-**
Kenaikan/Penurunan Kas BLUD	*8.5 2)*	**160.525.082,90**	**(11.722.238.837,61)**
Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD	*8.5 1)*	**11.384.643.832,20**	**23.106.882.669,81**
Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD	*8.5 3)*	**11.545.168.915,10**	**11.384.643.832,20**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 27 Maret 2026
Direktur
RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

dr. I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya, M.Kes
Pembina Tk.I/IV/b
NIP. 19740701 200212 1 008

RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
Ekuitas Awal	***9.1***	**398.845.872.875,70**	**405.277.792.251,45**
RK-PPKD	***9.2***	**-**	**(182.024,00)**
Surplus (Defisit) LO	***9.3***	**34.541.719.419,79**	**(6.437.896.926,86)**
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	***9.4***		
- Koreksi Nilai Piutang		(12.517.851,00)	2.199.400,00
- Koreksi Saldo Awal Penyisihan Piutang		(25.112.690,99)	(10.997,00)
- Koreksi Nilai Persediaan		-	(1.947.000,00)
- Koreksi Nilai Mutasi Persediaan Antar OPD		11.394.339,00	106.816.553,00
- Koreksi Nilai Utang Belanja Pegawai		318.072.235,95	54.660.214,91
- Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka		2.228.337,87	(1.568.977,79)
- Koreksi Saldo Awal Penyusutan		(13.676.349,00)	(150.239.618,00)
- Surplus Penjualan Aset Lainnya		-	(3.750.000,00)
- Koreksi Nilai Aset Tetap		(191.053.867,74)	-
- Koreksi Nilai Aset Lainnya		0,02	-
Ekuitas Akhir	***9.5***	**433.476.926.449,61**	**398.845.872.875,71**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 27 Maret 2026
Direktur
RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

dr. I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya, M.Kes
Pembina Tk.I/IV/b
NIP. 19740701 200212 1 008

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
PROVINSI BALI

LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
dan
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
Jalan Angsoka No.8 Denpasar – 80236, Telp (0361) 243350
Website: https://rsmatabalimandara.baliprov.go.id/
Email: rsmbm@baliprov.go.id

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
Jl. Angsoka No. 8 Denpasar

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA BLUD
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Memenuhi aturan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Mata Bali Mandara, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : dr. Ni Made Suryanadi, Sp.M
   Alamat Kantor : Jalan Angsoka No. 8 Denpasar Bali
   Alamat Rumah Sesuai KTP : Jalan Trijata II No 2, Br/Link Merta Rauh Dangin Puri Kangin Denpasar Utara
   Jabatan : Direktur

2. Nama : dr. Ida Ayu Gita Puspita, M.Kes
   Alamat Kantor : Jalan Angsoka No. 8 Denpasar Bali
   Alamat Rumah Sesuai KTP : Jalan PB Sudirman FS 3, Dauh Puri Klod Denpasar
   Jabatan : Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan

3. Nama : dr. Putu Ayu Widiastuti, M.P.H
   Alamat Kantor : Jalan Angsoka No. 8 Denpasar Bali
   Alamat Rumah Sesuai KTP : Jalan Cekomaria, Perum Taman Seroja Permai Kav. No. 3b Br Kayangan Peguyangan Kangin Denpasar
   Jabatan : Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya

4. Nama : Lusius Lino Febronius Gibson, S.Si, Apt
   Alamat Kantor : Jalan Angsoka No. 8 Denpasar Bali
   Alamat Rumah Sesuai KTP : Perm. Bumi Sasih Asri I No. 4 Br. Sasih
   Jabatan : Wakil Direktur Penunjang dan Diklit

Menyatakan bahwa:
1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tanggal 02 Desember 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Pelaporan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Rumah Sakit Di Kawasan Ekonomi Khusus.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta materia.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam penyusutan Laporan Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Untuk dan atas nama Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit Mata Bali Mandara



Direktur	:	dr. Ni Made Suryanadi, Sp.M Pembina Utama Muda NIP. 19711005 200003 2 007
Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan	:	dr. Ida Ayu Gita Puspita, M.Kes Pembina NIP. 19810807 200902 2 009
Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya	:	dr Putu Ayu Widiastuti, M.P.H' Pembina Tk.I NIP. 19780410 200501 2 014
Wakil Direktur Penunjang dan Diklit	:	Lusius Lino Febronius Gibson, S.Si, Apt Pembina Tk.I NIP. 19800222 200903 1 006

Bali, 25 Maret 2026

KETUT BUDIARTHA DAN ANGGIRIAWAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
LICENSE 321/KM.1/2019

Jalan Padang Mekar II, No. 22,
Padangsambian, Denpasar,
Bali 80117

Tlp. 0361-9078774,
E. info@kapbud.com
www.kapbud.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No : 00009/2.1266/AU.5/11/1612-2/1/III/2026

Pengguna Laporan Keuangan
Rumah Sakit Mata Bali Mandara

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Rumah Sakit Mata Bali Mandara** yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan Atas Laporan Keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

KETUT BUDIARTHA DAN ANGGIRIAWAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
LICENSE 321/KM.1/2019

Jalan Padang Mekar II, No. 22,
Padangsambian, Denpasar,
Bali 80117

Tlp. 0361-9078774,
E. info@kapbud.com
www.kapbud.com

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami.

Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
- Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KETUT BUDIARTHA DAN ANGGIRIAWAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
LICENSE 321/KM.1/2019

Jalan Padang Mekar II, No. 22,
Padangsambian, Denpasar,
Bali 80117

Tlp. 0361-9078774,
E. info@kapbud.com
www.kapbud.com

Laporan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Pengendalian Internal

Untuk memeroleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Pengendalian Internal. Laporan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Pengendalian Internal berupa Resume Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Resume Sistem Pengendalian Internal disajikan dalam Laporan Nomor: 00009.a/2.1266/AU.5/11/1612-2/1/III/2026 dan Nomor: 00009.b/2.1266/AU.5/11/1612-2/1/III/2026 tertanggal 25 Maret 2026 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Denpasar, 25 Maret 2026
Kantor Akuntan Publik
Ketut Budiartha dan Anggiriawan

Dr. Putu Budi Anggiriawan, S.E., M.Si., CA., CPA., ASEAN CPA.
Nomor Registrasi Akuntan Publik : AP. 1612

00009

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Pendapatan					
Pendapatan Pengelolaan BLUD dari Layanan Kesehatan	*4.1.a*	93.863.440.000,00	90.559.637.694,00	96,48%	95.836.167.814,00
Pendapatan hasil kerjasama	*4.1.c*	92.060.000,00	93.329.008,00	101,38%	23.614.918,00
Pendapatan APBD	*4.1.e*	-	-	-	4.389.000.000,00
Pendapatan lainnya	*4.1.f*	1.044.500.000,00	1.303.835.947,33	124,83%	714.112.173,74
Jumlah Pendapatan		**95.000.000.000,00**	**91.956.802.649,33**	**96,80%**	**100.962.894.905,74**
Belanja					
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	*4.2.a*	35.251.800.000,00	32.325.675.185,00	91,70%	35.700.421.817,00
Belanja Barang dan Jasa	*4.2.b*	46.602.655.000,00	41.850.061.233,33	89,80%	41.177.198.129,43
Jumlah Belanja Operasi		**81.854.455.000,00**	**74.175.736.418,33**	**90,62%**	**76.877.619.946,43**
Belanja Modal					
Belanja Tanah	*4.3.a*	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	*4.3.b*	8.431.545.000,00	8.221.575.702,00	97,51%	14.215.751.063,00
Belanja Gedung dan	*4.3.c*	1.318.000.000,00	1.081.528.377,92	82,06%	-
Belanja Jalan, Irigasi dan	*4.3d*	800.000.000,00	71.040.000,00	8,88%	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	*4.3.e*	60.000.000,00	42.000.000,00	70,00%	1.552.000.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	*4.3.g*	536.000.000,00	389.922.000,00	72,75%	-
Jumlah Belanja Modal		**11.145.545.000,00**	**9.806.066.079,92**	**87,98%**	**15.767.751.063,00**
Jumlah Belanja		**93.000.000.000,00**	**83.981.802.498,25**	**90,30%**	**92.645.371.009,43**
Surplus (Defisit)		**2.000.000.000,00**	**7.975.000.151,08**	**398,75%**	**8.317.523.896,31**
Pembiayaan					
Penerimaan Pembiayaan					
Penerimaan Pinjaman		-	-	-	-
Penerimaan dari Divestasi		-	-	-	-
Jumlah Penerimaan		-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan					
Pembayaran Pinjaman		-	-	-	-
Pemberian Pinjaman		-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran		-	-	-	-
Pembiayaan Neto		-	-	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		**2.000.000.000,00**	**7.975.000.151,08**	**399%**	**8.317.523.896,31**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 25 Maret 2026
Direktur
Rumah Sakit Mata Bali Mandara

dr. Ni Made Suryanadi,Sp.M
NIP.19711005 200003 2 007

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	*5.1*	**22.272.848.565,09**	**13.955.324.668,78**
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	*5.2*	-	-
Jumlah SAL Penerimaan Pembiayaan		**22.272.848.565,09**	**13.955.324.668,78**
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Berjalan	*5.3*	7.975.000.151,08	8.317.523.896,31
Jumlah SAL Pembiayaan Anggaran		**30.247.848.716,17**	**22.272.848.565,09**
Setoran Ke Kas Daerah	*5.5*	-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	*5.6*	**30.247.848.716,17**	**22.272.848.565,09**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 25 Maret 2026
Direktur
Rumah Sakit Mata Bali Mandara



dr. Ni Made Suryanadi,Sp.M
NIP.19711005 200003 2 007

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran APBD	*6.1*	-	-
Kas pada BLUD	*6.2*	30.247.848.716,17	22.272.848.565,09
Piutang Jasa Layanan	*6.4*	6.845.738.014,00	5.402.013.744,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	*6.4*	(40.909.300,57)	(45.069.494,02)
Persediaan BLUD	*6.5*	6.105.559.076,64	6.172.511.345,38
Jumlah Aset Lancar		**43.158.236.506,24**	**33.802.304.160,45**
Aset Tetap	*6.6*		
Tanah		1.173.690.000,00	1.173.690.000,00
Peralatan dan Mesin		162.823.101.409,73	154.867.880.847,72
Gedung dan Bangunan		134.142.799.098,40	133.061.270.720,48
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		4.336.393.819,91	4.265.353.819,91
Aset Tetap Lainnya		127.321.020,00	127.321.020,00
Biaya Perolehan Aset Tetap		**302.603.305.348,04**	**293.495.516.408,11**
Akumulasi Penyusutan		(169.026.310.480,11)	(158.999.250.166,10)
Jumlah Aset Tetap		**133.576.994.867,93**	**134.496.266.242,01**
Aset Lain-lain	*6.7*		
Aset Tidak Berwujud		2.723.834.245,00	2.291.912.245,00
Akumulasi Amortisasi		(974.040.945,00)	(612.982.245,00)
Aset Lain-lain		574.221,46	-
Jumlah Aset Lain-lain		**1.750.367.521,46**	**1.678.930.000,00**
JUMLAH ASET		**178.485.598.895,63**	**169.977.500.402,46**
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	*6.8*		
Utang Pihak Ketiga		422.026.995,00	541.033.930,50
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		-	2.787.254.410,00
Utang Belanja		3.309.088.028,00	24.754.741,00
Pendapatan Diterima Dimuka		48.045.977,01	65.645,51
Jumlah Kewajiban Jk Pendek		**3.779.161.000,01**	**3.353.108.727,01**
JUMLAH KEWAJIBAN		**3.779.161.000,01**	**3.353.108.727,01**
EKUITAS	*6.9*		
Ekuitas		166.624.391.675,45	151.909.008.173,90
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		(29.606.984,40)	(21.038.904,65)
Surplus (Defisit) LO		8.111.653.204,57	14.736.422.406,20
JUMLAH EKUITAS		**174.706.437.895,62**	**166.624.391.675,45**
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		**178.485.598.895,63**	**169.977.500.402,46**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 25 Maret 2026
Direktur
Rumah Sakit Mata Bali Mandara



dr. Ni Made Suryanadi,Sp.M
NIP.19711005 200003 2 007

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
Kegiatan Operasional					
Pendapatan					
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	*7.1.a*	92.003.296.936,00	95.340.063.974,00	(3.336.767.038,00)	-3,50%
Pendapatan Hasil Kerjasama	*7.1.c*	45.383.704,50	36.608.831,10	8.774.873,40	23,97%
Pendapatan Hibah	*7.1.d*	530.088.791,00	22.520.800,00	507.567.991,00	2254%
Pendapatan Usaha Lainnya	*7.1.e*	1.303.865.947,33	1.294.134.273,74	9.731.673,59	0,75%
Pendapatan APBD	*7.1.f*	-	4.389.000.000,00	(4.389.000.000,00)	-100%
Jumlah Pendapatan		**93.882.635.378,83**	**101.082.327.878,84**	**(7.199.692.500,01)**	**-7,12%**
Beban					
Beban Pegawai	*7.2.a*	32.979.619.496,00	35.918.751.796,00	(2.939.132.300,00)	-8,18%
Beban Barang dan Jasa	*7.2.b*	41.709.066.901,77	40.488.086.617,98	1.220.980.283,79	3,02%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	*7.2.e*	40.547.500,57	45.069.494,02	(4.521.993,45)	-10,03%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	*7.2.d*	11.085.627.386,00	9.927.297.339,00	1.158.330.047,00	11,67%
Jumlah Beban		**85.814.861.284,34**	**86.379.205.247,00**	**(564.343.962,66)**	**-0,65%**
Surplus (Defisit) dari Operasi		**8.067.774.094,49**	**14.703.122.631,84**	**(6.635.348.537,35)**	**-45,13%**
Kegiatan Non Operasional					
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	*7.3.a*	44.707.694,02	36.194.130,00	8.513.564,02	23,52%
(Kerugian) Penurunan Nilai Aset, Surplus /(Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya	*7.3.b*	828.583,94	2.894.355,64	3.722.939,58	128,63%
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		**43.879.110,08**	**33.299.774,36**	**12.236.503,60**	**36,75%**
Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		**8.111.653.204,57**	**14.736.422.406,20**	**(6.623.112.033,75)**	**-44,94%**
Pos Luar Biasa					
Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
Beban Luar Biasa		-	-	-	-
Jumlah Pos Luar Biasa		**-**	**-**	**-**	**-**
Surplus (Defisit)-LO		**8.111.653.204,57**	**14.736.422.406,20**	**(6.623.112.033,75)**	**-44,94%**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 25 Maret 2026
Direktur
Rumah Sakit Mata Bali Mandara

dr. Ni Made Suryanadi,Sp.M
NIP.19711005 200003 2 007

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Metode Langsung)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
Arus kas dari Aktivitas Operasi	*8.1*		
Arus Masuk Kas	*8.1 a)*		
Pendapatan dari APBD		-	4.389.000.000,00
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat		90.559.637.694,00	95.836.167.814,00
Pendapatan hasil kerjasama		93.329.008,00	23.614.918,00
Pendapatan lainnya		1.303.835.947,33	714.112.173,74
Jumlah Arus Masuk Kas		**91.956.802.649,33**	**100.962.894.905,74**
Arus Kas Keluar	*8.1 b)*		
Pembayaran Pegawai		32.325.675.185,00	35.700.421.817,00
Pembayaran Barang		28.008.878.038,15	29.248.675.847,80
Pembayaran Jasa		7.819.242.002,26	6.971.921.106,85
Pembayaran Pemeliharaan		5.650.016.652,32	4.604.915.654,78
Pembayaran Perjalanan Dinas		371.924.540,60	351.685.520,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**74.175.736.418,33**	**76.877.619.946,43**
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**17.781.066.231,00**	**24.085.274.959,31**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	*8.2*		
Arus Masuk Kas	*8.2 a)*	**-**	**-**
Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		-	-
Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		**-**	**-**
Arus Keluar Kas	*8.2 b)*		
Perolehan Peralatan dan Mesin		8.221.575.702,00	14.215.751.063,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		1.081.528.377,92	-
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		71.040.000,00	-
Perolehan Aset Tetap Lainnya		42.000.000,00	1.552.000.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya		389.922.000,00	-
Jumlah Arus Keluar Kas		**9.806.066.079,92**	**15.767.751.063,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		**(9.806.066.079,92)**	**(15.767.751.063,00)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	*8.3*		
Arus Masuk Kas	*8.3 a)*		
Penerimaan Pinjaman		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		**-**	**-**
Arus Keluar Kas	*8.3 b)*	**-**	**-**
Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		**-**	**-**
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		**-**	**-**

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Metode Langsung)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	*8.4*		
Arus Kas Masuk	*8.4 a)*		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		5.820.266.408,00	6.153.171.529,00
Jumlah Arus Kas Masuk		**5.820.266.408,00**	**6.153.171.529,00**
Arus Kas Keluar	*8.4 b)*		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		5.820.266.408,00	6.153.171.529,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**5.820.266.408,00**	**6.153.171.529,00**
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**-**	**-**
Kenaikan/Penurunan Kas BLUD	*8.5*	**7.975.000.151,08**	**8.317.523.896,31**
Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD		**22.272.848.565,09**	**13.955.324.668,78**
Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD		**30.247.848.716,17**	**22.272.848.565,09**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 25 Maret 2026
Direktur
Rumah Sakit Mata Bali Mandara

dr. Ni Made Suryanadi,Sp.M
NIP.19711005 200003 2 007

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
Ekuitas Awal	*9.1*	**166.624.391.675,45**	**151.909.008.173,90**
Surplus (Defisit) LO	*9.2*	**8.111.653.204,57**	**14.736.422.406,20**
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan	*9.3*		
Mendasar		**(29.606.984,40)**	**(21.038.904,65)**
Koreksi Ekuitas Lainnya		(47.366.000,00)	(52.487,65)
Koreksi Penghapusan Aset Tetap Rusak Berat		-	(20.986.417,00)
Koreksi Nilai Persediaan		20.525.774,60	-
Pendapatan Hibah Persediaan		(335.991,00)	-
Koreksi Saldo Awal Aset		(2.430.768,00)	-
Ekuitas Akhir	*9.4*	**174.706.437.895,62**	**166.624.391.675,45**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 25 Maret 2026
Direktur
Rumah Sakit Mata Bali Mandara

dr. Ni Made Suryanadi,Sp.M
NIP.19711005 200003 2 007

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA
TAHUN 2025

Memenuhi ketentuan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.
   NIP : 19760714 200902 2 003
   Alamat Kantor : Jl. Kusuma Yudha No. 29 Bangli
   Alamat Rumah Sesuai KTP : Jl. Nuansa Utama V, No. 11A, Tegal Kori Kaja, Ubung Kaja, Denpasar Utara.
   Jabatan : Direktur
2. Nama : dr. Komang Gede Rai Mulyawan, M.Kes.
   NIP : 19690917 199903 1 008
   Alamat Kantor : Jl. Kusuma Yudha No. 29 Bangli
   Alamat Rumah Sesuai KTP : Jl. Ratna Kembang Sari Residence, Tonja, Denpasar Utara
   Jabatan : Wakil Direktur Pelayanan
3. Nama : drg. Nyoman Wiradharma, M.Erg.
   NIP : 19840714 201101 1 003
   Alamat Kantor : Jl. Kusuma Yudha No. 29 Bangli
   Alamat Rumah Sesuai KTP : Banjar Dinas Sibang, Patemon, Seririt, Buleleng.
   Jabatan : Wakil Direktur Penunjang
4. Nama : I Gusti Putu Ngurah Kesuma Putra, S.Kep., Ns., M.M.
   NIP : 19770820 199603 1 002
   Alamat Kantor : Jl. Kusuma Yudha No. 29 Bangli
   Alamat Rumah Sesuai KTP : Jl. Merdeka No.122, Bebalang, Bangli
   Jabatan :Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 217/PMK.05/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Untuk dan atas nama Direksi Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama,

Bali, 20 Februari 2026

Direktur,

dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.
NIP. 19760714 200902 2 003

Wakil Direktur Pelayanan,	Wakil Direktur Penunjang,	Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya
dr. Km. Gede Rai Mulyawan, M.Kes.	drg. Nyoman Wiradharma, M.Erg	I Gst. Pt. Ngurah Kesuma Putra, S.Kep., Ns., M.M.
NIP. 19690917 199903 1 008	NIP. 19840714 201101 1 003	NIP. 19770820 199603 1 002

Laporan No: 00007/2.1516/AU.5/11/0463-1/1/II/2026

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pengguna Laporan Keuangan
Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini
Kami telah mengaudit laporan keuangan Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini
Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh

hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memeroleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan atas SPI dan Kepatuhan berupa Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Resume Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00007/ML/KAP.IGOR/1/II/2026 tanggal 20 Februari 2026 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Hal Lain

Laporan keuangan Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 9 April 2025.

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka & Rekan

00007

I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA., CFI., ASEAN CPA.
NRAP: AP. 0463

Badung, 20 Februari 2026

RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	**Pendapatan**					
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan	*4.1.a*	24.767.450.000,00	21.716.668.832,00	87,68%	23.585.477.046,00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	*4.1.b*	-	-	-	-
4	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	*4.1.c*	30.900.000,00	30.900.000,00	100,00%	26.550.000,00
5	Pendapatan Hibah	*4.1.d*	-	-	-	-
6	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	*4.1.e*	971.650.000,00	1.029.496.187,00	105,95%	776.459.216,45
7	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	*4.1.f*	230.000.000,00	278.106.142,46	120,92%	221.151.504,50
8	Pendapatan APBD	*4.1.g*	26.906.260.683,00	24.734.582.084,00	91,93%	13.693.793.229,00
9	**Jumlah Pendapatan**		**52.906.260.683,00**	**47.789.753.245,46**	**90,33%**	**38.303.430.995,95**
10	**Belanja**					
11	**Belanja Operasi**					
12	Belanja Pegawai	*4.2.a*	7.768.100.000,00	4.829.144.189,00	62,17%	4.394.766.301,00
13	Belanja Barang dan Jasa	*4.2.b*	26.736.511.113,00	23.017.854.706,37	86,09%	27.855.183.397,44
14	Bunga	*4.2.c*	-	-	-	-
15	Belanja Lain-lain	*4.2.d*	-	-	-	-
16	**Jumlah Belanja Operasi**		**34.504.611.113,00**	**27.846.998.895,37**	**80,71%**	**32.249.949.698,44**
17	**Belanja Modal**					
18	Belanja Tanah	*4.3.a*	-	-	-	-
19	Belanja Peralatan dan Mesin	*4.3.b*	3.621.000.000,00	3.106.222.902,00	85,78%	2.916.653.687,50
20	Belanja Gedung dan Bangunan	*4.3.c*	16.780.649.570,00	14.630.666.811,75	87,19%	1.233.675.284,19
21	Belanja Jalan, Irigasi dan	*4.3.d*	-	-	-	71.054.430,00
22	Belanja Aset Tetap Lainnya	*4.3.e*	-	-	-	-
23	**Jumlah Belanja Modal**		**20.401.649.570,00**	**17.736.889.713,75**	**86,94%**	**4.221.383.401,69**
24	**Jumlah Belanja**		**54.906.260.683,00**	**45.583.888.609,12**	**83,02%**	**36.471.333.100,13**
25	**Surplus (Defisit)**		**(2.000.000.000,00)**	**2.205.864.636,34**	**-110,29%**	**1.832.097.895,82**
26	**Pembiayaan**					
27	**Penerimaan Pembiayaan**					
28	Penerimaan SILPA		-	-	-	-
29	Penerimaan dari divestasi		-	-	-	-
30	**Jumlah Penerimaan**		-	-	-	-
31	**Pengeluaran Pembiayaan**					
32	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-	-
33	Pemberian Pinjaman		-	-	-	-
34	**Jumlah Pengeluaran**		-	-	-	-
35	**Pembiayaan Neto**		-	-	-	-
36	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**		**(2.000.000.000,00)**	**2.205.864.636,34**	-	**1.832.097.895,82**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PARAF HIRARKI	
WADIR ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA	
KEPALA BAGIAN KEUANGAN	

Bali, 20 Februari 2026
Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama
Direktur,

dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.
NIP.19760714 200902 2 003

RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	*5.1*	**11.253.136.977,16**	**9.421.041.081,34**
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	*5.2*	-	-
3	**Sub Total**		**11.253.136.977,16**	**9.421.041.081,34**
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Berjalan	*5.3*	2.205.864.636,34	1.832.097.895,82
5	**Sub Total**		**13.459.001.613,50**	**11.253.138.977,16**
6	Koreksi Tahun Sebelumnya		-	(2.000,00)
7	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	*5.5*	**13.459.001.613,50**	**11.253.136.977,16**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PARAF HIRARKI	
WADIR ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA	
KEPALA BAGIAN KEUANGAN	

Bali, 20 Februari 2026
Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama
Direktur,

dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.
NIP.19760714 200902 2 003

RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**ASET**			
2	**Aset Lancar**			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran APBD	*6.1*	-	-
4	Kas pada BLUD	*6.2*	13.459.001.613,50	11.253.136.977,16
5	Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD	*6.3*	2.750.334.741,75	2.810.481.007,75
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		(488.211.351,47)	(580.482.675,98)
7	Biaya Dibayar Dimuka	*6.4*	-	400,00
8	Persediaan BLUD	*6.5*	2.788.324.509,03	2.735.427.559,33
9	**Jumlah Aset Lancar**		**18.509.449.512,81**	**16.218.563.268,26**
10	**Aset Tetap**	***6.6***		
11	Tanah		8.376.005.816,57	8.376.005.816,57
12	Peralatan dan Mesin		74.257.214.786,71	71.086.858.211,59
13	Gedung dan Bangunan		124.588.169.926,87	125.988.913.633,41
14	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		1.985.309.420,00	1.985.309.420,00
15	Aset Tetap Lainnya		183.134.600,00	183.134.600,00
16	Konstruksi Dalam Pengerjaan		14.478.255.471,87	565.602.720,00
17	**Biaya Perolehan Aset Tetap**		**223.868.090.022,02**	**208.185.824.401,57**
18	Akumulasi Penyusutan		(95.140.751.274,44)	(89.529.669.750,53)
19	**Jumlah Aset Tetap**		**128.727.338.747,58**	**118.656.154.651,04**
20	**Aset Lain-lain**	***6.7***		
21	Aset Tidak Berwujud		899.806.400,00	899.806.400,00
22	Aset Lain-lain		1.298.750.000,00	989.027.000,00
23	**Biaya Perolehan Aset Lain-lain**		**2.198.556.400,00**	**1.888.833.400,00**
24	Akumulasi Amortisasi		(2.044.878.667,00)	(1.588.119.387,00)
25	**Jumlah Aset Lain-lain**		**153.677.733,00**	**300.714.013,00**
26	**JUMLAH ASET**		**147.390.465.993,39**	**135.175.431.932,30**
27	**KEWAJIBAN**			
28	**Kewajiban Jangka Pendek**			
29	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	*6.8*	1.291.954.210,10	82.385.997,00
30	Utang Pihak Ketiga		-	-
31	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek**		**1.291.954.210,10**	**82.385.997,00**
32	**JUMLAH KEWAJIBAN**		**1.291.954.210,10**	**82.385.997,00**
33	**EKUITAS**	***6.9***		
34	Ekuitas		146.098.511.783,29	135.093.045.935,30
32	**JUMLAH EKUITAS**		**146.098.511.783,29**	**135.093.045.935,30**
33	**JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS**		**147.390.465.993,39**	**135.175.431.932,30**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PARAF HIRARKI	
WADIR ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA	
KEPALA BAGIAN KEUANGAN	

Bali, 20 Februari 2026
Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama
Direktur,

dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.
NIP.19760714 200902 2 003

RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	**Kegiatan Operasional**					
2	**Pendapatan**					
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan	*7.1.1)*	21.651.772.566,00	24.034.747.541,00	(2.382.974.975,00)	-9,91%
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	*7.1.2)*	-	-	-	-
5	Retribusi Pemanfaatan Aset	*7.1.3)*	30.900.000,00	26.550.000,00	4.350.000,00	16,38%
6	Pendapatan Hibah	*7.1.4)*	4.486.098,00	7.178.128,00	(2.692.030,00)	-37,50%
7	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	*7.1.5)*	1.034.245.787,00	753.005.216,45	281.240.570,55	37,35%
8	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	*7.1.6)*	278.106.142,46	221.151.504,50	56.954.637,96	25,75%
9	Pendapatan APBD	*7.1.7)*	24.734.582.084,00	13.693.793.229,00	11.040.788.855,00	80,63%
10	**Jumlah Pendapatan**		**47.734.092.677,46**	**38.736.425.618,95**	**8.997.667.058,51**	**23,23%**
11	**Beban**					
12	Beban Pegawai	*7.2.1)*	6.048.240.609,10	38.100.000,00	6.010.140.609,10	15774,65%
13	Beban Barang dan Jasa	*7.2.2)*	22.964.266.180,96	27.604.902.240,54	(4.640.636.059,58)	-16,81%
14	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	*7.2.3)*	61.543.353,72	156.797.979,24	(95.254.625,52)	-60,75%
15	Beban Penyusutan dan Amortisasi	*7.2.4)*	6.154.205.833,56	6.470.964.764,00	(316.758.930,44)	-4,90%
16	Beban Lain-lain	*7.2.5)*	2.261.530,71	1.851.516,67	410.014,04	22,14%
17	**Jumlah Beban**		**35.230.517.508,05**	**34.272.616.500,45**	**957.901.007,60**	**2,79%**
18	**Surplus (Defisit) dari Operasi**		**12.503.575.169,41**	**4.463.809.118,50**	**8.039.766.050,91**	**180,11%**
19	**Kegiatan Non Operasional**	*7.3*				
20	Surplus (Defisit) Penghentian Aset Non Lancar		(1.659.356.176,65)	(249.564.667,30)	(1.409.791.509,35)	564,90%
21	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-	-	-
22	Surplus (Defisit) dari Keg. Non Operasional Lainnya		153.814.678,23	8.773.664.239,08	(8.619.849.560,85)	-98,25%
23	**Jumlah Surplus (Defisit) dari Keg. Non Operasional**		**(1.505.541.498,42)**	**8.524.099.571,78**	**(10.029.641.070,20)**	**-117,66%**
24	**Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa**		**10.998.033.670,99**	**12.987.908.690,28**	**(1.989.875.019,29)**	**-15,32%**
25	**Pos Luar Biasa**	*7.4*				
26	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
27	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
28	**Jumlah Pos Luar Biasa**		**-**	**-**	**-**	
29	**Surplus (Defisit)-LO**		**10.998.033.670,99**	**12.987.908.690,28**	**(1.989.875.019,29)**	**-15,32%**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PARAF HIRARKI	
WADIR ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA	
KEPALA BAGIAN KEUANGAN	

Bali, 20 Februari 2026
Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama
Direktur,

dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.
NIP.19760714 200902 2 003

RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024
(Metode Langsung)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Arus kas dari Aktivitas Operasi**	***8.1***		
2	**Arus Masuk Kas**	***8.1.1)***		
3	Pendapatan dari APBD		24.734.582.084,00	13.693.793.229,00
4	Retribusi Pelayanan Kesehatan		21.716.668.832,00	23.585.477.046,00
5	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan		-	-
6	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		30.900.000,00	26.550.000,00
7	Pendapatan Hibah		-	-
8	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan		1.029.496.187,00	776.459.216,45
9	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah		278.106.142,46	221.151.504,50
10	Koreksi Lainnya		-	-
11	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**47.789.753.245,46**	**38.303.430.995,95**
12	**Arus Kas Keluar**	***8.1.2)***		
13	Pembayaran Pegawai		4.829.144.189,00	4.394.766.301,00
14	Pembayaran Persediaan		10.830.431.032,00	12.994.687.205,44
15	Pembayaran Jasa		10.934.408.880,37	13.269.734.537,00
16	Pembayaran Pemeliharaan		924.326.182,00	1.056.405.155,00
17	Pembayaran Perjalanan Dinas		228.525.732,00	381.234.731,00
18	Pembayaran Uang/Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga		100.162.880,00	153.121.769,00
19	Pembayaran Lain-lain		-	-
20	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**27.846.998.895,37**	**32.249.949.698,44**
21	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**		**19.942.754.350,09**	**6.053.481.297,51**
22	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**	***8.2***		
23	**Arus Masuk Kas**	***8.2.1)***		
24	Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
25	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
26	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
27	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
28	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		-	-
29	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
30	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**-**	**-**
31	**Arus Keluar Kas**	***8.2.2)***		
32	Perolehan Tanah		-	-
33	Perolehan Peralatan dan Mesin		3.106.222.902,00	2.916.653.687,50
34	Perolehan Gedung dan Bangunan		14.630.666.811,75	1.233.675.284,19
35	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	71.054.430,00
36	Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
37	Perolehan Sarana Fisik Lainnya		-	-
38	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**17.736.889.713,75**	**4.221.383.401,69**
39	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**		**(17.736.889.713,75)**	**(4.221.383.401,69)**
40	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**	***8.3***		
41	**Arus Masuk Kas**	***8.3.1)***		
42	Penerimaan Pinjaman		-	-
43	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
44	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**-**	**-**
45	**Arus Keluar Kas**	***8.3.2)***		
46	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-
47	Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-
48	Pemberian Pinjaman		-	-
49	Penyetoran ke RKUD Provinsi Bali		-	-
50	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**-**	**-**
51	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**		**-**	**-**

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
52	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**	***8.4***		
53	**Arus Kas Masuk**	***8.4.1)***		
54	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		3.294.881.696,00	1.636.732.753,00
55	**Jumlah Arus Kas Masuk**		**3.294.881.696,00**	**1.636.732.753,00**
56	**Arus Kas Keluar**	***8.4.2)***		
57	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		3.294.881.696,00	1.636.732.753,00
58	**Jumlah Arus Kas Keluar**		**3.294.881.696,00**	**1.636.732.753,00**
59	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**		**-**	**-**
60	**Kenaikan/Penurunan Kas BLUD**		**2.205.864.636,34**	**1.832.097.895,82**
61	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD**		**11.253.136.977,16**	**9.421.039.081,34**
62	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD**		**13.459.001.613,50**	**11.253.136.977,16**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PARAF HIRARKI	
WADIR ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA	
KEPALA BAGIAN KEUANGAN	

Bali, 20 Februari 2026
Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama
Direktur,

dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.
NIP.19760714 200902 2 003

RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Ekuitas Awal**	***9.1***	**135.093.045.935,30**	**120.693.513.434,73**
2	**Surplus (Defisit) LO**	***9.2***	**10.998.033.670,99**	**12.987.908.690,28**
3	**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan**	***9.3***	**7.432.177,00**	**1.411.623.810,28**
	Penyesuaian Saldo Awal Piutang		-	1.432.265.405,00
	Penyesuaian Saldo Awal Penyisihan Piutang		-	(7.161.327,03)
	Penambahan Persediaan dari Mutasi Antar OPD		6.612.064,00	859.674,94
	Penyesuaian Saldo Awal Persediaan		-	1.934.945,36
	Penyesuaian Saldo Awal Aset Tetap		(0,01)	(9.275.938,00)
	Penambahan Aset Tetap dari Mutasi Antar OPD		298.370.000,00	-
	Penambahan Akumulasi Penyusutan dari Mutasi Antar OPD		(298.370.000,00)	-
	Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		820.113,01	(6.998.950,00)
4	**Ekuitas Akhir**	***9.4***	**146.098.511.783,29**	**135.093.045.935,30**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PARAF HIRARKI	
WADIR ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA	
KEPALA BAGIAN KEUANGAN	

Bali, 20 Februari 2026
Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama
Direktur,

dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.
NIP.19760714 200902 2 003

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD. PENGELOLAAN AIR LIMBAH
JALAN MELATI NO. 16 DENPASAR – (80233), TELEPON (0361) 225996,
Laman : www.uptpal-provbali.com, Pos-el : upt_pal_bali@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA BLUD
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Memenuhi ketentuan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : I Putu Sujana, S.T, M.Si.
   Alamat Kantor : Jl. Melati No. 16 Denpasar Telepon (0361) 225996
   Alamat Rumah Sesuai KTP : -
   Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/Pemimpin BLUD.
   NIP : 19710215 199803 1 010

2. Nama : Anak Agung Made Suniari, S.T.
   Alamat Kantor : Jl. Melati No. 16 Denpasar Telepon (0361) 225996
   Alamat Rumah Sesuai KTP : -
   Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Pejabat Keuangan.
   NIP : 19710626 200902 2 001

3. Nama : Ni Nyoman Budi Artini, STP., M.Si.
   Alamat Kantor : Jl. Melati No. 16 Denpasar Telepon (0361) 225996
   Alamat Rumah Sesuai KTP : -
   Jabatan : Kepala Seksi Pelaksana Teknik/Pejabat Teknis.
   NIP : 19700210 200701 2 023

4. Nama : Agus Sugiarto, S.T.
   Alamat Kantor : Jl. Melati No. 16 Denpasar Telepon (0361) 225996
   Alamat Rumah Sesuai KTP : -
   Jabatan : Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi/Pejabat Teknis
   NIP : 19700327 199603 1 005

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD. PENGELOLAAN AIR LIMBAH
JALAN MELATI NO. 16 DENPASAR – (80233), TELEPON (0361) 225996,
Laman : www.uptpal-provbali.com, Pos-el : upt_pal_bali@yahoo.com

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 217/PMK.05/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar
   b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Untuk dan atas nama UPTD PAL Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

Pejabat Pengelola

Nama	Jabatan	Jabatan Struktural	Tanda Tangan
I Putu Sujana, S.T. NIP. 19710215 199803 1 010	Pemimpin BLUD	Kepala UPTD	.....
Anak Agung Made Suniari, S.T. NIP. 19710626 200902 2 001	Pejabat Keuangan	Kasubag Tata Usaha	.....
Ni Nyoman Budi Artini, STP., M.Si. NIP. 19700210 200701 2 023	Pejabat Teknis	Kasi Pelaksana Teknis	.....
Agus Sugiarto, ST. NIP. 19700327 199603 1 005	Pejabat Teknis	Kasi Monev	.....

Bali, 2 Maret 2026

Laporan No: 00012/2.1516/AU.5/11/0463-5/1/III/2026

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pengguna Laporan Keuangan
UPTD Pengelolaan Air Limbah
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Bali

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini
Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Pengelolaan Air Limbah, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini
Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan

basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.
Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan
Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami.

Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memeroleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00012/ML/KAP.IGOR/1/III/2026 tanggal 2 Maret 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka & Rekan

00012

KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA & REKAN

I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA., CFI., ASEAN CPA.
NRAP: AP.0463

Badung, 2 Maret 2026

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	**Pendapatan**					
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	*4.1.a*	16.740.000.000,00	17.975.890.000,00	107,38%	15.654.695.000,00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	*4.1.b*	-	-	-	-
4	Pendapatan Hibah	*4.1.c*	-	-	-	-
5	Pendapatan Hasil Kerjasama	*4.1.d*	-	-	-	-
6	Pendapatan Usaha Lainnya	*4.1.e*	260.000.000,00	302.087.993,17	116,19%	162.333.540,72
7	Pendapatan APBD	*4.1.e*	1.340.072.150,00	1.311.696.150,00	97,88%	2.932.448.684,00
8	**Jumlah Pendapatan**		**18.340.072.150,00**	**19.589.674.143,17**	**106,81%**	**18.749.477.224,72**
9	**Belanja**					
10	**Belanja Operasi**					
11	Belanja Pegawai	*4.2.a*	9.660.000,00	9.660.000,00	100,00%	6.600.000,00
12	Belanja Barang dan Jasa	*4.2.b*	13.845.412.150,00	12.636.095.320,00	91,27%	11.693.357.582,00
13	**Jumlah Belanja Operasi**		**13.855.072.150,00**	**12.645.755.320,00**	**91,27%**	**11.699.957.582,00**
14	**Belanja Modal**					
15	Belanja Tanah	*4.3.a*			-	-
16	Belanja Peralatan dan Mesin	*4.3.b*	3.910.000.000,00	2.097.629.781,00	53,65%	455.693.600,00
17	Belanja Gedung dan Bangunan	*4.3.c*	540.000.000,00	536.832.850,00	99,41%	-
18	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	*4.3.d*	35.000.000,00	29.867.880,00	85,34%	-
19	Belanja Aset Lainnya	*4.3.e*			-	-
20	**Jumlah Belanja Modal**		**4.485.000.000,00**	**2.664.330.511,00**	**59,41%**	**455.693.600,00**
21	**Jumlah Belanja**		**18.340.072.150,00**	**15.310.085.831,00**	**83,48%**	**12.155.651.182,00**
22	**Surplus (Defisit)**		**-**	**4.279.588.312,17**	**0,00%**	**6.593.826.042,72**
23	**Pembiayaan**					
24	**Penerimaan Pembiayaan**					
25	Penerimaan Pinjaman		-	-	-	-
26	Penerimaan dari divestasi		-	-	-	-
27	Penerimaan kembali pinjaman		-	-	-	-
28	**Jumlah Penerimaan**		-	-	-	-
29	**Pengeluaran Pembiayaan**					
30	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-	-
31	Pengeluaraan Penyertaan Modal		-	-	-	-
32	Pemberian Pinjaman		-	-	-	-
33	**Jumlah Pengeluaran**		-	-	-	-
34	**Pembiayaan Neto**		-	-	-	-
35	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**		**-**	**4.279.588.312,17**	**0,00%**	**6.593.826.042,72**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 2 Maret 2026
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
UPTD Pengelolaan Air Limbah

I Putu Sujana, S.T, M.Si.
NIP. 19710215 199803 1 010

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	*5.1*	**11.397.444.299,21**	**4.803.618.256,49**
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	*5.2*	-	-
3	**Sub Total**		**11.397.444.299,21**	**4.803.618.256,49**
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	*5.3*	4.279.588.312,17	6.593.826.042,72
5	**Sub Total**		**15.677.032.611,38**	**11.397.444.299,21**
6	Penyetoran ke Kas Daerah	*5.4*		
7	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	*5.5*	**15.677.032.611,38**	**11.397.444.299,21**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 2 Maret 2026
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
UPTD Pengelolaan Air Limbah

I Putu Sujana, S.T, M.Si.
NIP. 19710215 199803 1 010

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH
NERACA
31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024
(disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**ASET**			
2	**Aset Lancar**			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran APBD	*6.1*	-	-
4	Kas pada BLUD	*6.2*	15.677.032.611,38	11.397.444.299,21
5	Piutang Layanan BLUD	*6.3*	2.818.375.000,00	2.364.775.000,00
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		(2.229.654.975,00)	(1.827.861.650,00)
7	Persediaan BLUD	*6.4*	386.257.205,81	205.671.320,00
8	**Jumlah Aset Lancar**		**16.652.009.842,19**	**12.140.028.969,21**
9	**Aset Tetap**	*6.5*		
10	Tanah		11.638.200.000,00	3.763.200.000,00
11	Peralatan dan Mesin		6.977.575.026,00	5.589.481.085,00
12	Gedung dan Bangunan		8.550.922.753,00	8.014.089.903,00
13	Jalan, Jaringan, dan Irigasi		1.419.146.864.777,00	784.887.508.286,00
14	Aset Tetap Lainnya			-
15	Konstruksi dalam Pengerjaan			-
16	**Biaya Perolehan Aset Tetap**		**1.446.313.562.556,00**	**802.254.279.274,00**
17	Akumulasi Penyusutan		*(597.748.367.579,00)*	*(321.655.598.392,00)*
18	**Nilai Buku Aset Tetap**		**848.565.194.977,00**	**480.598.680.882,00**
19	**Aset Lainnya**	*6.6*		
20	Aset Tidak Berwujud		49.406.000,00	49.406.000,00
21	Akumulasi Penyusutan		*(49.406.000,00)*	*(49.406.000,00)*
22	**Nilai Buku Tidak Berwujud**		-	-
23	Aset Lainnya - Aset Tetap Rusak Berat		704.780.340,00	179.169.500,00
24	Akumulasi Penyusutan		*(704.780.340,00)*	*(179.169.500,00)*
25	**Jumlah Aset Lainnya**		-	-
26	**Nilai Buku Aset Lainnya**		-	-
27	**JUMLAH ASET**		**865.217.204.819,19**	**492.738.709.851,21**
28	**KEWAJIBAN**			
29	**Kewajiban Jangka Pendek**			
30	Utang Belanja Pegawai	*6.7*	-	-
31	Utang Belanja Barang dan Jasa	*6.8*	381.188.624,00	349.657.928,00
32	Utang Jangka Pendek Lainnya	*6.9*	-	-
33	**Jumlah Kewajiban Jk Pendek**		**381.188.624,00**	**349.657.928,00**
34	**Kewajiban Jangka Panjang**			
35	Utang Jangka Panjang		-	-
36	**Jumlah Kewajiban Jk Panjang**		-	-
37	**JUMLAH KEWAJIBAN**		**381.188.624,00**	**349.657.928,00**
38	**EKUITAS**			
39	Ekuitas	*6.10*	864.836.016.195,19	492.389.051.923,21
40	**JUMLAH EKUITAS**		**864.836.016.195,19**	**492.389.051.923,21**
41	**JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS**		**865.217.204.819,19**	**492.738.709.851,21**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 2 Maret 2026
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
UPTD Pengelolaan Air Limbah

I Putu Sujana, S.T, M.Si.
NIP. 19710215 199803 1 010

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	**Kegiatan Operasional**					
2	**Pendapatan**					
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	*7.1.a*	18.429.490.000,00	16.019.855.000,00	2.409.635.000,00	15,04%
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	7.1.b	-	-	-	-
5	Pendapatan Hibah	*7.1.c*	7.875.000.000,00	264.397.480.127,00	(256.522.480.127,00)	0,00%
6	Pendapatan Lain-Lain	*7.1.d*	302.087.993,17	162.333.540,72	139.754.452,45	86,09%
7	Pendapatan APBD	*7.1.e*	1.311.696.150,00	2.932.448.684,00	(1.620.752.534,00)	-55,27%
8	**Jumlah Pendapatan**		**27.918.274.143,17**	**283.512.117.351,72**	**(255.593.843.208,55)**	**-90,15%**
9	**Beban**					
10	Beban Pegawai	*7.2.a*	9.660.000,00	6.600.000,00	3.060.000,00	46,36%
11	Beban Barang dan Jasa	*7.2.b*	12.487.040.130,19	11.853.255.171,00	633.784.959,19	5,35%
12	Beban Penyisihan Piutang	*7.2.c*	159.372.375,00	274.711.650,00	(115.339.275,00)	-41,99%
13	Beban Penyusutan	*7.2.d*	26.110.158.719,00	14.099.302.327,00	12.010.856.392,00	85,19%
14	Beban Amortisasi	*7.2.e*	-	-	-	-
15	Beban Lain-Lain	*7.2 f*	218.115.000,00	-	218.115.000,00	-
16	**Jumlah Beban**		**38.984.346.224,19**	**26.233.869.148,00**	**12.750.477.076,19**	**48,60%**
17	**Surplus (Defisit) dari Operasi**		**(11.066.072.081,02)**	**257.278.248.203,72**	**(268.344.320.284,74)**	**-104,30%**
18	**Kegiatan Non Operasional**	*7.3*				
19	Surplus (Defisit) Penjualan Aset		-	-	-	-
20	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-	-	-
21	Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya		(242.420.950,00)	(41.948.650,00)	(200.472.300,00)	477,90%
22	**Jumlah Surplus (Defisit) dari Keg. Non Operasional**		**(242.420.950,00)**	**(41.948.650,00)**	**(200.472.300,00)**	**477,90%**
23	**Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar**		**(11.308.493.031,02)**	**257.236.299.553,72**	**(268.544.792.584,74)**	**-104,40%**
24	**Pos Luar Biasa**					
25	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
26	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
27	**Jumlah Pos Luar Biasa**		-	-	-	-
28	**Surplus (Defisit)-LO**		**(11.308.493.031,02)**	**257.236.299.553,72**	**(268.544.792.584,74)**	**-104,40%**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 2 Maret 2026
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
UPTD Pengelolaan Air Limbah

I Putu Sujana, S.T, M.Si.
NIP. 19710215 199803 1 010

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Arus kas dari Aktivitas Operasi**			
2	**Arus Masuk Kas**	*8.1 1)*		
3	Pendapatan dari APBD		1.311.696.150,00	2.932.448.684,00
4	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat		17.975.890.000,00	15.654.695.000,00
5	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan		-	-
6	Pendapatan hasil kerjasama		-	-
7	Pendapatan hibah		-	-
8	Pendapatan usaha lainnya		302.087.993,17	162.333.540,72
9	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**19.589.674.143,17**	**18.749.477.224,72**
10	**Arus Kas Keluar**	*8.1 2)*		
11	Pembayaran Pegawai		9.660.000,00	6.600.000,00
12	Pembayaran Barang		12.636.095.320,00	11.693.357.582,00
13	Pembayaran Bunga		-	-
14	Pembayaran Lain-lain		-	-
15	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**12.645.755.320,00**	**11.699.957.582,00**
16	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**		**6.943.918.823,17**	**7.049.519.642,72**
17	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**			
18	**Arus Masuk Kas**	*8.2 1)*	-	-
19	**Jumlah Arus Masuk Kas**		-	-
20	**Arus Keluar Kas**	*8.2 2)*		
21	Perolehan Tanah		-	-
22	Perolehan Peralatan dan Mesin		2.097.629.781,00	455.693.600,00
23	Perolehan Gedung dan Bangunan		536.832.850,00	-
24	Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi		29.867.880,00	-
25	Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
26	Perolehan Aset Lainnya		-	-
27	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**2.664.330.511,00**	**455.693.600,00**
28	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**		**(2.664.330.511,00)**	**(455.693.600,00)**
29	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**			
30	**Arus Masuk Kas**	*8.3 1)*		
31	Penerimaan Pinjaman		-	-
32	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
33	**Jumlah Arus Masuk Kas**		-	-
34	**Arus Keluar Kas**	*8.3 2)*		
35	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-
36	Pengeluaraan Penyertaan Modal		-	-
37	Pemberian Pinjaman		-	-
38	Penyetoran ke Kas Daerah		-	-
39	**Jumlah Arus Keluar Kas**		-	-
40	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**		-	-

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
41	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**			
42	**Arus Kas Masuk**	*8.4 1)*		
43	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		1.047.281.493,00	581.095.294,00
44	**Jumlah Arus Kas Masuk**		**1.047.281.493,00**	**581.095.294,00**
45	**Arus Kas Keluar**	*8.4 2)*		
46	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		1.047.281.493,00	581.095.294,00
47	**Jumlah Arus Kas Keluar**		**1.047.281.493,00**	**581.095.294,00**
48	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**		-	-
49	**Kenaikan/Penurunan Kas BLUD**	*8.5*	**4.279.588.312,17**	**6.593.826.042,72**
50	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD**		**11.397.444.299,21**	**4.803.618.256,49**
51	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD**		**15.677.032.611,38**	**11.397.444.299,21**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 2 Maret 2026
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
UPTD Pengelolaan Air Limbah

I Putu Sulana, S.T, M.Si.
NIP. 19710215 199803 1 010

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Ekuitas Awal**	*9.1*	**492.389.051.923,21**	**235.199.152.369,49**
2	**Surplus (Defisit) LO**	*9.2*	**(11.308.493.031,02)**	**257.236.299.553,72**
3	**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**	*9.3*	**383.755.457.303,00**	**(46.400.000,00)**
	Koreksi Harga Perolehan Aset Tetap		46.400.000,00	(46.400.000,00)
	Koreksi Saldo Awal Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin		(1.415.874,00)	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Mutasi OPD Aset Tetap		(250.506.805.434,00)	-
	Mutasi Antar OPD Peralatan dan Mesin		(12.210.000,00)	-
	Mutasi Antar OPD Jalan, Irigasi, dan Jaringan		634.229.488.611,00	
4	**Ekuitas Akhir**	*9.4*	**864.836.016.195,19**	**492.389.051.923,21**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 2 Maret 2026
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
UPTD Pengelolaan Air Limbah

I Putu Sujana, S.T, M.Si.
NIP. 19710215 199803 1 010

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD. PENGELOLAAN AIR MINUM
JALAN HOS. COKROAMINOTO NOMOR 11 DENPASAR, TELEPON (0361) 412143

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA BLUD
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI TAHUN 2025

Memenuhi ketentuan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ni Kadeq Sudiartini, S.E.,M.M.
   Alamat Kantor : Jalan HOS Cokroaminoto No.11 Denpasar
   Alamat Rumah Sesuai KTP : Perum Padang Hijau A 13 Dps. Buana Desa, Padang Sambian, Denpasar Barat
   Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/Pemimpin BLUD
   NIP : 19681217 200701 2 028
2. Nama : I Made Joni Dwira Dharma, S.T.
   Alamat Kantor : Jalan HOS Cokroaminoto No.11 Denpasar
   Alamat Rumah Sesuai KTP : Jalan Tukad Banyusari Gg. IV No. 18, Tegal Sari, Panjer, Denpasar Selatan
   Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Pejabat Keuangan
   NIP : 19760622 201001 1 009
3. Nama : I Nyoman Agus Wirawan Wijaya, S.T.,M.T
   Alamat Kantor : Jalan HOS Cokroaminoto No.11 Denpasar
   Alamat Rumah Sesuai KTP : Br. Kemulan, Desa Jagapati, Abiansemal, Badung
   Jabatan : Kepala Seksi Pelaksana Teknik/Pejabat Teknis
   NIP : 19820825 201101 1 013
4. Nama : Gede One Widya Adisaputra, S.T.
   Alamat Kantor : Jalan HOS Cokroaminoto No.11 Denpasar
   Alamat Rumah Sesuai KTP : Br. Gelgel, Desa Keramas, Blahbatuh, Gianyar
   Jabatan : Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi/Pejabat Teknis
   NIP : 19811001 201101 1 002

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD. PENGELOLAAN AIR MINUM
JALAN HOS. COKROAMINOTO NOMOR 11 DENPASAR, TELEPON (0361) 412143

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 217/PMK.05/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Untuk dan atas nama UPTD Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali,

Bali, 03 Februari 2026

Pejabat Pengelola

Pemimpin BLUD



Ni Kadek Sudiartini, S.E., M.M.
NIP. 19681217 200701 2 028

Pejabat Keuangan	Pejabat Teknis	Pejabat Teknis
I Made Joni Dwira Dharma, S.T.	I Nym. Agus Wirawan Wijaya,S.T.,M.T	Gede One Widya Adisaputra, S.T.
NIP. 19760622 201001 1 009	NIP. 19820825 201101 1 013	NIP. 19811001 201101 1 002

Kantor Akuntan Publik
I GEDE OKA & REKAN
Registered Public Accountants
Izin Usaha KAP: KMK No. 131/MK/SK/2025

Laporan No: 00005/2.1516/AU.5/11/0463-5/1/II/2026

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pengguna Laporan Keuangan
UPTD Pengelolaan Air Minum
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Pengelolaan Air Minum, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke

pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memeroleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor: 00005/ML/KAP.IGOR/1/II/2026 tanggal 03 Februari 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka & Rekan
Pemimpin Rekan,

00005

KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA & REKAN

I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA., CFI., ASEAN CPA.
NRAP: AP.0463

Badung, 03 Februari 2026

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	**Pendapatan**					
2	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	*4.1.1*	39.910.000.000,00	32.662.398.001,00	81,84%	32.138.974.105,00
3	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan	*4.1.2*	-	-	-	-
4	Pendapatan hasil kerjasama	*4.1.3*	-	-	-	-
5	Pendapatan hibah	*4.1.4*	-	-	-	-
6	Pendapatan usaha lainnya	*4.1.5*	90.000.000,00	94.842.004,18	105,38%	179.807.972,33
7	Pendapatan APBD	*4.1.6*	3.218.719.622,00	3.199.186.376,00	99,39%	5.972.553.886,00
8	**Jumlah Pendapatan**		**43.218.719.622,00**	**35.956.426.381,18**	**83,20%**	**38.291.335.963,33**
9	**Belanja**					
10	**Belanja Operasi**					
11	Belanja Pegawai	*4.2.1*	-	-	-	-
12	Belanja Barang dan Jasa	*4.2.2*	34.193.724.697,00	29.775.221.019,00	87,08%	30.496.527.490,00
13	Bunga		-	-	-	-
14	Belanja Lain-lain		-	-	-	-
15	**Jumlah Belanja Operasi**		**34.193.724.697,00**	**29.775.221.019,00**	**87,08%**	**30.496.527.490,00**
16	**Belanja Modal**					
17	Belanja Tanah	*4.3.1*	-	-	-	-
18	Belanja Peralatan dan Mesin	*4.3.2*	8.178.581.100,00	8.143.486.400,00	99,57%	4.320.123.448,00
19	Belanja Gedung dan Bangunan	*4.3.3*	196.913.825,00	196.913.825,00	100,00%	650.793.140,00
20	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	*4.3.4*	649.500.000,00	199.500.000,00	30,72%	3.868.645.636,00
21	Belanja Aset Tetap Lainnya	*4.3.5*	-	-	-	-
22	Belanja Aset Lainnya	*4.3.6*	-	-	-	-
23	**Jumlah Belanja Modal**		**9.024.994.925,00**	**8.539.900.225,00**	**94,62%**	**8.839.562.224,00**
24	**Jumlah Belanja**		**43.218.719.622,00**	**38.315.121.244,00**	**88,65%**	**39.336.089.714,00**
25	**Surplus (Defisit)**		**-**	**(2.358.694.862,82)**	**-**	**(1.044.753.750,67)**
26	**Pembiayaan**					
27	**Penerimaan Pembiayaan**					
28	Penerimaan Pinjaman		-	-	-	-
29	Penerimaan dari divestasi		-	-	-	-
30	Penerimaan kembali pinjaman		-	-	-	-
31	**Jumlah Penerimaan**		-	-	-	-
32	**Pengeluaran Pembiayaan**					
33	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-	-
34	Pengeluaraan Penyertaan Modal		-	-	-	-
35	Pemberian Pinjaman		-	-	-	-
36	**Jumlah Pengeluaran**		-	-	-	-
37	**Pembiayaan Neto**		-	-	-	-
38	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**		**-**	**(2.358.694.862,82)**	**-**	**(1.044.753.750,67)**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 03 Februari 2026

Kepala UPTD Pengelolaan Air Minum,

Ni Kadek Sudiartini, S.E., M.M.
NIP.19681217 200701 2 028

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	*5.1*	**3.776.013.806,69**	**4.820.767.557,36**
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	*5.2*	-	-
3	**Sub Total**		**3.776.013.806,69**	**4.820.767.557,36**
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Berjalan	*5.3*	(2.358.694.862,82)	(1.044.753.750,67)
5	**Sub Total**		**1.417.318.943,87**	**3.776.013.806,69**
6	Penyetoran Ke Kas Daerah	*5.4*	-	-
7	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	*5.5*	**1.417.318.943,87**	**3.776.013.806,69**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 03 Februari 2026

Kepala UPTD Pengelolaan Air Minum,

Ni Kadeq Sudiartini, S.E., M.M.
NIP.19681217 200701 2 028

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**ASET**			
2	**Aset Lancar**			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran APBD	*6.1*	-	-
4	Kas pada BLUD	*6.2*	1.417.318.943,87	3.776.013.806,69
5	Piutang Operasional BLUD	*6.3*	3.112.656.735,00	2.796.271.075,00
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	*6.3*	(105.043.472,36)	(70.784.199,18)
7	Persediaan BLUD	*6.4*	3.359.146.958,26	4.194.144.207,65
8	**Jumlah Aset Lancar**		**7.784.079.164,77**	**10.695.644.890,16**
9	**Aset Tetap**	*6.5*		
10	Tanah		31.159.269.000,00	-
11	Peralatan dan Mesin		55.731.397.336,00	29.787.604.454,00
12	Gedung dan Bangunan		236.225.472.051,00	125.371.012.048,00
13	Jalan, Jaringan, dan Irigasi		151.716.760.010,00	284.701.667.344,00
14	Aset Tetap Lainnya		-	-
15	Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	-
16	**Biaya Perolehan Aset Tetap**		**474.832.898.397,00**	**439.860.283.846,00**
17	Akumulasi Penyusutan		(117.575.666.179,00)	(103.910.929.800,00)
18	**Jumlah Aset Tetap**		**357.257.232.218,00**	**335.949.354.046,00**
19	**Aset Lain-lain**	*6.6*		
20	Barang Kondisi Rusak Berat		160.707.266,00	160.707.266,00
21	Aset Yang dimanfaatkan Pihak Lain		-	-
22	Aset Tidak Berwujud		8.318.610.890,00	3.942.976.395,00
23	Akumulasi Amortisasi		(8.460.836.564,00)	(4.072.156.239,00)
24	**Jumlah Aset Lain-lain**		**18.481.592,00**	**31.527.422,00**
25	**JUMLAH ASET**		**365.059.792.974,77**	**346.676.526.358,16**
26	**KEWAJIBAN**			
27	**Kewajiban Jangka Pendek**	*6.7*		
28	Utang Belanja Pegawai		-	-
29	Utang Belanja Barang dan Jasa		1.344.144.109,00	1.268.249.952,00
30	Pendapatan Diterima Dimuka		-	-
31	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
32	**Jumlah Kewajiban Jk Pendek**		**1.344.144.109,00**	**1.268.249.952,00**
33	**JUMLAH KEWAJIBAN**		**1.344.144.109,00**	**1.268.249.952,00**
34	**EKUITAS**	*6.8*		
35	Ekuitas		363.715.648.865,77	345.408.276.406,16
36	**JUMLAH EKUITAS**		**363.715.648.865,77**	**345.408.276.406,16**
37	**JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS**		**365.059.792.974,77**	**346.676.526.358,16**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 03 Februari 2026

Kepala UPTD Pengelolaan Air Minum,

Ni Kadek Sudiartini, S.E., M.M.
NIP.19681217 200701 2 028

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Ref*	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	**Kegiatan Operasional**					
2	**Pendapatan**					
3	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	*7.1.1)*	32.978.783.661,00	31.733.033.698,00	1.245.749.963,00	3,93%
4	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan	*7.1.2)*	-	-	-	-
5	Pendapatan hasil kerjasama	*7.1.3)*	-	-	-	-
6	Pendapatan hibah	*7.1.4)*	-	177.424.457.031,00	(177.424.457.031,00)	-
7	Pendapatan usaha lainnya	*7.1.5)*	94.842.004,18	169.237.972,33	(74.395.968,15)	-43,96%
8	Pendapatan APBN / APBD	*7.1.6)*	3.199.186.376,00	5.972.553.886,00	(2.773.367.510,00)	-46,44%
9	**Jumlah Pendapatan**		**36.272.812.041,18**	**215.299.282.587,33**	**(179.026.470.546,15)**	**-83,15%**
10	**Beban**					
11	Beban Pegawai	*7.2.1)*	-	-	-	-
12	Beban Barang dan Jasa	*7.2.2)*	30.686.867.225,39	30.724.685.947,46	(37.818.722,07)	-0,12%
13	Beban Penyisihan	*7.2.3)*	105.043.472,36	70.784.199,18	34.259.273,18	48,40%
14	Beban Penyusutan	*7.2.4)*	17.327.188.844,38	6.608.089.614,00	10.719.099.230,38	162,21%
15	Beban Amortisasi	*7.2.5)*	13.045.830,00	13.045.830,00	-	-
16	**Jumlah Beban**		**48.132.145.372,13**	**37.416.605.590,64**	**10.715.539.781,49**	**28,64%**
17	**Surplus (Defisit) dari Operasi**		**(11.859.333.330,95)**	**177.882.676.996,69**	**(189.742.010.327,64)**	**-106,67%**
18	**Kegiatan Non Operasional**	*7.3*				
19	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
20	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-	-	-
21	Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya		70.784.199,18	37.642.557,41	33.141.641,77	88,04%
22	**Jlm. Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op**		**70.784.199,18**	**37.642.557,41**	**33.141.641,77**	**88,04%**
23	**Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa**		**(11.788.549.131,78)**	**177.920.319.554,10**	**(189.708.868.685,88)**	**-106,63%**
24	**Pos Luar Biasa**	*7.4*				
25	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
26	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
27	**Jumlah Pos Luar Biasa**		**-**	**-**	**-**	**-**
28	**Surplus (Defisit)-LO**		**(11.788.549.131,78)**	**177.920.319.554,10**	**(189.708.868.685,88)**	**-106,63%**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 03 Februari 2026

Kepala UPTD Pengelolaan Air Minum,

Ni Kadeq Sudiartini, S.E., M.M.
NIP.19681217 200701 2 028

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024
(Metode Langsung)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Arus kas dari Aktivitas Operasi**	*8.1*		
2	**Arus Masuk Kas**	*8.1 1)*		
3	Pendapatan dari APBD		3.199.186.376,00	5.972.553.886,00
4	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat		32.662.398.001,00	32.138.974.105,00
5	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan		-	-
6	Pendapatan hasil kerjasama		-	-
7	Pendapatan hibah		-	-
8	Pendapatan usaha lainnya		94.842.004,18	179.807.972,33
9	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**35.956.426.381,18**	**38.291.335.963,33**
10	**Arus Kas Keluar**	*8.1 2)*		
11	Pembayaran Pegawai		-	-
12	Pembayaran Barang		29.775.221.019,00	30.496.527.490,00
13	Pembayaran Bunga		-	-
14	Pembayaran Lain-lain		-	-
15	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**29.775.221.019,00**	**30.496.527.490,00**
16	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**		**6.181.205.362,18**	**7.794.808.473,33**
17	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**	*8.2*		
18	**Arus Masuk Kas**	*8.2 1)*		
19	Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
20	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
21	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
22	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi		-	-
23	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		-	-
24	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
25	Penerimaan dari Divestasi		-	-
26	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
27	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**-**	**-**
28	**Arus Keluar Kas**	*8.2 2)*		
29	Perolehan Tanah		-	-
30	Perolehan Peralatan dan Mesin		8.143.486.400,00	4.320.123.448,00
31	Perolehan Gedung dan Bangunan		196.913.825,00	650.793.140,00
32	Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi		199.500.000,00	3.868.645.636,00
33	Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
34	Perolehan Aset Lainnya		-	-
35	Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-
36	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
37	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**8.539.900.225,00**	**8.839.562.224,00**
38	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**		**(8.539.900.225,00)**	**(8.839.562.224,00)**
39	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**	*8.3*		
40	**Arus Masuk Kas**	*8.3 1)*		
41	Penerimaan Pinjaman		-	-
42	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
43	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**-**	**-**

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024
(Metode Langsung)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
44	**Arus Keluar Kas**	*8.3 2)*		
45	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-
46	Pengeluaraan Penyertaan Modal		-	-
47	Pemberian Pinjaman		-	-
48	Penyetoran ke Kas Daerah		-	-
49	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**-**	**-**
50	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**		**-**	**-**
51	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**	*8.4*		
52	**Arus Kas Masuk**	*8.4 1)*		
53	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		2.018.574.426,00	1.960.417.828,00
54	**Jumlah Arus Kas Masuk**		**2.018.574.426,00**	**1.960.417.828,00**
55	**Arus Kas Keluar**	*8.4 2)*		
56	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		2.018.574.426,00	1.960.417.828,00
57	**Jumlah Arus Kas Keluar**		**2.018.574.426,00**	**1.960.417.828,00**
58	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**		**-**	**-**
59	**Kenaikan/Penurunan Kas BLUD**	***8.5 2)***	**(2.358.694.862,82)**	**(1.044.753.750,67)**
60	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD**	***8.5 1)***	**3.776.013.806,69**	**4.820.767.557,36**
61	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD**	***8.4 3)***	**1.417.318.943,87**	**3.776.013.806,69**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 03 Februari 2026

Kepala UPTD Pengelolaan Air Minum,

Ni Kadeq Sudiartini, S.E., M.M.
NIP.19681217 200701 2 028

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Ekuitas Awal**	***9.1***	**345.408.276.406,16**	**167.494.043.189,06**
2	**Surplus (Defisit) LO**	***9.2***	**(11.788.549.131,78)**	**177.920.319.554,10**
3	**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**	***9.3***	**30.095.921.591,38**	**(6.086.337,00)**
	Mutasi Antar Perangkat Daerah - Tanah		31.159.269.000,00	-
	Mutasi Antar Perangkat Daerah - Peralatan dan Mesin		(19.236.666,00)	-
	Mutasi Antar Perangkat Daerah - Gedung dan Bangunan		524.474.345,00	-
	Koreksi Saldo Awal Peralatan dan Mesin		(128.365.469,57)	-
	Koreksi Saldo Awal Gedung dan Bangunan		(15.511.132,80)	-
	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(1.424.708.485,25)	(6.086.337,00)
4	**Ekuitas Akhir**	***9.4***	**363.715.648.865,77**	**345.408.276.406,16**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 03 Februari 2026

Kepala UPTD Pengelolaan Air Minum,

Ni Kadeq Sudiartini, S.E., M.M.
NIP.19681217 200701 2 028

PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HAYAM WURUK NOMOR 152 DENPASAR – BALI (80235), TELEPON : (0361) 224074
WEBSITE : WWW.BPSDM.BALIPROV.GO.ID, E-MAIL : BPSDM@BALIPROV.GO.ID

SURAT PERNYATAAN TANGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA BLUD
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Memenuhi ketentuan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (PKSDM) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Gde Hendra Pranata S.STP, M.Si.
   Alamat Kantor : Jln. Hayam Wuruk No.152 Denpasar
   Alamat Rumah Sesuai KTP : Jl. Karang Sari XII No. 3 Dps, Br/Link. Dukuh Sari, Padang Sambian Kaja, Denpasar Barat
   Jabatan : Kepala UPTD/Pemimpin BLUD
   NIP : 19850521 200312 1 002
2. Nama : Ni Luh Putu Puspasari, S.Sos.
   Alamat Kantor : Jln. Hayam Wuruk No.152 Denpasar
   Alamat Rumah Sesuai KTP : Jl. Tukad Yeh Aya IX C No. 19 Dps, Br/Link. Peken, Renon, Denpasar Selatan
   Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Pejabat Keuangan
   NIP : 19691113 198809 2 001
3. Nama : I Made Purnama Putera, S.STP., M.AP
   Alamat Kantor : Jln. Hayam Wuruk No.152 Denpasar
   Alamat Rumah Sesuai KTP : Br. Dinas Umaseka, Antosari, Selemadeg Barat
   Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Sarana dan Prasarana
   NIP : 19910429 201206 1 004
4. Nama : I Made Adi Jayatama, S.STP, M.AP
   Alamat Kantor : Jln. Hayam Wuruk No.152 Denpasar
   Alamat Rumah Sesuai KTP : Jl. Gutiswa X No. 7, Ambengan, Peguyangan Kangin, Denpasar Utara
   Jabatan : Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM
   NIP : 19920911 201406 1 002

ᬩᬮᬶᬓᬶᬦᬶᬱᬭᬩᬭᬲᬶᬯᬶᬓᬸᬲᬶᬯᬶᬓᬶᬮᬶᬓᬶ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ᬓᬩᬓᬶᬓᬲᬶᬯᬶᬓᬶᬩᬓᬶᬓᬶᬩᬓᬶᬓᬶᬫᬶᬦᬶᬲᬶᬫᬶᬦᬶᬲᬶᬫᬶᬦᬶᬲ

Laporan No: 00016/2.1274/AU.5/11/0463-3/1/III/2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pengguna Laporan Keuangan
UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Bali

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (PKSDM) Provinsi Bali, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2024, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memeroleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00016/ML/KAP.IGO/III/2025 tanggal 10 Maret 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka

00016

I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA., CFI., ASEAN CPA
NRAP: AP.0463

Badung, 10 Maret 2025

PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	**Pendapatan**					
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	*4.1.a*	22.392.613.000,00	22.776.129.500,00	101,71%	10.826.777.500,00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	*4.1.b*	-	-	-	-
4	Pendapatan Hasil Kerjasama	*4.1.c*	-	-	-	-
5	Pendapatan Hibah	*4.1.d*	-	-	-	-
6	Pendapatan Usaha Lainnya	*4.1.e*	300.000.000,00	575.864.907,41	191,95%	588.208.447,51
7	Pendapatan APBD	*4.1.f*	-	-	-	-
8	**Jumlah Pendapatan**		**22.692.613.000,00**	**23.351.994.407,41**	**102,91%**	**11.414.985.947,51**
9	**Belanja**					
10	**Belanja Operasi**					
11	Belanja Pegawai	*4.2.a*	-	-	-	-
12	Belanja Barang dan Jasa	*4.2.b*	25.552.305.000,00	19.324.942.355,00	75,63%	9.764.174.756,00
13	Bunga		-	-	-	-
14	Belanja Lain-lain		-	-	-	-
15	**Jumlah Belanja Operasi**		**25.552.305.000,00**	**19.324.942.355,00**	**75,63%**	**9.764.174.756,00**
16	**Belanja Modal**					
17	Belanja Tanah	*4.3.a*	-	-	-	-
18	Belanja Peralatan dan Mesin	*4.3.b*	755.000.000,00	650.000.000,00	86,09%	-
19	Belanja Gedung dan Bangunan	*4.3.c*	460.000.000,00	149.451.541,00	32,49%	44.552.895,00
20	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	*4.3.d*	125.000.000,00	124.642.800,00	99,71%	-
21	Belanja Aset Tetap Lainnya	*4.3.e*	-	-	-	-
22	Belanja Aset Lainnya	*4.3.f*	-	-	-	-
23	**Jumlah Belanja Modal**		**1.340.000.000,00**	**924.094.341,00**	**68,96%**	**44.552.895,00**
24	**Jumlah Belanja**		**26.892.305.000,00**	**20.249.036.696,00**	**75,30%**	**9.808.727.651,00**
25	**Surplus (Defisit)**		**(4.199.692.000,00)**	**3.102.957.711,41**	**-73,89%**	**1.606.258.296,51**
26	**Pembiayaan**					
27	**Penerimaan Pembiayaan**					
28	Penerimaan Pinjaman		-	-	-	-
29	**Jumlah Penerimaan**		**-**	**-**	**-**	**-**
30	**Pengeluaran Pembiayaan**		**-**	**-**	**-**	**-**
31	**Jumlah Pengeluaran**		**-**	**-**	**-**	**-**
32	**Pembiayaan Neto**		**-**	**-**	**-**	**-**
33	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**		**(4.199.692.000,00)**	**3.102.957.711,41**	**-73,89%**	**1.606.258.296,51**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 10 Maret 2025
Kepala UPTD Pengembangan Kompetensi
Sumber Daya Manusia Provinsi Bali,

I Gde Hendra Pranata S.STP, M.Si.
NIP. 19850521 200312 1 002

PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	*Catatan*	2024	2023
1	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	*5.1*	**4.199.692.447,04**	**2.593.434.150,53**
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	*5.2*	-	-
3	**Sub Total**		**4.199.692.447,04**	**2.593.434.150,53**
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	*5.3*	3.102.957.711,41	1.606.258.296,51
5	**Sub Total**		**7.302.650.158,45**	**4.199.692.447,04**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
7	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	*5.5*	**7.302.650.158,45**	**4.199.692.447,04**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 10 Maret 2025
Kepala UPTD Pengembangan Kompetensi
Sumber Daya Manusia Provinsi Bali,

I Gde Hendra Pranata S.STP, M.Si.
NIP. 19850521 200312 1 002

PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
NERACA
31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2024	2023
1	**ASET**			
2	**Aset Lancar**			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran APBD	*6.1*	-	-
4	Kas pada BLUD	*6.2*	7.302.650.158,45	4.199.692.447,04
5	Kas Lainnya Setara Kas		-	-
6	Piutang Operasional BLUD	*6.3*	122.700.000,00	1.300.000,00
7	Penyisihan Piutang		(45.438.000,00)	(6.500,00)
8	Persediaan BLUD	*6.4*	21.754.400,00	39.920.465,00
9	**Jumlah Aset Lancar**		**7.401.666.558,45**	**4.240.906.412,04**
10	**Aset Tetap**	*6.5*		
11	Tanah		11.300.800.000,00	11.300.800.000,00
12	Peralatan dan Mesin		14.026.587.603,66	14.151.699.128,66
13	Gedung dan Bangunan		15.454.651.049,99	15.305.199.508,99
14	Jalan, Jaringan, dan Irigasi		1.461.979.400,00	1.337.336.600,00
15	Aset Tetap Lainnya		216.416.870,00	216.416.870,00
16	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
17	**Biaya Perolehan Aset Tetap**		**42.460.434.923,65**	**42.311.452.107,65**
18	Akumulasi Penyusutan		*(17.291.616.261,66)*	*(17.198.958.085,66)*
19	**Jumlah Aset Tetap**		**25.168.818.661,99**	**25.112.494.021,99**
20	**Aset Lainnya**	*6.6*		
21	Barang Kondisi Rusak Berat		-	-
22	Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain		-	-
23	Aset Tak Berwujud		50.000.000,00	50.000.000,00
24	Aset Lain-Lain		-	-
25	**Jumlah Harga Perolehan**		**50.000.000,00**	**50.000.000,00**
26	Akumulasi Penyusutan		*(42.500.000,00)*	*(32.500.000,00)*
27	**Jumlah Aset Lainnya**		**7.500.000,00**	**17.500.000,00**
28	**JUMLAH ASET**		**32.577.985.220,44**	**29.370.900.434,03**
29	**KEWAJIBAN**			
30	**Kewajiban Jangka Pendek**			
31	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	*6.7*	55.457.348,00	35.595.964,00
32	Pendapatan Diterima Dimuka		-	-
33	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
34	**Jumlah Kewajiban Jk Pendek**		**55.457.348,00**	**35.595.964,00**
35	**Kewajiban Jangka Panjang**			
36	Utang Jangka Panjang		-	-
37	**Jumlah Kewajiban Jk Panjang**		-	-
38	**JUMLAH KEWAJIBAN**		**55.457.348,00**	**35.595.964,00**
39	**EKUITAS**			
40	Ekuitas	*6.8*	32.522.527.872,44	29.335.304.470,03
41	**JUMLAH EKUITAS**		**32.522.527.872,44**	**29.335.304.470,03**
42	**JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS**		**32.577.985.220,44**	**29.370.900.434,03**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 10 Maret 2025
Kepala UPTD Pengembangan Kompetensi
Sumber Daya Manusia Provinsi Bali,



I Gede Hendra Pranata S.STP, M.Si.
NIP. 19850521 200312 1 002

PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2024	2023
1	**Kegiatan Operasional**			
2	**Pendapatan**			
3	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	*7.1.1)*	22.776.129.500,00	10.826.777.500,00
4	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan	*7.1.2)*	-	-
5	Pendapatan hasil kerjasama	*7.1.3)*	-	-
6	Pendapatan hibah	*7.1.4)*	7.448.000,00	13.800.000,00
7	Pendapatan Usaha Lainnya	*7.1.5)*	697.264.907,41	589.508.447,51
8	Pendapatan APBD	*7.1.6)*	-	-
9	**Jumlah Pendapatan**		**23.480.842.407,41**	**11.430.085.947,51**
10	**Beban**			
11	Beban Pegawai	*7.2.1)*	-	-
12	Beban Barang dan Jasa	*7.2.2)*	19.363.869.804,00	9.834.887.669,00
13	Beban Penyisihan Piutang	*7.2.3)*	45.438.000,00	6.500,00
14	Beban Penyusutan	*7.2.4)*	874.317.701,00	1.239.391.178,00
15	Beban Amortisasi	*7.2.4)*	10.000.000,00	10.000.000,00
16	Beban Lain-Lain	*7.2.5)*	-	-
17	**Jumlah Beban**		**20.293.625.505,00**	**11.084.285.347,00**
18	**Surplus (Defisit) dari Operasi**		**3.187.216.902,41**	**345.800.600,51**
19	**Kegiatan Non Operasional**	*7.3*		
20	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non		-	-
21	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-
22	Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op.		6.500,00	-
23	**Jumlah Surplus (Defisit) dari Keg. Non**		**6.500,00**	**-**
24	**Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa**		**3.187.223.402,41**	**345.800.600,51**
25	**Pos Luar Biasa**			
26	Pendapatan Luar Biasa		-	-
27	Beban Luar Biasa		-	-
28	**Jumlah Pos Luar Biasa**		**-**	**-**
29	**Surplus (Defisit)-LO**		**3.187.223.402,41**	**345.800.600,51**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 10 Maret 2025
Kepala UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Bali,

I Gde Hendra Pranata S.STP, M.Si.
NIP. 19850521 200312 1 002

PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2024	2023
1	**Arus kas dari Aktivitas Operasi**			
2	**Arus Masuk Kas**	***8.1 1)***		
3	Pendapatan dari APBD		-	-
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		22.776.129.500,00	10.826.777.500,00
5	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan		-	-
6	Pendapatan Hasil Kerjasama		-	-
7	Pendapatan Hibah		-	-
8	Pendapatan Usaha Lainnya		575.864.907,41	588.208.447,51
9	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**23.351.994.407,41**	**11.414.985.947,51**
10	**Arus Kas Keluar**	***8.1 2)***		
11	Pembayaran Pegawai		-	-
12	Pembayaran Barang dan Jasa		19.324.942.355,00	9.764.174.756,00
13	Pembayaran Bunga		-	-
14	Pembayaran Lain-lain		-	-
15	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**19.324.942.355,00**	**9.764.174.756,00**
16	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**		**4.027.052.052,41**	**1.650.811.191,51**
17	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**			
18	**Arus Masuk Kas**	***8.2 1)***		
19	Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
20	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
21	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
22	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi		-	-
23	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		-	-
24	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
25	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**-**	**-**
26	**Arus Keluar Kas**	***8.2 2)***		
27	Perolehan Tanah		-	-
28	Perolehan Peralatan dan Mesin		650.000.000,00	-
29	Perolehan Gedung dan Bangunan		149.451.541,00	44.552.895,00
30	Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi		124.642.800,00	-
31	Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
32	Perolehan Aset Lainnya		-	-
33	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**924.094.341,00**	**44.552.895,00**
34	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**		**(924.094.341,00)**	**(44.552.895,00)**
35	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**			
36	**Arus Masuk Kas**	***8.3 1)***		
37	Penerimaan Pinjaman		-	-
38	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
39	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**-**	**-**
40	**Arus Keluar Kas**	***8.3 2)***		
41	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-
42	Pengeluaraan Penyertaan Modal		-	-
43	Pemberian Pinjaman		-	-
44	Penyetoran ke Kas Daerah		-	-
45	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**-**	**-**
46	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**			**-**

PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2024	2023
47	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**			
48	**Arus Kas Masuk**	***8.4 1)***		
49	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		1.255.958.893,00	646.666.943,00
50	**Jumlah Arus Kas Masuk**		**1.255.958.893,00**	**646.666.943,00**
51	**Arus Kas Keluar**	***8.4 2)***		
52	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		1.255.958.893,00	646.666.943,00
53	**Jumlah Arus Kas Keluar**		**1.255.958.893,00**	**646.666.943,00**
54	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**		**-**	**-**
55	**Kenaikan/Penurunan Kas BLUD**	***8.5***	**3.102.957.711,41**	**1.606.258.296,51**
56	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD**		**4.199.692.447,04**	**2.593.434.150,53**
57	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD**		**7.302.650.158,45**	**4.199.692.447,04**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 10 Maret 2025
Kepala UPTD Pengembangan Kompetensi
Sumber Daya Manusia Provinsi Bali,

Gede Hendra Pranata S.STP, M.Si.
NIP. 19850521 200312 1 002

PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	*Catatan*	2024	2023
1	**Ekuitas Awal**	***9.1***	**29.335.304.470,03**	**28.841.249.389,52**
2	**Surplus (Defisit) LO**	***9.2***	**3.187.223.402,41**	**345.800.600,51**
3	**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**	***9.3***	**-**	**148.254.480,00**
	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap		-	33.959.854,00
	Mutasi Antar OPD		-	114.294.626,00
4	**Ekuitas Akhir**	***9.4***	**32.522.527.872,44**	**29.335.304.470,03**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 10 Maret 2025
Kepala UPTD Pengembangan Kompetensi
Sumber Daya Manusia Provinsi Bali,

I Gde Hendra Pranata S.STP, M.Si.
NIP. 19850521 200312 1 002

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD. BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
JALAN GEMITIR 135 BIAUNG KESIMAN KERTALANGU, TELEPON (0361) 462340
EMAIL: bapelkesmas@baliprov.go.id WEBSITE : https://bapelkesmas-diskes.baliprov.go.id

SURAT PERNYATAAN TANGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA BLUD
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2025
UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

Memenuhi ketentuan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sinta Javani, S.ST., MAP
   Alamat Kantor : Jalan Gemitir No. 135 Biaung Denpasar
   Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah / Pemimpin BLUD
   NIP : 198106282002122001
2. Nama : I Putu Kaista, SE
   Alamat Kantor : Jalan Gemitir No. 135 Biaung Denpasar
   Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Pejabat Keuangan
   NIP : 197208021992021002
3. Nama : I Gusti Agung Ayu Mahayuni Oka,S.Sos.,MAP
   Alamat Kantor : Jalan Gemitir No. 135 Biaung Denpasar
   Jabatan : Kepala Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan/Pejabat Teknis
   NIP : 197105071993032005

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 217/PMK.05/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Untuk dan atas nama UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Bali, 6 Maret 2026
Kepala UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat
Dinas Kesehatan Provinsi Bali,



Sinta Javani, S.ST., MAP
NIP. 198106282002122001

Pejabat Keuangan,

I Putu Kaista, SE
NIP. 197208021992021002

Pejabat Teknis,

I Gusti Agung Ayu Mahayuni Oka,S.Sos.,MAP
NIP. 197105071993032005

Laporan No.: 00019/2.1516/AU.5/11/0463-4/1/III/2026

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pengguna Laporan Keuangan
UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat
Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (UPTD Bapelkesmas), yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan

basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami.

Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memeroleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00019/ML/KAP.IGOR/1/III/2026 dan tanggal 6 Maret 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

00019

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka & Rekan,

KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA & REKAN

I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA., CFI., ASEAN CPA.
NRAP: AP. 0463

Badung, 6 Maret 2026

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	**Pendapatan**					
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	*4.1.a*	2.952.000.000,00	3.221.661.635,00	109,13%	3.570.510.500,00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	*4.1.b*	-	-	-	-
4	Pendapatan Hasil Kerjasama	*4.1.c*	-	-	-	-
5	Pendapatan Hibah	*4.1.d*	-	-	-	-
6	Pendapatan Usaha Lainnya	*4.1.e*	48.000.000,00	55.272.162,55	115,15%	72.347.435,86
7	Pendapatan APBD	*4.1.f*	2.797.088.101,00	2.547.928.851,60	91,09%	1.624.844.994,00
8	**Jumlah Pendapatan**		**5.797.088.101,00**	**5.824.862.649,15**	**100,48%**	**5.267.702.929,86**
9	**Belanja**					
10	**Belanja Operasi**					
11	Belanja Pegawai	*4.2.a*	-	-	-	-
12	Belanja Barang dan Jasa	*4.2.b*	5.441.792.301,00	5.116.837.798,90	94,03%	4.666.274.920,00
13	Bunga		-	-	-	-
14	Belanja Lain-lain		-	-	-	-
15	**Jumlah Belanja Operasi**		**5.441.792.301,00**	**5.116.837.798,90**	**94,03%**	**4.666.274.920,00**
16	**Belanja Modal**					
17	Belanja Tanah	*4.3.a*	-	-	-	-
18	Belanja Peralatan dan Mesin	*4.3.b*	355.295.800,00	253.971.160,00	71,48%	225.140.400,00
19	Belanja Gedung dan Bangunan	*4.3.c*	-	-	-	-
20	Belanja Jalan, Jaringan, & Irigasi	*4.3.d*	-	-	-	-
21	Belanja Aset Tetap Lainnya	*4.3.e*	-	-	-	-
22	Belanja Aset Lainnya	*4.3.f*	-	-	-	-
23	**Jumlah Belanja Modal**		**355.295.800,00**	**253.971.160,00**	**71,48%**	**225.140.400,00**
24	**Jumlah Belanja**		**5.797.088.101,00**	**5.370.808.958,90**	**92,65%**	**4.891.415.320,00**
25	**Surplus (Defisit)**		**-**	**454.053.690,25**	**-**	**376.287.609,86**
26	**Pembiayaan**					
27	**Penerimaan Pembiayaan**					
28	Penerimaan Pinjaman		-	-	-	-
29	**Jumlah Penerimaan**		-	-	-	-
30	**Pengeluaran Pembiayaan**					
31	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-	-
32	**Jumlah Pengeluaran**		-	-	-	-
33	**Pembiayaan Neto**		-	-	-	-
34	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**		**-**	**454.053.690,25**	**-**	**376.287.609,86**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 6 Maret 2026
Kepala UPTD
Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat,

Sinta Javani, S.ST., MAP
NIP. 198106282002122001

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	*5.1*	**2.591.826.952,86**	**2.215.539.343,00**
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	*5.2*	-	-
3	**Sub Total**		**2.591.826.952,86**	**2.215.539.343,00**
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	*5.3*	454.053.690,25	376.287.609,86
5	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	*5.4*	**3.045.880.643,11**	**2.591.826.952,86**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 6 Maret 2026
Kepala UPTD
Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat,

Sinta Javani, S.ST., MAP
NIP. 198106282002122001

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**ASET**			
2	**Aset Lancar**			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran APBD	*6.1*	-	-
4	Kas pada BLUD	*6.2*	3.045.880.643,11	2.591.826.952,86
5	Kas Lainnya Setara Kas		-	-
6	Piutang Operasional BLUD	*6.3*	-	-
7	Piutang Non Operasional BLUD		-	-
8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		-	-
9	Belanja Dibayar Dimuka		-	-
10	Uang Muka Belanja		-	-
11	Persediaan BLUD	*6.4*	128.228.152,00	117.576.864,00
12	**Jumlah Aset Lancar**		**3.174.108.795,11**	**2.709.403.816,86**
13	**Aset Tetap**	*6.5*		
14	Tanah		6.343.375.000,00	6.343.375.000,00
15	Peralatan dan Mesin		3.010.163.699,00	2.961.223.839,00
16	Gedung dan Bangunan		8.763.580.132,90	8.763.580.132,90
17	Jalan, Jaringan, & Irigasi		412.336.365,00	412.336.365,00
18	Aset Tetap Lainnya		22.662.000,00	22.662.000,00
19	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
20	**Biaya Perolehan Aset Tetap**		**18.552.117.196,90**	**18.503.177.336,90**
21	Akumulasi Penyusutan		*(5.404.543.154,00)*	*(5.269.869.281,00)*
22	**Jumlah Aset Tetap**		**13.147.574.042,90**	**13.233.308.055,90**
23	**Aset Lainnya**	*6.6*		
24	Aset Lainnya		-	-
25	**Jumlah Harga Perolehan**		-	-
26	Akumulasi Penyusutan		-	-
27	**Jumlah Aset Lainnya**		-	-
28	**JUMLAH ASET**		**16.321.682.838,01**	**15.942.711.872,76**
29	**KEWAJIBAN**			
30	**Kewajiban Jangka Pendek**			
31	Utang Belanja Pegawai	*6.7*	-	-
32	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	*6.8*	16.796.247,00	29.570.812,00
33	Utang Jangka Pendek Lainnya	*6.9*	-	-
34	**Jumlah Kewajiban Jk Pendek**		**16.796.247,00**	**29.570.812,00**
35	**Kewajiban Jangka Panjang**			
36	Utang Jangka Panjang		-	-
37	**Jumlah Kewajiban Jk Panjang**		-	-
38	**JUMLAH KEWAJIBAN**		**16.796.247,00**	**29.570.812,00**
39	**EKUITAS**			
40	Ekuitas	*6.10*	16.304.886.591,01	15.913.141.060,76
41	**JUMLAH EKUITAS**		**16.304.886.591,01**	**15.913.141.060,76**
42	**JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS**		**16.321.682.838,01**	**15.942.711.872,76**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 6 Maret 2026
Kepala UPTD
Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat,

Sinta Jayani, S.ST., MAP
NIP. 198106282002122001

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	**Kegiatan Operasional**					
2	**Pendapatan**					
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	*7.1.a*	3.221.661.635,00	3.570.510.500,00	(348.848.865,00)	-9,77%
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	*7.1.b*	-	-	-	-
5	Pendapatan Hasil Kerjasama	*7.1.c*	-	-	-	-
6	Pendapatan Hibah	*7.1.d*	36.250.000,00	35.850.000,00	400.000,00	-
7	Pendapatan Lain-Lain	*7.1.e*	55.272.162,55	72.347.435,86	(17.075.273,31)	-23,60%
8	Pendapatan APBD	*7.1.f*	2.547.928.851,60	1.624.844.994,00	923.083.857,60	56,81%
9	**Jumlah Pendapatan**		**5.861.112.649,15**	**5.303.552.929,86**	**557.559.719,29**	**10,51%**
10	**Beban**					
11	Beban Pegawai	*7.2.a*	-	-	-	0,00%
12	Beban Barang dan Jasa	*7.2.b*	5.093.411.945,90	4.618.881.053,00	474.530.892,90	10,27%
13	Beban Penyisihan Piutang	*7.2.c*	-	-	-	-
14	Beban Penyusutan	*7.2.d*	375.555.173,00	403.123.739,00	(27.568.566,00)	-6,84%
15	Beban Amortisasi	*7.2.e*	-	-	-	-
16	Beban Lain-Lain	*7.2.f*	400.000,00	-	400.000,00	0,00%
17	**Jumlah Beban**		**5.469.367.118,90**	**5.022.004.792,00**	**447.362.326,90**	**8,91%**
18	**Surplus (Defisit) dari Operasi**		**391.745.530,25**	**281.548.137,86**	**110.197.392,39**	**39,14%**
19	**Kegiatan Non Operasional**	*7.3*				
20	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
21	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-	-	-
22	Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya		-	-	-	-
23	**Jumlah Surplus (Defisit) dari Keg. Non Oprasional**		-	-	-	-
24	**Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa**		**391.745.530,25**	**281.548.137,86**	**110.197.392,39**	**39,14%**
25	**Pos Luar Biasa**					
26	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
27	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
28	**Jumlah Pos Luar Biasa**		-	-	-	-
29	**Surplus (Defisit)-LO**		**391.745.530,25**	**281.548.137,86**	**110.197.392,39**	**39,14%**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 6 Maret 2026
Kepala UPTD
Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat,

Sinta Javani, S.ST., MAP
NIP. 198106282002122001

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Arus kas dari Aktivitas Operasi**			
2	**Arus Masuk Kas**	*8.1 1)*		
3	Pendapatan dari APBD		2.547.928.851,60	1.624.844.994,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		3.221.661.635,00	3.570.510.500,00
5	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan		-	-
6	Pendapatan Hasil Kerjasama		-	-
7	Pendapatan Hibah		-	-
8	Pendapatan Usaha Lainnya		55.272.162,55	72.347.435,86
9	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**5.824.862.649,15**	**5.267.702.929,86**
10	**Arus Kas Keluar**	*8.1 2)*		
11	Pembayaran Pegawai		-	-
12	Pembayaran Barang		5.116.837.798,90	4.666.274.920,00
13	Pembayaran Bunga		-	-
14	Pembayaran Lain-lain		-	-
15	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**5.116.837.798,90**	**4.666.274.920,00**
16	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**		**708.024.850,25**	**601.428.009,86**
17	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**			
18	**Arus Masuk Kas**	*8.2 1)*	-	-
19	**Jumlah Arus Masuk Kas**		-	-
20	**Arus Keluar Kas**	*8.2 2)*		
21	Perolehan Tanah		-	-
22	Perolehan Peralatan dan Mesin		253.971.160,00	225.140.400,00
23	Perolehan Gedung dan Bangunan		-	-
24	Perolehan Jalan, Jaringan, & Irigasi		-	-
25	Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
26	Perolehan Aset Lainnya		-	-
27	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**253.971.160,00**	**225.140.400,00**
28	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**		**(253.971.160,00)**	**(225.140.400,00)**
29	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**			
30	**Arus Masuk Kas**	*8.3 1)*		
31	Penerimaan Pinjaman		-	-
32	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
33	**Jumlah Arus Masuk Kas**		-	-
34	**Arus Keluar Kas**	*8.3 2)*		
35	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-
36	Pengeluaraan Penyertaan Modal		-	-
37	Pemberian Pinjaman		-	-
38	Penyetoran ke Kas Daerah		-	-
39	**Jumlah Arus Keluar Kas**		-	-
40	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**		-	-

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
41	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**			
42	**Arus Kas Masuk**	*8.4 1)*	-	-
43	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		283.151.324,20	216.312.809,60
44	**Jumlah Arus Kas Masuk**		**283.151.324,20**	**216.312.809,60**
45	**Arus Kas Keluar**	*8.4 2)*	-	-
46	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		283.151.324,20	216.312.809,60
47	**Jumlah Arus Kas Keluar**		**283.151.324,20**	**216.312.809,60**
48	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**		-	-
49	**Kenaikan/Penurunan Kas BLUD**	*8.5*	**454.053.690,25**	**376.287.609,86**
50	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD**		**2.591.826.952,86**	**2.215.539.343,00**
51	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD**		**3.045.880.643,11**	**2.591.826.952,86**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 6 Maret 2026
Kepala UPTD
Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat,

Sinta Javani, S.ST., MAP
NIP. 198106282002122001

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Ekuitas Awal**	*9.1*	**15.913.141.060,76**	**15.631.592.922,90**
2	**Surplus (Defisit) LO**	*9.2*	**391.745.530,25**	**281.548.137,86**
3	**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**	*9.3*	-	-
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		-	-
	Koreksi Utang Tunjangan Pegawai		-	-
4	**Ekuitas Akhir**	*9.4*	**16.304.886.591,01**	**15.913.141.060,76**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 6 Maret 2026
Kepala UPTD
Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat,

Sinta Javani, S.ST., MAP
NIP. 198106282002122001

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
KERTHI BALI SADHAJIWA
LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
KERTHI BALI SADHAJIWA
Jl. Angsoka, Nomor: 12, Denpasar, Bali (80239)
Telepon (0361) 221698, Website: https://balailabkes.baliprov.go.id
Email: labkes@baliprov.go.id

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
KERTHI BALI SADHAJIWA PROVINSI BALI
JALAN ANGSOKA NOMOR 12, DENPASAR – BALI (80239) TELEPON (0361) 221698
WEBSITE : https://balailabkes.baliprov.go.id , EMAIL : labkes@baliprov.go.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA BLUD
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
KERTHI BALI SADHAJIWA PROVINSI BALI

Memenuhi ketentuan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Dinas Kesehatan Provinsi Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. Ni Made Rindra Hermawathi, SpPK.
   Alamat Kantor : Jalan Angsoka, No. 12 Denpasar, Bali.
   Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah.
   NIP : 19810813 200902 2 005

2. Nama : I Wayan Saditya, SIP,MAP
   Alamat Kantor : Jalan Angsoka, No. 12 Denpasar, Bali.
   Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Pejabat Keuangan
   NIP : 19901129 201406 1 001

3. Nama : dr. Gde Agus Suryadinata
   Alamat Kantor : Jalan Angsoka, No. 12 Denpasar, Bali.
   Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan dan Mutu Laboratorium Kesehatan/Pejabat Teknis
   NIP : 19800909 200902 1 005

4. Nama : Ni Made Ayu Kemala Dewi, S.KM,M.Kes
   Alamat Kantor : Jalan Angsoka, No. 12 Denpasar, Bali.
   Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan dan Mutu Pemeliharaan, Pengujian Alat Kesehatan/Pejabat Teknis
   NIP : 19790418 200604 2 016

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
KERTHI BALI SADHAJIWA PROVINSI BALI
JALAN ANGSOKA NOMOR 12, DENPASAR – BALI (80239) TELEPON (0361) 221698
WEBSITE : https://balailabkes.baliprov.go.id , EMAIL : labkes@baliprov.go.id

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 217/PMK.05/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar
   b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Untuk dan atas nama UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Bali, 12 Maret 2026

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah,

dr. Ni Made Rindra Hermawathi, SpPK.
NIP. 19810813 200902 2 005

Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Pejabat Keuangan,

I Wayan Saditya, SIP, MAP
NIP. 19901129 201406 1 001

Kepala Seksi Pelayanan dan Mutu Laboratorium Kesehatan/Pejabat Teknis,

dr. Gde Agus Suryadinata
NIP. 19800909 200902 1 005

Kepala Seksi Pelayanan dan Mutu Pemeliharaan, Pengujian Alat Kesehatan/Pejabat Teknis,

Ni Made Ayu Kemala Dewi, S.KM,M.Kes
NIP. 19790418 200604 2 016

Laporan No: 00023/2.1516/AU.5/11/0463-3/1/III/2026

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pengguna Laporan Keuangan
UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa
Provinsi Bali

Laporan Audit Atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memeroleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00023/ML/KAP.IGOR/1/III/2026 tanggal 12 Maret 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

00023

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka & Rekan,

KANTOR AKUNTAN PUBLIK • I GEDE OKA & REKAN •

I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA., CFI., ASEAN CPA.
NRAP: AP.0463

Badung, 12 Maret 2026

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	*Catatan*	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	**Pendapatan**	***4.a.***				
2	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	*4.a.1)*	7.019.000.000,00	6.218.326.449,37	88,59%	5.469.091.787,00
3	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan		-	-	-	-
4	Pendapatan hibah		-	-	-	-
5	Pendapatan usaha lainnya	*4.a.2)*	181.000.000,00	173.556.862,04	95,89%	98.114.825,40
6	Pendapatan APBD		2.483.150.316,00	2.121.146.671,18	85,42%	2.532.396.213,00
7	**Jumlah Pendapatan**		**9.683.150.316,00**	**8.513.029.982,59**	**87,92%**	**8.099.602.825,40**
8	**Belanja**					
9	**Belanja Operasi**	***4.b.1)***				
10	Belanja Pegawai		1.932.431.593,00	-	-	-
11	Belanja Barang dan Jasa		5.909.093.723,00	5.372.818.416,68	90,92%	4.820.366.909,50
12	Bunga		-	-	-	-
13	Belanja Lain-lain		-	-	-	-
14	**Jumlah Belanja Operasi**		**7.841.525.316,00**	**5.372.818.416,68**	**68,52%**	**4.820.366.909,50**
15	**Belanja Modal**	***4.b.2)***				
16	Belanja Tanah		-	-	-	-
17	Belanja Peralatan dan Mesin		1.841.625.000,00	81.271.000,00	4,41%	1.052.603.640,00
18	Belanja Gedung dan Bangunan		-	-	-	-
19	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	-	-
20	Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-
21	Belanja Aset Lainnya		-	-	-	-
22	**Jumlah Belanja Modal**		**1.841.625.000,00**	**81.271.000,00**	**4,41%**	**1.052.603.640,00**
23	**Jumlah Belanja**		**9.683.150.316,00**	**5.454.089.416,68**	**56,33%**	**5.872.970.549,50**
24	**Surplus (Defisit)**		**-**	**3.058.940.565,91**	**-**	**2.226.632.275,90**
25	**Pembiayaan**					
26	**Penerimaan Pembiayaan**					
27	Penerimaan Pinjaman		-	-	-	-
28	Penerimaan dari divestasi		-	-	-	-
29	Penerimaan kembali pinjaman		-	-	-	-
30	**Jumlah Penerimaan**		**-**	**-**	**-**	**-**
31	**Pengeluaran Pembiayaan**					
32	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-	-
33	Pengeluaraan Penyertaan Modal		-	-	-	-
34	Pemberian Pinjaman		-	-	-	-
35	**Jumlah Pengeluaran**		**-**	**-**	**-**	**-**
36	**Pembiayaan Neto**		**-**	**-**	**-**	**-**
37	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**		**-**	**3.058.940.565,91**	**-**	**2.226.632.275,90**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bali, 12 Maret 2026
Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
Kerthi Bali Sadhajiwa,



dr. Ni Made Rindra Hermawathi,Sp.PK.
NIP: 19810813 200902 2 005

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Cat.	2025	2024
1	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	***5.1***	**5.493.460.321,60**	**3.266.828.045,70**
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	***5.2***	-	-
3	**Sub Total**		**5.493.460.321,60**	**3.266.828.045,70**
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	***5.3***	3.058.940.565,91	2.226.632.275,90
5	**Sub Total**		**8.552.400.887,51**	**5.493.460.321,60**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya			
7	Setoran ke Kasda	***5.4***		
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	***5.5***	**8.552.400.887,51**	**5.493.460.321,60**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bali, 12 Maret 2026
Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa,



dr. Ni Made Rindra Hermawathi,Sp.PK.
NIP: 19810813 200902 2 005

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**ASET**			
2	**Aset Lancar**			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran APBD	*6.1*		
4	Kas pada BLUD	*6.2*	8.552.400.887,51	5.493.460.321,60
5	Piutang Jasa Layanan	*6.3*	39.961.000,00	94.629.000,00
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	*6.3*	(28.776.205,00)	(26.573.985,00)
7	Persediaan BLUD	*6.4*	1.635.491.037,59	2.378.081.861,56
8	**Jumlah Aset Lancar**		**10.199.076.720,10**	**7.939.597.198,16**
9	**Aset Tetap**	*6.5*		
10	Tanah		-	-
11	Peralatan dan Mesin		26.582.331.269,33	26.737.812.602,66
12	Gedung dan Bangunan		7.503.820.131,31	7.503.820.131,31
13	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		1.003.068.506,30	1.003.068.506,30
14	Aset Tetap Lainnya		6.237.500,00	6.237.500,00
15	**Biaya Perolehan Aset Tetap**		**35.095.457.406,94**	**35.250.938.740,27**
16	Akumulasi Penyusutan		(24.702.332.216,33)	(23.171.093.401,66)
17	**Jumlah Aset Tetap**		**10.393.125.190,61**	**12.079.845.338,61**
18	**Aset Lain-lain**	*6.6*		
19	Aset Tidak Berwujud		-	-
20	Akumulasi Amortisasi		-	-
21	Aset Lainnya rusak berat		120.000.000,00	120.000.000,00
22	Akumulasi Penyusutan		(120.000.000,00)	(120.000.000,00)
23	**Jumlah Aset Lain-lain**		-	-
24	**JUMLAH ASET**		**20.592.201.910,71**	**20.019.442.536,77**
25	**KEWAJIBAN**			
26	**Kewajiban Jangka Pendek**			
27	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	*6.7*	-	-
28	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	*6.8*	-	-
29	Pendapatan Diterima Dimuka	*6.9*	-	-
30	**Jumlah Kewajiban Jk Pendek**		**-**	**-**
31	**JUMLAH KEWAJIBAN**		**-**	**-**
32	**EKUITAS**	*6.10*		
33	Ekuitas		20.592.201.910,71	20.019.442.536,77
34	**JUMLAH EKUITAS**		**20.592.201.910,71**	**20.019.442.536,77**
35	**JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS**		**20.592.201.910,71**	**20.019.442.536,77**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bali, 12 Maret 2026
Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
Kerthi Bali Sadhajiwa,

dr. Ni Made Rindra Hermawathi,Sp.PK.
NIP: 19810813 200902 2 005

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Cat.	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	**Kegiatan Operasional**					
2	**Pendapatan**					
3	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	*7.a.*	6.163.658.449,37	5.515.153.787,00	648.504.662	11,76%
4	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan		-	-	-	-
5	Pendapatan hasil kerjasama		-	-	-	-
6	Pendapatan hibah		1.171.581.973,60	355.838.513,00	815.743.461	229,25%
7	Pendapatan usaha lainnya	*7.a.2)*	173.556.862,04	98.114.825,40	75.442.037	76,89%
8	Pendapatan APBD	*7.a.3)*	2.121.146.671,18	2.532.396.213,00	(411.249.542)	-16,24%
9	**Jumlah Pendapatan**		**9.629.943.956,19**	**8.501.503.338,40**	**1.128.440.617,79**	**13,27%**
10	**Beban**	***7.b.***				
11	Beban Pegawai		-	-	-	-
12	Beban Barang dan Jasa		7.276.702.714,25	5.745.441.903,73	1.531.260.811	26,65%
13	Beban Penyisihan		2.544.205,00	341.985,00	2.202.220	643,95%
14	Beban Penyusutan Aset Tetap		1.800.292.147,00	1.837.484.555,00	(37.192.408)	-2,02%
15	Beban Amortisasi Aset Tetap Rusak Berat		-	-	-	-
16	**Jumlah Beban**		**9.079.539.066,25**	**7.583.268.443,73**	**1.496.270.623**	**19,73%**
17	**Surplus (Defisit) dari Operasi**		**550.404.889,94**	**918.234.894,67**	**(367.830.004,73)**	**-40,06%**
18	**Kegiatan Non Operasional**	***7.c.***				
19	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non		-	-		
20	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-	-	-
21	Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op.		341.985,00	111.675,00	230.310	206,23%
22	**Jlh Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op**		**341.985,00**	**111.675,00**	**230.310,00**	**206,23%**
23	**Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa**		**550.746.874,94**	**918.346.569,67**	**230.310,00**	**0,03%**
24	**Pos Luar Biasa**					
25	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
26	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
27	**Jumlah Pos Luar Biasa**		**-**	**-**	**-**	**-**
28	**Surplus (Defisit)-LO**		**550.746.874,94**	**918.346.569,67**	**230.310,00**	**0,03%**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bali, 12 Maret 2026
Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
Kerthi Bali Sadhajiwa,



dr. Ni Made Rindra Hermawathi,Sp.PK.
NIP: 19810813 200902 2 005

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Cat.	2025	2024
1	**Arus kas dari Aktivitas Operasi**	***8.a.***		
2	**Arus Masuk Kas**			
3	Pendapatan dari APBD		2.121.146.671,18	2.532.396.213,00
4	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat		6.218.326.449,37	5.469.091.787,00
5	Pendapatan jasa layanan dari entitas		-	-
6	Pendapatan hasil kerjasama		-	-
7	Pendapatan hibah		-	-
8	Pendapatan usaha lainnya		173.556.862,04	98.114.825,40
9	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**8.513.029.982,59**	**8.099.602.825,40**
10	**Arus Kas Keluar**			
11	Pembayaran Pegawai		-	-
12	Pembayaran Barang dan Jasa		5.372.818.416,68	4.820.366.909,50
13	Pembayaran Bunga		-	-
14	Pembayaran Lain-lain		-	-
15	**Jumlah Arus Kas Keluar**		**5.372.818.416,68**	**4.820.366.909,50**
16	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**		**3.140.211.565,91**	**3.279.235.915,90**
17	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**	***8.b.***		
18	**Arus Masuk Kas**			
19	Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
20	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
21	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
22	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
23	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		-	-
24	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
25	Penerimaan dari divestasi		-	-
26	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
27	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**-**	**-**
28	**Arus Keluar Kas**			
29	Perolehan Tanah		-	-
30	Perolehan Peralatan dan Mesin		81.271.000,00	1.052.603.640,00
31	Perolehan Gedung dan Bangunan		-	-
32	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
33	Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
34	Perolehan Aset Lainnya		-	-
35	Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-
36	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
37	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**81.271.000,00**	**1.052.603.640,00**
38	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**		**(81.271.000,00)**	**(1.052.603.640,00)**

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Cat.	2025	2024
39	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**			
40	**Arus Masuk Kas**			
41	Penerimaan Pinjaman		-	-
42	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
43	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**-**	**-**
44	**Arus Keluar Kas**			
45	Setoran Kas Ke Kas Daerah		-	-
46	Pengeluaraan Penyertaan Modal		-	-
47	Pemberian Pinjaman		-	-
48	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**-**	**-**
49	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**	***8.c.***	**-**	**-**
50	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**			
51	**Arus Kas Masuk**			
52	Penerimaan PFK		388.416.508,00	363.871.042,00
53	**Jumlah Arus Kas Masuk**		**388.416.508,00**	**363.871.042,00**
54	**Arus Kas Keluar**			
55	Pengeluaran PFK		388.416.508,00	363.871.042,00
56	**Jumlah Arus Kas Keluar**		**388.416.508,00**	**363.871.042,00**
57	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**	***8.d.***	**-**	**-**
58	**Kenaikan/Penurunan Kas BLUD**	***8.e.***	**3.058.940.565,91**	**2.226.632.275,90**
59	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD**	***8.e.***	**5.493.460.321,60**	**3.266.828.045,70**
60	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD**	***8.e.***	**8.552.400.887,51**	**5.493.460.321,60**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bali, 12 Maret 2026

Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
Kerthi Bali Sadhajiwa,



dr. Ni Made Rindra Hermawathi,Sp.PK.
NIP: 19810813 200902 2 005

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Cat.*	2025	2024
1	**Ekuitas Awal**	***9.***	**20.019.442.536,77**	**19.077.042.687,09**
2	**Surplus (Defisit) LO**		**550.746.874,94**	**918.346.569,67**
3	**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:**		**22.012.500,00**	**24.053.280,00**
	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap		-	21.512.804,00
	Koreksi Saldo Awal Penyusutan Aset Tetap		-	(1.029.524,00)
	Setoran Ke Kas Daerah		-	-
	Mutasi persediaan antar perangkat daerah		22.012.500,00	3.570.000,00
	Koreksi Saldo Awal Persediaan		-	-
4	**Ekuitas Akhir**		**20.592.201.910,71**	**20.019.442.536,77**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bali, 12 Maret 2026

Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa,



dr. Ni Made Rindra Hermawathi,Sp.PK.
NIP: 19810813 200902 2 005

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DHARMA YADNYA
JL. WR. SUPRATMAN NO. 256, DENPASAR, BALI, TELEPON 0361-462629

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA BLUD
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
RUMAH SAKIT UMUM DHARMA YADNYA
PROVINSI BALI

Memenuhi ketentuan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya Provinsi Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. Kadek Iwan Darmawan, MPH
   Alamat Kantor : Jl. WR. Supratman No. 256 Tohpati Denpasar Timur
   Jabatan : Pemimpin BLUD/Direktur
   NIP : 19770210 200501 1 005

2. Nama : Dr. Bdn. Ni Made Parwati, S.ST., SKM., M.Kes., S.H., M.H.Kes
   Alamat Kantor : Jl. WR. Supratman No. 256 Tohpati Denpasar Timur
   Jabatan : Pejabat Keuangan
   NIP : 19720518 199203 2 005

3. Nama : Ns. I Wayan Murjana, S.Kep., M.Fil.H., MM
   Alamat Kantor : Jl. WR. Supratman No. 256 Tohpati Denpasar Timur
   Jabatan : Pejabat Teknis
   NIP : 19730315 199302 1 002

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya Provinsi Bali.

Bali, 27 Februari 2026

Direktur,



dr. Kadek Iwan Darmawan, MPH
19770210 200501 1 005

Pejabat Keuangan,

Dr. Bdn. Ni Made Parwati, S.ST., SKM., M.Kes., S.H., M.H.Kes
19720518 199203 2 005

Pejabat Teknis,

Ns. I Wayan Murjana, S.Kep., M.Fil.H., MM
19730315 199302 1 002

Laporan No.: 00010/2.1516/AU.5/11/0463-1/1/II/2026

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pengguna Laporan Keuangan
Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya Provinsi Bali, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal

Kami memberi penekanan terhadap keseluruhan aset tetap yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Rumah Sakit, namun belum dilakukan penilaian dan belum dilaporkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali sebagaimana dijelaskan pada Resume Hasil Pemeriksaan Nomor 1. Total terdapat 1.222 item barang sebagaimana terlampir. Aset tetap dimaksud digunakan dalam kegiatan operasional Rumah Sakit, namun belum seluruhnya dicatat dan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. Opini kami tidak dapat dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas

kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00010/ML/KAP.IGOR/1/II/2026 tanggal 27 Februari 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

00010

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka & Rekan

KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA & REKAN

I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA., CFI., ASEAN CPA.
NRAP: AP.0463

Badung, 27 Februari 2026

PEMERINTAH PROVINSI BALI
RUMAH SAKIT UMUM DHARMA YADNYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
1	**Pendapatan**				
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	*4.1.a*	23.827.919.062,00	20.535.235.500,00	86,18%
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	*4.1.b*	-	-	-
4	Pendapatan Hasil Kerjasama	*4.1.c*	-	221.665.564,00	-
5	Pendapatan APBD	*4.1.d*	-	-	-
6	Pendapatan Lainnya	*4.1.e*	36.966.562,00	84.900.233,97	229,67%
7	**Jumlah Pendapatan**		**23.864.885.624,00**	**20.841.801.297,97**	**87,33%**
8	**Belanja**				
9	**Belanja Operasi**				
10	Belanja Pegawai	*4.2.a*	7.790.000.000,00	6.620.160.137,00	84,98%
11	Belanja Barang dan Jasa	*4.2.b*	22.790.609.016,00	14.871.931.295,42	65,25%
12	Bunga	*4.2.c*	-	-	-
13	Belanja Lain-lain	*4.2.d*	-	-	-
14	**Jumlah Belanja Operasi**		**30.580.609.016,00**	**21.492.091.432,42**	**70,28%**
15	**Belanja Modal**				
16	Belanja Tanah	*4.3.a*	-	-	-
17	Belanja Peralatan dan Mesin	*4.3.b*	2.118.125.800,00	1.779.182.496,00	84,00%
18	Belanja Gedung dan Bangunan	*4.3.c*	900.000.000,00	686.417.118,00	76,27%
19	Belanja Jalan, Irigasi dan	*4.3.d*	-	-	-
20	Belanja Aset Lainnya	*4.3.e*	-	-	-
21	**Jumlah Belanja Modal**		**3.018.125.800,00**	**2.465.599.614,00**	**81,69%**
22	**Jumlah Belanja**		**33.598.734.816,00**	**23.957.691.046,42**	**71,31%**
23	**Surplus (Defisit)**		**(9.733.849.192,00)**	**(3.115.889.748,45)**	**32,01%**
24	**Pembiayaan**				
25	**Penerimaan Pembiayaan**				
26	Penerimaan Pinjaman		-	-	-
27	Penerimaan dari divestasi		-	-	-
28	Penerimaan kembali pinjaman		-	-	-
29	**Jumlah Penerimaan**		**-**	**-**	**-**
30	**Pengeluaran Pembiayaan**				
31	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-
32	Pengeluaraan Penyertaan Modal		-	-	-
33	Pemberian Pinjaman		-	-	-
34	**Jumlah Pengeluaran**		**-**	**-**	**-**
35	**Pembiayaan Neto**		**-**	**-**	**-**
36	**Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran**		**(9.733.849.192,00)**	**(3.115.889.748,45)**	**32,01%**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 27 Februari 2026
Direktur
Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya

dr. Kadek Iwan Darmawan, MPH
NIP.197702102005011005

PEMERINTAH PROVINSI BALI
RUMAH SAKIT UMUM DHARMA YADNYA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	*Cat*	2025
1	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	***5.a***	**332.527.194,01**
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	*5.b*	-
3	**Sub Total**		**332.527.194,01**
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Berjalan	*5.c*	(3.115.889.748,45)
5	**Sub Total**		**(2.783.362.554,44)**
6	Pendapatan APBD/APBN	*5.d*	4.066.436.024,00
7	Setoran ke Kas Daerah	*5.e*	-
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	***5.f***	**1.283.073.469,56**

Bali, 27 Februari 2026
Direktur
Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya

dr. Kadek Iwan Darmawan, MPH
NIP.197702102005011005

PEMERINTAH PROVINSI BALI
RUMAH SAKIT UMUM DHARMA YADNYA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	*Cat*	2025
1	**ASET**		
2	**Aset Lancar**		
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.1	
4	Kas pada BLUD	6.2	1.283.073.469,56
5	Piutang Operasional BLUD	6.3	3.927.558.702,00
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	6.3	(237.621.265,40)
7	Persediaan BLUD	6.4	1.557.041.394,67
8	**Jumlah Aset Lancar**		**6.530.052.300,83**
9	**Aset Tetap**		
10	Tanah	6.5	-
11	Peralatan dan Mesin	6.5	13.234.468.672,00
12	Gedung dan Bangunan	6.5	19.658.983.948,00
13	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.5	603.990.230,00
14	Aset Tetap Lainnya	6.5	-
15	Konstruksi dalam Pengerjaan	6.5	686.417.118,00
16	**Jumlah Harga Perolehan**		**34.183.859.968,00**
17	*Akumulasi Penyusutan*	6.5	**(2.694.271.140,00)**
18	**Jumlah Aset Tetap**		**31.489.588.828,00**
19	**Aset Lainnya**		
20	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	6.6	-
21	Aset Tidak Berwujud	6.6	17.619.030,00
22	Aset Lain-lain	6.6	-
23	*Akumulasi Penyusutan/Amortisasi*	6.6	(2.055.554,00)
24	**Jumlah Aset Lainnya**		**15.563.476,00**
25	**Jumlah Aset**		**38.035.204.604,83**
26	**Kewajiban**		
27	**Kewajiban Jangka Pendek**		
28	Utang PFK		-
29	Utang Belanja	6.7	2.725.627.307,43
30	Utang Jangka Pendek Lainnya		-
31	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek**		**2.725.627.307,43**
32	**Kewajiban Jangka Panjang**		
33	Utang Jangka Panjang	6.8	284.278.715,00
34	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang**		**284.278.715,00**
35	**Jumlah Kewajiban**		**3.009.906.022,43**
36	**Ekuitas**		
37	Ekuitas	6.9	35.025.298.582,40
38	**Jumlah Kewajiban dan Ekuitas**		**38.035.204.604,83**

Bali, 27 Februari 2026
Direktur
Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya

dr. Kadek Iwan Darmawan, MPH
NIP 197702102005011005

PEMERINTAH PROVINSI BALI
RUMAH SAKIT UMUM DHARMA YADNYA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Cat*	2025
1	**Kegiatan Operasional**		
2	**Pendapatan**		
3	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	*7.1.a*	19.457.061.195,00
4	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan		
5	Pendapatan hasil kerjasama	*7.1.b*	181.444.431,00
6	Pendapatan hibah		421.901.805,00
7	Pendapatan lain-lain	*7.1.c*	84.900.233,97
8	Pendapatan APBD	*7.1.d*	4.066.436.024,00
9	**Jumlah Pendapatan**		**24.211.743.688,97**
10	**Beban**		
11	Beban Pegawai	*7.2.a*	6.620.160.137,00
12	Beban Barang dan Jasa	*7.2.b*	14.371.621.363,86
13	Beban Penyisihan Piutang	*7.2.c*	237.621.265,40
14	Beban Penyusutan Aset Tetap	*7.2.d*	2.696.326.694,00
15	Beban Lain-lain	*7.2.e*	-
16	**Jumlah Beban**		**23.925.729.460,26**
17	**Surplus (Defisit) dari Operasi**		**286.014.228,71**
18	**Kegiatan Non Operasional**		
19	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		-
20	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-
21	Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya	*7.3*	-
22	**Jlh Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op**		**-**
23	**Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa**		**286.014.228,71**
24	**Pos Luar Biasa**		
25	Pendapatan Luar Biasa		-
26	Beban Luar Biasa		-
27	**Jumlah Pos Luar Biasa**		**-**
28	**Surplus (Defisit)-LO**		**286.014.228,71**

Bali, 27 Februari 2026
Direktur
Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya

dr. Kadek Iwan Darmawan, MPH
NIP.197702102005011005

PEMERINTAH PROVINSI BALI
RUMAH SAKIT UMUM DHARMA YADNYA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No		*Cat*	2025
1	**Arus kas dari Aktivitas Operasi**	***8.1***	
2	**Arus Masuk Kas**	***8.1a***	
3	Pendapatan dari APBD		4.066.436.024,00
4	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat		20.535.235.500,00
5	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan		-
6	Pendapatan hasil kerjasama		221.665.564,00
7	Pendapatan hibah		-
8	Pendapatan usaha lainnya		84.900.233,97
9	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**24.908.237.321,97**
10	**Arus Kas Keluar**	***8.1b***	
11	Pembayaran Pegawai		6.620.160.137,00
12	Pembayaran Barang dan Jasa		14.871.931.295,42
13	**Jumlah Arus Masuk Keluar**		**21.492.091.432,42**
14	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**		**3.416.145.889,55**
15	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**	***8.2***	
16	**Arus Masuk Kas**	***8.2a***	
17	Penerimaan Penjualan atas Tanah		-
18	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-
19	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-
20	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-
21	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		-
22	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-
23	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**-**
24	**Arus Keluar Kas**	***8.2b***	
25	Perolehan Tanah		-
26	Perolehan Peralatan dan Mesin		1.779.182.496,00
27	Perolehan Gedung dan Bangunan		686.417.118,00
28	Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-
29	Perolehan Aset Tetap Lainnya		-
30	Perolehan Aset Lainnya		-
31	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**2.465.599.614,00**
32	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**	***8.3***	**(2.465.599.614,00)**
33	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**	***8.3a***	
34	**Arus Masuk Kas**		
35	Penerimaan Pinjaman		-
36	Penerimaan Kembali Pinjaman		-
37	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**-**
38	**Arus Keluar Kas**	***8.3b***	
39	Pembayaran Pokok Pinjaman		-
40	Pengeluaraan Penyertaan Modal		-
41	Penyetoran ke Kas Daerah		-
42	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**-**
43	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**		**-**

PEMERINTAH PROVINSI BALI
RUMAH SAKIT UMUM DHARMA YADNYA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No		*Cat*	2025
44	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**	***8.4***	
45	**Arus Kas Masuk**	***8.4.a***	
46	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		821.063.881,00
47	**Jumlah Arus Kas Masuk**		**821.063.881,00**
48	**Arus Kas Keluar**	***8.4.b***	
49	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		821.063.881,00
50	**Jumlah Arus Kas Keluar**		**821.063.881,00**
51	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**		**-**
52	**Kenaikan/Penurunan Kas BLUD**		**950.546.275,55**
53	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD**		**332.527.194,01**
54	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD**		**1.283.073.469,56**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 27 Februari 2026
Direktur
Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya

dr. Kadek Iwan Darmawan, MPH
NIP.197702102005011005

PEMERINTAH PROVINSI BALI
RUMAH SAKIT UMUM DHARMA YADNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

No.	Uraian	*Cat*	2025
1	**Ekuitas Awal**	***9.a***	**33.471.312.553,60**
2	**Surplus (Defisit) LO**	***9.b***	**286.014.228,71**
3	**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**	***9.c***	**1.267.971.800,10**
	Mutasi Aset Tetap Antar OPD		1.235.348.341,00
	Mutasi Aset Persediaan Antar OPD		42.992.633,35
	Koreksi Biaya Dibayar Dimuka		(32.162.234,00)
	Koreksi Saldo Awal Harga Perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin		(421.675.644,00)
	Koreksi Saldo Awal Harga Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan		130.889.614,00
	Koreksi Saldo Awal Harga Perolehan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi		245.167.000,00
	Koreksi Saldo Awal Harga Perolehan Aset Tetap Lainnya		17.619.030,00
	Koreksi Utang Pajak		49.793.059,75
5	**Ekuitas Akhir**	***9.c.6***	**35.025.298.582,41**

Bali, 27 Februari 2026
Direktur
Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya

dr. Kadek Iwan Darmawan, MPH
NIP.197702102005011005

PEMERINTAH PROVINSI BALI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
KERTA BALI SAGUNA

LAPORAN TAHUNAN

2025

PERUMDA KERTA BALI SAGUNA
Jalan Kamboja No. 15 Denpasar - Bali

PEMERINTAH PROVINSI BALI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
KERTA BALI SAGUNA
Jalan Kamboja Nomor 15 Denpasar – Telepon: (0361)236201

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH KERTA BALI SAGUNA DAN ENTITAS ANAK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025

Memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Peraturan Daerah No.2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah dengan perubahannya sesuai Peraturan Daerah No.5 Tahun 1985, dan perubahan terakhir sesuai Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2022, maka dengan kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Nyoman Kami Artana, S.T., M.Si.
   Alamat Kantor : Jalan Kamboja No.15, Denpasar
   Alamat Rumah (sesuai KTP) : Perum Taman Buana Permai E3, Br/Link. Buana Desa, Padangsambian, Denpasar Barat
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Agung Dwi Astika, S.H., M.H.
   Alamat Kantor : Jalan Kamboja No.15, Denpasar
   Alamat Rumah (sesuai KTP) : Jalan Katrangan No. 19 Denpasar, Br/Link. Ketapian, Sumerta, Denpasar Timur
   Jabatan : Direktur Operasional

3. Nama : Drs. Ida Bagus Gede Purnamabawa
   Alamat Kantor : Jalan Kamboja No.15, Denpasar
   Alamat Rumah (sesuai KTP) : Jalan Cekomaria No. C 151, Br/Link. Cengkilung, Peguyangan Kangin, Denpasar Utara
   Jabatan : Direktur Keuangan

4. Nama : Bagus Gede Ananta Wijaya Karna, S.T.
   Alamat Kantor : Jalan Kamboja No.15, Denpasar
   Alamat Rumah (sesuai KTP) : Jalan Kerta Usada No. 15 Denpasar, Br/Link. Kertaraharja, Sidakarya, Denpasar Selatan
   Jabatan : Direktur Pengembangan Usaha

Menyatakan bahwa :

1. Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna & Entitas Anak adalah entitas yang memenuhi kriteria sebagai entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat.

2. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna & Entitas Anak.

ᬧᬫᭂᬦᭀᬫᬩᬮᬶᬧᬭᭀᬯᬶᬲᬶ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ᬧᬾᬭᬩᬳᬸᬫᬶᬓᭂᬭᬢᬸᬓᭂᬭᬢᬸᬳᬶᬭᬶ
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
ᬓᬾᬭᬢᬩᬮᬶᬲᬕᬸᬦ
KERTA BALI SAGUNA
ᬤᬦᬩᬮᬶᬓᬾᬭᬢᬩᬮᬶᬲᬕᬸᬦᬸᬫᬾᬦᬶᬓᬶᬭᬶᬳᬶᬭᬶᬲᬸᬯᬸᬭᬸᬦᬶᬦᬶᬓᬶᬭᬶᬳᬶᬭᬶᬲᬸᬯᬸᬭᬸᬦᬶ
Jalan Kamboja Nomor 15 Denpasar – Telepon: (0361)236201

3. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna & Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat.

4. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna & Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar. Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

5. Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna & Entitas Anak telah membuat catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu Perusahaan, termasuk catatan yang terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu Perusahaan, dan dokumen-dokumen tersebut disimpan oleh Perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

6. Bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna & Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Denpasar, 25 Februari 2026
Direksi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna



Nyoman Kami Artana, S.T., M.Si.
Direktur Utama

Agung Dwi Astika, S.H., M.H.
Direktur Operasional

Drs. Ida Bagus Gede Purnamabawa
Direktur Keuangan

Bagus Gede Ananta Wijaya Karna, S.T.
Direktur Pengembangan Usaha

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN
Certified Public Accountants
License No. : 1011 / km.1 / 2010
Jl. Muding Indah I No. 5 Denpasar - 80361, Bali - Indonesia
Tel./Fax : (62-361) 434-884
E-mail : jmbali@johanmalonda.com www.johanmalonda.com
With Offices in Jakarta, Surabaya and Medan

bakertilly
NETWORK MEMBER
www.bakertilly.global

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00014/3.0225/AU.8/05/1756-3/1/II/2026

Dewan Pengawas dan Direksi

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KERTA BALI SAGUNA

Opini Wajar dengan Pengecualian

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian **Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna & Entitas Anak (Perusahaan & Entitas Anak)**, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian, dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang telah dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian pada laporan kami, Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan & Entitas Anak tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kasnya konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat (SAK EP).

Basis Opini Wajar dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5 tentang Piutang Usaha, piutang usaha konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2025 terdiri dari piutang Perusahaan (Entitas Induk) sebesar Rp1.947.214.222 dan entitas anak sebesar Rp1.178.109.850. Perusahaan (Entitas Induk) telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas Piutang Entitas Induk sebesar Rp493.132.538 yang telah sesuai dengan SAK EP Bab 11 sehingga Laporan Keuangan Entitas Induk telah disajikan secara wajar. Namun, terdapat piutang usaha PT Percetakan Bali (Entitas Anak) sebesar Rp1.178.109.850 yang mana merupakan piutang usaha Entitas Anak kepada pihak ketiga yang telah mengalami penurunan nilai, namun Entitas Anak belum membentuk estimasi cadangan kerugian penurunan nilai atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang tersebut. Hal tersebut mengakibatkan Laporan Keuangan Entitas Anak yang dikonsolidasikan ke Laporan Keuangan Entitas Induk belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Entitas Privat (SAK EP) Bab 11 Instrumen Keuangan paragraf 11.21 yang menyatakan bahwa "Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, entitas langsung mengakui kerugian penurunan nilai dalam laba rugi."

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan & Entitas Anak berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini wajar dengan pengecualian kami.

Penekanan Suatu Hal

Kami menarik perhatian ke Catatan 24 tentang Perkara Hukum atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang menguraikan tentang Perusahaan yang menjadi tergugat dalam proses arbitrase internasional yang masih dalam proses. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain diperoleh pada tanggal laporan auditor ini adalah informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian dan laporan auditor kami di dalamnya.

Opini kami atas Laporan Keuangan Konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas Laporan Keuangan Konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistenan material dengan Laporan Keuangan Konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Jika, berdasarkan pekerjaan yang telah kami laksanakan, kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material dalam informasi lain tersebut, kami diharuskan untuk melaporkan fakta tersebut.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat (SAK EP), dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai, kemampuan Perusahaan & Entitas Anak dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan Laporan Keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam Laporan Keuangan Konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajemen dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam Laporan Keuangan atau jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah Laporan Keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN
NIU-KAP: KEP-1011/KM.1/2010

I Wayan Wirawan, S.E., M.M., CPA.
NRAP AP.1756

Denpasar, 25 Februari 2026

00014

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KERTA BALI SAGUNA & ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan Lain)

ASET	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024*)	1 Januari 2024 *)
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas	2h, 4	105.575.204.132	120.549.737.681	39.593.533.423
Piutang Usaha	2i, 5	3.125.324.072	3.884.322.747	3.000.920.953
Dikurangi: Cadangan Kerugian Piutang		(493.132.538)	(501.531.538)	-
Piutang Lain-Lain	2i, 6	409.899.282	1.656.550	2.151.179.650
Persediaan	2j, 7	597.147.855	708.348.322	2.241.703.517
Jumlah Aset Lancar		**109.214.442.804**	**124.642.533.762**	**46.987.337.543**
ASET TIDAK LANCAR				
Investasi pada Entitas Asosiasi		-	-	70.000.000
Tanaman Perkebunan	2k, 8			
Tanaman Menghasilkan		1.115.398.169	1.153.212.130	1.157.289.862
Dikurangi: Akumulasi Penyusutan Tanaman Menghasilkan		(366.333.500)	(344.291.514)	(321.227.274)
Jumlah Tercatat Tanaman Perkebunan		**749.064.669**	**808.920.616**	**836.062.588**
Aset Tetap	2i, 9			
Harga Perolehan		16.156.629.278	16.064.303.740	16.308.835.389
Dikurangi: Akumulasi Penyusutan		(5.955.904.689)	(5.568.064.717)	(4.934.001.702)
Jumlah Tercatat Aset Tetap		**10.200.724.589**	**10.496.239.023**	**11.374.833.687**
Aset Pajak Tangguhan	2o, 12	465.641.370	223.924.696	98.894.879
Jumlah Aset Tidak Lancar		**11.415.430.629**	**11.529.084.335**	**12.379.791.155**
JUMLAH ASET		**120.629.873.434**	**136.171.618.097**	**59.367.128.697**
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Usaha	2m, 10	950.012.450	716.324.550	217.738.452
Biaya yang Masih Harus Dibayar	11	107.000.000	102.456.341	32.680.054
Utang Pajak	2o, 12	32.668.314	7.993.943.321	295.085.221
Pendapatan Diterima di Muka	13	56.336.994.932	41.022.107.686	41.748.050.602
Utang - Uang Muka (Deposit)	14	70.989.106	134.217.205	985.557.506
Utang Bank		-	-	825.768.079
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**57.497.664.802**	**49.969.049.103**	**44.104.879.914**
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang Sewa Pembiayaan	15	48.299.000	96.599.000	144.900.000
Utang Jangka Panjang Lainnya	16	965.849.400	-	-
Imbalan Pascakerja	2p, 17	657.569.743	516.307.987	436.192.032
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**1.671.718.143**	**612.906.987**	**581.092.032**
Jumlah Liabilitas		**59.169.382.945**	**50.581.956.090**	**44.685.971.946**
EKUITAS	18			
Modal Disetor		5.282.769.658	5.282.769.658	5.282.769.658
Cadangan Umum		8.356.313.965	8.356.313.965	8.356.313.965
Cadangan Tujuan		39.899.596.512	1.297.045.953	1.297.045.953
Saldo Laba		7.802.775.879	70.495.349.162	(395.684.514)
Jumlah		**61.341.456.014**	**85.431.478.738**	**14.540.445.062**
Kepentingan Non-Pengendali		**119.034.475**	**158.183.269**	**140.711.688**
Jumlah Ekuitas		**61.460.490.489**	**85.589.662.007**	**14.681.156.751**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**120.629.873.434**	**136.171.618.097**	**59.367.128.697**

*) Disajikan kembali lihat Catatan 25

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KERTA BALI SAGUNA & ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan Lain)

	Catatan	2025	2024*)
Pendapatan Operasional	2n, 19	25.523.229.814	25.064.136.540
Beban Pokok Pendapatan	2n, 20	(15.232.972.630)	(17.120.952.853)
Beban Pajak Penghasilan Final	21	(264.621.810)	(248.604.874)
LABA KOTOR		**10.025.635.374**	**7.694.578.814**
Beban Operasional	22		
Beban Pemasaran dan Distribusi		(130.484.946)	(163.094.217)
Beban Administrasi dan Umum		(6.509.908.709)	(7.874.077.235)
Jumlah Beban Operasional		**(6.640.393.655)**	**(8.037.171.452)**
LABA USAHA		**3.385.241.719**	**(342.592.638)**
Pendapatan (Beban) Non Operasional	23		
Pendapatan Non Operasional		4.390.182.393	72.686.198.063
Beban Non Operasional		(710.435.028)	(1.538.839.293)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		**3.679.747.366**	**71.147.358.770**
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		**7.064.989.084**	**70.804.766.132**
Beban Pajak Penghasilan			
Pajak Kini		-	(34.377.090)
Pajak Tangguhan		231.886.793	127.908.824
Total Beban Pajak Penghasilan		**231.886.793**	**93.531.734**
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		**7.296.875.878**	**70.898.297.866**
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN			
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasca Kerja		(44.681.277)	13.086.397
Pajak Penghasilan Terkait		9.829.881	(2.879.007)
LABA BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**7.262.024.482**	**70.908.505.256**
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik Entitas Induk		7.336.024.672	70.880.826.286
Kepentingan Non-Pengendali		(39.148.794)	17.471.581
JUMLAH		**7.296.875.878**	**70.898.297.866**
LABA BERSIH KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik Entitas Induk		7.301.173.276	70.891.033.676
Kepentingan Non-Pengendali		(39.148.794)	17.471.581
JUMLAH		**7.262.024.482**	**70.908.505.256**

*) Disajikan kembali lihat Catatan 25

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KERTA BALI SAGUNA & ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan Lain)

	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk						
		Saldo Laba					
	Setoran Modal	Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah	Kepentingan Non-Pengendali	Jumlah Ekuitas
Saldo per 31 Desember 2023	**5.282.769.658**	**8.356.313.965**	**1.297.045.953**	**1.132.909.585**	**16.069.039.161**	**-**	**16.069.039.161**
Dampak Transisi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat (SAK-EP)	-	-	-	(1.528.594.099)	(1.528.594.099)	140.711.688	(1.387.882.411)
Saldo per 1 Januari 2024	**5.282.769.658**	**8.356.313.965**	**1.297.045.953**	**(395.684.514)**	**14.540.445.062**	**140.711.688**	**14.681.156.751**
Laba Bersih Tahun Berjalan	-	-	-	70.891.033.676	70.891.033.676	17.471.581	70.908.505.256
Saldo per 31 Desember 2024	**5.282.769.658**	**8.356.313.965**	**1.297.045.953**	**70.495.349.162**	**85.431.478.738**	**158.183.269**	**85.589.662.007**
Cadangan Tujuan	-	-	38.443.746.559	(38.443.746.559)	-	-	-
Penggunaan Saldo Laba :							
- Dana Pembangunan Daerah/PAD	-	-	-	(27.000.000.000)	(27.000.000.000)	-	(27.000.000.000)
- Dana Insentif/Tantiem	-	-	-	(2.800.000.000)	(2.800.000.000)	-	(2.800.000.000)
- CSR	-	-	158.804.000	(1.750.000.000)	(1.591.196.000)	-	(1.591.196.000)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	-	-	-	7.301.173.276	7.301.173.276	(39.148.794)	7.262.024.482
Saldo per 31 Desember 2025	**5.282.769.658**	**8.356.313.965**	**39.899.596.512**	**7.802.775.879**	**61.341.456.014**	**119.034.475**	**61.460.490.489**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

PERUSAHAAN DAERAH KERTA BALI SAGUNA & ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2025	2024 *)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari Pelanggan	41.601.929.835	23.454.791.830
Pembayaran Kepada Pemasok, Pemerintah dan Karyawan	(19.391.935.974)	(18.758.146.588)
Penerimaan dari Pendapatan Operasional Lainnya	4.283.628.420	80.583.518.537
Pembayaran Beban Operasional	(836.521.607)	(2.249.747.729)
Pembayaran Beban Operasional Lainnya	(745.108.843)	(963.230.024)
Pembayaran Pajak	(8.354.703.842)	(481.444.338)
Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	**16.557.287.989**	**81.585.741.689**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
(Penambahan) Pengurangan Aset Tetap	(92.325.538)	244.531.649
Kas Bersih Yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	**(92.325.538)**	**244.531.649**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran Utang Bank	-	(825.768.079)
Pembayaran Utang Sewa Pembiayaan	(48.300.000)	(48.301.000)
Pembayaran Dana Pembangunan Daerah/PAD	(27.000.000.000)	-
Pembayaran Jasa Produksi	(2.800.000.000)	-
CSR	(1.591.196.000)	-
Kas Bersih Yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	**(31.439.496.000)**	**(874.069.079)**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	**(14.974.533.549)**	**80.956.204.258**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**120.549.737.681**	**39.593.533.423**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**105.575.204.132**	**120.549.737.681**

*) Disajikan kembali lihat Catatan 25

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

PEMERINTAH PROVINSI BALI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KERTHI BALI SANTHI

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

DAN

LAPORAN REVIU AKUNTAN PUBLIK INDEPENDEN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KERTHI BALI SANTHI

Jl. Akasia Nomor 2 Denpasar Bali

Email: perumdakbs@gmail.com

PEMERINTAH PROVINSI BALI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
KERTHI BALI SANTHI
Jalan Akasia Nomor 2 Denpasar Bali 80239
perumdakbs@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DIREKTUR
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
PERUSAHAAN UMUM DAERAH KERTHI BALI SANTHI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	I Gede Sumardika
Alamat Kantor	:	Jln. Akasia Nomor 2 Denpasar Bali
Alamat Rumah Sesuai KTP	:	Jl. Tegal Sembung No. 1, Br. Gulingan Tengah
Jabatan	:	Direktur Utama

Untuk dan atas nama Direksi Perumda Kerthi Bali Santhi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas Perumda Kerthi Bali Santhi menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)
3. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Denpasar, 10 Maret 2026
Direktur Utama
Perumda Kerthi Bali Santhi



I Gede Sumardika

No : 00001/LR/KAP.IGOR/1/III/2026

LAPORAN REVIU AKUNTAN PUBLIK INDEPENDEN

Pengguna Laporan Keuangan
Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi

Kami ditugaskan untuk melaksanakan reviu atas laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lain.

Tanggung jawab Manajemen terhadap Laporan Keuangan
Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas laporan keuangan terlampir. Namun, karena hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Tidak Menyatakan Kesimpulan, kami tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai suatu basis untuk menyatakan kesimpulan atas laporan keuangan.

Basis untuk Tidak Menyatakan Kesimpulan
Berdasarkan prosedur reviu yang kami laksanakan, kami menemukan kondisi-kondisi material dan pervasif sebagai berikut:

1. Laporan keuangan terlampir disusun dengan anggapan bahwa Perusahaan akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dimana perusahaan memiliki akumulasi kerugian (defisit saldo laba) pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp10.685.435.567,45 yang disebabkan oleh kerugian berulang tahun 2023, 2024 dan 2025. Di samping itu, perusahaan sudah tidak beroperasi sejak awal Tahun 2025 dan tidak memelihara dokumen perusahaan untuk mendukung saldo-saldo dalam laporan keuangan. Sebagai akibat dari hal tersebut, maka terdapat ketidakpastian signifikan tentang kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kami tidak memperoleh bukti bahwa manajemen dan/atau pemilik memiliki rencana signifikan untuk dapat melanjutkan keberlangsungannya terhadap kemampuan menghasilkan arus kas yang cukup dari kegiatan usaha di masa mendatang dan kemampuan manajemen dalam menyelesaikan akumulasi kerugian. Laporan keuangan belum mencakup penyesuaian-penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian (*going concern*) dan ketidaktersediaan dokumen tersebut.
2. Ketiadaan bukti pertanggungjawaban dana bank dimana terdapat sisa dana sebesar Rp451.041.223,00 per 31 Desember 2024 pada rekening bank entitas (BPD Bali, PT Bank BRI Rek. 055701000916307, BPR Aruna, BTN, dan BPR Lestari) yang telah ditutup selama tahun 2025. Namun, tidak ditemukan bukti pertanggungjawaban pemakaian biaya seperti nota, kuitansi, maupun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan dana tersebut sebelum penutupan rekening. PT Bank BRI Rek. 055701000916307 dan Akun BTN oleh pihak direksi tidak mendapatkan rekening koran terakhir dan konfirmasi penutupan di tahun 2025. Berdasarkan konfirmasi oleh pihak bank yang dilakukan direktur utama melakukan

konfirmasi terkait sisa saldo kas bank hanya didapatkan BPD Bali Rek. 0100111002483 yang bisa mendapatkan keterangan konfirmasi penutupan rekening pada PT Bank Pembangunan Bali Kantor Cabang Renon Dimana pada surat tanggal 07 Agustus 2025 perihal penutupan rekening dibayarkan uang sejumah saldo akhir Rp1.608.016,80 dan bunga Rp545.77, dengan biaya penutupn Rp25.000,00 dengan demikian yang dibayarkan pihak PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Renon adalah Rp1.583.562,57 yang diterima oleh Alit Putra C.Ms selaku direktur lama pada masa itu.

3. Ketiadaan dokumen pendukung biaya operasional Rp2.412.678.642,48 yakni kami tidak menemukan bukti kuitansi tagihan, nota biaya, atau dokumen pendukung lainnya atas biaya administrasi, dan umum selain beban penyusutan Rp556.932.043,32 dan beban amortisasi sewa kantor Rp20.767.599,96, dan beban PPN keluaran dimana keseluruhan biaya ini merupakan perhitungan akuntansi penyusutan, amortisasi dan surat tagihan pajak.
4. Ketidakpastian biaya yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.387.104.623,20 sehubungan tidak adanya dokumen pendukung, dan ketiadaan dokumen pendukung atas utang pajak 2025 sebesar Rp26.410.000,00, dimana tagihan pajak yang tercatat hanya sebesar Rp1.000.000 (billing 241799102445612) tanpa disertai bukti potong pendukung lainnya.

Tidak Menyatakan Kesimpulan

Karena signifikansi dari hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Tidak Menyatakan Kesimpulan, kami tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk merumuskan kesimpulan atas laporan keuangan terlampir. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan kesimpulan atas laporan keuangan ini.

Kantor Akuntan Publik
I Gede Oka dan Rekan



I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA., CFI., ASEAN CPA.
NRAP: AP.0463

Badung, 10 Maret 2026

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KERTHI BALI SANTHI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2025
Dengan Angka Pembanding Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	*3.b,4.a*	-	451.041.223,00
Piutang Usaha	*3.c,4.b*	-	4.887.330,00
Persediaan	*3.d,4.c*	-	-
Pembayaran Dimuka	*3.e,4.d*	-	326.533.889,00
Sewa Dibayar Dimuka	*4.e*	103.838.000,00	103.838.000,00
Akumulasi Amortisasi Sewa	*4.e*	(50.188.366,57)	(29.420.761,00)
Jumlah Aset Lancar		**53.649.633,43**	**856.879.681,00**
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap	*3.f,4.f*		
Harga Perolehan		1.253.242.945,72	2.929.349.040,00
Akumulasi Penyusutan		(578.813.523,40)	(495.704.075,00)
Jumlah Nilai Buku		**674.429.422,32**	**2.433.644.965,00**
TOTAL ASET		**728.079.055,75**	**3.290.524.646,00**
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek			
Biaya yang Masih Harus Dibayar	*4.g*	1.387.104.623,20	15.677.703,00
Utang Pajak	*4.h*	26.410.000,00	21.959.649,00
Utang Lain-Lain	*4.i*	-	485.100,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**1.413.514.623,20**	**38.122.452,00**
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Pembiayaan	*4.j*	-	406.567.137,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		**-**	**406.567.137,00**
JUMLAH KEWAJIBAN		**1.413.514.623,20**	**444.689.589,00**
Ekuitas			
Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Bali	*4.k*	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Saldo Laba (Rugi)	*4.l*	(10.685.435.567,45)	(7.154.164.943,00)
Jumlah Ekuitas		**(685.435.567,45)**	**2.845.835.057,00**
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**728.079.055,75**	**3.290.524.646,00**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Denpasar, 10 Maret 2026
Direktur Utama
Perumda Kerthi Bali Santhi

I Gede Sumardika

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KERTHI BALI SANTHI
LAPORAN LABA RUGI DAN PENHASILAN KOMPREHENSIF
PER 31 DESEMBER 2025
Dengan Angka Pembanding Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
Pendapatan Usaha			
Pendapatan	*3.g,5.a.1*	-	29.057.000,00
Harga Pokok Penjualan	*3.g,5.a.2*	-	-
Laba Kotor		**-**	**29.057.000,00**
Beban Operasional			
Beban Pemasaran	*3.g,5.b.1*	-	54.181.432,00
Beban Administrasi dan Umum	*3.g,5.b.2*	2.412.678.642,48	5.144.974.237,00
Jumlah Beban Operasional		**2.412.678.642,48**	**5.199.155.669,00**
Laba (Rugi) Operasional		**(2.412.678.642,48)**	**(5.170.098.669,00)**
Pendapatan (Beban) Non Operasional	*3.g,5.c*	(1.118.030.164,00)	77.683.768,00
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		**(3.530.708.806,48)**	**(5.092.414.901,00)**
Pajak Penghasilan	*3.g,5.d*	-	-
Laba (Rugi) Setelah Pajak		**(3.530.708.806,48)**	**(5.092.414.901,00)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Denpasar, 10 Maret 2026
Direktur Utama
Perumda Kerthi Bali Santhi

I Gede Sumardika

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KERTHI BALI SANTHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Buku yang Berakhir tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Bali	Saldo laba (Rugi)	Jumlah Ekuitas
Saldo Per 01 Januari 2023	**-**	**-**	**-**
Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Bali	10.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00
Laba (Rugi) Bersih Th 2023	**-**	(2.061.750.042,00)	(2.061.750.042,00)
Saldo Per 31 Desember 2023	**10.000.000.000,00**	**(2.061.750.042,00)**	**7.938.249.958,00**
Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Bali	-	-	-
Laba (Rugi) Bersih Th 2024	**-**	(5.092.414.901,00)	(5.092.414.901,00)
Saldo Per 31 Desember 2024	**10.000.000.000,00**	**(7.154.164.943,00)**	**2.845.835.057,00**
Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Bali	-	-	-
Koreksi Saldo Awal	-	(561.817,97)	(561.817,97)
Laba (Rugi) Bersih Th. 2025	**-**	(3.530.708.806,48)	(3.530.708.806,48)
Saldo Per 31 Desember 2025	**10.000.000.000,00**	**(10.685.435.567,45)**	**(685.435.567,45)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KERTHI BALI SANTHI
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2025
Dengan Angka Pembanding Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Laba (rugi) setelah pajak	**(3.530.708.806,48)**	**(5.092.414.901,00)**
Penyesuaian untuk merelokasi Laba (Rugi)	**(561.817,97)**	**-**
Menjadi Kas bersih diperoleh dari Aktivasi Operasi		
Penyusutan Aset	**83.109.448,40**	432.479.500,00
Perubahan Aset dan Kewajiban Operasi		
Kenaikan/Penurunan Piutang Usaha	4.887.330,00	(4.887.330,00)
Kenaikan/Penurunan Persediaan	-	550.000,00
Kenaikan/Penurunan Biaya Dibayar Dimuka	326.533.889,00	120.977.328,00
Kenaikan/Penurunan Sewa Dibayar Dimuka	20.767.605,57	20.767.596,00
Kenaikan/Penurunan Utang Pajak	4.450.351,00	9.867.789,00
Kenaikan/Penurunan Biaya Yang Masih Harus Dibayar	1.371.426.920,20	5.867.703,00
Kenaikan/Penurunan Utang Lain-Lain	(485.100,00)	485.100,00
Jumlah Aktivitas Operasi	**(1.720.580.180,28)**	**(4.506.307.215,00)**
Arus Kas Dihasilkan Dari Aktivitas Investasi		
Aset Tetap	1.676.106.094,28	(2.131.509.929,00)
Arus Kas Digunakan Dari Aktivitas Investasi	**1.676.106.094,28**	**(2.131.509.929,00)**
Arus Kas Aktivitas Pendanaan		
Utang Pembiayaan	(406.567.137,00)	155.169.321,00
Modal Disetor	-	-
Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Pendanaan	**(406.567.137,00)**	**155.169.321,00**
Kenaikan/Penurunan Kas dan Setara Kas	**(451.041.223,00)**	**(6.482.647.823,00)**
Kas dan Setara Kas Awal periode	**451.041.223,00**	**6.933.689.047,00**
Kas dan Setara Kas Akhir periode	**0,00**	**451.041.223,00**
Saldo Akhir Terdiri dari		
Kas		
Kas Tunai	-	448.800,00
Bank		
- BPD Bali Rek. 0100111002483	-	395.996.746,00
- PT Bank BRI Rek. 055701000916307	-	42.138.057,00
- BPR Aruna	-	-
- BTN	-	12.457.620,00
- PT BPR Lestari	-	-
Jumlah Kas dan Setara Kas	**-**	**451.041.223,00**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BANK BPD BALI

LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025



SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

Yang bertanda tangan di bawah ini:/*We, the undersigned:*

Nama/ *Name*	: I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.
Alamat Kantor/ *Office address*	: Jl. Raya Puputan, Niti Mandala, Denpasar, Bali.
Jabatan/ *Position*	: Direktur Utama/*President Director.*

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Entitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Bank.

State that :

1. *We are responsible for preparation and presentation of the Entity financial statements for the year ended December 31, 2025;*
2. *The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information contained in the financial statements is complete and correct;*
   b. The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;
4. *We are responsible for the Bank's internal control system.*

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. *This statement letter is made truthfully.*

Denpasar, 09 Januari 2026/*January 09*, 2026

Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of the Directors*



I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.
Direktur Utama/*President Director*

Ida Bagus Gede Setia Yasa
Pelaksana Tugas Direktur Operasional/*Interim Director of Operations*

Laporan Auditor Independen
Independent Auditor's Report

No/*Ref.* : 00001/2.1127/AU.1/07/0060-5/1/I/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali ("Bank"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

To the Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

Opinion

We have audited the financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Bali (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including information of material accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan dan dalam merumuskan opini audit kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini audit terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang dijelaskan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang dirancang untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, memberikan dasar bagi opini audit kami atas laporan keuangan terlampir.

Penjelasan atas Hal Audit Utama:

Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan

Pada tanggal 31 Desember 2025, pinjaman yang diberikan mencerminkan 58% dari jumlah aset. Bank melaporkan pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan sebesar Rp117.899.889.023 (Catatan 9) dengan akumulasi cadangan kerugian penurunan nilai Sebesar Rp1.155.828.488.569 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi ditentukan oleh Bank berdasarkan Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") berdasarkan PSAK 109, "Instrumen Keuangan" ("PSAK 109").

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our audit opinion thereon, and we do not provide a separate audit opinion on these matters. For the key audit matters below, our description of how our audit addressed such matter is provided in such context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to key audit matters communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matters below, provide the basis for our audit opinion on the accompanying financial statements.

Description of the Key Audit Matter:

Allowance for impairment credit loss attributable to loans

As of December 31, 2025, the loans represent 58% of the total assets. The Bank reported a recovery of allowance for impairment losses on loans amounting to Rp117,899,889,023 (Note 9) with an accumulated allowance for impairment losses of Rp1,155,828,488,569 for the year ended December 31, 2025.

These allowance for impairment losses for loans measured at amortized cost are determined by the Bank based on the Expected Credit Losses ("ECL") framework under SFAS 109, "Financial Instruments" ("SFAS 109").

Sesuai yang diungkapkan pada Catatan 3 di laporan keuangan, penilaian ini melibatkan pertimbangan manajemen dan estimasi yang signifikan. Bank menghitung KKE dengan menggunakan beberapa parameter seperti *probability of default, loss given default, exposure at default* dan tingkat diskonto. Bank juga menggunakan asumsi dalam menentukan eksposure seperti arus kas masa depan yang diharapkan dan faktor makro ekonomi masa akan datang, beberapa skenario probabilitas tertimbang dan penyesuaian *overlay* KKE yang dibuat, mengingat ketidakpastian ekonomi yang timbul di masa yang akan datang.

As disclosed in Note 3 to the financial statements, this assessment involves significant management judgment and estimation. The Bank calculates ECL using several parameters such as the probability of default, loss given default, exposure at default and discount rate. The Bank also uses assumptions in determining exposures such as expected future cash flows and future macroeconomic factors, several weighted probability scenarios and ECL overlay adjustments made, given the economic uncertainties that arise in the future.

Pengungkapan Bank mengenai cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dijelaskan pada Catatan 2d dan 9 atas laporan keuangan.

The Bank's disclosures regarding allowance for impairment losses on loans are explained in Notes 2d and 9 to the financial statements.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

How our audit addressed this Key Audit Matter

Prosedur audit kami untuk mengatasi risiko salah saji material yang berkaitan dengan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan, sebagai berikut:

Our audit procedures to address the risk of material misstatement relating allowance for impairment credit loss attributable to loans, include the following:

- Kami telah melaksanakan prosedur dengan memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal Bank yang relevan atas identifikasi aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan atau bukti objektif penurunan nilai, melalui pengujian atas pengendalian penetapan *rating* internal dan melakukan pemeriksaan secara sampling atas dokumen pinjaman.

- *We have carried out procedures by understanding and evaluating the design and implementation of Bank relevant internal controls for the identification of financial assets with significantly increased credit risk or objective evidence of impairment, through testing of internal rating determination controls and conducting sampling examinations of loan documents.*

- Kami memeriksa sampel atas aset keuangan yang diidentifikasi oleh Bank memiliki kualitas kredit yang lebih rendah dan direstrukturisasi, dan membuat penilaian independen kami apakah ada peningkatan risiko kredit secara signifikan atau terdapat bukti objektif penurunan nilai.

- *We examined samples of financial assets identified by the Bank as having lower credit quality and restructured, and formed our own independent judgment as to whether there was a significant increase in credit risk or any objective evidence of impairment.*

- Kami mengevaluasi keakuratan, kelengkapan data dan asumsi pemodelan signifikan yang digunakan dalam model KKE, termasuk penentuan *probability of default*, *loss given default* dan *exposure at default*, yang diterapkan terhadap persyaratan PSAK 109. Kami juga mengevaluasi kewajaran prakiraan ekonomi makro Indonesia.

- *We evaluate the accuracy, completeness of data and significant modeling assumptions used in the ECL model, including the determination of the probability of default, loss given default and exposure at default, which are applied to the requirements of SFAS 109. We also evaluate the reasonableness of Indonesia's macroeconomic forecasts.*

- Kami memeriksa keakuratan data dan perhitungan jumlah KKE, dengan melakukan perhitungan ulang atas keseluruhan portofolio yang penurunan nilainya dinilai secara kolektif dan melakukan perhitungan ulang atas penurunan nilainya dinilai secara individual berdasarkan sampel.

- *We checked the accuracy of data and calculation of the ECL amount, by recalculating the collective impairment assessment for the portfolio and recalculating the individual impairment assessment on a sample basis.*

- Kami juga menilai apakah pengungkapan laporan keuangan secara memadai dan Bank eksposur mencerminkan tepat terhadap risiko kredit.

- *We also assessed whether the financial statement disclosures adequately and appropriately reflect the Bank's exposures to credit risk.*

Penjelasan atas Hal Audit Utama:

Description of the Key Audit Matter:

Penilaian atas imbalan kerja dan kerugian komprehensif lain

Valuation of post-employment benefit and other comprehensive loss

Bank telah mengakui beban atas imbalan kerja sebesar Rp78.092.444.731 dan kerugian komprehensif lainnya sebesar Rp71.764.669.581 pada tanggal 31 Desember 2025. Beban atas imbalan kerja dan asumsi yang mendasar penilaian kerugian aktuarial merupakan hal penting, dan juga subjektif, pertimbangan karena saldo tidak stabil dan mempengaruhi komponen ekuitas lainnya Bank. Manajemen telah memperoleh saran dari aktuaria untuk menghitung aktuaria ini. Penilaian aktuaria ini sensitif terhadap asumsi utama seperti tingkat diskonto, tingkat inflasi dan tingkat kematian. Mengingat pertimbangan diperlukan oleh Bank dalam menetapkan asumsi ini, volatilitas dapat diakibatkan oleh perubahan asumsi dan signifikansi saldo terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Informasi terperinci mengenai hal ini disajikan dalam Catatan 20 pada laporan keuangan.

Bank's has recognized the post employment benefit expense of Rp78,092,444,731 and other comprehensive loss amounting to Rp71,764,669,581 as of December 31, 2025. The employee benefit expense and assumptions that underpin the valuation of the actuarial loss are important, and also subjective, judgments as the balance is volatile and affects Bank's other equity component. Management has obtained advice from actuarial specialists in order to calculate this actuarial amount. These actuarial valuations are sensitive to key assumptions such as discount rates, inflation rates and mortality rates. Given the judgment required by Bank's in setting these assumptions, the volatility can result from changes in assumptions and the significance of the balances to the financial statements as a whole. Detailed information pertaining to this is presented in Note 20 to the financial statements.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

Prosedur audit kami untuk mengatasi risiko salah saji material yang berkaitan dengan Penilaian atas imbalan kerja dan kerugian komprehensif lain, sebagai berikut:

Kami mengevaluasi penilaian Bank atas asumsi yang digunakan dalam penilaian kerugian aktuaria yang dilaporkan di penghasilan komprehensif lainnya termasuk informasi yang terkandung dalam laporan penilaian aktuaria untuk setiap program.

Kami mereviu ruang lingkup penilaian yang dilakukan dan kami mengevaluasi keahlian dan independensi aktuaris Bank. Ini termasuk penilaian dan penyelidikan untuk asumsi utama yang diterapkan, *benchmarking*, tingkat diskonto, inflasi, dan tingkat kematian, terhadap data eksternal jika tersedia dan membentuk ekspektasi independen kami sendiri berdasarkan pengetahuan kami tentang praktik pasar lokal.

Kami juga menilai kecukupan dan kelengkapan pengungkapan imbalan kerja terkait dalam laporan keuangan.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsitensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

How our audit addressed this Key Audit Matter

Our audit procedures to address the risk of material misstatement relating valuation of post-employment benefit and other comprehensive loss, include the following:

We evaluated Bank's assessment of the assumptions used in the valuation of actuarial loss reported in other comprehensive loss including the information contained within the actuarial valuation reports for each plan.

We reviewed the scope of valuations performed and we evaluated the expertise and independence of Bank's actuary. This included assessment and inquiry for the key assumptions applied, benchmarking, discount rates, inflation, and mortality rates, against external data where available and forming our own independent expectations based on our knowledge of local market practices.

We also assessed the adequacy and completeness of the related post employment benefit disclosures in the financial statements.

Other information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.

Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Bank.

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern.*

Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

00001

HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO

HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO Registered Public Accountants

Welly Adrianto, CPA

No. Ijin Akuntan Publik / *Public Accountant License Number:* AP. 0060

Jakarta, 9 Januari 2026/*January 9, 2026*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
ASET				***ASSETS***
Kas	4	868.945.822.140	580.735.597.835	*Cash*
Giro Pada Bank Indonesia	5	2.624.589.812.614	2.694.875.382.728	*Current Accounts with Bank Indonesia*
Giro Pada Bank Lain	6			*Current Accounts with Other Banks*
- Pihak Berelasi		--	--	*Related Parties* -
- Pihak Ketiga		50.635.186.507	45.119.172.455	*Third Parties* -
Jumlah Giro Pada Bank Lain		50.635.186.507	45.119.172.455	*Total Current Accounts with Other Banks*
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(33.541.150)	(32.035.380)	*Less: Allowance for Impairment Losses*
		50.601.645.357	45.087.137.075	
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	7			*Placements with Bank Indonesia and Other Banks*
- Pihak Berelasi		--	--	*Related Parties* -
- Pihak Ketiga		2.042.384.931.672	3.144.937.358.091	*Third Parties* -
Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lainnya		2.042.384.931.672	3.144.937.358.091	*Total Placements with Bank Indonesia and Other Banks*
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(871.698.227)	(1.778.693.256)	*Less: Allowance for Impairment Losses*
		2.041.513.233.445	3.143.158.664.835	
Efek - Efek	8			*Securities*
- Pihak Berelasi		--	--	*Related Parties* -
- Pihak Ketiga		11.273.318.815.282	9.760.077.271.692	*Third Parties* -
Jumlah Efek - Efek		11.273.318.815.282	9.760.077.271.692	*Total Securities*
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(17.000.000)	-	*Less: Allowance for Impairment Losses*
		11.273.301.815.282	9.760.077.271.692	
Pinjaman yang Diberikan	9			*Loans*
- Pihak Berelasi		28.230.814.253	32.221.984.154	*Related Parties* -
- Pihak Ketiga		24.972.675.035.729	22.797.947.429.290	*Third Parties* -
Total Pinjaman yang Diberikan		25.000.905.849.982	22.830.169.413.444	*Total Loans*
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(1.155.828.488.569)	(1.305.082.017.392)	*Less: Allowance for Impairment Losses*
		23.845.077.361.413	21.525.087.396.052	
Aset Tetap	10	419.196.470.729	388.131.366.573	*Fixed Assets*
Dikurangi : Akumulasi Penyusutan		(275.476.562.033)	(258.497.766.049)	*Less: Accumulated Depreciation*
		143.719.908.696	129.633.600.524	
Aset Takberwujud	11	58.954.311.542	51.760.428.880	*Intangible Assets*
Dikurangi: Akumulasi Amortisasi		(49.035.896.338)	(44.300.181.485)	*Less: Accumulated Amortization*
		9.918.415.204	7.460.247.395	
Aset Hak Guna	12	91.975.523.569	82.819.125.696	*Right-of-Use Assets*
Dikurangi : Akumulasi Penyusutan		(43.258.122.900)	(38.048.572.569)	*Less: Accumulated Depreciation*
		48.717.400.669	44.770.553.127	
Aset Lain - lain	13	277.012.295.332	229.637.221.111	*Other Assets*
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	18d	197.591.142.029	152.158.565.329	*Deferred Tax Assets - Net*
TOTAL ASET		**41.380.988.852.181**	**38.312.681.637.703**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN POSISI KEUANGAN (LANJUTAN)
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas Segera	14	82.350.275.735	74.679.631.081	*Liabilities Due Immediately*
Simpanan dari Nasabah	15a			*Deposits from Customers*
- Pihak Berelasi		1.807.365.717.356	590.707.387.143	*Related Parties -*
- Pihak Ketiga		32.045.845.274.782	31.577.083.821.666	*Third Parties -*
		33.853.210.992.138	32.167.791.208.809	
Simpanan dari Bank Lain	16a			*Deposits from Other Banks*
- Pihak Berelasi		--	--	*Related Parties -*
- Pihak Ketiga		1.075.658.295.068	661.691.987.042	*Third Parties -*
		1.075.658.295.068	661.691.987.042	
Pinjaman yang Diterima	17	23.991.677.262	24.433.647.846	*Borrowings*
Utang Pajak	18a	69.394.655.562	69.106.199.029	*Taxes Payable*
Beban yang Masih Harus Dibayar	19	24.454.215.202	22.595.470.132	*Accrued Expense*
Liabilitas Imbalan Kerja	20	296.976.448.112	265.776.646.490	*Post-Employment Benefit Obligation*
Liabilitas Sewa	21	17.404.471.686	15.056.560.942	*Lease Liabilities*
Liabilitas Lain - lain	22	417.705.426.456	351.353.237.757	*Other Liabilities*
TOTAL LIABILITAS		**35.861.146.457.221**	**33.652.484.589.128**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal Saham				*Share Capital*
nilai nominal Rp1.000.000				*Rp1,000,000 (full amount)*
(nilai penuh) per saham				*par value per share*
Modal Dasar :				*Authorized Capital :*
7.000.000 saham				*7,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh:	23			*Issued and fully paid capital:*
- 2025 : 2.880.177 saham		2.880.177.000.000	-	*2025 : 2,880,177 shares -*
- 2024 : 2.407.177 saham		--	2.407.177.000.000	*2024 : 2,407,177 shares -*
Tambahan Modal Disetor	24	1.881.882	1.881.882	*Additional Paid-In Capital*
Pengukuran Kembali atas				*Remeasurement of Post-Employment*
Imbalan Pasca Kerja		(126.881.342.334)	(70.904.900.061)	*Benefit Obligation*
Saldo laba				*Retained Earnings*
- Telah Ditentukan Penggunaannya		1.665.073.760.835	1.445.457.325.528	*Appropriated -*
- Belum Ditentukan Penggunaannya		1.101.471.094.577	878.465.741.226	*Unappropriated -*
TOTAL EKUITAS		**5.519.842.394.960**	**4.660.197.048.575**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**41.380.988.852.181**	**38.312.681.637.703**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
PENDAPATAN BUNGA				***INTEREST INCOME***
Pendapatan Bunga	26	3.504.934.937.519	3.347.855.439.821	*Interest Income*
Beban Bunga	27	(1.064.599.686.227)	(970.120.006.452)	*Interest Expense*
Jumlah Pendapatan Bunga Bersih		**2.440.335.251.292**	**2.377.735.433.369**	***Net Interest Income***
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				***OTHER OPERATING INCOME***
Pendapatan Operasional	28	222.943.984.674	215.885.835.798	*Operating Income*
Provisi dan Komisi	28	12.086.235.268	9.767.737.892	*Provision and Commission*
Lainnya	28	56.473.176.790	1.085.572.298	*Others*
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya		**291.503.396.732**	**226.739.145.988**	***Total Other Operating Income***
PEMULIHAN (PEMBENTUKAN) PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI				***RECOVERY (PROVISION) FOR IMPAIRMENT LOSSES***
Aset Keuangan	29	116.264.804.003	(148.944.965.537)	*Financial Assets*
Transaksi Rekening Administratif	22	93.730.043	3.029.469.404	*Transactions of Administrative Accounts*
Jumlah Pemulihan (Pembentukan) Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai		**116.358.534.046**	**(145.915.496.133)**	***Total Recovery (Provision) for Impairment Losses***
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				***OTHER OPERATING EXPENSES***
Gaji dan Tunjangan Karyawan	30	(908.986.417.227)	(857.370.759.001)	*Salaries and Employee Benefits*
Umum dan Administrasi	31	(429.182.535.035)	(372.758.501.000)	*General and Administrative*
Beban Modifikasi		(39.918.101.120)	(44.540.916.125)	*Modification Expenses*
Jumlah Beban Operasional Lainnya		**(1.378.087.053.382)**	**(1.274.670.176.126)**	***Total Other Operating Expenses***
LABA OPERASIONAL		**1.470.110.128.688**	**1.183.888.907.098**	***OPERATING INCOME***
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL				***NON-OPERATING INCOME (EXPENSE)***
Pendapatan Non Operasional	32	35.677.871.708	55.191.460.239	*Non-Operating Income*
Beban Non Operasional	32	(45.991.319.231)	(41.081.119.538)	*Non-Operating Expenses*
Jumlah Pendapatan Non Operasional		**(10.313.447.523)**	**14.110.340.701**	***Total Non Operating Income***
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		**1.459.796.681.165**	**1.197.999.247.799**	***INCOME BEFORE TAX EXPENSE***
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN (BEBAN)				***INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT***
Kini	18b	(387.969.935.980)	(343.799.588.163)	*Current Tax*
Tangguhan	18d	29.644.349.392	24.266.081.590	*Deferred Tax*
Jumlah Beban Pajak		**(358.325.586.588)**	**(319.533.506.573)**	***Total Tax Expense***
LABA TAHUN BERJALAN		**1.101.471.094.577**	**878.465.741.226**	***INCOME FOR THE YEAR***
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laporan Laba Rugi				***Items That Will Not Be Reclassified to Profit or Loss***
- Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	20	(71.764.669.581)	(14.981.663.737)	*Remeasurement of Post - Employement Benefit Obligation*
- Pajak Penghasilan Terkait	18d	15.788.227.308	3.295.966.022	*Related Income Tax -*
Jumlah Rugi Komprehensif Lain		**(55.976.442.273)**	**(11.685.697.715)**	***Total Other Comprehensive Loss***
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**1.045.494.652.304**	**866.780.043.511**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA PER SAHAM	44	404.740	411.318	*EARNINGS PER SHARE*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / *Issued and Fully Paid-up Capital*	Tambahan Modal Disetor / *Additional Paid-in Capital*	Pengukuran Kembali Imbalan Kerja Setelah Pajak/ *Remeasurement of post employment benefit Obligation-After Tax*	Saldo Laba / *Retained Earnings*			Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*
					Telah Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*			
					Cadangan Umum/ *General Reserve*	Cadangan Tujuan/ *Specific Reserve*	Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*	
Saldo 1 Januari 2025 / *Balance as of January 1, 2025*		**2.407.177.000.000**	**1.881.882**	**(70.904.900.061)**	**1.445.457.325.528**	**--**	**878.465.741.226**	**4.660.197.048.575**
Laba tahun berjalan/ *Profit for the year*		--	--	--	--	--	1.101.471.094.577	1.101.471.094.577
Penilaian Kembali Imbalan Kerja Setelah Pajak/ *Remeasurement of post employment benefit obligation*	20	--	--	(55.976.442.273)	--	--	--	(55.976.442.273)
Setoran modal/ *Issuance of share capital*	24	473.000.000.000	--	--	--	--	--	473.000.000.000
Pembagian laba/ *Distribution of net income :*								
Cadangan umum/ *General reserve*	25	--	--	--	219.616.435.307	--	(219.616.435.307)	--
Dividen / *Dividends*	25	--	--	--	--	--	(658.849.305.920)	(658.849.305.920)
Saldo 31 Desember 2025 / *Balance as of December 31, 2025*		**2.880.177.000.000**	**1.881.882**	**(126.881.342.334)**	**1.665.073.760.835**	**--**	**1.101.471.094.577**	**5.519.842.394.960**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

					Saldo Laba / *Retained Earnings*			
					Telah Ditentukan penggunaaannya/ *Appropriated*			
	Catatan/ *Notes*	**Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / *Issued and Fully Paid-up Capital***	**Tambahan Modal Disetor / *Additional Paid-in Capital***	**Pengukuran Kembali Imbalan Kerja Setelah Pajak/ *Remeasurement of post employment benefit Obligation-After Tax***	**Cadangan Umum/ *General Reserve***	**Cadangan Tujuan/ *Specific Reserve***	**Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated***	**Jumlah Ekuitas/ *Total Equity***
Saldo 1 Januari 2024 / *Balance as of January 1, 2024*		**2.050.257.000.000**	**2.340.338**	**(59.219.202.346)**	**1.260.900.248.199**	**-**	**738.228.309.317**	**3.990.168.695.508**
Laba tahun berjalan/ *Profit for the year*		--	--	--	--	--	878.465.741.226	878.465.741.226
Penilaian Kembali Imbalan Kerja Setelah Pajak/ *Remeasurament of post employment benefit obligation*	20	--	--	(11.685.697.715)	--	--	--	(11.685.697.715)
Setoran modal/ *Issuance of share capital*	24	356.920.000.000	(458.456)	--	--	--	--	356.919.541.544
Pembagian laba/ *Distribution of net income :*								
Cadangan umum/ *General reserve*	25	--	--	--	184.557.077.329	--	(184.557.077.329)	-
Dividen / *Dividends*	25	--	--	--	--	--	(553.671.231.988)	(553.671.231.988)
Saldo 31 Desember 2024/ *Balance as of December 31, 2024*		**2.407.177.000.000**	**1.881.882**	**(70.904.900.061)**	**1.445.457.325.528**	**--**	**878.465.741.226**	**4.660.197.048.575**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	Tahun yang Berakhir pada Tanggal: 31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari Pendapatan Bunga, Provisi, dan Komisi		3.468.219.766.908	3.325.426.375.190	*Receipts from Interest Income, Fee and Commissions*
Pembayaran Bunga		(1.062.740.941.157)	(967.549.242.090)	*Payments of Interest Expense*
Pembayaran Beban Tenaga Kerja		(906.796.368.064)	(735.821.419.561)	*Payments of Employee Expense*
Pembayaran Beban Umum dan Administrasi		(373.756.182.021)	(321.580.852.461)	*Payments of General and Administrative Expense*
Penerimaan dari Pendapatan Operasional dan Non Operasional Lainnya		265.822.041.836	224.163.788.098	*Receipts from Other Operating Income and Other Non-Operating Income*
Pembayaran Beban Non Operasional		(45.991.319.231)	(41.081.119.538)	*Non Operating Expense Paid*
Arus Kas Sebelum Perubahan Pada Aset dan Liabilitas Operasi		**1.344.756.998.271**	**1.483.557.529.638**	***Cash Flows Before Changes to Operating Assets and Liabilities***
(Kenaikan) / Penurunan dalam Aset Operasi				*(Increase) / Decrease In Operating Assets*
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	7	(192.360.193.748)	28.800.004.297	*Placements with Bank Indonesia and other Banks*
Efek-Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali		-	3.965.877.652.040	*Marketable Securities Purchased Under Resale Agreement*
Pinjaman yang Diberikan	9	(2.244.531.751.737)	(1.797.174.407.778)	*Loans*
Aset Keuangan Lainnya				
Aset Lain-lain	13	1.426.331.658	6.501.624.333	*Other Assets*
Kenaikan / (Penurunan) Liabilitas Operasi				*(Increase) / Decrease In Operating Liabilities*
Liabilitas Segera	14	7.670.644.654	(28.715.358.221)	*Liabilities Due Immediately*
Simpanan Nasabah	15	1.685.419.783.329	4.219.373.905.941	*Deposits from Customers*
Simpanan dari Bank Lain	16	413.966.308.026	(888.890.225.126)	*Deposits from Other Banks*
Liabilitas Lain-lain	22	72.802.945.548	(20.547.913.112)	*Other Liabilities*
Utang Pajak	18	(9.019.131.786)	(51.713.374.301)	*Taxes Payable*
Pembayaran Pajak Penghasilan	18	(378.662.347.661)	(340.266.587.176)	*Payment of Income Tax*
Penerimaan Pengembalian Pajak	18	-	57.677.097.293	
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		701.469.586.554	6.634.479.947.828	*Net Cash Provided by Operating Activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pembelian Efek-efek	8	(1.513.241.543.590)	(5.404.041.068.047)	*Acquisition from Marketable Securities*
Pembelian Aset Tetap	10	(44.600.642.117)	(35.677.351.024)	*Acquisitions of Fixed Assets*
Penjualan Aset Tetap	10	165.985.612	-	*Proceeds from Sale of Fixed Assests*
Pembelian Aset Takberwujud	11	(7.193.882.662)	(3.991.054.298)	*Acquisitions of Intangible Assests*
Pembayaran Aset Hak Guna		(468.245.883)	(9.987.014.734)	*Payment of Right-of-Use Assets*
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(1.565.338.328.640)	(5.453.696.488.103)	*Net Cash Used in Investing Activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penambahan Setoran Modal	23,24	473.000.000.000	356.919.541.544	*Proceeds from Issuance of Share Capital*
Pembayaran Pinjaman yang Diterima	17	(441.970.584)	(42.296.794.237)	*Payments of Borrowings*
Pembayaran Liabiltas Sewa	45	(21.311.933.334)	(9.624.383.458)	*Payments of Lease Liabilities*
Pembayaran Dividen	25	(658.849.305.920)	(553.671.231.988)	*Dividend Paid*
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(207.603.209.838)	(248.672.868.139)	*Net Cash Used in Financing Activities*
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas		**(1.071.471.951.924)**	**932.110.591.586**	***Net Increase (Decrease) Cash and Cash Equivalents***
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun		**6.465.667.511.109**	**5.533.556.919.523**	***Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year***
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun		**5.394.195.559.185**	**6.465.667.511.109**	***Cash and Cash Equivalents at End of the Year***
Komponen Kas dan Setara Kas:				***Components of Cash and Cash Equivalents:***
Kas	4	868.945.822.140	580.735.597.835	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	5	2.624.589.812.614	2.694.875.382.728	*Current Account with Bank Indonesia*
Giro pada Bank Lain	6	50.635.186.507	45.119.172.455	*Current Account with Other Banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Jangka Waktu Jatuh Tempo Tiga Bulan atau Kurang Sejak Tanggal Perolehan	7	1.850.024.737.924	3.144.937.358.091	*Placement with Bank Indonesia and Other Banks - Maturing within Three Months Since Aquisition Date*
Jumlah Kas dan Setara Kas		**5.394.195.559.185**	**6.465.667.511.109**	***Total Cash and Cash Equivalents***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT JAMKRIDA BALI MANDARA (Perseroda) DAN ENTITAS ANAK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

Memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen perusahaan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana., S.T
   Alamat Kantor : Jl. Surapati No. 8 Denpasar
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : I Made Gde Budi Dwipayana., S.E., Ak.
   Alamat Kantor : Jl. Surapati No. 8 Denpasar
   Jabatan : Direktur Operasional

3. Nama : Agus Adi Sana Putra., S.E., M.M
   Alamat Kantor : Jl. Surapati No. 8 Denpasar
   Jabatan : Direktur Keuangan

Untuk dan atas nama Direksi PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan Entitas Anak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan Entitas Anak menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan Entitas Anak;

2. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;

   b. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi
Denpasar, 24 Februari 2026

Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana, S.T	**I Made Gde Budi Dwipayana, S.E., Ak**	**Agus Adi Sana Putra, S.E., M.M**
Direktur Utama	Direktur Operasional	Direktur Keuangan

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN
Certified Public Accountants
License No. : 1011 / km.1 / 2010
Jl. Muding Indah I No. 5 Denpasar - 80361, Bali - Indonesia
Tel./Fax : (62-361) 434-884
E-mail : jmbali@johanmalonda.com www.johanmalonda.com
With Offices in Jakarta, Surabaya and Medan

bakertilly
NETWORK MEMBER
www.bakertilly.global

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00012/3.0225/AU.1/09/1756-4/1/II/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)

Opini

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian **PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan Entitas Anak ("Perusahaan dan Entitas Anak")**, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2025 serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian, dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian **PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan Entitas Anak** tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan dan Entitas Anak berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai, kemampuan Perusahaan dan Entitas Anak dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan dan Entitas Anak atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak.

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan dan Entitas Anak.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan dan Entitas Anak untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan dan Entitas Anak tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN
NIU-KAP: KEP-1011/KM.1/2010

I Wayan Wirawan, S.E., M.M., CPA
NRAP AP. 1756

00012

Denpasar, 24 Februari 2026

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

ASET	Catatan	2025	2024
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2d,4	291.515.072.313	184.754.877.134
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(193.497.284)	(189.894.700)
Deposito Berjangka	5	26.990.000.000	28.040.000.000
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(5.840.758.693)	(3.965.210.866)
Efek - Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	2g,12	8.500.000.000	-
Investasi Lancar Lainnya	6	100.000.000	-
Piutang Co-Guarantee	2e,7	89.865.565.247	75.249.928.367
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(70.423.092.017)	(40.982.717.008)
Piutang Usaha	2e,8	2.801.912.527	1.574.496.149
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(635.948.507)	(635.948.507)
Piutang Lain-Lain	9	469.700.862	156.940.278
Uang Muka	10	520.794.272	293.969.390
Biaya Dibayar di Muka - Bagian Lancar	2f,11	22.659.359.474	3.751.136.811
Jumlah Aset Lancar		**366.329.108.192**	**248.047.577.049**
ASET TIDAK LANCAR			
Efek	2g,12	117.402.195.272	105.160.733.907
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(3.031.786.472)	(3.144.223.833)
Biaya Dibayar di Muka - Bagian Tidak Lancar	2f,11	51.378.776.022	94.805.700.412
Aset Lain-Lain	13	31.405.982.096	23.879.682.439
Aset Tetap dan Inventaris	2h,14	28.706.930.398	28.271.127.201
Dikurangi: Akumulasi Penyusutan		(4.433.521.148)	(4.039.316.058)
Aset Tidak Berwujud	2i,15	1.180.725.022	950.438.672
Dikurangi: Akumulasi Amortisasi		(599.877.197)	(476.785.957)
Aset Pajak Tangguhan	2s,16	121.628.102	78.351.250
Jumlah Aset Tidak Lancar		**222.131.052.096**	**245.485.708.034**
JUMLAH ASET		**588.460.160.288**	**493.533.285.084**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

LIABILITAS DAN EKUITAS	Catatan	2025	2024
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Klaim	2m,17	1.008.142.072	1.182.047.821
Utang Pajak	2r,18	13.650.310	22.143.869
Utang Co-Guarantee	19	-	1.654.397.677
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	2n,20	5.021.780.730	4.647.759.985
Utang Lancar Lainnya	21	3.251.150.661	2.807.605.351
Penampungan Sementara Jasa Jaminan	2o,22	2.891.767.759	1.468.061.900
Dana Cadangan Klaim	2m,23	41.416.990.694	36.803.517.524
Corporate Social Resposibility (CSR)	24	643.882.569	716.630.424
Utang Setoran Modal Pemegang Saham	25	1.000.000.000	8.500.000.000
Pendapatan Diterima di Muka - Bagian Jangka Pendek	2p,26	75.475.941.065	12.814.452.866
Liabilitas Lain-Lain - Bagian Jangka Pendek	28	2.166.666.640	3.441.582.666
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**132.889.972.499**	**74.058.200.083**
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pendapatan Diterima di Muka - Bagian Jangka Panjang	2p.26	185.869.550.501	200.037.271.311
Liabilitas Imbalan Pascakerja	2r,27	528.645.298	331.654.416
Liabilitas Lain-Lain - Bagian Jangka Panjang	28	1.597.222.237	4.588.860.897
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**187.995.418.035**	**204.957.786.624**
JUMLAH LIABILITAS		**320.885.390.534**	**279.015.986.707**
EKUITAS			
Modal Saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebanyak 232.121 dan 184.621 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham	29	232.121.200.000	184.621.200.000
Cadangan Umum	29	11.113.690.358	9.341.512.966
Cadangan Tujuan	29	4.677.694.478	3.614.388.043
Selisih Transaksi dengan Kepentingan Non-Pengendali	29	1.145.537.839	-
Saldo Laba	29	15.734.293.206	12.899.314.327
Jumlah		**264.792.415.881**	**210.476.415.336**
Kepentingan Non-Pengendali	29	2.782.353.873	4.040.883.041
JUMLAH EKUITAS		**267.574.769.754**	**214.517.298.377**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**588.460.160.288**	**493.533.285.084**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2025	2024
PENDAPATAN USAHA	2k,30	**133.309.879.184**	**117.012.433.887**
BEBAN USAHA	2k,31	**(126.195.029.703)**	**(111.132.929.307)**
LABA BRUTO		**7.114.849.481**	**5.879.504.580**
PENDAPATAN (BEBAN) DI LUAR USAHA POKOK			
Pendapatan di Luar Usaha Pokok	32	1.952.491.707	1.572.154.528
Beban di Luar Usaha Pokok	33	(152.017.900)	(337.762.872)
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) DI LUAR USAHA POKOK		**1.800.473.807**	**1.234.391.656**
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**8.915.323.289**	**7.113.896.237**
BEBAN PAJAK			
Kini	18	-	(32.149.370)
Tangguhan	16	(138.085.305)	7.503.891
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		**8.777.237.983**	**7.089.250.758**
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN			
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pascakerja	27	(824.373.440)	(53.015.445)
Pajak Penghasilan Terkait	16	181.362.157	11.663.398
TOTAL LABA BERSIH KOMPREHENSIF		**8.134.226.701**	**7.047.898.712**
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik Entitas Induk		8.794.522.338	7.088.709.569
Kepentingan Non-Pengendali		(17.284.355)	541.190
JUMLAH		**8.777.237.983**	**7.089.250.758**
LABA BERSIH KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik Entitas Induk		8.151.511.055	7.047.357.522
Kepentingan Non-Pengendali		(17.284.355)	541.190
JUMLAH		**8.134.226.700**	**7.047.898.712**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk								
		Saldo Laba Yang Telah Ditentukan Penggunaannya							
	Modal Disetor	Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Cadangan Lainnya	Selisih Transaksi dengan Kepentingan Non-Pengendali	Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah	Kepentingan Non-Pengendali	Jumlah Ekuitas
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	**165.775.000.000**	**8.036.333.787**	**2.570.244.700**	**-**	**-**	**10.028.530.177**	**186.410.108.663**	**9.819.442.584**	**196.229.551.247**
Penambahan Modal Disetor	18.846.200.000	-	-	-	-	-	18.846.200.000	-	**18.846.200.000**
Pembentukan Cadangan Umum	-	1.305.179.179	-	-	-	(1.305.179.179)	-	-	**-**
Pembentukan Cadangan Tujuan	-	-	1.044.143.343	-	-	(1.044.143.343)	-	-	**-**
Pembagian Dividen	-	-	-	-	-	(1.566.215.014)	(1.566.215.014)	-	**(1.566.215.014)**
Corporate Social Responsibility (CSR)	-	-	-	-	-	(261.035.836)	(261.035.836)	-	**(261.035.836)**
Dampak Pengambilalihan Kepemilikan Non-Pengendali	-	-	-	-	-	-	-	(5.779.100.733)	**(5.779.100.733)**
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	7.047.357.522	7.047.357.522	541.190	**7.047.898.711**
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	**184.621.200.000**	**9.341.512.966**	**3.614.388.043**	**-**	**-**	**12.899.314.327**	**210.476.415.336**	**4.040.883.041**	**214.517.298.377**
Penambahan Modal Disetor	47.500.000.000	-	-	-	-	-	47.500.000.000	-	**47.500.000.000**
Pembentukan Cadangan Umum	-	1.772.177.392	-	-	-	(1.772.177.392)	-	-	**-**
Pembentukan Cadangan Tujuan	-	-	1.063.306.435	-	-	(1.063.306.435)	-	-	**-**
Pembagian Dividen	-	-	-	-	-	(2.126.612.871)	(2.126.612.871)	-	**(2.126.612.871)**
Corporate Social Responsibility (CSR)	-	-	-	-	-	(354.435.478)	(354.435.478)	-	**(354.435.478)**
Dampak Pengambilalihan Kepemilikan Non-Pengendali	-	-	-	-	-	-	-	(78.226.380)	**(78.226.380)**
Penyesuaian Kepentingan Non-Pengendali atas Transaksi Ekuitas Entitas Anak	-	-	-	-	1.145.537.839	-	1.145.537.839	(1.145.537.839)	**-**
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	8.151.511.055	8.151.511.055	(17.284.355)	**8.134.226.700**
Transaksi dengan Kepentingan Non-Pengendali									
Dividen dari Entitas Anak	-	-	-	-	-	-	-	(17.480.594)	**(17.480.594)**
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025	**232.121.200.000**	**11.113.690.358**	**4.677.694.478**	**-**	**1.145.537.839**	**15.734.293.207**	**264.792.415.881**	**2.782.353.873**	**267.574.769.754**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Imbal Jasa Penjaminan	158.286.084.560	110.387.628.533
Penerimaan Piutang Subrogasi	2.475.258.499	4.377.939.242
Penerimaan R/I Com atas Reasuransi Penjaminan	216.799.292	8.218.282.264
Penerimaan Bunga dan Adminsitrasi Provisi	4.193.774.550	3.396.211.263
Penerimaan dari Aktivitas Operasi Lainnya	2.556.783.047	2.759.342.411
Pembayaran IJP Co-guarantee/IJP/Premi Reasuransi	(17.734.005.985)	(41.506.817.145)
Pembayaran Klaim pada Terjamin	(35.026.156.571)	(23.645.520.999)
Pembayaran Biaya-biaya	(28.054.014.186)	(21.518.425.763)
Pembayaran untuk Aktivitas Lainnya	(144.962.300)	(248.448.318)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**86.769.560.907**	**42.220.191.488**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan dari Investasi	14.673.598.531	54.701.934.870
Pembayaran Investasi Lainnya	(6.134.669.849)	(41.132.515.650)
Penempatan Investasi yang Diperkenankan	(20.791.461.365)	(29.070.000.000)
Akuisisi Entitas Anak	(78.226.380)	(5.780.290.482)
Perolehan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud	(938.177.258)	(1.268.210.480)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(13.268.936.321)**	**(22.549.081.742)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari Setoran Modal	40.000.000.000	8.500.000.000
Penerimaan dari Aktivitas Pendanaan Lainnya	2.835.483.827	2.349.322.522
Penerimaan Pinjaman	-	6.500.000.000
Pembayaran Pinjaman	(4.259.381.059)	(6.284.090.884)
Pembayaran Deviden dan Pembagian Laba	(5.316.532.176)	(4.176.573.372)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	**33.259.570.592**	**6.888.658.266**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	**106.760.195.179**	**26.559.768.012**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**184.754.877.134**	**158.195.109.122**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**291.515.072.313**	**184.754.877.134**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT PURI RAHARJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025

RUMAH SAKIT UMUM PURI RAHARJA
Jl.WR. Supratman No 14 & 19 DPS 80233 BALI Telp. 222013 / 229118 Fax. (0361) 242537
website : www.puriraharja.com / email : puriraharja@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNGJAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT. PURI RAHARJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : dr. Gede Bagus Darmayasa, M.M.,M.Repro
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl. W.R. Supratman No. 14 & 19 Denpasar, Bali

Nama : dr. Anak Agung Made Naradipa, MARS
Jabatan : Direktur Pelayanan, Keperawatan dan Marketing
Alamat : Jl. W.R. Supratman No. 14 & 19 Denpasar, Bali

Nama : dr. I Dewa Putu Bagus Supriadi, MARS
Jabatan : Direktur SDM, Umum dan Keuangan
Alamat : Jl. W.R. Supratman No. 14 & 19 Denpasar, Bali

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP)
3. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Denpasar, 25 Maret 2026
PT Puri Raharja

METERAI TEMPEL
PERSEROAN TERBATAS PURI RAHARJA DENPASAR - BALI

(dr. Gede Bagus Darmayasa, M.M.,M.Repro)
Direktur Utama

(dr. Anak Agung Made Naradipa, MARS)
Direktur Pelayanan, Keperawatan dan Marketing

(dr. I Dewa Putu Bagus Supriadi, MARS)
Direktur SDM, Umum dan Keuangan

KETUT BUDIARTHA DAN ANGGIRIAWAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
LICENSE 321/KM.1/2019

Jalan Padang Mekar II, No. 22,
Padangsambian, Denpasar,
Bali 80117

Tlp. 0361-9078774,
E. info@kapbud.com
www.kapbud.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No : 00014/2.1266/AU.8/05/1612-1/1/III/2026

Pengguna Laporan Keuangan
PT Puri Raharja

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **PT Puri Raharja**, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal **31 Desember 2025**, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **PT Puri Raharja** tanggal **31 Desember 2025**, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP) di Indonesia.**

Dasar Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan **Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)**. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam bagian **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan** dalam laporan kami.

Kami independen terhadap Entitas sesuai dengan **ketentuan etika yang relevan** dalam pelaksanaan audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya sesuai dengan ketentuan tersebut.

Kami meyakini bahwa bukti audit yang kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal

Kami menarik perhatian pada **Catatan 5** atas laporan keuangan, yang menjelaskan bahwa **PT Puri Raharja menerapkan SAK-EP untuk pertama kalinya pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025**. Sehubungan dengan penerapan pertama kali tersebut, Entitas telah melakukan **penyajian kembali (restatement)** atas angka-angka komparatif/periode sebelumnya agar sesuai dengan penerapan SAK-EP, sebagaimana diungkapkan dalam **Catatan 5.**

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal Lainnya

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 disajikan sebagai angka koresponding atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 yang diaudit oleh auditor independen lain dengan Nomor: 00031/2.1274/AU.2/05/0463-4/1/III/2025 tertanggal 27 Maret 2025.

KETUT BUDIARTHA DAN ANGGIRIAWAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
LICENSE 321/KM.1/2019

Jalan Padang Mekar II, No. 22,
Padangsambian, Denpasar,
Bali 80117

Tlp. 0361-9078774,
E. info@kapbud.com
www.kapbud.com

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP) di Indonesia**, serta atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan dasar akuntansi kelangsungan usaha kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami.

Keyakinan memadai merupakan tingkat keyakinan yang tinggi, namun bukan merupakan jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi salah saji material ketika hal itu ada. Salah saji dapat timbul dari kecurangan atau kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, secara wajar diharapkan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional sepanjang audit. Kami juga:

1. Mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini kami.
2. Memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat dalam kondisi tersebut, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Entitas.
3. Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi serta pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
4. Menyimpulkan ketepatan penggunaan dasar akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material terkait peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

KETUT BUDIARTHA DAN ANGGIRIAWAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
LICENSE 321/KM.1/2019

Jalan Padang Mekar II, No. 22,
Padangsambian, Denpasar,
Bali 80117

Tlp. 0361-9078774,
E. info@kapbud.com
www.kapbud.com

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

5. Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, antara lain, ruang lingkup dan waktu audit yang direncanakan serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi selama audit kami.

Denpasar, 25 Maret 2026
Kantor Akuntan Publik
Ketut Budiartha dan Anggiriawan

Dr. Putu Budi Anggiriawan, S.E., M.Si., CA., CPA., ASEAN CPA.
Nomor Registrasi Akuntan Publik : AP. 1612

00014

PT PURI RAHARJA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	3b, 4a	13.247.648.029	16.075.690.434
Piutang	3c, 4b	8.661.079.618	7.561.656.266
Persediaan	3d, 4c	2.078.897.122	2.402.944.326
Biaya Dibayar Dimuka	3e, 4d	1.150.372.958	934.766.441
Uang Muka Pajak	4e	2.181.676.318	1.788.318.722
Jumlah Aset Lancar		**27.319.674.046**	**28.763.376.190**
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap - Nilai Buku	3f, 4f	38.242.896.345	32.171.681.960
Aset Lain-lain	4g	2.795.948	213.330.900
Jumlah Aset Tidak Lancar		**38.245.692.293**	**32.385.012.860**
Jumlah Aset		**65.565.366.339**	**61.148.389.050**
Liabilitas dan Ekuitas			
Liabilitas			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang	4h	5.758.762.332	4.936.952.027
Perpajakan	4i	447.495.703	92.066.692
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	4j	29.625.732	-
Pendapatan Diterima Dimuka	4k	3.000.000	-
Utang Bank Jangka Pendek	4l	280.212.277	419.912.277
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**6.519.096.044**	**5.448.930.996**
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang Bank Jangka Panjang	4l	5.763.333.335	1.969.999.998
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	3i, 4m	2.942.253.543	3.242.465.534
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**8.705.586.878**	**5.212.465.532**
Jumlah Liabilitas		**15.224.682.922**	**10.661.396.528**
Ekuitas			
Modal Saham	4n	15.000.000.000	15.000.000.000
Saldo Laba	4o	35.340.683.417	35.486.992.522
Jumlah Ekuitas		**50.340.683.417**	**50.486.992.522**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas		**65.565.366.339**	**61.148.389.050**

Denpasar, 25 Maret 2026
PT Puri Raharja



dr. Gede Bagus Darmayasa, M.M., M.Repro
Direktur Utama

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT PURI RAHARJA
LAPORAN LABA (RUGI)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
Pendapatan	3g, 4p	93.195.099.621	96.074.913.939
Harga Pokok Penjualan	4q	57.271.420.833	58.288.287.340
Laba Kotor		**35.923.678.787**	**37.786.626.599**
Beban Operasional	3g, 4r	36.056.604.272	37.274.522.766
Laba (Rugi) Operasional		**(132.925.485)**	**512.103.833**
Pendapatan (Beban) Non Operasional	3g, 4s	588.854.960	867.653.877
Laba Sebelum Pajak		**455.929.475**	**1.379.757.710**
Manfaat Pajak Tangguhan	3h, 4i	2.795.948	-
Pajak Kini	3h, 4i	(225.428.720)	(475.934.360)
Laba Setelah Pajak		**233.296.702**	**903.823.350**

Denpasar, 25 Maret 2026
PT Puri Raharja



dr. Gede Bagus Darmayasa, M.M., M.Repro
Direktur Utama

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT PURI RAHARJA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Saham	Cadangan Umum	Saldo Laba	Jumlah
Saldo 31 Desember 2023	**15.000.000.000**	**6.242.816.201**	**29.401.917.495**	**50.644.733.696**
Deviden	-	-	(1.061.564.524)	(1.061.564.524)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	903.823.350	903.823.350
Saldo 31 Desember 2024	**15.000.000.000**	**6.242.816.201**	**29.244.176.321**	**50.486.992.522**
Deviden	-	-	(379.605.807)	(379.605.807)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	233.296.702	233.296.702
Saldo 31 Desember 2025	**15.000.000.000**	**6.242.816.201**	**29.097.867.216**	**50.340.683.417**

PT PURI RAHARJA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba (Rugi) Bersih	233.296.702	903.823.350
Penyesuaian untuk Rekonsiliasi Laba (Rugi) Bersih		
Kas bersih diperoleh dari kegiatan usaha		
Penyesuaian Akumulasi Penyesuaian Aset Tetap		
Beban Penyusutan Aset Tetap	4.396.126.760	3.976.009.959
Penghapusan Aset Tetap	-	-
Penyesuaian Cadangan Penghapusan Piutang		
Beban Cadangan Penghapusan Piutang	-	(162.583.014)
Pembalikan Cadangan Penghapusan Piutang	-	-
Perubahan Aset dan Kewajiban Operasi:		
(Kenaikan) Penurunan Piutang Usaha	(1.099.423.352)	1.049.348.337
(Kenaikan) Penurunan Persediaan	324.047.204	(7.522.097)
(Kenaikan) Penurunan Uang Muka Pajak	(393.357.596)	521.102.061
(Kenaikan) Penurunan Biaya Dibayar di Muka	(215.606.517)	(80.768.515)
Kenaikan (Penurunan) Utang	821.810.305	(2.320.715.697)
Kenaikan (Penurunan) Utang Pajak	355.429.011	(228.119.933)
Kenaikan (Penurunan) Biaya Dibayar Dimuka	29.625.732	-
Kenaikan (Penurunan) Pendapatan Diterima Dimuka	3.000.000	-
Kenaikan (Penurunan) Utang Bank	(139.700.000)	300.000
Kenaikan (Penurunan) Imbalan Pascakerja	(300.211.991)	(340.415.302)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**4.015.036.258**	**3.310.459.149**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pengadaan Aset Tetap	(10.467.341.145)	(3.876.958.777)
Aset Lainnya	210.534.952	(213.330.900)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**(10.256.806.193)**	**(4.090.289.677)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Kenaikan (Penurunan) Utang Jangka Panjang	3.793.333.337	(1.188.000.000)
Kenaikan (Penurunan) Dividen	(379.605.807)	(1.061.564.524)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**3.413.727.530**	**(2.249.564.524)**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	**(2.828.042.405)**	**(3.029.395.052)**
Kas dan Setara Kas Awal Periode	**16.075.690.434**	**19.105.085.486**
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	**13.247.648.029**	**16.075.690.434**
Kas dan Setara Kas Terdiri Dari :		
Kas	48.051.440	85.889.858
Bank	13.199.596.590	15.989.800.576
JUMLAH KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	**13.247.648.029**	**16.075.690.434**

ASKRIDA
PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA

PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA
NERACA KONVENSIONAL
PER 31 Desember 2025

AKTIVA		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Deposito	705,889,130,000	*Utang Klaim*	551,467,695,567
Sertifikat Deposito	0	*Estimasi Klaim Retensi Sendiri*	4,810,086,281,758
Surat Berharga	774,979,426,876	*Premi yg belum merupakan pendapatan*	14,694,754,400,760
Penyertaan	383,932,863,037	*Utang Reasuransi*	22,336,797,698
Properti	48,790,580,031	*Utang Komisi*	38,408,209,194
Properti pinjaman hipotek	0	*Utang Pajak*	4,823,497,589
Investasi Lain	2,444,657,126	*Biaya yg masih harus dibayar*	12,402,383,158
		Utang Sewa Guna Usaha	2,106,396,749
		Utang Lain-lain	397,214,015,452
JUMLAH INVESTASI	1,916,036,657,070	JUMLAH KEWAJIBAN	20,533,599,677,925
Kas dan Bank	100,101,695,042	*Utang Jangka Panjang*	0
Piutang Premi	57,424,734,047		
Piutang Reasuransi	45,754,634,316		
Aset Reasuransi	2,691,114,180,483	**EKUITAS**	
Piutang Hasil Investasi	9,392,153,365	*Modal Dasar 300 Lbr @ RP.10.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor*	324,720,000,000
Piutang Lain	0	*Titipan Modal Disetor*	0
		Tambahan Modal Disetor	18,285,906,904
Biaya Dibayar Dimuka	2,091,065,653	*Agio Saham*	0
Aktiva Tetap	109,799,565,803	*Cadangan umum*	362,938,562,142
Aktiva Lain-lain	11,032,629,244	*Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak*	47,808,650,480
Aktiva Pajak Tangguhan	37,752,852,477	*Cadangan Khusus*	110,000,000
		Laba (Rugi) ditahan	240,765,133,983
		Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu	-22,472,573,206,866
		Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan	5,924,845,442,932
		Jumlah Ekuitas	-15,553,099,510,425
JUMLAH AKTIVA	**4,980,500,167,500**	**JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS**	**4,980,500,167,500**

Print Stamp : 112617202602O8

S.E. & O.
JAKARTA, 15 Januari 2026
PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA
DIREKSI

YUSAS NUGRAHA
DIREKTUR UTAMA

MARAH DENY ALDRIANSYAH
DIREKTUR OPERASIONAL

KANTOR PUSAT :
ASKRIDA TOWER, Jl. Pramuka Raya Kav. 151, Jakarta Timur 13120
Telp. (021) 8191212 (Hunting) Fax. (021) 29827215, 29827216, 29827217 E-mail : info@askrida.co.id
Anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia No. B. 0018.2002

ASKRIDA
PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA

PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA
LABA RUGI KONVENSIONAL
PER 31 Desember 2025

KETERANGAN	NILAI
Pendapatan Premi	
Premi Bruto	1,761,157,448,605
Premi Reasuransi	247,285,379,414
Kenaikan (Penurunan) Premi yang belum merupakan pendapatan	-7,095,415,941,078
Jumlah Pendapatan Premi	8,609,288,010,269
Beban Underwriting	
Beban Klaim	
Klaim Bruto	2,795,560,457,183
Klaim Reasuransi	515,037,962,911
Kenaikan (penurunan) estimasi klaim retensi sendiri	696,793,836,313
Jumlah Beban Klaim	2,977,316,330,585
Beban Komisi Netto	117,664,495,366
Beban Underwriting Lain Netto	16,546,550,900
Jumlah Beban Underwriting	3,111,527,376,851
Hasil Underwriting	5,497,760,633,418
Hasil Investasi	111,374,993,297
Beban Usaha	307,493,280,980
Laba Usaha	5,301,642,345,735
Penghasilan (Beban) Lain-lain	619,713,786,631
Laba Sebelum Pajak	5,921,356,132,366
Pajak Penghasilan	0
Pajak Penghasilan (Beban) Tangguhan	3,489,310,566
LABA BERSIH	**5,924,845,442,932**

Print Stamp : 11245620260206

S.E. & O.
JAKARTA, 15 Januari 2026
PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA
DIREKSI

YUSAS NUGRAHA
DIREKTUR UTAMA

MARAH DENY ALDRIANSYAH
DIREKTUR OPERASIONAL

KANTOR PUSAT :
ASKRIDA TOWER, Jl. Pramuka Raya Kav. 151, Jakarta Timur 13120
Telp. (021) 8191212 (Hunting) Fax. (021) 29827215, 29827216, 29827217 E-mail : info@askrida.co.id
Anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia No. B. 0018.2002

ASKRIDA
PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA

PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA
LABA RUGI KOMPREHENSIF
PER 31 Desember 2025

KETERANGAN	NILAI
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	5,924,845,442,932
Pendapatan (beban) komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	41,863,672,400
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	5,966,709,115,332
Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada :	
Pemilik entitas induk	5,966,709,115,332
Kepentingan nonpengendali	0
TOTAL	**5,966,709,115,332**

Print Stamp : 11265720260206

S.E. & O.
JAKARTA, 15 Januari 2026
PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA
DIREKSI

YUSAS NUGRAHA
DIREKTUR UTAMA

MARAH DENY ALDRIANSYAH
DIREKTUR OPERASIONAL

KANTOR PUSAT :
ASKRIDA TOWER, Jl. Pramuka Raya Kav. 151, Jakarta Timur 13120
Telp. (021) 8191212 (Hunting) Fax. (021) 29827215, 29827216, 29827217 E-mail : info@askrida.co.id
Anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia No. B. 0018.2002

PT JASAMARGA BALI TOL

Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

JASAMARGA
BALI MANDARA

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT JASAMARGA BALI TOL

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : I Ketut Adiputra Karang
   Alamat Kantor : Jl. Raya Pelabuhan Benoa Nomor 88 Pedungan, Denpasar Selatan, 80222, Denpasar, Bali
   Alamat Domisili Sesuai KTP atau Kartu Identitas Lain : Jl. Cipinang Baru I No. 34 A, Cipinang, Pulo Gadung, Jakarta Timur
   Nomor Telpon : (0361) 725326
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : I Wayan Eka Saputra
   Alamat Kantor : Jl. Raya Pelabuhan Benoa Nomor 88 Pedungan, Denpasar Selatan, 80222, Denpasar, Bali
   Alamat Domisili Sesuai KTP atau Kartu Identitas Lain : Jl. Selat Bali No.7, Br/Link. Pesanggaran, Pedungan, Denpasar Selatan
   Nomor Telpon : (0361) 725326
   Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa :
1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT Jasamarga Bali Tol;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; dan
   a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
3. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Denpasar, 27 Februari 2026



(I Ketut Adiputra Karang)	(I Wayan Eka Saputra)
Direktur Utama	Direktur Keuangan

PT Jasamarga Bali Tol
Grha Bali Tol
Jl. Raya Pelabuhan Benoa No. 88,
Denpasar Selatan, 80222 - Bali.
Tel +62 361 725326
www.jasamargabalitol.co.id

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor : 00151/2.1030/AU.1/06/0181-4/1/II/2026

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Jasamarga Bali Tol

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jasamarga Bali Tol ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan, tetapi tidak mencantumkan laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain jika ada yang teridentifikasi di atas dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami, membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola dan melakukan tindakan tepat yang akan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, Registered Public Accountants is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu level keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi atas kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Benny Andria
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0181

Jakarta, 27 Februari 2026

00151

PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2025 Rp	2024 Rp
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	4,27	14.057	31.607
Dana Dibatasi Penggunaannya	5,27	9.123	8.039
Piutang Usaha dan Lain-lain	6,27	524	738
Biaya Dibayar di Muka	7	392	77
JUMLAH ASET LANCAR		**24.096**	**40.461**
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap - Bersih	8	984	47
Hak Pengusahaan Jalan Tol - Bersih	9	1.860.965	1.848.455
Dana Dibatasi Penggunaannya	5,27	4.322	4.261
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		**1.866.271**	**1.852.763**
JUMLAH ASET		**1.890.367**	**1.893.224**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2025 Rp	2024 Rp
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha			
Pihak Berelasi	10,27	1.200	15.565
Pihak Ketiga	10	--	160
Utang Lain-lain	11,27	5.299	5.299
Beban Akrual	12,27	36.448	6.500
Pendapatan Diterima di Muka		143	189
Utang Pajak	17a	469	1.564
Liabilitas Jangka Panjang yang			
Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun :			
Utang Bank	13, 27	244.025	205.673
Liabilitas Sewa	15	633	--
Provisi Pelapisan Jalan Tol	16	10.010	--
Liabilitas Imbalan Kerja	18	437	--
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		**298.664**	**234.950**
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi			
Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun:			
Utang Bank	13,27	165.564	408.593
Liabilitas Sewa	15	379	--
Provisi Pelapisan Jalan Tol	16	13.814	12.732
Utang Pemegang Saham	14,27	851.750	747.750
Beban Akrual	12,27	293.929	203.117
Liabilitas Pajak Tangguhan	17.e	142.393	142.065
Liabilitas Imbalan Liabilitas	18	6.547	5.536
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		**1.474.376**	**1.519.793**
JUMLAH LIABILITAS		**1.773.040**	**1.754.743**
EKUITAS			
Modal Saham - Nilai Nominal Rp1.000.000			
(Rupiah Penuh) per Saham			
Modal Dasar - 1.440.434 Saham			
Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh -			
945.434 Saham	19	945.434	945.434
Tambahan Modal Disetor	20	112.102	112.102
Akumulasi Rugi		(939.900)	(919.404)
Pengukuran Kembali Liabilitas			
Imbalan Kerja	18	(309)	349
JUMLAH EKUITAS		**117.327**	**138.481**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**1.890.367**	**1.893.224**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2025 Rp	2024 Rp
PENDAPATAN			
Pendapatan Tol	21	214.919	194.479
Pendapatan Lainnya	22	1.523	1.347
BEBAN POKOK PENDAPATAN			
Beban Tol	23,27	(84.089)	(72.684)
LABA BRUTO		**132.353**	**123.142**
Beban Umum dan Administrasi	24	(23.548)	(24.979)
Beban Lain-lain		(680)	(661)
LABA USAHA		**108.125**	**97.502**
Penghasilan Keuangan	26,27	692	863
Beban Keuangan	25,27	(128.985)	(128.186)
RUGI SEBELUM PAJAK		**(20.168)**	**(29.821)**
(BEBAN) MANFAAT PAJAK			
Pajak Tangguhan	17.b	(328)	29.184
RUGI TAHUN BERJALAN		**(20.496)**	**(637)**
(RUGI) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi :			
Pengukuran Kembali Program Liabilitas Imbalan Kerja	18	(658)	429
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**(21.154)**	**(208)**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Rp	Tambahan Modal Disetor Rp	Akumulasi Rugi Rp	Pengukuran Kembali Program Imbalan Kerja Rp	Jumlah Ekuitas Rp
Saldo 1 Januari 2024		**945.434**	**112.102**	**(918.767)**	**(80)**	**138.689**
Rugi Tahun Berjalan		--	--	(637)	--	(637)
Penghasilan Komprehensif Lain	18	--	--	--	429	429
Saldo 31 Desember 2024		**945.434**	**112.102**	**(919.404)**	**349**	**138.481**
Rugi Tahun Berjalan		--	--	(20.496)	--	(20.496)
Penghasilan Komprehensif Lain	18	--	--	--	(658)	(658)
Saldo 31 Desember 2025		**945.434**	**112.102**	**(939.900)**	**(309)**	**117.327**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2025 Rp	2024 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan Kas dari Pendapatan Tol		214.862	194.969
Penerimaan Kas dari Pendapatan Usaha Lainnya	22	1.523	1.347
Pembayaran kepada Pemasok		(59.721)	(93.546)
Pembayaran kepada Pegawai		(18.023)	(17.950)
Penerimaan Bunga	26	692	863
Pembayaran Bunga dan Keuangan		(38.535)	(51.587)
Kas Bersih yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi		**100.798**	**34.096**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penambahan Hak Pengusahaan Jalan Tol		(15.722)	(25.666)
Pengurangan Dana Dibatasi Penggunaannya	5	--	12.630
Penambahan Dana Dibatasi Penggunaannya	5	(1.145)	--
Kas Bersih yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi		**(16.867)**	**(13.036)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Pembayaran Liabilitas Sewa	15	(595)	--
Penerimaan Utang Pemegang Saham	14	104.000	118.750
Pembayaran Utang Bank	13	(204.886)	(167.633)
Kas Bersih yang Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan		**(101.481)**	**(48.883)**
PENURUNAN NETO KAS DAN BANK		**(17.550)**	**(27.823)**
KAS DAN BANK AWAL TAHUN		**31.607**	**59.430**
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	**4**	**14.057**	**31.607**

Informasi Non-Kas dan Rekonsiliasi Aktivitas Pendanaan
Disajikan di Catatan 32

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
		Total Piutang	**937.858.991.379,84**	**249.756.284.299,46**	**933.582.239.130,56**	**254.033.036.548,74**
1.	Dinas Kesehatan	Piutang Retribusi Daerah	27.175.749.526,75	44.807.250.284,00	30.561.849.386,00	41.421.150.424,75
2.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Piutang Retribusi Daerah	2.364.775.000,00	886.480.000,00	432.880.000,00	2.818.375.000,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.796.271.075,00	3.112.656.735,00	2.796.271.075,00	3.112.656.735,00
3	Dinas Perhubungan	Piutang Lainnya	0,00	328.583.811,00	0,00	328.583.811,00
4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Piutang Lainnya	0,00	17.355.000.000,00	3.471.000.000,00	13.884.000.000,00
5	Dinas Kebudayaan	Piutang Retribusi Daerah	593.654.005,00	0,00	0,00	593.654.005,00
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	Piutang Retribusi Daerah	7.525.000,00	0,00	7.525.000,00	0,00
7	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Piutang Retribusi Daerah	0,00	3.456.000,00	0,00	3.456.000,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Piutang Retribusi Daerah	484.800,00	0,00	484.800,00	0,00
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Retribusi Daerah	850.610.949.524,68	233.549.527,00	843.668.686.104,69	7.175.812.946,99
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	491.332.281,37	2.529.442.452,46	3.020.774.733,83	0,00
		Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	180.125.380.000,00	0,00	180.125.380.000,00
		Piutang Lainnya	3.709.104.636,00	0,00	18.000.000,00	3.691.104.636,00
10	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Daerah	49.838.810.531,04	330.245.000,00	49.482.068.031,04	686.987.500,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	44.205.930,00	0,00	44.205.930,00
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Piutang Retribusi Daerah	270.335.000,00	0,00	122.700.000,00	147.635.000,00

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan	Jumlah Piutang Bersih
	Total Piutang dan Penyisihan	**254.033.036.548,74**	**19.960.668.142,46**	**234.072.368.406,28**
I	**Piutang Pajak Daerah**	**686.987.500,00**	**358.393.725,00**	**328.593.775,00**
	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	109.347.500,00	109.347.500,00	0,00
	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	247.395.000,00	247.395.000,00	0,00
	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0,00	0,00	0,00
	Piutang Pajak Air Permukaan	0,00	0,00	0,00
	Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	330.245.000,00	1.651.225,00	328.593.775,00
II	**Piutang Retribusi Daerah**	**52.160.083.376,74**	**14.905.276.565,05**	**37.254.806.811,69**
	Piutang Retribusi Jasa Umum	44.236.509.612,75	7.124.250.222,89	37.112.259.389,86
	Piutang Retribusi Jasa Usaha	7.923.573.763,99	7.781.026.342,16	142.547.421,83
	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00
III	**Piutang Lain-lain PAD yang Sah**	**3.156.897.225,00**	**105.266.316,41**	**3.051.630.908,59**
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	44.205.930,00	221.029,65	43.984.900,35
	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	34.560,00	1.814,40	32.745,60
	Piutang Pendapatan BLUD	3.112.656.735,00	105.043.472,36	3.007.613.262,64
	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00
IV	**Piutang Transfer Pemerintah Pusat**	**180.125.380.000,00**	**900.626.900,00**	**179.224.753.100,00**
	Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)	180.125.380.000,00	900.626.900,00	179.224.753.100,00
V	**Piutang Lainnya**	**17.903.688.447,00**	**3.691.104.636,00**	**14.212.583.811,00**
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.691.104.636,00	3.691.104.636,00	0,00
	Uang Muka	14.212.583.811,00	0,00	14.212.583.811,00

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2025

No	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
		NIHIL		

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1.	2010	Perumda Kerta Bali Saguna	Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 Tanggal 25 Nopember 2010	IJP	5.282.769.658,00	5.282.769.658,00	0,00	5.282.769.658,00	0,00	27.000.000.000,00	0,00	5.282.769.658,00
2.	2023	PT. BPD Bali	Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2021 Tanggal 30 Maret 2021	IJP	839.912.000.000,00	719.912.000.000,00	120.000.000.000,00	839.912.000.000,00	0,00	224.454.593.473,43	0,00	839.912.000.000,00
3.	2024	PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)	Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2023 Tanggal 8 Agustus 2023	IJP	212.846.200.000,00	174.846.200.000,00	38.000.000.000,00	212.846.200.000,00	0,00	1.928.163.221,00	0,00	212.846.200.000
4.	2010	PT. Rumah Sakit Puri Raharja	Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 Tanggal 25 Nopember 2010	IJP	8.736.000.000,00	8.736.000.000,00	0,00	8.736.000.000,00	0,00	221.082.422,00	0,00	8.736.000.000
5.	2023	Perumda Kerthi Bali Santhi	Perda Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2022 Tanggal 2 Desember 2022	IJP	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000
6.	2023	Perseroda Pusat Kebudayaan Bali	Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 11 Agustus 2023	IJP	5.004.744.704.585,27	5.004.744.704.585,27	0,00	5.004.744.704.585,27	0,00	0,00		5.004.744.704.585
7.	2018	PT Asuransi Bangun Askrida	Perda Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018	IJP	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	1.150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000.000
8.	2013	PT. Jasa Marga Bali Tol	Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2013 Tanggal 26 Nopember 2013	IJP	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	100.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000.000

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	ASET TETAP	15.908.552.541.060,70	6.397.218.253.056,61	1.677.323.795.876,70	20.628.446.998.240,60
A	TANAH	5.385.006.936.615,43	2.990.478.057.501,00	277.821.536.766,00	8.097.663.457.350,43
1	Sekretariat DPRD	52.595.040.000,00	-	-	52.595.040.000,00
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	12.915.320.000,00	-	-	12.915.320.000,00
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	2.084.389.783,00	-	-	2.084.389.783,00
4	Sekretariat Daerah	93.089.817.000,00	-	-	93.089.817.000,00
5	Dinas Perhubungan	55.404.256.000,00	-	-	55.404.256.000,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	22.841.516.932,00	1.181.018.000,00	-	24.022.534.932,00
7	Dinas Kesehatan	48.779.189.316,57	-	2.172.480.000,00	46.606.709.316,57
8	Dinas Kebudayaan	196.031.405.000,00	-	497.900.000,00	195.533.505.000,00
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	5.479.783.250,00	-	-	5.479.783.250,00
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	4.553.815.000,00	-	-	4.553.815.000,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	6.689.550.000,00	-	-	6.689.550.000,00
12	Badan Pendapatan	28.953.953.500,00	-	3.570.225.000,00	25.383.728.500,00
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1.912.186.829.989,43	50.549.707.481,00	74.006.477.450,00	1.888.730.060.020,43
14	Inspektorat	5.908.000.000,00	-	-	5.908.000.000,00
15	Dinas Pariwisata	6.155.360.000,00	-	-	6.155.360.000,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	5.779.200.000,00	-	-	5.779.200.000,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.735.000.000,00	-	-	5.735.000.000,00
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.540.480.000,00	-	-	18.540.480.000,00
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	23.285.829.000,00	-	-	23.285.829.000,00
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	2.286.375.000,00	-	-	2.286.375.000,00
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	8.018.088.625,00	888.583.250,00	888.583.250,00	8.018.088.625,00
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	6.171.200.000,00	4.098.869.000,00	4.098.869.000,00	6.171.200.000,00
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2.167.503.408.594,00	2.924.590.411.270,00	177.861.177.566,00	4.914.232.642.298,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	24.989.572.500,00	-	-	24.989.572.500,00
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	516.293.736.337,50	3.611.468.500,00	14.609.844.500,00	505.295.360.337,50
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	63.327.854.637,93	5.558.000.000,00	115.980.000,00	68.769.874.637,93

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	11.037.600.000,00	-	-	11.037.600.000,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.561.600.000,00	-	-	10.561.600.000,00
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	61.544.062.150,00	-	-	61.544.062.150,00
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	6.164.704.000,00	-	-	6.164.704.000,00
B	PERALATAN MESIN	2.196.293.227.099,68	360.576.433.451,94	53.950.291.856,58	2.502.919.368.695,04
1	Sekretariat DPRD	39.134.316.576,00	12.182.765.034,00	4.104.817.489,00	47.212.264.121,00
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	9.854.458.610,94	1.129.248.363,00	-	10.983.706.973,94
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	2.371.025.464,00	1.003.224.528,00	5.888.398,00	3.368.361.594,00
4	Sekretariat Daerah	73.950.287.351,50	36.713.254.605,00	13.764.491.556,08	96.899.050.400,42
5	Dinas Perhubungan	38.554.543.950,56	10.110.587.516,00	1.246.565.841,00	47.418.565.625,56
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	71.333.908.033,84	36.797.700.025,80	1.527.613.703,00	106.603.994.356,64
7	Dinas Kesehatan	764.195.325.040,26	83.067.197.375,13	3.784.088.186,72	843.478.434.228,67
8	Dinas Kebudayaan	41.818.523.832,32	2.117.566.566,00	734.569.499,00	43.201.520.899,32
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	22.349.724.779,51	1.164.494.074,00	5.567.519.699,00	17.946.699.154,51
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	5.850.583.975,00	688.690.389,00	357.045.375,00	6.182.228.989,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	6.142.419.578,00	-	279.766.380,00	5.862.653.198,00
12	Badan Pendapatan	37.625.418.193,16	2.930.265.033,00	1.282.675.746,74	39.273.007.479,42
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	18.656.747.094,23	2.725.718.042,00	1.023.886.769,54	20.358.578.366,69
14	Inspektorat	16.471.135.748,00	1.565.693.040,00	229.850.000,00	17.806.978.788,00
15	Dinas Pariwisata	3.393.722.520,00	795.786.650,00	186.912.700,00	4.002.596.470,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6.490.415.949,00	966.119.996,00	115.240.200,00	7.341.295.745,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	10.521.464.899,00	438.364.795,00	327.498.228,00	10.632.331.466,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70.500.524.989,20	10.061.679.047,00	677.767.220,00	79.884.436.816,20
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.380.123.118,66	1.288.742.599,00	433.342.368,00	22.235.523.349,66
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	6.832.263.199,00	6.348.193.490,00	1.981.105.948,00	11.199.350.741,00
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	4.085.756.645,69	1.237.562.373,00	13.500.000,00	5.309.819.018,69
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	4.470.754.210,00	248.945.800,00	63.950.450,00	4.655.749.560,00
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	5.392.028.714,00	53.628.000,00	367.069.600,00	5.078.587.114,00
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	96.311.028.097,04	51.987.679.438,00	3.685.115.253,00	144.613.592.282,04
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9.934.736.435,98	755.094.130,00	818.694.932,53	9.871.135.633,45
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	677.165.723.827,82	89.625.957.345,01	9.605.754.282,97	757.185.926.889,86
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	45.275.690.462,00	154.292.700,00	557.122.252,00	44.872.860.910,00
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	22.180.217.620,33	595.796.718,00	-	22.776.014.338,33
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.184.571.305,68	1.121.966.241,00	162.508.849,00	17.144.028.697,68
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	39.864.096.818,02	1.834.686.839,00	951.335.530,00	40.747.448.127,02
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	8.001.690.060,93	865.532.700,00	94.595.400,00	8.772.627.360,93
C	BANGUNAN DAN GEDUNG	3.850.274.091.822,14	792.722.540.270,93	443.079.353.065,85	4.199.917.279.027,22
1	Sekretariat DPRD	13.745.500.034,11	19.008.349.672,00	168.908.641,37	32.584.941.064,74
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	23.693.777.217,04	143.931.624,00	29.000.365,00	23.808.708.476,04

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	646.017.000,00	-	-	646.017.000,00
4	Sekretariat Daerah	33.129.483.733,10	52.710.306.171,00	-	85.839.789.904,10
5	Dinas Perhubungan	13.046.651.038,00	658.215.000,00	115.753.000,00	13.589.113.038,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	329.139.150.674,98	51.026.481.210,68	49.770.913.479,60	330.394.718.406,06
7	Dinas Kesehatan	618.678.064.584,90	46.505.196.834,38	24.179.070.693,60	641.004.190.725,68
8	Dinas Kebudayaan	69.151.262.409,58	1.530.872.154,76	993.666.364,00	69.688.468.200,34
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	22.950.748.326,08	2.126.305.533,00	418.724.710,00	24.658.329.149,08
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	8.697.575.714,00	267.978.939,61	-	8.965.554.653,61
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	5.277.990.461,06	-	-	5.277.990.461,06
12	Badan Pendapatan	63.023.039.850,41	5.159.651.116,94	34.056.398,40	68.148.634.568,95
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	35.672.998.276,01	73.905.476.137,00	69.015.617.271,00	40.562.857.142,01
14	Inspektorat	11.498.425.303,87	204.616.959,00	11.721.859,00	11.691.320.403,87
15	Dinas Pariwisata	1.493.928.545,00	287.511.064,00	-	1.781.439.609,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.345.336.877,06	-	-	3.345.336.877,06
17	Satuan Polisi Pamong Praja	1.811.113.920,93	-	-	1.811.113.920,93
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.663.383.052,00	2.249.124.458,36	41.504.723,60	8.871.002.786,76
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.330.008.810,40	468.631.491,00	-	21.798.640.301,40
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	8.474.536.500,43	-	-	8.474.536.500,43
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	1.854.206.011,00	235.924.035,00	-	2.090.130.046,00
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	7.923.653.691,20	127.932.000,00	-	8.051.585.691,20
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	1.456.321.518,00	9.758.010,00	54.358.010,00	1.411.721.518,00
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	484.199.551.179,21	298.488.274.145,00	265.830.307.461,00	516.857.517.863,21
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	21.097.975.924,00	10.019.463.827,66	510.279.743,66	30.607.160.008,00
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	1.760.813.942.327,98	199.547.387.929,54	31.711.984.508,62	1.928.649.345.748,90
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	84.305.604.720,05	-	-	84.305.604.720,05
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	32.771.449.321,83	-	-	32.771.449.321,83
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.675.994.127,94	1.195.053.461,00	193.485.837,00	6.677.561.751,94
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	153.809.765.759,90	26.846.098.497,00	-	180.655.864.256,90
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	4.896.634.912,07	-	-	4.896.634.912,07
D	JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	4.335.363.075.122,41	2.166.729.942.313,47	854.505.589.704,85	5.647.587.427.731,03
1	Sekretariat DPRD	2.096.630.480,00	-	-	2.096.630.480,00
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	333.387.032,17	-	-	333.387.032,17
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	157.065.000,00	-	157.065.000,00
4	Sekretariat Daerah	3.243.817.777,00	-	-	3.243.817.777,00
5	Dinas Perhubungan	12.402.514.658,00	42.642.646.541,00	-	55.045.161.199,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	17.280.000,00	1.446.168.209,45	17.280.000,00	1.446.168.209,45
7	Dinas Kesehatan	12.529.311.204,61	10.105.988.440,00	224.461.364,48	22.410.838.280,13
8	Dinas Kebudayaan	3.123.309.650,00	7.274.991.000,00	-	10.398.300.650,00
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	39.324.062.164,69	2.754.249.000,00	-	42.078.311.164,69
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	264.662.691,69	-	-	264.662.691,69

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	131.691.734,00	-	-	131.691.734,00
12	Badan Pendapatan	2.512.547.120,00	42.034.539,36	-	2.554.581.659,36
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1.925.726.975,00	634.664.631.841,00	634.486.661.336,00	2.103.697.480,00
14	Inspektorat	129.460.000,00	-	-	129.460.000,00
15	Dinas Pariwisata	190.834.765,00	159.573.378,00	-	350.408.143,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12.525.000,00	-	-	12.525.000,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	34.380.000,00	-	-	34.380.000,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	586.440.500,00	-	-	586.440.500,00
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.714.425.400,00	-	-	1.714.425.400,00
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	41.321.500,00	-	-	41.321.500,00
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	23.325.000,00	-	-	23.325.000,00
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	137.978.800,00	-	-	137.978.800,00
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	4.050.660.439.540,88	1.456.658.300.914,66	219.777.187.004,37	5.287.541.553.451,17
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	37.889.000,00	-	-	37.889.000,00
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	20.440.920.533,51	323.721.330,00	-	20.764.641.863,51
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	6.856.031.580,16	-	-	6.856.031.580,16
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	5.817.304.206,70	-	-	5.817.304.206,70
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	853.089.800,00	151.507.400,00	-	1.004.597.200,00
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	169.833.720.509,00	10.349.064.720,00	-	180.182.785.229,00
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	88.047.500,00	-	-	88.047.500,00
E	ASET TETAP LAINNYA	98.441.316.502,04	38.799.141.316,00	24.329.734.235,00	112.910.723.583,04
1	Sekretariat DPRD	396.341.550,00	-	-	396.341.550,00
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	940.603.500,00	29.000.365,00	-	969.603.865,00
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	738.150.322,00	46.799.598,00	36.974.100,00	747.975.820,00
5	Dinas Perhubungan	20.620.000,00	-	-	20.620.000,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	23.037.000,00	-	2.437.000,00	20.600.000,00
7	Dinas Kesehatan	379.480.520,00	2.006.700.000,00	2.006.700.000,00	379.480.520,00
8	Dinas Kebudayaan	1.815.924.136,90	-	-	1.815.924.136,90
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	11.573.000,00	-	-	11.573.000,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	550.000,00	-	-	550.000,00
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	24.500.000,00	-	-	24.500.000,00
14	Inspektorat	8.457.505,00	-	-	8.457.505,00
15	Dinas Pariwisata	45.232.000,00	-	-	45.232.000,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	30.320.000,00	-	-	30.320.000,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70.477.300,00	-	-	70.477.300,00

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	811.019.140,00	5.400.000,00	-	816.419.140,00
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	1.568.117.500,00	-	-	1.568.117.500,00
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	26.300.000,00	-	-	26.300.000,00
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	990.331.160,00	4.773.525.207,00	4.773.525.207,00	990.331.160,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	163.263.277,00	-	-	163.263.277,00
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	88.003.017.290,24	31.937.716.146,00	17.477.797.928,00	102.462.935.508,24
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	1.950.260.364,90	-	32.300.000,00	1.917.960.364,90
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	4.696.000,00	-	-	4.696.000,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	235.099.400,00	-	-	235.099.400,00
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	159.245.536,00	-	-	159.245.536,00
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	21.000.000,00	-	-	21.000.000,00
F	KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN	43.173.893.899,00	47.912.138.203,27	23.637.290.248,42	67.448.741.853,85
1	Sekretariat DPRD	-	79.087.944,00	-	79.087.944,00
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	24.809.047.000,00	-	24.809.047.000,00
7	Dinas Kesehatan	684.460.505,00	14.936.619.962,87	535.513.158,02	15.085.567.309,85
8	Dinas Kebudayaan	-	879.066.364,00	-	879.066.364,00
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	79.812.260,00	-	-	79.812.260,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	114.345.000,00	-	-	114.345.000,00
12	Badan Pendapatan	79.608.000,00	34.056.398,40	79.608.000,00	34.056.398,40
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-
14	Inspektorat	194.585.700,00	-	-	194.585.700,00
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	207.523.618,00	-	207.523.618,00	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	97.995.960,00	-	-	97.995.960,00
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	16.175.390.040,00	7.132.735.309,00	1.482.785.575,00	21.825.339.774,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	895.934.264,00	-	895.934.264,00	-

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	23.717.886.506,00	-	19.509.573.587,40	4.208.312.918,60
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	926.352.046,00	41.525.225,00	926.352.046,00	41.525.225,00
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
1	TANAH	5.385.006.936.615,43	2.990.478.057.501,00	277.821.536.766,00	8.097.663.457.350,43
					-
2	PERALATAN DAN MESIN	2.196.293.227.099,68	360.576.433.451,94	53.950.291.856,58	2.502.919.368.695,04
	a. Alat Besar	70.959.444.466,00	14.820.464.542,00	1.684.766.428,00	84.095.142.580,00
	b. Alat Angkutan	226.963.391.360,00	49.869.163.135,00	20.307.827.152,00	256.524.727.343,00
	c. Alat bengkel dan Alat Ukur	48.203.113.713,96	7.990.129.338,00	563.641.000,00	55.629.602.051,96
	d. Alat Pertanian	14.365.775.866,91	753.974.098,00	85.858.490,00	15.033.891.474,91
	e. Alat Kantor Dan Rumah Tangga	564.840.721.616,96	85.938.012.362,84	12.688.556.766,22	638.090.177.213,57
	f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	126.036.150.182,77	45.219.250.654,80	3.708.702.359,89	167.546.698.477,68
	g. Alat Kedokteran dan Kesehatan	504.846.069.910,53	63.534.586.635,00	1.347.458.952,00	567.033.197.593,53
	h. Alat Laboratorium	171.765.182.507,18	15.101.236.272,81	3.438.641.210,00	183.427.777.569,99
	i. Alat Persenjataan	29.957.170.739,10	6.100.407.208,00	142.960.100,00	35.914.617.847,10
	j. Komputer	412.199.352.455,21	53.442.697.632,49	9.100.212.924,47	456.541.837.163,24
	k. Alat Eksplorasi	29.136.000,00	-	-	29.136.000,00
	l. Alat Pengeboran	65.000.000,00	-	-	65.000.000,00
	m. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	445.680.100,00	172.940.220,00	-	618.620.320,00
	n. Alat Bantu Eksplorasi	32.700.000,00	5.848.363.162,00	-	5.881.063.162,00
	o. Alat Keselamatan Kerja	10.480.814.485,00	1.925.936.237,00	56.919.512,00	12.349.831.210,00
	p. Alat Peraga	772.313.100,00	74.405.154,00	18.543.500,00	828.174.754,00
	q. Peralatan Proses/Produksi	3.986.207.750,00	5.777.050.411,00	6.046.421,00	9.757.211.740,00
	r. Rambu-rambu	3.570.604.549,56	3.561.902.389,00	725.102.041,00	6.407.404.897,56
	s.Peralatan Olah Raga	6.774.398.296,50	445.914.000,00	75.055.000,00	7.145.257.296,50
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	3.850.274.091.822,14	792.722.540.270,93	443.079.353.065,85	4.199.917.279.027,22
	a. Bangunan Gedung	3.451.952.262.488,78	764.403.097.156,93	433.914.239.916,85	3.782.441.119.728,86
	b. Monumen	50.200.883.292,50	11.919.304.556,00	5.861.293.000,00	56.258.894.848,50
	c. Bangunan Menara	327.291.142.220,98	75.955.000,00	-	327.367.097.220,98
	d. Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.829.803.819,88	16.324.183.558,00	3.303.820.149,00	33.850.167.228,88
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	4.335.363.075.122,41	2.166.729.942.313,47	854.505.589.704,85	5.647.587.427.731,03
	a. Jalan dan Jembatan	2.613.411.578.530,16	687.730.552.169,02	4.633.089.923,37	3.296.509.040.775,81
	b. Bangunan Air	355.653.499.408,69	94.110.124.627,00	1.977.728.755,48	447.785.895.280,21
	c. Instalasi	589.054.059.025,27	1.277.834.657.704,00	847.778.251.126,00	1.019.110.465.603,27
	d. Jaringan	777.243.938.158,29	107.054.607.813,45	116.519.900,00	884.182.026.071,74
5	ASET TETAP LAINNYA	98.441.316.502,04	38.799.141.316,00	24.329.734.235,00	112.910.723.583,04
	a. Bahan Perpustakaan	72.138.503.436,74	30.827.974.614,00	17.063.515.998,00	85.902.962.052,74
	b. Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan/Olahrag	23.639.272.060,40	1.161.941.130,00	453.693.030,00	24.347.520.160,40
	c. Hewan	467.805.000,00	-	32.300.000,00	435.505.000,00
	d. Biota Perairan	-	-	-	-
	e. Tanaman	922.987.261,82	29.000.365,00	-	951.987.626,82
	f. Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	-
	g. Aset Tetap Dalam Renovasi	1.272.748.743,08	298.680.549,00	298.680.549,00	1.272.748.743,08
	h. Aset Tidak Berwujud	-	6.481.544.658,00	6.481.544.658,00	-
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	43.173.893.899,00	47.912.138.203,27	23.637.290.248,42	67.448.741.853,85

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								SALDO AKHIR
			BERTAMBAH				BERKURANG				
			PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah										
1	Sekretariat DPRD	-		79.087.944,00				-			79.087.944,00
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-		-				-			-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-		-				-			-
4	Sekretariat Daerah	-		-				-			-
5	Dinas Perhubungan	-		-				-			-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-		24.809.047.000,00				-			24.809.047.000,00
7	Dinas Kesehatan	684.460.505,00		14.936.619.962,87				535.513.158,02			15.085.567.309,85
8	Dinas Kebudayaan	-		879.066.364,00				-			879.066.364,00
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-		-				-			-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	79.812.260,00		-				-			79.812.260,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	114.345.000,00		-				-			114.345.000,00
12	Badan Pendapatan	79.608.000,00		34.056.398,40				79.608.000,00			34.056.398,40
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-		-				-			-
14	Inspektorat	194.585.700,00		-				-			194.585.700,00
15	Dinas Pariwisata	-		-				-			-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-		-				-			-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-		-				-			-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	207.523.618,00		-				207.523.618,00			-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-		-				-			-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	97.995.960,00		-				-			97.995.960,00
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-		-				-			-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-		-				-			-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-		-				-			-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	16.175.390.040,00		7.132.735.309,00				1.482.785.575,00			21.825.339.774,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	895.934.264,00		-				895.934.264,00			-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	23.717.886.506,00		-				19.509.573.587,40			4.208.312.918,60
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-		-				-			-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-		-				-			-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	926.352.046,00		41.525.225,00				926.352.046,00			41.525.225,00
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-		-				-			-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-		-							

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

No	URAIAN	SALDO AWAL	Mutasi		SALDO AKHIR
			Tambah	Kurang	
1	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	-	-	-
	Sewa	-	-	-	-
	Tanah	-	-	-	-
	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
			-	-	
2	ASET TIDAK BERWUJUD	28.998.557.508,65	7.443.559.648,90	246.681.989,90	36.195.435.167,65
3	ASET LAIN-LAIN	347.585.034.803,42	72.142.969.332,16	63.158.873.405,83	356.569.130.729,75
3.1	Aset Tetap Rusak Berat	27.319.681.313,01	33.250.332.010,36	18.704.107.287,49	41.865.906.035,87
	PERALATAN DAN MESIN	18.137.843.342,96	29.300.849.544,37	16.980.535.329,10	30.458.157.558,22
	a. Alat Besar	-	140.000.000,00	-	140.000.000,00
	b. Alat Angkutan	3.307.866.100,00	3.467.877.480,00	1.650.471.400,00	5.125.272.180,00
	c. Alat bengkel dan Alat Ukur	143.326.100,00	226.728.000,00	129.279.260,00	240.774.840,00
	d. Alat Pertanian	70.979.200,00	65.031.000,00	30.123.000,00	105.887.200,00
	e. Alat Kantor Dan Rumah Tangga	4.234.796.208,89	10.439.107.861,58	5.557.152.910,52	9.116.751.159,95
	f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.993.853.434,56	2.651.940.632,89	1.831.278.077,33	2.814.515.990,12
	g. Alat Kedokteran dan Kesehatan	949.624.150,00	877.778.072,00	49.090.550,00	1.778.311.672,00
	h. Alat Laboratorium	1.266.076.083,00	2.551.560.710,00	279.643.260,00	3.537.993.533,00
	i. Alat Persenjataan	66.892.000,00	122.050.500,00	64.492.000,00	124.450.500,00
	j. Komputer	5.937.030.600,51	8.704.000.288,90	7.341.612.371,25	7.299.418.518,16
	k. Alat Eksplorasi	-	-	-	-
	l. Alat Pengeboran	-	-	-	-
	m. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	-	-	-	-
	n. Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-
	o. Alat Keselamatan Kerja	23.600.600,00	35.775.000,00	-	59.375.600,00
	p. Alat Peraga	-	-	-	-
	q. Peralatan Proses/Produksi	-	5.999.999,00	-	5.999.999,00
	r. Rambu-rambu	-	-	-	-
	s.Peralatan Olah Raga	143.798.866,00	13.000.000,00	47.392.500,00	109.406.366,00
	GEDUNG DAN BANGUNAN	5.316.442.640,40	2.557.060.487,99	1.703.854.958,39	6.169.648.170,00
	a. Bangunan Gedung	5.316.442.640,40	2.557.060.487,99	1.703.854.958,39	6.169.648.170,00
	b. Monumen	-	-	-	-
	c. Bangunan Menara	-	-	-	-
	d. Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-	-
	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	102.110.000,00	17.280.000,00	17.280.000,00	102.110.000,00
	a. Jalan dan Jembatan	90.795.000,00	-	-	90.795.000,00
	b. Bangunan Air	988.000,00	-	-	988.000,00
	c. Instalasi	10.327.000,00	-	-	10.327.000,00
	d. Jaringan	-	17.280.000,00	17.280.000,00	-
	ASET TETAP LAINNYA	3.763.285.329,65	1.375.141.978,00	2.437.000,00	5.135.990.307,65
	a. Bahan Perpustakaan	2.187.629.379,65	1.336.391.978,00	2.437.000,00	3.521.584.357,65
	b. Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan/Olahraga	1.536.144.300,00	6.450.000,00	-	1.542.594.300,00
	c. Hewan	-	32.300.000,00	-	32.300.000,00
	d. Biota Perairan	-	-	-	-
	e. Tanaman	39.511.650,00	-	-	39.511.650,00
	f. Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	-
	g. Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	-
3.2	Aset Tetap Yang Tidak Digukanan Dalam Operasional Pemerintah	320.265.353.490,41	38.892.637.321,80	44.454.766.118,34	314.703.224.693,87
i	Pinjam Pakai	77.434.725.630,00	33.133.175.950,00	210.886.225,00	110.357.015.355,00
	TANAH	56.930.078.950,00	16.371.079.625,00	210.886.225,00	73.090.272.350,00
	PERALATAN DAN MESIN	970.385.327,00	68.213.500,00	-	1.038.598.827,00
	GEDUNG DAN BANGUNAN	17.718.108.503,00	16.445.590.100,00	-	34.163.698.603,00
	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1.816.152.850,00	248.292.725,00	-	2.064.445.575,00
	ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-
	KDP	-	-	-	-
ii	Penggunaan BMD untuk Dioperasionalkan Oleh Pihak Lain	37.433.004.292,65	3.415.421.250,00	1.644.379.000,00	39.204.046.542,65
	TANAH	26.036.245.359,54	3.415.421.250,00	1.644.379.000,00	27.807.287.609,54
	PERALATAN DAN MESIN	508.159.800,00	-	-	508.159.800,00
	GEDUNG DAN BANGUNAN	10.736.765.133,11	-	-	10.736.765.133,11
	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	151.834.000,00	-	-	151.834.000,00
	ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-
	KDP	-	-	-	-
			-	-	-
iii	Aset Tetap yang akan Dihibahkan	204.075.601.922,00	-	41.165.806.000,00	162.909.795.922,00
	TANAH	-	-	-	-
	PERALATAN DAN MESIN	-	-	-	-
	GEDUNG DAN BANGUNAN	2.472.332.923,00	-	-	2.472.332.923,00
	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	174.554.762.999,00	-	14.117.300.000,00	160.437.462.999,00
	ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-
	KDP	27.048.506.000,00	-	27.048.506.000,00	-

No	URAIAN	SALDO AWAL	Mutasi		SALDO AKHIR
			Tambah	Kurang	
iv	Aset Lain – Lain Lainnya	1.322.021.645,76	2.344.040.121,80	1.433.694.893,34	2.232.366.874,22
	TANAH	-	-	-	-
	PERALATAN DAN MESIN	-	415.186.028,58	111.673.247,58	303.512.781,00
	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.023.550.757,50	1.328.055.901,37	1.023.550.757,50	1.328.055.901,37
	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	298.470.888,26	600.798.191,85	298.470.888,26	600.798.191,85
	ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-
	KDP	-	-	-	-
				-	-
4	Properti Investasi	705.863.838.458,00		1.117.608.000,00	704.746.230.458,00
i	TANAH	700.024.106.820,00	-	1.117.608.000,00	698.906.498.820,00
					-
ii	GEDUNG DAN BANGUNAN	5.839.731.638,00	-	-	5.839.731.638,00
	a. Bangunan Gedung	5.839.731.638,00	-	-	5.839.731.638,00
	b. Monumen	-	-	-	-
	c. Bangunan Menara	-	-	-	-
	d. Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-	-
					-

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			NIHIL					

*) Saldo sudah termasuk Jasa Giro dan Dana Cadangan

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**707.808.146.491,09**	**915.679.685.217,39**	**701.023.849.669,31**	**924.101.597.721,97**
I	**Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**	**3.056.472.412,70**	**0,00**	**3.056.472.412,70**	**0,00**
	Utang Taspen	**3.056.472.412,70**	**0,00**	**3.056.472.412,70**	**0,00**
	Utang Taspen	3.056.472.412,70	0,00	3.056.472.412,70	0,00
II	**Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**	**243.464.798.088,00**	**243.464.798.088,00**	**243.464.798.088,00**	**243.464.798.088,00**
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	**243.464.798.088,00**	**243.464.798.088,00**	**243.464.798.088,00**	**243.464.798.088,00**
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	243.464.798.088,00	243.464.798.088,00	243.464.798.088,00	243.464.798.088,00
III	**Pendapatan Diterima Dimuka**	**21.702.352.175,15**	**497.703.036.262,63**	**5.240.038.644,26**	**514.165.349.793,52**
	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	**4.290.844.736,53**	1.267.004.628,63	4.256.849,12	5.553.592.516,04
	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	4.290.844.736,53	1.267.004.628,63	4.256.849,12	5.553.592.516,04
	Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa	**17.411.507.438,62**	**496.436.031.634,00**	**5.235.781.795,14**	**508.611.757.277,48**
	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah	16.527.376.353,06	495.983.455.634,00	4.555.291.955,65	507.955.540.031,41
	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan	884.131.085,56	452.576.000,00	680.489.839,49	656.217.246,07
IV	**Utang Belanja**	**439.584.523.815,24**	**174.511.850.866,76**	**449.262.540.524,35**	**166.471.449.840,45**
	Utang Belanja Pegawai	**101.054.700.228,54**	**92.925.327.343,70**	**102.399.681.703,51**	**91.580.345.868,73**
	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.915.469.959,13	4.861.134.866,00	1.953.603.152,13	4.823.001.673,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	47.334.145.890,00	54.536.784.400,00	48.639.344.172,00	53.231.586.118,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	51.805.084.379,41	33.150.089.478,70	51.806.734.379,38	33.148.439.478,73
	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	377.318.599,00	0,00	377.318.599,00
	Utang Belanja Barang dan Jasa	**27.529.724.017,50**	**38.892.001.113,06**	**36.178.143.568,84**	**30.231.881.561,72**
	Utang Belanja Barang	18.443.094.706,00	21.615.748.575,06	23.248.812.420,34	16.810.030.860,72
	Utang Belanja Jasa	4.975.114.152,00	7.099.355.359,00	5.301.711.948,00	6.772.757.563,00
	Utang Belanja Pemeliharaan	1.917.316.865,50	4.167.391.990,00	2.059.752.806,50	4.024.956.049,00
	Utang Belanja Perjalanan Dinas	6.598.891,00	1.499.000,00	6.598.891,00	1.499.000,00
	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.175.899.403,00	6.008.006.189,00	5.561.267.503,00	2.622.638.089,00
	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	0,00
	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**0,00**	**1.580.232.319,00**	**0,00**	**1.580.232.319,00**
	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	1.580.232.319,00	0,00	1.580.232.319,00
	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**315.384.317,20**	**0,00**	**315.384.317,20**	**0,00**
	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	315.384.317,20	0,00	315.384.317,20	0,00

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			BERTAMBAH	BERKURANG	
	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**0,00**	**1.143.700.000,00**	**0,00**	**1.143.700.000,00**
	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	1.143.700.000,00	0,00	1.143.700.000,00
	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	**0,00**	**1.964.700.000,00**	**0,00**	**1.964.700.000,00**
	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	1.964.700.000,00	0,00	1.964.700.000,00
	Utang Belanja Bagi Hasil	**310.684.715.252,00**	**39.970.590.091,00**	**310.684.715.252,00**	**39.970.590.091,00**
	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	260.386.539.729,00	33.454.244.356,00	260.386.539.729,00	33.454.244.356,00
	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	50.298.175.523,00	6.516.345.735,00	50.298.175.523,00	6.516.345.735,00

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
I	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	855.640.130.142,49	653.383.648,16	243.464.798.088,00	612.828.715.702,65
1.	**Utang kepada Pemerintah Pusat**	852.126.364.781,00	0,00	243.464.798.088,00	608.661.566.693,00
	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri	852.126.364.781,00	0,00	243.464.798.088,00	608.661.566.693,00
	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang	852.126.364.781,00	0,00	243.464.798.088,00	608.661.566.693,00
	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang	852.126.364.781,00	0,00	243.464.798.088,00	608.661.566.693,00
2.	**Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank**	3.513.765.361,49	653.383.648,16	0,00	4.167.149.009,65
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta	3.513.765.361,49	653.383.648,16	0,00	4.167.149.009,65
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah	3.513.765.361,49	653.383.648,16	0,00	4.167.149.009,65
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah.	3.513.765.361,49	653.383.648,16	0,00	4.167.149.009,65

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TA 2025 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH			%	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman**							
a	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Belanja Modal Jalan Provinsi Spesifikasi: Pemeliharaan Berkala Jalan pada Ruas Jalan Provinsi KETEWEL - SUKAWATI	20.039.040.389,00	9.891.503.930,00	10.147.536.459,00	49,36	9.039.604.070,00	
b		Belanja Modal Jalan Provinsi Spesifikasi: Pemeliharaan Berkala Jalan pada Ruas Jalan Provinsi TEGALTAMU - PAYANGAN - BATURANYAR SEGMEN I	19.994.366.062,00	16.809.381.225,00	3.184.984.837,00	84,07	2.850.713.775,00	
c		Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.825.000.000,00	3.436.840.525,00	388.159.475,00	0,00	381.871.169,00	
d		Pekerjaan Rehabilitasi Pagar Spesifikasi: Rehabilitasi Pagar Depan Kantor Makorem 163/Wira Satya Denpasar	3.825.000.000,00	3.436.840.525,00	388.159.475,00	89,85	381.871.169,00	
2	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**							
a	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA KEGIATAN: PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Bangunan Fasilitas Umum (Sarana dan Prasarana)	115.700.000.000,00	35.867.000.000,00	0,00	20,07	79.833.000.000,00	Berita Acara Serah Terima Nomor : B.14.000/9254/TI/D.Kominfos, tanggal 24 Desember 2025
b		Swakelola Manajemen Konstruksi Tower Turyapada	7.499.521.000,00	2.826.047.000,00	0,00	37,68	4.673.474.000,00	Sesuai dengan Addendum II Nomor : B.14.000/7181/TI/D.Kominfos, tanggal 24 September 2025
	JUMLAH		**170.882.927.451,00**	**72.267.613.205,00**	**14.108.840.246,00**		**97.160.534.183,00**	

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XX.1
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI BALI
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No.	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber	Status	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Bidang Perbankan**					
1.	PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Laporan Keuangan Audited		40.704.029.690.251,00	399.946.866.598,00	277.012.295.332,00
2.	PT Asuransi Bangun Askrida	Laporan Keuangan Unaudited		4.386.747.019.782,00	582.720.518.474,00	11.032.629.244,00
3.	PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)	Laporan Keuangan Audited		366.329.108.192,00	222.131.052.096,00	0,00
	Sub Total			45.457.105.818.225,00	1.204.798.437.168,00	288.044.924.576,00
II.	**Bidang Jasa Lainnya**					
1.	Perumda Kerta Bali Saguna	Laporan Keuangan Audited		109.214.442.804,00	11.415.430.629,00	0,00
2.	PT Puri Raharja	Laporan Keuangan Audited		27.319.674.046,00	38.245.692.293,00	0,00
3.	PT Jasamarga Bali Tol	Laporan Keuangan Audited		24.096.000.000,00	1.866.271.000.000,00	0,00
4.	Perumda Kerthi Bali Santhi	Laporan Keuangan Audited		53.649.633,43	674.429.422,32	0,00
	Sub Total			160.683.766.483,43	1.916.606.552.344,32	0,00
	Total Seluruh Bidang			45.617.789.584.708,40	3.121.404.989.512,32	288.044.924.576,00

No.	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor
1	2	8 = 5+6+7	9	10	11 = 9+10	12	13
I.	**Bidang Perbankan**						
1.	PT Bank Pembangunan Daerah Bali	41.380.988.852.181,00	35.546.765.537.423,00	314.380.919.798,00	35.861.146.457.221,00	2.880.177.000.000,00	1.881.882,00
2.	PT Asuransi Bangun Askrida	4.980.500.167.500,00	20.533.599.677.925,00	0,00	20.533.599.677.925,00	324.720.000.000,00	18.285.906.904,00
3.	PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)	588.460.160.288,00	132.889.972.499,00	187.995.418.035,00	320.885.390.534,00	232.121.200.000,00	0,00
	Sub Total	46.949.949.179.969,00	56.213.255.187.847,00	502.376.337.833,00	56.715.631.525.680,00	3.437.018.200.000,00	18.287.788.786,00
II.	**Bidang Jasa Lainnya**						
1.	Perumda Kerta Bali Saguna	120.629.873.433,00	57.497.664.802,00	1.671.718.143,00	59.169.382.945,00	5.282.769.658,00	0,00
2.	PT Puri Raharja	65.565.366.339,00	6.519.096.044,00	8.705.586.878,00	15.224.682.922,00	15.000.000.000,00	0,00
3.	PT Jasamarga Bali Tol	1.890.367.000.000,00	298.664.000.000,00	1.474.376.000.000,00	1.773.040.000.000,00	945.434.000.000,00	112.102.000.000,00
4.	Perumda Kerthi Bali Santhi	728.079.055,75	1.413.514.623,20	0,00	1.413.514.623,20	10.000.000.000,00	0,00
	Sub Total	2.077.290.318.827,75	364.094.275.469,20	1.484.753.305.021,00	1.848.847.580.490,20	975.716.769.658,00	112.102.000.000,00
		49.027.239.498.796,70	56.577.349.463.316,20	1.987.129.642.854,00	58.564.479.106.170,20	4.412.734.969.658,00	130.389.788.786,00

No.	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	BYPDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	14	15	16	17	18	19 = 17x18
I.	**Bidang Perbankan**						
1.	PT Bank Pembangunan Daerah Bali	0,00	-126.881.342.334,00	2.766.544.855.412,00	5.519.842.394.960,00	29,16%	1.609.686.441.366,50
2.	PT Asuransi Bangun Askrida	0,00	47.808.650.480,00	-15.943.914.067.809,00	-15.553.099.510.425,00	0,39%	1.150.000.000,00
3.	PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)	3.927.891.712,00	3.927.891.712,00	31.525.678.042,00	267.574.769.754,00	72,31%	193.482.578.580,00
	Sub Total	3.927.891.712,00	-75.144.800.142,00	-13.145.843.534.355,00	-9.765.682.345.711,00	101,86%	1.804.319.019.946,50
II.	**Bidang Jasa Lainnya**						
1.	Perumda Kerta Bali Saguna	0,00	119.034.475,00	56.058.686.356,00	61.460.490.489,00	100,00%	61.460.490.489,00
2.	PT Puri Raharja	0,00	0,00	35.340.683.417,00	50.340.683.417,00	58,24%	29.318.414.022,06
3.	PT Jasamarga Bali Tol	0,00	-309.000.000,00	-939.900.000.000,00	117.327.000.000,00	6,32%	100.000.000.000,00
4.	Perumda Kerthi Bali Santhi	0,00	0,00	-10.685.435.567,45	-685.435.567,45	100,00%	-685.435.567,45
	Sub Total	0,00	-189.965.525,00	-859.186.065.794,45	228.442.738.338,55	264,56%	190.093.468.943,61
		3.927.891.712,00	-75.334.765.667,00	-14.005.029.600.149,40	-9.537.239.607.372,45	366,42%	1.994.412.488.890,11

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XX.2
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI BALI

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No.	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber	Status	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di Luar Usaha	Beban di Luar Usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	**Bidang Perbankan**								
1.	PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Laporan Keuangan Audited		3.796.438.334.251,00	-2.326.328.205.563,00	1.470.110.128.688,00	35.677.871.708,00	-45.991.319.231,00	1.459.796.681.165,00
2.	PT Asuransi Bangun Askrida	Laporan Keuangan Unaudited		8.720.663.003.566,00	3.419.020.657.831,00	5.301.642.345.735,00	619.713.786.631,00	0,00	5.921.356.132.366,00
3.	PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)	Laporan Keuangan Audited		133.309.879.184,00	-126.195.029.703,00	7.114.849.481,00	1.952.491.707,00	-152.017.900,00	8.915.323.289,00
	Sub Total			12.650.411.217.001,00	966.497.422.565,00	6.778.867.323.904,00	657.344.150.046,00	-46.143.337.131,00	7.390.068.136.820,00
II.	**Bidang Jasa Lainnya**								
1.	Perumda Kerta Bali Saguna	Laporan Keuangan Audited		25.523.229.814,00	22.137.988.095,00	3.385.241.719,00	4.390.182.393,00	710.435.028,00	7.064.989.084,00
2.	PT Puri Raharja	Laporan Keuangan Audited		93.195.099.621,00	93.328.025.105,00	-132.925.485,00	843.163.787,00	254.308.827,00	455.929.475,00
3.	PT Jasamarga Bali Tol	Laporan Keuangan Audited		216.442.000.000,00	108.317.000.000,00	108.125.000.000,00	692.000.000,00	-128.985.000.000,00	-20.168.000.000,00
4.	Perumda Kerthi Bali Santhi	Laporan Keuangan Audited		0,00	2.412.678.642,48	-2.412.678.642,48	444.689.589,00	-1.562.719.753,00	-3.530.708.806,48
	Sub Total			335.160.329.435,00	226.195.691.842,48	108.964.637.591,52	6.370.035.769,00	-129.582.975.898,00	-16.177.790.247,48
	Total Seluruh Bidang			12.985.571.546.436,00	1.192.693.114.407,48	6.887.831.961.495,52	663.714.185.815,00	-175.726.313.029,00	7.373.890.346.572,52

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER